

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

LKPJ

Gubernur DIY

ꦭꦥꦺꦴꦫꦤ꧀ ꦏꦼꦠꦼꦫꦁꦒꦤ꧀ ꦥꦂꦠꦁꦒꦸꦁꦗꦮꦧꦤ꧀

2020

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengemban amanat pembangunan di daerah. Secara khusus, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) selalu menjadi komitmen Pemda DIY dalam memandang bahwa setiap proses pembangunan harus dapat dilihat tingkat keberhasilannya, obyektif, dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan selanjutnya. Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2020, penyusunan LKP) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 ini disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara regulasi, dokumen LKPJ ini disusun sebagaimana amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara umum, LKPJ Tahun 2020 menggambarkan hasil kinerja pelaksanaan APBD DIY pada Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD DIY tahun 2017-2022. Efektivitas pelaksanaan pembangunan oleh Pemda DIY dapat diukur berdasarkan capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) Pemda, indikator Program Pemda, dan indikator kinerja utama terhadap pelaksanaan urusan. Ruang lingkup dokumen LKPJ Tahun 2020 meliputi, Pendahuluan, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY, Program Strategis DIY, Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah, dan Penutup.

Mencermati atas hasil penyelenggaraan urusan pembangunan yang dilakukan Pemda DIY selama tahun 2020, sudah banyak hasil yang telah dicapai, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai. Secara khusus, capaian tahun 2020 apabila dibandingkan dengan rencana pembangunan lima tahunan (RPJMD 2017-2022), terdapat gap yang cenderung semakin lebar. Berdasar analisis terhadap masing-masing capaian kinerja, tidak bisa dipungkiri dampak pandemi Covid-19 pada semua aspek kehidupan, termasuk kemampuan keuangan Pemda, sangat berpengaruh terhadap capaian pembangunan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, masukan semua pihak, khususnya catatan dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan menjadi bagian kolaborasi bersama membangun Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera .

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yogyakarta, Maret 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL xxvi

DAFTAR GAMBAR..... xli

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1-1

A. DASAR HUKUM 1-1

B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG 1-3

1. Visi Jangka Panjang..... 1-3
2. Misi Jangka Panjang..... 1-4

C. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 1-4

1. Dasar Filosofi..... 1-4
2. Visi..... 1-7
3. Misi..... 1-9
4. Tujuan 1-11
5. Sasaran..... 1-12

D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2017-2022 1-13

1. Strategi..... 1-13
2. Arah Kebijakan Daerah..... 1-15
3. Program..... 1-18
4. Indikator..... 1-21

E. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020 1-24

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur..... 1-25
2. Peningkatan SDM..... 1-26
3. Pertumbuhan Berkualitas..... 1-26

F. GAMBARAN UMUM DAERAH 1-30
1. Kondisi Geografis Daerah 1-30
a. Batas Administrasi 1-30
b. Luas Wilayah 1-30
c. Topografi 1-31
2. Gambaran Umum Demografi 1-32
a. Jumlah Penduduk 1-32
b. Pertumbuhan Penduduk 1-35
c. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan 1-36
1) Penduduk Usia Kerja 1-36
2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 1-37
3) Angkatan Kerja 1-38
4) Penduduk yang Bekerja 1-39
5) Pengangguran Terbuka 1-40
d. Pendidikan 1-41
e. Kondisi Ekonomi Daerah 1-49
1) Sektor Unggulan 1-49
a) Sektor Industri Pengolahan 1-49
b) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1-50
c) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1-52
2) Pertumbuhan Ekonomi 1-60
3) Inflasi 1-63
3. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan 1-63
a. Gambaran Umum Birokrasi Pemda DIY 1-63
b. Gambaran Kondisi ASN yang dimiliki 1-65
c. Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Dalam APBD P 2020 1-66

BAB 2 KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PERUBAHAN APBD 2-1

A. PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN 2-1
B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2-3
1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah 2-3

2. Target dan Realisasi Pendapatan 2-5
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2-5
1) Pajak Daerah 2-6
2) Hasil Retribusi Daerah 2-7
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2-8
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2-9
b. Dana Perimbangan 2-10
c. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2-11
d. Dana Alokasi Umum (DAU) 2-11
e. Dana Alokasi Khusus (DAK) 2-12
f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2-13
1) Pendapatan Hibah 2-13
2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 2-14
3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 2-15
3. Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Pendapatan 2-15
a. Permasalahan 2-15
b. Solusi 2-16
C. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 2-16
1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah 2-16
2. Target dan Realisasi Belanja 2-17
a. Belanja Tidak Langsung 2-18
1) Belanja Pegawai 2-19
2) Belanja Subsidi 2-20
3) Belanja Hibah 2-21
4) Belanja Bantuan Sosial 2-22
5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2-22
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2-23
7) Belanja Tidak Terduga 2-24
b. Belanja Langsung 2-25
1) Belanja Pegawai 2-25

2) Belanja Barang dan Jasa 2-26
3) Belanja Modal 2-27
c. Belanja Dana Keistimewaan 2-29
d. Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah 2-33
1) Permasalahan 2-33
2) Solusi 2-34

D. PEMBIAYAAN DAERAH 2-34
1. Kebijakan Pembiayaan Daerah 2-34
2. Target dan Realisasi Pembiayaan 2-35
a. Penerimaan Pembiayaan 2-35
b. Pengeluaran Pembiayaan 2-35

E. PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN 2-35
1. Kinerja BUMD 2-35
a. Bank Pembangunan Daerah DIY 2-35
b. PT Anindya Mitra Internasional (AMI) 2-36
c. PT Taru Martani 2-36
d. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) 2-36

F. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2-37
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah 2-37
a. Dasar Hukum Pelaksanaan 2-38
b. Tantangan dan Permasalahan 2-39
c. Upaya-upaya Yang Dilaksanakan 2-39
d. Capaian 2-39
2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY 2-40
3. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan 2-42
a. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 2-42
1) Penjualan 2-42
2) Hibah 2-46
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2-47
c. Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah 2-48
d. Pemusnahan Barang Milik Daerah 2-50

4. Pendayagunaan Barang Daerah.....2-50
a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah 2-50
b. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah 2-61
1) Rehabilitasi Rumah Daerah 2-61
2) Penjaminan Barang Milik Daerah 2-61

BAB 3 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 3-1

A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMDA.....3-1
1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3-3
2. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM-Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 3-6
3. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Indeks Gini 3-8
4. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Persentase Angka Kemiskinan 3-10
5. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan – Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda Yang Diapresiasi 3-13
6. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Pertumbuhan Ekonomi.....3-15
7. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 3-16
8. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 3-18
9. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan 3-20
10. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar-Wilayah – Indeks Williamson 3-23
11. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan - Opini BPK 3-24
12. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Nilai AKIP 3-26
13. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan – Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan.....3-28

14. Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaandan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipatendan Tanah Desa – Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Yang Terfasilitasi Untuk Dikelola Serta Dimanfaatkan 3-29

B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA.....3-30

1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, dengan indikator:.....3-33
   a. Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) 3-33
   b. Harapan Lama Sekolah 3-35
   c. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif 3-36
   d. Persentase Sekolah Yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya Dengan Kategori Maju 3-37
2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup.....3-39
3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat, dengan Indikator 3-41
   a. Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Berkategori Nindya Ke Atas 3-41
   b. Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.....3-42
   c. Total Fertility Rate 3-44
   d. Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang.....3-45
   e. Angka Kejahatan Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*).....3-46
4. Program Penangggulangan Kemiskinan, dengan indikator 3-48
   a. Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru.....3-48
   b. Jumlah Penduduk Miskin (Jumlah Penduduk Miskin (Pada Tahun n) 3-49
   c. Pengeluaran Per Kapita Masyarakat 3-51
5. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda.....3-53
   a. Persentase Peningkatan Budaya Benda Yang Dilestarikan.....3-54
   b. Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan.....3-55

6. Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa), dengan indikator: 3-56
   a. Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan Dalam PDRB DIY 3-56
      1) Sektor Pertanian 3-58
      2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3-59
      3) Industri Pengolahan 3-62
      4) Perdagangan 3-63
   b. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3-63
   c. Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima) 3-65
7. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan indikator: 3-66
   a. Indeks Kualitas Air 3-66
   b. Indeks Kualitas Udara 3-69
   c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 3-71
   d. Indeks Risiko Bencana 3-73
8. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikator Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang 3-84
9. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan, dengan Indikator 3-87
   a. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten Yang Belum Maju (Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul) 3-87
   b. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi 3-89
10. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah, dengan Indikator 3-92
   a. Kemampuan Keuangan Daerah 3-92
   b. Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY 3-95
   c. Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, Nilai Eksternal Persepsi Korupsi 3-97
11. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah, dengan indikator Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan 3-98

12. Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa, dengan indikator Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen) 3-100

C. PENGHARGAAN 3-102

D. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN 3-105

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 3-105

a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar 3-105

1) Urusan Pendidikan 3-105

a) Kondisi Umum 3-105

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-109

2) Urusan Kesehatan 3-162

a) Kondisi Umum 3-162

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-164

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3-183

a) Sub Urusan Pekerjaan Umum 3-183

b) Sub Urusan Penataan Ruang 3-209

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3-221

a) Kondisi Umum 3-221

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-222

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3-227

a) Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas 3-227

b) Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 3-243

6) Urusan Sosial 3-257

a) Kondisi Umum 3-257

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-260

b. Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 3-282
1) Urusan Tenaga Kerja 3-282
a) Kondisi Umum 3-282
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-283
2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3-296
a) Kondisi Umum 3-296
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-298
3) Urusan Pangan 3-303
a) Kondisi Umum 3-303
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-308
4) Urusan Pertanahan 3-317
a) Kondisi Umum 3-317
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-320
5) Urusan Lingkungan Hidup 3-330
a) Kondisi Umum 3-330
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-331
6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 3-343
a) Kondisi Umum 3-343
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-347
7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3-351
a) Kondisi Umum 3-351
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-353
8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3-361
a) Kondisi Umum 3-361
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-365

9) Urusan Perhubungan 3-369
a) Kondisi Umum 3-369
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-371
10) Urusan Komunikasi dan Informatika 3-379
a) Kondisi Umum 3-379
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-382
11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3-409
a) Kondisi Umum 3-409
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-412
12) Urusan Penanaman Modal 3-428
a) Kondisi Umum 3-428
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-433
13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 3-440
a) Kondisi Umum 3-440
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-442
14) Urusan Statistik 3-446
a) Kondisi Umum 3-446
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-449
15) Urusan Persandian 3-455
a) Kondisi Umum 3-455
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-457
16) Urusan Kebudayaan 3-460
a) Kondisi Umum 3-460
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-466
17) Urusan Perpustakaan 3-488
a) Kondisi Umum 3-488
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-491

18) Urusan Kearsipan 3-500
a) Kondisi Umum 3-500
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-502
2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3-505
a. Urusan Kelautan dan Perikanan 3-505
1) Kondisi Umum 3-505
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-507
b. Urusan Pariwisata 3-532
1) Kondisi Umum 3-532
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-535
c. Urusan Pertanian 3-553
1) Kondisi Umum 3-553
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-559
d. Urusan Kehutanan 3-569
1) Kondisi Umum 3-569
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-572
e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 3-579
1) Kondisi Umum 3-579
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-581
f. Urusan Perdagangan 3-590
1) Kondisi Umum 3-590
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-591
g. Urusan Perindustrian 3-600
1) Kondisi Umum 3-600
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-601

h. Urusan Ketransmigrasian 3-612
1) Kondisi Umum 3-612
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-613
3. PENUNJANG URUSAN 3-617
a. Perencanaan Pembangunan 3-617
1) Kondisi Umum 3-617
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-618
b. Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan 3-668
1) Kondisi Umum 3-668
a) Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan 3-669
b) Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja 3-670
c) Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien 3-671
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-672
c. Administrasi Keuangan Daerah 3-687
1) Kondisi Umum 3-687
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-689
d. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 3-725
1) Sub Urusan Kepegawaian 3-725
a) Kondisi Umum 3-725
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-732
2) Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan 3-750
a) Kondisi Umum 3-750
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-751

e. Sekretariat Daerah 3-758
1) Tata Pemerintahan 3-758
a) Kondisi Umum 3-758
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-763
2) Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum 3-778
a) Kondisi Umum 3-778
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-784
3) Fasilitasi Perekonomian dan SDA 3-798
a) Kondisi Umum 3-798
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-801
4) Fasilitasi Kesra 3-805
a) Kondisi Umum 3-805
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-808
5) Kelembagaan dan Tata Laksana 3-818
a) Kondisi Umum 3-818
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-821
6) Fasilitasi Administrasi Pembangunan 3-833
a) Kondisi Umum 3-833
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-835
7) Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol 3-850
a) Kondisi Umum 3-850
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-852
8) Fasilitasi Pemerintahan 3-862
a) Kondisi Umum 3-862
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-863

9) Penanggulangan Bencana 3-871
a) Kondisi Umum 3-871
b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-874
f. Pengawasan 3-898
1) Kondisi Umum 3-898
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-904
g. Penelitian dan Pengembangan 913
1) Kondisi Umum 913
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 914
h. Sekretaris Dewan 3-916
1) Kondisi Umum 3-916
2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 3-918
E. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN 3-930
F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2019 3-961
1. PENDAHULUAN (CATATAN UMUM) 3-961
2. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN 3-967
a. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 3-967
b. Pengelolaan Belanja Daerah 3-968
c. Pembiayaan Daerah 3-970
d. Pengelolaan Barang Milik Daerah 3-971
e. Pengelolaan Aset Daerah Yang Dipisahkan 3-972
3. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3-972
a. Urusan Pendidikan 3-972
b. Urusan Kesehatan 3-975
c. Urusan Sosial 3-977
d. Sub Urusan Pekerjaan Umum 3-979
e. Sub Urusan Penataan Ruang 3-984
f. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3-985
g. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3-986

h. Urusan Pangan 3-987
i. Urusan Tenaga Kerja 3-989
j. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3-990
k. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3-991
l. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 3-991
m. Pendidikan dan Pelatihan 3-992
n. Sub Urusan Kepegawaian 3-993
o. Urusan Komunikasi dan Informatika 3-994
p. Urusan Persandian 3-996
q. Urusan Kelautan dan Perikanan 3-997
r. Urusan Pariwisata 3-1001
s. Urusan Perindustrian 3-1004
t. Urusan Perdagangan 3-1005
u. Urusan Pertanian 3-1006
v. Urusan Kehutanan 3-1007

4. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 3-1008
5. PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN 3-1009

a. Umum 3-1009
b. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan 3-1010
c. Penyelenggaraan Urusan Pertanahan 3-1010
d. Penyelenggaraan Urusan Tata Ruang 3-1011
e. Urusan Kelembagaan 3-1011

6. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 3-1012

a. Urusan Kerjasama Antar Daerah 3-1012
b. Pembinaan Batas Daerah 3-1013
c. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 3-1013
d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 3-1014
e. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 3-1015
f. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY 3-1015
g. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 3-1015
h. Lembaga Ombudsman 3-1016
i. Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) DIY 3-1017
j. Palang Merah Indonesia (PMI) DIY 3-1018
k. Trans Jogja 3-1021

BAB 4 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 4-1

A. DASAR HUKUM 4-1

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN 4-2

C. PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN 4-3

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4-3

a. Satker Tanaman Pangan (049087) 4-3
b. Satker Hortikultura (049088) 4-3
c. Satker Perkebunan (049089) 4-4
d. Satker Peternakan (049090) 4-4
e. Satker Sarana dan Sarana Pertanian-Tanaman Pangan (049094) 4-5

2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral 4-6

a. Program/Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya 4-7
b. Pengelolaan Sumber Daya Air 4-8
c. Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan 4-9

BAB 5 PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY 5-1

A. GAMBARAN UMUM 5-1

B. URUSAN KELEMBAGAAN 5-5

1. Kondisi Umum 5-5
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 5-8

C. URUSAN KEBUDAYAAN 5-9

1. Kondisi Umum 5-9
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 5-12

D. URUSAN PERTANAHAN 5-13

1. Kondisi Umum 5-13
2. Program dan Kegiatan Tahun 2020 5-15

E. URUSAN TATA RUANG 5-16

1. Kondisi Umum 5-16
2. Progam dan Kegiatan Tahun 2020 5-17

BAB 6 PROGRAM STRATEGIS DIY 6-1

A. PENANGANAN COVID-19 6-1

1. Latar Belakang 6-1
2. Maksud dan Tujuan 6-2
3. Progres Sampai Akhir Tahun 2020 6-2
4. Pelaksanaan Berdasar Rencana Operasi I 6-5

a. Sekretariat Posko 6-5
b. Bidang Kesehatan 6-6
c. Bidang Pendidikan 6-6
d. Bidang Sosial 6-6
e. Bidang Kominfo 6-6

5. Pelaksanaan Berdasar Rencana Operasi II 6-7

a. Sekretariat Posko 6-7
b. Bidang Kesehatan 6-9
c. Bidang Pendidikan 6-11
d. Bidang Sosial Kemasyarakatan 6-12
e. Bidang Ekonomi 6-26
f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum 6-43
g. Bidang Logistik 6-44
h. Sumbangan Dana Masyarakat 6-45

6. Realisasi Anggaran 6-45

a. Sumber Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 6-45
b. Dana Masyarakat 6-49

7. Permasalahan dan Solusi 6-50

a. Permasalahan 6-50
b. Solusi 6-50

B. JOGJA SMART PROVINCE 6-51

1. Latar Belakang 6-51
2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2020 6-52
3. Permasalahan dan Solusi 6-53

C. REFORMASI BIROKRASI 6-54
1. Latar Belakang 6-54
2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2020 6-54
3. Permasalahan dan Solusi 6-56

D. PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA 6-57
1. Latar Belakang 6-57
2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2020 6-58
3. Permasalahan dan Solusi 6-59

E. JOGJA AGRO PARK 6-60
1. Latar Belakang 6-61
2. Progress Sampai dengan Tahun 2020 6-61
3. Permasalahan dan Solusi 6-62

F. YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT 6-63
1. Latar Belakang 6-63
2. Progress Sampai dengan Tahun 2020 6-64
a. Kawasan Pendukung Bandara (Aerotropolis) 6-65
b. Akses Jalan 6-66
c. Aksesibilitas YIA Berbasis Darat (Angkutan Jalan) 6-67
d. Aksesibilitas YIA Berbasis Rel (Kereta Api) 6-67
e. Pembangunan VVIP Room 6-68
f. Pembangunan SPAM Regional Kamijoro 6-69
3. Permasalahan dan Solusi 6-70
a. Pemasalahan 6-70
b. Solusi 6-71

G. PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI 6-72
1. Latar Belakang 6-72
2. Progress Sampai dengan Tahun 2020 6-75
a. Penyusunan Naskah Yogyakarta Warisan Budaya Dunia 6-75
b. Penyusunan Naskah Management Plan Yogyakarta Warisan Budaya Dunia 6-76
c. Kajian Perencanaan Penataan Daya Dukung dan Daya Tampung Ruang Sumbu Filosofi 6-76
d. Perencanaan Teknis Fasad Bangunan Sumbu Filosofi 6-77

e. Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia 6-77
f. Pengadaan Lahan dan Bangunan Hotel Mutiara I dan II..... 6-77
g. Jasa Operasional dan Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra..... 6-78
h. Jasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol 6-79
i. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas 6-80
j. Uji Coba Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Semi Pedestrian Malioboro..... 6-80
k. Event Budaya Selasa Wagen dalam masa Pandemi Covid-19 6-82

3. Permasalahan dan Solusi..... 6-86
a. Permasalahan 6-86
b. Solusi 6-87

H. PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN 6-88
1. Latar Belakang 6-88
2. Progress Sampai dengan Tahun 2020..... 6-89
a. Perencanaan Pembebasan Lahan untuk Segmen Legundi – Planjan (9,50 km)..... 6-90
b. Persiapan Pembebasan Lahan untuk Segmen Garongan-Congot (Lanjutan) (8,89 km) 6-91
3. Permasalahan dan Solusi..... 6-93
a. Permasalahan 6-93
b. Solusi 6-94

I. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY..... 6-94
1. Latar Belakang 6-94
2. Progress Sampai dengan Tahun 2020..... 6-95
3. Permasalahan dan Solusi..... 6-97

J. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BERTARAF INTERNASIONAL RSUD WATES..... 6-97
1. Latar Belakang 6-97

2. Progress Sampai dengan Tahun 2020 6-98
a. Pembangunan Pengembangan RSUD Wates 6-98
b. Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran 6-98
3. Permasalahan dan Solusi 6-99
K. REVITALISASI TPA PIYUNGAN 6-100
1. Latar Belakang 6-100
2. Progress Sampai dengan Tahun 2020 6-101
3. Permasalahan dan Solusi 6-103
a. Permasalahan 6-103
b. Solusi 6-103
L. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 6-104
1. Latar Belakang 6-104
2. Progress Sampai dengan Tahun 2020 6-105
a. Ulasan Kegiatan penangulangan kemiskinan di DIY 6-105
b. Capaian Kemiskinan pada 2020 6-108
3. Permasalahan dan Solusi 6-109
BAB 7 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH 7-1
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH 7-1
1. Kerjasama Antar-Daerah 7-1
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 7-1
3. Kerjasama Daerah sebagai bentuk Sinergi dengan Pemerintah Pusat 7-3
4. Permasalahan dan Solusi 7-5
a. Permasalahan 7-5
b. Solusi 7-5
B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 7-6
1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 7-6
2. Komite Intelijen Daerah 7-7
a. Permasalahan dan Solusi 7-8
1) Permasalahan 7-8
2) Solusi 7-8

C. PEMBINAAN BATAS DAERAH 7-9
1. Kondisi Umum 7-9
2. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi 7-10
a. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY 7-10
b. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten/ Kota tentang Penyelesaian Permasalahan di Wilayah Perbatasan Kabupaten/ Kota dan atau antar Provinsi di DIY 7-11
c. Fasilitasi dan koordinasi usulan revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah pada segmen perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo. 7-12
d. Database Administrasi Kewilayah. 7-13
e. Penggantian dan pemasangan pilar batas daerah pada perbatasan antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo 7-13
3. Permasalahan dan Solusi dalam Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan 7-14
a. Permasalahan 7-14
b. Solusi 7-14

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 7-15
1. Gambaran Umum 7-15
2. Antisipasi daerah Dalam Menghadapi Kemugkinan Bencana 7-16
3. Permasalah dan Solusi 7-16
a. Permasalahan 7-16
b. Solusi 7-17

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7-18
1. Gambaran Umum 7-18
2. Permasalahan dan Solusi 7-19
a. Permasalahan 7-19
b. Solusi 7-19

F. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH 7-20
1. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) 7-20
a. Gambaran Umum 7-20
b. Permasalahan dan Solusi 7-24
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 7-27
a. Narasi Umum 7-27
b. Permasalahan dan Solusi 7-28
3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY 7-29
a. Narasi Umum 7-29
b. Permasalahan dan Solusi 7-30
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 7-31
a. Narasi Umum 7-31
b. Permasalahan dan Solusi 7-32
5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY 7-33
a. Narasi Umum 7-33
b. Permasalahan dan Solusi 7-35
6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) 7-36
a. Narasi Umum 7-36
b. Permasalahan dan Solusi 7-37
7. Palang Merah Indonesia (PMI) 7-38
a. Narasi Umum 7-38
b. Permasalahan dan Solusi 7-39
8. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY 7-40
a. Narasi Umum 7-40
b. Permasalahan dan Solusi 7-41
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY 7-41
a. Narasi Umum 7-41
b. Permasalahan dan Solusi 7-43
10. Komisi Informasi DIY 7-44
a. Narasi Umum 7-44
b. Permasalahan dan Solusi 7-46

11. Trans Jogja 7-47
a. Narasi Umum 7-47
b. Permasalahan dan Solusi 7-51

BAB 8 PENUTUP 8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tujuan Pembangunan DIY Tahun 2017-2022 1-12

Tabel 1.2. Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2017-2022 1-12

Tabel 1.3. Interkoneksi Prioritas Nasional dan Tematik Pembangunan DIY 1-28

Tabel 1.4. Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota 1-30

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kab/Kota di DIY (Jiwa) Tahun 2015-2020..... 1-32

Tabel 1.6. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020..... 1-35

Tabel 1.7. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2016-2020..... 1-36

Tabel 1.8. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2020..... 1-41

Tabel 1.9. Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di DIY Tahun 2017-2020..... 1-42

Tabel 1.10. Jumlah Guru di DIY Tahun 2017-2020 1-43

Tabel 1.11. Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan Tahun 2017-2020 1-46

Tabel 1.12. Jumlah Lembaga Pendidikan Nonformal di DIY Tahun 2020 1-48

Tabel 1.13. Jumlah Peserta Didik Nonformal di DIY Tahun 2020..... 1-49

Tabel 1.14. Perkembangan IKM di DIY Tahun 2015-2019..... 1-49

Tabel 1.15. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2016-2019..... 1-51

Tabel 1.16. Jumlah Pergerakan Wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kabupaten/Kota di DIY pada Tahun 2016-2020..... 1-52

Tabel 1.17. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2019-2020..... 1-53

Tabel 1.18. Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2018-2020 (Unit)..... 1-55

Tabel 1.19. Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2019-2020..... 1-56

Tabel 1.20. Produksi 5 Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2019-2020 1-57
Tabel 1.21. Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2019-2020 1-58
Tabel 1.22. Target dan Realisasi Produksi Minyak Kayu Putih di DIY (2016-2020) 1-59
Tabel 1.23. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%) 1-61
Tabel 1.24. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2019 1-62
Tabel 1.25. Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020 1-63
Tabel 1.26. Data Pilah Pegawai Pemda DIY Tahun 2016-2020 Berdasarkan Golongan 1-66
Tabel 1.27. Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit) 1-66
Tabel 1.28. Realisasi Belanja DIY Tahun 2020 (SebelumDilakukan Audit BPK RI) 1-67
Tabel 2.1. Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-5
Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-6
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-6
Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-7
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-9
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-10
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-11
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-11
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-12

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-13

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-13

Tabel 2.12. Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 2-15

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Organisasi Perangkat Daerah DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-17

Tabel 2.14. Realisasi Belanja DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-18

Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-19

Tabel 2.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-20

Tabel 2.17. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-21

Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-22

Tabel 2.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-23

Tabel 2.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-24

Tabel 2.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-25

Tabel 2.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-25

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-26

Tabel 2.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-28

Tabel 2.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit) 2-30

Tabel 2.26. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2020 Pemda DIY (Sebelum Dilakukan Audit) 2-39

Tabel 2.27. Tanah Milik Pemda DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2020 2-41

Tabel 2.28. Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2020 2-41

Tabel 2.29. Hasil Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Penjualan dan Lelang 2-45

Tabel 2.30. Ganti Kerugian Daerah berupa Barang Milik Daerah (BMD) pada OPD Pemda DIY Tahun 2020 2-49

Tabel 2.31. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa 2-51

Tabel 2.32. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2-53

Tabel 2.33. Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai 2-54

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2020 3-2

Tabel 3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY Menurut Komponen, 2015-2020 3-5

Tabel 3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020 3-5

Tabel 3.4. Gini Ratio DIY dan Indonesia Periode September 2019 – Spetember 2020 3-9

Tabel 3.5. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015-2019 (%) 3-11

Tabel 3.6. Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, 2019 - 2020 3-12

Tabel 3.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2019 - 2020 3-12

Tabel 3.8. Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang ditetapkan di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2007 -2020 3-13

Tabel 3.9. Penetapan Warisan Budaya Tak benda Kekayaan DIY tingkat Nasional dan Internasional Pada Tahun 2013 – 2020 3-14

Tabel 3.10. Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 (%) 3-16

Tabel 3.11. Kriteria dan Indikator IKLH 3-17

Tabel 3.12. Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 3-18

Tabel 3.13. Target dan Realisasi IKLH Tahun 2018 - 2020 3-18

Tabel 3.14. Daftar Dokumen Perencaan Pada Satuan Ruang Strategis 3-22

Tabel 3.15. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota 2016 – 2020 (dalam persen)..... 3-24

Tabel 3.16. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah..... 3-30

Tabel 3.17. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Desa 3-30

Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2020 3-31

Tabel 3.19. Rincian Jumlah Sekolah Yang Memenuhi SNP>90..... 3-33

Tabel 3.20. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah Menengah dan Khusus Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2020..... 3-34

Tabel 3.21. Target dan Capaian Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020 3-35

Tabel 3.22. Jumlah Pemuda Kader Aktif 2019-2020 di DIY 3-36

Tabel 3.23. Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif Tahun 2020..... 3-37

Tabel 3.24. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju Tahun 2020 3-38

Tabel 3.25. Target dan Capaian Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2020..... 3-40

Tabel 3.26. Kondisi Kabupaten/Kota Hasil Evaluasi KLA, 2017 - 2019 3-41

Tabel 3.27. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas Tahun 2020 3-42

Tabel 3.28. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tahun 2020. 3-43

Tabel 3.29. Target dan Capaian Indikator Program Dengan Indikator TFR DIY Tahun 2020 3-44

Tabel 3.30. Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa/ Kelurahan Cepat Berkembang Tahun 2020 3-45

Tabel 3.31. Jumlah Tindak Kejahatan Terlaporkan dan Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk 3-47

Tabel 3.32. Target dan Capaian Indikator Program Angka Kejahatan Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*) Tahun 2020 3-47

Tabel 3.33. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2020 3-49

Tabel 3.34. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020 3-50

Tabel 3.35. Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2017-2020..... 3-52

Tabel 3.36. Target dan Capaian Indikator Program Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Tahun 2020 3-52

Tabel 3.37. Jumlah Museum Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2020..... 3-54

Tabel 3.38. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Budaya Benda Yang Dilestarikan Tahun 2020..... 3-55

Tabel 3.39. Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikanTahun 2020..... 3-56

Tabel 3.40. Target dan Capaian Indikator Program Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY Tahun 2020..... 3-57

Tabel 3.41. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2016-2020..... 3-60

Tabel 3.42. Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020..... 3-63

Tabel 3.43. Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020..... 3-65

Tabel 3.44. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima) Tahun 2020..... 3-66

Tabel 3.45. Hasil Perhitungan Penggabungan IKA DIY dan Kabupaten/Kota..... 3-67

Tabel 3.46. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020 3-68

Tabel 3.47. Data Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2020..... 3-70

Tabel 3.48. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020 3-70

Tabel 3.49. Data Luas dan Hasil Konversi Penggunaan Lahan 3-71

Tabel 3.50. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2020 3-73

Tabel 3.51. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target RPJMD 3-73

Tabel 3.52. Capaian 2019-2020 dan Perbandingan dengan Target RPJMD 3-84

Tabel 3.53. Nilai Keterpaduan Program Struktur Ruang Tahun 2020 3-85

Tabel 3.54. Nilai Keterpaduan Program Pola Ruang Tahun 2019 3-85

Tabel 3.55. Klasifikasi Tingkat Keterpaduan Program 3-86

Tabel 3.56. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang Belum Maju (Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul) Tahun 2020 3-88

Tabel 3.57. PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2020 3-88

Tabel 3.58. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi Tahun 2020 3-90

Tabel 3.59. Kondisi Jalan Provinsi Per Kabupaten /Kota di Wilayah DIY pada Tahun 2020 3-91

Tabel 3.60. Target dan Capaian Indikator Program Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 3-93

Tabel 3.61. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah 3-93

Tabel 3.62. Target dan Capaian Indikator Program Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY Tahun 2020 3-96

Tabel 3.63. Rincian Penerimaan Pendapatan dari Optimalisasi Aset 3-96

Tabel 3.64. Target dan Capaian Indikator Program Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi Tahun 2020 3-97

Tabel 3.65. Target dan Capaian Indikator Program Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan Tahun 2020 3-99

Tabel 3.66. Target dan Capaian Indikator Program Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa Tahun 2020 3-101

Tabel 3.67. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 3-102

Tabel 3.68. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Desa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 3-102

Tabel 3.69. Rekap Inventarisasi Penetapan Perdes Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY..... 3-102

Tabel 3.70. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Capaian 2020 dan Perbandingan Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-106

Tabel 3.71. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-163

Tabel 3.72. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-185

Tabel 3.73. Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga 3-186

Tabel 3.74. Jumlah IPAL Komunal Sampai Dengan Tahun 2020..... 3-187

Tabel 3.75. Neraca Pengelolaan Sampah DIY Tahun 2020 (ton/hari)..... 3-188

Tabel 3.76. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional)..... 3-188

Tabel 3.77. Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Tahun 2020..... 3-190

Tabel 3.78. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-210

Tabel 3.79. Penilaian Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang DIY (Metode pembobotan dan skoring) 3-210

Tabel 3.80. Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemda DIY 3-211

Tabel 3.81. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-221

Tabel 3.82. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-228

Tabel 3.83. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-244

Tabel 3.84. Detail Indeks Ketahanan Nasional DIY disandingkan dengan capaian skor Nasional per November 2020 3-245

Tabel 3.85. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-258

Tabel 3.86. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-283

Tabel 3.87. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-296

Tabel 3.88. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-303

Tabel 3.89. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-317

Tabel 3.90. Rincian Permohonan Ijin Penetapan Lokasi 3-318

Tabel 3.91. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten..... 3-319

Tabel 3.92. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Desa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 3-319

Tabel 3.93. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2020 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-330

Tabel 3.94. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-345

Tabel 3.95. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-352

Tabel 3.96. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-362

Tabel 3.97. Rata-Rata Usia Menikah Perempuan..... 3-362

Tabel 3.98. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019 2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-370

Tabel 3.99. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-381

Tabel 3.100. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2016-2020 3-409

Tabel 3.101. Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2016-2020..... 3-410

Tabel 3.102. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-411

Tabel 3.103. Perkembangan Investasi di DIY 2016 - 2020 3-429

Tabel 3.104. Perkembangan Investasi Kabupaten/Kota di DIY 2016 - 2020 (Rp Juta)..... 3-431

Tabel 3.105. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-432

Tabel 3.106. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Capaian 2020 dan Perbandingan Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-441

Tabel 3.107. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-447

Tabel 3.108. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-460

Tabel 3.109. Budaya Benda yang dikelola dan dilestarikan pada Tahun 2020 3-461

Tabel 3.110. Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum pada Tahun 2020 3-462

Tabel 3.111. Penyelenggaraan *Event* Taman Budaya DIY Pada Tahun 2020 3-464

Tabel 3.112. Pengembangan Kinerja Seni di DIY Pada Tahun 2020 3-464

Tabel 3.113. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-488

Tabel 3.114. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-501

Tabel 3.115. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-506

Tabel 3.116. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2019-2020 3-534

Tabel 3.117. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-534

Tabel 3.118. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-553

Tabel 3.119. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2019-2020 3-555

Tabel 3.120. Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2019-2020 3-557

Tabel 3.121. Populasi Ternak di DIY Tahun 2019-2020* 3-557

Tabel 3.122. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2019-2020 3-559

Tabel 3.123. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-569

Tabel 3.124. Tren angka PDRB Kehutanan 2010 – 2019 3-570

Tabel 3.125. Angka produksi kehutanan 2019-2020 3-570

Tabel 3.126. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-579

Tabel 3.127. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2016-2020 3-590

Tabel 3.128. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-591

Tabel 3.129. Perkembangan IKM di DIY Tahun 2016-2020 3-600

Tabel 3.130. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-600

Tabel 3.131. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2016-2020 3-612

Tabel 3.132. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2019-2020 dan Capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD (2022) 3-613

Tabel 3.133. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-617

Tabel 3.134. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-668

Tabel 3.135. Pengukuran Capaian Fisik dan Keuangan Danais Tahun 2020 3-669

Tabel 3.136. Pengukuran Capaian Kualitas Pelayanan Kepada Parampara Praja 3-670

Tabel 3.137. Pengukuran Capaian Sasaran..... 3-671

Tabel 3.138. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-688

Tabel 3.139. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-731

Tabel 3.140. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-750

Tabel 3.141. Target dan Realisasi Kinerja Fasilitasi Tata Pemerintahan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-762

Tabel 3.142. Target dan Realisasi Kinerja Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-779

Tabel 3.143. Kegiatan pembahasan Raperda menjadi Perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2020..... 3-779

Tabel 3.144. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-798

Tabel 3.145. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Sebaran Wilayah dan Bentuk Perguruan Tinggi 3-805

Tabel 3.146. Target dan Realisasi Kinerja Fasilitasi Kesra Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-807

Tabel 3.147. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-820

Tabel 3.148. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-833

Tabel 3.149. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-851

Tabel 3.150. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-862

Tabel 3.151. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2020 serta Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-873

Tabel 3.152. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 3-900

Tabel 3.153. Risalah Pembahasan Itjen Kementerian Dalam Negeri RI..... 3-903

Tabel 3.154. Rekap Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY TA 2020 3-903

Tabel 3.155. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022) 913

Tabel 3.156. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)..... 3-917

Tabel 3.157. Daftar Kebijakan Strategis Pemda DIY Tahun 2020..... 3-930

Tabel 4.1. Alokasi Tugas Pembantuan Untuk Pemda DIY Tahun Anggaran 2020..... 4-2

Tabel 4.2. Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2020..... 4-3

Tabel 4.3. Pagu Anggaran Tugas Pembantuan Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2020..... 4-8

Tabel 4.4. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2020..... 4-8

Tabel 4.5. Target dan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Jalan di DIY TA 2020 4-9

Tabel 4.6. Lokasi Kegiatan Pemeliharan Rutin Jalan di DIY Tahun 2020..... 4-10

Tabel 4.7. Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Mayor Jalan dan Rehabilitasi Jembatan di DIY Tahun 2020 4-10

Tabel 4.8. Lokasi Kegiatan Pemeliharan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2020..... 4-10

Tabel 4.9. Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2020 4-11
Tabel 4.10. Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2020 4-11
Tabel 5.1. Ruang lingkup Penugasan Urusan Keistimewaan 5-2
Tabel 5.2. Alokasi Dana Keistimewaan Kabupaten/ Kota Tahun 2020 5-4
Tabel 5.3. Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2020 5-4
Tabel 5.4. Rekapitulasi Kinerja Urusan Kelembagaan 5-8
Tabel 5.5. Rekapitulasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020 5-12
Tabel 5.6. Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020 5-16
Tabel 5.7. Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Ruang Tahun 2020 5-18
Tabel 6.1. Kegiatan Penanganan Covid-19 per Bidang 6-3
Tabel 6.2. Pemberdayaan UKM Untuk Pembuatan Masker dan Wastafel 6-33
Tabel 6.3. Realisasi Anggaran Penggunaan Dana BTT Penanganan Covid-19 APBD Tahun Anggaran 2020 6-46
Tabel 6.4. Pemanfaatan Dana Bantuan Masyarakat 6-50
Tabel 6.5. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada 2018 dan 2019 6-55
Tabel 6.6. Progres Penataan Kawasan Sumbu Filosofi 2014 – 2020 6-83
Tabel 6.7. Ringkasan Progress Pembebasan Lahan dan Konstruksi Jalur Jalan Lintas Selatan DIY 6-92
Tabel 6.8. Progres Pembangunan Taman Budaya se-DIY 6-95
Tabel 7.1. Permendagri tentang Batas Daerah Lingkup DIY 7-9
Tabel 7.2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2020 7-11
Tabel 7.3. Konsultasi berdasarkan Bidang 7-21
Tabel 7.4. Konsultasi Berdasarkan Wilayah 7-21
Tabel 7.5. Konsultasi berdasarkan Sektor 7-21
Tabel 7.6. Pengaduan berdasarkan Bidang 7-22

Tabel 7.7. Pengaduan berdasarkan Wilayah..... 7-22

Tabel 7.8. Pengaduan berdasarkan Sektor 7-22

Tabel 7.9. JumlahTrip dan Penumpang Harian Rata-rata pada Tahun 2020..... 7-51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD 1-11

Gambar 1.2. Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY 1-31

Gambar 1.3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Tahun 1961-2020 (dalam %) 1-33

Gambar 1.4. Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota (Persen) 1-33

Gambar 1.5. Komposisi Penduduk D.I. Yogyakarta Menurut Kelompok Umur, 1971-2020 1-34

Gambar 1.6. Penduduk Usia Kerja Tahun 2016 -2020 (orang) 1-37

Gambar 1.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2016-2020 1-37

Gambar 1.8. Angkatan Kerja Tahun 2016-2020 1-38

Gambar 1.9. Penduduk yang Bekerja Tahun 2016-2020 1-39

Gambar 1.10. Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2016-2020 1-40

Gambar 1.11. TPT Nasional dan DIY Tahun 2016-2020 1-41

Gambar 1.12. Kondisi Fasilitas Sekolah di DIY 1-43

Gambar 1.13. Persentase Guru Berkualifikasi di DIY Tahun 2016-2020 1-44

Gambar 1.14. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Tahun 2016-2020 1-45

Gambar 1.15. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Tahun 2016-2020 1-45

Gambar 1.16. Capaian Akreditasi Sekolah/Madrasah DIY Tahun 2020 1-47

Gambar 1.17. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020 1-51

Gambar 1.18. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2015-2020 1-55

Gambar 1.19. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY Tahun 2016-2020 (%) 1-60

Gambar 1.20. Nilai PDRB per Kapita DIY Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) 1-62

Gambar 3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2010-2020 3-4

Gambar 3.2. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY tahun 2015-2019 3-7
Gambar 3.3. Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan September 2014 – September 2020 3-9
Gambar 3.4. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2016-2020 3-11
Gambar 3.5. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Indonesia Tahun 2016-2020 (%) 3-15
Gambar 3.6. Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis 3-21
Gambar 3.7. Indeks Williamson DIY Tahun 2016-2020 3-24
Gambar 3.8. Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2012-2019 3-27
Gambar 3.9. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020 3-35
Gambar 3.10. Capaian Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya 3-38
Gambar 3.11. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2015-2020 (Tahun) 3-40
Gambar 3.12. Perkembangan WUB Tahun 2016-2020 3-48
Gambar 3.13. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2015 – 2020 (Orang) 3-50
Gambar 3.14. Gambar Kontribusi 4 Lapangan Usaha terhadap PDRB DIY tahun 2016 - 2020 3-56
Gambar 3.15. Rincian Perkembangan Kontribusi Masing-Masing Sektor Tahun 2016-2020 3-57
Gambar 3.16. Gambar Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB DIY Tahun 2016-2020* 3-58
Gambar 3.17. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2016-2020 3-59
Gambar 3.18. Lama Tinggal Mancanegara di DIY tahun 2016 – 2020 3-61
Gambar 3.19. Lama Tinggal Nusantara di DIY tahun 2016 – 2020 3-62
Gambar 3.20. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka DIY dan Indonesia tahun 2016 - 2020 3-64
Gambar 3.21. Capaian Akreditasi A pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus di DIY Tahun 2020 3-105
Gambar 3.22. Kelas Industri kompetensi keahlian Perhotelan SMKN 6 Yogya 3-106

Gambar 3.23. Blended Learning Pada Anak Berkebutuhan Khusus 3-106
Gambar 3.24. Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Hotline 3-162
Gambar 3.25. IPAL Komunal 3-187
Gambar 3.26. Pelaksanaan Pekerjaan Tanggul Penahan Dinding, Drainase, Saluran Lindi dan Jalan di TPA Piyungan 3-189
Gambar 3.27. SPAM Regional Kartamantul (Sistem Bantar) 3-191
Gambar 3.28. Pengambilan Sampel Core-Drill Aspal Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi 3-193
Gambar 3.29. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Desa Kalitekuk, Semin, Gunungkidul 3-222
Gambar 3.30. Suasana Rapat Kerja FKUB DIY, November 2020 3-243
Gambar 3.31. Bimbingan Keterampilan Tata Rias (Salon) Bagi Warga Binaan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita 3-257
Gambar 3.32. Talkshow Hari Anti Kekerasan di Media Radio 3-297
Gambar 3.33. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2015-2020 3-304
Gambar 3.34. Gambar Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan di DIY tahun 2015-2020 3-307
Gambar 3.35. GISA di Gedung Parasamya Kabupaten Bantul 3-344
Gambar 3.36. Pelatihan pendidik pendidik sebaya 3-364
Gambar 3.37. Aplikasi Jogjapass 3-380
Gambar 3.38. Pangsa dan Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran, 2020 (c-to-c) 3-429
Gambar 3.39. Persentase Realisasi Investasi Tahun 2020 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota 3-431
Gambar 3.40. Pertandingan Cabor Anggar pada POPDA 2020 3-440
Gambar 3.41. Rehabilitasi WBCB yang dilakukan pada Tahun 2020 3-461
Gambar 3.42. Even Bahasa dan Permuseuman Tahun 2020 3-463
Gambar 3.43. Penyelenggaraan Event Budaya di Taman Budaya DIY Pada Tahun 2020 3-464
Gambar 3.44. FKY Tahun 2020 3-465
Gambar 3.45. Pentas Daring Seni Guyon Lagon bersama Dhimas Tedjo 3-465

Gambar 3.46. Pelaksanaan Program drive thru Layanan Perpustakaan 3-490
Gambar 3.47. Tangkapan layar website aplikasi iJogja 3-490
Gambar 3.48. Gubernur Membuka Pameran Sewindu Keistimewaan DIY 3-501
Gambar 3.49. Tangkapan Layar Web SIKS DPAD DIY 3-502
Gambar 3.50. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2015-2020 3-505
Gambar 3.51. Nilai Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Jasa Pertanian, dan Perburuan dalam PDRB DIY Tahun 2015-2020 3-554
Gambar 3.52. Nilai Tukar Petani Tahun 2019 dan 2020 3-554
Gambar 3.53. Kegiatan Tebangan Hasil Hutan Kayu di RPH Kemuning, BDH Playen, Kabupaten Gunungkidul 3-571
Gambar 3.54. Pungutan Daun Kayu Putih di RPH Candi, BDH Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Dengan Pelibatan Masyarakat Sekitar Hutan 3-571
Gambar 3.55. Pembinaan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan 3-581
Gambar 3.56. Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Air Tanah 3-581
Gambar 3.57. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Pertambangan 3-581
Gambar 3.58. Forum Grand Desain Keistimewaan DIY Paniradya Kaistimewan DIY 3-671
Gambar 3.59. Pengukuhan Pjs Bupati Bantul pada 26 September 2020 3-760
Gambar 3.60. Penghargaan Dalam Rangka Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2020 3-784
Gambar 3.61. Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali 3-799
Gambar 3.62. Pengecekan Suhu Tamu Undangan 3-851
Gambar 3.63. Tren Kejadian di DIY Tahun 2017-2020 3-871
Gambar 3.64. Data Nominal Kerusakan tahun 2020 3-872
Gambar 3.65. Sosialisai E-Wasda ke OPD Pemda DIY 3-899
Gambar 4.1. Dokumentasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 4-6

Gambar 4.2. Perbaikan Saluran Sekunder Kedundang dan Babat Semak Saluran Sekunder Cerbonan Wetan....4-9

Gambar 4.3. Pemeliharaan Berkala Jembatan: Pembersihan Jembatan Jembatan Pancuran....4-12

Gambar 4.4. Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan: Jalan Yogyakarta - Piyungan....4-12

Gambar 5.1. Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY....5-2

Gambar 5.2. Anggaran/Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2020....5-4

Gambar 5.3. Realisasi Fisik Per Urusan Tahun 2019 dan 2020....5-5

Gambar 5.4. Realisasi Keuangan Per Urusan Pada 2019 dan 2020....5-5

Gambar 5.5. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Lurah se-Kabupaten Gunungkidul oleh Bupati Gunungkidul....5-6

Gambar 5.6. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Keistimewaan Melalui Podcast....5-7

Gambar 5.7. Pojok Beteng Lor Wetan pasca direvitalisasi....5-11

Gambar 5.8. Livestreaming Ngayogjazz di Desa Mandiri Budaya....5-11

Gambar 5.9. Pemasangan Tegas Batas Desa....5-15

Gambar 5.10. Pemeliharaan Dokumen....5-15

Gambar 5.11. Manajemen lalu lintas di Kawasan Sumbu Filosofi (Semi Pedestrian Malioboro)....5-19

Gambar 6.1. Proporsi Alokasi BTT Untuk Penanganan Covid-19....6-5

Gambar 6.2. Informasi Covid-19 dari Humas Pemda DIY....6-9

Gambar 6.3. Tampilan Beranda https://corona.jogjaprov.go.id/....6-9

Gambar 6.4. Pemberdayaan Lulusan BLKPP DIY Untuk Pembuatan APD....6-29

Gambar 6.5. Sarana dan Prasarana Untuk Penyimpanan Produk Pertanian....6-32

Gambar 6.6. Bisnis Proses Belanja Ongkos Kirim (Free Ongkir)....6-35

Gambar 6.7. Contoh Media Publikasi Protokol Kesehatan....6-37

Gambar 6.8. Pemberian Perlengkapan Higienitas Destinasi Wisata....6-39

Gambar 6.9. Pemanfaatan Aplikasi Reservasi Daring....6-42

Gambar 6.10. Modul Start Up Academy....6-53

Gambar 6.11. JogjaCenter 6-53
Gambar 6.12. Penyerahan Apresiasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi 6-57
Gambar 6.14. Tanaman Timun di Green House 6-62
Gambar 6.15. Kegiatan Magang anak SMK Nanggulan KP di JAP 6-62
Gambar 6.16. Peresmian Bandara Internasional Yogyakarta 6-65
Gambar 6.17. Penandaan Tempat Duduk Untuk Penerapan *Physical Distancing* di Bandara Internasional Yogyakarta 6-65
Gambar 6.18. Gambar Rencana Trase Jalan Tol Pada Kawasan Sekitar YIA 6-66
Gambar 6.19. Sarana Angkutan AKDP Menuju YIA 6-67
Gambar 6.20. Bus Damri Rute Terminal Palbapang – YIA 6-67
Gambar 6.21. Pintu Intake Kamijoro 6-70
Gambar 6.22. Ruang Pompa Intake Kamijoro 6-70
Gambar 6.23. Konsep Sumbu Filosofi Kraton Yogyakarta 6-73
Gambar 6.24. Kondisi Jalan Malioboro Sisi Barat Pada Masa Pandemi Covid-19 th. 2020 6-73
Gambar 6.25. Penyemprotan Disinfektan Jalan Malioboro Pada Masa Pandemi Covid-19 th. 2020 6-73
Gambar 6.26. Kondisi Jalan Malioboro Pada Masa Pandemi Covid-19 th. 2020 6-74
Gambar 6.27. Kondisi Jalan Malioboro Pada Masa Pandemi Covid-19 th. 2020 6-74
Gambar 6.28. Kondisi Jalan Malioboro Setelah Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang-Undng Cipta Kerja 6-74
Gambar 6.29. Kondisi Jalan Malioboro Setelah Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang-Undng Cipta Kerja 6-74
Gambar 6.30. Kegiatan Pemeliharaan Eskalator Pada Eks Bioskop Indra 6-79
Gambar 6.31. Kegiatan Pemeliharaan Penyiraman Otomatis Pada Eks Bioskop Indra 6-79
Gambar 6.32. Lingkup Coba Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Semi Pedestrian Malioboro 6-81
Gambar 6.33. Apel pasukan kesiapan pelaksanaan Uji Coba MRLL Kawasan Malioboro 6-82

Gambar 6.34. Cegah Penyebaran Covid-19, Petugas Lakukan Ops Yustisi di Malioboro 6-83
Gambar 6.35. Peta Jalur Jalan Lintas Selatan di Pulau Jawa 6-88
Gambar 6.37. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pembebasan Lahan JJLS DIY Segmen Legundi – Planjan 6-90
Gambar 6.38. Jadwal rencana pelaksanaan pembebasan lahan JJLS DIY Segmen Garongan - Congot..... 6-91
Gambar 6.39. Pembangunan Taman Budaya Gunungkidul 6-97
Gambar 6.40. Kondisi Bangunan RSUD Wates Pada Akhir 2020 6-99
Gambar 6.41. Gedung rawat Inap RSUD Wates 6-99
Gambar 6.42. Gedung Apartemen Dioperasionalkan Untuk Isolasi Mandiri Bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Wates Masa Pandemi Covid-19..... 6-99
Gambar 6.43. Gedung Asrama Dioperasionalkan Pada Bulan Juli Dimanfaatkan Untuk Isolasi Mandiri Masyarakat Dengan Kondisi Positif Covid-19 dan Tanpa Gejala 6-99
Gambar 6.44. Kondisi Landfill di TPA pada Akhir Tahun 2020 6-100
Gambar 6.45. Koordinasi Dengan Konsultan dan Kontraktor Dari BPPW PUPR Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Kegiatan 6-102
Gambar 6.46. Pengecekan Drainase Sisi Selatan Selatan Badan Sampah..... 6-102
Gambar 6.47. Bantuan Pengembangan UMKM Kaja Shibori yang dilakukan PLN UIP Jawa Bagian Tengah II..... 6-107
Gambar 6.48. Jumlah Penduduk Miskin DIY 2014-2020. 6-108
Gambar 6.49. Sumbangan Sembako dari Angkasa Pura 6-109
Gambar 6.50. Tingkat Kemiskinan DIY pada September 2014-2020 6-109
Gambar 7.1. Penandatanganan Kerja Sama Pemda DIY dengan Polda DIY 7-4
Gambar 7.2. Dokumentasi Rakor Forkopimda, Desember 2020 7-7
Gambar 7.3. Tiga Tim Peserta Trofeo Akhir Tahun Yang Digelar di Stadion Mandala Krida, Rabu 30 Desember 2020..... 7-28
Gambar 7.4. Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka DIY Tahun 2020 7-29
Gambar 7.5. Gambar Sidang Ajudikasi Sengketa..... 7-45



Bab 1

Pendahuluan

2020

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Mengacu UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, telah diatur bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah bagian dari NKRI di mana Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII berkedudukan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut merupakan perwujudan komitmen dari Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian dari NKRI setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Dinyatakannya Daerah Kasultanan Ngayogyakarta sebagai DIY dengan UU No. 3 Tahun 1950 merupakan bentuk pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-undang ini telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman.

Pengakuan DIY sebagai daerah istimewa tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) dan (2), yaitu: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Disahkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY memberikan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Tujuan pengaturan Keistimewaan DIY adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi.

Urusan keistimewaan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap kewenangan yang diberikan, Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), yang disusun dengan dasar hukum, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan UU Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, berikut perubahannya.

B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

1. Visi Jangka Panjang

Visi pembangunan yang ingin dicapai oleh DIY dalam jangka waktu 20 tahun tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 yakni "*Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*". Pada akhir periode RPJPD tersebut, DIY diharapkan dapat bertransformasi menjadi pusat pendidikan terkemuka, pusat budaya terkemuka, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.

Sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel berstandar nasional ataupun internasional. Selain sarana dan prasarana fisik yang memadai, DIY diharapkan dapat menyediakan kultur lingkungan sosial masyarakat yang mendukung suasana kondusif dan nyaman untuk belajar.

Sebagai pusat budaya terkemuka, DIY diharapkan dapat menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Dengan disahkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY memperoleh dukungan dalam melakukan implementasi kewenangan Urusan Kebudayaan secara lebih luas untuk mewujudkan visi DIY sebagai pusat budaya terkemuka.

Sebagai daerah tujuan wisata terkemuka, DIY diharapkan dapat menjadi daerah tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik obyek dan atraksi wisata yang khas dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.

Upaya dalam mewujudkan visi jangka panjang tersebut dilakukan dengan mengutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat DIY (people-centered development) melalui pembangunan di semua sektor yang dilaksanakan secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Masyarakat yang maju dan mandiri didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang makmur secara ekonomi, mempunyai tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi, berpendidikan baik, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, serta terjamin hak-haknya dalam politik dan hukum secara merata. Masyarakat DIY juga dituntut untuk mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

2. Misi Jangka Panjang

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, DIY mempunyai empat misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD DIY 2005-2025, yaitu:

a. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
b. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
c. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
d. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

C. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Dasar Filosofi

Paradigma pembangunan di DIY didasarkan pada konsep "Renaisans Yogyakarta" sebagai pangkal berpikir perubahan ke depan yang berlandaskan pada nilai-nilai lama yang unggul atau nilai-nilai yang pernah menjadi rujukan bagi praktek kehidupan DIY dan telah membawa DIY pada posisi keistimewaannya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, DIY akan bergerak maju ke depan menjadi maju, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keluhuran dan keutamaan yang

menjadi penuntun gerak kehidupan masyarakat Jogja sehingga memiliki martabat yang istimewa dalam peta sejarah Indonesia. Diharapkan melalui paradigma "Renaisans Yogyakarta", nilai-nilai keutamaan yang sudah mulai luntur tersebut akan terwujud kembali melalui alam pikiran dan praktek kehidupan bermasyarakat, bernegara, kerja birokrasi, dan perilaku pemimpin.

Konsep "Renaisans Yogyakarta" yang terwujud dalam Semangat Jogja Gumregah mendasari tema visi pembangunan DIY tahun 2017-2022 yaitu "*Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*". **Abad Samudera Hindia** merupakan momentum untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi tersebut dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena *Indian Ocean Rim Association* (IORA), *Kra-Canal/Thai Canal Project*, serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan.

Persebaran tingkat kemiskinan DIY menunjukan adanya ketimpangan kesejahteraan antara kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah selatan DIY dibandingkan di wilayah utara DIY. Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY ini menjadi dasar untuk memberikan fokus dan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan DIY. Hal ini selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" yang dimaksudkan untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan DIY khususnya, dan di seluruh Wilayah DIY pada umumnya". Dengan demikian, potensi Kawasan Selatan perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, sehingga memiliki harkat dan martabat mulia.

Kemuliaan martabat manusia Jogja digambarkan dalam "***Lima Kemuliaan***" atau "***Panca Mulia***" sebagaimana yang disampaikan dalam pidato Gubernur pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY tahun 2017, yaitu:

a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing;
b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
c. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;

d. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis;
e. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Panca Mulia pertama, peningkatan harkat dan martabat hidup-kehidupan-penghidupan, diletakkan sebagai "dasar program" yang memayungi program-program lainnya. "Hidup" dimaknai sebagai upaya peningkatan harkat dan martabat masyarakat dalam urusan pelayanan dasar. Peningkatan harkat dan martabat "penghidupan" dimaknai dengan tercapainya peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara dalam aspek "kehidupan" dicapai melalui penyelenggaraan urusan-urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan urusan sosial.

Panca Mulia kedua mengamanatkan adanya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang disertai penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan prioritas memajukan wilayah pinggiran dan terpencil. Manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan secara individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif, dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan subtansi penting dari tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja.

Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab, sehingga strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di wilayah DIY dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di wilayah DIY yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menopang pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Panca Mulia ketiga dicapai melalui program-program serta urusan-urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pada Panca Mulia keempat dan kelima, upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja

memerlukan kemantapan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai "Trilogi SDM-DIY". Birokrasi tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan kantoran, tetapi perlu terwujud sebagai sebuah "karya peradaban" yang tidak lagi hanya menjalankan fungsinya sebagaimana adanya, namun mempunyai rasa memiliki atas apa yang dilaksanakan.

2. Visi

Berangkat dari tinjauan filosofis, berpijak pada RPJPD DIY, memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat di DIY, serta selaras dengan uraian tema Visi "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja", dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan DIY untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2022. Sehingga visi yang tercantum dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022 adalah:

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

Terwujudnya dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan untuk terlaksana atau terbukti. **Peningkatan** yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.

Kemuliaan dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia yakni dengan terpenuhinya:

a. Peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban;
b. Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan;
c. Terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi;
d. Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
e. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.

Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang berumur panjang dan hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, dan dapat hidup layak.

Manusia Jogja adalah insan di DIY yang menjadi subyek pembangunan. "Manusia Jogja" adalah semua individu yang hidup, berkehidupan, dan berpenghidupan di wilayah DIY. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan manusia Jogja adalah:

a. Semua individu yang telah menggantungkan hidupnya pada sumber daya yang berada di wilayah DIY;
b. Semua individu yang telah membangun jaringan dan juga telah dikuatkan serta dimuliakan oleh jaringan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah DIY.
c. Semua individu yang telah membangun serta menggantungkan penghidupannya pada sumber daya dan jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY.

Ciri khas manusia Jogja dalam perumusan visi "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" adalah mencakup pengertian mulia martabat hidupnya, mulia martabat kehidupannya, dan mulia martabat penghidupannya. Manusia Jogja yang memiliki hidup biologis yang mulia karena didukung oleh kualitas dan kuantitas asupan makanan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik, dan hidup dalam kualitas lingkungan fisik yang baik. Sebaliknya, manusia Jogja akan memiliki martabat yang buruk apabila kondisi fisik biologisnya buruk karena asupan makanan yang buruk serta memiliki tingkat kesehatan yang buruk, serta hidup dalam lingkungan fisik infrastruktur yang buruk. Sebagai catatan, bahwa di wilayah DIY masih terdapat kasus-kasus keluarga dan anak-anak yang memiliki tingkat kesehatan buruk akibat bergizi buruk.

a. Manusia Jogja yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang mulia, termasuk: (i) Mulia dalam berlalu lintas (sopan santun, tenggang rasa serta taat disiplin pada peraturan lalu lintas); (ii) Mulia dalam perilaku berkehidupan bersama di ruang publik (perilaku memarkir kendaraan yang tidak menzalimi orang lain sehubungan ukuran lebar jalan-jalan di Jogja relatif kecil, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau jalan atau ruang publik, tidak membuat atau memancing rasa permusuhan terhadap kelompok masyarakat lain); dan (iii) Mulia dalam berkehidupan menjalankan agama (saling menghormati kehidupan beragama kelompok agama lain).
b. Manusia Jogja yang memiliki penghidupan yang mulia, mencakup: (i) Cara-cara menjalankan kegiatan penghidupan yang mulia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (tidak merendahkan martabat dirinya, tidak melanggar hukum atau melakukan tindak pidana kriminal, tidak mengganggu kesehatan dirinya maupun orang lain); (ii) Tempat menjalankan penghidupan yang mulia (tidak menjalankan usahanya pada tempat-tempat yang mengganggu atau menzalimi atau merugikan hak orang lain; dan (iii) Sistem kerja yang mulia (tidak mengeksploitasi anak-anak dan perempuan, memberi atau mendapat imbalan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak merusak dan mencemari alam maupun warisan budaya).

3. Misi

Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang strategis dan berpengaruh, serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. Memajukan daerah;
c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d. Menyelesaikan persoalan daerah;
e. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan
f. Provinsi dengan nasional; dan
g. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Oleh karena itu, perwujudan visi tersebut dapat dirumuskan dalam dua misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut.

a. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang tertuang dalam rumusan Panca Mulia 1, 2, dan 3. Pemda DIY, segenap pemangku kepentingan, dan masyarakat melalui Misi pertama ini akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan sekurang-kurangnya dari aspek:

1) Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan dan akses infrastruktur dasar;
2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;
3) Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk di dalamnya upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan ketimpangan antar wilayah;
4) Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya, dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh warga.

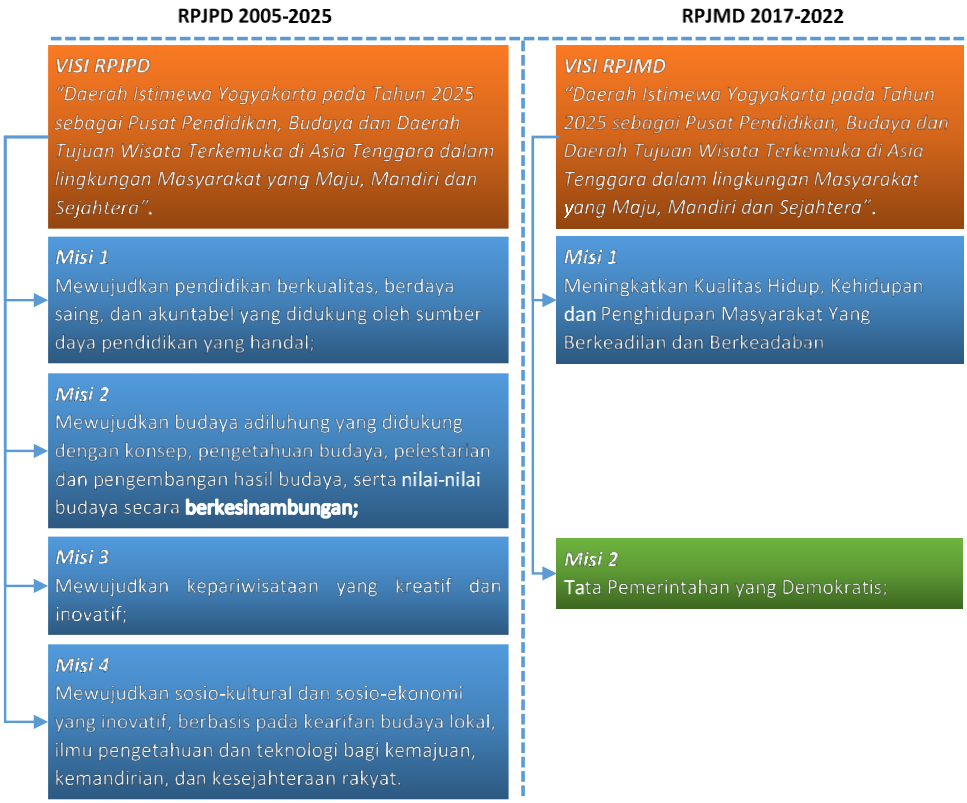
b. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termuat pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua akan mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang demokratis dan mewujudkan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas. Upaya mewujudkan misi kedua ini sekurangnya melalui:

1) Semangat “Perjumpaan” dan “Silang Birokrasi” sebagai strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horizontal antar SKPD).
2) Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: Etos, Etika, dan Kualitas. Dalam konteks Trilogi SDM-DIY, Etos, Etika, dan Kualitas merupakan satu kesatuan yang utuh dan dapat dijabarkan sebagai berikut.
    a) **Etos,** menyandang pesan perubahan persepsi dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban" yang mengandung arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban" yang memberikan kontribusi pada perkembangan peradaban di DIY seperti sekarang ini;
    b) **Etika**, menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia" dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan.
    c) **Kualitas**, menyandang pesan adanya pergeseran paradigma bahwa karya birokrasi tidak hanya dilihat sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi DIY dalam Lima Tahun ke depan.

Misi kedua pada hakikatnya adalah penguatan secara menyeluruh kelembagaan Pemda mulai dari kualitas individu, institusi hingga perbaikan pola kerja menjadi sebuah karya yang berkualitas tinggi yang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaanya, Misi kedua menjadi sebuah "*initial condition*" untuk terwujudnya Misi pertama yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban".



Gambar 1.1. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD
Sumber: RPJMD DIY 2017-2022 (data diolah)

4. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan misi selama kurun waktu lima tahun dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan DIY tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1. Tujuan Pembangunan DIY Tahun 2017-2022

Misi	Tujuan
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Dengan Tatanan Sosial Yang Menjamin Menjamin Ke-*Bhinneka-Tunggal-Ika*-an Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Mampu Menjaga dan Mengembangkan Budaya Yogyakarta
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	*Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)*

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

5. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dalam rangka mengarahkan tujuan pembangunan agar lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran pembangunan DIY selama kurun waktu 2017-2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2. Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2017-2022

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. Meningkatnya derajat kualitas SDM	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		2. Meningkatnya Derajat ekonomi masyarakat.	a. Indeks Gini b. Persentase Angka Kemiskinan
		3. Terpelihara dan Berkembang nya Kebudayaan	a. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi
		4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	a. Pertumbuhan Ekonomi b. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) c. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang d. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
		5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	a. Indeks Williamson
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)	1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	a. Opini BPK b. Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)
		2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	a. Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
		3. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa	a. Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2017-2022

Strategi, arah kebijakan, dan perwujudan atas program RPJMD DIY 2017-2022 untuk mencapai sasaran yang ada adalah sebagai berikut.

1. Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, dijabarkan sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

MISI 1

Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Tujuan	Sasaran:	Strategi:
Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an dalam kerangka	1. Meningkatnya derajat Kualitas SDM	1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan. 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Tujuan	Sasaran:	Strategi:
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. 2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. 3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.
	3. Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	1. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender. 2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk. 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 4. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum.
	4. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1. Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan)kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.
	5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	1. Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh. 3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 4. Pengurangan risiko bencana. 5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta.
	6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru. 2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

MISI ***2***

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis

Tujuan	Sasaran:	Strategi:
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)	1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif. 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah.

Tujuan	Sasaran:	Strategi:
		3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.
	2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, sampai dengan Desa. 2. Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa.
	3. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	1. Peningkatan kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Desa. 2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten.

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan di bawah ini.

MISI 1

Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:
1. Meningkatnya derajat kualitas SDM	1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan	1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. 2. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan. 3. Peningkatan layanan pendidikan di DIY 4. Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. 5. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). 6. Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan). 7. Peningkatan pelayanan medis, rehab medis, rehab social, dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa. 8. Peningkatan aksesibiltias dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:
2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. 2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. 3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.	1. Penumbuhan wirausaha baru yang mandiri. 2. Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat. 3. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin. 4. Peningkatan penduduk berakses air bersih layak. 5. Peningkatan penduduk berakses energi. 6. Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah. 7. Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin. 8. Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, serta pengawasan dan hubungan industrial.
3. Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	1. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender 2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 4. Pengembangan Keterlindungan Warga, Keamanan, dan Ketertiban Umum	1. Perencanaan dan penganggaran responsif gender. 2. Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 4. Peningkatan ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hokum. 5. Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana.
4. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan	1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan takbenda. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaanfasilitas kebudayaan. 3. Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa, dan Kelurahan Budaya.
5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	1. Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju,	1. Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. 2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (PLP2B).

Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:
	maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh 3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan 4. Pengurangan risiko bencana 5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta	3. Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 4. Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja. 5. Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian. 6. Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya, dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. 7. Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata. 8. Memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah. 9. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 10. Pengurangan risiko bencana secara komprehensif. 11. Menyediakan regulasi yang memperkuat kerjasama antara Pemda dengan badan usaha/swasta. 12. Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya. 13. Melakukan *capacity building* terkait pembiayaan non APBD dengan intensif.
6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru 2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	1. Pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA). 2. Pengembangan Kawasan Selatan sebagai pusat pertumbuhan. 3. Pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya. 4. Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi.

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

Adapun arah kebijakan terkait dengan Misi ke dua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis yang telah disesuaikan dengan sasaran dan strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut.

MISI 2

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis

Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:
1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah. 2. Menyusun regulasi pengelolan keuangan 3. Membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi. 4. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset deaerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga.
2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan Desa 2. Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa	1. Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Desa. 2. Internalisasi budaya pemerintahan pada Pemda dan Kabupaten/Kota.
3. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	1. Peningkatan kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Desa 2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	1. Melakukan fasilitasi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa. 2. Melakukan fasilitasi pelindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa.

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

3. Program

Berdasarkan arah kebijakan dan keselarasan dengan program strategis nasional, selanjutnya dijabarkan ke dalam Program Pemda sebagai program yang menaungi program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan sehingga dapat menggambarkan keterkaitan antara program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Program Pemda yang terdapat dalam misi pertama "Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban" dengan lima sasaran pembangunan dijabarkan sebagai berikut.

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*impact/outcome)*	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
MISI Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban		
SASARAN Meningkatnya derajat kualitas SDM		
PROGRAM Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); 2. Harapan Lama Sekolah 3. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif 4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
PROGRAM Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
PROGRAM Program Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas 2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif 3. *Total Fertility Rate* 4. Perkembangan Desa/Kelurahan Kategori Cepat Berkembang 5. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*)	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
SASARAN Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.		
PROGRAM Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru 2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n) 3. Pengeluaran per kapita masyarakat	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan		
PROGRAM Program Pelestarian Budaya Benda dan Takbenda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan 2. Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
SASARAN Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/*impact/outcome)*	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY 2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3. Jumlah Desa Mandiri Budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, Desa Preneur, Desa Prima): Target 2022: 1 Desa Mandiri Budaya	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
PROGRAM Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4. Indeks Risiko Bencana	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwjudan struktur dan pola ruang	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
SASARAN Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah		
PROGRAM Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi kedua "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis", yang didalamnya terdapat tiga sasaran pembangunan adalah sebagai berikut.

Misi/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/outcome)*	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
MISI Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis		
SASARAN Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan		
PROGRAM Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Kemapanan keuangan daerah. 2. Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp) 3. Nilai eksternal pelayanan publik 4. Nilai internal integritas organisasi 5. Nilai eksternal persepsi korupsi	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan		
PROGRAM Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan.	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan

Misi/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/outcome)*	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	
SASARAN Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa		
PROGRAM Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	1. Persentase tertib administrasi tanah kasultanan,kadipaten, dan tanah desa. 2. Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

4. Indikator

Indikator sasaran dan Indikator kinerja Program Pemda tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, sebagai target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut.

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2020 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
MISI Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban				
SASARAN Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM	78,38	81,08	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,80	70,12	
PROGRAM Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).	N/A	12,10	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Harapan Lama Sekolah.	15,23	15,82	
	3. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif.	N/A	210	
	4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	N/A	7,47	
PROGRAM Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	74,71	75,32	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2020 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM Program Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	N/A	4	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	N/A	21,17	
	3. Total *Fertility Rate*	N/A	2,1	
	4. Perkembangan Desa/Kelurahan Kategori Cepat Berkembang	24	48	
	5. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*)	N/A	9,60	
SASARAN Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini	0,4400	0,3776	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Persentase Angka Kemiskinan	12,36	9,11	
PROGRAM Program penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan Penumbuhan wirausaha baru	0,2	0,3	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	466.330	343.101	
	3. Pengeluaran per kapita masyarakat	13.229	14.073	
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi	10,98	11,72	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pelestarian budaya benda dan takbenda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	10,23	13,20	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
	2. Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	N/A	15,05	
SASARAN Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,21	5,29	Gubernur dan Wakil Gubernur
	IKLH(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	56,65	62,44	
	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75	79,5	
	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	11,11	40,69	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2020 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	42,32	44	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,72	2,42	
	3. Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022: 1 Desa mandiri budaya	N/A	10	
PROGRAM Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kualitas Air	29,17	38,60	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Indeks kualitas Udara	86,39	88,40	
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,84	60,86	
	4. Indeks Risiko Bencana	165 (tinggi)	145 (tinggi)	
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan Program Peman-faatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwjudan struktur dna pola ruang	N/A	76,7	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
SASARAN Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson	0,4662	0,4524	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, dan Bantul)	40,15	40,24	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	N/A	72	
MISI **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis**				
SASARAN Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	N/A	WTP	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	N/A	A	
PROGRAM	1. Kemampan Keuangan Daerah.	Sedang	Sedang	- Sekretaris Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2020 Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	2. Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp)	N/A	8.865 .696.693	- Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
	3. Nilai eksternal pelayanan public	N/A	8,70	
	4. Nilai internal integritas organisasi	4,16	4,40	
	5. Nilai eksternal persepsi korupsi	5,21	5,80	
SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan	N/A	73,91	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan.	100	-	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
	2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	N/A	50	
SASARAN Meningkatnya Fasi-litasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5369	13.419	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan,kadipaten, dan tanah desa.	19,83	N/A	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
	Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	N/A	59,45	

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

E. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Penyusunan tema pembangunan daerah tahun 2020 memedomani tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun perencanaan dimaksud. Mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan di dalam RPJPD DIY 2005-2025 dan tema indikatif pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta arah kebijakan umum pembangunan sebagai referensi tema indikatif. Memperhatikan internalisasi paradigma Abad Samudera Hindia dalam Visi Misi Gubernur DIY, aspek keistimewaan, memedomani

RKP 2020 beserta tema pembangunan nasional yang termuat, memperhatikan fokus tematik, serta identifikasi permasalahan pembangunan. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya sinergitas perencanaan pembangunan tahun 2020 di DIY. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, RKPD DIY Tahun 2020 mengusung Tema sebagai berikut.

"Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut.

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan Pembangunan Infrastruktur diharapkan menjadi pendorong pengurangan ketimpangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Selain itu, fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY mendorong perhatian dan fokus pembangunan diarahkan di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta yang selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia." Fokus pembangunan tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya." Prioritas penyelesaian infrastruktur antara lain: 1.) Pembangunan *Yogyakarta International Airport* (YIA); 2.) Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS); 3.) *Jogja Agro Techno Park* (JATP); dan 3.) Infrastruktur pendukung terkait.

Percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya terkait dengan sarana prasarana tetapi menyangkut juga aspek non sarana prasarana fisik. Kata kunci tema ini diharapkan dapat berkontribusi dalam rangka pencapaian target sasaran "Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan" yang akan diukur dengan indikator:

a. Pertumbuhan Ekonomi;
b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
c. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan;
d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan kata kunci tema tersebut dirumuskan prioritas pembangunan *Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan* yang sinergis dengan prioritas RKP/ nasional dalam rangka *Pemantapan ketahanan pangan, air, energi, dan pelestarian lingkungan hidup,* dan prioritas *Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja.*

2. Peningkatan SDM

Pada tahun 2019, perekonomian DIY tumbuh sebesar 6,60 persen namun belum optimal mengurangi ketimpangan antar kelompok pendapatan dan angka kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi DIY belum dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara merata. Indeks gini masih mencapai 0,428 dan Angka Kemiskinan 11,44%. Namun demikian, capaian IPM DIY sebesar 79,99 melampaui angka rata-rata nasional meskipun capaian IPM antar Kabupaten/Kota masih menunjukkan adanya ketimpangan.

Kondisi tersebut memerlukan terobosan baru agar pembangungan daerah tidak hanya tumbuh, namun juga memperhatikan dimensi pemerataan dan peningkatan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sesuai misi ke-1 RPJMD DIY 2017-2022.

Kata kunci Peningkatan SDM sekurangnya dapat mendukung pencapaian 3 Sasaran RPJMD DIY pada tahun 2020, yaitu:

a. *Meningkatnya Derajat kualitas SDM dengan indikator sasaran:*
   1) IPM
   2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
b. *Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan indikator sasaran:*
   1) Indeks Gini
   2) Angka Kemiskinan
c. *Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan* dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi.

Rumusan kata kunci dan penjelasannya dirumuskan dalam prioritas *Pembangunan Manusia dan Pengentasan* Kemiskinan *Berkelanjutan* yang sinergis dengan prioritas nasional *Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan*.

3. Pertumbuhan Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi di DIY tahun 2019 yang cukup tinggi belum terdistribusi secara merata di semua wilayah. Capaian Indeks Williamson yang mencapai 0,4469

sudah lebih baik dari target RPJMD sebesar 0,4552. Jika dilihat menggunakan Tipologi Klassen, tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY tahun 2014-2018 masih besar dimana Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masuk sebagai daerah maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul tercatat sebagai daerah berkembang cepat, sedangkan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tertinggal. Data ini diperkuat dengan hasil persebaran kabupaten/kota di DIY menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masuk kategori *low growth - pro poor* (kuadran II), Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masuk kategori *high growth-less pro poor* (kuadran IV), sementara Kabupaten Kulon Progo masuk kategori *low growth - less pro poor* (kuadran I). Ketimpangan ekonomi antar daerah merupakan masalah yang cukup sulit di atasi karena merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Ketimpangan distribusi pendapatan di DIY masih tinggi. Hal ini terlihat dari 80 persen penduduk berpendapatan menengah ke bawah yang hanya memperoleh 51,12 persen dari total distribusi pendapatan dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi memperoleh 48,88 persen dari total distribusi pendapatan. Terkait dengan permasalahan tersebut, perlu dirumuskan program pembangunan yang mampu menggerakkan skala ekonomi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo untuk mengurangi jurang ketimpangan ekonomi dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain:

a. Perluasan sektor penggerak pertumbuhan dan area pembangunan mengarah ke wilayah yang relatif tertinggal, prioritas utamanya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.
b. Membuat kebijakan yang mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan.
c. Meningkatkan kebutuhan investasi di kabupaten/kota secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah.

Pertumbuhan berkualitas juga diharapkan memperhatikan kelestarian lingkungan dan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang dalam upaya pencapaiannya. Pertumbuhan berkualitas tersebut diharapkan dapat memenuhi capaian Sasaran RPJMD DIY yaitu “Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson”. Pemenuhan sasaran tersebut diarahkan melalui strategi (1) penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru; dan (2) meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan kata kunci/strategi tersebut, dirumuskan prioritas *Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah* yang sinergis dengan prioritas RKP/nasional.

Ketiga pernyataan kunci tema tersebut masing-masing memiliki keterkaitan dengan prioritas daerah dan sasaran pembangunan DIY tahun 2020 serta diselaraskan dengan tema dan prioritas nasional. Untuk mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan SDM, dan Pertumbuhan Berkualitas perlu didukung Sasaran-Sasaran Misi ke-2 RPJMD DIY 2017-2022 "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis" sebagai Pendukung Prioritas, yaitu:

a. Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan;
b. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan; dan
c. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa.

Penentuan prioritas pembangunan DIY menggunakan pendekatan arahan tematik adalah sebagai berikut.

a. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan
b. Penurunan Ketimpangan Wilayah
c. Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)
d. Pembiayaan Pembangunan

Implementasi pendekatan tematik pada tahun 2020 disusun menggunakan kriteria:

a. Berpedoman pada sasaran Pemda, sasaran perangkat daerah, dan program perangkat daerah yang tertuang dalam RPJMD DIY.
b. Fokus pendekatan tematik sampai dengan level output kegiatan sehingga memungkinkan satu kegiatan perangkat daerah dapat menunjang lebih dari satu output tematik.
c. Fokus pendekatan tematik disosialisasikan dan dilakukan penyelarasan kewilayahan dengan kabupaten/kota melalui Forum Kewilayahan dan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah (Trilateral Sektoral-Kewilayahan) dalam rangkaian Musrenbang RKPD DIY 2020.

Pendekatan tematik pembangunan DIY tahun 2020 memiliki interkoneksi dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, sehingga menjadi bagian integral dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2020. Adapun interkoneksi Prioritas Nasional Tahun 2020 dan tematik pembangunan DIY adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3. Interkoneksi Prioritas Nasional dan Tematik Pembangunan DIY

No	Prioritas Nasional	Tematik Pembangunan DIY	Program Pemda
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	a. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	a. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

No	Prioritas Nasional	Tematik Pembangunan DIY	Program Pemda
		b. Penurunan Ketimpangan Wilayah c. Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)	b. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup c. Program Pembangunan Sosial Masyarakat d. Program Penanggulangan Kemiskinan e. Program Pelestarian Budaya Benda dan Takbenda
2	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan	a. Penurunan Ketimpangan Wilayah b. Dukungan Pembangunan *Yogyakarta International Airport* (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)	a. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan
3	Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup.	a. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan b. Penurunan Ketimpangan Wilayah c. Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)	a. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana b. Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang
4	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja	a. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan b. Penurunan Ketimpangan Wilayah c. Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)	a. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	a. Penurunan Ketimpangan Wilayah b. Pembiayaan Pembangunan	a. Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah b. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah c. Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

Sumber: RKPD DIY, 2020

F. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi

Ditinjau secara astronomis, DIY berada di antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Kemudian secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa bagian selatan, serta berbatasan dan dikelilingi oleh beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah utara, DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali. Lalu di sebelah barat DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. DIY berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah timur, DIY berbatasan dengan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri. Luas seluruh wilayah DIY adalah 3.133,15 km^2 atau 0,16% dari total luas Indonesia (1.916.906,77 km^2). DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Tingkatan pemerintahan dari atas ke bawah di DIY secara administratif terdiri atas 5 kabupaten/kota, 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Sedangkan jumlah pedukuhan di DIY adalah 4.508 dengan 7.102 RW dan 26.896 RT.

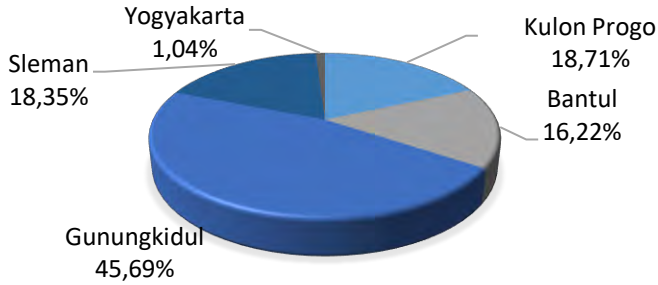
Tabel 1.4. Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Dukuh	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.884	4.462
Bantul	Bantul	17	75	934	-	5.681
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.432	1.671	6.864
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.933	7.364
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	614	2.525
DIY		**78**	**438**	**4.508**	**7.102**	**26.896**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

b. Luas Wilayah

Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah sebesar 45,69% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,04% dari luas DIY. Gambar berikut ini menyajikan proporsi luas masing-masing wilayah kabupaten/kota di DIY.



Gambar 1.2. Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

c. Topografi

Bentang alam DIY secara topografi dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut.

1) Kemiringan Lahan

Ada 4 kelompok/kategori kemiringan lahan di DIY, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km^2, lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km^2, lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km^2, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km^2.

2) Ketinggian Lahan

Menurut ketinggian lahan, wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori yaitu wilayah yang memiliki ketinggian lahan kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl) sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian lahan 100-499 mdpl sebesar 65,65%, wilayah dengan ketinggian lahan 500-999 mdpl sebesar 5,04%, dan wilayah dengan ketinggian lahan di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%.

3) Satuan Fisiografis

Wilayah DIY terdiri dari berbagai ekosistem yang memiliki potensi sumber daya alam, yaitu gunung api, karst, dataran alluvial, dan Samudra Hindia. Berdasarkan penampang topografis yang dimilikinya dan menurut satuan fisiografis, wilayah DIY terbagi menjadi:

a) Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150-700 m, dan terletak di Kabupaten Gunungkidul yang merupakan suatu wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu mengalami kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang

alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping dan memiliki karakteristik lapisan tanah yang dangkal serta vegetasi penutup yang relatif jarang.

b) Satuan gunung berapi Merapi seluas ± 582,81 km² dengan ketinggian 80-2.911 m dan terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung sekaligus kawasan resapan air.

c) Daerah dataran rendah terletak di antara pegunungan selatan dan pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km² dengan ketinggian 0-80 m yang berupa bentang alam fluvial dan didominasi oleh dataran alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul dan berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini termasuk wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang luas dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, daerah pantai ini terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir.

d) Pegunungan Kulon Progo dan dataran rendah di bagian selatan seluas ± 706,25 km² dengan ketinggian 0-572 m dan terletak di Kabupaten Kulon Progo. Daerah bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng curam dan potensi air tanah yang kecil.

2. Gambaran Umum Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2020 tercatat sebanyak 3.668.719 jiwa. *Sex ratio* penduduk selalu di atas 97% selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan proporsi jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2020, *sex ratio* DIY sebesar 98,22.

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kab/Kota di DIY (Jiwa) Tahun 2015-2020

Kelamin	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki	1.818.765	1.839.951	1.860.900	1.887.294	1.901.763	1.817.927
Perempuan	1.860.411	1.880.961	1.901.300	1.930.972	1.941.169	1.850.792
Jumlah	**3.679.176**	**3.720.912**	**3.762.200**	**3.818.266**	**3.842.932**	**3.668.719**

Kelamin	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sex Ratio	97,76	97,82	97,88	97,73	97,97	98.22

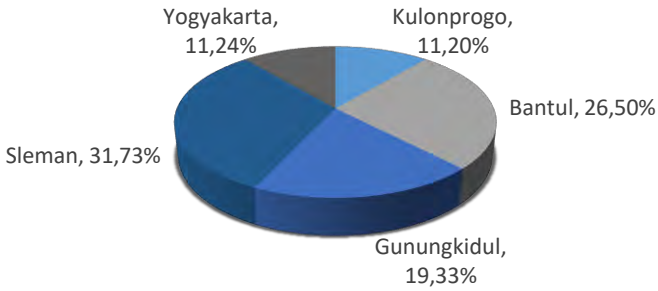
Sumber: BPS Provinsi DIY, Sensus Penduduk 2020

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sejak 2010 hingga 2020, laju pertumbuhan penduduk di wilayah DIY sebesar 0,58 persen per tahun. Angka tersebut menunjukkan penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,46 poin persen jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang tercatat sebesar 1,04 persen. Pertumbuhan periode 2010-2020 ini diketahui hampir sama dengan periode 1980 - 1990.



Gambar 1.3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Tahun 1961-2020 (dalam %)
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

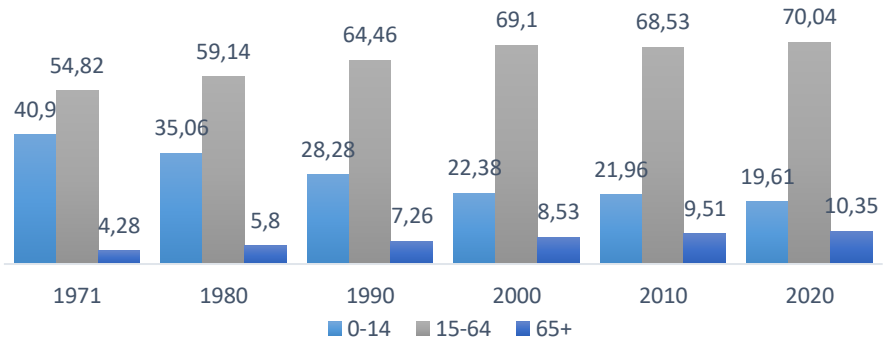
Persebaran penduduk antar wilayah di DIY sampai dengan tahun 2020 masih belum merata. Kabupaten Sleman menjadi wilayah berpenduduk terbanyak yaitu sejumlah 1.219.640 jiwa atau 31,73% dari total penduduk DIY. Diikuti oleh Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk 1.018.402 jiwa atau sekitar 26,50% dari total jumlah penduduk DIY. Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Kulon Progo yaitu sejumlah 430.220 jiwa (11,20%).



Gambar 1.4. Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota (Persen)
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (data diolah)

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) di DIY terus menunjukkan kecenderungan meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971, proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 54,8 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,04 persen di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa DIY masih berada dalam masa bonus demografi dengan persentase penduduk usia produktif lebih dari 60 persen. Pada periode yang sama, persentase penduduk berusia lebih dari 65 tahun juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Sementara itu, proporsi penduduk berusia 0-14 tahun justru menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun.

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY berusia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun sekitar 16,76% dari seluruh penduduk dan usia 20-34 tahun sekitar 15,55%. Kondisi sumber daya manusia tersebut mengindikasikan potensi sumber daya manusia yang produktif yang besar dan merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY. Lebih lanjut mengenai komposisi penduduk DIY menurut kelompok umur dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 1.5. Komposisi Penduduk D.I. Yogyakarta Menurut Kelompok Umur, 1971-2020
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Kepadatan penduduk DIY pada tahun 2020 adalah 1.171 jiwa/km^2. Kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 1.206 jiwa/km^2. Hingga tahun 2020, Kota Yogyakarta masih menjadi wilayah terpadat di DIY kendati jumlah penduduknya menduduki posisi paling sedikit kedua selama dua tahun terakhir. Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta yang sempat mengalami peningkatan dari 13.163 jiwa/km^2 pada tahun 2018 menjadi 13.290 jiwa/km^2 pada tahun 2019, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 11.710 jiwa/km^2. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah

Kabupaten Gunungkidul. Meskipun demikian, kepadatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul terus mengalami peningkatan kepadatan dari 498 jiwa/km^2 tahun 2018, naik menjadi 500 jiwa/km^2 di tahun 2019 dan menjadi 522 jiwa/km^2 di tahun 2020.

b. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Pertambahan penduduk alami hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi), dan migrasi keluar (emigrasi). Berdasarkan kriteria tersebut, laju pertumbuhan penduduk DIY pada tahun 2020 relatif terus menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaiman tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016-2020

Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Kulon Progo	1,09%	1,11%	1,06%	1,05%	0,99%*
Kabupaten Bantul	1,24%	1,19%	1,15%	1,16%	1,14%*
Kabupaten Gunungkidul	1,01%	0,95%	0,94%	0,89%	0,88%*
Kabupaten Sleman	1,11%	1,10%	1,11%	1,07%	1,06%*
Kota Yogyakarta	1,22%	1,19%	1,13%	1,04%	0,93%*
DIY	**1,13%**	**1,11%**	**1,08%**	**1,15%**	**1,02%***

*Keterangan: *) Angka Proyeksi* *Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020*

Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Jumlah penduduk laki-laki di DIY hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 1,82 juta orang atau 49,55% dari penduduk DIY. Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,85 juta orang atau 50,45% dari penduduk DIY. Berdasarkan angka tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk DIY tercatat sebesar 98,27. Rasio jenis kelamin tersebut bervariasi menurut kelompok umur. Rasio jenis kelamin saat lahir mencerminkan pola dimana proporsi penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pada kelompok usia 30-34 tahun, proporsi penduduk laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Selanjutnya, mulai kelompok umur 50 tahun ke atas, proporsi penduduk laki-laki kembali mengalami penurunan yang disebabkan oleh harapan hidup penduduk laki-laki yang lebih pendek dibandingkan penduduk perempuan.

c. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan Penduduk Usia Kerja (PUK) yang terus-menerus. Peningkatan PUK dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk serta tingkat harapan hidup yang tinggi di DIY. Sementara untuk angkatan kerja dan penduduk bekerja yang sebelumnya selalu meningkat pada tahun 2020, mengalami penurunan akibat dampak Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang mulai dirasakan DIY pada awal tahun 2020 berdampak secara langsung terhadap sektor ketenagakerjaan. Jumlah penduduk bekerja dan angkatan kerja menurun, sedangkan jumlah pengangguran dan jumlah bukan angkatan kerja khususnya mengurus rumah tangga mengalami peningkatan. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) fluktuatif sehingga secara langsung mempengaruhi jumlah penganggur terbuka dan jumlah bukan angkatan kerja. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya. Kondisi ketenagakerjaan di DIY dalam kurun waktu lima tahun digambarkan pada tabel berikut.

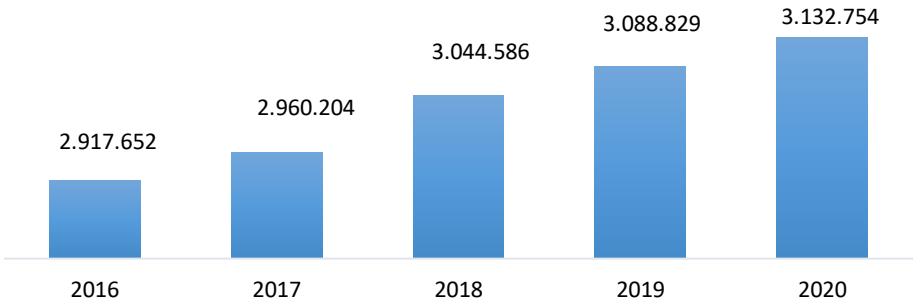
Tabel 1.7. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2016-2020

Kegiatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan kerja	**2,099,436**	**2,117,187**	**2,226,284**	**2,246,194**	**2,228,162**
Bekerja	2,042,400	2,053,168	2,151,252	2,174,712	2,126,316
Penganggur	57,036	64,019	75,032	71,482	101,846
Bukan angkatan kerja	**818,216**	**843,017**	**818,302**	**842,635**	**904,592**
Sekolah	273,286	266,870	259,491	278,350	277,808
Mengurus rumah tangga	430,895	472,108	461,036	463,355	526,850
Lainnya	114,035	104,039	97,775	100,930	99,934
Penduduk usia kerja	**2,917,652**	**2,960,204**	**3,044,586**	**3,088,829**	**3,132,754**
TPAK (%)	**71.96**	**71.52**	**73.12**	**72.72**	**71.12**
TPT (%)	**2.72**	**3.02**	**3.37**	**3.18**	**4.57**
TKK (%)	**97.28**	**96.98**	**96.63**	**96.82**	**95.43**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

1) Penduduk Usia Kerja

Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja yang merupakan dua komponen penyusun Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah PUK selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertambahan 50 ribu orang pertahun sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.

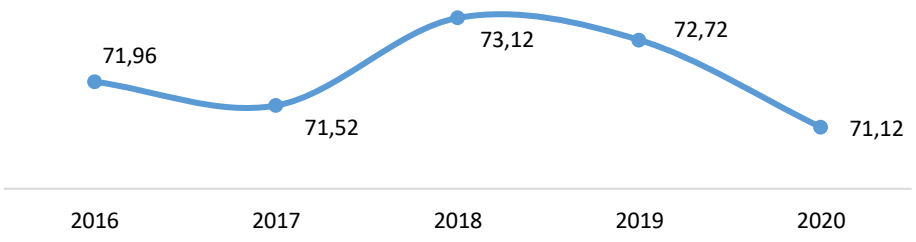


Gambar 1.6. Penduduk Usia Kerja Tahun 2016 -2020 (orang)
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Kualitas PUK di DIY dalam kurun waktu 2016-2020 dari segi pendidikan semakin meningkat. Jumlah PUK dengan pendidikan SLTA setiap tahun rata-rata meningkat 36 ribu orang dan pada tahun 2020 menjadi 1.200.705 orang. PUK dengan tingkat pendidikan diploma ke atas rata-rata bertambah 30 ribu orang. Pada bulan Agustus tahun 2020 tercatat sebanyak 505.672 orang. Kualitas PUK merupakan daya dukung utama dalam pembangunan ketenagakerjaan DIY.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK di DIY selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. TPAK tertinggi dicapai pada tahun 2018 yaitu 73,12% dan selanjutnya mengalami penurunan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, TPAK di DIY menurun 0.40% dan pada tahun 2020 kembali menurun 1.60% menjadi 71.12%. Penurunan TPAK di DIY pada tahun 2020 dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja yang beralih menjadi bukan angkatan kerja karena dampak Pandemi Covid-19, sebagaimana tampak pada gambar berikut.

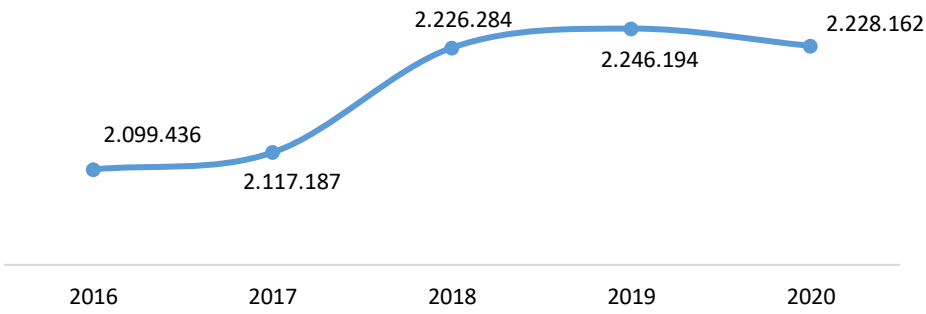


Gambar 1.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Saat ini pasar kerja lebih membutuhkan pencari kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini tergambar dari TPAK menurut pendidikan yang angkanya cenderung semakin tinggi. Sementara itu berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki mencapai 78,20% sedangkan TPAK perempuan 64,33%. Meskipun lebih rendah, namun TPAK perempuan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Namun dengan ketrampilan yang dimiliki, semakin banyak perempuan bergeser dari mengurus rumah tangga masuk ke kelompok angkatan kerja.

3) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja periode tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan rata-rata 69 ribu orang. Namun pada tahun 2020 angkatan kerja di DIY mengalami penurunan 18 ribu orang atau 0,8% menjadi 2,228 juta orang. Penurunan angkatan kerja ini disebabkan oleh peralihan angkatan kerja ke bukan angkatan kerja, yaitu menjadi pengurus rumah tangga akibat dampak Pandemi Covid-19 yang mencapai 64 ribu orang. Gambar berikut menunjukkan keadaan angkatan kerja di DIY selama tahun 2016-2020.

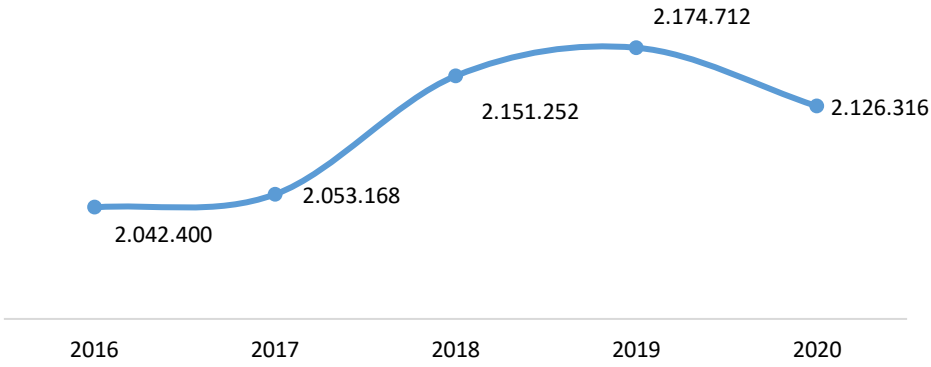


Gambar 1.8. Angkatan Kerja Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Kualitas angkatan kerja di DIY mengalami kecenderungan membaik. Selama kurun waktu 2016-2020 angkatan kerja dengan tingkat pendidikan sampai dengan tamat SD cenderung mengalami penurunan dan pada tahun 2020 menjadi 572.626 orang. Angkatan kerja di DIY masih didominasi dengan tingkat pendidikan menengah atas baik umum maupun kejuruan dengan jumlah 884.482 orang.

4) Penduduk yang Bekerja

Penciptaan lapangan kerja baru baik sektor formal maupun informal harus selalu dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Upaya ini menyebabkan penduduk bekerja mengalami peningkatan tiap tahun dengan rata-rata pertambahan 70 ribu orang pertahun selama kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2020, dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penduduk bekerja mencapai 48 ribu orang atau 2,23% dari tahun sebelumnya. Lebih lanjut disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.9. Penduduk yang Bekerja Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa berdasarkan sektor lapangan usaha, penurunan penduduk bekerja dengan persentase cukup tinggi terdapat pada sektor akomodasi makan & minum, jasa pendidikan, konstruksi, transportasi & pergudangan serta jasa perusahaan. Sementara itu, peningkatan pada sektor perdagangan dan pertanian tidak lepas dari adanya musim penghujan yang lama serta peralihan dari sektor formal ke sektor perdagangan. Komposisi jumlah penduduk bekerja pada tahun 2020 menurut sektor lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak di DIY yaitu pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan pada tahun 2020 sebesar 21,02%. Sementara itu, jumlah penduduk yang berkerja di sektor pertanian dan industri pengolahan masing-masing sebesar 20,17% dan 17,03%.

Menurut status pekerjaan, penduduk bekerja di DIY pada sektor formal meskipun angkanya lebih rendah dari sektor informal selama periode 2017-2019, mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 48,36%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup tinggi menjadi 42,59%, sedangkan sektor informal bertambah menjadi 57,41%. Hal ini merupakan dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sektor formal yang didominasi dengan status buruh/karyawan/pegawai banyak beralih ke sektor informal karena adanya efisiensi perusahaan.

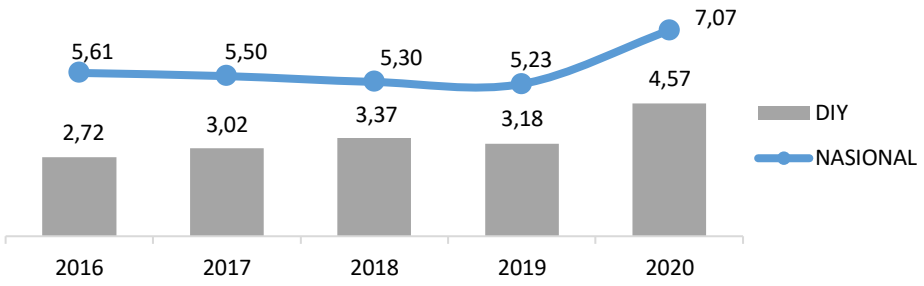
5) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka di DIY sebagian besar berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi (SMA/SMK, Diploma 3, dan Sarjana), namun belum mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Kondisi ini perlu dijembatani untuk menghubungkan dunia industri/usaha dengan dunia pendidikan. *Link & match* berbasis *market driven* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan perlu segera dilakukan.



Gambar 1.10. Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Pada tahun 2020, penganggur berpendidikan SMA dan SMK masih mendominasi yaitu mencapai 53,48%, diikuti penganggur berpendidikan tinggi (diploma & universitas) di posisi ke dua sebesar 24,55%, dan penganggur berpendidikan SMP ke bawah di posisi ke tiga dengan 21,96%. Tingginya penganggur berpendidikan SMA dan SMK disebabkan karena jumlah lulusan yang semakin banyak serta berada pada masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mencari dan memilih pekerjaan.



Gambar 1.11. TPT Nasional dan DIY Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa secara umum TPT DIY masih berada di bawah TPT Nasional. TPT DIY tahun 2016 sebesar 2,72%, sedangkan TPT nasional tercatat sebesar 5,61%,. Pada tahun 2020, meskipun TPT DIY mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,57%, namun angka tersebut masih berada di bawah TPT nasional yang diketahui sebesar 7,07%. Meskipun TPT di DIY relatif lebih rendah dibanding TPT nasional, namun perlu diupayakan agar tidak cenderung mengalami peningkatan.

d. Pendidikan

Dari total penduduk DIY pada tahun 2020, sebanyak 17,35% penduduk masih berada pada usia sekolah (7-18 tahun). Sebanyak 93,33% dari penduduk pada usia 7-18 tahun tersebut tercatat sebagai peserta didik aktif pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun khusus. Berikut adalah rincian jumlah penduduk usia sekolah tahun 2020 dan persebarannya di DIY.

Tabel 1.8. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Seluruhnya	Penduduk Menurut Usia Sekolah								
			7 - 12			13 - 15			16 - 18		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo	443	19	18	38	9	9	18	9	9	18
		.003	.720	.334	.054	.519	.070	.589	.669	.229	.898
2	Bantul	954	44	41	86	21	20	41	20	19	39
		.706	.690	.907	.597	.507	.187	.694	.614	.232	.846
3	Gunungkidul	774	32	29	61	15	14	30	15	14	30
		.609	.106	.776	.882	.767	.645	.412	.655	.898	.553
4	Sleman	1.082	51	48	99	24	23	48	23	22	46
		.754	.113	.569	.682	.974	.572	.546	.988	.714	.702
5	Yogyakarta	416	18	18	36	9	9	19	9	9	19
		.117	.638	.012	.650	.802	.343	.145	.919	.591	.510

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Seluruhnya	Penduduk Menurut Usia Sekolah								
			7 - 12			13 - 15			16 - 18		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
	DIY	**3.671.189**	**166.267**	**156.598**	**322.865**	**81.569**	**76.817**	**158.386**	**79.845**	**75.664**	**155.509**

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2021 (data diolah)

Pembangunan pendidikan di DIY dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1) Keberadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Ketersediaan lembaga pendidikan yang memadai diperlukan untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas. Berikut adalah tabel rincian jumlah lembaga pendidikan formal di DIY sampai dengan tahun 2020.

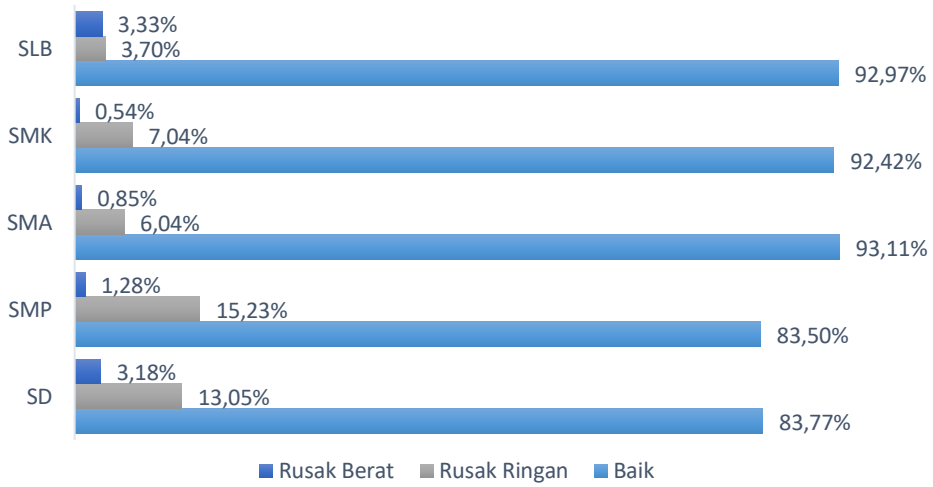
Tabel 1.9. Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di DIY Tahun 2017-2020

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Lembaga			
		2017	2018	2019	2020
1	SD/ MI	2.014	2.028	2.029	2.027
2	SMP/ MTs	540	549	550	550
3	SMA/ MA	216	216	217	220
4	SMK	218	218	218	217
5	SLB	79	79	79	79

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

Pada tabel di atas tampak bahwa selama kurun waktu 2017-2019 untuk satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs terjadi peningkatan jumlah lembaga pendidikan, sedangkan jumlah lembaga jenjang pendidikan menengah cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penurunan ini disebabkan adanya penggabungan beberapa sekolah sebagai bentuk kebijakan di kabupaten/kota. Pada satuan pendidikan SMK dan SLB, jumlah lembaga pendidikan cenderung tetap selama tahun 2017-2020, sedangkan untuk satuan pendidikan SMA terdapat penambahan sekolah baru di tahun 2020.

Tersedianya lembaga pendidikan perlu didukung dengan kondisi fasilitas yang mendukung kelancaran proses belajar. Berikut adalah data kondisi fasilitas sekolah di DIY pada tahun 2020. Secara umum fasilitas pendidikan di DIY berada dalam kondisi baik dan hanya memerlukan pemeliharaan rutin yang dapat dilakukan sekolah dengan dukungan operasional dari daerah maupun pusat.



Gambar 1.12. Kondisi Fasilitas Sekolah di DIY

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

2) Ketersediaan Tenaga Pendidik di Sekolah

Guru merupakan penggerak dalam proses pembelajaran di sekolah. Jumlah guru jenjang pendidikan formal di DIY secara umum mengalami penurunan pada tahun 2020 disebabkan banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas. Rincian jumlah guru di DIY tahun 2017-2020 disajikan dalam tabel berikut.

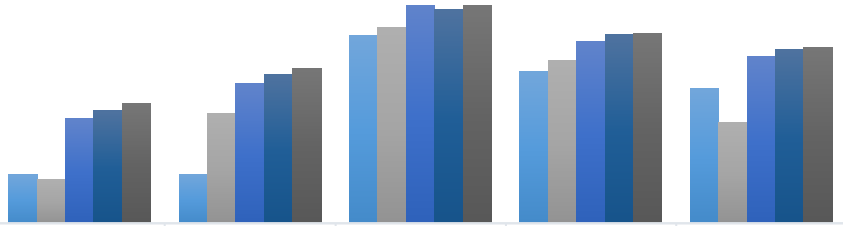
Tabel 1.10. Jumlah Guru di DIY Tahun 2017-2020

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Guru			
		2017	2018	2019	2020
1	SD/ MI	21.543	21.558	21.757	21.436
2	SMP/ MTs	12.158	12.283	12.388	11.935
3	SMA/ MA	6.894	6.775	7.027	6.979
4	SMK	8.374	8.314	8.079	7.738
5	SLB	1.186	1.234	1.284	1.281

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Ketersediaan tenaga pendidik di DIY tentunya perlu didukung oleh kompetensi yang memadai. Sesuai ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kualifikasi akademik ini menjadi salah satu persyaratan minimum dalam pemenuhan standar mutu pendidik pada satuan pendidikan. Sepanjang tahun 2020, Pemda DIY tetap mendukung

pemenuhan standar kualifikasi pendidik melalui pemberian akses bagi para guru yang akan menempuh studi lanjut. Pemda DIY juga menetapkan standar perekrutan guru baru sesuai kualifikasi akademik minimum tersebut. Persentase guru berkualifikasi di DIY tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut.



	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
2016	88,68	88,71	96,37	94,36	93,43
2017	88,42	92,07	96,79	94,97	91,56
2018	91,77	93,70	98,18	96,05	95,22
2019	92,2	94,2	97,8	96,4	95,6
2020	92,63	94,51	98,02	96,49	95,7

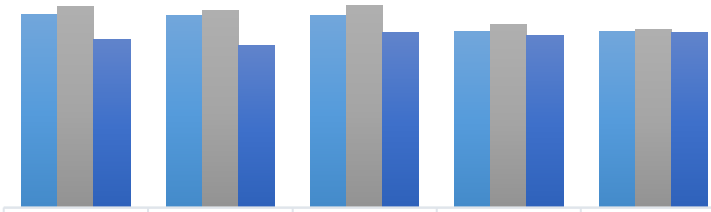
Gambar 1.13. Persentase Guru Berkualifikasi di DIY Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2020

Berdasarkan gambar di atas, terdapat kecenderungan peningkatan guru berkualifikasi selama kurun waktu 2016-2020. Peningkatan ini menggambarkan adanya penyesuaian kualifikasi akademik para pendidik di semua jenjang pendidikan yang akan mendukung peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

3) Partisipasi penduduk usia sekolah

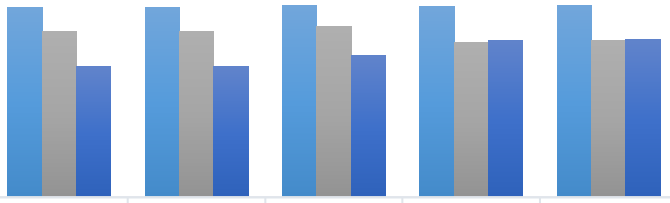
Adanya infrastruktur pendidikan yang memadai merupakan modal pemberian layanan pendidikan kepada masyarakat. Pemberian layanan pendidikan akan berdampak pada partisipasi penduduk usia sekolah. Partisipasi penduduk dalam pendidikan ditunjukkan dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Sedangkan APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APK dan APM DIY tahun 2016-2020 ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	108,21	107,63	107,66	98,63	98,82
SMP/MTs	112,63	110,72	113,20	102,86	99,96
SMA/MA/SMK	94,18	90,89	98,25	96,73	98,49

Gambar 1.14. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

Berdasarkan gambar di atas, peningkatan APK DIY selama jangka waktu 2015-2020 ada pada tingkat SMA/MA/SMK. Sementara itu, APK untuk SD/MI dan SMP/MTs secara umum tampak mengalami penurunan. Penurunan capaian APK untuk SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan adanya peningkatan kesesuaian domisili pada peserta didik jenjang pendidikan dasar. Peningkatan APK SMA/MA/SMK menunjukkan semakin tingginya partisipasi penduduk usia 16-18 tahun untuk menuntaskan pendidikan di jenjang menengah. Salah satu faktor pendukung capaian APK ini adalah peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam PPDB, jalur zonasi menjadi prioritas utama penerimaan sehingga dipastikan bahwa sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah di lingkungannya. Peraturan PPDB juga memberikan kepastian layanan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu karena menetapkan kuota penerimaan jalur afirmasi bagi setiap sekolah.



	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	96,81	96,82	97,83	97,09	97,61
SMP/MTs	84,35	84,61	86,82	79,01	79,89
SMA/MA/SMK	66,41	66,57	72,16	79,95	80,04

Gambar 1.15. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

Sesuai gambar di atas, capaian APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Salah satu penyebab peningkatan ini adalah penyesuaian antara usia siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan usia resmi sesuai ketentuan. Berdasarkan penjaringan data pendidikan kabupaten/kota tahun 2020, ketidaksesuaian usia terbesar masih ada pada jenjang pendidikan dasar yaitu pada tingkat SD/MI. Tercatat sebesar 18.215 siswa berusia kurang dari 7 tahun dan 3.106 siswa berusia lebih dari 12 tahun. Pada tingkat SMP/MTs, 23.715 siswa berusia kurang dari 13 tahun dan 4.288 siswa berusia lebih dari 15 tahun. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat peningkatan penyesuaian jumlah penduduk bersekolah sesuai usia ketentuan resmi di tahun 2020. Penilaian kualitas pembangunan pendidikan dapat digambarkan dari beberapa capaian, antara lain:

1. Capaian Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan.

Tabel 1.11. Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan Tahun 2017-2020

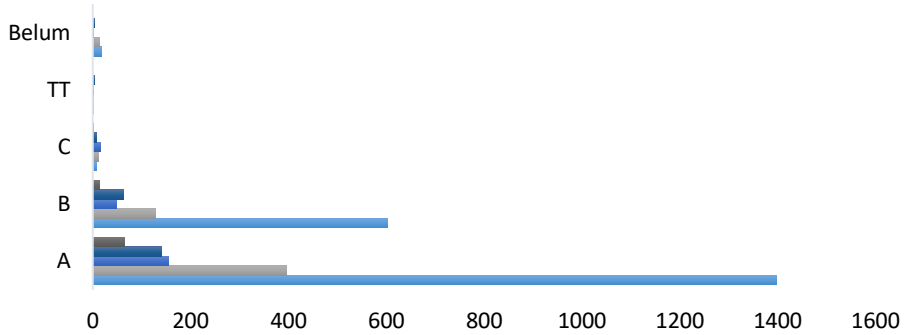
No	Satuan Pendidikan	Angka Mengulang (%)				Angka Putus Sekolah (%)				Angka Kelulusan (%)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	1,15	1,11	0,71	0,63	0,02	0,02	0,01	0,01	100	100	100	100
2	SMP/MTs	0,15	0,14	0,14	0,13	0,05	0,05	0,04	0,04	99,95	99,96	99,96	100
3	SMA/MA /SMK	0,14	0,10	0,09	0,08	0,12	0,11	0,10	0,10	99,92	99,94	99,94	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

Capaian angka mengulang dan angka putus sekolah dari tahun 2017-2020 menurut tabel di atas memperlihatkan kecenderungan penurunan. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendorong partisipasi aktif dalam pendidikan. Sebaliknya, angka kelulusan mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017-2020. Peningkatan ini salah satunya dipicu oleh kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Pandemi Covid-19 yang menyatakan bahwa kelulusan siswa tahun ajaran 2019/2020 diputuskan oleh satuan pendidikan melalui penilaian portofolio dan hasil pembelajaran selama 5 semester terakhir tanpa adanya Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah.

2. Capaian Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah

Akreditasi merupkan penggambaran secara keseluruhan kualitas satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasonal Pendidikan. Berikut adalah capaian akreditasi sekolah/ madrasah di tahun 2020 berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Provinsi DIY.



	A	B	C	TT	Belum
SLB	65	13	1	0	0
SMK	140	62	8	4	3
SMA/MA	154	48	15	1	2
SMP/MTs	396	128	12	1	13
SD/MI	1399	603	7	1	17

Gambar 1.16. Capaian Akreditasi Sekolah/Madrasah DIY Tahun 2020
Sumber: BAN Provinsi DIY, 2020

Melalui gambar di atas diketahui bahwa sebagian besar sekolah di DIY telah berstatus akreditasi A dan B, walaupun masih ada sekolah yang terakreditasi C maupun tidak terakreditasi. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi sekolah yang bersangkutan maupun Pemda DIY guna melakukan perbaikan terkait kualitas sarana prasarana pendidikan, mutu pendidik, maupun pengelolaan proses belajar.

Di samping seluruh proses pembelajaran formal, pendidikan di DIY banyak didukung oleh sektor pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal, sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan

peserta didik. Penyelenggara pendidikan nonformal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), majelis taklim, dan satuan PAUD sejenis (SPS). Jumlah lembaga PAUD Nonformal, SPS, PKBM, dan SKB dirinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.12. Jumlah Lembaga Pendidikan Nonformal di DIY Tahun 2020

No	Wilayah	Jumlah Lembaga					
		TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB
1	Kab. Gunungkidul	573	432	20	171	27	1
2	Kab. Bantul	517	488	56	237	26	1
3	Kab. Sleman	511	222	83	221	19	1
4	Kab. Kulon Progo	327	277	12	214	22	1
5	Kota Yogyakarta	222	80	40	356	21	1
	Total	**2.150**	**1.499**	**211**	**1.199**	**115**	**5**

Sumber: Dapodik Kemdikbud, 2020

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah lembaga PAUD di DIY pada tahun 2020 mencapai 5.059 lembaga. Banyaknya jumlah lembaga PAUD nonformal di DIY salah satunya dipengaruhi oleh advokasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan formal. Persiapan ini bukan hanya memperkenalkan situasi belajar di sekolah, namun lebih utama pada penanaman pendidikan karakter anak sejak dini sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya.

Keberadaan lembaga nonformal seperti PKBM dan SKB di DIY juga telah banyak membantu penduduk yang mengalami kendala dalam mengikuti pendidikan formal untuk tetap memperoleh pendidikan melalui jalur nonformal. PKBM dan SKB sebagai lembaga pendidikan kesetaraan tidak hanya fokus untuk memberikan pendidikan bagi penduduk yang putus sekolah, namun juga memberikan alternatif pembelajaran yang berbeda bagi penduduk usia sekolah yang tidak menempuh jalur pendidikan formal.

Sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lulusan pendidikan kesetaraan tetap mendapatkan kesempatan yang setara dengan lulusan pendidikan formal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Para lulusan ini akan mendapatkan pengakuan kemampuan dan keterampilan yang setara dengan dengan lulusan pendidikan formal setelah mengikuti Ujian Kesetaraan.

Tabel 1.13. Jumlah Peserta Didik Nonformal di DIY Tahun 2020

No	Wilayah	Jumlah Peserta Didik					
		TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB
1	Kab. Sleman	25.405	4.596	1.892	3.910	2.303	145
2	Kab. Bantul	22.029	6.701	572	2.581	3.019	388
3	Kab. Gunungkidul	14.473	8.470	264	3.595	2.863	108
4	Kota Yogyakarta	8.823	888	445	3.704	1.658	274
5	Kab. Kulon Progo	7.876	4.216	147	2.431	727	255
	Total	**78.606**	**24.871**	**3.320**	**16.221**	**10.570**	**1.170**

Sumber: Dapodik Kemdikbud, 2020

e. Kondisi Ekonomi Daerah

1) Sektor Unggulan

a) Sektor Industri Pengolahan

Industri Kecil dan Menengah (IKM) di DIY pada tahun 2020 tercatat sebanyak 96.597 unit usaha. Sektor ini menjadi penopang utama sektor industri pengolahan dengan nilai produksi mencapai Rp 12.465.398 juta pada tahun tersebut. Hingga tahun 2019, setiap tahunnya sektor ini mengalami pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan unit usaha, serapan tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi, serta nilai baku dan penolong. Namun pada tahun 2020 sektor ini mengalami penurunan akibat penurunan aktivitas ekonomi karena Pandemi Covid-19.

IKM DIY mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 355.319 orang pada tahun 2020 atau menurun 1,37% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang berakibat pada penurunan aktivitas ekonomi. IKM DIY terdiri dari Industri Pangan, Sandang dan Kulit, Kimia dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika, serta Industri Kerajinan. IKM Pangan mendominasi sektor ini. Berikut adalah tabel perkembangan IKM di DIY selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.14. Perkembangan IKM di DIY Tahun 2015-2019

IKM	2016	2017	2018	2019	2020
Unit usaha (UU)	90.906	91.214	94.840	97.013	96.597
Tenaga kerja (orang)	333.980	330.508	351.425	360.242	355.319
Nilai investasi (Rp Juta)	1.269.897	1.208.564	1.949.721	2.084.560	1.992.422
Nilai produksi (Rp Juta)	3.643.222	12.463.258	12.749.271	13.041.848	12.465.398
Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)	1.593.631	8.620.133	7.335.020	7.537.467	7.204.311

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2020

Nilai tambah produk yang dihasilkan sektor IKM Rp576.450 juta pada tahun 2020. Penurunan nilai tambah tersebut didapat dari selisih antara nilai produksi sebesar Rp 12.465.398 juta dengan nilai bahan baku dan bahan penolong sebesar Rp 7.204.311 juta. Nilai tambah Produk IKM pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 0.08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan sektor industri banyak mengalami penurunan kapasitas produksi.

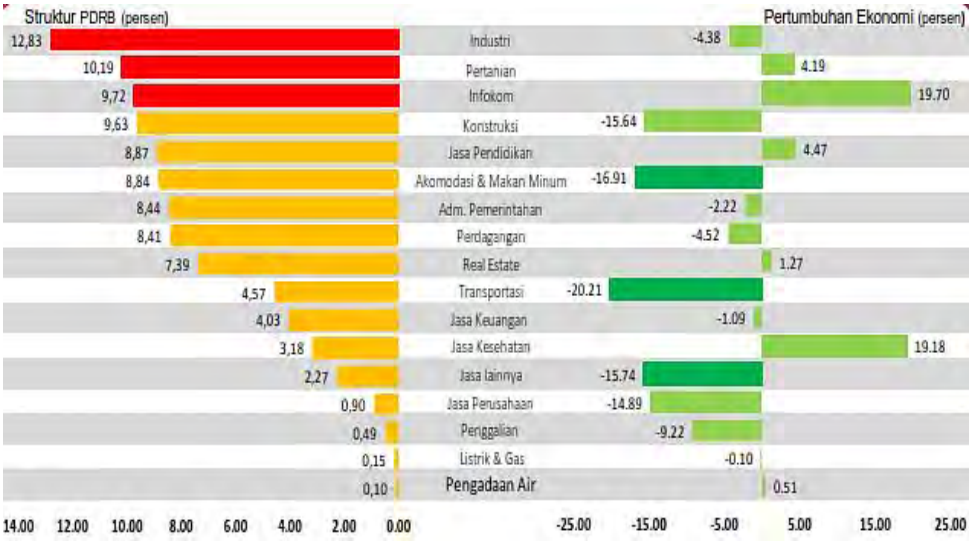
b) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Selama kurun waktu 2020, perekonomian DIY mengalami kontraksi sebesar 2,69 persen *(c-to-c)*, berbeda arah pertumbuhan dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,59 persen. Secara sektoral, kontraksi sangat dipicu oleh lapangan usaha transportasi serta penyediaan akomodasi dan makan-minum. Terdapat 11 (sebelas) lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi tertinggi yaitu 20,21 persen. Selain itu, empat lapangan usaha lain yang mengalami kontraksi hingga 2 digit adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 16,91%, jasa lainnya, konstruksi, dan jasa perusahaan masing-masing 15,74%, 15,64%, dan 14,89%.

Capaian nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY sampai dengan triwulan IV 2020 sejumlah 8.489.706, sedangkan capaian triwulan IV mencapai angka 2.467.661. Data Perekonomian DIY triwulan IV-2020 mengalami kontraksi sebesar 0,68% dibanding triwulan IV 2019 (y-on-y). Penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi sebesar 16,91% (y-on-y). Pada awal Juli 2020, berbagai acara *Meeting, Incentive Convention and Exhibition* (MICE) kembali diselenggarakan di wilayah DIY. Objek wisata juga mulai dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan.

Struktur PDRB dan perekonomian DIY tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya terlihat mengalami pergeseran. Posisi lima besar pangsa kontribusi tahun sebelumnya untuk sektor penyediaan akomodasi & makan minum dan perdagangan tergantikan oleh infokom dan jasa pendidikan. Kontraksi tertinggi yaitu 20,21% terjadi pada sektor transportasi. Sementara itu, laju pertumbuhan di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 16,91%. Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang luas

bagi industri pariwisata DIY antara lain jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara menurun drastis, jasa transportasi terpuruk, serta adanya hotel dan restoran yang mengalami gulung tikar.



Gambar 1.17. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi di DIY pada tahun 2020 sebanyak 1.848.548 orang terdiri dari jumlah wisatawan mancanegara 69.968 orang (3.79%) dan jumlah wisatawan domestik sebanyak 1.778.580 orang (96.21%), menurun sebesar 71,78% (4.700.833 orang) dibandingkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan penyelenggaraan acara MICE di hotel mengalami penurunan sebesar 91.91% (17.802 kali) dibandingkan tahun 2019.

Tabel 1.15. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	14.069	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.347	5.229.298	16.135	2,13	1,98
2018	416.374	5.272.719	5.689.093	17.814	2.15	1.99
2019	433.027	6.116.354	6.549.381	19.370	2,31	1,99
2020	69.968	1.778.580	1.848.548	1.568	1,95	1,65

Sumber: DInas Pariwisata DIY, 2020 (data sementara diolah)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2019, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di hotel bintang dan non bintang sebesar 2,31 hari sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 1,95 hari. Lama tinggal wisatawan domestik di DIY pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik di hotel bintang dan non bintang pada tahun 2019 tercatat sebesar 1,99 hari, sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 1,65 hari. Berikut data kunjungan jumlah wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kabupaten/kota di DIY pada Tahun 2015-2019.

Tabel 1.16. Jumlah Pergerakan Wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kabupaten/Kota di DIY pada Tahun 2016-2020

No	ODTW	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		jumlah	jumlah	Jumlah	jumlah	jumlah
1	Kota Yogyakarta	5.520.952	5.347.303	4.752.351	4.828.646	534.376
2	Kab. Sleman	4.950.934	6.814.558	7.898.088	8.024.885	4.250.119
3	Kab. Bantul	5.405.800	9.141.150	8.840.442	8.982.367	2.352.659
4	Kab. Kulon Progo	1.353.400	1.400.786	1.969.623	2.001.243	966.432
5	Kab. Gunungkidul	3.479.890	3.246.996	3.055.284	3.104.334	1.978.657
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi DIY		**20.710.976**	**25.950.793**	**26.515.788**	**26.941.475**	**10.082.243**

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2021 (data sementara)

Jumlah kunjungan wisatawan di DIY pada tahun 2020 menurut tabel di atas sebanyak 10.082.243 orang, menurun 16.859.232 orang dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang membuat pengelola destinasi wisata harus menutup tempat wisatanya selama beberapa bulan, serta adanya regulasi dari Pemerintah terkait persyaratan dan pembatasan selama musim liburan hingga akhir tahun yang berdampak terhadap penurunan jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata.

c) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam menyediakan bahan pangan bagi 3.842.932 jiwa penduduk DIY. Produksi tanaman pangan merupakan sumber energi utama dimana produksi hortikultura dan perkebunan berperan penting dalam menyediakan sumber serat dan zat-zat gizi makro maupun mikro yang diperlukan oleh tubuh. Sementara itu produksi peternakan berperan penting dalam menyediakan sumber protein hewani bagi masyarakat DIY.

(1) Tanaman Pangan

Hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga usaha utama tanaman pangan (padi dan palawija) di DIY mencapai 273.093 rumah tangga atau mencakup 55% dari total jumlah rumah tangga usaha tani yang mencapai 493.7647 rumah tangga (BPS, 2018). Di samping itu, komoditas utama tanaman pangan merupakan bahan pangan utama masyarakat DIY yang mencapai 3.842.932 jiwa. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha menjaga kecukupan bahan pangan utama bagi kebutuhan penduduk DIY melalui berbagai upaya, diantaranya kegiatan yang mengarah pada peningkatan produksi padi dan palawija.

Tabel 1.17. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2019-2020

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2019	2020*	2019	2020*	2019	2020*
1	Padi	142.468	144.688	56,92	58,64	810.980	848.504
2	Jagung	66.207	66.422	55,29	55,60	366.031	369.301
3	Ubi kayu	49.315	46.843	157,93	228,92	778.806	1.072.317

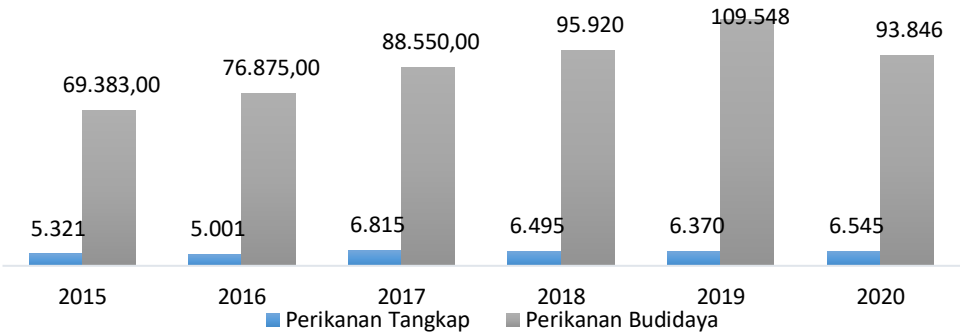
*Keterangan: *) Angka sementara*
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

Produksi padi, jagung, dan ubi kayu pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Produksi padi naik 37.524 ton (4,63%) menjadi 848.504 ton karena luas panen naik 2.220 ha (1,56%), dan produktivitas naik 1,72 ku/ha (3,02%). Produksi jagung naik 3.270 ton (0,89%) karena luas panen naik 215 ha (0,32%) dan produktivitas naik 0,31 ku/ha (0,56%). Ubi kayu walaupun bukan komoditas prioritas nasional namun produksinya di DIY cukup melimpah. Produksi ubi kayu meningkat sebesar 293.511 ton (37,69%) dari 778.806 ton di tahun 2019 menjadi 1.072.317 ton di tahun 2020. Peningkatan produksi padi, jagung, dan ubi kayu di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 didorong adanya dukungan pemerintah dalam pengembangan kawasan padi dan jagung berupa penyediaan benih unggul yang bersertifikat, penyediaan sarana prasarasa yang mendukung peningkatan produksi, serta pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim sedini mungkin. Sedangkan yang mendorong peningkatan produksi ubi kayu adalah penggunaan benih varietas unggul, pemupukan intensif dengan menggunakan pupuk kandang, dan pendampingan yang masif serta intensif selama proses budidaya.

(2) Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan Visi Gubernur DIY "Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru dengan Strategi Among Tani Dagang Layar" yaitu putar kemudi ke visi maritim dan laut sebagai halaman depan, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat berkontribusi optimal dalam perekonomian daerah khususnya di Wilayah Selatan DIY. Oleh karena itu, mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari Wilayah Pantura ke Pantai Selatan (Pansela) dengan mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di perdesaan, serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir yang didukung oleh infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan. Adanya potensi bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) yang berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Adikarta diproyeksikan mampu menumbuhkan pusat ekonomi baru di selatan DIY. Harapannya ikan yang didaratkan di PPP Tanjung Adikarta dapat langsung di eksport ke luar negeri utamanya ikan tuna, lobster, dan bawal.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan khususnya pada tahun 2020 tidak begitu terdampak Pandemi Covid-19. Pada awal Pandemi Covid-19, sektor budidaya dan tangkap mengalami hambatan pemasaran karena tutupnya hotel, restoran, dan catering. Hal ini berimbas pada penurunan produksi dan terganggunya rantai pasok akibat sosial dan *physical distancing*, serta beberapa wilayah yang mengalami pembatasan akses sementara. Namun seiring perjalanan waktu, pemasaran produksi tangkap dan budidaya dapat naik kembali dengan inovasi dari pelaku usaha. Kelompok pembudidaya ikan memasarkan langsung ke konsumen melalui media daring dan dibantu Pemda DIY. Produksi perikanan khususnya dari budidaya dari sekitar 109.548 ton pada tahun 2019 (Satudata KKP) menurun sekitar 14,33% menjadi 93.846 ton di tahun 2020 (Data Produksi DKP DIY 2021).



Gambar 1.18. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

Jumlah produksi perikanan di DIY masih didominasi oleh perikanan budidaya melalui pengembangan usaha perikanan budidaya di kolam, sawah (mina padi dan udang galah padi), jaring apung, karamba, dan telaga. Komoditas unggulan perikanan budidaya di DIY yaitu ikan lele 40.825 ton (43,5%), ikan nila 34.181 ton (36,42%), ikan gurami 8.297 ton (8,84%), ikan mas 420 ton (0.004%), udang vaname 3.364 ton (0,03%), dan ikan hias sejumlah 18.513.339 ekor (Data Produksi DKP DIY 2021).

Produksi perikanan tangkap tidak terpengaruh adanya Pandemi Covid-19. Hal ini ditandai dengan peningkatan produksi dari sekitar 6.370 ton pada tahun 2019 (Satudata KKP) menjadi 6.545 ton di tahun 2020 atau meningkat sekitar 2,74 % (Data Produksi DKP DIY 2021). Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut didukung dengan optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng yang berada di Gunungkidul serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tersebar di tiga kabupaten. Produksi perikanan tangkap juga didukung oleh komoditas perikanan tangkap yang berasal dari perairan umum daratan seperti sungai, embung, waduk, maupun genangan air lainnya. Dukungan sarpras untuk peningkatan produksi perikanan tangkap terlihat dengan adanya penambahan jumlah kapal sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.18. Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2018-2020 (Unit)

Ukuran Kapal	2018	2019	2020
<10 GT	491	529	521
≥10 GT	32	25	54

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2021

Pengolahan hasil perikanan pada masa pandemi ini justru naik daun karena banyak olahan ikan seperti nugget, bakso, otak-otak, sosis ikan, *crispy* ikan, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai akibat gencarnya kampanye gemar makan ikan (Gemarikan). Sosialisasi pentingnya makan ikan untuk imun dan kesehatan di masyarakat sudah berhasil dimana konsumsi makan ikan tahun 2020 sebesar 31,24 kg/kapita/tahun (Data Sementara Dislautkan DIY Tahun 2021) yang melebihi dari target 25,48 kg/kapita/tahun. Namun ada sebagian olahan yang justru tidak laku karena segmen pasarnya sebagai oleh-oleh wisatawan seperti keripik belut, kerupuk ikan, bandeng presto, dan lain-lain. Hal ini disiasati oleh para pengolah dengan diversifikasi olahan yang bisa laku di pasaran seperti Lesigor (lele siap goreng), nila berbumbu, dan masakan siap saji lainnya.

(3) Hortikultura

Komoditas hortikultura seperti cabai besar, cabai rawit, bawang merah, sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias merupakan komoditas primadona yang banyak dibudidayakan oleh petani karena memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan komoditas tanaman pangan. Beberapa komoditas hortikultura merupakan komponen *volatile food* yang turut berperan sebagai pembentuk inflasi seperti cabai besar, bawang merah, dan cabai rawit. Produksi hortikultura DIY tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.19. Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2019-2020

No	Komoditas	Produksi (Ton)	
		2019	2020*
1	Cabai besar	32.933	44.535
2	Cabai rawit	10.040	15.052
3	Bawang merah	16.998	19.236
4	Mangga	58.130	28.985
5	Durian	6.265	6.771
6	Pisang	47.554	66.729
7	Manggis	2.939	2.435
8	Salak	41.120	54.995

*Keterangan: *) Angka sementara* *Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021*

Produk sayuran hortikultura strategis seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah mengalami peningkatan produksi pada tahun 2020. Cabai besar meningkat dari 32.933 ton menjadi 44.535 ton atau sebesar 35,23%. Cabai rawit meningkat dari 10.040 ton

menjadi 15.052 ton atau 49,92%. Sementara itu, bawang merah mengalami kenaikan 13,17%.

Pengembangan durian di beberapa kawasan mulai memberikan hasil dengan adanya peningkatan produksi. Salak sebagai buah khas Yogyakarta khususnya Sleman mengalami peningkatan produksi dari 41.120 ton menjadi 54.995 ton.

(4) Perkebunan

Sub sektor perkebunan di DIY sebagian besar terkait erat dengan pengembangan agrowisata. Tahun 2020, akibat Pandemi Covid-19 sektor pariwisata mengalami pukulan yang cukup berat. Hal ini secara tidak langsung berdampak terhadap penghasilan sampingan dari para petani maupun pekebun. Namun dari sisi produksi, seperti tahun-tahun sebelumnya, sub sektor perkebunan selama tahun 2020 masih mampu memberikan kesejahteraan bagi para petaninya. Hal ini terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor perkebunan rata-rata selama tahun 2020 adalah 116,56, lebih besar dari rata-rata NTP sub sektor pertanian lainnya. Sehingga walaupun lahan usaha perkebunan di DIY lebih kecil dibanding sub sektor lainnya, namun mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih besar bagi para pelakunya.

Tabel 1.20. Produksi 5 Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2019-2020

No.	Komoditas	Produksi (ton)	
		2019	2020**
1	Kelapa	48.065,92	47.403,55
2	Kopi	512,56	533,68
3	Jambu mete	233,55	260,14
4	Kakao	1.792,47	1.962,05
5	Tebu	9.425,97	9.697,80

*Keterangan: **) Angka sangat sementara* *Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021*

Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2020 secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan produksi perkebunan didukung oleh kegiatan-kegiatan berupa peningkatan kapabilitas SDM (petugas dan petani) dalam teknis budidaya, penguatan kelembagaan petani/pekebun, fasilitasi sarana prasarana, dan pengendalian OPT. Sementara di bagian *off farm* kegiatan sertifikasi produk perkebunan serta pembukaan peluang pemasaran ke pasar modern dan lokasi wisata menjadi faktor pendorong meningkatnya nilai tambah produk perkebunan.

(5) Peternakan

Pembangunan sub sektor peternakan memiliki dua tujuan utama yang tidak bisa dipisahkan yaitu penyediaan bahan makanan sumber protein hewani dan peningkatan pendapatan petani. Komoditas yang dikembangkan antara lain sapi potong, sapi perah, dan kambing. Capaian populasi komoditas unggulan subsektor peternakan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.21. Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2019-2020

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2019	2020*
1	Sapi Potong	304.423	309.259
2	Sapi Perah	3.870	3.520
3	Kambing	407.226	416.400

*Keterangan: *) Angka sementara* *Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021*

Populasi sapi potong tahun 2020 naik sebanyak 4.836 ekor dibanding populasi tahun 2019. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya program unggulan Kementerian Pertanian yaitu Sapi Kerbau Komoditas Andalan negeri (SIKOMANDAN) yang berisi optimalisasi reproduksi berupa fasilitasi sarana prasarana dan operasional inseminasi buatan, dukungan akses pembiayaan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitasi premi asuransi sapi betina produktif, dan pengawasan pemotongan betina produktif.

Sapi perah sebagai penghasil susu dibudidayakan di Kabupaten Sleman tersebar di daerah lereng selatan Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan, Pakem, dan Turi. Pada Tahun 2020, populasinya turun sebanyak 350 ekor dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini merupakan dampak erupsi Gunung Merapi yang mendorong peternak menjual sebagian ternaknya.

Populasi kambing mengalami peningkatan sejumlah 9.174 ekor (2,25%). Hal ini dipengaruhi oleh kondisi permintaan pasar akan susu kambing dalam bentuk segar maupun olahan yang cukup besar dan sampai saat ini belum mampu dipenuhi seluruhnya oleh para peternak di DIY. Keadaan ini mendorong meningkatnya minat generasi muda untuk membudidayakan ternak kambing terutama kambing perah.

(6) Kehutanan

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kondisi ekonomi daerah, tidak terkecuali di sub sektor kehutanan. Salah satu dampaknya adalah menurunnya permintaan atas kayu selama tahun 2020. Penurunan pemintaan ini tentunya berdampak juga terhadap angka produksi kayu di DIY selama tahun 2020 yang hanya sebesar 71.335,54 m^3 atau turun sebesar 53,74 % dibandingkan tahun 2019 dengan angka produksi sebesar 154.210,60 m^3.

Industri pengolahan minyak kayu putih juga turut terdampak Pandemi Covid-19. Secara periodik, data produksi minyak kayu putih di DIY tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.22. Target dan Realisasi Produksi Minyak Kayu Putih di DIY (2016-2020)

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700
2018	44.285	44.296	10.458.285.600
2019	39.316	39.323	9.887.974.000
2020	41.610	40.353	9.748.035.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

Pada tahun 2020, target produksi minyak kayu putih adalah sebesar 41.610 liter. Target tersebut hanya dapat terealisasi sebesar 40.353 liter dikarenakan tertundanya pungutan bahan baku berupa daun kayu putih karena Pandemi Covid-19. Pungutan daun kayu putih yang dijadwalkan mulai pada bulan Maret terpaksa mundur sampai dengan bulan Juni dan berakhir di bulan Desember. Dari realisasi sebesar 40.353 liter, hanya 37.710 liter yang berhasil terjual dan menghasilkan nilai PAD sebesar Rp 9.748.035.000 sehingga masih terdapat 2.643 liter yang menjadi *stock opname* per tanggal 30 Desember 2020 dan akan menjadi barang persediaan di tahun 2021.

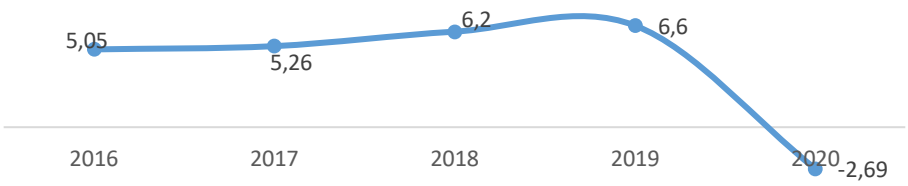
Hasil produksi minyak kayu putih tersebut berasal dari bahan baku daun kayu putih sebanyak 4.835 ton yang dipungut dari hutan kayu putih di empat Bagian Daerah Hutan (BDH), yaitu BDH Karangmojo dengan luas 2.177,46 ha (3.299 ton), BDH Playen dengan luas 984,70 ha (926 ton), BDH Paliyan seluas 413,60 ha (590 ton), dan BDH Panggang seluas 25 ha (20 ton). Pengelolaan tanaman kayu putih dilakukan dengan pola kerjasama melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Pola

ini sekaligus sebagai salah satu upaya pembinaan kepada masyarakat dalam mengusahakan hutan agar tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Wujud dari pemberdayaan antara lain mengikutsertakan petani maupun kelompok tani hutan dalam pemungutan dan pengangkutan hasil daun kayu putih pada saat panen.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan, sub sektor kehutanan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengusahakan tanaman pangan dengan pola tumpangsari. Sebanyak 157 kelompok tani hutan di lima BDH terdaftar sebagai petani pesanggem. Petani pesanggem adalah mereka yang menggarap sebagian lahan di kawasan hutan selepas tebang dengan ditanami tanaman pangan seperti padi gogo atau aneka jenis palawija terutama jagung, ketela pohon, kacang tanah, empon-empon, dan kedelai. Dari pola tumpangsari ini, capaian hasil produksinya cukup signifikan dan mencapai angka 42.339,8 ton pada tahun 2020 dengan luas tanam mencapai 6.186,75 ha.

2) Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DIY sejak tahun 2016 terus mengalami pertumbuhan positif hingga mencapai puncaknya sebesar 6,6% pada tahun 2019. Namun, sebagaimana yang terjadi di tingkat global dan nasional, Pandemi Covid-19 juga berdampak pada perekonomian DIY. Hal ini ditunjukkan oleh kontraksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2020 sebesar 2,69%. Berikut ini gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.



Gambar 1.19. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY Tahun 2016-2020 (%)
Sumber: BPS Provinsi DIY 2017-2021

Perlambatan ekonomi DIY pada tahun 2020 disumbang oleh pertumbuhan negatif di hampir semua lapangan usaha. Sektor dominan seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi sebesar 16,91% seiring menurunnya pertumbuhan sektor pariwisata. Lesunya sektor pariwisata juga berdampak pada kontraksi sektor transportasi sebesar 20,21%. Sektor Konstruksi yang merupakan salah satu kontributor terbesar laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 juga mengalami kontraksi sebesar 15,64%. Di sisi lain, sektor Informasi dan Keuangan serta Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 19,70% dan 19,18% seiring dengan adaptasi dampak Covid-19.

Tabel 1.23. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,46	1,94	2,16	1,03	4,19
2	Pertambangan dan Penggalian	0,42	3,39	10,59	3,04	-9,22
3	Industri Pengolahan	5,07	5,74	5,12	5,73	-4,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14,26	3,96	5,31	5,43	-0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,36	3,46	5,13	8,90	0,51
6	Konstruksi	5,42	6,94	13.1	14,39	-15,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,09	5,72	5,54	5,16	-4,52
8	Transportasi dan Pergudangan	4,61	4,74	6,6	3,55	-20,21
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,51	6,21	6,77	8,89	-16,91
10	Informasi dan Komunikasi	8,32	6,14	6,48	7,45	19,70
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,98	2,80	6,14	8,62	-1,09
12	Real Estat	5,14	4,94	5,54	5,93	1,27
13	Jasa Perusahaan	3,43	5,86	5,51	6,75	-14,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,57	4,51	4,06	3,30	-2,22
15	Jasa Pendidikan	3,07	5,56	6,01	6,57	4,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,52	5,84	6,05	6,61	19,18
17	Jasa lainnya	5,70	5,76	6,06	6,25	-15,74
	DIY	**4,94**	**5,05**	**5,26**	**6,20**	**-2,69**

Sumber: BPS Provinsi DIY 2017-2021

Menurut PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, kontributor terbesar dalam PDRB pada tahun 2019 dan 2020 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB ADHB tahun 2020 adalah Rp92.753.541,94 juta atau pada PDRB ADHK sebesar Rp58.084.319,83 juta. Di sisi lain, pengeluaran untuk inventori merupakan kontributor terkecil pembentukan PDRB tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp1.631.020,63 juta atas dasar harga berlaku atau Rp1.208.612,01 juta atas dasar harga konstan tahun 2010. Pada tahun

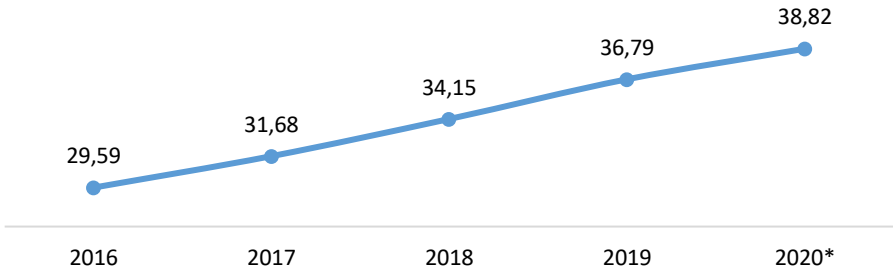
2020, semua komponen pengeluaran mengalami kontraksi kecuali perubahan inventori yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,24%.

Tabel 1.24. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2019

No	Komponen Pengeluaran	2019		2020		
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	Laju Pertum-Buhan (%)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	92.436.088,69	59.724.355,36	92.753.541,94	58..084.319,83	-2,75
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.613.731,56	2.911.995,20	4.378.318,81	2.720.887,22	-6,56
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	22.434.453,68	13.979.251,83	22.889.206,61	13.849.617,43	-0,93
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	49.576.127.59	30.021.483,98	44.319.423,28	25.995.230,74	-13,41
5	Perubahan Inventori	1.503.202,57	1.137.665,47	1.631.020,63	1.208.612,01	6,24
6	Ekspor Luar Negeri	8.837.678,27	5.413.130,88	7.781.383,92	4.715.936,57	-12,88
7	Impor Luar Negeri	6.711.022,53	4.503.188,14	5.334.509,75	3.833.395,55	-14,87
8	Net Ekspor Antar-Daerah	(31.622.076,87)	(4.197.150,79)	(30.029.632,68)	(1.061.608.08)	-74,71
	PDRB DIY	**141.068.182,95**	**104.487.543,78**	**138.388.752,76**	**101.679.600,17**	**-2,69**

Sumber: BPS Provinsi DIY (2020) dan olahan

Meskipun mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, namun nilai PDRB ADHB per kapita di DIY pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan menggunakan data jumlah penduduk Sensus Penduduk 2020 (per September 2020), PDRB ADHB per kapita tahun 2020 sebesar Rp38,32 juta yang meningkat Rp1,53 juta dari Rp36,79 juta pada tahun 2019.



Gambar 1.20. Nilai PDRB per Kapita DIY Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)
*Keterangan: *) proyeksi*
Sumber: BPS Provinsi DIY (2020) dan olahan

3) Inflasi

Inflasi Kota Yogyakarta sebagai proksi tingkat inflasi DIY selama periode 2015 sampai dengan 2020, masih mengalami fluktuasi. Laju inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tingkat tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,77% menjadi 1,68% di tahun berikutnya. Laju inflasi tertinggi pada tahun 2020 terdapat pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 6,01%. Sedangkan yang terendah pada tahun 2020 terdapat pada pengeluaran Perumahan, Air,Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,69%.

Tabel 1.25. Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Umum	3,09	2,29	4,20	2,66	2,77	1,40
1	Bahan Makanan	4,64	4,77	2,71	3,15	3,76	2,40
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	5,04	3,84	2,79	2,63	2,67	2,73
3	Perumahan, Air,Listrik, Gas dan Bahan Bakar	4,41	1,64	5,63	2,43	2,08	0,69
4	Sandang	5,87	3,04	3,84	3,61	5,51	1,30
5	Kesehatan	4,21	4,17	2,76	1,19	5,40	1,72
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	1,36	2,40	2,81	3,34	3,92	1,92
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-2,51	-2,06	6,72	2,46	0,37	6,01

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

3. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Gambaran Umum Birokrasi Pemda DIY

Penyelenggaraan reformasi birokrasi tahun 2020 telah memasuki periode ketiga *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024 yang bertujuan membangun birokrasi berkarakter kelas dunia (*Smart* ASN) dengan karakter profesional, berintegritas, berorientasi kepublikan, memiliki budaya pelayanan tinggi, dan berwawasan global. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang menjadi isu penting antara lain penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas SDM aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, hasil identifikasi dan pemetaan terdapat 81 jabatan struktural eselon IV yang dapat disederhanakan dan disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Hasil pemetaan telah disampaikan kepada Pemerintah melalui surat Nomor 061/17559 Tanggal 30 Desember 2019 perihal Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Surat Nomor 061/3715 Tanggal

28 Februari 2020 perihal Penyampaian Hasil Penyederhanaan Birokrasi Pemda DIY Tahap Pertama.

Penyederhanaan Regulasi diarahkan untuk perbaikan iklim investasi. Tercatat 95 Peraturan Daerah (Perda) yang tidak efektif telah dicabut berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Selanjutnya, Perda DIY Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga mencabut 83 Perda yang tidak efektif.

Transformasi digital yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik telah banyak dilakukan. Kondisi Pandemi Covid-19 semakin memicu pergeseran proses bisnis perangkat daerah ke arah serba digital. Aplikasi *Jogja Pass*, E-Posti, *Jogja Library For All* (Jolifa), Jogja Belajar Class, dan E-Lapor adalah contoh-contoh digitalisasi pelayanan publik. Berikutnya aplikasi Jogjaplan, *satriya.jogjaprov.go.id*, aplikasi *Co-Reform Space*, Si-Informan, E-Prima, Simpeg2, pengurusan pensiun secara digital, serta rapat secara daring merupakan contoh digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Terkait penguatan kapasitas aparatur birokrasi, Pemda DIY telah menyusun Analisis Kebutuhan Diklat dan *Human Capital Development Program* (HCDP) sebagai dasar dan acuan dalam perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan klasikal maupun non klasikal. Penguatan manajemen kinerja dan manajemen karier juga telah dilakukan, sehingga pada tahun 2020 Pemda DIY mendapatkan skor Indeks Sistem Merit 342 poin pada kategori Sangat Baik dan menjadi terbaik nasional.

Pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima. Salah satu upaya yang dilakukan Pemda DIY untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai unit pelayanan di lingkungan Pemda DIY. Salah satunya melalui monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada tahun 2020, terdapat 84 dari 95 unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY yang telah memenuhi variabel/indikator kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga masuk pada zona hijau (kepatuhan tinggi) dengan skor komposit penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang tinggi.

Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh 95 unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY dengan jumlah responden sebanyak 20.642 menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata sebesar 83,64 (mutu pelayanan B atau dikategorikan Baik), meningkat 0,95 poin dari nilai IKM tahun 2019 (82,69), dan meningkat 4,03 poin dari nilai IKM tahun 2018 (79,61). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik secara konstan telah mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik.

Selanjutnya, pembangunan Zona Integritas juga telah menghasilkan capaian yang signifikan. Terdapat tiga unit kerja yang lolos mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020, yakni Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Penyelenggaran Jaminan Sosial, dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman. Dengan demikian, total telah terdapat lima unit kerja berpredikat WBK di DIY. Hal ini membuktikan bahwa upaya pembangunan integritas menuju birokrasi yang bersih dan melayani telah melembaga.

b. Gambaran Kondisi ASN yang dimiliki

Salah satu unsur dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang tidak kalah pentingnya adalah bidang kepegawaian, DIY selalu berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individu pegawai menuju perspektif manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (*strategic human resource management*) agar selalu tersedia sumber daya ASN unggulan yang selaras dengan dinamika perubahan misi ASN maupun visi dan misi Gubernur DIY yang tersurat dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Oleh karena itu, RPJMD DIY Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang salah satu misinya yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Terkait dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi khususnya reformasi sumber daya aparatur di lingkungan Pemda DIY, sangat diperlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung pembangunan tata pemerintahan yang demokratis, desentralistis, dan dinamis serta ekonomi pasar sosial yang semakin terbuka. Oleh karena itu, perlu dibangun ASN yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah dan pemerintah daerah.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Pemda DIY memiliki ASN sejumlah 10.588 orang yang terdiri dari 5.223 orang laki-laki dan 5.335 orang perempuan. Rincian jumlah ASN berdasarkan golongan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.26. Data Pilah Pegawai Pemda DIY Tahun 2016-2020 Berdasarkan Golongan

No	Elemen	Tahun										Satuan
		2016		2017		2018		2019		2020		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan		**6.707**		**12.232**		**11.375**		**11.347**		**10.558**		**Orang**
1.	Golongan I	137	9	152	10	562	43	113	8	106	8	Orang
2.	Golongan II	851	200	975	243	4.623	1.657	782	215	706	193	Orang
3.	Golongan III	2.252	2.056	3.236	3.526	9.904	14.440	3.114	3.755	2.879	3.601	Orang
4.	Golongan IV	687	560	2.147	1.943	7.235	9.595	1.715	1.645	1.532	1.533	Orang

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah DIY,2021

Berdasarkan tabel di atas, ASN Pemda DIY pada tahun 2020 didominasi oleh Golongan III yakni sejumlah 61,38% dari keseluruhan ASN Pemda DIY. Banyaknya Golongan III ini dikarenakan adanya *pembatasan* tingkat pendidikan bagi CPNS baru, yaitu minimal D3 dan sudah tidak membuka formasi untuk pendidikan SMA atau sederajat. Penanganan Golongan III yang ada dilakukan dengan mengarahkan untuk menduduki Jabatan Fungsional.

c. Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Dalam APBD P 2020

Ringkasan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah *pada* tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp5.558.125.044.792,93 dan dapat direalisasikansebesar Rp5.611.715.965.808,71 atau 100,96% dari target yang ditetapkan. Secara rinci anggaran dan realisasi per kelompok pendapatan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.27. Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2019 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	1.799.932.971.064,54	1.876.663.198.063,71	104,26
2	Dana Perimbangan	2.395.248.332.317,00	2.371.292.926.821,00	99,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.362.943.741.411,39	1.363.759.740.924,00	100,06
Jumlah		**5.713.924.265.502,71**	**5.699.328.932.440,50**	**99,74**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Ringkasan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemda DIY menetapkan Belanja sebesar Rp5.865.604.964.088,35. Realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp5.433.564.049.791,03 atau 92,63%. Realisasi Belanja pada tahun 2020 mengalami penurunan baik secara nominal maupun persentase dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019 yang lalu, realisasi belanja tercatat

sebesar Rp5.544.650.430.330,02 atau 92,75%. Salah satu penyebab penurunan serapan anggaran atau realisasi belanja ini adalah adanya Pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga akhir tahun 2020. Lebih lanjut, Rincian Realisasi Belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.28. Realisasi Belanja DIY Tahun 2020 (SebelumDilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.884.017.560.770,72	3.626.470.537.480,02	93,37
2	Belanja Langsung	1.981.587.403.317,63	1.807.093.512.311,01	91,19
Jumlah		5.865.604.964.088,35	5.433.564.049.791,03	**92,63**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2020

Realisasi Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2020, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp425.069.919.295,42 dengan realisasi Rp423.712.988.195,42 atau 99,68%. Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp471.794.246.868,94 dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp3.145.029.200,00. Adapun Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp117.590.000.000,00 dan terealisasi 100% dengan peruntukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp101.000.000.000,00, kepada Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp90.000.000,00, kepada PD Air Bersih Rp12.500.000.000,00, dan Investasi Dana Bergulir melalui BUKP sebesar Rp4.000.000.000,00.



Bab 2

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Dalam Perubahan APBD

2020

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PERUBAHAN APBD

A. PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi DIY perlu ditetapkan perencanaan pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2020, perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dipandang perlu untuk dilakukan perubahan.

Kejadian wabah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang melanda dunia telah menyebabkan jatuhnya banyak korban, tidak terkecuali di Indonesia dan DIY. Hal ini mendasari ditetapkannya kondisi Bencana Nasional Non Alam oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penetapan Tanggap Darurat Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Gubernur DIY melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020. Kondisi bencana daerah ini menjadikan perlu dilakukan tindakan-tindakan re-focusing dan re-alokasi program kegiatan pembangunan.

Secara lebih detil dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2020 meliputi:

1. Adanya wabah pandemi Covid-19 yang memerlukan penanganan lebih lanjut;
2. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2020 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2020 dari masing-masing kegiatan;
3. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2020 terhadap kemampuan fiskal daerah;
4. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
6. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Sasaran, Tema dan Prioritas Pembangunan

Dalam upaya penanganan Covid-19, sasaran yang ingin dicapai oleh Pemda DIY adalah:

1. Tercegahnya penyebaran Covid-19 dengan cepat dan tepat;
2. Pasien Covid-19 tertangani hingga sehat dan tuntas;
3. Terwujudnya ketangguhan sosial, ekonomi, dan pendidikan warga masyarakat menghadapi pandemi Covid-19;
4. Terjaminnya keterbukaan, kejelasan, kemudahan, partisipasi dan literasi informasi kepada warga masyarakat DIY dalam pencegahan dan penanganan Covid-19;

Terjadinya pandemi Covid-19 juga menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap tema dan prioritas pembangunan Tahun 2020. Tema pembangunan pada RKPD DIY Tahun 2020 adalah ***"Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"***. Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat terkait upaya penanganannya, maka Tema Pembangunan DIY Tahun 2020 disesuaikan menjadi:

"Penanganan Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan serta
Upaya Penguatan Ekonomi Guna Meminimalisir Dampak Pandemi Covid-19"

Prioritas Pembangunan Tahun 2020 mengalami penyesuaian sebagai upaya sinkronisasi terhadap prioritas nasional tahun 2020. Prioritas pembangunan daerah di DIY disesuaikan agar sasaran pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19 dapat tercapai, yaitu:

1. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19;
2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net antara lain melalui bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19;
3. Penanganan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Perubahan Sasaran, Tema, dan Prioritas Pembangunan tersebut diikuti dengan perubahan rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan rambu-rambu berikut:

1. Pergeseran dilaksanakan pada tataran, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
2. Dilaksanakan penambahan/pengurangan Tolok Ukur Kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan);
3. Dimungkinkan untuk melakukan penambahan kegiatan baru (misal: karena ada ketentuan dari pusat);
4. Dimungkinkan penambahan kegiataN/Aktivitas karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga;
5. Dilaksanakan efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;

B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam pembiayaan pembangunan di Pemda DIY, peningkatan PAD diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Pemda DIY terhadap Pemerintah Pusat. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemda harus mengetahui potensi yang dimiliki daerah. Potensi yang dimiliki masing-masing daerah tidak selalu sama, dari potensi tersebut dioptimalkan untuk mendapatkan sumber penerimaan baru. Penerimaan Pemda DIY digunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi pembiayaan pembangunan di wilayah DIY. Ada dua cara untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Selanjutnya, untuk cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber pendapatan. Peningkatan pendapatan dilakukan dengan alasan kebijakan dan alasan teknis. Alasan kebijakan, dalam era otonomi daerah, PAD diharapkan menjadi pendorong utama bagi Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Alasan teknis dalam peningkatan pendapatan antara lain dengan meningkatkan layanan pembayaran pajak daerah, pemetaan potensi pendapatan daerah pada Perangkat Daerah berpendapatan, dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan masukan terhadap kondisi keuangan daerah. Realisasi PAD Tahun 2020 berhasil melampui target yang dianggarkan, yaitu sebesar Rp76.730.326.999,17 atau 4,26% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemda DIY dalam memungut sumber-sumber PAD. Penyumbang terbesar PAD sampai saat ini masih berasal dari penerimaan pajak daerah. Dengan demikian kinerja pemungut pajak daerah dapat dinilai efektif dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Selama Tahun 2020, Pemerintah Indonesia bahkan seluruh dunia terkena pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian yang menurun drastis. Hal tersebut berimbas pula pada penerimaan pendapatan di Pemda DIY. Penurunan penerimaan terbesar berasal dari pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang diakibatkan dari penjualan kendaraan bermotor yang turun. Namun secara umum, pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih menempati persentase tertinggi dari Pendapatan Asli Daerah.

Tercapainya sasaran meningkatnya pengelolaan PAD didorong oleh penyesuaian regulasi, peningkatan sumber daya dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pendataan dan penagihan pajak daerah, penambahan sarana

prasarana pendukung pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan aset, serta pembinaan terhadap BUMD yang telah berjalan cukup optimal.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja sasaran. Tahun 2020, intensifikasi pajak daerah dilakukan melalui pendataan dan penagihan wajib pajak secara *door to door,* mengirimkan surat kepada wajib pajak*,* melakukan sosialisasi kepada kelurahan di wilayah Samsat untuk melakukan pendataan kepemilikan kendaraan di wilayah Samsat. Selain itu menambah layanan *Drive Thru* untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak tanpa turun dari kendaraan. Inovasi baru dihadirkan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan melalui transaksi elektronik atau daring. Hal tersebut memungkinkan pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak cukup melalui mesin ATM yang menyediakan fasilitas E-Posti dan E-SAMSAT. Perluasan jangkauan layanan dilakukan dengan menambah pelayanan SAMSAT Desa karena dinilai berhasil memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di sekitar SAMSAT Desa. Hingga akhir Tahun 2020 pelayanan wajib pajak telah menjangkau hingga 12 desa/kelurahan se-DIY. Selain itu di akhir Tahun 2020 diupayakan penambahan pelayanan pembayaran pajak melalui bank selain BPD. Diharapkan di Tahun 2021, penambahan layanan akan terealisir. Upaya ekstensifikasi pajak daerah dilakukan dengan menyusun peraturan daerah di bidang pendapatan.

Peningkatan pendapatan retribusi melalui Intensifikasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki pendapatan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Retribusi yang menggunakan layanannya. Ekstensifikasi dilakukan dengan menggali potensi dari aset yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah untuk memperoleh pendapatan yang menjadi wewenangnya. Selain itu mengembangkan inovasi baru dengan penggunaan aplikasi yang mendukung kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Tahun 2020, pelayanan pembayaran retribusi bisa menggunakan layanan *e-commerce*, dengan menggunakan *Go Pay* untuk pembayaran sewa Rusunawa dan layanan QRIS untuk pembayaran retribusi yang lain. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya pungutan liar. Pembayaran retribusi cukup dengan menggunakan kartu ATM dan uang langsung masuk rekening pemerintah daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pemda DIY pada Tahun 2020 menetapkan target Pendapatan Daerah sebesar Rp5.558.125.044.792,93 dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.611.715.965.808,71 atau 100,96% dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp87.641.266.631,79 atau 1,54% dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp5.699.357.232.440,50. Secara rinci anggaran dan realisasi per kelompok pendapatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	1.799.932.971.064,54	1.876.663.298.063,71	104,26
2	Dana Perimbangan	2.395.248.332.317,00	2.371.292.926.821,00	99,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.362.943.741.411,39	1.363.759.740.924,00	100,06
Jumlah		**5.558.125.044.792,93**	**5.611.715.965.808,71**	**100,96**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Adapun rincian dari anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Hasil Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dan transfer Pusat ke Daerah. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk pembiayaan pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp1.799.932.971.064,54 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.876.663.298.063,71 atau 104,26%. Realisasi PAD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp206.132.036.370,79 atau 9,90% dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.082.795.334.434,50. Adapun rincian anggaran dan realisasi PAD DIY Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	1.596.879.866.993,00	1.646.559.198.863,00	103,11
2	Hasil Retribusi Daerah	32.999.671.755,00	36.380.162.731,71	110,24
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	101.460.382.142,49	101.460.382.151,46	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	68.593.050.174,05	92.263.554.317,54	134,51
	Jumlah	**1.799.932.971.064,54**	**1.876.663.298.063,71**	**104,26**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan target PAD tercapai, bahkan lebih dari target yang ditetapkan sebesar 4,26%. Adapun rincian anggaran dan realisasi per jenis pendapatan adalah sebagai berikut.

1) Pajak Daerah

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Target Pajak Daerah Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp1.596.879.866.993,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.646.559.198.863,00 atau mencapai 103,11%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp127.381.405.709,00 atau 7,18% dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.773.940.604.572,00. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	796.300.000.000,00	846.892.566.900,00	106,35
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	317.500.000.000,00	333.512.489.000,00	105,04
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	222.968.971.700,00	225.462.302.459,00	101,12
4	Pajak Air Permukaan	1.166.079.000,00	1.328.837.075,00	113,96
5	Pajak Rokok	258.944.816.293,00	239.363.003.429,00	92,44
	Jumlah	**1.596.879.866.993,00**	**1.646.559.198.863,00**	**103,11**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa dari total realisasi Pendapatan Pajak Daerah telah mencapai target yaitu 103,11%, namun Pendapatan Pajak Rokok hanya terealisasi sebesar Rp239.363.003.429,00 atau 92,44%. Target Pendapatan Pajak Rokok tidak tercapai karena adanya pemotongan dari pemerintah pusat sebesar 37,5% dari penerimaan yang seharusnya diterima oleh Pemda DIY terkait Integrasi Pemda DIY dengan BPJS Kesehatan.

2) Hasil Retribusi Daerah

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp32.999.671.755,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp36.380.162.731,71 atau 110,24% dari target anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.039.885.951,37 atau 14,24% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp42.420.048.683,08. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Retribusi Jasa Umum**	**7.963.681.000,00**	**8.664.796.884,71**	**108,80**
	Pelayanan Kesehatan	64.766.000,00	72.875.000,00	112,52
	Pelayanan Pendidikan	2.674.775.000,00	2.754.859.000,00	102,99
	PelayananPersampahan/Kebersihan	4.388.940.000,00	4.997.280.884,71	113,86
	Pengolahan Limbah Cair	835.200.000,00	839.782.000,00	100,55
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**24.643.670.755,00**	**27.205.350.847,00**	**110,39**
	Pemakaian KekayaanDaerah	4.574.964.755,00	5.447.360.848,00	119,07
	TempatPenginapan/ Pesanggrahan/Villa	194.165.000,00	191.675.000,00	98,72
	Pelayanan Kepelabuhan	79.355.000,00	81.191.500,00	102,31
	Tempat Rekreasi dan OR	75.517.000,00	100.645.500,00	133,28
	Penjualan Produk Usaha Daerah	19.058.227.000,00	20.566.433.999,00	107,91
	Tempat Khusus Parkir	285.615.000,00	372.127.000,00	130,29
	Retribusi Terminal	375.827.000,00	445.917.000,00	118,65
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**392.320.000,00**	**510.015.000,00**	**130,00**
	Retribusi Izin Trayek	72.220.000,00	77.580.000,00	107,42
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	900.000,00	825.000,00	91,67
	Retribusi Perpanjangan IMTA	319.200.000,00	431.610.000,00	135,22
	Jumlah	**32.999.671.755,00**	**36.380.162.731,71**	**110,24**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Secara umum realisasi penerimaan Retribusi Daerah telah melampaui target anggaran yang ditetapkan, namun terdapat beberapa retribusi yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggarahan/Villa dari anggaran Rp194.165.000,00 hanya terealisasi Rp191.675.000,00 atau 98,72%, serta Retribusi Izin Usaha Perikanan dari anggaran sebesar Rp900.000,00 hanya terealisasi Rp825.000,00 atau 91,67%. Tidak tercapainya retribusi ini disebabkan;

a. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa dari anggaran Rp194.165.000,00 hanya terealisasi Rp191.675.000,00 atau 98,72%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 dan pemerintah juga beberapa kali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
b. Retribusi Izin Usaha Perikanan dari anggaran sebesar Rp900.000,00 hanya terealisasi Rp825.000,00 atau 91,67%. Hal ini disebabkan karena kapal/alat tangkap yang dimiliki oleh para nelayan berjenis di bawah kapasitas 11-20 Gross Ton (GT)

Selain penerimaan yang tidak terealisir, beberapa penerimaan tercapai bahkan lebih dari 30% dari target yang ditetapkan. Penerimaan tersebut antara lain:

a. Retribusi Tempat rekreasi dan OR ditargetkan sebesar Rp75.517.000,00 dan terealisasi sebesar Rp100.645.500,00 atau sebesar 133,28% dari target, hal ini disebabkan adanya penambahan obyek baru di Museum Sonobudoyo yang mengakibatkan ketertarikan pengujung dan penerimaan melebihi target yang ditetapkan.
b. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditargetkan sebesar Rp285.615.000,00 dan terealisasi sebesar Rp372.127.000,00 atau sebesar 130,29% dari target, hal ini disebabkan adanya BTS TEMAN BUS yg masuk di retribusi parkir bandara dalam perjalanan anggaran yang belum terhitung di penghitungan target.
c. Retribusi Perpanjangan IMTA yang ditargetkan sebesar Rp319.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp431.610.000,00 atau 135,22% dari target, hal ini disebabkan pandemi yg terjadi di Tahun 2020 di berbagai negara di dunia, jadi tenaga asing di Indonesia tidak bisa kembali ke negara asalnya, sehingga harus memperpanjang izin tinggal dan izin menggunakan tenaga asingnya.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sampai dengan Tahun 2020, Pemda DIY telah melakukan penyertaan modal pada beberapa badan usaha yaitu pada PT Taru Martani, PT Anindya Mitra Internasional (AMI), PT Bank BPD

DIY, PT Asuransi Bangun Askrida, dan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP). Atas penyertaan modal tersebut, Pemda DIY memperoleh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target sebesar Rp101.460.382.142,49 dan dapat direalisasikan sebesar Rp101.460.382.151,46 atau 100,00 dari target anggaran yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 mengalami kenaikan dari penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 yang sebesar Rp85.960.737.606,37. Rincian anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	**Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD**	**95.336.062.563,26**	**95.336.062.572,26**	**100,00**
	PT. Taru Martani	148.697.623,00	148.697.632,00	100,00
	PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY	94.001713.614,26	94.001.713.614,26	100,00
	PT Anindya Mitra Internasional (AMI)	1.185.651.326,00	1.185.651.326,00	100,00
B	**Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta**	**99.318.011,00**	**99.318.011,00**	**100,00**
	PT Asuransi Bangun Askrida	99.318.011,00	99.318.011,00	100,00
C	**Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank**	**6.025.001.568.,23**	**6.025.001.568.,20**	**100,00**
	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	6.025.001.568,23	6.025.001.568,20	100,00
	Jumlah	**101.460.382.142,49**	**101.460.382.151,46**	**100,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp68.593.050.174,05 dan dapat direalisasikan sebesar Rp92.263.554.317,54 atau 134,51% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp88.210.302.665,74 atau 48,48%dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2019 sebesar Rp180.473.856.983,28. Adanya Pandemi Covid-19, target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 diturunkan.

Realisasi Tahun 2020, dapat melebihi dari target yang telah disesuaikan tersebut. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut;

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	438.704.000,00	1.015.989.156,00	231,59
Penerimaan Jasa Giro	7.378.215.717,00	21.541.249.683,40	291,96
Pendapatan Bunga Deposito	2.834.616.261,62	4.301.268.283,62	151,74
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	9.475.000,00	10.475.000,00	110,55
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	243.262.260,00	452.947.912,00	186,20
Pendapatan Denda Pajak	15.922.682.700,00	15.922.682.700,00	100,00
Pendapatan Denda Retribusi	1.638.230,00	5.355.130,00	326,89
Pendapatan dari Pengembalian	340.173.744,00	493.999.740,00	145,22
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	--	-	-
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	59.062.500,00	99.925.000,00	169,19
Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	35.743.006.079,00	38.945.105.715,00	108,96
Pendapatan dari pengelolaan BUKP	552.551.676,93	552.551.676,93	100,00
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.682.691.125.,00	3.311.776.530,00	123,45
Pendapat Denda Lain-lain	13.508.000,00	34.978.000,00	258,94
Tindak Lanjut Hasil Temuan	2.335.962.880,00	4.201.795.416,66	179,87
Lain-Lain	37.500.000,00	1.373.454.374,00	662,54
Jumlah	**68.593.050.174,05**	**92.263.554.317,54**	**134,51**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

b. Dana Perimbangan

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas: (i) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (ii) Dana Alokasi Umum; dan (iii) Dana Alokasi Khusus. Target Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.395.248.332.317,00 dan realisasi sebesar Rp2.371.292.926.821,00 atau 99,00% dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2020 tidak mencapai target karena adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan semua penerimaan mengalami penurunan.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	119.851.434.669,00	114.277.342.675,00	95,35
2	Dana Alokasi Umum	1.234.516.326.000,00	1.227.647.676.000,00	99,44
3	Dana Alokasi Khusus	1.040.880.571.648,00	1.029.367.908.146,00	93,38
	Jumlah	**2.395.248.332.317,00**	**2.371.292.926.821,00**	**99,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2020 sebesar Rp2.371.292.926.821,00 tidak mencapai target karena penerimaan negara dari sektor pajak tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga mempengaruhi penyaluran ke daerah. Dana Alokasi Khusus tidak mencapai target karena penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik disalurkan sesuai dengan kontrak yang dilakukan oleh daerah.

c. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Pos penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah DIY terdiri dari: (i) Bagi Hasil Pajak; (ii) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam; dan (iii) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Target Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp119.851.434.669,00 dengan realisasi Rp114.277.342.675,00 atau sebesar 95,35%. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp58.216.760.875,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yang sebesar Rp56.060.581.800,00.

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak	115.924.403.473,00	110.660.909.197,00	95,46
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	31.627.168,00	24.870.747,00	78,64
3	Dana Bagi Bagi Hasil Cukai	3.895.404.028,00	3.591.562.731,00	92,20
Jumlah		**119.851.434.669,00**	**114.277.342.675,00**	**95,35**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

d. Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Perimbangan terbesar pada Pemda DIY berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Alokasi DAU Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp1.234.516.326.000,00 dengan realisasi Rp1.227.647.676.000,00 atau 99,44%. Realisasi penerimaan DAU Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp123.454.344.000,00 dibandingkan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.351.102.020.000,00 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga target juga diturunkan dan mempengaruhi realisasi

e. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK pada Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp1.040.880.571.648,00 terdiri dari DAK Fisik Rp129.630.558.000,00 dan DAK Non Fisik Rp911.250.013.648,00. Sedangkan realisasi DAK sebesar Rp1.029.367.908.146,00 terdiri DAK Fisik Rp121.052.748.710,00 dan DAK Non Fisik Rp908.315.159.436,00. Realisasi penerimaan DAK Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp50.827.597.693,00 atau 5,19% dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu Rp978.540.310.453,00.

DAK Fisik meliputi DAK Fisik reguler dan penugasan, diperuntukkan bagi: (i) Pendidikan; (ii) Kesehatan; (iii) Infrastruktur Jalan; (iv) Infrastruktur Irigasi; (v) Kelautan dan Perikanan; (vi) Pertanian; (vii) Kehutanan, dan (viii) Pariwisata. Peruntukan DAK Non Fisik meliputi (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (ii) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM; (iii) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; (iv) Dana Tunjangan Profesi Guru; dan (vi) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Perincian DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendidikan	108.592.110.000,00	106.068.897.873,00	97.68
2	Kesehatan	7.527.698.000,00	5.860.796.287,00	77,86
3	Infrastruktur Jalan	-	-	-
4	Infrastruktur Irigasi	5.764.880.000,00	2.652.397.000,00	46,01
5	Kelautan dan Perikanan	627.342.000,00	547.052.500,00	87,20
6	Pertanian	1.887.696.000,00	1.887.696.000,00	100,00
7	Kehutanan	-	-	-
8	Pariwisata	5.230.832.000,00	4.035.909.050,00	77,16
Jumlah		**129.630.558.000,00**	**121.052.748.710,00**	**93,38**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Rincian DAK Non Fisik pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Operasional Sekolah	658.475.159.396	652.126.992.800	99,04
2	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.570.646.297	3.570.646.297	100,00
3	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	36.688.665	116.018.000	316,22
4	Dana Tunjangan Profesi Guru	242.470.349.000	242.470.349.000	100,00
5	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	6.697.170.290	10.031.153.339	149,78
Jumlah		**911.250.013.648**	**908.315.159.436**	**99,68**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah Lainnya. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp1.362.943.741.411,39 dengan realisasi Rp1.363.759.740.924,00 atau 100,06% dari target yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp132.900.755.171,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu Rp1.230.858.985.753,00. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	7.533.500.000,00	8.349.499.513,00	110,83
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.354.630.222.221,39	1.354.630.222.221,00	100,00
3	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	780.019.190,00	780.019.190,00	100,00
Jumlah		**1.362.943.741.411,39**	**1.363.759.740.924,00**	**100,06**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Rincian realisasi penerimaan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Target Pendapatan Hibah Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp7.533.500.000,00 dengan realisasi Rp8.349.499.513,00 atau 110,83%.

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp198.963.487,00 atau 2,33% dibandingkan realisasi 2019 yaitu Rp8.548.463.000,00. Penerimaan Hibah tersebut berasal dari pemerintah dan badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, Pendapatan Hibah dari Luar Negeri serta Pendapatan Hibah dari Kelompok Mayarakat/ Perorangan.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp7.533.500.000,00 dapat direalisasikan Rp6.958.643.000,00 atau 92,37%. Dari Dealer Otomotif Rp3.006.443.000,00, Main Dealer Rp28.200.000,00 dan PT. Jasa Raharja Rp3.924.000,00. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan dianggarkan sebesar Rp 0,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.390.856.513,00.

2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp1.354.630.222.221,39 terdiri dari Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp68.053.994.000,00. dan Dana Otonomi Khusus berupa Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1.286.576.228.221,39.

Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2020 sebesar Rp1.354.630.222.221,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut terdiri dari Dana Penyesuaian sebesar Rp68.053.994.000,00 dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1.286.576.228.221,00. Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp133.025.734.778,00 atau 10,89% dari realisasi tahun 2019 yaitu Rp1.221.604.487.443,00. Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian berupa DID Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp9.222.195.000,00 atau 15,68% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp58.831.799.000,00.

Realisasi penerimaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp123.803.539.778,00 atau 10,65% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp1.162.772.688.443,00. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Dana Keistimewaan DIY terkait dengan implementasi dari UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai kewenangan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada DIY.

3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Bantuan Keuangan yang berasal dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat yang merupakan konstribusi *sharing* dengan anggaran sebesar Rp780.019.190,00 dan terealisasi Rp780.019.190,00 (100%).

Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp73.983.880,00 atau 10,48% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu Rp706.035.310,00. Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.12. Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Yogyakarta	583.430.060,00	583.430.060,00	100,00
2	Kabupaten Bantul	91.448.260,00	91.448.260,00	100,00
3	Kabupaten Sleman	105.140.870,00	105.140.870,00	100,00
Jumlah		**780.019.190,00**	**780.019.190,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

3. Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Pendapatan

a. Permasalahan

Secara umum, target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD telah mampu mencapai target yang ditetapkan. Dalam rangka memacu peningkatan pendapatan, perlu diidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Perangkat Daerah berpendapatan. Kendala tersebut antara lain:

1) Kurangnya *channel* pembayaran pajak daring dalam pembayaran pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2) Pandemi Covid-19 menghancurkan semua sektor ekonomi, menyebabkan penurunan kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.
3) Banyaknya usaha yang tutup akibat *pandemi corona* yang tak kunjung selesai, mengakibatkan penerimaan retribusi menurun tajam.
4) Penerimaan Bagi Hasil dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berkurang karena adanya *refocussing* Anggaran akibat adanya pandemi Covid-19.

b. Solusi

Berdasarkan kendala tersebut di atas, secara bertahap telah dilakukan upaya perbaikan antara lain:

1) Menambahkan chanel pembayaran pajak daring dengan cara bekerjasama dengan beberapa bank dan layanan pembayaran daring.
2) Membebaskan denda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, untuk meringankan beban masyarakat.
3) Memberikan keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi dalam periode tertentu.
4) Melakukan penataan Anggaran terkait pengeluaran Belanja yang bersumber dari dana Bagi Hasil dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

C. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kondisi perekonomian nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2020, baik itu Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung. Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2020, sebagai berikut:

a. Memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT);
b. Melakukan percepatan penggunaan APBD antara lain melalui pemanfaatan BTT dengan prioritas:
   1) Penanganan kesehatan;
   2) Penanganan dampak ekonomi; dan
   3) Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial.
c. Melaksanakan penyesuaian APBD antara lain dengan melakukan realokasi anggaran belanja tidak terduga untuk menambah barang/jasa dan belanja modal dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan status kategori zona wilayah terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh satgas penanganan Covid-19 setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau untuk mendanai keperluan mendesak;
d. Menghitung kembali belanja gaji pegawai dengan dasar realisasi gaji bulan Juni dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang tidak dijadikan penghitung besaran gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya;
e. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten dan Kota disesuaikan dengan target penerimaan pajak daerah dan memperhitungan kelebihan penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2019;

f. Melakukan pencermatan dan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan OPD yang tidak dapat dilaksanakan, dapat ditunda pelaksanaannya, dapat diredesign TUK dan outputnya;

g. Menghentikan seluruh proses pengadaan barang/jasa yang belum melakukan tanda tangan kontrak per tanggal 3 April 2020, kecuali untuk pengadaaan barang/jasa yang bersumber pada dana keistimewaan, pengadaan barang/jasa untuk operasional OPD yang wajib dan mengikat, dan pengadaan barang/jasa untuk operasi dan pemeliharaan dasar/publik.

2. Target dan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemda DIY menetapkan Belanja sebesar Rp5.865.604.964.088,35 Realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp5.433.564.049.791,03. Realisasi Belanja pada tahun 2020 mengalami penurunan baik secara nominal maupun persentase dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019, realisasi belanja sebesar Rp5.544.650.430.330,02 atau 92,75%. Salah satu penyebab Penurunan serapan anggaran atau realisasi belanja ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga akhir tahun 2020. Belanja tahun 2020 dilaksanakan oleh 33 perangkat daerah sebagai Pengguna Anggaran, dengan rincian anggaran dan belanja sebagai berikut:

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Organisasi Perangkat Daerah DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.227.433.266.212,00	1.177.846.859.137,00	95,96
2	Dinas Kesehatan	175.707.757.161,29	129.617.621.649,00	73,77
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	573.146.992.580,00	544.725.757.367,01	95,04
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	47.515.576.065,00	41.518.983.074,00	87,38
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.665.849.353,00	7.718.268.374,00	89,07
6	Satuan Polisi Pamong Praja	14.263.558.338,00	13.650.721.472,00	95,70
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.576.619.707,00	22.634.196.360,00	92,10
8	Dinas Sosial	68.446.611.129,11	62.312.687.145,00	91,04
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.835.181.547,00	22.120.340.823,00	92,81
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	7.717.460.323,00	7.199.857.614,00	93,29
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48.030.733.178,00	44.389.681.878,00	92,42
12	Dinas Perhubungan	26.967.535.763,00	24.304.688.951,00	90,13
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.050.515.863,00	46.230.575.777,00	96,21
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	23.212.159.028,00	21.054.309.408,00	90,70

No	Organisasi Perangkat Daerah	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.992.188.224,00	5.601.799.349,00	93,49
16	Dinas Kebudayaan	314.966.111.077,00	296.976.785.408,00	94,29
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	22.202.840.172,00	21.159.002.048,00	95,30
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.002.627.957,00	20.908.475.789,00	95,03
19	Dinas Pariwisata	22.270.777.488,00	16.562.042.923,00	74,37
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	44.304.152.668,23	42.084.829.468,00	94,99
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.297.649.150,00	16.787.984.617,00	91,75
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	2.801.609.507,00	2.783.613.656,00	99,36
23	Sekretariat Daerah	62.454.018.536,00	53.821.946.480,00	86,18
24	Badan Penghubung Daerah	4.687.741.856,00	4.484.543.051,00	95,67
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.195.138.200,00	38.852.849.274,00	96,66
26	Sekretariat DPRD	73.062.817.844,00	55.650.672.651,00	76,17
27	Inspektorat	14.522.464.795,00	13.899.300.234,00	95,71
28	Paniradya Kaistimewan	11.301.857.737,00	10.488.626.016,00	92,80
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.865.276.197,00	14.217.000.389,00	89,61
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	221.476.886.478,00	210.870.555.950,39	95,21
31	PPKD/BUD	2.352.490.432.180,72	2.147.734.033.083,63	91,30
32	Badan Kepegawaian Daerah	287.791.363.357,00	285.888.130.502,00	99,34
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	11.349.194.417,00	9.467.309.873,00	83,42
	Jumlah	**5.865.604.964.088,35**	**5.433.564.049.791,03**	**91,40**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Anggaran Belanja Tahun 2020 sebesar Rp5.865.604.964.088,35 terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.884.017.560.770,72 serta Belanja Langsung Rp1.981.587.403.317,63. Realisasi belanja sebesar Rp5.433.564.049.791,03 terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung Rp3.626.470.537.480,02 dan realisasi Belanja Langsung Rp1.807.093.512.311,01, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14. Realisasi Belanja DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Belanja Tidak Langsung	3.884.017.560.770,72	3.626.470.537.480,02	93,37
2	Belanja Langsung	1.981.587.403.317,63	1.807.093.512.311,01	91,19
	Jumlah	**5.865.604.964.088,35**	**5.433.564.049.791,03**	**92,63**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Subsidi, (iii) Belanja Hibah, (iv) Belanja

Bantuan Sosial, (v) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, (vi) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, dan (vii) Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dianggarkan pada semua organisasi perangkat daerah, sedangkan selain Belanja Pegawai dianggarkan hanya pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp3.884.017.560.770,72 dengan realisasi Rp3.626.470.537.480,02 atau 93,37%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	1.531.527.128.590,00	1.478.736.504.396,39	96,55
2	Belanja Subsidi	78.044.866.828,00	78.044.846.317,00	100,00
3	Belanja Hibah	751.144.104.600,00	676.721.135.000,00	90,09
4	Belanja Bantuan Sosial	2.492.000.000,00	1.492.000.000,00	59,87
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemdes	693.891.920.604,00	693.891.920.604,00	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemdes	404.430.889.886,00	391.944.778.392,63	96,91
7	Belanja Tidak Terduga	422.486.650.262,72	305.639.352.770,00	72,34
	Jumlah	**3.884.017.560.770,72**	**3.626.470.537.480,02**	**93,37**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Belanja Pegawai tidak langsung juga menampung uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepada daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Anggaran Belanja Pegawai tidak langsung tahun 2020 sebesar Rp1.531.527.128.590,00 dengan realisasi sebesar Rp1.478.736.504.396,39 atau 96,55%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Gaji dan Tunjangan	956.086.322.002,00	904.306.293.550,39	94,58
2	Tambahan Penghasilan PNS	521.823.764.915,00	521.178.068.065,00	99,88
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	12.489.000.000,00	12.414.000.000,00	99,40
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	40.138.051.521,00	40.103.069.151,00	99,91
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	989.990.152,00	735.073.630,00	74,25
Jumlah		**1.531.527.128.590,00**	**1.478.736.504.396,39**	**96,55**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

2) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp78.044.866.828,00 dan realisasi sebesar Rp78.044.846.317,00 atau sebesar 100%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 ayat (1) Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tersebut merupakan perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk/jasa pelayanan umum masyarakat. Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Belanja Subsidi pada Pemda DIY merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Service* kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan angkutan. Secara rinci ketentuan tentang Subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2019 tentang Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Servise*.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggaran Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp751.144.104.600,00 dengan realisasi sebesar Rp676.721.135.000,00 atau 90,09%. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.17. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

Kode	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5.1.4.04.	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	748.663.566.600,00	674.240.597.000,00	90,06
5.1.4.04.01.	Hibah Urusan Pendidikan	619.021.710.000,00	559.762.297.800,00	90,43
5.1.4.04.02.	Hibah Urusan Kesehatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
5.1.4.04.06.	Hibah Urusan Sosial	417.500.000,00	417.500.000,00	100,00
5.1.4.04.08.	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	968.800.000,00	968.800.000,00	100,00
5.1.4.04.08.	Hibah Urusan Pangan	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00
5.1.4.04.13.	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.185.000.000,00	2.185.000.000,00	100,00
5.1.4.04.16.	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	805.866.000,00	557.508.600,00	69,18
5.1.4.04.17.	Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.000.000,00	259.000.000,00	100,00
5.1.4.04.33.	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	1.000.000.000,00	400.000.000,00	40,00
5.1.4.04.39.	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	15.000.000.000,00	6.000.000.000,00	40,00
5.1.4.04.40.	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	5.315.200.000,00	-	-
5.1.4.04.99.	Hibah Urusan Keistimewaan	102.460.490.600,00	102.460.490.600,00	100,00
5.1.4.07.	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	2.480.538.000,00	2.480.538.000,00	100,00
5.1.4.07.01.	Belanja Hibah Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	253.759.200,00	253.759.200,00	100,00
5.1.4.07.02.	Belanja Hibah Kepada Partai Nasional Demokrat	161.514.000,00	161.514.000,00	100,00
5.1.4.07.03.	Belanja Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera	283.305.600,00	283.305.600,00	100,00

Kode	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5.1.4.07.04.	Belanja Hibah Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	785.576.400,00	785.576.400,00	100,00
5.1.4.07.05.	Belanja Hibah Kepada Partai Golongan Karya	227.136.000,00	227.136.000,00	100,00
5.1.4.07.06.	Belanja Hibah Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	269.019.600,00	269.019.600,00	100,00
5.1.4.07.07.	Belanja Hibah Kepada Partai Demokrat	94.432.800,00	94.432.800,00	100,00
5.1.4.07.08.	Belanja Hibah Kepada Partai Amanat Nasional	279.979.200,00	279.979.200,00	100,00
5.1.4.07.09.	Belanja Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan	74.612.400,00	74.612.400,00	100,00
5.1.4.07.10.	Belanja Hibah Kepada Partai Solidaritas Indonesia	51.202.800,00	51.202.800,00	100,00
Jumlah		**751.144.104.600,00**	**676.721.135.000,00**	**90,09**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp2.492.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.492.000.000,00 atau 59,87%.

Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan	1.492.000.000,00	1.492.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00	-	-
Jumlah		**2.492.000.000,00**	**1.492.000.000,00**	**59,87**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian

hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah. Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp693.891.920.604,00 dan direalisasikan sebesar Rp693.891.920.604,00 atau 100%. Secara rinci realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

Kode	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota			
5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	120.965.338.876,00	120.965.338.876,00	100,00
5.1.6.02.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	159.398.655.115,00	159.398.655.115,00	100,00
5.1.6.02.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	88.092.018.037,00	88.092.018.037,00	100,00
5.1.6.02.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul	102.149.130.231,00	102.149.130.231,00	100,00
5.1.6.02.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	223.286.778.345,00	223.286.778.345,00	100,00
Jumlah		**693.891.920.604,00**	**693.891.920.604,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antardaerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan tersebut bersifat khusus yaitu khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp404.430.889.886,00 dengan realisasi Rp391.944.778.392,63 atau 96,91%. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

Kode	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	1.345.000.000,00	1.345.000.000,00	100,00
5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	1.345.000.000,00	1.345.000.000,00	100,00
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat Khusus	403.085.889.886,00	390.599.778.392,63	96,90
5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus	664.000.000,00	466.000.000,00	70,18
5.1.7.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus	10.349.000.000,00	8.789.000.000,00	84,93
5.1.7.05.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus	72.360.067.675,00	70.515.067.675,00	97,45
5.1.7.05.04.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus	6.884.000.000,00	5.426.000.000,00	78,82
5.1.7.05.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus	4.514.000.000,00	4.514.000.000,00	100,00
5.1.7.05.06.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	53.712.360.784,00	53.113.338.517,42	98,88
5.1.7.05.07.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	19.708.493.490,00	18.260.701.557,00	92,65
5.1.7.05.08.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	102.452.762.400,00	100.032.027.550,00	97,64
5.1.7.05.09.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	87.909.776.537,00	85.579.025.848,21	97,35
5.1.7.05.10.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus Urusan Keistimewaan	44.531.429.000,00	43.904.617.245,00	98,59
Jumlah		**404.430.889.886,00**	**391.944.778.392,63**	**96,91**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp422.486.650.262,72 dengan realisasi Rp305.639.352.770,00 atau 72,34%. Belanja Tidak Terduga Tahun

Anggaran 2020 tidak terealisasi karena tidak ada kejadian yang sifatnya luar biasa atau *force majeure* yang harus didanai dari Belanja Tidak Terduga.

b. Belanja Langsung

Pelaksanaan program dan kegiatan baik yang merupakan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dianggarkan melalui Belanja Langsung. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp1.981.587.403.317,63 dengan realisasi Rp1.807.093.512.311,01 atau 91,19%. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Langsung tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	98.507.330.130,15	83.500.380.311,00	84,77
2	Belanja Barang dan Jasa	905.031.751.647,71	782.830.947.893,01	86,50
3	Belanja Modal	978.048.321.539,77	940.762.184.107,00	96,19
Jumlah		**1.981.587.403.317,63**	**1.807.093.512.311,01**	**91,19**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Langsung merupakan pengeluaran honorarium kepada PNSD dan non PNSD dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan. Anggaran Belanja Pegawai Langsung tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp98.507.330.130,15 dengan realisasi sebesar Rp83.500.380.311,00 atau 84,77%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Langsung, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

Kode	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5.2.1.	Belanja Pegawai	98.507.330.130,15	83.500.380.311,00	84,77
5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.329.227.000,00	19.596.115.725,00	96,39
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	56.612.132.140,00	53.211.130.868,00	93,99
5.2.1.03.	Belanja Pegawai BLUD	20.441.866.990,15	9.678.748.718,00	47,35
5.2.1.04.	Belanja Pegawai BOS	1.124.104.000,00	1.014.385.000,00	90,24

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah meliputi belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, serta belanja lainnya yang sejenis.

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp905.031.751.647,71 dengan realisasi sebesar Rp782.830.947.893,01 atau 86,50%. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

Kode	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	905.031.751.647,71	782.830.947.893,01	86,50
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.624.677.843,00	19.488.864.840,00	94,49
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	72.181.497.829,18	63.498.920.943,00	87,97
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	234.573.235.074,39	210.245.109.980,00	89,63
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.303.627.200,00	1.232.049.442,00	94,51
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.638.956.415,00	15.641.565.381,00	88,68
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.955.961.330,23	20.294.260.476,00	92,43
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir	6.668.683.887,00	5.218.149.047,00	78,25
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.541.710.500,00	2.625.071.300,00	57,80
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	815.970.000,00	686.500.800,00	84,13
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.791.152.000,00	7.971.790.911,00	73,87
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.767.103.700,00	32.863.848.500,00	87,02

Kode	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	719.305.000,00	689.710.000,00	95,89
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.811.342.000,00	2.596.892.750,00	92,37
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.217.612.250,00	3.059.712.850,00	95,09
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.307.382.734,00	31.013.363.323,00	59,29
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.066.580.000,00	1.984.630.000,00	96,03
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.205.052.000,00	1.014.977.352,00	84,23
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	47.069.947.711,00	44.570.085.445,01	94,69
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35.665.630.551,00	33.655.752.775,00	94,36
5.2.2.23.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	1.179.706.450,00	873.417.612,00	74,04
5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	1.650.000.000,00	1.536.600.000,00	93,13
5.2.2.26.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	2.224.700.000,00	22.092.740.000,00	99,41
5.2.2.28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	87.799.307.573,91	59.250.219.679,00	67,48
5.2.2.29.	Belanja Hibah Barang/Jasa	70.689.402.000,00	67.677.202.052,00	95,74
5.2.2.30.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	8.899.484.880,00	7.517.947.911,00	84,48
5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.070.264.500,00	21.570.564.500,00	82,74
5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.040.084.160,00	4.266.200.000,00	84,65
5.2.2.33.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	120.350.000,00	112.397.000,00	93,39
5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa BOS	107.433.024.059,00	99.582.403.024,00	92,69

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Anggaran Belanja Modal Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp978.048.321.539,77 dengan realisasi Rp940.762.184.107,00 atau 96,19% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

Kode	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5.2.3.	Belanja Modal	978.048.321.539,77	940.762.184.107,00	96,19
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	705.573.303.389,00	696.797.547.541,00	98,76
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	1.446.529.500,00	1.017.692.000,00	70,35
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	6.731.904.140,00	6.144.704.140,00	91,28
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	264.311.600,00	234.255.150,00	88,63
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	3.362.256.200,00	3.078.799.410,00	91,57
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	619.986.500,00	603.655.000,00	97,37
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	912.076.500,00	885.248.440,00	97,06
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.220.372.287,00	10.562.174.201,00	94,13
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.029.117.122,00	40.251.269.431,00	98,10
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.392.318.550,00	4.697.858.002,00	87,12
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	168.525.000,00	161.627.132,00	95,91
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	399.078.500,00	394.626.660,00	98,88
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5.242.641.820,00	4.976.678.782,00	94,93
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	543.541.500,00	528.873.000,00	97,30
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	1.314.495.550,00	1.144.606.750,00	87,08
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	444.766.950,00	415.142.450,00	93,34
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	34.683.869.884,00	33.577.088.502,00	96,81
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	35.326.911.352,00	26.489.134.280,00	74,98
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	17.181.000,00	-	-
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	14.218.355.000,00	10.051.919.292,00	70,70

Kode	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.860.276.000,00	2.418.110.045,00	84,54
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	978.980.000,00	820.875.450,00	83,85
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	53.697.764.047,77	49.993.768.269,00	93,10
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	119.842.460,00	118.894.300,00	99,21
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	1.874.548.000,00	1.818.016.945,00	96,98
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	1.370.588.000,00	1.035.459.432,00	75,55
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	114.055.000,00	113.367.800,00	99,40
5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	334.275.000,00	332.989.336,00	99,62
5.2.3.33.	Belanja Modal BLUD	11.865.500.403,00	6.728.785.947,00	56,71
5.2.3.34.	Belanja Modal Sertifikasi Tanah	3.000.000,00	2.477.360,00	82,58
5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	235.962.000,00	219.319.051,00	92,95
5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
5.2.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/ Telepon/Gas	376.027.000,00	360.130.500,00	95,77
5.2.3.38.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	21.592.957.540,00	21.328.292.713,00	98,77
5.2.3.39.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.699.503.745,00	13.445.296.796,00	98,14

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

c. Belanja Dana Keistimewaan

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar Rp5.865.604.964.088,35 dan realisasi sebesar Rp5.433.564.049.791,03, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 (Lampiran V) ditetapkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00. Penyaluran Dana Keistimewaan Tahun 2020 sebesar Rp1.286.576.228.221,00 berasal dari nilai alokasi sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2019 sebesar Rp33.423.771.778,61.

Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2020 dilaksanakan oleh OPD dilingkungan Pemda DIY dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemda DIY ke rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten/Kota untuk pembiayaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan Keistimewaan. Sisa Dana Keistimewaan pada Pemda Kabupaten/Kota pada akhir tahun anggaran disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemda DIY.

Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran telah terserap sebesar Rp1.279.572.655.079,63 atau 96,94% sesuai dengan Berita Acara yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
I	**KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH**	**14.554.390.500,00**	**13.266.845.421,00**	**1.287.545.079,00**	**91,15**
1	Kota Yogyakarta	174.296.500,00	157.614.750,00	16.681.750,00	90,43
2	Kabupaten Bantul	1.270.319.000,00	1.185.032.400,00	85.286.600,00	93,29
3	Kabupaten Kulon Progo	1.289.277.500,00	1.247.489.300,00	41.788.200,00	96,76
4	Kabupaten Gunungkidul	1.213.190.900,00	1.065.057.521,00	148.133.379,00	87,79
5	Kabupaten Sleman	741.920.000,00	728.119.675,00	13.800.325,00	98,14
6	Biro Tata Pemerintahan	238.854.000,00	212.495.000,00	26.359.000,00	88,96
7	Biro Hukum Setda	325.000.000,00	302.111.200,00	22.888.800,00	92,96
8	Biro Organisasi	1.150.752.750,00	923.024.400,00	227.728.350,00	80,21
9	Paniradya Kaistimewan	7.755.231.850,00	7.057.635.675,00	697.596.175,00	91,00
10	Badan Kepegawaian Daerah	195.548.000,00	193.685.500,00	1.862.500,00	99,05
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000,00	194.580.000,00	5.420.000,00	97,29
II	**KEBUDAYAAN**	**744.003.521.915,00**	**714.035.144.010,84**	**29.968.377.904,16**	**95,97**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1	Kota Yogyakarta	11.986.349.265,00	11.627.809.886,84	358.539.378,16	97,01
2	Kabupaten Bantul	13.747.762.590,00	12.839.672.482,00	908.090.108,00	93,39
3	Kabupaten Kulon Progo	93.604.771.950,00	91.586.440.552,00	2.018.331.398,00	97,84
4	Kabupaten Gunungkidul	81.273.171.500,00	80.080.153.950,00	1.193.017.550,00	98,53
5	Kabupaten Sleman	40.789.854.150,00	40.420.852.720,00	369.001.430,00	99,10
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.821.288.500,00	2.164.062.618,00	657.225.882,00	76,70
7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	183.994.000,00	183.994.000,00	-	100,00
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	36.286.983.752,00	32.426.991.803,00	3.859.991.949,00	89,36
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	864.876.500,00	626.484.000,00	238.392.500,00	72,44
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.975.000,00	3.975.000,00	-	100,00
11	Dinas Sosial	2.424.100.000,00	2.082.845.270,00	341.254.730,00	85,92
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	797.875.500,00	714.697.500,00	83.178.000,00	89,58
13	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	182.000.000,00	175.140.400,00	6.859.600,00	96,23
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	38.906.714.950,00	38.000.811.123,00	905.903.827,00	97,67
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.081.965.250,00	3.842.226.000,00	239.739.250,00	94,13
16	Dinas Kebudayaan	276.814.504.942,00	261.666.622.714,00	15.147.882.228,00	94,53
17	Museum Negeri Sonobudoyo	12.468.457.066,00	11.568.102.454,00	900.354.612,00	92,78
18	Taman Budaya Yogyakarta	6.053.305.600,00	5.821.612.940,00	231.692.660,00	96,17
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.261.818.000,00	3.123.877.920,00	137.940.080,00	95,77
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.783.547.000,00	1.729.742.300,00	53.804.700,00	96,98
21	Dinas Pariwisata	6.927.825.500,00	5.041.079.190,00	1.886.746.310,00	72,77
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.358.892.800,00	1.345.105.350,00	13.787.450,00	98,99
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.076.626.500,00	3.696.064.350,00	380.562.150,00	90,66

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
24	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	224.676.000,00	213.216.000,00	11.460.000,00	94,90
25	Badan Penghubung Daerah	857.695.000,00	833.072.888,00	24.622.112,00	97,13
26	PPKD/BUD	102.220.490.600,00	102.220.490.600,00	-	100,00
III	**PERTANAHAN**	**19.469.545.187,00**	**16.644.881.594,21**	**2.824.663.592,79**	**85,49**
1	Kota Yogyakarta	1.239.550.000,00	1.194.422.250,00	45.127.750,00	96,36
2	Kabupaten Bantul	3.857.701.400,00	3.409.016.075,00	448.685.325,00	88,37
3	Kabupaten Kulon Progo	3.170.804.000,00	2.813.892.448,00	356.911.552,00	88,74
4	Kabupaten Gunungkidul	4.789.091.637,00	3.812.290.277,21	976.801.359,79	79,60
5	Kabupaten Sleman	2.361.996.850,00	2.127.286.850,00	234.710.000,00	90,06
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.162.890.800,00	2.444.873.637,00	718.017.163,00	77,30
7	Biro Tata Pemerintahan	264.197.500,00	243.687.000,00	20.510.500,00	92,24
8	Biro Hukum	383.313.000,00	359.413.057,00	23.899.943,00	93,76
9	PPKD/BUD	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100,00
III	**TATA RUANG**	**541.972.542.398,00**	**535.625.784.053,58**	**6.346.758.344,42**	**98,83**
1	Kota Yogyakarta	40.312.165.019,00	40.133.491.630,58	178.673.388,42	99,56
2	Kabupaten Bantul	832.710.500,00	826.980.600,00	5.729.900,00	99,31
3	Kabupaten Kulon Progo	4.387.908.950,00	4.384.205.250,00	3.703.700,00	99,92
4	Kabupaten Gunungkidul	634.322.500,00	621.524.100,00	12.798.400,00	97,98
5	Kabupaten Sleman	637.658.000,00	628.358.000,00	9.300.000,00	98,54
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	417.894.725.978,00	412.555.793.455,00	5.338.932.523,00	98,72
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.054.739.788,00	1.373.167.640,00	681.572.148,00	66,83
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.765.710.000,00	3.731.228.683,00	34.481.317,00	99,08
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34.660.000,00	34.320.000,00	340.000,00	99,02

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
10	Dinas Perhubungan	3.321.359.210,00	3.245.278.602,00	76.080.608,00	97,71
11	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	114.942.500,00	114.742.500,00	200.000,00	99,83
12	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	402.839.953,00	401.310.793,00	1.529.160,00	99,62
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	67.578.800.000,00	67.575.382.800,00	3.417.200,00	99,99
	Jumlah	**1.320.000.000.000,00**	**1.279.572.655.079,63**	**40.427.344.920,37**	**96,94**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

d. Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

1) Permasalahan

Secara umum capaian realisasi belanja tahun 2020 pada perangkat daerah lebih dari 90% dari anggaran belanja yang ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa perangkat daerah yang capaian realisasi belanjanya kurang dari 90% dari anggaran yang ditetapkan, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pariwisata, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan. Sisa anggaran sebagian besar berasal dari sisa lelang dan efisiensi. Permasalahan utama Belanja Daerah tahun 2020 dapat diinventarisasi sebagai berikut:

1) Kegiatan yang bersifat persediaan seperti listrik, perjalanan dinas, rapat-rapat, mengalami penurunan.
2) Beberapa pos anggaran tidak dioptimalkan karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi, untuk itu perlunya mengubah metode pelaksanaan seperti pada Pelaksanaan Rapat/Sosialisasi/ Publikasi/Penyelenggaraan *event*/Pelatihan dilaksanakan melalui daring.
3) Masih adanya temuan-temuan kelebihan volume pekerjaan konstruksi sebagai hasil pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah maupun Pemeriksa Eksternal.
4) Masih adanya pengadaan barang/jasa yang gagal untuk memilih/ menetapkan penyedia barang/jasa.
5) Masih adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan namun dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) dilakukan efisiensi.

2) Solusi

1) Berkenaan dengan capaian indikator kinerja yang tidak optimal dalam masa pandemi, dilakukan evaluasi perencanaan yang komprehensif baik dari aspek sasaran, program, dan kegiatan.
2) Dilakukan perencanaan strategis program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan capaian sasaran strategis serta mempertimbangkan adaptasi *pranatan anyar* agar memperoleh capaian *outcome* yang optimal dan akuntabel.
3) Penyusunan dokumen perencanaan yang lebih cermat, memperbaiki manajemen pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, sehingga dapat meminimalisir Temuan-temuan kelebihan volume konstruksi.
4) Meningkatkan sumber daya pengelola pengadaan barang/jasa di Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa.
5) Meningkatkan koordinasi antara bagian program dengan bagian pelaporan sehingga permasalahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak terkendala dengan tidak tersedianya anggaran karena pergeseran dan efisiensi.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan besar dan menjadi prioritas Pemda DIY mengakibatkan berubahnya pembiayaan daerah. Hal ini dasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah. Regulasi ini mengatur pembebanan pengeluaran untuk penanganan Covid-19 pada Belanja Tidak Terduga (BTT) dan tahapannya bila BTT tidak mencukupi, antara lain dengan menggunakan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, kebijakan pembiayaan juga dipengaruhi oleh hasil pelaporan keuangan tahun anggaran 2019. Mempetimbangkan hal tersebut, kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2020 adalah:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sisa lebih penghitungan anggaran tahun lalu (SILPA) tahun 2019 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp420,567 Milyar.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dilakukan penyesuaian yang terdiri dari penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY, PD Air Bersih, Asuransi Bangun Askrida dan pemberian dana bergulir kepada BUKP. Penyertaan modal kepada PT BPD DIY pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dirasionalisasi sebesar Rp61,040 Milyar. Rasionalisasi terhadap penyertaan modal dilakukan untuk percepatan penanganan Covid-19 sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2020.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp425.069.919.295,42 dengan realisasi Rp423.712.988.195,42 atau 99,68%. Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp117.590.000.000,00 dan terealisasi 100% dengan peruntukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp101.000.000.000,00, kepada Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp90.000.000,00, kepada PD Air Bersih Rp12.500.000.000,00 dan Investasi Dana Bergulir melalui BUKP sebesar Rp4.000.000.000,00.

E. PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN

1. Kinerja BUMD

a. Bank Pembangunan Daerah DIY

PT Bank BPD DIY pada tahun 2020 memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp94.001.713.614,26. Penerimaan Bagian Laba tersebut berasal dari Laba PT Bank BPD DIY Tahun 2019. Penerimaan tersebut meningkat sebesar Rp15.736.585.097,67 dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2019 sebesar Rp78.265.128.516,59

Penerimaan Bagian Laba dihitung berdasarkan nilai penyertaan modal yang dilakukan Pemda DIY. Nilai penyertaan modal Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp795.440.000.000. Modal dasar PT Bank BPD DIY sebesar Rp4.000.000.000.000,00 sedangkan kewajiban

penyertaan modal Pemda DIY sebesar Rp2.040.000.000.000,00. Posisi modal disetor tahun 2020 sebesar Rp795.440.000.000 sehingga Pemda DIY masih mempunyai kewajiban sebesar Rp1.244.560.000.000 yang akan dipenuhi sampai dengan tahun 2025. Kewajiban penyertaan modal tersebut ditetapkan dengan Perda DIY No. 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

Penambahan penyertaan modal Pemda DIY tahun 2020 sebesar Rp101.000.000.000,00. Tahun 2020 PT Bank BPD DIY memperoleh laba sebesar Rp243.980.043.013,00.

b. PT Anindya Mitra Internasional (AMI)

PT AMI memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp1.185.651.326,00. Penerimaan tersebut menurun sebesar Rp32.827.674,00 dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2019 sebesar Rp1.218.479.000,00. Hal ini disebabkan karena penerimaan pendapatan dari bidang transportasi (penerimaan tiket Trans Jogja) mengalami penurunan karena jumlah penumpang yang turun akibat pandemi Covid-19. Pada Tahun 2020 PT AMI mencatat laba sebesar Rp3.555.003.551,00.

c. PT Taru Martani

PT Taru Martani pada tahun 2020 memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp148.697.632,00. Penerimaan tersebut menurun sebesar Rp776.385.527,00 dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2019 sebesar Rp925.083.150,00. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya beban biaya amortisasi (sisa dari tahun 2015). Penerimaan Bagian Laba tersebut merupakan bagian dari laba perusahaan tahun 2019 sebesar Rp371.744.079,00

d. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)

BUKP pada tahun 2020 memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp6.025.001.568,23. Penerimaan tersebut meningkat sebesar Rp684.532.886,23 dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2019 sebesar Rp5.340.468.682,00

Tahun 2020 BUKP mencatat laba sebesar Rp11.747.195.265,96. Penerimaan bagian laba tahun 2020 merupakan setoran bagian laba 2019 yang berasal dari 75 BUKP.

F. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pada Pemda DIY pengelolaan barang milik daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perda tersebut merupakan siklus pengelolaan Barang Milik Barang yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian BMD. Agar tercipta pengelolaan barang milik daerah yang optimal dan akuntabel, manajemen aset yang terintegrasi dan bersinergi dengan stakeholder terkait, tidak hanya di satu siklus namun diseluruh siklus yang ada, memerlukan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah di Pemda DIY. Kolaborasi dari Gubernur sebagai pemegang kekuasaan BMD, Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD, BPKA selaku Pejabat Penatausahaan BMD, OPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang serta Pengurus Barang sesuai perannya masing-masing akan dapat menciptakan optimalnya pengelolaan BMD.

Di samping peluang dapat menambah pendapatan asli daerah, tantangan dan permasalahan terkait barang milik daerah juga harus dihadapi dan dicarikan solusi oleh Pemda DIY sehingga tantangan dan permasalahan itu bukan menjadi penghambat optimalisasi aset maupun optimalisasi pendapatan namun menjadi penyemangat dalam pengelolaan barang milik daerah.

Beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemda DIY, diantaranya:

1) Menyusun perencanaan yang semakin efektif dan efisien, sehingga perencanaan kebutuhan yang ada sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.
2) Lokasi tanah yang tidak strategis sehingga Pemda DIY belum bisa mengoptimalkan sepenuhnya.
3) Aturan-aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang rigid, sehingga relatif kurang fleksibel untuk diterapkan dengan dunia usaha.
4) Terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pemanfaatan BMD serta kebutuhan meningkatkan skill terutama dalam bidang *entrepreneurship*.
5) Semakin meningkatkan kelengkapan input data pada sistem informasi aset yang ada.

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah yang banyak dengan nilai yang besar

diperlukan suatu sistem informasi manajemen yang handal dan reliabel. Pada Tahun 2020 ini, Pemda DIY menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset untuk Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya, sedangkan untuk Barang Milik Daerah berupa Persediaan menggunakan Aplikasi Persediaan. Kedua aplikasi ini telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai kodefikasi barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah.

a. Dasar Hukum Pelaksanaan

1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6) Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah;
7) Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
8) Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
9) Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah,
10) Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang MIlik Daerah.

b. Tantangan dan Permasalahan

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penatausahaan barang milik daerah, diantaranya untuk semakin meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dilibatkan menjadi pengurus barang, karena mempunyai kemampuan yang berbeda-beda agar pencatatan dan pelaporan tertib dan tepat waktu penyelesaiannya. Selain itu, terus berupaya agar Aplikasi Aset Tetap dan aset lainnya yang digunakan dapat semakin dihandalkan untuk menyusun laporan. Melakukan upaya agar bisa mempunyai database aset tanah yang memadai dan berbasis GIS (*Geographic Information System*), serta integrasi sistem informasi barang dengan sistem informasi keuangan.

c. Upaya-upaya Yang Dilaksanakan

Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam penatausahaan barang milik daerah, dilakukan pendampingan dan rekonsiliasi data aset dan keuangan lebih intensif kepada pengurus barang dan kepada pengelola akuntansi sehingga laporan dapat terselesaikan tepat waktu, berupaya melakukan replacement aplikasi aset tetap secara bertahap dan pengembangan menu untuk aplikasi persediaan, mengusahakan aplikasi dapat diakses dimanapun dan kapanpun (berbasis web dan daring), mempersiapkan aplikasi khusus tanah dengan mendasarkan pada Geographic Information System.

d. Capaian

Dari pendampingan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan didapatkan jumlah barang milik daerah berupa aset tetap dan aset lainnya adalah sebanyak 3.249.051 unit dengan nilai aset sebesar Rp12.621.040.309.260,40 yang dikelola oleh 37 OPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.26. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2020 Pemda DIY (Sebelum Dilakukan Audit)

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.908.449	2.018.103.401.089,46
2	Dinas Kesehatan	24.082	253.288.347.892,78
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	10.593	5.041.281.045.991,46
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.093	618.362.803.898,60
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.706	9.379.779.462,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.895	13.522.899.310,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.078	73.029.689.904,20
8	Dinas Sosial	18.723	144.737.595.307,38
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.716	86.853.816.232,98

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.185	27.990.755.265,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.001	161.722.458.652,92
12	Dinas Perhubungan	13.710	274.559.817.662,30
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.862	110.531.819.858,77
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.980	23.624.869.305,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	1.410	7.444.455.364,91
16	Dinas Kebudayaan	97.621	599.750.506.169,77
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15.424	205.305.136.460,11
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.672	230.507.495.531,76
19	Dinas Pariwisata	1.234	61.159.612.143,01
20	Dinas Pertanian	15.056	285.095.491.952,49
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.098	54.162.423.947,00
22	Biro Tata Pemerintahan	1.696	5.155.311.032,50
23	Biro Hukum	6.905	5.729.362.428,00
24	Biro Bina Mental Spiritual	506	1.922.469.674,00
25	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	763	2.217.548.793,00
26	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1.106	3.469.140.609,99
27	Biro Organisasi	699	3.020.315.979,03
28	Biro Umum, Humas dan Protokol	9.183	260.276.565.785,08
29	Biro Pemberdayaan Masyarakat	273	1.406.370.969,00
30	Badan Penghubung Daerah	4.371	32.919.994.457,00
31	Sekretariat DPRD	4.518	601.283.182.581,60
32	Inspektorat	1.732	20.902.254.340,99
33	Paniradya Kaistimewan	644	4.886.158.820,96
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.504	17.677.198.697,96
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	17.732	1.290.329.019.808,40
36	Badan Kepegawaian Daerah	5.162	28.977.180.286,00
37	Badan Pendidikan dan Pelatihan	16.669	40.454.013.595,00
	Jumlah	**3.249.051**	**12.621.040.309.260,40**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemda DIY melakukan kegiatan Peningkatan Status Hak Atas Tanah. Hal ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian status kepemilikan atas tanah-tanah yang dikuasai dan tercatat di daftar inventaris barang Pemda DIY. Pada Tahun Anggaran 2020 dari target pensertifikatan 7 bidang tanah untuk Balik Nama dari atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah DIY. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya *re design* anggaran, serta kantor pertanahan membatasi pelayanan sehingga tahapan pelaksanaan balik nama tanah SMA 4 Yogyakarta masih sebatas penghapusan hak belum sampai pendaftaran hak (sebanyak 3 sertifikat). Untuk SMA 1 Temon (sebanyak 2 sertifikat) dan SMA 1 Wates

(sebanyak 2 sertifikat) sudah selesai Balik Nama dari atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjadi atas nama Pemerintah Daerah DIY. Hasil pensertifikatan tanah tahun 2020 dapat tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.27. Tanah Milik Pemda DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2020

No	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan
1	SMAN 4 Yogyakarta	245	Penghapusan hak, belum pendaftaran hak
2	SMAN 4 Yogyakarta	3.775	Penghapusan hak, belum pendaftaran hak
3	SMAN 4 Yogyakarta	1.005	Penghapusan hak, belum pendaftaran hak
4	SMAN 1 Temon	20.053	Balik Nama dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ke Pemerintah Daerah DIY
5.	SMAN 1 Temon	10.000	Balik Nama dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ke Pemerintah Daerah DIY
6	SMAN 1 Wates	7.580	Balik Nama dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ke Pemerintah Daerah DIY
7	SMAN 1 Wates	1.519	Balik Nama dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ke Pemerintah Daerah DIY

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Sedangkan kegiatan pengumpulan dokumen Warkah Tanah Pemda DIY adalah kegiatan melengkapi data pendukung Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DIY dari proses pengukuran sampai dengan terbit Sertifikat Hak Pakai. Kegiatan ini merupakan bentuk pengamanan barang milik daerah untuk mengantisipasi apabila ada pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap tanah-tanah Pemda DIY tersebut. Kegiatan pendokumentasian warkah sertifikat pada tahun 2020 telah terealisasi sejumlah 37 warkah sertifikat tanah, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.30 di bawah ini.

Tabel 2.28. Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2020

No.	Kab/Kota	Jumlah Warkah Tanah
1	Kota Yogyakarta	9
2	Kabupaten Bantul	7
3	Kabupaten Kulon Progo	5
4	Kabupaten Gunungkidul	7
5	Kabupaten Sleman	9
Jumlah		**37**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Untuk tahun 2020 ini karena adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan dari Kantor Pertanahan yang membatasi pelayanan membuat upaya pensertifikatan tanah kurang maksimal.

3. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

a. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan Pasal 329 Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut: 1).Penjualan; 2).Tukar Menukar; 3).Hibah; atau 4).Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Dalam hal regulasi yang mengatur teknis kegiatan pemindahtanganan sebagaimana di atas, Pemda DIY juga berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

1) Penjualan

Sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan penjualan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 338 Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah:

a) Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
b) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan/atau
c) Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu proses penting dalam proses penjualan barang milik daerah adalah penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 325 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016, bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan.

Penilaian barang milik daerah berupa bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur. Syarat Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

Penilaian barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur. Adapun Tim Penilai di atas adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah DIY membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah sub kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 53/TIM/2020 Tahun 2020.

Tahapan yang akan dilakukan secara rinci dalam proses pemindahtanganan barang milik daerah adalah:

a) Tahap Persiapan
   (1) Penelitian Usulan Pemindahtanganan
   (2) Verifikasi Barang Milik Daerah
   (3) Penilaian Barang Milik Daerah
   (4) Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah oleh Gubernur

b) Tahap Pelaksanakan Penjualan Barang Milik Daerah.

   Pemindahtanganan barang milik daerah pada Pemda DIY yang dilaksanakan setelah terbitnya persetujuan Gubernur DIY pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

   (1) Keputusan Gubernur Nomor 76/KEP/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Jalan, Saluran Irigasi, dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020;

   (2) Keputusan Gubernur Nomor 105/KEP/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Hasil Penebangan Pohon dan Pembongkaran Bangunan dalam rangka Pembangunan JJLS di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Jerukwudel-Baran-Duwet Tahap 2 dan Paket Pembangunan Jalan Baru Legundi-Planjan di Kabupaten Gunungkidul.

   Proses pemindahtanganan dilaksanakan dengan mekanisme penjualan kepada masyarakat umum, namun hasil penjualan dinyatakan Tidak Ada Penawaran (TAP). Berdasarkan hasil evaluasi Tim, tidak lakunya barang milik daerah dikarenakan kondisi perekonomian yang lesu serta lemahnya daya beli masyarakat (dalam hal ini Calon Pembeli Barang Milik Daerah) akibat pandemi Covid-19;

(3) Keputusan Gubernur Nomor 180/KEP/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020.

Proses pemindahtanganan barang daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dilaksanakan dengan cara lelang melalui KPKNL Yogyakarta;

(4) Keputusan Gubernur Nomor 226/KEP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen di Jalan AM Sangaji Nomor 41 Yogyakarta;

(5) Keputusan Gubernur Nomor 268/KEP/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo.

Proses pemindahtanganan barang daerah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen di Jalan AM Sangaji Nomor 41 Yogyakarta dan Bangunan Gedung Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan cara lelang melalui KPKNL Yogyakarta. Namun kedua proses lelang dinyatakan gagal lelang atau Tidak Ada Penawaran (TAP). Berdasarkan hasil evaluasi Tim, hal ini juga disebabkan oleh lesunya kondisi perekonomian serta lemahnya daya beli masyarakat (dalam hal ini Calon Pembeli Barang Milik Daerah) akibat pandemi Covid-19;

(6) Keputusan Gubernur Nomor 292/KEP/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Jalan, Saluran Irigasi, dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020;

(7) Keputusan Gubernur Nomor 303/KEP/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Hewan Ternak pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2020;

(8) Keputusan Gubernur Nomor 356/KEP/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

Persetujuan pemindahtanganan ini telah ditindaklanjuti dengan proses penjualan barang milik daerah berupa bangunan gedung Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Adapun proses pemindahtanganan/ penjualan barang milik daerah berupa bangunan gedung pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta belum dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020;

(9) Keputusan Gubernur Nomor 383/KEP/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah yang Hilang berupa 1 (satu) Unit Camera Digital dan 1 (satu) Unit Handy Cam pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut adalah hasil pemindahtanganan BMD melalui Penjualan dan Lelang pada Pemda DIY Tahun Anggaran 2020:

Tabel 2.29. Hasil Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Melalui Penjualan dan Lelang

No	Jenis BMD yang Dilakukan Penjualan/Lelang	Jumlah Unit	Hasil Penjualan/ Lelang (Rp)
1	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	87.500.000
2	Kendaraan Bermotor Dinas Operasional a) Motor b) Mobil	 59 unit 7 unit	438.429.467
3	Bangunan Gedung dan Sisa Bongkaran Material: a) SMAN 4 Yogyakarta b) SMKN 2 Depok c) SMAN 1 Rongkop	 1 unit 1 unit 1 unit	61.302.989
4	Hasil Penebangan Pohon	-	3.349.000

No	Jenis BMD yang Dilakukan Penjualan/Lelang	Jumlah Unit	Hasil Penjualan/ Lelang (Rp)
5	Hasil Peternakan (Hewan Ternak)	10 ekor sapi 11 ekor kambing 14 ekor domba	299.317.100

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

2) Hibah

Berdasarkan Ketentuan Pasal 396 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah Sosial; Budaya; Keagamaan; Kemanusiaan; Pendidikan yang bersifat non komersial; serta Penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

Syarat barang milik daerah yang dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 397 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

a) Bukan merupakan barang rahasia negara;
b) Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
c) Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tahapan yang dilakukan secara rinci dalam proses pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara hibah yaitu:

a) Tahap Persiapan.
   (1) Adanya Kesediaan Menerima Hibah.
   (2) Penelitian dan pengecekan barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
   (3) Persetujuan Hibah BMD oleh Gubernur.

b) Tahap Pelaksanaan.
   (1) Penyiapan Naskah Perjanjian Hibah.
   (2) Penyerahan BMD yang dihibahkan beserta penandatanganan Berita Acara Serah Terima BMD.

Berikut hasil persetujuan Gubernur berkaitan dengan hibah barang milik daerah yaitu:

a) Keputusan Gubernur Nomor 16/KEP/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
b) Keputusan Gubernur Nomor 46/KEP/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
c) Keputusan Gubernur Nomor 169/KEP/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul kepada Pemerintah Kabupaten Bantul.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 431 Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:

1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Penghapusan barang milik daerah merupakan proses terakhir yang dilaksanakan dalam sistem pengelolaan barang milik daerah. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Adapun proses penghapusan barang milik daerah yang telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan yaitu:

1) Keputusan Gubernur Nomor 15/KEP/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor Lainnya yang Melekat pada Bangunan Gedung eks Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro 56 Yogyakarta;

2) Keputusan Gubernur Nomor 62/KEP/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Dihibahkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dari Daftar Barang Milik Daerah;
3) Keputusan Gubernur Nomor 106/KEP/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
4) Keputusan Gubernur Nomor 114/KEP/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
5) Keputusan Gubernur Nomor 283/KEP/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul dari Daftar Barang Milik Daerah;
6) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 13/SEKDA/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan, Mesin, dan Aset Tetap Lainnya dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2020;
7) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 41/SEKDA/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Sleman;
8) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 55/SEKDA/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Satu Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Hilang pada Balai Proteksi Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 56/SEKDA/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020;
10) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 72/SEKDA/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.

c. Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Dalam rangka percepatan proses penyelesaian ganti kerugian daerah di lingkungan Pemda DIY, langkah konkret yang telah dilaksanakan adalah dengan membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kerugian Daerah. Pemda DIY membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 192/KEP/2020 tanggal 24 Juni 2020, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Nomor 931/04389/PBD tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan Personel Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka penyelesaian ganti kerugian daerah di lingkungan Pemda DIY, Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan telah menempuh beberapa langkah sebagai berikut:

1) Pelaporan Penyelesaian Kerugian Daerah DIY Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dengan Nomor 931/3334 tanggal 21 Februari 2020 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2) Pembuatan Surat Peringatan Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditujukan kepada Pegawai dan Non Pegawai yang terkena Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dengan Surat Nomor 931/05193/PBD s.d. Nomor 931/05214/PBD tanggal 28 Juli 2020.
3) Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah telah menerima laporan kehilangan Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Camera Digital dan 1 (satu) unit Handy Cam yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY.

Tabel 2.30. Ganti Kerugian Daerah berupa Barang Milik Daerah (BMD) pada OPD Pemda DIY Tahun 2020

Nama OPD	LHP Inspektorat	Pengenaan Kerugian Daerah (Rp)	Bukti Pengembalian	Ket
SMA Negeri 1 Sedayu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	X.700/58/SB/2019 tgl 26 Desember 2019	7.975.000	STS No.900/00141 tgl 28 Januari 2020	LUNAS

Sumber: BPKA DIY, 2021

Proses penyelesaian terhadap kasus kehilangan barang milik daerah di atas sebagai berikut:

1) Pada kasus di atas telah dilaksanakan pelunasan untuk pengembalian Kerugian Daerah yang timbul akibat kehilangan barang milik daerah. Proses selanjutnya adalah penerbitan Surat Keterangan Pelunasan Kerugian Daerah Nomor 931/07736/PBD tanggal 2 November 2020.

2) Untuk menghapus barang milik daerah tersebut di atas, telah diterbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah yang Hilang Berupa 1 (satu) Unit Camera Digital dan 1 (satu) Unit Handy Cam pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, dan Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 9/SEKDA/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Hilang Berupa 1 (satu) Unit Camera Digital dan 1 (satu) Unit Handy Cam pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY.

d. Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemda DIY tidak melaksanakan kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah berupa pemusnahan.

4. Pendayagunaan Barang Daerah

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana Pasal 81 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dapat dilakukan dengan cara sewa, pinjam pakai, bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama penyediaan infrastruktur. Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 mengakibatkan beberapa kendala terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah terutama yang dimanfaatkan melalui sewa. Beberapa penyewa yang terdampak secara ekonomi, kemudian mengembalikan barang milik daerah dan ada yang mengajukan keringanan sewa. Khusus untuk keringanan sewa telah diterbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 306/KEP/2020 tentang Pemberian Keringanan Sewa Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020. Terkait pemanfaatan barang milik daerah, pada tahun 2020 ini telah diterbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018.

Pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, meliputi:

1) Barang milik daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan yang dimanfaatkan melalui sewa sebagaimana tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.31. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2020 (Rp)	Keterangan
1	Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulon Progo	PT. Formula Land	108.000.000	-
2	Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2017 utk 5 th sekaligus (2017-2022)
3	Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo	PT. Selo Adi Karto	217.800.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2020-2022)
4	Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji	Yayasan Wira Husada	-	Pembayaran telah dilakukan pada tahun 2019
5	Tanah bekas OG No.16 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Pemdes Sumbermulyo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2019 utk 2 th sekaligus (2019-2021)
6	Tanah dan Bangunan eks Rumah Dinas Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	BUKP Gondokusuman	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2019 utk 3 th sekaligus (2019-2022)
7	Tanah di Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Dharmapala	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2017 utk 4 th sekaligus (2017-2021)
8	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	15.000.000	-
9	Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta	dr. Soedarman	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2018 utk 5 th sekaligus (2018-2023)
10	Tanah di Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2019 utk 2 tahun sekaligus (2019-2021)
11	Tanah dan Bangunan di Kedongkiron,Dongkelan, Yogyakarta	Sri Andayani	13.700.000	-
12	Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Kelompok Tani Tirto Manunggal	20.000.000	Pembayaran dilakukan untuk 5 tahun sekaligus (2019 - 2024)
13	Lahan Parkir Basement Malioboro Mall	PT. Yogya Indah Sejahtera	1.000.000.000	-
14	Tanah di Jl. Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	Talenta Body Repair	53.600.000	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2020-2022)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2020 (Rp)	Keterangan
15	Tanah di Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yogyakarta	Suka Astuti	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2019 utk 2 th sekaligus (2019-2021)
		Tien Setiantoro	10.000.000	-
		Roos Ani	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2016-2021)
		Sumartiningsih	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2016-2021)
		Aris Purnomo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2019 utk 2 th sekaligus (2019-2021)
16	Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman	Badan Anti Korupsi	-	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2018-2020)
		Sarjuri	6.400.000	-
17	Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	Ir. Bambang Priambodo	-	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (01/01/ 2019-31/12/2020)
18	Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul	YB. Pratomo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2017-2022)
19	Tanah dan bangunan di Komplek Colombo No.56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala DS.	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2019 utk 2 th sekaligus (2019-2021)
20	Tanah dan bangunan di Jl. Janti (Eks Dinas Gedung Pertambangan)	PT. Anindya Mitra Internasional	312.800.000	-
21	Tanah di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2017 utk 3 th sekaligus (2018 - 2020)
22	Tanah dan bangunan di Jl. DI. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2016-2021)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2020 (Rp)	Keterangan
23	Tanah dan bangunan di Jl. Sriti No. 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2018 utk 3 th sekaligus (2018-2021)
24	Tanah dan bangunan di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul	BADKO TKA TPA	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2018 utk 2 th sekaligus (2018-2020)
25	Tanah dan bangunan di Jl. Kusumanegara No. 168E Yogyakarta	LP2Desaku	-	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2019-2021)
27	Tanah eks Tanah Kas Desa Wates (71 Bidang Tanah)	99 Penyewa	294.732.932	-
28	Tanah dan Bangunan di Jalan Warung Boto Nomor 918	Gabungan Bridge Seluruh Indonesia	-	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2019-2021)

Sumber: BPKA DIY, 2021

2) Barang milik daerah berupa Rumah Daerah yang dimanfaatkan melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Tabel 2.32. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2020 (Rp)	Ket
1	Jl. Colombo Nomor 59 Yogyakarta	Mrabawani Ati	3.480.000	-
2	Jl. Colombo Nomor 60 Yogyakarta	Ir. Syahbenol Hasibuan	7.521.600	-
3	Jl. Colombo Nomor 61 Yogyakarta	Sugistiati	5.050.800	-
4	Jl. Janturan Nomor 29 Yogyakarta	Iwan Kurniawan, S.STPar	2.792.400	-
5	Jl. Janturan Nomor 29 A Yogyakarta	Asmita	3.723.200	-
6	Jl. Sriti Nomor 20 B Demangan, Yogyakarta	Ny. Dra. Sulistyaningsih	3.396.000	-
7	Jl. Sriti Nomor 20 C Demangan, Yogyakarta	Bambang Hermanto, SH, M.Hum	4.330.000	-
8	Jl. Bima Nomor 25 Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Eko Fajar Laksana	2.857.200	-
9	Jl. Bima Nomor 25 A Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Maria Kristina Budi	1.904.800	-
10	Jl. Bima Nomor 25 B Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Dra. Mulyati Yunipratiwi, M.Si	2.313.000	-
11	Jl. Bima Nomor 25 C Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Drs. Djoko Aryanto, MM	1.878.000	-
12	Jl. D.I. Panjaitan No. 74 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Ny. Djaenab Murniati	6.912.400	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2020 (Rp)	Ket
13	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (1)	Monika Irene Donatirin	3.373.000	-
14	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (2)	Jaka Surana, SE	2.023.800	-
15	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Siti Mukaronah	2.286.000	-
16	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Aida Kusuma Wahyuni	2.286.000	-
17	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rini Setraparwati	2.286.000	-
18	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Dwi Nugroho	2.367.600	-
19	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Eko Supriyanto, SH	2.340.000	-
20	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Tri Mulyadi, S. Hut, MP	2.286.000	-
21	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Agus Dwi Anggraito	2.286.000	-
22	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Hasan Khoiri, A.Md	3.103.200	-
23	Randubelang No.40 RT.02/RW.08 Bangunharjo, Sewon, Bantul	Saimin	3,930,300	-
24	Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)	Suhartati	2.994.000	-
25	Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)	Mashudi	2.994.000	-
26	Panggungharjo, Sewon, Bantul (4)	Gutik Lestarna, SPT	2.994.000	-
27	Panggungharjo, Sewon, Bantul (5)	Wahyuningsih	3.243.500	-
28	Asrama Transito, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta (3)	Sugiyanta, SIP	1.269.100	-
29	Jalan Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman	Yasrizal, S.Sos, M.Si	1.171.100	-
30	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Parjono/Zulaiha	2.107.200	-
31	Jl. Panembahan Romo Nomor 65 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Dra. Rahayu Endang Pujiati	5.484.000	-
32	Jl. Podang No. 4 Caturtunggal, Depok, Sleman	Anastasia Sri Winarsi	2.818.200	-
33	Jl Rajawali no.11 Condongcatur, Depok, Sleman	Yasrizal, S.Sos, M.Si	937.000	

Sumber: BPKA DIY, 2021

3) Barang Milik Daerah yang dioptimalkan melalui pinjam pakai sebagai berikut:

Tabel 2.33. Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai

No	Lokasi	Peminjam
1	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta seluas + 1.000 m^2 dari seluruh luas tanah +	BPS Kota Yogyakarta

No	Lokasi	Peminjam
	6.775 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988.	
2	Sebagian tanah milik Pemda DIY yang terletak di yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta seluas + 2.250 m² dan Kendaraan jenis Minibus, Merk dan Type Toyota Innova 2.0 G M/T Luxury, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFXW4G4D2276646, Nomor Mesin ITR-7696020, warna Black Mica.	BPN Kanwil DIY
3	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut: **Tanah** 1. Tanah SHP 2 terletak di Wijirejo, Pandak, Bantul; 2. Tanah SHP 1 terletak di Wijirejo, Pandak, Bantul; 3. Tanah SHP 1 terletak di Argorejo, Sedayu, Bantul; 4. Tanah SHP 3 terletak di Murtigading, Sanden, Bantul; 5. Tanah SHP 5 terletak di Murtigading, Sanden, Bantul; 6. Tanah SHP 6 terletak di Murtigading, Sanden, Bantul; 7. Tanah SHP 105 terletak di Timbulharjo, Sewon, Bantul; 8. Tanah SHP 1 terletak di Timbulharjo, Sewon, Bantul; 9. Tanah SHP 5 terletak di Srigading, Sanden, Bantul; 10. Tanah SHP 1 terletak di Sendangsari, Pajangan, Bantul. **Bangunan** 1. Rumah Jaga di BBI Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul; 2. Bak Penetasan di BBI Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul; 3. Bak Penampungan di BBI Gesikan, Wijirejo, Pandak	Pemkab Bantul
4	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta seluas + 646,35 m2 (41,7 m x 15,5 m) dari luas keseluruhan 6.064 m² sesuai dengan sertifikat Nomor P.76/Smk tanggal 19 April 1995.	Balai Pemerintah Desa di Yogyakarta
5	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah, bangunan dan serat fiber optic yang terletak di Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah SHP 47 terletak di Jl Veteran, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta; 2. Tanah SHP 8 terletak di Jl Kyai Mojo, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta; 3. Tanah SHP 3 terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta; 4. Bangunan yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta; 5. Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Serat *Fiber Optic* sebanyak 12 *core* dari 96 *core* yang telah terbangun.	Pemkot Yogyakarta
6	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian bangunan/gedung dengan rincan sebagai berikut: 1. Sebagian bangunan gedung seluas ±123 m² terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta; 2. Sebagian bangunan gedung seluas ±123 m² terletak di lantai 2 sisi utara eks Kantor Satuan Polisi Pamong Praja DIY terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta.	Sekretariat Kerjasama Pembangunan Yogyakarta, Sleman dan Bantul (Sekretariat Bersama Kartamantul) Provinsi DIY

No	Lokasi	Peminjam
7	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta, dengan luas 8.049 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.13/Syd, Seri AD.734426, Tanggal 5 April 1994	ISI Yogyakarta
8	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 2.142 m^2 dan luas bangunan 845 m^2 yang terletak di Jalan Faridan Muridan Noto Nomor 21 Kota Baru Yogyakarta, sesuai dengan sertifikat Nomor 81 Seri BB 172946 tanggal 20 Mei 2009.	Badan Siber dan Sandi Negara
9	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah SHP 00001 terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul; 2. Tanah SHP 00002 terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul; 3. Tanah SHP 00004 terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul; 4. Tanah SHP 00003 terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul; 5. Tanah SHP 00002 terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul; 6. Tanah SHP 00003 terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul; 7. Tanah SHP 00001 terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul; 8. Tanah SHP 00005 terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul; 9. Tanah SHP 00003 terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul; 10. TanahSHP 00002 terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul; 11. Tanah SHP 8 dan bangunan terletak di Semin, Semin, Gunung Kidul; 12. Sebagian tanah sesuai dengan SIPKD Modul Aset KIB A dengan Nomor Kode Barang 01.11.04.01. dan Nomor Register 002 terletak di Kedung Keris, Nglipar, Gunung Kidul seluas 1.825 m^2; 13. Tanah SHP 03 terletak di Semanu, Semanu, Gunungkidul; 14. Tanah SHP 04 terletak di Putat, Patuk, Gunungkidul; 15. Tanah SHP 04 terletak di Bandung, Playen, Gunungkidul; 16. Tanah SHP 1 terletak di Sumberejo, Semin, Gunungkidul; 17. Tanah SHP 9 terletak di Kepek, Wonosari, Gunungkidul; 18. Tanah SHP 07 terletak di Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul.	Pemkab Gunungkidul
10	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah yang terletak di Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah SHP 1 terletak di Sumberagung, Moyudan, Sleman; 2. Tanah SHP 1 terletak di Margodadi, Seyegan, Sleman; 3. Tanah SHP 3 terletak di Pandowoharjo, Sleman; 4. Tanah SHP 4 terletak di Pandowoharjo, Sleman; 5. Tanah SHP 1 terletak di Bimomartani, Ngemplak, Sleman; 6. Tanah SHP 1 terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman; 7. Tanah SHP 44 terletak di Hargobinangun, Pakem, Sleman; 8. Tanah SHP 16 terletak di Jl. Pangukan, Beran Kidul, Tridadi, Sleman; 9. Tanah SHP 19 terletak di Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman; 10. Tanah SHP 1 terletak di Hargobinangun, Pakem, Sleman;	Pemkab Sleman

No	Lokasi	Peminjam
11	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah dan Kendaraan roda empat dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta seluas + 1.380 m^2 dari luas keseluruhan + 6.775 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988. 2. Minibus/MP, Suzuki/GC 415 V-APVSTD 2008/1493CC/AB 1660 UA /MHYGDN41V8J-300414/ G15AID-165659 /F730905/ Warna Merah berlogo BNN.	BNNP DIY
12	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah, bangunan dan kendaraan yang terletak di Jalan Wiyoro Lor Nomor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah SHP 11 seluas 2.542 m^2; 2. Bangunan gedung kantor bertingkat seluas 2.542 m^2; 3. Toyota Kijang Innova G tahun 2005 AB 1870 UA, isi silinder 1.998 cc, warna hitam metalik, nomor rangka MHFXW42G152056978, Nomor mesin IR-6195917, Nomor BPKB 77734031.	Pangkalan TNI AL Yogyakarta
13	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah, Peralatan Mesin dan Kendaraan dengan rincian sebagai berikut: **Tanah** 1. Tanah SHP 66 terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta; 2. Tanah ySHP 67 terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta. 3. Tanah SHP 68 terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta; **Peralatan Mesin** 1. Kursi besi/ metal (kursi kerja sekretaris) 1 unit; 2. Meja Rapat 19 unit; 3. Kursi Rapat 56 unit; 4. Kursi Putar 3 unit; 5. Kursi Lipat 11 unit; 6. Sofa 1 unit; 7. Taplak meja 18 unit; 8. Note Book Accer 5 unit. **Kendaraan** 5 kendaraan roda empat dan 2 kendaraan roda 2.	KPU DIY
14	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah yang terletak di Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul seluas + 850 m^2 dari seluruh luas tanah + 47.597 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.8578015 Tanggal 1 Juni 1988; 2. Tanah yang terletak di Desa Gatak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas + 264 m^2 dari seluruh luas tanah + 2.244 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR.721913 Tanggal 1 Juni 2001.	Detasemen Zeni Bangunan 2/IV Yogyakarta

No	Lokasi	Peminjam
15	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas 306 m^2 yang terletak di Komplek Colombo No 57 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.	Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan di Jalan Sriti Nomor 20 E, Caturtunggal, Depok, Sleman dengan luas + 357 m^2 dari luas keseluruhan 2.144 m^2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 466 Seri AX 785329 tanggal 9 Mei 2006 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bangunan dengan luas + 50 m^2.	Perwakilan Kementerian Pertahanan Daerah Istimewa Yogyakarta
17	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa: 1. tanah yang terletak di Jalan Jenggotan Nomor 5A Kelurahan Bumijo Kecamantan Jetis Kota Yogyakarta seluas + 3.837 m2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1031 Seri BL 078280 tanggal 24 April 2013 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. bangunan gedung kantor permanen dengan luas + 3.637 m2 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi).	Oditurat Mliter II-11 Yogyakarta
18	Barang Milik daerah Pemda DIY berupa 24 bidang tanah dan 2 bangunan gedung yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan rincian sebagai berikut: **Tanah** 1. Tanah eks TKD SHP 34 Dipan, Wates; 2. Tanah eks TKD SHP 35 Dipan, Wates; 3. Tanah eks TKD SHP 37 Dipan, Wates; 4. Tanah eks TKD SHP 39 Dipan, Wates; 5. Tanah eks TKD SHP 77 Punukan, Wates; 6. Tanah eks TKD SHP 90 Punukan, Wates; 7. Tanah eks TKD SHP 91 Mutihan, Wates; 8. Tanah eks TKD SHP 92 Kedungdowo, Wates; 9. Tanah eks TKD SHP 93 Durungan, Wates; 10. Tanah eks TKD SHP 94 Durungan, Wates; 11. Tanah eks TKD SHP 107 Kedunggong, Wates; 12. Tanah SHP 14 Pengasih, Pengasih; 13. Tanah SHP 112 di Jl. Tentara Pelajar, Wates. 14. Tanah SHP 1 terletak di Hargorejo, Kokap, Kulon Progo; 15. Tanah SHP 1 terletak di Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo 16. Tanah SHP 1 terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo; 17. Tanah SHP 1 terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo; 18. Tanah SHP 5 terletak di Kulwaru, Wates, Kulon Progo; 19. Tanah SHP 8 terletak di Jl. Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo; 20. Tanah SHP 10 terletak di Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo; 21. Tanah SHP 7 terletak di Jalan Khudori Nomor 49, Wates, Kulon Progo; 22. Tanah SHP 26 terletak di Jalan Kweni, Wates, Wates, Kulon Progo; 23. Tanah SHP 40 terletak di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo;	Pemkab Kulon Progo

No	Lokasi	Peminjam
	24. Tanah SHP 89 terletak di Punukan, Wates, Wates, Kulon Progo. **Bangunan** 1. Bangunan gedung Kantor Permanen di Jl. Tentara Pelajar Wates; 2. Bangunan gedung tempat kerja lainnya di Jl. Tentara Pelajar, Wates.	
19	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa: 1. Tanah yang terletak di Jalan DI Panjaitan No 49, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta seluas + 1.662 m^2 dari luas keseluruhan + 2.915 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.00014 Seri AZ 043039 tanggal 18 April 2007 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Bangunan Gedung kantor permanen dengan luas + 783.75 m^2 dari luas keseluruhan + 1.380 m^2.	Bawaslu DIY
20	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa: 1. Kendaraan operasionl dinas Toyota Camry AB 1017 UH. 2. kendaraan operasionl dinas Nissan Terrano AB 1095 UH.	Pangkalan TNI AU Adisutjipto
21	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa kendaraan dinas operasional sebanyak 3 (tiga) unit Yaitu: 1. Nomor Polisi AB 1253 UH, Merk & Type Toyota Kijang Innova G, Tahun pembuatan 2012, Isi silinder 1.998 cc, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFXW42G4C2241958, Nomor Mesin 1TR7441106, Nomor BPKB 04939025; 2. Nomor Polisi AB 1255 UH, Merk & Type Toyota Kijang Innova G, Tahun pembuatan 2012, Isi silinder 1.998 cc, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFXW42GXC2242368, Nomor Mesin 1TR7443972, Nomor BPKB 04939022; 3. Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Hitam Metalik, Tahun 2020, Nomor Polisi: AB 1511 UH.	Komando Resor Militer 072/Pmk
22	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit Toyota Camry 2.5 SV A/T, Hitam Metalik, Tahun 2020, Nomor Polisi: AB 1632 UH.	Kejaksaan Tinggi Yogyakarta
23	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Hitam Metalik, Tahun 2020, Nomor Polisi: AB 1533 UH	Polda DIY
24	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas + 1.298 m2 dari luas keseluruhan + 2.244 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR. 721913 Tanggal 01 Juni 2001.	Kalurahan Bokoharjo
25	Barang Milik Dareah Pemda DIY berupa bangunan parkir dengan tipe *knockdown* yang bisa menampung 40 unit bus dan 2.600 unit kendaraan roda dua dan bangunan kios pedagang kaki lima sebanyak 144 unit	Pemkot Yogyakarta
26	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian tanah yang terletak di Jalan Kyai Mojo, Pingit, Yogyakarta dengan luas 8.877 m2 dari luas keseluruhan 29.841 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.5/Bnr Seri B 8972861 Tanggal 26 September 1987.	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
27	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian tanah dan bangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang terletak di Jalan Argolubang Nomor 19 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta seluas + 100 m2 untuk Resort KSDA Kota Yogyakarta.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta

No	Lokasi	Peminjam
28	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian tanah seluas 560 m2 dari luas tanah 2.411 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor 00027 Seri AX 705701 tanggal 31 Mei 2007 dan bangunan seluas 120 m2 yang terletak di Jalan Retno Dumilah Nomor 23 C Kotagede Yogyakarta.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
29	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan kantor, terletak di Jalan Sisingamangaraja No 21 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah Hak Pakai Pemda DIY dengan luas 4.832 m2, sertifikat hak pakai nomor 53 tanggal 01 September 2020; 2. Bangunan gedung kantor permanen bertingkat dengan luas 1.012 m2.	Badan Intelejen Negara
30	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Besi-Jangkang,Dusun Klidon, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah bangunan Pedidikan dan Latihan (Sekolah) LBK Klidon, seluas 1.927 m2 degan sertifikat hak pakai nomor P.12 seri AX 7853 tanggal 17 April 2020; 2. 10 unit bangunan terdiri atas pagar keliling, bangunan bengkel, bangunan tempat ibadah permanen, gedung pos jaga permanen, bangunan gedung tempat kerja (4 unit), rumah negara dan asrama permanen.	Pemkab Sleman
31	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa dua bidang tanah terletak di Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanah Hak Pakai Pemda DIY seluas 187 m2 sesuai sertifikat hak pakai nomor 00073 seri BO 408799 tanggal 28 Februari 2019; 2. Tanha Hak Pakai Pemda DIY seluas 401 m2 sesuai sertifikat hak pakai nomor 00074 seri BO 408800 tanggal 26 Februari 2019.	BPCB Yogyakarta
32	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan rumah daerah, terletak di Jalan Nyi Adisari Nomor 4 Pilahan, rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: 1. Sebagian Tanah Hak Pakai Pemda DIY seluas ± 250 m2 dari luas keseluruhan 2.411 m2, berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 00027 Seri AX 705701 tanggal 31 Mei 2007; 2. Bangunan rumah negara luas ± 70 m2.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
33	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah Bangunan Kantor, seluas + 5.000 m2 dari luas keseluruhan 30.000 m2 hak pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 21 Maret 1985 yang terletak di Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
34	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Wisma PU Kaliurang, Kabupaten Sleman seluas + 64 m2.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
35	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman seluas + 694 m2 dari seluruh luas tanah + 5.800 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor 166 Seri AX 216169 Tanggal 17 April 2006.	Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub RI

No	Lokasi	Peminjam
36	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa bangunan seluas 90 m2 yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta.	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Sumber: BPKA DIY, 2021

4) Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan melalui bentuk Bangun Guna Serah sebanyak satu bidang, yaitu Tanah di Jl. Malioboro dengan PT. YIS selama 30 tahun dengan kontribusi pada tahun 2020 sebesar Rp833.000.000,00 sesuai dengan:

a) Akta Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53.
b) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl. Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 665.2/3076 tanggal 8 Desember 1993.
c) Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl. Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 199/KPTS/1998 tanggal 14 Agustus 1998.

b. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah

1) Rehabilitasi Rumah Daerah

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas yang terletak di Komplek Colombo Nomor 56 Caturtunggal, Depok, Sleman dengan Pagu Anggaran Rp152.858.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp152.556.000,00. Selanjutnya untuk Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas yang terletak di Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul dengan Pagu Anggaran Rp35.275.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp35.111.000,00.

2) Penjaminan Barang Milik Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 298 bahwa Gubernur/BupatiWalikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pada APBD 2020 tersedia dana sebesar Rp1.300.000.000,00 untuk kegiatan penjaminan barang milik daerah.

Untuk asuransi, pemilihan dilakukan dengan cara tender, dengan rincian hasil sebagai berikut:

a) Penjaminan Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 milik Pemda DIY, dimenangkan oleh PT. Asuransi Bintang TBK dengan pertanggungan berupa 313 kendaraan dengan pertanggungan all risk dan pertanggungan Total Loss Only dengan nilai premi sebesar Rp644.184.319,00 untuk masa pertanggungan 21 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2021;
b) Penjaminan Gedung, dimenangkan oleh PT. Asuransi Sinar Mas dengan pertanggungan berupa 102 gedung dengan pertanggungan kebakaran dan pertanggungan gempa bumi dengan nilai premi sebesar Rp584.237.923,00 untuk masa pertanggungan 21 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2021.



Bab 3

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

2020

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD DIY periode 2017-2022. Penyusunan tema pembangunan DIY dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, secara teknokratis dilakukan dengan mempertimbangkan RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Secara hierarki dan keterkaitan antardokumen, tema pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 mempertimbangkan tema indikatif yang dirumuskan dalam RPJPD DIY 2005-2025. Pilihan tema pembangunan yang ada memperhatikan aspek keistimewaan, tema pembangunan nasional, dan fokus tematik sehingga sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2020 di DIY dapat tercapai. Memperhatikan aspek-aspek tersebut, dirumuskan Tema RKPD DIY Tahun 2020 yaitu "Percepatan Pembangunan Infastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan prioritas (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan; (2) Penguatan Konektivitas dan Pemerataan Wilayah; (3) Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan; (4) Pendukung Prioritas Pembangunan. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 dan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat terkait upaya penanganannya, maka Tema Pembangunan DIY Tahun 2020 disesuaikan menjadi "Penanganan Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan serta Upaya Penguatan Ekonomi Guna Meminimalisir Dampak Pandemi Covid-19."

Selanjutnya sesuai cascading kinerja Pemda yang telah mengakomodir *performance based budgeting*, evaluasi atas capaian pembangunan yang dilakukan Pemda DIY dapat dilihat dari capaian kinerja yang mengalir secara bertingkat mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran Pemda, Program Pemda, sampai dengan Program OPD. Capaian indikator kinerja sasaran Pemda merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Sedangkan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pemda yang merupakan program untuk menaungi sasaran serta program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Berdasarkan evaluasi sampai dengan akhir tahun 2020, pencapaian sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), Program Pemda, serta capaian kinerja urusan disampaikan sebagai berikut.

A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMDA

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2017-2022, terdapat 14 indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda DIY. Capaian indikator tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	2020		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	79,99	81,08	79,97	98,63	Tidak Tercapai
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka Indeks	70,15	70,12	73,59*	104,95	Tercapai
3.	Indeks Gini	Angka Indeks	0,4280	0,3776	0,437	84,27	Tidak tercapai
4.	Persentase angka kemiskinan	Persen	11,44	9,11	12,80	59,50	Tidak tercapai
5.	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi	Persen	13,10	11,72	11,97	102,13	Tercapai
6.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,60	5,29	-2,69	-50,85	Tidak tercapai
7.	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Angka indeks	61,05	62,44	61,60	98,65	Tidak tercapai
8.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	78,85	79,5	78,95	99,31	Tidak tercapai
9	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	Persen	31,53	40,69	40,69	100	Tercapai
10.	Indeks Williamson	Angka Indeks	0,4540	0,4524	0,4530*	99,87	Tidak Tercapai
11.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
12.	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) 1=AA;2=A;3=BB;4=B; 5=CC;6=C;7=D	Nilai	AA	A	AA*	150	Tercapai
13.	Persentase capaian program urusan keistimewaan	Persen	96,15	82,61	84,62	102,43	Tercapai
14.	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Bidang	10.729	13.419	12.437	92,68	Tidak tercapai

*Keterangan: *) Angka sementara*
Sumber: Bappeda DIY, 2021

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama, realisasi sasaran kinerja Pemda DIY tahun 2020 menunjukkan 6 indikator yang memiliki persentase capaian >100% dari total 14 indikator. Meskipun beberapa indikator mengalami peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun 2019, namun secara umum, capaian di atas menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari total 14 indikator yang ada, indikator yang belum tercapai atau tingkat capaiannya berada pada aras <100% sebanyak 8 indikator yang meliputi: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Persentase angka kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, IKLH, Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Indeks Williamson, dan Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan. Dampak dari pandemi Covid-19 secara nyata berpengaruh terhadap capaian kinerja, kedelapan indikator yang realisasinya belum sesuai target tersebut, selanjutnya perlu menjadi fokus Pemda DIY untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya. Uraian pencapaian dari masing-masing IKU Pemda DIY sebagaimana tersebut di atas, diinformasikan sebagai berikut.

1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

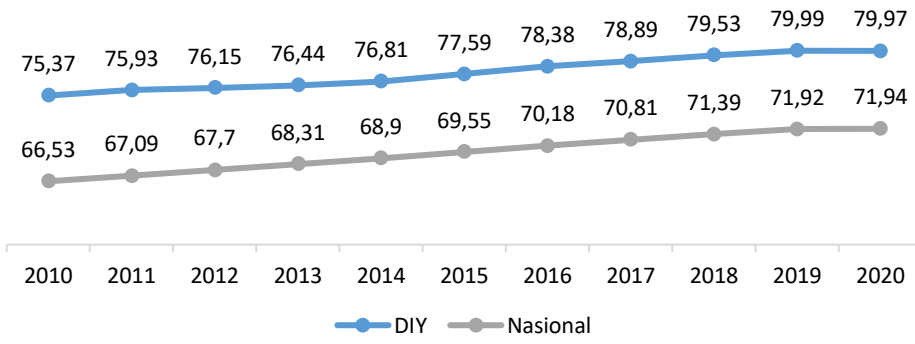
Visi RPJMD DIY tahun 2017-2022 adalah Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Kemulian dalam visi tersebut dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia (Misi Lima Tahun Gubernur), yakni terpenuhinya kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat yang berkeadilan, terwujudnya kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh dan berkeadilan, serta pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas. Dalam hal ini fokusnya adalah pembangunan manusia yang dimensinya adalah lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi. Hal ini mengandung pengertian bahwa konsep pembangunan manusia harus mengandung 4 unsur yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

IPM sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks dilakukan melalui proses standarisasi menggunakan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian

pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian.

IPM merupakan perwujudan dari tiga aspek pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Aspek umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan standar hidup yang layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Capaian pembangunan manusia DIY sampai dengan tahun 2020 berada pada level 79,97 dan berada dalam kategori "IPM Tinggi" (70≤IPM<80). Meskipun sedikit menurun dibanding tahun 2019, namun secara umum capaian IPM DIY terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2020. Selama satu dekade, IPM DIY meningkat dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 79,97 pada tahun 2020 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,59% setiap tahunnya. Penurunan capaian IPD DIY pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan indeks pada dimensi standar hidup yang layak yang tidak mampu dikompensasi oleh kenaikan indeks pada kedua dimensi yang lain yakni kesehatan dan pengetahuan. Daya beli penduduk selama masa pandemi Covid-19 menurun tajam sehingga pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan tercatat lebih rendah dari tahun 2019. Meskipun demikian, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan level IPM nasional dan menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia.



Gambar 3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2010-2020
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Capaian IPM DIY sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang semakin membaik dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY Menurut Komponen, 2015-2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UHH (Tahun)	74,68	74,71	74,74	74,82	74,92	74,99
HLS (Tahun)	15,03	15,23	15,42	15,56	15,58	15,59
RLS (Tahun)	9,00	9.12	9,19	9,32	9,38	9,55
Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rp)	12.684	13.229	13.521	13.946	14.394	14.015
IPM	**77,59**	**78,38**	**78,89**	**79,53**	**79,99**	**79,97**
Pertumbuhan IPM (%)	**1,02**	**1,01**	**0,65**	**0,81**	**0,74**	**-0.03**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak di DIY secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Level indikator usia harapan hidup dan harapan lama sekolah di DIY tercatat tertinggi secara nasional. Pencapaian pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2020 cukup bervariasi. Level IPM pada tingkat kabupaten/kota berkisar antara 69,98 hingga 86,61. Capaian IPM Kota Yogyakarta sebesar 86,61 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di DIY, bahkan di Indonesia. Level capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan Bantul, yaitu sebesar 83,84 dan 80,01. IPM ketiga daerah ini termasuk dalam kategori "sangat tinggi" (IPM≥80). IPM Kabupaten Kulon Progo (74,46) termasuk dalam kategori "tinggi" (70≤IPM<80). Sementara, IPM Kabupaten Gunungkidul (69,98) berada dalam kategori "sedang" (60≤IPM<70). Lebih lanjut, IPM di DIY menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	71,52	72,38	73,23	73,76	74,44	74,76
Bantul	77,99	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01
Gunungkidul	67,41	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98
Sleman	81,2	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84
Yogyakarta	84,56	85,32	85,49	86,11	86,65	86,61

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

2. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM-Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak berdasarkan pada perbedaan fungsi biologis (jenis kelamin), tetapi berupa pembedaan sifat, peranan, fungsi dan status yang merupakan kontruksi budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki potensi dan kemampuan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan, namun saat ini kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Masih terjadi pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai bentuk ketidak adilan gender dalam bentuk stereotip, subordinasi, marjinalisasi, diskriminasi dan beban ganda. Peran yang sering dilekatkan kepada perempuan adalah peran domestik, sedangkan peran produksi dan peran dalam masyarakat lebih banyak dilekatkan pada laki-laki. Kondisi inilah yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender sehingga mereka tidak mempunyai kesamaan kondisi dan posisi dalam berperan dan berpartisipasi baik dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun pertahanan keamanan.

Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan digunakan pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Komponen pembentukan IDG adalah berasal dari: 1). Keterlibatan perempuan di parlemen, 2). Perempuan sebagai tenaga manajer/profesional/ administrasi dan teknisi serta komponen 3). Sumbangan pendapatan perempuan.

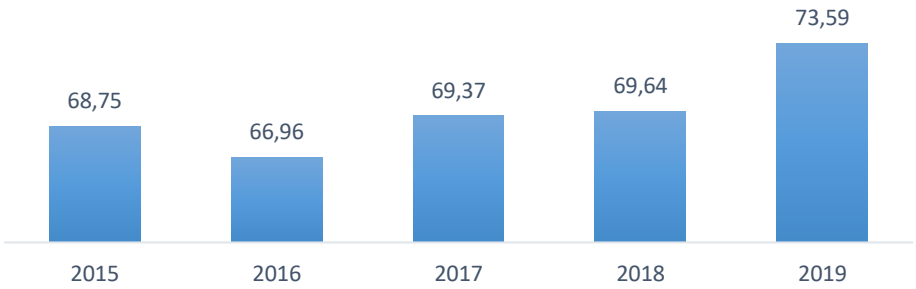
Capaian pemberdayaan perempuan yang masih lebih rendah daripada laki-laki terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia bahkan merupakan hal umum yang terjadi di dunia. Meskipun upaya pemberdayaan perempuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal khususnya di bidang politik dan ekonomi.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain Program dan kegiatan yang mendorong masyarakat lebih memahami tentang PUG Keberhasilan meningkatkan angka IDG harus tetap dipertahankan dengan cara menekan/menghilangkan beberapa faktor penghambat antara lain:

a. Adanya dikotomi antara ruang publik dan ruang privat yang membatasi peran perempuan. Perempuan tidak memiliki daya saing secara finansial, perempuan memiliki kekurangan dalam penguasaan ekonomi maupun sosial sehingga mengalami kesulitan untuk masuk ke ranah politik yang didominasi kaum laki-laki
b. Budaya yang masih menganggap bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin dan masuk pada dunia politik,

c. Dukungan dari Partai politik terhadap perempuan yang masih sebatas pada terpenuhinya kuota calon legislatif,
d. Implementasi dari berbagai regulasi tentang PUG belum optimal.

Hal ini yang kemudian mendorong Pemda DIY memasukkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) karena masih adanya kesenjangan gender dalam pembangunan. Kondisi ini selaras dengan isu gender dalam komitmen global *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan kelimanya yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan



Gambar 3.2. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY tahun 2015-2019
Sumber: BPS DIY, 2020

Sehubungan data IDG sampai dengan tahun 2020 belum dirilis, analisis capaian baru dapat dilakukan sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan data sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 IDG di DIY mengalami tren peningkatan. Upaya yang dilakukan adalah menjalin sinergisitas dengan berbagai *stakeholder* dalam pengarusutamaan gender sehingga menunjukkan hasil di mana pada tahun 2019 IDG DIY mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan dari semula 69,64 pada tahun 2018 naik menjadi 73,59 di tahun 2019. Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya IDG adalah keterwakilan perempuan di parlemen yang semula sebesar 11% pada Pemilu 2014 meningkat menjadi 18,18% pada Pemilu 2019. Selain itu, Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional memberikan sumbangan yang paling besar pada peningkatan IDG yaitu semula 47,7% di tahun 2018 meningkat menjadi 49,65% di tahun 2019. Sedangkan sumbangan pendapatan perempuan hanya meningkat sedikit yaitu semula 40,78% di tahun 2018) menjadi 40,85% pada tahun 2019.

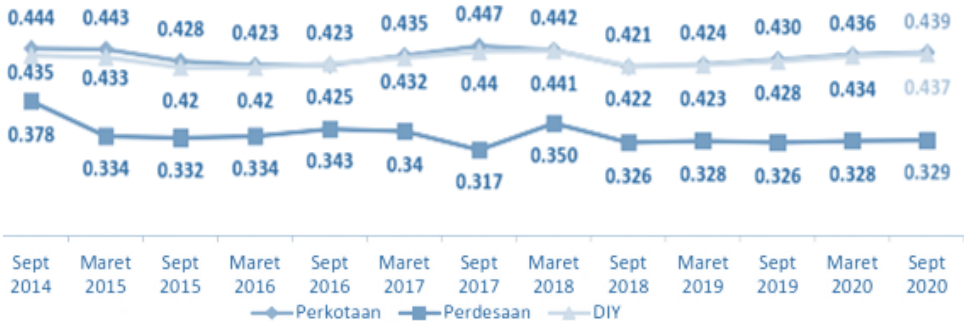
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IDG di DIY adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi dan kualitas perempuan dalam jabatan struktural semakin meningkat,
b. Pendidikan Politik bagi perempuan secara intensif dan konsisten sehingga semakin meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek pembangunan,
c. Intervensi melalui program dan kegiatan yang mendorong kapasitas kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi meningkat,
d. Penguatan kelembagaan yang mendorong pelaksanaan Pengarusutamaan Gender,
e. Sinergi antara OPD, Lembaga Masyarakat, Organisasi perempuan dan parpol dalam mendukung keterwakilan perempuan di legislatif,
f. Dukungan regulasi sebagai landasan hukum untuk implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG).

3. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi merupakan salah satu persoalan ekonomi serius yang dihadapi Indonesia, secara umum dan khususnya di DIY. Kondisi ini bertolak belakang dengan salah satu tujuan pembangunan yang selama ini dicita-citakan yaitu tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang terdistribusi secara merata dan dapat dinikmati oleh keseluruhan penduduk secara seimbang. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Gini Ratio. Gini ratio dihitung berdasarkan kelas pendapatan dengan skala 0-1. Nilai Gini Ratio berada pada interval 0 sampai dengan 1, semakin mendekati angka satu menunjukkan semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk di suatu tempat. Sebaliknya, semakin dekat Gini ratio dengan angka 0 menunjukkan semakin terjadinya pemerataan pendapatan.

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya. Angka Gini Ratio DIY pada September 2020 tercatat sebesar 0,437 atau naik 0,003 poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 0,434. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, angka tersebut termasuk pada kategori ketimpangan sedang. Hal ini tercermin dari persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah yang besarnya mencapai 15,66 persen dari total pengeluaran penduduk DIY.



Gambar 3.3. Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan September 2014 – September 2020
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Dari gambar di atas, tampak bahwa angka Gini Ratio pada periode bulan September 2014 – September 2020 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Selama kurun waktu tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY mencapai puncaknya pada Maret 2018 yang diindikasikan dengan angka Gini Ratio sebesar 0,441. Adapun tingkat ketimpangan pengeluaran yang terendah terjadi pada September 2015 dan Maret 2016 dengan Gini Ratio masing-masing sebesar 0,420. Meskipun demikian, sejak September 2018 tercatat Gini Ratio DIY mengalami peningkatan secara berturut-turut. Hal tersebut perlu mendapat perhatian karena meningkatnya kesenjangan akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah.

Sedangkan berdasarkan tempat tinggal, peningkatan Gini Ratio terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Angka Gini Ratio di perkotaan tercatat sebesar 0,439 atau naik 0,003 poin dalam satu semester terakhir. Sementara itu, tingkat ketimpangan di perdesaan pada September 2020 sebesar 0,329 atau naik 0,001 poin dibandingkan kondisi Maret 2020. Lebih lanjut mengenai Gini Ratio di wilayah perkotaan dan perdesaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4. Gini Ratio DIY dan Indonesia Periode September 2019 – Spetember 2020

Wilayah/Waktu	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
Daerah Istimewa Yogyakarta			
September 2019	0,430	0,326	0,428
Maret 2020	0,436	0,328	0,434
September 2020	0,439	0,329	0,437
Indonesia			
September 2019	0,391	0,315	0,380
Maret 2020	0,393	0,317	0,381
September 2020	0,399	0,319	0,385

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Angka Gini Ratio di perkotaan pada bulan September 2019 tercatat sebesar 0,430. Selanjutnya, pada Maret 2020 angka Gini Ratio meningkat menjadi 0,436. Kemudian pada September 2020, Gini Ratio di perkotaan DIY kembali meningkat menjadi 0,439. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan penduduk yang secara terus-menerus di perkotaan selama periode satu tahun terakhir.

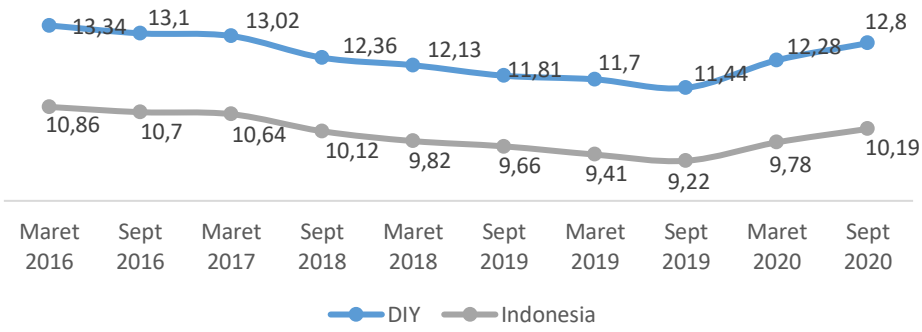
Hal serupa juga terjadi di daerah perdesaan, dimana tingkat ketimpangan menunjukkan adanya peningkatan meskipun dengan laju yang lebih rendah. Pada September 2019, Gini Ratio perdesaan adalah 0,326. Selanjutnya, pada Maret 2020 meningkat menjadi 0,328. Pada September 2020, Gini Ratio di perdesaan kembali meningkat menjadi 0,329. Gini Ratio dan laju perubahan yang cenderung lebih rendah di perdesaan dibandingkan di perkotaan menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan penduduk di perdesaan lebih baik daripada di perkotaan.

Secara keseluruhan terjadi peningkatan konsumsi pada kelompok penduduk 40 persen terbawah selama satu semester terakhir di DIY. Hal tersebut diperkirakan terkait dengan adanya bantuan sosial selama masa pandemi Covid-19. Namun demikian, kondisi ini tidak menyebabkan turunnya tingkat ketimpangan. Hal ini karena pada saat yang sama kelompok penduduk 20 persen teratas juga meningkatkan konsumsi selama satu semester terakhir. Hal tersebut diduga, sebagai respon terhadap kondisi yang ada.

4. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Persentase Angka Kemiskinan

Permasalahan yang masih dihadapi oleh DIY khususnya dan Indonesia secara keseluruhan yaitu kemiskinan. Permasalahan ini bersifat kompleks dan multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan nasional. Masih tingginya angka kemiskinan di DIY merupakan masalah serius yang menjadi fokus perhatian dan prioritas utama pembangunan daerah.

Selama periode September 2016 sampai dengan September 2019, persentase penduduk miskin DIY menunjukkan penurunan. Persentase penduduk miskin di DIY berkurang 1,9 poin dari 13,34% menjadi 11,44%. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sedikit meningkat yang diakibatkan dampak pandemi Covid-19. Persentase penduduk miskin di September 2020 sebesar 12,80% atau meningkat sebanyak 1,36 poin dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 11,44%. Peningkatan kemiskinan di DIY mempunyai kaitan dengan semakin memburuknya kondisi perekonomian di DIY. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi DIY tercatat sebesar sebesar -2,69%. Sedangkan garis kemiskinan semakin meningkat dari Rp449.485,00 per kapita/bulan (September 2019) menjadi Rp465.428,00/kapita/bulan (September 2020).



Gambar 3.4. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi DIY,2021

Berdasarkan data rilis tingkat kemiskinan kabupaten/kota yang tersedia, yakni sampai dengan Maret 2019, tingkat kemiskinan terbesar tahun 2019 di DIY berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 17,39%, sedangkan yang terendah di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 6,84%. Tiga Kabupaten yang berada berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan di DIY adalah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul. Capaian angka kemiskinan di semua kabupaten/kota pada tahun 2019 masih belum sesuai dengan target. Hal tersebut berpengaruh terhadap capaian angka kemiskinan di DIY. Target dan realisasi angka kemiskinan masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut.

Tabel 3.5. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2015-2019 (%)

Kabupaten/Kota	Maret 2015	Maret 2016	Maret 2017	Maret 2018	Maret 2019
Kulon Progo	21,40	20,30	20,03	18,30	17,39
Bantul	16,33	14,55	14,07	13,43	12,92
Gunungkidul	21,73	19,34	18,65	17,12	16,61
Sleman	9,46	8,21	8,13	7,65	7,41
Kota Yogyakarta	8,75	7,70	7,64	6,98	6,84

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Berdasarkan tipe daerah, tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Selama dua tahun terakhir, persentase penduduk miskin di perdesaan selalu di atas 13,5% sedangkan di perkotaan di bawah 12,5%. Tingkat kemiskinan di perdesaan adalah 14,57% sedangkan di perkotaan adalah 12,17% pada September 2020.

Tabel 3.6. Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, 2019 - 2020

Daerah/Bulan	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan	
Maret 2019	10,89
September 2019	10,62
Maret 2020	11,53
September 2020	12,17
Perdesaan	
Maret 2019	13,89
September 2019	13,67
Maret 2020	14,31
September 2020	14,57
Perkotaan + Perdesaan	
Maret 2019	11,70
September 2019	11,44
Maret 2020	12,28
September 2020	12,80

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Selama tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2) mengalami peningkatan baik secara keseluruhan maupun di tiap tipe daerah. Pada September 2019, Indeks P1 perkotaan dan perdesaan sebesar 1,545. Selanjutnya, pada Maret 2020, Indeks P1 meningkat menjadi 1,939. Pada September 2020, Indeks P1 meningkat lagi menjadi 2,079. Meningkatnya indeks P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan.

Pada September 2019, Indeks P2 perkotaan dan perdesaan adalah 0,301 dan meningkat menjadi 0,456 pada Maret 2020. Selanjutnya, sejalan dengan bertambahnya penduduk miskin dan meningkatnya keparahan kemiskinan, Indeks P2 pada September 2020 meningkat lagi menjadi 0,499. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Di perdesaan, tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di perdesaan meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat kesenjangan antara penduduk miskin setahun sebelumnya dengan P2 September 2019 adalah 0,277 dan September 2020 meningkat menjadi 0,569.

Tabel 3.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2019 - 2020

Bulan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2019	1,725	1,783	1,741
September 2019	1,488	1,697	1,545
Maret 2020	1,857	2,160	1,939
September 2020	1,976	2,368	2,079

Bulan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2019	0,408	0,317	0,384
September 2019	0,310	0,277	0,301
Maret 2020	0,419	0,526	0,456
September 2020	0,475	0,569	0,499

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

5. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan – Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda Yang Diapresiasi

Budaya benda adalah segala sesuatu wujud hasil karya budaya berupa benda yang mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, politik, sosial dan keagamaan, bergaya tertentu dan sudah langka serta berusia lebih dari 50 tahun. Budaya benda meliputi struktur, situs, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. DIY memiliki keragaman dan kekayaan budaya benda yang terbentang sejak jaman prasejarah, Hindu-Budha, Islam hingga masa kolonial. Sebagai salah satu pusat peradaban di Indonesia, tentu saja seluruh potensi budaya benda yang ada perlu dipelihara dan dikembangkan.

Tabel 3.8. Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang ditetapkan di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2007 -2020

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2007	28	-	28
2	2010	16	-	16
3	2011	95	-	95
4	2013	1	-	1
5	2014	1	-	1
7	2016	1	-	1
8	2018	2	-	2
9	2019	6	-	6
10	2020	16		16
Jumlah		**166**		**166**

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Budaya benda kekayaan DIY yang ditetapkan di tingkat nasio0nal dan internasional pada tahun 2020 meliputi Rumah Sakit Bethesda, SMA Negeri 3 Yogyakarta, Jembatan Mbeling (Jembatan Kereta Api di Sungai Progo [BH No. 2034 Sisi Utara), Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Goa Braholo, Gedung Agung, Monumen Perjuangan Rumah Makan Sate Puas, Gedung Pusat UGM, Hotel Garuda, nDalem Joyodipuran (kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY), Korem 072 Pamungkas, Rumah Jenderal Sudirman Bintaran (Museum Sudirman), Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, SMA Negeri 11 Yogyakarta, Rumah Sakit Panti Rapih dan Jembatan Bantar.

Budaya Tak benda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan – ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia.

Tabel 3.9. Penetapan Warisan Budaya Tak benda Kekayaan DIY tingkat Nasional dan Internasional Pada Tahun 2013 – 2020

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2013	1		1
2	2014	1	-	4
3	2015	4	-	4
4	2016	9	-	9
5	2017	18	-	18
6	2018	27	-	27
7	2019	30	-	30
8	2020	14		14
Jumlah		**104**	**-**	**104**

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020

Sejak tahun 2013 -2020 sudah 104 Warisan Budaya Tak benda kekayaan DIY yang telah di tetapkan. Pada Tahun 2020 di tetapkan 14 warisan budaya tak benda, yaitu Besengek Tempe Benguk, Busana Mataraman Yogyakarta, Kupatan Jolosutro, Madhilakhiran Wonontoro, Rasulan, Upacara Adat Cing-Cing Goling, Peksi Burak, Reog Wayang, Srimpi Pandhelori, Kethoprak Yogyakarta, Wayang Thengul Yogyakarta, Nilai-Nilai Ajaran Sestradi Puro Pakualaman, Babad Mangkubumi Yogyakarta dan Babad Ngayogyakarta HB V-VII.

Realisasi pada tahun 2020 sebesar 11,97% dari target 11,72%. Pencapaian ini diukur dari peningkatan Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi nasional dan internasional. Sedangkan capaian terhadap target akhir pencapaian RPJMD di tahun 2022 yang sebesar 12,04% telah terealisasi sebesar 99.41% sehingga dengan besaran pencapaian tersebut, target akhir RPJMD optimis dapat dicapai.

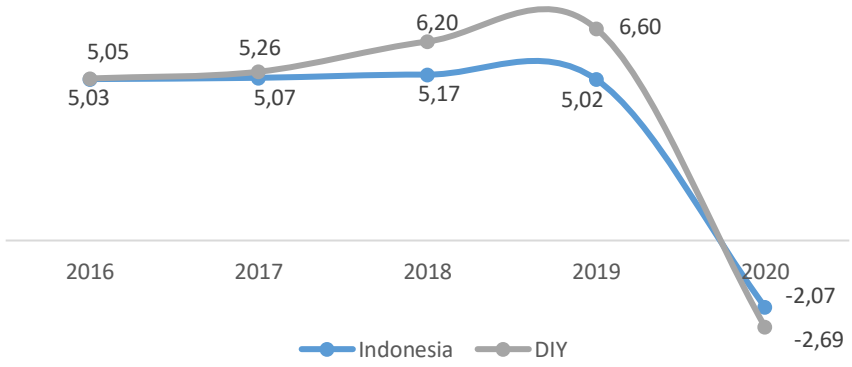
Pencapaian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Benda dan Tak Benda di DIY didukung melalui kegiatan perlindungan (penyelamatan, perawatan, pemeliharaan dan pemugaran), selain itu didukung pula dengan adanya promosi publikasi. Meskipun demikian, capaian sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga Internasional (UNESCO) dalam melakukan penetapan Budaya Benda maupun Tak Benda.

6. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan kondisi perekonomian suatu daerah ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kapasitas daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa. Indikator yang mengukur kapasitas ekonomi tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika kapasitas tersebut meningkat yang berarti secara riil jumlah produksi barang dan jasa meningkat akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi positif. Pada tahun 2020, nilai PDRB atas dasar harga konstan maupun berlaku yaitu masing-masing Rp138,388 triliun atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp101,679 triliun.

Perekonomian DIY selama 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,69 persen (c-to-c), berbeda arah pertumbuhan dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,60 persen. Secara sektoral, kontraksi terutama dipicu oleh lapangan usaha transportasi serta penyediaan akomodasi dan makan-minum. Sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen mengalami kontraksi, termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto.

Penurunan PDRB tersebut disebabkan oleh melemahnya aktivitas ekonomi dampak pandemi Covid-19. Pembatasan fisik dan sosial menyebabkan interaksi dan mobilitas sumber daya terutama tenaga kerja menjadi terbatas sehingga dinamika aktivitas perekonomian menurun.



Gambar 3.5. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Indonesia Tahun 2016-2020 (%)
Sumber: BPS Provinsi DIY , 2021

Tabel 3.10. Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 (%)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)	Sumber Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,19	0.33
Pertambangan dan Penggalian	-9,22	-0.05
Industri Pengolahan	-4,38	-0.55
Pengadaan Listrik, Gas	-0,10	0.00
Pengadaan Air	0,51	0.00
Konstruksi	-15,64	-1,71
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,52	-0.37
Transportasi dan Pergudangan	-20,21	-1,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16,91	-1,65
Informasi dan Komunikasi	19,70	2,20
Jasa Keuangan	-1.09	-0.04
Real Estate	1,27	0.09
Jasa Perusahaan	-14,89	-0.17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,22	-0,16
Jasa Pendidikan	2,24	0.39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,18	0.51
Jasa lainnya	-15.74	-0.44
PDRB	**-2,69**	**-2,69**

Sumber: BPPSD DIY, 2021

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi DIY didukung oleh pertumbuhan positif dari 6 (enam) lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh tercepat adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sekitar 19,70% dengan menyumbang 2,20% terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif hanya dicapai oleh komponen perubahan inventori dan ekspor antardaerah netto yang meningkat 0,07% dan 3%. Unsur pengeluaran lain mengalami pertumbuhan negatif.

Berdasarkan Kajian dari Bappenas tahun 2020, bahwa harga lahan/ keterbatasan lahan dan kualitas SDM khususnya produktivitas tenaga kerja turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terutama dari sisi investasi. Pelambatan pertumbuhan ekonomi di DIY terjadi seiring dengan telah selesainya beberapa proyek besar konstruksi seperti; Bandara NYIA dan Underpass Kentungan.

7. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditetapkan secara nasional sebagai indikator untuk menilai ketercapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional. Demikian halnya dengan IKLH yang ditetapkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota

juga menggambarkan kondisi pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Selain itu, IKLH dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH DIY merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup Provinsi yang merupakan generalisasi dari Indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/Kota se-DIY.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah Kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Perhitungan IKLH tetap menggunakan metode yang sama dengan tahun sebelumnya sampai akhir periode masa berlaku RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 dengan rumus IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL). Untuk perhitungan IKTL terdapat penambahan luas penggunaan lahan, yaitu Cagar alam geologi seluas 145,179 ha, hutan penelitian seluas 101,645 ha dan lahan rawan bencana alam seluas 3355,859 ha. Sedangkan untuk perhitungan IKA masih tetap menghitung tujuh parameter yang sama, yaitu DO, BOD, COD, TSS, PO_4, Fecal Coli dan Total Coliform. Perhitungan IKU masih menggunakan metode yang sama dengan parameter kualitas udara NO_2 dan SO_2. Parameter dan bobot dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Kriteria dan Indikator IKLH

No.	Kriteria	Parameter	Indeks	Bobot	Indeks x Bobot
1.	Kualitas Air Sungai	TSS, DO, BOD, COD, PO_4. Fecal Coli, Total Coliform	38,43	30 %	11,53
2.	Kualitas Udara	SO_2, NO_2	89,14	30 %	26,74
3.	Kualitas Tutupan Lahan	H. Produksi, H. Lindung, H. Rakyat, Cagar alam Geologi, C. Alam, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Taman Nasional, H. Penelitian, Suaka Marga Satwa, lahan Rawan Bencana Alam Geologi, Perkebunan, Lahan Pangan tidak beririgasi, sempadan sungai, Sempadan pantai, RTH.	58,32	40 %	23,33
Capaian IKLH					**61,60**

Sumber data: Laporan IKLH Nasional tahun 2020

Berdasarkan data dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), maka dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan formulasi sebagai berikut:

IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)

IKLH = (30% x 38,43) + (30% x 89,14) + (40% x 58,32)

IKLH = 61,599 ≈**61,60**

Realisasi IKLH sebesar 61,60 masih berada di bawah target RPJMD yaitu 62,44. Berdasarkan klasifikasi nilai IKLH dari KLHK, maka angka IKLH DIY sebesar 61,60 dikategorikan cukup baik. Klasifikasi nilai IKLH dari KLHK dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.12. Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Skor	Kriteria
IKLH > 80	Sangat Baik
70 < IKLH ≤ 80	Baik
60 < IKLH ≤ 70	**Cukup Baik**
50 < IKLH ≤ 60	Kurang Baik
40 < IKLH ≤ 50	Sangat kurang baik

Sumber: Klasifikasi IKLH , RPJMN 2020 – 2024 (KLHK RI)

Adapun realisasi IKA, IKU, IKTL dan IKLH selama tahun 2018 – 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.13. Target dan Realisasi IKLH Tahun 2018 - 2020

Tahun / Indeks	2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKA	34,20	40,25	36,40	38,65	38,60	38,43
IKU	87,06	84,24	87,73	85,25	88,40	89,14
IKTL	55,5	60,86	58,18	59,70	60,86	58,32
IKLH	58,58	61,69	60,51	61,05	62,44	61,60

Sumber: Analisis data DLHK DIY Tahun 2021

Jika dibandingkan dengan nilai realisasi IKLH tahun 2019 terjadi kenaikan nilai IKLH pada tahun 2020. Namun demikian, realisasi belum mencapai target. Tidak terpenuhinya target IKLH dikarenakan nilai IKA dan IKTL berada di bawah target RPJMD. Nilai IKA rendah karena tingginya kadar Bakteri Koli tinja dan Total Koli yang dominan berasal dari limbah domestik. Sedangkan nilai IKTL yang belum mencapai target, selain karena adanya perubahan sumber data untuk perhitungan IKTL yang hanya bersumber dari interpretasi citra satelit Kementerian LHK dan kajian RTH tahun 2018, juga disebabkan masih rendahnya penambahan vegetasi baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) maupun rehabilitasi terhadap lahan kritis lainnya.

8. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun Kabupaten/Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat yang diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Selain itu, juga perlu memperhitungkan kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari struktur ruang yang dihitung dengan membandingkan struktur ruang eksisting terhadap struktur ruang RTRW DIY.

Berdasarkan Permen ATR No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang maka capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2020 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.

Perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan dengan membandingkan antara kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dengan luas kawasan lindung dan luas kawasan budidaya. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung diperoleh dari pemanfaatan ruang kawasan lindung eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan lindung pada RTRW, sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya diperoleh dari pemanfaatan ruang kawasan budidaya eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya pada RTRW. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi yakni sesuai, tidak sesuai, dan belum terwujud melalui proses *superimpose* antara peta rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan tahun 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian kawasan lindung dan kawasan budidaya diketahui bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di DIY seluas 15.846,403 ha atau sebesar 86,61% dengan ketidaksesuaian seluas 2.449,435 ha atau sebesar 13,39%. Ketidaksesuaian pada kawasan lindung diantaranya adanya aktivitas budidaya pada kawasan sempadan sungai. Sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya di DIY seluas 234.718,609 ha atau sebesar 78,48%, belum terwujud 48.368,709 ha (16,18%), dan tidak sesuai seluas 15.982,924 atau sebesar 5,34%. Persentase dukungan belum terwujudnya kawasan budidaya adalah pada kawasan peruntukan industri yang saat ini kondisinya masih berupa kebun, permukiman, dan sawah. Sehingga perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut.

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	$= \frac{\text{(total luas kesesuaian kawasan lindung+total luas kawasan budidaya)}}{\text{(total luas kawasan lindung+total luas kawasan budidaya)}}$ $= \frac{15.846{,}403 + 234.718{,}609}{18.295{,}837 + 299.070{,}242}$ $= 78{,}95\ \%$

Sehingga kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW capaiannya sebesar 78,95%. Capaian ini meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun tidak mencapai target tahun 2020 yang sebesar 79,5%. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 95,70% dari target kinerja akhir RPJMD yang ditargetkan sebesar 82,5%.

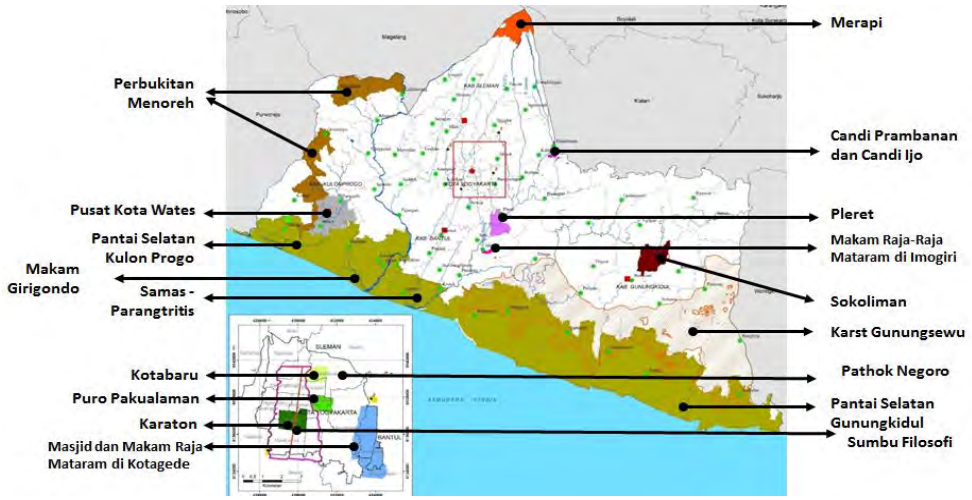
Meskipun kinerja masuk dalam kriteria tinggi, namun pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tantangan dalam mempertahankan maupun meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang, seiring dengan banyaknya kawasan yang berkembang dengan pesat diantaranya aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya.

9. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

Penataan ruang keistimewaan telah diatur dalam Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Tujuan pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial,kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan serta dipergunakan untuk membangun harmonisasi dengan satuan ruang lainnya. Pelaksanaan penataan ruang di satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang.Dalam mendukung capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis ini peran pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersifat memberikan bantuan dalam hal:

a) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
b) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
c) Penyusunan rencana induk pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;
d) Pelaksanaan Penataan Ruang;
e) Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan Ruang Tanah Kasultananatau Tanah Kadipaten yang menyalahi Rencana Tata Ruang;
f) Penanganan sengketa atas pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;

g) Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan Ruang;
h) Pengendalian pemanfaatan Ruang; dan
i) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.



Gambar 3.6. Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis

Penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan menjadi salah satu indikator kinerja utama DIY yang dicapai melalui beberapa komponen meliputi:

a. Penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang:
   1) PenyusunanRencana Rinci Tata Ruang
   2) PenyusunanRencanaInduk (*Masterplan*)
   3) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
b. Pemanfaatan Ruang
c. Pengendalian Pemanfaatan ruang

Capaian kinerja untuk sasaran Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 9,16% dari tahun 2019. Capaian persentase penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan adalah sebesar 40,69% dari target yang ditetapkan sebesar 40,69 % atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 54,44 %, capaian tahun 2020 ini mencapai 74,74%. Indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci, rencana induk dan RTBL, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis.

Realisasi capaian kinerja tersebut merupakan penjumlahan dari capaian beberapa aspek diantaranya jumlah Satuan Ruang Strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci, rencana induk dan RTBL sebesar 14,86 %,

keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan sebesar 12,50 % dan pengendalian pemanfaatan ruang padaSatuan Ruang Strategis sebesar 13,33%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini mengalami peningkatan pada satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci, rencana induk dan RTBL meningkat sebesar 1,81 %, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan meningkat sebesar 2,92 %, dan pengendalian pemanfaatan ruang padaSatuan Ruang Strategis meningkat sebesar 4,44 %. Berikut ini daftar satuan ruang strategis yang sudah mempunyai dokumen perencanaan, didorong untuk melakukan perwujudan ruang sesuai dokumen rencana dan satuan ruang strategis yang dilakukan upaya peningkatan kesesuaian sebagai berikut:

Tabel 3.14. Daftar Dokumen Perencaan Pada Satuan Ruang Strategis

No	Satuan Ruang Strategis	RTBL	Rencana Induk	RRTR
1	Karaton	2015	2014	2018
2	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	2014	2015	
		2015		
		2020		
3	Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	2014	2015	2018
4	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	2015		2018
		2019		
5	Masjid Pathok Nagoro	2015	2018	2018
				2019 (Validasi KLHS)
6	Gunung Merapi		2015	
			2018	
7	Pantai Samas – Parangtritis	2015	2014	2019
		2019		
8	Kerto – Pleret	2015		
		2020		
9	Kotabaru	2015	2015	2018
10	Candi Prambanan - Candi Ijo		2016	2020
11	Sokoliman	2016	2018	
12	Perbukitan Menoreh	2015	2015	2018
		2018	2020	
				2019 (Validasi KLHS)
13	Karst Gunungsewu	2014	2015	2019
			2018	
14	Pantai Selatan Gunungkidul	2016	2019	2018
15	Puro Pakualaman	2015	2014	2018
16	Makam Girigondo	2015		
17	Pusat Kota Wates			2020
18	Pantai Selatan Kulon Progo			

Sumber: DPTR DIY, 2021

Capaian keterwujudan pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis dinilai berdasarkan pembobotan pada masing – masing SRS yang sudah dilakukan upaya tindak lanjut perwujudan ruang berdasarkan dokumen rencana yang sudah disusun. Pada Satuan Ruang Strategis juga sudah dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis yang ada di perkotaan dan perbukitan menoreh.

Faktor pendorong capaian sebagai berikut:

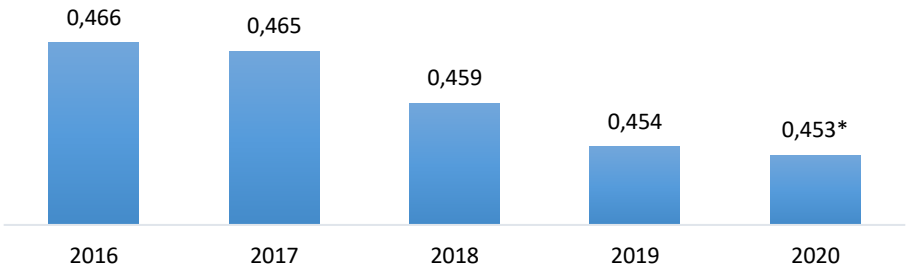
1. Pengawasan pemanfaatan ruang secara rutin dan melakukan penindakan pelanggaran yustisi maupun non-yustisi pada Satuan Ruang Strategis;
2. Koordinasi rutin dengan kabupaten/kota yang sudah mempunyai rencana tata bangunan lingkungan untuk segera menetapkannya menjadi peraturan bupati/ peraturan walikota.

Adapun faktor yang menjadi penghambat capaian, antara lain penetapan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat penghapusan aturan Rencana Tata Ruang Strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota

10. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar-Wilayah – Indeks Williamson

Keberhasilan pembangunan dapat ditinjau dari peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Bagi suatu daerah setingkat provinsi, keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh produk rata-rata yang dapat dihasilkan masyarakat daerah di bawahnya (kabupaten dan kota). Lebih lanjut lagi keberhasilan dalam mensejahterakan seluruh masyarakat dapat dilhat dari meratanya produksi rata-rata per kapita antar daerah.

Kemerataan kemajuan pembangunan ekonomi antar daerah dalam hal ini antar kab/kota yang ada di DIY dapat menggunakan berbagai macam pendekatan. Salah satu ukuran kemerataan tersebut adalah Indeks Williamson. Indeks ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemerataan produksi per rata-rata penduduk antar wilayah. Dasar perhitungannya menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Nilai Indeks Williamson di DIY selama lima tahun terakhir ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Gambar 3.7. Indeks Williamson DIY Tahun 2016-2020

*Keterangan: *olahan*

Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kesenjangan ekonomi antardaerah di DIY menurun selama periode 2016 sampai 2020 yang ditunjukkan dengan penurunan indeks dari 0,466 di tahun 2016 menjadi 0,453 di tahun 2020. Penurunan ketimpangan wilayah yang cukup signifikan terjadi di tahun 2018 dan 2019 seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo yaitu masing-masing sebesar 10,83% dan 13,49%. Pada tahun 2020, ketimpangan ekonomi antarwilayah mengalami penurunan disebabkan oleh kontraksi rata-rata dua daerah yang lebih maju secara ekonomi yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kontraksi tiga kabupaten lain. Rata-rata kontraksi dua daerah yang lebih maju adalah 3,17%, sedangkan rata-rata kontraksi tiga daerah lainnya adalah 2,13%. Tabel berikut menunjukkan perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota.

Tabel 3.15. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota 2016 – 2020 (dalam persen)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulonprogo	4,76	5,97	10,83	13,49	-4,06
Bantul	5,05	5,10	5,47	5,53	-1,66
Gunung Kidul	4,88	5,01	5,16	5,34	-0,68
Sleman	5,22	5,34	6,42	6,48	-3,91
Yogyakarta	5,11	5,24	5,49	5,96	-2,42

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Meskipun kesenjangan ekonomi antarwilayah semakin turun, namun capaian tahun 2020 belum sesuai target sebesar 0,524. Hal tersebut disebabkan karena belum meratanya pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah DIY.

11. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan - Opini BPK

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode tertentu. Salah satu peran dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah

menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun meliputi komponen laporan keuangan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas Pengelolaan Keuangan Negara di daerah, maka setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang diperiksa kecuali yang objeknya telah diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutkan opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada:

a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
b. Kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures)*;
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

a. Wajar Tanpa Pengecualian *(unqualified opinion)*;
b. Wajar Dengan Pengecualian *(qualified opinion)*;
c. Tidak Wajar *(adversed opinion)*; dan
d. Pernyataan menolah memberikan opini *(disclaimer of opinion)*.

Pada tahun 2020, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 21A/LHP/XVIII.YOG/04/2020, LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 21B/LHP/XVIII.YOG/04/2020 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Nomor 21C/LHP/XVIII.YOG/ 04/2020. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk keepuluh kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010.

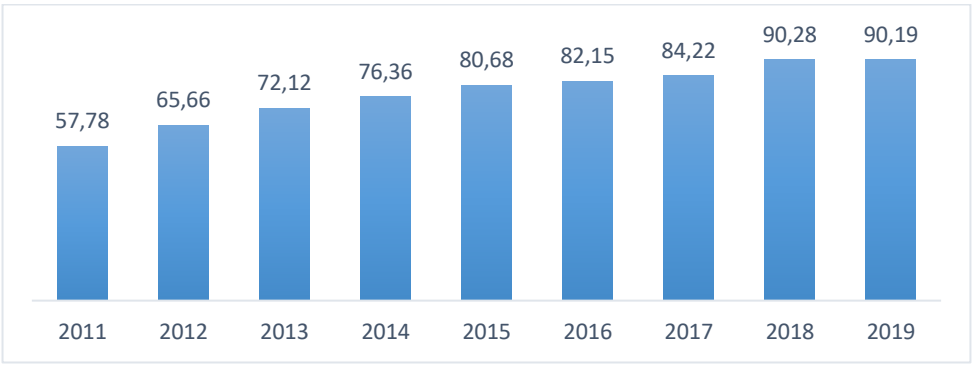
Keberhasilan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik.
b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan review pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.
c. Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fsik sarana prasarana.

12. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Nilai AKIP

Keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan didasari oleh penguatan sistem akuntabilitas yang rasional dan terukur. Untuk membangun sistem yang akuntabel harus menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang didukung oleh semua Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu perlu upaya untuk mengarahkan supaya dapat bergerak menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain tujuan dan sasaran, penting menyusun strategi, pengalokasian anggaran dengan memperhatikan target kinerja, pengembangan sistem pelaporan kerja yang akurat, melakukan *review* manajemen kinerja secara berkala, serta pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan, serta monev secara terintegrasi. Penguatan sistem akuntabilitas tersebut untuk menjaga konsistensi, keterukuran, meningkatkan kualitas proses, memudahkan kontrol, membangun budaya kerja, menjaga keterkaitan, serta yang terpenting meningkatkan kualitas monitoring dalam pelaksanaan pembangunan.

Perbaikan terhadap akuntabilitas DIY secara nyata telah menghasilkan peningkatan efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil, *refocussing* program kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk tahun 2020 belum dirilis oleh i Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rebublik Indonesia (KemenPAN dan RB RI), sehingga nilai terakhir AKIP Pemda DIY masih sampai dengan tahun 2019 sebesar 90,19 atau dengan kategori AA. Sampai dengan penilaian terakhir yang dikeluarkan KemenPAN dan RB tersebut, Pemda DIY merupakan satu-satunya Pemda yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP. Perkembangan nilai AKIP Pemda DIY dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.8. Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2012-2019
Sumber: Bappeda DIY, 2020

Dari Hasil Evaluasi terakhir oleh KemenPAN RB disampaikan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemda DIY menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Penerapan Sistem AKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik di lingkungan Pemda DIY telah dilakukan dengan baik, secara formal penerapan tersebut telah dilakukan hingga ke unit kerja terkecil dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun laporan kinerja serta telah melakukan evaluasi kinerja internal. Kualitas penerapan SAKIP sudah baik, terlihat dari penyusunan RPJMD yang sudah berorientasi pada manfaat yang akan diterima masyarakat, sudah berpedoman pada *integrated development plan* serta fokus pada prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan Pemda DIY.

Capaian kinerja AKIP didorong oleh keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan penyusunan kelembagaan berbasis kinerja (*performance based organization*). Sebelumnya, Pemda DIY selama empat tahun berturut-turut (2014-2017) menyandang predikat A dan mulai tahun 2018 telah mendapatkan predikat AA. Dengan perolehan predikat AA, maka nilai AKIP dalam RPJMD 2018-2022 telah terlampaui. Dilihat dari perkembangan nilai AKIP Pemda DIY, sejak Tahun 2011 sampai dengan 2018, Hasil evaluasi AKIP selalu mengalami kenaikan. Namun pada evaluasi terakhir, tahun 2019 mengalami penurunan 0,09 poin dibanding tahun 2018, meskipun masih masuk dalam predikat AA. Penurunan nilai AKIP DIY pada tahun 2019 ini bila dibandingkan tahun 2018 terletak pada komponen Perencanaan Kinerja sebesar, menurun 0,26 poin. Kemudian juga dari komponen Pengukuran Kinerja yang menurun sebesar 0,11 poin. Selanjutnya untuk komponen Pelaporan Kineja, Evaluasi Internal, serta Capaian Kinerja terdapat kenaikan.

13. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan – Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan

Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruan merupakan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY dengan status keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki berdasarkan sejarah dan hak asal-usul sebagaimana dimuat dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Program/kegiatan Urusan Keistimewaan DIY tahun 2020 direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan dan dikendalikan lebih tepat sasaran, terukur, berorientasi hasil, berkesinambungan, integratif, tematik, dan kolektif kolegial sesuai kewenangan maupun kewilayahan dengan memperhatikan regulasi yang ada utamanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan kewenangan tersebut, Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pergub No. 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Pergub No. 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.

Tujuan pengaturan Keistimewaan DIY tersebut beraras pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13 Tahun 2012 yakni: (1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Tujuan tersebut diwujudkan dengan rancangan program dan kegiatan yang memiliki korelasi kuat dengan poin poin tujuan tersebut. Program prgram tersebut dapat dikategorikan dalam program-program yang bersifat pelayanan publik lembaga pengampu keistimewaan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa-desa budaya, penyediaan ruang-ruang untuk penumbuhan ekonomi dan aktivitas UMKM, legalisasi status tanah, penataan kelembagaan asli di kabupaten/kota hingga tingkat kaurahan/kelurahan, pemberdayaan organisasi-organisasi budaya secara daring, penyediaan sarana prasarana penghubung antar satuan ruang strategis, pemeliharaan dan pengembangan aset-aset budaya, penyediaan sarana prasarana untuk beraktivitas budaya serta lainnya.

Capaian sasaran strategis meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan diukur dengan indikator persentase capaian Program Urusan Keistimewaan yang formulasinya jumlah program urusan keistimewaan yang tergetnya tercapai dibagi jumlah seluruh program urusan keistimewaan kali 100%. Capaian indikator kinerja persentase capaian program urusan keistimewaan pada tahun 2020 mencapai 84,62% dari target 82,61%, berdasarkan hitungan program yang tercapai sebanyak 22 program dari 26 program urusan keistimewaan. Penghitungan ketercapaian prgram tersebut juga memperhatikan ketercapaian kegiatan kegiatan di dalamnya. Faktor penghambat dari pencapaian indikator program yang lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan banyak kegiatan-kegatan yang bersifat masal dan perjalanan misi kebudayaan tidak dapat dilakukan agar nengurangi dampak lebih luas dari pandemik.

14. Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaandan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipatendan Tanah Desa – Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Yang Terfasilitasi Untuk Dikelola Serta Dimanfaatkan

Kewenangan keistimewaan di bidang pertanahan, khususnya berkenaan dengan keberadaan tanah-tanah Kasultanan Yogyakarta dan tanah-tanah Kadipaten Pakualaman yang tersebar di Kabupaten/kota se Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang tercantum dalam UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta No.13 Tahun 2012 Bab X pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten, dengan Undang undang ini dinyatakan sebagai Badan Hukum. Selanjutnya Perdais No 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, menjabarkan ruang lingkup dalam Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Penatausahaan pertanahan meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran.Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari Tanah Keprabon, dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Tanah bukan keprabon atau dede keprabon terdiri dari, tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh, tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi yang telah dan belum memiliki *serat kekancingan*, serta tanah yang belum digunakan.

Bidang tanah kasultanan, kadipaten yang difasilitasi dan dikelola berdasarkan data inventarisasi adalah sebanyak 14.044 bidang. Jumlah bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten tersebut sesuai dengan langkah penatausahaan maka dilakukan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sebagai upaya untuk memiliki kepastian hukum. Pada tahun 2020 ditargetkan Bidang tanah kasultanan, kadipaten

dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan sebanyak 13.419 bidang. Capaian Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan pencapaian untuk tahun 2020 tidak mencapai target. Dari target 13.419 bidang, terealisasi hanya 12.437 bidang atau terhadap target 2020 mencapai 92,68 %. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, sampai dengan tahun 2020 telah didaftarkan sebanyak 12.287 bidang dan telah terbit sebanyak 7.214 sertifikat. Persiapan pendaftaran tanah pada tahun berikutnya sudah dilakukan pemberkasan sebanyak 1.301 bidang. Berikut disampaikan data pendaftaran tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa sampai dengan tahun 2020 di setiap kabupaten/kota.

Tabel 3.16. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah

No	Kabupaten/ Kota	Pendaftaran								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	100	631
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	500	395	3442
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	402	2184
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	500	2939
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	202	3091
	Jumlah	**45**	**744**	**2.170**	**1.140**	**1.270**	**2.559**	**2.760**	**1.599**	**12.287**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

Tabel 3.17. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Desa

NO	KABUPATEN	JUMLAH BIDANG	Bidang Sudah Sertipikat	Bidang Belum Sertipikat	Sertipikat Terverifikasi 2019	Sertipikat Belum diverifikasi	Penyesuaian Sertifikat
1	Bantul	15,743	2,117	13,626	390	1,727	50
2	Kulon Progo	4,156	3,649	507	3,649	0	*0*
3	Gunungkidul	10,882	3,283	7,599	1,277	2,006	50
4	Sleman	19,498	7,007	12,491	7,007	0	50
	Jumlah	**50,279**	**16,056**	**34,223**	**12,323**	**3,733**	**150**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA

Sesuai dengan skema cascading *Perfomance Based Budgeting* RPJMD 2017-2022, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY ditopang oleh beberapa program pemda sebagai basis *money follow program* dan bersifat *holistic-tematik-integrative* sesuai dengan sasaran serta program perangkat daerah yang berada dalam lingkup kinerjanya. Berdasarkan evaluasi dan analisa data yang dilakukan, capaian indikator kinerja program Pemda DIY sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	2020		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
1	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	26,30	12,10	14,32	118,32	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,58	15,82	15,59	98,55	Tidak tercapai
3	Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	Orang	245	210	238	113,33	Tercapai
4	Persentase sekolah yang melakukan pendidikan bebasis dengan kategori maju	Persen	25,14	7,47	25,14*	336,55	Tercapai
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,92	75,32	74,99	99,56	Tidak tercapai
6	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	Kab /Kota	2	4	2*	50	Tidak tercapai
7	Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	Persen	25	21,62	24,92	115,26	Tercapai
8	*Total Fertility Rate*	Angka	1,8	2,1	1,8	114,29	Tercapai
9	Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang	Desa/ Kelu-rahan	42	48	48	100	Tercapai
10	Angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*)	Angka	16,50	9,6	12,10	73,96	Tidak tercapai
11	Persentase peningkatan Penumbuhan wirausaha baru	Persen	0,3	0,3	0,4	133,3	Tercapai
12	Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	Ribu jiwa	440.890	343.101	503.140	53,36	Tidak Tercapai
13	Pengeluaran per kapita masyarakat	Juta Rp/ Tahun	16.077	14.073	17.304	122,96	Tercapai
14	Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	Persen	12,32	13,20	13,27	100,53	Tercapai
15	Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	Persen	17,00	15,05	36,60	243,20	Tercapai
16	Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	Persen	41,04	44,00	40,27	91,52	Tidak tercapai
17	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	3,18	2,42	4,57	52,95	Tidak tercapai
18	Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)	Desa	N/A	10	10	100	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	2020		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
19	Indeks Kualitas Air	Angka indeks	38,65	38,60	38,43	99,56	Tidak tercapai
20	Indeks Kualitas Udara	Angka indeks	85,25	88,40	89,14	100,84	Tercapai
21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka indeks	59,70	60,86	58,32	95,83	Tidak tercapai
22	Indeks Risiko Bencana	Angka indeks	148,53	145	124,41	116,55	Tercapai
23	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	Persen	75,88	76,7	66,26	86,38	Tidak Tercapai
24	Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	Persen	39,7	40,24	40,09	99,63	Tidak tercapai
25	Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi	Persen	79,84	72	81,46	113,13	Tercapai
26	Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100	Tercapai
27	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Rupiah	18.277 .128.626	9.953 .610.205	9.016 .510.978	90,58	Tidak tercapai
28	Nilai eksternal pelayanan publik	Nilai	8,50	8,70	8,94*	102,76	Tercapai
29	Nilai internal integritas organisasi	Nilai	4,82	4,40	4,78*	108,64	Tercapai
30	Nilai eksternal persepsi korupsi	Nilai	5,97	5,80	6,52*	112,41	Tercapai
31	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Persen	25	75	100	133,33	Tercapai
32	Persentase tertib Administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	Persen	50,08	59,45	61,25	103,03	Tercapai

*Keterangan: *) Data diolah dan angka sementara*

Berdasarkan capaian tahun 2020, dari keseluruhan 32 indikator kinerja sebanyak 20 indikator memiliki persentase capaian ≥100% dan terdapat 12 indikator yang realisasinya masih <100%. Meskipun beberapa indikator mengalami peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun 2019, secara umum capaian di atas menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uraian masing-masing program berikut realisasi indikator adalah sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, dengan indikator:

a. Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri dari delapan aspek, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian, yang menjadi dasar penentuan kualitas satuan pendidikan, khususnya jenjang pendidikan menengah dan khusus yang berada di bawah kewenangan Pemda DIY. Perhitungan capaian SNP diperoleh dari persentase jumlah SMA, SMK, dan SLB dengan nilai SNP lebih dari 90 pada tahun n-1 sampai dengan tahun n dibagi jumlah seluruh SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta dan dikalikan 100%. Berikut adalah data pencapaian SNP > 90 di DIY pada tahun 2019 dan 2020 untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus.

Tabel 3.19. Rincian Jumlah Sekolah Yang Memenuhi SNP>90

Sekolah	Sekolah dengan pencapaian SNP >90		Jumlah Sekolah Total di DIY
	2019	2020	
SMA	35	2	165
SMK	18	4	217
SLB	6	1	79
Jumlah	59	7	461
Persentase:	**(59+7)/461 x 100% = 14,32%**		

Sumber: BAN-P DIY, 2021

Sesuai perhitungan pada tabel di atas, diperoleh capaian 14,32% untuk sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus di DIY yang memenuhi SNP > 90. Sebagai catatan, pada tanggal 12 November 2020 telah disahkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor1005/P/2020 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan tindaklanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Peringkat terakreditasi Satuan Pendidikan mencakup kelayakan seluruh program yang diselenggarakan pada saat Akreditasi. Terdapat perubahan penilaian di 4 (empat) peringkat Akreditasi Sekolah/madrasah sebagai berikut:1) Peringkat akreditasi A (Unggul) jika sekolah/madrasah memperoleh nilai akhir akreditasi sebesar 91 sampai dengan 100 (91<NA <100), 2) Peringkat akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh nilai akhir akreditasi

sebesar 81 sampai dengan 90 (81 <NA <90), 3) Peringkat akreditasi C (Cukup) jika sekolah/madrasah memperoleh nilai akhir akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 (71 <NA <80) dan 4) Tidak Terakreditasi (TT) jika sekolah/madrasah memperoleh nilai akhir akreditasi di bawah 71. Dengan kriteria dan perangkat akreditasi yang telah ditetapkan maka ada perubahan capaian kinerja sekolah dengan pencapaian >90.

Selanjutnya, perbandingan capaian dengan target tahun 2020 dan target akhir RPJMD diberikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.20. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah Menengah dan Khusus Yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Realisasi		
Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	26,30	12,10	14,32	118,32	13,20	108,49

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

Target SNP di tahun 2020 maupun target akhir RPJMD sesuai tabel di atas telah terlampaui dengan capaian di tahun 2020. Meski demikian terdapat penurunan persentase capaian di tahun 2020 sebesar 11,98% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Adanya pemberlakuan uji coba untuk instrumen penilaian SNP yang baru di tahun 2020 menyebabkan hanya ada 18 SMA, SMK, dan SLB di DIY yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi proyek percontohan penilaian SNP.

Dukungan Pemda DIY terhadap ketercapaian target pemenuhan SNP di DIY tahun 2020 antara lain diwujudkan dalam bentuk dukungan operasional terhadap satuan pendidikan menengah dan khusus baik negeri maupun swasta. Dukungan operasional ini dapat digunakan oleh satuan pendidikan untuk membiayai seluruh pelaksanaan proses belajar mengajar, melakukan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, serta melakukan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020, Pemda DIY tetap mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran secara daring maupun *blended learning* demi menjaga kualitas lulusan dan satuan pendidikan.

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan lamanya (dalam satuan tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY, terjadi peningkatan HLS secara bertahap sejak tahun 2015. Capaian HLS di DIY sesuai data terakhir adalah 15,59 tahun pada tahun 2020. Dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat peningkatan HLS sebesar 0,01 tahun. Berikut adalah data capaian HLS DIY dibandingkan dengan target 2020 dan target akhir RPJMD.

Tabel 3.21. Target dan Capaian Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 Terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	15,58	15,82	15,59	98,55	16,12	96,71

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar berikut memperlihatkan peningkatan capaian HLS DIY dari tahun 2016-2020 dan perbandingan dengan capaian secara nasional.



Gambar 3.9. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Peningkatan HLS di DIY dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di DIY. Perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan perbaikan infrastruktur bidang pendidikan akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan taraf pendidikan yang lebih tinggi. Capaian angka HLS di DIY menunjukkan bahwa masyarakat di DIY mampu menuntaskan pendidikan menengah dan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pendidikan didukung oleh Pemda DIY melalui pemberian bantuan operasional ke sekolah dan pemberian beasiswa bagi siswa yang berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu untuk memastikan semua penduduk usia sekolah memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

c. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif

Sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pendidikan pemuda ditujukan untuk membentuk mental pemuda yang tangguh dan berwawasan luas sebagai bekal peran aktif pemuda dalam pembangunan masyarakat. Peran pemerintah daerah, adalah memfasilitasi pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik lokal kedaerahan.

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah memberikan tantangan bagi pendidikan dan pemberdayaan pemuda dengan adanya pembatasan penyelenggaraan kegiatan pemuda. Meski demikian, Pemda DIY tetap memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan pemuda secara daring ataupun tatap muka terbatas mengingat pandemi telah menimbulkan dampak ekonomi yang cukup berat bagi masyarakat. Berbagai pelatihan maupun pembinaan kepemudaan dengan dukungan organisasi-organisasi kepemudaan tetap berjalan di tahun 2020. Organisasi kepemudaan di tahun 2020 banyak berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat terdampak pandemi melalui pelatihan kewirausahaan.

Indikator kinerja Peningkatan jumlah pemuda kader aktif di DIY dihitung dari selisih jumlah pemuda kader aktif pada tahun n dengan jumlah pemuda kader aktif pada tahun n-1. Berikut adalah rincian perhitungan jumlah kader pemuda aktif pada tahun 2019-2020.

Tabel 3.22. Jumlah Pemuda Kader Aktif 2019-2020 di DIY

	Tahun 2019	Tahun 2020
Pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan (Kwarda, KNPI) dan pelatihan yang diselenggarakan organisasi kepemudaan	1.174	1.268
Pemuda yang berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan (alumni pelatihan keterampilan, pelatihan pemasaran daring, pelatihan agrobisnis; partisipan Sentra Kewirausahaan Pemuda 2020)	2.775	2.823

	Tahun 2019	Tahun 2020
Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan (alumni Jambore Pemuda, LBB, KPN, PPAN, Paskibraka, P4GN, Pemuda Pelopor; peserta sosialisasi awal PPAN 2020)	3.080	3.176
Jumlah	**7.029**	**7.267**
Selisih jumlah pemuda kader aktif tahun 2019 dan 2020:	**7.267-7.029 = 238**	

Sumber: Balai Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

Capaian perhitungan jumlah pemuda kader aktif di tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.23. Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	orang	245	210	238	113,33	220	108,18

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

Capaian peningkatan jumlah pemuda kader aktif pada tahun 2020 sebesar 238 orang telah melampaui target yang ditetapkan, termasuk jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, walaupun peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 tidak sebesar peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Peningkatan partisipasi pemuda ini salah satunya menunjukkan dukungan Pemda DIY terhadap pemberdayaan pemuda di masa pandemi, utamanya terkait kewirausahaan pemuda dan pemberdayaan sektor usaha kecil menengah yang dalam pengembangannya banyak memerlukan partisipasi aktif pemuda.

d. Persentase Sekolah Yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya Dengan Kategori Maju

Penerapan pendidikan berbasis budaya di sekolah merupakan salah satu misi pendidikan di DIY yang telah ditetapkan melalui Perda DIY No. 5 Tahun 2011. Pendidikan berbasis budaya didefinisikan sebagai pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.

Pada tahun 2020 sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penyesuaian kurikulum di masa pandemi, pendidikan karakter dipersyaratkan sebagai salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Dengan adanya pengimplementasian pendidikan berbasis budaya di DIY, yang salah satu unsurnya adalah penanaman pendidikan karakter sesuai nilai-nilai budaya Yogyakarta, Pemda DIY telah mendukung penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi yang dilaksanakan berdasarkan sistem pendidikan nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.

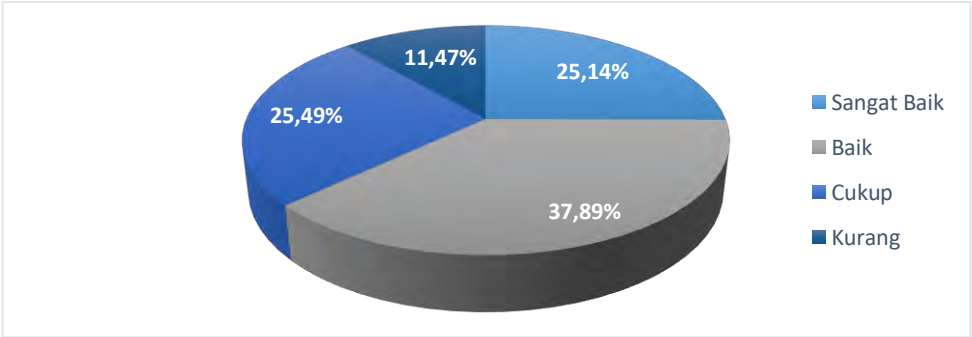
Rincian pencapaian indikator kinerja ini ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 3.24. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	%	25,14	7,47	25,14*	336,55	8,98	280,06*

*Keterangan: *) Realisasi tahun 2019*
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan evaluasi penerapan pendidikan berbasis budaya di sekolah untuk tahun 2020 tidak dapat dilakukan sehingga data capaian indikator yang digunakan adalah data capaian tahun 2019 yaitu sebesar 25,14%. Capaian ini telah melampaui target tahun 2020 maupun target akhir RPJMD. Berikut adalah gambar capaian implementasi penerapan pendidikan berbasis budaya sekolah di DIY.



Gambar 3.10. Capaian Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

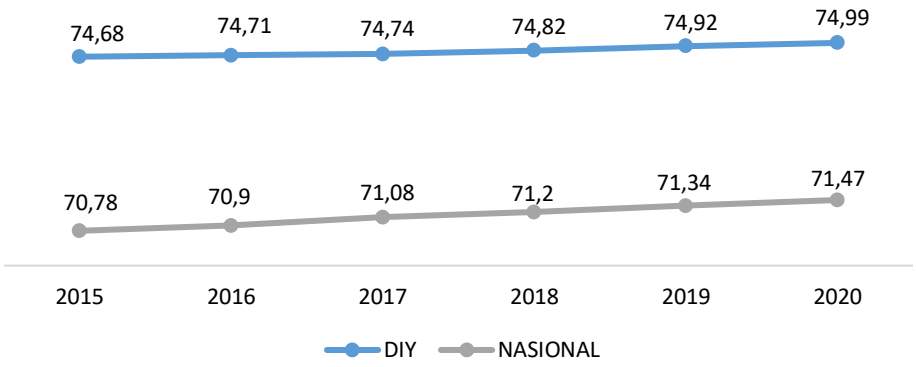
Pada tahun 2020 Pemda DIY memastikan dukungan pembiayaan maupun kontrol untuk penerapan pendidikan berbasis budaya, yang juga mencakup pendidikan karakter, tetap berjalan melalui sistem pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan operasional pembiayaan pembelajaran, pengintegrasian nilai-nilai budaya Yogyakarta ke dalam kurikulum pembelajaran jarak jauh, serta adanya hasil penerapan pendidikan karakter berbasis budaya yang dilakukan para guru dalam evaluasi hasil belajar siswa.

2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Definisi lainnya menyebutkan bahwa AHH dsebutkan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-X. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu sehingga yang dimaksud AHH adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah yang merupakan salah satu indikator derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan AHH memiliki indikasi adanya keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Indikator ini digunakan sebagai parameter bagaimana pembangunan kesehatan dilaksanakan di DIY. Meski demikian, AHH juga memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor yakni pendidikan, inflasi, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, dan sosial ekonomi, namun kesehatan memegang peranan penting dalam penentuannya.

Perlu menjadi perhatian bahwa pertumbuhan AHH nasional pada 2020 hanya 0,18%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,20%. Pertumbuhan AHH DIY mengalami hal yang sama, jika pada 2019 tumbuh 0,13% pada 2020 tumbuh 0,09%. Perlambatan AHH secara nasional dan DIY pada tahun ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19.



Gambar 3.11. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2015-2020 (Tahun)
Sumber: BPS Indonesia, 2021

Tahun 2020 AHH saat lahir penduduk DIY sebesar 74,99 tahun. Capaian tahun 2020 berada di bawah target sebesar 75,32 tahun atau tingkat ketercapaiannya adalah 99,56% dari target. AHH DIY senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang meningkat dari 74,68 tahun di tahun 2015 menjadi 74,99 di tahun 2020. Capaian AHH DIY senantiasa di atas capaian nasional.

Tabel 3.25. Target dan Capaian Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,92	75,32	74,99	99,56	75,49	99,33

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021 (data diolah)

Masalah utama kesehatan pada tahun 2020 adalah terjadinya pendemi Covid-19 yang juga melanda DIY. Dilain sisi, prevalensi penyakit tidak menular relatif masih tinggi dan beberapa diantaranya (hipertensi, diabetes melitus, kanker, jantung) menjadi komorbid (penyakit penyerta) yang berisiko mengalami kondisi parah ketika individu terinfeksi Covid-19. Selain itu penyakit menular juga masih menjadi perhatian terutama meningkatnya angka HIV serta penemuan kasus tuberculosis yang belum optimal. DIY juga masih memiliki pekerjaan untuk menurunan angka kematian ibu melahirkan dan kematian nenonatal.

Pelayanan kesehatan pada masa pandemi mengalami perubahan dalam rangka mencegah penularan dan meluasnya penyebaran Covid-19. Upaya yang dilakukan diantaranya; membuat kebijakan pelayanan kesehatan di fasilitas

pelayanan kesehatan, penyiapan RS Rujukan Covid-19 termasuk kelengkapan sarana/prasarana/alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, membangun jejaring koordinasi/komunikasi dan penguatan sistem rujukan rumah sakit, peningkatan utilitas dan kapasitas pelayanan kritikal dan non kritikal RS Rujukan Covid-19, serta upaya lainnya terkait pengendalian pandemi Covid-19.

Upaya promotif dan preventif tetap dilakukan dimasa pandemi dengan menggunakan berbagai media, baik secara virtual maupun pertemuan terbatas untuk penyebarluasan informasi untuk program kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi, lansia, dan gizi. Demikian juga untuk pembinaan pendampingan bumil dan balita oleh kader bekerja sama dengan PKK. Pendampingan permasalahan KIA pada masa pandemi, bekerjasama dengan institusi pendidikan. Berbagai upaya ini dilakukan dalam rangka mencapai angka harapan hidup yang lebih baik.

3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat, dengan indikator:

a. Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Berkategori Nindya Ke Atas

Anak merupakan fondasi penggerak kemajuan bangsa, oleh karena itu anak perlu untuk dipenuhi dan dilindungi hak-haknya agar tumbuh kembangnya menjadi sempurna. Perhatian yang begitu besar oleh PBB dengan menerbitkan Konvensi Hak Anak dan diwujudkan dalam suatu kebijakan hukum oleh pemerintah RI melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memastikan pemenuhan dan perlindungan hak anak dilakukan oleh negara yaitu pemerintah dan warga negara. Aplikasi teknis hal tersebut wujudkan dalam program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen antara sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh, berkelanjutan dalam kebijakan, program maupun kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak serta perlindungan anak. Berdasar hasil evaluasi, kondisi kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel 3.26. Kondisi Kabupaten/Kota Hasil Evaluasi KLA, 2017 - 2019

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Yogyakarta	Madya	Nindya	Nindya
2	Sleman	Madya	Nindya	Nindya
3	Bantul	Madya	Madya	Madya
4	Gunung Kidul	Madya	Madya	Madya
5	Kulon Progo	Madya	Madya	Madya

Sumber: DP3AP2 DIY, 2021

Tingkatan KLA dibagi dalam beberapa kategori untuk mengukur pemajuanya (berdasar tingakatan tertinggi ke tingkatan terendah) yaitu: 1. Kabupaten/Kota Layak Anak, 2. Utama, 3. Nindya, 4. Madya, 5. Pratama. Pemajuan KLA di DIY telah dilaksanakan di 4 Kabupaten dan 1 Kota. Kategori KLA tersebut di terbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui serangkaian monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.

Tabel 3.27. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satu-an	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Realisasi		
Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas.	Kab/ Kota	2	4	2*	50%	5	40

Sumber: DP3AP2 DIY, 2021

Pada Tahun 2020 tidak dilakukan monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam masa pandemi Covid-19 sehingga kategori KLA di DIY masih tetap mengacu pada tahun 2019. Pada Tahun 2020 Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman meraih kategori Nindya sedangkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo meraih kategori Madya. Kondisi tersebut bepengaruh terhadap belum tercapaiannya Indikator Kinerja Program Pemda Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda pada Tahun 2020 sejumlah 2 Kab/Kota atau 50% dari target sejumlah 4 Kab/Kota sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas. Hal ini merupakan hal di luar kendali Pemda DIY, karena ada pandemi Covid-19 dan tidak dilaksanakannya evaluasi terhadap pemajuan KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak RI pada tahun 2020.

b. Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Visi DIY untuk mewujudkan Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja mengandung arti pada keadilan dan keberadaban. Hal ini termaktub dalam misi:, “Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing”. Keadilan disini membawa makna antara lain pada terwujudnya keadilan gender.

Pembangunan yang berkeadilan harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Semua diharapkan mendapatkan akses yang sama, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan dalam menetapkan suatu keputusan serta menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama.

Harapan tersebut diwujudkan dengan terus mendorong partisipasi perempuan untuk mengambil peran dalam lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan juga lembaga yudikatif. Meningkatnya peran perempuan di lembaga-lambaga ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kualitas demokrasi yang berkeadilan gender guna mempercepat terwujudnya keadilan gender dibidang politik dan pengambilan keputusan. Aspek ini salah satunya diukur melalui Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. indikator ini dihitung dari Jumlah perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibagi jumlah seluruh pejabat pengambil keputusan pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikali 100%, untuk melihat sejauh mana perempuan dapat masuk dan berperan dalam pengambilan keputusan.

Tabel 3.28. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Perempuan Pengambil Keputusan Di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tahun 2020.

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.	%	25	21,62	24,92	115,26	21,62	115,26

Sumber: DP3AP2 DIY, 2021

Keberhasilan pencapaian target disumbang oleh meningkatnya jumlah perempuan pengambil keputusan di lembaga yudikatif (jaksa, hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta pejabat perempuan di Kepolisian) yaitu sebesar 29,92%. Perempuan sebagai Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah (eksekutif) angkanya sebesar 20% sedangkan perempuan di legislatif sebesar 18,18%.

Meningkatnya persentase perempuan di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1) Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan di DIY
2) Kompetensi dan kualitas perempuan dalam jabatan strategis/pengambil keputusan semakin meningkat
3) Peluang untuk menduduki jabatan strategis melalui lelang jabatan dan pemilihan langsung memberi kesempatan pada perempuan untuk berkompetisi
4) Sinergi antara OPD, Lembaga kemasyarakatan, Organisasi perempuan dan parpol dalam mendukung keterwakilan perempuan di legislatif
5) Perubahan *mindset* masyarakat yang mendukung kepemimpinan perempuan di ranah publik.

c. Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya, yaitu tiap 1.000 perempuan dengan usia reproduksinya yang berumur 15 – 49 tahun. TFR ini diperlukan untuk menggambarkan riwayat fertilitas, kelahiran dari perempuan selama masa reproduksinya. Indikator ini penting untuk mengetahui atau melihat sejauh mana keberhasilan suatu wilayah (negara, provinsi, kabupaten/kota) dalam mengendalikan jumlah penduduknya.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) terakhir yaitu tahun 2017 TFR di DIY adalah 2,2. Sedangkan dalam jangka panjang untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga dengan pertumbuhan nol (0) dengan kata lain pertumbuhan penduduk yang seimbang, maka TFR paling ideal adalah 2,1.

Dikarenakan belum tersedianya SDKI terbaru, maka untuk mengetahui capaian TFR DIY 2020 dilakukan dengan metode SKAP (Survey Kinerja Akuntabilitas Publik) oleh Badan Statistik Nasional maupun BKKBN RI. pada tahun 2020 angka TFR di DIY adalah 1,81. Hitungan ini berdasarkan estimasi dari jumlah penduduk, termasuk di dalamnya perempuan berusia subur/PUS (umur 15 – 49 tahun). Target dan capaian program digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.29. Target dan Capaian Indikator Program Dengan Indikator TFR DIY Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Total Fertility Rate (TFR)	angka	1,8	2,1	1,8	114,29	2,1	114,29

Sumber: BKKBN Etc, 2021

Berdasarkan data tersebut target kinerja tahun 2020 sudah tercapai, namun kondisi ini menunjukkan TFR DIY masih di bawah angka yang ideal 2,1. Sebagai pembanding untuk melihat angka TFR tahun 2020 dengan metode Palmore oleh Perwakilan BKKBN DIY yang telah disepakati bersama dengan instansi terkait, bahwa angka TFR di DIY adalah 2,05.

Apabila melihat hasil penghitungan dengan Metode PALMORE Angka TFR di DIY Tahun 2020 adalah 2,05. Meskipun angka ini masih di bawah target yang ideal tetapi sudah mendekati angka ideal 2,1.

Dalam rangka mengendalikan penduduk, untuk mempertahankan dan atau meningkatkan angka pertumbuhan penduduk ke angka TFR 2,1 di DIY, telah banyak upaya-upaya yang dilakukan baik oleh Perwakilan BKKBN DIY, DP3AP2 DIY, Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya melalui program keluarga berencana dan pengendalian penduduk.

d. Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang

Penentuan desa/kelurahan cepat berkembang dilakukan pemerintah DIY melalui evaluasi terhadap perkembangan Desa/Kelurahan sesuai instrumen Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 mencakup evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan. Selain dimaksudkan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan, juga untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan.

Tabel 3.30. Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan Jumlah Desa/ Kelurahan Cepat Berkembang	Desa/ Kelurahan	42	48	48	100%	60	80%

Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2021

Berdasarkan evaluasi perkembangan desa/kelurahan cepat berkembang pada tahun 2020 terdapat penambahan desa/ kelurahan cepat berkembang sebanyak 6 desa/kelurahan yaitu:

1) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman
2) Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo
3) Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri ,Kabupaten Bantul
4) Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul
5) Kalurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta
6) Kalurahan Suryatmajan, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta

Dengan demikian secara kumulatif sampai dengan tahun 2020 terdapat 48 desa/kelurahan cepat berkembang di DIY, memenuhi target tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD yang sebanyak 48 desa, atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.

e. Angka Kejahatan Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)

Tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat. Keamanan yang terjadi di suatu wilayah akan membangun suasana kondusif bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas termasuk dalam melakukan usaha ekonomi produktif.

Rasa aman sebagai perasaan terlindungi dari ancaman atau teror dari luar dan dalam dirinya yang mencakup berbagai aspek. Kebutuhan rasa aman tidak sebatas pada keamanan fisik melainkan juga keamanan yang menyangkut psikologi yang didalamnya berhubungan dengan keamanan, stabilitas sistem yang menghindarkan manusia dari rasa cemas, khawatir dan berbagai hal lainnya. Jumlah angka kejahatan (*crime total*) digunakan untuk mengukur rasa aman masyakarat. Semakin tinggi jumlah angka kejahatan menunjukkan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Indikator yang dapat menunjukkan kondisi keamanan di suatu wilayah adalah rasio terkena tindak kejahatan (*crime rate*) yang menggambarkan risiko penduduk terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk di wilayah tertentu pada satuan waktu tertentu. Penghitungan angka ini setidaknya mengacu pada angka kriminalitas yang tercatat di Kepolisian Daerah DIY dan jumlah penduduk DIY menurut BPS.

$$\textbf{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

Secara umum situasi Kamtibmas sepanjang tahun 2020 di wilayah DIY cenderung kondusif dan terkendali. Kasus tindak kriminal tahun 2020 didominasi tindak pidana konvensional, meliputi penipuan, pencurian baik

pencurian biasa atau dengan pemberatan dan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, asusila, penggelapan. Selain itu juga terjadi tindak pidana transnasional yang didominasi kasus narkoba. Jenis tindak kriminal terhadap kekayaan negara meliputi *ilegal logging, ilegal fishing, ilegal mining*, dan uang palsu merupakan tindak pidana yang paling minim terjadi di DIY. Beberapa kasus kriminalitas yang terjadi seperti, kasus Curat, Curas, Curanmor, penganiayaan dengan pemberatan, klithih, tawuran antar pelajar, kejadian perampokan pada super market/toko dan penyalahgunaan narkoba masih bisa ditekan dengan tindakan preventif dan represif persuasif. Upaya penyelesaian pengungkapan kasus tindak pidana dan menekan kasus tindak pidana menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum oleh Polda DIY.

Jumlah kejahatan terlapor atau *crime total* yang diterima oleh Polda DIY tahun 2020 tercatat 4.701 kasus meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 4.599 kasus, sedangkan untuk gabungan jumlah kejahatan terlapor dari Polres kabupaten/kota dan Polda DIY adalah 4.701 kasus. Berdasarkan Jumlah total penduduk DIY sesuai proyeksi jumlah Penduduk yang di rilis BPS DIY sejumlah 3.882.288 jiwa, maka Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) berada pada angka 12,10. Kondisi tersebut belum dapat mencapai target yang diinginkan yaitu 9,6 di tahun 2020.

Tabel 3.31. Jumlah Tindak Kejahatan Terlaporkan dan Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk

Elemen Data Kriminal	2018	2019	2020
Jumlah Tindak Kejahatan Tercatat	5.317	4.599	4.701
Jumlah Penduduk	3.818.266	3.842.932	3.882.288
Angka Kejahatan per 100.000 penduduk	15,58	16,50	12,10

Sumber: BPPSD DIY, 2021

Tabel 3.32. Target dan Capaian Indikator Program Angka Kejahatan Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*) Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap Target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*)	angka	16,50	9,6	12,10	73,96	7,33	34,92

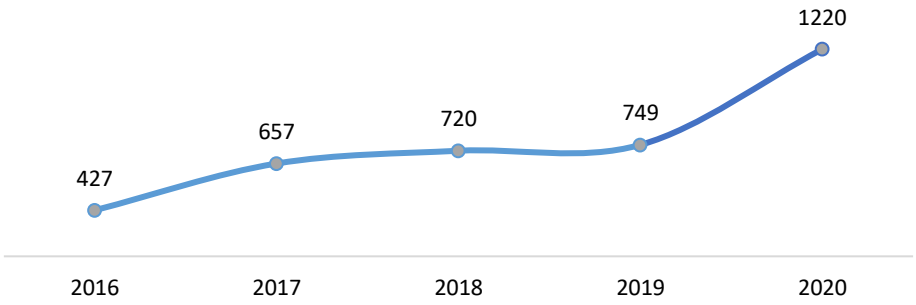
Sumber: BPPSD DIY, 2021

Iklim kehidupan yang aman dan damai selaras dengan pertumbuhan ekonomi adalah satu kesatuan mutlak yang sekaligus merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan segenap komponen bangsa dan didukung situasi keamanan yang stabil akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan baik. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan langkah strategis dalam upaya memenuhi dan menciptakan keamanan pada masyarakat agar tercipta stabilitas nasional yang dapat membuka ruang terwujudnya suasana aman dan kondusif. Kondisi ini berpengaruh pada dinamika kegiatan ekonomi produktif dan pada akhirnya berimbas pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

4. Program Penangggulangan Kemiskinan, dengan indikator:

a. Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru

Menjadi wirausahawan di masa pandemi Covid-19 merupakan pilihan paling tepat disaat banyak perusahaan yang merumahkan karyawan hingga melakukan Pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi ini. Adanya Pandemi Covid-19 secara makro mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi sebagai dampak aktivitas ekonomi yang tidak stabil. Kebijakan *social distancing* mengakibatkan penurunan daya beli dan perekonomian daerah menjadi terpuruk. Namun demikian, kegiatan ekonomi harus terus dijalankan agar masyarakat mendapat penghasilan dan dapat bertahan hidup. Dalam hal ini pemerintah perlu berperan aktif dalam rangka pemulihan ekonomi melalui pembinaan, pemdampingan dan pemberian stimulan agar wirausaha baru tetap bisa tumbuh dan berpartisipasi dalam penguatan ekonomi dimasa pandemi. Pada tahun 2020 pertumbuhan Wirausaha baru di DIY menuju kearah yang positif walaupun berada pada kondisi resesi ekonomi, hal ini dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 3.12. Perkembangan WUB Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2021

Tabel 3.33. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali sasi	% Reali-sasi		
Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	%	0,3	0,3	0,4	133,3	0,4	100

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2021

Persentase jumlah wirausaha baru terhadap UKM pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020, dari total 287.683 unit UKM terdapat 1.220 unit yang merupakan wirausaha baru, atau sebesar 0,42%. Data tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2019, yaitu sejumlah 749 wirausaha baru dari total 262.130 unit UKM

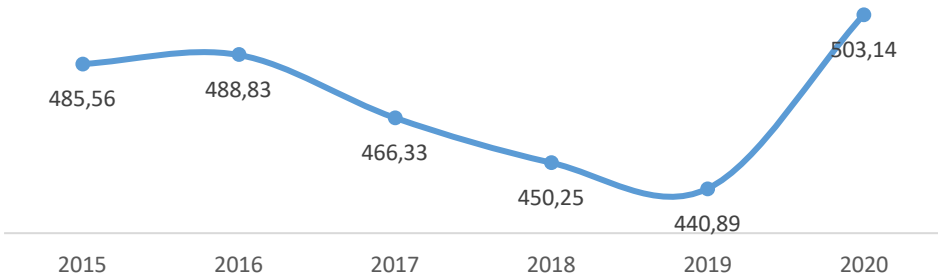
Capaian Indikator Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM tahun 2020 didukung dari program penumbuhan wirausaha baru Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY melalui kegiatan penumbuhan Desa Preneur yang bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan berbasis potensi ekonomi dan desa budaya. Selain itu, selama masa tanggap darurat, UMKM yang terkena dampak Covid-19 diberikan stimulan *untuk* dapat memasarkan produknya melalui Markethub Sibakul Jogja yang didukung dengan pemberian bantuan bebas ongkos kirim dan didorong promosinya melalui media campaign. Pemberian stimulan pada UMKM ini, juga menarik masyarakat secara luas yang secara masif mendaftar sebagai mitra sibakul serta mengikuti kampanye markethub agar mendapatkan dukungan kemudahan pemasaran produk. Hal ini yang menyebabkan tumbuhnya wirausaha baru di kalangan masyarakat. Wirausaha baru yang telah terdaftar pada aplikasi SiBakul Jogja diberikan pelatihan berjenjang yang diarahkan menuju transaksi bisnis digital serta diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran virtual sebagai upaya menyongsong adaptasi kebiasaan baru.

b. Jumlah Penduduk Miskin (Jumlah Penduduk Miskin (Pada Tahun n)

Persoalan kemiskinan masih menjadi salah satu fokus pembangunan di DIY. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di DIY secara signifikan. Perkembangan tingkat kemiskinan di DIY bersifat fluktuatif, sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 tingkat kemiskinan terus menurun namun belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di DIY kembali meningkat akibat dampak pandemi Covid-19,

Merujuk pada hasil Susenas per September 2020, garis kemiskinan di DIY sebesar Rp465.428/kapita/bulan. Terjadi peningkatan Garis kemiskinan sebanyak 0,42% dibandingkan Maret 2020 yang besarnya Rp463.479 per kapita/bulan. Garis kemiskinan makanan sebesar 335.262 rupiah per kapita/bulan, sementara Garis kemiskinan nonmakanan sebesar 130.166 rupiah per kapita/bulan. Penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 503,14 ribu jiwa. Apabila dibandingkan dengan Maret 2020, mengalami peningkatan jumlah masyarakat miskin sebanyak 27,4 ribu. Tingkat kemiskinan DIY meningkat sebesar 0,52 poin persen menjadi 12,80 persen.

Peningkatan penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan. Penduduk miskin perkotaan meningkat 27,1 ribu orang menjadi 353,21 ribu. Sedangkan penduduk miskin perdesaan bertambah 0,3 ribu orang menjadi 149,93 ribu. Peningkatan juga terjadi pada indeks kedalaman kemiskinan yang mencapai 2,079 dan indeks keparahan kemiskinan yang menjadi 0,499.



Gambar 3.13. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2015 – 2020 (Orang)
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Tabel 3.34. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	440.890	343.101	503.140	53,36	278.509	19,35

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021 dan RPJMD DIY 2017-2020

Validitas data merupakan kunci dalam pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Data menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Kendala yang selama ini dihadapi adalah terjadinya *exclusion* dan i*nclussion error* pada data kemiskinan. *Exclusion error* adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan tetapi

akhirnya tidak bisa menerima program disebabkan namanya yang tidak tercantum dalam data kemiskinan. Sementara *inclusion error* adalah masyarakat yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan bantuan tetapi justru menerima program karena namaya terdapat dalam data kemiskinan. Persoalan ini perlu dipecahkan dengan cara verifikasi dan validasi data yang rutin dan dilakukan secara ketat.

Intervensi pengurangan jumlah penduduk miskin yang dilakukan oleh Pemda DIY pada tahun 2020 melalui program penanggulangan kemiskinan di antaranya:

1) Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan mahasiswa yang tinggal di asrama karena pandemi Covid-19.
2) Pelatihan Kewirausahaan, Kelembagaan dan Usaha UMKM dengan sasaran penumbuhan desa preneur dan peningkatan kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran.
3) Penanganan Desa Rawan Pangan untuk mewujudkan desa mandiri pangan.
4) Pembentukan kesempatan kerja, pembekalan kewirausahaan, dan pendampingan tenaga kerja mandiri terdidik.
5) Pelatihan keterampilan pencari kerja, *mobile training.*
6) Penanganan Rumah tidak layak huni.
7) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).
8) Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah untuk siswa dari keluarga tidak mampu
9) Jaminan Kesehatan Semesta sesuai Pergub 63 tahun 2016 menjalankan fungsi sebagai penyangga untuk masyarakat yang tidak terjamin.
10) Monitoring dan evaluasi Desa PRIMA.
11) Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Balai/Panti sosial.
12) Pembinaan kelompok masyarakat desa/kelurahan melalui model Global Gotong Royong dan Segoro Amarto.
13) Kerjasama Pemda dengan TNI dan masyarakat desa/kelurahan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

c. Pengeluaran Per Kapita Masyarakat

Salah satu indikator untuk mengkukur kemampuan ekonomi adalah standar kehidupan yang layak. Standar hidup yang layak direpresentasikan oleh indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu bulan

dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana perubahan komposisinya dipakai sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran per kapita penduduk mencapai level Rp17.303.664,00 juta pada tahun 2020. Angka ini naik sebesar 7,63% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp16.076.712,00. Jumlah pengeluaran per kapita tahun 2017 hingga tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.35. Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2017-2020

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran per kapita per bulan	1.140.167	1.302.661	1.339.726	1.441.972
Pengeluaran Per Kapita per tahun	13.682.004	15.631.932	16.076.712	17.303.664

Sumber: BPS RI, angka terakhir Maret 2020

Sementara itu, untuk target dan capaian angka pengeluaran per kapita masyarakat secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.36. Target dan Capaian Indikator Program Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satu-an	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Juta Rp /tahun	16,077	14,073	17,304	122,96	14,593	118,58

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Dalam lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita penduduk DIY tumbuh rata-rata 6% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa standar kehidupan penduduk semakin membaik, yang artinya kualitas kesejahteraannya semakin meningkat. Secara nasional, pengeluaran per kapita penduduk DIY pada tahun 2020 berada pada peringkat kedelapan. Tingginya level pengeluaran per kapita penduduk dipengaruhi pola konsumsi penduduk yang lebih bervariasi serta tingkat harga komoditas barang dan jasa yang secara relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat harga komoditas yang sama di provinsi lain. Dengan kata lain, daya beli penduduk di DIY secara relatif lebih tinggi dari provinsi lain di Indonesia.

Pengeluaran penduduk DIY untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari pengeluaran untuk komoditas makanan. Pada tahun 2020, tercatat sebesar Rp832.693,00 (58,97%) merupakan pengeluaran non makanan, naik dari tahun 2019 yang mencapai Rp793.281,00 (59,21%). Sedangkan untuk pengeluaran makanan, pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp579.279,00 (41,03%), naik dari tahun 2019 yang mencapai Rp546.445,00 (40,79%).

Persentase pengeluran untuk komoditas non makanan didominasi oleh kelompok komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 24,88% dan kelompok aneka barang dan jasa sebesar 16,67%. Sedangkan untuk persentase terendah adalah kelompok pesta dan upacara/kenduri sebesar 2,12%.

5. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang kaya peninggalan baik budaya fisik maupun non fisik. Kekayaan budaya yang bersifat fisik benda (warisan budaya dan cagar budaya) maupun non fisik (tak benda) seluruhnya perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan. Berkaitan dengan budaya fisik yang perlu dilestarikan tersebut berwujud warisan budaya kebendaan dan cagar budaya meliputi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan. Peran penting warisan budaya dan cagar budaya tersebut sebagai penanda keistimewaan DIY merupakan perwujudan dari identitas dan jati diri masyarakat DIY. Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya merupakan kegiatan penting untuk mempertahankan kelestarian penanda-penanda keistimewaan DIY. Sesuai regulasi Cagar Budaya, kegiatan pelestarian akan dilaksanakan melalui kegiatan pelindungan (penyelamatan, perawatan, pemeliharaan dan pemugaran). Selain itu akan didukung promosi/publikasi pelestariannya. Diharapkan pelaksanaan kegiatan ini akan menurunkan tingkat keterancaman pelestarian cagar budaya, meningkatkan kelestarian objek dan mempertahankan nilai pentingnya serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian. Dengan demikian upaya pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya (CBWB) di DIY merupakan hal penting untuk dilaksanakan dengan melibatkan berbagai elemen sehingga diharapkan upaya yang pengembangan CBWB yang dilakukan dapat berjalan secara optimal.

Museum merupakan tempat yang ideal untuk melestarikan benda warisan atau cagar budaya. Kondisi museum di tahun 2020 banyak melakukan pengetatan kegiatan, melalui penerapan protokol kesehatan, bahkan tidak melayani kunjungan sama sekali guna menurunkan tingkat penyebaran virus. Penutupan ini sangat berdampak pada kondisi museum-museum yang ada di Yogyakarta, sebagain besar mengalami kesulitan pendanaan seperti diketahui bahwa biaya kegiatan operasional museum

berasal dari tiket masuk. Terdapat 46 museum di DIY dan yang telah masuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah Musea (BARAHMUS) DIY sebanyak 38 Museum. Pemerintah DIY membantu museum di masa pandemi melalui kegiatan-kegiatan antara lain: Penempatan Tenaga Edukator yang tersebar di 17 (tujuh belas) museum, Pemilihan dan Penempatan Duta Museum di 35 Museum, Fasilitasi Wajib Kunjung Museum (WKM) Adaptasi Kebiasaan Baru sejumlah 3.780 peserta non sekolah. Selain itu juga dilakukan pengembangan aplikasi sistem informasi WKM untuk mempermudah sistem pengelolaan WKM, Lomba Cerdas Cermat secara luring dan daring serta mengirimkan kontingen dari DIY untuk maju ke tingkat nasional dan meraih Juara II, Fasilitasi Rapat Kerja untuk anggota Badan Musyawarah Musea (BARAHMUS).

Tabel 3.37. Jumlah Museum Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2020

No	Kabupaten /Kota	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Bantul	8	8	9	9	9	9
2	Gunungkidul	1	1	1	1	1	1
3	Kulon Progo	0	0	0	0	0	0
4	Sleman	13	13	13	14	14	14
5	Yogyakarta	21	21	21	22	22	22
	DIY	**43**	**43**	**44**	**46**	**46**	**46**

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Warisan budaya tak benda meliputi antara lain nilai, bahasa, ada dan tradisi, dan kesenian. Sebagai bentuk upaya peningkatan budaya tak benda bahasa melalui Digilitasi Aksara jawa, macapatan, penerbitan majalah Sempulur dan Tabloid Jawacana setiap triwulan, sandiwara berbahasa Jawa, dan kompetisi bahasa serta sastra. Pengembangan kesenian dilaksanakan melalu berbagai kegiatan, antara lain: Festival kebudayaan Yogyakarta untuk memajukan senikontemporer, Gelar Budaya Jogja untuk memajukan seni tradisi klasik dan Pentas Seni Tradisi untuk memajukan seni tradisi kerakyatan. Selain itu, dilaksanakan pula *workshop* serta berbagai kompetisi antara lain teater, kethoprak, karawitan, wayang, dan lain sebagainya. Selain itu, juga dilaksanakan upacara adat, yang merupakan wahana interaksi sosial serta media pewarisan tata nilai yang biasanya terkait dengan religi, peristiwa tertentu, tokoh tertentu dan situs tertentu.

a. Persentase Peningkatan Budaya Benda Yang Dilestarikan

Pencapaian indikator sasaran jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan dari target sebesar 13,20%, telah terealisasi 13,27% pada tahun 2020. Sedangkan bila diukur dari target akhir RPJMD yang sebesar 15,17%, maka capaiannya sebesar 87,47% dan diharapkan pada tahun 2022 seluruh target RPJMD akan tercapai. Pencapaian ini didukung dengan program kegiatan

yang dilakukan secara kolaborasi oleh pemerintah dan masyarakat. Realisasi budaya benda yang dikelola dan dilestarikan pada tahun 2020 terdiri dari 700 budaya benda, dengan rincian dari 3 Situs, 250 Benda Budaya, 443 Bangunan Cagar Budaya dan 4 Kawasan Cagar budaya.

Tabel 3.38. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Budaya Benda Yang Dilestarikan Tahun 2020

IndikatorKinerja Program Pemda	Satu-an	Capa-ian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	%	12,32	13,20	13,27	100,53	15,17	87,47

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

b. Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan

Pelaksanaan even dan kegiatan pada masa pandemi dilaksanakan secara daring, dengan mekanisme ini dapat meningkatkan cakupan intervensi terhadap budaya tak benda. Hal ini dikarenakan, dalam pelaksanaan secara daring sumber daya yang digunakan lebih sederhana, sehingga frekuensi pelaksanaan kegiatan bisa lebih banyak. Pada Tahun 2020, terdapat peningkatan intervensi budaya pada beberapa bidang kesenian, sehingga menambah cakupan pelaksanaan even budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan. Namun demikian, dipastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan protokol kesehatan. Realisasi budaya tak benda yang dilestarikan Tahun 2020 ada 416 item yang terdiri dari 49 Upacara Adat , 4 Upacara Tradisi , 34 Organisasi Seni Rupa , 284 Organisasi Seni Pertunjukan, 27 Organisasi Perfilman , 18 Organisasi Kepercayaan.

Adapun, realisasi indikator kinerja peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan pada tahun 2020 melampaui dari angka yang ditargetkan yaitu 36,6% atau sebesar 243,2%. Sedangkan capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2022 sebesar 183%.

Tabel 3.39. Target dan Capaian Indikator Program Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikanTahun 2020

IndikatorKinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	%	17,00	15,05	36,60	243,20	20,00	183,00

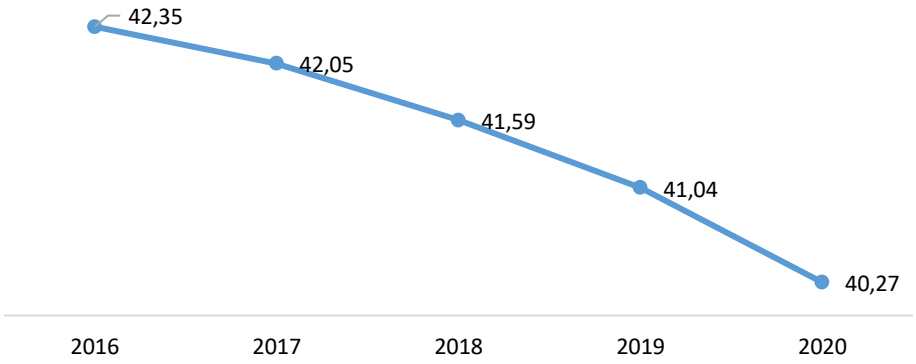
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

6. Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa), dengan indikator:

a. Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan Dalam PDRB DIY

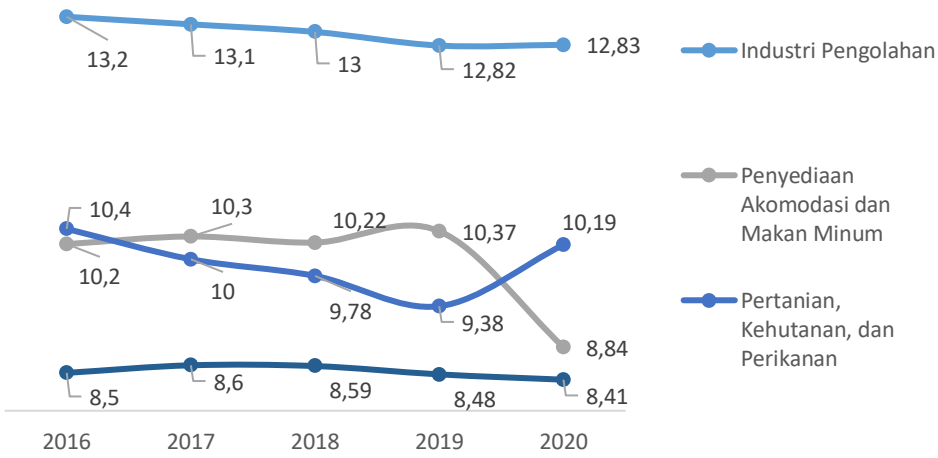
Kontributor terbesar PDRB DIY yang juga disebut sebagai sektor-sektor dominan meliputi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan. Keempat sektor tersebut secara konsisten merupakan lima kontributor terbesar selama beberapa tahun terakhir, selain sektor konstruksi yang meningkat secara signifikan. Secara kumulatif, kontribusi keempat sektor tersebut pada PDRB DIY 2020 sebesar 40,27%.

Kontribusi empat sektor tersebut terhadap perekonomian DIY dalam periode 2016 hingga 2020 cenderung menurun. Pada tahun 2020 bahkan menurun sangat signifikan disebabkan dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan perlambatan sektor pariwisata serta perdagangan.



Gambar 3.14. Gambar Kontribusi 4 Lapangan Usaha terhadap PDRB DIY tahun 2016 - 2020
Sumber: BPS Provinsi DIY 2017-2021

Secara rinci perkembangan kontribusi masing-masing sektor disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.15. Rincian Perkembangan Kontribusi Masing-Masing Sektor Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi DIY 2017-2021

Tabel 3.40. Target dan Capaian Indikator Program Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kontribusi Sektor Pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	%	41,04	44,00	40,27	91,52	46	87,54

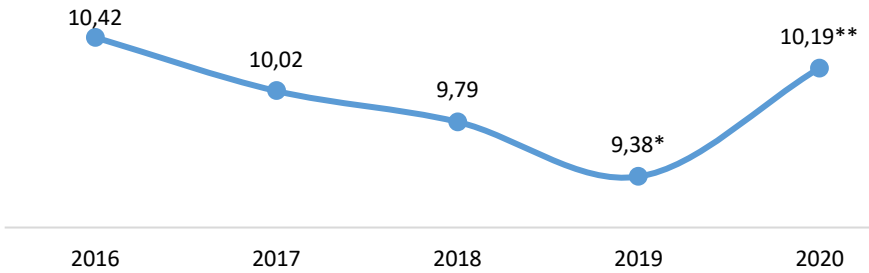
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Capaian kinerja kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan di tahun 2020 adalah 40,27%. Hal ini berarti hanya mencapai 91,52% dari target sebesar 44,00%. Penurunan total kontribusi empat lapangan usaha dipengaruhi oleh penurunan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor industri

pengolahan. Di sisi lain, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru meningkat pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 seiring dengan laju pertumbuhan yang positif dan relatif tidak terdampak oleh pandemi Covid-19.

1) Sektor Pertanian

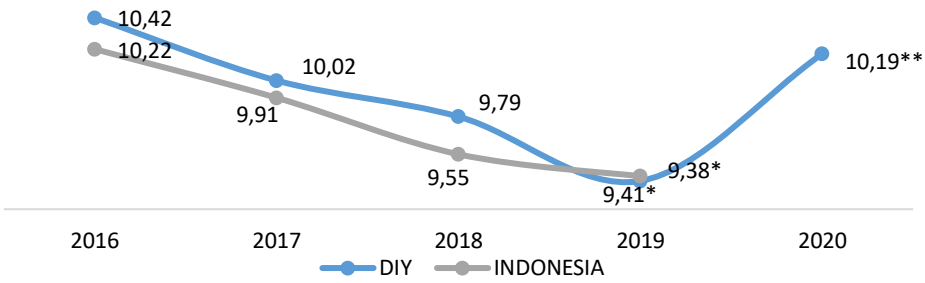
Sektor pertanian memiliki kontribusi terhadap pembangunan di DIY dan peran sektor pertanian mulai tergantikan oleh sektor industri. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Tolak ukur keberhasilan pembangunan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional, meskipun proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan target utama pembangunan daerah dan diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Kemampuan daerah untuk tumbuh tidak terlepas dari peranan sektor-sektor yang ada dalam suatu perekonomian, termasuk lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2020 lapangan usaha ini menjadi penyumbang kedua terbesar dalam perekonomian DIY setelah lapangan usaha Industri Pengolahan. Kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB DIY tahun 2020 sebesar 10,19%, naik 0,81% dibanding tahun 2019 sebesar 9,38%. Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020 utamanya didukung oleh pertumbuhan pada kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 19,70%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 19,18%, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,19%. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.16. Gambar Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB DIY Tahun 2016-2020*

*Keterangan: *) Data sementara, **) Data Sangat Sementara*
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang *resilience*, memiliki ketahanan yang baik terhadap gejolak lingkungan akibat krisis termasuk dampak pandemi Covid-19 ini. Nilai pertumbuhan PDRB sektor pertanian triwulan 1: -8,92%, triwulan 2: 10,06%, triwulan 3: 7,49%, dan triwulan 4: 4,19% dibanding nilai PDRB pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY triwulan 1: 11,28%, triwulan 2: 10,98%, triwulan 3: 10,85%, dan triwulan 4: 10,19%.



Gambar 3.17. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2016-2020

*Keterangan: *) Data sementara, **) Data Sangat Sementara, capaian nasional tahun 2020 belum dirilis BPS*

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun. Kondisi di DIY hampir sama dengan kondisi nasional, namun untuk tahun 2020 di DIY ada peningkatan kontribusi pada sektor ini dibanding tahun sebelumnya, sedangkan capaian Nasional belum dirilis oleh BPS. Dari sisi produksi pertanian di DIY mengalami peningkatan pada tahun 2020, namun kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai akhir tahun 2020 menyebabkan beberapa komoditas pertanian mengalami hambatan dalam pemasarannya. Untuk memperlancar pemasaran produk pertanian diperlukan dukungan dari para pihak terkait sehingga apa yang sudah dihasilkan oleh para petani dapat diserap oleh pasar dan pertanian tetap mampu menjadi salah satu penyumbang utama PDRB DIY.

2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Selama kurun waktu 2020, perekonomian DIY mengalami kontraksi sebesar 2,69 persen (c-to-c), berbeda arah pertumbuhan dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,59 persen. Secara sektoral, kontraksi sangat dipicu oleh lapangan usaha transportasi serta penyediaan akomodasi dan makan-minum. Capaian nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam

PDRB DIY sampai dengan TW IV 2020 sejumlah 8.489.706. Untuk capaian TW IV mencapai angka 2.467.661. Data Perekonomian DIY triwulan IV-2020 mengalami kontraksi sebesar 0,68 % dibanding triwulan IV 2019 (y-on-y), Penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi sebesar 16,91 % (y-on-y).

Sebagai salah satu kota tujuan wisata di Indonesia, DIY banyak dikunjungi wisatawan tidak hanya wisatawan domestik tetapi juga mancanegara. Beragam Daya Tarik Wisata (DTW) ada di DIY dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Beberapa diantaranya merupakan DTW yang sudah sangat populer secara nasional seperti Malioboro, Kraton Jogja, Candi Prambanan, Pantai Parangtritis, Puncak Becici, dan Tebing Breksi. Karena keindahan alam dan budaya yang luar bisa ini maka DIY masih sangat diminati wisatawan, Namun merebaknya pandemi virus Covid-19 di hampir penjuru dunia memberikan dampak terhadap kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara pada awal tahun 2020, DIY sendiri mulai terkena dampaknya secara langsung mulai bulan Maret hal tersebut dapat terlihat dari jumlah wisatawan pada setiap bulan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 Jumlah Wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi di DIY sebanyak 1.848.548 orang, mengalami penurunan sebesar 71,78% (4.700.833 orang), terdiri dari Jumlah wisatawan mancanegara 69.968 wisatawan (3,79%) dan Jumlah wisatawan domestik sebanyak 1.778.580 wisatawan (96,21%).

Tabel 3.41. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2016-2020

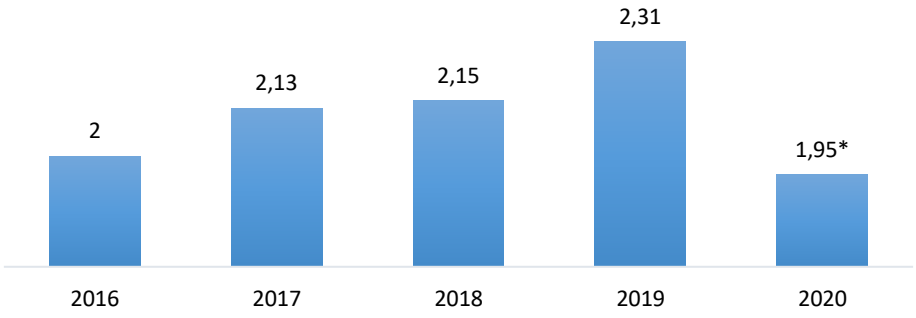
Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	14.069	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.347	5.229.298	16.135	2,13	1,98
2018	416.374	5.272.719	5.689.093	17.814	2.15	1.99
2019	433.027	6.116.354	6.549.381	19.370	2,31	1,99
2020	69.968*	1.778.580	1.848.548	1.568	1,95*	1,65

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2021 (data sementara, diolah)

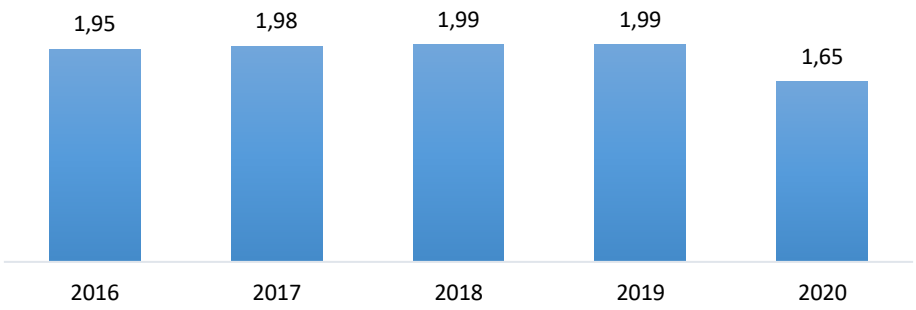
Faktor Penghambat menurunnya target indikator Jumlah Wisatawan adalah Pariwisata sangat terdampak pandemi Covid-19. Pada awal Triwulan II, pengelola destinasi wisata di DIY berinisiatif menutup destinasinya untuk mencegah penyebaran Covid-19. mulai Maret 2020 jumlah wisatawan asing maupun domestik yang menginap di hotel berbintang di DIY juga mulai turun.

Faktor pendukung dalam upaya pencapaian target indikator Jumlah Wisatawan adalah dengan mulai dibukanya destinasi wisata pada awal TW III sehingga di harapkan dapat memberi dampak positif bagi peningkatan kunjungan wisatawan dibandingkan pada Triwulan II 2020. Adanya Pranatan Anyar Plesiran Yogya dan kerja sama antara Dispar dengan BI dalam pengembangan aplikasi visitingjogja (merupakan aplikasi pendataan kunjungan wisatawan di destinasi wisata dengan melakukan reservasi secara daring dan pihak pemerintah dapat mendapatkan data real time mengenai jumlah kunjungan kategori usia, asal daerah, pendapatan masing-masing destinasi sebagai data yang bisa diperoleh secara *real time* yang merupakan data akurat untuk menentukan strategi pengembangan pariwisata kedepan) diharapkan dapat mencegah dan mengurangi penyebaran pandemi Covid-19, dalam penggunaan aplikasi tersebut pengelola destinasi dapat mengatur dan membatasi kunjungan wisatawan serta mengurangi kontak langsung pembayaran tiket masuk destinasi wisata dengan wisatawan sesuai dengan protokol kesehatan.

Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di DIY pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dari tahun 2019. Pada tahun 2019 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di Hotel Bintang dan Non Bintang sebesar 2,31 hari,sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 1,95 hari. Untuk lama tinggal wisatawan nusantara tahun 2020 juga terdampak pandemi Covid-19 sehingga mengalami penurunan menjadi 1,65 hari dibanding lama tinggal wisman pada tahun 2019 yang bisa mencapai 2,31 hari. Penyelenggaraan event sepanjang tahun 2020 secara perlahan mulai bangkit dan berjalan lagi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, hal ini diyakini mampu meningkatkan lama tinggal wisawatan di era adaptasi kebiasaan baru sekarang ini.



Gambar 3.18. Lama Tinggal Mancanegara di DIY tahun 2016 – 2020
*Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2021 (data diolah, *sebelum pandemi (Januari-Februari))*



Gambar 3.19. Lama Tinggal Nusantara di DIY tahun 2016 – 2020
Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2021 (data diolah)

Diperlukan strategi untuk mendongkrak jumlah dan lama tinggal wisatawan yang mengunjungi DIY ditengah pandemi Covid-19. Salah satu strategi itu yakni dengan membuat "*pranatan anyar*" berwisata di Yogyakarta, khususnya dalam industri Pariwisata seperti destinasi wisata, hotel/*homestay*, rumah makan dan sebagainya harus dapat menerapkan protokol kesehatan secara baik dan tertib, dengan memperhatikan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety,* dan *Environment*) menjadikan Yogyakarta menjadi salah satu tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk di kunjungi pada kondisi sekarang ini, sehingga wisatawan akan lebih lama lagi tinggal di Yogyakarta.

Selain itu, dengan adanya program vaksinasi Covid-19 dari Pemerintah yang dicanangkan awal tahun 2021, diharapkan di tahun 2021 mendatang dapat meredam dan mengurangi penyebaran virus corona, sehingga dapat berdampak pada meningkatnya rasa aman terhadap orang-orang yang ingin melakukan kegiatan wisata. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta sekaligus menaikkan angka Length *of Stay* baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

3) Industri Pengolahan

Pada tahun 2020 sektor industri pengolahan masih menjadi peringkat pertama dalam penunjang laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di DIY. Sektor industri pengolahan tercatat memberikan kontribusi sebesar 12,85% yang mana menjadi angka kontribusi tertinggi dibandingkan dengan sektor yang lain. Pada tahun 2020 target kinerja indikator nilai sektor industri pengolahan di PDRB DIY adalah Rp13.201.887 juta (atas dasar harga konstan), dengan realisasi

Rp12.618455 juta atau dengan capaian kinerja sebesar 95,58%. Penurunan nilai sektor industri tidak terlepas dari adanya dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhambatnya kegiatan industri.

4) Perdagangan

Selain sektor industri pengolahan, sektor perdagangan juga berkontribusi pada laju pertumbuhan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di DIY. Pembangunan sector perdagangan bertujuan untuk meningkatkan nilai perdagangan dalam dan luar negeri, serta mengukur kinerja nilai sector perdagangan dalam PDRB. Pada tahun 2020 kontribusi sector perdagangan terhadap struktur PDRB DIY tercatat sebesar 8,41%. Pada tahun 2020, sector perdagangan menunjukkan kinerja yang terbilang masih cukup baik, meskipun terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 target indikator kerja nilai sektor perdagangan dalam PDRB Rp8.643.438 juta, dengan realisasi Rp8.253.026 atau dengan capaian kinerja sebesar 95,48%. Tidak tercapainya target ini tidak terlepas dari menurunnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri karena dampak dari adanya pandemi Covid-19.

b. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Tingkat Penganggur Terbuka adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Dalam kurun waktu 5(lima) tahun TPT DIY fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan , hanya pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,19% disbanding TPT Agustus 2018 menjadi 3,18%, tetapi tahun 2020 kembali naik menjadi 4,57%, hal ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 dimana sektor pariwisata dan sektor pendidikan di DIY sangat terdampak.

Tabel 3.42. Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020

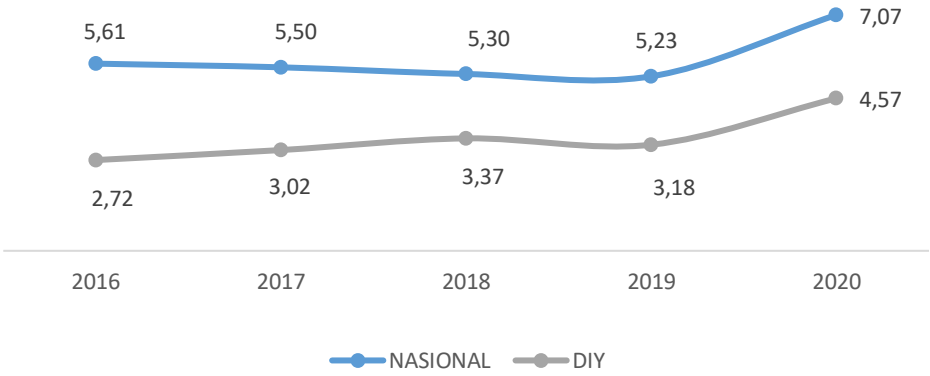
Indikator Kinerja Program Pemda	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,18	2,42	4,57	52,95	2,07	45,30

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Pada Tahun 2020 terjadi fenomena dimana jumlah penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas pada bulan agustus sebesar 3,133 juta orang, naik 1,42% dibanding agustus 2019. Di sisi lain terjadi penurunan jumlah angkatan kerja

(penduduk bekerja dan pengangguran) yang pada bulan agustus 2020 sebanyak 2,228 juta atau turun 0,80% dibanding agustus 2019. Kondisi ini disebabkan terjadi pergeseran dari angkatan kerja ke bukan angkatan kerja khususnya pada pengurus rumah tangga.

Penduduk DIY yang bekerja pada bulan agustus 2020 sebanyak 2,126 juta dan 101.846 orang menganggur. Jumlah penganggur tersebut naik 30.364 orang dibandingkan tahun 2019 sebanyak 71.482 orang. Besaran TPT di DIY dari agustus 2016-agustus 2019 cenderung mengalami kenaikan namun masih berada di bawah TPT Nasional. Pada Agustus 2020 TPT Nasional Sebesar 7,07% naik 1,84% dibanding agustus 2019 sebesar 5,23%. Dengan naiknya jumlah penganggur diperlukan kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang tepat untuk menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menekan tingkat laju pengangguran. Perkembangan TPT Nasional dan DIY dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.20. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka DIY dan Indonesia tahun 2016 - 2020

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Dalam RPJMD telah ditetapkan target TPT pada tahun 2020 sebesar 2,42%, realisasi sebesar 4,57% atau hanya tercapai 52,95% dari target. Belum tercapainya tingkat penganggur terbuka ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan lapangan usaha pada sektor akomodasi & konsumsi, Jasa Pendidikan, Transportasi & Pergudangan, Konstruksi serta Jasa Perusahaan sangat berkurang. Namun demikian TPT DIY masih menduduki peringkat kedelapan se-Indonesia. Pencapaian tersebut tidak lepas dari usaha seluruh sektor untuk bersama-sama mengupayakan terciptanya kesempatan kerja serta menjaga kondusifitas iklim dunia usaha pada masa pandemi di DIY.

c. Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)

"Desa Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai Kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an". (Kajian *Grand Design* Desa Mandiri Budaya Tahun 2020)

Desa Mandiri Budaya merupakan bentuk integrasi dan satu kesatuan konsep yang terdiri dari 4 instrumen penilaian berikut: 1). Instrumen penilaian Desa Budaya yang telah diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan; 2). Instrumen penilaian Desa Wisata yang telah diinisiasi oleh Dinas Pariwisata; 3). Instrumen penilaian Desa Prima yang telah diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; dan 4). Instrumen penilaian Desa Preneur yang telah diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan hasil Kajian Grand Design Desa Mandiri Budaya Tahun 2020, terdapat 7 desa mandiri budaya dengan kategori A (Utama), 13 desa mandiri budaya dengan kategori B (Madya), dan 5 desa mandiri budaya dengan kategori C (Pratama). Desa Mandiri Budaya yang berkategori A (Utama)antara lain: Bejiharjo, Pagerharjo, Putat, Pandowoharjo, Girikerto, Wedomartani, dan Sabdodadi. Desa Mandiri Budaya berkategori B (Madya) antara lain: Jatimulyo, Margodadi, Bangunkerto, Bangunjiwo, Beji, Kemadang, Ngalang, Sedangmulyo, Hargomulyo, Trimurti, Banjarharjo, Tuksono, dan Panggungharjo. Adapun Desa Mandiri Budaya berkategori C (Pratama) antara lain: Kalijero, Semin, Wonokerto, Dlingo, dan Gilangharjo. Pada tahun 2020, telah ditetapkan desa/kalurahan Mandiri Budaya sebagai berikut.

Tabel 3.43. Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020

No	Nama Desa/Kalurahan	Kedudukan	Peringkat
1	Bejiharjo	Kabupaten Gunungkidul	Utama
2	Pagerharjo	Kabupaten Kulon Progo	Utama
3	Putat	Kabupaten Gunungkidul	Utama
4	Pandowoharjo	Kabupaten Sleman	Utama
5	Girikerto	Kabupaten Sleman	Utama
6	Wedomartani	Kabupaten Sleman	Utama
7	Sabdodadi	Kabupaten Bantul	Utama
8	Jatimulyo	Kabupaten Kulon Progo	Madya
9	Margodadi	Kabupaten Sleman	Madya

No	Nama Desa/Kalurahan	Kedudukan	Peringkat
10	Bangunkerto	Kabupaten Sleman	Madya

Sumber: Keputusan Gubernur DIY No. 364/KEP/2020

Tabel 3.44. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima) Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Desa mandiri budaya	Desa/ Kelurahan	N/A	10	10	100	20	50

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Dengan telah ditetapkannya 10 Desa Mandiri Budaya, maka realisasi indikator Program Pemda Desa Mandiri Budaya sebesar 100%. Sedangkan terhadap target akhir RPJMD di tahun 2022, capaian di tahun 2020 mencapai 50%.

Selanjutnya, Desa Mandiri Budaya diklasifikasikan menjadi tiga pemeringkatan, yaitu:

1) Desa Mandiri Budaya peringkat C (Pratama), yaitu desa mandiri budaya yang pilar desa budayanya sudah maju, pilar desa wisatanya berkembang, tetapi pilar desa prima dalam posisi tumbuh dan desa preneurnya masih embrio.
2) Desa Mandiri Budaya peringkat B (Madya) desa mandiri budaya yang pilar desa budayanya sudah maju, pilar desa wisatanya sudah maju, tetapi pilar desa prima dan desa preneurnya masih berkembang.
3) Desa Mandiri Budaya peringkat A (Utama), desa mandiri budaya yang pilar desa budaya maju, pilar desa wisata sudah mandiri, desa prima dan desa preneurnya maju.

7. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dengan indikator:

a. Indeks Kualitas Air

Pembangunan dan kemajuan teknologi di salah satu sisi menguntungkan manusia, namun di sisi lain akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang akan menerima dampak negatif dari pesatnya pertumbuhan tersebut. Manusia dengan berbagai aktivitasnya baik di bidang industri, pertanian, peternakan atau rumah tangga memberikan kontribusi terhadap pencemaran air. Pencemaran air

terjadi pada air permukaan seperti sungai, danau dan lautan serta pada air tanah, yang akan menjadi permasalahan serius sepanjang pengelolaan terhadap sumber pencemar tidak tertangani secara tuntas. Sedangkan air yang bersih dan sehat menjadi kebutuhan primer setiap manusia dan makhluk hidup lainnya.

Informasi kualitas air menjadi kebutuhan yang penting sehingga perlu penilaian kualitas air yang dapat dipahami semua pihak. Hasil penilaian kualitas air selain untuk mengetahui layak tidaknya air untuk dikonsumsi juga dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan, serta dapat menilai perbaikan yang terjadi jika dilakukan intervensi pengelolaan atau pengendalian pencemaran air. Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan penilaian kualitas air yang memberikan informasi secara cepat tentang kondisi kualitas air. IKA menggunakan konsep bahwa nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan kualitas air yang semakin baik. IKA memberikan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. IKA dapat memberikan indikasi kualitas badan air di berbagai titik dan dapat digunakan untuk melacak perubahan antarwaktu.

Perhitungan IKA berdasarkan pada Indeks pencemaran (IP). Penggunaan IP untuk menentukan status mutu air berdasar pada Permen LH Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penentuan Status Mutu Air dengan metode Indeks Pencemaran. Baku Mutu air yang digunakan sebagai tolok ukur parameter berdasarkan Pergub DIY No. 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai IP diperoleh berdasarkan perhitungan 7 parameter kualitas air sungai (*Disolved Oxygen (DO), Biologycal Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), Phosphat (PO4), Fecal Coli,* dan *Total Coliform*) dan hasil pemantauan kualitas air sungai pada 10 sungai yang menjadi kewenangan DIY (Sungai Winongo, Gajahwong, Code, Bedog, Konteng, Kuning, Tambakbayan, Oyo, Belik, dan Bulus). Kesepuluh sungai tersebut dipantau dalam 2 (dua) periode yang mewakili musim hujan dan kemarau, yang sebelumnya direncanakan akan dilakukan pemantauan sebanyak 3 (tiga) periode dengan titik pantau masing-masing sebanyak 50 titik. Penentuan titik pantau berdasarkan pada wilayah administratif, letak geografis, mewakili sumber pencemar, outlet DAS, titik intake pengelolaan air minum, dan hulu sungai yang dianggap tidak banyak aktivitas manusia.

Tabel 3.45. Hasil Perhitungan Penggabungan IKA DIY dan Kabupaten/Kota

No	Sungai	Nilai IKA
1.	Winongo	43,09
2.	Code	39,30

No	Sungai	Nilai IKA
3.	Gajahwong	37,89
4.	Kuning	40,77
5.	Konteng	25,71
6.	Bedog	45,00
7.	Belik	40,00
8.	Bulus	40,00
9.	Oyo	35,00
10.	Tambakbayan	37,50
Nilai IKA DIY 2020		**38,43**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka IKA DIY tahun 2020 sebesar 38,43 belum memenuhi target RPJMD (38,60). dan jika dibandingkan dengan capaian IKA pada tahun 2019 (38,65), maka angka IKA tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 ini, parameter dominan yang melebihi bakumutu air sungai adalah parameter Bakteri Coli Tinja dan Bakteri Total Coliform. Keberadaan Bakteri *Coli* menunjukkan bahwa air telah terkontaminasi dengan limbah manusia dan hewan berdarah panas yang mengandung bakteri atau virus patogen. Hal ini menunjukkan bahwa kadar pencemar yang mendominasi berasal dari limbah domestik. Capaian IKA tahun 2020 terhadap target RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.46. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka indeks	38,65	38,60	38,43	99,56	42,50	90,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

Beberapa hal yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai, antara lain:

1) Tingginya kadar pencemar yang berasal dari limbah domestik yaitu kadar *Bakteri Coli* Tinja dan *Bakteri Coliform*.
2) Musim kemarau yang cukup panjang menyebabkan debit sungai yang kecil sehingga konsentrasi kadar pencemar di dalam air meningkat
3) Tidak tersedianya data 1 (satu) periode pada musim peralihan antara musim penghujan dengan musim kemarau, sehingga menyebabkan kurangnya varian data. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19, tidak memungkinkan untuk melakukan pengambilan sampel di sungai dengan adanya penetapan pembatasan aktivitas di lapangan dan tatap muka.
4) Titik pengambilan sampel yang sudah tidak representatif terhadap kondisi eksisting, dengan semakin banyaknya aktivitas disekitaran sungai

5) Adanya *refocussing* anggaran terkait dengan gerakan masyarakat untuk mebersihkan sungai.

b. Indeks Kualitas Udara

Pencemaran udara di daerah perkotaan dan industri cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bertambahnya volume kendaraan dan konsumsi energi menyebabkan tingginya kadar emisi yang dihasilkan. Kondisi ini diperburuk juga dengan berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan karena perluasan bangunan fisik untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Pada akhirnya, kondisi udara yang buruk di perkotaan akan mempengaruhi kesehatan penduduknya.

Indeks Kualitas Udara (IKU) ditetapkan sebagai salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah, baik secara nasional maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Indeks kualitas udara berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara terdiri dari 5 (lima) parameter utama, yaitu Ozon (O3), partikulat (PM10), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO2) dan Sulfur dioksida (SO2). Namun untuk IKU di DIY berdasarkan pemilihan parameter yang telah ditetapkan KLHK dalam perhitungan IKLH ini hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO2 dan SO2. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU DIY dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler pada 20 titik pantau yang tersebar di Kabupaten/Kota, dikolaborasi dengan hasil pengukuran kualitas udara ambien metode passive yang diukur oleh Kabupaten Sleman. Titik pantau metode passive mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun rumus Indeks Kualitas Udara (IKU) sebagai berikut:

$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$$

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar, sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen. Berdasarkan perhitungan Indeks kualitas udara di DIY dan Kabupaten/Kota diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.47. Data Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2020

No.	Lokasi	Rerata NO2	Rerata SO2	Ieu	IKU
		µg/Nm³	µg/Nm³	Indeks	Indeks
1.	Kulon Progo	7,78	5,22	0,22766	92,90
2.	Bantul	13,97	7,68	0,36675	85,18
3.	Gunungkidul	9,51	3,64	0,20998	93,97
4.	Sleman	12,01	7,61	0,3403	86,66
5.	Kota Yogyakarta	14,01	6,38	0,3345	86,97
IKU Rata-rata					**89,14**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 89,14 telah melebihi target RPJMD (88,40). Jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2019 sebesar 85,25, maka pada tahun 2019 ini, nilai IKU mengalami peningkatan.

Tabel 3.48. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka Indeks	85,25	88,40	89,14	100,84	89,74	99,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti transportasi, penyediaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan, serta dukungan pihak lain seperti masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, faktor alam juga dapat mempengaruhi kualitas udara yaitu meteorologi dan bencana, seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui beberapa intervensi seperti kebijakan pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan dan penyediaan data akurat, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan serta sanksi.

Pengelolaan cerobong asap dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas emisi, yaitu dengan mengganti bahan bakar yang lebih ramah lingkungan serta memasang alat pereduksi emisi. Pemasangan alat pereduksi emisi ini sebenarnya sudah diwajibkan dalam aturan Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

IKTL digunakan untuk menghitung luas tutupan lahan bervegetasi yang merepresentasikan tutupan lahan secara lengkap. Berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999, menyatakan bahwa luas kawasan hutan yang harus dipertahankan setiap Provinsi guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi masyarakat minimal 30% dari luas wilayah, maka Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Dalam perhitungan IKTL ini diasumsikan bahwa, daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,23% dari luas wilayah administrasinya). Oleh karenanya nilai tutupan tertinggi diberikan kepada papua dengan nilai 100, sedangkan daerah-daerah yang mempunyai tutupan 30% dari wilayah administrasinya diberi nilai 50. Berdasarkan asumsi tersebut, maka untuk menghitung IKTL digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84{,}3 - (TH \times 100)) \times 50/54{,}3)$$

Keterangan:

84,3	:	persentase tutupan hutan tertinggi di Papua
TH		Tutupan hutan (tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah administratif)
50 dan 54,3	:	Konstanta

Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah data shapefile penggunaan lahan yang berasal dari olah data Citra satelit KLHK, Tahun 2018 yang dioverlaykan terhadap *shapefile* kemiringan lahan dari DLHK DIY Tahun 2020 dan hasil kajian Feasibility Study RTH di DIY Tahun 2018. Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan vegetasi hutan dan tutupan vegetasi lainnya (non hutan). Luas tutupan vegetasi hutan dan non hutan dilakukan konversi performa sebagai Kualitas Tutupan Lahan (KTL). Setiap jenis penggunaan lahan memiliki konstanta konversi yang berbeda. Setelah dilakukan konversi selanjutnya dijumlahkan, kemudian dibagi luas wilayah admministratif (318.600 hektar), sehingga diperoleh angka Tutupan Hutan (TH) atau Kualitas Tutupan Lahan (KTL). Hasil luas dan hasil konversi penggunaan lahan dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 3.49. Data Luas dan Hasil Konversi Penggunaan Lahan

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi (ha)
1.	Hutan Produksi	13.439,286	1	13.439,286
2.	Hutan Lindung	2.294,926	1	2.294,926
3.	Hutan Rakyat	79.262,580	1	79.262,580
4.	Cagar alam Geologi	145,179	1	145,179

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi (ha)
5.	Cagar alam	11.877	1	11.877
6.	Taman Wisata Alam	1.035	1	1.035
7.	Taman Hutan Raya	615,186	1	615,186
8.	Taman Nasional	1.865,454	1	1.865,454
9.	Hutan Penelitian	101,645	1	101,645
10.	Suaka Margasatwa	619,586	1	619,586
11.	Rawan Bencana Alam Geologi	3.355,859	1	3.355,859
12.	Perkebunan	21.002,973	0,4	8.401,189
13.	Lahan Pangan Tidak Beririgasi	40.854,715	0,1	4.085,4715
14.	Sempadan Pantai	1.311,106	0,6	786,663
15.	Sempadan sungai	5.454,789	0,6	3.272,874
16.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	9.818,780	0,6	5.891,268
	TOTAL			**124.150,078**

**) Data RTH merupakan data Kajian Feasibility Study RTH di DIY Tahun 2018 oleh BLH DIY*
Sumber data: Olah data citra satelit KLHK yang dioverlaykan terhadap shapefile kemiringan lahan DLHK DIY tahun 2021

Perhitungan IKTL dengan menggunakan rumus di atas, adalah sebagai berikut:

Luas Administrasi Provinsi DIY	= 318.600 hektar
TH	= Total Hasil Konversi/Luas Admin DIY
	= 124.150,078/318.600 = 0,39
IKTL	= 100 - [(84,3-(0,39 x100)) x 50/54,3]
	= 100 - (45,3 x 0,92)
	= 58,32

Berdasarkan data pada tabel, realisasi Indeks Kualitas **Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2020 adalah 58,32**. Adapun target IKTL dalam RPJMD tahun 2020 adalah 60,86 sehingga realisasi IKTL belum mencapai target. Apabila dibandingkan dengan realisasi IKTL tahun 2019 sebesar 59,7, realisasi IKTL tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena data luas penggunaan lahan mengacu dari hasil interpretasi Citra Landsat terbaru dari KLHK, yang terdapat penurunan tutupan vegetasi pada beberapa jenis penggunaan lahan, yaitu perkebunan yang semula 33.999,62 ha menjadi 21.002,973 ha, lahan pangan tak beririgasi yang semula 66.446,46 ha menjadi 40.854,715 ha, sempadan sungai yang semula 6.454,79 ha menjadi 5.454,79 ha, dan sempadan pantai yang semula 2.311,11 ha menjadi 1.311,11 ha.

Tabel 3.50. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	59,70	60,86	58,32	95,83	66,20	88,097

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

d. Indeks Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Kajian risiko bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

$$Risiko\ Bencana \approx Ancaman * \frac{Kerentanan}{Kapasitas}$$

Pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan rumus matematika. Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan.

Tabel 3.51. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Risiko Bencana	Angka indeks	148,53	145	124,41	116,55	125	99,52

Sumber: BPBD DIY, 2021

Indeks risiko bencana di DIY berdasarkan hasil kajian pada tahun 2020 diperoleh nilai 124,41. Target diukur melalui Indeks Risiko Bencana tercapai 124,41

dengan demikian persentase target terhadap realisasi 116,55%, dan lebih baik dari target yang dicanangkan sebesar 145. Dibandingkan realisasi tahun lalu 148,53 (100,99%), capaian tahun ini sebesar 124,41 (116,55%) terdapat kenaikan sebesar 15,56%. Angka IRBI 124,41 menunjukkan bahwa risiko bencana di DIY masih tinggi dan masih diperlukan beberapa upaya yang harus diperbaiki dan ditungkatkan untuk menurunkan indeks risiko bencana. Peningkatan kapasitas wilayah, pengurangan tingkat kerentanan bencana dapat dilakukan dengan mitigasi struktural dan mitigasi non struktural yang harus berjalan beriringan.

Pemda DIY berupaya untuk menurunkan Indeks tersebut dengan melakukan berbagai hal untuk meminimalisir dampak terhadap bencana, diantaranya dengan melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat, sosialisasi dan penguatan kelembagaan bencana di masyarakat antara lain melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana. Pada tahun 2019 nilai IRBI turun 6,86 menjadi 148,53. Upaya untuk menurunkan indeks risiko bencana terus dilakukan sehingga pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 24,38 menjadi 124,41. Nilai Indeks Risiko Bencana di DIY Tahun 2020 adalah 124,41 untuk 7 ancaman bencana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian

a. Ancaman kawasan

DIY merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi ancaman bencana paling kompleks, tercatat ada 7 ancaman bencana alam yang terdapat di DIY, diantaranya adalah gunung berapi, banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrem, kekeringan dan tsunami. Ancaman bencana yang terdapat di Kawasan ini membuat DIY harus berbenah agar untuk meningkatkan mitigasi struktural dan non struktural dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana akan mengurangi dampak dan korban akibat bencana baik material maupun non material. Penanganan kedaruratan terhadap bencana harus ditingkatkan dengan konsep meningkatkan potensi hidup korban dan mengurangi korban jiwa terhadap bencana. Siklus penanganan bencana tidak berhenti hanya pada tahap ini tapi berlanjut pada penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengedepankan konsep *build back better and safer* pada masyarakat dan wilayah rawan bencana dengan outputnya adalah pengurangan risiko bencana. Ancaman Kawasan di DIY menjadi lebih tinggi karena tercatat ada 3 bencana besar yang sudah melanda wilayah DIY, yaitu gempa tahun 2006, erupsi Merapi 2010 dan bencana banjir, longsor dan angin kencang akibat siklon Cempaka tahun 2017.

Epidemi *Corona Virus Disease 2019* pada tahun 2020 juga berpengaruh terhadap risiko bencana. Namun untuk penghitungan Indeks Risiko Bencana tahun 2020 ini hanya mempertimbangkan 7 (tujuh) ancaman bencana alam seperti pada tahun 2019 dan tahun sebelumnya. Selain bencana besar tersebut, tercatat beberapa bencana yang melanda DIY diantaranya adalah kekeringan, tanah longsor, banjir dan cuaca ekstrem.

b. Kerentanan kawasan yang terancam

Suatu Kawasan memiliki nilai ancaman terhadap bencana yang besar apabila Kawasan tersebut memiliki potensi bencana yang tinggi (parameter fisik seperti kemiringan lereng, jenis tanah, ketersediaan air tanah, jarak terhadap sesar aktif, dll) dan memiliki tingkat kapasitas atau ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana yang rendah. Misal pada suatu wilayah yang rentan terhadap bencana gempa bumi, seharusnya dibangun bangunan dengan mengedepankan konsep bangunan tahan gempa hingga skala Richter tertentu. Hasil tersebut kemudian akan menjadi salah satu pedoman dalam memberikan suatu ijin terhadap kegiatan yang akan dilakukan di atas lahan tersebut, demikian juga untuk peruntukan lahan lainnya. Apabila hal tersebut dapat diterapkan, maka akan meningkatkan kapasitas untuk mengurangi dampak dari potensi bencana yang ada. Karena secara geografis, potensi bencana fisik tidak dapat dihilangkan tapi dapat dimanagemen untuk mengurangi dampak bencana nya. Kondisi demografis masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk yang merupakan suatu keniscayaan, kecepatan perubahan lahan serta degradasi lahan harus menjadi perhatian bahwa **indeks risiko merupakan angka yang bukan bersifat linier**, tapi dapat berpotensi berubah tergantung pada upaya mitigasi struktural dan non struktural yang dlakukan untuk pengurangan risiko bencana.

c. Kapasitas kawasan yang terancam

Kapasitas Kawasan merupakan salah satu faktor penting dalam pengurangan risiko bencana. Dengan peningkatan kapasitas suatu wilayah di daerah rawan bencana, maka akan mengurangi dampak terhadap bencana tersebut. Prioritas program pengurangan risiko bencana HFA dan indikator pencapaiannya adalah:

1) Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya .
2) Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah.

3) Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua tingkat
4) Mengurangi faktor-faktor risiko dasar .
5) Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.

Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui upaya mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural dapat berupa pembangunan talud pada lereng/tebing untuk menahan longsor, pembangunan rumah dengan struktur tahan gempa, pembangunan jembatan dengan struktur yang kuat, pembangunan saluran drainase jalan untuk mengurangi dampak bencana banjir, pembangunan kembali sarana ekonomi masyarakat dan pembangunan fisik lain yang selalu berpedoman pada konsep ***build back better and safer*** demi pengurangan risiko bencana. Sedangkan mitigasi non struktural lebih menekankan pada konsep pengurangan risiko bencana dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah rawan bencana agar selalu siap dan tanggap terhadap bencana. Bentuk kegiatannya dapat berupa sosialisasi mitigasi bencana, pendidikan sekolah bencana, pemasangan rambu evakuasi, gladi lapang dan lain-lain. Kapasitas Kawasan yang terancam pada wilayah DIY memang masih belum merata. Tercatat hanya Kabupaten Sleman yang memiliki kapasitas pengurangan risiko bencana di atas 3, sedangkan 4 kabupaten/kota lain masih dalam kategori rendah-sedang. Bencana yang terjadi terakhir yaitu banjir, tanah longsor dan angin kencang karena siklon Cempaka membuktikan bahwa kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana masih banyak tergantung dari Pemerintah dan belum mampu mandiri dalam peningkatan pengurangan risiko bencana. Regulasi yang belum optimal penerapannya, kesadaran masyarakat yang rendah bahwa mereka hidup di daerah bencana membuat kapasitas wilayah di DIY masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi indeks risiko bencana. Peningkatan kapasitas tersebut tidak hanya dilakukan dengan melakukan kegiatan yang bersifat monumental, tapi juga harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat aplikatif, mitigasi struktural dan non struktural harus berjalan beriringan demi pengurangan risiko bencana yang efektif dan efisien untuk Masyarakat Jogja Yang Tangguh Bencana.

Indeks Risiko Bencana Tiap Ancaman Bencana

a. Tsunami

Tsunami bila ditinjau dari definisinya merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Penyebab tsunami selain gempa tektonik juga dapat diakibatkan oleh tanah longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, atau jatuhnya meteor ke laut. Wilayah DIY, potensi tsunami

terdapat di wilayah daerah pantai selatan rawan tsunami. Daerah ini telah mengalami sejumlah tsunami kecil yang merusak kapal nelayan dan sejumlah infrastruktur yang terdapat di tepi pantai di wilayah pantai selatan. Indeks risiko bencana di DIY khususnya untuk bencana tsunami saat ini mencapai 1,61. Nilai ini dilihat dari kerentanan wilayah DIY dari bencana tsunami dengan mempertimbangkan aspek-aspek geologi, peta ancaman tsunami dan demografi di wilayah tersebut hingga jumlah desa yang kemungkinan terpapar dampak tsunami. Secara umum wilayah DIY memiliki indeks bencana tsunami yang rendah kecuali pada wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Perlu adanya mitigasi structural dan non structural di wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan meningkatkan kapasitas desa yang berbatasan dengan garis pantai, membangun TEA/TES, memberikan edukasi dan fasilitasi peralatan dan perlengkapan keselamatan terhadap bencana serta sosialisasi kepada masyarakat tentang apa, bagaimana dan pencegahan dampak tsunami.

b. Tanah Longsor

Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh diantaranya adalah beban permukaan, kemudian tekstur tanah dan struktur tanah nya jg berpengaruh serta curah hujan.

Bencana tanah longsor di wilayah DIY terjadi pada beberapa titik rawan dengan kondisi tanah curam yang biasanya berada pada dinding sungai dan di sepanjang kawasan pegunungan Menoreh yang berpotensi longsor terutama di musim penghujan, kemudian di daerah Kabupaten Gunung Kidul dengan Karst-nya. Salah satu contoh bencana akibat tanah longsor yang pernah terjadi adalah musibah yang diakibatkan oleh Siklon Cempaka. Curah hujan yang tinggi, didukung dengan kondisi tanah yang labil, kelerengan yang curam, beban peruntukan lahan mengakibatkan longsor yang terjadi hampir di semua wilayah di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman. Ancaman bencana tanah longsor di DIY memang cukup tinggi mengingat topografi, geologi dan jenis tanah nya yang memang rentan

terhadap bencana tanah longsor. Indeks risiko bencana di DIY khususnya untuk bencana tanah longsor saat ini mencapai 4,46. Nilai ini dilihat dari kerentanan wilayah DIY dari bencana longsor dengan mempertimbangkan aspek-aspek geologi, peta bahaya tanah longsor dan demografi di wilayah tersebut hingga jumlah desa yang kemungkinan terpapar dampak tanah longsor. Secara umum wilayah DIY memiliki indeks bencana tanah longsor yang rendah karena salah satu mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD DIY maupun Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor. Penguatan ini dilakukan dengan pengadaan alat EWS tanah longsor yang dipasang pada desa atau wilayah yang berpotensi longsor tinggi, perbaikan talud, penguatan konstruksi pengaman badan jalan, penguatan konstruksi rumah, penataan penggunaan lahan seperti terasiring dan lainnya. Penguatan kapasitas terkait bencana tanah longsor juga dilakukan pada desa yang berpotensi bencana tanah longsor dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bencana itu sendiri, petunjuk dan lokasi untuk TEA/TES serta organisasi peduli bencana di tiap-tiap wilayah juga sangat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Indek risiko tanah longsor yang relative rendah ini memberikan pengertian bahwa risiko bencana yang besar dapat diminimalisir dengan adanya penguatan kapasitas baik structural dan non structural.

c. Erupsi

Gunung berapi atau gunung api secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas (batuan dalam wujud cair atau lava) yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Suatu gunung berapi merupakan bentukan alam dari pecahan yang terjadi di kerak Bumi. Patahan tersebut mengakibatkan lava panas, abu vulkanik dan gas bisa keluar dari dapur magma yang terdapat di bawah permukaan bumi. Letusan atau erupsi gunung berapi dapat menimbulkan berbagai bencana, tidak hanya di daerah dekat letusan. Bahaya dari debu vulkanik adalah terhadap penerbangan khususnya pesawat jet karena debu tersebut dapat merusak turbin mesin jet. Letusan besar dapat mempengaruhi suhu dikarenakan asap dan butiran asam sulfat yang dimuntahkan letusan dapat menghalangi matahari dan mendinginkan bagian bawah atmosfer bumi seperti troposfer, namun material tersebut juga dapat menyerap panas yang dipancarkan dari bumi sehingga memanaskan stratosfer. Dari sejarah, musim dingin vulkanik telah mengakibatkan bencana kelaparan yang parah.

Bencana Erupsi di DIY secara khusus memang hanya berdampak pada wilayah Kabupaten Sleman bagian Utara. Kalau dipetakan lebih jauh lagi, hanya berdampak pada wilayah sebelah Selatan dan Tenggara Gunung Merapi. Akan tetapi untuk dampak sekunder seperti lahar dingin dan abu vulkanik, terjadi jauh hingga daerah Kota Yogyakarta, Kab. Bantul dan Kab. Kulon Progo. Ancaman bencana erupsi gunung berapi di DIY memang cukup tinggi mengingat Gunung Merapi merupakan salah satu Gunung Berapi teraktif di dunia. Sejarah geologi dan sejarah letusan memberikan gambaran tentang dasyatnya erupsi yang bahkan dahulu mampu mengubur Candi Borobudur di Jawa Tengah. Secara khusus, indeks risiko bencana erupsi di DIY saat ini mencapai 0,90. Nilai yang sangat rendah ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah DIY dan masyarakat di DIY pada umumnya dalam mengurangi dampak bencana erupsi Gunung Merapi. Pembangunan TEA dan TES di wilayah KRB (Kawasan Rawan Bencana), pembangunan hunian tetap di daerah aman bencana, pembangunan DAM dan pengendali aliran lahar, zonasi KRB, perbaikan jalur evakuasi secara regular, sosialisasi dan kesiapsiagaan dari masyarakat dan aparat pemerintah terhadap bencana yang dinilai regular ini membuat ancaman yang tinggi dapat diminimalisir dampaknya. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, pemerintah yang peduli tentang kearifan lokal dan pembangunannya membuat dampak bencana ini dapat dikurangi hingga ke taraf yang aman atau kecil risikonya. Hasil ini memberikan bahwa mitigasi struktural dan non struktural yang berjalan seiring dan terkoordinasi memberikan hasil yang optimal pada pengurangan risiko bencana.

d. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa Bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Frekuensi suatu wilayah, mengacu pada jenis dan ukuran gempa Bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa Bumi diukur dengan menggunakan alat Seismometer. Moment magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa Bumi terjadi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh observatorium seismologi nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 magnitude. Kedua skala yang sama selama rentang angka mereka valid. Gempa 3 magnitude atau lebih sebagian besar hampir tidak terlihat dan jika besarnya 7 lebih berpotensi menyebabkan kerusakan serius di daerah yang luas, tergantung pada kedalaman gempa. Gempa Bumi terbesar bersejarah besarnya telah lebih dari 9, meskipun tidak ada batasan besarnya. Gempa Bumi besar terakhir besarnya 9,0 atau lebih besar adalah 9,0 magnitudo gempa di Jepang pada tahun 2011 (per Maret 2011).

Wilayah DIY merupakan jalur subduksi lempeng Indo-Australia-Eurasia. Pertemuan ketiga lempeng ini menyebabkan wilayah ini sangat rentan terhadap gempa bumi. Dari data yang ada, DIY sudah mengalami beberapa kali gempa dan gempa dengan kekuatan di atas 5 skala Richter di DIY dan sekitarnya terjadi di tahun 1867, 1937, 1943, 1976, 1981, 2001 dan terakhir tahun 2006. Namun gempa dengan kerusakan dan korban jiwa yang besar terjadi tahun 1867, 1943 dan 2006. Gempa tahun 1867 menyebabkan runtuhnya Tugu Keraton Yogyakarta, sebagian Gedung Agung dan Taman Sari. Sementara gempa tahun 1943 mengakibatkan 2800 rumah hancur dan 213 orang meninggal dunia dan 2096 lainnya luka-luka. dan gempa yang terjadi di tahun 2006 menewaskan 5.048 jiwa dan melukai 27.808 jiwa. Korban terbanyak berada di wilayah Bantul dengan jumlah meninggal sebanyak 4.143 orang, luka berat 8.673 orang serta luka ringan sebanyak 3.353 orang. Sementara jumah rumah yang rusak sebanyak 240.396 buah. Secara khusus, indeks risiko bencana gempa bumi di DIY saat ini mencapai 13,21. Dengan potensi gempa yang sangat tinggi, angka IRBI tersebut menggambarkan bahwa Pemda DIY dan semua unsur masyarakat memiliki kepedulian dalam bahaya dan dampak bencana gempa bumi. Simulasi bencana gempa yang banyak dilakukan di instansi pemerintah, masyarakat dan swasta memberikan pemahaman lebih baik tentang bagaimana gempa bekerja dana apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana gempa. Mitigasi structural dan non structural yang dilakukan terkait bencana gempa juga gencar dilakukan untuk bangunan-bangunan pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana membuat bangunan yang aman gempa. Alokasi desa tangguh bencana dan kampung tangguh bencana juga harus dikhususkan untuk wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi terdampak gempa, seperti wilayah sesar aktif dan patahan-patahan geologi. Gempa walaupun kecil tapi juga dapat memicu bencana lain seperti longsor, sehingga harus diperlukan mitigasi yang komprehensif terkait jenis bencana ini.

e. Banjir

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Manusia terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik. Banjir genangan dan banjir bandang, keduanya bersifat

merusak. Aliran arus air yang tidak terlalu dalam tetapi cepat dan bergolak (turbulent) dapat menghanyutkan manusia dan binatang. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material berupa batuan yang lebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi. Banjir air pekat ini akan mampu merusakan pondasi bangunan yang dilewatinya terutama pondasi jembatan sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan bangunan dan menghanyutkannya. Pada saat air banjir telah surut, material yang terbawa banjir akan diendapkan ditempat tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman, perumahan serta timbulnya wabah penyakit.

Bencana banjir di DIY memang dirasakan oleh sebagian masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu walaupun prosentasinya kecil, namun tetap potensial mengingat terdapat sejumlah sungai besar di wilayah DIY dan terdapatnya kecenderung penyempitan aliran sungai dan menimbulkan kerentanan yang cukup tinggi terjadinya genangan air. Untuk wilayah DIY, pada awalnya potensi banjir terdapat di wilayah bagian selatan dan sejumlah wilayah lain yang dialiri oleh sungai-sungai besar. Akan tetapi bencana banjir yang diakibatkan oleh SIklon Cempaka membuka mata bahwa bencana banjir tidak hanya dapat terjadi di wilayah dengan topografi rendah/datar/cekung saja, bahwa banjir yang terjadi akibat siklon Cempaka juga terjadi di wilayah Karst Gunung Kidul dan di Kab. Kulon Progo dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Tidak adanya early warning system atau edukasi pada masyarakat tentang bagaimana bencana banjir tersebut meningkatkan tingkat kerugian yang diakibatkan oleh banjir, dimana pada tahun-tahun sebelumnya hanya dianggap sebagai genangan dan tidak berpotensi merusak. Indeks risiko bencana di DIY khususnya untuk bencana banjir yang saat ini mencapai 21,16 dan merupakan nilai indeks risiko tertinggi ketiga membuat bencana banjir harus ikut disertakan dalam factor pengurangan risiko bencana. Mitigasi structural dan non structural harus mengikutsertakan potensi bencana ini, pembuatan embung, saluran drainase, resapan pada bangunan publik, Kawasan ruang terbuka hijau yang perlu ditingkatkan persentasenya, penataan tata ruang berbasis bencana serta pengurangan tingkat degradasi lingkungan dan lahan harus menjadi titik perhatian dalam pengurangan risiko bencana khususnya bencana banjir. Pemahaman masyarakat yang harus diperkaya dengan pengurangan dampak bencana banjir juga harus selalu disosialisasikan sehingga mampu mengurani tingkat kerugian bencana terhadap lahan. Pelatihan dapur umum juga perlu ditingkatkan untuk wilayah-wilayah yang berpotensi bencana banjir, karena rata-rata pengungsi akibat bencana banjir memiliki tingkat menetap yang relative lebih lama daripada bencana lain.

f. Kekeringan

Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Kekeringan dapat menjadi bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya. Dampak ekonomi dan ekologi kekeringan merupakan suatu proses sehingga dampak yang ditimbulkan pada tiap wilayah tidak sama.

Bencana kekeringan di DIY secara umum dapat dibagi menjadi 2 tipe, tipe pertama yaitu kekeringan yang diakibatkan oleh kondisi fisik/alam yaitu melanda daerah Kab. Gunung Kidul dan Kab. Kulon Progo, sedangkan kekeringan yang diakibatkan oleh penggunaan lahan oleh manusia, banyak dirasakan di wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul. Bencana kekeringan sendiri sampai saat ini masih menjadi bencana musiman atau regular di DIY. Pemda dan masyarakat seperti merasa bahwa itu merupakan bencana regular yang harus datang dan tidak perlu dilakukan antisipasi. Cara pandang seperti itu membuat potensi kekeringan yang ada di DIY semakin meningkat karena degradasi lahan, pengambilan air tanah yang kurang terkontrol, perilaku pemanfaatan air yang tidak efektif dan efisien membuat bencana kekeringan semakin nyata ancamannya saat ini. Indeks risiko bencana di DIY khususnya untuk bencana kekeringan yang saat ini mencapai 43,03 dan merupakan nilai indeks risiko tertinggi kedua membuat bencana kekeringan harus ikut disertakan dalam factor pengurangan risiko bencana. Mitigasi structural dan non structural harus mengikutsertakan potensi bencana ini, pembuatan embung, saluran drainase, regulasi pemanfaatan air yang tegas, Kawasan ruang terbuka hijau yang perlu ditingkatkan persentasenya, penataan tata ruang berbasis bencana serta pengurangan tingkat degradasi lingkungan dan lahan harus menjadi titik perhatian dalam pengurangan risiko bencana khususnya bencana kekeringan. Pemahaman masyarakat dan perubahan perilaku tentang pemanfaatan air juga harus selalu disosialisasikan sehingga mampu mengurani tingkat kerugian bencana. Pembuatan pilot project desa ramah air atau desa hijau untuk peningkatan kualitas lahan dan sumber daya air perlu dimulai dari lingkungan terkecil.

g. Cuaca Ekstrem

Definisi Cuaca Ekstrem secara umum adalah fenomena meteorologi yang ekstrem dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrem didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrem lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada Lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer, intensitas lebih dari 1 (satu) hari selama periode satu bulan yang melebihi rata-ratanya, contoh cuaca ekstrem: hujan lebat, hujan es, badai, gelombang panas, puting beliung, badai pasir, gelombang tinggi.

Bencana cuaca ekstrem di DIY pemahamannya baru sebatas pada curah hujan yang tinggi. Hal tersebut sering *overlap* terhadap kondisi bencana banjir. Pemahaman akan bencana cuaca ekstrem baru dirasakan pada saat bencana akibat siklon Cempaka pada akhir tahun 2017. Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 600 Milyar rupiah dan dirasakan oleh seluruh wilayah di DIY. Pemahaman masyarakat tentang *early warning system* pada cuaca ekstrem sering dipandang sebagai prakiraan cuaca tanpa adanya persiapan lebih lanjut dalam mengantisipasi potensi bencana ini. Kurangnya edukasi pada masyarakat tentang bagaimana bencana cuaca ekstrem tersebut meningkatkan tingkat kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Indeks risiko bencana di DIY khususnya untuk bencana cuaca ekstrem saat ini mencapai 40,04 dan merupakan nilai indeks risiko tertinggi membuat bencana cuaca ekstrem menjadi prioritas dalam pengurangan risiko bencana. Potensi bencana lain yang sudah turun harus mampu menjadi pemacu pemerintah dan masyarakat untuk menurunkan indeks risiko bencana cuaca ekstrem ini. Mitigasi struktural dan non struktural harus mengikutsertakan potensi bencana ini, pembuatan atau penyediaan lokasi TEA/TES, penyusunan dan penerapan yang tegas untuk regulasi pemanfaatan lahan di daerah resapan, penataan tata ruang berbasis bencana serta pengurangan tingkat degradasi lingkungan dan lahan menjadi titik perhatian dalam pengurangan risiko bencana cuaca ekstrem. Pemahaman masyarakat yang harus diperkaya dengan pengurangan dampak bencana cuaca ekstrem juga harus selalu disosialisasikan sehingga mampu mengurani tingkat kerugian bencana terhadap lahan. Gladi lapang juga harus memperhatikan potensi bencana ini agar masyarakat tau dan siap dalam menghadapi bencana cuaca ekstrem untuk mengurangi dampak yang ditimbulkannya.

8. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikator Persentase dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang

Pemda DIY melakukan penilaian persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang. Berdasarkan rencana indikasi program yang ada dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039 yang disandingkan dengan program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD pada tahun 2020.

Sebagai akibat pandemi Covid-2019 yang mengharuskan adanya perubahan anggaran, beberapa program/ kegiatan tidak bisa terlaksana dengan optimal sehingga realisasi capaian indikator ini hanya sebesar 66,26%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa capaian pada tahun 2020 baru tercapai 86,38% dari target Tahun 2020 sebesar 76,7% karena terdapat beberapa program yang tidak terlaksana atau dilaksanakan namun kuantitasnya tidak sesuai dengan target. Dukungan terhadap ketidaktercapaian terdapat pada rendahnya perwujudan struktur ruang berupa pengembangan pusat kegiatan.

Tabel 3.52. Capaian 2019-2020 dan Perbandingan dengan Target RPJMD

No	Indikator	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% realisasi		
1	Persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	75,88	76,7	66,26	86,38	78,7	84,18

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

Hasil Penilaian Keterpaduan Program Struktur Ruang

Hasil penilaian keterpaduan program dan lokasi pemanfaatan ruang untuk Program utama dalam Struktur Ruang berdasarkan tabel Indikasi Program Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi DIY tahun 2019-2039 yang disandingkan dengan program yang dilaksanakan OPD terkait tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.53. Nilai Keterpaduan Program Struktur Ruang Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Nilai	
		Sebelum Perubahan Anggaran	Pasca Perubahan Anggaran Covid-19
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI		**68,58%**	**57,71%**
A	Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan	**55,56%**	**33,33%**
1	Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	100,00%	100
2	Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	100,00%	50
4	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal	38,46%	15,38
B	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	**51,97%**	**15,38%**
1	Perwujudan sistem jaringan Transportasi	67,74%	46,07%
2	Perwujudan sistem jaringan energi	100,00%	64,52%
3	Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	83,33%	83,33%
4	Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air	77,78%	66,67%
5	Perwujudan Jaringan Irigasi	100,00%	100,00%
6	Perwujudan sistem penyediaan air minum	100,00%	100,00%
9	Perwujudan sistem jaringan drainase	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2020

Hasil Penilaian Keterpaduan Program Pola Ruang

Hasil penilaian keterpaduan program dan lokasi pemanfaatan ruang untuk Program Utama dalam Pola Ruang berdasarkan tabel Indikasi Program Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi DIY tahun 2019-2039 yang disandingkan dengan program yang dilaksanakan OPD terkait tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.54. Nilai Keterpaduan Program Pola Ruang Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Nilai	
		Sebelum Perubahan Anggaran	Pasca Perubahan Anggran Covid-19
	PERWUJUDAN POLA RUANG	**67,86%**	**71,41%**
A	Perwujudan Kawasan Lindung	**94,44%**	**77,80%**
1	Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	85,71%	57,14%
2	Program kawasan perlindungan setempat	85,71%	72,72%
3	Program perwujudan kawasan konservasi	100,00%	100,00%
4	Perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi	100,00%	100,00%
5	Perwujudan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau	100,00%	100,00%
6	Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam	90,00%	70,05%

No	Program/Kegiatan	Nilai	
		Sebelum Perubahan Anggaran	Pasca Perubahan Anggran Covid-19
7	Kawasan Lindung Cagar Budaya	100,00%	100,00%
B	Perwujudan Kawasan Budidaya	**74,67%**	**67,90%**
1	Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	100,00%	100,00%
2	Program Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat	100,00%	100,00%
3	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian	80,00%	73,33%
3.	Program Perwujudan Kawasan Perikanan	50,00%	50,00%
4.	Program Perwujudan Kawasan Pertambangan	100,00%	100,00%
5.	Program Perwujudan Kawasan Industri	100,00%	40,00%
6.	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata	79,00%	79,00%
7	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman	100,00%	60,00%
8	Program Perwujudan Kawasan Hankam	0,00%	0,00%
9	Program Perwujudan Kawasan Budidaya Lainnya	44,44%	66,67%
C	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI**	**72,2%**	**72,2%**
1	Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	50,00%	50,00%
2	Kawasan strategis kepentingan ekonomi	100,00%	100,00%
3	Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	100,00%	100,00%
4	Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

Tabel 3.55. Klasifikasi Tingkat Keterpaduan Program

Perwujudan Program Utama	Nilai	
	Sebelum Perubahan Anggaran	Pasca Perubahan Anggran Covid-19
STRUKTUR RUANG	**68,58%**	**57,71%**
Pengembangan Pusat Kegiatan	55,56%	33,33%
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	51,97%	46,07%
POLA RUANG	**84,44%**	**71,41%**
Kawasan Lindung	94,44%	77,80%
Kawasan Budidaya	77,78%	67,90%
Kawasan Strategis Provinsi	72,22%	72,22%
REKAP KESESUAIAN	**76,83%**	**66,25%**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

Nilai keterwujudan indikasi program RTRW DIY pada tahun 2020 secara keseluruhan -sebelum perubahan anggaran- sebesar 76,83% dengan klasifikasi Kurang Berkualitas, sedangkan pascaperubahan anggaran Covid-19 turun menjadi 66,26% dengan klasifikasi Kurang Berkualitas. Arahan RTRW 2020 dalam keterwujudan struktur ruang dengan nilai terendah sebelum perubahan anggaran yaitu Program Sistem Jaringan Prasarana Wilayah dengan nilai kesesuaian 51,97%, sedangkan

pascaperubahan anggaran yaitu Program Pengembangan Pusat Kegiatan dengan nilai sebesar 33,33%. Penurunan Program Pengembangan Pusat Kegiatan disebabkan karena penurunan pemantapan dan penataan PKW dari 100% menjadi 50% serta penurunan pengembangan PKL dari 38,46% menjadi 15,38% karena banyaknya program Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Pada arahan keterwujudan Pola Ruang, program dengan nilai tertinggi yaitu Program Pewujudan Kawasan Lindung dengan nilai kesesuaian 94,44% (sebelum dan sesudah perubahan anggaran). Nilai terendah pada kesesuaian terhadap program keterwujudan Pola Ruang sebelum terjadi perubahan anggaran yaitu Program Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dengan nilai 72,22%. Pascaperubahan anggaran, nilai kesesuaian terhadap keterwujudan pola ruang terendah yaitu keterwujudan Kawasan Budidaya dengan nilai kesesuaian yaitu 67,90%. Perwujudan pola ruang pada kawasan strategis rendah dikarenakan program kegiatan ditunda tidak dilaksanakan karena adanya *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19.

9. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan, dengan indikator:

a. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten Yang Belum Maju (Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul)

Salah satu permasalahan paling penting dari suatu pembangunan daerah adalah tentang penurunan ketimpangan wilayah. Penurunan ketimpangan wilayah ini merupakan tujuan delapan dan tujuan sepuluh dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dapat disebut juga dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ketimpangan wilayah ini pun menjadi salah satu isu strategis dan mendapatkan perhatian tersendiri di DIY. Masalah ini adalah salah satu fokus permasalahan yang harus dapat ditangani dan dicarikan solusinya dengan pemerataan pembangunan. Sesuai yang diamanatkan di dalam RPJMD DIY 2017-2022, semangat untuk mengurangi ketimpangan wilayah ini berupa tujuan delapan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif bagi semua orang.

Kegiatan ekonomi di DIY yang saat ini masih terkonsentrasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, merupakan penyebab terjadinya ketimpangan wilayah di DIY. Selama ini, nilai PDRB ADHK dari 2 kabupaten/kota tersebut menyumbang lebih dari 60% dari total PDRB DIY. Hal yang berbeda terjadi pada Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul yang luas wilayahnya adalah 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,05% dari keseluruhan *output* DIY. Perbedaan struktur ekonomi di setiap wilayah

kabupaten/kota yang mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal, menjadi salah satu dari berbagai penyebab adanya ketimpangan tersebut. Lapangan usaha sebagai penggerak paling utama perekonomian di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul adalah lapangan usaha sektor industri pengolahan dan menjadi lapangan usaha penyumbang terbesar nilai PDRB di DIY. Sedangkan sektor pertanian masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 3.56. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang Belum Maju (Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul) Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Reali-sasi	% Realisasi		
Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul)	%	39,7	40,24	40,09	99,63	40,26	99,58

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020 (Data Diolah)

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,69%. Demikian juga, pertumbuhan ekonomi di semua wilayah juga menunjukkan perkembangan yang negatif. Kabupaten Kulon Progo mengalami kontraksi terbesar pada tahun 2020, yaitu sebesar 4,06%, yang tumbuh lebih rendah dibandingkan kontraksi ekonomi DIY. Meskipun demikian, pangsa PDRB ADHK di Kabupaten Kulon Progo masih terendah dibandingkan wilayah lain, yaitu sebesar 8,28%. Pangsa PDRB ADHK Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul juga masih di bawah Kabupaten Sleman yang merupakan daerah berkontribusi terbesar. Meskipun demikian perkembangan nilai gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul terhadap total PDRB DIY meningkat dari tahun 2019. Total pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju mencapai 40,09%. Pangsa sebelumnya adalah 39,7%. Berikut ini tabel perkembangan PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2020.

Tabel 3.57. PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2020

Kab/Kota	PDRB ADHK (Juta Rp)	Pangsa PDRB ADHK (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kulon Progo	8.414,75	8,28	-4,06
Bantul	18.838.13	18,52	-1,66

Kab/Kota	PDRB ADHK (Juta Rp)	Pangsa PDRB ADHK (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Gunungkidul	13.513,23	13,29	-0,68
Sleman	33.906,37	33,34	-3,91
Yogyakarta	27.015,49	26,57	-2,42

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Agar kesenjangan antar kabupaten/kota semakin menurun, tantangan ke depan bagi DIY berhubungan dengan kebutuhan investasi di kabupaten/kota proporsional untuk masing-masing daerah dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki setiap daerah. Pemda DIY menargetkan peningkatan PDRB pada kabupaten/kota yangbelum maju, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul, yang bertujuan mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi.

b. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi

Berdasarkan Perdais No. 5 tahun 2019 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039. Rencana struktur wilayah ruang DIY terdiri dari sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana, sistem jaringan prasaran dimaksud terdiri dari sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya. Terkhusus untuk sistem jaringan transporasi meliputi sistem jaringan sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan tranportasi darat bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas melalui beberapa pengembangan, melalui:

1) Sistem jaringan jalan
2) Sistem lalu lintas dan angkutan jalan
3) Sistem jaringan kereta api

Ketiga sistem di atas berpengaruh terhadap peningkatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi darat diwilayah DIY. Sistem jaringan jalan wilayah DIY ditunjang oleh Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/kota dan Jalan Lingkungan. Total Panjang jalan Provinsi di DIY adalah 760.45 km yang terbagi secara administrasi di beberapa wilayah kabupaten yang berada di DIY. Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten Sleman sepanjang 116,32 km, kabutean Bantul sepanjang 162,15 km, Kabupaten Kulon Progo sepanjang 175,14 km, Kabupaten Gunungkidul sepanjang 306,84 km dan untuk wilayah Kota Yogyakarta tidak dilalui Jalan Provinsi.

Pengembangan sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan untuk angkutan massal didukung dengan terminal angkutan antar kota, antar provinsi, dan terminal angkutan intermodal dalam kota sebagai salah satu simpul transportasi darat guna mendukung mobilitas antara daerah. Secara kewenangan maka layanan angkutan umum dibagi menjadi dua yaitu:

1) Angkutan Dalam Trayek yaitu Angkutan Perkotaan dan Angkutan Antar kota Dalam Provinsi (AKDP).
2) Angkutan Tidak Dalam Trayek: angkutan taksi dan angkutan sewa (umum dan khusus).

Angkutan umum perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini dilayani oleh Transjogja dengan cakupan wilayah adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul hingga tahun 2019 terdapat 11 Trayek yang teridiri Trayek 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, dan 11). Pada tahun 2020 terdapat penambahan 3 trayek yaitu trayek 12,13 dan 14 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang jaringan trayek angkutan perkotaan. Pergub tersebut meng-*update* dari Pergub sebelumnya, sehingga tiga trayek baru dapat memenuhi pelayanan angkutan pada 3 kecamatan tersebut.

Tabel 3.58. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi	%	79,84	72	81,46	113,13	83	98,14

Sumber: Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2021 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi pada tahun 2020 berada di atas target, dengan nilai 81,46%, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai target sebesar 72 % (sehingga persentase realisasi mencapai 113,13%). Nilai capaian ini berada pada posisi 98,19% terhadap target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 83%.

Angka realisasi 81,46 % ini didapat dari rata-rata dua variabel, yaitu:

1) Persentase cakupan pelayanan angkutan di DIY sebesar 91,35% yang merupakan rata-rata dari:
   a) Cakupan pelayanan Angkutan Dalam Trayek sebesar 82,70 %, dimana nilai tersebut didapat dari prosetase capaian target penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek yang terdiri dari angkutan perkotaaan dengan nilai 50 % dan Angkutan AKDP dengan niali 32.70%. Persentase capaian angkutan perkotaan dengan nilai 50 % didapatkan dari capaian layanan angkutan ke 25 kecamatan atau dari perhitungan ((25 kecamatan/25 Kecamatan) x 100%)/2. Sedangkan nilai 32,70 % didapatkan dari pelaksanaan Studi Angkutan AKDP ke NYIA tahun 2018 dan Sosialisasi/Pelaksanaan Penataan AKDP tahun 2019 serta operasional AKDP hingga tahun 2020.
   b) Cakupan pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek sebesar 100%. Nilai ini melonjak dari tahun-tahun sebelumnya karena terjadi perubahan regulasi pada moda angkutan sewa khusus yang memudahkan para operator untuk mendapatkan dokumen legalitas perizinan. Peraturan semula yaitu km.35 Tahun 2003, diubah beberapa kali yaitu dengan PM.32 Tahun 2014, PM.26 Tahun 2016, dan PN.108 Tahun 2017, kemudian terakhir diubah dengan PM.118 Tahun 2018. Sejak perubahan terakhir ini, permohonan izin penyelenggaraan angkuitan sewa khusus meningkat drastis. Semula ditargetkan hanya sejumlah 100 armada pada tahun 2022, karena tahun 2017 hanya berjumlah 15 armada yang memiliki izin. Akan tetapi pada tahun 2021 ini sudah 816 armada angkutan sewa khusus yang memiliki dokumen perizinan. Hal ini menyebabkan target cakupan pelayanan angkutan tidak dalam trayek terlampaui.
2) Persentase kondisi mantap di jalan provinsi sebesar 71,56%, yang dihitung berdasarkan data kondisi jalan berkategori baik dan sedang, sepanjang 544,17 km terhadap total panjang jalan provinsi sepanjang 760,45 km. Dapat lihat pada gambar di bawah untuk kondisi Provinsi per kabupaten/ kota yang berada di wilayah DIY.

Tabel 3.59. Kondisi Jalan Provinsi Per Kabupaten /Kota di Wilayah DIY pada Tahun 2020

No	Kabupaten	Panjang (km)	Kondisi (km)			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Bantul	162,150	115,425	11,230	28,370	7,125
2	Kulon Progo	175,140	104,950	34,250	23,490	12,450
3	Gunungkidul	306,840	98,190	98,935	75,990	33,725
4	Sleman	116,320	47,950	33,240	27,200	7,930
	Jumlah Seluruhnya	**760,450**	**366,515**	**177,655**	**155,050**	**61,230**
	Persentase	**100%**	**48,197%**	**23,362%**	**20,389%**	**8,052%**

No	Kabupaten	Panjang (km)	Kondisi (km)			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
	Kondisi Mantap (km)		**544,170**			
	Persentase Kondisi Mantap		**71,56%**			
	Kondisi Tidak Mantap (km)				**216,280**	
	Persentase Tidak Kondisi Mantap				**28,44%**	

Sumber: Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2021

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 target capaian kinerja Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan, dengan indikator persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi telah tercapai.

10. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah, dengan indikator:

a. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat keberhasilan otonomi di daerah. Untuk itu diperlukan analisis guna mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah sampai saat ini masih merupakan sektor andalan Pemerintah Daerah.

Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemampuan Keuangan Daerah tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 tahun 2020 tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah. Adapun penghitungan dan pengelompokan kemampuan keuangan daerah mengacu Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 62 Tahun 2017, sebagai berikut:

1) Di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;
2) Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; dan
3) Di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah,

dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Permendagri No. 62 tahun 2017 bahwa data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Hasil analisis atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 yang dijadikan acuan penghitungan KKD tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah pada Pemda DIY pada posisi sedang dengan nilai sebesar Rp2.281.696.835.262,50.

Tabel 3.60. Target dan Capaian Indikator Program Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100	Sedang	100

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Tingkat kemampuan keuangan daerah pada posisi "sedang" tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dengan perhitungan :

Tabel 3.61. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah

1.	PendapatanUmum	PendapatanAsli Daerah	2.082.795.334.434,50
		Dana Alokasi Umum	1.351.102.020.000,00
		Dana Bagi Hasil	56.060.581.800,00
	Jumlah 1		**3.489.957.936.234,50**
2.	BelanjaPegawai	GajidanTunjangan	745.798.159.660,00
		Iuran BPJS Kesehatan ASN	16.940.059.817,00
		IuranJaminanKecelakaanKerja/ Kematian ASN	4.955.684.738,00
		TambahanPenghasilan PNS	440.567.196.757,00
	Jumlah 2		**1.208.261.100.972,00**
3.	**KemampuanKeuangan Daerah**	**Jumlah 1 – Jumlah 2**	**2.281.696835.262,50**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021 (Pergub DIY Nomor 45 tahun 2020)

Capaian kemampuan keuangan daerah yang masih dalam kategori sedang didukung oleh realisasi PAD melebihi target. PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian daerah,

kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dan transfer Pusat ke aerah. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk pembiayaan pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp1.799.932.971.064,54 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.876.663.298.063,71 atau 104,26%. Realisasi PAD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp206.132.036.370,79 atau 9,90% dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.082.795.334.434,50. Realisasi PAD Tahun 2020 masih didominasi penerimaan Pajak Daerah (87,74%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah (5,41%), Lain-Lain PAD yang Sah (4,92%), dan Retribusi Daerah (1,94%).

Secara keseluruhan target PAD tercapai, bahkan lebih dari target yang ditetapkan sebesar 4,26%, Ketercapaian PAD merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak.

Dampak ekonomi akibat pandemi mempengaruhi kemampuan masyarakat wajib pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, untuk itu Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meringankan beban masyarakat wajib pajak sekaligus mendongkrak penerimaan pajak, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 26 tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN-KB) yang disahkan pada 1 April 2020 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selain itu dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui beberapa inovasi yang telah dilakukan, yaitu:

1) Layanan Pojok Simpatik pada KPPD DIY di Kabupaten Sleman.

Pojok Simpatik adalah sebuah layanan terbaru dari KPPD DIY di Kabupaten Sleman untuk wajib pajak di wilayah Kabupaten Sleman khususnya dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya. Layanan Pojok Simpatik terdiri dari layanan pusat informasi segala urusan kesamsatan, layanan pengaduan terkait pelayanan kesamsatan maupun pengaduan terhadap kejadian tindakan pungutan liar (pungli) maupun indikasi gratifikasi dan korupsi.

2) Layanan *Samsat on Call* pada KPPD DIY di Kabupaten Sleman.

Layanan ini menyajikan pembayaran pajak tahunan tanpa harus datang ke Kantor Samsat, tetapi unit Samsat yang akan mendatangi lokasi wajib pajak. Samsat on Call hanya bisa diakses scara kolektif, misalnya oleh komunitas otomotif, pabrik, kantor, kelurahan maupun komunitas lainnya.

3) Layanan Samoling (Samsat Mobil Keliling) pada KPPD DIY di Kabupaten Kulon Progo

4) Layanan *Go Door Pak Mo* (*Go Door Pakai Motor*) untuk Lansia pada KPPD DIY di Kota Yogyakarta

Selain itu juga dilakukan upaya meningkatkan PAD dari sektor retribusi dalam bentuk pemberian kemudahan layanan pembayaran retribusi menggunakan layanan *e-commerce*, dengan menggunakan Go Pay untuk pembayaran sewa Rusunawa dan layanan QRIS untuk pembayaran retribusi yang lain. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya pungutan liar. Pembayaran retribusi cukup dengan menggunakan kartu ATM dan uang langsung masuk rekening Pemerintah Daerah DIY.

b. Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY

Optimaliasi aset dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan nilai guna secara ekonomis dari Barang Milik Daerah Pemda DIY, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan barang milik daerah. Optimalisasi atau pendayagunaan barang milik daerah selama ini telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Pejabat Penatusahaan Barang Milik Daerah bersama sama dengan OPD Pemerintah Daerah DIY selaku Pengguna Barang Milik Derah. Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana Pasal 81 dari Permendagri No. 19 Tahun 2016 dapat dilakukan dengan cara sewa, pinjam pakai, bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama penyediaan infrastruktur. Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 mengakibatkan beberapa kendala terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah terutama yang dimanfaatkan melalui sewa. Beberapa penyewa yang terdampak secara ekonomi, kemudian mengembalikan barang milik daerah dan ada yang mengajukan keringanan sewa. Khusus untuk keringanan sewa telah diterbitkan Kepgub DIY Nomor 306/KEP/2020 tentang Pemberian Keringanan Sewa Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020. Terkait pemanfaatan barang milik daerah, pada tahun 2020 ini telah diterbitkan Pergub Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari Perda DIY No. 6

Tahun 2018. Target dan realisasi indicator kinerja Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.62. Target dan Capaian Indikator Program Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY Tahun 2020

IndikatorKinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Optimalisasi aset-aset pemda DIY	Rupiah	18.277.128.626 *	9.953.610.205	9.016.510.978	90.58	9.626.994.395	93,66

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan daerah. Pendapatan Pemda DIY dari kegiatan pemanfaatan barang milik daerah terdiri dari penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah (Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah) dengan realisasi pada Tahun 2020 sebesar Rp9.016.510.978.00. Realisasi tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp9.626.626.994,33. Rincian penerimaan pendapatan dari optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sebesar Rp9.016.510.978.00 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.63. Rincian Penerimaan Pendapatan dari Optimalisasi Aset

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.227.155.300.01	5.505.859.448.00	59.67
2.	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa	514.840.000.00	207.325.000.00	40.27
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah:			
	Sewa Tanah dan Bangunan	4.378.412.600.00	837.180.000.00	19.12
	Sewa Lahan	1.610.700.000.00	1.031.584.630.00	64.05
	Pengelolaan Terminal		-	0
	Penggunaan Asrama		-	0
	Penggunaan Aula	-	-	0
	Sewa Tempat/Ruangan	-	136.364.00	0
	Bagi Hasil Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan	2.098.000.000.00	403.917.625.00	19.25
	Penjualan Air Curah	-	165.914.411.00	0
	Sewa Sebagian Tanah dan Bangungan di Komplek Kepatihan Danurejan		-	0
	Sewa Bangunan dan Sebagian Tanah Park and Ride		-	0
	Sewa Bangunan untuk Kantin		-	0
	Sewa Bangunan untuk Fotocopy	2.400.000.00	2.400.000.00	100.00
	Sewa Bangunan untuk Koperasi		-	0
	Sewa Ruangan Usaha Fotokopi dan Koperasi		-	0
	Sewa Ruangan Usaha Fotokopi, Koperasi dan Kantin		-	0

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	pengelolaan hutan produksi Klayar Kenet	25.000.000.00	1.580.750.00	6.32
	pengelolaan hutan produksi Ngingrong Mulo	18.000.000.00	4.262.750.00	23.68
	Pengelolaan oleh PT. YIS	833.000.000.00	833.000.000.00	100.00
	Sewa di Komplek Lapangan Kenari	-	18.850.000.00	0
	Sewa computer		4.500.000.00	0
	Jumlah	**18.707.507.900.01**	**9.016.510.978.00**	**48%**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, 2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah adalah:

1) Terjadinya pendemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan adanya penyewa mengakhiri kontrak dikarenakan adanya kebijakan pemerintah daerah.
2) Penyewa mengajukan keringanan sewa dan jangka waktu sewa.
3) Adanya hasil penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah (sewa) yang relatif tinggi, sehingga kurang terjangkau oleh masyarakat umum.

c. Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, Nilai Eksternal Persepsi Korupsi

Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah merupakan program strategis Pemda DIY yang mendukung sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terdapat lima indikator kinerja program, yaitu kemampuan keuangan daerah, optimalisasi aset-aset Pemda DIY, nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi. Capaian tiga indikator terakhir yaitu nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi termasuk komponen penghitungan Indeks Reformasi Birokrasi yang dievaluasi dan dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

Tabel 3.64. Target dan Capaian Indikator Program Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Eksternal Pelayanan Publik	Nilai	8,50	8,70	8,94*	102,76	8,80	101,59

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Nilai internal integritas organisasi	Nilai	4,82	4,40	4,78*	108,64	4,60	103,91
3.	Nilai eksternal persepsi korupsi	Nilai	5,97	5,80	6,52*	112,41	6	108,67

*Keterangan: *) Data sementara Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2021*

Secara umum, capaian indikator mengalami peningkatan signifikan, hanya indikator integritas organisasi yang mengalami sedikit penurunan. Kenaikan tersebut kemungkinan besar akan berdampak pada peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2020. Optimisme kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi juga didasarkan atas berbagai capaian prestasi nasional antara lain sebagai berikut:

1) Pemda DIY mendapat penghargaan "Praktik Baik Reformasi Birokrasi Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2020" oleh Kemenpan RB dan KPK RI;
2) Penghargaan "Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)" dari Kemenpan RB yakni Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman, Balai Pelatihan Kesehatan DIY, dan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY; sehingga total sudah terdapat 5 unit kerja berpredikat WBK.
3) Terdapat satu inovasi pelayanan publik Pemda DIY yang berhasil masuk TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menpan RB No. 192 Tahun 2020 Tentang TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan 5 Pemenang *Outstanding Achievement Of Public Service Innovation* 2020 yaitu:
    a) Melintasi Batas Ruang Kelas Bersama Jogjabelajar Class – Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
    b) JOGJAPLAN: Perencanaan Pembangunan DIY yang ORDINATE (Konsisten, Responsif, Dinamis, dan Akuntabel) dengan *e-Planning* – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.

11. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah, dengan indikator Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan

Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah merupakan program strategis Pemda DIY dalam rangka pelaksanaan kewenangan

urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Ketercapaian pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diukur dari indikator terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan tersebut mengatur asas, pembentukan, dan susunan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan. Pelaksanaan urusan kelembagaan istimewa sesuai regulasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan (1) Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, (2) Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan, dan (3) Peraturan Gubernur tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Dengan telah disusunnya Peraturan Gubernur pelaksanaan, semua urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan telah terwadahi dalam Perangkat Daerah dan dilaksanakan sesuai kewenangan dalam perundang-undangan. Dengan demikian capaian kesesuaian pelaksanaan urusan kelembagaan pada tahun 2020 telah mencapai 100%.

Tabel 3.65. Target dan Capaian Indikator Program Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan Tahun 2020

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Terwujudnya Pelaksanaan urusan Kelem-bagaan sesuai dengan Perdais kelembagaan	%	25	75	100	133,33	100	100

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2021

Capaian tersebut antara lain ditandai dengan telah ditetapkannya:

a. Peraturan Gubernur yang mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang telah diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan dan program pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD, yakni:

1) Tahun 2018: telah ditetapkan 49 Peraturan Gubernur DIY yang mengatur tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah dan UPT
2) Tahun 2019: telah ditetapkan 3 Peraturan Gubernur DIY tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY yang mengatur tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah
3) Tahun 2020: telah ditetapkan 12 Peraturan Gubernur DIY tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah dan UPT

b. Pergub DIY Nomor 131 Tahun 2018 yang mengatur Penugasan Urusan Keistimewaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan struktur kelembagaan, tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa dalam hal penyelenggaraan urusan keistimewaan.
c. Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagai pedoman kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan penugasan urusan Keistimewaan dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli di DIY.
d. Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan.

12. Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa, dengan indikator Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)

Perdais No 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, menjabarkan ruang lingkup dalam Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Penatausahaan pertanahan meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran.Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari Tanah Keprabon, dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Tanah bukan keprabon atau dede keprabon terdiri dari, tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh, tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/ institusi yang telah dan belum memiliki serat kekancingan, serta tanah yang belum digunakan.

Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa diurusan pertanahan dapat dicapai meliputi beberapa unsur yaitu persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan, Pemeliharaan Dokumen Pertanahan, pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desaserta fasilitasi tanah desa (permohonan pemanfaatan tanah dan jumlah desa yang sudah difasilitasi dalam penyusunan draft raperdes). Berikut ini capaian kinerja pada tahun 2020.

Tabel 3.66. Target dan Capaian Indikator Program Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa Tahun 2020

Indikator	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% reali-sasi		
Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	%	50,08	59,45	61,25	103,03	88,67	69,08

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

Capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa untuk tahun 2020 melampaui target. Dari target 59,45% realisasi capaian program 61,25% atau terealisasi sebesar 103,03%. Dibandingkan dengan capaian 2019 capaian tersebut meningkat 11,17%. Rincian capaian pada tahun 2020 sebagai berikut persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan 26,56%, Pemeliharaan Dokumen Pertanahan 2,30%, pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan 15%, tanah kadipaten dan tanah desa serta fasilitasi tanah desa (pendaftaran tanah desa 0,38%, permohonan pemanfaatan tanah 10% dan jumlah desa yang sudah difasilitasi dalam penyusunan *draft* raperdes 7,02%). Meta indikator dan pembobotannya adalah Capaian pengelolaan (60%) ditambah capaian pemanfaatan (40%). Capaian tersebut didukung paling besar dari capaian persentase bidang tanah yang didaftarkan sebanyak 12.437 bidang dari target keseluruhan 21.877 bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa agar memiliki kepastian hukum. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, sampai dengan tahun 2020 telah didaftarkan sebanyak 12.287 bidang dan telah terbit sebanyak 7.214 sertifikat. Persiapan pendaftaran tanah pada tahun berikutnya sudah dilakukan pemberkasan sebanyak 1.301 bidang. Selain pendaftaran untuk fasilitasi penetapan perdes tentang pemanfaatan tanah desa sudah dilaksanakan pada 275 desa yang ada di DIY dan 117 desa yang sudah dilakukan review terhadap raperdes. Berikut ini disampaikan data pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sampai dengan tahun 2020 tiap kabupaten/kota:

Tabel 3.67. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

No	Kabupaten/ Kota	Pendaftaran								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	100	631
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	500	395	3442
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	402	2184
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	500	2939
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	202	3091
	Jumlah	**45**	**744**	**2.170**	**1.140**	**1.270**	**2.559**	**2.760**	**1.599**	**12.287**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

Tabel 3.68. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Desa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

No	Kabupaten	Jumlah Bidang	Bidang Sudah Sertifikat	Bidang Belum Sertifikat	Sertifikat Terverifikasi 2019	Sertifikat Belum diverifikasi	Penyesuaian Sertifikat
1	Bantul	15.743	2.117	13.626	390	1.727	50
2	Kulon Progo	4.156	3.649	507	3.649	0	*0*
3	Gunungkidul	10.882	3.283	7.599	1.277	2.006	50
4	Sleman	19.498	7.007	12.491	7.007	0	50
	Jumlah	**50.279**	**16.056**	**34.223**	**12.323**	**3.733**	**150**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

Tabel 3.69. Rekap Inventarisasi Penetapan Perdes Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	Direview DIY	Review Kab.
1	Bantul	75	43	18	5	9
2	Gunungkidul	144	94	20	19	11
3	Kulon Progo	87	87	0	0	0
4	Sleman	86	51	19	13	3
	Jumlah	**392**	**275**	**57**	**37**	**23**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021.

C. PENGHARGAAN

Pada tahun 2020, Pemda DIY berhasil meraih berbagai penghargaan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, antara lain:

1. Apresiasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi.
2. Penghargaan dan apresiasi 10 kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Kementerian Keuangan RI.
3. Penghargaan *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* 2020 dari Kementerian PAN dan RB RI.

4. Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 sebagai Inovator Pemerintah Provinsi DIY sebanyak 15 kelompok khusus dari Kementerian PAN dan RB RI.
5. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB RI sebagai unit kerja pelayanan di KPPD DIY.
6. Piagam Penghargaan atas donasi yang disalurkan untuk kemanusiaan pada Operasi Tanggap Darurat Bencana Penanganan Pandemi Covid-19 di DIY dari Palang Merah Indonesia.
7. Penghargaan sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dari Kementerian PAN dan RB RI.
8. Penghargaan atas Komitmen Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Penyampaian Informasi Berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Tahun 2020, dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) RI.
9. Penghargaan atas Peran Aktif Dalam Penangan Covid-19 dengan Peringkat III dan IV dari Kementerian Sosial RI.
10. BKN *Award* Tahun 2020 Kategori I Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara RI, Peringkat I.
11. Penghargaan Pengakuan Kelayakan/Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan Akreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara RI.
12. Penghargaan atas Pelaksanaan Merit Sistem Tahun 2020 dengan penilaian Sangat Baik (Kategori IV), Juara II dari Komisi Aparatur Sipil Negara RI.
13. LAN *Awards* Tahun 2020 – Penghargaan Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2020: *Agile Learning Centre for Agile Governanc*, dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dengan Peringkat III.
14. Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian PAN dan RB RI.
15. Penghargaan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan dari Direktorat PAUD Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
16. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 Klasifikasi Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat RI.
17. Penerimaan 14 Sertifikat Terkait Penetapan Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
18. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun 2020 dengan predikat IPK Terbaik Peringkat Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang, dan IPK Terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja, dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
19. Penghargaan atas Upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Bidang Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja Inklusif, dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
20. Penghargaan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan Tahun 2020 terkait Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan, dari Direktorat Jenderal

Pembinaan Pengawasan dan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI.

21. Penghargaan terkait Sistem Pelaporan Monitoring Penyakit Ikan melalui SSMPI, dengan Peringkat I dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian kelautan dan Perikanan RI.
22. Penghargaan sebagai OPD dengan Implemantasi SPIP Terbaik Tahun 2020, Juara II dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI.
23. Penghargaan atas Lomba Perpustakaan SLTA/Madrasah Tingkat Nasional Tahun 2020, Juara I dari Perpustakaan Nasional RI.
24. Penghargaan atas Lomba Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2020 Klaster A, Juara III dari Perpustakaan Nasional RI.
25. Penghargaan atas Dedikasi Membina dan Mengembangkan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca, dari Perpustakaan Nasional RI.
26. Penghargaan dengan Kategori Provinsi sebagai *Pitch Investment Deck* Terbaik: DIY sebagai Daerah dengan *Pitch* Terbaik Tahun 2020, Peringkat I dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.
27. PR Indonesia *Awards* 2020 (kompetisi kehumasan atau *Public Relations* (PR) paling komprehensif se-Indonesia) atas Penghargaan PR (humas) Terbaik untuk website resmi humas pemerintah provinsi dalam Kategori Pemerintah Provinsi, Sub Kategori Website. Predikat sebagai *Gold Winner* dari RPIndonesia Group.
28. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai Pelatihan Kesehatan dan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial, dari Kementerian PAN dan RB RI.
29. Penghargaan atas TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali, masuk dalam Nominasi 2, yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.
30. Penghargaan untuk Kategori Kemitraan Daerah dengan Peringkat I dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI.
31. Bhumandala *Award*, Bhumandala Kanaka/Medali Emas pada Kategori Provinsi dengan Juara I dari Badan Informasi Geospasial RI. Penghargaan diberikan sebagai Provinsi pertama dengan Simpul Jaringan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah aktif dan operasional.

D. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN

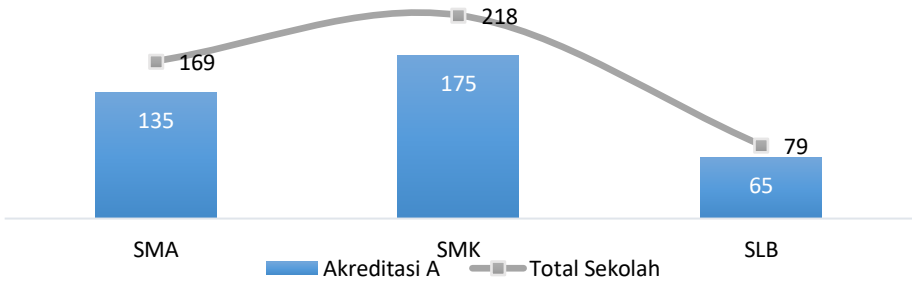
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

a) Kondisi Umum

Visi Pemda DIY untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara mengarah kepada pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berkualitas dan didukung oleh sumber daya yang handal. Kualitas penyelenggaraan pendidikan di DIY antara lain ditunjukkan melalui partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan pencapaian akreditasi sekolah yang merupakan bentuk pemetaan kualitas satuan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus ditingkatkan oleh Pemda DIY melalui dukungan pembiayaan operasional satuan pendidikan, pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk jenjang pendidikan menengah, dan beasiswa pendidikan khusus untuk peserta didik di SLB dan sekolah inklusif. Pemda DIY telah memastikan bahwa dukungan operasional sekolah tetap berjalan pada masa pandemi Covid-19 demi menjamin keberlangsungan proses pembelajaran.



Gambar 3.21. Capaian Akreditasi A pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus di DIY Tahun 2020
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

Sebagaimana gambar di atas, pada tahun 2020 tercatat bahwa akreditasi A dicapai oleh 135 dari 169 SMA, 175 dari 218 SMK, dan 65 dari 79 SLB. Capaian tersebut menunjukkan bahwa satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendididikan

khusus di DIY didukung oleh sumber daya yang berkualitas dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas pula kepada penduduknya. Pada masa pandemi Covid-19, layanan pendidikan jenjang menengah dan khusus di DIY menggunakan *blended learning system* yang menggabungkan antara sistem pembelajaran daring dan luring. Penggabungan ini dilakukan sebagai solusi bagi pembelajaran praktik di SMK dan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penuh secara daring.



Gambar 3.22. Kelas Industri Kompetensi Keahlian Perhotelan SMKN 6 Yogya



Gambar 3.23. B*lended Learning* Pada Anak Berkebutuhan Khusus

Target kinerja Pemda DIY urusan pendidikan dijabarkan dalam indikator sebagai berikut.

Tabel 3.70. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Capaian 2020 dan Perbandingan Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 Terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	63,63	58,22	N/A	N/A	58,41	N/A
2	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMA	55,33	58,02	N/A	N/A	58,29	N/A
3	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	97,27	98,39	98,42	100,03	98,63	99,79
4	Capaian APK pendidikan Menengah	persen	96,73	98,41	98,49	100,08	99,74	98,75
5	Capaian APK pendidikan khusus	persen	82,37	83,36	83,38	100,02	86,50	96,39

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

Dengan adanya pandemi Covid-19, pada tanggal 24 Maret 2020 diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 yang salah satunya berisi kebijakan mengenai penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yaitu:

(1) UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan.
(2) Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
(3) Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C akan ditentukan kemudian.
(4) Kelulusan SMA/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Kelulusan siswa SMK/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/5425 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) Di Lingkungan Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya Surat Edaran ini dan diikuti dengan pembatalan Ujian Nasional, maka tidak ada angka capaian untuk indikator Rata-rata hasil Ujian Nasional SMA dan SMK di tahun 2020. Target akhir RPJMD diproyeksikan akan berhasil tercapai karena sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ujian Nasional ditiadakan mulai tahun 2021.

Capaian Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah pada tahun 2020 adalah 98,42%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2019, terdapat peningkatan sebesar 1,15%. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyaknya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan untuk mengajar di sekolah.

Salah satu alasannya adalah karena semakin besarnya tuntutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan guna mencukupi syarat administratif pendidik dan akreditasi sekolah. Terhadap target akhir RPJMD, capaian tahun 2020 masih sebesar 99,79% dari target akhir. Guna mendukung ketercapaian target akhir RPJMD, Pemda DIY dalam melakukan pendampingan rutin kepada satuan pendidikan selalu menekankan pentingnya pemenuhan kualifikasi guru sebagai salah satu faktor penentu mutu sekolah. Sebagai langkah pendukung, Pemda DIY memberikan perluasan akses peningkatan kualifikasi pendidikan melalui kesempatan bagi guru untuk melakukan studi lanjut agar mencapai jejang S1.

Dengan capaian APK Pendidikan Menengah sebesar 98,49% pada tahun 2020, terdapat peningkatan sebesar 1,76% dibandingkan tahun 2019. Adanya peningkatan capaian APK Pendidikan Menengah secara bertahap menunjukkan peningkatan partisipasi penduduk usia 16-18 tahun di DIY untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Faktor pendukung utama peningkatan ini salah satunya melalui fasilitasi oleh Pemda DIY, utamanya melalui bantuan operasional dan beasiswa, baik kepada sekolah negeri maupun swasta jenjang pendidikan menengah agar kebutuhan pembelajaran dapat tercukupi dan peserta didik tidak terkendala oleh kondisi ekonomi keluarga. Mengingat capaian pada tahun 2020 masih sebesar 98,75% dari target akhir RPJMD, selain memberikan dukungan operasional dan beasiswa Pemda DIY juga memberikan perluasan akses bagi pembukaan sekolah baru oleh masyarakat sehingga dapat menjaring siswa dari lingkungan terdekat serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui workshop peningkatan kompetensi, forum guru mata pelajaran, dan penyelarasan kurikulum sekolah.

Capaian tingkat partisipasi penduduk usia 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus dalam pendidikan di tahun 2020 mencapai 83,38%. Peningkatan sebesar 1,01% dibandingkan tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan pelayanan di bidang pendidikan khusus sekaligus peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 86,50%, Pemda DIY berupaya meningkatkan dukungan terhadap pelayanan pendidikan khusus melalui pembiayaan operasional SLB negeri dan swasta di DIY melalui

BOSDA, pemberian beasiswa inklusif dan asrama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler dan memberikan fasilitas asrama bagi para siswa SLB, kemudahan akses bagi pembukaan sekolah baru sehingga memungkinkan penjaringan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekitar sekolah, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui workshop peningkatan kompetensi guru pendidikan luar biasa dan pengayaan materi keterampilan dalam kurikulum sekolah, serta pemberian advokasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Pemda DIY juga memberikan dukungan terhadap operasional Pusat Layanan Autis di Sentolo, Kulon Progo sebagai salah satu sarana pembinaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp415.734.600.092,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 14 Program dan 296 kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp394.174.819.375,00 (91,81%), dengan pencapaian fisik sebesar 99,90%. Adanya deviasi pada realisasi fisik disebabkan tidak terlaksananya pemeliharaan pagar pada gedung Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo. Sebelum dilaksanakan penyelenggaraan pekerjaan, rekomendasi dari Dinas PUP-ESDM DIY menyatakan bahwa gedung Balai sendiri sudah tidak layak pakai dan memerlukan rehabilitasi berat. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pemeliharaan pagar dibatalkan dan akan dilaksanakan bersamaan dengan rehabilitasi gedung kantor. Rincian capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Pendidikan tertuang dalam tabel berikut

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	- Pemberian beasiswa untuk anak usia 15-18 th yang belum bersekolah	**PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH**				- Masih ada anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sampai ke jenjang pendidikan menengah karena alasan sosial ekonomi; - Masih adanya ABK tidak bersekolah - Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan belum merata di DIY	- Pemanfaatan bantuan operasional sekolah, beasiswa Kartu Cerdas, dan DAK untuk mencegah siswa putus sekolah - Sosialisasi bantuan operasional sekolah dan beasiswa bagi ABK; - Advokasi kepada masyarakat akan pentngnya pelayanan pendidikan untuk ABK - Pemetaan dan rotasi PTK untuk meratakan kualitas dan kuantitas PTK di satuan pendidikan	A. URUSAN PEMERINTAHAN 1. Urusan Pendidikan 1. Terkait dengan peningkatan kualitas SMK, pada tahun 2021 akan diselenggarakan sinkronisasi kurikulum antara sekolah dengan dunia industri untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen, pariwisata, kemaritiman, teknologi dan rekayasa, agribisnis dan agroteknologi, teknik informasi dan komunikasi, serta kesehatan dan pekerjaan sosial. Output sinkronisasi ini adalah bahan ajar yang akan mendukung pengayaan materi di SMK dan mengasah lebih dalam keahlian praktik siswa. Penerapan bahan ajar ini juga diharapkan mampu mendekatkan siswa pada realitas pekerjaan di lapangan kelak sehingga akan memudahkan siswa memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh dunia usaha/dunia industri. Lulusan SMK diharapkan nantinya mampu bersaing sebagai tenaga kerja yang terampil dan kompeten. 2. Pada tahun 2020 dilaksanakan pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk 13.400 siswa SMA dan SMK di DIY dengan total anggaran sebesar Rp20.100.000.000,00. Di tahun 2021 juga direncanakan jumlah penerima beasiswa Kartu Cerdas sebanyak 13.400 siswa. Beasiswa ini diharapkan mampu
			- Penyediaan akses /bantuan transportasi bagi siswa yang jauh dari sekolah	Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	40	54			
			- Pemberian BOSDA kepada sekolah meningkatkan jumlah anak usia sekolah yang belum bersekolah yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	80.3	80.1			
			- Pemberian beasiswa miskin untuk anak usia 15-18th yang belum bersekolah	Angka Putus Sekolah	Persen	0.2	0.1			
			- Penyediaan sarana prasarana baik yang brsifat fisik bangunan maupun fisik bahan ajar/percontohan	**Penyediaan BOS/BOSDA**						
			- Peningkatan kualitas PTK dengan mengirim untuk mengikuti diklat yang bersifat daerah, nasional dan internasional	BOSDA swasta sekolah/madrasah	Sekolah swasta	305	305			
			-Penyelenggaraan program magang dengan DUDI bagi peserta didik untuk	dukungan terhadap pengurangan angka putus sekolah 0,20% dan Persentase	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			meningkatkan kompetensi dan life skill lulusan	Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%						mengurangi beban ekonomi orangtua siswa dari keluarga kurang mampu sehingga siswa dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Untuk pembiayaan di jenjang pendidikan tinggi, di tahun 2020 dan 2021 calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu masih diarahkan pada pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). KIP-Kuliah adalah salah satu upaya untuk membantu para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. 3. Pada tahun 2020 diberikan insentif kepada 1.199 pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap yang terdiri dari GTT dan PTT SLB Swasta, GTY dan PTY se-DIY, dan guru-guru inklusi dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.288.000.000,00. Pemberian insentif ini dilanjutkan tahun 2021 dengan pengajuan anggaran insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap di DIY sebagai salah satu wujud penghargaan kepada mereka. 4. Peningkatan kualitas PTK di sekolah menengah telah dilakukan secara rutin setiap tahun, antara lain dengan penyelenggaraan
			- Sertfikasi keahlian baik bagi PTK dan lulusan program keahlian	BOSNAS 3 jenjang pendidikan	Sekolah	2741	2740			
			- Penyediaan fasilitas berupa sarana prasarana fisik bangunan berupa panggung, teater maupun fasilitas fisik pendukung berupa alat music, gamelan, busana tari dll	**Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah**						
			- Pengiriman PTK untuk mengikuti diklat seni dan budaya baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional	Penyaluran Kartu Cerdas Jenjang Sekolah Menengah	Siswa	13400	13400			
			- Pengiriman/ pertukaran pelajar di bidang seni dan budaya baik tingkat nasional maupun internasional	Dukungan terhadap pengurangan angka putus sekolah 0,20%	%	100	100			
			- Peningkatan kerjasama dengan dunia pariwisata khususnya perhotelan melalui program magang bagi peserta didik	**Pembinaan Siswa SMA**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			- Peningkatan kualitas dan mutu PTK untuk memperoleh sertifikasi yang menunjang di bidang pariwisata	Pembekalan Kewirausahaan Siswa	Bidang	6	6			bimbingan teknis penulisan karya ilmiah bagi guru (yang merupakan dasar bagi penerapan pemikiran ilmiah dalam metode pengajaran di sekolah) dan mendorong para PTK untuk mengikuti berbagai kompetisi seperti Anugerah Konstitusi; Olimpiade Guru; Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Berprestasi; serta Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi. Guna mendukung peningkatan kualitas pengajaran, dalam pemberian diklat peningkatan kompetensi guru juga perlu dilakukan pemerataan sehingga seluruh guru di DIY memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelatihan demi peningkatan kualitas. Terkait dengan pemerataan PTK, telah dilakukan kegiatan Pemetaan Data Kebutuhan Guru jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus (Dikmensus) guna menjaring kebutuhan pendidik SMA, SMK, dan SLB di DIY. Salah satu output dari kegiatan ini adalah rotasi guru dan Kepala Sekolah di DIY berdasarkan pertimbangan jarak domisili dan kompetensi guru atau kinerja Kepala Sekolah yang bersangkutan. Penerapan zonasi
			- Peningkatan program keahlian melalui kegiatan dan pengadaan unit usaha di bidang perhotelan dan pariwisata	Pembinaan minat bakat istimewa	Bidang	3	3			
			- Penyediaan sarana prasarana fasilitas penunjang untuk meningkatkan ketrampilan di dunia kreatif, baik yang berupa alat perlengkapan maupun bahan percontohan	Penyusunan Karya tulis penelitian	Karya	50	50			
			- Peningkatan kerjasama antara dunia pariwisata dengan membuka pangsa pasar untuk memasarkan hasil kreasi industry kreatif sebagai cinderamata atau souvenir	Penyediaan soal seleksi, koreksi pelaksanaan KSN-K	Bidang	9	9			
			- Perbaikan ruangan baik kelas maupun non kelas yang	Pembinaan karakter dan budaya antikorupsi	Forum	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			mengalami kerusakan ringan maupun berat							dilakukan bukan semata berdasarkan jarak dari tempat tinggal ke tempat kerja, namun juga mempertimbangkan hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG). UKG dapat digunakan sebagai standarisasi kualitas guru sehingga hasilnya dapat mendukung pemerataan kualitas guru di DIY. Dengan demikian diharapkan guru-guru dengan kompetensi mengajar yang baik tidak terkonsentrasi di satu titik namun dapat disebar ke berbagai sekolah guna meningkatkan mutu satuan pendidikan. Sebaliknya, guru-guru dengan kompetensi pengajaran yang masih kurang baik juga tidak terkonsentrasi di satu titik sehingga diharapkan adanya transfer ilmu dan kualitas pengajaran dari guru yang kualitasnya lebih baik ke guru yang kualitasnya masih perlu ditingkatkan. 5. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN guru, kepala sekolah dan pengawas sampai dengan saat ini masih dalam tahap pembahasan karena perlu menyesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah DIY.
			- Peningkatan keamanan dan kenyaman ruang dengan penambahan CCTV, dan meja kursi yang nyaman	Pembinaan Pra-Seleksi Debat Bahasa	Tim	2	2			
			- Penyediaan peralatan maupun perlengkapan ruang pendukung pendidikan	Dukungan terhadap capaian 40 medali	%	100	100			
			- Penyediaan ruang simpan bagi semua peralatan dan perlengkapan penunjang pendidikan sehingga terdata dengan jelas baik jumlah dan penggunaannya	**Pembinaan Siswa SMK**						
			- Penguatan standar kompetensi siswa untuk memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui pemberian sertifikasi peserta didik program keahlian bagi sekolah kejuruan	Dukungan terhadap capaian 40 medali	%	100	100			
			- Pendampingan oleh PTK terhadap bidang minat baik di bidang sains maupun social	Pembinaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional	Kegi-atan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			bagi siswa untuk menerbitkan karya ilmiah							
			- Pembinaan dan pengiriman siswa untuk mengikuti kompetensi keilmuan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional	Sosialisasi Klinik Sains	Kegi-atan	1	1			
			- Pembinaan dan pendampingan oleh PTK untuk peningkatan kemampuan dan ketrampilan yang bersifat sederhana namun dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan	Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa Siswa SMK	Sekolah	15	5			
				Sarana Prasarana Pendidikan Menengah						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	%	100	100			
				Terlaksananya DAK 2020	Jenjang	2	2			
				Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	%	100	100			
				Bimtek Guru Mapel	Mapel	15	15			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Koordinasi Pokja Pengembang Kurikulum	Doku-men	1	1			
				Bimtek Klinik Sains	Bidang	6	6			
				Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK						
				Penyusunan dan updating materi uji kompetensi	Kegi-atan	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	%	100	100			
				Penelusuran dan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja	Kegi-atan	1	1			
				Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Teaching Factory	Doku-men	1	1			
				Pengawasan sekolah dalam Perijinan pada Satuan Pendidikan Menengah	Doku-men	1	1			
				DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)						
				Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA	Ruang	104	104			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	%	100	100			
				Pengadaan Sarana Belajar SMA	Paket	63	63			
				Pembangunan Prasarana Belajar SMA	Ruang	44	44			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	%	100	100			
				Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan – Pariwisata	RPS	1	1			
				Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan Dalam Rangka Pemerataan Kualitas Layanan SMK Antarwilayah	RPS	1	1			
				Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Sektor Industri	RPS	13	13			
				Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Industri Kreatif	RPS	2	2			
				Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Ketahanan Pangan	RPS	1	1			
			- Pemberian beasiswa untuk ABK yang belum bersekolah	**PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Jumlah SLB dengan Akreditasi A	Persen	52.56	82.28			
				Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus	Medali	9	22			
			- Advokasi orang tua dengan anak difable mengenai pentingnya tetap bersekolah (advokasi pendidikan inklusi)	**Pengembangan Layanan Khusus Autis**						
				Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditas A 52,56%	%	100	100			
				Layanan terapi , Assesmen dan Pendidikan Transisi bagi Anak Autis	Anak Autis	164	164			
			- Penyediaan transportasi bagi ABK yang rumahnya jauh dari SLB	**Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK**						
				Seleksi Lomba Olahraga Khusus Anak Tuna Grahita	Peserta	200	200			
				dukungan terhadap capaian perolehan jumlah medali 9 medali	%	100	100			
				Bantuan Operasional Sekolah SLB						
				Penyaluran Beasiswa Inklusi	Siswa	792	792			
				Penyediaan Biaya Asrama SLB Negeri	SLBN	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pemberian makanan tambahan bagi SLB (PMTAS)	Siswa SLBN	1542	1417			
				Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A 52,56%	%	100	100			
				Bantuan Operasional Sekolah	SLB Swasta	70	70			
				Pembudayaan Pendidikan Inklusif						
				Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Minat Bakat Istimewa (PPMBI) SD (pembinaan) dan SMP (penjaringan)	Bidang	3	3			
				Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A 52,56%	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Yogyakarta						
				Operasional pada SLB Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian jumlah SLB dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Yogyakarta						
				Dukungan terhadap capaian jumlah SLB dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional pada SLB Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SLB Negeri Pembina						
				Operasional pada SLB Negeri	Sekolah	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan terhadap capaian jumlah SLB dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Bantul						
				Operasional pada SLB Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian jumlah SLB dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Bantul						
				Dukungan terhadap capaian jumlah SLB dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional pada SLB Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Sleman						
				Dukungan terhadap capaian jumlah SLB dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional pada SLB Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Gunungkidul						
				Operasional pada SLB Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian jumlah SLB dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Gunungkidul						
				Operasional pada SLB Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian jumlah SLB dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Kulon Progo						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan terhadap capaian jumlah SLB dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional pada SLB Negeri	Sekolah	1	1			
				DAK Reguler Bidang Pendidikan (SLB)						
				Pengadaan Sarana Belajar SLB	Paket	5	5			
				Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditas A 52,56%	%	100	100			
				Pembangunan Prasarana Belajar SLB	Ruang	8	8			
				Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB	Ruang	3	3			
				PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN						
				Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	Persen	99.56	99.95			
				Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional	Medali	57	18			
				Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan						
				Dukungan terhadap capaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99,56%	%	100	100			
				Pengelolaan sistem informasi pendidikan (Dapodik SMA, Dapodik SMK, Dapodik SLB, dan Website Dikpora DIY)	Sistem Infor-masi	4	4			
				PPDB daring	Sekolah	118	118			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Ujian						
				Pelatihan dan penyusunan soal ujian SD/MI	paket soal	3	3			
				Dukungan terhadap capaian angka kelulusan jenjang SMA. SMK, dan SLB 99.56%	%	100	100			
				Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan						
				Dukungan 99,56% terhadap capaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB	%	100	100			
				Fasilitasi Lembaga di Bidang Pendidikan	Lem-baga	6	6			
				Pengiriman Lomba Dikdas dan PNFI						
				Sosialisasi dan Bimtek Penulisan Naskah Lomba Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi	Kegi-atan	2	2			
				Koordinasi Penyelenggaraan FLS2N SD dan SMP	Sesi	2	2			
				Koordinasi Penyelenggaraan KOSN SD dan SMP	Sesi	2	2			
				Koordinasi Penyelenggaraan KSN SD dan SMP	Sesi	2	2			
				Dukungan terhadap capaian jumlah medali lomba kompetisi	Medali	57	14			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				nasional dan internasional						
				Pembinaan Lomba Sekolah Sehat	Pembi-naan	4	4			
				Koordinasi Penyelenggaraan lomba MTQ Pelajar	Sesi	2	2			
				Pembelajaran Daring						
				Pembuatan studio JB TV streaming	Studio	1	1			
				Terselenggarannya pembelajaran daring pada masa tanggap darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)	Bulan	2	2			
				Kajian Pembelajaran Digital	kajian	1	1			
				Siaran JB Radio	kali	10	10			
				Produksi Infografis untuk Sosialisasi Covid-19	judul	4	4			
				Bimtek Daring	Sesi	80	80			
				Peralatan Penunjang	Paket	1	1			
			- Peningkatan kemampuan dan ketrampilan PTK melalui diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						
			- Sertifikasi bagi PTK agar mampu menciptakan lulusan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Persen	87.54	87.72			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			yang berkemampuan dan terampil							
			- Penyediaan sarana prasarana berupa fasilitas tempat dan peralatan dan bahan praktek	**Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif**						
			- Standar keahlian bagi PTK melalui sertifikasi sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tersandar	Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru /TPG (SMA)	Orang	69	69			
			- Peningkatan ketrampilan dan kemampuan melalui diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional bagi PTK	Bimtek Pengelolaan GTK (SMA)	Orang	69	69			
			- Kerjasama dengan DUDI melalui program magang bagi peserta didik	Identifikasi, Verifikasi dan Validasi data TPG (Sosialisasi)	Orang	126	126			
			- Penyiapan PTK yang professional melalui sertifikasi sebagai bentuk pengakuan akan kualitas kemampuan dan kompetensi PTK	dukungan terhadap capaian peningkatan kapasitas dan kompetensi PTK 87,54%	%	100	100			
			- Penyediaan PTK dengan melakukan mapping kebutuhan PTK di SLB dan SM	**Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			- Penyediaan PTK sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi dengan BKD	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PTK	313	313			
			- Peningkatan mutu dan kapasitas melalui pengiriman PTK mengikuti diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru	Doku-men	4950	4952			
			- Penekanan akan tanggung jawab, kewajiban dan hak yang diperoleh sebagai PTK melalui tupoksi yang jelas dan tertata, sebagai tolak ukur pegawai	Pemberian insentif GTY dan PTY	PTK	1079	1079			
				Bimbingan Teknis Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	Guru	40	40			
				Dukungan terhadap capaian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	%	100	100			
				Seleksi Calon Pengawas sekolah	Orang	31	31			
				Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kepala Sekolah	127	127			
				Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
				Dukungan terhadap capaian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 87.54%	%	100	100			
				Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmensus	Guru	73	66			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kerjasama dengan LPTK						
				Pemetaan Data Kebutuhan Guru Dikmensus	Sekolah	126	127			
		BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN		**PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)**						
				Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	Persen	81	81.87			
				Produksi Media Pembelajaran						
				Pengembangan media Virtual Reality untuk terapi respon dan focus	aplikasi	2	2			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK 81%	%	100	100			
				Produksi media untuk jogjabelajar.org	judul	30	30			
				Peningkatan kompetensi guru bidang TIK	orang	200	200			
				Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK						
				Layanan Pembelajaran dan Pendampingan TIK dengan Mobile Learning Service	lokasi	30	28			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pengelolaan IDC BTS dan Jaringan	unit Edisi IDC ,	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	%	100	100			
				Pengembangan Jogja Belajar	judul	28	28			
		BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK		**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK**						
				Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar	peserta	2080	511			
				Administrasi Perkantoran						
				Penyediaan Makanan dan Minuman	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12			
				Pengelolaan Arsip	Kegi-atan	2	2			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tahun	1	1			
				Lancarnya tugas pokok fungsi kantor dalam penatausahaan keuangan dan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tahun	1	1			
				Jasa Kebersihan Kantor	tahun	1	1			
				Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas	unit	8	8			
				Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola keuangan, pegawai dan barang	berkas	6	6			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tahun	1	1			
				Peningkatan kompetensi pegawai	Kegi-atan	2	2			
				Jasa Kebersihan Kebun	tahun	1	1			
				Pembelian Toner	paket	3	3			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per undang-undangan	tahun	1	1			
				Rapat konsultasi danmkoordinasi	Kegi-atan	3	3			
				Belanja Alat Tulis Kantor	paket	4	4			
				Penyediaan Pupuk/tanaman obat	tahun	1	1			
				Jasa Keamanan Kantor	tahun	1	1			
				Penyediaan BBM	tahun	1	1			
				Penyusunan IKM						
				Tersusunnya laporan survey IKM	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Terlaksananya kegiatan IKM	bulan	10	10			
				Roadshow dan Sosialisasi Program BLPT						
				Program-program yang Ada di BLPT Dapat Tersosialisasi Dengan Baik dan Membangun Jejaring Kepala SMA, Kepala SMK, Kepla SLB dan Pengawas di DIY	lokasi	3	3			
				Terlaksananya Roadshow dan Sosialisasi Program BLPT	%	100	100			
				Kegiatan Pelayanan BLUD (Pendapatan 2020)						
				Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada BLUD	%	100	100			
				Tercapainya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Seksi Layanan Pendidikan Teknik Pada BLUD	bulan	12	12			
				Pemeliharaan Bengkel Rutin/ Berkala Peralatan Bengkel						
				Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Bengkel	Jurusan	4	4			
				Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Dengan Pelaksanaan Praktek Sesuai Standar Nasional dan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pelayanan Produksi Jasa untuk Masyarakat Umum Sesuai Target yang Diharapkan						
				DED Asrama						
				Terpeliharanya sarana prasarana kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	%	100	100			
				DED Asrama	Doku-men	1	1			
				Kegiatan Pelayanan BLUD (Penggunaan SILPA)						
				Terbayarkan Honorarium, Asuransi, dan Tunjangan Hari Raya Non PNS PTT	%	38.5	38.5			
				Bukti Pembayaran Honorarium, Asuransi, dan Tunjangan Hari Raya Non PNS PTT	Berkas	5	5			
				Tersedianya Peralatan Praktik di Seksi Layanan Pendidikan Teknik	Item	1	0			
				Penambahan Peralatan Praktik di Seksi Layanan Pendidikan Teknik	%	100	0			
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana						
				Pemeliharaan Penunjuk arah	tahun	1	1			
				Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan air,listrik dan telepon	Kegi-atan	6	6			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Rutin Lingkungan	tahun	1	1			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	tahun	1	1			
				Pemeliharaan Gedung Pertemuan	kegiatan	1	1			
				Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tahun	1	1			
				Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraaan Dinas/operasional	Kenda-raan	5	5			
				Terpeliharanya sarana prasarana kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	%	100	100			
				LSP P2						
				Terlaksananya pebentukan LSP P2 di BLPT	%	100	0			
				Terbentuknya LSP P2 di BLPT	Jurusan	4	0			
				Sikronisasi dan Pengembangan Silabi Diklat						
				Terwujudnya workshop pengembangan program diklat	program diklat	4	4			
				Dokumen Program Diklat	Doku-men	4	4			
				Kegiatan SMM ISO 9001:2015						
				Terselesaikannya tindakan perbaikan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				atas temuan Audit Internal ISO 9001:2015						
				Terselenggaranya Audit Eksternal ISO 9001:2015	kali	1	1			
				Terselesaikannya tindakan perbaikan atas temuan Audit Eksternal ISO 9001:2015	%	100	100			
				Terselenggaranya Audit Internal ISO 9001:2015	kali	1	1			
				Pengadaan Peralatan Bengkel						
				Tersedianya Peralatan Praktek di Seksi Layanan Pendidikan Teknik	Item	20	20			
				Penambahan Fasilitas Peralatan Praktek di Seksi Layanan Pendidikan Teknik	%	100	100			
				Peningkatan Kompetensi Peserta Didik SMK						
				Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Peserta Didik SMK se-DIY	%	100	100			
				Terlaksananya Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kompetensi Peserta Didik SMK	paket diklat	8	8			
				Peningkatan Kompetensi Guru SMK						
				Meningkatnya pengetahuan dan	%	100	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				ketrampilan Guru SMK di Yogyakarta						
				Terlaksananya Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SMK	peserta	60	0			
				Penanganan Covid-19						
				Terbuatnya Wastafel Mobile	Unit	24	24			
				Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Yogyakarta	%	100	100			
				Bahan Pendukung	Paket	1	1			
				Penyusunan Program dan Penataan Anggaran						
				Dokumen anggaran	Doku-men	1	1			
				Terwujudnya penyusunan program dan penataan anggaran	%	100	100			
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran						
				Peralatan Gedung Kantor	item	4	4			
				Perlengkapan Gedung Kantor	item	6	6			
				Penanganan Covid-19	Kegi-atan	1	1			
				Tersedianya Peralatan Perkantoran Sebagai Pendukung Produktifitas	%	100	100			
				PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL		**Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Bambanglipuro**						
				Dukungan terhadap pencapaian sekolah dengan akreditasi A	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Banguntapan						
				Dukungan terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Banguntapan						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan akreditasi A	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Bantul						
				Dukungan Terhadap Pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Bantul						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase	sekolah	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				sekolah dengan akreditasi A						
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 3 Bantul						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Dlingo						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Imogiri						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Jetis						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kasihan						
				Dukungan terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kretek						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian sekolah dengan akreditasi A	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pajangan						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Piyungan						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pleret						
				Dukungan 0,33% terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 78,95%	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pundong						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap pencapaian persentase	sekolah	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				sekolah dengan Akreditasi A						
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sanden						
				Dukungan Terhadap Capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah SMAN 1 Sanden	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sedayu						
				Dukungan terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sewon						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Srandakan						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				1. Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Bantul						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Presentasi	sekolah	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Sekolah dengan Akreditasi A						
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Dlingo						
				Dukungan terhadap Capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kasihan						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Kasihan						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Kasihan						
				Dukungan terhadap pencapaian Persentase sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	0			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	0			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pajangan						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pandak						
				Dukungan terhadap pencapaian persentase sekolah dengan akreditasi A	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pleret						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan akreditasi A	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pundong						
				Dukungan terhadap pencapaian persentase sekolah dengan akreditasi A	sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sanden						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sedayu						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap pencapaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	sekolah	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sewon						
				Operasional Sekolah Menengah negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan akreditasi A	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Sewon						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan 0,33% terhadap Pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 85,00%	sekolah	1	1			
				PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL						
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul	Persen	80.67	80.23			
				Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul						
				Dukungan terhadap Capaian Persentase Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP 80.67%	%	100	100			
				Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	Kejua-raan	1	1			
				UKK	SMK	17	17			
				Pembinaan OSIS	siswa	85	85			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	Kejua -raan	2	2			
				Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	Kejua -raan	2	2			
				Pembinaan Karakter Kebangsaan	siswa	170	170			
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN		**PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH**						
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Cangkringan						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Depok						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Gamping						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Godean						
				Dukungan terhadap capaian Persentase	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Sekolah dengan Akreditasi A						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalasan						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Minggir						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Mlati						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngaglik						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Ngaglik						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngemplak						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pakem						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Prambanan						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Seyegan						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sleman						
				Dukungan terhadap capaian Persentase	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Sekolah dengan Akreditasi A						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Sleman						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Tempel						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Turi						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Cangkringan						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Depok						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Depok						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Godean						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Godean						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kalasan						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Seyegan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tempel						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN						
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Sleman	Persen	85	81.31			
				Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman						
				Pendidikan Karakter	siswa	56	56			
				Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	Kejua -raan	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 85%	%	100	100			
				Verifikasi Alat UKK	sekolah	57	57			
				Penyelnggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	Kejua -raan	4	4			
		BALAI PENDIDIKAN		**PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH**						
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Galur						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
		MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO		Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Girimulyo						
				Dukungan terhadap pencapaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalibawang						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kokap						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Lendah						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pengasih						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Samigaluh						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sentolo						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Temon						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Wates						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Wates						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Girimulyo						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kokap						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nanggulan						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Panjatan						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	0			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	0			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pengasih						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Pengasih						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Samigaluh						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Temon						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akrerditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO						
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di kabupaten Kulon Progo	Persen	75.67	73.59			
				Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penguatan FKPO	orang	60	60			
				Penyusunan Soal Latihan Ujian Nasional dan Kisi -Kisi USBN	paket	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase Sekolah dan Program Keahlian yang memenuhi SNP 75.67%	%	100	100			
				Pembinaan Akreditasi	sekolah	53	53			
				Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	Kejua-raan	4	4			
				Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	Kejua-raan	2	2			
				Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	Kejua-raan	3	0			
				Penguatan Pendidikan Karakter	orang	50	50			
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH**						
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Karangmojo						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Panggang						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Patuk						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Playen						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Playen						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelaksanaan Sekolah KKO	Sekolah	1	1			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Rongkop						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semanu						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semin						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Tanjungsari						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelaksanaan Sekolah KKO	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Wonosari						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Wonosari						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Gedangsari						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Gedangsari						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Girisubo						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Ngawen						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nglipar						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Ponjong						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Purwosari						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Saptosari						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungsari						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tepus						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Wonosari						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Wonosari						
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Wonosari						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan Akreditasi A	%	100	100			
				PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL						
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Gunungkidul	Persen	83.22	81.69			
				Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul						
				Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	Keju-araan	3	3			
				Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	Keju-araan	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan Terhadap Capaian Persentase sekolah dan Program keahlian yang memenuhi SNP 83,22%	%	100	100			
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA		**PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH**						
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Yogyakarta						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 3 Yogyakarta						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 4 Yogyakarta						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 5 Yogyakarta						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 6 Yogyakarta						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 7 Yogyakarta						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 8 Yogyakarta						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 100% Kelompok Sasaran Kegia	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 9 Yogyakarta						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 10 Yogyakarta						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 11 Yogyakarta						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan						
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Yogyakarta						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan Akreditasi A 100% Kelompok Sasaran Kegia	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Yogyakarta						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Yogyakarta						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 4 Yogyakarta						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan						
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 5 Yogyakarta						
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 6 Yogyakarta						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 7 Yogyakarta						
				Dukungan terhadap capaian Persentase Sekolah dengan akreditasi A 100% kelompok sasaran kegiatan	%	100	100			
				Operasional Sekolah Menengah Negeri	Sekolah	1	1			
				PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA						
				Persentase sekolah dan program keahlian yang	Persen	86.9	81.43			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				memenuhi SNP di Kota Yogyakarta						
				Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta						
				Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat kota	Kejua-raan	1	1			
				Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat kota	Kejua-raan	2	2			
				Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat kota	Kejua-raan	2	2			
				Pendidikan Karakter	Siswa	71	0			
				Dukungan terhadap Capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 86,90%	%	100	100			
				Verifikasi Tempat dan Alat Uji Kompetensi Kejuruan	Sekolah	30	30			
				Bimtek Pengembangan MGMP	Guru	94	94			
				Forum Operator Dapodik	Opera-tor	71	71			

2) *Urusan Kesehatan*

a) *Kondisi Umum*



Gambar 3.24. Penanganan Pandemi Covid-19 melalui *Hotline*

Pandemi Covid-19 menjadi masalah global dan berdampak pada semua sendi kehidupan, terutama sektor kesehatan. Kondisi tersebut mempengaruhi pembangunan kesehatan yang berfokus pada peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). Upaya yang dilakukan tertuang dalam 5 (lima) Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang Kesehatan yang mengacu pada 5 (lima) prioritas nasional yakni; 1) percepatan penurunan stunting, 2) percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neo natal (AKN), 3) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, 4) percepatan eliminasi Tuberkulosis (TB), dan 5) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM). Kelima upaya tersebut dilaksanakan dengan tetap memberikan perhatian terhadap program/kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pelayanan kesehatan di masyarakat.

Data kasus kematian ibu melahirkan pada 2020 adalah 40 kasus. Sedangkan jumlah kasus kematian neo natus 211 dan kasus kematian bayi 282 kasus. Beberapa upaya yang dilakukan DIY untuk menekan angka kematian tersebut diantaranya dengan meningkatkan meningkatkan persentase kunjungan *antenatal care* dan *neonatal* serta persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Kondisi kesehatan di DIY relatif lebih baik dengan meningkatnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan akses masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini didukung oleh: (1) Akreditasi layanan kesehatan, dari 76 Rumah Sakit di wilayah DIY terdapat 39 rumah sakit terakreditasi utama dan paripurna, sedangkan untuk 121 Puskesmas di DIY semua telah terakreditasi; (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia dalam hal pelayanan kesehatan jiwa paripurna, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya secara paripurna; dan (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Paru Respira khususnya pelayanan kesehatan paru dan saluran pernafasan.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, ada beberapa masalah kesehatan terkait dengan penyakit menular yang perlu mendapatkan perhatian. Kasus Pneumonia, Tuberkulosis (TB) Paru, Diare, dan Malaria merupakan beberapa penyakit yang harus ditekan, meskipun angka tersebut cenderung berada di bawah angka nasional. Sebaliknya prevalensi penyakit tidak menular cenderung naik, di antaranya penyakit Kanker, Stroke, Ginjal Kronis, Diabetus Melitus, Jantung, dan Hipertensi. Capaian indikator urusan kesehatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.71. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	73,28	69,08	75,19	108,80	73,28	102,60
3	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	60	65	81,39	125,20	75	108,52
4	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Paru	%	74,80	77,20	77,20	100	81,30	94,90

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Perilaku sadar sehat diukur melalui persentase puskesmas yang melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga pada tahun 2020 dari target sebesar 100% terealisasi 100%. Faktor pendorong tercapainya target puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga adalah adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu diukur dengan persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 69,08% terealisasi 75,19% atau dengan persentase capaian sebesar 108,80%. Tercapainya target pelayanan kesehatan yang terakreditasi didorong upaya pendampingan teknis dan asistensi ke puskesmas oleh sumber daya manusia kesehatan secara mandiri.

Pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu diukur melalui persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 65% terealisasi 76,74% atau dengan persentase capaian sebesar 118,06%.

Pelayanan kesehatan paru yang bermutu diukur melalui persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan paru. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 77,20% tercapai 100% atau terealisasi 77,20%. Faktor pendorong tercapainya pelayanan kesehatan paru yang bermutu yaitu adanya sinergi antara tim mutu dan satuan pemeriksa internal rumah sakit.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp129.337.084.875,29. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 13 Program dan 28 kegiatan urusan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan DIY, RS Jiwa Grhasia, dan RS Paru Respira. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp89.095.386.061,00 (68,88%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1. Peningkatan cakupan, mutu, akses dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas 2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat serta intervensi masalah gizi di masyarakat seperti stunting. 3. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta penggalangan kerja sama melalui *Corporate Social*	**PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT**					- Intensifkan koordinasi	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN a. Urusan Kesehatan 1) Upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kematian ibu, bayi (neonatus) dan balita antara lain dengan pemenuhan sarana prasarana dan SDM Kesehatan yang dilaksanakan secara paralel dengan pendampingan/Bimtek mutu dan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu juga masih dilakukan peningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga guna kesiapsiagaan pencegahan kematian ibu, bayi dan balita. Jaminan Kesehatan yang telah dan akan dilakukan yakni Program Jaminan Persalinan (Jampersal) melalui anggaran DAK dan anggaran APBD sebagai buffer/penyangga yang disalurkan melalui Jamkesos. Kegiatan termasuk Preventif KIA melalui meliputi Skrining prenatal, TORCH, dan Gerakan untuk
				Persentase Desa Sehat Mandiri	Persen	54.66	76.7			
				Persentase Balita Sehat	Persen	40.06	40.62	- Hal teknis terkait integrasi aplikasi SIMKIA - Pada kondisi pandemi, kontak tenaga kesehatan (Nakes) dengan sasaran (bumil dan balita) berkurang	- melakuka perencanaan integrasi SIMKIA dengan kab/kota - Kontak tetap dilakukan pada kondisi risiko tinggi, sedangkan yang normal, diupayakan pemantauan jarak jauh dan pemantauan mandiri dengan Buku KIA.	
				Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat						
				Jumlah POS UKK yang Terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas	Unit	193	195			
				Puskesmas yang melakukan penjaringan dini atau pembinaan kebugaran jasmani anak sekolahan melalui gerakan peregangan atau bermain pada jam istirahat (100%)	%	100	100			
				Kab/Kota Melakukan IKL TTU	Kab/Kota	5	5			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			Responsibility (CSR) dengan pihak swasta.	Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM (18.26%)	%	100	100			kesejahteraan Ibu dan Balita (Garba). Bersamaan dengan hal tersebut, tetap dilakukan *update* pengetahuan untuk petugas kesehatan mengenai tata laksana kesehatan ibu dan bayi, pendampingan ibu hamil risiko tinggi, dan pemantauan ibu hamil, bayi dan balita melalui buku KIA. Semua kegiatan tersebut dilakukan pada 2020 dan tetap dilanjutkan pada tahun 2021. Ada satu inovasi yang akan dikembangkan di tahun 2021 yaitu pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Terintegrasi Kesehatan Ibu dan anak (SIMKIA) yang akan mengintegrasikan semua sistem di provinsi dan 5 kabupaten/ kota. 2) Dalam rangka pencegahan stunting telah dilakukan kegiatan melalui anggaran DAK Non Fisik berupa pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita Kurus. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi percepatan
			4. Peningkatan Penyehatan Lingkungan serta implementasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) melalui pembinaan dan pengawasan bersama dengan Puskesmas	Kesepakatan Strategi Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1			
				TTU yang memenuhi syarat (92%)	%	100	100			
				Dukungan Mitra Ormas dalam Desa Siaga	Mitra	20	20			
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Dilakukan Verikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa	50	50			
			5. Peningkatan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri (49,77%)	%	100	100			
				Dukungan Mitra Ormas dalam Germas	Mitra	20	20			
			6. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit menular seperti tenaga epidemiologi, sanitasi dan	Pembentukan Pos UKK wilayah Kerja Puskesmas (60.33%)	%	100	100			
				Kampanye Kesehatan	Jenis	3	3			
				Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga						
				Pendampingan ibu hamil oleh tenaga terlatih	Orang	1500	1500			
				Kabupaten/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi	Kabupaten	3	3			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			laboratorium terutama mengantisipasi jika terjadi wabah	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4) (75 %)	%	100	87,04			perbaikan kualitas gizi masyarakat sekaligus sebagai upaya promosi secara langsung tentang pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil dan balita kurus.
			7. Deteksi dini secara pro-aktif untuk penyakit menular	Sosialisasi Hasil Riset Gizi	Orang	150	150			
			8. Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Penurunan Persentase Ibu Hamil; Kurang Energi Kronik (KEK) (0,2 %)	%	100	0			3) Dalam upaya menemukan dan mengobati penyakit menular terutama tuberkulosis (TB) untuk mencapai tujuan zero TB pada tahun 2030 dilakukan penguatan sistem pembinaaan dan pengawasan (Binwas) antara lain: (a) koordinasi dan Advokasi lintas sektor, LSM, dan organisasi profesi (b) Pengembangan alur dan sistem rujukan Tes Cepat Molekuler (TCM), dan rujuk balik pasien TB Resisten Obat (RO) ke Puskesmas satelit (c) Penguatan jejaring di dalam maupun luar DIY (d) Pengembangan Layanan TB RO di RS Pemerintah yang telah ditunjuk (e) Pengembangan alur rujukan dan Pelatihan manajemen TB DOTS, (f) Orientasi Public Private Mix (PPM) bagi
				Penurunan Persentase Balita Kurus (0,2 %)	%	100	0			
			9. Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 87%	%	100	0			
				Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat (DAK)						
				Dukungan Implementasi Health Campus	Kampus	10	10			
			10. Penguatan tenaga SDM Kesehatan melalui pelatihan dan perijinan	Jumlah Lintas Sektor/Perwakilan Masyarakat Terpapar Informasi Penanggulangan Bencana	Orang	2500	2500			
			11. Penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan	Pelaksanaan Posyandu di seluruh wilayah kerja puskesmas	%	100	100			
			12. Pengembangan pembiayaan jaminan	Rekomendasi Hasil audit kematian ibu/ bayi	Rekomendasi	11	11			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			kesehatan penyangga sebagai komplemen dan suplemen	Kesepakatan lintas program - lintas sektor dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Posyandu	Dokumen	1	1			Kabupaten/Kota, (g) Pelatihan/On Job Training (OJT) TB RO bagi Tim TB RO di RS dan manajemen TB RO di kabupaten kota (h) melibatkan peran Lintas sektor dalam penemuan kasus, (i) Monev peran PPM dalam intensifikasi penemuan kasus, dan utilisasi Tes Cepat Molekuler (TCM), (j) Membangun sistem pelaporan dan feedback bagi klinik dan Dokter Praktik Mandiri, (k) Monev SR dan pelaksanaan jejaring TB Sensitif Obat (SO) dan TB RO, dan (l) Monev hasil pelatihan dan pengembangan Layanan TB RO. Strategi integrasi dalam upaya di atas dilaksanakan dengan cara Pengembangan MoU dengan lintas sektor, Intensifikasi penemuan kasus dengan penetapan petunjuk teknis, integrasi program, penyusunan pedoman dan SPO, dan Pelibatan lintas sektor untuk mendorong pasien
			13. Penguatan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi	Stakeholder meningkat pemahamannya terkiat stigma HIV AIDS	Orang	60	60			
				Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK) (0,5 %)	%	100	100			
				Kampanye kesehatan	Jenis	3	3			
				Juklak/Juknis Institusi Sejahtera	Dokumen	1	1			
				Penurunan Persentase Balita Kurus (0,2 %)	%	100	100			
				Fasyankes dan Perusahaan tersosialisasi PAK	Unit	40	40			
				Kab/Kota Berkomitmen untuk Mengimplementasikan Penanggulangan Diare sesuai Standar	%	100	100			
				Peralatan Penanggulangan Covid-19	Paket	5	5			
				Media Promosi Kesehatan Paru	Jenis	10	10			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Sampel Penyakit Potensi KLB	Paket	1	1			TB RO memulai dan menyelesaikan pengobatan. 4) Upaya agar masyarakat tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan selama pandemi Covid-19 terkait Germas dilaksanakan melalui koordinasi pelaksanaan Posyandu New Normal, koordinasi desa siaga Covid-19, penyusunan protokol kesehatan pada tatanan kab/kota sehat, dan edukasi pemakaian masker kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menguatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan terkait Germas dengan cara penyelenggaraan kab/kota sehat, TTU di sekolah, pasar, dan hotel, penguatan STBM, lomba pasar sehat, dan sertifikasi higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA
				Pelaksanaan K3 di perusahaan dan fasyankes	Unit	40	40			
				Insentif Tenaga Kesehatan untuk Penanganan Covid-19	Paket	1	1			
				Nakes meningkat pemahamannya tentang Implementasi PISPK indikator KIA	Orang	30	30			
				Bahan kimia penanggulangan Covid-19	Jenis	2	2			
				Puskesmas mendukung penanggulangan Covid-19	%	100	100			
				APD sanitarian	Jenis	1	1			
				Penilaian Aksi Konvergensi Stunting	Dokumen	1	1			
				Model Sekolah Sehat dilakukan pembinaan	Dokumen	2	2			
				Cetak media promosi kesehatan lingkungan	Jenis	1	1			
				Fasyankes tersosialisasi pengelolaan limbah medis sesuai standar	Unit	40	40			
				RKA DAK 2021 Dinkes DIY	Dokumen	1	1			
				Informasi kesehatan di kab/kota	Kab/Kota	5	5			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kab/Kota diketahui upaya perbaikan gizi dan penurunan stunting	Kab/Kota	3	3			YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH 1. Dalam upaya menekan laju pertumbuhan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di DIY, kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) pada tahun 2020: a. Pertemuan Perencanaan Penganggaran bersama Bappeda dan OPD DIY Tahun 2021 diharapkan OPD masih terlibat aktif dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di DIY b. Pelatihan Fasilitator HIV bagi disabilitas yang dilakukan 1 kali bagi Disabilitas bisu dan Tuli, 1 kali Pelatihan Disabilitas Netra, fisik, dan mental pada bulan Maret 2020. Tantangan yang dihadapi oleh KPAD saat ini: 1) Perlunya Kolaborasi HIV dan Covid-19 dalam Kebijakan mekanisme layanan, Pendampingan, termasuk Media bagi ODHA dan Masyarakat umum (Media yg harus disiapkan), 2) Adanya pandemi Covid-19
				Persentase penderita HIV yangmenerima pengobatan ARV	%	68	68			
				Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4) (75%)	%	100	100			
				Mahasiswa/Usia Produktif Dilakukan Skrining Kesehatan	Orang	5000	5000			
				Workshop Ujicoba Modul Pendampingan Ibu Hamil (OSOC)	Dokumen	1	1			
				Kesepakatan Penanggulangannya Diare	Dokumen	1	1			
				Media promosi kesehatan	Jenis	10	10			
				Penanggulangan Diare Terpadu	Kab/Kota	5	5			
				Media promosi Kesehatan Keselamatan Kerja	Jenis	1	1			
				Rencana usulan DAK 2021 DIY	Dokumen	1	1			
				Instutui/OPD Berkomitmen Mengimplementasikan Institusi Sejahtera	Institusi	100	100			
				Persentase Penanggulangan	%	100	100			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kejadian Luar Biasa (KLB)						menyebabkan kegiatan koordinasi tatap muka dihentikan sementara, koordinasi dilakukan melalui whatshapp dan telepon, 3) Selama 3 bulan koordinasi dengan Pendamping ODHA dan Pengurus *Shelter* ODHA terkait obat ARV yang terhambat bagi teman-teman ODHA,
				Kesepakatan Tindak Lanjut Intervensi Promkes dalam PIS PK	Dokumen	1	1	target sudah terpenuhi sejak tahun 2019	merekomendasikan merubah indikator dari persentase puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan Pendekatan Keluarga dengan indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)	
				Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga (DAK)						c. Kolaborasi Webinar kerja sama KPA DIY dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Meeting Expert HIV tanggal 20 Juni 2020, melalui Meeting Zoom dan Chanel Youtube Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPAD di tahun 2021: 1) Koordinasi rutin Lintas Sektor, 2) Koordinasi Perencanaan Penganggaran, 3) Koordinasi dengan Populasi Kunci, 4) Koordinasi Panti Sosial Anak u menyiapkan Anak-anak yg yatim piatu karena ortu meninggal HIV, 5) Pemetaan Populasi Kunci 2021
				Penurunan Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (0,25 %)	%	100	100			
				Balita kurus mendapatkan makanan tambahan	Orang	3557	3557			
				Ibu Hamil KEK mendapatkan Makanan Tambahan	Orang	3808	3808			
				Penurunan Persentase Balita Kurus (0,1 %)	%	100	100			
				PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT						
				Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	58.92	59.12			
				Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah						

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Persentase Pengamatan Epidemiologi kurang dari 24 jam	%	100	100			2. Dalam upaya mewujudkan membangun masyarakat tangguh dan tanggap bencana yang dilakukan oleh PMI melalui tujuan strategis meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta penyakit melalui program-program kesiapsiagaan, kesehatan, dan sosial, serta pelayanan kesehatan rujukan. Tujuan tersebut dirinci dalam *outcome* Kapasitas PMI dalam mengelola program-program berbasis masyarakat di bidang kesiapsiagaan dan kesehatan meningkat. a. Output 1: Perangkat penunjang program-program berbasis masyarakat di bidang kesiapsiagaan dan kesehatan (seperti Media KIE, alat peraga, perangkat M&E) tersedia secara memadai Kegiatan yang dilakukan oleh PMI dalam mewujudkan output 1 adalah: 1) Workshop Inisiasi Program Berbasis Masyarakat, 2) Mencetak dan mendistrubusikan media KIE, perangkat M & E dan alat peraga penunjang program-program berbasis PMI DIY, 3)
				Anak Baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	%	91	91			
				Anak kurang dari 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%	96	96			
				Jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I/jumlah seluruh anak baduta (92,05%)	%	100	100			
				Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) (100%)	%	100	100			
				Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular						
				Hibah kelembagaan KPAD	Rp	500000000	500000000			
				Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan deteksi dini kanker (Sadanis dan IVA Test)	Kab/Kota	5	5			
				Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa (60%)	%	100	100			
				Jumlah Kab/ Kota yang melakukan posbindu sesuai standar	Kab/Kota	5	5			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini sadanis dan IVA tes> 3 persen dari total WUS (20%)	%	100	100			Simulasi Penanggulangan Bencana b. Output 2: Kegiatan-kegiatan program-program berbasis masyarakat di bidang kesiapsiagaan dan kesehatan dilaksanakan oleh pegawai/sukarelawan/fasilitator yang kompeten di PMI semua tingkatan Kegiatan yang dilakukan oleh PMI dalam mewujudkan output 2 adalah: 1) Kampus Siaga Bencana - Tersedianya kerja sama (MoU) antara PMI DIY dan Perguruan Tinggi, di antaranya adalah Universitas Ahmad Yani, Poltekes Kemenkes dan Universitas Guna Bangsa - Simulasi kesiapasiagaan bencana 2) Sekolah Siaga Bencana - Kesiapsiagaan Bencana, dalam hal ini "Ayo Siaga bencana" termasuk salah satu kurikulum pembelajaran Palang Merah Remaja dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA - Sekolah Siaga Bencana - Kerja sama PMI dengan beberapa sekolah
				Persentase kab/kota yang cakupan pneumonia lebih dari 60 % (60%)	%	100	100			
				Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan skrining jiwa	Kab/Kota	5	5			
				Jumlah Klinik yang melaksanakan strategi DOTS	Klinik	75	75			
				API (Annual Parasite Incidence) (kurang dari 1 permil)	%	100	100			
				Persentase penderita HIV yangmenerima pengobatan ARV (68%)	%	100	100			
				Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV	Faskes	30	30			
				Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia	%	83.76	83.76			
				Persentase cakupan penemuan TB (36%)	%	100	100			
				Persentase kab/ kota yang memiliki 10	%	100	100			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				persen pandu PTM (60%)						ditindaklanjuti dengan pelatihan dan simulasi - Program Manajemen Kebersihan Menstruasi 3) Program Kesiapsiagaan Bencana berbasis Masyarakat - Pelatihan dan Simulasi Program kesiapsiagaan berbasis keluarga - Desa binaan melalui siaga bencana berbasis masyarakat (SIBAT) - Pelatihan pertolongan pertama untuk masyarakat - Kampanye keselamatan jalan raya
				Persentase kab/ kota dengan ABJ > 80 % (40%)	%	100	100			
				Persentase kab/kota yang memiliki 1 posbindu per desa (20%)	%	100	100			
				Jumlah kabupaten/kota yang melakukan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)	Kab/Kota	5	5			
				Jumlah kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	Kab/Kota	5	5			
				Jumlah DPS yang tersosialisasikan ISTC (International Standart For Tuberculosis Care)	DPS	100	100			
				PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN						
				Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	48.08	44.47	Selama pandemi Covid-19 kegiatan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan ditunda	Menyesuaikan kebijakan dan regulasi yang ada terkait proses akreditasi dimasa pandemi	
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain						

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Hibah Kelembagaan PMI	Rp	500000000	500000000			
				Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan	RS	60	60			
				Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	Puskesmas	100	100			
				Terbangunnya RSUD Wates sesuai spesifikasi dan tepat waktu	%	100	100			
				Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	Faskes	30	30			
				Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan pelayanan	Lab	2	2			
				Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan	Klinik	30	30			
				FKTP dan FKTL yang memenuhi standar pelayanan (213 Faskes)	%	100	100			
				Pengadaan panel LVMDP, IPAL, trafo, kabel feeder, ruang OK 4 pada RSUD WATES	Jenis	5	5			
				BKK tahap III RSUD Wates	%	100	100			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain						
				Tim FKTP Berprestasi	Dokumen	2	2			
				RS yang mendapatkan pembinaan mutu	RS	60	60			
				Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) dan pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar manajemen mutu dan manajemen pelayanan (204 Faskes)	%	100	100			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN						
				Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	Persen	76.79	73.9	Kegitan pembinaan dan monev terkait penerapan standar di Fasyankes dan sarprodis kefaramsian tidak bisa di lakukan karena pembatasan perjalanan dinas dan juga rasionalisasi anggaran	Mengupayakan penganggaran kegiatan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan kondisi situasi pandemi	

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan, SDMK dan Pembiayaan	%	73,9	62.32	pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana di FKTP dan FKTL, penilaian nakes teladan, Pengembangan integrasi Sistem Informasi tenaga dan sarana kesehatan belum dapat terealisasi karena adanya *refocussing* anggaran karena Covid-19	Mengupayakan penganggaran kegiatan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan kondisi situasi pandemi	
				Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan						
				Sarana Kesehatan mendapat visitasi untuk rekomendasi perijinan	%	100	100			
				Tenaga kesehatan yang terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan	Tenaga Kesehatan	25	25			
				FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	FKTL	6	6			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana 83,67%	%	100	100			
				Pembinaan Wahana Program Dokter Internsip Indonesia (PIDI)	Wahana	17	17			
				Pembinaan perijinan tenaga dan sarana kesehatan	Kabupaten/ Kota	5	5			
				Tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	%	100	100			
				FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	FKTP	121	121			
				Pembinaan Organisasi Profesi	Organisasi Profesi	20	20			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keshatan Tingkat Lanjutan (FKTL)						
				Perbekkes (Perbekalan Kesehatan) dan obat bufferstock	Paket	1	1			
				Puskesmas dan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian	Fasyankes	3	3			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Obat Indikator Tersedia (40 Jenis)	%	100	100			
				Meningkatnya Mutu Pelayanan Kefarmasian, sediaan farmasi dan Perbekes serta pengendalian makanan (3 sarana)	%	100	100			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keshatan Tingkat Lanjutan (FKTL) (DAK)						
				Jumlah pengiriman obat dan perbekes	Kali	12	12			
				Obat dan perbekes terdistribusi (5 Kab/Kota)	%	100	100			
				PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES						
				Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat	layanan	11	13			
				PROGRAM PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES						
				Persentase mantan linatih yang meningkat kompetensinya	%	64	88,76			
				PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS						
				Penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	100			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Jenis layanan jaminan kesehatan Komplemen dan Suplemen kesehatan	layanan	25	26			
				PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA						
				Angka keberhasilan pengobatan (sucsess rate) TB	%	84	74,19	terdapat 3 orang yang secara pencatatan masuk dalam kategori Do/ drop out	Menekan kasus gagal pengobatan sehingga tidak menjadi kategori 2 yang waktu untuk pengobatannya lebih lama dan beriko menjadi TB resisten obat	
				Angka kematian Pasien > 48 jam	%	1,5	1,07			
				Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari	hari	80	49,56	adanya pandeminya Covid-19 menyebabkan RSP Respira harus membatasi jumlah kunjungan pasien dan harus selektif dalam menerima pasien rawat inap.	Menerapkan protokol kesehatan dalam memberikanpelayanan kepada pasien	
				Bed Occupancy Rate (BOR)	%	60	18,45	Adanya pandemi BOR mengalami penurunan	Menerapkan protokol kesehatan dengan menguatamakan pencegahan	

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
									penyebaran/penularan Covid-19	
				Length of stay (LOS)	%	5	2,82			
				PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA						
				Penyelesaian berkas klaim pasien jaminan kesehatan	%	78	78			
				Penyusunan laporan tahunan RS	%	83	83,00	-		
				Pemenuhan SDM sesuai ABK	%	88	87			
				Keseuaian inventarisasi barang RS	%	90	90			
				Persentase pasien yang mampu ADL (activity daily living)	%	88	89,06			
				Angka pasien cidera karena fiksasi	orang	3	0			
				Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit	%	86	86			
				Rata-rata jam pelatihan karyawan dalam setahun	%	75	79,88			
				Waktu tunggu pelayanan rawat jalan jiwa ≤ 60 menit	%	69	69		-	
				Tingkat penggunaan tempat tidur (Bed occupancy rate/BOR)	%	62	55,04	BOR mengalami penurunan dampak adanya pandemi	Menerapkan protokol kesehatan sehingga tetap dapat memberikan pelayanan rawat inap serta membuka ruang	

No	Urusan Pemerin-tahan	Organi-sasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								Covid-19 dan rujukan berjenjang oleh BPJS berakibat Puskesmas tidak dapat langsung merujuk ke RS Jiwa Grhasia	perawatan Covid-19 untuk ODGJ	

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Sub Urusan Pekerjaan Umum

(1) Kondisi Umum

Sebagaimana telah tertuang dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakaryaan (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya) serta Sub Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sub Urusan Sumber Daya Air dilaksanakan menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Pemda DIY dalam pelaksanaan Sub Urusan Sumber Daya Air mengelola 41 Daerah Irigasi Kewenangan DIY dengan total luasan areal oncoran sebesar 13.987 ha yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) daerah irigasi lintas kabupaten/kota dan 6 (enam) daerah irigasi utuh dengan luasan (1000 – 3000 ha) yang berada di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai tahun 2020, Pemda DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 25 embung dan tersebar di DIY dengan rincian: 1) Kabupaten Sleman 8 (delapan) unit; 2) Kabupaten Bantul 3 (tiga) unit; 3) Kabupaten Kulon Progo 4 (empat) unit; 4) Kabupaten Gunungkidul 9 (Sembilan) unit; dan 5) Kota Yogyakarta 1 (satu) unit. Adapun pelaksanaan pengelolaan sungai di DIY merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sub Urusan Jalan memegang peranan penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan aksesibilitas di wilayah DIY. Dengan panjang jaringan jalan Nasional sepanjang 247,91 km dan jaringan jalan provinsi sepanjang 760,45 km (SK Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi), maka perlu dilakukan pengembangan fungsi jalan dan selalu

mempertahankan status jalan provinsi dalam kondisi mantap. Pengembangan jaringan jalan yang dikembangkan antara lain Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Prambanan - Gading, serta rintisan Bedah Menoreh. Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral.

Sub Urusan Keciptakaryaan dalam hal ini adalah Sub Urusan Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan, dan Lingkungannya dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Sub Urusan Jasa Konstruksi melalui Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berperan dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan uji laboratorium konstruksi dengan mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Sasaran Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 meliputi: 1) Penduduk Berakses Sanitasi, 2) Penduduk Berakses Air Minum, 3) Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi, 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah, dan 5) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi yang diukur menggunakan lima indikator kinerja sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.72. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Realis-asi		
1	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	%	96,62	92,47	96,46	104,31	94,25	102,34
2	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	%	91,30	90,49	92,82	102,57	94,14	98,60
3	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	84,14	84,75	84,85	100,12	86,25	98,38
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	%	97,56	96,74	98,03	101,33	101,33	98,03
5	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	64,80	73,14	75,13	102,72	99,57	75,45

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2021

(a) Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi sebagai upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dan melalui dukungan APBN dan APBD Kabupaten, jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 3.744.714 jiwa atau setara dengan 96,46% dari jumlah penduduk DIY sejumlah 3.882.288 Jiwa (Dataku, 2021). Sampai dengan akhir tahun 2020 persentase capaian penduduk berakses sanitasi telah mencapai 104,31% dari target sebesar 92,47%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

- *Penanganan air limbah terpusat*

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan

penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan.

Penambahan jumlah sambungan rumah air limbah Sistem IPAL Terpusat Sewon untuk tahun 2020 dibatasi karena kapasitas IPAL yang sudah melebihi kapasitas rencana. Pada tahun ini dengan kontrak tahun jamak, APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah melakukan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kapasitas IPAL Regional Sewon untuk menambah kapasitas IPAL Sewon. Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2019 adalah 25.018 SR dan pada tahun 2020 terbangun sambungan rumah sebanyak 276 SR, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.73. Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)		
		s.d 2019	2020	s.d 2020
1	Kota Yogyakarta	18.421	145	18.566
2	Kabupaten Bantul	2.869	30	2.899
3	Kabupaten Sleman	3.728	101	3.829
Jumlah Total		**25.018**	**276**	**25.294**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2021

Selain peningkatan kapasitas IPAL Regional Sewon yang dilaksanakan oleh APBN sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan akses sanitasi aman di DIY, APBN melalui BPPW DIY pada tahun 2020 juga melaksanakan pembangunan sebagai berikut:

- Pembangunan SPALDT Depok Sleman mencakup area pelayanan Kecamatan Depok.
- Pembangunan SPALDT Bambanglipuro Bantul yang mencakup area pelayanan Kecamatan Bambanglipuro dan Kecamatan Bantul.

- *Penanganan air limbah berbasis masyarakat*

Program Sanimas merupakan program pemerintah dalam meningkatkan akses sanitasi di suatu daerah yang berbasis masyarakat. Pada tahun 2020, BPPW DIY melaksanakan Program Sanimas di 10 lokasi DIY dengan rincian empat lokasi di Kabupaten Sleman, lima lokasi di Kabupaten Bantul, dan satu

lokasi di Kabupaten Gunungkidul. Selain Program Sanimas terdapat program DAK Sanitasi yang mana pada tahun 2020, terdapat 24 lokasi sasaran dengan rincian 12 lokasi pelaksanaan pembangunan IPAL Komunal dan 12 lokasi pelaksanaan pembangunan tangki septik individual. Jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sampai dengan akhir tahun 2020, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.74. Jumlah IPAL Komunal Sampai Dengan Tahun 2020

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	58
2	Kabupaten Bantul	145
3	Kabupaten Sleman	144
4	Kabupaten Gunungkidul	72
5	Kabupaten Kulon Progo	37
Jumlah Total		**456**

Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2021



Gambar 3.25. IPAL Komunal

(b) Sampah

Volume timbunan sampah di DIY tahun 2020 adalah 1.366,79 ton/hari. Sampah yang tereduksi di rumah tangga baik secara mandiri, melalui bank sampah, pengolahan di TPS3R, maupun pemulung di DIY adalah sebesar 198,26 ton/hari atau 14,51% dari volume timbulan sampah. Sementara itu, sampah yang ditangani oleh sistem kota berupa pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pemrosesan sebesar 772 ton/hari atau 56,54% dari volume timbulan sampah. Masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola di DIY sebesar 395,8 ton/hari atau 28,96%. Neraca Pengelolaan Sampah DIY Tahun 2020 (ton/hari) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.75. Neraca Pengelolaan Sampah DIY Tahun 2020 (ton/hari)

No	Keterangan	Realiasasi 2020					
		Kota Yogyakarta	Kab Bantul	Kab Kulon Progo	Kab Gunung-kidul	Kab Sleman	DIY
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	364,15	381,46	94,58	80,32	446,28	1.366,79
II	SAMPAH TERKELOLA	359,23	179,56	52,13	69,82	310,25	970,99
	Persentase sampah terkelola	98,65%	47,07%	55,12%	86,93%	69,52%	71,04%
a.	PENGURANGAN (TPS3R, BANK SAMPAH DLL)	90,85	43,46	8,93	22,21	32,81	198,26
	Persentase pengurangan	**24,95%**	**11,39%**	**9,44%**	**27,65%**	**7,35%**	**14,51%**
b.	PENANGANAN (DIANGKUT KE TPA)	268,38	136,10	43,20	47,61	277,44	772,73
	Persentase Penanganan	**73,70%**	**35,68%**	**45,68%**	**59,28%**	**62,17%**	**56,54%**
III	SAMPAH BELUM TERKELOLA	4,92	201,90	42,45	10,50	136,03	395,80
	Persentase sampah belum terkelola	1,35%	52,93%	44,88%	13,07%	30,48%	28,96%

Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2021

Terdapat 3 (tiga) unit TPA di DIY yaitu 1) TPA regional (TPA Piyungan) yang melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, 2) TPA Baleharjo (Kabupaten Gunungkidul), dan 3) TPA Banyuroto (Kabupaten Kulon Progo). Volume total layanan 3 unit TPA tersebut kurang lebih 772,73 ton/hari.

Tabel 3.76. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional)

No	Wilayah	Jumlah TPA (unit)	Volume yang masuk (ton/hari)
1	Kota Yogyakarta	1	268,38
2	Kabupaten Bantul		136,10
3	Kabupaten Sleman		277,44
4	Kabupaten Gunungkidul	1	47,61
5	Kabupaten Kulon Progo	1	43,20
Jumlah Total		**3**	**772,73**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2021

Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, pada tahun 2020 telah dilakukan kegiatan berupa:

- Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Pengembangan TPA Piyungan
- Kajian Pengembangan Lahan TPA Piyungan

- Perencanaan pembuatan talud saluran lindi TPA Piyungan
- Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan: 450 m

Selain itu, APBN melalui BPPW DIY telah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan dengan melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Piyungan. Kegiatan ini dilaksanakan secara tahun jamak yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Selain pekerjaan di TPA Piyungan, BPPW DIY melaksanakan pembangunan TPS 3R di 2 lokasi yaitu Playen Gunungkidul dan Pakem Sleman.



Gambar 3.26. Pelaksanaan Pekerjaan Tanggul Penahan Dinding, Drainase, Saluran Lindi dan Jalan di TPA Piyungan

(c) Drainase

Kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2020 oleh Dinas PUPESDM DIY melalu bidang Sumber Daya Air dan Drainase sebagai upaya mengurangi titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yaitu: 1) Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC) dan 2) Pemeliharaan Saluran Drainase di Jalan Teknika Utara Simpang MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

(d) Jumlah Penduduk Berakses Air Minum

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum layak. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum

dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY.

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta dukungan dari APBN Ditjend Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, hingga tahun 2020 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 92,82% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.603.459 jiwa. Sampai dengan akhir tahun 2020 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 102,57% dari target sebesar 90,49% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 telah tercapai sebesar 98,59%.

Tabel 3.77. Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Tahun 2020

No	Kabupaten	Perpipaan	Non Perpipaan	Belum Ada Akses
1	Sleman	340.444	875.391	16.763
2	Bantul	155.221	823.483	51.294
3	Yogyakarta	100.658	335.278	-
4	Gunung Kidul	268.540	270.788	209.947
5	Kulon Progo	154.111	279.546	826
Jumlah		**1.018.973**	**2.584.486**	**278.829**
Total Akses Air Minum		**3.603.459**		
Capaian Akses		**92,82%**		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2021

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana APBN, telah dilakukan Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Tahap II dengan kapasitas 300 liter/detik. SPAM Regional Kartamantul yang dilaksanakan merupakan Sistem Kebon Agung yang akan melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan secara tahun jamak yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Selain pelaksanaan SPAM Regional, Program Pamsimas untuk 30 desa juga merupakan program yang dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan air minum di DIY.



Gambar 3.27. SPAM Regional Kartamantul (Sistem Bantar)

(e) Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi

Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengatur bahwa SPM Bidang Sumber Daya Air merupakan rasio antara rencana pemberian air irigasi dengan realisasi pemberian air irigasi. Realisasi sampai akhir tahun 2020 luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 84,85% dari luas areal daerah irigasi DIY. Dengan demikian meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi telah mencapai 100,12% dari target sebesar 84,75%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 telah mencapai sebesar 98,38%. Realisasi Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2020 adalah 11.868,48 ha dari luas total areal Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan DIY sebesar 13.987 ha sehingga persentase capaian sebesar 84,85%.

Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Rehabilitasi Jaringan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Pijenan/Kamijoro yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi.
- Pengelolaan Jaringan Irigasi yang mencakup 41 daerah irigasi kewenangan DIY.

(f) Peningkatan aksesibilitas Jalan

Dalam rangka melayani perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat perlu diakomodasi oleh sistem infrastruktur yang tepat bagi masing–masing tingkat perkembangan maupun potensi yang dimiliki disetiap satuan wilayah. Pemahaman mengenai kebutuhan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tersebut mutlak diperlukan agar lebih menghasilkan manfaat, Terutama prasarana jalan yang memainkan peran penting sebagai prasarana distribusi lalulintas barang dan manusia maupun sebagai salah satu prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan kapasitas dan struktur prasarana jalan yang ada atau dengan pembangunan jalan baru. Selain itu perlunya perhatian khusus bagi daerah daerah perbatasan dan semi terisolir untuk mendapatkan aksesibilitas sarana jalan secara maksimal sehingga meningkatkan kelancaran dalam arus kegiatan baik sosial maupun ekonomis yang diharapkan berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah tersebut.

Pada Tahun 2019 yaitu terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 13,5 km atau 97,56% dari target 95,76%. Jadi sampai tahun 2019 total panjang jalan yang terbangun mencapai 971,81 km dari total kebutuhan panjang jalan yang direncanakan sepanjang 996,16 km. Formulasi perhitungannya adalah jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan X 100 % = (971,81 km/996,16 km) x 100% = 97,56%.

Realisasi capaian tahun 2020 yaitu terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 18,2 km atau 98,03% dari target 96,74%. Jadi sampai tahun 2020 total panjang jalan yang terbangun mencapai 976,51 km dari total kebutuhan panjang jalan yang direncanakan sepanjang 996,16 km. Formulasi perhitungannya adalah jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan X 100 % = (976,51 km/996,16 km) x 100% = 98,03%.

(g) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Dengan berlandaskan ketentuan tersebut, sasaran peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi dirumuskan ke dalam indikator persentase capaian program,yang dihitung berdasarkan sub-capaian kinerja untuk dua kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi (bobot 50 persen); dan
- Kegiatan Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi (bobot 50 persen).



Gambar 3.28. Pengambilan Sampel *Core-Drill* Aspal Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di DIY dilaksanakan melalui program Pelayananjasa Pengujian dan Pembinan Jasa Konstruksi. Pada tahun 2020 layanan Jasa Pengujian dilakukan melalui layanan penerbitan sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 765 Dokumen LHU . Adapun pembinaan jasa konstrksi dilakukan melalui layanan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi dan

layanan sistem informasi konstruksi yang dilakukan secara tatap muka/sosialisasi/pembinaan, penyebaran informasi, pameran teknologi ke-PU-an dan klinik kostruksi.

Pada tahun 2020 talah telah dilakukan sertifikasi terhadap 30 orang Tenaga ahli Konstruksi dari target 300 orang dikarenakan keterbatasan pertemuan saat pandemi. Adapun layanan penerapan sistem informasi jasa konstruksi telah di akses sejumlah 444.268 orang dari target 419.360 orang melalui website klinik konstruksi, dan akses informasi di media sosial youtube; serta melalui penyediaan data informasi di aplikasi SIPJAKI yang tercapai 70%.

(2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada Tahun Anggaran 2020, jumlah alokasi dana untuk pelaksanaan Sub Urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp102.044.229.392,00 yang dilaksanakan melalui sembilan Program dengan 29 Kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi keuangan sebesar Rp85.160.029.381,00 (83,45%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah permukiman skala regional pada kawasan permukiman padat penduduk yang tidak memungkinkan dengan skala kawasan atupun individual	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				1. ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan OP yang terbatas 2. Adanya kerusakan jaringan pipa air limbah dengan kategori yang cukup berat sehingga diperlukan alokasi dalam pendanaan untuk Rehabilitasi Jaringan perpipaan air limbah tersebut 3. Peralatan dan instalasi Air Limbah yang sudah tua (umur lebih dari 10 tahun)	1. penambahan Pipa lateral dan Induk Air Limbah 2. Melakukan investigasi terhadap laporan masyarakat terdampak kerusakan jaringan air limbah 3. Koordinasi dengan Instansi lain untuk melakukan Optimalisasi terhadap Instalasi IPAL	1. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN a. Sub Urusan Pekerjaan Umum Terkait penanganan penduduk berakses sanitasi, di IPAL Sewon sedang dilakukan peningkatan kapasitas pengelolaan menjadi 40.000 SR dari kapasitas sekarang sejumlah 25.000 SR. Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Untuk permasalahan sampah, saat ini telah dilakukan integrasi penanganan TPST Piyungan antara APBN dan APBD DIY guna meningkatkan fungsi layanan. Disamping itu perlu segera menindaklanjuti studi-studi terkait penanganan TPST Piyungan. Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan terpadu dari sumber hingga sampai di TPA perlu terus ditingkatkan. Kesadaran
			2. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem distribusi air minum	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	74.06.00	71.56.00	1. Fasilitas pendukung pengolahan air bersih masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan permintaan 2. Adanya perubahan perencanaan yang	1.Melakukan investigasi terhadap permasalahan teknis maupun non teknis 2. Melakukan investigasi permasalahan, koordinasi dengan instansi terkait, dan melakukan percepatan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								berbeda dengan kondisi lapangan baik teknis maupun non teknis	pekerjaan lapangan	masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri mempunyai peran sangat penting. Peningkatan pengelolaan sampah di tingkat TPS, TPS 3R, TPST, maupun bank sampah perlu dilaksanakan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA yang kapasitasnya juga terbatas. Sedangkan untuk drainase, pengurangan titik genangan di kawasan perkotaan Yogyakarta (KPY) akan terus ditingkatkan untuk mengurangi lama genangan yang selama ini terjadi selama 3 jam. 2. Tindak lanjut Rekomendasi terkait Penduduk DIY yang berakses air minum dengan standard kesehatan perlu terus ditingkatkan. Masih ada sebagian warga DIY yang kesulitan air minum. Terutama di wilayah Gunungkidul, sebagian Bantul, Kulon Progo dan sebagian Sleman.
			3. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air irigasi	Penambahan Jaringan Jalan Baru	%	46.99	48.08.00	Alih Fungsi Lahan pertanian yang tidak bisa dikendalikan	Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
			4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Provinsi	**Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan**				1. Proses pembebasan lahan oleh Pemkab Gunungkidul yang tidak sesuai jadwal/ terlambat 2. Lokasi pekerjaan yang sebagian menggunakan tanah milik Kementerian Kehutanan, memerlukan pencermatan dan koordinasi	1. terus memonitor dan berkoordinasi dengan Pemkab GK terkait proses pembebasan lahan 2. berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan	
			5. Dukungan penguasaan teknologi dan penyebarluasan informasi bidang ke PU an dan	Peningkatan Jalan Semin - Blimbing, Gunungkidul	km	2	2	Kuota fasilitasi sertifikasi kompetensi belum dimanfaatkan secara optimal oleh beberapa	mendorong peran aktif Asosiasi Profesi yang belum berkontribusi secara optimal	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			pelayanan jasa pengujian					Asosiasi Profesi sektor konstruksi		Program strategis SPAM regional segera beroperasi dan dapat mencukupi kebutuhan air minum dan air bersih bagi warga DIY. Untuk daerah-daerah yang rawan air minum pemerintah DIY perlu mencari solusi dengan memanfaatkan model seperti embung, telaga buatan dan sebagainya: Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum di DIY, salah satu program Pemda DIY adalah penyelenggaraan SPAM Regional. Progres penyelenggaraan SPAM Regional sebagai berikut: a. Pembangunan SPAM Regional Kartamantul telah dilaksanakan untuk tahap 1 yaitu Sistem Bantar dan telah dioperasionalkan oleh Balai PIALAMP dengan debit pengolahan sebesar 400 liter/detik untuk pelayanan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabaupaten Sleman. Untuk pembangunan SPAM Regional Kartamantul
			6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada kawasan permukiman di kecamatan miskin serta pemanfataan sumber daya mineral dan air tanah	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Pandanan - Candirejo	Dokumen	1	1	Keterbatasan aksen masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi/ pemberian bantuan stimulan bahan bangunan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.	Memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah akan pentingnya tempat tinggal yang layak huni serta mengupayakan bantuan stimulan berupa barang bahan bangunan serta stimulan upah tukang.	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunungkidul	Dokumen	1	1			
				Penyusunan DED Jembatan Buyutan Gunungkidul	Dokumen	1	1			
				DED Pembangunan Jembatan Kenet	Dokumen	1	1	-	-	
				Perencanaan Peningkatan Jalan	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Nglipar - Semin, Gunungkidul						tahap 2 yaitu sistem Kebon Agung dengan debit pengolahan sebesar 300 liter/detik direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2020-2021 oleh Kementerian PUPR. b. Intake Kamijoro yang berada di Bendung Kamijoro ini merupakan unit air baku untuk SPAM Regional Kamijoro. Unit air baku beserta sebagian jaringannya sudah dibangun oleh Kementerian PUPR. Untuk pembangunan unit produksi dan unit distribusi lainnya direncanakan akan dilaksanakan menggunakan skema KPBU. Saat ini Pemda DIY sedang menyusun dokumen prastudi kelayakan untuk Proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro. SPAM Regional Kamijoro direncanakan akan menyuplai kebutuhan air minum di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul
				DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul	Dokumen	1	1			
				Penyusunan DED Jembatan Bancang Gunungkidul	Dokumen	1	1			
				Kajian Pengembangan Jaringan Jalan Pendukung Jalur Jalan Lintas Selatan Segmen Parangtritis-Batas Bantul 1-Girijati	Dokumen	1	1			
				DED Peningkatan Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunungkidul	Dokumen	1	1			
				Dukungan kenaikan kondisi mantap jalan provinsi sebesar 0,07% (dari 73,46% menjadi rencana 73,53%)	%	100	100			
				Perencanaan Peningkatan Jalan Patuk - Terong, Bantul	Dokumen	1	1			
				DED Peningkatan Jalan Sambipitu - Nglipar - Semin, Gunungkidul	Dokumen	1	1			
				Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan Tahun 2020	Dokumen	1	1			serta kawasan strategis seperti YIA, Pelabuhan Tanjung Adikarto dan Kawasan Industri Pasir Besi. c. Penyusunan dokumen perencanaan SPAM Regional Banyusoco direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2021. Penyelenggaraan SPAM Regional Banyusoco direncanakan untuk menyuplai kebutuhan air minum di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. â€¢ Selain penyelenggaraan SPAM Regional, untuk memenuhi kebutuhan air minum di perdesaan, Pemda DIY melalui DPUPESDM DIY memberikan bantuan hibah berupa pipa dan accessoriesnya untuk kelompok Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta (PAMMASKARTA). Bantuan ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan
				Dukungan 72.54% terhadap kemantapan Jalan Provinsi sebesar: 74,06% berupa kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	%	100	100			
				Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jembatan Tahun 2020	Dokumen	1	1			
				Operasional Pompa dan Genset Kulur	Liter	3600	2294.11.00			
				Terpasangnya Jembatan Balley	Paket	1	1			
				Terpeliharanya Jembatan Provinsi (246 buah jembatan)	M	5727.08.00	5727.08.00			
				Terpeliharanya Jalan Provinsi (92 ruas jalan)	km	731.07.00	731.07.00			
				Persertifikatan Tanah Jalan Provinsi						
				Dukungan berupa ketertiban pengelolaan aset terhadap kemantapan jalan provinsi	%	100	100			
				SPS Permohonan Hak	SPS	400	355			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI						air minum perpipaan di perdesaan yang sulit terjangkau oleh pelayanan PDAM. Pengelolaan SPAM perdesaan ini dilaksanakan oleh masyarakat penerima sehingga masyarakat juga turut aktif dalam penyelenggaraan SPAM. Jenis sumber yang digunakan sebagai sumber air baku untuk SPAM Perpipaan di DIY adalah sumber air permukaan berupa sungai dan waduk serta sumber-sumber air tanah lainnya. Untuk pemanfaatan embung yang ada DIY belum dioptimalkan sebagai sumber air minum karena pemanfaatan embung lebih diperuntukkan untuk menjaga pelestarian sumber daya air dan sumber air baku untuk irigasi. 3. Tindak lanjut Rekomendasi terkait Optimalisasi usaha-usaha pelestarian sumber daya daya air, baik sumber
				Penanganan Lokasi genangan	Lokasi	1	0			
				Penanganan sampah sistem regional	Ton/hari	660	561.81			
				Layanan Sistem air limbah terpusat	SR	25200	25294			
				Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah						
				Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Pengembangan TPA Piyungan	(dokumen) Ketersedia	1	1			
				Kajian Pengembangan Lahan TPA Piyungan	(Dokumen) Penyusunan	1	1			
				Perencanaan pembuatan talud saluran lindi TPA Piyungan	dokumen perencanaan	1	1			
				Peningkatan sampah yang dikelola di TPST Regional menjadi sebesar 660 ton/hari	%	100	100			
				Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan	Meter	450	450			
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase						
				Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Center (JEC) 1000 meter						daya air hujan, air permukaan maupun airtanah, dengan rehabilitasi dan pemeliharaan sumber air, embung dan telaga telaga pada daerah yang minim akan sumber air bersih. Pendekatan kebudayaan pemenuhan dan pengelolaan air bersih harus dilakukan: Pemda DIY berupaya terus untuk melaksanakan pelestarian sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat termasuk pada daerah yang minim sumber air bersih. Upaya pelestarian tersebut dilaksanakan pada tampungan-tampungan air yang berupa embung. Upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi pada embung tersebut. Kegiatan pemeliharaan rutin berupa pekerjaan babat semak dan gali
				Dukungan pembangunan sistem saluran drainase terhadap Penanganan 1 Lokasi genangan	%	100	100			
				Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Lokasi	2	2			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
				Panjang jaringan distribusi SPAM regional	meter	91174	91447			
				Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	liter/ detik	750	750			
				Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						
				Dukungan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar terhadap penambahan panjang jaringan distribusi SPAM	%	100	100			
				Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dan Inverter	unit	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Tersedianya Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	unit	4	3			waled untuk menjaga fungsi embung dengan melibatkan tenaga operasional dari penduduk sekitar embung. Sedangkan kegiatan rehabilitasi dilakukan bila kerusakan embung telah mencapai lebih dari 40 %. Dalam rangka melaksanakan pelestarian sumber daya air tersebut, Pemda DIY juga melaksanakan kampanye pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan masyarakat pemerhati Sumber Daya Air dengan menggunakan pendekatan kebudayaan masyarakat lokal (local wisdom) antara lain yang dilaksanakan pada acara Kenduri banyu udan, Gerakan irigasi bersih, Hari Air Dunia, dll. Selain berupaya terus melestarikan sumber daya air dalam rangka mewujudkan keberlanjutan sumber daya air dan memenuhi kebutuhan air baku bagi warga DIY, Pemda DIY selalu mengupayakan
				Tersedianya Belanja Modal Locator Detektor Pipa	unit	1	1			
				Apraisal tanah untuk PDAB	dokumen	1	1			
				Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bak Injeksi Kaporit	unit	1	1			
				Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dozing	unit	2	2			
				Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo	Meter	90	90			
				Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur (Watermeter Digital)	unit	3	3			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU						
				Penyediaan Air Baku	liter/ detik	19.05	20			
				Pengelolaan Air Baku	liter/ detik	62.04.00	61.01.00			
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku						
				Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA	dokumen	1	1			
				Dukungan sebesar 179 % untuk penambahan air baku terhadap Program Pengelolaan dan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pengembangan Air Baku sebesar 19,5 liter/detik						penyediaan embung-embung baru. 4. Tindak lanjut Rekomendasi terkait Peningkatan luas fungsional daerah irigasi terus diusahakan. Hal ini akan dapat meningkatkan luas lahan produktif pertanian. Peningkatan luas fungsional daerah irigasi diharapkan tidak hanya besaran pada luasannya tetapi kualitas layanan daerah irigasi. Antara lain ditentukan kapasitas tenaga operasional irigasi dilapangan. Perlu dukungan dan fasilitasi terhadap tenaga operasional tersebut: Upaya Pemda DIY dalam rangka meningkatkan luas fungsional daerah irigasi yang teraliri air irigasi adalah dengan melakukan terus melaksanakan peningkatan jaringan irigasi yang banyak menyebabkan terjadinya kehilangan air irigasi. Upaya peningkatan jaringan irigasi
				Pengelolaan Air Baku						
				Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga	Embung	24	1			
				Dukungan mempertahankan air baku dari total sebesar 76,95 ltr/detik, guna mendukung Pemenuhan Ketersediaan Air Baku 62,4%)	%	100	100			
				Pengelolaan Web dan Data SISDA	Sistem/Aplikasi	1	1			
				Kampanye Pengelolaan SDA	Kegiatan	3	3			
				Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi	Pos Hidrologi	64	64			
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI						
				Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY	%	74.05.00	72.32.00			
				Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah	%	77.82	73			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				irigasi kewenangan Pemda DIY						dilaksanakan berdasar hasil penyusunan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI). Disamping peningkatan jaringan irigasi juga perlu untuk mempertahankan kondisi jaringan irigasi yang ada. Tujuannya agar dapat memberikan layanan yang baik. Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan pemeliharaan, baik permeliharaan rutin maupun berkala, termasuk selalu melaksanakan kalibrasi terhadap alat ukur pada bangunan ukur debit. Kegiatan operasional dan pemeliharaan rutin dilakukan oleh tenaga harian yang terus ditingkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi tersebut dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pembagian air dan pemeliharaan jaringan pada seluruh daerah
				Pengembangan Jaringan Irigasi						
				Dukungan Pengembangan Jaringan Irigasi sebesar 2,20 % terhadap Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY sebesar 74,50%	%	100	100			
				Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi	Daerah Irigasi	41	41			
				DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul	dokumen	1	1			
				Pengelolaan Jaringan Irigasi						
				Dukungan untuk mempertahankan Luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 4,86 % guna mendukung Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi sebesar 77,82%	%	100	100			
				Koordinasi Tata Pengaturan SDA (Masyarakat P3A/GP3A/IP3A)	Daerah Irigasi	41	41			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	41	41			irigasi serta memfasilitasi petani dalam meyelesaikan permasalah yang dihadapi setiap saat selama 24 Jam. Upaya peningkatan kompetensi petugas tersebut di atas didukung dengan melengkapi kebutuhan alat dan bahan pendukung operasional dan pemeliharaan berupa kantor pengamatan, alat Pelindung diri (jas hujan, senter, sepatu boots, dll), peralatan kerja (sabit, sekop, angkong, dll). 5. Tindak lanjut Rekomendasi terkait Peningkatan aksesibilitas berupa jalan perlu ditingkatkan hingga tidak ada lagi wilayah/daerah yang terisolir. Terutama untuk wilayah perbatasan DIY dengan Jawa Tengah: Dalam rangka mendukung peningkatan kelancaran arus kegiatan, keseimbangan aksesibilitas wilayah perbatasan dan mengurangi disparitas wilayah, pada tahun 2019 dilakukan pengembangan jaringan jalan Jalur Jalan
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	8	0			
				Operasi Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	41	41			
				Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	41	41			
				Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi	dokumen	1	1			
				Pengembangan Jaringan Irigasi (DAK)						
				Dukungan Pengembangan Jaringan Irigasi sebesar 2,20 % terhadap Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY sebesar 74,50%	%	100	100			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa	Meter	350	350			
				Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										Lintas Selatan (JJLS), Prambanan - Gading, serta rintisan Bedah Menoreh. Sedang pada tahun 2020 diusulkan pengembangan aksesibilitas wilayah perbatasan khususnya yang di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan peningkatan jaringan jalan di ruas jalan Semin - Blimbing, ruas Ngalang - Hargomulyo - Watugajah dan ruas Pandanan - Candirejo. 6. Tindak lanjut Rekomendasi terkait Pembinaan, pengawasan secara intensif terhadap pelaku usaha jasa kontruksi serta selektifitas dalam penentuan pihak pelaksana jasa kontruksi dalam melakukan kontrak kerja sehingga diharapkan tidak terjadi lagi adanya hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, keterlambatan dalam penyelesaian serta penyimpangan terhadap peraturan perundangan dalam pengadaan barang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										dan jasa. Perlu pendampingan dan fasilitasi yang memadai agar hasil dari konstruksi di DIY benar-benar berakar dan mencerminkan identitas budaya Yogyakarta. Hal ini harus dilakukan sejak dalam perencanaan pekerjaan konstruksi: Pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara intensif kepada masyarakat jasa konstruksi, sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu untuk para tenaga ahli sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi yaitu melalui rangkaian fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi. Pada tahun 2020 direncanakan penambahan tenaga ahli konstruksi bersertfikat sejumlah 30 Orang, pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk sosialisasi dan/atau rapat koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) sejumlah 40 Orang, dan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										pendampingan Klinik Konstruksi bagi 40 Orang. Adapun dalam rangka pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi oleh badan usaha konstruksi diselenggarakan layanan pengujian konstruksi yang diwujudkan dalam 800 Laporan Hasil Uji (LHU). Adapun pada tahun 2021 penambahan tenaga ahli konstruksi sejumlah 453 orang sehingga jumlah tenaga ahli akan mencapai 1.080 orang dan dalam rangka pengawasan dilakukan layanan pengujian yang diwujudkan dalam 640 LHU (Laporan Hasil Uji), sehingga peningkatan kinerja penyelenggara jasa konstruksi diprediksi dapat mencapai 85,86%

b) Sub Urusan Penataan Ruang

(1) Kondisi Umum

Pemda DIY telah menerbitkan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penataan ruang di DIY. Perda tersebut sebagai tindak lanjut dari amanah UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada kabupaten/kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap RTRW kabupaten/kota dan RTRW provinsi. Kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan tingkat keterwujudan dan tingkat kesesuaian pola dan struktur ruang terhadap RTRW provinsi.

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa disini meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang.

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 diukur menggunakan dua indikator, yaitu indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan Persentase penataan ruang pada kawasan keistimewaan, target dan realisasi kinerja untuk tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.78. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	70,61	71,41	75,83	109,20	87,81	86,36
2	Peningkatan kinerja pe-nataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	%	28,26	35,38	36,67	103,65	44,49	82,42

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

(2) Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang

Capaian kinerja Penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2020 sebesar 75,83% melampaui dari target sebesar 71,41%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 87,81%, capaian pada tahun 2020 sebesar 86,36%. Berikut rincian perhitungan capaian indikator kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Tabel 3.79. Penilaian Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang DIY (Metode pembobotan dan skoring)

No	Kinerja	Nilai
I	ASPEK PENGATURAN PENATAAN RUANG	82,50
A	Penetapan Perda RTRW	50,00
B	Penetapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan Ruang Provinsi	100,00
C	Penetapan Peraturan perundang-undangan tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi	62,50
D	Penetapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan Penataan Ruang	100,00
E	Penetapan Peraturan Perundang-undangan Lainnya di Bidang Penataan Ruang	100,00
II	ASPEK PEMBINAAN PENATAAN RUANG	68,75
A	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	100,00
B	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	100,00
C	Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100,00
D	Apakah Pemda Provinsi sudah pernah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai upaya mengembangkan kemampuan SDM	0,00
E	Penelitian dan pengembangan	0,00
F	Sisteminformasi dan komunikasi	50,00
G	Penyebarluasan Informasi Berbagai Aspek Penataan Ruang	100,00
H	KesadarandanTanggungjawab	100,00
III	ASPEK PERENCANAAN TATA RUANG	84,58
A	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi	100,00
B	Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Provinsi	69,17
IV	ASPEK PEMANFAATAN RUANG	86,67

No	Kinerja	Nilai
A	Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah dengan RTR Provinsi	100,00
C	Penilaian SKPD terhadap kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan RTR Provinsi	80,00
D	Pemahaman OPD terhadap RTR Provinsi	80,00
V	ASPEK PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	64,58
A	Indikasi Arahan Peraturan Zonasi (IAPZ) dan/atau Arahan Peraturan Zonasi (APZ)	100,00
B	Perizinan Pemanfaatan Ruang	100,00
C	Pemberian intensif dan Disinsentif	0,00
D	Pengenaan Sanksi	58,33

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

Tabel 3.80. Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemda DIY

No	Aspek	Penilaian			Persentase Skor terhadap Maksimal Skor (%)	Klasifikasi
		Bobot	Maksimal Skor	Skor		
1	Aspek Pengaturan Penataan ruang	30%	30	24,75	82,5	Baik
2	Aspek Pembinaan Penataan Ruang	40%	40	27,5	68,75	Cukup
3	Aspek Perencanaan Tata ruang	10%	10	8,46	84,58	Baik
4	Aspek Pemanfaatan Ruang	10%	10	8,67	86,67	Baik
5	Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang	10%	10	6,46	64,58	Cukup
	Jumlah Hasil Akhir	**100%**	**100**	**75,83**	**75,83**	Baik

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021
Catatan:
Nilai klasifikasi hasil akhir skor berdasarkan Kuesioner Wastek Penataan Ruang Tahun 2020 adalah sebagai berikut.
Memuaskan (M) → 86% - 100%
Baik (B) → 70% - 85%
Cukup (C) → 55% - 69%
Kurang (K) → < 55%

Berdasarkan tabel di atas, rincian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di DIY tergolong baik dengan nilai sebesar 75,83% dengan rincian aspek pengaturan penataan ruang 24,75%, aspekpembinaan penataan ruang 27,5%, aspek perencanaan tata ruang 8,46%, aspek pemanfaatan ruang 8,67% dan aspek pengendalian pemanfaatan ruang 6,46%. Aspek pengaturan penataan ruang, aspek perencanaan tata ruang, dan aspek pemanfaatan ruang mempunyai skor yang dapat dikategorikan baik, namun aspek pembinaan penataan ruang pada unsur diklat penelitian, dan pengembangan masih dan dan aspek pengendalian pemanfaatan ruang sehingga mempunyai skor dengan kategori cukup.

(3) Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan

Pencapaian indikator sasaran peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan tahun 2020 telah melampaui target yaitu sebesar 36,67% atau 103,65% dari target yang ditetapkan sebesar 35,38%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 44,49 %, capaian ini mencapai 82,42%. Pencapaian kinerja diukur melalui Indikator 1) jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana Rinci, Rencana Induk, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang mencapai 21,67%, serta 2) Keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan mencapai 15%.

(4) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Alokasi anggaran Sub Urusan Penataan Ruang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp2.599.166.788,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam lima Program dan sembilan Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp1.897.832.516,00 (73,02%), dengan pencapaian fisik sebesar 80%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1. Sinkronisasi regulasi penataan ruang (vertikal dan horisontal)	**PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG**				masih banyak Rencana Rinci Tata Ruang yang belum diperdakan.	Percepatan proses penyusunan rencana rinci tata ruang.	1. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN a. Sub Urusan Penataan Ruang 1) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan penataan ruang perlu dilakukan dengan: a) Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, dari sisi pengaturan sudah ditindaklanjuti melalui kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi. b) Dari sisi pembinaan, bahwa Perda RTRW DIY telah disosialisakan ke OPD dan masyarakat melalui tatap muka dan media massa. dan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota akan melalui proses rekomendasi Gubernur sebelum dapat diajukan persetujuan substansi ke Menteri ATR/BPN RI. c) Dari sisi pelaksanaan Sudah ada surat pengantar Ketua TKPRD untuk menindaklanjuti indikasi program RTRW untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. d) Dari sisi pengawasan telah dilakukan kegiatan monev dan
			2. Menyebarluaskan informasi penataan ruang	Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan	%	72.63	75.63			
			3. Meningkatkan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang	**Pembinaan Penataan Ruang**						
			4. Mewujudkan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan penataan ruang antar wilayah dan sektoral	Publikasi	tayang	6	6			
			5. Mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Kab/Kota	5	5			
			6. Mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dukungan 50% terhadap Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan hingga mencapai 72,63%	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			7. Meningkatkan kualitas penataan administrasi pertanahan	Rumusan bahan kebijakan penataan ruang di DIY melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah di DIY	dokumen	2	2			wastek. Semua penyusunan RTR kabupaten/kota akan diberikan rekomendasi Gubernur sebelum dapat diajukan ersetujuan substansi ke pusat
			8. Mewujudkan penataan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa sesuai peruntukan	**PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG**				belum tersedianya beberapa instrumen pengendalian sehingga pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal	percepatan penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang serta perwujudan struktur dan pola ruang	2) Saat ini baru disusun kajian/naskah akademik untuk dijadikan usulan rapergub. Tahun 2021 diharapkan pergub Insentif dan Disinsentif sudah dapat ditetapkan. 3) Telah ditindaklanjuti melalui sosialisasi terhadap satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang tertuang pada Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten. 4) Kewenangan dalam melakukan revisi Perda No. 10/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan ada di Biro Hukum. Dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sudah ada acuan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019 - 2039 yang sudah melalui proses Persetujuan Menteri sesuai dengan Permen ATR Nomor 8 Tahun 2017. Salah satu evaluasi materi dalam Permen ATR tersebut memuat
				Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasa	%	82.73	78.61			
				Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang						
				Dukungan sebesar 50% terhadap Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan aspek pengawasan hingga mencapai 82,73%	%	100	100			
				Penyusunan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan keterpaduan	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				indikasi program pada RTRW						tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) berdasarkan dari data Kementerian Pertanian RI.
				Penyusunan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan keterpaduan indikasi program pada RTR	dokumen	1	1			
				Pengendalian Pemanfaatan Ruang						
				Dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY	dokumen	1	1			
				Dokumen penilaian kinerja penyelenggaran penataan ruang di 4 kabupaten 1 kota dan di DIY	dokumen	1	1			
				Penyebaran informasi tentang penataan ruang	%	60	12			
				Dukungan sebesar 50% terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan hingga mencapai 82,73%	%	100	100			
2	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1. Sinkronisasi regulasi penataan ruang (vertikal dan horisontal)	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**				masih banyak Rencana Rinci Tata Ruang yang belum diperdakan.	Percepatan proses penyusunan rencana rinci tata ruang.	2. PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN Urusan Tata Ruang Agar dapat mengeskpresikan nilai-nilai Keistimewaan, maka disusun

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			2. Menyebarluaskan informasi penataan ruang	Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	32.22.00	46.67			dokumen perencanaan berupa Rencana Rinci Tata Ruang, Rencana Induk dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat sehingga dalam implementasi identitas Keistimewaan dapat terbaca oleh seluruh lapisan masyarakat.
			3. Meningkatkan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang	**Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten**						
			4. Mewujudkan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan penataan ruang antar wilayah dan sektoral	Penyusunan bahan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi	Dokumen	1	1			
			5. Mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Tersedianya Matek RRTR	Dokumen	2	2			
			6. Mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersedianya Berita Acara Pra-Validasi KLHS RRTR dari KLHK	Berita Acara	2	2			
			7. Meningkatkan kualitas penataan administrasi pertanahan	Tersedianya Dokumen KLHS	Dokumen	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			8. Mewujudkan penataan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa sesuai peruntukan	Pendampingan penetapan RDTR Kabupaten	Dokumen	3	3			
				Tersedianya Peta Dasar, Tematik dan Rencana	Dokumen	2	2			
				Dukungan sebesar 9,01% terhadap Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	%	100	100			
				Tersedianya Berita Acara Asistensi Peta Dasar, Tematik, dan Rencana dari BIG	Berita Acara	2	2			
				Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang						
				Dukungan sebesar 12,61% terhadap Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaanpada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	%	100	100			
				Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang berupa: Perdais Tata Ruang Keistimewaan pada Desa/Kelurahan	satuan ruang strateg	3	3			
				Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dokumen hasil pembahasan usulan perubahan tahun 2020, rencana 2021 dan rencana 2022 urusan tata ruang	dokumen	1	1			
				Dukungan sebesar 12,61% terhadap Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaanpada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	%	100	100			
				PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS				belum tersedianya beberapa instrumen pengendalian sehingga pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal	percepatan penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang serta perwujudan struktur dan pola ruang	
				Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	%	62.05.00	70.14.00			
				Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang						
				Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				ruang kawasan strategis						
				Dokungan sebesar 38,46% terhadap Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang padasatuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten sebesar 62,50%	%	100	100			
				Dokumen keterpaduan program pada satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Dokumen	1	1			
				Dokumen Evaluasi Dampak Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas pada SRS Perbukitan Menoreh khususnya Kawasan Tonogoro	Dokumen	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tata Ruang						
				Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	dokumen	1	1			
				Dukungan Sebesar 38,46% terhadap Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				padasatuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten sebesar 62,50%						
				Updating database sistem informasi database dana keistimewaan urusan tata ruang	dokumen	1	1			
				PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN TATA RUANG						
				Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang mencapai 100%	persen	100	0			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Tata Ruang)						
				Pengadaan kendaraan operasional roda 4	Kendaraan roda 4	1	0			

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a) Kondisi Umum

Pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam kerangka pembangunan manusia dan merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Memastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (*adequate shelter for all*), Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya.

Sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah penduduk dengan hunian yang layak, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.81. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	96,66	96,16	97,37	101,26	97,50	99,86

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2021

Data tahun 2019 menunjukkan bahwa *backlog* di DIY, yaitu *backlog* Kepemilikan 314.975 unit dan *backlog* penghunian 103.773 unit (Susenas BPS, 2019). Target indikator persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak pada tahun 2020 sejumlah 96,16% dapat dicapai melalui peningkatan hunian yang layak dengan jumlah 1.243.071 unit. Peningkatan persentase penduduk dengan hunian yang layak dicapai melalui kegiatan penanganan rumah tidak layak huni sejumlah 6.557 unit.



Gambar 3.29. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Desa Kalitekuk, Semin, Gunungkidul

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020 dalam APBD DIY sejumlah Rp8.559.229.380,00 yang terealisasi sebesar Rp8.206.345.723,00 (95,88%) melalui satu Program dengan dua Kegiatan dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak melalui Program Penyelenggaraan Perumahan dengan capaian melalui penanganan rumah tidak layak huni berbagai sumber pendanaan yaitu dari anggaran DAK, BSPS, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi. Penanganan RTLH sampai dengan tahun 2020 berjumlah 33.535 unit dari total 1.276.606 RT (BSD, 2019), sehingga jumlah rumah layak huni di DIY sebanyak 1.243.017 RT atau sebesar 97,37%.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
3	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada kawasan permukiman di kecamatan miskin serta pemanfataan sumber daya mineral dan air tanah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN**				Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi/ pemberian bantuan stimulan bahan bangunan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. -	Memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah akan pentingnya tempat tinggal yang layak huni serta mengupayakan bantuan stimulan berupa barang bahan bangunan serta stimulan upah tukang. -	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1. Tindak lanjut Rekomendasi terkait masih tingginya masyarakat yang tinggal dalam Rumah Tidak Layak Huni di DIY perlu di atasi dengan program yang tidak parsial: Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni harus dipadukan dengan kegiatan yang meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sebagai sasaran utama perbaikan RTLH. Kemampuan untuk berinvestasi terhadap kelayakan tempat tinggal sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, 2. Tindak lanjut Rekomendasi terkait Indikator kinerja sasaran perlu diubah dengan indeks kawasan pemukiman yang lebih luas. Hal ini akan mendorong adanya inovasi dalam penataan kawasan pemukiman terutama di perkotaan. Hal ini berhubungan dengan status tanah dan data lainnya yang tidak sinkron: Pembuatan skema pemanfaatan
				Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	32,43	48,86			
				Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	%	12	10,74			
				Cakupan penanganan kawasan kumuh	%	72,16	69,11			
				Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh						
				Dukungan Berupa Penanganan PSU Kawasan Kumuh Terhadap Cakupan Kawasan Kumuh yang sudah tertangani	%	100	0			
				Penanganan Rumah Tidak Layak Huni						
				Dukungan sebesar 4000 unit penanganan RTLH terhadap Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY menjadi 32,43%	%	100	100			
				Tersusunnya Usulan Penanganan RTLH Di DIY Melalui APBN 2021	Laporan	1	1			
				Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulon Progo	dokumen	1	1			
				Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Perencanaan dan Verifikasi RTLH Untuk Peningkatan Kualitas (10000 unit): a. Kabupaten Bantul (1256 unit) b. Kabupaten Sleman (1365 unit) c. Kabupaten Kulon Progo (3411 unit) d. Kabupaten Gunungkidul (3658 unit) e. Kota Yogyakarta (400 unit)	unit	10000	10000			kenaikan nilai guna tanah (*land value capture*) untuk meningkatkan pendapatan daerah baik langsung maupun tidak langsung, dari nilai pemanfaatan penguasaan tanah. Skema ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur/kosong, insentif pengembangan hunian vertikal, dan kemudahan investasi
				Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Prioritas di Kabupaten Gunungkidul	unit	161	161			3. Tindak lanjut Rekomendasi terkait Harga perumahan semakin mahal sebagai dampak dari mahalnya harga tanah untuk permukiman. Untuk itu perlu mengupayakan masalah tersebut agar harga perumahan dapat terjangkau: Memprioritaskan penyediaan hunian baru terjangkau dengan memulai pembentukan BUMD daerah yang mengelola aset PKP atau yang diserahi mandat untuk mengelola kawasan. Pengembangan hunian baru vertikal dikonsentrasikan pada simpul-simpul
				Perencanaan dan Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	unit	500	500			
				Pengembangan Perumahan						
				Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY	dokumen	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY	Laporan	1	1			
				Rekomendasi Kebijakan PKP	Laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Redesain Infrastruktur Perumahan MBR Piyungan	Laporan	1	1			transportasi melalui Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit *(TOD - Transit Oriented Development)* sesuai peraturan tata ruang dan RP3KP DIY
				Dukungan sebesar 12 % berupa penyediaan terhadap Dokumen RP3 sebagai Perwujudan Kawasan Perumahan sesuai RTRW sebesar 12%	%	100	100			
				Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN						
				Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	titik	32	0			
				Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	titik	48	0			
				Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman						
				Dukungan berupa Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umun terhadap penyelenggaraan PSU Kawasan	%	100	0			
				Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman	dokumen	1	1			
				DED PSU Tahun 2021	dokumen	1	1			
				Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Peningkatan kualitas PSU pada 32 titik di Kawasan Strategis Propinsi	%	100	100			
				Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan	dokumen	1	1			
				Perencanaan Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA	dokumen perencanaan	1	1			
				Penyusunan DED PSU KSP 2021	Lokasi	135	135			

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a) Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas

(1) Kondisi Umum

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Dalam hal ini Pemda DIY wajib melindungi masyarakat dari segala gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Untuk menciptakan suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

DIY merupakan kota Pendidikan, kota budaya, dan kota wisata sehingga DIY bagaikan magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi warga yang menetap. Situasi ini menjadikan DIY sebagai daerah yang multi etnis dan multi kultur. Implikasinya, DIY mengalami perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya:

(a) Hampir di setiap jalan terdapat reklame besar yang melintang di atas jalan yang membahayakan pengguna jalan.
(b) Adanya penambangan liar di sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ijin.
(c) Peredaran minuman berakohol yang memicu berbagai permasalahan kriminalitas.
(d) Adanya pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat agar pelaksanaan kehidupan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah target dan realisasi kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban tahun 2020.

Tabel 3.82. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Rerata jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan	Desa/ Kel.	334	340	334	98,23	360	92,7

Sumber: Satpol PP DIY, 2021

Indikator kinerja sasaran Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah rerata jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan. Dari target sejumlah 340 desa/kelurahan telah terealisasi sebanyak 334 desa/kelurahan sehingga capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 tidak tercapai target dengan persentase 98,23%. Hal ini karena alat ukur yang digunakan adalah hasil survey potensi desa (podes) yang dilakukan oleh BPS hanya pada tahun 2018. Dengan demikian sudah tidak relevan lagi apabila digunakan untuk mengukur kinerja sasaran strategis tahun 2020. Selain permasalahan tersebut, ketidaktercapaiannya disebabkan adanya bencana pandemi Covid-19. Salah satu meta indikator sasaran Satpol PP DIY adalah bertambahnya jumlah anggota Satlinmas. Namun karena penyebaran Covid-19 berimplikasi pada anggaran di seluruh level pemerintahan, maka tahun 2020 ini tidak ada pertambahan anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 telah tercapai sebesar 92,78%.

(2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp6.945.297.100,00 Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 7 Program dan 20 kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat terealisasi sebanyak Rp6.786.297.139,00 (97,71%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM Satpol PP secara Gradual 2. Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi/ OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait 3. Melakukan Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 4. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain di daerah perbatasan 5. Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				1) Pelaku ekonomi yang tidak patuh terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Telah diketahui bahwa hampir di setiap jalan terdapat reklame besar yang melintang di atas jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan; 2) Upaya pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang menghalangi petugas dalam menjalankan tugas. 3) Banyaknya penambangan liar di sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga atau perusahaan swasta tanpa izin. Hal ini akan berakibat merusak lingkungan baik manusia maupun alam.	1) Perlu adanya kebijakan dan komitmen antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berupa pelimpahan wewenang kepada Pemda DIY terkait Penertiban reklame yang berada di jalan nasional. 2) Untuk meningkatkan kepatuhan pelanggar dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat rentan pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. 3) Perlu adanya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penindakan secara non yustisial terhadap pelanggar perda penambangan liar serta operasi penertiban perijinan 4) Untuk mengatasi peredaran minuman berakohol kami melakukan operasi	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1. Beberapa kegiatan terkait penanganan aksi klithih: a. Melalui usulan perubahan anggaran Tahun 2020 telah dilakukan Operasi Yustisi minumam beralkohol karena keberanian aksi klithih ternyata salah satu penyebabnya adalah minuman beralkohol. Selain itu, juga telah dilakukan Operasi Non Yustisi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. b. Rencana pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021 akan melakukan operasi tertib pendidikan ke sekolah-sekolah, patroli malam, operasi minuman beralkohol, dan operasi anjal gepeng. 2. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran						
				11 Bukti pembayaran KIR kendaraan	Unit	5	5			
				8 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	5	5			
				10 Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu	Unit	37	37			
				12 Jasa kebersihan kantor	m2	34200	34200			
				15. Terbayarnya Biaya Langganan Aplikasi Video Conference	Bulan	9	9			
				2 Barang cetakan	Jenis	8	8			
				Dukungan 24.36% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				13 Alat tulis kantor	Jenis	41	41			
				1 Benda-benda pos (materai dan perangko)	Jenis	2	2			
				4 Surat kabar/majalah	Eksem-	48	48			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
					plar			4) Banyak beredar minuman keras/minuman berakohol di wilayah DIY yang dijual pada warung-warung kecil/toko kelontong yang seharusnya tidak menjual barang tersebut secara illegal. 5) Masyarakat cenderung abai dalam menghadapi pandemi Covid-19	yustisi kepada pengedar minuman berakohol legal maupun illegal dengan harapan agar putusan pengadilan membuat jera kepada para pelanggar 5) Untuk menghadapi masyarakat yang abai terhadap penyebaran Covid-19, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Satpol PP melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memakai masker, melakukan jaga jarak dan menjauhi kerumunan di tempat umum, dan ketika terbit Peraturan Gubernur no 77 Tahun 2020 maka kami melakukan operasi non yustisi di wilayah perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta, pelaku usaha (restoran, café, UMKM serta masyarakat umum) terhadap pelanggar	Masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja DIY telah membentuk Kader Penegak Perda dan Perkada di Desa sebanyak 5 (lima) Kader yang berfungsi untuk membantu melakukan penegakan Perda dan Perkada di wilayah desanya masing-masing. Untuk Tahun 2021 akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda dimaksud. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pelanggaran Perda dan Perkada, termasuk juga untuk menangani aksi klithih. Kalau di Kota Yogyakarta, namanya Kader Panca Tertib. Tetapi kalau di Kabupaten se DIY namanya Kader Penegak Perda dan Perkada.
				14 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	14	14			
				6 Pembayaran tagihan rekening internet	Bulan	12	12			
				3 Penggandaan	Lembar	50000	50000			
				7 Pembayaran tagihan internet	Bulan	12	12			
				5 Pembayaran tagihan rekening listrik	Bulan	12	12			
				9 Pembayaran tagihan rekening telepon	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Dukungan 34.60% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				1. Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	2	2			
				4 Kinerja perencanaan program dalam 1 tahun sesuai peraturan	Orang	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				perundangan yang berlaku					protokol kesehatan Covid-19	
				3 Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	8	8			
				5 Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Orang	7	7			
				2 Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	2	2			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				2 Konsultasi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY luar jawa terlaksana dengan baik	Tahun	1	1			
				3 Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	Tahun	1	1			
				Dukungan 41.03% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				1 Konsultasi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam jawa terlaksana dengan baik	Tahun	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor						
				1. Rehabilitasi gedung kantor Satpol PP DIY	Unit	1	1			
				Dukungan 21.93% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				2 Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMD	Unit	19	19			
				Dukungan 71.34% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				1 Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMD	Unit	15	15			
				3 Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMD	Unit	2	2			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				1 Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jenis	3	3			
				2 Peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jenis	20	20			
				Dukungan 6.73% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				1 Laporan kinerja instansi pemerintahan (LKJiP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen	Pering -kat	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)						
				Dukungan 4.13% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				1 Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 19 kegiatan	%	5	5			
				Dukungan 8.72% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				3 Buku data Satpol PP	Buku	30	30			
				Dukungan 40.93% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
				1 Berita acara forum perencanaan OPD	BA	1	1			
				2 ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Jenis Doku -men	2	2			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				1 Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 19 kegiatan	%	100	100			
				Dukungan 46.21% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM Satpol PP secara Gradual 2. Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi/ OPD Provinsi,	**PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**						
				Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	%	45	45			
				Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	%	45	45			
				Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait	3 Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	Laporan	15	15			
			3. Melakukan Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	4 Deteksi dini potensi gejolak sosial masyarakat (Permendagri No 54 Th 2011)	Laporan	15	15			
			4. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain di daerah perbatasan	1 Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas perbatasan	Laporan	2	2			
			5. Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya	Dukungan 29.58% terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	%	100	100			
				5 Unjuk rasa yang berlangsung dengan kondusif di 5 Kab/Kota	Laporan	36	36			
				6. Penyelenggara pilkada termonitoring	Kabu -paten	3	3			
				2 Laporan pengendalian tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	Laporan	15	15			
				Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Aset						
				3 Kunjungan kerja Gubernur, Wagub, dan tamu daerah dalam kondisi aman	Kali	18	18			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				1 Aset Pemda DIY yang dijaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan	Titik	15	15			
				Dukungan 19.07% terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	%	100	100			
				4. Objek Vital dalam kondisi aman	Tahun	1	1			
				2 Kantor Gubernur dan Wagub dan tamu daerah dalam kondisi aman	Tahun	1	1			
				Pembinaan Kapasitas Aparatur Tibumtranmas						
				Dukungan 34.13% terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	%	100	100			
				1 Anggota Pol PP yang terbina fisk, mental, pengetahuan dan jiwa korsanya	Orang	129	129			
				Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas						
				1 Laporan hasil penanganan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap gangguan tibumtranmas dan linmas	Doku -men	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				2 Rekomendasi penanganan kerjasama antara Satpol PP DIY dengan Polda	Rekomen-dasi	1	1			
				Dukungan 17.22% terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	%	100	100			
				3. Aplikasi penanganan pengaduan masyarakat	Paket	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
				Meningkatnya jumlah desa yang memiliki Satlinmas aktif	%	30	47.72			
				Pembinaan Potensi Masyarakat						
				1 Meningkatnya kapasitas bagi potensi masyarakat untuk bersinergi dengan unsur komunitas dan aparat kamtibmas	Orang	70	70			
				Dukungan 4.45% terhadap persentase desa yang memiliki Satlinmas dan jaga warga yang aktif	%	100	100			
				Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa						
				1 Meningkatnya kemampuan dan	Orang	1200	1200			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				keterampilan anggota Satlinmas dalam memberikan perlindungan masyarakat						
				Dukungan 63.60% terhadap persentase Satlinmas yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat	%	100	100			
				2. Anggota Satlinmas yang bertugas dalam pelaksanaan pilkada meningkat kompetensi nya terhadap protokol kesehatan Covid-19	Orang	70	70			
				PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA						
				Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	%	75	75.03			
				Operasi Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada						
				1 Rekomendasi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas PPNS	Rekomen -dasi	1	1			
				2 Pelanggaran perda dan atau perkada yang tertangani secara yustisi dengan mekanisme acara pemeriksaan cepat	Laporan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				4 Laporan penegakkan perda/perkada di perbatasan	Laporan	1	1			
				3 Rekomendasi pelaksanaan penegakkan hukum secara terpadu	Doku -men	1	1			
				Dukungan 38.63% terhadap persentase peningkatan pelanggaran perda dan perkada yang tertangani	%	100	100			
				Operasi Non Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada						
				2 Pemahaman bagi rentan pelanggar cukai rokok ilegal yang meningkat	Orang	120	120			
				Dukungan 30.09% terhadap persentase peningkatan pelanggaran perda dan perkada yang tertangani	%	100	100			
				1 Pelanggaran perda dan atau perkada yang tertangani secara non yustisial	Laporan	19	19			
				3 Kapasitas anggota Pol PP dalam rangka penanganan cukai rokok ilegal yang meningkat	Orang	50	50			
				Internalisasi Budaya Sadar Perda dan/ Perkada						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 31.28% terhadap persentase peningkatan pelanggaran perda dan perkada yang tertangani	%	100	100			
				1 Tokoh masyarakat dan perangkat desa yang memahami perda dan perkada DIY	Orang	200	200			
3	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM Satpol PP secara Gradual 2. Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi/ OPD Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal terkait 3. Melakukan Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 4. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Provinsi	**PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS**						
				Persentase kesesuaian pemanfaat ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	%	72.63	72.63			
				Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang						
				3 Meningkatnya kompetensi Satlinmas Rescue Istimewa untuk mewujudkan perlindungan masyarakat	Orang	30	30			
				2 Operasi/ penertiban	Kali	10	10			
				1 Patroli di kawasan sumbu filosofis dan samas parangtritis	Bulan	2	2			
				4 Potensi Satlinmas Rescue Istimewa siap siaga dalam pengamanan di objek wisata	Orang	328	328			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			lain di daerah perbatasan 5. Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya	Dukungan 72.41% terhadap persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten 60%	%	100	10			

b) *Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik*

(1) Kondisi Umum

DIY merupakan wadah yang baik sebagai percontohan kehidupan yang beragam, multikultural, toleran, dan nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Upaya pembinaan kesatuan dan stabilitas politik yang sudah dilakukan, menjadi modal utama dalam membentuk masyarakat madani dan merupakan *benefit* yang mendukung upaya Pemda dalam mewujudkan DIY sebagai pusat budaya, pendidikan, dan tujuan wisata terkemuka di Asia bahkan dunia.

Dalam upaya meningkatkan kerukunan dan menjalin komunikasi antar elemen masyarakat telah dilakukan upaya-upaya strategis melalui Koordinasi Kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lain sebagainya.



Gambar 3.30. Suasana Rapat Kerja FKUB DIY, November 2020

Terkait dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba, upaya yang telah dilakukan antara lain, menyelenggarakan rapat kerja Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), menyusun rencana aksi daerah P4GN, yang dilakukan bersama bersama Polda DIY, BPOM, dan BNNP DIY; dan menyelenggarakan sosialisasi bahaya narkoba kepada pelajar.

Capaian DIY dalam Indeks Demokrasi Indonesia

Berdasarkan rilis pada bulan Agustus 2020, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk DIY pada tahun 2019 tercatat sebesar 80,67. Angka tersebut turun 0,15 poin dibandingkan angka IDI pada tahun 2018 yang sebesar 80,82. Terdapat satu aspek yang mengalami penurunan, yaitu Aspek Hak-hak Politik. Adapun Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya.

Pada penghitungan angka di atas, terdapat tiga variabel yang menunjukkan adanya penurunan nilai. Ketiga variabel tersebut adalah: Variabel Kebebasan Berpendapat, Kebebasan dari Diskriminasi, dan Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan.

Realisasi indikator kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

Tabel 3.83. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY	Angka	3,14	3,04	3,13	102,96	3,06	102,29

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2021

Capaian kinerja Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY dengan indikator skor indeks ketahanan nasional di DIY tahun 2020 terealisasi sebesar 3,13 atau setara 102,96% dari target 3,04. Angka tersebut mencapai kriteria penilaian realisasi kinerja dengan predikat "sangat baik".

Capaian kinerja sebesar 3,13 merupakan rerata dari capaian skor indeks ketahanan nasional DIY gatra ideologi, politik, sosial budaya dan ekonomi. Adapun hasil capaian dari masing–masing gatra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.84. Detail Indeks Ketahanan Nasional DIY disandingkan dengan capaian skor Nasional per November 2020

No.	Gatra	Capaian Skor (DIY)	Capaian Skor (Nasional)
1.	Ideologi	3,05	1,70
2.	Politik	3,36	1,88
3.	Sosial Budaya	3,14	1,88
4.	Ekonomi	2,98	2,79
Jumlah		**12,53**	**8,25**
Rerata		**3,13**	**2,06**

Sumber: Skor Ketahanan Wilayah DIY per November 2020 dari laman https://siskurtannas.lemhannas.go.id/

(2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp8.665.849.353,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam tujuh Program dan 19 kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat terealisasi sebanyak Rp4.699.562.291,00 (86,86%), dengan pencapaian fisik sebesar 97,47%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan pemberdayaan kelembagaan 3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pencegahan dan penanganan potensi konflik dan atau konflik	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Tidak ada permasalalahan menonjol pada kesekretariatan	Tidak ada permasalalahan menonjol pada kesekretariatan	1. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH a. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 1) Terkait dengan adanya korban meninggal penyelenggara pemilu pada saat rekapitulasi pemilu 2019 yang membuat masyarakat prihatin dan memunculkan syak wasangka yang kurang baik, Badan Kesbangpol DIY akan berkomunikasi dengan KPU DIY untuk memberikan kebijakan dalam rekrutmen penyelenggara pemilu berupa penyerahan surat sehat yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki penyakit kronis atau penyakit yang bisa berdampak buruk
				Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	84.02			
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran						
				Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan R 4 dan R 2	bulan	12	12			
				Alat Pencegahan Covid-19	jenis	8	8			
				Pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan internet	bulan	12	12			
				Alat Tulis Kantor	bulan	12	12			
				Kebersihan Gedung Kantor 3 org	bulan	12	12			
				Dukungan 28.62% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12			
				Langganan surat kabar harian, dan majalah	bulan	12	12			
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Kinerja Pengelola Barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	orang	2	2			
				Kinerja Perencana Program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	orang	2	2			
				Kinerja Pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	orang	2	2			
				Kinerja Penjaga Keamanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK.	orang	6	6			
				Kinerja Driver/Pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	orang	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 24.52% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			apabila mengalami kelelahan dan stress dan adanya batasan usia. 2) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan mencegah dan mengurangi peredaran gelap Napza, Badan Kesbangpol DIY bersama dengan Forum P4GN DIY selalu melakukan sinergi secara aktif, disertai dengan pelaksanaan kegiatan rapat kerja dan workshop yang melibatkan beragam elemen terkait, termasuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap komitmen dan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di DIY. 3) Upaya membumikan Pancasila melalui gerakan dan suri
				Kinerja Pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	orang	9	9			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	Tahun	1	1			
				Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Tahun	1	1			
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah	Tahun	1	1			
				Dukungan 46.86% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	93.9			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Kursi kantor	buah	42	42			
				Printer	unit	7	7			
				Dukungan 31.86% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Kursi pimpinan	set	1	1			
				Laptop	buah	2	2			
				Peralatan Penanganan Covid-19	jenis	3	3			
				Almari	buah	1	1			
				Komputer	unit	8	8			
				Almari Laci Filling Kabinet	buah	5	5			
				Mesin ketik elektrik	buah	0	0			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Kamar Mandi yang dirawat	unit	1	1			
				Garasi berkanopi	unit	1	1			
				Gedung bercat	m2	197	197			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 22.62% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			tauladan, khususnya pada generasi muda juga dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol DIY melalui kegiatan Sinau Pancasila yang berupaya membangun pemahaman perwakilan generasi muda milenial akan arti ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan target sebanyak 18 (delapan belas) kelompok dalam tahun anggaran 2020 ini (target awal 78 kelompok, namun direvisi karena adanya pandemi Covid-19). Pada tahun anggaran 2021, kegiatan Seminar Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan dilaksanakan setidaknya di 78 (tujuh puluh delapan) lokasi se-DIY.
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Dukungan 22.76% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMD	bulan	12	12			
				Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMD	bulan	12	12			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Dukungan 22.76% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Alat kantor yang dipelihara	jenis	18	18			
				Mebeleur yang dipelihara	jenis	4	4			
				Perlengkapan kantor yang dipelihara	jenis	3	3			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	persen	100	79.67			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Dukungan 6.17% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100			
				Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	nilai LKJIP	2	2			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Dukungan 14.64% terhadap capaian program peningkatan pengembangan	persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						2. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN a. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dilakukan secara rutin dalam rangka pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan secara rutin melalui kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY. Sesuai Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	persen	5	5			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Dukungan 58.62% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100			
				ROPK, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Doku-men	6	6			
				Berita Acara Forum Perencanaan OPD	BA	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Dukungan 20.57% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100			
				Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	persen	100	100			
2	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		**PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL**				- Banyaknya deviasi karena penundaan kegiatan akibat pandemi sehingga kegiatan yang bernuansa luring harus dibatalkan.	- Perlu adanya kegiatan yang dilakukan secara daring dalam rangka peningkatan cegah dini dan deteksi dini - Penguatan koordinasi dengan forum-forum	
				Skor Indeks Ketahanan Nasional di DIY Gatra Ideologi	angka	2.89	3.05			
				Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
				Rekomendasi FKUB (Forum Kerukunan Umat beragama)	Rekomen-dasi	3	3			
				Dukungan 30% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi sebesar 2,89	persen	100	100			
				Kelompok/Perwakilan generasi muda (milenial) yang meningkat pemahaman tentang ideologi, nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam Sinau Pancasila	kelompok	18	18			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Rekomendasi FPK (Forum Pembauran kebangsaan)	Rekomen-dasi	3	3	- Masih adanya geliat potensi konflik horizontal di masyarakat; dan masih adanya tindak pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan beragama di daerah yang dapat memicu timbulnya potensi konflik sosial;	kemitraan (FKUB, FPK, FKDM, Forkopimda, POA, PKS dan lain sebagainya) sebagai upaya preventif dalam mengantisipasi timbulnya potensi konflik horizontal di masyarakat;	dan Kabupaten/Kota, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Adapun materi koordinasi yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah berkaitan dengan kondisi wilayah DIY dari aspek kondusivitas daerah (keamanan, ketertiban dan ketenteraman). Instansi vertikal yang terlibat dalam Forkopimda antara lain DPRD DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Kanwil Kementerian Agama, Perwakilan Bank Indonesia DIY, Akademi Angkatan Udara, dan instansi terkait lainnya.
				Pembinaan Kewaspadaan Nasional						
				Rekomendasi Forum Kemitraan di DIY	Rekomen-dasi	1	1			
				Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY	laporan	1	1			
				Laporan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi	laporan	1	1			
				Rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Rekomen-dasi	4	4			
				Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Forkopimda	laporan	1	1			
				Laporan Update Caturwulan Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	laporan	3	3			
				Laporan Pemantauan Orang Asing (POA)	laporan	1	1			
				Dukungan 70% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Gatra Ideologi sebesar 2,89	persen	100	100			
				PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT						
				Skor Indeks Ketahanan Nasional di DIY Gatra Politik	angka	3.34	3.36			
				Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat						
				Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DIY mendapat bantuan keuangan Parpol sesuai peraturan perundangan yang berlaku	parpol	10	10			
				Dukungan 42,86% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebsesar 3,34	persen	100	100			
				Perwakilan Kelompok Masyarakat (Difabel, Pemilih Pemula, Kelompok Perempuan) yang mendapat pendidikan politik dan kewargaan	orang	0	0			
				Laporan dan rekomendasi tindak lanjut hasil IDI DIY	laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah						Pokok permasalahan yang menjadi bahan koordinasi dalam Forkopimda antara lain: Persiapan, pelaksanaan dan pasca pemilu/pemilu kepala daerah DIY. Persiapan menyosong bulan Ramadhan, Idul Fitri dan musim libur tengah tahun; Menyosong hari Natal & Tahun Baru dan liburan akhir tahun. Adapun hasil dan manfaat koordinasi yang diperoleh adalah suatu kesepakatan bersama antara stakeholder di wilayah DIY untuk mengambil peran masing-masing untuk menjaga kondisi wilayah agar tetap aman, tertib dan tenteram. 3. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA a. Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam
				Laporan Pemantauan Dinamika Politik di Daerah Dalam Tahapan Pemilukada 2020 di DIY	laporan	1	1			
				Dukungan 14,28% terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3,34	persen	100	100			
				Pembinaan Organisasi Masyarakat						
				Rekomendasi Forum Ormas di DIY	Rekomen--dasi	1	1			
				Dukungan 42,86 % terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3,34	persen	100	100			
				Laporan pengawasan organisasi kemasyarakatan di DIY	laporan	1	1			
				Perwakilan Ormas yang paham peraturan perundangan tentang organisasi kemasyarakatan	peserta dari elemen	50	50			
				PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI						
				Skor Indeks Ketahanan Nasional di DIY Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	angka	2.88	3.06			
				Pembinaan Ketahanan Ekonomi						
				Dokumen Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi di DIY	Doku-men	1	1			
				Rekomendasi Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Rekomen-dasi	1	1			
				Dukungan 40% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi sebesar 2,88	persen	100	100			
				Pembinaan Ketahanan Sosial Budaya						
				Laporan dan Rekomendasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	laporan dan reko mendasi	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Rekomendasi P4GN	Rekomen-dasi	1	1	-Minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanakan pemilihan umum -Organisasi masyarakat belum digerakkan secara optimal sebagai actor yang mampu menunjang persatuan dan	-Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanakan pemilihan umum melalui sosialisasi kepemiluan - Diterapkan strategi pemberdayaan yang inovatif dan dapat berkelanjutan untuk memastikan bahwa organisasi masyarakat dapat berperan secara optimal dalam proses pembangunan demokrasi di tingkat lokal melalui peningkatan partisipasi publik. Dengan adanya kerjasama, koordinasi dan fasilitasi dengan pembentukan pokja pembinaan organisasi kemasyarakatan	rangka menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, kami akan berkoordinasi lebih lanjut bersama KPU DIY agar terus memperbaharui DPT secara berkala dan menjalin komunikasi/ koordinasi secara berkala dengan partai politik, tidak hanya dilakukan saat menjelang atau pasca Pemilu. Selain itu, kami juga memberikan ruang kepada KPU DIY untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan Sosialisasi Kepemiluan yang difokuskan pada generasi muda dan kelompok marginal dalam rangka peningkatan partisipasi politik masyarakat yang bisa pula dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi berkala dengan masyarakat/partai politik.
				Perwakilan Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Pemuda yang mendapat Sosialisasi terkait Pencegahan Narkoba	orang	50	50			
				Dukungan 50% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya sebesar 2,88	persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								kesatuan bangsa -Masih fluktuatifnya capaian IDI DIY -Perlunya penguatan ketahanan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19	maka akan meningkatkan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di daerah. -Telah dilakukan serangkaian usaha untuk meningkatkan dan atau mempertahankan capaian IDI tahun sebelumnya. Usaha tersebut antara lain adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait melalui pembentukan Pokja Pengembangan Demokrasi Daerah DIY - Tim Ketahanan Ekonomi dan Sosial DIY dibentuk oleh Badan Kesbangpol DIY bertujuan untuk	b. Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu DIY agar bersama KPU turut memberikan pendidikan politik, khususnya bagi warga DIY terutama terkait bidang pengawasan. Selain itu, Badan Kesbangpol DIY pada tahun anggaran 2020 dan 2021 juga memberikan ruang kepada Bawaslu DIY untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan Sosialisasi Kepemiluan yang difokuskan pada generasi muda dan kelompok marginal dalam rangka peningkatan partisipasi politik masyarakat yang bisa pula dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan politik, khususnya bagi warga

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
									meminimalisir indeks potensi konflik yang diakibatkan oleh dimensi ekonomi melalui penguatan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. Tim Ketahanan Ekonomi dan Sosial DIY melibatkan instansi yang terkait dan stakeholder yang ada di DIY. Kerjasama antar pemerintah, stakeholder dan masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan. Sudah saatnya pelibatan publik dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Kegiatan Tim Ketahanan Ekonomi dan Sosial DIY bertujuan untuk melaksanakan rencana aksi yang	DIY terutama terkait bidang pengawasan.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
									sudah di susun. Perlunya inventarisasi data permasalahan terkait ekonomi dan sosial yang terjadi di DIY sehingga perlu pembahasan yang jelas siapa melakukan apa. Perlunya Tim ketahanan ini membuat ukuran-ukuran yang jelas mengenai standar ketahanan ekonomi seperti apa sehingga hasil yang dilakukan oleh Tim Ketahanan bisa terukur dengan jelas. Selain itu Tim Ketahanan juga harus membuat master plan bagaimana membangun ketahanan ekonomi dan sosial secara kolaboratif.	
3	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	BADAN KESATUAN BANGSA		**PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**				-sebagian pelaksanaan kegiatan	-pelaksanaan kegiatan ditunda hingga triwulan IV	
						0	0			
				Pembinaan Jagawarga						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
		DAN POLITIK		Pembinaan/Pendampingan/Pengembangan Kapasitas Jaga Warga	kali	15	6	ditunda dikarenakan semua kegiatan dialihkan untuk penanganan Covid-19		
				Dukungan 50% terhadap capaian peningkatan jumlah kelompok Jaga Warga yang terbina dan mampu menjalankan fungsinya	persen	100	84.2			
				Jumlah kelompok Jaga Warga yang terbina dan mampu menjalankan fungsinya	Desa/ Kelurahan/ Kelom	325	325			
				Rakor Monev Jaga Warga	kab kota x 3 kali	0	0			
				Sosialisasi Revisi Pergub ke Kabupaten/Kota se-DIY	kali	6	6			
				Terbentuknya Kader Pembauran Budaya di DIY	mahasiswa	75	25			

6) *Urusan Sosial*

a) *Kondisi Umum*

Kondisi sosial masyarakat yang dinamis dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan permasalahan bersama yang membutuhkan kerjasama antar setiap *stakeholder* seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi berbasis perorangan, keluarga dan masyarakat.



Gambar 3.31. Bimbingan Keterampilan Tata Rias (Salon) Bagi Warga Binaan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan sosial dalam pembagian kewenangannya merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus ditangani bersama. Sasaran utama penanganan permasalahan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Dalam penanganan permasalahan sosial pemerintah daerah tidak hanya menangani langsung permasalahan sosial terhadap PMKS, tetapi juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendorong tumbuh berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan sebagai penunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Pemda DIY dilaksanakan melalui program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam target dan realisasi urusan sosial tahun 2020.

Ringkasan kinerja Urusan Sosial di Tahun 2020, digambarkan melalui indikator sebagai berikut:

(1) Indikator Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 42,17% dengan realisasi sebesar 43,85% dengan persentase capaian target 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 sebesar 99,03%;

(2) Indikator Persentase PPKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial: Target 2020 sebesar 51,58% dengan realisasi sebesar 45,35%. Capaian target 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 sebesar 87,88%.

Tabel 3.85. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	42,17	42,17	43,85	103,98	44,28	99,03
2	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan	%	51,72	51,58	45,35	87,92	51,60	87,88

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
	nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial							

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2021

Berdasarkan Tabel tersebut Capaian kinerja Urusan Sosial tahun 2020, Sasaran 1: Terwujudnya Kebutuhan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Perubahan Perilaku Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target 42,17% tercapai 43,85%; dengan demikian persentase realisasi terhadap target 103,98%, maka target tahun 2020 tercapai. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 44,48%, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut disebabkan oleh Tersedianya data PMKS dan PSKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya lembaga kesejahteraan sosial terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi sosial kab/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan untuk Sasaran 2: Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan target 51,58% Tercapai 45,35% dengan persentase ketercapaian sebesar 87,92%, sehingga target tahun 2020 tidak tercapai. Tidak tercapainya target kinerja sasaran 2 disebabkan oleh ada *pandemi* Covid-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan adanya *refocussing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat dampak *pandemi* Covid-19. Terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak memenuhi target, hal ini dikarenakan menyesuaikan SE Nomor: I/SE/III2020 Tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan penundaan atau pembatalan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang melibatkan banyak orang dalam upaya pencegahan pandemi Covid-19 di DIY.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020, Urusan Sosial dilaksanakan dengan 14 Program dan 31 Kegiatan. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp45.457.655.707,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp41.592.903.566,00 dan realisasi fisik 91,49%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	DINAS SOSIAL		**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**						PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH a. Urusan Sosial 1) Kewenangan Dinas Sosial DIY terhadap proses verifikasi dan validasi DTKS sebatas melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Untuk itu Dinas Sosial DIY bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali telah melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, melakukan pemantauan serta mengevaluasi sampai sejauh mana hasil verifikasi dan validasi data BDT yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti SKB tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK.07/2020,
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran						
				Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor	Jenis	13	13			
				Ijin Frekuensi/ Retribusi/ Pajak	Lokasi	1	1			
				Kir roda 4	Unit	4	4			
				Dukungan 6.94% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	23	23			
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	Buah	5	5			
				Penyediaan Jasa kebersihan	Lokasi	4	4			
				Penyediaan Materai 3000 dan 6000	Lembar	168	168			
				Pembayaran Pajak STNK roda 2/3, dan 4/6	Unit	77	77			
				Belanja kawat/fax/internet	Bulan	3	0	Tidak dipergunakan karena sudah difasilitasi dari Diskominfo (terkait fasilitasi *zoom meeting*)	Sudah difasilitasi oleh Diskominfo	
				Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jenis	3	3			
				Penyediaan Surat kabar lokal, regional, nasional dan Majalah	Jenis	4	4			
				Bibit tanaman Hias	Bulan	12	12			
				Retribusi sampah	Bulan	12	12			
				Pembayaran tagihan rekening air	Lokasi	6	6			
				Penyediaan Alat tulis kantor	Jenis	37	37			
				Pembayaran tagihan rekening listrik	Lokasi	24	24			
				Pembayaran tagihan rekening telepon	Lokasi	10	10			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Tertib administrasi keuangan, barang dan kepegawaian	Bulan	12	12			
				Jasa Arsip	Orang	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Jasa keamanan kantor dan tempat kerja	Orang	33	33			Nomor: 1 Tahun 2020, dan Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Permutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemda DIY menetapkan instruksi Gubernur DIY Nomor 4/INSTR/2020 Tentang Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota se-DIY tentang percepatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tahun 2020 Dinas Sosial DIY telah memberikan peningkatan kapasitas kepada petugas pendata di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dengan menggunakan aplikasi SIKS Droid yaitu sistem pengembangan SIKS-NG
				Dukungan 6.71% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Konsultasi dan koordinasi Dalam Daerah	Bulan	12	12			
				Makanan dan Minuman rapat/ sidang/ tamu	Os	4929	4929			
				Dukungan 2.74% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah	Bulan	12	12			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor						
				Konsultasi Perencanaan	Paket	1	1			
				Dukungan 6.09% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan Pagar Camp Assesment	paket	1	1			
				Pemasangan wastafel	paket	1	1			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Pengadaan AC Split 1 PK	Unit	2	2			
				Dukungan 0.50% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pengadaan Almari Besi/ Brankas	Unit	1	1			
				Pengadaan Televisi	Unit	1	1			
				Pengadaan Pompa Air *Camp Assesment*	Unit	4	4			
				Pengadaan HT Camp Assesment	Unit	4	4			
				Pengadaan AC Split 2 PK	Unit	3	3			
				Pengadaan AC Split 0.5 PK	Unit	2	2			
				Pengadaan CCTV dan Kabel monitor Dinas dan Camp Assesment	Unit	24	24			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Dukungan 0.96% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan saluran air	Paket	1	1			
				Pengurasan WC Camp Assesment	kali	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan bangunan/ gedung tempat kerja	Paket	1	1			yang lama sebagai pendukung kebijakan Pemerintah Pusat (Pusdatin Kemsos) di dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data. Hal ini segera ditindak lanjuti oleh Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Kulon Progo yang rencananya akan segera menggunakan aplikasi SIKS Droid tersebut pada proses verifikasi dan pendataan tahun 2021 kedepan. Dinas Sosial DIY akan segera membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Verifiksi dan Validasi DTKS dengan harapan proses verifikasi dan validasi DTKS kedepan dapat menghasilkan output data yang akurat. 2) Kondisi KPM PKH sampai dengan tahun 2018 berdasarkan laporan dari pendamping PKH sudah ada sejumlah 2.261 KPM PKH yang telah graduasi
				Pemeliharaan kran kamar mandi dinas dan camp	Buah	50	50			
				Pemeliharaan instalasi listrik di TMP/ tambah daya	Paket	1	1			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2, 3, 4, 6 Dinas	Bulan	12	12			
				Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2, 3, 4, 6	Unit	63	63			
				Dukungan 1.33% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Belanja Jasa Service Roda 2,3, 4, 6	Kali	146	146			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Penggantian Refil Filter Air Tanah Camp Assesment	Unit	10	10			
				Pemeliharaan CPU komputer	Unit	20	20			
				Pemeliharaan pompa air/ jet pump	Unit	2	2			
				Pemeliharaan printer	Unit	20	20			
				Pemeliharaan lampu balast	Unit	2	2			
				Pembelian BBM/ solar Genzet	Liter	510	510			
				Pemeliharaan faximile	Unit	2	2			
				Servis AC	Unit	90	90			
				Pemeliharaan laptop	Unit	6	6			
				Isi freon AC	Unit	30	30			
				Pemeliharaan generator/ genzet	Unit	2	2			
				Dukungan 0.31% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan lift	Unit	1	1			
				Pemeliharaan LCD proyektor	Unit	2	2			
				Pemeliharaan mesin potong rumput	Unit	4	4			
				Pemeliharaan sound sistem/ wireles	Unit	4	4			
				Pemeliharaan mesin ketik	Unit	5	5			
				Suku cadang AC	Unit	5	5			
				Pemeliharaan *handy talky*	Unit	10	10			
				Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional						
				Pengadaan kendaraan dinas roda 4 Dinas	Unit	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 1.06% terhadap sarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			mandiri dan mempunyai usaha mandiri. Data penerima PKH dan BPNT 2018 2019 PKH 213.557 212.624 (per tahap 4) BPNT 317.219 324.998 (Keputusan Perdirjen PFM No 13A/4/SK/HK0202/10/2019 Tanggal 1 Oktober 2019) Jumlah 530.776 534.352 3) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan graduasi PKH, sehingga warga yang sudah sejahtera tetapi masih menerima PKH bisa segera dikeluarkan dari kepesertaan PKH melalui kegiatan motivasi graduasi mandiri yang bersinergi dengan kabupaten/kota/ kecamatan/ desa serta bimbingan teknis KPM PKH sasaran graduasi. Tahun 2020 harapannya PKH Graduasi akan terus meningkat jumlahnya, akan tetapi karena adanya pandemi C-19
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
				Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu						
				Pembinaan Pekerja Sosial dan Penilaian Angka Kredit	Orang	32	32			
				Dukungan100% terhadap peningkatan kapasitas sumbedaya aparatur (peksos) bertambah/ meningkat dan kenaikan pangkat serta penyesuaian jabatan menurut angka kredit	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	dokumen	1	1			
				Dukungan 10.28% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Dukungan 15.50% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Dokumen	1	1			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Pengelolaan website Dinas	Kegiatan	1	1			
				Dokumen perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA, ROPK, PK, Renja	Dokumen	5	5			
				Dukungan 59.84% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Dokumen bahan perenc	1	1			anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung PKH Graduasi dirasionaliasasi untuk penanganan C-19 dan kegiatan diusulkan kembali pada tahun 2021.
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Dukungan 14.38% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	Kegiatan	1	1			
2	SOSIAL	DINAS SOSIAL		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				Jumlah PMKS di lapangan tidak bisa diprediksi sehingga menyesuaikan kondisi yang ada. Sebagai contoh Rumah Perlindungan Sosial yang ditargetkan dalam satu triwulan 6 klien, namun realisasinya hanya 2 dikarenakan selama penjangkauan hanya menemukan 2 dengan kategori anak terlantar, anak balita	1. Selalu berkoordinasi dengan instansi sosial kab/kota atau terkait, masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam penanganan PMKS 2. Selalu melakukan updating Data PMKS dan PSKS agar mampu digunakan dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan	1. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH a. Urusan Sosial 1) Kewenangan Dinas Sosial DIY terhadap proses verifikasi dan validasi DTKS sebatas melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Untuk itu Dinas Sosial DIY bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali telah melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, melakukan pemantauan serta mengevaluasi sampai sejauh mana hasil verifikasi dan validasi data BDT yang telah dilaksanakan oleh

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								terlantar, dan anak jalanan.	SKPD 3. Selalu menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik dengan instansi sosial kab/kota bersama-sama dengan PSKS dalam penanganan PMKS dan mendukung program kegiatan SKPD	masing-masing Kabupaten/Kota. Tahun 2020 Dinas Sosial DIY telah memberikan peningkatan kapasitas kepada petugas pendata di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dengan menggunakan aplikasi SIKS Droid yaitu sistem pengembangan SIKS-NG yang lama sebagai pendukung kebijakan Pemerintah Pusat (Pusdatin Kemsos) di dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data. Hal ini segera ditindak lanjuti oleh Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Kulon Progo yang rencananya akan segera menggunakan aplikasi SIKS Droid tersebut pada proses verifikasi dan pendataan tahun 2021 kedepan. Dinas Sosial DIY akan segera membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Verifiksi dan Validasi DTKS dengan harapan proses verifikasi dan
				Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat	%	5.91	13.5			
				Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial						
				Draf Rapergub anak dalam kondisi khusus	Kegiatan	1	1			
				Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis LKSA	Orang	30	30			
				Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Anak	20	20			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Bantuan Operasional Yayasan Sayap Ibu	Lembaga	1	1			validasi DTKS kedepan dapat menghasilkan output data yang akurat. 2) Kondisi KPM PKH sampai dengan tahun 2018 berdasarkan laporan dari pendamping PKH sudah ada sejumlah 2.261 KPM PKH yang telah graduasi mandiri dan mempunyai usaha mandiri. Data penerima PKH dan BPNT 2018 2019 PKH 213.557 212.624 (per tahap 4) BPNT 317.219 324.998 (Keputusan Perdirjen PFM No 13A/4/SK/HK0202/10/2019 Tanggal 1 Oktober 2019) Jumlah 530.776 534.352 3) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan graduasi PKH, sehingga warga yang sudah sejahtera tetapi masih menerima PKH bisa segera dikeluarkan dari kepesertaan PKH melalui kegiatan motivasi graduasi mandiri yang bersinergi dengan
				Kontribusi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 1.120 penyandang disabilitas, 1 kelembagaan disabilitas dan 480 anak bermasalah sosial atau 100 %	%	100	100			
				Pengasramaan Murid SLB	Orang	50	50			
				Perlindungan Anak Terlantar melalui LKSA	Orang	245	245			
				Pemenuhan kebutuhan dasar Anak Balita Terlantar (ABT)	Anak	20	20			
				Bantuan Operasional Rumah Singgah	Lembaga	7	7			
				Family Gathering Keluarga Penyandang Disabilitas	Orang	150	150			
				Perlindungan Bagi Anak Disabilitas melalui LKS	Orang	50	50			
				Bimbingan Sosial Pelayanan dan Perlindungan Anak Jalanan dan Referal Anak serta Bimbingan Sosial Anak Jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosial	Orang	75	178			
				Bantuan Operasional LPA DIY	Lembaga	1	1			
				Penyusunan rekomendasi terhadap Perubahan Perda Disabilitas DIY	Dokumen	1	1			
				Rekomendasi Adopsi Cota	Orang	30	88			
				Komite Penyandang Disabilitas	Kegiatan	1	1			
				Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang						
				Institusi Penerima Wajib Lapor Yang Dimonev	Lembaga	5	6			
				Assessment dan pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assessment	Orang	160	512			
				Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam *Shelter*	Orang	7	10			
				Pemulangan PMKS ke daerah asal, perujukan ke TRC Kemensos atau panti Sosial/Balai Rehabilitasi	Orang	30	52			
				Kontribusi Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				170 gelandangan pengemis pemulung, 7 orang ODHA dan 12 orang korban tindak kekerasan dan perdagan						kabupaten/kota/ kecamatan/ desa serta bimbingan teknis KPM PKH sasaran graduasi. Tahun 2020 harapannya PKH Graduasi akan terus meningkat jumlahnya, akan tetapi karena adanya pandemi C-19 anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung PKH Graduasi dirasionaliasasi untuk penanganan C-19 dan kegiatan diusulkan kembali pada tahun 2021.
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
				Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	67.6	69.62	1. Bencana alam, jumlah orang terlantar dan jenazah terlantar tidak bisa diprediksi setiap tahunnya sehingga kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada 2. Banyak kegiatan yang ditunda bahkan tidak dilaksanakan dalam upaya pencegahan pandemi Covid-19 sehingga banyak sasaran kegiatan yang tidak tercapai	: 1. Adanya kerja sama yang baik dengan mitra yang dimiliki Dinas Sosial dalam kegiatan pelayanan sosial bagi lansia dan korban bencana (LKS lansia, pendamping lansia Tagana DIY, BPBD DIY dan masyarkat khususnya yang berada dalam daerah rawan bencana) 2. Kemampuan dan kompetensi SDM di dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
									maupun mitra khuusunya Tagana dan pendamping lansia yang potensial sangat memahami pekerjaan sehingga sangat mendukung ketercapaian kegiatan. Selain itu sarpras untuk opersional ke lapangan juga memadai	
				Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin						
				Workshop Grand Desain Kawasan Ramah Lansia DIY	Kegiatan	1	0	Adanya *refocussing* anggaran		
				Bedah Kamar Lansia	Orang	50	50			
				Peringatan HLUN dan bhakti sosial 2020	Orang	2000	0	Adanya *refocussing* anggaran		
				Pelayanan harian lanjut usia melalui Taman Werda	Orang	125	0	Adanya *refocussing* anggaran		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Pelayanan LUT melalui Family Support	Orang	50	0	Adanya *refocussing* anggaran		
				Bantuan permakanan lanjut usia terlantar	Orang	100	100			
				Penumbuhan LKS Lanjut Usia	Lembaga	5	0	Adanya *refocussing* anggaran		
				Pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	Orang	1000	1000			
				Bimtap KPM Penerima PKH	Lokasi	10	0	Adanya *refocussing* anggaran		
				Bantuan penguatan kelembagaan lansia	Lembaga	1	1			
				Fasilitasi Lanjut Usia melalui *Home Care*	Orang	700	700			
				Kontribusi Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin terhadap Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 1.300 LU, peringatan HLUN atau 0.94 %	%	100	100			
				Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar						
				Kontribusi Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Serta Pemulangan dan Pemakanan Orang Terlantar terhadap Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam 1 tahun atau 33.33 %	%	100	100			
				Fasilitasi perawatan (Dimakamkan) Jenazah Terlantar (30 org) dan visum (15 orang)	Orang	45	20	Jenazah terlantar tidak bisa diprediksi setiap tahunnya sehingga kegiatan dilaksanakan sesuai dengan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								kondisi yang ada		
				Memfasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan	Tahun	1	1			
				Fasilitasi Tagana	Tagana	300	300			
				Fasilitasi Tenaga Pelopor Perdamaian	Orang	104	104			
				Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana Kekeringan	Tanki	751	751			
				Revitalisasi Pengurus Tenaga Pelopor Perdamaian	Orang	54	54			
				PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN						
				Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat	%	1.01	0	1. Tidak semua bantuan yang diberikan kepada penerima PKH graduasi bisa meningkatkan usaha mereka karena karakteristik penerima dan jenis usahanya berbeda-beda namun masih berjalan hanya saja progresnya berbeda-beda 2. Banyak kegiatan yang ditunda bahkan tidak dilaksanakan dalam upaya pencegahan	1. Adanya kerja sama yang baik antar petugas di lingkungan dinas dan pendamping PKH serta pengurus KUBE, LKM dan USEP di lapangan 2. Kemampuan dan kompetensi pendamping PKH dan pengurus KUBE, LKM dan USEP di lapangan sangat baik sehingga	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								pandemi Covid-19 sehingga banyak sasaran kegiatan yang tidak tercapai . Dari 9 keluaran dalam DPA menjadi 3 keluaran.	komunikasi dan koordinasi dengan dinas menjadi lancar	
				Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH						
				Pendampingan dan koordinasi penyaluran bantuan pangan /BPNT	Kab/Kota	5	5			
				UEP PKH Graduasi melalui BKK	Orang	825	0	Adanya *refocussing* anggaran		
				Kontribusi Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial Serta Pendataan PMKS dan PSKS terhadap Program penanganan fakir miskin dalam 1 tahun atau 100 %	%	100	100			
				Pendampingan dan koordinasi UEP PKH	Kab/Kota	5	5			
				Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS						
				Penyuluhan sosial melalui media cetak	Paket	5	5			
				Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	Lokasi	6	6			
				Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan PMKS serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	%	100	100			
				Penyuluhan sosial melalui media elektronik	Paket	25	25			
				Penyuluhan melalui media peragaan	Lokasi	25	25			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Publikasi Informasi kesejahteraan sosial melalui media surat kabar	Paket	50	50			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS						
				Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	25.88	25.88			
				Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai						
				Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan, dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial werdha disabilitas pada Balai RTPD	Orang	185	185			
				Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebanyak 44 orang yang mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial ataun 25.88 %	%	100	100			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL						
				Persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	%	45	0	Adanya *refocussing* anggaran		
				Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai						
				Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW	Orang	70	70			
				Kontribusi 45% Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai Terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi perempuan Penyandang Masalah Sosial Sebanyak 0 orang Perempuan Penyandang Maslah Sosial Yang Tersertifikasi	%	100	100			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG, DAN EKS PSIKOTIK						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat	%	14.4	17.6			
				Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai						
				Kontribusi 14.4 % Pelayanan Sosial Bagi Gelandanagn, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik sebanyak 10 orang (gelandangan pemulung pengemis yang mampan	%	14.4	14.4			
				Pelayanan Sosial Bagi Penyadang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai	Orang	250	250			
				Pelayanan sosial bagi gelandangan,Pemulung dan pengemis Warga Binaan Balai	Orang	50	50			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL						
				Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	%	80	105			
				Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai						
				Terwujudnya Warga Binaan Balai yang Mampu Hidup Normatif (77,50%)	%	100	100			
				Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi 40 Anak Terlantar dan 40 Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai PRSR	Orang	80	80			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL						
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	%	39.76	16.07	Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 30/HUK/2011 tentang Standar	Adanya kerja sama yang baik diantara semua pihak baik dari Balai RSPA	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, pada Bab 3 dengan judul Standar Penentuan Respon yang Tepat Bagi Anak pada Bab A Standar tentang Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam pelayanan poin nomor 3 yaitu Peran untuk Menerima Rujukan, menerangkan bahwa: LKSA harus bertindak sebagai pihak yang menerima rujukan untuk anak-anak yang	sendiri maupun dari pihak jejaring seperti petugas TKSK, Peksos Sakti maupun lembaga lembaga yang lain yang ikut berkontribusi terhadap pelaksanaan pemulangan anak dari tahab menyiapkan keluarga maupun lingkungan sampai proses pemulangan anak	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								membutuhkan pengasuhan alternatif dan tidak secara proaktif melakukan rekruitmen anak-anak dalam komunitas yang tidak membutuhkan pengasuhan alternatif. Berdasarkan peraturan pada tersebut, Balai RSPA tidak melakukan penjangkauan tetapi hanya menerima rujukan dari Dinas sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Sosial Masyarakat, Desa, dll.		
				Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Warga Binaan dan Terpenuhinya Hak-Haknya dan Mampu Berfungsi Sosial	%	100	100			
				Perlindungan, Pengasuhan Balita Terlantar	orang	25	16			
				Perlindungan, Perlindungan dan Pengembangan Sosial Anak Terlantar	orang	80	75			
				Perlindungan, Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	orang	35	10			
				PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR						
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya	%	100	104.67			
				Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai						
				Perlindungan, Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Orang	214	224			
				Kontribusi 100% Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar sebanyak 224 orang yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya	%	100	100			
				PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN						
				Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	%	51.58	45.2	Ada pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan adanya *refocussing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat dampak pandemi Covid-19.		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								Terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak memenuhi target, hal ini dikarenakan menyesuaikan SE Nomor: I/SE/III2020 Tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan penundaan atau pembatalan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang melibatkan banyak orang dalam upaya pencegahan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								pandemi Covid-19 di DIY. Contoh kegiatan yang tidak dapat memenuhi target dikarenakan pandemi Covid-19 yaitu pada prosentasi peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat (Ziarah Rombongan) targetnya 4500 orang realisasinya 2288 orang. Selain itu, pada indikator berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial (HKSN) juga tidak dapat		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								memenuhi target.		
				Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan						
				Pemberian Penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Pemberian Gelar Pahlawan dan Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian	Orang	7	7			
				Dukungan terhadap Meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/TMP, Monumen dan Tetenger serta kesejahteraan keluarga pahlawan terhadap program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	%	100	100			
				Peringatan Hari Besar Nasional dan HKSN	Orang	1500	500			
				Terfasilitasinya ziarah Rombongan di TMP dari berbagai Lembaga/Instansi se DIY maupun Luar Daerah	Orang	4500	2288			
				Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)						
				Penguatan kapasitas pengurus dan pembinaan/rakor FK PSKS Provinsi	Orang	40	40			
				Fasilitasi IPSM (rakor: 100 org)	Kegiatan	1	1			
				Peningkatan kapasitas TKSK	Orang	78	78			
				PSKS berprestasi (Orsos, WKSBM, KT, TKSK, PSM)	Kab/Kota	5	5			
				Dialog Interaktif dan Publikasi PUB dan UGB melalui media cetak, leaflet dan radio	Kegiatan	3	3			
				Fasilitasi Karang Taruna (Rakor: 100 org)	Kegiatan	2	2			
				Fasilitasi WKSBM (Rakor: 100 org)	Kegiatan	2	2			
				Pembinaan dan Rakor LK3 (40 org), Peningkatan Kapasitas Pengurus (50 org) dan Pertemuan Jejaring LK3 (50 org)	Kegiatan	1	1			
				Kontribusi PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS terhadap Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Bantuan Oprasional Karang Taruna DIY, IPSM DIY, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKSBKKS)	Lembaga	3	3			
3	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	DINAS SOSIAL		**PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN**						
				Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra						
				Dukungan 31,54% Terhadap Capaian Jumlah Karya Bahasa dan Sastra Yang Dilestarikan Dengan Target Capaian 2 Karya	%	100	100			
				Gerbang Praja (Sarasehan dan Penyuluhan Sosial)	Lokasi	83	83			

b. Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

a) Kondisi Umum

Permasalahan ketenagakerjaan DIY pada tahun 2020 semakin kompleks dengan adanya Pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi yang memburuk memaksa banyak pelaku usaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), merumahkan karyawan dan mengurangi jam kerja. Menurut data dari BPS terdapat 540.120 orang penduduk DIY yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran (3.370 orang), Bukan angkatan kerja (22.830 orang), Sementara tidak kerja (36.570 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (448.350 orang).

Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2020 sebanyak 2.228.000 orang, mengalami penurunan 0,80 % (18.000 orang) dibandingkan Agustus 2019, fenomena ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana banyak angkatan kerja yang bergeser menjadi bukan angkatan kerja misal mengurus rumah tangga. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,12%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY pada Agustus 2020 sebesar 4,57%, mengalami peningkatan 1,39 %poin dibanding TPT Agustus 2019 (3,18%). Penduduk bekerja DIY sebanyak 2.126.000 orang, berkurang 48.000 orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama pada Perdagangan (2,03 % poin) dan Pertanian (1,12 %poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Penyediaan akomodasi dan makan minum (1,16 %poin), Jasa Perusahaan (0,83% poin), dan Konstruksi (0,76 %poin). Diperlukan kebijakan lintas sektor yang lebih konkret untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di DIY masih bisa dipertahankan terbukti dengan diterimanya penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun 2020 dari Kementrian Ketenagakerjaan RI untuk dua (2) kategori yaitu IPK Terbaik Peringkat Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang dan IPK Terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja.

Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan tahun 2020 berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai berikut.

Tabel 3.86. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	orang	1.115	1.575	1.584	100,57	2625	60,34
2	Jumlah kasus yang diselesai-kan diluar pengadilan hubungan industrial	kasus	22	30	43	143,33	50	86

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2021

Indikator Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan hingga tahun 2020 sebanyak 1.584 orang , dengan rincian penempatan pada tahun 2019 sebanyak 1.115 orang bertambah 469 penempatan pada tahun 2020. Keberhasilan capaian indikator ini dengan mengoptimalkan lulusan pelatihan dan pemagangan tahun sebelumnya untuk ditempatkan serta dari lulusan pelatihan kegiatan selain APBD.

Indikator Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial dibandingkan dengan capaian tahun 2019 mengalami peningkatan 33,33% (capaian tahun 2019 110%). Melonjaknya jumlah kasus hubungan industrial sebagai dampak pandemi Covid-19 dan keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh bertambahnya sumber daya manusia Mediator Hubungan Industrial dan pemanfaatan Tehnologi Informasi (TI) yaitu penyelesaian kasus secara daring dan luring.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 urusan Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp8.870.963.970,00 yang terbagi dalam sembilan Program dan 25 Kegiatan. Dari total pagu anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp7.961.568.730,00 (89,75%), dengan realisasi fisik dapat tercapai 100%. Selanjutnya rincian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut.

No	Urusan Pemerin-tahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Terwujudnya Kesempatan Kerja 2. Terwujudnya hubungan industrial yang konusif untuk mengembang-kan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja 3. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**						
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100			
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran						
				Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan roda 4	unit	12	12			
				Pemilahan arsip keuangan in aktif	berkas	5600	5600			
				Pembayaran tagihan rekening telepon,listrik,air dan internet	bulan	12	12			
				Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Covid-19	Jenis	10	10			
				Sterilisasi Rusunawa	Blok	4	4			
				Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan	bulan	12	12			
				Penggandaan	lembar	50000	50000			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Langanan surat kabar harian,majalah dan tabloid	bulan	12	12			
				Alat tulis kantor	jenis	50	50			
				Bukti pembayaran retribusi sampah	bulan	12	12			
				Dukungan 44,34% terhadap administrasi perkantoran	persen	100	100			
				Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan roda 2	unit	30	30			
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	44	44			
				Barang logistik kantor	jenis	4	4			
				Penjilidan	buku	390	390			
				Barang Cetakan	jenis	38	38			
				Peralatan rumah tangga	jenis	0	0			
				Kebersihan gedung kantor	gedung	6	6			
				Pengiriman dokumen	Doku-men	600	600			
				Penyusutan arsip keuangan	berkas	4500	4500			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Kinerja 10 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	10	10			
				Kinerja 3 orang pengelola barang	orang	3	3			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku						
				Kinerja 16 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	orang	16	16			
				Dukungan 33,75% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100			
				Kinerja 3 orang pengelola administrasi kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	3	3			
				Kinerja 5 orang perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	5	5			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Dukungan 21,92% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				.Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarnaa aparatur	Persen	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Perlengkapan dan peralatan kantor sesuai RKPBMD	jenis	20	20			
				Dukungan 28,12% terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Terpeliharanya rumah dan gedung kantor	unit	3	3			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 45,92% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Kendaraan dinas operasional roda 4	unit	12	12			
				Kendaraan oprasional roda 2	unit	30	30			
				Dukungan 19,10% terhadap kebutuhan sarana dan prsarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Perlengkapan Kantor	jenis	7	6			
				BBM operasional genset	liter	200	200			
				Peralatan Kantor	jenis	7	7			
				Meubelair	jenis	5	5			
				Dukungan 6,87% terhadap sarana dan prasaran aparatur	persen	100	98			
				Peralatan Rumah Tangga	jenis	8	8			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
				Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	100			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pengembangan I S O						
				Dukungan sebesar 98,23% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	persen	100	100			
				Surveliance ISO 9001-2015	sertifikat	3	3			
				Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu						
				Instruktur	orang	38	38			
				Penguji K3	orang	11	11			
				Pengawasan ketenagakerjaan	orang	20	20			
				Pengantar kerja	orang	4	4			
				Mediator Ketenagakerjaan	orang	3	3			
				Dukungan sebesar 1,87% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	persen	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Dukungan 1,24% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhir Febuari 2020	nilai	80	84.72			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Dukungan 3,79% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaia kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Realisasi fisik dan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	persen	1	1			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Pengelolaan data dan informasi	Doku-men	1	1			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 72,06% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Dokumen perencanaan renstra dan renja	Doku-men	2	2			
				Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Doku-men	1	1			
				Rencana Operasional/ pelaksanaan kegiatan ROPK 2020	Doku-men	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	persen	100	100			
				Dukungan 11,89% terhadap penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
2	TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Terwujudnya Kesempatan Kerja 2. Terwujudnya hubungan industrial yang konusif untuk	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				1. Pola pikir peserta pelatihan sebagian besar kurang	1. Pemantauan penempatan lulusan pelatihan memanfaatkan teknologi informasi	1. Merubah pola pikir adalah pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam
				Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil	Persen	0.09	0.06			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja 3. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil	Persen	0.22	0.15	berminat kerja keluar DIY 2. Terlambatnya proses regenerasi mediator 3. Masih adanya kesempatan kerja yang tidak bisa terisi oleh pencari kerja	2. Mengoptimalkan peran Asosiasi Mediator Hubungan Industrial dan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia di DIY 3. Koordinasi lintas sektor untuk memaksimalkan pertumbuhan kesempatan kerja	mengatasi permasalahan ini akan diawali melalui penyusunan grand desain pembangunan karakter Angkatan Kerja Istimewa dan disosialisasikan ke seluruh masyarakat secara bertahap. 2. Kekurangan sumber daya manusia disiasati dengan pemanfaatan Tehnologi Informasi (TI) yaitu penyelesaian kasus secara daring dan pembuatan sistem Pengaduan Ketenagakerjaan. Cara ini ditempuh dalam rangka optimalisasi kinerja mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan. 3. Koordinasi lintas sektor untuk mendorong adanya penambahan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Perguruan Tinggi (PT) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), sehingga penempatan lulusan bisa lebih optimal dan lebih ada jaminan keamanan bagi pencari kerja.
				Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil	Persen	5.71	3.88			
				Pelatihan Tenaga Kerja Profesional						
				Pelatihan Aviation security	orang	0	0			
				Dukungan sebesar 5,25% terhadap target peningkatan persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil sebesar 5.71 %	persen	100	100			
				PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN						
				Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi	orang	400	61			
				Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi	lembaga	82	81			
				Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja						
				Dukungan sebesar 80 % terhadap target Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan sebanyak 400 Orang	persen	100	100			
				Sertifikasi Uji Kompetensi	orang	80	80			
				Pemagangan Tenaga Kerja						
				Penyiapan peserta untuk mengikuti	orang	20	20			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				seleksi pemagangan ke Jepang Program IM						
				Dukungan sebesar 20% terhadap target Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan sebanyak 400 Orang	persen	100	100			
				Pelatihan dan Standarisasi Lembaga Pelatihan						
				Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	lembaga	77	77			
				Dukungan 100% terhadap jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi sebanyak 82 lembaga	persen	100	100			
				PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL						
				Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	Perusa-haan	1488	1470			
				Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja						
				Raker Regulasi Pengupahan dan Jaminan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan	orang	0	0			
				Pembinaan rusunawa	orang	182	182			
				Pendataan pekerja/buruh rumahan	Doku-men	0	0			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK)	SK Gub	2	2			
				Dukungan sebesar 50% terhadap target jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial danjaminan sosial sebanyak 1488 perusahaan	persen	100	100			
				Koordinasi Dewan Pengupahan DIY	kali	3	3			
				Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial						
				Dukungan sebesar 50% terhadap target jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial sebanyak 1488 perusahaan	persen	100	100			
				Pendataan dan Pembinaan Perusahaan di WIlayah DIY	perusahaan	44	44			
				Sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit	sidang/ kesepa-katan	2	2			
				Peserta Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Perselisihan HI bagi Mediator	orang	30	30			

No	Urusan Pemerin-tahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN						
				Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja	%	63	64.61			
				Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja						
				Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	Perusa-haan	280	280			
				Dukungan sebesar 62,34% terhadap target persentase jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja sebesar 62%	persen	100	100			
				Pengawasan Norma Kerja						
				Naskah Akademik Dokumen Raperda Ketenagakerjaan	Doku-men	1	1			
				Dukungan sebesar 37,66% terhadap target persentase jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja sebesar 62%	persen	100	100			
				Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	Perusa-haan	280	280			

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Kondisi Umum

Meningkatnya data kasus kekerasan perempuan dan anak di DIY tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan Pemda DIY untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPAP2) DIY, antara lain Kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, fasilitasi pusat lembaga layanan, peningkatan kapasitas bagi petugas layanan, Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan lain sebagainya. Salah satu layanan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan lainnya adalah Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (Tesaga). Tidak hanya terbatas melalui media telepon, layanan Tesaga juga dikembangkan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat luas dan pada kondisi pandemi Covid-19 masyarakat lebih banyak mengakses layanan secara daring daripada bertemu langsung. Selain itu melalui media sosial masyarakat lebih memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. Fenomena gunung es para korban kekerasan yang enggan melaporkan bisa tereduksi dan lebih menampakkan angka yang mendekati sesungguhnya.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak diukur dengan indikator yaitu Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Adapun capaian sasaran tersebut pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.87. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Realisasi*		
Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio	0,50	0,46	0,52	86,96	0,45	86,96

Sumber: DP3AP2 DIY, 2020 (data diolah)

Pada Tahun 2020, target dari indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020 adalah sebesar 0,46 realisasi capaian sebesar 0,52 dengan persentase capaian sebesar 86,96%, dengan demikian maka target pada tahun 2020 belum tercapai. Apabila dibandingkan dengan kondisi capaian tahun 2019 sebesar 94,00% maka capaian tahun 2020 ini ada penurunan sebesar 7,04%. Melihat kondisi prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi maka dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan melalui berbagai program dan kegiatan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor. Upaya-Upaya yang dilakukan antara lain:

(1) Pengembangan jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dengan penambahan anggota yang terlibat sesuai dengan dasar berdasarkan Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2019 tentang perubahan Pergub DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan
(2) Terselenggaranya layanan Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) baik di tingkat provinsi maupun terbentukanya UPT PPA di kabupaten/kota.
(3) Pengembangan Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (TeSaGa) menjadi *multiplatform* komunikasi melalui Whatsapp, Blog, Instagram, Youtube dll.



Gambar 3.32. Talkshow Hari Anti Kekerasan di Media Radio

(4) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak melalui Radio, Televisi, dan Media Cetak.

(5) Meningkatkan jumlah lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Pergub DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Pergub DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
(6) Penerapan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan semakin efektif.
(7) Mengefektifkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sehingga mampu mengembangkan jaringan sampai tingkat kecamatan dan desa di DIY.
(8) Penerbitan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Tahun 2020-2022

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp1.154.703.000,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam dua Program dan lima Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp1.117.367.125,00 (96,77%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Peningkatan kualitas pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan terutama di P2TPAKK "RDU" 2. Percepatan penurunan prevalensi pada perempuan dan anak diprioritaskan untuk memperkuat jejaring antar lembaga	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**				Triwulan I 1. Adanya wabah Covid-19 yang menghambat penanganan korban kekerasan 2. Ancaman kekerasan melalui TI semakin tinggi, literasi digital masyarakat masih rendah 3. Sistem pencegahan yang komprehensif belum terbangun Triwulan II: Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan pelayanan tidak optimal. Sosialisasi, Edukasi, dan kegiatan pencegahan terkendala secara teknis maupun dukungan anggaran yang dihapus (Refokusing COVID) Triwulan III: 1. Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan pelayanan tidak optimal. 2. Sosialisasi, Edukasi, dan kegiatan pencegahan terkendala secara teknis maupun dukungan anggaran yang dihapus (Refokusing COVID) Triwulan IV: 1. Perkembangan teknologi informasi membuat dunia tanpa batas, potensi ancaman kekerasan	1. Meningkatkan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak ke masyarakat dan sekolah; 2. Melanjutkan sosialisasi anti kekerasan pada perempuan dan anak	
				Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	76	83.89			
				Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan						
				Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)	lembaga	1	1			
				Advokasi pencegahanTindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada stakeholder di desa	orang	0	0			
				Kampanye Hari Anti Kekerasan	orang	0	0			
				Fasilitasi Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK 'RDU') - Hibah	lembaga	1	1			
				Advokasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan bagi pekerja informal	orang	0	0			
				Penguatan Kapasitas Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) DIY	orang	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pendampingan korban pasca penanganan	orang	15	15	semakin tinggi 2. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat mengalami berbagai permasalahan misalnya kebijakan WFH, SFH, berkurangnya penghasilan akibat PHK dll sehingga menambah stresor yang bisa memicu munculnya perilaku kekerasan 3. Modus kekerasan mengalami berbagai perubahan yang sering kali sulit diantisipasi pencegahannya 4. Belum terbangun sistem pencegahan yang komperhensif		
				Fasilitasi Gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	lembaga	0	0			
			Peningkatan level capaian KLA di DIY melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA.	**Pemenuhan Hak-hak Anak**						
				Inisiasi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	kader	0	0			
				Workshop dalam rangka pemenuhan hak anak	angkatan	0	0			
				TOT Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Angkatan	0	0			
				Pernyelenggaraan HAN di DIY	orang	0	0			
				Pembinaan kabupaten kota layak anak	gugus tugas KLA	6	6			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
				Persentase perempuan pengambil keputusan di ranah public	%	34.38	35.92			
			Pengembangan Sistem, kelembagaan dan pemanfaatan data gender dan anak untuk menunjang pelaksanaaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender	**Kelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah**						
				Pendampingan PPRG oleh *Focal Point*	OPD	24	37			
				Penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat Mentor	1	0.95			
			1. Peningkatan perempuan pengambil keputusan di ranah publik diprioritaskan pada penguatan kapasitas perempuan potensial dan penguatan jejaring kemitraan/kerjasama dengan OPD, Lembaga masyarakat, media serta partai politik. 2. Pembentukan Desa Prima Sejahtera baru di fokuskan di daerah tertinggal/miskin dan pendampingan secara berkelanjutan untuk menuju klasifikasi Desa Prima Sejahtera maju	**Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**						
				Sosialisasi pemahaman gender	kali	0	0			
				Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial	kali	1	1			
				Pembinaan Desa Prima	Desa	100	105			
				Advokasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Partai Politik	kali	1	1			
				Hibah Kelompok	Desa	15	15			
				Pengelolaan Data Gender dan Anak						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			Penguatan Sistem Data Gender diprioritaskan dengan penguatan system dan penguatan kelembagaan tim data gender dan anak.	Mendukung bahan pengambilan kebijakan gender dan anak sebesar 24,58%	%	100	100			
				Fasilitasi organisasi perempuan	organisasi	3	3			
				Update data gender dan anak serta data perlindungan perempuan dan anak	dokumen	0	0			
				Fasilitasi forum pendukung PUG PPPA	forum	4	4			
				Pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan informasi gender dan anak	sistem	0	0			

3) Urusan Pangan

a) Kondisi Umum

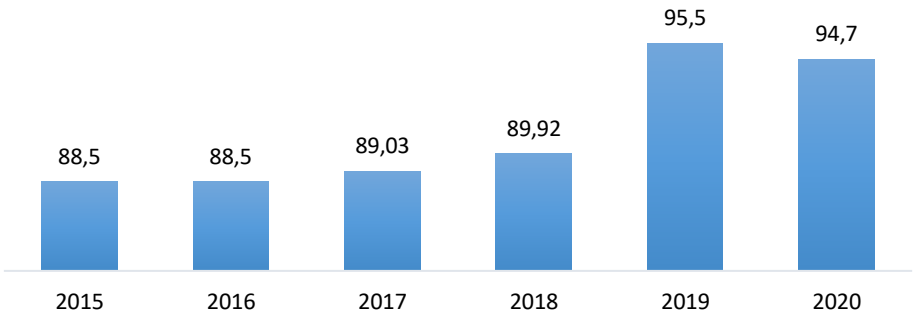
UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda prioritas untuk kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Urusan Pangan memiliki dua indikator kinerja sasaran yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan.

Tabel 3.88. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 Terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	95,50	90,52	94,7	104,62	91,12	103,93
2	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	%	40,79	39,74	41,03	96,75	38,65	93,84

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

Skor PPH dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan serta digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Tujuan dari PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) dengan skor ideal 100.



Gambar 3.33. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2015-2020
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil susenas BPS capaian skor PPH tahun 2020 di DIY sebesar 94,7 jauh lebih tinggi dari capaian angka nasional sebesar 86,30. Kalau kita lihat dengan capaian skor PPH tahun 2020 telah melebihi target tahunan RPJMD 2017–2022. Namun demikian realisasi skor PPH mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 0,8 jauh lebih kecil dari penurunan di tingkat nasional yang mencapai 1,6.

Angka capaian skor PPH di atas 90 merupakan katagori cukup ideal dan nilai ideal adalah 100, sehingga walaupun selama 1 tahun terakhir di DIY terjadi penurunan skor PPH, kualitas konsumsi masih lebih baik dari tingkat nasional. Namun demikian berdasarkan konsumsi kalori/kapita/hari di DIY, masih perlu ditingkatkan keseimbangan antara 9 kelompok bahan pangan. Sasaran utamanya adalah penurunan konsumsi beras dan terigu dengan mendorong peningkatan konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah/biji berminyak yang capaiannya masih di bawah standar yang dianjurkan dengan berbasis pada pangan lokal.

Untuk mencapai skor PPH ideal dan peningkatan kesimbangan konsumsi kalori/kapita/hari di masyarakat, perlu didukung dengan perubahan pola konsumsi pangan yang dimulai dari sejak usia dini serta keterlibatan 4 pilar, yaitu masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui progam/kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui bentuk kampanye, gerakan, edukasi, promosi dan sosialisasi.

Tercapainya indikator skor PPH didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Lahan pekarangan rumah tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Terwujudnya ketahanan pangan didukung oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan atau distribusi pangan, dan pemanfaatan atau konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah maupun impor. Pada tahun 2020, pemerintah daerah menambah cadangan pangan sejumlah 60 ton beras. Tahun 2020 tidak ada penyaluran cadangan pangan, sehingga jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras secara kumulatif telah mencapai 275,041 ton. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus ditambah melalui pengadaan tiap tahunnya. Cadangan pangan sangat berguna ketika terjadi kekurangan pangan, bencan alam, bencana sosial dan keadaan darurat. Ketersedian cadangan pangan terkait dengan ketersediaan energi. Tahun 2020 ketersediaan energi yang dilhitung dengan Neraca Bahan Makanan (NBM), ketersediaannya mencapai 3.734 kkal/kapita/hr.

Aspek distribusi dan akses pangan juga terus diperkuat dan ditingkatkan. Salah satu upaya dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan bagian dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Tahun 2020 ada penyesuaian nama Toko Tani Indonesia (TTI) menjadi Pasar Mitra Tani (PMT). Lembaga ini diharapkan dapat mendorong stabilisasi harga sehingga konsumen dapat membeli komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar. Dalam masa pandemi PMT juga pernah melakukan kerjasama dengan *marketplace* daring seperti Aplikasi Gojek/Goshop dan Aplikasi Titipku dengan memberikan ongkir murah /diskon ongkir jika belanja di PMT.

Akses pangan ke masyarakat juga terus diperluas dengan adanya fasilitasi bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan. Fasilitasi ini diberikan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan secara kontinu dengan harga yang terjangkau.

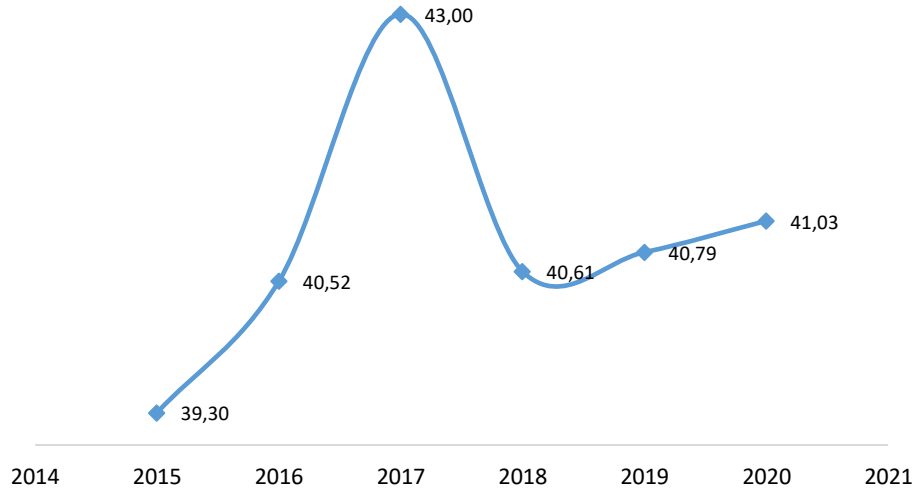
Aspek keamanan pangan sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, diamanatkan bahwa urusan pangan melibatkan lintas sektor yang menangani pangan segar dan olahan. Oleh karena itu diperlukan Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang bersifat koordinatif dengan kewenangan masing-masing OPD dengan harapan potensi cemaran kimia, fisik, biologis maupun mikrobiologis pada pangan segar dan olahan dapat dicegah atau diminimalisir mulai dari proses produksi dengan *Good Agricuture Practices* (GAP)/*Good Farming Practices* (GFP), pasca panen dengan *Good Handling Practices* (GHP), pengolahan dengan *Good Manufacturing Practices* (GMP), distribusi dengan *Good Distribution Practices* (GDP) dan *Good Retailing Practices* (GRP), sehingga pangan segar dan olahan sampai ditingkat konsumen dalam kondisi aman dikonsumsi. Adanya JKPD mendukung penyelesaian kasus–kasus pangan yang insidentil dan melibatkan rantai pasok pangan dari hulu sampai hilir.

Pada tahun 2020 ada 74 kelompok usaha yang memperoleh nomor register Produk Domestik (PD) atau Register Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tersebar di Sleman 21 unit, Kulon Progo 10 Unit, Bantul 34 Unit dan Kota Yogyakarta 9 unit. Sertifikat Packing House (PH) pada tahun 2020 diberikan kepada 2 unit usaha.

Sampai dengan tahun 2020 masih ada 4 Desa Rawan Pangan di DIY, yaitu Desa Kalirejo, Kokap, Kulon Progo; Desa Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo; Desa Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo; dan Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul. Hal ini menjadi tugas dan permasalahan yang harus diselesaikan secara tuntas melibatkan peran serta lintas sektor karena menjadi salah satu prioritas utama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY. Pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka kemiskinan di DIY dari 11,70% di tahun 2019 menjadi 12,28% di tahun 2020. Dari 4 Desa Rawan Pangan yang tersisa disebabkan oleh indikator akses pangan yang dipengaruhi oleh tingginya angka kemiskinan di desa-desa tersebut. Walaupun tantangannya cukup berat namun Pemda DIY tetap melaksanakan

berbagai upaya mengatasi kerawanan pangan dan mengentaskan kemiskinan melalui usaha ekonomi produktif, antara lain melalui Desa Mandiri Pangan (Demapan), Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), dan Pengembangan Korporasi Usahatani, serta Penguatan Lumbung Pangan dan Distribusi Pangan.

Indikator kinerja kedua adalah persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan, yaitu persentase pendapatan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli makanan dibanding dengan semua pengeluaran untuk membeli makanan dan non makanan.



Gambar 3.34. Gambar Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan di DIY tahun 2015-2020
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tahun 2019 sesuai data yang dirilis BPS sebesar 40,79%. Capaian tahun 2020 sebesar 41,03%, tercapai sebesar 96,75% dibanding target tahun 2020, yaitu 39,74%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 38,65% tingkat capaiannya sebesar 93,84%. Kondisi pandemi selama tahun 2020 telah menyebabkan melemahnya perekonomian di DIY yang berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat. Jika dibandingkan realisasi tahun 2019, ada peningkatan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan

untuk makanan sebesar 0,24%. Peningkatan pengeluaran terjadi pada kelompok makanan umbi-umbian, daging, telur dan susu, serta sayuran sedangkan penurunan terjadi pada kelompok padi-padian, ikan/udang/cumi/kerang, buah-buahan serta makanan dan minuman jadi. Turunnya pengeluaran makanan untuk kelompok padi-padian sudah sejalan dengan penurunan tingkat konsumsi padi-padian/beras pada komposisi Skor PPH yang merupakan indikator kinerja lainnya di penyelenggaraan urusan pangan. Rokok yang juga merupakan bagian dari pengeluaran makanan mengalami kenaikan 0,03%. Hal ini sejalan dengan data hasil survei yang dilakukan Komite Nasional Pengendalian Tembakau, tingkat konsumsi rokok cenderung meningkat selama masa pandemi ini.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Urusan Pangan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui dua Program, yaitu Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan dengan 5 Kegiatan dan Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan dengan 2 kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.159.656.000,00 dengan realisasi Rp1.108.369.750,00 (95,58%). Rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Peningkatan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani. 2. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan. 3. Pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana). 4. Pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani. 5. Menumbuhkan sentra-sentra pembibitan ternak lokal Pendampingan dan pengawalan kelompok. 6. Pendampingan dan pengawalan kelompok. 7. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pemantapan kelembagaan penyuluhan, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan. 8. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sector. 9. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah).	**PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN**				Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan sesuai kaidah Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus ditingkatkan. Terjadinya pandemi Covid-19 menurunkan tingkat perekonomian masyarakat sehingga kemungkinan pola konsumsi akan berubah, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan pokok terlebih dulu dan keberagaman dan kualitas konsumsi mungkin agak diabaikan.	Sosialisasi, promosi, dan gerakan konsumsi pangan B2SA secara berkesinambungan	1) Kampanye penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) sudah dilaksanakan di 18 lokasi dari rencana pelaksanaan di 30 lokasi dengan menggunakan dana APBD, kampanye penganekaragaman konsumsi pangan lokal di 16 lokasi dan bimtek budidaya hortikultura di lahan pekarangan di 16 lokasi dengan menggunakan dana BTT, serta sosialisasi produk pangan lokal yang menggunakan Danais. Kampanye dan sosialisasi ini bertujuan: • Mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. • Meningkatkan ketrampilan masyarakat akan pengolahan pangan lokal dengan
				Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	%	0,08	-0,52			
				Kegiatan Penyediaan Cadangan Pangan						
				Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	ton	60	60			
				Informasi data cadangan pangan	bulan	12	12			
				NBM Sementara, NBM Tetap, Prognosa Ketersediaan Pangan, ARAM I	dokumen	4	4			
				Distribusi Pangan Masyarakat						
				Operasional TTIC	tahun	1	1			
				Penyelenggaraan Jogja Benih						
				Informasi perbenihan dan layanan konsultasi	tahun	1	1			
				Gerakan Penganekaragaman Pangan						
				Gerakan penganekaragaman pangan	lokasi	18	18			
				Pengawasan Keamanan Pangan						
				Sertifikasi dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)	dokumen	2	2			
				Persentase pengawasan dan	persen	80	80			

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Targ-et	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			10. Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal. 11. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan. 12. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilitasasi harga pangan strategis, dan pemantauan distribusi, harga, akses pangan. 13. Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan. 14. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Perbenihan. 15. Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat. 16. Pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.	pembinaan keamanan pangan				Masih ditemukan proses produksi pangan dan pangan yang beredar yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan.	Optimasi peran JKPD sesuai kewenangan yang diampu masing-masing instansi melalui: 1) Pembinaan keamanan pangan 2) Pengawasan pangan *pre market* dan *post market* 3) Registrasi dan sertifikasi produk dan pelaku usaha pangan	diadakannya praktek pengolahan pangan lokal. • Sebagai promosi pangan lokal di masyarakat 2) Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat lingkup DIY, sudah diterbitkan Perda no.2 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan serta Pergub No. 22 tahun 2016 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Berdasarkan Perda dan Pergub tersebut, semua ketentuan mulai diberlakukan 5 tahun sejak diundangkan, sehingga sejak tahun 2019 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melalui lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) DIY

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Targ-et	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										melakukan pengawasan keamanan pangan pre-market dalam bentuk sertifikasi dan registrasi produk PSAT yang diproduksi dan dikemas oleh petani/pelaku usaha tani di wilayah DIY, serta melalui Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dilakukan juga pengawasan keamanan pangan *post-market* melalui pengambilan dan pengujian sampel pangan segar yang beredar dipasar tradisional dan retail modern yang dilakukan rutin setiap bulan melakukan pemantauan. Selain itu DPKP DIY juga bekerja sama dengan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) yang beranggotakan lintas SKPD yang membidangi pengawasan keamanan pangan untuk melakukan pengawasan insidentil bersama-sama saat terjadi kasus atau KLB (kejadian luar biasa) terkait keamanan pangan di wilayah DIY.

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Targ-et	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										3) Rencana kegiatan ke depan: • Sosialisasi, gerakan, bimtek di 4 kabupaten dan 1 kota sebanyak 78 kali dengan melibatkan praktisi dan akademisi • Budidaya hortikultura di lahan pekarangan: 25 lokasi • Penyusunan Peraturan Gubernur tentang JKPD sebagai landasan hukum.
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN				1. Masih tingginya angka kemiskinan di DIY 2. Masih terdapat 4 desa rawan pangan di DIY . 3. Pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat menurun.	Koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai OPD dan lembaga terkait untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan dalam rangka menangani kemiskinan dan kerawanan pangan melalui jaminan sosial, peningkatan infrastruktur, dan usaha ekonomi produktif	1) Sampai dengan tahun 2020 masih ada 4 Desa Rawan Pangan di DIY. Hal ini menjadi tugas dan permasalahan yang harus diselesaikan secara tuntas, melibatkan peran serta lintas sektor, dan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY. Target akhir RPJMD tahun 2022 sudah tidak ada lagi Desa Rawan Pangan di DIY. Target ini akan dicapai melalui berbagai upaya, antara
				Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	4	4			
				Penanganan Desa Rawan Pangan						
				Desa Mandiri Pangan	Desa	5	5			
				Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) Penumbuhan	Gapoktan	2	2			
				Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan						
				Laporan analisis situasi pangan dan gizi	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Targ-et	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										lain melalui Desa Mandiri Pangan (Demapan) dan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM). Desa Mandiri Pangan ditujukan untuk mengatasi kerawanan pangan dan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi produktif. Masyarakat di desa rawan pangan difasilitasi dengan hibah dan pendampingan usaha sesuai potensi wilayahnya. Hibah yang diberikan akan dimanfaatkan untuk usaha produktif baik di bidang pangan maupun non pangan, diharapkan dapat menambah pendapatan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Pendampingan pasca penyaluran hibah dilaksanakan melalui berbagai bimtek dan pelatihan untuk menambah keterampilan

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Targ-et	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										masyarakat dalam mengelola usaha produktif. Tahun 2020, hibah Demapan diberikan untuk 5 desa, yang meliputi 3 desa lama (tahap pengembangan) dan 2 desa baru (tahap penumbuhan). (2) Masalah aksesibilitas juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya Desa Rawan Pangan. Untuk mendekatkan pangan ke masyarakat dengan harga terjangkau, dilaksanakan kegiatan LAPM (Lembaga Akses Pangan Masyarakat). Kegiatan di tahun 2020 dilakukan melalui pemberian hibah uang kepada 2 gapoktan untuk dimanfaatkan sebagai modal pendirian warung/toko bahan pokok. Sasaran kegiatan ini adalah gapoktan yang mampu mengelola pembelian, pengelolaan dan penjualan bahan pangan. Nantinya gapoktan akan

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Targ-et	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										mengelola warung/toko dan menjual sembako ke masyarakat dengan harga lebih rendah atau minimal sama dengan harga pasar. Dengan adanya warung/toko ini diharapkan dapat mendekatkan masyarakat dengan bahan pokok sehingga aksesibilitas pangan masyarakat meningkat. 3) Dari aspek cadangan pangan, pada tahun 2020 Pemerintah Daerah DIY telah menambah jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 60 ton. 4) Rencana ke depan: kegiatan Demapan 6 desa, LAPM 2 gapoktan, Pengembangan Korporasi Usahatani, Distribusi Pangan dan Penguatan Lumbung Pangan. Sedangkan pengadaan CPPD tidak dilakukan karena pengadaan di tahun

No	Urusan Pemerintah-an	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Targ-et	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										2020 sudah cukup banyak. Biasanya hanya sekitar 10-25 ton per tahun namun dengan adanya kebijakan dari Pusat untuk penguatan cadangan pangan di daerah dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dan adanya alokasi DID tambahan untuk DIY yang dapat dimanfaatkan untuk menambah jumlah CPPD menyebabkan pengadaan CPPD 2020 menjadi jauh lebih banyak dibanding kondisi normal.

4) Urusan Pertanahan

a) Kondisi Umum

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. UU ini mengatur penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang diakui UU. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 terdiri dari dua indikator, yaitu Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi dan Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan tanah kadipaten dan tanah desa. Berikut ini tabel target dan realisasi kinerja Urusan Pertanahan tahun 2020.

Tabel 3.89. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Realisasi		
1	Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Realisasi		
2	Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	%	50,08	59,45	56,85	95,63	88,67	64,11

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

(1) Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi

Capaian persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi pada tahun 2020 telah sesuai target. Indikator capaian yaitu pelayanan terhadap permohonan pengajuan ijin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Pada tahun 2020 permohonan ijin penetapan lokasi sebanyak lima dan empat yang sudah terbit ijin penetapan lokasinya. Permohonan ijin penetapan lokasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.90. Rincian Permohonan Ijin Penetapan Lokasi

No	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2020	Tol Jogja-Solo (proses yang sudah dilakukan lanjutan sosialisasi dan konsultasi publik, terbit Ijin Penetapan Lokasi)	Nomor SK IPL 206/KEP/2020
2	2020	Tol Jogja - Bawen (koordinasi persiapan, sosialisasi, konsultasi publik, IPL terbit)	Nomor SK IPL 385/KEP/2020
3	2020	Pembangunan jalan ruas Prambanan – Lemah abang segmen A (sosialisasi awal, pendataan awal, konsultasi publik, IPL terbit)	Nomor SK IPL 352/KEP/2020
4	2020	Pembangunan pelebaran jalan ruas Karangnongko - Toyan (sosialisasi, konsultasipublik, IPL terbit)	Nomor SK IPL 279/KEP/2020
5	2020	Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-YIA	Masih dilakukan Verifikasi dokumen perencanaan dan rapat koordinasi, belum dilaksanakan tahapan persiapan karena ada perubahan trase

Sumber: Dinas Pertanahandan Tata Ruang DIY, 2021

(2) Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa

Capaian indikator Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa tahun 2020 tidak mencapai target. Realisasi capaian indikator sebesar 56,85% atau 95,63% dari target 59,45%. Dibandingkan dengan tahun 2019, capaian tersebut meningkat 6,77%. Rincian capaian pada tahun 2020 yaitu persentase jumlah bidang tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa yang didaftarkan untuk dapat dikelola serta dapat dimanfaatkan sebesar 56,85%. Capaian tersebut didukung paling besar dari capaian persentase bidang tanah kasultanan yang didaftarkan sebanyak 12.287 bidang dan tanah desa 150 bidang dari target keseluruhan 21.877 bidang tanah kasultanan dan kadipaten agar memiliki kepastian hukum. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2020 telah didaftarkan sebanyak 10.729 bidang dan telah terbit sebanyak 7.214 sertifikat. Persiapan pendaftaran tanah pada tahun berikutnya sudah dilakukan pemberkasan sebanyak 1.301 bidang.

Tabel 3.91. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten/ Kota	Pendaftaran								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	100	631
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	500	395	3442
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	402	2184
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	500	2939
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	202	3091
Jumlah		45	45	744	2170	1140	1270	2559	2760	**12287**

Sumber: Dinas Pertanahandan Tata Ruang DIY, 2021

Tabel 3.92. Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Desa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

No	Kabupaten	Jumlah Bidang	Bidang Sudah Sertifikat	Bidang Belum Sertifikat	Sertifikat Terverifikasi 2019	Sertifikat Belum diverifikasi	Penyesuaian Sertifikat
1	Bantul	15,743	2,117	13,626	390	1,727	50
2	Kulon Progo	4,156	3,649	507	3,649	0	*0*
3	Gunungkidul	10,882	3,283	7,599	1,277	2,006	50
4	Sleman	19,498	7,007	12,491	7,007	0	50
Jumlah		**50,279**	**16,056**	**34,223**	**12,323**	**3,733**	**150**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Pertanahan dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp3.191.656.800,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam tiga Program dan sembilan Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat terealisasi sebanyak Rp2.473.639.637,00 (77,50%), dengan pencapaian fisik sebesar 97,12%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	PERTANAHAN	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1. Sinkronisasi regulasi penataan ruang (vertikal dan horisontal)	**PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN**				perlu koordinasi intensif dengan pemohon dalam proses ijin penetapan lokasi	percepatan dalam fasilitasi pemohon ijin penetapan lokasi	
			2. Menyebarluaskan informasi penataan ruang							
			3. Meningkatkan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang							
			4. Mewujudkan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan penataan ruang antar wilayah dan sektoral							
			5. Mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW							
			6. Mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	%	100	100			
			7. Meningkatkan kualitas penataan administrasi pertanahan	**Layanan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			8. Mewujudkan penataan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa sesuai peruntukan	dokumen laporan kegiatan Layanan Penetapan Lokasi Pembangunan Bagi Kepentingan Umum	Doku-men	1	1			
				Dukungan 100% terhadap Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	%	100	100			
2	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1. Sinkronisasi regulasi penataan ruang (vertikal dan horisontal)	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN**				adanya permasalahan pertanahan di lapangan yang perlu untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku	percepatan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten serta penyelesaian permasalahan pertanahan sesuai dengan aturan yang berlaku	2. PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN a. Urusan Pertanahan Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai tindak lanjut Undang-undang tersebut telah ditetapkan Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten telah ditetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan
			2. Menyebarluaskan informasi penataan ruang	Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara, Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten, bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	Bidang	11.419	10.863			
			3. Meningkatkan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang	Dokumen tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dipelihara	Doku-men	37	37			
			4. Mewujudkan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan	Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah	Bidang	55	55			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			penataan ruang antar wilayah dan sektoral	kasultanan dan tanah kadipaten						Pemanfaatan Tanah Kasultanandan Tanah Kadipaten, danPeraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kegiatan yang dilakukan dalam rangka urusan pertanahan meliputi: a) Kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah kadipaten b) Pengadaan sarana dan prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen c) Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten d) Penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten e) Penyiapan bahan pertimbangan teknis izinpenggunaan tanah; dan f) Kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
			5. Mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	**Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**						
			6. Mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dukungan 11,22% terhadap bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	%	100	94			
			7. Meningkatkan kualitas penataan administrasi pertanahan	Soft copy Peta batas administrasi wilayah Kelurahan dan Peta Sarana Prasarana Kelurahan di Kota Yogyakarta	Kelu-rahan di Kota Yo	45	45			
			8. Mewujudkan penataan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa sesuai peruntukan	Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Desa	Serti-pikat	200	153			
				Identifikasi dokumen Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah	Kepu-tusan	500	390			
				Pemeliharaan Dokumen Pertanahan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 5,30% terhadap Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 52 dokumen	%	100	0			
				Inventarisasi dokumen pertanahan di Desa	Doku-men	1	1			
				Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan						
				Dokumen Penyiapan Upgrade Sistem Informasi Pertanahan terintegrasi Tata Ruang	Doku-men	1	1			
				Dokumen Sinkronisasi Data Pertanahan di DIY	Doku-men	1	1			
				Updating basis data pertanahan dalam Sistem Informasi Pertanahan: - Tanah Kasultanan 41 Desa di Kabupaten Sleman - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Sleman - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Bantul;	Kabupa-ten	2	2			
				Dokumen Profil Penatagunaan Pertanahan di DIY	Doku-men	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 1,2% terhadap bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	%	100	100			
				Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa						
				Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY	Doku-men	1	1			
				Dukungan 1,77% terhadap Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanandan tanah kadipaten untuk peningkatan tertib administrasi Tanah Kasultanan, TanahKadipaten dan Tanah Desa hingga mencapai 55%	%	100	100			
				Perencanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 5,05% terhadap Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang sudahdidaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanahkadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	%	100	100			
				Dokumen hasil pembahasan usulan perubahan tahun 2020, rencana 2021 dan rencana 2022 urusan pertanahan	Doku-men	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan						
				Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan	Doku-men	1	1			
				Dukungan 3,13% terhadap Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang sudahdidaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanahkadipaten, dan tanah desa hingga	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				mencapai 11.419 bidang						
				PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN						
				Bidang Tanah Desa yang Didaftarkan di BPN	Bidang	2000	150			
				Persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	%	10.02	70.02.00			
				Persentase pengajuan permohonan serat kekancingan yang ditindaklanjuti	%	100	100			
				Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten						
				Rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten	Rekomen-dasi	375	375			
				Berkas Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Desa.	Berkas Rekomen-dasi	60	70			
				Review RaPerdes Pemanfaatan Tanah Desa di 129 desa	Review Perdes	129	129			
				Sosialisasi Peraturan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	kali (sosiali-sasi)	55	24			
				Tersusunnya Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur 34 Tahun 2017	RaPer-gub	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				tentang Pemanfaatan Tanah Desa						
				Dukungan 8,27% terhadap Persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa hingga mencapai sebesar 10,20% dan Persentase pengajuan permohonan serat kekancingan yang ditindaklanjuti hingga mencapai 100%	%	100	89			
				Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						
				Penanganan permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Pertanahan	Doku-men	1	1			
				Dukungan 15,77% terhadap peningkatan pemanfaatan tanah desa untuk mendukung persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa hinggamencapai 10,2%	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Verifikasi permohonan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	Dokumen	1	1			
				Dokumen hasil inventarisasi permasalahan tanah desa di 8 Desa	Dokumen	1	1			
				Pelayanan Penanganan Aduan Permasalahan Pertanahan	Dokumen	1	1			

5) Urusan Lingkungan Hidup

a) Kondisi Umum

Kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting. Kualitas Lingkungan Hidup secara kuantitatif dapat dihitung menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Kerangka perhitungan IKLH yang diadopsi saat ini adalah pengembangan dari konsep yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan sebagai indikator.

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka DIY menetapkan IKLH sebagai salah satu indikator dalam sasaran "Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan" sebagai upaya untuk mewujudkan misi "Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban" sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2017-2022.

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola lingkungan hidup yang berkualitas, maka urusan lingkungan hidup memiliki indikator kinerja berupa ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Realisasi ketercapaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.93. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2020 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Realis-asi		
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	92,29	94,39	93,12	98,65	100	93,12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

Nilai IKLH tahun 2020 adalah sebesar 61,60 dimana realisasi tersebut masih berada di bawah target yaitu 62,44. Berdasarkan angka realisasi tersebut maka diperoleh angka katercapaian sebesar 93,12 % dan masih berada di bawah target ketercapaian IKLH tahun 2020

sebesar 94,39 %. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun berjalan (N) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra dikalikan 100%. Berdasarkan Klasifikasi IKLH RPJMN 2020 – 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka realiasi nilai IKLH DIY pada tahun 2020 berada pada kriteria cukup baik.

Sebagaimana diketahui bahwa kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Realisasi pada tahun 2020, hanya nilai IKU yang realisasinya berhasil melampaui target yaitu 89,14 dari target sebesar 88,40. Sedangkan realisasi IKA sebesar 38,43 dan realisasi IKTL sebesar 58,32. Realisasi IKA dan IKTL belum dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu 38,60 untuk IKA, dan 60,86 untuk IKTL.

Tidak tercapainya nilai IKA karena tingginya kadar Bakteri Koli tinja dan Total Koli yang dominan berasal dari limbah domestik. Sedangkan nilai IKTL yang belum mencapai target karena adanya perubahan sumber data untuk perhitungan IKTL, yang hanya bersumber dari interpretasi citra satelit KLHK dan kajian RTH tahun 2018, tanpa sumber data lainnya.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.030.148.837,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai lima Program yang terdiri dari 12 Kegiatan. Adapun realisasi dari belanja langsung pada tahun 2020 adalah sebesar Rp11.057.801.755,00 atau sebesar 91,91% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;	**PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP**				Dari 80 Usaha dan/atau Kegiatan, terealisasi 24 Usaha dan/atau Kegiatan yang TAAT (30%) dan 56 Usaha dan/atau Kegiatan TIDAK TAAT (70%) disebabkan karena kurangnya pemahaman pelaku usaha, salah satunya belum melaksanakan pengelolaan dan pemantauan LH sebagaimana yang tercantum dalam Matrik RKL-RPL	Adanya pembinaan/bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dari Bidang P2KLH, sehingga menambah pemahaman pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan LH. Dibuktikan dengan 80% usaha/kegiatan secara rutin sudah menyampaikan laporan sehingga memudahkan tim pengawas.	
			2. Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY	persen	48.75	30			
			3. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya;	Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRPKab/Kota	%	100	193.75			
			4. Meningkatkan efektivitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan;	**Pengkajian Lingkungan Hidup**						
			5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;	Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan	Bulan	12	12			
			6. Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara;	dan/atau Program Kabupaten/Kota di DIY						
			7. Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian polusi;	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) DIY	Dokumen	1	1			
			8. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim global dan penanggulangan dampak gas rumah kaca;	Dukungan 50 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY dan Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRPKab/Kota pada tahun	%	100	100			
			9. Meningkatkan sinergisitas dan memperjelas pembagian peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara ambient.	**Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu**						
			10. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan	Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			Perusakan Lingkungan Hidup;	lingkungan hidup yang masuk						
			11. Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;	Dukungan 53,05 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY sebesar 3	%	100	100			
			12. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya;	Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan	Usaha/ Kegiatan	100	100			
			13. Meningkatkan efektivitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan;	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**						
			14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;	Jumlah sumber pencemar air sungai (*point source*) yang ditangani di 10 sungai (usaha/kegiatan)	usaha/ kegiatan	222	150	Adanya *refocussing* anggaran mengakibatkan target tidak tercapai. Dari 207 usaha/kegiatan hanya terealisasi sebesar 150 usaha/kegiatan, melalui Data Triwulan Laporan Kualitas Limbah Perusahaan (*Point*	Optimalisasi anggaran melalui pendampingan dan pembinaan kepada 150 usaha/kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								Source), pembinaan dan Data Hasil Pengawasaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Point Source*)		
			15. Meningkatkan efektivitas kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran air sungai;	Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai (lokasi)	lokasi	96	20	Target tidak dapat terpenuhi karena adanya rasionalisasi anggaran antisipasi Covid-19. Realisasi hanya tercapai sebesar 20 lokasi yang diperoleh melalui Data Pembinaan Bank Sampah (Non Point Source).	Pelibatan pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sebagai upaya untuk mengurangi umlah sumber pencemar	
			16. Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum;	Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota (usaha/kegiatan)	usaha/ kegiatan	70	70			
			17. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah;	**Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup**						
			18. Peningkatan pembinaan bagi kelompok	Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			masyarakat peduli lingkungan.							
			19. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas perangkat Daerah untuk melaksanakan Program Penambahan Tutupan Vegetasi;	Dukungan 66,67 % terhadap tercapainnya target penanganan sumber pencemar air sungai (point source dan non point source) yang ditangani di 10 sungai dan sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/ Kota	%	100	100			
			20. Meningkatkan akesebilitas dengan para pemrakarsa kegiatan untuk fasilitasi lahan atau pengembangan tutupan vegetasi dan konservasi lahan.	Dokumen Perencanaan Gerakan Bersih Sungai	dokumen	1	1			
				Pengelolaan Sampah dan Limbah B3						
				Pembinaan dan workshop pengelola sampah mandiri	Kelompok	16	16			
				Dukungan 33,33 % terhadap tercapainya target penanganan pengelolaan sampah dan limbah B3 di 5 Kab/Kota pada tahun n	%	100	100			
				Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY	Kab/Kota	5	5			
				Pengadaan Perlengkapan Gerakan Bersih Pantai	Paket	1	1			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	Penghargaan	3	1			
				Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	Penghargaan	3	1			
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup						
				Dukungan sebesar 54,56% terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan	%	100	100			
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup	Kab/Kota	5	5			
				Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru)	Kab/Kota	5	5			
				Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan						
				Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi	Dokumen	1	1			
				Dukungan sebesar 50 % terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan	%	100	100			
				Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan						
				Dukungan sebesar 50 % terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan						
				Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan	Unit	61	61			
				Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan	Parameter	19	19			
				PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM						
				Penambahan tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi	ha	165	75	Adanya rasionalisasi anggaran dan keterbatasan aksesibilitas ke lokasi penanaman	Mencari sumber alokasi anggaran selain dari APBD, misalnya dari APBN untuk membantu ketercapaian program	
				Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	%	0.1	0.8			
				Rehabilitasi Hutan dan Lahan						
				Data Tutupan Lahan DIY	Dokumen	1	1			
				Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY	Dokumen	1	1			
				Dukungan sebesar 25% terhadap tercapainya penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi sebesar 165 ha dan penurunan kerusakan hutan sebesar 15,72 ha	%	100	100			
				Penanaman Vegetasi	ha	50	50			
				Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY	Dokumen RTT Rehabili-tasi	1	1			
				Konservasi Sumber Daya Alam						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan sebesar 15,65% terhadap pencapaian target Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi pada tahun 2020	%	100	100			
				Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui pemeliharaan tanaman 5 ha (1600 btg + 400 Penyulaman) di Pantai Mlarangan Asri, Dukuh II, Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	ha	5	5			
				Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman seluas 10 ha (4000 btg) di Glagah	ha	10	10			
				Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 ha)	ha	10	10			
				Perlindungan dan Pengamanan Hutan						
				Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan- Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun)- Identifikasi daerah rawan gangguan keamanan hutan (24 RPH)- Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian- Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan- Patroli	BDH	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Gabungan Pengamanan Hutan						
				Dukungan sebesar 25% terhadap tercapainya penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi sebesar 165 ha dan penurunan kerusakan hutan sebesar 15,72Ha	%	100	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						
				Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional	ton/ hari	660	57.397.875	Realisasi jumlah sampah yang terkelola di TPA Piyungan adalah 565,995 ton/hari, kurang dari target 660 ton/hari. Adanya pandemi covid menyebabkan berkurangnya kegiatan belajar di sekolah atau kampus dan berkurangnya aktivitas wisata sehingga mengurangi timbulan sampah.	Membangun komitmen para pelaksana kegiatan dalam pengelolaan sampah di DIY	
				Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah						
				Monev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi (2 unit)	Dokumen	2	2			
				Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	Unit	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah pada TPA Regional dari 600 ton/hari menjadi sebesar 660 ton/hari	%	100	100			
				Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA	km	1.2	1.2			
				Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah						
				Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	ha	10	10			
				Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA	Lokasi	2	2			
				Pengadaan Perlengkapan K3	Jenis	6	6			
				Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	Unit	5	5			
				Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 Unit)	Unit	1	1			
				Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA	Unit	1	0.95	Pungujian Kualitas Udara dan Kualitas Air tidak bisa dilaksanakan pada periode ke II (April s/d Juni 2020) dikarenakan Covid-19 baru puncak wabah dan adanya Surat Edaran Gubernur No. 433/4958 tanggal 17 Maret 2020 terkait Pencegahan Covid-19 di DIY, sehingga kegiatan dilapangan dihentikan untuk	Pengujian hanya dilakukan 2 periode selama tahun 2020	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								sementara dan pelaksanakan untuk periode II tidak dilaksanakan		
				Sewa Alat Berat	Unit	2	1			
				Sewa Kendaraan Pengangkut BBM	Unit	1	1			
				Dukungan kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah pada TPA Regional dari 600 ton/hari menjadi sebesar 660 ton/hari	%	100	100			
				Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA	Orang	35	35			

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a) Kondisi Umum

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di DIY tahun 2020 menggambarkan orientasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya mendukung terlaksananya Sensus Penduduk 2020 mencatat Indonesia menuju Satu Data Kependudukan untuk Indonesia Maju dan untuk mendukung suksesnya Pilkada 2020 di Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunungkidul, terutama dalam kesiapan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Penguatan fungsi pelayanan pada instansi pelaksana Adminduk yang berdampak langsung terhadap kemudahan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan dan strategi penguatan fungsi pelayanan dilakukan dengan mengoptimalkan kualitas dan kecepatan pelayanan di instansi pelaksana tetap menjadi prioritas kegiatan. Guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan Covid-19, pemerintah Kabupaten/Kota tetap melayani pengurusan dokumen Adminduk, pelayanan dimaksimalkan dengan menggunakan sestem Daring/daring, selain itu fasilitasi penduduk rentan bagi anak penghuni panti juga menjadi prioritas kegiatan dalam mendukung pemenuhan hak sipil anak penghuni panti. Selain memberikan pelayanan kepemilikan KTP-el, pemerintah juga memberikan fasilitasi kepemilikan dokumen penting kependudukan bagi penduduk miskin/marginal yaitu berupa akta kelahiran dan akta perkawinan.

Pada tahun 2020 Pemda DIY telah melaksanakan dua kali pelayanan terpadu dalam rangka percepatan kepemilikan KTP-el yang bertempat di Gedung Graha Pandawa Balaikota Yogyakarta dan Pendopo Manggala Parasamsya Kabupaten Bantul. Pelayanan terpadu ini merupakan wujud dari Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan *(#GISA*), yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran utama dari *#GISA* adalah kepemilikan KTP-el pertama kali dan pemegang Surat Keterangan (surat pengganti KTP sementara) dan kepemilikan kartu KIA bagi anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.



Gambar 3.35. GISA di Gedung Parasamya Kabupaten Bantul

Dalam masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, salah satunya adalah pembatasan dalam pelaksanaan sosialisasi dengan cara tatap muka secara langsung. Karena itu kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan secara daring/daring. Melalui program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) yang diselenggarakan Pemda DIY dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat serta memungkinkan adanya dialog dua arah dari masyarakat dengan Kepala Dinas Dukcapil terkait pertanyaan serta permasalahan yang dialami di bidang administrasi kependudukan sehingga masyarakat bisa mendapatkan solusi secara langsung dengan cepat dan tepat.

Pendayagunaan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan KTP-el untuk mendukung kebutuhan data bagi instansi lintas sektor. Pada tahun 2020 Pemda DIY telah memberikan dukungan terkait pemanfaatan data kependudukan kepada beberapa instansi baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY atau instansi non pemerintah yang melakukan pelayanan publik. Beberapa Instansi yang sudah memanfaatkan data kependudukan diantaranya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam integrasi pengembangan sistem informasi pelaporan dan monitoring. Pemda DIY juga sudah memanfaatkan data kependudukan dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Selain itu, dalam rangka memaksimalkan *tracing* penyebaran Covid-19 di DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY telah mengintegrasikan data kependudukan dalam pengembangan aplikasi *JogjaPass,* yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan untuk *self screening* Covid-

19 sekaligus identitas digital bagi masyarakat DIY. Data kependudukan juga dimanfaatkan oleh beberapa OPD di DIY dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima bantuan, yaitu oleh Dinas Sosial DIY, Dinas Kebudayaan DIY dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY. Data kependudukan juga telah dimanfaatkan oleh beberapa Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Panti Rapih, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sadewa dan Rumah Sakit Bhayangkara DIY dalam integrasi sistem pendaftaran pasien baru.

Sedangkan, untuk Pencapaian target daerah terkait kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP-el, akta kelahiran, dan akta kematian). Pada tahun 2020, Pemda DIY menargetkan 86,10% penduduk DIY telah memiliki dokumen penting administrasi kependudukan. Dari target tersebut sampai dengan akhir Desember 2020 telah terealisasi kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan sebesar 99,42% atau setara 114,05% dari target yang ditetapkan. Dengan kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan, masyarakat akan lebih mudah dan terjamin dalam mengakses fasilitas publik.

Tabel 3.94. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	97,87	87,17	99,42	114,05	87,97	103,01

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2021

Pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran yang melampaui sebesar 12,25% dari target tersebut karena didukung oleh beberapa faktor yang diantaranya:

(1) Konversi *database* kelahiran non-SIAK ke database SIAK untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran;
(2) Kerja sama dengan puskesmas, bidan, dan rumah sakit dalam rangka percepatan penerbitan akta kelahiran;
(3) Mewajibkan penduduk datang untuk melampirkan akta kelahiran;

(4) Membebaskan sanksi denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran bagi penduduk dari keluarga miskin; dan pendataan penduduk secara berkala; serta;
(5) Memfasilitasi penerbitan akta kelahiran dan KIA bagi anak-anak di panti Asuhan dan anak inklusi terutama untuk anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya dengan menerapkan program **SIPITA** (Strategi Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Anak-Anak di Panti Asuhan dan Anak Inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta). Sebagai *role model* program SIPITA telah dilaksanakan di Panti Asuhan Kabupaten Bantul berupa pemenuhan dokumen akta kelahiran dan KIA, untuk kedepanya program tersebut akan dilaksanakan di semua Kabupaten dan Kota se DIY.

Capaian DIY atas kepemilikan akta kelahiran anak sampai akhir 2020 tercatat 96,75%. Adapun untuk capaian atas kepemilikan akta kematian tahun 2020 adalah 100%. Dari jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan sebanyak 35.923, yang sudah diterbitkan akta kematianya adalah 35.923.

Sampai dengan Desember 2020, jumlah total penduduk DIY berdasarkan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di kabupaten/kota sebanyak 3.671.189 orang. Sedangkan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2.817.907 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.379.518 orang dan perempuan sebanyak 1.438.389 orang. Dari jumlah penduduk wajib KTP tersebut, sebanyak 2.809.057 atau 99,68% telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat di database KTP-el. Walaupun angka perekaman dan kepemilikan KTP-el di DIY telah melampaui target RPJMD, namun masih ada penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman biometrik sebanyak 13.185 orang atau 0.47% dari total wajib KTP. Beberapa penyebab sebagian penduduk wajib KTP belum melakukan perekaman yaitu karena tinggal sementara di luar DIY, bekerja di luar negeri, dan/atau telah pindah domisili tetapi belum melapor.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada Tahun 2020 secara keseluruhan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan melalui satu Program dan tiga kegiatan dengan pagu Rp964.981.000,00. Secara keseluruhan belanja tersebut dapat terealisasi sebanyak Rp802.421.358,00 (83,15%) dengan capaian fisik sebesar 100%.

Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BIRO TATA PEMERINTAHAN	1. Penyelenggaraan adminduk yang melindungi hak warga negara atas dokumen kependudukan dan Peningkatan kualitas pengelolaan data kependudukan	**PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				1. Masih banyak penduduk rentan yang belum memiliki dokumen adminduk 2. masih banyak penduduk marginal yang belum terfasilitasi akta perkawinan 3. Kurangnya pemahaman penduduk tentang kegunaan dan tata cara pengurusan dokumen adminduk 4. Masih rendahnya cakupan kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	1. Pemberian fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran dan KIA) bagi penduduk rentan 2. Pemberian fasilitasi penerbitan akta perkawinan bagi penduduk marginal 3. a. Pelaksanaan sosialisasi Perda 9 tahun 2015 tentang penyelenggaraan adminduk dan KIA b. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan adminduk melalui media cetak dan media elektronik c. Pelaksanaan kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat" 4. a. Menjalin kerja sama dengan stakeholders dalam rangka pemberian insentif bagi anak pemegang KIA di DIY b. Fasilitasi blangko KIA kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota se DIY	Data kemiskinan merupakan salah satu data sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam membangun data sektoral, termasuk data kemiskinan, kini seluruh OPD telah memahami bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai produk kebijakan nasional bidang administrasi kependudukan merupakan elemen data yang wajib tercantum. Dampak positif dari keberadaan NIK di data sektoral adalah kemudahan proses updating data melalui mekanisme penyandingan dan integrasi dengan database kependudukan. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai pengelola database kependudukan membuka akses seluas-luasnya kepada OPD yang memerlukan data penduduk by NIK by name by address untuk
				Persentase Kepemilikan Dokumen Penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	86.1	99.42			
			2. Penyelenggaraan adminduk yang melindungi hak warga negara atas dokumen kependudukan	**Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
				1. Blangko KIA	Keping	20000	20000			
				5. Kerja Sama dengan Lembaga Penyedia Jasa/ Layanan Publik untuk Pemberian Insentif	Lembaga	7	7			
				2. Dokumen Akta Kelahiran bagi Penduduk Miskin/ Marginal	Akta	400	400			
				6. KTP-el dan KIA yang Diterbitkan dalam Pelayanan Terpadu	KTP-el	200	200			
				7. Sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2015	Orang	600	600			
				4. Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk	Dokumen	80	80			
				3. Dokumen Akta Perkawinan bagi	Akta	50	50			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penduduk Miskin/ Marginal					c. Pelaksanaan pelayanan terpadu pencetakan KIA"	pembangunan dan updating data sektoral. Adapun mekanisme akses data penduduk bisa dilakukan melalui integrasi database, penyandingan data, dan view access only. Sampai saat ini, OPD yang telah memanfaatkan database kependudukan sebagai sumber basis data sektoral adalah Dinas Sosial DIY, Disperindag DIY, Dinas Kominfo DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY, serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Gangguan atas keamanan data merupakan risiko yang harus dihadapi oleh pengelola data, termasuk data kependudukan. Risiko gangguan tersebut semakin besar ketika database terkoneksi dengan jaringan komunikasi data. Untuk mengurangi potensi tindak peretasan data kependudukan,
				Dukungan sebesar 61,68% terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	100	100			
			3. Peningkatan kualitas pengelolaan data kependudukan	**Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**				1. Belum banyak OPD/lembaga yang mengakses data kependudukan untuk keperluan verifikasi dan validasi serta percepatan pelayanan publik 2. Masih banyak OPD/Lembaga yang kurang paham terkait dengan pemanfaatan data kependudukan. 3. Tingginya gangguan keamanan database dan sistem informasi kependudukan	1. Pelaksanaan sosialisasi kepada OPD/lembaga terkait tata cara dan prosedur pemanfaatan data kependudukan 2. Pelaksanaan sosialisasi kepada OPD/lembaga terkait pemanfaatan data kependudukan 3. Penggunaan jaringan tertutup untuk akses data oleh OPD dan lembaga pengguna, melakukan pembaruan firewall secara berkala untuk meningkatkan standar keamanan dan melakukan pembaruan versi bahasa pemrograman secara bertahap	
			4. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan	Dukungan sebesar 23,03% terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100			
				3. Profil Perkembangan Kependudukan 2018	Dokumen	1	1			
				1. Instansi yang Mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan	Instansi	2	2			
				2. Pengembangan Sistem Informasi Adminduk	Sistem	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)					terhadap aplikasi terpasang.	beberapa kebijakan teknis telah dilakukan antara lain, menggunakan jaringan tertutup untuk akses data oleh OPD dan lembaga pengguna, melakukan pembaruan firewall secara berkala untuk meningkatkan standar keamanan, dan melakukan pembaruan versi bahasa pemrograman secara bertahap terhadap aplikasi terpasang.
				Dukungan sebesar 16.34% terhadap cakupan kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	100	100			
				1. Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik	cetak, elektronik	1.1	1.1			
				2. Peningkatan Kapastitas Aparatur Adminduk di Kab/kota	orang	30	30			
				3. Penyebarluasan program pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga penyedia layanan public	lembaga	30	30			

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Kondisi Umum

Pemda DIY menetapkan sasaran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2017-2022 yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan.

Pada tahun 2020 terdapat 4 target rumusan bahan kebijakan dalam rangka penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yaitu Kajian Pemenuhan Hak Anak, Kajian Penggunaan Dana Desa untuk Penurunan Angka Kemiskinan DIY, Kajian Kesiapan DIY menuju Provinsi Inklusi dan Rapergub Pengarusutamaan Gender. Dari rencana target kinerja tersebut terealisasi rumusan bahan kebijakan berupa Rapergub Pengarusutamaan Gender yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021.

Target dari indikator sasaran Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun 2020 adalah empat lembaga dengan capaian empat lembaga. Berdasarkan capaian tersebut maka persentase capaian pada tahun 2020 adalah 100%. Pencapaian indikator kinerja sasaran dilakukan dengan Fasilitasi dan Pendampingan TP-PKK DIY, Pembinaan terhadap pelaksana posyandu terbaik tingkat DIY, Pembinaan Bumdes melalui pelatihan bisnis plan dan Manajemen Pengelolaan BUMDes.

Sementara itu, Fasilitasi dan Pembinaaan LPMD/K dalam rangka mendukung Program Tentara Manunggal Membangun Desa, Pemda DIY mengalokasikan Rp1.225.000.000,00 dari APBD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat masyarakat di bidang fisik seperti pembangunan talud, jalan, gorong gorong rehab masjid dan sebagainya dan pembangunan non fisik dalam bentuk penyuluhan terkait penyakit masyarakat, narkoba, fanatisme sempit dan bela negara. Dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 juga dilaksanakan penyuluhan pencegahan virus corona, penerapan protokol kesehatan dan sosialisasi protokol pemakaman Covid-19 dan sebagainya. Lembaga kemasyarakatan adalah motor penggerak

pembangunan di desa/kelurahan, sehingga perlu senantiasa ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 3.95. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Real-isasi	% Reali-sasi		
1	Rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	Doku-men	4	4	1	25	4	25
2	Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	Lem-baga	4	4	4	100	4	100

Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2021

Strategi keberhasilan pencapaian sasaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan melalui:

(1) Meningkatkan kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah desa, TNI, Pelaku ekonomi, perguruan tinggi serta seluruh pihak yang terlibat dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa

(2) Dukungan terhadap keterlibatan TNI dalam pembangunan desa melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa, serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat Desa

(3) Peningkatan kapasitas pengelola Bumdes melalui Pelatihan tentang manajemen pengelolaan BUMDes; dan Pelatihan tentang *Business Plan* sehingga pengelola BUMDes mampu melaksanakan kegiatan BUMDes mulai dari mencari potensi desa, perencanaan hingga evaluasi kegiatan hasil musyawarah para tokoh masyarakat setempat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

(4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan pemberdayaan masyarakat yang berasaskan semangat gotong royong masyarakat melalui Gerakan Gotong Royong dan Segoro Amarto, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa, pendapatan masyarakat, dan aset desa.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada Tahun 2020 secara keseluruhan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui program kegiatan dengan alokasi Rp3.182.342.000,00 kemudian dilakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penangangan pandemi Covid-19 menjadi Rp793.451.500,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 6 Program dan 16 kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp728.161.706,00 (91,77%) dengan capaian fisik sebesar 100%.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	URUSAN UMUM	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui KIE dan pendampingan di wilayah prioritas daerah (IPM dan kantong kemiskinan) 2. Percepatan Peningkatan Keberdayaan lembaga masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pengelola lembaga masyarakatdan Bumdes. 3. Peningkatan cakupan jumlah layanan Bumdes dengan membentuk Bumdes baru dan menyehatkan Bumdes yang	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Pandemi Covid-19 menyebabkan Beberapajadwalkegiatan mundur	dilakukan penjadwalan ulang kegiatan
				Mendukung tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran					
				Dukungan 21,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				Surat Masuk	surat	1500	1500		
				Surat keluar	surat	2000	2000		
				bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	unit	4	4		
				Alat Tulis kantor	jenis	39	39		
				Barang cetakan	jenis	7	7		
				Barang Penggandaan	lembar	12498	12498		
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	8	8		
				Surat kabar	jenis	2	2		
				Buku Referensi/Peraturan Perundangan	-	-	-		
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					
				Dukungan 12,58% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				Kinerja pengelola keuangan 9 orang, Barang 2 orang dalam 1	orang	1	1		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			telah terbentuknamun kurang aktif. 4. Peningkatan cakupan kerjasama antar Kabupaten/ Kota, Desa/ Kelurahan	tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku					
				kinerja pengelola kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	11	11		
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi					
				Dukungan 65,87% terhadap adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				makan dan minum sidang	bulan	12	12		
				konsultasi dan koordinasi dalam daerah	bulan	12	12		
				konsultasi dan koordinasi luar daerah	bulan	12	12		
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
				Mendukung tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan					
				almari 0 unit	-	-	-		
				filling cabinet 0 unit	-	-	-		
				komputer 11 unit	%	100	100		
				notebook 5 unit	%	100	100		
				printer 7 unit	%	100	100		
				almari pendingin 1 unit	%	100	100		
				dispenser 2 unit	%	100	100		
				LCD proyektor 1 unit	%	100	100		
				kamera digital 1 unit	%	100	100		
				faximile 1 unit	%	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional					
				Dukungan 12,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMD terpelihara	unit	4	4		
				kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMD terpelihara	unit	2	2		
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan					
				Perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMD terpelihara 8 jenis	%	100	100		
				Dukungan 49,77% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional					
				Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2	unit	2	2		
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM					

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN					
				Mendukung tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD					
				Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, renstra dan IKU)	%	100	100		
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD					
				Dukungan 12,59% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukng kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 16 kegiatan	%	100	100		
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi					
				dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Dokumen Renja 2021	dokumen	1	1		
				DPA 2021	dokumen	1	1		
				ROPK 2020	dokumen	1	1		
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD					
				Dukungan 10,42% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100		
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	%	100	100		
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		**PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT**				Adanya pandemi Covid-19 , Pelaksanaan rapat koordinasi dilaksanakan lebih terbatas denganmenjalankan protokol kesehatan, Beberapajadwalkegiatan mundur	dilakukan penjadwalan ulang kegiatan, Rapat dilaksanakan dengan menjalankaan protokol kesehatan/zoom
				Desa/kelurahan model gerakan gotong royong	kelurahan	8	8		
				Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat					
				Mendukung terbentuknya kelompok masyarakat desa dengan model segoro amarto	%	100	100		
				Jumlah kelurahan implementasi model segoro amarto	kelurahan	8	8		
4	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT**				1. Adanya *refocussing* anggaran karena Covid-19 sehingga terdapat target output yang tidak dilaksanakan yang berpengaruh pada capaian kinerja eselon II dan III	dilakukan penjadwalan ulang kegiatan, Rapat dilaksanakan dengan menjalankaan protokol kesehatan/zoom
				Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	dokumen	4	1	2. Rapat koordinasi dilaksanakan lebih terbatas denganmenjalankanprotokol kesehatan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat				3. Beberapa jadwal kegiatan mundur	
				Dukungan pada penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat	%	100	100		
				Jumlah kebijakan sektor sosial yang tersusun	dokumen	0	0		
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PM yang terlaksana	Laporan	1	1		
				jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaankebijakan sektor sosial yang terlaksana	Laporan	1	1		
				Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor sosial yang terlaksana	Laporan	1	1		
				kebijakan sektor sosial yang terlaksana	Laporan	1	1		
				Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Laporan	1	1		
				Perumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat					
				penyusunan kajian pemenuhan hak anak	Dokumen	0	0		
				Rapergub pengarusutamaan gender	Dokumen	0	0		
				jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PPPA yang terlaksana	Laporan	1	1		
				Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor KB-KS yang terlaksana	Laporan	1	1		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor PP-PA yang terlaksana	Laporan	1	1		
				Laporan pelaksanaan kegiatan	Laporan	1	1		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT				1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan program TMMD dilaksanakan gotong royong dengan sistem shift	1. Gotong royong dengan sistem shift
				Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	lembaga	4	1	2. Beberapa jadwal kegiatan mundur	2. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan
				Penguatan Lembaga Kemasyarakatan				3. Rapat koordinasi dilaksanakan lebih terbatas denganmenjalankan protokol kesehatan	3. Rapat Rapat dilaksanakan dengan menjalankaan protokol kesehatan/zoom
				Dukungan terhadap penguatan 2 jenis lembaga kemasyarakatan	%	100	100		
				Bantuan Kelembagaan LPMD/LPMK pada lokasi TMM	lokasi	15	15		
				Bantuan Kelembagaan TP PKK	lembaga	1	1		
				Pembinaan pengelola lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan					
				Jumlah fasilitasi TMMD	lokasi	15	15		
				Jumlah fasilitasi TP PKK	Lembaga	1	1		
				Jumlah fasilitasi pokjanal posyandu	Lembaga	1	1		
				Pelatihan pengelola BUMDes	orang	125	125		

8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Kondisi Umum

Kondisi penduduk yang seimbang adalah salah satu kunci kesuksesan pembangunan. Penduduk yang terlalu padat akan menyebabkan produktifitas menjadi terhambat karena hambatan pada kesempatan dan akses yang terbatas. Untuk itu menjadi penting pengendalian penduduk utamanya melalui program Keluarga Berencana (KB) dilakukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang ini mengatur agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan" dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang.

Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), *Total Fertility Rate* (TFR) DIY secara perlahan mengalami kenaikan mulai tahun 2012 sampai tahun 2017 hingga mencapai angka 2,2. Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Untuk tahun 2020, angka TFR dengan basis data melalui Survey Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat angka 1,81.

Upaya pengendalian penduduk dilaksanakan melalui dua sasaran strategis yaitu meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan dan meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia. Indikator yang dipergunakan untuk sasaran pertama yaitu umur menikah pertama perempuan, sedangkan untuk sasaran kedua indikator yang dipergunakan adalah persentase legalitas keluarga (Perkawinan dan Kelahiran). Capaian pada tahun 2020 digambarkan berikut ini.

Tabel 3.96. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Umur Menikah Pertama Perempuan	umur	24,61	24,40	24,61	100,86	24,4	100,86
2	Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran)	%	98,05	98,00	97,54	99,53	98,00	99,53

Sumber: DP3AP2 DIY, 2021 (data diolah)

(1) Umur Menikah Pertama Perempuan

Target dari indikator umur menikah pertama perempuan pada tahun 2020 adalah umur 24,40 tahun dengan capaian umur sebesar 24,61 tahun. Berdasarkan data capaian tersebut maka target pada tahun 2020 sudah tercapai dengan persentase capaian 100,86%. Capaian tahun 2020 tersebut apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2022 dengan target umur 24,4 tahun sudah tercapai. Selanjutnya upaya yang harus dilakukan adalah mempertahankan umur ideal menikah pertama perempuan antara umur 21 sampai dengan 25 tahun sehingga diharapkan bisa meningkatkan kualitas keluarga.

Data capaian sasaran ini diperoleh dari Sistem Data Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlidnungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY yang telah diolah, data tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.97. Rata-Rata Usia Menikah Perempuan

No	Usia Menikah	Jumlah Menikah (F)	Nilai Tengah (n)	F x n	Rata-rata Usia Nikah (Fxn/Jml Menikah)
1	12 – 16	78	14	1.092	14
2	17 – 21	4.512	19	85.728	19
3	22 – 25	9.016	23,5	211.876	23,5
4	26 – 30	5.768	28	161.504	28
5	31 – 35	1.964	33	64.812	33
		21.338		**525.012**	**24,61**

Sumber: DP3AP2 DIY, 2021

Peningkatan usia perkawinan pertama bagi perempuan dipengaruhi oleh terutama kesadaran pentingnya persiapan pernikahan dari berbagai aspek baik psikologis, ekonomi dan kompromi terhadap situasi yang tengah berlangsung. Semakin terbukanya akses layanan dan informasi Kesehatan reproduksi juga berdampak. Ini tidak terlepas dari tersusunnya media advokasi bagi remaja tentang kesehatan reproduksi serta adanya koordinasi yang lebih melalui forum. Termasuk terbitnya Pergub No. 102 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja di DIY. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama bagi perempuan diantaranya melalui sosial pendidikan kesehatan reproduksi remaja, sosialisasi program pengendalian penduduk, dan fasilitasi forum penyelenggaran program kesehatan reproduksi remaja.

Capaian indikator Umur menikah pertama perempuan tersebut didukung dari:

(a) Pembinaan dan pengembangan pengendalian penduduk

DP3AP2 DIY memiliki kegiatan-kegiatan yang mengintervensi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY. Data-data mengenai kependudukan memiliki andil dalam perancangan kegiatan-kegiatan tersebut, adanya data yang jelas dan akurat akan mempermudah tercapainya tujuan yang diharapkan. Maka dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Teknis Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.

Kanwil Kementerian Agama juga berkeinginan melakukan kolaborasi dengan DP3AP2 dalam hal peningkatan kapasitas penyuluh agama tentang Ketahanan Keluarga, Kesehatan Reproduksi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kesetaraan Gender, pemanfaatan bersama aplikasi AKIDAH. Hal ini disebabkan tingginya angka perceraian DIY selama tahun 2019 sebanyak 5.709 pasang dengan berbagai penyebabnya di antaranya ketidakharmonisan, ekonomi, perkawinan dini, dan KDRT.

(b) Pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Pemahaman tentang kesehatan Reproduksi dan keluarga berencana akan sangat mempengaruhi umur menikah perempuan, upaya ini dilakukan dengan mencetak pendidik-pendidik sebaya agar komunikasi bisa lebih efektif.



Gambar 3.36. Pelatihan pendidik pendidik sebaya

Selain itu pengetahuan tentang kesehatan Reproduksi Remaja juga sangat penting, dengan memahami Kesehatan Reproduksi maka remaja akan merencanakan pernikahannya dengan matang

(2) Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran)

Target dari indikator Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran) pada tahun 2020 adalah 98,00% dengan capaian sebesar 97,54%. Berdasarkan dari capaian tersebut maka target tahun 2020 belum tercapai dengan persentase capaian pada tahun 2020 mencapai 99,53%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 98,05% maka capaian tahun 2020 agak menurun 0,51%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 98% maka capaian tahun 2020 belum tercapai, sehingga masih diperlukan program dan kegiatan yang mendukung agar dapat mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut.

Sebagai catatan, karena data yang tersedia baru sampai semester 1 sehingga penghitungan capaian sampai dengan akhir tahun belum bisa dilakukan. Upaya pencapaian target agar bisa tercapai melalui peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan sehingga setiap pernikahan yang terjadi selalu sudah mendapatkan buku akte nikah. Selain itu pemenuhan Hak-Hak Anak terutama Hak Sipil Anak sudah mendapatkan prioritas utama sehingga setiap anak wajib mendapatkan akte kelahiran. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target ini adalah masih adanya perkawinan tidak dilaporkan dan dicatatkan serta Kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) sehingga tidak dilaporkan dan dicatatkan. Upaya untuk mendorong tercapainya target dilakukan melalui

Pembinaan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta menerbitkan Perda DIY No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tentang Hak-Hak Anak.

Pada sisi yang lain, ketahanan keluarga adalah pondasi kesejahteraan keluarga, upaya untuk mencapai ketahanan keluarga dimulai dari kepemilikan legalitas keluarga, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang masif tentang pentingnya ketahanan keluarga. Dalam rangka mensukseskan ketahanan keluarga tersebut diperlukan juga pertemuan untuk membahas strategi-strategi yang akan dipergunakan melalui rakor ketahanan keluarga.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp602.059.000,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam dua Program dan empat Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp518.632.000,00 (86,14%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		**PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK**				1. Era milenial dimana penggunaan Gadget tidak bisa dibatasi sehingga menyebabkan semua informasi masuk dan tidak tersaring, hal-hal buruk mempengaruhi anak 2. Banyaknya pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan Triwulan IV: 1).Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan dan anggaran di Redesign dan Refokusing 2).Alokasi pembiayaan kegiatan yang terbatas, sehingga sasaran dan jumlah masyarakat yg terpapar pelaksanaan kegiatan tsb juga terbatas 3).Fasilitas , khususnya bahan2 kegiataN/Aktivitas pembinaan kegiatan yang terbatas (misalnya: soft ware yg terkini, terupdate, kurikulum pelatihan yg ketinggalan ilmu terkini, juga hardware yg terbatas: bahan/materi sosialisasi dll) 4).SDM pelaksana/petugas yg belum/jarang difasilitasi ilmu2 terkini/*up to date*, sehingga pentingnya peningkatan kapasitas SDM/petugas, misal dengan Pelatihan, mengikuti Bimtek dll	Integrasi Program lintas sektor terkait	-
				Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rasio	1.17	1.15			
			Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk	**Pembinaan dan Pengembangan Pengendalian Penduduk**						
				Pembuatan Sistem informasi kependudukan (dashboard kependudukan)	paket	1	1			
				Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk yang terlaksana	paket	5	5			
				Pelatihan pengolah data kependudukan	angkatan	0	0			
				Pelatihan petugas operator dasboard kependudukan	angkatan	0	0			
				Penayangan Media Animasi Presentasi tentang Pengendalian Penduduk di televisi local	kali	0	0			
				Pelatihan petugas perawatan dan security dashboard kependudukan	angkatan	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			Hanya ada satu Balita dalam satu keluarga	**Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**						
				Pelatihan Pendidik Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja	kali	5	5			
				Pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	kelompok	0	0			
				Fasilitasi FP2KRR	forum	0	0			
				Bakti sosial Pelayanan KB	lokasi	0	0			
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Triwulan 1: "Masih adanya perkawinan dan kelahiran yang tidak didaftarkan Triwulan 2: Program dan Kegiatan dilakukan penge-NOL-an sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19 Triwulan 3: Program dan Kegiatan dilakukan penge-NOL-an sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19 Triwulan 4: Masih adanya perkawinan dan kelahiran yang tidak didaftarkan	Integrasi Program lintas sektor terkait	
				Raso kekerasan dalam keluarga	Rasio	0.0013	0.001			
			Pembentukan sistem konseling keluarga yang holistik dan integratif sesuai dengan rancangan Grand Design Ketahanan Keluarga	**Pembinaan Ketananan Keluarga**						
				Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY	kali	1	1			
				Sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga	kali	1	1			
				Penguatan jejaring legalitas keluarga	kali	1	1			
				Penyusunan Juknis Implementasi Ketahanan Keluarga	dokumen	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Koordinasi Penyusunan data pilah keluarga	kali	1	1			
				Advokasi pembinaan Ketahanan Keluarga	kali	0	0			
			Pengembangan dan penguatan jejaring dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	**Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera**						
				Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera	desa	0	0			
				Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	desa	0	0			
				Monitoring dan Evaluasi Desa Pelopor Prima Sejahtera	desa	3	3			

9) Urusan Perhubungan

a) Kondisi Umum

Sektor Perhubungan berperan sebagai mobilitas untuk mendukung aktivitas sektor-sektor yang lain seperti sektor perdagangan, pendidikan, industri, UKM hingga pariwisata. Oleh karena itu, memiliki peranan yang amat strategis dalam perkembangan suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan. Adanya simpul – simpul transportasi berupa terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara akan membuka suatu wilayah dalam meningkatkan mobilitas atau pergerakan orang, hal ini berdampak pada peningkatan laju perekonomian antar wilayah termasuk.

Mengacu pada Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039, sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara. Dalam hal ini urusan perhubungan terkonsentrasi pada sistem jaringan transportasi darat, dengan pengembangan sebagai berikut:

(1) Menghubungkan antar pusat kegiatan primer-sekunder;
(2) Menghubungkan antar pusat kegiatan primer-sekunder dengan kota di wilayah sekitar.

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas, dilakukan melalui pengembangan sistem jaringan jalan, sistem lalu lintas dan angkutan jalan dan sistem jaringan kereta api. Arah kebijakan yang dilakukan meliputi peningkatkan kinerja penyediaan layanan angkutan umum dan tingkat pelayanan jalan dari 43,67% di tahun 2017 menjadi 49,79% di tahun 2022.

Arah kebijakan tersebut mengindikasikan adanya dua variabel tolok ukur, yaitu variabel penyediaan layanan angkutan umum, serta variabel tingkat pelayanan jalan (*level of service*) dengan target dan capaian pada tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.98. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019 2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan	%	45,27	45,54	49,42	108,52	49,79	99,25

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2021

Dari tabel di atas dapat dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja penyedian layanan angkutan umum dan tingkat pelayanan telah melebihi target, dimana realisasi capaian pada tahun 2020 adalah 49,42%, sedangkan targetnya adalah 45,54% sehingga persentase realisai terhadap target capaian tahun 2020 adalah 108,52 %. Sedangkan berdasarkan target akhir RPJMD 2017-2022, realisasi tahun 2020 tersebut telah mencapai 99,25%.

Capaian target pada tahun 2020 diperoleh melalui penyediaan layanan angkutan umum sebesar 75,50% dan tingkat pelayanan jalan sebesar 23,33%. Pada aspek penyediaan layanan angkutan umum, capaian nilai diambil berdasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan perkotaan, terutama Angkutan Perkotaan Trans Jogja dengan capaian nilai sebesar 51 % dengan cakupan area pelayanan 25 kecamatan dari 25 kecamatan yang ditargetkan sampai pada tahun akhir RPJMD.

Pada aspek tingkat pelayanan jalan mengacu Permenhub No. 96 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tingkat pelayanan jalan perkotaan adalah pada kecepatan minimal rata-rata 20 km/jam dan di jalan provinsi minimal 40 km/jam. Adapun nilai rata-rata kecepatan lalu lintas di jalan provinsi adalah 46,45 km/jam sedangkan kawasan perkotaan pada kawasan prioritas (Terban, Seturan, Kranggan, Godean) adalah 38,81 km/jam. Sehingga dengan demikian, tingkat ketercapaian target pelayanan jalan di DIY dapat dikatakan tercapai 100%.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Perhubungan dilaksanakan melalui delapan Program dan 28 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.164.834.614,00. Secara keseluruhan belanja langsung dapat terealisasi sebesar Rp17.089.336.755,00 (89,00%), dengan pencapaian fisik 89,63%. Secara rinci capaian program dan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN	1. Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Perlengkapan Jalan 2.Penyelenggaraan edukasi keselamatan lalu lintas 3.Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum 4.Peningkatan cakupan layanan angkutan dalam trayek 5.Peninkatan kinerja angkutan umum 6.Peningkatan tertib perizinan angkutan umum 7. Pengembangan penyelenggaraan angkutan barang dan perkeretaapian 8.Penyediaan dan peningkatan simpang bersinyal 9.Pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan 10. Pengelolaan terminal park and ride dan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI**				1. Manajemen dan Rekayasa LL di kawasan Malioboro dg sistem giratori belum diterima oleh sebagian masyarakat 2. Belum memiliki peralatan khusus untuk pemeliharaan APJ 3. Penurunan jumlah penumpang Transjogja karena pendemi Covid-19 4. Penurunan pelayanan angkutan AKDP 5. Belum tersedia data angkutan pariwisata di DIY karena proses perijinan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan 6. Pada saat penegakan hukum fasilitas untuk e-tilang untuk kendaraan angkutan barang dan penumpang belum tersedia, sehingga pelanggar dari luar daerah harus kembali menjalani persidangan di daerah pelanggaran 7. Angka kecelakaan cenderung masih mengalami peningkatan setiap tahun karena peningkatan jumlah	1. Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, pengaturan secara teknis (APILL, rambu) dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2. Berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten/ Kota untuk bantuan peminjaman peralatan 3. pengadaan alat crane dengan spesifikasi sesuai kebutuhan 4. Pengurangan jam operasional dan jam operasional Bus Transjogja yang beroperasi 5. Melaksanakan review angkutan AKDP 6. Meminta dukungan pendanaan dari Kementerian	Secara prinsip, penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy the Service kepada PT Anindya Mitra Internasional, yang juga dilandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 (PP 74/2014) tentang Angkutan Jalan, di mana prinsip yang diacu adalah pada Bab X tentang Subsidi Angkutan Penumpang Umum, dengan ketentuan-ketentuan yang terinci pada pasal 107 – pasal 111. Penunjukan PT AMI sebagai pengelola Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja juga telah mengacu pada PP 74/2014 pada Pasal 110 huruf b. yang menyebutkan bahwa pemilihan Perusahaan
					Persen	100	100			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan						
				Pengadaan suku cadang APJ Listrik	Paket	1	1			
				Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan di DIY	Dokumen	1	1			
				Pengadaan suku cadang APILL	Paket	1	1			
				Pengadaan suku cadang APJ Surya	Paket	1	1			
				Pemeliharaan Early Warning	Unit	1	1			
				Pengadaan dan Pemasangan Rambu bersuar lalu lintas darat (Warning Light TS)	Unit	0	0			
				Rehab berat APILL	Lokasi	2	2			
				Pengadaan suku cadang rambu	Unit	100	100			
				Pengadaan dan Pemasangan APJ Listrik	Unit	150	150			
				Pengadaan dan Pemasangan Rambu tidak bersuar (Rambu lalu lintas dan Cermin tikungan)	Paket	0	0			
				Teknisi perbaikan perlengkapan jalan APILL dan APJ	OH	1056	1056			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			perparkiran 11.Pengembangan terminal, park and ride dan perparkiran					pengguna jalan 8.Dengan adanya rasionalisasi anggaran, pemeliharaan hanya dilaksanakan untuk dua simpang (Sp. Kleringan dan Melia) 9.50% ATCS off, hal ini dikarenakan berbagai hal, diantaranya listrik mati, komponen rusak dan cuaca 10.Adanya hal kedua tersebut, menyebabkan seting ATCS dilaksanakan secara manual ke lapangan, kendala yang dihadapi adalah saat ini belum tersedia teknisi khusus yang di kontrak/bekerjasama dengan dinas 11. Pagu anggaran perbaikan simpang sangat terbatas, jumlah simpang yang dianggarkan untuk perbaikan hanya berkisar kurang dari 5 simpang, sehingga apabila ada simpang ATCS lain yang rusak harus menunggu anggaran tahun depan. 12. Belum ada data inventarisasi dan identifikasi terhadap	Perhubungan 7. Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan 8. Berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk memfasilitasi persidangan di tempat bagi pelanggar 9. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengguna jalan 10. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan 11. Penegakan hukum 12. Peningkatan kerjasama stakeholder terkait, untuk menyusun rencana aksi keselamatan di DIY 13.Seting ATCS dilaksanakan secara manual, dilaksanakan oleh operator	Angkutan Umum yang melayani Angkutan Penumpang umum dalam trayek bersubsidi dilakukan melalui proses penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan. Prinsip subsidi dalam PP 74/2014 merupakan bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan. Implementasi konsep subsidi yang diterapkan pada Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja mengacu pada Pasal 108 ayat (1) huruf b. di mana besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								kinerja ATCS, Sehingga perencanaan perbaikan masih kurang tepat 13. Komponen ATCS belum terstandarisasi, sehingga masih tergantung hanya pada beberapa penyedia. 14.Target jumlah penumpang yang terlayani belum sesuai target. Dari target 4600 penumpang per hari terealisasi 2865 penumpang per hari akibat kondisi pendemi.	ATCS yang ada saat ini 14. Mencari harga pembanding Di kota lain yang juga menggunakan system ATCS 15. Penentuan jumlah perbaikan ATCS pada tahun depan, akan dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kinerja ATCS	Perusahaan Angkutan Umum. Di dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2018 juga telah diamanatkan hak dan kewajiban dari masing-masing di mana salah satu ketugasan yang dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan DIY adalah: a. merencanakan, membangun dan mengembangkan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan dokumen perencanaan; b. menetapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal); c. mengawasi pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja agar tersedia layanan yang memenuhi SPM dengan tata kelola yang baik (good governance); d. menetapkan kebijakan terkait penyediaan dan pemeliharaan Prasarana Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja; e. menetapkan tarif layanan Sistem Angkutan
				Penegakan Hukum Lalu Lintas						
				Penyelenggaraan Pemantauan Hari Hari Besar	Hari	8	8			
				Penegakan Hukum Lalu Lintas	Bulan	12	0			
				Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa LL (Kawasan Kranggan dan terban)	Dokumen Laporan	1	0			
				Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						
				Talk Show "Keselamatan LLAJ"	Kali	20	20			
				Penegakan Hukum Angkutan Jalan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum, Barang dan Emisi Gas Buang @ 10 Kali	Bulan	10	9			Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja. Dari aspek-aspek di atas maka rekomendasi dari DPRD DIY untuk meningkatkan pengawasan akan dilaksanakan secara lebih intensif oleh Dinas Perhubungan DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN						
					Persen	100	100			
				Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek						
				Appraisal Bus Trans Jogja Operasional Trans jogja 2021	Dokumen	1	1			
				Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus Trans Jogja	Bulan	12	12			
				Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021	Dokumen	1	1			
				Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaaan	Dokumen	1	1			
				Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek						
				Terselenggaranya perizinan angkutan tidak dalam trayek 905 kendaraan	Dokumen	1	1			
				Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian						
				Pengendalian terhadap Pelaksanaan Rencana Perkeretaapian di DIY	Dokumen	1	1			
				PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS						
					Persen		100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kegiatan Penerapan Manajemen Lalu Lintas						
				Penanganan permasalahan lalu lintas melalui Forum lalu Lintas angkutan jalan (Tersusunnya rencana bersama penanganan manajemen lalu lintas di DIY)	Bulan	12	12			
				Evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang (Mengidentifikasi tingkat palayanan ruas jalan dan persimpangan di DIY)	Dokumen	1	1			
				Rekomendasi Andalalin (Tersusunnya surat pertimbangan teknis rekomendasi andalalin)	Bulan	12	12			
				Studi Manajemen dan rekayasa LL sekitar YIA dan Underpass Kentungan	Laporan	1	1			
				Kegiatan Penerapan Rekayasa Lalu Lintas						
				Pemeliharaan CC Room dan APILL ATCS 1 paket serta Operasional CC Room ATCS 12 bulan	%	100	100			
				Perbaikan ATCS	Lokasi	2	2			
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN						
					Persen	100	100			
				Kegiatan Pengelolaan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Operasional dan Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir	Bulan	12	12			
				Operasional dan Pemeliharaan *Park and Ride*	Bulan	12	12			
				Operasional dan Pemeliharaan Terminal Tipe B	Bulan	12	12			
				Kegiatan Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran						
				Gate Parkir	Paket	1	1			
				PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN						
					Persen	100	100			
				Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis						
				Penataan lalu lintas di Kawasan Heritage City (Malioboro) yaitu Petugas Jogo Margo 72 org dan Forum lalu lintas satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis untuk Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas di Kawasan Heritage	%	100	100			
				Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh						
				Pengadaan dan Pemasangan Rambu tidak bersuar (RPPJ)	Unit	5	5			
				Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Ruas Jalan Gedangsari-Sambipitu, Ruas Hargomulyo-Watugajah dan Rongkop)	Unit	60	60			
				Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo						
				Pengadaan dan pemasangan alat Penerangan Jalan Tenaga Surya (Ruas Jalan Ngremang-Glagah Kabupaten Kulon Progo)	Unit	5	5			
				Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul						
				Pengadaan dan pemasangan APJ Tenaga Surya	Unit	5	5			

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

a) Kondisi Umum

Sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran TI untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pergub DIY Nomor 52 Tahun 2018, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemda DIY mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik di lingkup Pemda DIY. Berkenaan dengan ketugasan pelayanan informasi tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya WhatsApp, Instagram (@kominfodiy), Twitter (@kominfodiy), Youtube (Kominfo DIY), dan Facebook fanspage (Kominfo DIY), selain itu publik juga dapat mengakses portal ppid.jogjaprov.go.id. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, masukan kepada Pemerintah DIY dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui aplikai E-Lapor DIY sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan DIY. E-Lapor DIY juga telah diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan *Whiste Blowing System* (WBS).

Pemda DIY juga mengelola layanan informasi berbasis *mobile* yakni Jogja Istimewa Apps, yang didalamnya berisi informasi tentang Jogja Budaya, Jogja Wisata, Jogja Layanan Publik, Jogja Belajar, Jogja Kuliner, Jogja Info, Jogja Transportasi, Jogja Event, Jogja Galeri, Jogja 360, Jogja Doeloe *Augmented Reality* (AR), dan Jogja *Streaming*. di samping itu lembaga penyiaran publik juga menjadi sarana penyebarluasan informasi publik dengan pembuatan Iklan Layanan Masyarakat dan dialog interaktif. Bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan perkembangan teknologi informasi, penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui seni pertunjukan rakyat. Selain itu terkait hasil pembangunan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemda diinformasikan melalui portal resmi Pemda DIY (jogjaprov.go.id). Portal jogjaprov.go.id menjadi pintu gerbang

bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan, serta berita terkait kegiatan Pemda DIY.

Pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mengintegrasikan 10 (sepuluh) urusan ke dalam Sistem Informasi Eksekutif melalui *Integrated Development Management Center* (IDMC) (idmc.jogjaprov.go.id), yakni urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan pangan, urusan Sosial, urusan Keamanan dan Ketertiban Umum, urusan Tata Ruang, urusan Pertanahan, urusan Kominfo, urusan Perhubungan dan urusan Kependudukan. Melalui sistem informasi yang terintegrasi ini, akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Didalam IDMC ini juga mengintegrasikan aplikasi layanan e-Lapor yang merupakan aplikasi pengaduan pelayanan publik dan informasi *surveillance* yang terkoneksi ke 26 titik CCTV yang ada di wilayah DIY.

Dinas Komunikasi dan Informatika membangun aplikasi Jogjapass yang dapat dimanfaatkan untuk *tracing* apabila ada kejadian positif di satu lokasi. Implementasi Jogjapass berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata. Terdapat pula *Disaster Support System* (dss.jogjaprov.go.id) untuk mengelola data sosial, data kesehatan, data ekonomi dan data sektor lainnya di DIY sebagai bagian dari proses identifikasi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. *Disaster Support System* adalah sistem yang mengkolaborasi data dari Dinas Sosial DIY, Biro Tata Pemerintahan DIY, Dinas Pendidikan DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Koperasi DIY, Dinas Pertanian Tanaman Pangan DIY, Dinas Tenaga Kerja DIY, DP3AP DIY, Biro Perekonomian DIY, BPKA DIY, Bappeda DIY, Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Pekerjaan Umum DIY.



Gambar 3.37. Aplikasi Jogjapass

Tahun 2020 membangun *Jogja Center* untuk memudahkan komunikasi pimpinan berjalan dengan baik dan lancar Dinas Kominfo DIY. *Jogja Center* merupakan pengembangan sistem analitik berbasis *big data*, yang difokuskan pada pengembangan data analitik dan pendukung pengambilan keputusan, serta merujuk pada dimensi-dimensi *Jogja Smart Province* (JSP). Untuk saat ini *Jogja Center* adalah ruang/tempat untuk melakukan beberapa hal terkait *video conference, analytic data*, dan monitoring terhadap rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemda DIY.

Selain itu, untuk lebih memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan jaringan internet, Pemda DIY menyediakan 76 titik WiFi gratis diantaranya di kawasan Malioboro dan lokasi wisata tebing Breksi serta 71 titik di lokasi UMKM DIY. Terkait dengan pegembangan jaringan sekolah untuk mendukung pendidikan di masa pandemi, Pemda DIY telah mengkoneksikan seluruh sekolah SMA/K Negeri se DIY dengan jaringan yang dimiliki oleh Pemda DIY. Berikut ini dapat disajikan tabel capaian Urusan Komunikasi dan Informasi.

Tabel 3.99. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Reali-sasi 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Realisasi		
Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi	Pering-kat	9	6	9	66.67	4	0,25

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2021

Tolok ukur kinerja terdiri dari satu sasaran yaitu Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi dengan indikator peringkat keterbukaan informasi badan publik yang dikeluarkan Komisi Informasi Pusat. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menargetkan masuk peringkat 6 dalam cluster informatif. Berdasarkan nilai skor hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2020 Pemda DIY berada pada peringkat 9 dengan nilai 93,83 atau berada pada *cluster* informatif untuk Badan Publik kategori Pemerintah Provinsi. Capaian realisasi kinerjanya adalah

sebesar 66,67%. Dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat kenaikan *cluster* dari menuju informatif ke cluster informatif dan terdapat kenaikan skor keterbukaan informasi sebesar 13,64.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan melalui alokasi anggaran Rp43.571.479.950,00. Anggaran tersebut untuk membiayai sembilan Program dan 22 kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp42.215.215.571,00 (96,89%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY	1. Pemberdayaan dan pengembangan: (1) PPID disetiap badan publik; (2) Komunitas masyarakat penggiat Teknologi Informasi 2. Pembuatan dan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) 3. Pengembangan dan optimalisasi jaringan pemerintah daerah	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				1. Perencanaan pengembangan TIK Perangkat Daerah di 2. lingkup Pemda DIY belum memedomani Blueprint Pengembangan TIK yang telah disusun 3. Masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna informasi dan layanan publik, sehingga informasi yang disediakan dan layanan yang diselenggarakan tidak dipergunakan secara optimal; 4. Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal diseluruh penyelenggaraan	1. Internalisasi Blueprint Pengembangan TIK di lingkup Pemda DIY dan optimalisasi peran Pengelola TIK di tiap-tiap Perangkat Daerah 2. Meningkatkan desiminasi kepada masyarakat akan hak dan kewajiban sesuai dengan UU KIP; 3. Menyediakan tempat layanan yang gratis dan nyaman untuk mengakses layanan publik pemerintah dan	**Urusan Komunikasi dan Informatika** Dalam rangka menyediakan informasi publik dan memberikan edukasi masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan antara lain: 1. Sosialisasi dengan topik Jogja Bijak Bermedia Sosial kepada masyarakat DIY untuk memberikan edukasi tentang bahaya atau risiko hukum dari penyebaran berita hoaks. 2. Kegiatan talkshow, penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di televisi dan radio dengan tujuan mengedukasi kepada masyarakat agar berhati-hati menyebarluaskan berita hoaks, karena dampaknya bisa berurusan dengan aparat penegak hukum dan bisa berakhir dipenjara.
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	11			
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran						
				Pembayaran tagihan rekening telepon	Bulan	12				
				Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat)	Unit	10				
				Peralatan dan perlengkapan pencegahan COVID	Kegiatan	1				
				Benda-benda Pos (Materai, Perangko)	Jenis	2				
				Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional roda 2 (dua)	Jenis	8				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								layanan publik Pemerintah DIY		3. Forum Komunikasi dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang komunikasi sosial, pakar media sosial, pakar hukum, dengan peserta segenap lapisan masyarakat termasuk kaum difabel dengan tema informasi terkini termasuk memberikan pemahaman agar masyarakat tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar (Hoaks). 4. Forum Media Sosial yang menyasar pada hoaks hunter dan penekanan pada konten-konten yang positif dan bekerjasama dengan rekan-rekan buzzer media sosial Jogja. 5. Sosialisasi melalui Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-DIY, dengan topik peran serta PPID dalam pencegahan penyebaran berita Hoaks.
				Pengiriman Dokumen	Bulan	12				
				Alat Tulis Kantor	Jenis	30			meningkatkan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi di Pemerintah Daerah DIY yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar pelayanan lebih efektif dan efisien	
				Bendera	Jenis	2				
				Penggandaan dan penjilidan	Penggandaan	16				
				Surat Kabar	Jenis	6				
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	14				
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	7				
				Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	34.26				
				Pembersihan kantor Diskominfo DIY	Bulan	12				
				Penyediaan Barang cetakan	Jenis	10				
				Pembayaran tagihan rekening listrik	Bulan	12				
				Majalah	Jenis	1				
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Kinerja pengelola keuangan	Orang	5				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku						Dalam kerangka Jogja Smart Province, inisiasi pengembangan Smart City untuk Kab/Kota di DIY, difasilitasi melalui 5 (lima) dimensi Jogja Smart Province yaitu Smart Government, Smart Culture, Smart Environment, Smart Living dan Smart Society. Untuk orkhestrasi layanan publik, didukung oleh 3 (tiga) aspek perubahan yaitu struktur, infrastruktur dan suprastruktur.Beberapa inisiasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya adalah: 1. Forum Kominfo se-DIY, yang menghasilkan kesepakatan mendukung pengembangan Jogja Smart Province sesuai konsep Smart City masing-masing Kota/Kabupaten. 2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY
				Tenaga pengelola pelayanan perkantoran	Bulan	12				
				Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	2				
				Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	Bulan	12				
				Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	36.47				
				Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	1				
				Kinerja perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	3				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						dengan Pemerintah Daerah Kab/kota se-DIY sebagai bentuk komitmen bersama pengembangan Jogja Smart Province dan Smart City. Penandatangan PKS ini merupakan salah satu poin tindak lanjut dari Forum Kominfo DIY. 3. Penyusunan Dokumen E-Government Interoperability Framework yang merupakan dokumen kerangka kerja interoperabilitas sistem untuk pertukaran dari berbagi data di sektor pemerintahan. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya sepenuhnya ditujukan untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, baik saat ini ataupun di masa
				Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Luar Daerah terlaksana dengan baik	Bulan	12				
				Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	29.27				
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan Bulan 12 12 Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	Bulan	12				
				Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Dalam Daerah terlaksana dengan baik	Bulan	12				
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Persentase Pemenuhan Pelayanan	Persen	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Administrasi Perkantoran						mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Pengembangan e-GIF ini diharapkan akan mampu menuwujudkan interoperabilitas sinergi antar aplikasi serta dapat mengatur sisi teknis dan non-teknis pengembangan dan penggunaan aplikasi kepemerintahan di wilayah Pemerintah DIY dan Kabupaten/Kota di DIY. Dengan adanya E-Government Interoberability Framework (e-GIF) diharapkan terwujudnya interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah DIY dan Kab/Kota, tersedianya kamus data sistem informasi di lingkungan Pemerintah DIY dan tersedianya framework
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Bracket	Unit	6				
				AC 2 PK	Unit	1				
				Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	23.58				
				Gas Tabung Pemadam Kebakaran	Unit	6				
				Kursi rapat	Unit	26				
				Peralatan dan perlengkapan pencegahan Covid-19	Jenis	4				
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	14.29				
				Gedung Kantor Terpelihara	Bulan	12				
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang	Persen	17.37				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah DIY dan Kab/Kota. Berbagai layanan kolaboratif dan integratif semasa pandemi Covid-19 di tahun 2020, diantaranya adalah pemanfaatan aplikasi JogjaPass di pabrik dan layanan public (wisata, transportasi, penyedia jasa akomodasi) yang tersebar di Kab/Kota se DIY, kemudian aplikasi CMS (Corona Monitoring System) dan DSS (Disaster Support System) untuk pengolahan data penerima bansos, dan pembangunan JogjaCenter yang berfungsi sebagai data warehouse dan fasilitasi virtual meeting. Dalam konsepsi kolaborasi pemanfaatan jaringan internet, telah diselesaikan pembangunan jaringan
				Kendaraan dinas/operasional terpelihara roda 2 (dua)	Unit	8				
				Kendaraan dinas/operasional terpelihara roda 4 (empat)	Unit	10				
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Pemeliharaan LAN	Tahun	1				
				Peralatan listrik, telepon dan air	Tahun	1				
				Pemeliharaan Kursi	Buah	15				
				Air Conditioner	Unit	30				
				Genset	Buah	3				
				Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner)	Unit	50				
				Mesin Ketik Manual	Unit	5				
				Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	3.93				
				Notebook	Unit	12				
				Pemeliharaan Meja	Buah	5				
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100				internet ke seluruh desa dan SMK se DIY. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap Kab/Kota untuk dikembangkan menjangkau kedalam lingkup wilayah terkecil, misalnya dari kantor kelurahan/kantor desa ke balai RW, RT dan sebagainya. Dalam rangka mengintegrasikan berbagai layanan digital kabupaten kota dalam satu sentuhan di Pemda DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, melaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindak lanjut, diantaranya: 1. Melaksanakan Forum Komunikasi Kominfo se-DIY pada bulan Februari 2020. Forum ini merupakan wadah komunikasi dan sharing antara Kominfo DIY dengan Kominfo Kabupaten/Kota se DIY terkait integrasi dan pemanfaatan bersama data Sistem Informasi Desa di
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Nilai LKjIP Diskominfo DIY	Nilai	80				
				Dukungan terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	2.27				
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Realisasi sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Persen	10				
				Dukungan terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	12.83				
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Berita Acara Forum	Berita Acara	1				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Perencanaan OPD						DIY. Dengan adanya kolaborasi data bersama Kabupaten/Kota, DIY bisa memanfaatkan data yang komprehensif sebagai modal perencanaan pembangunan. 2. Melaksanakan sosialisasi Program Jogja Smart Province melalui media cetak, radio televisi, serta loyalty campaign untuk memberikan informasi kepada masyarakat DIY dan stakeholder pentahelix dalam mendukung upaya perwujudan Jogja Smart Province. 3. Membangun gudang data penanganan Covid-19 di DIY yang berisi data dari seluruh Kabupaten/Kota se-DIY. Untuk tahap pertama kolaborasi data dilaksanakan untuk sektor kesehatan dan sosial.
				Penyusunan ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA	Dokumen	5				
				Dukungan terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	50.77				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										4. Menyiapkan draft Pergub E-Gif sebagai payung hukum operasionalisasi kerangka kerja interoperabilitas di DIY. 5. Melaksanakan Pagelaran TIK dengan memberikan fasilitasi kepada kab/kota dan pelaku TIK DIY, untuk mempromosikan dan mensosialisasikan layanan publik, produk TIK serta produk digital creative lainnya.
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Kesesuaian antara Capaian Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja	Persen	100				
				Dukungan terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	8.27	8.27			
2	KOMUNIKASI	DINAS		**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
	DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Pemberdayaan dan pengembangan: (1) PPID disetiap badan publik; (2) Komunitas masyarakat penggiat Teknologi Informasi 2. Pembuatan dan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) 3. Pengembangan dan optimalisasi jaringan pemerintah daearah	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	Persen	70	**11**	Perencanaan pengembangan TIK Perangkat Daerah di lingkup Pemda DIY belum memedomani Blueprint Pengembangan TIK yang telah disusun	Internalisasi Blueprint Pengembangan TIK di lingkup Pemda DIY dan optimalisasi peran Pengelola TIK di tiap-tiap Perangkat Daerah	**Urusan Komunikasi dan Informatika** Dalam rangka menyediakan informasi publik dan memberikan edukasi masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan antara lain: 1. Sosialisasi dengan topik Jogja Bijak Bermedia Sosial kepada masyarakat DIY untuk memberikan edukasi tentang bahaya atau risiko hukum dari penyebaran berita hoaks. 2. Kegiatan talkshow, penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di televisi dan radio dengan tujuan mengedukasi kepada masyarakat agar berhati-hati menyebarluaskan berita hoaks, karena dampaknya bisa berurusan dengan aparat penegak hukum dan bisa berakhir dipenjara.
				Pembinaan Kelembagaan KIP						
				Dukungan terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	Persen	15				
				Jumlah badan publik yang Badan Publik mematuhi ketentuan UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Badan Publik	36				
				Jumlah sengketa informasi publik yang tertangani	Sengketa	6				
				Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik						
				Dukungan terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yangtertangani	Persen	40				
				Keluhan masyarakat atas layanan pemda DIY yang tertangani	Bulan	12				
				Pengelolaan Layanan Informasi Publik						
				Dukungan terhadap persentase keluhan masyarakat atas	Persen	26				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				pelayanan Pemda yang tertangani						3. Forum Komunikasi dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang komunikasi sosial, pakar media sosial, pakar hukum, dengan peserta segenap lapisan masyarakat termasuk kaum difabel dengan tema informasi terkini termasuk memberikan pemahaman agar masyarakat tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar (Hoaks). 4. Forum Media Sosial yang menyasar pada hoaks hunter dan penekanan pada konten-konten yang positif dan bekerjasama dengan rekan-rekan buzzer media sosial Jogja. 5. Sosialisasi melalui Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-DIY, dengan topik peran serta PPID dalam pencegahan penyebaran berita Hoaks.
				Masyarakat Yang Menggunakan Layanan PPID Utama	Orang	250				
				Masyarakat Yang Menggunakan MCAP	Orang	120				
				Masyarakat Yang Menggunakan CoWorking Space	Orang	500				
				Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi						
				Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial	Kali	9				
				Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi (konten media sosial/videotron)	Buah	3				
				Penyebarluasan informasi pemda DIY kepada masyarakat (Majalah Diskominfo)	Eksemplar	250				
				Dukungan terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yangtertangani	Persen	15				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Publikasi ILM di Radio	Kali	60				Dalam kerangka Jogja Smart Province, inisiasi pengembangan Smart City untuk Kab/Kota di DIY, difasilitasi melalui 5 (lima) dimensi Jogja Smart Province yaitu Smart Government, Smart Culture, Smart Environment, Smart Living dan Smart Society. Untuk orkhestrasi layanan publik, didukung oleh 3 (tiga) aspek perubahan yaitu struktur, infrastruktur dan suprastruktur.Beberapa inisiasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya adalah: 1. Forum Kominfo se-DIY, yang menghasilkan kesepakatan mendukung pengembangan Jogja Smart Province sesuai konsep Smart City masing-masing Kota/Kabupaten.
				Peningkatan wawasan masyarakat tentang Perda TIK	Kali	1				
				PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN						
				Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	Persen	37.5				
				Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Daerah						
				Rekomendasi Pengembangan E-Government yang dihasilkan dari Forum Komunikasi se- DIY	Dokumen	1				
				Dukungan terhadap persentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	Persen	10				
				Aplikasi layanan publik yang dikelola	Aplikasi	3				
				Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Modul yang terintegrasi dalam IDMC	Modul	3				2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Kab/kota se-DIY sebagai bentuk komitmen bersama pengembangan Jogja Smart Province dan Smart City. Penandatangan PKS ini merupakan salah satu poin tindak lanjut dari Forum Kominfo DIY. 3. Penyusunan Dokumen E-Government Interoperability Framework yang merupakan dokumen kerangka kerja interoperabilitas sistem untuk pertukaran dari berbagi data di sektor pemerintahan. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya sepenuhnya ditujukan untuk
				Dukungan terhadap persentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	Persen	49				
				PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI						
				Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	Persen	80.5				
				Pengelolaan Jaringan Komputer Pemerintah Daerah						
				Dukungan terhadap persentase jaringan infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang terintegrasi dalam layanan TIK	Persen	90				
				Pengelolaan Jaringan Wireless	Titik	66				
				Pengelolaan Jaringan *Virtual Private Network* (VPN)	Titik	93				
				Pengelolaan Jaringan Fiber Optik	Titik	90				
				Pengelolaan JITV						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Konten paket tayangan Pemda DIY	Konten	300				berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, baik saat ini ataupun di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Pengembangan e-GIF ini diharapkan akan mampu menuwujudkan interoperabilitas sinergi antar aplikasi serta dapat mengatur sisi teknis dan non-teknis pengembangan dan penggunaan aplikasi kepemerintahan di wilayah Pemerintah DIY dan Kabupaten/Kota di DIY. Dengan adanya E-Government Interoberability Framework (e-GIF) diharapkan terwujudnya interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah DIY dan Kab/Kota, tersedianya kamus data sistem informasi
				Dukungan terhadap persentase jaringan infrastruktur dalam Lingkungan PemdaDIY yang terintegrasi dalam layanan TIK	Persen	10				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										di lingkungan Pemerintah DIY dan tersedianya framework interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah DIY dan Kab/Kota. Berbagai layanan kolaboratif dan integratif semasa pandemi Covid-19 di tahun 2020, diantaranya adalah pemanfaatan aplikasi JogjaPass di pabrik dan layanan public (wisata, transportasi, penyedia jasa akomodasi) yang tersebar di Kab/Kota se DIY, kemudian aplikasi CMS (Corona Monitoring System) dan DSS (Disaster Support System) untuk pengolahan data penerima bansos, dan pembangunan JogjaCenter yang berfungsi sebagai data warehouse dan fasilitasi virtual meeting. Dalam konsepsi kolaborasi pemanfaatan jaringan internet, telah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										diselesaikan pembangunan jaringan internet ke seluruh desa dan SMK se DIY. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap Kab/Kota untuk dikembangkan menjangkau kedalam lingkup wilayah terkecil, misalnya dari kantor kelurahan/kantor desa ke balai RW, RT dan sebagainya. Dalam rangka mengintegrasikan berbagai layanan digital kabupaten kota dalam satu sentuhan di Pemda DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, melaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindak lanjut, diantaranya: 1. Melaksanakan Forum Komunikasi Kominfo se-DIY pada bulan Februari 2020. Forum ini merupakan wadah komunikasi dan sharing antara Kominfo DIY dengan Kominfo Kabupaten/Kota se DIY terkait integrasi dan pemanfaatan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										bersama data Sistem Informasi Desa di DIY. Dengan adanya kolaborasi data bersama Kabupaten/Kota, DIY bisa memanfaatkan data yang komprehensif sebagai modal perencanaan pembangunan. 2. Melaksanakan sosialisasi Program Jogja Smart Province melalui media cetak, radio televisi, serta loyalty campaign untuk memberikan informasi kepada masyarakat DIY dan stakeholder pentahelix dalam mendukung upaya perwujudan Jogja Smart Province. 3. Membangun gudang data penanganan Covid-19 di DIY yang berisi data dari seluruh Kabupaten/Kota se-DIY. Untuk tahap pertama kolaborasi data dilaksanakan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										untuk sektor kesehatan dan sosial. 4. Menyiapkan draft Pergub E-Gif sebagai payung hukum operasionalisasi kerangka kerja interoperabilitas di DIY. 5. Melaksanakan Pagelaran TIK dengan memberikan fasilitasi kepada kab/kota dan pelaku TIK DIY, untuk mempromosikan dan mensosialisasikan layanan publik, produk TIK serta produk *digital creative* lainnya.
3	KEBUDAYAAN DINAS (KEISTIMEWAAN) KOMUNIKASI DAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Pemberdayaan dan pengembangan: (1) PPID disetiap badan publik; (2) Komunitas masyarakat penggiat Teknologi Informasi 2. Pembuatan dan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (SIE)	**PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN**				1. Perencanaan pengembangan TIK Perangkat Daerah dilingkup Pemda DIY belum memedomani Blueprint Pengembangan TIK yang telah disusun 2. Masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang hak dan kewajiban sebagai	1. Internalisasi Blueprint Pengembangan TIK di lingkup Pemda DIY dan optimalisasi peran Pengelola TIK di tiap-tiap Perangkat Daerah 2. Meningkatkan desiminasi kepada masyarakat akan hak dan kewajiban	**Urusan Komunikasi dan Informatika** Dalam rangka menyediakan informasi publik dan memberikan edukasi masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan antara lain: 1. Sosialisasi dengan topik Jogja Bijak Bermedia Sosial kepada masyarakat DIY untuk
				Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana						
				Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital						
				Peralatan Video Conference paket Peralatan SMS Blaster untuk Alat penyebarluasan informasi tematik ke masyarakat						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			3. Pengembangan dan optimalisasi jaringan pemerintah daearah	Jaringan Intranet Pemda DIY berfungsi optimal	Lokasi	50		pengguna informasi dan layanan publik, sehingga informasi yang disediakan dan layanan yang diselenggarakan tidak dipergunakan secara optimal 3. Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal diseluruh penyelenggaraan layanan publik Pemerintah DIY	sesuai dengan UU KIP; 3. Menyediakan tempat layanan yang gratis dan nyaman untuk mengakses layanan publik pemerintah dan meningkatkan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi di Pemerintah Daerah DIY yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar pelayanan lebih efektif dan efisien	memberikan edukasi tentang bahaya atau risiko hukum dari penyebaran berita hoaks. 2. Kegiatan talkshow, penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di televisi dan radio dengan tujuan mengedukasi kepada masyarakat agar berhati-hati menyebarluaskan berita hoaks, karena dampaknya bisa berurusan dengan aparat penegak hukum dan bisa berakhir dipenjara. 3. Forum Komunikasi dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang komunikasi sosial, pakar media sosial, pakar hukum, dengan peserta segenap lapisan masyarakat termasuk kaum difabel dengan tema informasi terkini termasuk memberikan pemahaman agar masyarakat tidak menyebarkan berita-
				Infrastruktur Internet Desa di Kulon Progo terbangun	Desa	7				
				Pembangaunan Jaringan Fiber Optik Sekolah	Sekolah	49				
				Peralatan data center untuk memenuhi kekurangan storage, RAM dan CPU server utama Pemda DIY	Paket	1				
				Kurikulum Start Up Academy	Dokumen	1				
				Langganan Bandwidth Pemda DIY	Lokasi	156				
				Network Operations Center (NOC) dan Jaringan Kepatihan terpelihara	Lokasi	23				
				Peralatan Network Operations Center untuk penambahan kapasitas bandwidth dan peningkatan kualitas jaringan intranet Pemda DIY	Paket	1				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Peralatan Studio Jogja Istimewa TV dan Ruang Command Center IDMC terpelihara	Ruang	2				berita yang tidak benar (Hoaks). 4. Forum Media Sosial yang menyasar pada hoaks hunter dan penekanan pada konten-konten yang positif dan bekerjasama dengan rekan-rekan buzzer media sosial Jogja. 5. Sosialisasi melalui Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-DIY, dengan topik peran serta PPID dalam pencegahan penyebaran berita Hoaks. Dalam kerangka Jogja Smart Province, inisiasi pengembangan Smart City untuk Kab/Kota di DIY, difasilitasi melalui 5 (lima) dimensi Jogja *Smart Province* yaitu *Smart Government, Smart Culture, Smart Environment, Smart Living dan Smart Society.* Untuk orkhestrasi layanan publik, didukung oleh 3 (tiga) aspek perubahan
				Saluran media digital Pemda DIY berfungsi optimal	Paket	1				
				Peralatan Videotron terpelihara	Unit	2				
				Produk Multimedia untuk menyebarkan konten positif kepada masyarakat	Produk multimedia	2				
				Jogja Center (JSP Smart Room)	Paket	1				
				Dukungan terhadap persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	Persen	100				
				Peralatan Wifi Acces Point Jalan Malioboro dan CCTV terpelihara	CCTV	30				
				Integrasi e-ticketing tempat wisata dengan Jogist	Paket	1				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										yaitu struktur, infrastruktur dan suprastruktur.Beberapa inisiasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya adalah: 1. Forum Kominfo se-DIY, yang menghasilkan kesepakatan mendukung pengembangan Jogja Smart Province sesuai konsep Smart City masing-masing Kota/Kabupaten. 2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Kab/kota se-DIY sebagai bentuk komitmen bersama pengembangan Jogja Smart Province dan Smart City. Penandatangan PKS ini merupakan salah satu poin tindak lanjut dari Forum Kominfo DIY. 3. Penyusunan Dokumen E-Government Interoperability

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										Framework yang merupakan dokumen kerangka kerja interoperabilitas sistem untuk pertukaran dari berbagi data di sektor pemerintahan. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya sepenuhnya ditujukan untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, baik saat ini ataupun di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Pengembangan e-GIF ini diharapkan akan mampu menuwujudkan interoperabilitas sinergi antar aplikasi serta dapat mengatur sisi teknis dan non-teknis pengembangan dan penggunaan aplikasi kepemerintahan di wilayah Pemerintah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										DIY dan Kabupaten/Kota di DIY. Dengan adanya E-Government Interoberability Framework (e-GIF) diharapkan terwujudnya interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah DIY dan Kab/Kota, tersedianya kamus data sistem informasi di lingkungan Pemerintah DIY dan tersedianya framework interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah DIY dan Kab/Kota. Berbagai layanan kolaboratif dan integratif semasa pandemi Covid-19 di tahun 2020, diantaranya adalah pemanfaatan aplikasi JogjaPass di pabrik dan layanan public (wisata, transportasi, penyedia jasa akomodasi) yang tersebar di Kab/Kota se

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										DIY, kemudian aplikasi CMS (Corona Monitoring System) dan DSS (Disaster Support System) untuk pengolahan data penerima bansos, dan pembangunan JogjaCenter yang berfungsi sebagai data warehouse dan fasilitasi virtual meeting. Dalam konsepsi kolaborasi pemanfaatan jaringan internet, telah diselesaikan pembangunan jaringan internet ke seluruh desa dan SMK se DIY. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap Kab/Kota untuk dikembangkan menjangkau kedalam lingkup wilayah terkecil, misalnya dari kantor kelurahan/kantor desa ke balai RW, RT dan sebagainya. Dalam rangka mengintegrasikan berbagai layanan digital kabupaten kota dalam satu sentuhan di Pemda DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY,

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										melaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindak lanjut, diantaranya: 1. Melaksanakan Forum Komunikasi Kominfo se-DIY pada bulan Februari 2020. Forum ini merupakan wadah komunikasi dan sharing antara Kominfo DIY dengan Kominfo Kabupaten/Kota se DIY terkait integrasi dan pemanfaatan bersama data Sistem Informasi Desa di DIY. Dengan adanya kolaborasi data bersama Kabupaten/Kota, DIY bisa memanfaatkan data yang komprehensif sebagai modal perencanaan pembangunan. 2. Melaksanakan sosialisasi Program Jogja Smart Province melalui media cetak, radio televisi, serta loyalty campaign untuk memberikan informasi kepada masyarakat DIY dan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										stakeholder pentahelix dalam mendukung upaya perwujudan Jogja Smart Province. 3. Membangun gudang data penanganan Covid-19 di DIY yang berisi data dari seluruh Kabupaten/Kota se-DIY. Untuk tahap pertama kolaborasi data dilaksanakan untuk sektor kesehatan dan sosial. 4. Menyiapkan draft Pergub E-Gif sebagai payung hukum operasionalisasi kerangka kerja interoperabilitas di DIY. 5. Melaksanakan Pagelaran TIK dengan memberikan fasilitasi kepada kab/kota dan pelaku TIK DIY, untuk mempromosikan dan mensosialisasikan layanan publik, produk TIK serta produk *digital creative* lainnya.

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Kondisi Umum

Upaya pembinaan dan pendampingan menyeluruh melalui peningkatan aspek Kelembagaan, Usaha koperasi, Keuangan, Permodalan, dan Manajemen Koperasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Koperasi sehingga berdampak pada peningkatan volume usaha/omzet Koperasi. Pembinaan dan pendampingan salah satunya dengan dilakukan sosialisasi akses pembiayaan sebagai sarana penyebaran informasi tentang prosedur untuk mendapatkan akses pembiayaan baik dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Stimulus permodalan pada masa pandemi sangat signifikan dalam membatu koperasi untuk dapat beroperasi kembali sehingga omzet dapat kembali diraih setelah mengalami penurunan tajam pada triwulan I dan II tahun 2020. Perkembangan omzet koperasi dapat dilihat pada tabel keragaan Koperasi berikut.

Tabel 3.100. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi Aktif	2.427	1.782	1.926	1.722	1.758
2	Koperasi Tidak Aktif	311	598	63	196	180
3	Modal Sendiri (Rp Juta)	1.139.942	1.200.158	1.425.918	1.625.568	1.595.511
4	Modal Luar (Rp Juta)	1.835.173	2.085.166	2.262.263	2.512.343	2.188.554
5	Volume Usaha (Rp Juta)	4.473.800	3.678.342	4.394.362	4.325.218	4.141.871
6	Koperasi Primer	2707	2352	1963	1.890	1.728
7	Koperasi Sekunder	31	28	26	28	30

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2021

Sebagai akibat pandemi Covid-19, Omzet Koperasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun demikian target realisasi omzet koperasi tahun 2020 telah tercapai. Penurunan omzet disebabkan adanya penurunan aspek kelembagaan koperasi. Pembatasan jam operasional koperasi disertai daya beli masyarakat yang cenderung turun drastis karena mengalami penurunan pendapatan berdampak pada omzet koperasi sektor riil. Selain itu aspek likuiditas koperasi juga mengalami penurunan. Sebagian besar anggota koperasi tidak dapat membayar angsuran karena tidak punya pendapatan, sehingga kredit macet meningkat dan menurunkan likuiditas koperasi. Selain itu sebagian besar anggota

koperasi menarik simpanan wajib sehingga koperasi simpan pinjam tidak dapat menyalurkan dana pinjaman.

Meskipun terdampak pandemi Covid-19, secara keseluruhan jumlah UMKM DIY dari tahun ke tahun cenderung meningkat yang menunjukkan bahwa sektor UMKM memang menjadi penyumbang terbesar pada PDRB DIY. Peningkatan jumlah UMKM, serta jumlah masing-masing skala usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.101. Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usaha Mikro	130.525	135.799	141.991	143.385	188.033
2	Usaha Kecil	59.655	62.042	64.896	65.533	58.980
3	Usaha Menengah	36.031	37.472	39.196	39.581	30.665
4	Usaha Besar	12.408	12.904	13.498	13.631	10.005
Jumlah		**230.047**	**238.619**	**248.217**	**262.130**	**287.683**

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2021

Peningkatan jumlah UMKM karena kesadaran UMKM untuk mendaftar secara mandiri di aplikasi SiBakul Jogja mengalami peningkatan di masa Pendemi ini. Namun sebaliknya, penurunan jumlah usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil disebabkan dua hal, yaitu terjadinya penurunan skala usaha selama masa Pandemi, bahkan sebagian telah menutup usahanya. Hal ini karena selama masa pandemi Covid-19 banyak lokasi wisata sepi ditinggalkan pengunjung dan kegiatan pembelajaran dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi dilakukan secara daring. Kondisi ini mengakibatkan UMKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya, sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

Pelaksanaan urusan Koperasi dan UMKM DIY diukur melalui 2 (dua) sasaran strategis, yakni:

(1) **Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM** yang terbagi menjadi dua indikator yaitu Omzet Koperasi dan Omzet UKM. Target capaian indikator sasaran Omzet Koperasi tahun 2020 sebesar 4,141,478 Juta Rupiah, sampai dengan bulan Desember 2020 terealisir 4,142,871 Juta Rupiah. Disisi lain target capaian indikator sasaran Omzet UKM tahun 2020 sebesar 10,906 Milyar Rupiah; sampai dengan bulan Desember 2020 terealisir 10,964 Milyar Rupiah.

(2) **Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UMKM** dengan indikator Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM. Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebanyak 0.3%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 terealisir 0,4%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target.

Tabel 3.102. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capai-an 2019	2020			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	Omzet Koperasi	Rp Juta	4.325.218	4,141,478	4,142,871	100.03	4.308.794	96,15
2	Omzet UKM	Rp Milyar	10.783	10.906	10.964	100.53	11.347	96,62
3	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM	Persen	0,3	0,3	0,4	133.33	0,4	100

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2021

Dengan demikian secara keseluruhan indikator sasaran urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2020 telah tercapai, namun masih diperlukan perhatian untuk mencapai target realiasi per tahun sehingga target sampai dengan akhir RPJMD juga dapat tercapai.

Kesulitan permodalan yang dialami oleh KUMKM telah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui LPDB memberikan kemudahan skema permodalan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga banyak Koperasi terbantu dalam mendapatkan modal usaha, diantaranya melalui Subsidi bunga bagi Koperasi dan UMKM dan Pinjaman Bunga Ringan sebesar 3%. Realisasi pembiayaan LPDB untuk 14 koperasi tersebar di wilayah DIY pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp53.450.000.000,00 yang sangat mendukung usaha koperasi sehingga dapat menaikkan omzet di masa pandemi.

Sebagai Pembina UMKM Dinas Koperasi UKM DIY berinisiatif membantu pemasaran KUMKM yang ada pada wilayah DIY dengan memberikan sejumlah fasilitasi untuk meningkatkan pemasaran produknya. Pada awal pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah melibatkan UMKM dalam penyediaan fasilitasi protokol Kesehatan, yaitu pembuatan masker dan wastafel untuk tempat wisata, adapun

untuk UMKM bidang kuliner dan serumpunnya, diberikan fasilitasi sertifikasi PIRT dan halal dengan tujuan perluasan pemasaran produknya, subsidi kemudahan ongkos kirim atau *free*-ongkir untuk UMKM yang tergabung dalam SiBakul Markethub. Selain itu, fasilitasi untuk perkenalan produk UMKM secara global, melalui pameran virtual Wirakarya SiBakul Jogja yang untuk selanjutnya dapat diikuti di link *youtube* Dinas Koperasi dan UKM DIY.

Selain itu penyaluran Bantuan Presiden untuk UMKM melalui skema Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang pendataannya dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan aplikasi SiBakul Jogja, berdampak langsung pada UMKM yang telah kehabisan modal usaha untuk dapat memulai kembali usahanya. UMKM penerima BPUM sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima BPUM yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM nomor 914/Dep.2/X/2020 tanggal 30 November 2020 pada lampiran 3, 10, 12 dan 13 sebanyak 64.420 UMKM.

Selain itu, selama masa tanggap darurat, UMKM yang terkena dampak Covid-19 diberikan stimulan untuk dapat memasarkan produknya, melalui pemberian bantuan bebas ongkos kirim. UMKM juga diberikan dukungan promosi melalui media campaign dan marketplace pada fitur Markethub SiBakul Jogja. Hal ini mendorong tumbuhnya Wirausaha Baru yang masif untuk mendaftar ke sibakul serta mengikuti kampanye markethub agar mendapatkan dukungan kemudahan pemasaran produk. Wirausaha baru yang telah terdaftar pada aplikasi SiBakul Jogja diberikan pelatihan berjenjang yang diarahkan menuju transaksi bisnis digital serta diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran virtual sebagai upaya menyongsong adaptasi kebiasaan baru.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp19.797.065.578,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam sembilan Program dan 24 Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp17.777.599.311,00 (89,8%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1. Peningkatan kapasitas kinerja dan daya saing Koperasi dan UMKM perlu dioptimalkan 2. Mengembangkan kemitraan pelaku KUKM dengan perbankan, BUMN dan usaha swasta lainnya. 3. Pengembangan Enterprenurship pelaku UMKM dilakukan melalui diklat, pendampingan dan fasilitasi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan wilayah	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**						
				Program 01-06	%	100	0			
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran						
				Komponen Instalasi Listrik	Jenis	10	10			
				Alat tulis kantor	Jenis	20	20			
				Surat Kabar	Jenis	2	2			
				Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12			
				Pembayaran Listrik 2951 Kwh	Bulan	12	12			
				Retribusi Sampah	Bulan	12	12			
				Surat Keluar	Surat	4000	3752			
				Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	7	7			
				Penggandaan dan jilid	Lembar	75000	39665			
				Dukungan 31.34 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Buku Perpustakaan	Jenis	10	0			
				Pengelolaan arsip dinamis	Jenis	2	2			
				Pembayaran Telpon 3 sambungan	Bulan	12	12			
				Bukti pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan 4	Unit	19	19			
				Peralatan Rumah Tangga	Jenis	13	13			
				Surat Keluar	Surat	3000	2698			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Bukti Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	Orang/ Bulan	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 30,95% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Bukti Pembayaran Honor Perencana Program	Orang/ Bulan	2	2			
				Jasa Keamanan Kantor	Bulan	12	12			
				Bukti Pembayaran Honor Pengelola Kepegawaian	Orang/ Bulan	2	2			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Perjalanan Dinas dalam daerah	Bulan	12	12			
				Dukungan 37.76 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Perjalanan Dinas luar daerah luar pulau jawa	Bulan	12	12			
				Perjalanan Dinas luar daerah dalam pulau jawa	Bulan	12	12			
				Makan dan minum sidang	OS	1750	658			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Program 01-06	%	100	0			
				Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor						
				Pembuatan tiang baliho	unit	1	1			
				Dukungan 26.42 % terhadap sarana	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dang fungsi SKPD						
				Pembuatan Gudang	Unit	1	1			
				Tempat parkir	m^2	250	250			
				kaca jendela	paket	1	1			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis	3	3			
				Pengadaan Komputer	Jenis	4	4			
				Dukungan 55.20 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pengadaan Mebeleur	Jenis	0	0			
				Interior Gedung Induk	Paket	0	0			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Dukungan 15.40 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPMD	Unit	19	19			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Peralatan Kantor terpelihara	Jenis	6	6			
				Dukungan 2.97 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
				Perlengkapan Kantor terpelihara	Jenis	6	6			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Program 01-06	%	100	0			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Dukungan 4.44 % terhadap penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	A	82	84.34			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Bulan	12	12			
				Dukungan 7,99% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Doku -men	2	2			
				Dukungan 74.23% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Forum Perencanaan OPD	kali	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Dukungan 13.32% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan	%	100	95			
2	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1. Peningkatan kapasitas kinerja dan daya saing Koperasi dan UMKM perlu dioptimalkan 2. Mengembangkan kemitraan pelaku	**PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU**				Pelaku UMKM sebagian masih lemah disisi kemampuan personil, Kualitas SDM yang terbatas, Keterbatasan modal, Kaderisasi terhadap anggota untuk menjadi pengurus/pengawas masih	Peningkatan kapasitas pelaku KUMKM dalam hal: daya saing, daya kolaborasi dan daya adaftif. Dinas Koperasi UMKM DIY melakukan pembinaan melalui Sosialisasi, Bintek, Diklat	
				jumlah wirausaha baru	Wira -usaha	899	1220			
				Pelatihan Kewirausahaan						
				Jumlah peserta pelatihan penumbuhan desa	ukm	30	30			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			KUKM dengan perbankan, BUMN dan usaha swasta lainnya.	Preneur tahap 2 di 6 Desa meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran				rendah, Edukasi terhadap anggota masih lemah, Masyarakat umum belum mengenal koperasi karena tidak dijadikan materi pelajaran secara formal berakibat kecilnya minat berkoperasi dikalangan generasi muda Pandemi Covid-19 masih belum menurun trendnya, dan status tanggap darurat hingga akhir 2020 masih belum dicabut 2. Kondisi ekonomi daerah masih belum pulih 3. Sektor strategis masih belum pulih (wisata dan pendidikan)	dan pendampingan serta mendatangkan tenaga ahli/narasumber sesuai dengan bidangnya. Dalam Pemasaran bisa dilakukan dengan promosi , pameran produk-produk sektor riil yang dihasilkan UMKM anggota koperasi. Perlu diadakan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan koperasi di sektor riil. Perlu koordinasi dengan dinas kab/kota serta stokeholder yang ada sehingga hasil yang didapat akan maksimal dalam penciptaan WUB.	
			3. Pengembangan Enterprenurship pelaku UMKM dilakukan melalui diklat, pendampingan dan fasilitasi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan	Dukungan sebesar 67% (100 wub) terhadap terwujudnya peningkatan Jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2019 ke 2020 (sebesar 150 wub) semula 749 wub menjadi 899 wub	persen	100	100			
				Layanan Usaha Wirausaha Baru						
				Edukasi Kewirausahaan Berbasis Media Sosial bagi WUB	Kegi -atan	0	0			
				Roadmap pembinaan koperasi dan UKM berdaya saing khas jogja	Doku -men	0	0			
				Jumlah wirausaha kab/kota yang dilayani dalam pojok konsultasi bisnis	ukm	50	50			
				Upgrade aplikasi tata kelola KUKM Terpadu	aplikasi	1	0			
				Dukungan sebesar 33% (50 wub) terhadap terwujudnya peningkatan Jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2019 ke 2020 (sebesar 150 wub)	persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				semula 749 wub menjadi 899 wub						
				Jumlah kiriman stimulus daya beli produk KUKM	Kiri -man	8000	8000			
				Akses promosi dan pemasaran UKM mitra SiBakul Jogja	ukm	60	60			
				Pembuatan Sistem Aplikasi Tata kelola KUKM Terpadu	Apli -kasi	1	0			
				Pemulihan UMKM terdampak Covid-19	UMKM	402	402			
				Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis	ukm	200	200			
				Jumlah 150 Peserta Inkubator Bisnis yang siap, (sudah memiliki manajemen usaha, jejaring pemasaran, produksi yang baik) menjadi wirausaha baru	wub	0	0			
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN						
				nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	juta rupiah	2046177	8234429			
				Pengawasan dan Penilaian Koperasi						
				Pengembangan aplikasi database koperasi	Apli -kasi	0	0			
				Dukungan sebesar 30% (3.024 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omzet koperasi riil dari tahun 2019 ke 2020 (10.080 juta	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah						
				Jumlah koperasi yang naik peringkat	Kope-rasi	0	0			
				Jumlah koperasi sehat	Kope-rasi	0	0			
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan	Kope-rasi	30	30			
				Jumlah koperasi berprestasi	Kope-rasi	0	0			
				Jumlah koperasi yang diawasi	Kope-rasi	0	0			
				Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi						
				Pelayanan Dekopin terhadap fungsi dan aspirasi Gerakan Koperasi	Tahun	1	1			
				Jumlah koperasi peserta pelatihan (SDM dan Kelembagaan) yang meningkat kapasitas usahanya 100%	Kope-rasi	0	0			
				Sosialisasi Koperasi 13 x 2 titik lokasi	Orang	0	0			
				Jumlah koperasi produsen peserta pelatihan yang meningkat kapasitas usahanya 100%	Kope-rasi	1	1			
				Dukungan sebesar 30% (3.024 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omzet koperasi riil dari tahun 2019 ke	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				2020 (10.080 juta rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah						
				Master Plan Pengembangan Koperasi Susu di Kabupaten Sleman	Doku -men	0	0			
				Meningkatnya pemahaman perkoperasian bagi generasi muda	Kelom -pok	0	0			
				Penguatan bisnis dan kelembagaan koperasi sekunder	Kope -rasi	0	0			
				Jumlah peserta Bimtek Dewan Pengawas Syariah yang meningkat Kapasitasnya 100%	Orang	0	0			
				Pemasaran Perkoperasian						
				Peningkatan omzet koperasi yang mengikuti pameran produk Koperasi (harkopnas, Produk koperasi dan UKM)	Rupiah	0	0			
				Jumlah media publikasi Perkoperasian	Media Publi -kasi	0	0			
				Dukungan sebesar 40% (4.032 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omzet koperasi riil dari tahun 2019 ke 2020 (10.080 juta	%	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah						
				Pelatihan Kapasitas Koperasi (DAK)						
				Terlaksananya Diklat Pelatihan Kapasitas Koperasi	Kope -rasi	840	840			
				Dukungan sebesar 30% (3.024 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omzet koperasi riil dari tahun 2019 ke 2020 (10.080 juta rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah	%	100	100			
				Terlaksananya Pendampingan Kepada Koperasi	Kope -rasi	280	280			
				PROGRAM PENGEMBANGAN UKM						
				Nilai omzet UKM Tahun n	juta rupiah	87516	340026			
				Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM						
				Jumlah peserta pelatihan (terkait produk) yang meningkat ketrampilannya	UKM	0	0			
				Jumlah UKM peserta pelatihan (manajemen usaha dan manajemen keuangan) yang meningkat kapasitasnya	UKM	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyusunan profil UKM Jogja	Doku -men	0	0			
				Jumlah peserta pelatihan terkait sertifikasi yang meningkat pengetahuannya (ISO, HACCP)	UKM	0	0			
				Pelatihan Manajemen bagi UKM di 5 Kab/Kota	AKT	0	0			
				Dukungan 50% (2.083,5 juta rupiah) terhadap peningkatan Nilai omzet UKM sebesar 5% (4.167 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 83.349 juta rupiah menjadi 87.516 juta rupiah	%	100	100			
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Wirausaha Baru	Halal PIRT	180	180			
				Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi Halal dan PIRT	Halal	80	80			
				Pemasaran Produk UKM						
				Peningkatan omzet UKM di Galeri SMESCO	UKM	100	80			
				Gebyar UKM DIY di Galeri SMESCO	UKM	0	0			
				Peningkatan omzet UKM peserta pameran produk UKM	%	0.1	0.2			
				Dukungan 50% (2.083,5 juta rupiah)	%	100	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				terhadap peningkatan Nilai omzet UKM sebesar 5% (4.167 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 83.349 juta rupiah menjadi 87.516 juta rupiah						
				Jumlah Kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/Toko Modern	Kontrak	0	0			
				Peningkatan omzet UKM Galeri di YIA	%	5	5			
				Jumlah UKM goes digital	UKM	0	0			
				Jumlah UKM paham proses sertifikasi merk dan branding	UKM	0	0			
				Pelatihan Kapasitas UKM (DAK)						
				Dukungan 50% (2.083,5 juta rupiah) terhadap peningkatan Nilai Omzet UKM sebesara 5% (4.167 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 83.349 juta rupiah menjadi 87.516 juta rupiah	%	100	0			
				Terlaksananya Diklat Pengembangan UKM	orang	1605	1605			
				Terlaksananya Pendampingan Kepada UKM	orang	634	532			
				PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina	rupiah	18250500000	69560000000			
				Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan						
				Jumlah Koperasi yang meningkat kemampuannya dalam mengakses permodalan	Kope-rasi	50	50			
				Dukungan 50% (Rp9.125.250.000,-) terhadap jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun 2019 sebesar Rp18.250.500.000,-	%	100	100			
				Jumlah Kontrak Pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara Koperasi dan Mitra	Kope-rasi	10	10			
				Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan						
				Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara UMKM dengan mitra	UKM	20	20			
				Jumlah UKM yang meningkat kemampuannya dalam mengakses permodalan	UKM	30	30			
				Dukungan 50% (Rp 9.125.250.000) terhadap jumlah	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun 2020 sebesar Rp18.250.500.000						
3	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		**PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA**				Pelaku UMKM sebagian masih lemah disisi kemampuan personil, Kualitas SDM yang terbatas, Keterbatasan modal, Kaderisasi terhadap anggota untuk menjadi pengurus/pengawas masih rendah, Edukasi terhadap anggota masih lemah, Masyarakat umum belum mengenal koperasi karena tidak dijadikan materi pelajaran secara formal berakibat kecilnya minat berkoperasi dikalangan generasi muda Pandemi Covid-19 masih belum menurun trendnya, dan status tanggap darurat hingga akhir 2020 masih belum dicabut 2. Kondisi ekonomi daerah masih belum pulih 3. Sektor strategis masih belum pulih (wisata dan pendidikan)	Peningkatan kapasitas pelaku KUMKM dalam hal: daya saing, daya kolaborasi dan daya adaftif. Dinas Koperasi UMKM DIY melakukan pembinaan melalui Sosialisasi, Bintek, Diklat dan pendampingan serta mendatangkan tenaga ahli/narasumber sesuai dengan bidangnya. Dalam Pemasaran bisa dilakukan dengan promosi , pameran produk-produk sektor riil yang dihasilkan UMKM anggota koperasi. Perlu diadakan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan koperasi di sektor riil. Perlu koordinasi dengan dinas kab/kota serta stokeholder yang ada sehingga hasil yang didapat akan maksimal dalam penciptaan WUB.	
						0	0			
				Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia						
				Dukungan 0.9% terhadap jumlah desa mandiri budaya	persen	100	100			
				Pengelolaan eks Hotel Mutiara	Doku -men	2	2			
				PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						
				Pengembangan Kewirausahaan Desa						
				Rembug Deso Usaha Gotong royong	kali	2	2			
				Pameran Produk Lokal UKM	kali	3	3			
				Pendampingan UKM pada (tahap Penumbuhan dan Pengembangan)	desa	15	15			
				Three D Bioskop Indra	paket	1	1			
				Publikasi dan Pemasaran (Tahap Penumbuhan dan Pengembangan)	video profile	2	2			
				Gelaran Produk sibakul	kali	4	4			
				Pelatihan Branding Produk Budaya	Angka -tan	2	2			
				Sosialisasi Kewirausahaan	Angka -tan	55	55			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Roadmap Pengembangan K45PAK	Doku -men	1	1			
				Kajian Profile Embrio Desa Preneur untuk Mendukung Desa Mandiri Budaya	Doku -men	1	1			
				Penyusunan Profil Desa Budaya dan Potensi Kewirausahaan UMKM	Doku -men	1	1			
				Dukungan 0.9% terhadap jumlah desa mandiri budaya	persen	100	100			
				Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Produk UKM (desa tahap penumbuhan dan pengembangan)	Angka -tan	10	10			
				Pameran virtual wirakarya budaya sibakuljogja	kali	2	2			
				Promosi melalui talkshow dan angkringan	Kegi -atan	1	1			
				Sosialisasi Kewirausahaan (Tahap Penumbuhan)	lokasi	0	0			
				Pelatihan/Diklat Peningkatan Kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya (Desa Tahap Penumbuhan dan Pengembangan)	Angka -tan	20	20			
				Pelatihan 5 Desa Penumbuhan K45PAK	Angka -tan	10	10			

12) Urusan Penanaman Modal

a) Kondisi Umum

Penanaman modal atau investasi sudah diketahui bahwa memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah negara atau daerah. Hal ini dikarenakan investasi merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membentuk jalannya kegiatan perekonomian sehari-hari. Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Rata-rata pertumbuhan pada periode tersebut sebesar 22,66%, dengan pertumbuhan terendah pada tahun 2017 sebesar 6,42% dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 56,18%. Pertumbuhan investasi di DIY pada dua tahun terakhir (2018 dan 2019) mengalami lonjakan yang tinggi. Hal ini sebagai imbas dampak kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menggelontorkan dana pembangunan infrastruktur yang cukup besar dalam wujud proyek bandara NYIA, proyek - proyek lain termasuk jalan negara yang melintasi bagian selatan wilayah DIY, proyek pembangunan underpass jalur lintas selatan di YIA, underpass Kentungan, jalan tol dan beberapa proyek perbaikan infrastruktur jalan raya maupun fasilitas publik di beberapa wilayah di DIY.

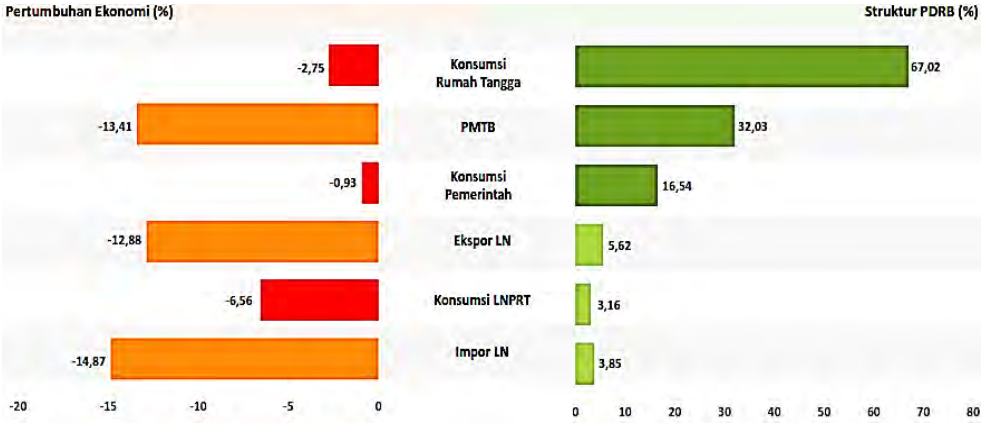
Pada tahun 2020 realisasi investasi tercatat tumbuh sebesar Rp2.823.382.580.000,00 (10,62%). Meskipun tercatat bertumbuh, capaian realisasi investasi DIY tahun 2020 mengalami penurunan terhadap capaian tahun 2019 yang mencatatkan pertumbuhan realisasi investasi sebesar Rp6.518.285.700.000,00 (32,47%) sebagaimana terlihat pada tabel dan gambar. Hal ini diindikasikan dikarenakan pembangunan konstruksi YIA sudah memasuki tahap penyelesaian serta adanya dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Secara kumulatif total investasi di DIY sampai dengan tahun 2020 adalah Rp29.417.339.654.802,00 yang terdiri dari PMDN Rp19.931.377.693.467,00 dan PMA Rp9.485.961.961.335,00.

Tabel 3.103. Perkembangan Investasi di DIY 2016 - 2020

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Growth (Rp000)	Investation Growth (%)
s.d 2016	4.522.819.693	7.554.841.971	12.077.661.664	854.258.422	7,61 %
s.d 2017	4.817.449.093	8.036.525.281	12.853.974.374	776.312.710	6,42 %
s.d 2018	10.949.163.293	9.126.508.081	20.075.671.374	7.221.697.000	56,18 %
s.d 2019	17.248.001.993	9.345.955.081	26.594.057.074	6.518.385.700	32,47 %
s.d2020	19.931.447.693	9.485.961.961	29.417.439.654	2.823.382.580	10,62%

Sumber: Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY, 2021

Pandemi Covid-19 berdampak sangat luas dan pengaruhnya merambah hingga semua aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan keselamatan namun juga aspek ekonomi. Untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto, berdasarkan data BPS, nilai PMTB dalam PDRB DIY tahun 2020 tercatat sebesar Rp44.329.520 juta. Nilai tersebut sudah melampaui target RPJMD tahun 2020 sebesar Rp40.633.132 (109,09%). Pada tahun 2020 PMTB menempati peringkat kedua penyumbang PDRB setelah Konsumsi Rumah Tangga. Meskipun demikian seperti telah disebutkan sebelumnya dan berdasarkan gambar di bawah akan tampak bahwa PMTB mengalami kontraksi sebesar 13,41%.



Gambar 3.38. Pangsa dan Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran, 2020 (*c-to-c*)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Tajamnya penurunan pertumbuhan ekonomi DIY ini juga disebabkan faktor bahwa periode-periode sebelumnya ekonomi DIY tumbuh cukup tinggi; yang salah satunya didorong oleh adanya aktivitas pembangunan YIA pada fase konstruksi awal (belanja modal awal), dan pada tahun selanjutnya investasi yang dicatatkan hanya berasal dari belanja modal lanjutan yang tentunya tidak sebesar belanja awal. Dari sisi investasi, imbas dari adanya pandemi Covid-19 juga terlihat pada semakin tajamnya penurunan pertumbuhan realisasi investasi dari tahun 2019 ke 2020. Meskipun demikian dikarenakan masih didorong oleh kelanjutan proses konstruksi YIA dan proyek – proyek infrastruktur besar lainnya; investasi DIY masih tercatat bertumbuh (meski mengalami penurunan) sebagaimana tergambar dari data yang telah disampaikan sebelumnya.

(1) Persebaran Investasi DIY

Lonjakan pertumbuhan nilai realisasi investasi di DIY pada kisaran tahun 2017 hingga 2019 sedikit banyak mengubah peta persebaran nilai realisasi investasi apabila dilihat dari segi lokasi investasi di kabupaten/kota. Hal ini juga berlanjut pada pola persebaran nilai realisasi investasi di tahun 2020. Lokasi bandara baru (YIA) yang ada di Kabupaten Kulon Progo menjadikan Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2019 menempati posisi pertama nilai realisasi investasi se-DIY. Di tahun 2020 dengan nilai realisasi investasi total sebesar Rp12.507.288 Juta, Kulon Progo masih menempati posisi teratas nilai realisasi investasi DIY. Kondisi realisasi investasi di 4 (empat) wilayah lain masih relatif sama dengan kondisi 5 (lima) tahun terakhir, dimana realisasi investasi total menunjukkan adanya pertumbuhan positif dengan nilai realisasi investasi tertinggi adalah Kabupaten Kulon Progo, diikuti Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul.

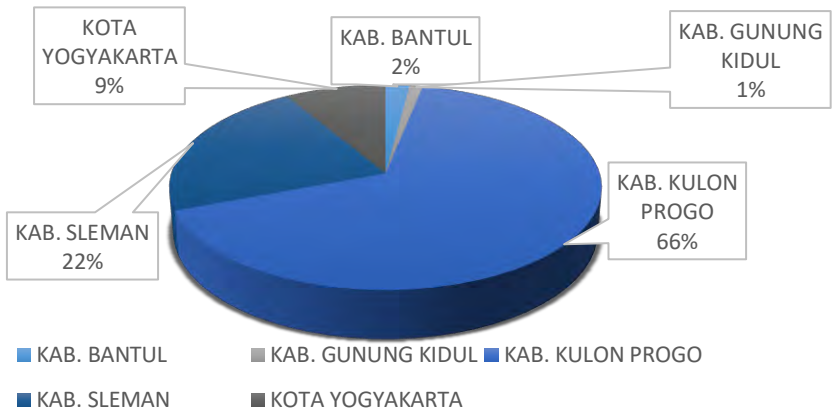
Dari tabel di bawah terlihat bahwa antara wilayah dengan nilai realisasi investasi tertinggi (Kabupaten Kulon Progo) dan terendah (Kabupaten Gunungkidul) masih terdapat kesenjangan cukup besar yaitu kurang lebih sekitar Rp12.126.223 Juta. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan 2020 masih ada kesenjangan/ketimpangan pertumbuhan investasi di kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada tabel dan gambar Perkembangan Investasi Per Kabupaten/Kota kumulatif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 berikut:

Tabel 3.104. Perkembangan Investasi Kabupaten/Kota di DIY 2016 - 2020 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Bantul	743.288	929.537	1.078.588	1.209.467	1.266.968
Sleman	4.944.506	5.198.931	6.716.164	7.618.557	8.242.760
Gunungkidul	184.497	255.746	270.751	349.159	381.065
Kulon Progo	1.086.725	1.193.302	5.771.863	10.640.748	12.507.288
Yogyakarta	5.118.644	5.276.458	6.238.304	6.776.025	7.019.257
Jumlah	**12.077.660**	**12.853.974**	**20.075.670**	**26.593.956**	**29.417.340**

Sumber: Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY, 2021

Perbandingan jumlah realisasi investasi pada tahun 2020 berdasarkan Kabupaten/Kota juga dapat dilihat pada pie chart di bawah. Terlihat bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Kulon Progo masih menjadi penyumbang nilai realisasi investasi terbesar di DIY (66,1%) disusul oleh Kabupaten Sleman (22,1%) dan Kota Yogyakarta (8,6%). Terlihat pula bahwa Kabupaten Gunungkidul hanya menyumbangkan 1,1% nilai realisasi investasi tahun 2020.



Gambar 3.39. Persentase Realisasi Investasi Tahun 2020 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota

Apabila dipilah berdasar kategori penanaman modal, untuk PMDN, Kabupaten Kulon Progo menempati posisi teratas penyumbang realisasi investasi terbesar dengan nilai realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp1.837.831.700.000,00. Hal ini (masih) bersumber pada proyek infrasruktur besar diantaranya proyek pembangunan bandara NYIA dan infrastruktur penunjangnya. Menempati posisi

kedua adalah Kabupaten Sleman dengan nilai realisasi investasi PMDN sebesar Rp551.005.400.000,00 dan posisi Kota Yogyakarta dengan nilai realisasinya sebesar Rp231.859.200.000,00. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul tercatat masih menempati posisi dua terbawah dengan nilai realisasi yang tidak jauh berbeda di kisaran Rp 31 Milyar. Sedangkan untuk PMA, Kabupaten Sleman menempati posisi teratas penyumbang realisasi investasi terbesar dengan nilai realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp73.198.080.000,00. Hal ini sedikit banyak menunjukkan bahwa penanam modal asing banyak yang berminat berinvestasi di Kabupaten tersebut. Pada posisi kedua adalah Kabupaten Kulon Progo diikuti oleh Kabupaten Bantul pada posisi ketiga.

(2) Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019-2020

Tabel 3.105. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai PMTB dalam PDRB DIY	Juta rupiah	49.519.128	40.633.132	44.329.520	109,09	44.798.028	98,95
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,86	84	86,68	103,19	86	100,7

Sumber: Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY, 2021

Pada tahun 2020 Nilai PMTB dalam PDRB DIY menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 44.329.520 juta rupiah. Nilai PMTB tersebut sudah melampaui target tahun 2020 sebesar 40.633.132 juta rupiah atau 109,09 persen. Capaian realisasi nilai PMTB di tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD (2022) sebesar 44.798.028 juta rupiah adalah 98,95 persen. Meskipun melampaui target tahun 2020, perlu dicatat bahwa capaian angka PMTB ini masih berada di bawah capaian tahun 2019, yang artinya ada penurunan pertumbuhan. Hal ini diindikasikan disebabkan oleh akan selesainya tahap konstruksi proyek – proyek besar yang menjadi penyumbang utama lonjakan nilai PMTB di tahun sebelumnya, serta sebagai imbas adanya pandemi Covid-19.

Berkenaan dengan ketugasan pelayanan perizinan secara terpadu, pada tahun 2020, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam hal pelaksanaan pelayanan perizinan secara terpadu mencapai 86,68 (Nilai A, sangat baik) melebihi target mutu pelayanan yang ditetapkan dengan nilai sebesar 84. Capaian tersebut didukung oleh komitmen yang kuat dari instansi serta aparatur pelayanan perizinan, adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Standar Pelayanan yang jelas, sarana dan prasarana penunjang layanan yang memadai, dan pemanfaatan aplikasi layanan perizinan Daring *single Submission* (OSS). Sebagai catatan dan sebagai bahan evaluasi; nilai ini masih di bawah capaian tahun 2019 yaitu 87,86. Hal ini diindikasikan karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat pelayanan perizinan sempat tersendat dikarenakan adanya masa tanggap darurat dan penerapan berbagai protokol kesehatan yang mengharuskan diminimalisirnya pelayanan perizinan tatap muka. Meski demikian penurunan nilainya tidak terlalu signifikan dan masih dalam batas wajar.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2020 didukung dengan empat Program utama dan sembilan Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.412.234.549,00. Pada tahun 2020, penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp2.137.220.801,00 atau 88,59%, dengan realisasi fisik mencapai 99,13%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN PENANAMAN MODAL	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	1. Mendorong pelaksanaan kebijakan Regulasi tentang kewajiban Investor untuk menyerap tenaga kerja local 2. Peningkatan Investasi Yang Inklusif Terutama Dari Investor Domestik 3. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmoni 4. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu Pemberian insentif dan fasilitasi investasi 5. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal 6. Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkualitas dan Berkelanjutan 7. Melakukan koordinasi intensif terkait dengan materi kerjasama baik secara formal maupun informal dan tindak	**PROGRAM PROMOSI INVESTASI**				- Masih terdapat ketimpangan penyebaran investasi - Masih lamanya birokrasi dan telaah teknis dari OPD teknis pelayanan perijinan yang mempengaruhi SOP yg ada - Secara khusus pada tahun 2020 terdapat permasalahan adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini menghadirkan permasalahan dalam hal pencapaian tujuan peningkatan realisasi investasi. Dengan adanya pandemi maka kegiatan perekonomian pun banyak yang mengalami penurunan sehingga pertumbuhan	Penerapan Tugas dan fungsi Penanaman Modal sesuai dengan UU 23 tahun 2014 Pemanfaatan dan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi/daring system dalam rangka pelaksanaan pelayanan perijinan Mendorong kerja bersama seluruh stakeholder di DIY yang berkaitan dengan Penanaman Modal untuk melakukan konsolidasi potensi yang merupakan kunci efektivitas promosi Investasi di DIY. Area kerja bersama ini diantaranya	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN a. Urusan Penanaman Modal 1. Upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan ketimpangan investasi: a. Melakukan pemetaan potensi investasi unggulan yang lokusnya berada pada wilayah yang realisasi investasinya tercatat masih rendah yaitu di wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.Pemetaan ini dilaksanakan dengan membuat Kajian dan Forum Pemetaan Potensi. 2. Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi lamanya birokrasi perizinan: Mendorong penggunaan teknologi informasi (dalam hal ini Aplikasi SiCantik Cloud) 3. Upaya untuk mengatasi dampak
				Nilai Rencana Investasi tahun n	Juta Rupiah	1243628	1051886			
				Promosi Investasi						
				pameran investasi di jakarta dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp 300.000.000.000,-	pameran investasi	0	0			
				Temu investor di DIY dengan mengundang 6 investor dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp 300.000.000.000,-	kali	0	0			
				Dukungan sebesar 61,92 % terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi Tahun n (RpJuta) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1.036.356 menjadi 1.243.628 juta rupiah	Juta Rupiah	100	99.18			
				Penanganan Kerjasama Luar Negeri						
				Temu kemitraan dengan Negara Mitra Kerjasama dengan proyek atau nilai investasi yang ditawarkan ke Luar Negeri	Negara Mitra Kerjasa	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			lanjut kerjasama yang sudah disepakati	sebesar Rp 300.000.000.000				ekonomi pun terkontraksi. Dari sisi investasi maka kondisi pandemi akan membuat calon investor banyak menahan untuk tidak menanamkan modal karena dana yang dimiliki lebih digunakan untuk menutup biaya operasional. Selain itu kondisi pandemi membuat adanya pergeseran sektor unggulan yang diminati investor. Permasalahan penanganan permasalahan investor yang telah berinvestasi di DIY juga menjadi cukup pelik, karena pandemi Covid-19 telah membuat beberapa	adalah menentukan area potensi dan peluang dengan fokus di masing-masing wilayah, koordinasi untuk menyelesaikan gap dalam business process yang masih menjadi kendala, penyebarluasan mindset investasi, pola koordinasi promosi, dan harmonisasi regulasi. - Mendorong inovasi untuk melaksanakan promosi investasi di tengah pandemi, serta aftercare investor yang telah berusaha di DIY.	pandemi: Melakukan inovasi untuk melaksanakan promosi investasi di tengah pandemi, serta aftercare investor yang telah berusaha di DIY.
			8. Peningkatan Ketepatan, kecepatan, dan kelancaran pelayanan ijin dan non ijin mencapai 100%	Dukungan sebesar 38,06 % terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi Tahun n (RpJuta) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1.036.356 menjadi 1.243.628 juta rupiah	%	100	95.91			
			9. Mempercepat penyelesaian pengaduan perijinan dan kemudahan pelayanan perijinan bagi masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI**						
				Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	Juta Rupiah	988910	2602036			
				Penanganan Permasalahan Penanaman Modal						
				Permasalahan Penanaman Modal Yang telah selesai difasilitasi	Perma-salahan	2	2			
				Dukungan sebesar 30 % terhadap terwujudnya peningkatan Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN Tahun n dari tahun 2019 ke 2020 semula 941.819 menjadi 988.910 (RpJuta rupiah)	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat 7 perusahaan dari tahun 2019 menjadi 154 perusahaan di Tahun 2020	Perusa-haan	7	260	perusahaan yang ada cukup kesulitan bahkan untuk mempertahankan bisnisnya		
				Percepatan Realisasi Investasi						
				Dokumen Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi	Doku-men	1	1			
				Proposal Kerjasama investasi	Doku-men	0	0			
				Dokumen Naskah Akademik Raperda RUPM	Doku-men	0	0			
				Dukungan sebesar 40% terhadap terwujudnya peningkatan Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN Tahun n dari tahun 2019 ke 2020 semula 941.819 menjadi 988.910 (RpJuta rupiah)	%	100	100			
				Penyiapan Potensi Investasi						
				Dukungan sebesar 30% terhadap terwujudnya peningkatan Pertumbuhan Nilai	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Realisasi Investasi PMA & PMDN Tahun n dari tahun 2019 ke 2020 semula 941.819 menjadi 988.910 (RpJuta rupiah)						
				Potensi investasi yang siap jual di kab Gunungkidul	Doku -men	0	0			
				PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN						
				Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	persen	97	97			
				Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor SDA dan Kesra						
				Dokumen Izin terbit,persetujuan pemenuhan komitmen tahun 2020	izin	800	611			
				Dukungan sebesar 50 % terhadap terwujudnya Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%) dari tahun 2019 ke 2020 semula 95% menjadi 97%	%	100	99.42			
				Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor Perekonomian dan Infrastruktur						
				Dukungan sebesar 50 % terhadap terwujudnya	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%) dari tahun 2019 ke 2020 semula 95% menjadi 97%						
				Dokumen Izin terbit,persetujuan pemenuhan komitmen tahun 2020	izin	800	1061			
				PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN						
				Waktu penyelesaian ijin usaha	hari	3	4			
				Percepatan Perizinan Berusaha						
				Maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan	Doku -men	0	0			
				Penyusunan komitmen bersama percepatan pelayanan perizinan	Doku -men	0	0			
				Updating SOP ijin dan non ijin	Doku -men	0	0			
				Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Doku -men	0	0			
				Bimtek OSS bagi Petugas Pelayanan Perijinan	orang	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan sebesar 60 % terhadap terwujudnya Waktu penyelesaian ijin usaha (hari) dari tahun 2019 ke 2020 semula 5 hari menjadi 3 hari	%	100	98.24			
				Updating Data GIS Pasca Izin Terbit	%	0	0			
				Aplikasi si Cantik Cloud	Apli -kasi	1	1			
				Pelayanan Pengaduan Perizinan						
				Dukungan sebesar 40% terhadap terwujudnya Waktu penyelesaian ijin usaha (hari) dari tahun 2019 ke 2020 semula 5 hari menjadi 3 hari	%	100	100			
				Pengaduan Perizinan selesai 100 %	Penga -duan	2	16			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84	86.68			
				SOP Pengaduan	dokume n	0	0			

13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a) Kondisi Umum

Pendidikan kepemudaan merupakan salah satu upaya untuk membina generasi muda Indonesia. Pendidikan kepemudaan berfokus pada dua aspek utama, yaitu pembinaan karakter dan pengembangan kapasitas pemuda sebagai agen pembaharu di masyarakat. Pembinaan kewirausahaan pemuda masih menjadi fokus utama Pemda DIY di tahun 2020, disamping menyelenggarakan pula sosialisasi pertukaran pemuda antar negara dan seleksi paskibraka. Adanya pandemi Covid-19 banyak membatasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan sehingga pembinaan pemuda lebih banyak berupa pendampingan para alumni peserta pelatihan sebelumnya. Progres para alumni dalam mengembangkan kewirausahaan diharapkan mampu menjadi pendorong tumbuhnya kewirausahaan di masyarakat, mengingat dampak pandemi Covid-19 yang sangat besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat.



Gambar 3.40. Pertandingan Cabor Anggar pada POPDA 2020

Selanjutnya terkait bidang olahraga, dukungan pembinaan untuk para atlet pelajar melalui berbagai kejuaraan olahraga masih terus dilakukan Pemda di tahun 2020 sesuai tujuan pengembangan olahraga pelajar di DIY. Adanya pandemi Covid-19 membatasi penyelenggaraan banyak kejuaraan olahraga namun pada bulan Maret 2020 Pemda DIY masih berkesempatan menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA). Para atlet pelajar juga masih menyelenggarakan latihan rutin dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat sebagai persiapan untuk menghadapi kompetisi-kompetisi olahraga mendatang.

Tabel 3.106. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Capaian 2020 dan Perbandingan Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	%	10,02	10,9	10,02	91,93	11,8	84,92
2	Prestasi Cabang Olahraga	Pering-kat	Peringkat 7 POPNAS	Peringkat 9 POPNAS	N/A	N/A	Peringkat 8 POPNAS	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2021

Capaian indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun 2020 belum dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu tercapai 10,02% dari target 10,90%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 tidak terdapat peningkatan di tahun 2020 dan masih terdapat selisih 1,78% antara capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD. Pada tahun 2020 terdapat beberapa kendala yang dialami dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, antara lain:

(1) Keterbatasan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan secara tatap muka akibat pandemi Covid-19.
(2) Pembatalan kegiatan yang penyelenggaraannya dikoordinir oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, misalnya Pertukaran Pemuda Indonesia Korea (PPIKor) sesuai surat dari Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor PP.04.01/3.23.1/D-II.5/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020.
(3) Keterbatasan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan maupun workshop kepemudaan yang melibatkan banyak peserta dan praktik intensif di lapangan. Akibatnya, kegiatan lebih banyak dilaksanakan dalam forum alumni kegiatan tahun sebelumnya secara daring maupun tatap muka sangat terbatas.

Pada tahun 2020, prestasi olahraga DIY diukur melalui pencapaian peringkat dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). Sesuai Surat Edaran Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 8.10.1/DIV-1/VIII/2020, tidak ada penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional di tahun 2020. Dengan demikian maka tidak ada capaian kinerja untuk indikator Prestasi cabang olahraga di tahun 2020.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Alokasi anggaran untuk Urusan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2020 sebesar Rp7.675.597.969,00. Anggaran tersebut dibagi dalam empat Program dan 13 kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp6.980.025.875,00 (90,94%), dengan capaian fisik sebesar 100%. Deviasi keuangan berasal dari efisiensi anggaran belanja rutin dan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan POPDA 2020. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA-BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	- Pembentukan kelompok pemuda sebagai model akan terwujudnya kemandirian dan kewirausahaan yang dilakukan mulai dari pelatihan, pendampingan dan bantuan usaha namun dengan tetap dilakukan evaluasi terkait trial dan error selama pelaksanaan sehingga dapat dijadikan model bagi kelompok pemuda lainnya	**PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN**				- Keterbatasan modal usaha dan keterampilan wirausaha - Berkembangnya perilaku-perilaku negatif remaja di masyarakat - Dampak pandemi Covid-19 terhadap pembatasan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan	- Penyelenggaraan seleksi sentra kewirausahaan pemuda - Pendampingan dan monitoring terhadap usaha-usaha yang telah dirintis oleh para peserta pelatihan kewirausahaan sebelumnya. - Adanya upaya untuk merintis kegiatan pelatihan dan kegiatan kepemudaan secara daring maupun tatap muka sangat terbatas	B. TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN LAINNYA 1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap KONI salah satunya diwujudkan melalui hibah Gubernur bagi penyelenggaraan kegiatan KONI. Di tahun 2020, Pemda DIY mengalokasikan hibah kepada KONI sebesar Rp29.000.000.000,00. Diharapkan hibah ini mampu mendukung pemberian penghargaan kepada para pelatih dan atlet berprestasi serta mendukung persiapan para atlet yang akan mewakili DIY pada PON 2021. 2. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY Dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap Kwarda DIY salah satunya diwujudkan melalui hibah Gubernur bagi penyelenggaraan kegiatan Kwarda DIY. Di tahun 2020, Pemda DIY mengalokasikan hibah kepada Kwarda DIY sebesar Rp500.000.000,00. Diharapkan pemberian hibah ini dapat mendukung kegiatan kepramukaan yang diorganisir Kwarda DIY dalam rangka peningkatan kualitas generasi
			- Pendampingan terhadap sentra pemuda yang sudah pernah mendapatkan pelatihan sehingga didapatkan tolak ukur dan evaluasi atas capaian yang sudah dicapai baik berupa keberhasilan maupun kegagalan	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	Persen	26	24.34			
			- Membuka kesempatan kerjasama dengan dunia industry kreatif dan pariwisata dengan membentuk jaringan kerja antara sentra pemuda dengan berdasar spesifikasi/kekhususan produk	**Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan**						
				Dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada Pendidikan kepemudaan	%	26	26			
			- Peningkatan kegiatan kepemudaan seperti karang taruna, pramuka, tonti dan PMI	1. Sosialisasi/Perekrutan Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara	Kegia -tan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			- Pengiriman pemuda/ pemudi melalui program pertukaran pemuda baik antar daerah di Indonesia maupun ke Negara lain	**Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan**						muda DIY dan penanaman nilai-nilai kearifan lokal sehingga generasi muda DIY menjadi generasi yang mandiri, kreatif dan produktif.
				Rehabilitasi Youth Centre	m^2	150	150			
				Rehabilitasi Pondok Pemuda	m^2	40	40			
				Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	%	100	100			
			- Penyelenggaraan kegiatan yang mampu meningkatkan kreatifitas dan peran serta pemuda dalam menjaga keamanan, kebersamaan dan kesatuan melalui kegiatan lintas agama	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan**						
				Dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada Pendidikan kepemudaan	%	26	26			
				Pelatihan Pemuda Kader Anti Narkoba DIY dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka DIY	siswa/ pemuda	130	130			
				Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda						
				dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada Pendidikan kepemudaan	%	26	26			
				1. Sentra Kewirausahaan Pemuda	SKP	6	6			
			- Penyediaan sarana olahraga publik bagi masyarakat	**PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA**				- Masih kurangnya kualitas pembinaan, sarana	Penyelenggaraan POPDA sebagai saringan atlet	
				Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL	Medali	6	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			- Penyediaan sarana olahraga yang memenuhi standar pelayanan internasional sehingga memudahkan pemanfaatan dan penggunaan pada saat kompetensi olahraga	Jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	Medali	12	31	pelatihan, tenaga pelatih profesional yang mendapatkan kesejahteraan yang layak, serta penghargaan terhadap prestasi atlet - Berkurangnya event olahraga akibat pandemi Covid-19	untuk berlaga di ajang POPWIL, penyempurnaan dan pemeliharaan sarana olahraga	
				Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga						
			- Penyediaan akses public atas sarana olahraga bagi masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat gemar olahraga	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan Olahraga yang berpartisipasi pada pendidikan keolahragaan 26%	%	100	100			
				Pembangunan Stadion Mandala Krida	unit	1	1			
			- Penyediaan sarana umum seperti toilet, shower dan mushola yang dapat digunakan baik oleh atlet yang bertanding maupun berlatih, dan masyarakat sebagai pengguna umum	**Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional**						
				Seleksi Pelatih PAB	orang	72	56			
				Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Cabor	28	27			
				Bantuan Kelembagaan KONI dan NPC	Lem -baga	2	2			

14) Urusan Statistik

a) Kondisi Umum

Dalam penyelenggaraan urusan statistik, Pemda DIY berpedoman pada peraturan perundangan, yaitu: a) PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; b) Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; c) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); d) Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; e) Pergub DIY Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Pergub DIY Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan f) Pergub DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tugas dan fungsi Urusan Statistik adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelayanan data dan informasi pembangunan daerah yang berupa data geospasial dan data non geospasial. Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Pemda DIY telah memiliki *tool* dalam pengelolaan data berupa Aplikasi Dataku untuk data statistik (*non spasial*) dan Aplikasi Geoportal untuk data spasial, serta mengembangkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi, serta untuk menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, telah dilakukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, dan *stakeholders* penyedia data lainnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya. UPT BPPSD DIY sebagai unit yang melaksanakan urusan statistik telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

(1) Menyusun Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
(2) Memberikan kemudahan dalam pemanfaatan data dan informasi yang lebih optimal oleh Perangkat Daerah di DIY, instansi vertikal di DIY, dan kabupaten/kota dengan meng-*update* Aplikasi Dataku yang lebih *user friendly* dan menambah fitur-fitur yang memudahkan dalam pengelolaan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
(3) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama baik dengan Organisasi Perangkat Daerah Pemda DIY, instansi vertikal di daerah, kabupaten/kota maupun *stakeholders* penyedia data lainnya.
(4) Mendorong dan mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan simpul jaringan di kabupaten/kota se DIY, melalui Perjanjian Kerjasama antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota se DIY pada tahun 2019 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial melalui Simpul Jaringan Informasi Geospasial, sehingga saat ini DIY merupakan provinsi pertama yang seluruh simpul jaringan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah aktif, operasional dan terintegrasi.
(5) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi geospasial dan non geospasial dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia.

Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020 diukur dengan dua indikator yaitu: 1) Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah; dan 2) Tingkat Kepuasan Pelanggan. Target dan realisasi kinerja Urusan Statistik secara rinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.107. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam Perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
2	Tingkat Kepuasan pelanggan	%	83,28	70	83,31	119,01	72	115,71

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2021

Realisasi kinerja Urusan Statistik pada Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2020 telah sesuai target sebesar 100%,yaitu sebanyak 4.481 elemen data bisa terisi seluruhnya pada aplikasi Dataku, dan beberapa analisis yang telah disusun yaitu Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021, Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021, Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021, Dokumen Analisis Kemiskinan DIY, Dokumen Analisis Ketimpangan DIY, Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian, Penyediaan Data Statistilk Geospasial Perencanaan dan Pengendalian, DIY Dalam Angka, serta Update dan Verifikasi Data Statistik, Update dan Verifikasi Data Geospasial.

Realisasi kinerja pada Tingkat kepuasan pelanggan tahun 2020 dengan target sebesar 70 telah tercapai sebesar 83,31%. Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD adalah 100% untuk indikator Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah, dan 115,71% untuk indikator Tingkat Kepuasan Pelanggan. Pelaksanaan survey tingkat kepuasan pelanggan mengacu Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2019. Indikator penilaian kepuasan masyarakat terdiri dari sembilan unsur yaitu persyaratan; prosedur; waktu pelayanan; biaya/tarif; produk layanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada tiga layanan BPPSD DIY meliputi: 1) layanan data dan informasi spasial dan nonspasial daring berupa Sistem Informasi Pengelolaan Data Pembangunan Daerah (Update dan verifikasi data statistik pada aplikasi Jogja Dataku) serta Sistem Informasi Geospasial (Update dan verifikasi data geospasial pada aplikasi Geoportal); 2) layanan data dan informasi spasial dan nonspasial *offline* berupa penerbitan buku-buku Analisis antara lain Analisis PDRB DIY, Analisis ICOR DIY, Analisis Makro Ekonomi, Analisis Kemiskinan DIY, Analisis Ketimpangan Daerah DIY, Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian, Penyediaan Data

Geospasial Perencanaan dan Pengendalian, DIY Dalam Angka; serta 3) layanan pengaduan.

Kepuasan pelanggan yang capaiannya rendah adalah unsur waktu pelayanan dengan nilai 79,55 (kategori Baik dengan peringkat 8) dan unsur sarana prasarana dengan nilai 78,13 (kategori Baik dengan peringkat 9). Nilai unsur pelayanan waktu masih rendah karena ada beberapa data yang harus menunggu jadwal rilis dan seringnya pergantian personil agen data sehingga kadang data terlambat diupdate. Nilai unsur pelayanan sarana prasarana juga belum maksimal karena keterbatasan sarana prasarana yang harus disediakan, seperti: fasilitas untuk difabel, ketersediaan perangkat keras yang terbatas.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Statistik dilaksanakan di Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.315.130.400,00, dapat direalisasikan sebanyak Rp1.179.318.726,00 (89,67%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam tiga Program dan sembilan Kegiatan dengan rician sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH	1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan system aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sengguh) serta *office management*, maupun ketersediaan informasi untuk public melalui web Bappeda. 2. Penguatan fasilitas terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternative kebijakan. 3. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan. 4. Meningkatkan kapasitas perencana dalam	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				1) Terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga menghambat jalannya koordinasi baik dengan Pusat, OPD, Instansi vertikal maupun stakeholder yang lain. 2) Ketidaktersediaan data statistik yang dibutuhkan terjadi ketika beberapa data yang bersumber dari BPS dirilis dalam waktu yang tidak sesuai dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga pemanfaatan data BPS menjadi kurang optimal dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. 3) Masih banyak OPD di lingkungan Pemerintah Daerah se-DIY yang belum memahami data geospasial, serta arti pentingnya pemanfaatan data	1) Koordinasi dilakukan secara daring dengan memanfaatkan platform virtual meeting baik zoom meeting atau google meeting. 2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan BPS Provinsi DIY dalam rangka penyelarasan ketersediaan data dan rilis data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. 3) Diseminasi tentang data Geospasial kepada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah se-DIY.	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen	100	100			
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda	buah	1	1			
				Dukungan terhadap terwujudnya adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	25,80%	25,80%	25,80%			
				Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas Balai	meter	25	25			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor:	jenis	67	67			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	15	15			
				Pembayaran tagihan rekening telepon	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa surat menyurat: - Pengiriman dokumen	kali	30	30			
				Bahan bacaan dan perundang-undangan	jenis	4	4			
				Penydiaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan:	lembar	48000	21267			
				Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	jenis	17	17			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
			pengembangan *tools* atau *instrument* untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. 5. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan. 6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta control terhadap capaian indikator.7. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan. 8. Membangun link antarsistem yang ada di internal Bappeda DIY dan dengan system informasi diluar Bappeda DIY yang terkait. 9. Menjamin infrastruktur jaringan dan computer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan. 10. Menyempurnakan mekanisme forum	Penyediaan Jasa surat menyurat: benda pos	lembar	500	500	geospasial terutama dalam proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan. 4) Data geospasial yang di produksi di masing masing OPD di lingkungan Pemerintah Daerah se-DIY sebagian besar belum terstandar, dalam hal referensi koordinat spasial, jenis penyajian visual simbol data, dan kesetaraan satuan unit data atribut.	Terutama dalam upaya menyamakan persepsi tentang; • Pengertian data geospasial; • Sumber data geospasial; • Metodologi penyusunan data geospasial; • Manfaat data geospasial. 4). Integrasi data geospasial (standarisasi data) agar berbagai data geospasial mengacu pada referensi yang sama, memiliki kesetaraan unit data atribut atau level data atribut yang jelas, dan standar simbolisasi penyajian.	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	12	12			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Honor pengelola kepegawaian	bulan	12	12			
				Honor pengelola keuangan	bulan	12	12			
				Honor pengelola barang	bulan	12	12			
				Honor Perencana Program	bulan	12	12			
				Dukungan terhadap terwujudnya adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	7.21	7.21			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Dukungan terhadap terwujudnya adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	66.98	66.98			
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Jawa)	bulan	12	12			
				Tersedianya makan dan minuma nrapat	os	1728	952			
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	bulan	12	12			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100			
				Pengadaan Peralatandan Perlengkapan						
				Komputer PC	unit	1	1			
				Kamera pengawas CCTV	paket	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
			trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik/program strategis bersama yang konsisten dan terukur. 11. Meningkatkan system aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data. 12. Pengembangan system aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, Sintal, Jogja Dataku, dll) sesuai dengan kebutuhan. 13. Menyempurnakan mekanisme forum Trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik/program strategis bersama yang konsisten dan terukur.	Almari arsip besi	unit	1	1			
				Tabung pemadam	unit	2	2			
				Dukungan thd tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	53.19	53.19			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Gedung Kantor Terpelihara	unit	1	1			
				Dukungan thd tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	26.5	26.5			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Kendaraandinas/operasional terpelihara: Kendaraan dinas roda 4	unit	1	1			
				Dukungan thd tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	10.6	10.6			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Pemeliharaan AC	unit	9	9			
				Pemeliharaan jaringan komputer	paket	1	1			
				Pemeliharaan notebook	unit	3	2			
				Pemelihaan almari	buah	5	0			
				Pemeliharaan komputer PC	unit	10	7			
				Pemeliharaan filling kabinter	buah	2	0			
				Dukungan thd tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran	%	9.69	9.69			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				tugas dan fungsi SKPD (konsistensi penempatan antar kegiatan)						
				Pemeliharaan printer	unit	5	2			
2	STATISTIK	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH		**PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH**						
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100	100			
				Tingkat Kepuasan Pelanggan	persen	70	83.31			
				Penyediaan Data Statistik						
				Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	Doku -men	1	1			
				Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah DIY	Doku -men	1	1			
				Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	Doku -men	1	1			
				Penyediaaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian	Doku -men	1	1			
				Dukungan terhadap persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%	%	100	100			
				Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	Doku -men	1	1			
				Penyediaaan Data Statistik Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	Doku -men	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Dokumen Analisis Kemiskinan DIY	Doku -men	1	1			
				Penyajian dan Informasi Data Statistik						
				Update dan Verifikasi Data Statistik	paket	1	1			
				Update dan Verifikasi Data Geospasial	paket	1	1			
				Dukungan terhadap persentase tingkat kepuasan pelanggan sebesar 70%	%	100	100			
				DIY dalam angka	buku	50	50			

15) Urusan Persandian

a) Kondisi Umum

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi yang dilakukan meliputi: (a) penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemda DIY dan (b) melakukan pembinaan penyelenggaraan persandian ke kabupaten/kota se-DIY dalam hal Pemda DIY sebagai wakil pemerintah pusat. Disamping itu juga dalam rangka penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

(1) Kegiatan Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemda DIY
- Menyediakan akses layanan Datacenter Pemda DIY dengan dengan melakukan perawatan dan pengelolaan *Datacenter (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)* Pemda DIY serta menjamin kerahasiaan, integritas, akuntabilitas dan ketersediaan informasi yang ada dalam DC dan DRC Pemda DIY sepanjang tahun 2019, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan *Service Level Agreement* (SLA) terhadap Layanan *Data Center* Pemda DIY sebesar 99,5 % dalam 1 Tahun atau 362 Hari;
- Penyusunan Laporan Insiden Keamanan Informasi yaitu kegiatan pelaporan terkait pengelolaan insiden yang berisi langkah-langkah yang harus diambil apabila terjadi insiden pada *website* Pemda DIY, yang dimulai dari tahap

persiapan sampai dengan tahap pembuatan laporan dari penanganan insiden yang dapat terjadi pada semua halaman website, baik milik sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional dan ekonomi digital;

- Melaksanakan kegiatan Launching CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) yang didasarkan pada Program Kerja BSSN yang telah melakukan pengukuran tingkat kesiapan penanganan insiden keamanan siber dan memilih 10 Pemerintah Pusat dan 15 Pemerintah Daerah, salah satunya Pemda DIY sebagai *Pilot Project* Pembentukan CSIRT Tahun 2020.
- Operasional *Computer Security Incident Response Team* yang didasari oleh diterbitkannnya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 87/TIM/2020, dibentuklah Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber yang beranggotakan 30 orang yang berasal dari Pemda DIY, Kab/Kota, Kejati DIY, Korem 072/Pamungkas, POLDA DIY.

(2) Kegiatan Pengelolaan Persandian

- *Counter Surveillance* (Pengamanan Ruangan) ruang kerja dan ruang rapat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati se-DIY, Sekda DIY, Asisten Setda DIY, serta Sekda dan Asisten Kabupaten/Kota se-DIY serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY.
- *Signal Jamming* (Pengacakan Sinyal) pada pelaksanaan even tertentu di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY.
- Fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan (HT dan laptop berenkripsi).
- Fasilitasi layanan *encrypted* email atau surel terenkripsi bagi pimpinan, baik enkripsi surel yang akan dikirim maupun dekripsi surel yang diterima untuk diteruskan kepada pimpinan.
- Pengelolaan telepon berbasis Voip untuk instansi di lingkungan Pemda DIY.
- Pengelolaan Frekuensi UHF untuk penunjang komunikasi di lingkungan Pemda DIY.
- Fasilitasi Pengecekan *spectrum* peralatan sandi milik provinsi/kabupaten/kota

- Pengujian Keamanan Sistem Informasi *(Penetration Testing*) pada Aplikasi yang digunakan oleh OPD di Pemda DIY untuk mengetahui celah kerawanannya.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Persandian, dilaksanakan melalui satu Program dan dua Kegiatan dengan alokasi pagu Rp940.710.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp822.593.467,00 (87,40%) Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tersebut tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	Urusan Persandian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY	1. Pemberdayaan dan pengembangan: (1) PPID disetiap badan publik; (2) Komunitas masyarakat penggiat Teknologi Informasi 2. Pembuatan dan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) 3. Pengembangan dan optimalisasi jaringan pemerintah daerah	**PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**				Masih minimnya SDM Persandian	Meningkatkan SDM persandian **dengan** mengikuti beberapa training dari BSSN	Urusan Persandian Peningkatan SDM internal Pemda DIY untuk pengelolaan keamanan informasi dan persandian dilakukan dengan mengikuti beberapa training dari BSSN diantaranya dengan: 1. ASEAN-JAPAN Cyber Security Drill Test yang merupakan drill test kerjasama pengamanan siber antara BSSN dengan Badan Keamanan Siber Asia Pacific dilaksanakan pada Bulan Februari 2020 2. Workshop Pembentukan dan Pengelolaan CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) dari BSSN untuk membekali Tim CSIRT dengan mengirimkan 2 Personil 3. Pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis BSSN (ECIH dan Threat Hunting) namun dibatalkan karena Pandemi Covid-19. Penunjukan Personil pada Workshop Dasar
				Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	Persen	37.5	37.5			
				Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY						
				Operasional CSIRT DIY	Bulan	6	6			
				Dukungan terhadap persentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaandata dan informasi yang berbasis TIK	Persen	23	23			
				Laporan Insiden Keamanan Informasi	Dokumen	1	1			
				Launching CSIRT DIY	Kali	1	1			
				Ketersediaan Akses Datacenter (SLA)	Hari	362	362			
				Pengelolaan Persandian						
				Rekomendasi Forkomsanda	Rekomendasi	1	1			
				Ruangan yang teramankan	Ruangan	22	22			
				Jaringan telepon PABX yang dipelihara	Titik	500	500			
				Laporan Pengujian Keamanan Informasi (Penetration Testing)	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										Jaringan dan Keamanan Jaringan (daring) 4. Pada Bulan Desember 2020 mendapatkan tambahan personil CPNS sejumlah 3 orang. Seksi Keamanan Informasi = 2 orang, Seksi Persandian = 1 orang
				Dukungan terhadap persentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	Persen	13	13			

16) Urusan Kebudayaan

a) Kondisi Umum

Sejalan dengan Visi DIY yaitu **"Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**, maka urusan kebudayaan menjadi salah satu tumpuan dalam mewujudkannya. Dengan demikian keberhasilan kinerja urusan kebudayaan cukup strategis untuk menentukan keberhasilan pencapaian visi tersebut.

Kinerja Urusan Kebudayaan diukur berdasarkan empat indikator capaian sasaran yakni:

(1) Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan.
(2) Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum.
(3) Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya.
(4) Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY.

Tahun 2020 menjadi tahun yang berbeda bagi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Adanya Pandemi Covid-19, berdampak terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan. Oleh karena itu, agar kegiatan tetap berjalan maka konsep pelaksanaan kegiatan dirubah secara daring. Berikut di bawah ini disajikan tabel target dan realisasi kinerja Urusan Kebudayaan tahun 2020.

Tabel 3.108. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1.	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	buah	638	668	700	104,79	768	91,15
2.	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	%	11,00	6.27	8.56	136.52	7,40	115,68
3.	Peningkatan penyelenggaraan even	%	6,77	7.79	7.96	102,18	12,79	62,24

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
	budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya							
4.	Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY	%	4,93	4.44	6.11	137,61	4,75	128,63

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

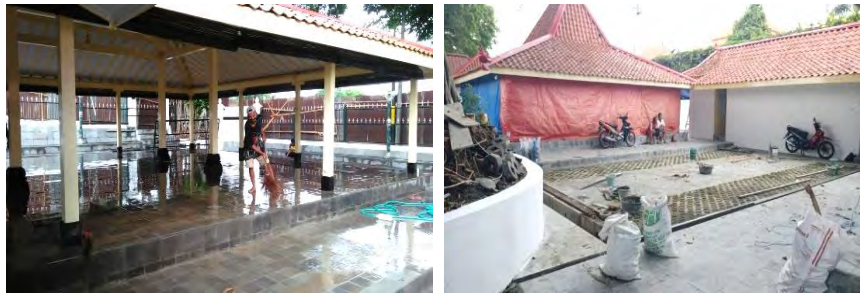
(1) Indikator Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan

Indikator jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan menggambarkan kinerja kegiatan pelestarian budaya benda yang dilakukan. Pengelolaan dan Pelestarian di implementasikan melalui registrasi, kajian, rehabilitasi, pemeliharaan, dan sosialisasi. Pengelolaan dan pelestarian budaya benda difokuskan pada situs, bangunan dan kawasan yang mendukung pengusulan Yogyakarta sebagai Warisan Dunia. Pada Tahun 2020, Budaya benda yang menjadi sasaran program meliputi 3 Situs, 250 Benda Cagar Budaya, 443 Bangunan Cagar Budaya, dan 4 Kawasan Cagar Budaya serta 700 Budaya Benda. Sehingga persentase capaian sebesar 104,79% karena target yang ditetapkan sebenyak 668 budaya benda.

Tabel 3.109. Budaya Benda yang dikelola dan dilestarikan pada Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1.	Situs	3
2.	Benda Cagar Budaya	250
3.	Bangunan Cagar Budaya	443
4.	Kawasan Cagar Budaya	4
Jumlah		700

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021



Gambar 3.41. Rehabilitasi WBCB yang dilakukan pada Tahun 2020

(2) Indikator meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum

Capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 8,56% dari target sebesar 6,27% dengan persentase capaian sebesar 136,52%. Capaian Indikator meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum ditunjang oleh beberapa sub Indikator. Sub indikator tersebut terdiri dari pengembangan di bidang permuseuman, pengembangan di bidang sejarah, dan pengembangan di bidang bahasa dan sastra. Pengembangan dibidang museum pada tahun 2020 dilakukan dengan melaksanakan kegiatan registrasi museum di 1 museum yakni Museum Affandi, dan penyelenggaraan 6 event museum seperti Pemilihan Duta Museum, Pelatihan SDM Permuseuman, jumpa Sahabat Museum, Raker Pemuseuman, Pameran Museum, dan yang menjadi unggulan adalah Wajib Kunjung Museum. Sedangkan Pengembangan dibidang sejarah dengan melaksanakan kajian terhadap 12 peristiwa, dan event Internalisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan dengan menggandeng 3 komunitas sejarah di DIY. Selain itu juga dilakukan pengembangan di bidang bahasa dan sastra, melalui pelaksanaan berbagai event bahasa, antara lain Kompetisi Bahasa Sastra, Pentas Kethoprak, Macapatan, Sandiwara Bahasa Radio yang disiarkan melalui 2 Stasiun Radio, Perayaan Digitalisasi Aksara Jawa dan Festival kethoprak. Selain event pengembangan bidang bahasa sastra juga melakukan kajian terhadap 1 dokumen kajian naskah kuno Serat Aji Saka.

Tabel 3.110. Pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum pada Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Naskah Kuno	1
2	Registrasi Museum	1
3	Peristiwa Sejarah	12
4	Event Museum	6
5	Event Bahasa	51
6	Komunitas Sejarah	3
Jumlah		**74**

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021



Gambar 3.42. Even Bahasa dan Permuseuman Tahun 2020

(3) Indikator peningkatan penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya

Capaian indikator peningkatan penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya pada Tahun 2020 mencapai 7,96% dari target 7,79% dan persentase capaian sebesar 102,18%.

Event internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya pada tahun 2020 adalah Worldship Orchestra Japan. Worldship Orchestra Japan merupakan pagelaran musik orchestra yang melibatkan antara Pemain orchestra yang berasal dari Jepang dan berkolaborasi dengan Pemain orchestra yang berasal dari Yogyakarta yang merupakan Siswa Siswi Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. Selain event Internasinal ada pula 2 event budaya dengan skala nasional yang diselenggarakan yaitu Symphonic Jazz 50's (*Indonesian Song Book*) dan Teater Alam dengan membawakan cerita: Odipus Rex.

Sedangkan event budaya skala Provinsi yang telah terselenggara yaitu 1) Pameran Tunggal Seni Rupa Ekwan Marianto The Journey of Happiness, 2) Teater/Studi Pentas#19 Teater Pebei, 3) Pameran Dendang & Calon Guru, 4) Musik Orkes/Karawitan/Pengetan 1000 Hari Djaduk, 5) Musik Orkes/Karawitan/Orkestra, 6) Teater/Pentas jaran Abang 2020, 7) Musik JCG, 8) Teater/Pentas Teater Anak dengan Judul kali Plastik, 9) Temu Seniman dan Budayawan Sastra DIY, 10) Indonesia Kita, 11) Smada Light Orchestra, 12) HIH RAMINTEN MIROTA, 13) Musik Malam TBY, 14) Gelar Seni Tradisi, 15) Gelar Seni Tradisi, 16) Gelar Karya Maestro, 17) Gelar Seni Tradisi.

Tabel 3.111. Penyelenggaraan *Event* Taman Budaya DIY Pada Tahun 2020

No	Klasifikasi *Event*	Jumlah *Event*
1	Internasional	1
2	Nasional	2
3	Provinsi	17
Jumlah *Event*		**20**

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Proses pemajuan kebudayaan dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sesuai undang-undang, terdapat 10 obyek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pemajuan Kebudayaan DIY di arahkan untuk mampu membawa obyek-obyek pemajuan kebudayaan DIY ke ajang Nasional dan Internasional serta membawa *event* Nasional dan Internasional ke DIY.



Gambar 3.43. Penyelenggaraan *Event* Budaya *di* Taman Budaya DIY Pada Tahun 2020

(4) Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY

Kinerja pengembangan seni di DIY diukur dengan menghitung kinerja pengembangan pada Upacara Adat, Upacara Tradisi, Organisasi Seni Rupa, Organisasi Seni Pertunjukan, Organisasi Perfilman, Lembaga Budaya, Lembaga Pendidikan Budaya, dan Organisasi Kepercayaan. Pencapaian indikator pada tahun 2020 sebesar 6,11% dari target 4,44% atau dengan persentase capaian sebesar 137,61%.

Tabel 3.112. Pengembangan Kinerja Seni di DIY Pada Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Upacara adat	49
2	Upacara Tradisi	4
3	Organisasi seni rupa	34
4	Organisasi seni pertunjukan	284
5	Organisasi perfilman	27

No	Uraian	Jumlah
6	Organisasi Kepercayaan	18
	Jumlah	**416**

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Pada tahun 2020 pengembangan di arahkan untuk pemerataan akses masyarakat akan sarana prasarana budaya dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan even budaya. Penyelenggaraan even budaya di masa pandemi mengalami banyak perubahan Konsep. Perubahan tersebut mengadaptasi dengan protokol kesehatan dalam rangka mengurangi penyebaran Penyakit Covid-19. Perubahan konsep tersebut menjadikan beberapa penyelenggaraan kegiatan yang awalnya berbentuk penyelenggaran secara langsung kini diubah menjadi menjadi penyelnggaran Even Budaya secara daring melalui akun Youtube milik Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan).

Salah satu Even Budaya yang diselenggarakan secara daring adalah Festival Kebudayaan Tahun 2020, dengan tema yang diusung yaitu Mulanira yang berarti akar hening di tengah bising. FKY pada tahun 2020 memiliki dua program besar–yaitu Program pertunjukan dan Program Seni Rupa. Selain FKY ada pula kegiatan Even Seni budaya yang diselenggarakan secara daring seperti Guyon Lagon, yang merupakan Acara Campursari yang dipadu dengan Humor Jawa.

Adanya pandemi di tahun 2020 tidak menghentikan langkah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dalam menyelenggarakan event kebudayaan. Adaptasi terhadap perubahan situasi dan kondisi diikuti dengan mengubah konsep kegiatan dan penerapan protokol kesehatan guna pencegahan penyakit Covid-19. Kebijakan ini diambil agar nadi seni dan kebudayaan dan roda perekonomian masyarakat yang hidup dari penyelenggaran even budaya di Yogyakarta tidak serta merta berhenti tanpa kejelasan.



Gambar 3.44. FKY Tahun 2020



Gambar 3.45. Pentas Daring Seni Guyon Lagon bersama Dhimas Tedjo

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp144.654.376.366,84. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi ke dalam tujuh Program dan 33 Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung terealisasi sebanyak Rp279.135.216.874,00 atau sebesar 95,00% dan dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	DINAS KEBUDAYAAN	1. Menumbuh kembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda.	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Penyedia pemenang tender kesulitan melaksanakan pekerjaan, karena tidak memiliki kemampuan khusus dalam pekerjaan rehabilitasi cagar budaya, karena tender pekerjaan cagar budaya disamakan dengan tender konstruksi secara umum	Pengendalian pelaksanaan kontrak secara ketat	a. Urusan Kebudayaan Dimulai pada tahun 2013 sampai dengan 2020 pemerintah pusat telah menyalurkan dana keistimewaan kepada DIY. Dana keistimewaan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada DIY untuk membiayai kewenangan terkait dengan urusan keistimewaan yang salah satunya adalah kebudayaan. Urusan Kebudayan dimaknai dalam arti luas dan bisa di kerjakan secara koloboratif dengan berbagai OPD. Provinsi DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2011. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Perda ini mengamanatkan
			2. Meningkatkan kuantitas dan kualitaslayanan dan pengelolaanfasilitas kebudayaan			0	0			
			3. Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa dan Kelurahan Budaya	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						
				Isi Tabung pemadam kebakaran 8 buah	buah	8	8			
				Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan (Roda 4: 15 Unit dan Roda 6: 8 Unit)	unit	16	16			
				Kebersihan Gedung Kantor	gedung	3	3			
				Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik air dan Intenet, Sewa Hosting dan Domain	Tahun	1	1			
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	jenis	19	19			
				Langganan Surat Kabar Harian	jenis	2	2			
				Penggandaan	lembar	41000	27000			
				Dukungan 63,38% terhadap administrasi Perkantoran yang	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi UPTD						pelaksanaan pendidikan di DIY harus berorientasi budaya dan budaya menjadi bagian dalam materi belajar mengajar. Amanat Perda ini menuntut Kolaborasi Dinas Pendidikan DIY dan Dinas Kebudayaan DIY. Rekomendasi DPRD DIY agar Dinas Kebudayaan DIY hendaknya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan DIY untuk memasukan materi kebudayaan dalam kurikulum pendidikan sangatlah tepat dan selaras dengan program dan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY bersama sama dengan OPD terkait. Pada tahun 2020 melalui dinas pendidikan dana keistimewaan urusan kebudayaan melaksanakan kegiatan pembinaan muatan
				Alat Tulis Kantor	jenis	49	49			
				Alat Listrik dan Elektronik	jenis	28	28			
				Belanja Perangko: 170 Buah, Materai 3000: 450 Buah: materai 6000: 250 buah	jenis	3	2			
				Barang Cetakan	jenis	12	12			
				Pembayaran Retribusi sampah (Dinas kebudayaan dan Museum Pleret)	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Honor Pengelola Keuangan	Tahun	1	1			
				Honor Pengelola Barang	Tahun	1	1			
				Honor Pengelola Kepegawaian	Tahun	1	1			
				Kinerja 17 Orang Keamanan Kantor	Tahun	1	1			
				Honor Perencana Program	Tahun	1	1			
				Dukungan 36,95% Terhadap Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi UPTD	%	100	100			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Makan dan minum rapat (4864 os)	Tahun	1	1			lokal yang di dalamnya salah satunya terkait dengan pendidikan berbasis budaya yang buku/panduannya sudah disusun dan dicetak pada tahun 2015-2016 serta didistribusikan kepada sekolah-sekolah di DIY dan untuk tahun 2020 dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan berbasis budaya. Dinas Kebudayaan DIY pada tahun 2020 melakukan penyusunan buku saku tata nilai serta pelatihan tata nilai untuk agen agen tata nilai yang akan melakukan sosialisasi tata nilai budaya DIY kepada masyarakat. Kegiatan Kebudayaan yang menyasar pendidikan disabilitas dilakukan dengan Kegiatan Moekti. Moekti adalah singkatan dari mobil keliling terapi seni. Program ini diinisiasi
				Dukungan 36,95% Terhadap Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi UPTD	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Dukungan 0,57% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi UPTD	%	100	100			
				Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	gedung	3	3			
				Pemeliharaan Air Limbah/Kotor	unit	14	14			
				Pemeliharaan air minum/bersih	unit	9	9			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Kendaraan Dinas Operasional terpelihara (Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 6, Kendaraan Roda 2)	buah	16	16			
				Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Kendaraan Dinas/Operasional) terpenuhi	%	100	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Peralatan Kantor	jenis	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Gamelan	unit	1	1			oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan Moekti dimaksudkan untuk memenuhi hak anak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mengoptimalkan seluruh kemampuan melalui media seni, khususnya seni rupa. Disabilitas yang di sasar adalah siswa yang sekolah di berbagai SLB di DIY dan guru guru SLB di DIY. Moekti telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga sekarang dan akan di tingkatkan lagi secara kuantitas dan kualitas pada tahun tahun selanjutnya. No Tahun Sasaran SLB Siswa 1 2018 2 40 2 2019 2 40 3 2020 4 80 Penerbitan Majalah Budaya yang menyajikan laku/aktivitas budaya di DIY sebagai pengayaan pendidikan
				Instalasi Telepon	jenis	3	3			
				Jaringan Komputer	titik	7	7			
				Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor) Terpenuhi	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Yang Capaian Kinerjanya Sesuai Dokumen Perencanaan	Nilai LKJIP A	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	%	100	100			
				Tersusunnya Laporan Keuangan	%	100	100			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Tahun	1	1			
				Terlaksananya Penyusunan RKA-DPA, Renstra,Sistem Informasi, Statistik Budaya	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						budaya di Sekolah dilaksanakan dengan menerbitkan Majalah Matabudaya yang setiap tahun terbit 4 edisi yang di distribusikan sekitar 500 eksemplar pada setiap edisinya ke 500 sekolah di DIY. Penerbitan Matabudaya sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Dinas Kebudayaan DIY sejak tahun 2012 sampai sekarang telah melaksanakan Workshop Film Pelajar dengan peserta siswa SLTA se DIY dan hasilnya menjadi bagian dari Festival Film Pelajar. Tidak hanya di dinas pendidikan, Dinas pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk telah menyusun dan mencetak buku terkait dengan pengasuhan anak berbasis budaya
				Capaian Kinerja Pelaksanaan Kgiatan Sesuai dengan Alokasi Anggaran Kas 100%	Realisasi penggu -naan	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										DIY dan pada tahun 2020 ini melaksanakan kegiatan pengasuhan berbasis budaya di 5 desa budaya di DIY.
2	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	DINAS KEBUDAYAAN	1. Menumbuh kembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda.	**PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN**				1. Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan Kebudayaan secara Offline dikarenakan pandemi	1. Perubahan Konsep Penyelenggaraan Acara secara Daring	a. Urusan Kebudayaan Dimulai pada tahun 2013 sampai dengan 2020 pemerintah pusat telah menyalurkan dana keistimewaan kepada DIY. Dana keistimewaan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada DIY untuk membiayai kewenangan terkait dengan urusan keistimewaan yang salah satunya adalah kebudayaan. Urusan Kebudayan dimaknai dalam arti luas dan bisa di kerjakan secara koloboratif dengan berbagai OPD. Provinsi DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2011.
			2. Meningkatkan kuantitas dan kualitaslayanan dan pengelolaanfasilitas kebudayaan	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	Tema	12	12			
			3. Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa dan Kelurahan Budaya	Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	Karya	9	9			
				Rasio kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	Persen	0.6	0.76			
				Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan						
				Kajian Sejarah Lokal DIY	Doku -men	6	6			
				Lawatan sejarah	Even	1	1			
				Peringatan Peristiwa Bersejarah	Even	3	3			
				Roadshow Kesejarahan	Kali	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				.Internalisasi Sejarah Kepahlawanan	Even	2	2			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Perda ini mengamanatkan pelaksanaan pendidikan di DIY harus berorientasi budaya dan budaya menjadi bagian dalam materi belajar mengajar. Amanat Perda ini menuntut Kolaborasi Dinas Pendidikan DIY dan Dinas Kebudayaan DIY. Rekomendasi DPRD DIY agar Dinas Kebudayaan DIY hendaknya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan DIY untuk memasukan materi kebudayaan dalam kurikulum pendidikan sangatlah tepat dan selaras dengan program dan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY bersama sama dengan OPD terkait. Pada tahun 2020 melalui
				Peningkatan Minat Kesejarahan	Doku-men	1	1			
				Ekspose sejarah	Even	5	5			
				Cerdas Cermat Sejarah	Even	1	1			
				Pembinaan Komunitas	Komunitas	3	3			
				Dukungan 14,80% Terhadap Capaian Jumlah Sumber Sejarah Yang DirevitalisasiDengan Target Capaian 11 Sumber Sejarah	Persen	100	100			
				Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra						
				Kompetisi Bahasa dan Sastra	Jenis Lomba	9	9			
				Pergelaran karya Bahasa dan Sastra	Kali	47	47			
				Promosi dan Publikasi Bahasa dan Sastra	Edisi	6	6			
				Dukungan 31,54% Terhadap Capaian Jumlah Karya Bahasa dan Sastra YangDilestarikan Dengan Target Capaian 6 Karya	Persen	100	100			
				Pra Kongres Aksara Jawa	Even	2	2			
				Buku Sastra Budaya	Eksem-plar	900	900			
				Festival Ketoprak	Even	1	1			
				Sandiwaro Radio Bahasa Jawa	Kali rekaman	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
					dan Si					dinas pendidikan dana keistimewaan urusan kebudayaan melaksanakan kegiatan pembinaan muatan lokal yang di dalamnya salah satunya terkait dengan pendidikan berbasis budaya yang buku/panduannya sudah disusun dan dicetak pada tahun 2015-2016 serta didistribusikan kepada sekolah-sekolah di DIY dan untuk tahun 2020 dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan berbasis budaya. Dinas Kebudayaan DIY pada tahun 2020 melakukan penyusunan buku saku tata nilai serta pelatihan tata nilai untuk agen agen tata nilai yang akan melakukan sosialisasi tata nilai budaya DIY kepada masyarakat. Kegiatan Kebudayaan yang menyasar pendidikan disabilitas dilakukan dengan
				kajian bahasa sastra	Doku-men kajian	1	1			
				Perayaan Digitalisasi Aksara Jawa	Even	1	1			
				Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman						
				Registrasi Koleksi Museum	Muse-um	1	1			
				Pengadaan Tanah Musuem Pleret Tahap II	Bidang	3	3			
				Pendampingan Edukator Museum	Muse-um	18	18			
				Pameran Museum	Even`	1	1			
				Wajib Kunjung Museum	peser	3780	3780			
				Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman	Even	1	1			
				Kajian Permuseuman	Doku-men	9	9			
				Pembelian Lahan Museum Sejarah Purbakala Pleret	Meter Persegi	1904	1904			
				Jumpa Sahabat Museum	Even	1	1			
				Rapat Kerja Permuseuman	Kali	3	2			
				Pemilihan Duta Museum	Duta Museum	34	34			
				Safari Permuseuman	Kali	41	41			
				Pelatihan SDM Permuseuman	Even	1	1			
				Pengadaan Tata Pamer Museum	Unit	1	1			
				Akuisisi Lahan Batikan	Kawasan (9 Sertifik	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Museum Pleret	Gedung	1	1			Kegiatan Moekti. Moekti adalah singkatan dari mobil keliling terapi seni. Program ini diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan Moekti dimaksudkan untuk memenuhi hak anak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mengoptimalkan seluruh kemampuan melalui media seni, khususnya seni rupa. Disabilitas yang di sasar adalah siswa yang sekolah di berbagai SLB di DIY dan guru guru SLB di DIY. Moekti telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga sekarang dan akan di tingkatkan lagi secara kuantitas dan kualitas pada tahun tahun selanjutnya. No Tahun Sasaran SLB Siswa 1 2018 2 40 2 2019 2 40 3 2020 4 80 Penerbitan
				Dukungan 15,78% Terhadap Rasio Kunjungan Museum Dibanding Kunjungan keODTW Lain Dengan Target Capaian 0,55 Rasio	Persen	100	100			
				PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA						
				persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	13.2	29.78			
				Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya						
				persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan. 13,2 % target tahun 2020. dari 11,22 % ditahun 2019	Persen	100	100			
				Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB	Cagar Budaya	50	50			
				Penetapan WBCB (TACB DIY)	draf usulan pene -tapan	10	32			
				Penyusunan Regulasi WBCB	Draft	1	1			
				Rekomendasi Pelestarian WBCB (DP2WB DIY)	Rekomen -dasi	60	60			
				Pelatihan WBCB	Kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kajian WBCB	Doku-men	1	1			Majalah Budaya yang menyajikan laku/aktivitas budaya di DIY sebagai pengayaan pendidikan budaya di Sekolah dilaksanakan dengan menerbitkan Majalah Matabudaya yang setiap tahun terbit 4 edisi yang di distribusikan sekitar 500 eksemplar pada setiap edisinya ke 500 sekolah di DIY. Penerbitan Matabudaya sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Dinas Kebudayaan DIY sejak tahun 2012 sampai sekarang telah melaksanakan Workshop Film Pelajar dengan peserta siswa SLTA se DIY dan hasilnya menjadi bagian dari Festival Film Pelajar. Tidak hanya di dinas pendidikan, Dinas pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan
				Perencanaan Teknis WBCB	Doku-men	4	4			
				Badan/ Lembaga Pengelola	Pokjanis	2	2			
				Sosialisasi Sadar Lestar	Kegi-atan	1	1			
				Penerbitan Buletin Mayangkara	Eksem-plar	1000	1000			
				Penyusunan Draft Pelestraian Bangunan Tradisional	Naskah	1	1			
				konten aplikasi Jogja Smart Culture	konten	1	1			
				apraisal Bangunan PA VII	Doku-men	1	1			
				Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya						
				Rehabilitasi WBCB	Bangu-nan	7	7			
				Perawatan WBCB	Bangu-nan	14	14			
				Penyusunan DED Notoprajan	Doku-men	1	1			
				Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB	Situs dan Kawasan	5	5			
				-	Persen	100	100			
				Pengawasan WBCB	Doku-men	1	1			
				Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia						
				Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	Even	1	1			
				Kajian Yogyakarta Warisan Dunia	Doku-men	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 4,52% Terhadap Capaian Persentase Cagar Budaya dan Warisan BudayaYang Dilestarikan Dengan Target 12,21%	Persen	100	100			pengendalian penduduk telah menyusun dan mencetak buku terkait dengan pengasuhan anak berbasis budaya DIY dan pada tahun 2020 ini melaksanakan kegiatan pengasuhan berbasis budaya di 5 desa budaya di DIY.
				Perencanaan Yogyakarta Dunia	Doku-men	1	1			
				Apraisal Lahan dan Bangunan Mutiara I dan II	Doku-men	1	1			
				Pengadaan Lahan dan Bangunan Mutiara I dan II	Bangu-nan (5 Serti fik	2	2			
				PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN						
				Jumlah layanan yang terpenuhi standard kriteria standar:	Jenis	20	20			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya						
				Sarpras perkantoran	Jenis	45	45			
				Pemeliharaan	Jenis Pemeli-haraan	3	3			
				Lancarnya aktivitas perkantoran di Dinas Kebudayaan dan KPA	Persen	100	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya						
				Gamelan Kuningan	Set	5	5			
				Gamelan Besi	Set	8	8			
				Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Gamelan Perunggu	Gamelan	1	1			
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEBUDAYAAN						
				Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Persen	99.08	99.3			
				Realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya	Kerja sama	25	25			
				Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan						
				Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Doku -men	1	1			
				Dukungan 16,67% Terhadap Capaian Realisasi Pelaksanaan Program KegiatanUrusan Kebudayaan Dengan Target 99,08%	Persen	100	100			
				Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan						
				Aplikasi pengelolaan keuangan dan Monev	Aplikasi	1	1			
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan TW I, II, II dan IV	Dokumen	4	4			
				Penyusunan kajian infografis budaya	Doku -men	1	1			
				Dukungan 10,00% Terhadap Capaian Realisasi Pelaksanaan	Persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Program KegiatanUrusan Kebudayaan Dengan Target 99,08%						
				Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya						
				MSO	Even	1	1			
				Penguatan Organisasi	Kali	20	20			
				Dukungan 100 %Terhadap realisasi 30 kerjasama dengan mitra budaya	Persen	100	100			
				Sumonar	Even	1	1			
				Pencak silat	Even	1	1			
				Jemparingan	Even	1	1			
				Pembinaan Batik	Even	1	1			
				-	-	0	0			
				PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						
				Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	Persen	1.93	1.98			
				Jumlah Desa Mandiri Budaya	Desa Budaya	10	10			
				Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi	Persen	28.49	29			
				Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya						
				pendampingan desa budaya	Orang	112	112			
				2. Peningkatan SDM 3. Sarpras Desa Budaya	Persen	100	100			
				Kepyakan Desa Mandiri Budaya	Even	1	1			
				Sarpras Desa Budaya	Set	27	27			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Maestro Masuk Desa	Maestro untuk 56 des	3	3			
				gelar Potensi	Even	6	6			
				Kajian Balai Budaya	Dokumen kajian	1	1			
				Buletin Desa Budaya	eDISI	1	1			
				Lomba Karya Tulis Budaya	Even	1	1			
				Website Desa Budaya	Website Desa Budaya	1	1			
				kajian potensi Desa Budaya	Dokumen	1	1			
				Pembinaan Lembaga Penggiat Seni						
				Lomba Lukis DIY Kyoto	Even	1	1			
				Workshop dan Lomba Komik	Even	1	1			
				Moekti	Even	1	1			
				ARTJOG	Even	1	1			
				Matra Award	Even	1	1			
				Pesta Boneka	Even	1	1			
				Film Tari	Materi	5	5			
				Pembuatan Film	Pemenang	10	10			
				Pemutaran Film di Desa/Kelurahan	Kali	5	1			
				Dukungan 5,88% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni YangSudah Direvitalisasi Dengan Target 28, 49 %	Persen	100	97			
				Bioskop Jum'at	Kali	2	2			
				Pemutaran Film (Muhibah Budaya)	Even	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya						
				Dukungan 3,50% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni YangSudah Direvitalisasi Dengan Target 28.49 5%	Persen	100	98			
				koordinasi ke licoln center amerika dalam rangka misi kebudayaan	Kali	1	1			
				Peringatan 35 Tahun DIY -Kyoto	Even	1	0			
				Penghargaan Seniman dan Budayawan						
				Penghargaan untuk 6 kategori yakni Pelestari dan atau Pelaku Seni, Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi, Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Budayawan (Pemikir, Pemerhati,Pengamat, Analis Sosial Budaya), Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya), Maestro Budaya,,	Orang	25	24			
				Workshop dan Sarasehan Paska Pemberian Penghargaan Seniman dan Budayawan	Kali	6	6			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penghargaan Kategori Lainnya (Anak dan Remaja)	Orang	10	10			
				Dukungan 1,71% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni YangSudah Direvitalisasi Dengan Target 28,94 %	Persen	100	98			
				Festival Kebudayaan Yogyakarta						
				Kompetisi	Even	1	1			
				Pameran	Even	1	1			
				Pergelaran Seni	Even	1	1			
				Talkshow	Even	1	1			
				PKN	Even	1	1			
				Dukungan 5,55% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni YangSudah Direvitalisasi Dengan Target 28, 49 %	Persen	100	100			
				Gelar Budaya Jogja						
				Festival Kethoprak.	Even	1	1			
				Festival Sendratari.	Even	1	1			
				Festival Teater	Even	1	1			
				Jogja Gamelan Festival.	Even	1	0			
				Pekan Budaya Diffabel.	Even	1	1			
				Tutorial Langen	Mater`	4	4			
				Dukungan 5,55% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni YangSudah Direvitalisasi Dengan Target 28, 49 %	Persen	100	90			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Tutorial Tari Klasik Gaya Yogyakarta	Materi	50	50			
				Pembuatan Buku Sendratari	Even	1	1			
				Publikasi Seni dan Budaya Daerah						
				Sanja Desa BUdaya	Paket	1	0			
				Ketoprak Sayembara	Even	22	22			
				Citra Jogja	Even	12	12			
				Jogja Semesta	Even	9	8			
				Kuncung Bawuk	Even	20	20			
				Angkringan	Even	4	4			
				Muhibah Budaya	Kali	1	1			
				Majalah Budaya	Edisi	4	4			
				Ketoprak Radio	Paket	4	4			
				Suplemen Budaya	Paket	3	3			
				Launching Agenda Budaya	Paket	1	1			
				Dialog Budaya	Even	4	3			
				Pasar Budaya	Even	11	11			
				Live streaming	Paket	40	39			
				Dokumentasi Agenda Budaya	Paket (tapping)	5	5			
				Pembuatan dan Lomba Vlog Budaya	Paket dan 1 even	40	40			
				Workshop Pengelolaan Medsos	Even	1	1			
				Iklan Layanan Masyarakat	Paket	12	12			
				Talkshow Daring	Kali	10	10			
				Upgrade Sistem informasi	Paket	1	1			
				Ketoprak Tobong	Paket	4	4			
				Ketoprak Lintas Generasi	Paket	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pembuatan Video Animasi Tata Nilai	Paket	2	2			
				Dukungan 2,99% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni YangSudah Direvitalisasi Dengan Target 28.49 %	Persen	100	98			
				Selendang Sutera						
				Dukungan 1,71% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni YangSudah Direvitalisasi Dengan Target 28,49 %	Persen	100	100			
				Gelar Budaya Etnis daring	Kali	36	36			
				Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi						
				Puncak Ritual Wayang Kulit Kepatihan	Even	1	1			
				Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Kali	3	3			
				Festival Upacara Adat	Even	1	1			
				Fasilitasi Puncak Ritual Masyarakat dan Kelompok Penghayat	Kali	10	10			
				Cetak Buku Profil Penghayat Kepercayaan thd Tuhan YME se-DIY	Eksem -plar	300	300			
				Tutorial Tata Busana Pengantin dan Uba Rampe Sesaji Gaya Yogyakarta	Jenis	8	8			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Tutorial Pranatacara Gaya Yogyakarta	Jenis	21	21			
				Daring Tutorial Permainan Tradisional	Jenis	5	5			
				Dukungan 1,60% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni YangSudah Direvitalisasi Dengan Target 28, 49 %	Persen	100	100			
				Cetak Buletin MLKI	Edisi	1	1			
				Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat						
				Pementasan Seni Adiluhung (1 Pepadi DIY 2.. Pepadang 3 .Sukrokasih 4. Wayang Wong.)	Kali	51	51			
				Workshop Pedalangan	Kali	3	3			
				Dukungan 7,61% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni YangSudah Direvitalisasi Dengan Target 28,49 %	Persen	100	100			
				Seleksi Dalang Se- DIY	Even	1	1			
				Penerbitan 1 Judul Buku Pedalangan	Eksem -plar	300	300			
				Pementasan Wayang Golek dan Beber	Kali	2	2			
				Radio tonil pentas wayang kulit	Kali	5	5			
				Kajian Pengembangan Omah Wayang	Doku -men	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pelatihan Tata Nilai Budaya DIY	Paket	1	1			
				pembuatan konten Tata nilai	Video	1	1			
				Pencatatan, inventarisasi, penetapan WBTB	Doku-men	1	1			
				Perayaan WBTB di Jakarta	Even`	1	1			
				Cetak buku ragam WBTB	Judul	3	3			
				Raker Dewan Kebudayaan	Kali	8	8			
				Sarasehan Keris	Kali	2	2			
				JIHF	Even	1	1			
				Penyelengaraan Even Penggiat Seni						
				Pentas Seni Budaya	Kelom-pok	460	264			
				Pentas Seni Budaya	Kelom-pok	460	264			
				Dukungan 7,61% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni YangSudah Direvitalisasi Dengan Target 28,49 %	Persen	100	58			
				Dukungan 7,61% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni YangSudah Direvitalisasi Dengan Target 28,49 %	Persen	100	58			
				Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi						
				Dukungan 7,61% Terhadap Capaian	Persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni YangSudah Direvitalisasi Dengan Target 28,49 %						
				Dukungan Kegiatan Lembaga Pelestari Adat dan Tradisi	Kegiatan	1	1			

17) Urusan Perpustakaan

a) Kondisi Umum

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Peran perpustakaan dalam Sistem Pendidikan Nasional yaitu mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15-44 tahun melalui penyediaan sumber informasi dan pengetahuan agar warga masyarakat memiliki budaya gemar membaca.

Pada urusan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY memiliki sasaran strategis yang tercantum di dalam RPJMD 2017-2022, yakni meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan. Kinerja sasaran meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan diukur dengan indikator persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan. Pada tahun 2020 target indikator sasaran tersebut ditetapkan sebesar 25%.

Realisasi hingga tahun 2020, terdapat 833.049 pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan. Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif (usia 5-65 tahun) di DIY pada tahun 2020 menurut data proyeksi BPS adalah 3.255.200 jiwa. Sehingga persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 25,83% atau terealisasi 103,32% dari target 25%. Terhadap target akhir RPJMD 2017-2022 yang ditetapkan sebesar 27%, capaian tersebut telah mencapai 95,67%. Rincian capaian Urusan Perpustakaan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.113. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	%	24,83	25	25,83	103,32	27	95,67

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, 2021

Data realisasi jumlah pemustaka berasal dari statistik pengunjung yang direkap selama tahun 2020. Pengunjung perpustakaan ini berasal dari kunjungan fisik dan virtual. Kunjungan fisik berasal dari:

(1) Layanan Perpustakaan Menetap

- Kunjungan di unit Grhatama Pustaka (GTP): memberikan berbagai layanan perpustakaan seperti Layanan Koleksi Buku Anak, Layanan Koleksi Buku Braile, Layanan Koleksi Umum, Layanan Referensi Umum, Layanan Koleksi Digital, Layanan Koleksi Buku Langka, dan Layanan Koleksi Deposit
- Kunjungan di unit Jogja Library Center (JLC): disediakan Jenis layanan Yogyasiana, Majalah dan Surat Kabar, Kyoto Corner, Internet, Audio Visual, dan *Center of Excellent* (CoE) Budaya Jawa.
- Kunjungan di unit Rumah Belajar Modern (RBM): selain menyediakan buku juga menyediakan kegiatan interaktif yaitu perpustakaan anak, mendongeng, wisata pustaka, internet, permainan edukatif, dan peningkatan kreatifitas.

(2) Layanan Perpustakaan Ekstensi

- Kunjungan dari Layanan Pojok Baca: diselenggarakan di sepuluh titik lokasi yang sering dikunjungi masyarakat, yaitu RSUP dr. Sardjito, RS. YAP, RS. Bethesda, RS. PKU Muhammadiyah Gamping, RSUD Kota Yogyakarta, SAMSAT Yogyakarta, SAMSAT Kulon Progo, Pengadilan Negeri Yogyakarta, BPJS Kesehatan, dan Kantor Pajak Pratama.
- Layanan Perpustakaan Keliling pada area publik seperti pasar, alun-alun, puskesmas, sekolah, kantor kecamatan, dan pantai khususnya hari Minggu.
- Layanan Paket Buku dan *Delivery Order* (Pemustaka Istimewa)

Sedangkan data Kunjungan virtual berasal dari website DPAD DIY, website Balai Layanan Perpustakaan, website *Jogja Library for All*, *Website Center of Excellence* (COE), aplikasi iJogja, dan jangkauan media sosial.



Gambar 3.46. Pelaksanaan Program *drive thru* Layanan Perpustakaan

Dengan adanya Pandemi Covid-19, layanan perpustakaan harus menutup layanan publik selama tiga bulan pada awal terjadinya pandemi. Setelah layanan dibuka, diberlakukan protokol kesehatan seperti pembatasan pengunjung dan menjaga jarak antar pengunjung. Inovasi yang dilakukan DPAD DIY pada saat pandemi adalah dengan menerapkan program *drive thru* Layanan Perpustakaan, dimana pemustaka tetap dapat mengembalikan buku maupun mengurus surat bebas perpustakaan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.



Gambar 3.47. Tangkapan layar website aplikasi iJogja

Adanya penutupan layanan sementara dan penerapan protokol kesahatan dengan membatasi jumlah pengunjung tentunya membuat kunjungan fisik ke perpustakaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 tercatat hanya terdapat

sebesar 100.363 pemustaka selama satu tahun. Hal ini cukup jauh jika dibandingkan dengan kunjungan pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 547.376 pemustaka. Penurunan kunjungan fisik ini, di atasi dengan melakukan inovasi dengan mengoptimalkan layanan virtual DPAD DIY. Salah satunya melalui iJogja. Pemustaka bisa mengunduh langsung aplikasi ini melalui ponsel masing-masing. Aplikasi ini dapat diunduh di google play store pada perangkat ponsel maupun melalui aplikasi yang bisa diunduh di website iJogja.id jika ingin di install ke *Personal Computer* (PC). Dengan aplikasi ini masyarakat bisa menelusuri dan menemukan bacaan yang diinginkan, selain itu bisa juga menjalin pertemanan dan saling berbagi buku yang direkomendasikan. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dan mengakses koleksi perpustakaan.

Selama pandemi, jumlah kunjungan virtual ke perpustakaan cukup meningkat. Tercatat selama tahun 2020, terdapat 716.730 pemustaka yang mengakses layanan virtual perpustakaan seperti iJogja, website, hingga medsos. Hal ini meningkat cukup pesat dari tahun 2019 yang hanya terdapat 193.306 pemustaka yang mengakses layanan virtual ini. Sehingga faktor pendukung capaian kinerja tahun 2020 salah satunya adalah pengoptimalan layanan virtual perpustakaan sehingga dapat mengatasi keterbatasan pengunjung fisik yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp10.716.869.189,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam empat Program pendukung dan tiga Program Teknis dengan 20 Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp10.302.476.587,00 (96,13%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				- Adanya Pandemi Corona Virus 19 layanan perpustakaan di GTP harus menutup layanan publik selama tiga bulan pada awal terjadinya pandemi (April-Juni). Selain itu Layanan JLC Malioboro dan RBM tidak beroperasi sejak April 2020. - Belum optimalnya fasilitas penunjang proses pembuatan anggota baru. Selama ini pembuatan anggota baru masih perlu berkunjung secara fisik ke Gedung DPAD DIY.	- Dengan mengedepankan inovasi seperti menggunakan layanan berbasis digital, masyarakat diharapkan tetap dapat mengakses informasi bidang perpustakaan. - Hal ini di atasi dengan pembuatan kartu anggota secara digital, yang diharapkan mampu mengurangi kendala yang terjadi karena keharusan datang ke Gedung perpustakaan. Pada akhirnya inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah anggota baru, yang menyasar tidak hanya warga masyarakat yang berlokasi dekat dengan Gedung perpustakaan, melainkan juga warga yang terdapat di kabupaten/kota.	
				Peningkatan kualitas pelayanan internal	persen	100	100			
			2. Melakukan Fasilitas Penatausahaan, pemeliharaan Dokumen dan Pengawasan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet	bulan	4	4			
				Barang cetakan	jenis	7	7			
				Kebersihan gedung kantor	gedung	5	5			
				Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4	unit	16	16			
				Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2	unit	7	7			
				Penggandaan	lembar	140000	14000			
				Surat masuk	Surat	1850	1850			
				Langganan surat kabar dan majalah	jenis	3	3			
				Dukungan 89,22% terhadap Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100			
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	1	1			
				Alat tulis kantor	jenis	48	48			
				Tertatanya arsip dinamis dan tersusutnya arsip yang sudah masuk masa retensi	daftar	1	1			
				Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6	unit	1	1			
				Keamanan Gedung Kantor	bulan	12	12			
				Peralatan Rumah Tangga	jenis	6	6			
				Surat keluar	Surat	6500	6500			
				Pengiriman dokumen	dokumen	50	50			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Bukti pembayaran retribusi sampah	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Perencanaan program sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tahun	1	1			
				Pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tahun	1	1			
				Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tahun	1	1			
				Dukungan 2% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perka	persen	100	100			
				Pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tahun	1	1			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Dukungan 10,78% terhadap Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100			
				Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	bulan	6	6			
				Konsultasi dan koordinasi luar Jawa terlaksana dengan baik	bulan	3	3			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur terpenuhi	persen	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Dukungan 2,28% terhadap Persentase pemenuhan	persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						
				Pengadaan peralatan sesuai RKBMD	jenis	3	3			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Dukungan 27,39% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100			
				Pemeliharaan Gedung kantor sesuai RKPBMD	lokasi	2	2			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Dukungan 38,24% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100			
				Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKPBMD terpelihara	unit	17	17			
				Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKPBMD terpelihara	unit	1	1			
				Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKPBMD terpelihara	unit	7	7			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMD	jenis	8	8			
				Pemeliharaan berkala meubelair sesuai RKPBMD	jenis	1	1			
				Dukungan 32,08% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100			
				Relokasi ke gedung depo arsip	persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKPBMD	jenis	8	8			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
				Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertambah/meningkat	persen	100	100			
				Pengembangan I S O						
				Surveilance ISO 9001:2015	kali	0	0			
				Dukungan 44 % terhadap Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	100	100			
				Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu						
				Dukungan 56% terhadap Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	100	100			
				Penilaian Angka Kredit Pustakawan	kali	2	2			
				Penilaian Angka Kredit Arsiparis	kali	2	2			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Kualitas penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program	persen	100	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai	laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)						
				Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)	laporan	1	1			
				Dukungan 6% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Laporan Fungsional	laporan	12	12			
				Laporan Semesteran/Prognosis	laporan	1	1			
				Laporan Keuangan Tahunan	laporan	1	1			
				Dukungan 6% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Penyusunan Dokumen PK, RKT/Renja, RKA,dan DPA	dokumen	1	1			
				Dukungan 76% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100			
				Forum OPD/Raker Penyusunan Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan	kali	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Dukungan 12% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Realisasi Penggunaan data sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan selama 1 tahun	kegiatan	22	22			
2	PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						
			2. Melakukan Fasilitas Penatausahaan, pemeliharaan Dokumen dan Pengawasan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah perpustakaan yang terstandard	Perpus -takaan	49	49			
				Pembinaan Perpustakaan						
				Dukungan 26% terhadap jumlah perpustakaan terstandard	persen	100	100			
				Workshop NPP	kali	2	2			
				Bimtek perpustakaan	angkatan	4	4			
				workshop Akreditasi perpustakaan	kali	2	2			
				Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca						
				Lomba minat baca	kali	0	0			
				Forum Perpustakaan	kali	0	0			
				Workshop karya tulis	kali	0	0			
				Dukungan 74% terhadap jumlah perpustakaan terstandard	persen	100	100			
				Bedah buku	kali	29	29			
				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI						
				Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	eksemplar	10174	3363			
				Pelestarian Bahan Pustaka						
				Alih Bahasa dari Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia	lembar	0	0			
				perbaikan buku rusak	eks	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				alih media	lembar	10000	10658			
				Termit Control	m2	0	0			
				Alih Bahasa dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia	lembar	0	0			
				Dukungan 34,07% terhadap Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	persen	100	100			
				Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi						
				Penyusunan bibliografi daerah	terbitan	0	0			
				Penyusunan katalog induk daerah	terbitan	0	0			
				Penyusunan accesion list	terbitan	0	0			
				Pengadaan e-book	judul	0	0			
				Dukungan 65.93% terhadap Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	persen	100	33.63			
				Penelusuran dan Abstraksi Budaya Timu	terbitan	0	0			
				Pengadaan Bahan pustaka	judul	0	0			
				Pengolahan Bahan Pustaka	eksemplar	3000	3363			
				Pengolahan E-Deposit	paket	0	0			
				Bahan pustaka KCKR	judul	3000	3025			
				pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman	penerbit	0	0			
				DAK Pengembangan Sarana TIK Perpustakaan						
				Dukungan 16% terhadap penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	persen	100	100			
				Pengadaan Server	unit	0	0			
				PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN						
				Jumlah anggota baru perpustakaan	orang	6000	4458			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Jumlah perpustakaan anggota Jogja Library For All (JLA) yang menindak-lanjuti kerjasama	Perpus -takaan	5	5			
				Layanan Perpustakaan Menetap						
				Telaah Pustaka Budaya Jawa	kali	1	1			
				Peningkatan Kreativitas, Library Trip, Wisata Pustaka, Bimbingan Pemustaka	kali	10	10			
				Dukungan 80.83% terhadap peningkatan Jumlah pengunjung atau pemustaka sebesar 6000 orang	persen	100	100			
				Layanan Menetap	lokasi	3	3			
				Layanan Perpustakaan Ekstensi						
				Layanan Delivery Order	transaksi	65	100			
				Layanan Keliling	lokasi	18	18			
				Layanan Pojok Baca	lokasi	10	10			
				Layanan Paket Buku	lokasi	18	18			
				Layanan Mendongeng	kali	3	3			
				Layanan JLA	Perpus -takaan	0	0			
				Dukungan 19.17% terhadap peningkatan jumlah pengunjung dan penambahan 1 perpustakaan anggota JLA yang menindaklanjuti kerjasama	persen	100	100			

18) Urusan Kearsipan

a) Kondisi Umum

Dengan diberlakukannya UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan, bidang kearsipan diharapkan menjadi lebih baik itu bagi pelaku kearsipan maupun masyarakat awam. Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai permasalahan yang dialami bangsa ini. Dalam arsip, informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya, dan harkat kebangsaan dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai sebuah aset bangsa, arsip harus dilestarikan agar generasi bangsa dari tahun ke tahun dapat memanfaatkannya sebagai sumber informasi jati diri bangsa. Arsip harus diatur, ditata atau disusun secara sistematis dan logis agar dapat dilestarikan dan mudah ditelusuri. Pengaturan/penataan/ penyusunan arsip tentu harus berpedoman pada aturan atau kaidah kearsipan agar arsip yang disimpan dapat terjaga utuh baik fisik maupun informasinya.

Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY berupaya melaksanakan sasaran strategis yang tercantum di dalam RPJMD 2017-2022 urusan Kearsipan yakni meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi. Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi diukur dengan indikator yaitu Peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

Realisasi hingga akhir tahun 2020, terdapat 6.890 berkas arsip yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Jumlah total arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2020 tersebut berasal dari pemanfaatan arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, arsip kraton, arsip puro pakualaman, arsip digital (media akses, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS). Rincian capaian Urusan Kearsipan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.114. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	Berkas	6.605	6.850	6.890	100,58	7.500	91,80

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, 2021

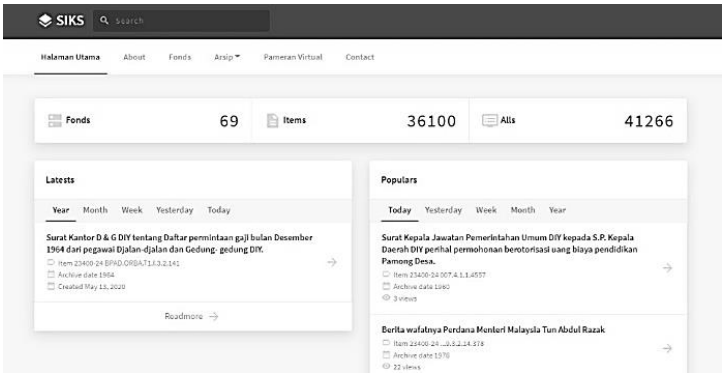
Berdasarkan tabel di atas, jumlah arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 100,58%. Tercatat sejumlah 6.890 berkas arsip telah dimanfaatkan. Angka tersebut lebih besar dari target yang ditetapkan yakni 6.850 berkas. Realisasi ini telah berkontribusi sebesar 91,8% terhadap target akhir RPJMD 2017-2022.



Gambar 3.48. Gubernur Membuka Pameran Sewindu Keistimewaan DIY

Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2020 ini adalah sosialisasi yang terus digalakkan melalui kegiatan promosi dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan melalui pameran arsip. Pada tahun 2020 sejumlah pameran sudah dilaksanakan oleh DPAD DIY, diantaranya adalah pameran Sewindu Keistimewaan DIY, satu dasawarsa erupsi Merapi dan pameran alat transportasi bersejarah. Melalui pameran-pameran tersebut, DPAD DIY berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arsip, dan tentu juga pada akhirnya dapat mendukung sasaran meningkatkan jumlah arsip yang dimanfaatkan masyarakat.

Selain menggelar pameran, DPAD DIY juga mencoba mengoptimalkan layanan arsip melalui sarana digital, salah satunya yakni Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS). Jenis layanan ini berupaya dioptimalkan untuk menanggulangi efek dari pandemi Covid-19 terhadap layanan kearsipan di DPAD DIY. Guna menekan penyebaran Covid-19, pelayanan arsip telah menerapkan protokol kesehatan sehingga para pengguna arsip yang tidak bisa secara langsung mengunjungi kantor DPAD DIY, tetap bias mengakses layanan arsip melalui SIKS yang dapat diakses melalui http://dpad.jogjaprov.go.id/siks. Melalui layanan SIKS, pengguna masih bisa mengakses arsip melalui internet tanpa perlu datang langsung ke DPAD DIY. Pengguna bisa mencari arsip berdasarkan tema melalui guide arsip tematik. Terdapat setidaknya 41.266 arsip yang bisa diakses pengguna melalui SIKS tersebut.



Gambar 3.49. Tangkapan Layar Web SIKS DPAD DIY

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp567.829.900,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam dua Program dan empat Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp560.086.400,00 (98,64%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN**				- Pandemi Corona Virus 19 berdampak pada layanan arsip yang harus menutup layanannya selama tiga bulan pertama pandemi melanda. - Masyarakat maupun OPD, LKD dan Sekolah Belum semua mempunyai kesadaran dalam pengelolaan Arsip - Proses pengawasan kearsipan sebagai salah satu pendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan juga penguatan tata laksana pengukuran kinerja kearsipan masih memiliki banyak kendala terutama di saat pandemi dimana masih diperlukan kunjungan dan assessment ke masing-masing OPD	- Dengan inovasi seperti menggunakan layanan berbasis digital diharapkan masyarakat tetap dapat mengakses informasi dari kearsipan. - sosialisasi melalui pameran menjadi salah satu ujung tombak yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat perihal pentingnya arsip bagi kehidupan - Membuat aplikasi yang mampu mempermudah tatalaksanana penginputan data dan pelaporan pengawasan internal kearsipan dalam bentuk aplikasi yang berisi Formulir C/Formulir D/Formulir E, Wawancara dan Verfikasi Lapangan	
				Peningkatan jumlah OPD/UPTD/Sekolah yang melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan standard	institusi	90	91			
			2. Melakukan Fasilitas Penatausahaan, pemeliharaan Dokumen dan Pengawasan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	**Pengelolaan Arsip**						
				Dukungan 74.81% terhadap jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	persen	100	100			
				Pengolahan Arsip Statis	berkas	0	0			
				Jumlah Arsip yang dinilai dan disusutkan	berkas	7200	7200			
				Pembinaan Kearsipan						
				Pembinaan kearsipan OPD-UPTD	instansi	86	86			
				Peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar, peningkatan kualitas petugas arsip	persen	100	100			
				PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP						
				Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	berkas	8000	8377			
				Pelestarian Arsip						
				Terdokumentasinya arsip tekstual (tahap scanning)	data	25000	25000			
				Dukungan 35.29% terhadap Jumlah arsip	persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				yang sudah diolah dan dilestarikan						
				Terdokumentasinya arsip foto (tahap *scanning*)	foto	500	500			
				Layanan Kearsipan						
				Pembuatan Film depo arsip	buah	1	1			
				Layanan arsip statis	orang	249	3013			
				Entri data SIKS dan JIKN	paket	1	1			
				Verifikasi data layanan arsip	kegiatan	1	1			
				Arsip statis dapat dilayankan optimal	persen	100	100			

2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) Kondisi Umum

Visi Gubernur DIY dalam RPJMD 2017-2022 yaitu menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja diimplementasikan melalui urusan kelautan dan perikanan. Produksi perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih didominasi oleh perikanan budidaya dibandingkan perikanan tangkap, untuk itu masih perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang relatif masih tertinggal baik dari segi kewilayahan maupun ekonominya. Sektor Kelautan dan Perikanan dalam masa pandemi Covid-19 untuk bidang perikanan tangkap tidak terdampak pandemi karena nelayan bisa melaut sepanjang tahun dan hasilnya naik dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk sektor budidaya agak terdampak diawal pandemi karena menurunnya permintaan dari Hotel, Restoran dan Katering tetapi seiring perjalanan waktu bisa pulih kembali dengan inovasi sistem pemasaran dan segmen pasar hasil perikanan budidaya.



Gambar 3.50. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2021

Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 14,33 %, sedangkan perikanan tangkap mengalami kenaikan sebesar 2,7%. Penurunan perikanan budidaya tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda diawal tahun 2020 menyebabkan penurunan permintaan dari konsumen yang berimbas pada turunnya produksi perikanan.

Perbandingan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di tahun 2020 adalah 1:14. Hal ini dikarenakan produksi tangkap hanya mengandalkan PPP Sadeng yang mempunyai kapal kapal besar, sedangkan PPI yang lainnya hanya menggunakan kapal jukung untuk armada kapalnya. Harapannya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta bisa segera beroperasi dan juga pembangunan Pelabuhan Perikanan Gesing Gunungkidul dapat segera terwujud sehingga mampu mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap di DIY.

Tabel di bawah menjabarkan indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2020 sesuai RPJMD 2017-2022 dan capaiannya.

Tabel 3.115. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	juta rupiah	301.500	325.357	324.210*	99,65	331.897	97,68
2	Peningkatan status kawasan konservasi	%	20	60	30	50	100	30

*Keterangan: *) Data prediksi sementara tahun 2020*
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2021

Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) pada tahun 2020 menurut prediksi dapat tercapai Rp324.210 juta dimana ini sudah melebihi realisasi tahun 2019 sebesar Rp301.500 juta. Namun demikian belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp325.357 juta. Komponen utama PDRB sub sektor Kelautan dan Perikanan adalah budidaya perikanan karena kontribusinya hampir 93,48%. Produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 93.846 ton melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 89.500 ton, akan tetapi menurun jika dilihat dari tahun 2019 sebesar 109.548 ton. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di awal tahun, hasil budidaya tidak dapat terserap pasar utamanya untuk Hotel, Restoran, dan Katering. Tetapi seiring berjalannya waktu dan adanya inovasi dari pembudidaya dalam memasarkan produknya maka usaha perikanan budidaya dapat berjalan dengan baik. Inovasi yang dilakukan adalah dengan pemasaran secara daring dibantu oleh pemerintah sehingga dapat memutus rantai pemasaran di pengepul, langsung dari kelompok pembudidaya ke konsumen. Selain itu,

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Sleman, dan Gunungkidul mengamanatkan ikan sebagai salah satu menu dalam program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) Tahun 2020.

Selain budidaya, Perikanan tangkap juga menyumbang PDRB sub sektor perikanan walaupun produksinya kecil tetapi nilainya sangat besar karena harganya lebih mahal dari ikan air tawar. Ikan ekonomis tinggi yang ditangkap nelayan DIY antara lain Tuna, Lobster, Layur dan Bawal dipasarkan keluar daerah bahkan ada yang diekspor. Produksi tangkap meningkat dari tahun 2019 sebesar 6.370 ton menjadi 6.545 ton pada tahun 2020.

Indikator Peningkatan status kawasan konservasi pada tahun 2020 sebesar 60% tidak dapat tercapai karena kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan Zonasi (RPZ) diefisiensikan untuk penanganan Covid-19. Kegiatan RPZ sudah dialokasikan kembali pada anggaran tahun 2021 dan harapannya target yang sudah ditetapkan dapat dicapai. DIY mempunyai dua kawasan yang sudah dicadangkan untuk kawasan konservasi yaitu Kawasan Konservasi Perairan di Gunungkidul sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul No. 271/KPTS/2013 tanggal 2 September 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bantul No. 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir di Kabupaten Bantul tanggal 28 April 2014.

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp22.260.199.210,00 dan kemudian di-*refocussing* menjadi Rp13.529.536.110,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 11 Program dan 30 Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp12.802.661.250,00 (94,63%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK, Meningkatkan kualitas produk hasil pengolahan kelautan dan perikanan, mengembangkan sistem pengolahan dan pemasaran yang modern , Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Pandemi Covid-19 secara umum tidak begitu mempengaruhi sektor kelautan dan perikanan tetapi tetap menurunkan nilai PDRB sub sektor kelautan dan Perikanan	Kelautan dan perikanan mempunyai inovasi dalam menghadapi Covid-19 dengan berbagai metode baik itu cara budidaya, pemasaran sampai dengan adaptasi dengan kebiasaan baru	a. Urusan Kelautan dan Perikanan Sebagian besar nelayan DIY bukan merupakan nelayan asli/murni, tetapi berasal dari profesi lain seperti petani, buruh, dan profesi lain yang jauh dari dunia perikanan tangkap, tetapi kemudian beralih menjadi nelayan. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap karakter/mental dan kemampuan nelayan DIY. Sebagian besar nelayan DIY adalah nelayan PMT (Perahu Motor Tempel) yang terbiasa dengan one day fishing (1 hari). Untuk merubah pola melaut menjadi 5-7 hari (kapal sekoci ukuran 5-15GT) membutuhkan waktu yang panjang, mental yang kuat dan modal yang banyak/besar. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan perubahan mindset nelayan dan mencari kader-kader nelayan/regenerasi nelayan adalah:
			2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan yang berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen -tase	100	100			
			3. Meningkatkan kualitas hasil	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			budidaya, tangkap dan produk.							1. Bimtek kaderisasi nelayan: mengenalkan kegiatan usaha perikanan tangkap sekaligus mencari bakal calon nelayan yang mampu untuk bisa mengoperasionalkan armada penangkapan ikan tingkat dasar PMT. 2. Magang nelayan. Magang nelayan merupakan proses yang panjang untuk regenerasi nelayan, peningkatan kemampuan usaha untuk mengoperasikan kapal yang lebih besar. Tahapannya dimulai dengan kegiatan kaderisasi nelayan Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan nelayan untuk menangkap ikan di laut, maka diselenggarakan beberapa kegiatan pelatihan/Bimtek, yaitu: 1. Kegiatan tahun 2020: a. Bimtek *Basic Safety*
			4. Mengembangkan sistem pemasaran yang modern	Barang cetakan	Jenis	16	16			
			5. Pendampingan dan pengawalan kelompok	Pembayaran jasa kebersihan kantor	lok	1	1			
				Pembayaran kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 2	unit	21	21			
				Pembayaran tagihan telepon	Bulan	12	12			
				Pembayaran retribusi sampah	Bulan	12	12			
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	23	23			
				dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Surat kabar dan majalah	Jenis	8	8			
				Pembayaran tagihan listrik	Bulan	12	12			
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet	bulan	9	9			
				Alat listrik dan elektronik	Jenis	9	9			
				Belanja penggandaan dan penjilidan	Lembar	90.384	90.384			
				Perangko, material dan benda pos	Jenis	2	2			
				Alat Tulis Kantor	Jenis	38	38			
				Pembayaran kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 4	unit	16	16			
				Pengiriman dokumen	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						*Training Fisheries* (BST-F) Nelayan memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang keselamatan dasar di laut/di atas kapal perikanan. b. Lomba Produktifitas Armada Tersedianya data produksi dan nilai produksi kapal perikanan/PMT yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tahun yang akan datang. 2. Usulan kegiatan di tahun 2021: a. Bimtek Laminasi Perahu Motor Tempel, nelayan diharapkan mempunyai kemampuan dalam perbaikan kasko PMT. b. Bimtek Kaderisasi Nelayan Jumlah ketertarikan terhadap profesi nelayan yang semakin sedikit, sehingga diperlukan kegiatan kaderisasi nelayan dalam rangka memperkenalkan dunia perikanan tangkap dengan tujuan
				dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Bukti Pembayaran Honorarium Perencana Program	orang	7	7			
				Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	orang	8	8			
				Bukti pembayaran honorarium keuangan/ kepagawaian	orang	12	12			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Bulan	12	12			
				dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	os	3.318	3.318			
				Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Bulan	12	12			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Meningkatnya sarana dan prasaran aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor						
				Rehab kamar mandi Dinas	unit	1	1			
				Rehab rumah genset	unit	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pembangunan kanopi parkir kendaraan	m2	40	40			mendapatkan calon nelayan yang siap bekerja sebagai nelayan. c. Bimtek Penggunaan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan Minimnya pengetahuan tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan sehingga diharapkan dapat terwujud pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. d. Magang Nelayan Perahu Motor Tempel Sebagian besar nelayan DIY bukan merupakan nelayan asli/murni, tetapi berasal dari profesi lain seperti petani, buruh, dan profesi lain yang jauh dari dunia perikanan tangkap, tetapi kemudian beralih menjadi nelayan. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap karakter/mental dan kemampuan nelayan DIY. Sebagian besar nelayan DIY adalah nelayan PMT (Perahu Motor Tempel) yang terbiasa dengan *one day fishing* (1 hari). Untuk merubah pola
				dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	%	100	100			
				Pembangunan wastafel cuci tangan	unit	6	6			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Perlengkapan kantor	Jenis	1	1			
				dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Pengecatan dan perbaikan pintu kantor	buah	10	10			
				Pengecatan dinding	m2	2,100	2,100			
				dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pengecatan pintu besi gerbang dan sekeliling	m2	600	600			
				Pemeliharaan paving blok	m2	50	50			
				Pemeliharaan saluran air lingkungan kantor	m2	29	29			
				Pemeliharaan talang air	unit	1	1			
				Pengecatan dan perbaikan jendela kantor	buah	20	20			
				Pengecatan dinding pagar dan pembatas taman	paket	1	1			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				dukungan 20% terhadap sarana dan prasaranaaparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			melaut menjadi 5-7 hari (sekoci) membutuhkan waktu yang panjang, mental yang kuat dan modal yang banyak. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan perubahan mindset nelayan dan mencari kader-kader nelayan/regenerasi nelayan adalah: magang nelayan. Magang nelayan merupakan proses yang panjang untuk regenerasi nelayan atau mendapatkan nelayan yang tangguh. Beberapa tahapan yang harus dilalui: 1. Dimulai dengan kegiatan kaderisasi nelayan. Dari masyarakat/calon nelayan yang minat menjadi nelayan akan bergabung ke sentra kegiatan perikanan tangkap (bisa jadi pendorong kapal dulu atau nelayan jaring eret). 2. Tahapan selanjutnya adalah meningkat menjadi Anak Buah Kapal (ABK-PMT). Pada tahap
				Kendaraan Roda 2 (1 tahun)	unit	21	21			
				Kendaraan Roda 4 (1 tahun)	unit	15	15			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Peralatan kantor terpelihara	Jenis	5	5			
				Perlengkapan kantor terpelihara	Jenis	3	3			
				Dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Terwujudnya peatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai	nilai	84	86			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2020						ini sudah siap menjadi nelayan. 3. Selanjutnya bila telah terampil menguasai medan lautan baru bisa menjadi nahkoda di kapal PMT, 4. Bagi nelayan yang tertarik ingin menjadi nelayan dengan kapal di atasnya bisa kita ikutkan mengikuti magang di kapal motor Sekoci (kapal di atas 10 GT) dengan waktu melaut 5-7 hari. 5. Tahapan berikutnya bagi nelayan yang ingin menjadi Nahkoda Kapal Motor sekoci tadi (syarat harus punya ANKAPIN/ SIM Kapal). 6. Peningkatan dengan keinginannya menjadi Nahkoda kapal di atas 30GT e. Pencatatan Produktifitas Armada Penangkap Ikan Data produksi dan nilai produksi yang akurat di masing-masing TPI. f. Penyusunan Master Plan dan DED PPI Gesing Kab. Gunung Kidul
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian dan kinerja dan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	%	1	1			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				data produksi perikanan dan kelautan	tahun	1	1			
				dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	dokumen	5	5			
				forum perencanaan OPD	kali	1	1			
				Publikasi media cetak dan elektronik	tahun	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						Rencana pembangunan PPI Gesing diharapkan dapat digunakan untuk berlabuh kapal motor ikan > 5 GT yang mampu beroperasi di perairan pantai sampai ZEE sehingga berujung pada peningkatkan produksi perikanan tangkap. Sekaligus menciptakan sentra pertumbuhan ekonomi baru di wilayah yang masih tertinggal. Terkait BBM: Upaya yang dilakukan yaitu berkoordinasi dan mendorong Kab. Gunungkidul untuk membentuk sub penyalur BBM di PPP Sadeng, karena kebutuhan BBM di PPP Sadeng perhari masih di bawah 8 Kl sehingga paling efektif adalah dalam bentuk Sub Penyalur. Hal ini juga sudah ditindaklanjuti oleh kemenkomaritim yang mengadakan rapat koordiansi dengan pihak yang terkait seperti pertamina, nelayan, kabupaten dan HNSI. Terkait insentif bahan
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	%	100	100			
2	KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK, Meningkatkan kualitas produk hasil pengolahan kelautan dan perikanan, mengembangkan sistem pengolahan dan pemasaran yang modern , Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan	**PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN**				Optimalisasi PPP Tanjung Adikarta yang masih belum beroperasional karena adanya sedimentasi pasir. Beberapa fasilitas ada yang sudah rusak.	Penyatuan aset dari BBWSSO, Perhubungan dan kabupaten Kulon Progo kemudian akan dimintakan dana ke Bappenas untuk kajian FBC dan OBC. Selain itu akan diusahakan pendanaan lewat APBN dengan bantuan Kemenko maritim dan Kemenkopolhukam	
			2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap	Nilai produksi ikan yang masuk melalui	Milyar	34.78	58.22			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			dan olahan yang berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat	pelabuhan/tempat pelelangan ikan						bakar yang digunakan nelayan untuk melaut sedang kami usulkan untuk penanganan dampak Covid-19 di biro perekonomian. Terkait Perijinan: Perijinan yang masih perlu diperhatikan oleh DKP DIY adalah perijinan kapal-kapal di atas 30 GT, yang merupakan kewenangan pusat. Dari 7 km belum ada yang memiliki ijin penangkapan ikan. Hal ini disebabkan keengganan pemilik kapal memenuhi persyaratan pengajuan ijin dengan berbagai alasan. Oleh karena itu DKP DIY mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan perijinan kapal ikan. Baik itu ditahun 2020 maupun tahun 2021 telah di lalukan pendampingan terkait perijinan. Yang merupakan kewenangan provinsi adalah kapal 5-30 GT. Terkait Garam: Produksi garam di DIY dapat
			3. Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk.	**Pelayanan Pelabuhan Perikanan**						
			4. Mengembangkan sistem pemasaran yang modern	Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhan	orang	30	30			
			5. Pendampingan dan pengawalan kelompok	Dukungan 50% thd target peningkatan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan sebesar Rp 1,47 M dari tahun 2019 sebesar Rp 33,31 M menjadi sebesar Rp 34,78 M pada tahun 2020	%	100	100			
				Reviu masterplan PPP Sadeng	Doku -men	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										dikatakan bagus karena selain mutu garamnya kualitas tinggi metode pembuatannya pun sangat efektif. Namun demikian untuk memasarkan masih terkendala diproses perijinan yaitu ijin edar. Untuk itu DKP DIY tahun 2019 mengadakan kegiatan Bimtek Usaha Garam, diharapkan para pembuat garam dapat meningkatkan kualitas produksinya yang bersetandar SNI. UKM yang sudah maju diharapkan dapat memasarkan garam dengan perijinan yang lengkap. *Road map* garam telah dibuat dengan besinergi antar OPD DIY , Kabupaten Kota dan *stakeholder* yang ada, untuk mengelola permasalahan Perijinan (SNI dan ijin Edar), Pemasaran (Pemasaran Lokal dan Khusus), Packing Labeling, terbentuknya Koperasi Garam. Terkait Tanjung Adikarto:

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										Progress penyelesaian pelabuhan perikanan tanjung adikarto yaitu dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang telah diinisiasi oleh Tim Percepatan bersama Bappena, dan telah ditindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait. Namun tertunda karena pandemi Covid-19. Terkait pakan dan bibit ikan: Sudah dirintis Pakan Mandiri dengan bahan baku murah. Telah dilakukan kegiatan sarasehan pakan mandiri, untuk subsitusi pakan bagi pembudidaya. Kegiatan yang terkait dengan benih ikan berkualitas telah dilakukan di 2020 dan 2021 antara lain: 1. Sosialisasi dan pelatihan MPM manajer pengendali mutu benih 2. Memberikan bantuan induk 3. Melakukan audit CPIB berkala

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										4. Mengoptimalkan peran UPTD Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (UPTD BPTPB) untuk menghasilkan benih dan calon induk serta induk unggul yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Para pembudidaya sudah difasilitasi secara optimal untuk dapat membuat pakan sendiri dari bahan baku lokal yang murah dan terjangkau dengan bantuan mesin pellet, pelatihan dan sarasehan pakan mandiri untuk mengoptimalkan produksinya. Sampai saat ini sudah banyak yang dapat membuat pakan mandiri walaupun kapasitasnya masih untuk konsumsi kelompok tersebut. Bahan pakan mandiri sudah bekerjasama dengan CSR Hotel dan restoran sehingga sisa makanan bisa digunakan untuk bahan baku pakan mandiri.
				Pengelolaan Pelabuhan Perikanan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kajian Penyusunan koordinat wilayah kerja daratan dan wilayah kerja perairan PPP Sadeng	Doku -men	-	-	Target di*refocus-sing* untuk penanganan pandemi Covid-19	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	
				Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan Pelabuhan	orang	30	30			
				Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran	orang	-	-	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	
				Dukungan 50% thd target peningkatan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan sebesar Rp 1,47 M dari tahun 2019 sebesar Rp 33,31 M menjadi sebesar Rp 34,78 M pada tahun 2020	%	100	100			
				PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				Kajian Rencana Pengelolaan Zonasi diefisiensikan untuk penanganan Covid-19 sehingga capain target Peningkatan	Kajian Rencana Pengelolaan Zonasi telah diusulkan pada tahun 2021 sehingga untuk target 60% dan usulan penetapan batas kawasan ke KKP untuk target 80% dapat tercapai ditahun 2021	
				Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan	persen	14	43.43			
				Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	persen	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								status konservasi tidak bisa dicapai		
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan						
				Jumlah Pengawasan terpadu di laut	kali	3	3			
				Jumlah Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan	kali	17	17			
				dukungan 35% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 10% tahun 2020 dilaporkan ada 16 kejadian ilegal dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100	100			
				Jumlah Pengawasan Mutu Produk Perikanan	kali	17	17			
				Gerakan Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan						
				dukungan 15% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 10% tahun 2020 dilaporkan ada 20 kejadian	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				ilegal dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan						
				jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	orang	-	-	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	
				Restoking Sumber Daya Kelautan dan Perikanan						
				dukungan 15% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 10% tahun 2020 dilaporkan ada 20 kejadian ilegal dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100	100			
				Populasi Sumber Daya kelautan dan perikanan bertambah	ekor	990 .,000	990 .000			
				Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi						
				dukungan 35% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kelautan dan Perikanan sebesar 10% tahun 2020 dilaporkan ada 20 kejadian ilegal dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan						
				penyusunan dokumen kak oerencanaan kawasan konservasi	Doku -men KAK	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP				Banyak kegiatan yang diefisiensikan untuk penangan Covid-19 tetapi Produksi perikanan tangkap sudah melebihi target dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan.	Penganggaran tahun 2021 untuk peningkatan SDM nelayan telah dianggarkan untuk meningkatkan jumlah nelayan baru, bimtek nelayan dan pemberdayaan nelayan sehingga produksi bisa nambah dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat.	
				Produksi perikanan tangkap	Ton	6,481	6,545	Pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas nelayan sehingga produktivitas normal.	Memberi motivasi agar tetap melakukan aktivitas kenelayanan	
				Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap						
				produksi kelompok nelayan	ton	-	-	Target di*refocussing* untuk	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								penanganan pandemi Covid-19		
				kontribusi 60% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 5.509 ton pada tahun 2020	%	100	100			
				Jumlah nelayan memiliki sertifikat BST/ketrampilan simulasi radar/penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan/perbaikan dan perawatan mesin/laminasi PMT	orang	27	27			
				Jumlah nelayan baru	orang	-	-	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	
				Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap						
				jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan	kelompok	-	-	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	
				Jumlah Kapal yang melengkapi perizinan secara OSS (Daring *Single Submission*)	kapal	1	1			
				Jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap	Doku -men	-	-	Target di*refocussing* untuk penanganan	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								pandemi Covid-19		
				kontribusi 40% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 5.509 ton pada tahun 2020	%	100	100			
				Jumlah Kapal yang memiliki Buku Kapal	kapal	1	1			
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN				Pandemi Covid-19 hanya mempengaruhi pengolahan khusus oleh-oleh wisatawan, sedangkan untuk yang konsumsi masyarakat justru naik omzetnya.	Dislautkan memberi pelatihan diversifikasi olahan yang cocok dengan pandemi Covid-19 seperti fish jelly produk, lesigor (lele siap goreng dan ikan beku berbumbu lainnya)	
				Tingkat konsumsi ikan	kg/ kapita/ tahun	25.48	31.24			
				Pengolahan Hasil Perikanan						
				persentase hasil perikanan yang memenuhi standar mutu	%	75	75			
				Dukungan 35% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan menjadi 22.50 kg/kapita/tahun pada tahun 2020	%	100	100			
				jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	orang	450	450			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				produksi perikanan olahan dari kelompok madya	ton	-	-	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	
				produksi perikanan olahan dari kelompok pemula	ton	-	-	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	
				jumlah rekomendasi Unit Pengolah Ikan yang akan diajukan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	Rekomen -dasi	-	-	Target di*refocus-sing* untuk penanganan pandemi Covid-19	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	
				Pemasaran Hasil Perikanan						
				jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	orang	740	740			
				jumlah pelaku usaha yang meningkat omzetnya	orang/ kelompok	-	-	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	
				Dukungan 50% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan menjadi 22.50 kg/kapita/tahun pada tahun 2020	%	100	100			
				Persentase penjualan produk olahan	%	-	-	Target di*refocussing* untuk	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								penanganan pandemi Covid-19		
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)						
				Dukungan 15% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan sebesar menjadi 22.50 kg/kapita/tahun pada tahun 2020	%	100	100			
				Terbangunnya Unit Pengolahan Ikan	unit	5	5			
				PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA				Awal pandemi, pemasaran hasil budidaya ikan terdampak karena berhentinya demand dari Hotel, Restoran dan Catering sehingga stok melimpah dan harganya turun. Tapi seiring berjalannya waktu pemasaran dan harga semakin stabil.	Dislautkan memfasilitasi pemasaran secara daring, sehingga memutus rantai pasok di pengepul sehingga pembudidaya ikan lebih banyak untungnya karena pemasarannya langsung ke konsumen. Selain itu Pemda Kabupaten Kulon Progo, sleman dan Gunung kidul mengamanatkan ikan sebagai salah satu menu dalam BPNT(Bantuan Pangan Non Tunai)	
				Produksi perikanan budidaya	Ton	89,500	93,846			
				TUK	satuan	target	realisasi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya						
				Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendikasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB	unit pembu -didaya/ kel	5	5			
				produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	ton	20	20			
				Kontribusi 50% terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya menjadi 69.810 ton pada tahun 2020 (terdiri dari udang galah: 60 ton; nila: 21.000 ton; mas: 100 ton; gurami:10.050 ton; udang vaname: 1.500 ton; tawes: 185 ton; patin:65 ton; lele: 32.000 ton; bawal: 3.900 ton; lainnya: 1000 ton)	%	100	100			
				Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya						
				Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha perikanan Budidaya (antar UPR dengan Pembudidaya)	Doku -men	-	-	Target di*refocus-sing* untuk penanganan pandemi Covid-19	Target di*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19	
				Produksi perikanan budidaya, dari kelompok madya	ton	40	40			
				Kontribusi 50% terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya menjadi 69.810 ton pada tahun 2020 (terdiri dari udang galah: 60 ton; nila: 21.000 ton; mas: 100 ton;	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				gurami:10.050 ton; udang vaname: 1.500 ton; tawes: 185 ton; patin:65 ton; lele: 32.000 ton; bawal: 3.900 ton; lainnya: 1000 ton)						
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA				Pemasaran benih ikan juga terdampak ketika pembudidaya ikan menunda untuk menebar kembali, sehingga benih di BPTPB juga tidak terserap. Anggaran untuk rutin BPTPB juga dipangkas 50% sehingga ketersediaan benih juga menurun.	Benih yang tidak terserap akan dibesarkan sendiri untuk dijual sebagai ikan konsumsi. Penganggaran 2021 akan dioptimalkan lagi sehingga ranah BPTPB sebagai lembaga pengembangan teknologi bisa ditegakkan.	
				Produksi benih perikanan budidaya yang bersertifikat yang terdsitribusi	persen	86	88			
				Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan						
				Dukungan 25 % Terhadap Persentase Benih Perikanan Budidaya Bersertifikat yang terdistribusi 84 % (terdiri dari benih nila 540.000.000 Ekor, benih lele 290.000.000 Ekor, benih ikan mas 12.000.000, udang galah 6.000.000 Ekor)	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Rekomendasi hasil uji hama dan penyakit ikan	sampel	150	156			
				Perbanyakan Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya						
				Calon Induk Ikan	Kg	3,280	3,707			
				Dukungan 75% Terhadap Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat terdistribusi 86% (terdiri dari benih nila 540.000.000 Ekor, benih lele 290.000.000 Ekor, benih ikan mas 12.000.000 Ekor, udang galah 6.000.000 Ekor)	%	100	100			
				Petunjuk teknis perikanan budidaya	Petun -juk teknis	2	2			
				Benih Ikan dan Udang	ekor	3.325 .225	4.289 .660			
3	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK, Meningkatkan kualitas produk hasil pengolahan kelautan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			dan perikanan, mengembangkan sistem pengolahan dan pemasaran yang modern , Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan							
			3. Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk.	**Pengembangan Budaya Bahari**						
			4. Mengembangkan sistem pemasaran yang modern	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah PPI Gesing	Doku -men	1	1			
			5. Pendampingan dan pengawalan kelompok	Sosialisasi pengkayaan sumber daya ikan local	Kelom -pok	55	55			
				Lomba Pokdakan Ber-CBIB dan Pra-CBIB	Kelom -pok	20	20			
				Lomba Vlogger dan Fotografi	Even	1	1			
				Video konten edukasi Kelautan dan Perikanan	judul/ tema	6	6			
				Masterplan PPI Gesing	Doku -men	1	1			
				Sekolah Lapang Budidaya MInapadi	Angka -tan	3	3			
				Pelatihan Budikdamber (15 paket)	Kabu -paten/ kota	5	5			
				Pelatihan Budidamber	Angka -tan	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar -get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pelatihan Budidaya Ikan Hias	kali	-	-			
				Pelatihan Sistem Budidaya dengan Kincir	kali	4	4			
				Lomba Perahu Nelayan	Kabu -paten	3	3			
				Meningkatnya pemahaman masyarakat DIY tentang budaya bahari	persen	0.1	0.1			
				Pelatihan Minapadi	kali	1	1			
				Lomba Unit Pengolah Ikan Bersertifikat	kali	1	1			
				Lomba Pokmaswas	Kelom -pok	15	15			

b. Urusan Pariwisata

1) Kondisi Umum

Keanekaragaman alam, budaya, keunikan dan kekhasan yang dimiliki oleh DIY menjadi modal utama dalam mengembangkan kepariwisataan. Provinsi yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota ini dikenal sebagai kota kebudayaan, pendidikan dan tujuan wisata. Meskipun wilayahnya relatif kecil, tetapi DIY mampu menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke "Kota Gudeg". Perda DIY No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025 disebutkan bahwa Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai didalam undang-undang Kepariwisataan No 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa tujuan kepariwisataan diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, memajukan kebudayaan dan menghapus kemiskinan. Pembangunan destinasi pariwisata pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan saja namun juga sebagai upaya untuk mendistribusikannya secara lebih proposional baik dari sisi jumlah maupun pendapatan daerah dan masyarakat. Pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh dan *sustainable* agar manfaatnya bisa terus dirasakan baik oleh pemerintah, pelaku wisata maupun masyarakat lokal dengan tetap mengedepankan pada 4 pilar (Destinasi, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan) sebagai upaya perwujudan azas pembangunan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan secara nasional, keempat pilar harus dikembangkan secara terpadu. Kuantitas bukan lagi menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pemasaran, namun segi kualitas juga harus diperhatikan. Sinergitas antara pemangku kepentingan dengan lingkungan harus selalu diupayakan dalam pengembangan sebuah destinasi sehingga mewujudkan *simbiosis mutualistic*.

Saat ini pengembangan pariwisata di DIY difokuskan pada amenitas dan aksesibilitas terutama infrastruktur bandara, penerbangan langsung, serta transportasi darat ke obyek wisata. Dalam rangka memenuhi aspek

amenitas, telah dilakukan percepatan dengan membangun *homestay* desa wisata dengan desain yang menonjolkan kearifan lokal seperti ciri khas budaya masyarakat setempat, tetapi berstandar dunia. Selama ini Yogyakarta menjadi salah satu barometer kegiatan pariwisata nasional, sehingga menjadi sasaran para investor untuk mendirikan hotel. Salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan pariwisata daerah adalah perkembangan jumlah usaha hotel dan akomodasi lainnya. Menurut BPS pada tahun 2020, jumlah hotel dan akomodasi yang tersebar di lima kabupaten/kota telah mencapai 2.123 hotel, terdiri dari 172 hotel bintang dan 1.951 hotel non bintang. Berikut adalah sebaran perkembangan hotel di 4 kabupaten dan satu kota di DIY. Di Kabupaten Kulon Progo banyaknya usaha penyediaan akomodasi sebanyak 36 usaha. Seluruh usaha akomodasi yang berdiri di Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah hotel non bintang. Usaha penyediaan akomodasi di Kabupaten Bantul tercatat sebanyak 387 usaha terdiri dari 3 hotel bintang dan sebanyak 384 usaha merupakan hotel non bintang. Di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 195 usaha, dengan rincian 2 usaha adalah hotel bintang dan 193 usaha adalah hotel non bintang. Kota Yogyakarta usaha penyediaan akomodasi sebanyak 725 usaha. Berdasarkan klasifikasinya, terdapat 102 hotel bintang dan 623 adalah hotel nonbintang di Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman memiliki jumlah akomodasi paling banyak diantara kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 780 usaha, dengan rincian 65 adalah hotel bintang dan 715 adalah hotel nonbintang.

Meski jumlah perkembangan akomodasi di DIY cukup pesat namun industri Pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu Global. Aspek keamanan, Sosial, Politik, Ekonomi dan kesehatan memberikan andil besar terhadap minat calon wisatawan untuk melakukan perjalanan. Seperti yang terjadi di tahun 2020 ini wabah Covid-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, sektor pariwisata dinilai paling parah terdampak pendemi tersebut. Bisnis hotel menjadi salah satu sektor usaha yang paling telak dihantam pandemi Covid-19. Bisnis ini bergantung pada kegiatan masyarakat, mulai dari yang menginap hingga mengadakan kegiatan di hotel. Merebaknya Covid-19 membuat kegiatan masyarakat di luar rumah berkurang. Hal itu menyebabkan jasa akomodasi yang ditawarkan menjadi tidak laku. Sejumlah hotel harus merelakan untuk menutup hotelnya selama beberapa bulan. Bahkan ada beberapa pengelola akomodasi yang harus menjual hotelnya karena tingkat okupansi yang rendah sehingga tidak menutup biaya operasional.

Tabel 3.116. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2019-2020

Kabupaten/Kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Jumlah Total	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kulon Progo	-	-	26	36	26	36
Bantul	2	3	283	384	285	387
Gunungkidul	2	2	199	193	201	195
Sleman	61	65	649	715	710	780
Yogyakarta	98	102	479	623	577	725
Jumlah	**163**	**172**	**1.636**	**1.951**	**1.799**	**2.123**

Sumber: BPS Prov. DIY, 2021

Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang luas bagi industri pariwisata DIY. Jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara menurun drastis. Kegiatan transportasi juga terpuruk. Banyak hotel dan restoran yang mengalami kebangkrutan dan menyebabkan banyak karyawan yang dirumahkan.

Kegiatan kajian Analisa Belanja Wisatawan tahun 2020 sebagai sumber data capaian kinerja meningkatnya jumlah belanja wisatawan ditiadakan. Untuk capaian realisasi kinerja ini dikonsultasikan dengan Tenaga Ahli Pariwisata *(Expert Justice)* dan survei *stakeholder*. Adapun hasil dari konsultasi tersebut, didapatkan hasil analisis belanja wisatawan nusantara per hari sebesar Rp675.000,00 dan rata-rata *LoS* tahun 2020 1,8 hari. Maka untuk *spending money* wisatawan, dihitung Rp675.000,00 X 1,8 hari sehingga dapat diperoleh angka Rp1.215.000,00. Untuk belanja wisman tidak bisa dihitung dikarenakan dalam kurun November-Desember 2020 jumlah wisman di DIY sangat kecil *(death session).* Rata-rata pengeluaran wisatawan yang berkunjung di DIY pada tahun 2020 hanya mencapai Rp1.215.000,00 atau turun menjadi Rp9.229.575,00 (88.37%) bila dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp10.444.575,00.

Tabel 3.117. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY	Juta rupiah	10.217.677	10.446.367	8.489.706	81,27	11.737.538	72,33
2	Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	rupiah	10.444.575	8.123.974	1.215.000	14,96	8.830.595	13,76

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2021 (data diolah)

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui sembilan Program dan 22 Kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp4.549.509.238,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp17.721.268.250,00. Secara keseluruhan belanja tidak langsung dapat terealisasi sebesar Rp4.319.794.093,00 (94,95%) dan belanja langsung dapat direalisasi sebesar Rp12.242.248.830,00 (69,08%), dengan capaian fisik kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan di-*refocussing* dan pembatalan kegiatan akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	DINAS PARIWISATA	1.Dalam Pengembangan daya tarik pariwisata meliputi: 1) Diversifikasi dan kreatifitas produk wisata local; 2) Pengembangan daya tarik wisata malam; 3) Meningkatkan kualitas produk wisata agar bertaraf internasional. 2.Dalam pengembangan aksesibilitas: 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung akses pariwisata di destinasi wisata; 2) Koordinasi dengan stakeholder terkait Peningkatan konektivitas akses yang handal ke lokasi-lokasi daya tarik wisata unggulan DIY. 3.Dalam pengembangan amenitas meliputi: 1) Peningkatan standar layanan fasilitas pendukung wisata di destinasi wisata; 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas amenitas di destinasi wisata; 3) Koordinasi dengan Stakeholder terkait Pengembangan tourism hub sebagai simpul kontrol dan distribusi pergerakan kunjungan wisata	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				1. DIY masih belum menjadi destinasi wisata utama khususnya bagi wisatawan mancanegara 2. Masih rendahnya Length of Stay (lama Tinggal wisatawan)n khususnya bagi wisatawan mancanegara 3. Pandemi global corona berdampak luas pada pariwisata DIY, jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis di DIY, termasuk belanja wisatawan juga dipastikan menurun drastis. okupansi hotel menurun drastis. Hal tersebut berdampak pada menurunnya imdikator sasaran ini yaitu sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY mengalami kontraksi. 1. Triwulan I ini belum begitu banyak pergerakan wisatawan dikarenakan belum masuk musim liburan 2. Terdapat masa-	1. Penetapan pasar utama destinasi wisata DIY untuk wisman dan wisnus dalam rangka perumusan promosi pasar potensial 2. pengembangan konten promosi tematik DIY, penguatan advertising baik daring maupun offline, 3. Standarisasi usaha dan sertifikasi SDM dalam rangka mendukung daya saing produk pariwisata 1. Promosi pariwisata DIY secara komprehensif semua stakeholder pariwisata DIY 2. meningkatkan jumlah event pariwisata di destinasi wisata 3. Mengembangkan destinasi wisata malam hari 4. Mengembangkan atraksi wisata malam hari	
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran						
				Barang Cetakan	unit/ buku	9	9			
				Dukungan 24,19% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Peralatan Rumah Tangga	jenis	30	30			
				Jasa KIR	kali	2	0			
				Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh	bulan	12	12			
				Alat tulis kantor	jenis	58	58			
				Pembayaran rapat daring berbayar/paid daring meeting	bulan	9	9			
				Pengiriman Dokumen	Doku -men	27	0			
				Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12	12			
				Pengelolaan arsip dinamis SKPD	tahun	1	1			
				Penyusutan arsip	arsip	10000	10000			
				Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	unit	12	12			
				Penggandaan	lembar	51022	51022			
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	25	25			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			4.Pengembangan Pasar dan Promosi Pariwisata DIY meliputi: 1) Melakukan analisis pengembangan pasar pariwisata yang mendukung pembangunan pariwisata DIY; 2) Intensifikasi promosi pariwisata secara daring (melalui media digital) dan offline (melalui pameran, pembuatan bahan promosi dll); 3) Pengembangan konten promosi wisata tematik DIY; 4) Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri; 5) Pengembangan pengembangan travel pattern dan paket wisata serta manajemen atraksi daya tarik wisata yang kompetitif; 6) Pengelolaan pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata 5.Pengembangan Citra Pariwisata (brand development tourism): 1) Penguatan dan Pengembangan citra branding destinasi wisata DIY; 2) *Brand awareness/ campaign* di media digital	Surat Masuk	surat	15000	15000	masa low season untuk kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan-bulan tertentu 3. Khusus untuk wisatawan nusantara di sekitar DIY (Jateng dan Jatim) jumlah belanjanya masih cenderung rendah 4. Pandemi global corona berdampak massive pada pariwisata DIY. spending money wisatawan menurun drastis dikarenakan jumlah wisatawan menurun.		
				Majalah dan Surat Kabar	jenis	4	4			
				Surat Keluar	surat	27500	27500			
				Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan	bulan	12	12			
				Pembayaran tagihan rekening air 1 unit	bulan	12	0			
				Thropy	set	37	12			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	orang/ bulan	7	7			
				Bukti pembayaran honorarium perencana program	orang/ bulan	3	3			
				Dukungan 13,34% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Jasa keamanan kantor/tempat kerja	bulan	12	12			
				Bukti pembayaran honorarium pengurus barang	orang/ bulan	2	2			
				Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	orang/ bulan	1	1			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Dukungan 62,47% terhadap administrasi perkantoran yang	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			dan non digital untuk promosi destinasi wisata DIY 6.Standarisasi Usaha Pariwisata meliputi: 1) Penyusunan standar usaha penyelenggaraan usaha jasa pariwisata; 2) Standarisasi usaha pariwisata dalam mendukung daya saing produk dan destinasi wisata DIY; 3) pelaksanaan bimbingan teknis standar internasional usaha pariwisata; 4) Pembinaan usaha berbasis potensi lokal pendukung wisata 7.Penguatan organisasi kepariwisataan dan SDM Pariwisata meliputi: 1) Penguatan Organisasi Kepariwisataan dan SDM Pariwisata dalam mendukung tata kelola kepariwisataan yang bedaya saing dan berkelanjutan; 2) Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (lintas sektor dan lintas wilayah); 3) Sertifikasi SDM bidang Pariwisata	mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
				Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam daerah terlaksanan dengan baik	tahun	1	1			
				Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam Jawa terlaksanan dengan baik	tahun	1	1			
				Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	orang	2696	2696			
				Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata luar Jawa terlaksanan dengan baik	tahun	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Pengadaan Komputer	jenis	1	1			
				Dukungan 15,79% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Pembuatan unit Wastafel Kantor DiSPAR	unit	2	2			
				Pembuatan unit Wastafel Kantor TIC Malioboro	unit	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Gedung Kantor & Taman	paket	1	1			
				Dukungan 36,58 % terhadap sarpras aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Mesin Generator (Genset)	unit	3	3			
				Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 terpelihara sesuai RKPMD	unit	12	12			
				Dukungan 37,77% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Dukungan 9,86% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Peralatan gedung kantor terpelihara	jenis	8	8			
				Mebeleur terpelihara	jenis	2	2			
				Perlengkapan gedung kantor terpelihara	jenis	3	3			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian Kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) Hasil (SIPKD) Dukungan 1,85 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Nilai LKJIP	82	80.41			
				Dukungan 1,85 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	%	7	30.91			
				Dukungan 3,69 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Doku -men	4	4			
				Dukungan 68,60 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendkung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Forum Perencanaan OPD 1 kali	kali	1	1			
				Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com 1 tahun; dengan pengunjung website sebanyak 2.200 org/hari	Pengun -jung	520 .000	624 .416			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Dukungan 25,86 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pengembangan Sistem Pengendalian Penggunaan Anggaran	Apli -kasi	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	%	100	100			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	1.Dalam Pengembangan daya tarik pariwisata meliputi: 1) Diversifikasi dan kreatifitas produk wisata local; 2) Pengembangan daya tarik wisata malam; 3) Meningkatkan kualitas produk wisata agar bertaraf internasional 2.Dalam pengembangan aksesibilitas: 1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung akses pariwisata di destinasi wisata 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait Peningkatan konektivitas akses yang handal ke lokasi-lokasi daya tarik wisata unggulan DIY. 3.Dalam pengembangan amenitas meliputi: 1. Peningkatan standar layanan fasilitas pendukung wisata di destinasi wisata 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas amenitas di destinasi wisata 3. Koordinasi dengan Stakeholder terkait	**PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA**						
				jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	orang	6542.327	1848.548	1. DIY masih belum menjadi destinasi wisata utama khususnya bagi wisatawan mancanegara 2. Masih rendahnya Length of Stay (lama Tinggal wisatawan)n khususnya bagi wisatawan mancanegara 3. Pandemi global corona berdampak luas pada pariwisata DIY, jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis di DIY, termasuk belanja wisatawan juga dipastikan menurun drastis. okupansi hotel menurun drastis. Hal tersebut berdampak pada menurunnya imdikator sasaran ini yaitu sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY mengalami kontraksi. 1. Saat ini belum begitu banyak	1. Penetapan pasar utama destinasi wisata DIY untuk wisman dan wisnus dalam rangka perumusan promosi pasar potensial 2. Pengembangan konten promosi tematik DIY, penguatan advertising baik daring maupun offline, 3. Standarisasi usaha dan sertifikasi SDM dalam rangka mendukung daya saing produk pariwisata 1. Promosi pariwisata DIY secara komprehensif semua stakeholder pariwisata DIY 2. meningkatkan jumlah event pariwisata di destinasi wisata 3. Mengembangkan destinasi wisata malam hari 4. Mengembangkan	
				Promosi Pariwisata						
				Video Promosi Pariwisata	video - tematik	2	2			
				Dampak Pandemi Covid-19 terhadap belanja Wisatawan	Doku -men	1	1			
				Dokumen Statistik Pariwisata DIY 2020	Doku -men	1	1			
				Jumlah ulasan destinasi wisata dari Familiarization Tour 1 Tahun tamu dari Kemenlu, Kemenpar, KBRI,Kantor Perwakilan, Asosiasi pariwisata di luar negeri	ulasan yang terpubli	30	17			
				Talkhsow Promosi Pariwisata Pranatan Anyar Plesiran Jogja	kali talk -show	2	2			
				Jumlah kontrak kerjasama dengan negara anggota EATOF yang dihasilkan dari event EATOF	kontrak kerja -sama	0	0			
				Jumlah kontrak bisnis yang dihasilkan dari	transaksi bisnis	120	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			Pengembangan tourism hub sebagai simpul kontrol dan distribusi pergerakan kunjungan wisata 4.PENGEMBANGAN Pasar dan Promosi Pariwisata DIY meliputi: 1. Melakukan analisis pengembangan pasar pariwisata yang mendukung pembangunan pariwisata DIY 2. Intensifikasi promosi pariwisata secara daring (melalui media digital) dan offline (melalui pameran, pembuatan bahan promosi dll) 3. Pengembangan konten promosi wisata tematik DIY 4. Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri 5. Pengembangan pengembangan travel pattern dan paket wisata serta manajemen atraksi daya tarik wisata yang kompetitif 6. Pengelolaan pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata 5.Pengembangan Citra Pariwisata (*brand development tourism*): 1. Penguatan dan Pengembangan citra branding destinasi wisata DIY	Jogja International Travel Mart				pergerakan wisatawan dikarenakan belum masuk musim liburan 2. Terdapat masa-masa low season untuk kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan-bulan tertentu 3. Khusus untuk wisatawan nusantara di sekitar DIY (Jateng dan Jatim) jumlah belanjanya masih cenderung rendah 4. Pandemi global corona berdampak massive pada pariwisata DIY. spending money wisatawan menurun drastis dikarenakan jumlah wisatawan menurun.	atraksi wisata malam hari	
				Kajian analisa belanja wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2020	Doku -men	0	0			
				Dukungan sebesar 60% (369.659 orang wisatawan) terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10,40% (616.099 orang wisatawan) semula 5.926.228 orang wisatawan menjadi 6.542.327 orang wisatawan	%	100	100			
				Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Pranatan Anyar Plesiran Jogja	kategori	2	2			
				Publikasi di Media Elektronik di Bandara	Publi -kasi	1	0			
				Pelayanan Informasi Pariwisata						
				Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa Pelayanan Informasi Wisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun, TIC di Malioboro dan Bali)	orang wisata -wan	15500	2867			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			2. Brand awareness/campaign di media digital dan non digital untuk promosi destinasi wisata DIY 6.Standarisasi Usaha Pariwisata meliputi: 1. Penyusunan standar usaha penyelenggaraan usaha jasa pariwisata 2. Standarisasi usaha pariwisata dalam mendukung daya saing produk dan destinasi wisata DIY. 3. pelaksanaan bimbingan teknis standar internasional usaha pariwisata 4. Pembinaan usaha berbasis potensi lokal pendukung wisata 7.Penguatan organisasi kepariwisataan dan SDM Pariwisata meliputi: 1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan dan SDM Pariwisata dalam mendukung tata kelola kepariwisataan yang bedaya saing dan berkelanjutan 2. Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (lintas sektor dan lintas wilayah). 3. Sertifikasi SDM bidang Pariwisata	Jumlah 11 jenis bahan promosi pariwisata (baliho, spanduk, x-banner, peta wisata, booklet, brosur kuliner, calendar event, tabloid pariwisata,CD parwisiata) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan	Eksem-plar	24850	24850			
				Dukungan sebesar 40% (246.440 orang wisatawan) terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10,40% (616.099 orang wisatawan) semula 5.926.228 orang wisatawan menjadi 6.542.327 orang wisatawan	%	100	100			
				Publikasi dan promosi di media elektronik	tahun	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA						
				Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	%	19.61	10			
				Pelatihan dan Serifikasi SDM Pariwisata						
				Dukungan 50% terhadap terwujudnya	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku parwiisata dari tahun 2019 ke 2020 semula 17% menjadi 19.61%						
				Jumlah SDM pelaku wisata yang meningkat kapasitasnya	orang	30	0			
				Pelatihan dan Kemitraan Kelembagaan Pelaku Pariwisata						
				Dukungan 50% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku parwiisata dari tahun 2019 ke 2020 semula 17% menjadi 19.61%	%	100	100			
				Jumlah kemitraan yang dilakukan antara desa wisata dengan Hotel	Kemi -traan	5	0			
				Jumlah pokdarwis yang meningkat kapasitasnya melalui Lomba desa/kampung wisata, pokdarwis dan homestay pada tahun 2020	Pok -darwis	20	3			
				PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA						
				Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	UJP	150	186			
				Pengawasan Industri Pariwisata						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2020 ,2 UJP (35 usaha)	usaha (2 UJP)	35	33			
				Dukungan 40% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi dari tahun 2019 ke 2020 semula 100 UJP menjadi 150 UJP atau meningkat sebanyak 50 UJP	%	100	100			
				Sosialisasi SOP Protokol Kesehatan Sektor Pariwisata	UJP	4	4			
				Pelatihan dan Sertifikasi Industri Pariwisata						
				Dukungan 60% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi dari tahun 2019 ke 2020 semula 100 UJP menjadi 150 UJP atau meningkat sebanyak 50 UJP	%	100	100			
				Jumlah UJP yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis (4 UJP @40 peserta)	peserta	160	120			
				PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA						
				LoS wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	hari	2.22	1.8			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata						
				Dukungan 60% (0,048 hari) terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2019 ke 2020 sebesar (0,08 hari) semula 2.14 hari menjadi 2.22 hari	%	100	100			
				Rekomendasi program pengembangan kepariwisataan di 20 destinasi pariwisata	Doku -men	1	1			
				Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata						
				Jumlah event pariwisata lokal (Pawai & Pameran Pembangunan, Penyelenggaraan Atraksi Kesenian Di DTW-5 titik di 5 kab/kota, Grebeg Santri)	event	0	0			
				Simulasi Pelaksanaan SOP Penyelenggaraan Sektor Pariwisata	event simulasi	1	1			
				Dukungan 40% (0,032 hari) terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2019 ke 2020	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				(0,08 hari) semula 2.14 hari menjadi 2.22 hari						
				Jumlah event pariwisata internasional (Jogja Air Show)	event	1	0			
				Penyusunan Story Telling 1 Kawasan	Doku -men	1	1			
				Jumlah event pariwisata nasional (Perahu Naga)	event	0	0			
				Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)						
				Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner di Pinus Asri	unit	3	3			
				Pembangunan Pusat Informasi Wisata TIC di Pinussari (Zona Penunjang)	unit	1	1			
				Pembangunan Ruang Ganti dan/atau Toilet di Pintu Langit	unit	2	2			
				Penataan Lansekap di Pintu Langit	paket	2	2			
				Pembangunan Ruang Ganti dan/atau Toilet di Pinus Asri	unit	1	1			
				Penataan Lansekap di Pinussari (Zona Inti)	paket	2	2			
				Penataan Lansekap di Pinussari (Zona Penunjang)	paket	1	1			
				Pembangunan Panggung Kesenian/ Pertunjukan di Pinussari (Zona Inti)	unit	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pembuatan Boardwalk di Pinussari (Zona Inti)	m2	1000	1000			
				Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner di Pintu Langit	unit	1	1			
				Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner di Pinussari (Zona Penunjang)	unit	6	6			
				Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari Tahun 2019 ke 2020 sebesar (0.08 hari) semula 2,14 hari menjadi 2,22 hari	%	100	100			
				Pembangunan Ruang Ganti dan/atau Toilet di Pinussari (Zona Penunjang)	Unit	2	2			
3	KEBUDAYAAAN (KEISTIMEWAAN)	DINAS PARIWISATA	1.Dalam Pengembangan daya tarik pariwisata meliputi: 1) Diversifikasi dan kreatifitas produk wisata local; 2) Pengembangan daya tarik wisata malam; 3) Meningkatkan kualitas produk wisata agar bertaraf internasional 2.Dalam pengembangan aksesibilitas: 1) Pembangunan sarana dan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA**				1. DIY masih belum menjadi destinasi wisata utama khususnya bagi wisatawan mancanegara 2. Masih rendahnya Length of Stay (lama Tinggal wisatawan)n khususnya bagi wisatawan mancanegara 3. Pandemi global corona	1. Penetapan pasar utama destinasi wisata DIY untuk wisman dan wisnus dalam rangka perumusan promosi pasar potensial 2. pengembangan konten promosi tematik DIY, penguatan advertising baik daring maupun offline, 3. Standarisasi	
				Pengembangan Atraksi Wisata Budaya						
				Dukungan sebesar 25% terhadap terwujudnya persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 0,02 % semula 0,08 % menjadi 0,10 %	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			prasarana pendukung akses pariwisata di destinasi wisata; 2) Koordinasi dengan stakeholder terkait Peningkatan konektivitas akses yang handal ke lokasi-lokasi daya tarik wisata unggulan DIY. 3.Dalam pengembangan amenitas meliputi: 1) Peningkatan standar layanan fasilitas pendukung wisata di destinasi wisata; 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas amenitas di destinasi wisata; 3) Koordinasi dengan *Stakeholder* terkait Pengembangan tourism hub sebagai simpul kontrol dan distribusi pergerakan kunjungan wisata 4.Pengembangan Pasar dan Promosi Pariwisata DIY meliputi: 1) Melakukan analisis pengembangan pasar pariwisata yang mendukung pembangunan pariwisata DIY; 2) Intensifikasi promosi pariwisata secara daring (melalui media digital) dan offline (melalui pameran, pembuatan bahan promosi	Event Skala Nasional: Royal Mataram Festival, Simfoni Keroncong Pelesir, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, Ngayogjazz, Jogja Heboh Fashion Carnival	event	5	3	berdampak luas pada pariwisata DIY, jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis di DIY, termasuk belanja wisatawan juga dipastikan menurun drastis. okupansi hotel menurun drastis. Hal tersebut berdampak pada menurunnya imdikator sasaran ini yaitu sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY mengalami kontraksi. 1. Triwulan I ini belum begitu banyak pergerakan wisatawan dikarenakan belum masuk musim liburan 2. Terdapat masa-masa low season untuk kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan-bulan tertentu 3. Khusus untuk wisatawan nusantara di sekitar DIY (Jateng dan Jatim) jumlah belanjanya masih cenderung rendah 4. Pandemi global corona berdampak massive	usaha dan sertifikasi SDM dalam rangka mendukung daya saing produk pariwisata 1. Promosi pariwisata DIY secara komprehensif semua stakeholder pariwisata DIY 2. meningkatkan jumlah event pariwisata di destinasi wisata 3. Mengembangkan destinasi wisata malam hari 4. Mengembangkan atraksi wisata malam hari	
				Event Skala Lokal: Atraksi wisata budaya di kawasan strategis, Virtual Tour Budaya, Penyelenggaraan Virtual B to B	event	3	3			
				Jejaring Media Sosial sebagai Pendukung Media Promosi	tahun	1	1			
				Pengadaan Display TIC YIA	Kegi-atan	1	1			
				Sosialisasi Pranatan Anyar di Destinasi Wisata	kali	10	10			
				Event Skala Internasional	event	0	0			
				Bakti Saka Pariwisata	Kegi-atan	5	5			
				Peningkatan Lembaga Wisata Budaya						
				Pelatihan Penguatan Kelembagaan Desa Wisata	lokasi	15	15			
				Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya (Tahap Pengembangan Desa Mandiri Budaya)	orang	150	150			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			dll); 3) Pengembangan konten promosi wisata tematik DIY; 4) Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri; 5) Pengembangan pengembangan travel pattern dan paket wisata serta manajemen atraksi daya tarik wisata yang kompetitif; 6) Pengelolaan pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata 5.Pengembangan Citra Pariwisata (brand development tourism): 1) Penguatan dan Pengembangan citra branding destinasi wisata DIY; 2) *Brand awareness/ campaign* di media digital dan non digital untuk promosi destinasi wisata DIY 6.Standarisasi Usaha Pariwisata meliputi: 1) Penyusunan standar usaha penyelenggaraan usaha jasa pariwisata; 2) Standarisasi usaha pariwisata dalam mendukung daya saing produk dan destinasi wisata DIY; 3) pelaksanaan bimbingan teknis standar internasional usaha	Promosi Pariwisata Melalui Media Elektronik	kali	20	20	pada pariwisata DIY. spending money wisatawan menurun drastis dikarenakan jumlah wisatawan menurun.		
				Jumlah pelaku wisata yang memenuhi standar mutu SDM dan Kelembagan Pariwisata di Desa wisata Embrio Desa Mandiri Budaya	orang	140	140			
				Pembuatan Video Promosi Pranatan Anyar	video	10	10			
				Pelatihan SDM dan Lembaga Wisata Budaya (Tahap Penumbuhan Desa Mandiri Budaya)	orang	150	150			
				Sosialisasi Pranatan Anyar di Desa Wisata	orang	600	600			
				Dukungan 10.04 % % terhadap capaian desa mandiri budaya sebanyak 10 desa	%	100	100			
				Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	orang	75	75			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			pariwisata; 4) Pembinaan usaha berbasis potensi lokal pendukung wisata 7.Penguatan organisasi kepariwisataan dan SDM Pariwisata meliputi: 1) Penguatan Organisasi Kepariwisataan dan SDM Pariwisata dalam mendukung tata kelola kepariwisataan yang bedaya saing dan berkelanjutan; 2) Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (lintas sektor dan lintas wilayah); 3) Sertifikasi SDM bidang Pariwisata							

c. Urusan Pertanian

1) Kondisi Umum

Capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun 2020 yang dirilis BPS DIY sebesar 7.460.189 juta rupiah. Dengan rincian untuk kategori tanaman pangan sebesar 3.230.401 juta rupiah (43,30%), tanaman hortikultura 2.209.320 juta rupiah (29,61%), tanaman perkebunan 251.243 juta rupiah (3,37%), dan peternakan sebesar 1.769.224 juta rupiah (23,72%). Sebagai data dukung, produksi tanaman pangan tahun 2020 sebesar 2.376.463 ton mengalami kenaikan 16,21% dari tahun 2019, hortikultura tercapai 400.026 ton naik 11,44% dibandingkan tahun sebelumnya, perkebunan tercapai 62.907,17 ton meningkat sebesar 0,59% dari tahun sebelumnya, dan peternakan tercapai 608.473 *Animal Unit* naik sebesar 4,09% dari tahun 2019. Peningkatan nilai produksi di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan diprediksi memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai PDRB sektor pertanian di DIY pada Tahun 2020. Pertumbuhan positif sektor pertanian pada masa pandemi tentu memberikan harapan akan kelangsungan produksi pangan di DIY.

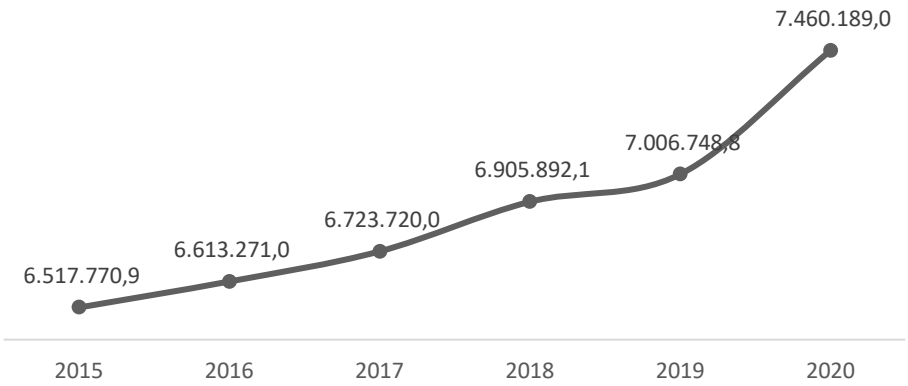
Kinerja sasaran ini pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.118. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 Terhadap target akhir RPJMD 2022(%)
			Target	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB	Juta Rupiah	7.005.748,80	7.183.372	7.460.189,00**	103,85	7.327.757	101,81

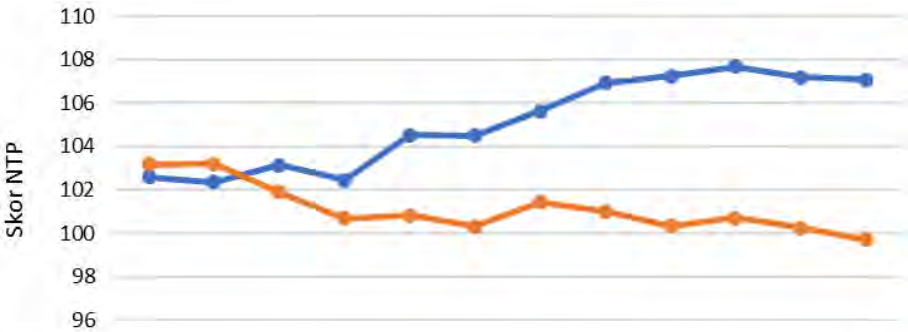
*Keterangan: **) Angka sangat sementara, capaian Tahun 2020 belum dirilis oleh BPS (Data merupakan angka prediksi dengan perhitungan regresi linier terhadap capaian nilai PDRB)*
Sumber: BPS Provinsi DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

Tabel di atas menunjukan pencapaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun 2020 sebesar 7.460.189 juta rupiah atau tercapai sebesar 103,85% dari target tahun 2020. Capaian PDRB tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 6,49%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2022 telah tercapai 101,81%.



Gambar 3.51. Nilai Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Jasa Pertanian, dan Perburuan dalam PDRB DIY Tahun 2015-2020
Sumber: BPS Provinsi DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

Indikator lain yang mencerminkan kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase, merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Capaian nilai NTP mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2020 berada di bawah capaian NTP pada bulan yang sama tahun 2019. Hal ini dapat dikaitkan dengan kejadian pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia, termasuk di wilayah DIY sejak Maret 2020 dan kondisinya belum membaik sampai akhir tahun 2020.



	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2019	102,6	102,36	103,15	102,46	104,53	104,49	105,64	106,93	107,25	107,69	107,18	107,08
2020	103,16	103,19	101,91	100,69	100,82	100,3	101,44	101,01	100,33	100,71	100,24	99,71

Gambar 3.52. Nilai Tukar Petani Tahun 2019 dan 2020
Sumber: BPS Prov. DIY, 2021

Berdasarkan gambar, diketahui bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2020 sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 mendorong adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada terhambatnya aktivitas beberapa sektor. Hal ini berimplikasi melemahkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Selain itu, kebijakan PSBB juga turut mempengaruhi kelancaran distribusi komoditas pangan antarkota, antarprovinsi, dan antarpulau. Sisi positif terjadinya pandemi di tahun 2020 adalah masyarakat yang banyak beraktivitas di rumah memiliki waktu lebih dan mendorong lahirnya trend budidaya pertanian di lahan pekarangan, hal ini dapat menjadi solusi dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan keluarga secara mandiri.

Rata-rata NTP tahun 2020 sebesar 101,13 artinya usaha pertanian masih mampu memberikan tambahan kesejahteraan bagi para petani. Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan meningkat di tahun 2020. Namun beberapa komoditas mengalami hambatan dalam pemasarannya. Walaupun sudah ada upaya untuk memasarkan produk pertanian secara daring namun belum mampu menyerap seluruh produk yang dihasilkan. Permintaan akan produk pertanian di DIY yang merupakan sentra wisata dan pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi saat ini, daya serap terhadap produk pertanian menurun karena kebijakan sekolah/kuliah masih menggunakan metode daring belum ada tatap muka pelajaran di kelas sehingga jumlah pelajar dan mahasiswa indekos menurun drastis; usaha sektor pariwisata serta hotel-restoran-kafe (horeka) juga menurun tajam; aktivitas sosial, hajatan, dan pesta di masyarakat sangat terbatas sehingga permintaan konsumen terhadap produk pertanian juga mengalami penurunan. Dengan kondisi ini, walaupun produksi naik namun nilai barang yang diterima petani lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.119. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2019-2020

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2019	2020*
1	Padi	810.980	848.504
2	Jagung	366.031	369.301
3	Kedelai	5.041	7.997
4	Kacang Tanah	80.682	75.045
5	Kacang Hijau	226	533
6	Ubi Kayu	778.806	1.072.317
7	Ubi Jalar	3.149	2.766
8	Sorghum	23	0

*Keterangan: *) Angka sementara* *Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021*

Produksi tanaman pangan tahun 2020 sebesar 2.376.464 ton, mengalami kenaikan sebesar 331.525 ton (16,21%) dari tahun 2019. Produksi padi, jagung, kedelai, kacang hijau dan ubi kayu mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Hal ini disebabkan karena karena adanya dukungan pemerintah dalam pegembangan kawasan padi, jagung, kedelai, kacang hijau berupa penyediaan benih unggul yang bersertifikat, penyediaan sarana prasarasa yang mendukung peningkatan produksi serta pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim sedini mungkin. Sedangkan produksi kacang tanah, ubi jalar, dan sorghum mengalami penurunan dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena minat petani untuk budidaya kacang tanah dan ubi jalar berkurang dan beralih ke komoditas lain, sedangkan untuk sorghum hanya untuk pakan ternak.

Produksi hortikultura di tahun 2020 mencapai 400.026 ton atau tercapai 100,12% dibanding target sebesar 399.550 ton. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2019 sebesar 358.969 ton, ada kenaikan 11,44%. Beberapa produk sayuran hortikultura strategis, seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang merah mengalami kenaikan produksi dibanding tahun 2019. Cabai besar meningkat produksinya, dari 32.933 ton di tahun 2019 menjadi 44.535 ton di tahun 2020 atau meningkat 35,23%. Produksi cabai rawit meningkat dari 10.040 ton menjadi 15.052 ton di tahun 2020 atau naik 49,92% dibanding tahun 2019. Produksi bawang merah mengalami kenaikan 13,17% dibanding tahun 2019.

Buah salak sebagai buah khas Yogyakarta mengalami peningkatan produksi dari 41.120 ton di tahun 2019 menjadi 54.995 ton di tahun 2020 atau naik 33,74%. Produksi durian sebagai buah idola juga naik dari tahun lalu, meskipun tidak terlalu signifikan.

Kenaikan produksi hortikultura didukung oleh kondisi pasar yang semakin membaik, adanya insentif dari pemerintah baik yang bersifat ektensifikasi maupun intensifikasi, pendampingan dari petugas lapangan pertanian, serta sarana prasarana pendukung untuk proses produksi maupun pasca panen hortikultura.

Komoditas utama lain yakni semangka, melon, dan mangga produksinya menurun dibanding tahun sebelumnya. Jumlah tanaman menghasilkan untuk komoditas mangga mengalami penurunan, minat masyarakat membudidayakan mangga turun sehingga produksinya turun. Penurunan produksi merata di semua kabupaten. Faktor cuaca juga berperan menjadi penyebab menurunnya produksi mangga. Sebagian besar petani

semangka dan melon menggunakan sistem sewa lahan dan modal untuk budidaya kedua komoditas ini cukup tinggi sehingga kondisi permintaan pasar yang tidak menentu di masa pandemi ini menurunkan minat para petani untuk berbudidaya.

Tabel 3.120. Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2019-2020

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2019	2020*
1	Cabai besar	Ton	32.933	44.535
2	Cabai rawit	Ton	10.040	15.052
3	Bawang merah	Ton	16.998	19.236
4	Mangga	Ton	58.130	28.985
5	Durian	Ton	6.265	6.771
6	Pisang	Ton	47.554	66.729
7	Salak	Ton	41.120	54.995
8	Pepaya	Ton	8.376	13.995
9	Semangka	Ton	8.909	7.090
10	Melon	Ton	24.016	22.230

*Keterangan: *) Angka sementara*
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

Sasaran program peningkatan populasi peternakan adalah meningkatnya populasi ternak. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan populasi ternak antara lain dengan penyediaan bibit ternak bermutu, optimalisasi reproduksi ternak, bimbingan teknis penyediaan pakan ternak, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan. Populasi ternak DIY tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.121. Populasi Ternak di DIY Tahun 2019-2020*

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2019	2020*
1	Sapi Potong	304.423	309.259
2	Sapi Perah	3.870	3.520
3	Kambing	407.226	416.400
4	Domba	143.957	148.191
5	Ayam Ras Petelur	3.567.652	4.618.205
5	Ayam Ras Pedaging	6.244.881	6.184.378
6	Itik	411.044	441.503

*Keterangan: *) Angka sementara*
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

Jumlah populasi ternak tahun 2020 sebesar 606.060 Unit Ternak, mengalami peningkatan 21.494 Unit Ternak/*Animal Unit* atau sebesar 3,68% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 584.566 Unit Ternak. Ada komoditas strategis peternakan yang mengalami penurunan

populasi pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Penurunan populasi sapi perah disebabkan oleh erupsi gunung Merapi, yang mempengaruhi para peternak menjual sebagian ternaknya. Penurunan populasi ayam ras pedaging merupakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan permintaan daging ayam menurun sehingga peternak mengurangi volume produksinya.

Populasi sapi potong mengalami peningkatan sebesar 4.836 ekor atau 1,59%. Peningkatan ini didukung adanya program optimalisasi reproduksi yang meningkatkan jumlah kelahiran sapi. Populasi kambing dan domba mengalami peningkatan masing-masing sejumlah 9.174 ekor (2,25%) dan 4.234 ekor (2,94%). Peningkatan ini didorong oleh tumbuhnya minat generasi muda untuk beternak kambing dan domba. Populasi ayam ras petelur mengalami kenaikan sebesar 1.050.553 ekor atau 29,45% karena beternak ayam ras petelur cukup menguntungkan sehingga minat untuk beternak ayam ras juga meningkat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi peternak di DIY untuk pengembangan ternak antara lain:

a) Keterbatasan bibit ternak terutama ternak kambing dan domba, padahal permintaan daging kambing dan domba cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan kuliner.
b) Keterbatasan lahan hijauan pakan ternak untuk memproduksi rumput dan legume.
c) Harga panen ayam ras pedaging yang fluktuatif menyebabkan jumlah peternak mandiri dan peternak plasma kemitraan semakin menurun.
d) Keterbatasan lahan untuk lokasi kandang karena pemukiman yang semakin padat sehingga keberadaan usaha peternakan bisa mengganggu lingkungan.
e) Adanya ancaman berbagai macam penyakit termasuk penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia, perlu upaya pencegahan dan penanganan yang tepat.

Produksi perkebunan tahun 2020 sebesar 62.907,17 ton atau tercapai 91,15% dari target tahun 2020 yaitu 69.015 ton. Capaian tahun 2019 sebesar 62.537,59 ton menjadi 62.907,17 ton di tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar 0,59%. Hal ini didukung oleh peningkatan produksi beberapa komoditas yaitu gula hablur tebu meningkat 2,88%, biji kering kakao meningkat 9,46%, biji kopi kering meningkat 4,12% dan biji mete kering meningkat 11,39%. Produksi kelapa mengalami penurunan 1,38% dikarenakan tanaman yang dikembangkan sejak tahun 1990-an saat ini

sudah tua mengakibatkan produktivitas menurun. Adanya hama kutu putih pada kelapa di Kokap juga menurunkan produksi. Peningkatan produksi komoditas perkebunan juga didukung oleh kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) yang cukup berpengaruh pada peningkatan produktivitas per tanaman perkebunan. Selain itu, kegiatan Sekolah Lapang dan Bimbingan Teknis Lapangan juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas kemampuan petani/pekebun dalam kegiatan pemeliharaan tanaman perkebunan.

Tabel 3.122. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2019-2020

No.	Komoditas	Produksi (ton)	
		2019	2020**
1	Kelapa	48.065,92	47.403,55
2	Kopi	512,56	533,68
3	Jambu mete	233,55	260,14
4	Kakao	1.792,47	1.962,05
5	Tebu	9.425,97	9.697,80

*Keterangan: *) Angka sangat sementara*
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Urusan Pertanian pada tahun 2020 dilaksanakan melalui sembilan Program dengan 21 Kegiatan, pagu anggaran Rp9.418.139.810,00. Realisasi keuangan sebesar Rp9.138.708.371,00 atau sebesar 97,03% dari target yang ditetapkan dengan realisasi fisik 99,95%. Rincian capaian kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Peningkatan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani. 2. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan 3. Pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) 4. Pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani. 5. Menumbuhkan sentra-sentra pembibitan ternak lokal Pendampingan dan pengawalan kelompok	**PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN**				Faktor penghambat dalam upaya peningkatan produksi antara lain luas lahan pertanian yang semakin berkurang, kondisi iklim yang sering berubah dan hama penyakit. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan permintaan akan beberapa produk pertanian terutama yang dipergunakan untuk bahan konsumsi kebutuhan non Rumah Tangga (restoran/ rumah makan, hotel, kos, pariwisata, dll) menurun sehingga beberapa produk mengalami kesulitan pemasaran.	Meningkatkan produktivitas tanaman melalui pemanfaatan teknologi, fasilitasi sarana dan prasarana produksi, pendampingan intensif, mitigasi dan pengendalian OPT serta PHMS	Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diinisiasi oleh DPRD DIY sudah terbit dan akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait dengan menyusun Pergub turunannya pada tahun 2021. Rencana Review Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai tindak lanjut keluarnya Perda DIY No.5 tahun 2019 tentang RTRW DIY 2019-2039 diharapkan akan mampu mengurangi laju alih fungsi lahan pertanian. Salah satu upaya untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian yaitu dengan pengelolaan pertanian secara terpadu dengan membentuk korporasi petani dalam kawasan pertanian. Untuk mengoptimalkan kelembagaan korporasi petani, perlu meningkatkan peran pemuda dalam sektor pertanian, peningkatan kualitas pelaku pertanian
				Tingkat Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Pertanian	Nilai/ Skor	74	73,04			
				Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian						
				Penilaian Klas Kelompok	Dokumen	1	1			
				Dukungan 40% terhadap target peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian dan perkebunan menjadi 74 nilai/skor	%	100	100			
				Temu Tugas Penyuluh	Kali	1	1			
				Pelatihan SDM Pertanian						
				Terlatihnya teknis hortikultura bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik)	Orang	30	30			
				Terwujudnya dukungan sebesar 60% terhadap target peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian dari skor 73 di tahun 2019 menjadi 74 di tahun 2020	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN						
				Produksi Tanaman Pangan	ton	2313050	2332606,65			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			6. Pendampingan dan pengawalan kelompok. 7. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pemantapan kelembagaan penyuluhan, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan 8. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sector	**Budidaya Tanaman Pangan**						melalui pendidikan pelatihan dan pendampingan, mengembangkan pertanian terpadu, penguatan corporate farming. Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan pertanian bagi generasi muda melalui pengoptimalan peran BPP untuk ikut membina generasi muda agar berminat bergerak di sektor pertanian, penggunaan alat mekanisasi pertanian beradaptasi dengan teknologi 4.0, serta pengembangan sistem informasi pertanian untuk penyebaran informasi berbasis IT. Sedangkan dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan, upaya yang telah dilakukan yaitu: 1) Memfasilitasi alat mesin pertanian beserta bimbingan teknis alat mesin kepada petani berupa alat pengolahan tanah (traktor roda 2/rotary/cultivator), alat
				Dukungan 97% (sebesar 270 ton) terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2019 sebesar 2.312.780 ton menjadi 2.313.050 ton di tahun 2020 (Padi 880.376, Jagung 311.849, Kedelai 8.656, kacang Tanah 80.907, kacang hijau 301, ubi kayu 1.030.961	%	100	100			
				Sarana pertanian yang dapat dipenuhi	Unit	114	111			
				Kajian pendukung pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	dokumen	1	1			
				Pertanian Terpadu Jogja Agro Techno Park						
				Operasional JATP	tahun	1	1			
				Dukungan 2% (sebesar 270 ton) terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2019 sebesar 2.312.780 ton menjadi 2.313.050 ton di tahun 2020 (Padi 880.376, Jagung 311.849, Kedelai	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				8.656, kacang Tanah 80.907, kacang hijau 301, ubi kayu 1.02						menanam benih padi (rice transplanter), alat penanam jagung, alat perontok padi, jagung dan kedelai (power thresher multiguna/power thresher mobil), pompa air, handsprayer, alat pemanen padi (combine harvester), Rice Milling Unit, alat pengolah pupuk organik dan lain-lain, sehingga dengan alat mesin pertanian maka proses akan lebih cepat, biaya lebih murah, kehilangan hasil berkurang, hasil pertanian dan pendapatan petani meningkat, pertanian akan maju, modern dan dapat menarik generasi muda milenial. 2) Memberikan percontohan pertanian ramah lingkungan/pertanian organik menuju Jogja sehat. Pertanian organik dapat memperbaiki kondisi tanah dan lingkungan, selain itu meningkatkan nilai tambah karena harga yang jauh lebih tinggi. Pertanian organik didukung
				Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan						
				Dukungan 1% (sebesar 270 ton) terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2019 sebesar 2.312.780 ton menjadi 2.313.050 ton di tahun 2020 (Padi 880.376, Jagung 311.849, Kedelai 8.656, kacang Tanah 80.907, kacang hijau 301, ubi kayu 1.030.961	%	100	100			
				Ketersediaan informasi harga komoditas tanaman pangan (beras, jagung, kedelai)	komoditas	3	3			
				PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA						
				Produksi Hortikultura	Ton	399550	400026			
				Budidaya Tanaman Hortikultura						
				Pemeliharaan Obor Pangan Lestari (OPAL) dan pertanaman anggrek	Unit	1	1			
				Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura	ha	20	20			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya stroberi	ha	2	2			teknologi aman bagi petani dan lingkungan, biaya rendah dan menarik bagi generasi muda karena mempunyai prospek yang lebih baik (pasar ekspor terbuka lebar). 3) Pemberian insentif kepada petani di lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa insentif asuransi pertanian, fasilitasi pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, Jalan Usaha Tani, perbaikan irigasi dan lain-lain. 4) Sosialisasi dan koordinasi lintas sektor, perguruan tinggi, masyarakat secara bersama-sama dan sinergis terkait pentingnya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengingat ketersediaan pangan yang harus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, disisi lain ancaman penurunan provitas pertanian berupa hama penyakit, banjir, kekeringan, longsor dan bencana alam lainnya. 2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dinas
				Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya biofarmaka	ha	2	2			
				Dukungan 95% terhadap peningkatan produksi tanaman hortikultura dari tahun 2019 sebesar 397.965 ton menjadi 399.550 ton di tahun 2020 meningkat sebesar 1.585 ton (buah dan sayuran tahunan 1.435 ton; Tanaman biofarmaka 150 ton)	Persen	100	100			
				Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Hortikultura						
				Ketersediaan informasi harga komoditas hortikultura (cabe, bawang merah, bawang putih, tomat)	Komoditas	4	4			
				Dukungan 5% terhadap peningkatan produksi tanaman hortikultura dari tahun 2019 sebesar 397.965 ton menjadi 399.550 ton di tahun 2020 meningkat sebesar 1.585 ton	Persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				(buah dan sayuran tahunan 1.435 ton; Tanaman biofarmaka 150 ton)						Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sudah dilaporkan pada awal tahun anggaran berikutnya sebagai bagian dari LKPJ dan akan terus dilaporkan setiap tahunnya selama OPD masih mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.
				PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN						
				Populasi Ternak	Animal Unit	624874	606784			
				Budidaya peternakan						
				Dukungan 95% terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak dari tahun 2019 sebesar 622.841 AU menjadi 624.874 AU di tahun 2020 meningkat sebesar 2.033 AU	%	100	100			
				Sosialisasi Pengembangan Pakan Komplit Ruminansia	Orang	42	42			
				Bimtek Pengembangan Pupuk Organik	Orang	20	20			
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan						
				Dukungan 3% terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak dari tahun 2020 sebesar 624.874 AU menjadi 626.885 AU di tahun 2020 meningkat sebesar 2.011 AU	%	100	100			
				Fasilitasi obat dan vaksin	-	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pengawasan lalu lintas ternak	lokasi	7	7			
				Pengamanan Produk Pangan Asal Hewan						
				Dukungan 2% terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak dari tahun 2019 sebesar 622.841 AU menjadi 624.874 AU di tahun 2020 meningkat sebesar 2.032 AU	%	100	100			
				sudah dihapus	-	0	0			
				PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN						
				Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT dan DPI	%	95	96,57			
				Pengendalian OPT Tanaman Pertanian						
				Dukungan 70 % terhadap Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI sebesar 95 % (luas tanaman pertanian aman dari serangan OPT)	Persen	100	100			
				Pembuatan agens hayati (untuk TPH dan perkebunan)	Jenis	10	10			
				Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura dan perekebunan selama 1 tahun (padi 120 ha,	ha	200	200			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				jagung 10 ha, kedelai 5 ha, cabe 3 ha, bawang merah 2 ha, perkebunan 60 ha)						
				Berfungsinya laboratorium LPHPT	Tahun	1	1			
				Penerapan PHT pada tembakau	Unit	2	2			
				Penyediaan Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pertanian						
				Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	Dokumen	1	1			
				Berfungsinya laboratorium LPMT	Tahun	1	1			
				Dukungan 30 % terhadap Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPInsebesar 95 % (luas tanaman pertanian aman dari serangan OPT)	Persen	100	100			
				Rekomendasi tingkat residu pada produk	Rekomendasi	80	80			
				Dokumen data, informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi;	Kecamatan	67	67			
				PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN						
				Produksi Perkebunan	Ton	69015	62907,17			
				Budidaya Tanaman tembakau (Cukai)						
				SL GAP Tembakau	kali	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 1% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.740 ton menjadi 68.877 ton , melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	%	100	100			
				Kelembagaan Petani tembakau (cukai)						
				Dukungan 1% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.740 ton menjadi 68.877 ton , melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	%	100	100			
				-	-	0	0			
				Budidaya Tanaman Perkebunan						
				Bimtek Budidaya Perkebunan Komoditas Kelapa (25 orang)	Hari	3	3			
				Dukungan 97% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.877 ton menjadi	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				69.015 ton, melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar						
				Pemeliharaan tanaman perkebunan 3 komoditas (Kelapa, Cengkeh, Nilam) (100 orang)	ha	27	27			
				Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan						
				Peningkatan pengetahuan dan manajemen usaha tani the	Kelompok Tani	2	2			
				Dukungan 1% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.877 ton menjadi 69.015 ton, melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	%	100	100			
				Uji mutu kopi	Kelom-pok Tani	2	2			
				Bimtek pengolahan pasca panen	Orang	25	25			

d. Urusan Kehutanan

1) Kondisi Umum

Pembangunan sektor kehutanan di DIY dilakukan dengan pendekatan pengelolaan hutan berkelanjutan dimana aspek ekologi, ekonomi, dan sosial harus berjalan selaras dan seimbang. Pengelolaan hutan berkelanjutan berlandaskan pada pengelolaan hutan lestari dengan memperhatikan tata ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas.

Ditinjau dari aspek pengelolaannya hutan di DIY dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Hutan Negara dan Hutan Rakyat dengan total luasan 98.396,53 ha. Luasan hutan negara cenderung tetap yaitu seluas 19.133,95 ha yang terbagi menjadi hutan konservasi seluas 3.316,87 ha, hutan produksi seluas 13.519,47 ha, dan hutan lindung seluas 2.297,61 ha. Jenis vegetasi dominan di wilayah hutan negara adalah jati, kayu putih dan pinus. Sedangkan luas hutan rakyat di DIY pada tahun 2020 seluas 79.262,58 ha yang tersebar di 4 (empat) kabupaten. Luasan hutan rakyat ini meningkat seluas 662,89 ha dibandingkan tahun 2019. Penambahan luasan ini berasal dari intervensi pemerintah dalam bentuk kegiatan penanaman sebagai upaya penambahan luas tutupan vegetasi. Luasan hutan rakyat terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 54.548, 904 ha, disusul oleh Kabupaten Kulon Progo dengan luasan 12.338,347 ha, Kabupaten Bantul dengan luas 9905,811 ha, dan Kabupaten Sleman dengan luasan 2469,518 ha. Jenis vegetasi hutan rakyat di DIY antara lain jati, sonokeling, mahoni, gliricidea, akasia, dan bambu.

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2017-2022, indikator kinerja urusan kehutanan di DIY adalah nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY. Target dan realisasi kinerja urusan kehutanan pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.123. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Realisasi		
Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	juta	1.086.970	749.480	1.103.535,8*	147,24	764.545	144,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY (angka proyeksi), 2021

Realisasi nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun 2020 sebesar Rp1.103.535,8 juta. Realisasi capaian PDRB sub sektor kehutanan tahun 2020 telah melampaui dengan persentase realisasi sebesar 147,24%. Sementara itu, nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan sebesar Rp764.545 juta. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, maka sudah terlampaui sebesar 144,33%.

Angka realisasi ini masih bersifat sangat sementara karena belum adanya rilis angka PDRB sub sektor kehutanan sampai dengan laporan ini dibuat. Angka realisasi ini dihitung berdasarkan analisa proyeksi yang dilakukan berdasarkan nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu DIY selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan hasil estimasi laju PDRB diperoleh bahwa laju PDRB dari tahun 2017 menuju ke tahun 2018 merupakan angka terendah dalam rentang tahun 2010 sampai dengan 2019. Oleh karena itu, angka laju ini dipilih sebagai faktor pengali untuk menghitung nilai PDRB sub sektor Kehutanan Tahun 2020. Adapun angka PDRB selama 10 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 3.124. Tren angka PDRB Kehutanan 2010 – 2019

No	Tahun	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	PDRB Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	+/- (%)
1	2010	7.252.595,2	649.337,8	
2	2011	7.805.134,5	684.673,9	5,44
3	2012	8.640.411,7	707.783,8	3,38
4	2013	9.449.019,7	750.207,7	5,99
5	2014	9.769.112,4	816.386,5	8,82
6	2015	10.793.840,1	902.903,4	10,60
7	2016	11.456.173,0	955.185,0	5,79
8	2017	11.932.796,3	1.004.944,9	5,21
9	2018	12.708.213,9	1.020.262,4	1,52
10	2019	13.255.030,7	1.086.968,1	6,54

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Salah satu yang berpengaruh terhadap nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB adalah hasil produksi kehutanan. Secara terinci, angka produksi kehutanan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.125. Angka produksi kehutanan 2019-2020

No.	Uraian	Volume	
		2019	2020
1.	**Produksi kayu bulat (m^3)**	**154.210,60**	**71.335,54**
a.	Kayu Bulat Hutan Negara	1.103,90	2.249,84
b.	Kayu Bakar Hutan Negara	37,38	0,00

No.	Uraian	Volume	
		2019	2020
c.	Kayu Bulat Hutan Rakyat	153.069,32	69.085,70
2.	**Produksi kayu olahan (m^3)**	**24.090,41**	**26.715,31**
a.	Kayu Gergajian/*Swan Timber* (m^3)	6.171,34	3.931,62
b.	Kayu lapis/*plywood* (m^3)	1.065,10	4.956,46
c.	*Veneer* (m^3)	1.065,12	1.211,98
d.	*Barecore* (m^3)	15.788,85	16.493,30
e.	*Blockboard* (m^3)	0	121,95
3.	**Produksi hasil hutan non kayu**	**166.653**	**517.846**
a.	Minyak kayu putih (liter)	39.323	40.353
b.	Bambu (batang)	127.330	477.493
4.	**Jasa Lingkungan (Rp)**	**2.454.374.875**	**409.761.125**
a.	Pengelolaan Hutan Mangunan	2.411.134.750	403.917.625
b.	Pengelolaan Hutan Produksi Klayar Kenet	21.874.375	1.580.750
c.	Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo	21.365.750	4.262.750

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

Angka realisasi produksi kayu bulat tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan angka produksi tahun 2019 dari yang sebelumnya sebesar 154.210,60 m^3 menjadi 71.335,54 m^3 atau turun sebesar 53,74%. Penurunan ini merupakan dampak dari permintaan atas kayu yang juga menurun selama tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Produksi kayu bulat di hutan negara berasal dari tebangan yang sudah direncanakan dan tebangan tak tersangka. Tebangan tak tersangka merupakan akibat adanya gangguan hutan yang berupa pencurian dengan barang bukti yang dapat diselamatkan, kebakaran, bencana alam, serta tegakan tinggal jati, namun potensinya masih relatif kecil.



Gambar 3.53. Kegiatan Tebangan Hasil Hutan Kayu di RPH Kemuning, BDH Playen, Kabupaten Gunungkidul



Gambar 3.54. Pungutan Daun Kayu Putih di RPH Candi, BDH Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan Pelibatan Masyarakat Sekitar Hutan

Sub sektor kehutanan juga berkontribusi terhadap sektor industri olahan yang berasal dari industri minyak kayu putih dan produksi kayu olahan. Produksi minyak kayu putih pada tahun 2020 mencapai 40.353 liter, sedangkan produksi kayu olahan antara lain berasal dari kayu gergajian, kayu lapis, *venner*, *barecore*, dan *blockboard*. Produksi kayu olahan tahun 2020 mengalami kenaikan produksi sebesar 2.624,9 m^3 jika dibandingkan tahun 2019. Produksi kayu olahan tahun 2019 sebesar 24.090,41 m^3 menjadi sebesar 26.715,31 m^3 pada tahun 2020.

Sektor jasa lainnya juga mengambil manfaat dari usaha kehutanan yang dilakukan melalui wisata alam dengan pemanfaatan jasa lingkungan di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Selama tahun 2020, kunjungan wisata alam mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19. Penurunan tersebut terlihat dari PAD yang didapatkan selama tahun 2020 yakni sebesar Rp409.761.125,00 yang turun drastis jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.454.374.875,00 atau turun sebesar 83,30%.

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020, Urusan Kehutanan melaksanakan tiga Program dan delapan Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp7.516.171.080,00. Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi anggaran untuk Urusan Kehutanan sebesar Rp6.694.028.274,00 atau sekitar 89,06%, dengan capaian fisik sebesar 100%. Secara terinci, capaian kinerja program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Pembaharuan Sistem Tata Kelola Kehutanan	**PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN**						a. Urusan Kehutanan Nilai PDRB sub sektor kehutanan disumbang oleh hasil hutan primer dari dalam Kawasan hutan. Produksi kayu di tahun 2019 mencapai 154.210,56 m3, dimana realisasi produksi ini lebih tinggi jika dibandingkan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 120.235,40 m3. Produksi kayu bulat tahun 2019 berasal dari *land clearing* sebesar 1.554,83 mÂ³, dari pemegang ijin pada Hutan Tanaman Rakyat sebesar 86,76 mÂ³, dari pemegang ijin dalam Hutan Kemasyarakatan sebesar 3.290,75 mÂ³, dan dari hutan rakyat 149.278,22 m3. Dalam pengelolaan kawasan hutan, DLHK DIY sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke pelaporan. Dalam tahapan perencanaan, disusun dokumen perencanaan berupa Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang merupakan dokumen yang berisi rencana pengelolaan hutan
			2. Mempertahankan keberadaan kawasan hutan	Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	persen	2	0	Tahun 2020 tidak ada penambahan usaha kehutanan yang bersertifikat di DIY. Hal ini salah satunya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh KLHK akibat rasionalisasi covid. Bahkan terdapat unit usaha yang sedianya siap difasilitasi namun usahanya mengalami colaps akibat Covid-19	Anggaran difokuskan untuk melakukan pembinaan dan penilikan (*surveillance*) pertama bagi usaha kehutanan yang telah memiliki sertifikat. Tujuannya agar usaha tersebut masih tetap dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19	
			3. Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan tertata	persen	89.4	88.03	Kegiatan pemeliharaan dan penegasan tanda batas kawasan hutan serta penyelesaian permasalahan tenurial belum dapat diselesaikan karena adanya rasionalisasi anggaran dan penangguhan pelaksanaan	Optimalisasi kegiatan melalui kerjasama dan koordinasi yang baik dengan petugas di lapangan agar kegiatan tetap berjalan walaupun dengan sumber daya yang terbatas.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								kegiatan karena pandemi Covid-19		(teknis/fisik) selama periode tertentu yang berazaskan kelestarian sumber daya hutan dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan sosial untuk suatu unit pengelolaan. RPKH selanjutnya didetailkan lagi menjadi dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) yang terdiri dari RTT Tebangan, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman. Dari dokumen tersebut dapat diketahui potensi tebangan yang dapat dilakukan berikutnya dan kegiatan penanaman serta pemeliharaan yang akan dilakukan. Dorongan kepada para pelaku usaha kehutanan untuk melakukan sertifikasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian hutan juga terus dilakukan. Upaya untuk mendorong hal tersebut salah satunya dilakukan dengan pendampingan tata usaha hasil hutan pada industri hasil hutan primer yang belum memiliki ijin dalam rangka pemenuhan persyaratan perijinan. Pada tahun 2019 terdapat
			4. Perencanaan Kehutanan yang Komprehensif dan berkesinambungan	**Penataan Hutan**						
			5. Peningkatan produktifitas dan nilai tambah sumber daya hutan dan fungsinya	Pengadaan bahan dan peralatan dalam rangka Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang	Paket	1	1			
			6. Optimalisasi Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Hutan	Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Pansela	Lokasi	2	2			
			7. Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	Dukungan 100% terhadap terwujudnya persentase kawasan hutan tertata sebesar 87,4%	%	100	100			
			8. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan	Penegasan Batas pada Daerah Rawan	Titik	10	10			
			9. Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan	**Penatausahaan Produksi Hasil Hutan**						
			10. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	Pengendalian penatausahaan hasil hutan	Unit usaha	21	21			
			11. Peningkatan Kontribusi Kehutanan bagi	Dukungan 50 % terhadap persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			Keberlanjutan Sektor Perekonomian lainnya	yang memiliki sertifikat sebesar 2%						penambahan 4 lembaga usaha kehutanan yang mendapatkan sertifikasi yaitu unit manajemen usaha SPP Gunungkidul dari Kab. Gunungkidul, UMHR Wono Lestari dari Kab. Bantul, APHR Dwi Manunggal dari Kab. Sleman, dan PHRL Mitra Wana Binangun dari Kab. Kulon Progo. Dengan demikian maka pembangunan usaha kehutanan di DIY sudah mengarah pada keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang.
			12. Konservasi Keanekaragaman Hayati	**Pengelolaan Perhutanan Sosial**						
			13. Peningkatan Manfaat Jasa Ekosistem	Pembinaan Hutan Rakyat (HR)	Kelompok	20	20			
			14. Peningkatan Peran Hutan dalam Pemulihan Daya Dukung DAS	Fasilitasi Penyuluh Kehutanan	Orang	60	60			
			15. Rehabilitasi lahan dan pencegahan bencana alam	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Kelompok	45	45			
			16. Optimalisasi dan Distribusi Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Dukungan 50 % terhadap persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat sebesar 2%	%	100	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI						
				persentase hutan konservasi terkelola	%	76.62	76.67			
				Pengelolaan Tahura Bunder						
				Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 10 ekor	Bulan	12	12			
				Dukungan 50% terhadap tercapaianya target persentase hutan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				konservasi terkelola sebesar 75,86%						
				Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura						
				Pengamanan Kawasan: a. Papan Informasi Pengamanan Hutan	Bulan	12	12			
				Papan nama pohon	Unit	60	60			
				Dokumen rencana kegiatan Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura	dokumen	1	1			
				Pengamanan Kawasan	Bulan	12	12			
				Dukungan sebesar 90% terhadap pencapaian target persentase hutan konservasi terkelola pada tahun 2020	%	100	100			
				Pengamanan Kawasan: c. Dokumen rencana kegiatan Pelatihan Pengamanan hutan	dokumen	1	1			
				Pengamanan Kawasan: b. Pembuatan sekat bakar	m2	20000	20000			
				Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, akses kelola hutan sosial (DAK)						
				Dokumen Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Bunder	Dokumen	1	1			
				Dukungan sebesar 25% terhadap tercapainya penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi sebesar 165	ha	15.72	15.72			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				ha dan penurunan kerusakan hutan sebesar						
				PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN						
				Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	batang	330000	442600			
				Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan						
				Dukungan sebesar 50% terhadap tercapainya jumlah bibit tanaman kehutanan bersertifikat yang ditanam pada tahun 2020	%	100	100			
				Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 411.600 batang, jati 2.000 batang, sengon 5.000 batang, stek jati 2.000 batang, munggur 3.000 batang, nangka 5.000 batang, sirsat 10.000 batang, dan mahoni 4.000 batang)	Batang	442600	442600			
				Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan						
				Dukungan sebesar 50% terhadap tercapainya jumlah bibit tanaman kehutanan bersertifikat yang ditanam pada tahun 2020	%	100	100			
				Dokumen Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Pegelolaan Sumber Benih	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar	Batang bibit	443000	443000			
				Dokumen Rencana Kegiatan Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan	dokumen	1	1			
				Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan	Sumber benih	4	4			
				Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kab	4	4			

e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Kondisi Umum

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu sub urusan geologi dan air tanah, mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 tetap diutamakan pada peningkatan layanan publik melalui pembinaan, penataan perizinan, peningkatan pengawasan dan pengendalian berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja yang telah tercantum dalam RPJMD dan Renstra Dinas PUP-ESDM DIY tahun 2017 – 2022. Dalam mendukung peningkatan pelayanan publik tersebut, terutama perubahan tata kelola air tanah pasca terbit UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah disusun Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 691/6927/SE/IV/2020 Tahun 2020 tentang Penerbitan Perizinan Air Tanah & Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA). Dalam rangka pengelolaan energi di Provinsi DIY sebagai upaya mendukung pencapaian saran/target nasional di bidang energi maka Pemerintah Daerah DIY menetapkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2050.

Sasaran Urusan ESDM sesuai dengan RPJMD DIY Tahun 2017 - 2022, adalah Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik dan Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang dengan 2 indikator sebagai berikut.

Tabel 3.126. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,99	98,14	99,99	101,8	100	99,99
2	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	57	71	79	111,27	115	68,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2021

Capaian indikator persentase rumah tangga berakses listrik dihitung melalui pendekatan parameter Rasio Elektrifikasi berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM RI. Sampai dengan akhir tahun 2020 data Rasio Elektrifikasi di DIY mencapai 99,99% atau kurang lebih 1.316.752 rumah tangga dari jumlah total 1.316.882 rumah tangga di DIY. Dari jumlah tersebut, sejak tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2020 Pemda DIY telah melakukan intervensi pemasangan instalasi dan sambungan listrik subsidi sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan kepada 8849 rumah tangga. Selain terus berupaya meningkatkan Rasio Elektrifikasi tersebut, yang tidak kalah penting adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas keselamatan ketenagalistrikan yang ada di masyarakat terutama yang disasar adalah rumah tangga miskin yang telah menikmati listrik namun masih menyalur atau tidak sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Indikator Kesesuaian izin air tanah dan pertambangan terhadap tata ruang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Air Tanah dan Program Pengelolaan Pertambangan. Dalam pemberian rekomendasi teknis izin air tanah dilakukan sesuai dengan arahan zona konservasi air tanah, sedangkan pemberian rekomendasi teknis izin pertambangan dilakukan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang merupakan wilayah pertambangan sebagai landasan bagi kegiatan pertambangan. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan izin air tanah dan pertambangan dilakukan agar pelaksanaan izin air tanah dan pertambangan dikelola secara baik dan benar dengan tetap menjaga konservasi sumber daya mineral dan lingkungan.

Sampai dengan tahun 2020 telah dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh izin yang terdiri dari 120 izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) dan 321 izin air tanah. Berdasarkan upaya tersebut telah terverifikasi sejumlah 29 IUP OP dan 50 izin air tanah yang memiliki kinerja baik dan benar. Sehingga capaian kesesuaian izin air tanah dan pertambangan sebesar 79 izin atau 111,27% dari target tahun 2020.



Gambar 3.55. Pembinaan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan



Gambar 3.56. Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Air Tanah



Gambar 3.57. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Pertambangan

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan ESDM dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp17.831.430.500,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi ke dalam tiga Program dan delapan Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat terealisasi sebesar Rp14.849.638.300,00 (83,28%), dengan pencapaian fisik sebesar 95,46%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1. Peningkatan pembangunan infrastrutur ketenagalistrikan khususnya di pedesaan dan daerah terpencil/terisolir dengan didukung pemanfaatan energi baru terbarukan serta konservasi energi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN**						
			2. Melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	RT	9848	10011	a. Data BDT TNP2K tidak valid	a. Verifikasi calon penerima bansos SR dilakukan pada tahun berjalan;	
				Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	Unit	72	62	b. Verifikasi calon penerima bansos SR dilakukan pada tahun berjalan;	b. Pelaksanaan lelang menunggu revisi DPA terhadap nama calon penerima bansos SR yang lolos verifikasi.	
				Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	Izin	26	26	c. Pelaksanaan lelang menunggu revisi DPA terhadap nama calon penerima bansos SR yang lolos verifikasi.		
				Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	Izin	19	19			
				Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan						
				Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik (5000 RT)	Dokumen	1	1			
				Pemasangan Sistem On Grid pada PLTS	Dokumen	1	1	-	-	
				Penyusunan SID Jaringan Listrik	Dokumen	1	1			
				Dukungan penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan sebesar 9848 Berupa Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sejumlah 900	%	100	90			
				Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	RT	900	681			
				Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan						
				Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	Unit Usaha	25	25			
				Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	Unit Usaha	50	50			
				Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan						
				Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY	Aplikasi	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan	Laporan	2	2			
				Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Bantul dan Kulon Progo	Paket	1	1			
				Dukungan Peningkatan Tertib Izin Ketenagalistrikan yang Sesuai dengan Ketentuan dari 30 Izin menjadi 45 Izin	%	100	100			
				Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	Paket	1	1			
				Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan	Laporan	2	2			
				PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH						
				Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	dusun	76	98	a. Belum ada regulasi pengelolaan air tanah pengganti UU No. 7/2004 b. Terbitnya PP 24/2018 tentang OSS dimana perizinan air tanah masuk	a. Penyesuaian proses perizinan air tanah sesuai PP No. 121/2015	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								dalam urusan Pekerjaan Umum		
				Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	%	20	20	b. Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten belum direview	b. pemberian rekomendasi teknis/persetujuan perizinan air tanah dan pertambangan sesuai pedoman zonasi pengusahaan air tanah dan kawasan peruntukan pertambangan	
				Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	Izin	26	29	c. Perda RTRW pada wilayah perbatasan antar Kabupaten tidak sinkron	c. Pengaturan, Pem-binaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengusaha-an air tanah untuk kepentingan usaha dan pengusahaan pertambangan	
				Akumulasi jumlah izin air tanah sesuai dengan ketentuan	Izin	19	21			
				Pendayagunaan Air Tanah						
				Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul (4 Unit dan 80 Unit)	Unit	84	84			
				Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kab. Gunungkidul (50 Lokasi)	Dokumen	1	1			
				Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kab. Kulon Progo (39 Lokasi)	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kab. Sleman (10 Lokasi)	Dokumen	1	1			
				Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman (6 Unit dan 120 Unit)	Unit	126	125			
				Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama (20 Lokasi)	Dokumen	1	1			
				Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul (4 Unit dan 80 Unit)	Unit	84	84			
				Dukungan 4.08% berupa pembangunan sarana dan prasarana pengambilan air tanah terhadap target penyediaan air bersih di total 228 dusun yang masuk kategori daerah sulit air prioritas utama	%	100	95,57			
				Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul (31 Lokasi)	Dokumen	1	1			
				Pengawasan Air Tanah dan Geologi						
				Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Sleman,	Laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Yogyakarta, dan Gunungkidul						
				Dukungan Peningkatan Tertib Izin Air Tanah yang Sesuai Dengan Ketentuan dari 30 izin menjadi 45 izin	%	100	100			
				Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY	Laporan	2	2			
				Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo	Laporan	1	1			
				Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi						
				Pembuatan sumur pantau air tanah dalam	Unit	4	4			
				Dukungan berupa data dan informasi rerata muka air tanah dari sumur pantau pada cekungan air tanah dari CAT di DIY terhadap upaya mempertahankan Rerata penurunan muka air tanah	%	100	100			
				Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah	Laporan	1	1			
				Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (80 Unit Usaha)	Laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (120 Unit Usaha)	Laporan	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN						
				Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	%	7,06	7,68			
				Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	Izin	11	11			
				Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	Izin	15	18			
				Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan						
				Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 2 Kabupaten (Gunungkidul, Bantul)	Dokumen	2	2			
				Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan (60 Unit Usaha)	Laporan	1	1			
				Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan	Unit Usaha	60	60			
				Dukungan sebesar 100 % terhadap Pening-katan Pengelolaan Sumber Daya Mineral pada 7,6 % pengusa-haan Kawasan Perun-tukan Pertambangan	%	100	100			
				Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Peningkatan Tertib Izin Usaha Pertambangan yang Baik dan Benar dari 19 Izin menjadi 26 Izin	%	100	100			
				Operasional Inspektur Tambang	Dokumen	1	1			
				Pendataan dan Penghi-tungan Volume Pro-duksi Usaha Pertam-bangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul	Laporan	1	1			
				Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	Laporan	2	2			
				Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo	Laporan	1	1			
				Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY	Aplikasi	1	1			

f. Urusan Perdagangan

1) Kondisi Umum

Sektor perdagangan merupakan salah satu pendukung berjalannya roda perekonomian di DIY. Perdagangan di DIY tidak hanya mencakup perdagangan di dalam negeri namun juga mencakup perdagangan luar negeri/ekspor. Dalam kurun waktu lima tahun, nilai perdagangan luar negeri DIY mampu menunjukkan kenaikan positif. Peningkatan nilai perdagangan luar negeri DIY disebabkan adanya penambahan yang cukup signifikan di dalam beberapa aspek sehingga rata-rata peningkatan mencapai 13,44% setiap tahunnya. Pada tahun 2019 nilai perdagangan luar negeri DIY tercatat sebesar 9,53% kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 12,67%. Salah satu aspek yang mempengaruhi peningkatan nilai ekspor adalah volume ekspor dimana pada tahun 2019 berada di angka 64,17(Juta kg). Namun pada volume ekspor tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan tercatat sebesar 103,51 (Juta kg). Komoditas ekspor DIY juga mengalami peningkatan, pada tahun 2019 terdapat 94 komoditas yang di ekspor sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 104 komoditas. Disamping adanya peningkatan nilai ekspor DIY, terjadi pula penurunan dibeberapa aspek dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Negara tujuan ekspor DIY pada tahun 2019 tercatat sebanyak 113 negara, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 111 negara tujuan ekspor. Jumlah eksportir juga turut berkurang dimana pada tahun 2019 tercatat ada 400 eksportir sedangkan pada tahun 2020 berkurang menjadi 373 eksportir.

Produk tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit (stk), biji vanila, minyak atsiri, stk sintetis, papan kemas, wigs (rambut palsu), kerajinan kertas, dan kerajinan kayu adalah komoditas utama ekspor DIY yang diekspor ke negara-negara tujuan ekspor terutama Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Belanda, Korea Selatan, Inggris, Australia, Perancis, China, dan Belgia. Tabel di bawah ini adalah perkembangan ekspor DIY dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.127. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Volume (Juta kg)	57,01	59,24	53,57	64,17	103,51
Nilai (Juta US $)	252,18	296,61	338,02	370,22	417,12
Komoditas	88	78	88	94	104
Negara	112	112	114	113	111
Eksportir	286	314	360	400	373

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2021

Sektor perdagangan secara umum menunjukkan kinerja yang kurang baik. Target kinerja sektor ini hanya tercapai sebesar 92,16% pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya penurunan aktivitas perdagangan dalam negeri akibat penurunan daya beli masyarakat.

Tabel 3.128. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun n (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	8.643.438	8.955.393	8.253.025	92,16	9.873.321	83,59

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2021

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui tiga Program dan enam Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp846.190.000,00. Anggaran tersebut dapat direalisasi sebanyak Rp820.132.000,00 (96,92%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
2	PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran	**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR**				1. Menurunnya omzet selama pandemi Covid-19 mengakibatkan melemahnya modal usaha pelaku usaha sektor industri. Proses promosi dan pemasaran produk pelaku usaha sektor industri tidak dapat dilaksanakan karena biaya promosi dan pemasaran tidak dapat dipenuhi. 2. Terjadi perlambatan ekspor. Hal ini dikarenakan negara-negara tujuan ekspor DIY seperti Amerika, China dan Eropa mengurangi permintaannya.	Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha sektor industri baik secara daring maupun konvensional	Urusan Perindustrian 1) Program pembinaan bagi pelaku IKM harus ditingkatkan. Disperindag DIY selalu meningkatkan program pembinaan bagi pelaku IKM. Pembinaan dilakukan mulai dari Perbaikan mutu produksi, Perbaikan akses bahan baku, Perbaikan kelembagaan, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Perbaikan akses pasar dalam negeri, dan Perbaikan akses pasar luar negeri. Peningkatan pembinaan diantaranya dilakukan melalui berbagai inovasi dalam pembinaan. Beberapa inovasi yang telah dilakukan diantaranya: a. Penyelenggaraan pelatihan IKM secara daring Pada tahun 2020 ini, terjadi pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pelatihan konvensional tidak dapat dilaksanakan Namun demikian, pembinaan pada IKM tetap dilaksanakan akan tetapi secara daring. Kelebihan
			2. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga	nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n	Juta US$	314.76	410.06	1. Kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku terutama bahan baku impor, misalnya: China sebagai pemasok bahan baku bagi Industri DIY mengalami pembatasan ekspor sehingga produsen DIY kesulitan bahan baku. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses produksi pelaku usaha	Bantuan peralatan produksi, Fasilitas konsultasi pelayanan impor bahan baku, Peningkatan kemampuan IKM dan IKM pemula melalui pelatihan IKM	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
								sektor industri yang tergantung pada bahan baku impor. 2. Menurunnya omzet selama pandemi Covid-19 mengakibatkan melemahnya modal usaha pelaku usaha sektor industri. Proses produksi sebagian IKM tidak dapat dilakukan karena biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja, energi) tidak dapat dipenuhi.		kegiatan ini, adalah jumlah peserta yang lebih banyak dan biaya yang minimalis. Pada tahun 2021 kegiatan ini akan dilaksanakan kembali. b. Penerapan ATG di Sentra Potensial Pelaku usaha di sektor industri khususnya industri kecil menengah, secara umum kurang memiliki kemampuan membeli peralatan/mesin untuk mendukung produksinya. Sementara itu, program pemberian bantuan hibah berupa mesin/peralatan dari pemerintah kepada pelaku industri kecil menengah masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha di DIY. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melalui Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG) telah melakukan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan pemanfaatan teknologi bagi industri kecil menengah. Inovasi tersebut dilakukan
			3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor	**Pelatihan dan Kemitraan Eksportir**						
			4. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha	Jumlah SKA yang diterbitkan	SKA	19599	17522			
			5. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas	Jumlah Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor Unggulan dari 40 orang peserta pelatihan yang	Orang	33	40			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sektor)	meningkat kemampuannya 82%						dengan cara meminjam pakaikan mesin-mesin berteknologi tepat guna yang dirancang dan dibuat oleh BPTTG kepada IKM. Mesin-mesin tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mesin-mesin tersebut dipinjampakaikan kepada sentra-sentra IKM. Melalui skema ini, IKM tidak perlu membeli mesin-mesin yang mereka butuhkan. Pada tahun 2020, Penerapan ATG dilaksanakan pada 4 sentra IKM. Pada tahun 2021 kegiatan tersebut diusulkan kembali dengan sasaran yang berbeda. c. Pelayanan Fasilitasi HKI secara daring Dalam rangka meningkatkan daya saing dan perlindungan hak kekayaan intelektual IKM melalui layanan fasilitasi HKI yang lebih optimal, Disperindag DIY melalui Balai Pengembangan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan layanan informasi dan fasilitasi HKI secara
			6. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif	Jumlah peserta pelatihan Eksportir baru dari 100 orang peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 82%	orang	82	82			
			7. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk industri	Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor Unggulan dari 0 orang peserta yang meningkat kapasitasnya 82%	orang	0	0			
			8. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM	Dukungan sebesar 20% (1,23 Juta US$) terhadap terwujudnya target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 2% (6,17 Juta US$) semula 308.59 Juta US$ menjadi 314,76 Juta US$	%	100	100			
				Pemasaran Perdagangan Luar Negeri						
				Dukungan sebesar 80% (4,9 Juta US$) terhadap terwujudnya	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 2% (6,17 Juta US$) semula 308.59 Juta US$ menjadi 314,76 Juta US$						daring. Melalui layanan ini, IKM dapat lebih mudah dalam mengakses informasi dan fasilitasi HKI. Sehingga diharapkan semakin banyak IKM yang mengerti pentingnya HKI dan mengakses fasilitasi dari Disperindag. d. Peningkatan Pemasaran IKM melalui Pemasaran Daring Agar produk IKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, Disperindag DIY mengupayakannya melalui revitalisasi portal e-comerce milik Disperindag DIY (jogjaplaza.com), pelatihan pemasaran daring, dan fasilitasi temu kemitraan antara IKM dengan penyelenggara marketplace potensial. Upaya tersebut dilaksanakan di tahun 2020 dan akan dilaksanakan di tahun berikutnya. 2) Peningkatan dan pendampingan manajeman IKM. Kegiatan pendampingan kepada IKM dari tahun ke tahun telah dilaksanakan
				Operasional Pokja KADIN	Tahun	1	1			
				Peningkatan omzet UKM peserta Pameran Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor sebanyak 1 Pameran (Pameran JIFFINA) dengan komoditas: Pameran JIFFINA: Mebel Kayu, Home Decor, Kerajinan Rotan.	ribu US$	20	20			
				Peningkatan omzet UKM peserta Pameran Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor sebanyak 1 Pameran (Jogja Trade Expo)	ribu US$	10	10			
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI						
				Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina	Milyar Rupiah	1.95	1.29			
				Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri						
				Peningkatan omzet peserta Pameran	Rp	1500000	10441000			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				(Pameran Tetap) semula Rp 3.5 Juta Menjadi Rp 5 Juta						terutama berkaitan dengan manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan produksi IKM. Untuk manajemen usaha secara umum Disperindag telah bersinergi dengan OPD yang memang memiliki tupoksi pembinaan dari sisi manajemen usaha secara umum yaitu Dinas Koperasi dan UKM DIY. 3) Fasilitasi Pemda DIY untuk menumbuhkan kerjasama IKM dengan Industri besar. Disperindag DIY menganggarkan kegiatan temu kemitran IKM dengan pelaku usaha besar baik untuk IKM Agro maupun IKM Logam, Sandang, dan Aneka pada tahun 2020. Karena adanya Pandemi Covid-19 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, pada tahun 2021, telah diusulkan kegiatan tersebut. 4) Pemanfaatan Kawasan Industri di Sentolo dan Piyungan Pemanfaatan kawasan Sentolo selama ini belum
				Operasional Dekranas	Tahun	1	1			
				Jumlah pelaku usaha dari 0 orang peserta bimtek pemasaran daring yang meningkat kamampuannya 80%	Orang	0	0			
				Dukungan 95% (sebesar 190 juta rupiah) terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 12,90% (200 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1,75 milyar rupiah menjadi 1,95 milyar rupiah	%	100	52			
				Kajian Konsep Kawasan pusat Penjualan Berbagai Jenis Produk - Produk Lokal Yang Terkoneksi Dengan Pengusaha Tour dan Trevel	Dokumen	0	0			
				Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri						
				Jumlah pelaku usaha dari 100 orang peserta bimtek (PKL dan sekolah pasar) yang	Orang	80	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				meningkat kamampuannya 80%						dapat dioptimalkan. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut belum ditetapkan secara resmi sebagai kawasan industri dan statusnya masih sebagai kawasan peruntukan industri. Upaya yang akan dilakukan Disperindag adalah mendorong agar kawasan Sentolo segera dikondisikan dan ditetapkan sebagai kawasan industri. Sementara itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Industri Piyungan, Disperindag mengupayakannya dengan cara mensosialisaikan dan mempromosikan kepada pelaku usaha yang relevan dengan konsep kawasan industri Piyungan. Urusan Perdagangan 1) Peningkatan kemampuan para pelaku perdagangan di DIY. Peningkatan kemampuan para pelaku perdagangan di DIY akan dilaksanakan melalui
				Dukungan 5% (10 juta rupiah) terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 12,90% (200 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1,75 milyar rupiah menjadi 1,95 milyar rupiah	%	100	100			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN						
				Persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar	persen	5.5	1.93			
				Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok						
				Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN di bawah batas toleransi	%	5	5			
				Dukungan 50% (sebesar 0,03%) terhadap terwujudnya target penurunan persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				sebesar 0,06% semula 5,61 % menjadi 5,55 %						pelatihan dan sekolah pasar. Pelatihan dilaksanakan dengan materi manajemen pemasaran, pemasaran daring, dan pemasaran melalui ekspor. Pada tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 dan *refocussing* anggaran untuk penanganan, kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian kegiatan tersebut kami rencanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021. 2) Memanfaatan peluang dengan adanya NYIA Pembangunan bandara NYIA tentu akan memperluas pasar produk IKM. Hal ini merupakan peluang bagi IKM. Peluang tersebut dapat diraih apabila produk IKM memiliki kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selama ini Disperindag berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM melalui berbagai pelatihan produksi dan
				Fluktuasi harga beras di bawah batas toleransi	%	3	3			
				Stabilnya harga bahan pokok yang dipantau	%	5	5			
				Perlindungan Konsumen						
				Dukungan 50% (sebesar 0,03%) terhadap terwujudnya target penurunan persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 0,06% semula 5,61 % menjadi 5,55 %	%	100	122			
				Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen dari 450 orang peserta yang meningkat pemahamannya 80%	orang	360	450			
				Jumlah Barang yang diujikan di laboratorium yang terakreditasi	komoditas	0	0			
				terlayaninya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK	sengketa	27	35			
				Jumlah barang yang diawasi Pengawasan	barang	300	420			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga						pemasaran, peningkatan teknologi produksi, dan fasilitasi HKI. Pada tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 dan *refocussing* anggaran untuk penanganannya, sebagian kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian kegiatan tersebut kami rencanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021. 3) Perlu dukungan sarana perdagangan daring di DIY berupa Sarana Pusat media industri daring. Agar produk IKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, Disperindag DIY mengupayakannya melalui revitalisasi portal e-comerce milik Disperindag DIY (jogjaplaza.com). Melalui aplikasi ini, diharapkan pelaku usaha dapat memasarkan produknya secara daring. Kegiata ini akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 akan dilakukan maintenance dan upgrade.

g. Urusan Perindustrian

1) Kondisi Umum

Perkembangan sektor industri di DIY pada tahun 2020 ini mengalami tantangan yang sangat berat dengan adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 sektor pengolahan memberikan kontribusi sebesar 12,85% pada struktur PDRB DIY dan pada 2020 mengalami penurunan menjadi 12,83%. Sampai dengan tahun 2019, industri kecil menengah DIY selalu mengalami pertumbuhan. Namun pada tahun 2020, sector ini mengalami penurunan baik dari sisi unit usaha, tenaga kerja, maupun nilai produksinya. Pada tahun 2019 jumlah IKM mencapai 97.013 unit usaha dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 96.597 unit usaha. Hal ini berpengaruh pada penurunan serapan tenaga kerja, dari 360.242 orang pada tahun 2019, menjadi 355.319 orang di tahun 2020. Pada tahun 2019, IKM DIY mampu berproduksi dengan nilai produksi Rp13.041.848 juta mengalami penurunan menjadi Rp12.465.398 juta di tahun 2020.

Tabel 3.129. Perkembangan IKM di DIY Tahun 2016-2020

IKM	2016	2017	2018	2019	2020
Unit usaha (UU)	90.906	91.214	94.840	97.013	96.597
Tenaga kerja (orang)	333.980	330.508	351.425	360.242	355.319
Nilai produksi (RpJuta)	3.643.222	12.463.258	12.749.271	13.041.848	12.465.398

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2021

Sektor industri pengolahan tetap merupakan contributor terbesar pada struktur PDRB DIY dengan kontribusinya sebesar 12,83%, walaupun target indicator kinerja tahun 2020 tidak tercapai. Target indicator kinerja sektor ini adalah Nilai sektor industri dalam PDRB sebesar Rp13.143.131 juta. Realisasi target ini adalah sebesar Rp12.577.438 juta atau sebesar 95,70% dari target. Tidak tercapainya target ini dikarenakan adanya penurunan permintaan produk industri dari pasar domestik maupun global akibat adanya pandemi Covid-19.

Tabel 3.130. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sektor industri pengolahan dalam	Juta Rupiah	13.201.887	13.143.131	12.577.438	95,70	14.215.611	88,48

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
PDRB DIY tahun n (Atas dasar harga konstan)							

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2021

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui tiga Program dan delapan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp2.220.533.530,00. Anggaran tersebut dapat direalisasi sebanyak Rp1.915.735.135,00 (86,27%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah terdiri dari empat Kegiatan dengan pagu sebesar Rp1.572.463.250,00 dan realisasinya sebesar Rp1.304.731.850,00. Program Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari 2 Kegiatan dengan pagu sebesar Rp356.469.000,00 dan realisasinya sebesar Rp329.334.904,00. Program Peningkatan Teknologi Industri terdiri dari dua Kegiatan dengan pagu sebesar Rp291.601.280,00 dan realisasinya sebesar Rp281.668.381,00. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
3	PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran	**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**				1. Menurunnya omzet selama pandemi corona mengakibatkan melemahnya modal usaha pelaku usaha sector industri. Proses promosi dan pemasaran produk pelaku usaha sector industry tidak dapat dilaksanakan karena biaya promosi dan pemasaran tidak dapat dipenuhi. 2. Terjadi perlambatan ekspor. Hal ini dikarenakan negara-negara tujuan ekspor DIY seperti Amerika, China dan Eropa mengurangi permintaannya.	Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha sector industry baik secara daring maupun konvensional	Urusan Perindustrian 1) Program pembinaan bagi pelaku IKM harus ditingkatkan. Disperindag DIY selalu meningkatkan program pembinaan bagi pelaku IKM. Pembinaan dilakukan mulai dari Perbaikan mutu produksi, Perbaikan akses bahan baku, Perbaikan kelembagaan, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Perbaikan akses pasar dalam negeri, dan Perbaikan akses pasar luar negeri. Peningkatan pembinaan diantaranya dilakukan melalui berbagai inovasi dalam pembinaan.
			2. Peningkatankelancaran distribusi, stabilisasi harga	Nilai Produksi IKM	Juta Rupiah	13238739	12561595.48	1.Kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku terutama bahan baku impor, misalnya: China sebagai pemasok bahan baku bagi Industri DIY mengalami pembatasan ekspor sehingga produsen DIY kesulitan bahan baku. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses produksi pelaku usaha sector industri yang tergantung pada bahan baku impor. 2.Menurunnyaomzetselamapandemi corona mengakibatkan melemahnya modal usaha pelaku usaha sector industri. Proses produksi sebagian IKM	Bantuan peralatan produksi, Fasilitas konsultasi pelayanan impor bahan baku, Peningkatan kemampuan IKM dan IKM pemula melalui pelatihan IKM	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
								tidak dapat dilakukan karena biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja, energi) tidak dapat dipenuhi.		Beberapa inovasi yang telah dilakukan diantaranya:
			3. Memperkuat dan memperluasperdagangan internasionaldengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor	Nilai Produksi IKM	Juta Rupiah	13238739	12561595.48			a. Penyelenggaraan pelatihan IKM secara daring Pada tahun 2020 ini, terjadi pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pelatihan konvensional tidak dapat dilaksanakan
			4. Penciptaan wirausaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha	**PelatihanIndustri Kecil MenengahAgro**						
			5. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sektor)	Jumlahpeserta Bemtek/Pelatihan di Kab. Gunungkidul (Mebel kayu, bahan bangunan dari kayu, kerajinan kayu, IKM Pemula Kayu, IKM Pemula Bambu, Olahan Pangan, Minuman Segar), Bantul (Mebel Bambu, Kerajinan Bambu, IKM Pemula Bambu,Bahan Bangunan dari Kayu, Olahan Pangan), Kota (OlahanPangan), Kulon Progo (Kerajinan Bambu, Olahan Coklat,	Orang	78	78			Namun demikian, pembinaan pada IKM tetap dilaksanakan akan tetapi secara daring. Kelebihan kegiatanini, adalah jumlah peserta yang lebih banyak dan biaya yang minimalis. Pada tahun 2021 kegiatan ini akan dilaksanakan kembali. b. Penerapan ATG

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
				Minuman Segar) dari 540 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%						di Sentra Potensial Pelakuusaha di sector industry khususnya industry kecil menengah, secara umum kurang memiliki kemampuan membeli peralatan/mesin untuk mendukung produksinya. Sementara itu, program pemberian bantuan hibah berupa mesin/peralatan dari pemerintah kepada pelaku industry kecil menengah masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha di DIY. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melalui Balai
			6. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif	Jumlah peserta Bimtek/Pelatihan IKM Mebeldari 40 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	Orang	26	26			
			7. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk industri	Jumlah peserta Bimtek/Pelatihan IKM Olahan Pangan dari 40 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	Orang	26	26			
			8. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industry untuk IKM	Data dan Road Map Pengembangan IKM Tembakau DIY	Buku	1	1			
				Jumlahpeserta Bimtek/Pelatihan di Samigaluh (Mebel Kayu, Olahan Kopi), Girimulyo (Mebel Bambu, Olahan Kopi), Nglipar (Kerajinan Kayu), Gedangsari (Olahan Pangan), Kokap (Bahan Bangunan dari Kayu, IKM Pemula Kayu, OlahanPangan), Sleman (Olahan Kopi, Olahan Pangan) dari	Orang	52	52			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
				420 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%						Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG) telah melakukan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan pemanfaatan teknologi bagi industry kecil menengah. Inovasi tersebut dilakukan dengan cara meminjampakaikan mesin-mesin berteknologi tepat guna yang dirancang dan dibuat oleh BPTTG kepada IKM. Mesin-mesin tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mesin-mesin tersebut dipinjampakaikan kepada sentra-sentra IKM. Melalui skema ini, IKM tidak
				Jumlah peserta Bimtek/Pelatihan Olahan Pangan dan Kerajinan Bambu dari 100 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	Orang	0	0			
				Jumlah produk yang terfasilitasi pendaftaran sertifikasi MD	KategoriProduk	4	4			
				Jumlah peserta Bimtek/Pelatihan IKM Olahan Pangan dari 20 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	Orang	13	13			
				Dukungan sebesar 5.851.523 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 13.238.739 juta rupiah	%	100	100			
				Kemitraan IKM Agro						
				Peningkatan Omzet IKM setelah Test Pasar sebanyak 0 IKM	Rp	0	0			
				Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 0	IKM	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
				IKM yang bermitra sebanyak 12%						perlumembeli mesin-mesin yang mereka butuhkan. Pada tahun 2020, Penerapan ATG dilaksanakan pada 4 sentra IKM. Pada tahun 2021 kegiatan tersebut diusulkan kembali dengan sasaran yang berbeda. c. Pelayanan Fasilitasi HKI secara daring Dalam rangka meningkatkan daya saing dan perlindungan hak kekayaan intelektual IKM melalui layanan fasilitasi HKI yang lebih optimal, Disperindag DIY melalui Balai Pengembangan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan layanan
				Dukungan sebesar 3.150.820 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 13.238.739 juta rupiah	%	100	100			
				PelatihanIndustri Kecil MenengahLogam, Sandang dan Aneka						
				Jumlah peserta Bemtek/Pelatihan IKM Pakaian Jadi, Produk Kulit, Kain Perca, dan Pande Besi di Kab. Bantul dan Gunungkidul dari 100 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	Orang	65	75			
				Jumlah peserta Pelatihan Sandang Logam dan Aneka dari 60 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	Orang	39	39			
				Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 40 orang peserta yang meningkat	Orang	26	40			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
				ketrampilannya sebesar 65 %						informasi dan fasilitasi HKI secara daring. Melalui layanan ini, IKM dapat lebih mudah dalam mengakses informasi dan fasilitasi HKI. Sehingga diharapkan semakin banyak IKM yang mengerti pentingnya HKI dan mengakses fasilitasi dari Disperindag. d.Peningkatan Pemasaran IKM melalui Pemasaran Daring Agar produk IKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, Disperindag DIY mengupayakannya melalui revitalisasi portal e-comerce milik Disperindag DIY
				Jumlah peserta Pelatihan Sandang Logam dan Aneka 80 orang yang meningkat Ketrampilannya sebesar 65 %	Orang	0	0			
				Dukungan sebesar 2.753.658 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 13.238.739 juta rupiah	%	100	100			
				Jumlah peserta Pelatihan IKM IT 20 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	Orang	13	20			
				Jumlah peserta Bemtek/Pelatihan IKM Produk Sandang dari 100 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	Orang	0	0			
				Kemitraan IKM Logam, Sandang dan Aneka						
				Peningkatan Omzet IKM setelah Test Pasar dengan komoditas: Komponen Otomotif, Mesin, Peralatan RumahTangga, Fashion dan Aneka	Juta	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
				Dukungansebesar 1.482.739 juta rupiah terhadapterwujudnyatarget Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 13.238.739 juta rupiah	%	100	100			(jogjaplaza.com), pelatihan pemasaran daring, dan fasilitasi temu kemitraan antara IKM dengan penyelenggara marketplace potensial. Upaya tersebut dilaksanakan di tahun 2020 dan akan dilaksanakan di tahun berikutnya. 2) Peningkatan dan pendampingan manajeman IKM. Kegiatan pendampingan kepada IKM dari tahun ketahun telah dilaksanakan terutama berkaitan dengan manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan produksi IKM.
				Jumlah IKM peserta temu kemitraa ndari 0 IKM yang bermitra sebanyak 12%	IKM	0	0			
				Jumlah peserta Pelatihan IKM IT 20 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	Orang	13	20			
				PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
				Jumlah HAKI yang terdaftar	Unit	120	277			
				Edukasi dan Advokasi HKI						
				Jumlah peserta sosialisasi HKI yang meningkat pemahamannya 100%	Orang	400	400			
				Jumlah pelaku usaha sector industri dan perdagangan yang berkonsultasi	Orang	70	70			
				Dukungan 50% terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) daritahun 2019 ke 2020 sebesar 20 buah HKI	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
				semula 100 HKI menjadi 120 HKI						Untuk manajemen usaha secara umum Disperindag telah bersinergi dengan OPD yang memang memiliki tupoksi pembinaan dari sisi manajemen usaha secara umum yaitu Dinas Koperasi dan UKM DIY. 3) Fasilitasi Pemda DIY untuk menumbuhkan kerjasama IKM dengan Industri besar. Disperindag DIY menganggarkan kegiatan temu kemitraan IKM dengan pelaku usaha besar baik untuk IKM Agro maupun IKM Logam, Sandang, dan Aneka pada tahun 2020. Karena adanya Pandemi Covid-19 kegiatan
				PelayananPendaftaran HKI						
				Dukungan 50% terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 20 buah HKI semula 100 HKI menjadi 120 HKI	%	100	100			
				Jumlah pelaku usaha sector industri dan perdagangan yang difasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	IKM dan Kelompok	277	277			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
										tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, pada tahun 2021, kami mengusulkan kegiatan tersebut kembali. 4) Pemanfaatan Kawasan Industri di Sentolo dan Piyungan Pemanfaatan kawasan Sentolo selama ini belum dapat dioptimalkan. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut belum ditetapkan secara resmi sebagai kawasan industri dan statusnya masih sebagai kawasan peruntukan industri. Upaya yang akan dilakukan Disperindag adalah mendorong agar kawasan Sentolo segera

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut rekomendasi DPRD
										dikondisikan dan ditetapkan sebagai kawasan industri. Sementara itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Industri Piyungan, Disperindag mengupayakannya dengan cara menyosialisaikan dan mempromosikannya kepada pelaku usaha yang relevan dengan konsep kawasan industry Piyungan.

h. Urusan Ketransmigrasian

1) Kondisi Umum

Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama pembangunan ekonomi di kawasan desa yang masih terisolasi atau tertinggal. Transmigrasi memiliki nilai yang strategis dalam konteks ketersediaan sumber daya manusia yang produktif dan tanah atau lahan untuk dikembangkan oleh transmigran. Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Tabel 3.131. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2016	80
2	2017	48
3	2018	36
4	2019	50
5	2020	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2021

Pada tabel di atas terlihat pengiriman transmigran sampai tahun 2018 mengalami penurunan, tahun 2019 mengalami peningkatan sedangkan tahun 2020 tidak ada pemberangkatan transmigran karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk tidak melaksanakan penempatan transmigran karena dampak pandemi Covid-19. Pemda DIY selama kurun waktu 2016-2020 telah memberangkatkan transmigran sebanyak 214 KK.

Urusan ketransmigrasian sesuai RPJMD Tahun 2017-2022 mendukung sasaran terwujudnya kesempatan kerja, yang dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi yaitu perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi. Indikator yang digunakan adalah jumlah kesempatan kerja dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 2.126.316 orang atau capaian realisasi sebesar 103,12%.

Tabel 3.132. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2019-2020 dan Capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah kesempatan kerja	orang	2.138.014	2.061.962	2.126.316	103,12	2.149.001	98.94

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2021

Capaian ini bersumber data dari hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) bulan Agustus 2020 Badan Pusat Statistik yaitu jumlah angkatan kerja yang bekerja. Secara umum pelaksanaan strategi perluasan kesempatan kerja telah berhasil dengan baik. Tenaga Kerja terdampak Covid-19 mendapatkan pembekalan ketrampilan sehingga mampu bergeser bekerja di sektor informal. Sedangkan pelaksanaan strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yaitu tidak melakukan pengiriman transmigrasi pada tahun 2020.

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020, Urusan Ketransmigrasian masuk dalam Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi dengan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.750.808.000,00 untuk melaksanakan satu Program dan tujuh Kegiatan. Adapun realisasi keuangan hanya sebesar Rp1.609.419.000,00 (91,92%) karena ada efisiensi anggaran. Sedangkan realisasi fisik program tersebut dapat tercapai sebesar 100%. Dari anggaran sebesar Rp1.750.808.000,00, yang dialokasikan untuk kegiatan transmigrasi adalah sebesar Rp11.000.000,00 dengan realiasi anggaran sebesar Rp10.650.000,00 (96,81%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Berikut tabel rincian capaian kinerja program dan kegiatan pada Urusan Ketransmigrasian.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
3	TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Terwujudnya Kesempatan Kerja	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN**				Pola pikir peserta pelatihan sebagian besar kurang berminat kerja keluar DIY	Pemantauan penempatan lulusan pelatihan memanfaatkan tehnologi informasi	1. Merubah pola pikir adalah pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam mengatasi permasalahan ini akan diawali melalui penyusunan grand desain pembangunan karakter Angkatan Kerja Istimewa dan disosialisasikan ke seluruh masyarakat secara bertahap.
			2. Terwujudnya hubungan industrial yang konusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja	Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran	orang	10790	11019	Masih adanya kesempatan kerja yang tidak bisa terisi oleh pencari kerja	Koordinasi lintas sektor untuk memaksimalkan pertumbuhan kesempatan kerja	
			3. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	**Penempatan Tenaga Kerja**				Terlambatnya proses regenerasi mediator	Mengoptimalkan peran Asosiasi Mediator Hubungan Industrial dan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia di DIY	2. Kekurangan sumber daya manusia disiasati dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), yaitu penyelesaian kasus secara daring dan pembuatan sistem Pengaduan Ketenagakerjaan. Cara ini ditempuh dalam rangka optimalisasi kinerja mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan.
				Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) tenaga Kerja AKAD	orang	100	100			3. Koordinasi lintas sektor untuk mendorong adanya penambahan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
				Dukungan 9.38% terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dantransmigran sebanyak 10.790 orang	persen	100	100			
				Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja						
				Dukungan 54, 81 % terhadap target jumlah	persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				penempatan tenaga kerja,perluasan kerjadan transmigran sebanyak 10.790 orang						Perguruan Tinggi (PT) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), sehingga penempatan lulusan bisa lebih optimal dan lebih ada jaminan keamanan bagi pencari kerja.
				Penyediaan informasi pasar kerja	bulan	12	12			
				Pembentukan Kesempatan Kerja						
				Dukungan 24,85 % terhadap terwujudnya jumlah penempatan tenaga kerja,perluasankerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	persen	100	100			
				Pembentukan Kewirausahaan Tenaga kerja mandiri (TKM)	orang	80	80			
				Penciptaan kesempatan kerja darurat	lokasi	7	7			
				Padat karya infrastruktur	lokasi	50	50			
				Penyelenggaraan Transmigrasi						
				Dukungan 0,94 % terhadap target jumlah penempatan tenagakerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	persen	100	100			
				Penyelenggaraan Transmigrasi	KK	0	0			
				Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia						
				Dukungan 5.06 % target jumlah penempatan tenagakerja,perluasan	persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang						
				Laporan rekomendasi PMI Unprocedural	laporan rekomendasi	4	4			
				Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia	orang	0	0			
				Pemantauan Lembaga Penempatan						
				Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penca	perusahaan	0	0			
				Dukungan 4,69% terhadap target jumlah penempatan tenagakerja,perluasan kerja dan transmigran 10.790 orang	persen	100	100			

3. PENUNJANG URUSAN

a. Perencanaan Pembangunan

1) Kondisi Umum

Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga berpedoman pada Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2020, sesuai dengan RPJMD 2017-2022 untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, ditetapkan indikator yaitu persentase ketercapaian sasaran pembangunan, dengan target sebesar 84,5%. Tingkat capaian kinerja pelaksanaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.133. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	95,95	84,5	67,09	79,39	85,5	78,47

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2021

Target kinerja urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2020 sebesar 84,5% dengan realisasi sebesar 67,09%, sehingga persentase ketercapaian sasaran sebesar 79,39%. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah diperoleh dari perhitungan jumlah indikator sasaran perangkat daerah yang tercapai indikator dibagi total indikator

sasaran perangkat daerah yang ada di RPJMD dikali 100%. Realisasi sasaran tidak memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak sasaran perangkat daerah yang tidak tercapai, dari seluruh jumlah indikator sasaran Perangkat Daerah yaitu 79 indikator sasaran, sebanyak53 indikator sasaran yang tercapai dan 26 indikator sasaran yang tidak tercapai.

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp8.244.498.170,00 yang dibagi ke dalam 11 Program dan 29 Kegiatan. Dari total anggaran yang dialokasikan, realisasi anggaran adalah sebesar Rp6.838.414.056,00 atau 82,94%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sengguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda.	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				1. Kondisi sosial, politik dan karakter SDM yang berbeda sehingga proses sinkronisasi terhadap perencanaan pembangunan menjadi sangat kompleks; 2. Proses pengendalian pembangunan adalah sebuah proses yang kompleks (bagaimana desain prosesnya, desain kertas kerja sebagai tool untuk mengukur atau menilai sustansi pengendalian, instrumen penunjang, dan lain sebagainya) sangat dipengaruhi oleh sumber	2. Untuk sasaran Renstra periode selanjutnya diusahakan untuk tidak berubah selama 5 tahun sehingga setiap tahunnya dapat diperbandingkan secara proporsional; 3. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPEDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 4. Mengusahakan untuk menyesuaikan pedoman penyusunan penetapan kinerja yang dijabarkan ke dalam triwulan jika memungkinkan;	TINDAK LANJUT REKOMENDASI UMUM: 1.Pemerintah DIY akan terus berkomitmen dan fokus dalam penanggulangan kemiskinan terutama dengan disahkannya Peraturan Daerah No 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam hal perbaikan data kemiskinan diterbitkan Peraturan Gubernur DIY No. 139 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pergub ini menjadi dasar hukum verifikasi validasi data kemiskinan dari tingkat desa/kelurahan. Pada Pergub ini dijelaskan bahwa proses pendataan tersebut dimulai dari musyawarah desa/kelurahan
			2. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			pembangunan dan alternatif kebijakan.					daya yang tersedia (waktu, SMD, biaya, instrumen penjunjang) sehingga hasil pengendalian sulit sekali untuk mencerminkan informasi yang ideal	5. Menyajikan pelaporan kinerja secara lengkap sesuai dengan pedoman yang berlaku (informasi terkait dengan capaian kinerja); 6. Meningkatkan evaluasi internal Bappeda DIY secara rutin.	dilanjutkan validasi hasil musyawarah desa/kelurahan oleh pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut dimutakhirkan dua kali dalam satu tahun. Selanjutnya, data ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan dilaporkan ke Gubernur melalui Dinas Sosial DIY. Pada tahun 2021 direncanakan dibentuk tim evaluasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdiri dari unsur Sekda, Bappeda, Biro Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota sebagai upaya meningkatkan kualitas verifikasi /validasi di tingkat bawah. Dalam aspek intervensi program kegiatan penanggulangan kemiskinan, selain intervensi melalui
			3. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			
			4. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						
			5. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	unit	11	11			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			indikator pembangunan,							jaminan sosial yang sifatnya charity juga melalui intervensi yang sifatnya pemberdayaan masyarakat terutama peningkatan skill agar masyarakat miskin memiliki kemampuan sehingga bisa bekerja untuk meningkat kesejahteraanya. Upaya pemberdayaan masyarakat juga didukung oleh bantuan permodalan dan dukungan akses pasar. Desa Prima misalnya, program ini menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan, diarahkan lebih menyasar pada lokasi kantong kemiskinan, pemberian bantuan permodalan dan didukung pemasaran produknya sampai mandiri. Selain itu juga pemerintah memberikan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi, Beasiswa untuk siswa tidak mampu. 2.
			6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator.	Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: Penilaian dan Penyusutan Arsip	boks	150	150			
			7. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiyaan pembangunan.	Penyediaan Alat Tulis Kantor: Alat tulis kantor	jenis	69	69			
			8. Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal BAPPEDA DIY dan dengan sistem informasi di luar BAPPEDA DIY yang terkait.	Penyediaan jasa sewa lahan/tanah/hewan/tanaman : sewa tanaman	Bulan	12	12			
			9. Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan	Penyediaan Jasa surat menyurat: Surat keluar	surat	3000	4562			
			10. Menyempurnaka	Penyediaan Jasa surat menyurat: Surat masuk	surat	5000	5000			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			n mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik/program strategis bersama yang konsisten dan terukur							Pengurangan kesenjangan wilayah terus dilakukan diantaranya melalui pengembangan kawasan selatan DIY. Upaya ini akan terus dilakukan dengan melanjutkan dan mengawal rencana pengembangan sarana dan prasarana yang akan mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan maupun penyediaan infrastruktur dasar wilayah. Pengembangan SPAM Kamijoro, Jalur Jalan Lintas Selatan sebagai pendukung YIA merupakan bagian dari pelaksanaan hal-hal tersebut. Diharapkan dengan tumbuhnya kawasan-kawasan perkonomian baru akan berdampak pada meningkatnya perekonomian daerah/kabupaten/kota yang bermuara pada menurunnya ketimpangan wilayah di DIY. 3. Pertanian
			11. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya	Lem-bar	75000	40531			
			12. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, SINTAL, JOGJA DATAKU, dll) sesuai dengan kebutuhan.	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor: Pembersihan kantor BAPPEDA DIY	bulan	12	12			
			13. Menyempurnaka	Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	jenis	19	19			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			n mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik/program strategis bersama yang konsisten dan terukur.	Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: Penataan Arsip	boks	150	150			memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan pangan, dimana pangan yang tidak mencukupi akan memunculkan permasalahan sosial dan ekonomi. Pertanian juga menyediakan lapangan pekerjaan dan menjadi tulang punggung masyarakat. Selain itu, pertanian juga berperan sebagai penyangga kesehatan masyarakat. Dalam masa pandemi Covid-19 petani adalah juga pejuang selama penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Untuk itu, ketahanan dan kemandirian pangan tetap menjadi perhatian serius bagi Pemda DIY dan akan selalu diupayakan lebih ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian
				Penyediaan alat - alat/perlengkapan	jenis	2	2			
				Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - surat kabar	jenis	4	4			
				Pembayaran jasa langganan 11 akun video converence	bulan	9	9			
				Penyediaan Jasa surat menyurat: Pengiriman dokumen	kali	100	200			
				Pembayaran tagihan rekening telepon	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	unit	5	5			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	11	11			
				Bahan bacaan dan Perundang-undangan: Buku Perundang-undangan	paket	1	1			
				Dukungan 20,01% terhadap terwujudnya adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Penyediaan Jasa surat menyurat: benda pos	Lem -bar	2050	1200			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Barang cetakan	jenis	15	15			untuk meningkatkan kontribusi dalam PDRB, Pemda DIY telah melakukan berbagai intervensi mulai dari on farm sampai dengan off farm dengan harapan dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas pertanian yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY di sektor pertanian diantaranya yaitu: Tahun 2020: 1. Peningkatan kapasitas SDM petani melalui berbagai pelatihan mulai dari on farm sampai off farm yang diikuti dengan bantuan sarpras pertanian. 2. Untuk membantu pemasaran produk pertanian, dilakukan optimalisasi peran TTIC baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19 3. Pemberian
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	bulan	12	12			
				Dukungan 2,45 % terhadap terwujudnya adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Honor analis perencanaan program dan anggaran	bulan	12	12			
				Honor pengelola keuangan	bulan	12	12			
				Honor pengelola kepegawaian	bulan	12	12			
				Honor pengelola barang	bulan	12	12			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	bulan	12	12			
				Tersedianya makan dan minuman rapat	bulan	12	12			
				Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu:- Pelaksanaan workshop/ rapat kerja	kali	1	1			
				Perlengkapan Motivasi Kerja Pegawai Bappeda	orang	150	150			
				Dukungan 77,54% terhadap terwujudnya adminstrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu:- Penerbitan Journal	kali	1	1			insentif kepada petani berupa fasilitasi pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, alsintan, Jalan Usaha Tani, perbaikan irigasi dan lain-lain. 4. Penyusunan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 5. Kajian Roadmap Pengembangan Penganekaragaman Pangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan 6. Kajian pendukung pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 7. Pengembangan Lumbung Mataraman 8. Pemda DIY berkomitmen untuk mengentaskan desa rawan pangan sebagaimana menjadi target dalam RPJMD 2017-2022. Kerjasama sinergis dengan para pihak dilakukan agar permasalahan kemiskinan di desa-desa tersebut dapat
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Jawa)	bulan	12	12			
				Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu:- Penilaian Angka Kredit	kali	2	2			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor						
				Rehabilitasi Depo Arsip	unit	1	1			
				Dukungen 4,02% terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Pengadaan Almari	unit	1	1			
				Pengadaan Thermometer Infrared	buah	3	3			
				Pengadaan *Air Conditioner*	unit	4	4			
				Dukungan 24,91 % terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Pengadaan Pompa Air	unit	1	1			
				Pengadaan LCD	unit	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan Printer	unit	7	7			diselesaikan secara tuntas. Terkait dengan akses pangan, Pemda DIY telah melakukan intervensi dengan bantuan modal melalui gapoktan-gapoktan di desa rawan pangan. Usulan 2021 1. Asuransi usaha tani padi 2. Uji coba kartu tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi 3. Adanya pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum bagi generasi muda di DIY untuk melirik sektor pertanian. Bencana pandemi Covid-19 membuka kesadaran generasi muda bahwa sektor pertanian merupakan â€œtambang emas tanpa batasâ€•, yang akan selalu diperlukan dan memegang peranan penting di setiap kondisi. Adanya pandemi ini telah memunculkan peluang-peluang bisnis di sektor pertanian dengan cara-
				Pengadaan Komputer PC	unit	9	9			
				Pengadaan komputer Note Book	unit	4	4			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Gedung kantor terpelihara	unit	3	3			
				Dukungan 21,72 % terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Kendaraan dinas/operasional terpelihara:1. Kendaraan dinas roda 4	unit	11	11			
				Kendaraan dinas/operasional terpelihara: 2. Kendaraan dinas roda 2	unit	3	3			
				Dukungan 35,42 % terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Dukungan 13,94 % terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100			
				Pemeliharaan CCTV	unit	1	1			
				Pemeliharaan Generator set	unit	1	1			
				Pemeliharaan meja kursi tamu	set	2	2			
				Pemeliharaan AC split	unit	52	52			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Jaringan komputer & internet	paket	1	1			cara baru yang menarik bagi kaum milenial. Oleh karenanya, pendidikan dan pelatihan pertanian bagi generasi muda akan ditingkatkan melalui pengoptimalan peran BPP untuk ikut membina generasi muda agar berminat bergerak di sektor pertanian, penggunaan alat mekanisasi pertanian yang beradaptasi dengan teknologi 4.0, serta pengembangan sistem informasi pertanian untuk penyebaran informasi berbasis IT. 4. Penyusunan Pergub Tindak lanjut Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 9. Peningkatan kapasitas SDM petani melalui berbagai pelatihan mulai dari on farm sampai off farm yang diikuti dengan bantuan sarpras pertanian 5. Penyusunan Draft Rapergub Insentif dan disinsentif PLP2B 6.
				Pemeliharaan Mesin tik manual	unit	10	10			
				Pemeliharaan Sound system	unit	5	5			
				Pemeliharaan Kursi Kerja	buah	20	20			
				Pemeliharaan Meja Kerja	buah	20	20			
				Pemeliharaan Faksimile	unit	2	2			
				Pemeliharaan Filling cabinet	buah	12	12			
				Pemeliharaan Tabung pemadam kebakaran	unit	6	6			
				Pemeliharaan AC floor standing	unit	4	4			
				Pemeliharaan Printer	unit	20	20			
				Pemeliharaan Komputer PC	unit	40	40			
				Pemeliharaan Almari	buah	12	12			
				Pemeliharaan LCD proyektor	unit	6	6			
				Pemeliharaan Komputer note book	unit	16	16			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Bahan LKJ dan LKPJ Tahun 2019	Dokumen	2	2			
				LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2019	Dokumen	1	1			
				Dukungan 3,62% terhadap terwujudnya penatausahaan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA						Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan yaitu dengan mendorong rumah tangga untuk memanfaatkan lahan di sekitarnya (termasuk pekarangan) untuk ditanami tanaman pangan maupun hortikultura guna pemenuhan gizi keluarga. 7. Kajian Pembentukan Pusat Grosir Pangan 8. Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Pendukung Pengendalian Inflasi 9. Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama Pendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi 10. Kajian Pemulihan Sektor Perekonomian Terdampak Covid-19 Pemda DIY juga berkomitmen untuk pengembangan sektor perikanan kelautan
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	Laporan	1	1			
				Dukungan 12,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	%	100	100			
				Laporan Keuangan Audited	Laporan	1	1			
				Laporan Keuangan bulanan	Laporan	12	12			
				Laporan Keuangan Semester	Laporan	2	2			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Pengelola Teknologi Informasi (pengelola jaringan internet)	bulan	12	12			
				Dukungan 87,41 % terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	%	100	100			
				ROPK Perangkat Daerah 2020	Dokumen	1	1			
				Forum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Renja Perangkat Daerah 2021	Dokumen	1	1			sebagai salah satu wujud pemanfaatan potensi dan pengembangan wilayah selatan DIY yang berbatasan dengan laut dengan garis pantai sepanjang 113 Km2. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain: a. Pemda DIY telah menyelenggarakan berbagai bimtek dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan nelayan untuk meningkatkan produksi ikan di DIY. Intervensi dilakukan melalui berbagai bentuk fasilitasi bagi nelayan yang pada prinsipnya memberikan kemudahan dan memberikan bekal yang cukup kepada nelayan. Pelatihan yang diselenggarakan terdiri dari pelatihan teknis penangkapan ikan, serta pelatihan pendukung lainnya seperti bimtek pelayanan pelabuhan, pengelolaan pelabuhan
				Renja Perangkat Daerah Perubahan 2020	Dokumen	1	1			
				RKA Perubahan 2020	Dokumen	1	1			
				RKA 2021	Dokumen	1	1			
				DPA Perubahan 2020	Dokumen	1	1			
				ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2020	Dokumen	1	1			
				DPA 2021	Dokumen	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Dukungan 3,01 % terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	%	100	100			
				Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan	Dokumen	12	12			
				Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV	Dokumen	4	4			
				Dokumen Laporan Monev Bappeda Tahunan	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										dan keselamatan pelayaran termasuk didalamnya pelatihan untuk nelayan dalam rangka pemenuhan kelengkapan untuk perijinan. b. Untuk mengembangkan wilayah pansela dengan tetap mengupayakan perwujudan Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai dapat beroperasi. Pada tahun 2021 telah diusulkan melalui dana APBN untuk penyelesaian Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto. Untuk pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan membuka akses jalur selatan, maka sebagai alternatif akan dikembangkan Pelabuhan Gesing di Gunungkidul (master plan masih dalam usulan 2021). 4. Kesenjangan yang terjadi di DIY adalah kesenjangan penduduk dengan pendapatan tinggi dengan pendapatan rendah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										dan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Untuk itu diperlukan program untuk meningkatkan kepedulian sosial dan revitalisasi budaya gotong royong. Disamping itu, perlu juga mendorong kapasitas lembaga di desa dalam pengelolaan dana desa dan manajemen pemerintahan di desa dengan harapan terjadi peningkatan ekonomi masyarakat desa sehingga bisa menurunkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan Kesenjangan pendapatan terjadi karena pertumbuhan pendapatan kelompok berpendapatan rendah jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan kelompok berpendapatan tinggi. Untuk mengurangi ketimpangan, program

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										dan kegiatan pemberdayaan ekonomi diprioritaskan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin diantaranya melalui kegiatan yang bersifat meningkatkan kapasitas usaha ekonomi rakyat. Dilihat dari sektor lapangan usaha, tenaga kerja atau unit usaha mikro dan kecil di DIY didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, Pertanian dan usaha jasa di bidang pariwisata. Beberapa kegiatan yang rencana akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain: a. Untuk menyasar usaha mikro dan kecil baik terutama sektor industri pengolahan Pemda DIY melakukan pelatihan dan kemitraan Industri Kecil. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan untuk meningkatkan daya

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										saing produk lokal sementara itu kegiatan kemitraan dilakukan untuk meningkatkan akses pasar. b. Untuk menumbuhkan kemampuan kemandirian berusaha dilakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan dengan sasaran pada lokasi kantong-kantong kemiskinan atau yang biasa disebut dengan Desapreneur. c. Untuk meningkatkan kapasitas usaha serta kesempatan kerja di sektor pariwisata dilakukan pelatihan kepariwisataan baik pada tingkat SDM maupun kelembagaan usaha. Kegiatan ini diutamakan menyasar pada desa/kampung wisata dengan tujuan manfaat geliat pariwisata dapat dirasakan oleh komunitas atau masyarakat secara langsung. d. Pengurangan kesenjangan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										pendapatan dilakukan juga dengan strategi mengurangi pengangguran melalui kegiatan pembentukan kesempatan kerja baik dengan padat karya infrastruktur maupun pembekalan kewirausahaan tenaga kerja mandiri. Pada sektor formal, untuk mengurangi pengangguran dilakukan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 5. Penentuan program dan kegiatan serta besaran anggaran, fokus dan lokus sudah dilakukan melalui proses identifikasi dampak terhadap kinerja yang diharapkan termasuk peningkatan PDRB serta aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lainnya. Di tahun mendatang, proses identifikasi dan analisis dampak diharapkan dapat dilakukan lebih efektif dan akurat

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										sehingga dampak anggaran belanja pemerintah mencerminkan intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat DIY. Proses identifikasi dan analisis membutuhkan data yang akurat dan terkini sehingga penyediaan data-data tersebut akan diupayakan untuk terwujud di masa mendatang untuk lebih mengoptimalkan identifikasi dan analisis masalah pembangunan. Belanja Pemerintah secara langsung apabila dilihat dari PDRB menurut Pengeluaran mendukung sebesar 14 % dari total PDRB. Pemerintah Daerah DIY di dalam menentukan program dan kegiatan pada peningkatan perekonomian DIY berpedoman pada RPJMD DIY khususnya pada program dan kegiatan yang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										mendukung capaian sasaran Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat dan sasaran Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan. Apabila dilihat alokasi anggaran untuk mendukung capaian sasaran tersebut Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan anggaran sebesar 23,25 % untuk program dan kegiatan pengungkit perekonomian DIY dengan target Ekonomi DIY pada Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,26 %. Realisasinya pada Tahun 2019 ekonomi DIY tumbuh sebesar 6,60%, melebihi apa yang ditargetkan. 6. Kinerja bidang aparatur dan keuangan yang sudah dinilai bagus, akan kami pertahankan dan terus tingkatkan dengan berbagai inovasi kegiatan yang akan kami lakukan. Terkait dengan kinerja

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										aparatur, berbagai kegiatan yang akan kami lakukan masih tetap berlandaskan pada penanaman nilai-nilai budaya kerja dengan inovasi pada implementasinya, sedangkan untuk mempertahankan kinerja keuangan, kami akan menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan dan akuntansi Pemerintah. Pemda DIY secara bertahap mengupayakan Integrasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah baik dari level pemda DIY, OPD, s/d level individu (e-SKP). Integrasi yang telah berjalan dengan baik pada fase perencaanaan, penganggaran dan pengendalian serta monev kinerja pada level pemda dan OPD. Adapun pada pengukuran kinerja individu akan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										diupayakan dapat bersinergi dengan fase integrasi yang telah berjalan tersebut. Untuk mempertahankan kinerja aparatur dan keuangan Pemda DIY, beberapa hal telah dilaksanakan dan akan terus dilakukan. Beberapa langkah konkret yang dilaksanakan berupa penguatan reformasi birokrasi Pemda DIY termasuk implementasi budaya kerja SATRIYA secara lebih massif. Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, diharapkan dapat membangun komitmen Perangkat Daerah untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya sejalan dengan rekomendasi DPRD, dalam hal ini agar ASN Pemda DIY terus melakukan inovasi dan kreatif dalam pelaksanaan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										program/kegiatan, salah satunya dilakukan dengan menerapkan penilaian terhadap unsur inovasi pada raport kinerja perangkat daerah, yang sekaligus sebagai upaya mendorong terciptanya One Agency One Innovation di lingkup Pemda DIY. Adapun sebagai manifestasi reward and punishment terhadap etos kerja aparatur, mekanisme pemberian tambahan penghasilan sudah memperhitungkan kinerja organisasi, yang dipertimbangkan melalui berbagai aspek termasuk perencanaan dan pengendalian, pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi individu, capaian sasaran kinerja pegawai menjadi faktor penentu yang dominan. Beberapa hal tersebut, serta dukungan terus menerus dari DPRD DIY

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										sebagai mitra kerja Pemda, diharapkan menciptakan kemantapan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan sumber daya manusia aparatur yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai â€œTrilogi SDM-DIYâ€•. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENGELOLAAN BELANJA DAERAH: Rekomendasi kami terima untuk memasukkan pola kebijakan dana keistimewaan ke dalam RKPD periode selanjutnya. Terkait dengan peran DPRD, dapat kami sampaikan bahwa di dalam pembahasan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) maupun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), keterlibatan DPRD tentulah sangat besar, mengingat Perdais maupun Perda tentang RPJMD membutuhkan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										pembahasan dan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Sedangkan pada proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2017 disebutkan bahwa â€œDalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat â€¦â€•. Pasal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan peran DPRD dalam proses penyusunan RKPD direpresentasikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang akan ditelaah lebih lanjut untuk menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKPD. TINDAK LANJUT

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN: Rekomendasi akan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada DPRD setelah adanya informasi kejelasan anggaran alokasi APBN di wilayah DIY. Meskipun pelibatan daerah sudah dilakukan, diantaranya melalui e proposal pada masing-masing K/L, selama ini perencanaan APBN, termasuk Tugas Pembantuan, didominasi oleh kebijakan K/L. Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan K/L yang sudah ditetapkan dalam Renja-K/L yang mengacu pada RKP. Dengan kalimat lain, sebenarnya potensi tugas pembantuan ada di seluruh kewenangan konkuren pemerintah yang ada di DIY, dengan tentunya yang memenuhi syarat

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										untuk ditugas pembantuankan, namun realisasinya, apakah kewenangan tersebut akan diperbantukan atau tidak sangat tergantung pada kebijakan pembangunan di tingkat pusat;
2	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sengguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				a. Kondisi sosial, politik dan karakter SDM yang berbeda sehingga proses sinkronisasi terhadap perencanaan pembangunan menjadi sangat kompleks; b.Proses pengendalian pembangunan adalah sebuah proses yang kompleks (bagaimana desain prosesnya, desain kertas kerja sebagai tool untuk mengukur atau menilai sustansi pengendalian, instrumen penjunjang, dan lain sebagainya)	1. Untuk sasaran Renstra periode selanjutnya diusahakan untuk tidak berubah selama 5 tahun sehingga setiap tahunnya dapat diperbandingkan secara proporsional; 2. Melakukan koordinasi internal dengan melibatkan semua komponen SDM BAPPEDA DIY dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja tahunan; 3. Mengusahakan untuk menyesuaikan pedoman penyusunan penetapan kinerja yang dijabarkan ke	TINDAK LANJUT REKOMENDASI UMUM: 1.Pemerintah DIY akan terus berkomitmen dan fokus dalam penanggulangan kemiskinan terutama dengan disahkannya Peraturan Daerah No 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam hal perbaikan data kemiskinan diterbitkan Peraturan Gubernur DIY No. 139 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			media web Bappeda.					dan sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia (waktu, SMD, biaya, instrumen penjunjang) sehingga hasil pengendalian tidak sulit sekali untuk mencerminkan informasi yang ideal	dalam triwulan jika memungkinkan; 4. Menyajikan pelaporan kinerja secara lengkap sesuai dengan pedoman yang berlaku (informasi terkait dengan capaian kinerja); 5. Meningkatkan evaluasi internal Bappeda DIY secara rutin.	Mampu. Pergub ini menjadi dasar hukum verifikasi validasi data kemiskinan dari tingkat desa/kelurahan. Pada Pergub ini dijelaskan bahwa proses pendataan tersebut dimulai dari musyawarah desa/kelurahan dilanjutkan validasi hasil musyawarah desa/kelurahan oleh pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut dimutakhirkan dua kali dalam satu tahun. Selanjutnya, data ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan dilaporkan ke Gubernur melalui Dinas Sosial DIY. Pada tahun 2021 direncanakan dibentuk tim evaluasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdiri dari unsur Sekda, Bappeda, Biro Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			2. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan.	Persentase perencanaan yang berkualitas	%	100	98.77			
			3. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan.	Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	%	100	98.25.00			
			4. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan**						
			5. Meningkatkan kualitas dan	Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan,	tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku						kabupaten/kota sebagai upaya meningkatkan kualitas verifikasi /validasi di tingkat bawah. Dalam aspek intervensi program kegiatan penanggulangan kemiskinan, selain intervensi melalui jaminan sosial yang sifatnya charity juga melalui intervensi yang sifatnya pemberdayaan masyarakat terutama peningkatan skill agar masyarakat miskin memiliki kemampuan sehingga bisa bekerja untuk meningkat kesejahteraanya. Upaya pemberdayaan masyarakat juga didukung oleh bantuan permodalan dan dukungan akses pasar. Desa Prima misalnya, program ini menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan, diarahkan lebih menyasar pada lokasi kantong kemiskinan, pemberian bantuan permodalan
			6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator.	Dokumen RKPDP 2020 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP	Dokumen	1	1			
			7. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiyaan pembangunan.	Dokumen RKPD 2021 sbg dasar penyusunan KUA PPAS	Dokumen	1	1			
			8. Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal BAPPEDA DIY dan dengan sistem informasi di luar BAPPEDA DIY yang terkait.	Dokumen KUA PPAS 2021 sebagai dasar penyusunan RAPBD	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			9. Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan	Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan)	Apli-kasi	1	1			dan didukung pemasaran produknya sampai mandiri. Selain itu juga pemerintah memberikan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi, Beasiswa untuk siswa tidak mampu. 2. Pengurangan kesenjangan wilayah terus dilakukan diantaranya melalui pengembangan kawasan selatan DIY. Upaya ini akan terus dilakukan dengan melanjutkan dan mengawal rencana pengembangan sarana dan prasarana yang akan mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan maupun penyediaan infrastruktur dasar wilayah. Pengembangan SPAM Kamijoro, Jalur Jalan Lintas Selatan sebagai pendukung YIA merupakan bagian dari pelaksanaan hal-hal tersebut. Diharapkan dengan tumbuhnya
			10. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik/program strategis bersama yang konsisten dan terukur	Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang berkualitas	%	100	100			
			11. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data	Dokumen KUPA PPASP 2020 sebagai dasar penyusunan RAPBDP	Doku-men	1	1			
			12. Pengembangan	**Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Kewilayahan**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, SINTAL, JOGJA DATAKU, dll) sesuai dengan kebutuhan.							kawasan-kawasan perkonomian baru akan berdampak pada meningkatnya perekonomian daerah/kabupaten/kota yang bermuara pada menurunnya ketimpangan wilayah di DIY. 3. Pertanian memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan pangan, dimana pangan yang tidak mencukupi akan memunculkan permasalahan sosial dan ekonomi. Pertanian juga menyediakan lapangan pekerjaan dan menjadi tulang punggung masyarakat. Selain itu, pertanian juga berperan sebagai penyangga kesehatan masyarakat. Dalam masa pandemi Covid-19 petani adalah juga pejuang selama penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Untuk itu, ketahanan dan kemandirian
			13. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik/program strategis bersama yang konsisten dan terukur.	Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang berkualitas	%	100	100			
				Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2021 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah	Dokumen	1	1			
				Dukungan 50% terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	%	100	100			
				Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2022	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah						pangan tetap menjadi perhatian serius bagi Pemda DIY dan akan selalu diupayakan lebih ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian untuk meningkatkan kontribusi dalam PDRB, Pemda DIY telah melakukan berbagai intervensi mulai dari on farm sampai dengan off farm dengan harapan dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas pertanian yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY di sektor pertanian diantaranya yaitu: Tahun 2020: 1. Peningkatan kapasitas SDM petani melalui berbagai pelatihan mulai dari on farm sampai off farm yang diikuti dengan bantuan sarpras pertanian. 2.
				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN						
				Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	%	86.96	67.39.00			
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan						
				Dukungan 45,65 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 86,96%	%	100	100			
				Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2019	Dokumen	1	1			
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	Dokumen	1	1			
				Dokumen bahan perencanaan 2022	Dokumen	1	1			
				Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha						Untuk membantu pemasaran produk pertanian, dilakukan optimalisasi peran TTIC baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19 3. Pemberian insentif kepada petani berupa fasilitasi pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, alsintan, Jalan Usaha Tani, perbaikan irigasi dan lain-lain. 4. Penyusunan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 5. Kajian Roadmap Pengembangan Penganekaragaman Pangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan 6. Kajian pendukung pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 7. Pengembangan Lumbung Mataraman 8. Pemda DIY berkomitmen untuk mengentaskan desa rawan pangan sebagaimana menjadi
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	Dokumen	1	1			
				Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2019	Dokumen	1	1			
				Dukungan 54,35 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 86,96%	%	100	100			
				Dokumen bahan perencanaan 2022	Dokumen	1	1			
				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA						
				Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	%	91.14.00	67.61			
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM						
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS tahun 2020						target dalam RPJMD 2017-2022. Kerjasama sinergis dengan para pihak dilakukan agar permasalahan kemiskinan di desa-desa tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Terkait dengan akses pangan, Pemda DIY telah melakukan intervensi dengan bantuan modal melalui gapoktan-gapoktan di desa rawan pangan. Usulan 2021 1. Asuransi usaha tani padi 2. Uji coba kartu tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi 3. Adanya pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum bagi generasi muda di DIY untuk melirik sektor pertanian. Bencana pandemi Covid-19 membuka kesadaran generasi muda bahwa sektor pertanian merupakan â€œtambang emas tanpa batasâ€•, yang akan selalu diperlukan
				Dokumen bahan perencanaan 2022	Dokumen	1	1			
				Dukungan 42,42% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 91,14%	%	100	100			
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM tahun 2019	Dokumen	1	1			
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra						
				Dokumen bahan perencanaan 2022	Dokumen	1	1			
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS tahun 2020	Dokumen	1	1			
				Dukungan 43,94% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 91,14%	%	100	100			
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2019	Dokumen	1	1			
				Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY	Dokumen	1	1			dan memegang peranan penting di setiap kondisi. Adanya pandemi ini telah memunculkan peluang-peluang bisnis di sektor pertanian dengan cara-cara baru yang menarik bagi kaum milenial. Oleh karenanya, pendidikan dan pelatihan pertanian bagi generasi muda akan ditingkatkan melalui pengoptimalan peran BPP untuk ikut membina generasi muda agar berminat bergerak di sektor pertanian, penggunaan alat mekanisasi pertanian yang beradaptasi dengan teknologi 4.0, serta pengembangan sistem informasi pertanian untuk penyebaran informasi berbasis IT. 4. Penyusunan Pergub Tindak lanjut Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 9. Peningkatan kapasitas SDM petani melalui berbagai
				Dokumen Monev TPB DIY	Dokumen	1	1			
				Dukungan 13,64% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 91,14%	%	100	100			
				Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Penaggulangan Kemiskinan	Aplikasi	1	1			
				Dokumen Evaluasi CSR/TSLP	Dokumen	1	1			
				PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA						
				Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	%	82.86	51.72			
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM						
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2019	Dokumen	1	1			
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPAPPAS Tahun 2020						pelatihan mulai dari on farm sampai off farm yang diikuti dengan bantuan sarpras pertanian 5. Penyusunan Draft Rapergub Insentif dan disinsentif PLP2B 6. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan yaitu dengan mendorong rumah tangga untuk memanfaatkan lahan di sekitarnya (termasuk pekarangan) untuk ditanami tanaman pangan maupun hortikultura guna pemenuhan gizi keluarga. 7. Kajian Pembentukan Pusat Grosir Pangan 8. Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Pendukung Pengendalian Inflasi 9. Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama Pendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi 10. Kajian Pemulihan Sektor
				Dokumen bahan perencanaan 2022	Dokumen	1	1			
				Dukungan 54,29% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana prasarana sebesar 82,86%	%	100	100			
				Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup						
				Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Dokumen	1	1			
				Dukungan 45,71 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana Prasarana sebesar 82,86 %	%	100	100			
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	Dokumen	1	1			
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2019	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Dokumen bahan perencanaan 2022	Dokumen	1	1			Perekonomian Terdampak Covid-19 Pemda DIY juga berkomitmen untuk pengembangan sektor perikanan kelautan sebagai salah satu wujud pemanfaatan potensi dan pengembangan wilayah selatan DIY yang berbatasan dengan laut dengan garis pantai sepanjang 113 Km2. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain: a. Pemda DIY telah menyelenggarakan berbagai bimtek dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan nelayan untuk meningkatkan produksi ikan di DIY. Intervensi dilakukan melalui berbagai bentuk fasilitasi bagi nelayan yang pada prinsipnya memberikan kemudahan dan memberikan bekal yang cukup kepada nelayan. Pelatihan yang diselenggarakan
				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN						
				Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	%	91	91			
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum						
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2019	Dokumen	1	1			
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	Dokumen	1	1			
				Dokumen bahan perencanaan 2022	Dokumen	1	1			
				Dukungan kegiatan 61,76 % Terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang pemerintahan sebesar 91%	%	100	100			
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik						
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2019	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Dukungan kegiatan 38,24 % Terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang pemerintahan sebesar 91%	%	100	100			terdiri dari pelatihan teknis penangkapan ikan, serta pelatihan pendukung lainnya seperti bimtek pelayanan pelabuhan, pengelolaan pelabuhan dan keselamatan pelayaran termasuk didalamnya pelatihan untuk nelayan dalam rangka pemenuhan kelengkapan untuk perijinan. b. Untuk mengembangkan wilayah pansela dengan tetap mengupayakan perwujudan Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai dapat beroperasi. Pada tahun 2021 telah diusulkan melalui dana APBN untuk penyelesaian Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto. Untuk pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan membuka akses jalur selatan, maka sebagai alternatif akan dikembangkan Pelabuhan Gesing di
				Dokumen bahan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	Dokumen	1	1			
				Dokumen bahan perencanaan 2022	Dokumen	1	1			
				PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH						
				Persentase Capaian Kegiatan SKPD	%	90	90			
				Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	%	100	100			
				Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah						
				Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TWI-III/ Tahun 2020	Dokumen	3	3			
				Laporan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan (10 buku)	Dokumen	1	1			
				Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2019	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2019	Dokumen	1	1			Gunungkidul (master plan masih dalam usulan 2021). 4. Kesenjangan yang terjadi di DIY adalah kesenjangan penduduk dengan pendapatan tinggi dengan pendapatan rendah dan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Untuk itu diperlukan program untuk meningkatkan kepedulian sosial dan revitalisasi budaya gotong royong. Disamping itu, perlu juga mendorong kapasitas lembaga di desa dalam pengelolaan dana desa dan manajemen pemerintahan di desa dengan harapan terjadi peningkatan ekonomi masyarakat desa sehingga bisa menurunkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan Kesenjangan
				Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY	Dokumen	2	2			
				Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota	Dokumen	2	2			
				Laporan Evaluasi Hasil RKPD DIY	Dokumen	2	2			
				Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2019	Dokumen	1	1			
				Dukungan 50 % terhadap Persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 90%	%	100	100			
				Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2019	Dokumen	1	1			
				Update e-Monev/ web SENGGUH	Aplikasi	1	1			
				Dukungan 50 % terhadap Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar100%	%	100	100			
				Laporan Evaluasi Hasil Program Pemda	Dokumen	1	1			
				Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah						
				Penyerahan DIPA APBN 2021	kali	1	1			
				Draft Rapergub Pengendalian Pembangunan	Dokumen	1	1			
				Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2020	Dokumen	1	1			
				Video Akuntabilitas Kinerja DIY	video	1	1			
				Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2019	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Dukungan 50% terhadap Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepatwaktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	%	100	100			pendapatan terjadi karena pertumbuhan pendapatan kelompok berpendapatan rendah jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan kelompok berpendapatan tinggi. Untuk mengurangi ketimpangan, program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi diprioritaskan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin diantaranya melalui kegiatan yang bersifat meningkatkan kapasitas usaha ekonomi rakyat. Dilihat dari sektor lapangan usaha, tenaga kerja atau unit usaha mikro dan kecil di DIY didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, Pertanian dan usaha jasa di bidang pariwisata. Beberapa kegiatan yang rencana akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain: a. Untuk menyasar
				Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2019	Dokumen	1	1			
				Laporan Kinerja APBN Tahun 2019 dan 2020	Dokumen	4	4			
				Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2019	Dokumen	1	1			
				Dukungan 50% terhadap Persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 90%	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										usaha mikro dan kecil baik terutama sektor industri pengolahan Pemda DIY melakukan pelatihan dan kemitraan Industri Kecil. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal sementara itu kegiatan kemitraan dilakukan untuk meningkatkan akses pasar. b. Untuk menumbuhkan kemampuan kemandirian berusaha dilakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan dengan sasaran pada lokasi kantong-kantong kemiskinan atau yang biasa disebut dengan Desapreneur. c. Untuk meningkatkan kapasitas usaha serta kesempatan kerja di sektor pariwisata dilakukan pelatihan kepariwisataan baik pada tingkat SDM maupun kelembagaan usaha. Kegiatan ini

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										diutamakan menyasar pada desa/kampung wisata dengan tujuan manfaat geliat pariwisata dapat dirasakan oleh komunitas atau masyarakat secara langsung. d. Pengurangan kesenjangan pendapatan dilakukan juga dengan strategi mengurangi pengangguran melalui kegiatan pembentukan kesempatan kerja baik dengan padat karya infrastruktur maupun pembekalan kewirausahaan tenaga kerja mandiri. Pada sektor formal, untuk mengurangi pengangguran dilakukan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 5. Penentuan program dan kegiatan serta besaran anggaran, fokus dan lokus sudah dilakukan melalui proses identifikasi dampak terhadap kinerja yang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										diharapkan termasuk peningkatan PDRB serta aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lainnya. Di tahun mendatang, proses identifikasi dan analisis dampak diharapkan dapat dilakukan lebih efektif dan akurat sehingga dampak anggaran belanja pemerintah mencerminkan intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat DIY. Proses identifikasi dan analisis membutuhkan data yang akurat dan terkini sehingga penyediaan data-data tersebut akan diupayakan untuk terwujud di masa mendatang untuk lebih mengoptimalkan identifikasi dan analisis masalah pembangunan. Belanja Pemerintah secara langsung apabila dilihat dari PDRB menurut Pengeluaran

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										mendukung sebesar 14 % dari total PDRB. Pemerintah Daerah DIY di dalam menentukan program dan kegiatan pada peningkatan perekonomian DIY berpedoman pada RPJMD DIY khususnya pada program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat dan sasaran Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan. Apabila dilihat alokasi anggaran untuk mendukung capaian sasaran tersebut Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan anggaran sebesar 23,25 % untuk program dan kegiatan pengungkit perekonomian DIY dengan target Ekonomi DIY pada Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,26 %. Realisasinya pada Tahun 2019 ekonomi DIY tumbuh sebesar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										6,60%, melebihi apa yang ditargetkan. 6. Kinerja bidang aparatur dan keuangan yang sudah dinilai bagus, akan kami pertahankan dan terus tingkatkan dengan berbagai inovasi kegiatan yang akan kami lakukan. Terkait dengan kinerja aparatur, berbagai kegiatan yang akan kami lakukan masih tetap berlandaskan pada penanaman nilai-nilai budaya kerja dengan inovasi pada implementasinya, sedangkan untuk mempertahankan kinerja keuangan, kami akan menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan dan akuntansi Pemerintah. Pemda DIY secara bertahap mengupayakan Integrasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah baik dari level pemda DIY, OPD, s/d level individu (e-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										SKP). Integrasi yang telah berjalan dengan baik pada fase perencaanaan, penganggaran dan pengendalian serta monev kinerja pada level pemda dan OPD. Adapun pada pengukuran kinerja individu akan diupayakan dapat bersinergi dengan fase integrasi yang telah berjalan tersebut. Untuk mempertahankan kinerja aparatur dan keuangan Pemda DIY, beberapa hal telah dilaksanakan dan akan terus dilakukan. Beberapa langkah konkret yang dilaksanakan berupa penguatan reformasi birokrasi Pemda DIY termasuk implementasi budaya kerja SATRIYA secara lebih massif. Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, diharapkan dapat membangun komitmen Perangkat

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										Daerah untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya sejalan dengan rekomendasi DPRD, dalam hal ini agar ASN Pemda DIY terus melakukan inovasi dan kreatif dalam pelaksanaan program/kegiatan, salah satunya dilakukan dengan menerapkan penilaian terhadap unsur inovasi pada raport kinerja perangkat daerah, yang sekaligus sebagai upaya mendorong terciptanya One Agency One Innovation di lingkup Pemda DIY. Adapun sebagai manifestasi reward and punishment terhadap etos kerja aparatur, mekanisme pemberian tambahan penghasilan sudah memperhitungkan kinerja organisasi, yang dipertimbangkan melalui berbagai aspek termasuk perencanaan dan pengendalian,

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi individu, capaian sasaran kinerja pegawai menjadi faktor penentu yang dominan. Beberapa hal tersebut, serta dukungan terus menerus dari DPRD DIY sebagai mitra kerja Pemda, diharapkan menciptakan kemantapan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan sumber daya manusia aparatur yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai â€œTrilogi SDM-DIYâ€•. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENGELOLAAN BELANJA DAERAH: Rekomendasi kami terima untuk memasukkan pola kebijakan dana keistimewaan ke dalam RKPD periode selanjutnya. Terkait dengan peran DPRD, dapat kami sampaikan bahwa di dalam pembahasan Peraturan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										Daerah Istimewa (Perdais) maupun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), keterlibatan DPRD tentulah sangat besar, mengingat Perdais maupun Perda tentang RPJMD membutuhkan pembahasan dan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Sedangkan pada proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2017 disebutkan bahwa â€œDalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat â€¦.â€•. Pasal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan peran

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										DPRD dalam proses penyusunan RKPD direpresentasikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang akan ditelaah lebih lanjut untuk menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKPD. TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN: Rekomendasi akan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada DPRD setelah adanya informasi kejelasan anggaran alokasi APBN di wilayah DIY. Meskipun pelibatan daerah sudah dilakukan, diantaranya melalui e proposal pada masing-masing K/L, selama ini perencanaan APBN, termasuk Tugas Pembantuan, didominasi oleh kebijakan K/L. Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan K/L yang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
										sudah ditetapkan dalam Renja-K/L yang mengacu pada RKP. Dengan kalimat lain, sebenarnya potensi tugas pembantuan ada di seluruh kewenangan konkuren pemerintah yang ada di DIY, dengan tentunya yang memenuhi syarat untuk ditugas pembantuankan, namun realisasinya, apakah kewenangan tersebut akan diperbantukan atau tidak sangat tergantung pada kebijakan pembangunan di tingkat pusat;

b. Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan

1) Kondisi Umum

Status istimewa atau otonomi khusus yang melekat pada Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan status kedudukan hukum yang didasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa sebagaimana termuat dalam UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Keistimewaan DIY mencakup Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Pemda DIY melaksanakan perencanaan pembangunan Urusan Keistimewaan melalui Paniradya Kaistimewan sebagaimana termuat dalam Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pergub DIY Nomor 20 Tahun 2020.

Dalam hal penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya, terlebih pada tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh lini kegiatan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY. Terdapat beberapa pekerjaan dalam penyelenggaraan urusan Keistimewaan yang terhambat pelaksanaannya karena pandemi Covid-19. Namun demikian, Pemda DIY terus berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan tetap berkoordinasi secara intens dengan *stakeholders* yang terlibat. Hal ini agar pekerjaan fisik yang ditargetkan pada tahun ini dapat tetap terlaksana dengan berbagai penyesuaian.

Tabel 3.134. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realiasasi 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Realiasasi 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Real-isasi	% Reali-sasi		
1	Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan	%	98,58	98	98,005	100,005	98,2	99,80

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realiasasi 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Realiasasi 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Real-isasi	% Reali-sasi		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	86,02	74	87	117,57	78	111,54
3	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	80,86	80.5	90	111,80	83	108,43

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021

Pada tahun 2020, realisasi untuk tiga indikator kinerja sasaran terkait perencanaan pembangunan urusan keistimewaan telah melebihi target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan

Sasaran kinerja program-program Urusan Keistimewaan yaitu "Meningkatnya kualitas implementasi Urusan Keistimewaan" ini tercapai sebesar 98,005% atau 100,005% dari target yang ditetapkan, dihitung dari capaian kinerja fisik dan capaian keuangan program urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh PA/KPA danais. Hasil penghitungan total capaian kinerja diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.135. Pengukuran Capaian Fisik dan Keuangan Danais Tahun 2020

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Tahap III/Akhir (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	Kelembagaan	14.554.390.500	13.266.845.421	91,15	99,80
2	Kebudayaan	744.003.521.915	714.035.144.010,84	95,97	99,15
3	Pertanahan	19.469.545.187	16.644.881.594,21	85,49	98,25
4	Tata Ruang	541.972.542.398	535.625.784.053,58	98,83	98,99
	TOTAL	**1.320.000.000.000**	**1.279.572.655.079,63**	**96,94**	**99,07**
	RERATA			**98,005**	

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021

Secara keseluruhan, realisasi keuangan program Keistimewaan Urusan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang sebesar 96,94%, dan realisasi fisik program Keistimewaan Urusan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang sebesar 99,96%. Sehingga rerata capaian keuangan dan fisik tersebut sebesar 98,005%. Angka ini menggambarkan bahwa kualitas implementasi

urusan Keistimewaan pada tahun 2020 telah tercapai sesuai target. Hanya saja pada program Keistimewaan Urusan Pertanahan, realisasi keuangannya tidak mencapai 90% karena terdapat efisiensi anggaran serta terdapat beberapa kegiatan Keistimewaan urusan pertanahan yang tidak terlaksana 100% di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo.

b) Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja

Sasaran kinerja "Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja" yang menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan Pemda DIY kepada Parampara Praja pada tahun ini tercapai sebesar 87% atau 117,57% dari target yang ditetapkan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.136. Pengukuran Capaian Kualitas Pelayanan Kepada Parampara Praja

Sub-Indikator	Hasil Penilaian	Rata-Rata Nilai
a. Kepuasan dukungan Tim Asistensi	87,5%	87 %
b. Kepuasan terhadap dukungan Paniradya	87,3%	
c. Kepuasan sarana prasarana	86,0%	
d. Kepuasan terhadap pelayanan Paniradya	87,2%	

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021

Berbeda dengan tahun 2019, pada tahun 2020 sub indikator "kepuasan terhadap perjalanan dinas" penilaiannya masuk ke dalam sub indikator "kepuasan terhadap dukungan Paniradya". Secara keseluruhan rata-rata indeks pelayanan Parampara Praja sebesar 87%. Angka tersebut telah melampaui target pada tahun 2020 yaitu 74%. Dengan kata lain, sasaran kinerja "Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja" terpenuhi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran pencapaian kinerja Pemda DIY dalam memfasilitasi Parampara Praja adalah sebagai berikut:

(1) Kepuasan dukungan tim asistensi, yaitu penyediaan data-data pendukung dan analisis yang nantinya digunakan sebagai masukan bagi anggota Parampara Praja dalam menyusun rekomendasi kepada Gubernur;
(2) Kepuasan dukungan Paniradya, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY kepada anggota Parampara Praja dalam hal

penjadwalan kegiatan, hubungan dengan para pemangku kepentingan, penyediaan materi-materi referensi, hingga memfasilitasi dan mengakomodasi perjalanan dinas bagi Parampara Praja;

(3) Kepuasan sarana prasarana, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY dalam fasilitasi sarana prasarana seperti komputer dan kendaraan;

(4) Kepercayaan terhadap pelayanan Paniradya, yaitu persepsi anggota Parampara Praja terhadap pelayanan yang diberikan Paniradya Kaistimewan DIY.

c) Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien

Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien menunjukkan terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sebesar 90% atau 111,80% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut diukur dengan sumber data diolah dari hasil evaluasi kelembagaan Pemda DIY, nilai hasil survei perhitungan tingkat budaya SATRIYA, dan nilai hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemda DIY. Hasil penghitungan total capaian kinerja diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.137. Pengukuran Capaian Sasaran

No	Indikator	Nilai
1.	Persentase kelembagaan perangkat daerah pelaksana keistimewaan yang proporsional	92%
2.	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	87,6%
3.	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	90,4%
	RERATA	**90%**

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021



Gambar 3.58. Forum Grand Desain Keistimewaan DIY Paniradya Kaistimewan DIY

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020, Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan dilaksanakan melalui alokasi anggaran Rp8.330.823.850,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 10 Program dan 23 Kegiatan. Secara fisik, sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai 99,22% sedangkan dari segi keuangan terealisasi sebanyak Rp7.556.430.325,00 (90,70%). Rincian capaian kinerja program/kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	PANIRADYA KAISTIMEWAN	1. Penyusunan kebijakan umum urusan keistimewaan 2. Pengoordinasian perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3. Peningkatan Pelayanan Parampara Praja 4. Peningkatan Hubungan Dengan Semua Stakeholder	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**						TINDAK LANJUT PENGELOLAAN BELANJA DAERAH: Perencanaan urusan keistimewaan sudah tercantum di dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) sesuai amanat dalam peraturan perundangan. Urusan keistimewaan sebenarnya juga telah mendapatkan porsi tersendiri dalam penyajiannya di dokumen perencanaan. Selanjutnya, RPJMD DIY Tahun 2017-2022 juga telah mencantumkan bagan alur (cascade) urusan keistimewaan sehingga akan terlihat dengan jelas dukungan terhadap sasaran pembangunan daerah. Namun demikian apabila diperlukan, pada masa mendatang penjelasan mengenai urusan keistimewaan akan kami cantumkan dalam kebijakan belanja daerah.
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran						
				Alat tulis kantor	jenis	22	22			
				Dukungan 19,74% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung tugas dan fungsi OPD	persen	100	100			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda empat	unit	9	9			
				Surat Kabar	SKH	4	4			
				Barang cetakan	jenis	15	15			
				Peralatan Rumah Tangga	jenis	17	17			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua	unit	7	7			
				Majalah	jenis	2	2			
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	5	5			
				Penggandaan	lembar	19992	19992			
				Buku/Kepustakaan	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	orang	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	orang	10	10			
				Kinerja perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	orang	1	1			
				Dukungan 14,75% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	persen	100	100			
				Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	orang	1	1			
				Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	orang	1	1			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1			
				Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik	orang	1	1			
				Dukungan 65,51% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	persen	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Peralatan gedung kantor yang dibeli	jenis	5	5			
				Dukungan 21,25% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	persen	100	100			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Dukungan 74,91% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	persen	100	100			
				Kendaraan dinas/operasional roda empat	unit	9	9			
				Kendaraan dinas/operasional roda dua	unit	7	7			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 3,84% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	persen	100	100			
				Peralatan gedung kantor yang dipelihara	jenis	3	3			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Dukungan 18,82% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	persen	100	100			
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) dengan nilai A	tahun	1	1			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Dukungan 23,53% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang	persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD						
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dengan deviasi	persen	10	10			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Dukungan 28,24% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	persen	100	100			
				ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	dokumen	2	2			
				Berita Acara Forum Perencanaan OPD	BA	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	persen	99	99			
				Dukungan 29,41% terhadap penatausahaan	persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD						
2	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)	PANIRADYA KAISTIMEWAN	1. Penyusunan kebijakan umum urusan keistimewaan 2. Pengoordinasian perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan 3. Peningkatan Pelayanan Parampara Praja 4. Peningkatan Hubungan Dengan Semua Stakeholder	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN**				Kecocokan waktu antar pengampu kepentingan dan tata kala waktu pelaksanaan keistimewaan dan kompleksitas permasalahan perencanaan keistimewaan	1. Peningkatan koordinasi internal Parampara Praja dan eksternal Parampara Praja 2. Menjalin koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan urusan keistimewaan 3. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan	TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN A. Urusan Kelembagaan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang telah ditetapkan melalui Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah telah mempertimbangkan keselarasan urusan sesuai amanat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta regulasi-regulasi terkait lainnya. Kelembagaan Pemerintah Daerah diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.
				Persentase urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	100			
				Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan	persen	69	94			
				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						
				2. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 2021	Doku -men	1	1			
				3. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 2022	Doku -men	1	1			
				Dukungan terhadap persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	60	60			
				1. Rencana Program dan Kegiatan keistimewaan 2020	Doku -men	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan tahun 2020	Doku -men	4	4			Selanjutnya, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2019 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan yang teah mengatur masing-masing level pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan tema visi "Abad Samudera Hindia", berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah telah dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. B. Urusan Kebudayaan Dalam rangka pelaksanaan kewenangan keistimewaan, Dinas Pendidikan DIY melalui urusan kebudayaan telah berkontribusi dalam upaya mengenalkan dan memajukan spirit keistimewaan melalui Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya, Program Pendidikan Non Formal dan Informal dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam pengembangnan dan Pelestarian Budaya Daerah. Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan Peningkatan
				Dukungan terhadap persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	40	40			
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PARAMPARA PRAJA						
				Indeks Kepuasan layanan kepada Prampara Praja	Persen	74	87			
				Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan						
				Dukungan 100% terhadap Indeks Kepuasan Layanan kepada Parampara Praja	persen	100	100			
				Bahan Rekomendasi kepada Parampara Praja	Doku-men	18	18			
				PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN						
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan						
				Camera crane	unit	1	1			
				Drone	unit	1	1			
				Camera flash	unit	1	1			
				Kamera	unit	4	4			
				Conference camera	unit	3	0			
				Printer	unit	9	9			
				Mobil	unit	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Komputer	unit	3	3			kapasitas pendidikan menengah dalam pengembangan dan pelestarian budaya daerah. Program Pendidikan anak usia dini dengan kegiatan pengembangan model pengasuhan anak tradisi jawa. Program Peningkatan Sarpras Kebudayaan dengan kegiatan Pengadaan sarana kesenian ke sekolah dan Pembangunan Laboratorium Budaya di Satuan Pendidikan. C. Urusan Pertanahan Pengaturan urusan pertanahan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan agar tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat memberikan sumbangsih maksimal untuk ketenteramaan dan kesejahteraan masyarakat. Keistimewaan DIY dalam Pertanahan bertumpu pada Tanah Kasultanan dan kadipaten. Di bidang pertanahan perlu diwujudkan semangat keistimewaan atau nilai-nilai dasar sebagaimana yang sudah teruraikan yakni Tahta Untuk Rakyat. Di antara perujudan "Tahta Untuk Rakyat" adalah kebijakan yang dikembangkan di
				Tripod	unit	4	4			
				Laptop	unit	1	1			
				Scanner	unit	3	3			
				Dukungan sebesar 100% terhadap realisasi pelayanan sarana prasarana keistimewaan pada pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan	%	100	100			
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN TATA CARA						
				Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	persen	80	91.67			
				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara						
				Dukungan 60% terhadap Persentase Capaian Program Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang berkualitas	Persen	60	60			
				1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2020	Doku -men	1	1			
				2. Rencana Program dan Kegiatan	Doku -men	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2021						bidang pertanahan. Semangat "Tanah Untuk Rakyat" serta sikap populis dan nasionalis tersebut
				3. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2022	Doku -men	1	1			harus menjadi dasar bagi penyusunan Perdais Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Semangat tersebut harus mewarnai pengelolaan dan pemanfaatan baik Tanah
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara						
				Dokumen Hasil Monitoring dan evaluasi tahapan pelaksanaan program/kegiatan Keistimewaan urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2020	Doku-men	4	4			Keprabon maupun Tanah Bukan Keprabon. Perujudan dari semangat tersebut harus tercermin pada pemanfaatan tanah bagi kepentingan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang
				Dukungan 40% terhadap persentase capaian program keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	Persen	40	40			diwujudkan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN						D. Urusan Tata Ruang
				Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	80	95.45			Implementasi kewenangan keistimewaan pada urusan tata ruang telah dituangkan di dalam Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan						Dalam perdais tersebut
				3.Rencana Program dan kegiatan keistimewaan urusan	laporan	1	1			diamanatkan bahwa pengaturan tata ruang tanah kasulatanan dan tanah kadipaten harus mengangkat konsep tata ruang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				kebudayaan tahun 2022						DIY yang dilandasi oleh konsep â€œHamemayu Hayuning Bawanaâ€• karena tertuju langsung pada penciptaan ruang-ruang dan tata ruang yang membangun kautaman manusia, melestarikan kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan manusia dengan sifat-sifat yang inklusif, dan menghormati alam sebagai bagian dari kautaman manusia. Dengan demikian, Perdais Tata Ruang menjadi sarana membangun manusia dan ruang kehidupannya dengan melakukan tatanan baru urusan tata ruang, yang dilakukan melalui kebijakan struktur ruang dengan konservasi dan pelindungan tata ruang keistimewaan, serta kebijakan pola ruang dengan pengembangan tata ruang keistimewaan. Melalui perdais tersebut juga telah ditetapkan 18 Satuan Ruang Strategis Keistimewaan pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
				Dukungan terhadap persentase capaian program keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	60	0			
				4. Grand Design Desa Mandiri Budaya	laporan	1	1			
				2. Rencana program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2021	laporan	1	1			
				1. Rencana program dan kegiatan Keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2020	laporan	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2020	Doku -men	4	4			
				Dukungan terhadap persentase capaian program keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	40	0			
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahaan dan tata ruang yang berkualitas	persen	80	93.75			
				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan						
				Dukungan 30% terhadap Persentase Capaian Program Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang yang berkualitas	Persen	30	30			
				1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2020	Doku -men	1	1			
				2. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2021	Doku -men	1	1			
				3. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2022	Doku -men	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan						
				Dukungan 20% terhadap Persentase Capaian Program Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang yang berkualitas	Persen	20	20			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2020	Doku -men	4	4			
				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang						
				1. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2020	Doku -men	1	1			
				Dukungan 30% terhadap Persentase Capaian Program Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang yang berkualitas	persen	30	30			
				2. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2021	Doku -men	1	1			
				3. Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2022	Doku -men	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang						
				Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2020	Doku -men	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 20% terhadap Persentase Capaian Program Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang yang berkualitas	persen	20	20			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEISTIMEWAAN						
				Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Persen	94	94.59			
				Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan						
				Konten Informasi Keistimewaan DIY yang Terpublikasikan kepada Masyarakat	Media	5	5			
				Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Pelaksan Keistimewaan	Doku -men	1	1			
				Dukungan 100% terhadap Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Persen	100	100			
				Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pelaksan Keistimewaan	Doku -men	1	1			
				Buku Informasi Keistimewaan	Eksem -plar	3850	3850			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dokumen Hasil Forum Grand Design Keistimewaan	Doku -men	1	1			

c. Administrasi Keuangan Daerah

1) Kondisi Umum

Berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Tugas tersebut dijabarkan dalam pasal 4 Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan ,Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, dengan fungsi diantaranya adalah:

a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
b) Pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
c) Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah
d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan
e) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
f) Pengelolaan kas daerah dan akuntansi
g) Pengelolaan barang milik daerah

Perdais Nomor 1 Tahun 2018 didesain secara paralel *(inline)* dengan alur *(cascading)* kinerja yang dimulai dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program-program Pemda beserta indikator ketercapaiannya yang didukung oleh seluruh OPD di lingkup Pemda DIY. Sesuai cascade kinerja pada RPJMD, sasaran strategis yang mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari fasilitasi administrasi keuangan beserta target dan capaian realisasinya dinyatakan dalam tabel berikut.

Tabel 3.138. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	95,46
2	Optimalisasi Aset-aset Pemda	Rp	7.107 .452.565	6.453 .519.026	3.069 .093.332	47,56	6.967 .568.518	44,05

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2021

a) Indikator kinerja pada sasaran pertama diukur dengan indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolan keuangan daerah yang dihitung secara kualitatif. Capaian indikator pertama sebesar 100%, berasal dari capaian meningkatnya PAD (bobot kualitatif sebesar 20%), APBD yang tepat dan akurat (bobot kualitatif sebesar 20%), laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot kualitatif sebesar 20%), penatausahaan keuangan daerah yang akurat (bobot kualitatif sebesar 20%) dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot kualitatif sebesar 20%). Jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian tahun 2020 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran pertama tahun 2020 ini didukung oleh tercapainya target tahunan pelaksanaan Program Peningkatan Pendapatan, Program Peningkatan Pendapatan KPPD, Program Perencanaan Penganggaran, Program Penatausahaan Keuangan Daerah, Program Pembinaan Pengelolaan Daerah, dan Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

b) Indikator kinerja pada sasaran kedua diukur dengan indikator nilai Proyeksi Optimalisasi Aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah (nilai rupiah proyeksi aset pengelola barang milik daerah). Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar Rp6.453.519.026,00 sampai dengan akhir bulan Desember 2020 terealisasi Rp3.069.093.332,00 (47,56%). Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebesar Rp6.505.543.500,00 terjadi penurunan sebanyak Rp3.436.450.178,00 (50,44%). Capaian indikator sasaran kedua didukung oleh kinerja 2 (dua) program yakni Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah. Realisasi optimalisasi aset-aset pada pengelola barang milik

daerah tidak mencapai target dikarenakan faktor eksternal terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada terganggunya hampir seluruh aspek kehidupan tidak hanya nasional namun juga regional. Dampak pandemi tersebut di wilayah DIY menyebabkan penyewa BMD mengakhiri kontrak, di antaranya Jogja Expo Center. Pandemi Covid-19 menyebabkan even-even berskala besar untuk sementara tidak boleh diselenggarakan karena berpotensi untuk meningkatkan penularan virus. Selain itu banyak penyewa lahan BMD yang mengajukan keringanan pembayaran sewa.

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Penunjang Urusan Administrasi Keuangan pada tahun anggaran 2020 dilaksanakan melalui 12 Program dan 40 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp106.783.652.150,00. Secara keseluruhan, realisasi belanja langsung sebesar Rp104.433.926.321,00 (97,79%) (sebelum dilakukan audit). Adapun capaian fisik pelaksanaan program/ kegiatan sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 100%. Secara rinci, program/kegiatan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga 3. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah 4. Peningkatan pelayanan pajak dan non	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Dinamika perubahan kebijakan terkait pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan	Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, belanja dan aset berbasis akrual secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel	
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	2. Penilai Pemerintah di Pemda DIY belum tersedia sehingga masih menggunakan konsultan jasa penilai independen dimana memerlukan anggaran yang tidak sedikit, dan akan menyulitkan Pemda DIY apabila Penilaian Kembali Barang Milik	Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah agar dapat mengidentifikasi asset-aset idle, melaksanakan *Road Map* Pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta melaksnakan kajian terhadap aset idle untuk memperoleh anallisis kegunaan terbaik dan tertinggi (*Highest Best Use/*HBU)	
				Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			pajak kepada masyarakat					Daerah diberlakukan	sebelum dilaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	
				Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
			5. Ketepatan waktu dan keakuratan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
			6. Peningkatan peran optimalisasi barang milik daerah sebagai salah satu kontributor peningkatan PAD	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
			7. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya tata kerja sesuai dengan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			sistem dan prosedur serta monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	17	17			
				Penyusutan arsip keuangan	Dokumen	2540	2540			
				Kebersihan gedung kantor	Gedung	3	3			
				Alat Tulis Kantor	jenis	32	32			
				Penggandaan	lembar	494000	494000			
				Pemilahan arsip keuangan in aktif	Berkas	5000	4960			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	unit	7	7			
				Barang cetakan	jenis	15	15			
				Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid	jenis	7	7			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	unit	12	12			
				Pengiriman dokumen	Bulan	12	12			
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan langganan internet	Bulan	12	12			
				Bukti pembayaran retribusi sampah	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penjilidan	Buku	580	570			
				Dukungan 63.49% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				KInerja pengelola barang dalam 1 tahun	Orang	4	4			
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun	Orang	18	18			
				Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Orang	2	2			
				Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun	Orang	3	3			
				kinerja Perencana program kegiatan dalam 1 tahun	Orang	7	7			
				Dukungan 24.69% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Dukungan 11.80% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah dalam Jawa terlaksana dengan baik	bulan	12	12			
				Konsultasi dan koordinasi luar daerah luar Jawa terlaksana dengan baik	bulan	12	12			
				Makan minum tamu tersedia sesuai kebutuhan	orang	1200	284			
				Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	orang perjalanan	9	0			
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	orang	1080	1079			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Mebeleur sesuai RKBMD	jenis	2	2			
				Dukungan 41,65% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Peralatan kantor sesuai RKBMD	jenis	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Alat studio sesuai RKBMD	jenis	3	3			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD	unit	3	3			
				Dukungan 9.17% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Depo arsip kantor terpelihara sesuai RKBMD	Unit	1	1			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	unit	7	7			
				Dukungan 6.66% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD	unit	11	11			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMD	jenis	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 13,33% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Jaringan terpelihara sesuai RKBMD	jenis	2	2			
				AC terpelihara sesuai RKBMD	Unit	56	56			
				Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD	jenis	3	3			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				LKjIP tahun 2019 yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret 2020	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 20% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis BPKA DIY tahun 2020	Dokumen	2	2			
				Laporan Keuangan Tahun 2019 BPKA DIY	Dokumen	1	1			
				Dukungan 20% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				Laporan Keuangan Bulanan	Dokumen	12	12			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Dukungan 50% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				Berita Acara Forum Perencanaan OPD	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Renja, ROPK, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen	8	8			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Laporan monitoring dan evaluasi (monev) akhir tahun	Dokumen	1	1			
				Laporan monitoring dan evaluasi (monev) bulanan	Dokumen	12	12			
				Laporan monitoring dan evaluasi (monev) timbal balik triwulanan	Dokumen	4	4			
				Dukungan 10% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
2	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		**PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**						
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis						
				Tanah terbebskan di Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 221 Kelurahan Tegalrejo Yogyakarta seluas 3.914 m2	unit	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 11,51% terhadap peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapa 17,50%	%	100	100			
3	ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah	**PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH**				Dinamika perubahan kebijakan terkait pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan	Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, belanja dan aset berbasis akrual secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel	TINDAK LANJUT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH: 1). Terobosan untuk mencari sumber pendapatan baru, telah dilakukan Pemerintah Daerah DIY dengan menggali sumber pendapatan baru, seperti misalnya dengan memanfaatkan asset daerah, dengan menyewakan asset yang dimiliki Pemda dan mendirikan BUMD terkait Aset Pemda yang nantinya akan mengelola Barang Milik Daerah untuk menjadi sumber pendapatan baru 2). Peluang investasi dalam skala besar pada Pemda DIY belum pernah dilakukan karena belum ditemukan potensi yang cukup besar untuk

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah 3). Usaha-usaha peningkatan penghasilan melalui penghasilan dari BUMD dilakukan dengan mencari peluang usaha lain yang bisa dioptimalkan oleh BUMD, salah satunya dengan mendirikan cafÃ© untuk memanfaatkan peluang usaha saat ini 4). Usaha yang telah dilakukan Pemda DIY dalam mencapai rata-rata nasional, yaitu 46% dibanding APBD DIY dengan melakukan meningkatkan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY. Dengan memanfaatkan asset daerah dengan menyewakan asset daerah ataupun memanfaatkan mengoptimalkan asset daerah 5). Usaha Pemerintah dalam menginformasikan kepada Wajib Pajak terkait dengan Pajak yang akan jatuh tempo, Pemda DIY membuat aplikasi yang bisa didownload

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										oleh masyarakat untuk bisa mengetahui Jatuh tempo masing-masing Wajib Pajak, selain itu dengan mengirim surat kepada Wajib Pajak melalui PT POS Indonesia dengan kegiatan SUPER PKB (Surat Pemberitahuan Pajak kendaraan Bermotor) terkait jatuh tempo pajak kendaraan milik Wajib Pajak 6). Optimalisasi Pajak Air Permukaan telah dilakukan dengan melakukan pendataan pengusaha yang memanfaatkan sumber-sumber air permukaan sebagai usahanya, yang selanjutnya akan dilakukan penagihan terhadap pemanfaatan Air Permukaan. TINDAK LANJUT PENGELOLAAN BELANJA DAERAH: Penganggaran Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/ Kota telah dihitung berdasarkan Perda DIY Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pergub DIY Nomor 89 tahun 2016 tentang Pengelolaan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan SK Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2019 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan SK Gubernur DIY Nomor 24/KEP/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2019 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019. Agar Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/ Kota bisa terealisasi 100% maka penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah juga harus tercapai 100%., karena penyaluran Belanja Bagi

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										Hasil kepada Kabupaten/ Kota didasarkan atas penerimaan tersebut. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Air Permukaan sudah terealisasi 100% , sementara Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Pajak Rokok tidak mencapai 100% karena penerimaan dari Pajak Rokok tidak sesuai dengan anggaran. Pajak rokok dianggarkan sebesar Rp210.353.611.516,00 dan realisasinya sebesar Rp190.255.946.878,00 sehingga Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten dan Kota yang bersumber dari pajak rokok tidak bisa terealisasi 100%. Sementara itu, Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secaralangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										belanja; 1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upahdalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 2. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untukpembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang daridua belas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakanprogram dan kegiatan pemerintahan daerah 3. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asettetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. TINDAK LANJUT BELANJA DANA KEISTIMEWAAN: Belanja Langsung dalam APBD 2019 telah diarahkan untuk belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja pegawai dianggarkan untuk

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Barang dan Jasa dainggarkan untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Modal dainggarkan untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan TINDAK LANJUT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH: Dalam pengelolaan barang milik daerah, selalu mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dalam hal ini adalah siklus pengelolaan barang mulai dari perencanaan (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) sampai dengan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										Penghapusan. Dalam rangkaian pengelolaan barang tersebut, Pemda DIY telah menggunakan sistem teknologi informasi diantaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah modul Aset untuk pencatatan aset tetap, aplikasi persediaan barang milik daerah untuk pencatatan barang persediaan dan pada tahun 2019 telah merintis aplikasi pemanfaatan barang milik daerah. Bahwa inventarisasi aset barang dilakukan secara periodik yaitu per semester. Pemda DIY juga telah melakukan pengamanan barang milik daerah baik pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Upaya yang telah dilakukan Pemda DIY kaitannya dengan pengamanan secara hukum adalah dengan melakukan sertifikasi terhadap tanah - tanah yang belum ada legalitasnya dan menindaklanjuti penghuni liar untuk ditertibkan atau

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										diproses secara legal melalui sewa barang milik daerah. Terkait dengan asset yang â€œmangkrakâ€• dan tidak diproduktif, Pemda DIY telah melakukan Road Map Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Highest Best Use barang milik daerah idle sehingga dapat menentukan penggunaan terbaik dan tertinggi terhadap barang tersebut. TINDAK LANJUT PENGELOLAAN ASET DAERAH YANG DIPISAHKAN: 1. Untuk merespon percepatan dunia usaha, akan dibentuk 2 BUMD baru yaitu, a. Perusahaan Daerah Air Bersih Saat ini sedang dalam proses di Biro Hukum Kemendagri b. BUMD Pengelolaan Aset 2. Untuk mengoptimalkan penegelolaan aset daerah akan dibentuk BUMD Pengelolaan Aset dimana proses pembentukan kelembagaan BUMD tersebut sudah masuk dalam Propemperda 2020. 3. Target PAD PT

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										Bank BPD DIY tidak dapat direalisasikan seperti pada proposal penambahan modal karena realisasi setoran modal lebih kecil dari yang direncanakan dalam RPJMD T.A. RPJMD TARGET APBD Realisasi Setoran Modal Deviden Setoran Modal Deviden Setoran Modal Deviden 2019 209.440.000.000 85.150.000.000 309.440.000.000 79.201.315.078 164.440.000.000 78.265.128.517 4. Kinerja PT Taru Martani dalam mengelola usaha tembakau mengalami peningkatan. Terkait dengan pengembangan usaha di Pati, Jawa Tengah sedang dalam proses pengalihan saham yang dimiliki oleh PT Yongsin Aneka Energy.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan sesuai SAP (tepat waktu 60%, lengkap 40%, tidak tepat waktu 30%, tidak lengkap 20%)	%	100	100	2. Penilai Pemerintah di Pemda DIY belum tersedia sehingga masih menggunakan konsultan jasa penilai independen dimana memerlukan anggaran yang tidak sedikit, dan akan menyulitkan Pemda DIY apabila Penilaian Kembali Barang Milik Daerah diberlakukan	Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah agar dapat mengidentifikasi asset-aset idle, melaksanakan Road Map Pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta melaksnakan kajian terhadap aset idle untuk memperoleh anallisis kegunaan terbaik dan tertinggi (highest best use/HBU) sebelum dilaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			3. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	**Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**						
			4. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat	Raperda Pertanggungjawaban APBD TA.2019 disampaikan paling lambat Juni 2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2019	Dokumen	1	1			
			5. Ketepatan waktu dan keakuratan pengelolaan keuangan daerah	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA.2019 disusun paling lambat Februari dan Agustus 2020	Dokumen	2	2			
			6. Peningkatan peran optimalisasi barang milik daerah sebagai salah satu kontributor peningkatan PAD	Laporan keuangan Pemda DIY TA.2019 Un audited selesai Maret 2020	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			7. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur serta monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan	Dukungan 40% terhadap ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda pertanggungjawaban APBD	%	100	100			
				Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai bulan Juli 2020	Dokumen	1	1			
				Pengelolaan Sistem dan Sumber Daya Pelaporan Keuangan Daerah						
				Dukungan 60% terhadap ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda pertanggungjawaban APBD	%	100	100			
				Sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan lancar untuk 3 (tiga) jenis tahapan pengelolaan keuangan daerah (Penyusunan APBD, Penaatausahaan Keuangan daerah, penyusunan pelaporan	Unit	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				dan pertanggungjawaban keuangan)						
				PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH						
				Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah	%	100	100			
				Pengendalian Belanja Langsung						
				Penerbitan dokumen SP2D Belanja langsung seluruh PA dan KPA dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana Prasarana dan Sosial Budaya	dokumen SP2D terbit	8817	8817			
				Dukungan 60% terhadap penatausahaan keuangan daerah yang akurat	%	100	100			
				Pengendalian Belanja Tidak Langsung						
				Penerbitan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Non Gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana prasarana dan Sosial budaya	dokumen SP2D paling	200	200			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				BA Rekonsiliasi dgn Taspen dan BPJS	Dokumen Berita Acara	3	3			
				Penerbitan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana Prasarana dan Kesra (Paling lambat hari Pertama masuk kerja setiap bulan)Rekonsiliasi anggaran non kas	dokumen SP2D terbit	1263	1263			
				Dukungan 40% terhadap penatausahaan keuangan daerah ysng akurat	%	100	100			
				PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
				Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100			
				Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota						
				Hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota 2021 dan Perubahan APBD Kab/Kota TA.2020	surat Sekda tentang	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Hasil evaluasi paling lama 15 hari setelah Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA 2020 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD TA.2020	Kep Gub ttg Evaluasi	5	5			
				Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA.2021 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD TA. 2021	Kep Gub ttg Evaluasi	5	5			
				Dukungan 20% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100			
				Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota 2019 diterima secara lengkap	Kep Gub ttg Evaluasi	5	5			
				Bina Pengelolaan Keuangan Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara dan KPA/KPB APBD	Keputusan Gubernur	2	2			
				Dukungan 40% kinerja terhadap pembinaan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100			
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kelompok Sasaran Pengelola Keuangan	Pengelola Keuangan	38	38			
				Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PMK dan Permendagri)	Peraturan Gubernur	1	1			
				Bina Administrasi BUMD dan BUKP						
				Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP Tahun buku N-1	Dokumen	1	1			
				Deviden BUKP	Rp	5,5E+12	6025001568			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Keputusan Kepala BPKA tentang pengesahan RKAT BUKP Tahun Buku 2020 berdasarkan SE Pedoman penyusunahn RKAT N+1 selambat-lambatnya akhir Nopember	Dokumen	1	1			
				Rekruitmen Calon Direktur BUMD Air Bersih	Orang	1	1			
				Penyertaan modal daerah pada BUMD Air Bersih (Rekening pembiayaan)	Rp	1,25E+10	12500000000			
				Penurunan NPL BUKP	%	15	14			
				Deviden BUMD	Rp	9,454E+10	95336062572			
				BUMD Ekspo	Kegiatan	1	0			
				Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY (Rekening Pembiayaan)	Rp	1,62E+11	1,01E+11			
				Dukungan 40% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	%	100	100			
				Dana bergulir BUKP(rekening pembiayaan)	Rp	4E+09	4000000000			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Keputusan Gubernur tentang pengesahan Laporan tahunan BUKP tahun buku N-1	Dokumen	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH						
				Persentase Kontribusi Pendapatan Pajak, Retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan , PAD Lain yang Sah Terhadap pendapatan	%	56.06	55.17			
				Perencanaan Pendapatan Daerah						
				Rencana Target Pendapatan Daerah	Rp	5477871356163.9	5237365965390.7			
				Dukungan 30% terhadap meningkatnya Pendapatan daerah	Rp	6,13E+12	6,13018E+12			
				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah						
				Laporan Dana transfer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	20	20			
				Dukungan 70% terhadap meningkatnya PAD	Rp	6,074E+12	6,07401E+12			
				Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp	1726122874050.5	1867680707447.7			
				PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan RAPBD	%	100	100			
				Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD	%	100	100			
				Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah						
				Dukungan 60% terhadap kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	%	100	100			
				Perda APBD TA.2021 ditetapkan paling lambat Desember 2020 yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraaturan perundangan yang berlaku	Dokumen	1	1			
				Pergub penjabaran APBD TA 2021 ditetapkan paling lambat bulan Desember 2020 yang sesuai dengan dokumen perencanaan (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA PD TA.2021 yang telah disyahkan paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	Dokumen	313	0			
				DPA PD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD TA.2021 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD TA.2021	Dokumen	33	0			
				Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah						
				Perda PAPBD TA.2020 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	Dokumen Perda PAPBD	1	1			
				Dukungan 40% terhadap kesesuaian program dan kegiatan antara KUPA PPAS dan APBD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA PD paling laambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	Dokumen SPD	157	157			
				DPPA PD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD TA.2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2020	Dokumen DPPA PD	33	33			
				Pergub Penjabaran PAPBD TA.2020 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	Dokumen Pergub Penja	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
				Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai prosedur	%	100	100			
				Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 30% terhadap Pengelolaan pengelolaan BMD sesuai dengan prosedur	%	100	100			
				Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan Keputusan Gubernur	Unit	15	66			
				Penjualan dan Penghapusan Bangunan Gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	unit	5	5			
				Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	jenis	5	5			
				Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah						
				Laporan Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret	Laporan	2	2			
				Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	Dokumen	1	1			
				Dukungan 40% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah						
				Rumah dinas yang siap untuk di operasionalkan	Unit	5	5			
				Polis Asuransi Barang Milik Daerah (Polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 ke atas)	jenis	1	1			
				Sertifikasi terhadap bidang tanah BMD	Dokumen	7	7			
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor BMD	Unit	1	1			
				Penagihan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi semula Rp 427.512.806	Rp	425512806	409235397			
				Dukungan 30% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	%	100	100			
				PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH						
				Jumlah potensi barang Milik Daerah yang didayagunakan	%	71.43	71.43			
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perma-salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 60% terhadap pendayagunaan barang milik daerahn yang optimal	%	100	100			
				Evaluasi pemanfaatan BMD untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna (terhadap BMD yang telah di manfaatkan)	Obyek	10	10			
				Penilaian Barang Milik Daerah						
				Dukungan 40% terhadap pendayagunaan barang milik daerah yang optimal	%	100	100			
				Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD	Laporan	1	1			

d. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Sub Urusan Kepegawaian

a) Kondisi Umum

Pelayanan publik dewasa ini menjadi isu strategis yang merupakan gambaran harapan masyarakat terhadap kualitas kinerja birokrasi pemerintah yang memiliki implikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan di bidang kepegawaian secara berkelanjutan akan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan juga akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan (*trust*) dan legitimasi terhadap Pemerintah.

Hadirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengubah paradigma manajemen kepegawaian dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara. Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (*drafting and recording data plus information*) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN bisa terwujud dengan dibangunnya sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (*unified system*). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam lingkup Sumber Daya Manusia Aparatur, Pemda DIY melalui Badan Kepegawaian Daerah DIY terus melakukan upaya-upaya perbaikan atau reformasi birokrasi dalam rangka pelaksanaan manajemen ASN yang lebih baik, sebagai berikut.

(1) Kajian Manajemen Sumber Daya Manusia

Kajian Manajemen SDM Aparatur merupakan proses untuk melakukan telaah atas apa yang harus sudah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan agar tercipta pengelolaan kepegawaian yang berkesinambungan dengan memperhatikan capaian-capaian yang

telah diperoleh dan dengan menganalisis kesenjangan yang dirumuskan melalui agenda-agenda pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan yang ingin dicapai membutuhkan adanya komitmen, keteguhan, dan konsistensi sehingga menjaga ketercapaian kinerja yang mampu memberikan manfaat sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD DIY 2017-2022.

(2) Perencanaan dan Pengadaan Pegawai

Suatu organisasi tanpa didukung pegawai yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi, operasional, dan fungsional maka organisasi itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaan, mengembangkan, dan memajukan organisasi di masa mendatang. Langkah konkrit yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan, penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai lima tahunan yang dilakukan setiap tahunnya dan penyusunan formasi berbasis jabatan.

Informasi yang didapat dari hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan yang disandingkan dengan bezetting pegawai dan pegawai yang akan pensiun, PNS yang meninggal dunia serta PNS mutasi untuk mengetahui proyeksi kebutuhan pegawai tahunan dan atau lima tahunan.

Perencanaan kebutuhan pegawai yang baik hanya dapat diperoleh melalui penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai. Rekruitmen Pegawai merupakan proses yang krusial dan kritis. Krusial artinya rekruitmen pegawai memiliki implikasi high *cost economy* dan merupakan investasi besar bagi satuan organisasi/negara termasuk Pemda DIY. Implikasi high *cost economy* adalah selain membutuhkan biaya yang besar dalam pelaksanaannya, juga secara tidak langsung akan meningkatkan efisiensi anggaran melalui pemenuhan pegawai yang berkualitas dan berkompeten. Sementara implikasi investasi diperoleh melalui penyiapan anggaran gaji bagi pegawai baru selama masa aktif, pensiun, bahkan sampai pensiun janda/anak (rata-rata 50 s.d 60 tahun), serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.

Oleh sebab itu, perlu diupayakan pelaksanaan seleksi CPNS melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan dengan mengedepan prinsip objektif, transparan, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. Seleksi CPNS dilakukan dalam tiga tahap meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang dengan pendekatan berbasis Teknologi Informasi pada setiap tahapannya.

(3) Rightsizing

Penempatan PNS dalam jabatan berdasarkan prinsip "menempatkan orang yang tepat dalam jabatan yang tepat". Prinsip ini memerlukan alat yang dapat mengenali kompetensi PNS dan alat untuk menetapkan standar kompetensi jabatan. Penempatan dan distribusi PNS (jabatan fungsional tertentu dan umum) akan lebih mempertimbangkan hasil pemetaan jabatan dan formasi (sesuai kebutuhan dan keahlian yang dimiliki), sedangkan untuk penataan dan penempatan dalam jabatan struktural mempertimbangkan rekomendasi *Assessment Center* dengan tanpa mengabaikan hak-hak PNS sesuai dengan nilai-nilai demokratis, transparansi, dan keadilan. Rekomendasi ini mengacu pada analisis jabatan dan profil kompetensi yang akuntabel terutama menyangkut kualifikasi pegawai meliputi pendidikan, diklat teknis serta penjaringan minat dan bakat pegawai. Penempatan seseorang dalam jabatan diharapkan sesuai dengan bakat, kemampuan, peminatan pegawai serta kebutuhan instansi. Penguatan peran Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan penilaian yang memadai. Pegawai yang akan ditempatkan dalam jabatan tertentu merupakan pegawai yang benar-benar telah diseleksi secara objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip merit *system*. Setiap tahun perlu senantiasa diupayakan rotasi pegawai secara berkala sebagai upaya penyegaran kerja dan peningkatan wawasan dan keahlian kerja. Untuk mendapatkan kepuasan dan efektivitas kerja perlu ada kesesuaian antara kemampuan kualifikasi pegawai yang akan dirotasi.

(4) Implementasi Merit System

UU ASN meletakkan dasar kompetisi terbuka di antara PNS dalam proses pengisian jabatan, khususnya dalam mengisi Pimpinan Tinggi (JPT). Dengan sistem ini, pengisian JPT dilakukan secara terbuka di

antara PNS yang memenuhi syarat jabatan dan standar kompetensi jabatan. Melalui sistem promosi terbuka, PNS yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk duduk dalam jabatan-jabatan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan seleksi dengan promosi terbuka diharapkan dapat memperkuat kompetisi di antara PNS serta memperkuat implementasi NKRI. Apabila sistem ini berjalan dengan baik, orang-orang yang duduk dalam JPT adalah PNS terbaik yang diseleksi berdasarkan kompetensi dan kinerja dengan tanpa memandang asal usul, warna kulit, agama, ras, keturunan dan/atau hubungan afiliasi politik.

Dalam upaya percepatan reformasi birokrasi untuk mendukung kebijakan manajemen kepegawaian tersebut, Pemda DIY membangun dan mengembangkan aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam proses-proses manajemen antara lain:

(a) SIMPEG (aplikasi penunjang manajemen kepegawaian);
(b) e-Perencanaan kepegawaian (dukungan dalam penyusunan formasi, proyeksi kebutuhan pegawai, dan analisis kesenjangan jabatan yang dipergunakan sebagai rekomendasi dalam pengusulan CPNS, penataan/redistribusi/rotasi, dan perencanaan diklat);
(c) e-Presensi (aplikasi penunjang mesin presensi);
(d) e-Document (Aplikasi penunjang dokumen mulai dari pencatatan surat masuk, penulisan disposisi sampai penyelesaian lebih lanjut);
(e) SINEMA PANAS SISTER (Sistem Penerimaan Pegawai ASN Berbasis Komputer: Aplikasi untuk mendukung Tes Kompetensi Bidang(TKB) CPNS); dan
(f) SIAP SK (Sistem Aplikasi Program Seleksi Kepegawaian yang dapat dipergunakan untuk dukungan pelaksanaan seleksi Pegawai Non PNS, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah, Seleksi Tugas Belajar, dan seleksi kepegawaian lainnya).
(g) Kinangkat (Aplikasi kenaikan pangkat yang berbasis less paper, dan menerapkan tanda tangan elektronik dalam prosesnya).
(h) e-Mutasi (Sistem Aplikasi yang membantu bagi pegawai-pegawai yang mutasi ke Pemda DIY untuk mengetahui sejauh mana proses mutasi itu berjalan).
(i) Si-Informan (Aplikasi penilaian kinerja pegawai atau SKP)

(5) Peningkatan Kompetensi ASN

Peningkatan Kompetensi ASN dalam rangka peningkatan profesionalisme PNS dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat, yaitu diklat teknis/fungsional, pendidikan formal maupun non formal, atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan perubahan pola pikir, moral, dan perilaku SDM aparatur.

Pemda DIY mengupayakan sistem penciptaan PNS profesional, kompeten, dan berkinerja baik melalui pemberdayaan jabatan fungsional tertentu. Sistem ini mengandung dua proses, yaitu; (1) memasukkan pemerintah dalam jabatan fungsional; dan (2) memasukkan jabatan fungsional dalam pemerintah. Proses pertama diartikan bahwa pemerintah daerah mendukung pengembangan jabatan fungsional tertentu berupa formasi jabatan dan ketersediaan dana untuk pengembangan profesi baik melalui diklat, penelitian, dan observasi. Proses kedua diartikan bahwa pejabat fungsional (tingkat ahli) dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Proses kedua akan berjalan dengan baik manakala proses pertama dilakukan secara jujur dan profesional. Artinya, dukungan pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk mengkebiri peran dan aspirasi pejabat fungsional.

(6) Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan ASN di lingkungan Pemda DIY, akan dilaksanakan pemberian tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan prestasi kerja berdasarkan pada kinerja individu dan instansi. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja merupakan wujud penghargaan atau reward bagi PNS sesuai dengan kinerjanya.

Peningkatan kesejahteraan ASN tidak hanya sebatas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai. Kesejahteraan rohani diberikan dengan mengadaan pengajian rutin ASN Pemda DIY setiap hari Rabu setiap bulannya. Perlombaan olahraga antar OPD dan juga MTQ.

(7) Peningkatan Kualitas Layanan melalui penerapan ISO 9001-2015

Peningkatan mutu layanan kepada ASN dan masyarakat, perlu dibangun Sistem Manajemen Mutu yang dibangun berstandar mutu internasional yakni ISO 9001 versi 2015. Pembangunan Sistem

Manajemen Mutu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada *user*, kejelasan prosedur, tata kerja, serta dokumentasi arsip.

Tujuan pembangunan Sistem Manajemen Mutu ini antara lain: 1) Untuk menetapkan Sistem Manajemen Mutu instansi, tanggung jawab masing-masing personil serta memberikan prosedur umum bagi layanan yang berkaitan dengan sistem mutu; 2) Sebagai bentuk komitmen untuk memelihara mutu, menyerahkan produk, mengendalikan mutu, melakukan perbaikan secara berkelanjutan, serta menyelenggarakan pelayanan berorientasi pada kepuasan pelanggan; 3) Memonitor kekurangan dalam penyelenggaraan layanan dan sebagai bahan tindak lanjut perbaikan; 4) Memastikan bahwa seluruh personil memiliki pemahaman terhadap persyaratan dan tanggung jawab layanan; dan 5) Memberikan pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan.

(8) Penguatan Peran Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai sebagai penyelenggara Assessment Center

Secara konseptual metode *Assessment Center* adalah sebuah proses sistematis untuk menilai keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu yang dianggap penting bagi keberhasilan kinerja yang unggul pada suatu jabatan. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa tujuan Assessment Center bukan hanya menilai kompetensi seseorang. Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2008, *Asessment Center* dapat digunakan untuk berbagai tujuan antara lain: 1) Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural; 2) Pengembangan keahlian; 3) Penentuan Kebutuhan Pelatihan; dan4) Identifikasi Kader Pimpinan (*Talent pool*).

Hasil laporan *Asessment Center* memberikan gambaran profil kompetensi seseorang yang disandingkan dengan standar kompetensi jabatan yang dituju; apakah memenuhi atau belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Hasil *Assessment Center* bukan hanya menjadi keputusan untuk mempromosikan dan menempatkan seseorang, tetapi sebagai pengambilan keputusan tindakan pengembangan kemampuan pegawai agar dapat mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, agar *Assessment Center* dapat memberikan manfaat maksimal, penting bagi pegawai yang mengikuti *assessment* untuk menerima umpan balik mengenai profil kompetensi mereka. Hal ini dapat digunakan

sebagai upaya agar membangun kesadaran dan komitmen pengembangan diri.

Dengan kata lain, *Assessment Center* merupakan sebuah upaya untuk dapat mengembangkan kompetensi dan profesionalisme pegawai. Kehadiran Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai di Pemda DIY diharapkan mampu berperan secara optimal untuk mengidentifikasi kompetensi pegawai khususnya di lingkungan Pemda DIY yang diharapkan dapat diaplikasikan untuk kebutuhan promosi, pelatihan dan pengembangan, maupun perencanaan SDM organisasi sehingga dapat membangun karakter pegawai dan pejabat di Pemda DIY yang profesional, bersih, dan melayani.

Tabel 3.139. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase kualitas manajemen SDM aparatur	%	88,41	80,50	88,41	108,48	85,00	104,01

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2021

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase kualitas manajemen SDM aparatur Tahun 2020 sebesar 88,41% dari target 80,50%, atau sebesar 108,48%. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan, diantaranya dengan melakukan seleksi Tenaga Bantu atau Naban. Seleksi ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan pegawai yang menurun tiap tahun karena purna tugas. Pegawai yang memasuki masa purna tugas pada tahun 2019 mencapai 757 dan tahun 2020 sebanyak 817 pegawai dari target yang ditetapkan 700 pegawai.

Penyusunan proyeksi pegawai melalui analisis pemetaan pegawai. Pada tahun 2018 diusulkan 700 formasi CPNS ke Kemenpan-RB dan disetujui sebanyak 766 formasi. Dalam pelaksanaan seleksi Tahun 2018, dari 766 formasi terisi sebanyak 759 formasi, lima formasi kosong, dan dua formasi mengundurkan diri setelah pengumuman penerimaan.

Formasi CPNS yang tersedia pada tahun 2019 sebanyak 717 formasi. Telah dilakukan seleksi administrasi terhadap 8.888 orang; sebanyak 6.176 orang lulus seleksi, sedangkan 2.712 orang tidak lulus. Seleksi Naban Tahun 2019 menghasilkan sebanyak 3.638 orang.

Formasi CPNS Tahun 2019 dilakukan seleksi SKB dan sudah diumumkan sebanyak 688 CPNS. Pengangkatan kembali Naban seleksi 2019 sebanyak 3.449 orang, P3K sebanyak 50 orang, Naban baru 2020 sebanyak 87 orang dan dari STAN sebanyak 43 orang.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Penunjang Sub Urusan Kepegawaian dilaksanakan melalui alokasi anggaran Rp10.514.347.966,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam delapan Program dan 21 Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp8.847.476.894,00 (84,15%), dengan pencapaian fisik sebesar 98,80%. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan pengumpulan massa tidak bisa dilakukan. Kebijakan penundaan tes psikologi bagi pegawai mutasi ke Pemda DIY serta penundaan tes kompetensi bagi JPT Pratama belum bisa dilakukan karena masih menunggu rekomendasi dari KASN. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BKD DIY	1. Mengembangkan sistem talent pool untuk menuju merit system pengelolaan kepegawaian	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Kurangnya koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait	Percepatan sistem merit sesuai dengan arahan KASN, Penyusunan Formasi dalam rangka pemenuhan pegawai sudah dikirimkan ke Kemenpan dan saat ini masih menunggu keputusan dari Kemenpan, Keputusan P3K juga masih menunggu keputusan dari Kemenpan	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. TINDAK LANJUT KEPEGAWAIAN DAERAH Pemenuhan Tenaga Teknis untuk mengisi kekurangan ASN di tahun 2020 telah dilakukan dengan Rekrutmen Tenaga Bantusebanyak 3600 orang. Tenaga Bantu tersebut dikelola berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 dengan diberikan hak-hak sebagai berikut: 1. Gaji setara PNS; 2. Cuti; 3. BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan; 4. Tunjangan lain; 5. Pengembangan Kompetensi; 6. Tugas tambahan lain. B. TINDAK LANJUT URUSAN PENDIDIKAN Rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur TPP bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sudah ada, namun belum bisa dilaksanakan karena kondisi keuangan Daerah untuk *refocussing* penanganan wabah Covid-19 dan TPP bagi Guru,

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										Kepala Sekolah dan Pengawas paling lambat akan direalisaskian mulai Tahun Anggaran 2021.
			2. Mengembangkan potensi aparatur agar lebih kompetensi dan memiliki daya bersaing	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
			3. Perencanaan pegawai	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						
			4. Perbaikan sistem rekruitmen pegawai	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (STNK) roda dua 4 unit dan roda empat 7 unit	tahun	1	1			
			5. Rightsizing	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12			
			6. Pelaksanaan sistem seleksi terbuka	Jasa surat menyurat dan paket pengiriman	bulan	12	12			
			7. Profesionalisme PNS	Perijinan frekwensi radio	tahun	1	1			
			8. Penguatan jabatan fungsional	Bukti pembayaran biaya langganan aplikasi rapat dalam jaringan (2 akun 3 bulan)	bulan	3	0			
			9. Mewujudkan layanan kepegawaian secara less paper	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	25	25			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			10. Penerapan manajemen kinerja	Dukungan 60% Terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	%	100	100			
			11. Meningkatkan mutu layanan dengan pelayanan kepegawaian terpadu berdasarkan data kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis kompetensi	Jasa kebersihan kantor (Cleaning servise)	bulan	12	12			
				Pengelolaan arsip dinamis SKPD	bidang	6	5			
				Alat Tulis Kantor	jenis	82	82			
				Bahan Bacaan (Langganan Surat Kabar BKD dan Balai PKP)	jenis	4	3			
				Peralatan kebersihan	jenis	19	19			
				Barang cetakan dan penggandaan	jenis	20	20			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Kinerja Perencana Program 1 Tahun	orang	3	3			
				Kinerja Tenaga Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Selama 1 Tahun	orang	9	9			
				Kinerja Pengelola Keuangan 1 Tahun	orang	7	7			
				Pengurus Barang 1 Tahun	orang	2	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 20% Terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	%	100	100			
				Pengelola Kepegawaian 1 Tahun	orang	2	2			
				Pengelola Barang 1 Tahun	orang	1	1			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Dukungan 20% Terhadap Terwujudnya Administarsi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	%	100	100			
				Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Komputer (PC Branded 2 unit, notebook 2 unit, printer 2 unit)	jenis	3	3			
				Mebeleur (Meja 24 buah, Kursi 42 buah)	jenis	2	2			
				Dukungan 15% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	%	100	100			
				Alat Studio (Kamera)	unit	4	4			
				Perlengkapan Perkantoran AC Split 2 unit, Genset 1 unit	jenis	2	2			
				Alat Semprot Disinfektan	unit	1	1			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Pemeliharaan Taman dan Halaman	bulan	12	12			
				Pemeliharaan Jaringan Listrik	tahun	1	1			
				Dukungan 60% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur YangMendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	%	100	100			
				Pemeliharaan Gedung Kantor 3 paket (Pemeliharaan Drainase dan Pemasangan Conblok ; Pemeliharan rutin BKD DIY; Pemeliharaan rutin dan sarpras Balai)	paket	3	3			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat selama 1 tahun	unit	7	7			
				Mendukung 15% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	%	100	100			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua selama 1 tahun	unit	4	4			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 tahun	jenis	20	20			
				Pemeliharaan Mebeleur selama 1 tahun	jenis	3	3			
				Dukungan 10% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	persen	100	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	%	100	100			
				LKJ-IP BKD DIY Tahun 2019	laporan	1	1			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Realisasi Sesuai Dengan Anggaran Kas Yang Telah Ditetapkan 8 Program dan 21 Kegiatan (Deviasi 5%)	laporan	12	12			
				Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	%	100	100			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				ROPK, Renja, Renstra, RKA, DPA Yang Sesuai Aturan Yang Berlaku (Dokumen Perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020)	dokumen	1	1			
				Dukungan 70% Terhadap Terwujudnya	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penatusahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%						
				Berita Acara Forum Perencanaan OPD	BA	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	%	100	100			
				Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK 100%	laporan	12	12			
2	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Mengembangkan sistem talent pool untuk menuju merit system pengelolaan kepegawaian	**PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**				Kurangnya koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait	Percepatan sistem merit sesuai dengan arahan KASN, Penyusunan Formasi dalam rangka pemenuhan pegawai sudah dikirimkan ke Kemenpan dan saat ini masih menunggu keputusan dari	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. TINDAK LANJUT KEPEGAWAIAN DAERAH Pemenuhan Tenaga Teknis untuk mengisi kekurangan ASN di tahun 2020 telah dilakukan dengan Rekrutmen Tenaga Bantusebanyak 3600 orang. Tenaga Bantu tersebut dikelola berdasarkan Peraturan
			2. Mengembangkan potensi aparatur agar lebih kompetensi dan memiliki daya bersaing							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			3. Perencanaan pegawai						Kemenpan, Keputusan P3K juga masih menunggu keputusan dari Kemenpan	Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 dengan diberikan hak-hak sebagai berikut: 1. Gaji setara PNS; 2. Cuti; 3. BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan; 4. Tunjangan lain; 5. Pengembangan Kompetensi; 6. Tugas tambahan lain. B. TINDAK LANJUT URUSAN PENDIDIKAN Rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur TPP bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sudah ada, namun belum bisa dilaksanakan karena kondisi keuangan Daerah untuk *refocussing* penanganan wabah Covid-19 dan TPP bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas paling lambat akan direalisaskian mulai Tahun Anggaran 2021.
			4. Perbaikan sistem rekruitmen pegawai							
			5. Rightsizing							
			6. Pelaksanaan sistem seleksi terbuka							
			7. Profesionalisme PNS							
			8. Penguatan jabatan fungsional							
			9. Mewujudkan layanan kepegawaian secara less paper	Peningkatan Budaya Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara	persen	100	80			
			10. Penerapan manajemen kinerja	**Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar Daerah**						
			11. Meningkatkan mutu layanan dengan pelayanan	Jumlah ASN mutasi yang memahami keistimewaan DIY	orang	100	80			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			kepegawaian terpadu berdasarkan data kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis kompetensi							
				Dukungan terhadap peningkatan budaya pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara	%	100	80			
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Mengembangkan sistem talent pool untuk menuju merit system pengelolaan kepegawaian	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN**				Kurangnya koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait	Percepatan sistem merit sesuai dengan arahan KASN, Penyusunan Formasi dalam rangka pemenuhan pegawai sudah dikirimkan ke Kemenpan dan saat ini masih menunggu keputusan dari Kemenpan, Keputusan P3K juga masih menunggu keputusan dari Kemenpan	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. TINDAK LANJUT KEPEGAWAIAN DAERAH Pemenuhan Tenaga Teknis untuk mengisi kekurangan ASN di tahun 2020 telah dilakukan dengan Rekrutmen Tenaga Bantusebanyak 3600 orang. Tenaga Bantu tersebut dikelola berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 dengan diberikan hak-hak sebagai berikut: 1. Gaji setara PNS; 2. Cuti; 3. BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan; 4. Tunjangan lain; 5. Pengembangan Kompetensi; 6. Tugas tambahan lain. B. TINDAK LANJUT URUSAN

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										PENDIDIKAN Rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur TPP bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sudah ada, namun belum bisa dilaksanakan karena kondisi keuangan Daerah untuk *refocussing* penanganan wabah Covid-19 dan TPP bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas paling lambat akan direalisaskian mulai Tahun Anggaran 2021.
			2. Mengembangkan potensi aparatur agar lebih kompetensi dan memiliki daya bersaing	Persentase pegawai sesuai kebutuhan pegawai (formasi dan bezzeting)	persen	81	93.22			
			3. Perencanaan pegawai	Persentase pegawai perangkat daerah dengan data kepegawaian terintegrasi, valid dan update	persen	90.4	91.02			
			4. Perbaikan sistem rekruitmen pegawai	**Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur**						
			5. Rightsizing	Formasi Pegawai	dokumen	1	1			
			6. Pelaksanaan sistem seleksi terbuka	Laporan/Kajian Proyeksi Kebutuhan Pegawai	laporan	1	1			
			7. Profesionalisme PNS	Pegawai Rekruitmen Sesuai Formasi	orang	2500	3400			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			8. Penguatan jabatan fungsional	Dukungan 100% Terhadap Persentase Pegawai Sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	%	100	100			
			9. Mewujudkan layanan kepegawaian secara less paper	**Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur**						
			10. Penerapan manajemen kinerja	Aplikasi Layanan Kepegawaian (Sistem Informasi ASN/Simpeg, Sistem Informasi Presensi)	aplikasi	1	1			
			11. Meningkatkan mutu layanan dengan pelayanan kepegawaian terpadu berdasarkan data kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis kompetensi	Pemeliharaan Mesin Presensi	unit	225	225			
				Laporan data monev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota	laporan	12	12			
				Dukungan 100% Terhadap Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	%	100	100			
				Laporan hasil integrasi (secara fungsi) modul	laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				SIM Diklat dengan SIMPEG						
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI						
				Persentase pemenuhan kompetensi pegawai	persen	82	82.81			
				Pengembangan Profesionalisme Aparatur						
				Peserta pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang dikirim ke diklat	orang	118	299			
				Ijin dinas luar negeri	surat	50	15			
				ASN yang mendapat beasiswa tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas	orang	154	179			
				Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi	laporan	1	1			
				Dukungan 70% Terhadap Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	%	100	100			
				Surat ijin/keterangan belajar	surat	50	111			
				ASN yang lulus ujian dinas dan PI (Ujian Dinas: 160 org, Ujian Penyesuaian Ijazah: 100 orang)	orang	260	293			
				Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur						
				Jabatan Pelaksana	jabatan	150	501			
				Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	jabatan	85	280			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Jabatan Administrator (esl III) , Pengawas (esl IV dan V)	jabatan	150	333			
				Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	jabatan	11	17			
				Dukungan 30% Terhadap Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	%	100	100			
				Perpindahan Aparatur (mutasi PNS)	PNS	25	208			
				PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI						
				Persentase SK kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	persen	91	96.8			
				Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur						
				Jumlah ASN yang paham tentang penilaian TPP	PNS	220	225			
				Fasilitasi JKK/JKM	orang	10	3			
				Pegawai yang menerima Satyalancana Karya Satya	orang	400	406			
				Dukungan 80% Terhadap Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu 91%	%	100	96			
				Penegakan Disiplin Aparatur						
				Penetapan hukum pegawai dan pejabat negara	surat	250	210			
				Dukungan 20% Terhadap Persentase SK Kepegawaian yang	%	100	90			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Diselesaikan Tepat Waktu 91%						
				Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	kasus	14	19			
				PNS yang paham pengisian LHKPN	orang	180	180			
				PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
				Nilai survei kepuasan dari pelayanan kepegawaian	nilai	79	86.71			
				Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian						
				Aplikasi Buku Tamu Dikembangkan	paket	1	1			
				Dokumen hasil Sertifikasi Layanan Mutu	sertifikat	1	1			
				Dukungan 60% Terhadap tertib administrasi pengelolaan kepegawaian daerah 97,76%	%	100	99			
				Aplikasi Arsip yang dikembangkan	aplikasi	1	1			
				Kartu Identitas (Karis/Karsu dan Karpeg)	kartu	250	1282			
				Hasil survei Kepuasan Masyarakat	laporan	1	1			
				Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif	SK	400	456			
				Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun						
				Dukungan 60% Terhadap tertib administrasi pengelolaan kepegawaian daerah	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				SK Pemensiunan Pegawai Akurat dan tepat Waktu	PNS	700	817			
				SK Kenaikan Pangkat Akurat, Tepat Orang dan Tepat Gaji	PNS	900	1294			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI						
				Persentase kompetensi individu yang terpetakan	persen	47.57	41.85			
				Pengukuran Kompetensi Pegawai						
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY	orang	58	22			
				Dukungan 70% Terhadap 47,57% kompetensi individu yang terpetakan	%	100	91			
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY	orang	225	183			
				Aparatur yang mengikuti Bimbingan Konseling Pribadi	orang	20	11			
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY	orang	619	527			
				Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai						
				SDM Assesor dan Non Assesor yang berkompeten dengan diklat, pelatihan dan bimtek selama 1 tahun	orang	19	25			
				Kabupaten/Kota DIY yang terkoordinir dalam kerja sama pengukuran	kabupaten/kota	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 30% Terhadap 47,57% kompetensi individu yang terpetakan	%	100	100			
				Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Kemitraan	laporan	2	2			
				Kesepakatan kerja sama pengukuran (1 kesepakatan dan 5 PKS)	kesepakatan	6	14			

2) Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan

a) Kondisi Umum

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap aparatur agar dapat melaksanakan tugas secara profesional yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman kepada masyarakat dan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik *(good governance).* Sesuai dengan Surat Edaran Kepala LAN Nomor 7/K.1/HKM02.3/2020 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020 Tentang penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di DIY, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY telah menyelenggarakan berbagai jenis diklat dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh (*daring*) sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi aparatur seperti yang diamanahkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. UU tersebut menyatakan bahwa pengembangan kompetensi salah satunya adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Diklat yang dilaksanakan antara lain Diklat Penjenjangan (Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV), Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional.

Tabel 3.140. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Akreditasi Badan Diklat	Skor/ angka	91	92	91	98,91	93	97,80

Sumber: Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, 2021

Realisasi capaian indikator kinerja Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2020 adalah sebesar 98,91%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase capaian adalah sebesar 97,8% dari target skor 93 pada tahun 2022. Target tidak tercapai karena mempertimbangkan Surat dari LAN RI Nomor 1946/D.3/PDP.09 Tanggal 12 Mei 2020 tentang Tanggapan Permohonan Akreditasi, disebutkan bahwa Pelatihan Dasar CPNS

tidak membedakan pengelolaan dan program Latsar CPNS, tidak berdasarkan golongan (perbedaan hanya terletak pada evaluasi pembelajaran). Sehubungan dengan hal tersebut, terkait pelaksanaan akreditasi, masa berlaku akreditasi Latsar CPNS dapat mengikuti masa berlaku akreditasi Latsar CPNS Golongan III yakni sampai dengan bulan November 2022.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020, Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan melalui alokasi anggaran sebesar Rp6.504.207.354,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam delapan Program dan 24 Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp6.504.207.354 (93,06%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Penyeleng-garaan diklat yang berkualitas	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada upaya peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY.	Melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan metode pembelajaran *Distance Learning* (daring) dengan memanfaatkan teknologi informasi	Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan. Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menjadi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketugasan yang diberikan tersebut, setiap tahun Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan bentuk-bentuk Pendidikan dan Pelatihan untuk aparatur, baik Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, maupun Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Pelatihan Kepemimpinan
			2. Penyusunan kurikulum diklat dan pelaksanaan penelitian kediklatan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	persen	100	100			
			3. Mengembangkan jejaring kediklatan antar daerah/lembaga	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						
				Lisensi Meet	bulan	2	0			
				Langganan surat kabar, majalah	bulan	12	12			
				Alat listrik dan elektronik	jenis	23	23			
				Jasa Kebersihan	jenis bangunan	16	16			
				KIR kendaraan Roda empat	unit	1	1			
				Penggandaan	lembar	65000	65000			
				Terkelolanya arsip dinamis	tahun	1	1			
				Pembayaran telpon, listrik, air, dan TV	bulan	12	12			
				Lisensi Aplikasi Zoom	bulan	3	0			
				ATK	jenis	40	40			
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	21	19			
				Retribusi sampah	bulan	12	12			
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	buah	5	5			
				Terbayarnya pajak STNK	unit	12	12			
				Cetak	jenis	13	13			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Kinerja Pengelola Kepegawaian 2 orang	tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kinerja Pengelola Barang 2 orang	tahun	1	1			Pengawas), Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Pelatihan Kepemimpinan Administrator). Pada tahun 2019 Badan Pendidikan dan Pelatihan telah berhasil menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II) melalui pola pendampingan dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, pada tahun 2020 menyelenggarakan kembali dalam bentuk pendampingan dengan LAN RI sebelum kemudian bisa menyelenggarakan secara mandiri pada tahun 2021. Terkait dengan pengembangan kapasitas SDM tenaga kediklatan, untuk mengakomodir perkembangan yang ada. Bandiklat DIY telah menyelenggarakan Diklat Training Officer Course (TOC). Diklat Management of Training (MoT) baik dengan
				Kinerja Perencana Program 3 orang	tahun	1	1			
				Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang	tahun	1	1			
				Pengiriman	tahun	1	1			
				Kinerja Keamanan Kantor 15 orang	tahun	1	1			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Laporan Pembinaan Angka Kredit	laporan	1	1			
				Penyusunan Karya Tulis	laporan	1	1			
				Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	tahun	1	1			
				Perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah	tahun	1	1			
				Belanja makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	persen	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Printer	unit	9	9			
				Termometer Gun	unit	2	2			
				Kursi Futura	buah	197	197			
				UPS	unit	5	5			
				Printer A3	unit	1	1			
				Computer PC	unit	8	8			
				Alat Penyemprotan	buah	5	5			
				Laptop	unit	7	7			
				Jam dinding kamar Asrama Pandu	buah	40	40			
				Lampu Belajar Asrama Pandu	buah	80	80			
				Proyektor LCD	unit	2	2			
				Flip Chart	buah	20	20			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Perawatan taman dan perawatan kebun lingkungan	meter persegi	17000	17000			menyelenggarakan sendiri maupun melalui skema pengiriman, dan untuk peningkatan kapasitas tenaga pengajar/Widyaiswara pada tahun 2020 dilaksanakan melalui diklat ToF/Workshop pengajar/penyelenggara untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas). Selain itu secara rutin juga dilaksanakan pengiriman Widyaiswara untuk mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pengajar.
				Pembuatan TPA Sampah	paket	1	1			
				DED Rehabilitasi Gedung Pandu	dokumen DED	1	1			
				Rehab Ruang Kelas	paket	1	1			
				Perawatan taman lingkungan asrama	meter persegi	28340	28340			
				Laundry (sprei, gordyn, taplak meja, cover kursi)	kilogram	35000	28040			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Kendaraan dinas/operasional terpelihara (roda 2 dan roda 4)	unit	13	13			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Peralatan gedung kantor terpelihara	jenis	6	6			
				Pemeliharaan mebeler	jenis	2	2			
				Perlengkapan gedung kantor terpelihara	jenis	2	2			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	persen	100	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	nilai	1	1			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Realisasi sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan	persentase deviasi	5	0			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Berita Acara Forum Perencanaan OPD	Berita Acara	1	1			
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	dokumen	5	5			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	Persen	100	100			
2	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas	**PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN**						
			2. Penyusunan kurikulum diklat dan pelaksanaan penelitian kediklatan	Tingkat pemahaman ASN tentang keistimewaan	persen	100	100			
			3. Mengembangkan jejaring kediklatan antar daerah/lembaga	**Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bagi Aparatur**						
				Grand Design yang telah direview	naskah	1	1			
				Kurikulum Pelatihan Neuro Science	naskah	1	1			
				Kurikulum Pelatihan Tata Naskah Jawa	naskah	1	1			
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas	**PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN**						
			2. Penyusunan kurikulum diklat dan pelaksanaan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	persen	12.5	85.62			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			penelitian kediklatan							
			3. Mengembangkan jejaring kediklatan antar daerah/lembaga	**Diklat Kepemimpinan Tingkat II**						
				-	-	0	0			
				Diklat Kepemimpinan Tingkat III						
				Diklat Kepemimpinan Tingkat III	orang	80	80			
				Diklat Kepemimpinan Tingkat IV						
				Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	orang	80	80			
				PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL						
				Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	persen	13.3	52.51			
				Pendidikan dan Pelatihan Teknis						
				Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi	orang	30	30			
				Diklat Media Informasi	orang	30	30			
				Diklat Bendahara Daerah	orang	30	30			
				Diklat Perencanaan dan Penganggaran	orang	30	30			
				Diklat Fungsional						
				Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	orang	60	60			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN						
				Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	persen	84	100			
				Promosi dan Pembinaan Kemitraan						
				Kesepakatan Diklat Kemitraan	BA	5	5			
				Publikasi Kediklatan di Mass Media (Cetak)	paket	3	3			
				Data Calon Peserta Hasil Promosi dengan 1 laporan data calon peserta diklat Kemitraan untuk 1 tahun berjalan	laporan	1	1			
				Monitoring Diklat Kemitraan	laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Terkirimnya Surat Penawaran ke kabupaten/kota/instansi/Lembaga	kali	400	400			
				Penyelenggaraan Kemitraan						
				Rekomendasi Rapat Kerja Monitoring Pelatihan Kemitraan	rekomendasi	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU						
				Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	skor	79	80.96			
				Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat						
				Pedoman penyelenggaraan diklat (kurikulum)	Kurikulum dan silabu	4	4			
				Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat						
				Laporan hasil evaluasi pasca diklat	laporan	6	6			
				Laporan penjamin mutu	laporan	1	1			
				Penelitian Kediklatan						
				Laporan	laporan	0	0			
				Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat						
				Terpeliharanya bahan Pustaka	buku	12730	12730			
				Penerbitan buletin diklat	edisi	2	2			

e. Sekretariat Daerah

1) Tata Pemerintahan

a) Kondisi Umum

Penyelenggaraan tata pemerintahan di DIY didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Berdasarkan ketentuan Perda Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, pelaksanaan program dan kegiatan sub urusan otonomi dan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di DIY, pada Pada Tahun Anggaran 2020 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY juga telah melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pendampingan, dan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial. Pada Tahun 2020 Pemda DIY menyusun draft Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah diundangkan menjadi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koordinasi, monitoring dan evaluasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah khususnya terkait tindak lanjut pengalihan Sarana dan Prasarana serta Dokumen yang berkaitan dengan kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya yaitu:

(1) Pengalihan Aset Jalan Yang Mengalami Perubahan Status
(2) Pengalihan Aset Logandeng
(3) Pengalihan Aset Situs Sultan Agung Ompak Kerto
(4) Pengalihan Aset Eks Metrologi Legal

Tahun 2020 merupakan tahun politik bagi Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman berkaitan dengan adanya Pilkada Serentak 2020. Sehingga Pemerintah Daerah DIY turut serta memberi dukungan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di tiga kabupaten tersebut agar berjalan lancar dan sukses meski dilaksanakan di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Beberapa bentuk dukungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY antara lain:

(1) Aktif melaksanakan sosialisasi secara daring terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.
(2) Dalam rangka menjamin netralitas ASN, Pejabat BUMN/BUMD, dan Lurah serta Perangkat Kalurahan dan menghindari penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye, maka Pemerintah Daerah DIY menerbitkan SE Gubernur DIY Nomor 270/11545 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN/BUMD, Kepala Desa/Lurah, dan Perangkat Desa/Pamong Kalurahan serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
(3) Selain itu bagi anggaota DPRD yang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak Tahun 2020 difasilitasi usulan pemberhentian antarwaktu keanggotaannya.
(4) Memfasilitasi Cuti di Luar Tanggungan Negara pada masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2020,



Gambar 3.59. Pengukuhan Pjs Bupati Bantul pada 26 September 2020

(5) Memfasilitasi pengusulan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah bagi daerah yang Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan kembali mencalonkan diri dalam Pilkada pada daerah pemilihan yang sama;

(6) Pemda DIY melalui Tim *Desk* Pilkada telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di DIY berjalan dengan aman dan damai.

Sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, Gubernur DIY pada tahun 2020 melaksanakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Adapun bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah dalam rangka mendukung proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2020 telah melaksanakan fasilitasi usulan peresmian PAW Anggota DPRD sebanyak 6 usulan. Dari 6 usulan tersebut, 2 diantaranya merupakan usulan PAW Anggota DPRD DIY, 2 usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, 1 usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sleman, dan 1 usulan PAW Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Adapun rincian 6 usulan PAW Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

(1) PAW Anggota DPRD DIY atas nama Joko Budi Purnomo yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri pada Pilkada 2020 dan digantikan oleh Andriana Wulandari, SE.
(2) PAW Anggota DPRD DIY atas nama Agus Sumartono, S.Si karena meninggal dunia dan digantikan oleh Boedi Dewantoro, SH.
(3) PAW Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul atas nama Soemaryanto karena diberhentikan dan digantikan oleh Lagiyo.
(4) PAW Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul atas nama Anton Supriyadi ST., yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri pada Pilkada 2020 dan digantikan oleh Umiyati, SE.
(5) PAW Anggota DPRD Kabupaten Sleman atas nama Danang Maharsa, SE., yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri pada Pilkada 2020 dan digantikan oleh Dra. Hj. Sri Haryani, M.Si
(6) PAW Anggota DPRD Kota Yogyakarta atas nama Syamsul Hadi, SE., karena meninggal dunia dan digantikan oleh Dra. Rini Hapsari.

Berdasarkan amanat Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan SE Mendagri RI Nomor 100/1664/OTDA Tanggal 23 Maret 2020, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2019 telah disampaikan kepada Presiden melalui Kemendagri dengan tepat waktu. Pada Tahun 2020 Pemda DIY memperoleh piagam penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,2212 dan status kinerja sangat tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan beberapa agenda diantaranya; Pembinaan aparatur dalam pengelolaan dokumen administrasi Pemdes, peningkatan kapasitas BPD dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, Pembinaan Aparatur kecmatan sebagai Pembina Teknis Pemerintah Desa dan Pendampingan penyusunan APBDes Pro poor. Disamping itu, Pemda DIY juga melakukan pemantauan pengelolaaan Dana Desa dan juga pemantauan kinerja kecamatan.

Berikutnya pembinaan perbatasan antar-daerah dilaksanakan melalui koordinasi rutin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten yang berbatasan di wilayah Provinsi Jawa

Tengah, serta koordinasi internal antara Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan hasil berupa:

(1) Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/ Kota DIY
(2) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten/ Kota tentang Penyelesaian Permasalahan di Wilayah Perbatasan Kabupaten/ Kota dan atau antar Provinsi di DIY.

Tabel 3.141. Target dan Realisasi Kinerja Fasilitasi Tata Pemerintahan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Real-isasi	% Real-isasi		
Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan	%	120,68	100	113,85	113,85	100	113,85

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2021

Capaian penghitungan indikator sasaran tersebut merupakan komposit dari 2 (dua) sub indikator yakni Persentase dinamika penyelenggaraan otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan (terealisasi 107,69%) dan Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum yang direspon dengan kebijakan (terealisasi 120%). Sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 113,85%. Indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan bersifat kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan jumlah kumulatif kebijakan yang dihasilkan. Capaian indikator sasaran tersebut dapat melampaui target dikarenakan Pemda DIY segera merespon setiap dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi baik di pusat maupun di daerah, sehingga terselenggara tatanan pemerintahan serta pelayanan publik yang responsif dan akuntabel di mata masyarakat. Hal tersebut tentu saja merupakan hasil dari melalui korbinwas, sinkronisasi, dan kerja sama lintas sektor yang terkait dengan konteks kebijakan.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Fasilitasi Tata Pemerintahan dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp3.245.418.000,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam sembilan Program dan 21 Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp2.773.070.279,00 (85,45%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BIRO TATA PEMERINTAHAN	1. Harmonisasi hubungan antar pemerintah dalam penyelesaian permasalahan perbatasan antar pemerintah daerah	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Belum optimalnya hubungan kerjasama yang sinergis dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah yang lain.	Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan di Biro Tata Pemerintahan yang responsif melalui koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama antar jenjang pemerintahan.	
			2. Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
			3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam setiap tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						
			4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya	6. Jasa Surat-menyurat	Jenis	3	3			
				8. Penggandaan	Lembar	55000	5585			
				2. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM	11. Langganan Aplikasi Video Conference	bulan	3	3			
				1. Alat Tulis Kantor	jenis	37	37			
				7. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	11	11			
				3. Barang Cetakan	Jenis	16	16			
				4. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua	Unit	7	7			
				Dukungan sebesar 13,32% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				5. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat	Unit	5	4			
				9. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Tabung	11	11			
				10. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	16	16			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Dukungan sebesar 11,31% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				4. Kinerja 1 Orang Fasilitasi Kepegawaian	Tahun	1	1			
				5. Kinerja 2 Orang Pengemudi	Tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				1. Kinerja 1 Orang Perencana Program	Tahun	1	1			
				6. Kinerja 9 Orang Pengelola Keuangan	Tahun	1	1			
				2. Kinerja 2 Orang Pengelola Barang	Tahun	1	1			
				3. Kinerja 1 Orang Caraka	Tahun	1	1			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				1. Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	Tahun	1	1			
				2. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	Tahun	1	1			
				3. Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi	Tahun	1	1			
				Dukungan sebesar 75,37% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				3. Pengadaan Peralatan Medis	jenis	4	4			
				2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKBMD	Jenis	6	6			
				Dukungan sebesar 41,62% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD						
				1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai RKBMD	Jenis	2	2			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				2. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat	Unit	5	5			
				1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua	Unit	7	7			
				Dukungan sebesar 42,21% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Terpeliharanya Peralatan/ Perlengkapan, Gedung/ Kantor sesuai RKPBMD	Jenis	15	15			
				Dukungan sebesar 16,17% terhadap Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD						
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang Capaian Kinerjanya sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai	70	83.54			
				Terukurnya akuntabilitas kinerja Biro selama satu tahun anggaran	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				3. Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2020	Lapor -an	1	1			
				Dukungan sebesar 5,23% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Belanja Fungsional	Bulan	12	12			
				1. Laporan Keuangan Tahunan	Lapor -an	1	1			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021	Doku -men	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021	Doku -men	1	1			
				3. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021	Doku -men	1	1			
				5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020	Doku -men	1	1			
				Dukungan sebesar 78,17% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				1. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	Berita Acara	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Dukungan sebesar 7,84% terhadap Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Realisasi Penggunaan Dana Sesuai Anggaran Kas yang Telah Ditetapkan 9 Program 19 Kegiatan	%	95	95			
3	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)	BIRO TATA PEMERINTAHAN	1. Harmonisasi hubungan antar pemerintah dalam penyelesaian permasalahan perbatasan antar	**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			pemerintah daerah							
			2. Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan							
			3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam setiap tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa							
			4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM	Penerapan Keistimewaan di Kalurahan dan Kapanewon di 4 Kabupaten serta Kemantren di Kota dan 1 Kabupaten telah sesuai dengan Tindak lanjut penataan kelembagaan asli di Daerah (Perdais No. 1 Tahun 2018 dan Pergub. 25 Tahun 2019)	%	100	100			
				Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon, Kemantren dan Kalurahan						
				Kajian Papan Tanda Keistimewaan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	Doku -men	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Laporan Hasil pembinaan penerapan Keistimewaan di Kalurahan, Kapanewon dan Kemantren	Lapor-an	1	1			
				Penerapan Keistimewaan di Kalurahan dan Kapanewon di 4 Kabupaten serta Kemantren di Kota dan 1 Kabupaten telah sesuai dengan Tindak lanjut penataan kelembagaan asli di Daerah (Perdais No. 1 Tahun 2018 dan Pergub. 25 Tahun 2019)	%	100	100			
4	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)	BIRO TATA PEMERINTAHAN	1. Harmonisasi hubungan antar pemerintah dalam penyelesaian permasalahan perbatasan antar pemerintah daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN**						
			2. Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan							
			3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam setiap	Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa							
			4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM	**Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**						
				1. Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo	Doku -men	1	1			
				Dukungan sebesar 1,15% terhadap Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	%	100	100			
				3. Penggantian dan pemasangan pilar perapatan batas daerah pada perbatasan antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo	pilar	25	25			
				2. Database Administrasi Kewilayahan	Doku -men	1	1			
5	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO TATA PEMERINTAHAN	1. Harmonisasi hubungan antar pemerintah dalam penyelesaian permasalahan perbatasan antar pemerintah daerah	**PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA**				Belum optimalnya hubungan kerjasama yang sinergis dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah yang lain.	Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan di Biro Tata Pemerintahan yang responsif melalui koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama antar	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
									jenjang pemerintahan.	
			2. Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%	100	107.69			
			3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam setiap tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa	**Pelaksanaanan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan**						
			4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM	Dukungan sebesar 50% terhadap Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%	100	100			
				3. Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Rekomen -dasi	1	12			
				1. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 Bidang SPM	Laporan Standar Pelayanan	1	1			
				4. Rekomendasi Penerapan NSPK	Doku -men	0	0			

Urusan Kerjasama Antar Daerah Pada tanggal 10 Juli 2019 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Perbatasan DIY-Jateng Nomor 119/06463/2019, 125.5/063/2019, sebagai salah satu tindak lanjut dari kesepakatan bersama ini dapat sampaikan bahwa pada tanggal 10 Maret

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				2. LPPD Tahun 2019	Doku -men	1	1			2020 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah melakukan koordinasi dengan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Provinsi Jawa Tengah terkait usulan Program/kegiatan Kerja Sama Daerah yang memungkinkan untuk dilakukan mulai Tahun 2020 ini, yaitu Pembahasan Angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum tidak dalam trayek perbatasan DIY-Jateng. Dari koordinasi yang dilakukan dengan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah, diperoleh jawaban bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pembahasan dan koordinasi tehnis yang kemudian perlu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, Biro Tata Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah dan Biro Tata
				Penanganan Kerjasama Dalam Negeri						
				Dukungan sebesar 50% terhadap Persentase Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang Direspon dengan Kebijakan	%	100	100			
				3. Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	Rekomen -dasi	0	0			
				2. Surat Keputusan Bersama(SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	SKB	0	0			
				1. Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Naskah Perjan -jian Ke	5	5			
				PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN						
				Persentase Desa Tertinggal yang Memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	%	100	100			
				Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan						
				1. Desa dengan Aparatur yang Terbina dalam Pengelolaan Dokumen Administrasi Pemdes	desa	5	5			
				2. Desa dengan BPD yang Meningkat Kapasitasnya dalam Penyelenggaraan Musdes	desa	5	5			
				4. Kecamatan dengan Aparatur yang Terbina	Keca -matan	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				sebagai Pembina Teknis Pemerintah Desa						Pemerintahan Setda DIY bersepakat untuk menindaklanjuti. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketenteraman merupakan tugas dan fungsi dari Bakesbangpol DIY.
				3. Desa yang Terdampingi dalam Penyusunan APBDesa Pro Poor	desa	5	5			
				Dukungan sebesar 71,34% terhadap Persentase Desa Tertinggal yang Memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	%	100	100			
				Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan						
				Dukungan sebesar 28,66% terhadap Persentase Desa Tertinggal yang Memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	%	100	100			
				1. Pemantauan Kinerja Kecamatan	Lapor -an	1	1			
				2. Pemantauan Pengeloaan Dana Desa	Rekomen -dasi	1	1			
				PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH						
				Persentase Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Direspon dengan Kebijakan	%	100	120			
				Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
				1. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Umum	Lapor -an	0	0			Pembinaan Batas Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
				6. Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rekomen -dasi	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				5. Laporan Monitoring Pelaksanaan Pilkada di 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Gunungkidul) kepada Menteri Dalam Negeri	Lapor -an	1	1			Batas Desa, khususnya pada Pasal 7 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka sesuai dengan kewenangannya batas daerah antar desa merupakan kewenangan masing-masing kabupaten/kota. Pasal 6 menyatakan bahwa tugas Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Provinsi. Biro Tata Pemerintahan pada tahun 2020 dan 2021 akan memaksimalkan fungsi koordinasi pembinaan dan pengawasan penyusunan peta batas desa tersebut.
				4. Laporan Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Bupati Bantul, Gunungkidul, dan Sleman	Lapor -an	1	1			
				3. Berkas usulan Pemberhentian, Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu	usulan/ draf SK	0	0			
				2. Berkas Usulan Pemberhentian, Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu	Usulan/ Draf SK	2	6			
				Dukungan sebesar 98.37 % terhadap Persentase Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan yang Direspon dengan Kebijakan	%	100	100			
				Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi						
				1. Database Pilar Batas untuk Pengelolaan Tanda Batas Wilayah	Doku -men	0	0			
				3. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten/ Kota tentang Penyelesaian Permasalahan di Wilayah Perbatasan Kabupaten/ Kota dan atau antar Provinsi di DIY	Doku -men Kesepa -katan	1	1			
				Dukungan sebesar 1.63 % terhadap Persentase	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah						
				4. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/ Kota DIY	Doku -men	1	1			
				2. Hasil Koreksi Koordinat Pilar Batas Wilayah DIY_Jateng Secara Geodetik	Doku -men	0	0			

2) Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum

a) Kondisi Umum

Penyusunan produk hukum daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah sehingga dalam pembentukan produk hukum daerah dapat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, penyusunan produk hukum daerah harus mengakomodir perkembangan masyarakat dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat agar pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat dirasakan optimal.

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi perundang-undangan dan hukum, program kegiatan yang dilaksanakan berupa legislasi rancangan produk hukum daerah dan kegiatan perumusan kebijakan di bidang hukum. Kegiatan legislasi rancangan produk hukum daerah dimaksudkan sebagai upaya sinkronisasi, harmonisasi, dan penyelarasan penyusunan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terhadap aspek legal drafting penyusun produk hukum. Sedangkan kegiatan perumusan kebijakan di bidang hukum bertujuan antara lain untuk memetakan permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, untuk kemudian mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Instruksi Gubernur. Tahapan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa dibagi dalam lima tahap yaitu proses pembahasan, penyusunan rancangan peraturan daerah, penjaringan aspirasi masyarakat, evaluasi-klarifikasi-konsultasi, serta publikasi rancangan peraturan perundang-undangan di media cetak.

Pada Tahun 2020, target dan realisasi Kinerja Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.142. Target dan Realisasi Kinerja Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan Informasi produk hukum yang baik	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2021

Berdasarkan Propemperda DIY Tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) Raperda yang menjadi target pembahasan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak mundurnya jadwal pembahasan terhadap beberapa Raperda, selanjutnya dilakukan beberapa perubahan terhadap jumlah target dan judul Rancangan Peraturan Daerah yaitu menjadi 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah. Adapun target dan realisasi dari kegiatan pembahasan Raperda menjadi Perda adalah sebagai berikut:

Tabel 3.143. Kegiatan pembahasan Raperda menjadi Perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2020

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Pembahasan Raperda	10 Rancangan Peraturan Daerah	Raperda tentang Pramuwisata	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kepramuwisataan
		Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta
		Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
		Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Telah dilaksanakan persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur
		Raperda tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa	Telah dilaksanakan persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur
		Raperda tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Dalam proses permohonan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri
		Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dalam proses permohonan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri
		Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	(Karena adanya pandemi Covid-19, terdapat perubahan terhadap jumlah target dan judul Rancangan Peraturan Daerah yaitu menjadi 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah)

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2020

Penyusunan produk hukum daerah selain Perda, pada tahun 2020 juga telah disusun sebanyak 100 Pergub dan 390 Keputusan Gubernur. Disamping penyusunan legislasi, Pemda DIY juga melakukan pengawasan atas Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mewujudkan Produk Hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang sinkron dan harmonis. Hal tersebut dilaksanakan agar pelaksanaan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penyebarluasan informasi serta produk hukum daerah, Pemda DIY melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum dan Digitalisasi Produk Hukum sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan sosialisasi Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten beserta aturan pelaksanaannya di lima kabupaten/kota se-DIY.
(2) Mengunggah 368 produk hukum ke dalam website JDIH berupa 10 Perda, 92 Pergub, dan 368 Keputusan Gubernur.
(3) Penyampaian Lembaran Daerah dan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 2.200 buku ke kabupaten/kota sampai ke tingkat pedukuhan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 disebutkan bahwa Gubernur mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemda DIY dalam penyelenggaraan pemerintahan tak luput dari konsekuensi akan adanya keberatan dari masyarakat yang memungkinkan adanya gugatan ataupun tuntutan di Pengadilan baik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Umum. Demikian juga tidak menutup kemungkinan Pemda DIY menjadi penggugat apabila kepentingannya telah dirugikan oleh Badan Hukum Perdata ataupun orang pribadi/masyarakat. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan pelayanan hukum bagi aparatur, Pemda DIY melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum dengan realisasi penyelesaian permasalahan hukum litigasi sebanyak empat kasus sebagai berikut:

(1) Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor: 92/Pdt.G/2019/PN.Yyk jo. Nomor: 151/PDT/2020/PT.YYK antara pihak Pembanding Hj.Setiowati, dkk dan Terbanding Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, serta unsur-unsur Pemerintah lainnya, Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dalam perjanjian sewa menyewa, permohonan peralihan status tanah Negara Golongan III serta penerbitan hak pakai, terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa yang terletak di Tunjung No.2 ,

RT.086, RW.021, kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas 701 m2 dengan amar putusan Tingkat Banding sebagai berikut:

(a) Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Para Penggugat;
(b) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Yyk yang dimohonkan banding tersebut;
(c) Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat sekarang Para Terbanding;
(d) Menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Outvankelijk Verklaard*);
(e) Menghukum Para Pembanding semula para Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara dala kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Perkara Perdata dengan Nomor: 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk antara Sulcha Prihasti, S.E., MM sebagai Penggugat melawan PT. BPD DIY, Yayasan BPD DIY, Dewan Komisaris PT.BPD DIY sebagai para Tergugat dan Gubernur DIY sebagai turut Tergugat. Pihak Penggugat dimenangkan sebagian kemudian dilakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta oleh Para Tergugat dan turut Tergugat.

(3) Perkara Perdata Nomor: 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk antara jo. Nomor: 64/PDT/2020/PT.YYK antara PT. BPD DIY sebagai Pembanding I, Yayasan Kesejahteraan BPD DIY sebagai Pembanding II, Dewan Komisaris PT. BPD DIY sebagai Pembanding III dan Gubernur DIY sebagai Pembanding melawan Sulcha Prihasi, SE., MM. Penggugat menduduki Jabatan anggota Direksi BPD DIY sampai diberhentikan dengan hormat pada tanggal 4 September 2009 Badan hukum Tergugat I masih berbentuk Perusahan Daerah (PD) sehingga sepanjang mengenai hak-hak Penggugat sebagai mantan anggota Direksi (Direktur Pemasaran) yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat. Dengan Amar putusan dalam tingkat banding:

(a) Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

(b) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 148/Pdt.G/2019/PN Yyk tanggal 28 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut.;
(c) Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
(d) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
(e) Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankeliojk verklaard*);
(f) Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
(g) Perkara saat ini lanjut dalam proses Kasasi yang diajukan oleh Sulcha Prihasi, SE., MM dan dalam tahap menunggu putusan Kasasi.

(4) Perkara TUN Nomor: 147.K/TUN/2019 jo. Nomor 73.PK/TUN/2020 antara: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemohon Peninjauan Kembali II melawan Sita Kristiana, dkk sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dengan amar putusan Peninjauan Kembali sebagai berikut:
(a) Mengabulkan Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Pemohon Kembali II Pemrintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
(b) Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/TUN/2019 tanggal 25 April 2019
(c) Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai penggugat;
(d) Dalam Pokok:
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2020, kinerja Layanan Hukum Masyarakat yang dilaksanakan Pemda DIY adalah sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan perlindungan dan pemajuan HAM yaitu Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk implementasi rencana aksi HAM di DIY tahun 2020 periode pelaporan bulan ke-12 (B12).



Gambar 3.60. Penghargaan Dalam Rangka Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2020

(2) Ditahun 2020, Pemda DIY mendapatkan Penghargaan Atas Upayanya Membina dan Membangun Seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2019.

(3) Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Usaha Beretika di DIY dan Perbaikan Pelayanan Publik di DIY yang dilaksanakan oleh Lembaga Ombudsman (LO) DIY dengan target 100 rekomendasi dan terealisasi 165 rekomendasi.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 pelaksanaan Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum dilaksanakan melalui alokasi anggaran Rp4.261.944.000,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam sembilan Program dan 20 Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung terealisasi sebesar Rp3.899.930.210,00 (91,51%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BIRO HUKUM	1. Menyelaraskan program legislasi daerah peraturan daerah dan program legislasi daerah peraturan gubernur dengan arah pembangunan daerah melalui penguatan pada aspek pembinaan hukum daerah dalam fungsi perencanaan hukum dan evaluasi keberlakuan produk hukum daerah	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Materi muatan dalam rancangan produk hukum dari OPD Pengusul masih berupa draft kasar sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi	Mengadakan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis penyusunan produk hukum	Lembaga Ombudsman Daerah (LOD). Bersama ini kami sampaikan bahwa Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. LO DIY merupakan Lembaga Non Struktural yang indipenden, sehingga Pemerintah Daerah DIY tidak bisa mencampuri kewenangan LO DIY tersebut. Biro Hukum Setda DIY hanya berperan sebagai pengampu anggaran
			2. Menerapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Persen	100	100	Adanya Pandemi Covid-19 dimana ada pembatasan pertemuan sehingga berdampak mundurnya penyususnan dan pembahasan rancangan produk hukum	Menerapkan protokol kesehatan secara baik dalam setiap melaksanakan ketugasan. Serta melakukan kerjasama yang baik dari instansi terkait melibatkan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) DIY pada saat harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Produk hukum daerah sehingga tercapainya target yang telah di tetapkan. Pemanfaatan	
			3. Melaksanakan harmonisasi produk hukum daerah secara tepat waktu dengan memanfaatkan teknologi informasi	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
									Zoom meeting dalam melaksanakan koordinasi agar tetap tercapainya target yang telah ditetapkan.	Lembaga Ombudsman. Terkait dengan rekomendasi pada angka 2, Biro Hukum akan memberikan masukan kepada LO DIY untuk lebih meningkatkan Kinerja Pelayanan Edukasi kepada masyarakat terkait tusi LO DIY dan sektor properti agar pengaduan di sektor tersebut dapat berkurang.
			4. Memanfaatkan analisis kebijakan dalam perumusan dan penyusunan produk hukum daerah	Arsip Dokumen Hukum	Doku -men	2	2			
			5. Mengikutsertakan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dalam diklat penyusunan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kompetensi	Penggandaan	Paket	1	1			
			6. Mengikutsertakan pejabat fungsional analis kebijakan dalam diklat analisis kebijakan guna meningkatkan kompetensi	Administrasi Persuratan	Surat	7000	7000			
			7. Peningkatan dan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Langganan Aplikasi Video Conference	Paket	4	4			
			8. Menggunakan teknologi informasi dalam layanan informasi produk hukum	ATK	Jenis	51	51			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			9. Peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia	Barang Cetakan	Jenis	13	13			
			10. Mengikutsertakan pegawai dalam diklat bantuan hukum guna meningkatkan kompetensi	Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	6	6			
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jenis	6	6			
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pencegahan Covid-19	Jenis	4	4			
				Dukungan 33% terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Kinerja 1 orang Perencana Program	Tahun	1	1			
				Kinerja 1 orang Pengelola Kepegawaian	Tahun	1	1			
				Dukungan 33% terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kinerja 10 orang Pengelola Keuangan	Tahun	1	1			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan	Tahun	1	1			
				Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	Tahun	1	1			
				Dukungan 34% terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Persen	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Termometer Digital Laser	Buah	1	0			
				Komputer PC	Unit	4	0			
				Notebook	Unit	2	0			
				Printer	Unit	3	0			
				Dukungan 33% terhadap capaian Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung	%	100	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD						
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Unit	6	6			
				Dukungan 33% terhadap capaian Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Dukungan 34% terhadap capaian Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Printer	Buah	10	10			
				Fumigasi ruang perpustakaan	Kali	2	2			
				Notebook	Buah	10	10			
				Mesin Ketik	Buah	3	3			
				AC	Buah	20	20			
				Pintu Kantor	Buah	12	12			
				Komputer	Buah	10	10			
				Mebeleur	Buah	10	10			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Persen	100	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Nilai LKjIP A	100	100			
				Dukungan 25% terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Dukungan 25% terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Lapor-an keu-angan	100	100			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Hukum yang lengkap dan terkini						
				Dukungan 25% terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Berita Acara Forum Perencanaan OPD	BA	1	1			
				ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Doku -men	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Dukungan 25% terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	100			
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	%	100	100			
2	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)	BIRO HUKUM		**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						
				Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan	Persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Perundang-Undangan, Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum dan Kesusilaan						
				Pengawasan rancangan produk hukum dan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan						
				Dukungan 100% terhadap Pencapaian Persentase Kewenangan, substansi Materi dan Legal Drafting Rancangan Produk Hukum Kabupaten/kota sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan keistimewaan, kepentingan umum dan kesusilaan	%	100	100			
				Kajian Rancangan Produk Hukum Kabupaten/kota terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Rekomen-dasi	10	10			
3	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)	BIRO HUKUM		**PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	Persen	100	100			
				Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						
				Dukungan 5.32% terhadap peningkatan pemanfaatan tanah desa untuk mendukung persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa berupa penyelesaian sengketa tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	%	100	100			
				Penanganan sengketa tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	Putusan	2	2			
4	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO HUKUM		**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**						
				Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas	Persen	100	100			
				Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah						
				Dukungan 50% terhadap capaian Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	%	100	100			
				Rancangan Peraturan Gubernur	Ranca-ngan	30	30			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Rancangan Peraturan Daerah	Ranca -ngan	8	8			
				Rancangan Keputusan Gubernur	Ranca -ngan	100	100			
				Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum						
				Dukungan 50% terhadap capaian Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	%	100	100			
				Dokumen kajian pembangunan hukum	Doku -men	0	0			
				Rekomendasi Terhadap Produk Hukum Daerah	Rekomen -dasi	2	2			
				PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/ KOTA						
				Persentase kewenangan, substansi materi dan legal drafting produk hukum kabupaten/kota yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah	Persen	100	100			
				Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/ Kota						
				Dukungan 50% terhadap capaian Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyusunan Produk Hukum Daerah						
				Rekomendasi hasil konsultasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota	Rekomen-dasi	25	25			
				Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota						
				Dukungan 50% terhadap pencapaian Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	%	100	100			
				Nomor Register	Nomor	20	20			
				Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	Keputus-an	3	3			
				Rekomendasi Fasilitasi	Rekomen-dasi	20	20			
				PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM						
				Persentase produk hukum daerah yang terpublikasikan	Persen	100	100			
				Penyebarluasan Produk Hukum						
				Jumlah buku informasi peraturan perundang-undangan	Buku	1100	1100			
				Dukungan 50% terhadap capaian Persentase Produk	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Hukum Daerah yang Terpublikasikan						
				Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah	Buku	1100	1100			
				Laporan Legal Expo Bidang Hukum	Lapor-an	0	0			
				Digitalisasi Produk Hukum						
				Jumlah Produk hukum yang diunggah (upload) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Produk Hukum	260	260			
				Memberi 50% Dukungan terhadap capaian Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	%	100	100			
				PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM						
				Persentase bantuan dan layanan hukum	Persen	100	100			
				Layanan Hukum Masyarakat						
				Dukungan 50% terhadap capaian Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	%	100	100			
				Laporan RANHAM	Lapor-an	1	1			
				Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD	Keputus-an	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Keputusan Gubernur tentang Izin pemanfaatan Tanah Desa	Keputus-an	50	50			
				Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum						
				Putusan permasalahan hukum litigasi	Putusan	1	1			
				Dukungan 50% terhadap capaian Bantuan dan Layanan Hukum	%	100	100			
				Laporan Hasil Seleksi Pansel Komisioner LO DIY Periode 2021-2024	Lapor-an	1	1			
				Laporan Hasil Penyelesaian Penanganan Kasus Perdata, Tata Usaha Negara, dan Pendampingan Hukum 2020	Lapor-an	1	1			
				Rekomendasi penanganan pengaduan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan publik	Produk Akhir	100	100			
				Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY	Lapor-an	1	1			
				Buku panduan pendampingan hukum bagi penyadang disabiltas	Buku	0	0			

3) *Fasilitasi Perekonomian dan SDA*

a) *Kondisi Umum*

Urusan Fasilitasi Perekonomian dan SDA menjadi salah satu bagian penting di dalam perencanaan pembangunan. Ruang lingkup Fasilitasi Perekonomian dan SDA meliputi perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam. Perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan SDA ini meliputi sektor industri dan perdagangan, koperasi dan UMKM, perizinan dan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, serta kelautan dan perikanan.

Fasilitasi Perekonomian dan SDA diharapkan mampu mengatasi permasalahan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang dunia usaha dan pengelolaan sumber daya perekonomian sehingga perekonomian semakin meningkat, makin berkurangnya jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran, sekaligus diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah dapat terkurangi secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan dukungan terhadap sasaran Pemda DIY yaitu meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dan menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Untuk mengukur kinerja urusan fasilitasi perekonomian dan SDA digunakan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1.

Tabel 3.144. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	100	90	105	116,67	100	105

Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2021

Capaian kinerja fasilitasi perekonomian dan SDA tahun 2020 dengan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1, terealisasi sebesar 105% dari target 90% atau dengan persentase capaian sebesar 116,67%. Angka tersebut diperoleh dari enam rumusan kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi, sebanyak tujuh kebijakan yang ditindaklanjuti. Tujuh dokumen kebijakan yang ditindaklanjuti tersebut terdiri dari enam dokumen rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan satu dokumen nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama terkait pengembangan ekonomi daerah.


MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 264 Tahun 2020
Memberikan Penghargaan Kepada :

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagai

NOMINASI TPID PROVINSI BERKINERJA TERBAIK
WILAYAH JAWA-BALI

Jakarta, 12 Agustus 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

AIRLANGGA HARTARTO

Gambar 3.61. Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali
Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY,2021

Dalam hal pengendalian inflasi, Pemda DIY juga berupaya berinovasi dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. Hal ini terbukti dengan dicapainya penghargaan berupa nominasi 2 TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tahun 2020.

Selain menjaga stabilisasi harga, TPID DIY saat ini juga menitikberatkan pada menjaga kestabilan produksi dan pasokan komoditas pangan sehingga menginisiasi tersusunnya Peraturan Gubernur DIY nomor 71 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini, diharapkan antara lain:

(1) Menjaga kestabilan produksi dan pasokan komoditas pangan
(2) Meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga komoditas pangan
(3) Memudahkan pengawasan distribusi pangan dari produsen sampai ke konsumen
(4) Adanya ketersediaan Sistem Informasi Tata Niaga Pangan yang akurat berkaitan dengan produktifitas, pola distribusi, jumlah pasokan dan harga di DIY sebagai instrumen sistem peringatan dini dalam pengendalian inflasi.

Dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran arus distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pasca menyebarnya Covid-19, diterbitkan SE Gubernur DIY Nomor 500/6349 Tanggal 14 April 2020 tentang Menjaga Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Arus Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya Serta Penggunaan Produk UMKM DIY. Selain itu, dalam upaya Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal, juga diterbitkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 5/INSTR/2020 tentang Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal.

Selanjutnya sebagai upaya mengurangi dampak pandemi Covid-19 dan dalam rangka pemulihan ekonomi, telah diterbitkan SE Gubernur DIY Nomor 443/7130 Tanggal 29 April 2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus Berupa Pengurangan atau Penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Pelaku Usaha. Dengan adanya Surat Edaran ini diharapkan dapat mengurangi beban perusahaan/pelaku usaha dengan kebijakan pemberian stimulus/insentif baik berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewenangan Pemda, Kabupaten/Kota berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah serta pajak penerangan jalan. Pemberlakuan kebijakan pemberian stimulus /insentif dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi.

Pada tahun 2020 juga diinisiasi Kesepakatan Bersama Antara Pemda DIY dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tentang Penerbitan dan Pemanfaatan Kartu Tani di DIY. Dengan adanya Kesepakatan Bersama ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses penyediaan sarana produksi khususnya pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas dan

produksi tanaman pangan. Salah satu kebijakan akses pupuk ini dilakukan dengan penyediaan dan rencana implementasi kartu tani.

Dengan penerapan kartu tani ini diharapkan juga memberikan manfaat bagi petani, kios pupuk, pemerintah, penyedia pupuk maupun puhak perbankan. Manfaat bagi petani: mendapat kepastian dalam memperoleh pupuk bersubsidi; kemudahan penyerapan hasil panen petani oleh offtaker; petani bisa menggunakannya sebagai tabungan; kemudahan petani dalam akses pembiayaan; kemudahan dalam mendapatkan bantuan sosial maupun subsidi; kemudahan petani mengakses program pemerintah; peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Manfaat bagi kios pupuk: memudahkan pelayanan karena sesuai dengan kuota yang ada; dana hasil pembelian pupuk dari petani dapat langsung masuk ke rekening simpanan; mendapatkan penghasilan tambahan sebagai agen BRILink. Manfaat bagi pemerintah: ketersediaan data petani *by name by addres* yang valid; ketepatsasaran penyaluran pupuk bersubsidi; mendorong penyerapan hasil panen petani oleh *offtaker*; kemudahan monitoring dan evaluasi pertanian. Manfaat bagi penyedia pupuk: ketersediaan informasi kebutuhan pupuk beserta sebaran wilayahnya; distribusi pupuk lebih akurat dan tepat sasaran; mempermudah manajemen stok dan perkiraan produksi pupuk. Manfaat bagi pihak bank: bisa memiliki database calon nasabah prospektif; perbankan (BRI) bisa memproyeksi kebutuhan kredit di sektor pertanian.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Fasilitasi Perekonomian dan SDA dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp1.453.941.840,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 6 Program dan 15 kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp1.219.756.725,00 (83,89%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Merumuskan arah kebijakan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam hayati berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat	**PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH**				– Penyesuaian terhadap dinamika perekonomian yang berkembang cepat memerlukan koordinasi yang cepat pula antar mitra di setiap sektor. – Semakin dinamis dan kompleks permasalahan perekonomian menyebabkan perlunya bentuk rumusan kebijakan yang aktual dan relevan – Adanya Pandemi covid menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap perumusan kebijakan yang responsif terhadap pemulihan ekonomi – Masih Lemahnya Informasi Keterpaduan Antar regulasi yang terkait	– Koordinasi dan sinkronisasi dengan mitra di setiap sektor yang diampu dengan lebih intensif – Identifikasi kebutuhan akan kebijakan yang tepat dan *update* secara lebih sistematis dan komprehensif – Kebijakan yang responsif terhadap pemulihan ekonomi – Pembaharuan Informasi terkait Keterpaduan regulasi dan penguatan koordinasi stakeholder lintas sektor	
				Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	%	40	40			
				Pengendalian Inflasi Daerah						
				Dukungan 20% terhadap rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	%	100	100			
				Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	dokumen rekomendasi	1	1			
				Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah						
				Laporan hasil monitoring dan evaluasi	dokumen	1	1			
				Kajian Analisis Strategi Pemasaran Produk Desa Melalui BUMDES	dokumen	1	1			
				Dukungan 20% terhadap rumusan kebijakan stabilitasperekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	%	100	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN						
				Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar	%	30	30			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan						
				Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah						
				Rekomendasi Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	dokumen	1	1			
				Dukungan sebesar 30% terhadap Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian yang menjadi dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	%	100	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PEREKONOMIAN						
				Rumusan kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	%	30	30			
				Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan						
				Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan perlindungan sumber daya alam berkelanjutan	dokumen	1	1			
				Dukungan 15% terhadap peningkatan persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	%	100	100			
				Penyusunan Kebijakan Green Economic						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	dokumen	1	1			
				Dukungan 15% terhadap peningkatan persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	%	100	100			

4) *Fasilitasi Kesra*

a) *Kondisi Umum*

Kebijakan Pembangunan mental spiritual di DIY pada tahun ini difokuskan pada upaya membentuk, memelihara dan meningkatkan kondisi mental spiritual masyarakat melalui tiga pendekatan, yaitu budaya, olahraga dan agama, tanpa mengesampingkan aspek kesehatan dan aspek pendidikan sebagai bagian penting dari perwujudan SDM yang unggul.

Pembangunan Mental Spiritual melalui pendekatan budaya mengambil sasaran mengoptimalkan internalisasi nilai-nilai budaya Yogyakarta di dalam kehidupan perguruan tinggi yang terintegrasi dengan sistem pendidikan karakter bagi sivitas akademika di DIY. Saat ini terdapat 118 Perguruan Tinggi di DIY, baik negeri maupun swasta, dengan jumlah mahasiswa mencapai lebih dari 260 ribu orang, dengan latar belakang budaya yang beragam. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal menjadi sarana yang strategis dalam upaya menjaga, melestarikan dan mengembangkan budaya *adiluhung* sebagai warisan luhur dalam koridor pembangunan karakter bangsa.

Tabel 3.145. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Sebaran Wilayah dan Bentuk Perguruan Tinggi

NO	BENTUK	WILAYAH KOTA DAN KABUPATEN					TOTAL	%
		KABUPATEN BANTUL	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	KABUPATEN KULON PROGO	KABUPATEN SLEMAN	KOTA YOGYAKARTA		
1	Universitas	46.190	1.141		92.117	60.942	200.390	*74,3%*
2	Institut	1.543		529	4.499	7.956	14.527	*5,4%*
3	Sekolah Tinggi	18.335			11.916	11.320	41.571	*15,4%*
4	Akademi	1.098			801	6.246	8.145	*3,0%*
5	Politeknik	118			1.982	2.817	4.917	*1,8%*
6	Akademi Komunitas				300		300	*0,1%*
	TOTAL	67.284	1.141	529	111.615	89.281	269.850	*100,0%*
	%	*24,9%*	*0,4%*	*0,2%*	*41,4%*	*33,1%*	100,0%	

Sumber: LLDIKTI Wilayah V Dalam Angaka Tahun 2020

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan penyusunan pedoman pelaksanaan Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam kehidupan kampus/perguruan tinggi yang selaras dengan kehidupan akademik

dan non akademik bagi segenap sivitas akademika dalam bertingkah laku di kampus maupun di masyarakat. Dengan strategi memaksimalkan peran perguruan tinggi ini, diharapkan mampu terwujud suatu sistem pendidikan yang berkualitas dan diperkaya dengan nilai-nilai luhur budaya dan memperkuat pendidikan karakter melalui penanaman nilai-nilai budaya bagi mahasiswa beserta sivitas akademika tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing kampus maupun keragaman tradisi-budaya asal yang dibawa, untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai wilayah salad bowl bagi pengembangan budaya.

Pembangunan Mental Spiritual melalui pendekatan olahraga dilakukan dengan sasaran memberikan penanaman nilai-nilai sportifitas, terutama bagi generasi muda. Nilai sportivitas yang diharapkan tumbuh dan berkembang diantaranya adalah nilai kejujuran (*fairplay*), kerja keras dan pantang menyerah (*hardworking*), saling menghormati (*respect*) dan juga rasa percaya diri (*self confidence*). Strategi yang dambil adalah dengan fasilitasi sarana dan prasarana berolahraga bagi masyarakat, sebagai bagian yang paling penting dalam berolahraga.

Kebutuhan sarana olahraga yang mendesak di DIY adalah sarana olahraga otomotif berupa sirkuit. Tidak saja digunakan sebagai ajang perlombaan, sirkuit dapat juga menjadi sarana pembinaan bagi generasi muda pengemar olahraga otomotif khususnya, maupun olahraga lain secara umum, sehingga banyak kelompak sasaran yang dapat dijangkau. Disamping itu, perkembangan olahraga otomotif di DIY sendiri menunjukan perkembangan yang cukup baik, terlihat dari banyaknya bibit atlit potensial yang mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Pembangunan sirkuit juga memunginkan adanya *multiplier effect* baik dari aspek kesehatan jasmani dan rohani, maupun dari aspek sosial ekonomi selaras dengan perkembangan industri pariwisata yang dikembangkan. Sehingga di tahun ini, kajian studi kelayakan rencana pembangunan sirkuit dilaksanakan dengan pengambilan calon lokasi di Desa Gading, Playen, Gunungkidul.

Pembangunan Mental Spiritual melalui pendekatan keagamaan dilakukan dengan sasaran utama meningkatnya iman dan taqwa yang tercermin dalam pengamalan nilai-nilai agama dalam perilaku bermasyarakat. Bersinergi dengan Kementerian Agama, Pemda DIY

melalui Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY mengambil peran sebagai katalisator melalui koordinasi, pembinaan maupun fasilitasi lembaga/organisasi keagamaan di masyarakat yang merupakan aktor utama pembangunan kehidupan beragama. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengelolaan modal sosial keagamaan yang mempunyai potensi sangat besar dalam mendukung pembangunan.

Dalam mewujudkan pembangunan SDM seutuhnya, aspek kesehatan tidak dapat dilepaskan. Selain pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19, fokus utama pembangunan SDM dari aspek kesehatan adalah upaya penanganan stunting di DIY. Angka prevalensi stunting di DIY, berdasar Riskesdas tahun 2018, masih di bawah standar WHO, yaitu 21,4%. Sementara di Kabupaten Gunung Kidul sendiri, angka prevalensi stunting mencapai 34%, melampaui angka nasional sebesar 30,8%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya penanganan yang serius dari Pemerintah. Bentuk tindak lanjut di tingkat awal yang dilakukan adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan stunting di DIY.

Selanjutnya Kinerja Pembangunan Fasilitasi Kesra pada tahun 2020, secara umum dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.146. Target dan Realisasi Kinerja Fasilitasi Kesra Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	91,7	84	100	119,05	100	100

Sumber: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2021

Perumusan kebijakan diharapkan mampu menyusun kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, keberhasilan kinerja perumusan kebijakan terukur melalui indikator persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual dengan target kinerja tahun 2020 sebesar 84,00% dan berhasil terealisasi sebesar 100%, sehingga persentase capaiannya sebesar 119,05%.

Sedangkan fasilitasi kehidupan beragama diukur dengan terlaksananya seluruh bentuk fasilitasi yang ditargetkan yaitu sebesar 100%, dengan bentuk fasilitasi meliputi:

(1) Pembinaan Mental Rohani Agama melalui penyampaian materi-materi keagaman dan Peringatan Hari Besar Keagamaan.
(2) Fasilitasi pelayanan kepada Jamaah Haji asal DIY melalui persiapan pengiriman Petugas Haji Daerah.
(3) Fasilitasi Festival Keagamaan, dan
(4) Fasilitasi Penyaluran Hibah Keagamaan.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Fasilitasi Kesra pada tahun 2020 dilaksanakan melalui enam Program dan 16 Kegiatan dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp4.401.784.900,00, dengan realisasi realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp1.925.427.100,00 atau 43,74%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	1. Meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				1) Karakter dan perilaku mahasiswa peserta didik belum menjadi isu utama bagi sebagian besar pengelola perguruan tinggi yang ada, sehingga komitmen dalam mewujudkan sistem pendidikan karakter di kampus masing-masing masih belum terlihat. 2) Kawasan Lapangan Terbang Gading di Kecamatan Playen, Gunungkidul tidak serta merta dapat dialihfungsikan sebagai sirkuit olahraga otomotif, disebabkan karena fungsi kawasan tersebut telah diatur sebagai bandar udara khusus sekaligus merupakan kawasan peruntukan pertahanan keamanan yang saat ini berada di bawah pengelolaan TNI AU. 3) Pembatasan sosial akibat adanya pendemi Covid-19 menyebabkan kegiatan-kegiatan fasilitasi dan pembinaan	1) Perlu disusun regulasi dan skema kesepakatan dalam bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak perguruan tinggi dalam rangka koordinasi pelaksanaan sistem pendidikan karakter di masing-masing kampus, diikuti dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara periodik. 2) Mencari alternatif lokasi lain yang lebih feasible dari berbagai aspek, terutama terkait dampak sosial politik dan hukum, dengan tetap memaksimalkan sarana-prasarana olahraga yang sudah ada dalam menginternaisasi nilai-nilai sportifitas bagi generasi muda di DIY. 3) Penggunaan media sosial dan komunikasi daring, baik sebagai sarana penyampaian materi keagamaan dan pesan-pesan moral maupun dalam koordinasi dan pembinaan lembaga/organisasi keagamaan. 4) Pengembangan sistem koordinasi, sosialisasi dan	
			2. Meningkatkan persentase kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan yang terlayani	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran						
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	unit	4	4			
				Surat Masuk	surat	2160	975			
				Buku Referensi Peraturan Perundangan	paket	1	1			
				Barang Cetakan	jenis	7	7			
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	8	8			
				Surat Kabar	jenis	2	2			
				Alat Tulis Kantor	jenis	38	38			
				Barang Penggandaan	lembar	12500	12500			
				Surat Keluar	surat	5500	2152			
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan	unit	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu				keagamaan yang bersifat pengumpulan massa sulit dilaksanakan. 4) Koordinasi berjenjang dari tingkat daerah sampai dengan elemen terendah di masyarakat dalam pelaksanaan RAD penanganan stunting di DIY masih sulit dilakukan akibat konsentrasi pihak-pihak terkait masih terfokus pada penanganan pandemi Covid-19..	supervisi yang lebih sederhana, mudah dan efektif dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi daerah penanganan stunting.	
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik	tahun	1	1			
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik	tahun	1	1			
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik	tahun	1	1			
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1			
				Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	jenis	1	1			
				Pengadaan Peralatan Komputer	jenis	2	2			
				Pengadaan Mebeulair	jenis	2	2			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Sesuai RKPBMD Terpelihara	unit	2	2			
				Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Sesuai RKPBMD Terpelihara	unit	4	4			
				Dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMD Terpelihara	jenis	8	8			
				Dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Terwujudnya penata usaha keuangan dan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat Februari 2020	skor	84	83,79			
				Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Kinerja Perencana Program Kegiatan dan Anggaran 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tahun	1	1			
				Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tahun	1	1			
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah	%	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				ditetapkan (Laporan keuangan dengan deviasi 0%)						
				Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	tahun	1	1			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021	dokumen	1	1			
				Forum OPD	dokumen	1	1			
				Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2021	dokumen	1	1			
				Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2020	dokumen	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan (Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100)	%	100	43.75			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
2	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	1. Meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	**PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN**				Semakin luasnya cakupan serta dinamisnya kompleksitas permasalahan terkait bina mental spiritual menyebabkan belum seluruhnya mampu diakomordir dalam bentuk rumusan kebijakan yang aktual dan relevan	Identifikasi kebutuhan akan kebijakan yang tepat dan update secara lebih sistematis dan komprehensif	
			2. Meningkatkan persentase kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan yang terlayani	Bahan rumusan kebijakan bina mental dan pembinaan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti	dokumen	2	4			
				Jumlah layanan lembaga keagamaan 5 agama	layanan	4	4			
				Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan						
				Dukungan 100% terhadap rumusan bahan kebijakan bina mental dan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti	%	100	100			
				Koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan embarkasi haji di DIY	dokumen	1	1			
				Penyelenggaraan Festival Keagamaan						
				FASI Tingkat Daerah	kegiatan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 25% terhadap terlayaninya lembaga keagamaan 5 agama	%	100	100			
				Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama						
				Pengiriman TPHD (Tim Pendamping Haji Daerah)	SK Gubernur tentang	1	1			
				Dukungan 75% terhadap terlayaninya lembaga keagamaan 5 agama	%	100	100			
				Hibah kepada MUI DIY	lembaga	1	1			
				Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Peringatan Hari Besar Keagamaan terhadap 5 Agama	kali	4	4			
				Hibah kepada BAZNAS DIY	lembaga	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT						
				Bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti	dokumen	2	2			
				Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	dokumen	1	1			
				Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan kesehatan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				masyarakat yang ditindaklanjuti						
				Posbindu PTM Satriya	dokumen	1	1			
				Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta	dokumen	1	1			
				Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Mutu & Akreditasi Pelayanan Kesehatan	dokumen	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA						
				Bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	dokumen	2	2			
				Penyusunan Kebijakan Kebudayaan						
				Kajian Penguatan Budaya Lokal DIY untuk peningkatan apresiasi di Perguruan Tinggi DIY	dokumen	1	1			
				Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia						
				Kajian Fasilitas Olahraga	dokumen	1	1			
				Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	%	100	100			

5) Kelembagaan dan Tata Laksana

a) Kondisi Umum

Dalam rangka mewujudkan tercapainya misi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta merespons tuntutan reformasi birokrasi, Pemda DIY telah melaksanakan program dan kegiatan yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan penataan organisasi, guna mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan.

Dengan telah ditindak-lanjutinya Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui (1) Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, (2) Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan, dan (3) Peraturan Gubernur tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, maka penataan kelembagaan Pemda DIY telah berjalan sesuai dengan arah yang direncanakan. Pada tahun 2020, pemantapan kelembagaan perangkat daerah Pemda DIY diarahkan pada monitoring dan evaluasi terhadap rincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan UPT.

Terkait keberadaan Lembaga Non Struktural (LNS) sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, pada tahun 2020 telah disusun pedoman mengenai Lembaga Non Struktural (LNS). Pedoman dimaksud menjadi acuan pembentukan, perubahan dan pembubaran LNS pada beberapa perangkat daerah pemda DIY serta acuan dalam menata, merencanakan kebutuhan penganggaran dan sinkronisasi tugas dan fungsi dengan perangkat daerah.

Dalam bidang manajemen SDM aparatur, pada tahun 2020 telah disusun dokumen reviu analisis jabatan, dokumen reviu analisis beban kerja, dan dokumen standar kompetensi jabatan dengan ruang lingkup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY. Dokumen tersebut merupakan salah satu pedoman dalam penataan SDM aparatur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pada aspek budaya kerja, pembangunan aparatur yang berkarakter telah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penanaman nilai-nilai luhur budaya SATRIYA (Selaras, Akal budi luhur, Teladan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan Percaya diri dan Ahli–Profesional) sebagai sebagai salah satu ranah penting perubahan reformasi birokrasi Pemda DIY, yakni perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja). Internalisasi nilai-nilai budaya pemerintahan pada aparatur di lingkungan Pemda DIY, pembentukan kelompok budaya pemerintahan pada setiap Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis, pelatihan/pendampingan penyusunan rencana aksi (action plan) implementasi budaya pemerintahan, kompetisi antar kelompok budaya pemerintahan, serta monitoring dan evaluasi implementasi budaya pemerintahan pada semua Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis menjadi strategi dan upaya penting pembentukan karakter istimewa ASN Pemda DIY.

Dorongan terhadap pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang dilaksanakan oleh setiap unit pelayanan Pemda DIY menjadi prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020. Salah satu langkah yang telah ditempuh antara lain kewajiban bagi setiap penyelenggara untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan yang diberikan, baik yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) maupun proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing). Perbaikan kualitas pelayanan publik juga dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Survei dimaksud menjadi instrumen evaluasi pada setiap unit pelayanan. Pada tahun 2020 pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan Pemda DIY terhadap 95 unit penyelenggara pelayanan publik dengan jumlah responden sebanyak 20.642 responden. Dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tersebut, hasilnya diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata sebesar 83,64 dengan mutu pelayanan B atau dikategorikan Baik. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pelayanan publik Pemda DIY adalah baik.

Tabel 3.147. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	91,85	80,50	83,31	103,49	83	100,37
2	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	unit penyeleng-gara pelayan-an publik	69	16	84	525	31	270,97

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2021

Capaian indikator kinerja Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien pada tahun 2020 terealisasi sebesar 83,31% dari target 80,50% atau dengan persentase capaian sebesar 103,49%. Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tersebut yakni ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemda DIY untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan.

Capaian indikator kinerja Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau juga melampaui target, dari target 16 unit tercapai sebanyak 84 unit atau dengan persentase capaian sebesar 525%. Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu: (1) Peran aktif penyelenggara pelayanan untuk memenuhi indikator kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (2) Dilaksanakannya pendampingan pemenuhan indikator kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan monitoring secara intensif; dan (3) Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus dioptimalkan antara lain dengan selalu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peraturan gubernur yang menjadi tindak lanjut Perda Pelayanan Publik, yaitu Pergub Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan serta Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Pergub Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat. Selain itu juga terus didorong gerakan "*One Agency One Innovation*" dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 44

Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 pelaksanaan Fasilitasi Kelembagaan dan Tata Laksana dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp2.439.768.750,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam tujuh Program dan 17 Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp1.919.355.906,00 (78,67%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BIRO ORGANISASI	1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Perubahan regulasi dari Pusat	1) Meningkatkan intensitas komunikasi, informasi, advokasi, pendampingan, *monitoring* dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kepada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Pusat. 2) Penguatan kelompok budaya pemerintahan dan agen perubahan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.	urusan Kelembagaan 1) Dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini telah dilaksanakan evaluasi implementasi Perdais dimaksud dengan melakukan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2017-2022 untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Desain kelembagaan disusun dengan setiap struktur mengampu minimal 1 (satu) program sehingga program yang sama tidak mungkin diampu beberapa struktur, artinya overlap dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dihindari. Setiap struktur yang dibentuk telah mengakomodir fungsi koordinasi sesuai dengan masing-masing urusan. 2) Dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan
			2. Melaksanakan perumusan kebijakan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	Situasi pandemi Covid-19 yang mengubah pola interaksi internal birokrasi, pola interaksi masyarakat maupun pola interkasi antara birokrasi dan masyarakat	Memberikan fasilitasi yang optimal kepada unit pelayanan publik Pemda DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
			3. Meningkatkan implementasi budaya pemerintahan	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						
			4. Mempercepat pelaksanaan	Penggandaan	lembar	22800	22800			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			Reformasi Birokrasi							yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Khusus tentang kelautan diampu oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan serta 1 (satu) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai, yang diatur dilebih lanjut dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
			5. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan public	Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	5	5			
			6. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	unit	5	5			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	unit	3	3			
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	buah	2	2			
				Surat Masuk	lembar	2500	2500			
				Bukti Pembayaran langganan aplikasi rapat dalam jaringan	akun bulan	3	3			
				Pengiriman dokumen	paket	1	1			
				Alat tulis kantor	jenis	32	32			
				Surat keluar	lembar	2700	2700			
				Langganan surat kabar harian dan majalah	jenis	4	4			
				Barang cetakan	jenis	7	7			
				Dukungan sebesar 9,77% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	15	15			
				Perangko, Material, benda pos	buah	420	420			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	tahun	1	1			
				Dukungan terhadap 90,23% administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Dukungan terhadap 61,62% sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBMD	unit	5	5			
				Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMD	unit	3	3			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				AC ruangan	unit	15	15			
				Printer	unit	16	16			
				Dukungan terhadap 38,38% sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Suku cadang printer	unit	10	10			
				Suku cadang wireless	unit	1	1			
				Suku cadang Notebook	unit	7	7			
				CPU	unit	13	13			
				Notebook	unit	10	10			
				LCD	unit	2	2			
				Monitor	unit	7	7			
				Suku cadang printer dotmatrik	unit	6	6			
				Suku cadang CPU	unit	13	13			
				Suku cadang UPS	unit	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Mesin Ketik	unit	4	4			
				Faximile	unit	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RKT dan IKU) paling lambat Maret 2020	Nilai LKjIP	80	80			
				Dukungan 3,01% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Dukungan 39,80% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 17 kegiatan	%	95	0			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Kinerja 2 orang perencana program	tahun	1	1			
				Dukungan 53,63% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA TA.2021 dan Perubahan TA. 2020	dokumen	6	6			
				Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Organisasi yang lengkap dan terkini	%	100	100			
				Berita Acara Forum Perencanaan OPD	BA	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	%	100	0			
				Dukungan 3,56% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
2	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)	BIRO ORGANISASI	1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah	**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**				Perubahan regulasi dari Pusat	1) Meningkatkan intensitas komunikasi, informasi, advokasi, pendampingan, *monitoring* dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kepada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Pusat. 2) Penguatan kelompok budaya pemerintahan dan agen perubahan di masing-masing	urusan Kelembagaan 1) Dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini telah dilaksanakan evaluasi implementasi Perdais dimaksud dengan melakukan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2017-2022 untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih dalam

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
									SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.	pelaksanaan program dan kegiatan. Desain kelembagaan disusun dengan setiap
			2. Melaksanakan perumusan kebijakan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional	%	87	88.66	Situasi pandemi Covid-19 yang mengubah pola interaksi internal birokrasi, pola interaksi masyarakat maupun pola interkasi antara birokrasi dan masyarakat	Memberikan fasilitasi yang optimal kepada unit pelayanan publik Pemda DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	struktur mengampu minimal 1 (satu) program sehingga program yang sama tidak mungkin diampu beberapa struktur, artinya overlap dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dihindari. Setiap struktur yang dibentuk telah mengakomodir fungsi koordinasi sesuai dengan masing-masing urusan. 2) Dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Khusus tentang kelautan diampu oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan serta 1 (satu) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai, yang diatur dilebih lanjut dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2018 tentang
			3. Meningkatkan implementasi budaya pemerintahan	**Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah**						
			4. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Draf Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi dan Pola Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	rapergub	10	10			
			5. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT	dokumen	1	1			
			6. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Dukungan sebesar 6,03% terhadap persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Draf Peraturan Gubernur tentang Lembaga Non Struktural	rapergub	1	1			Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
				Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/ Kota						
				Laporan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan di Kabupaten/Kota	rekomendasi	1	1			
				Standar Operasional Prosedur tentang Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1			
				Dukungan sebesar 2,50% terhadap persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	%	100	100			
				Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan						
				Dokumen Standar Kompetensi	dokumen	1	1			
				Sistem Informasi Analisis Jabatan yang terintegrasi dengan sistem evaluasi jabatan dan kepegawaian	aplikasi	0	0			
				Dukungan sebesar 10,78% terhadap persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	%	100	100			
				Dokumen Reviu Analisis Jabatan dan Beban Kerja	dokumen	2	2			
				Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan						
				Data Usulan Perencanaan Urusan Kelembagaan 2022	dokumen	1	1			
				Data Usulan Program Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2021	dokumen	1	1			
				Laporan monitoring dan Evaluasi Urusan Kelembagaan Tahun 2020	dokumen	1	1			
				Dukungan sebesar 10,57% terhadap persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	%	78	82.09.00			
				Implementasi Budaya Pemerintahan DIY						
				Reviu Peraturan Gubernur tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta	rapergub	0	0			
				Rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan DIY	dokumen	1	1			
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	laporan	1	1			
				Pemenang Kompetisi Budaya Pemerintahan SATRIYA (OPD, UPT, Sekolah)	KBP Berprestasi	9	9			
				Mendukung 31,90% tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	%	100	100			
				Agen Perubahan yang meningkat kapasitasnya	Agen Perubahan	250	250			
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO ORGANISASI	1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah	**PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI**				Perubahan regulasi dari Pusat	1) Meningkatkan intensitas komunikasi, informasi, advokasi, pendampingan, *monitoring* dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kepada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Pusat. 2) Penguatan kelompok budaya pemerintahan dan	urusan Kelembagaan 1) Dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini telah dilaksanakan evaluasi implementasi Perdais dimaksud dengan melakukan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2017-2022 untuk

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
									agen perubahan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.	meminimalisir terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Desain kelembagaan disusun dengan setiap struktur mengampu minimal 1 (satu) program sehingga program yang sama tidak mungkin diampu beberapa struktur, artinya overlap dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dihindari. Setiap struktur yang dibentuk telah mengakomodir fungsi koordinasi sesuai dengan masing-masing urusan. 2) Dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Khusus tentang kelautan diampu oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan serta 1 (satu) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai, yang diatur dilebih lanjut dengan Peraturan
			2. Melaksanakan perumusan kebijakan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Catatan: indikator baik adalah minimal melaksanakan 5 area perubahan reformasi birokrasi	%	76	78.38.00	Situasi pandemi Covid-19 yang mengubah pola interaksi internal birokrasi, pola interaksi masyarakat maupun pola interkasi antara birokrasi dan masyarakat	Memberikan fasilitasi yang optimal kepada unit pelayanan publik Pemda DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
			3. Meningkatkan implementasi budaya pemerintahan	**Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi**						
			4. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dukungan 82,34% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	%	100	100			
			5. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik	Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada 37 OPD	laporan	1	1			
			6. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan	**Perumusan kebijakan, koordinasi, dan monitoring akuntabilitas kinerja**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			pemerintah daerah							Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
				Dokumen LKjIP, PK dan BA serah terima	dokumen LKjIP, PK da	37	37			
				Dukungan 17,66% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI						
				Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	inovasi	1	2			
				Perumusan Kebijakan Standarisasi						
				Review SOP Internal Perangkat Daerah Pemda DIY	SK Kepala Perangkat	37	37			
				Rapergub SB	rapergub	1	1			
				Dukungan 65,65% terhadap jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional	%	100	100			
				Rapergub Pemberian Dana Opersional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD	rapergub	0	0			
				Rapergub SHBJ	rapergub	1	1			
				Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum						
				Jumlah Inovasi pelayanan publik yang dibina (sesuai Pergub Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi)	inovasi	0	0			
				Jumlah inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang	inovasi	10	39			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				diselenggarakan Kementerian PAN dan RB RI						
				Rekomendasi hasil Monev Indeks Kepuasan Masyarakat	unit pelayanan publi	0	0			
				Dukungan 34,35% terhadap jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional	%	100	100			
				Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	unit pelayanan publi	0	0			

6) *Fasilitasi Administrasi Pembangunan*

a) *Kondisi Umum*

Fasilitasi administrasi pembangunan pada Pemda DIY dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Setda DIY, yang sesuai dengan Pergub DIY No. 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, mengampu tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah dan diukur melalui Indikator kinerja Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.148. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti	%	65	65	72,2	111,08	80	90,25

Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2021

Capaian terhadap indikator tersebut pada tahun 2020 mencapai 72,2% dari target yang ditetapkan sebesar 65% atau dengan persentase capaian sebesar 111,08%. Angka tersebut diperoleh dari delapan belas rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi tiga belas kebijakan.

Indikator kinerja Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti, merupakan hasil dari pelaksanaan program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut.

(1) Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah

Program Pengelolaan kebijakan Infrastruktur daerah mengampu dua kegiatan yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah dan kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah. Kegiatan Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah menghasilkan Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang IPTEKS dan Dokumen Rumusan Kebijakan Sektoral. Sedangkan kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi kebijakan Infrastruktur Daerah salah satunya menghasilkan *Policy Brief* terkait Monev Implementasi Kebijakan Pengelolaan Drainase Di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

(2) Program Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan

Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan mengampu dua kegiatan yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan menghasilkan keluaran berupa dokumen *policy brief* rumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Adapun kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan menghasilkan *Policy Brief* terkait Monitoring dan Implementasi Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS).

(3) Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah

Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah mengampu dua kegiatan yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sumber-sumber Pembiayaan Non Pemerintah dan kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-sumber Pembiayaan Non Pemerintah. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sumber-sumber Pembiayaan Non Pemerintah menghasilkan Surat Edaran Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/18977/SE/XXII/2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun melalui kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-sumber Pembiayaan Non Pemerintah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada masa pandemi Covid-19.

Biro PIWP2 juga mengampu dukungan pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahun 2020, Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mengampu tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Kegiatan Pengelolaan Pengadaan secara Elektronik. Sebanyak 324 paket pengadaan dengan total anggaran sebesar Rp314.792.320.524,00 telah diselesaikan.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020, Fasilitasi Administrasi Pembangunan dilaksanakan melalui alokasi anggaran Rp1.932.750.750,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam sembilan Program dan 22 Kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp1.419.161.355,00 (73,43%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1. Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Masih Lemahnya Informasi Keterpaduan Antar Aturan Terkait	Pembaharuan Informasi terkait Keterpaduan Aturan	
			2. Peningkatan penggunaan aplikasi informasi digital yang tepat guna dalam mendukung perumusan kebijakan.			0	0	-	-	
			3. Peningkatan kualitas kelembagaan pengadaan barang dan jasa menuju *Center of Excelence*.	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						
				Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	23	23			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Surat masuk	surat	2500	2125			
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: 1. LED A60 10/13 W 2. LED A60 7 W 3. Isolasi 4. Roll kabel 15 m 5. Kabel 2 x 2,5 mm2	jenis	5	5			
				Dukungan sebesar 60% terhadap tercapainya persentase administrasi	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Surat keluar	surat	2500	14151			
				Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional (roda 2, 2 unit; roda 4, 5 unit)	unit	7	7			
				Tersedianya Surat kabar, Majalah dan Buku Perpustakaan: 1. Harian KR 2. Harian Jawa Pos 3. Harian Tribun 4. Majalah	jenis	4	4			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: - Penggandaan	lembar	42100	37600			
				Tersedianya jasa dan alat penanganan Covid: masker, sarung tangan, penyemprotan disinfektan, biaya langganan web conference.	jenis	4	4			
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	jenis	15	15			
				Tersedianya Barang Cetakan	jenis	11	11			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Dukungan sebesar 15% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	1.0E+14			
				Jasa Administrasi Keuangan (11 orang/12 bulan)	OB	132	132			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Jasa Perencana Program (2 orang/12 bulan)	OB	24	24			
				Jasa Pengelola Kepegawaian (1 orang/12 bulan)	OB	12	12			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Luar Jawa)	bulan	12	12			
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	12	12			
				Dukungan sebesar 25 % terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	0			
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa)	bulan	12	12			
				Tersedianya makan dan minuman rapat	OS	1809	1488			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Dukungan sebesar 40 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%	%	100	100			
				Terlaksananya pengadaan mebeulair	paket	1	1			
				Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung Kantor: 1. AC 2. PC 3. Notebook 4. Printer 5. UPS/Stabilizer 6.	jenis	14	14			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pointer 7. Dispenser 8. Hardisk External 9. Mesin Ketik 10. Karpet 11. Sofa 12. Rak 13. Kulkas 14. Thermogun						
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Dukungan sebesar 20 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Terpeliharanya Kendaraan dinas/ operasional (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	unit	7	7			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor: 1. Pemeliharaan Standing AC 2. Pemeliharaan AC 3. Pengisian Freon	jenis	3	3			
				Terpeliharanya Peralatan gedung kantor:1. Komputer2. Mainboard PC 3. Mainboard notebook 4. Laptop/Notebook 5. Printer 6. Hard disk 7. Mesin ketik manual 8. LCD Proyektor 9. Lampu Balast 10. Lensa 11. Stabilizator 12. Batery	jenis	12	12			
				Dukungan sebesar 40% dalam pencapaiannya peningkatan sarana prasarana aparatur	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Tersusunnya Bahan LKPJ dan LKJ	Lapor-an	2	2			
				Tersusunnya LKjIP	Lapor-an	1	1			
				Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Laporan keuangan tahunan gabungan	Lapor-an	1	1			
				Laporan keuangan Bulanan	bulan	12	12			
				Laporan keuangan semester	Lapor-an	2	2			
				Laporan keuangan tahunan Audited	Lapor-an	1	1			
				Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Laporan keuangan triwulan	Lapor-an	4	4			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Pengembangan Sistem Informasi	aplikasi	1	1			
				Tersusunnya RKA dan DPA 2021	Doku-men	1	1			
				Forum Perangkat Daerah	Berita Acara Forum	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Perubahan Th 2020	Dokumen	1	1			
				Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2021	Dokumen	1	1			
				Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Tersusunnya ROPK 2020	Dokumen	1	1			
				Tersusunnya RKA-P dan DPA-P 2020	Dokumen	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2	Dokumen	4	4			
				Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD	%	100	100			
2	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1. Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan pembnagunan yang responsif terhadap	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**				Masih Lemahnya Informasi Keterpaduan Antar Aturan Terkait	Pembaharuan Informasi terkait Keterpaduan Aturan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			kebutuhan masyarakat.							
			2. Peningkatan penggunaan aplikasi informasi digital yang tepat guna dalam mendukung perumusan kebijakan.	**Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten**				-	-	
			3. Peningkatan kualitas kelembagaan pengadaan barang dan jasa menuju Center of Excelence.	Monev Pengelolaan KCAG dan Geoheritage DIY dalam rangka mendukung rencana induk (9 KCAG)	Doku -men	1	1			
				Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan KCAG dan Geoheritage DIY (Peningkatan Pemahaman 60% Terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pemanfaatan KCAG DIY pada masyarakat instansi Kabupaten/Kota di DIY)	%`	60	60			
				Dukungan berupa arahan kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten sebesar 55,1%	%	100	100			
				Penyusunan Rencana Induk Tata Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						
				Penyusunan Dokumen Usulan Penetapan Potensi Warisan Geologi DIY	Doku -men	1	1			
				Dukungan berupa arahan penataan kawasan Satuan Ruang Strategis Kadipaten sebesar 55.1%	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN						
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis						
				Dukungan sebesar 0,09% Terhadap Peningkatan Perwujudan Tata Ruang Sesuai Dokumen Perencanaan Pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Sebesar 15,83%	%	100	100			
				Operasionalisasi Sekretariat Bersama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Budaya (18 SRS)	Doku -men	1	1			
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1. Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan pembnagunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	**PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**				Masih Lemahnya Informasi Keterpaduan Antar Aturan Terkait	Pembaharuan Informasi terkait Keterpaduan Aturan	
			2. Peningkatan penggunaan aplikasi informasi digital yang tepat guna dalam mendukung perumusan kebijakan.	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	%	100	100	-	-	
			3. Peningkatan kualitas kelembagaan	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			pengadaan barang dan jasa menuju Center of Excelence.							
				Dukungan sebesar 50% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	%	100	100			
				Terlaksanannya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa	Doku -men	4	4			
				Terselenggaranya Pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi	bulan	12	12			
				Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa						
				Peningkatan Kinerja UKPBJ	kali	2	2			
				Laporan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Doku -men	1	1			
				Dukungan 20% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik						
				Dukungan sebesar 30% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	%	100	100			
				Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik	bulan	12	12			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH						
				Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	%	65	75			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah						
				Dokumen bahan Rumusan Kebijakan Sektoral	Doku -men	1	1			
				Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	%	100	100			
				Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang IPTEKS	Doku -men	1	1			
				Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah						
				Dokumen Monev Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah	Doku -men	1	1			
				Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	%	100	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						
				Persentase Rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti	%	65	80			
				Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan						
				Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	%	100	100			
				Tersusunnya Policy Brief Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Doku -men	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Pembangunan Berkelanjutan						
				Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	%	100	100			
				Tersusunnya Policy Brief Monitoring Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Doku -men	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH						Pembiayaan Daerah A. Pada tahun 2019 tahun pertama Bagian Pembiayaan Non Pemerintah dibentuk telah dilakukan: 1. Kajian Penyiapan Regulasi/kebijakan pemerintah daerah terkait Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang di harap dapat menjadi pelengkap sandaran dan rujukan hukum dalam memperlancar pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. - Draft Rapergub telah selesai dikerjakan dan telah diajukan ke Biro Hukum 2. Telah dilaksanakan Fasilitasi Proses Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, seperti diketahui bersama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui SK Gubernur DIY No. 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2019 telah menetapkan program prioritas pembangunan terdiri dari pengembangan 5 infrastruktur, 9 Kawasan dan 3 program strategis, 4 program diantaranya di kerjakan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yaitu: Pengembangan TPA Piyungan, Pembangunan SPAM Kamijoro, Pembangunan Jogja Agro Park dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto 3. Kajian Pelaksanaan Perda 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan mendorong peran aktif dan kesepakatan bersama badan usaha/swasta dalam pelaksanaan TJLSP, Swasta/Badan usaha didorong menyalurkan program TJLSP yang dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. - Hasil kajian telah ditindaklanjuti menjadi surat Edaran Gubernur DIY tentang pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta B. Tahun 2020 tahun ke dua Bagian Pembiayaan Non Pemerintah direncanakan akan melaksanakan: 1. Kajian Pembiayaan non Pemerintah pada Program Prioritas Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang keluarannya adalah daftar skema pembiayaan non pemerintah program pembangunan prioritas pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Fasilitasi Proses Pelaksanaan 4 Program Pembangunan yang telah di skemakan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. 3. Kajian Lanjutan tentang Pelaksanaan TJLSP di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memahami

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										detail impact dari pelakanaan TJLSP bagi masyarakat yang secara langsung ataupun tidak langsung jelas berkontribusi aktif pada penanggulangan kemiskinan. Kajian ini diharapkan mampu menghasilkan jawaban mekanisme dam bentuk TJLSP apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan impact postif dalam menurunkan angka kemiskinan.
				Persentase rumusan bahan kebijakan pembiayan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti	%	60	60			
				Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah						
				Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 60%	%	100	100			
				Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah (1 Dokumen)	Doku -men	1	1			
				Fasilitasi KPBU	Doku -men	1	1			
				Monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah						
				Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah (1 Dokumen)	Doku -men	1	1			
				Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 60%						

7) Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol

a) Kondisi Umum

Banyaknya prestasi yang diperoleh oleh Pemda DIY menyebabkan tingginya minat daerah lain untuk berkunjung dan belajar ke Pemda DIY, tidak terkecuali di tengah pandemi Covid-19. Pelayanan terbaik kepada tamu yang berkunjung ke Pemda DIY telah dilaksanakan melalui pelayanan keprotokolan dan kerumahtanggaan yang profesional, terstandar, serta mengutamakan kearifan lokal. Dengan adanya pandemi, telah diterbitkan SE Gubernur Nomor 11/SE/XI/2020 tentang Prosedur Penerimaan Tamu di Pemda DIY dalam Tatanan Normal Baru, dengan tujuan pemberian layanan prima tanpa mengesampingkan kesehatan dan keselamatan tamu.

Langkah yang diambil dalam usaha penegakan protokol kesehatan dalam layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan di antaranya dengan:

(1) Pemasangan bilik disinfektan beserta pengukur suhu otomatis di pintu masuk ruang Gubernur dan Wakil Gubernur;
(2) Penyiapan *hand sanitizer* dan pengukuran suhu badan oleh petugas sebelum kegiatan dimulai;
(3) Pemasangan *wastafel* di berbagai titik strategis di Komplek Kepatihan;
(4) Penyediaan jamuan makanan kecil di piring dengan dibungkus plastik *cling wrap*;
(5) Penataan ulang ruang rapat guna mengakomodasi *physical distancing*;
(6) Pewajiban penggunaan masker di area Komplek Kepatihan;
(7) Pengaturan jumlah maksimal dan posisi pengguna *lift*;
(8) Pembuatan area khusus untuk penjemputan maupun kiriman barang dari ojek daring di Komplek Kepatihan guna meminimalisasi kontak.



Gambar 3.62. Pengecekan Suhu Tamu Undangan

Dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas Pemda DIY, Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY sebagai instansi yang pelayanan utamanya kepada pimpinan dan tamu, maka dalam pelayanan kepada pimpinan dan masyarakat, tata kelola persuratan dan kehumasan mendapat perhatian utama. Tata kelola persuratan dan naskah dinas, pengaturan agenda pimpinan, manajemen ruang rapat, dan sistem informasi pemerintah daerah Pemda DIY telah menggunakan sistem daring dalam aplikasi Sisminkada.

Dalam bidang kehumasan, dengan adanya dukungan SDM yang memiliki kompetensi yang tidak diragukan lagi, tercipta tim yang solid dan profesional guna menghasilkan pemberitaan yang berkualitas dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya predikat Gold Winner untuk kategori Website Pemerintah Daerah Terbaik dalam Public Relations Indonesia Award tahun 2020.

Tabel 3.149. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali--sasi	% Reali--sasi		
1.	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, dan persandian serta persuratan	%	90,255	87	90,91	104,49	88	103,30

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali--sasi	% Reali--sasi		
2.	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi Pemerintah Daerah	Skor indeks	82,33	84	93,99	111,89	88	106,81

Sumber: Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY, 2021

Sesuai dengan tabel di atas, target indikator kualitas layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, dan persandian serta persuratan untuk tahun 2020 ditetapkan sebesar 87 dan terealisasi sebesar 90,91. Adapun indikator kualitas layanan pemberitaan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 84 pada tahun 2020 dan tercapai sebesar 93,99. Capaian pada kinerja sasaran tersebut menunjukkan bahwa layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan telah memberikan upaya maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap tamu, serta layanan kehumasan telah menyampaikan informasi pemerintah daerah secara akuntabel dan memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020, Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol dilaksanakan melalui alokasi anggaran Rp14.792.985.200,00, untuk enam Program dan 18 Kegiatan. Secara keseluruhan realisasi fisik selesai 100 % dengan realisasi belanja sebesar Rp13.270.604.537,00 (89,71%). Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	1. Penguatan fungsi dan fasilitasi layanan kerumahtanggaan yang profesional	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Biro Umum Humas dan Protokol mempunyai fungsi utama pelayanan pimpinan dan tamu. Dengan adanya pandemi yang berpengaruh pada segala aspek dan tamu-tamu serta agenda kegiatan pusat banyak yang diselenggarakan di DIY, maka kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan tamu merupakan hal utama yang mendapatkan prioritas agar pelayanan tamu tetap dapat terselenggara dengan baik	Penyusunan SOP Penerimaan Tamu dalam masa pandemi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran nomor 11/SE/XI/2020 tentang Penerimaan Tamu dalam Tatanan Normal Baru dan penyiapan sarana prasarana yang memadai telah diambil guna kelancaran penerimaan tamu yang datang ke Pemda DIY dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan	
			2. Penguatan fungsi dan fasilitasi layanan keprotokolan yang profesional	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			
			3. Peningkatan kualitas SDM, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana persuratan dan persandian	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3	unit	1	1			
				Arsip Inaktif tertata	berkas	9000	9000			
				Jasa kebersihan kantor	bulan	12	12			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 6	unit	2	2			
				Jilid buku	buku	80	80			
				Biaya internet	bulan	3	3			
				Pembayaran rekening telepon, air, dan listrik	bulan	12	12			
				Jasa KIR	kendaraan	3	3			
				kelestarian arsip inaktif	m3	900	804			
				Surat kabar harian	jenis	3	3			
				Penggandaan	lembar	85000	85000			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	unit	41	41			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2	unit	30	30			
				Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	45	45			
				Alat tulis kantor	jenis	83	83			
				Cetakan Umum	jenis	35	35			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Peralatan dan perlengkapan pencegahan Covid-19	jenis	10	10			
				Jasa pengiriman pos dalam dan luar daerah	bulan	12	12			
				Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	jenis	30	30			
				Jasa keamanan kantor	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	20	20			
				Kinerja pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	2	2			
				Kinerja perencana program sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	2	2			
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	9	9			
				Kinerja pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	3	3			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Perjalanan dinas dalam dan luar daerah pelayanan kehumasan untuk koordinasi/peliputan/dokumentasi kegiatan pimpinan	tahun	1	1			
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				Makanan dan Minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	35	35			
				Perjalanan dinas dalam dan luar daerah pelayanan keprotokolan untuk koordinasi persiapan kunjungan Pejabat Negara dan memandu kegiatan pimpinan	tahun	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Meubelair sesuai dengan RKBMD	jenis	1	1			
				Meubelair sesuai dengan RKBMD	jenis	1	1			
				Penerangan Bangsal Kepatihan	paket	1	1			
				Penerangan Bangsal Kepatihan	paket	1	1			
				Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	jenis	1	1			
				Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	jenis	1	1			
				Peralatan dan perlengkapan pencegahan Covid-19	jenis	5	5			
				Peralatan dan perlengkapan pencegahan Covid-19	jenis	5	5			
				Dukungan terhadap pencapaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	20	20			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Jumlah Gedung bersejarah yang dipelihara	unit	13	13			
				Jumlah Gedung tempat kerja yang dipelihara	unit	11	11			
				Jumlah Aquarium air laut dan air tawar yang dipelihara	unit	4	4			
				Jumlah luasan Taman yang terpelihara selama 12 bulan	m2	9340	9340			
				Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	20	20			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	20	20			
				Kendaraan dinas/operasional roda 4	unit	40	40			
				Kendaraan dinas/operasional roda 2	unit	30	30			
				Kendaraan dinas/operasional roda 3	unit	1	1			
				Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2	unit	10	10			
				Kendaraan dinas/operasional roda 6	unit	2	2			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Instalasi Air minum/bersih 533 m'	bulan	12	12			
				Instalasi Air minum/bersih 533 m'	bulan	12	12			
				Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	20	20			
				Jaringan listrik	bulan	12	12			
				Jaringan listrik	bulan	12	12			
				BBM operasional genset	bulan	12	12			
				BBM operasional genset	bulan	12	12			
				Peralatan kantor	jenis	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Perlengkapan kantor	jenis	12	12			
				Perlengkapan kantor	jenis	12	12			
				Instalasi air limbah/kotor 53 m'	bulan	12	12			
				Instalasi air limbah/kotor 53 m'	bulan	12	12			
				Barang bercorak kesenian	set	1	1			
				Barang bercorak kesenian	set	1	1			
				Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional						
				Kendaraan dinas roda 4	unit	7	7			
				Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	20	20			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Dukungan terhadap terwujudnya pentausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	25	25			
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) dengan nilai "A"	dokumen	1	1			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Dukungan terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mednukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	25	25			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan, laporan keuangan dengan deviasi	%	10	10.03			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Berita Acara hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	dokumen	1	1			
				ROPK, RKT, Renja, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	dokumen	6	6			
				Dukungan terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	25	25			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Dukungan terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	25	25			
				Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai dengan ROPK	%	100	100			
2	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	1. Penguatan fungsi dan fasilitasi layanan kerumahtanggaan yang profesional 2. Penguatan fungsi dan fasilitasi layanan keprotokolan yang profesional 3. Peningkatan kualitas SDM,	**PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN**						
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis						
				Pagar besi Komplek Kepatihan sisi barat	unit	1	1			
				Pembuatan pergola sisi timur Bale Tanjung	unit	1	1			
				Dukungan terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50%	%	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana persuratan dan persandian	Dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor (eks rumah dr. Heru dan Nuryani Wijaya)	dokumen	1	1			
				Pengecatan Bangsal Kepatihan	unit	1	1			
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	1. Penguatan fungsi dan fasilitasi layanan kerumahtanggaan yang profesional 2. Penguatan fungsi dan fasilitasi layanan keprotokolan yang profesional 3. Peningkatan kualitas SDM, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana persuratan dan persandian	**PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN**						
				Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	skor	83	87			
				Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu						
				Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda DIY	bulan	12	12			
				Dukungan terhadap pencapaian skor dan indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan dan tamu	%	70	70			
				Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda	bulan	12	12			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu						
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	jenis	4	4			
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	jenis	4	4			
				Alat/Perlengkapan	jenis	5	5			
				Alat/Perlengkapan	jenis	5	5			
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	19	19			
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	19	19			
				Dukungan terhadap pencapaian skor dari indeks kepuasan	%	30	30			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				pelayanan kerumahtanggaan terhadap pimpinan dan tamu						
				Pengisian tabung gas 12 kg	kali	30	30			
				Pengisian tabung gas 12 kg	kali	30	30			
				PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN						
				Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	skor	83	864.525			
				Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu						
				Pelayanan keprotokolan penerimaan tamu pemda DIY	bulan	12	12			
				Dukungan terhadap pencapaian skor dari indeks kepuasan pelayanan protocol terhadap pimpinan dan tamu	%	40	40			
				Pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Staf Ahli Gubernur, Sekda, Asisten Sekda	bulan	12	12			
				Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya						
				Upacara PHBN tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	upacara	7	7			
				Korps Musik Pemda DIY	tahun	1	1			
				Upacara/Acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	kali	30	30			
				Dukungan terhadap skor dari indeks kepuasan pelayanan protocol terhadap pimpinan dan tamu	%	60	60			
				Upacara Bendera Lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	upacara	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT						
				Peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	pengunjung	283860	1116250			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah						
				Penyebarluasan informasi melalui SPD Jogjawara	eksemplar	1500	1500			
				Penyebarluasan informasi melalui media cetak	kali	47	47			
				Penyebarluasan informasi melalui media radio	kali	8	8			
				Penyebarluasan informasi melalui media sosial	paket	3	3			
				Penyebarluasan informasi melalui media TV	kali	50	50			
				Dukungan terhadap peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	%	60	60			
				Video publikasi	jenis	2	2			
				Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	buah	74	74			
				Pembinaan Kemitraan Media dan Pers						
				Analisis Media	laporan	12	12			
				Jumpa pers	kali	6	6			
				Kemitraan Pemda DIY dengan Admin Media Sosial	laporan	3	3			
				Dukungan terhadap tercapainya peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	%	40	40			

8) Fasilitasi Pemerintahan

a) Kondisi Umum

Pandemi Covid-19 telah merubah pola kerja dan kehidupan masyarakat. Pada masa pandemi, Badan Penghubung Daerah turut memberikan kontribusi untuk penanganan Covid-19 di Yogyakarta, dengan berkoordinasi bersama semua pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat Yogyakarta. Badan Penghubung Daerah telah membantu kepulangan pekerja dan mahasiswa Indonesia yang baru sampai di tanah air ke Yogyakarta, mengirim berbagai alat kesehatan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional ke Yogyakarta, dan membantu berbagai OPD di Yogyakarta untuk berhubungan dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Nasional.

Kegiatan di Anjungan DIY Taman Mini Indonesia Indah, selanjutnya dilaksanakan dengan menyesuaikan ketentuan terkait penanganan pandemi yang dikeluarkan Pemerintah. Kesinambungan penyelenggaraan diklat kesenian yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Daerah DIY terus diupayakan karena menjadi bagian dari upaya pelestarian kesenian khas Yogyakarta di area Jakarta dan sekitarnya.

Tabel 3.150. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah	%	88,44	88	88,50	100,57	90	98,33

Sumber: Badan Penghubung Daerah DIY, 2021

Indikator kinerja sasaran diukur dari responden yang mendapatkan pelayanan penginapan dan kendaraan dinas dari Banhubda selama tahun 2020. Capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar 88,50% mencapai target yang ditetapkan (88%) dan lebih tinggi dari capaian 2019 yang sebesar 88,44%.

Capaian tahun 2020 ini didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

(1) Loyalitas pengguna layanan Banhubda cukup tinggi karena kepuasan terhadap pelayanan yang disediakan;
(2) Adanya perbaikan fasilitas pelayanan berupa peningkatan tipe kendaraan untuk pelayanan maupun perubahan menu sarapan di penginapan;

Adanya pemeliharaan fasilitas pelayanan menyesuaikan protokol kesehatan yang berlaku saat ini seperti penyemprotan disinfektan dan penyediaan sabun cuci tangan serta pembersih tangan.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 pelaksanaan Urusan Fasilitasi Pemerintahan dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp2.072.660.000,00, dibagi dalam enam Program dan 16 Kegiatan. Secara keseluruhan dapat direalisasi sebesar Rp1.870.222.072,00 (90,23%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				adanya tuntutan di lapangan untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan dalam pemenuhan pelayanan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan	peningkatan kuaitas sarana prasarana pelayanan meliputi kendaraan dan penginapan	
			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga			0	0			
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran						
				2. ATK	jenis	43	43			
				1. Arsip Dinamis SKPD	berkas	35000	35000			
				9. Bukti pembayaran telepon 5 saluran	bulan	12	12			
				13. Pengisian tabung pemadam kebakaran	tabung	10	10			
				10. Kebersihan Kantor	m2	74848	74848			
				3. Barang cetakan	jenis	10	10			
				18.Peralatan rumah tangga perkantoran	jenis	4	4			
				11. Pengiriman	tahun	1	1			
				6. Bukti pembayaran internet 2 jaringan	bulan	12	12			
				5. Bukti pembayaran air 2 sambungan	bulan	12	12			
				14. Peralatan listrik	jenis	7	7			
				4. Barang penggandaan	lembar	24800	24800			
				7. Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh	bulan	12	12			
				15. Surat kabar	eks	720	720			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				16. Surat keluar	lembar	660	660			
				17. Surat masuk	lembar	600	600			
				12. Pengisian tabung gas	kali	6	6			
				8. Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu	unit	11	11			
				Dukungan 67,06 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				2. Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	orang	1	1			
				4. Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	orang	10	10			
				Dukungan 5,14 % terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				1. Kinerja perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	orang	1	1			
				3. Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	orang	1	1			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				1. Konsultasi dan koordinasi Badan Penghubung Daerah	tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				dalam daerah terlaksana dengan baik						
				3. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1			
				Dukungan 27,81 % terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				2. Konsultasi dan koordinasi Badan Penghubung Daerah luar daerah terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Dukungan 27,07% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	jenis	3	3			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				-	-	0	0			
				-	-	0	0			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				2.Kendaraan dinas operasional roda empat	unit	9	9			
				1.Kendaraan dinas operasional roda dua	unit	2	2			
				Dukungan 68,17% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Peralatan dan perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMD	jenis	3	3			
				Dukungan 4,77% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Dukungan 20,86% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) dilaksanakan triwulan I tahun 2020	Nilai LKJiP SKPD A	80	81.92			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	%	5	9.77			
				Dukungan 23,41% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuanga	%	100	100			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 43,73% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				2.ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA.2021 dan Perubahan TA 2020)	%	100	100			
				1. Berita Acara Forum perencanaan OPD	BA	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Dukungan 12,00% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100			
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan	%	95	90.23			
2	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah	**PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA**						
			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan	**Gelar Seni Budaya Daerah**						
				Dukungan kegiatan Gelar Seni Budaya Daerah terhadap program Pembinaan dan	%	100	100			

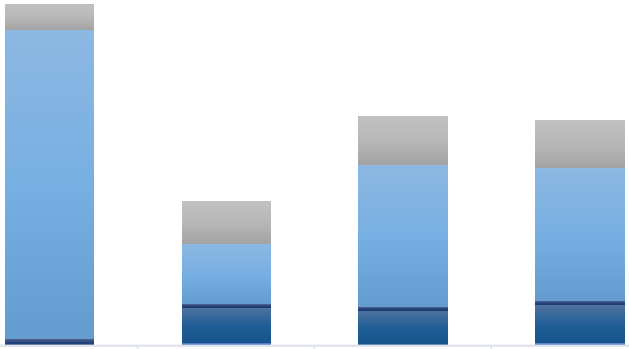
No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			kerjasama pihak ketiga	Pengembangan Adat dan Seni sebesar 89,22%						
				1. Gelar Seni Budaya	Pentas	12	12			
				2. Stakeholder yang paham seni budaya Karawitan, Seni Tari, Ketoprak Gaya Yogyakarta	orang	140	140			
3	SEKRETARIAT DAERAH	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH**						
			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga	Peningkatan kualitas layanan tamu Kantor Perwakilan Daerah	%	86	87.54			
				Pelayanan Pimpinan dan Tamu						
				Indeks tamu yang memberikan apresiasi positif terhadap pelayanan	angka indeks	86	88.84			
				Dukungan 98,85% terhadap peningkatan kualitas layanan tamu Badan Penghubung Daerah	%	100	100			
				Pelayanan Informasi dan Kemitraan						
				Dukungan 1,15% terhadap peningkatan kualitas layanan tamu Badan Penghubung Daerah	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kesepakatan bersama dengan BANHUBDA se Indonesia	kesepakatan	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PROMOSI POTENSI DAN SENI BUDAYA						
				Peningkatan Kualitas Layanan Promosi Potensi dan Seni Budaya	angka indeks	86.5	88.75			
				Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah						
				Dukungan 76,38 % terhadap peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya	%	100	100			
				Skor indeks kepuasan mitra yang terfasilitasi promosi melalui pameran	Angka indeks	86	88.5			
				Promosi Seni dan Budaya Daerah						
				Sampel audience promosi seni budaya daerah yang tertarik terhadap Yogyakarta	Angka indeks	87	89			
				Dukungan 23,62 % terhadap peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya	%	100	100			

9) *Penanggulangan Bencana*

a) *Kondisi Umum*

Wilayah DIY memiliki intensitas kejadian bencana yang cenderung tinggi. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar kejadian bencana di DIY dalam empat tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sampai akhir 2020.



	2017	2018	2019	2020
Angin Kencang	89	147	168	167
Longsor	1097	216	506	475
Banjir	24	12	12	14
Kekeringan	1	1	1	1
Gempa	0	124	122	135
Gunung Api	0	12	4	9
Epidemi	0	0	0	1
Tsunami	0	0	0	0

Gambar 3.63. Tren Kejadian di DIY Tahun 2017-2020
Sumber: Pusdalops BPBD DIY, 2021

Sepanjang tahun 2020, terdapat dua kejadian yang dikategorikan sebagai bencana tingkat provinsi yaitu Pandemi Covid-19 dan Erupsi Gunung Merapi namun demikian terdapat kejadian bencana di tingkat Kab/Kota berupa bencana kekeringan yang ditetapkan sebagai siaga darurat. Total nilai kerusakan dampak bencana pada tahun 2020 cukup besar yaitu Rp19.445.004.000,00 yang terdiri dari

kejadian Bencana sebesar Rp19.201.954.000,00 dan kejadian lainnya sebesar Rp243.050.000,00, data tersebut berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Pusdalops BPBD DIY dari BPBD Kab/Kota untuk beberapa kejadian sebagai berikut:



Gambar 3.64. Data Nominal Kerusakan tahun 2020
Sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2021

Pada tahun 2020 terdapat Surat Keputusan Tanggap Darurat oleh Gubernur DIY tingkat daerah telah dikeluarkan yaitu:

(1) Surat Keputusan Gubernur Nomor 65/Kep/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

(2) Surat Keputusan Gubernur Nomor 121/Kep/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

(3) Surat Keputusan Gubernur Nomor 197/Kep/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

(4) Surat Keputusan Gubernur Nomor 227/Kep/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

(5) Surat Keputusan Gubernur Nomor 254/Kep/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

(6) Surat Keputusan Gubernur Nomor 286/Kep/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

(7) Surat Keputusan Gubernur Nomor 318/Kep/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

(8) Surat Keputusan Gubernur Nomor 346/Kep/2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta;

(9) Surat Keputusan Gubernur Nomor 358/Kep/2020 tanggal 25 Nopember 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketujuh Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

(10) Surat Keputusan Gubernur Nomor 388/Kep/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedelepan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Capaian Penilaian Indek Ketahanan Daerah DIY yang merupakan indikator kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.151. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2020 serta Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	72,5	74	75,26	101,7	80	84,62

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2021

Indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah dengan target pada tahun 2020 sebesar 74 dan tercapai sebesar 75,26 atau mencapai 101,7%. Ketercapaian sasaran tersebut didukung adanya peningkatan kapasitas, komitmen aparatur dan masyarakat untuk

mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Meskipun nilai indeks pada tahun 2020 telah melebihi target, namun berdasarkan evaluasi atas pencapaiannya terdapat dua tantangan dan perhatian kedepan, yang meliputi:

(1) Kewenangan koordinasi dan keterlibatan masyarakat juga para *stakeholder* terkait pada penanggulangan bencana DIY;
(2) Regulasi dan koordinasi dalam upaya percepatan mitigasi struktural dan non-struktural. Menghadapi berbagai permasalahan tersebut dibutuhkan komitmen tinggi dari seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

b) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pelaksanaan fasilitasi penunjang urusan Penanggulangan Bencana pada tahun anggaran 2020 dilakukan melalui pelaksanaan tujuh Program dan 18 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.511.752.000,00. Secara keseluruhan, realisasi belanja langsung sebesar *Rp16.517.382.846,00 (84,65%), dengan realisasi fisik sebesar 100%. Secara lebih rinci realisasi program/kegiatan pada tahun 2020 tersaji pada tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				1) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengantisipasi bencana yang dipicu oleh hidrometeorologi sehingga mengakibatkan lemahnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat. 2) Banyak pihak yang memiliki EWS baik pemerintah maupun non pemerintah dengan indikator yang berbeda-beda sehingga sistem peringatan dini bencana di DIY belum terintegrasi dan pengelolaannya belum efektif dan efisien.	1) Menyusun Rencana Kontijensi bencana yang dipicu oleh hidrometeorologi 2) EWS di DIY memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan dalam rangka pengelolaan EWS terintegrasi.	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Tindak lanjut Pencegahan dan Penanggulanan Bencana: 1. Jejaring antar OPD, lembaga, organisasi relawan dalam mitigasi bencana yang sudah terbentuk diantaranya adalah: a. Klaster penanggulangan bencana, ada 8 klaster PB yakni: Klaster Kesehatan, Klaster Pencarian dan Penyelamatan, Klaster Logistik, Klaster pengungsian dan Perlindungan, Klaster Pendidikan, Klaster Sarana dan Prasarana, Klaster Ekonomi, Klaster Pemulihan Dini b. Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY 2. SOP yang melibatkan semua pemangku kepentingan kebencanaan telah dibentuk melalui PERATURAN
			2. Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerjasama kemitraan, perbaikan/pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana & pengelolaan sumber daya	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	30.76			
			3. Peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						
			4. Peningkatan manajemen risiko dan manajemen krisis dengan memperkuat kesiapsiagaan, respon	(11) Bukti pembayaran rekening air PDAM	bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana di semua tingkatan							GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
				(14) Bukti pembayaran surat kabar harian	bulan	12	12			NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
				(2) Bukti pembayaran jasa kebersihan Gedung Kantor BPBD DIY	bulan	12	12			PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
				(6) Penggandaan dokumen	lembar	100000	100000			NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG
				(4) Pembelian Alat-alat/Perlengkapan	jenis	12	12			STANDAR OPERASIONAL
				(3) Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	jenis	5	5			PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA 3. Gladi
				Dukungan sebesar 38% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			lapang pada SOP yang sudah di tetapkan disebutkan bahwa Gladi lapang diawali dengan penyusunan rencana kontijensi. Tahun 2019 sudah disusun
				(10) Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasioanl roda 6	unit	10	10			rencana kontijensi Erupsi Merapi. Gladi lapang di Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
				(1) Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasioanl roda 2	unit	20	20			dilaksanakan melekat pada kegiatan Destana/Katana Gladi Lapang tingkat DIY tahun 2020 dan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				(5) Pembelian ATK dan barang pakai habis lainnya	jenis	60	60			2021 belum dilaksanakan. 4. Fasilitasi terhadap organisasi relawan kebencanaan baik untuk peningkatan SDM maupun operasional organisasi dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan kesiapsiagaan bencana, pelatihan penanggulangan kebakaran maupun pelatihan dapur umum.
				(12) Bukti pembayaran rekening listrik	bulan	12	12			
				(15) Bukti pembayaran tagihan internet/TV berlangganan	tahun	1	1			
				(9) Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasioanl roda 4	unit	18	18			
				(8) Tersedianya barang cetak	jenis	5	5			
				(13) Bukti pembayaran rekening telepon	bulan	12	12			
				(7) Pengiriman paket	tahun	1	1			
				(16) Pembelian peralatan kebersihan dan Bahan pembersih	jenis	8	8			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				(6) Kinerja Perencana Program 2 orang	orang	2	2			
				Dukungan sebesar 23% terhadap tercapainya administrasi	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
				(1) Kinerja tenaga kontrak Pengelola Arsip/Perpustakaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	2	2			
				(2) Kinerja tenaga kontrak pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	4	4			
				(4) Kinerja tenaga kontrak penjaga repeater dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	4	4			
				(5) Kinerja Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang 10 orang	orang	10	10			
				(7) Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang	orang	1	1			
				(8) Kinerja tenaga kontrak Front office dalam 1 tahun	orang	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				sesuai peraturan perundangan yang berlaku						
				5. Kinerja pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, dan perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	0	0			
				(3) Kinerja tenaga kontrak penjaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	orang	6	6			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Dukungan sebesar 39% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				(4) Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1			
				(3) Perjalanan dinas luar Jawa terlaksana dengan baik	tahun	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				(2) Perjalanan dinas di dalam Jawa terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				(1) Konsultasi dan koordinasi BPBD DIY Dalam Daerah terlaksana dengan baik	tahun	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	19.68			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Dukungan sebesar 61% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
				(3) Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBMD	unit	7	7			
				(1) Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMD	unit	20	20			
				(2) Kendaraan dinas operasional roda 4	unit	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				bensin sesuai RKPBMD						
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				(3) Paket pemeliharaan bangunan tempat kerja	Bulan	12	12			
				Dukungan sebesar 39% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perngkat daerah	%	100	100			
				(2) Mebeleur kantor terpelihara sesuai kebutuhan	Bulan	12	12			
				(1) Peralatan dan perlengkapan gedung kantor terawat	Bulan	12	12			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	100	47.12			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Dukungan 9% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	nilai LKjIP A	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Dukungan 10% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				(3) Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan	Lapor -an	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				(1) Laporan keuangan semesteran dan prognosis 2 laporan	Lapor -an	2	2			
				(2) Laporan keuangan bulanan 12 laporan	Lapor -an	12	12			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				2. Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi BPBD DIY yang lengkap dan terkini	%	0	0			
				(1) ROPK, RENJA, RKA, RKAP, DPA dan DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Doku -men	11	11			
				Dukungan 68% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				(3) Berita Acara Forum perencanaan PD	BA	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan ROPK yang telah ditetapkan	%	100	100			
				Dukungan 13% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100			
2	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan	**PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA**				1) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengantisipasi bencana yang dipicu oleh hidrometeorologi sehingga mengakibatkan lemahnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat. 2) Banyak pihak yang memiliki EWS baik pemerintah maupun non pemerintah dengan indikator	1) Menyusun Rencana Kontijensi bencana yang dipicu oleh hidrometeorologi 2) EWS di DIY memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan dalam rangka pengelolaan EWS terintegrasi.	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Tindak lanjut Pencegahan dan Penanggulanan Bencana: 1. Jejaring antar OPD, lembaga, organisasi relawan dalam mitigasi bencana yang sudah terbentuk diantaranya adalah: a. Klaster penanggulangan bencana, ada 8 klaster PB yakni: Klaster Kesehatan, Klaster Pencarian dan Penyelamatan, Klaster Logistik,
			2. Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerjasama kemitraan, perbaikan/pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana & pengelolaan sumber daya	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	desa/ kelurahan	25	5			
			3. Peningkatan investasi PRB untuk	Peningkatan Sekolah Aman (SSB)	Sekolah	25	25			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja	di Kawasan Rawan Bencana				yang berbeda-beda sehingga sistem peringatan dini bencana di DIY belum terintegrasi dan pengelolaannya belum efektif dan efisien.		Klaster pengungsian dan Perlindungan, Klaster Pendidikan, Klaster Sarana dan Prasarana, Klaster Ekonomi, Klaster Pemulihan Dini b. Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY 2. SOP yang melibatkan semua pemangku kepentingan kebencanaan telah dibentuk melalui PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA 3. Gladi lapang pada SOP yang sudah di tetapkan disebutkan bahwa Gladi lapang
			4. Peningkatan manajemen risiko dan manajemen krisis dengan memperkuat kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana di semua tingkatan	**Pengelolaan Pencegahan Bencana**						
				Dukungan 54% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	%	100	100			
				5. Review Peta Banjir, Angin Kencang, Tanah Longsor	Doku -men	0	0			
				(3) Profile Destana	Paket	1	1			
				(1) Desa/Kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana baru yang	Desa/ Kelurahan	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				terbentuk dan berkembang di DIY (Kab. Kulon Progo: 1 desa; Sleman: 1 desa; Kota Yk: 3 Kelurahan)						diawali dengan penyusunan rencana kontijensi. Tahun 2019 sudah disusun rencana kontijensi Erupsi Merapi. Gladi lapang di Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilaksanakan melekat pada kegiatan Destana/Katana Gladi Lapang tingkat DIY tahun 2020 dan 2021 belum dilaksanakan. 4. Fasilitasi terhadap organisasi relawan kebencanaan baik untuk peningkatan SDM maupun operasional organisasi dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan kesiapsiagaan bencana, pelatihan penanggulangan kebakaran maupun pelatihan dapur umum.
				2. Hasil Rekomendasi FPRB untuk pengurangan risiko berbasis komunitas	Rekomen -dasi	0	0			
				4. Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di DIY	Doku -men	0	0			
				Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana						
				5. Jumlah OPD yang Terlibat dalam Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB) di DIY	OPD	0	0			
				2. Relawan dan Petugas yang meningkat kemampuan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	orang	0	0			
				1. Laporan Klaster Komponen	Laporan	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penanggulangan Bencana (8 klaster)						
				3. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang Terbentuk dan Terbina	SPAB/ SSB	0	0			
				4. Dokumen Renkon Gempa Bumi, Banjir dan Kekeringan Tingkat Provinsi	Doku -men	0	0			
				6. Peta Rawan Bencana Kebakaran Se-DIY	Laporan	0	0			
				(7) Petugas pemadam kebakaran terlatih, meningkat kompetensinya dalam pengelolaan kebakaran permukiman	orang	35	35			
				Dukungan 46% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	%	100	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	menit	14	14			
				Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	menit	14	14			
				Pengelolaan Kedaruratan Bencana						
				Dukungan 18% terhadap peningkatan respon kejadian bencana	%	100	100			
				(4) Laporan piket bulanan TRC	laporan	12	12			
				(3) Laporan Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan	laporan/ kejadian	360	360			
				2. Aparat dan Petugas yang meningkat kapasitasnya dalam Penanganan Kedaruratan	orang	0	0			
				(7) Relawan dan Petugas yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Pos Aju 40 orang	angkatan	2	2			
				(1) Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta	Kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				memiliki ketrampilan dalam penanganan darurat bencana DIY						
				5. Laporan Pendampingan, Sertifikasi ISO 45001 dan monev tentang A3	Laporan	0	0			
				6. Laporan Geladi Relawan	laporan	0	0			
				Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana						
				(4) Laporan Operasional PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana	Laporan	12	12			
				(3) Laporan Operasional media center selama 12 bulan (informasi kebencanaan kepada publik)	laporan	12	12			
				Dukungan 42% terhadap peningkatan respon kejadian bencana	%	100	100			
				(5) Software Activity Monitoring System Untuk	Set	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Surveillance petugas lapangan						
				1. Petugas Pusdalops dan Pengelola media center yang meningkat kapasitas dan teamwork-nya (2 angkatan)	orang	0	0			
				(2) Sistem reaksi cepat di Pusdalops PB DIY untuk mendukung Kesiapsiagaan dan respon penanganan kedaruratan, pencegahan penyebaran Covid-19 di DIY	Set system integrasi	1	1			
				Pengelolaan Logistik Bencana						
				(6) Laporan Semesteran Pengelolaan dan pendistribusian Logistik	Laporan	2	2			
				2. Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana (30 orang)	Kelom -pok	0	0			
				(7) Kajian Kebutuhan Logistik	Doku -men	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				(1) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana.	Kelom -pok	3	3			
				(3) Laporan Update Data Logistik secara Periodik	Laporan update data	1	1			
				(4) Paket bantuan Logistik dan Peralatan yang siap terdistribusi dalam darurat Bencana	Paket logistik	1200	1200			
				(5) Paket perlengkapan untuk penanggulangan bencana (800 bronjong, 15.000 karung, 350 sekop panjang, 350 sekop pendek, 500 deklit, 1.000 selimut, 500 tikar, 500 lbr seng)	Jenis	8	8			
				Dukungan 23% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana	%	100	100			
				Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana						
				Dukungan 16% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur	%	100	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				dan masyarakat dalam penanggulangan bencana						
				(4) Peralatan Penanggulangan Bencana	Jenis	16	0			
				(5) Laporan Update Data Peralatan PB secara Periodik	laporan	2	0			
				(3) Aparat dan Relawan yang meningkat Kesiapsiagaan dalam pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai kluster peruntukannya (1 angkatan)	Orang	50	0			
				1. Aparat, relawan dan masyarakat yang terampil dalam Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana (1 angkatan)	Orang	0	0			
				(2) Dokumen Kajian kebutuhan peralatan PB	Doku -men	1	0			
				(6) Kendaraan operasional PB siap pakai (ATV, Truk Roda 6, Sweeper	jenis	7	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Truck, Mini Loader, Mini Escavator, Forklift, Motor Tempel)						
				PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA						
				Indek pemulihan pasca bencana	angka	75	75			
				Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana						
				3. KK yang mendapat stimulan perbaikan rumah pascabencana	KK Terveri -fikasi	0	0			
				9. Laporan rehabilitasi barak pengungsian Desa Donokerto dan Desa Candibinangun Sleman (2 barak)	laporan	0	0			
				(2) Kajian Perhitungan DRI pasca bencana banjir longsor akibat siklon Cempaka 2017	Doku -men	1	1			
				(1) Kajian Indek Risiko Bencana DIY tahun 2019	Doku -men	1	1			
				(7) Pemeliharaan jembatan Beally	bulan	12	12			
				6. Tukang dan tenaga terampil yang meningkat	orang	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				ketrampilannya tentang rancang bangun tahan gempa dan huntara						
				Dukungan sebesar 99% terhadap pencapaian indeks pemulihan pasca-bencana	%	100	100			
				(12) Rehabilitasi Jalan Barongan-Bibal	km	2.2	2.2			
				(8) Tebing lahan cadangan Huntap Plosokerep yang diperkuat	lokasi	1	1			
				5. Perwakilan OPD dan relawan yang paham dan terampil mengaplikasikan JITU-PASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS	orang	0	0			
				(11) Rekonstruksi Jalan Sedayu-Pandak	km	1.25	1.25			
				(10) Rekonstruksi pengaman badan jalan dan jembatan ruas Jalan Imogiri-Dodogan	meter	3	3			
				(4) Laporan Hasil Monev Pasca bencana Bansor	Doku -men/ laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				akibat siklon Cempaka 2017 di Kabupaten bantul dan Gunungkidul						
				Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi budaya pasca bencana						
				Dukungan sebesar 1% terhadap pencapaian indekspemulihan pasca-bencana (DRI DIY)	%	100	0			
				Kelompok kesenian mendapat stimulan pemulihan budaya pascabencana	Kelom -pok	0	0			
3	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan	**PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA**				1) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengantisipasi bencana yang dipicu oleh hidrometeorologi sehingga mengakibatkan lemahnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat. 2) Banyak pihak yang memiliki EWS baik pemerintah maupun non	1) Menyusun Rencana Kontijensi bencana yang dipicu oleh hidrometeorologi 2) EWS di DIY memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan dalam rangka pengelolaan EWS terintegrasi.	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Tindak lanjut Pencegahan dan Penanggulanan Bencana: 1. Jejaring antar OPD, lembaga, organisasi relawan dalam mitigasi bencana yang sudah terbentuk diantaranya adalah: a. Klaster penanggulangan bencana, ada 8 klaster PB yakni: Klaster Kesehatan, Klaster Pencarian
			2. Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerjasama kemitraan, perbaikan/pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana & pengelolaan sumber daya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	angka	13.2	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			3. Peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja	**Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya**				pemerintah dengan indikator yang berbeda-beda sehingga sistem peringatan dini bencana di DIY belum terintegrasi dan pengelolaannya belum efektif dan efisien.		dan Penyelamatan, Klaster Logistik, Klaster pengungsian dan Perlindungan, Klaster Pendidikan, Klaster Sarana dan Prasarana, Klaster Ekonomi, Klaster Pemulihan Dini b. Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY 2. SOP yang melibatkan semua pemangku kepentingan kebencanaan telah dibentuk melalui PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA 3. Gladi lapang pada SOP yang sudah di
			4. Peningkatan manajemen risiko dan manajemen krisis dengan memperkuat kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana di semua tingkatan	Dukungan 2,38% terhadap capaian persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan sebesar 13,2%	%	100	100			
				1. Kajian dampak bencana terhadap perekonomian di Kawasan Cagar Budaya DIY	Doku -men	0	0			
				2. Kajian Mitigasi Bencana pada Bangunan Cagar Budaya di DIY	Doku -men	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
										tetapkan disebutkan bahwa Gladi lapang diawali dengan penyusunan rencana kontijensi. Tahun 2019 sudah disusun rencana kontijensi Erupsi Merapi. Gladi lapang di Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilaksanakan melekat pada kegiatan Destana/Katana Gladi Lapang tingkat DIY tahun 2020 dan 2021 belum dilaksanakan. 4. Fasilitasi terhadap organisasi relawan kebencanaan baik untuk peningkatan SDM maupun operasional organisasi dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan kesiapsiagaan bencana, pelatihan penanggulangan kebakaran maupun pelatihan dapur umum.

f. Pengawasan

1) Kondisi Umum

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Pemda DIY dilaksanakan melalui Inspektorat DIY.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2020 dilaksanakan mengacu pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 288/KEP/2019 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan pada kode etik pengawasan, dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia serta prosedur lain yang sesuai melalui penilaian atas sistem pengendalian internal yang diterapkan, pengumpulan dan penelaahan bukti-bukti dan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM, anggaran dan sarana prasarana, kegiatan pengawasan dinilai mampu menyelaraskan tata kelola dengan risiko organisasi yang mungkin timbul yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pemetaan risiko digunakan sebagai faktor risiko untuk perencanaan pengawasan.

Adanya Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pelaksanakan pengawasan yang dilakukan terhadap OPD maupun unit kerja Pemda DIY maupun OPD/Unit Kerja Kabupaten/Kota di DIY. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru tanpa mengurangi kualitas pengawasan itu sendiri. Salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan dalam kondisi pandemi yang terjadi adalah optimalisasi pemanfaatan data pada sistem informasi yang tersedia melalui pengawasan daerah berbasis

elektronik (E-Wasda) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Sistem Informasi Melalui Elektronik Pengawasan Daerah. Dengan adanya pengawasan berbasis sistem informasi ini maka diharapkan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan mengoptimalkan aplikasi yang sudah tersedia tanpa mengurangi kualitas pengawasan yang dilaksanakan.



Gambar 3.65. Sosialisai E-Wasda ke OPD Pemda DIY

Selain dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam masa pandemi Covid-19 juga dilakukan pendampingan terhadap OPD-OPD pengampu kegiatan yang bersumber dari dana belanja tidak terduga (BTT). Adapun pendampingan dilaksanakan pada refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Pemda DIY T.A. 2020 serta pendampingan atas pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Selain pendampingan telah dilakukan juga monev dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD DIY ke masyarakat di kabupaten/kota wilayah DIY.

Capaian kinerja fasilitasi pengawasan pada tahun 2020 dalam mewujudkan sasaran strategis yaitu **Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal** diukur melalui satu indikator kinerja utama yaitu persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, sebagai berikut.

Tabel 3.152. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	90,07	85	93,13	109,56	90	103,47

Sumber: Inspektorat DIY, 2021

Target indikator kinerja utama yaitu persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY, Itjen Kementerian Dalam Negeri RI dan Inspektorat DIY adalah sebesar 85% telah terlampaui dengan capaian realisasi 93,13% atau sebesar 109,56% dari target yang ditetapkan.

Upaya percepatan tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

a) Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data tindaklanjut secara internal oleh Pemda DIY sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun;
b) Kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan melalui koordinasi baik daring atau luring ke OPD/unit kerja terkait untuk memantau sejauh mana progress tindak lanjut yang dilakukan
c) Pembahasan tindaklanjut oleh BPK RI perwakilan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada semester I dan Semester II tahun berjalan. Pembahasan dilakukan secara manual dan mengupload ke sistem daring dengan menunjukkan bukti tindak lanjut yang ada;
d) Apabila ada hambatan oleh OPD/unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI maka diadakan konsultasi dengan BPK RI untuk mencari solusi yang tepat

Secara umum faktor pendorong untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah koordinasi yang intensif ke OPD secara formal maupun non formal melalui penanggung jawab pelaksana tindak lanjut, penyelesaian rekomendasi temuan APIP yang tinggi karena adanya konsultasi dengan tim pemeriksa dan bagian monev terkait dengan bentuk tindak lanjut yang harus diserahkan, koordinasi dengan tim pemeriksa, sebelum tim memasuki obyek pemeriksaan akan mendapatkan inventarisasi temuan pemeriksaan baik APIP BPK maupun Itjen dan tindaklanjut yang harus diselesaikan oleh OPD terkait. Adapun faktor penghambat dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah:

a) Rekomendasi keuangan yang belum terbayarkan karena dari pihak ke-3 belum terselesaikan;
b) Adanya pergantian personil penanggungjawab pada OPD atau terkonfirmasi Covid-19;
c) Berkurangnya frekuensi monitoring dan evaluasi ke OPD/unit kerja melalui pertemuan langsung sedikit banyak berpengaruh terhadap kualitas tindaklanjut yang diberikan, karena tidak semua bisa terselesaikan melalui *virtual meeting*.

Adapun terhadap obyek pemeriksaan baik di Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota selama Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

a) Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY

Pada 2020, BPK RI Perwakilan DIY menerbitkan 4 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima oleh Pemda DIY, yaitu 2 LHP pada Semester I dan 2 LHP pada Semester II. Adapun 2 LHP pada Semester I, yaitu:

(1) LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemda DIY No. 01/LHP/XVIII.YOG/01/2020;
(2) LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2019 No.21A-C/LHP/XVIII.YOG/04/2020;

Pemda DIY telah menindaklanjuti serta telah melakukan penyetoran ke kas umum daerah sejumlah nilai rekomendasi tersebut. Secara keseluruhan, hasil sementara pemantauan tindak lanjut Pemeriksaan BPK sampai dengan Juni 2020 sebagaimana Surat BPK RI Perwakilan Nomor 165/S/XVIII.YOG/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 Hal Penyampaian Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Usulan Semester I tahun 2020, sebagai berikut:

(1) 832 rekomendasi telah sesuai (selesai) ditindaklanjuti atau sebesar 80,78%;
(2) 194 rekomendasi atau 18,82% belum sesuai (dalam proses);
(3) 3 rekomendasi atau (0,29%) belum ditindaklanjuti;
(4) Nilai rekomendasi keuangan yang masih memerlukan tindak lanjut sampai dengan Juni 2019 adalah sebesar Rp8.434.141.976,20

Selanjutnya 2 LHP BPK RI Perwakilan DIY pada semester II yaitu:

(1) LHP Kinerja Atas Efektivitas Penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Semseter I Tahun 2020 pada Pemerintah

Daerah DIY dan Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta Nomor 30/LHP/XVIII.YOG/09/2020;

(2) LHP Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*-2019 (COVID -19) Tahun 2020 pada Pemda DIY oleh BPK RI Perwakilan DIY Nomor 35/LHP/XVIII.YOG/12/2020.

Risalah penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK semester II belum diterima sehingga yang menjadi dasar perhitungan capaian kinerja untuk hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY adalah risalah penyelesaian semester sebesar 80,78%.

Kendala penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY dapat disampaikan sebagai berikut:

(1) Data yang diserahkan dalam pembahasan maupun yang diunggah melalui eauditee.bpk.go.id berbeda dengan data yang tercatat dalam risalah pembahasan;

(2) ~~R~~ekomendasi berupa kebijakan/peraturan membutuhkan waktu dalam penyusunannya sehingga tidak dapat segera ditindaklanjuti;

(3) Rekomendasi berupa tagihan kerugian ke mantan anggota dewan, dalam proses penagihan mengalami kesulitan karena kondisi ekonomi antan anggota dewaN/Ahli waris yang kurang memadai;

(4) Proses penentuan status tindak lanjut yang diserahkan kepada BPK RI Perwakilan membutuhkan waktu karena penentuan status tersebut merupakan kewenangan pusat, yang berakibat pada hasil risalah pembahasan terbit tidak dalam waktu dekat.

b) Pemeriksaan *Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri*

Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri RI yang tertuang dalam LHP Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di DIY Tahun Anggaran 2019 Nomor 700/171-LHP/IJ Tanggal 31 Oktober 2019 memuat 15 temuan. Temuan tersebut terbagi dalam 6 urusan dan 19 rekomendasi. Berdasarkan risalah pembahasan, seluruh tindak lanjut telah sesuai rekomendasi, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.153. Risalah Pembahasan Itjen Kementerian Dalam Negeri RI

No	Obrik	Temuan	Rekomendasi	Status						Kerugian			
				S	%	D	%	B	%	Tptd	Nilai	Setoran	Sisa
1	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	1	3	3	100	0	0	0	0	0	-	-	-
2	Pajak dan Retribusi Daerah	1	1	1	100	0	0	0	0	0	-	-	-
3	Pengadaan Barang dan Jasa	3	5	5	100	0	0	0	0	0	-	-	-
4	Perizinan dan Non Perizinan	7	7	7	100	0	0	0	0	0	-	-	-
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas	2	2	2	100	0	0	0	0	0	-	-	-
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	1	100	0	0	0	0	0	-	-	-
TOTAL		**15**	**19**	**19**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**

Sumber: Inspektorat DIY, 2021

Secara umum, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri RI tidak mengalami kendala. Namun, hal penting yang perlu diperhatikan bahwa tindak lanjut yang bersifat kebijakan perlu pendampingan dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Itjen Kementerian Dalam Negeri RI juga melaksanakan pemantauan pelaksanaan penanganan Covid-19 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Nomor 700/231-LHP/IJ Tanggal 27 Oktober 2020.

c) Pemeriksaan Inspektorat DIY

Selaku APIP Internal Pemda DIY selama tahun 2020, Inspektorat DIY telah melaksanakan pemeriksaan operasional regular sebanyak 192 obyek pemeriksaan APBD/DANAIS pada level provinsi/kabupaten/kota di DIY. Rincian dan penyelesaian tindak lanjut disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.154. Rekap Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY TA 2020

Uraian	Jumlah	% tindak lanjut	Nilai (Rp)
Jumlah LHP Terbit	192 LHP		
Jumlah Temuan	695 temuan		2.931.843.026,00
Jumlah Rekomendasi	1858 rekomendasi		2.931.843.026,00
tindak lanjut sesuai rekomendasi	1832 rekomendasi	98,6%	2.777.688.834,00
Tindak lanjut dalam proses penyelesaian	4 rekomendasi	0,2%	-
Belum ada tindak lanjut	20 rekomendasi	1,1%	154,154,192,00

Sumber: Inspektorat, 2021

Selain pemeriksaan operasional regular, pada tahun 2020 Inspektorat DIY juga telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya antara lain:

a) 100 pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi reviu dokumen perencanaan, reviu Dana Alokasi Khusus (DAK), reviu LPPD, pendampingan Covid-19 dan lainnya,
b) Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 pada 37 OPD di lingkungan Pemda DIY;
c) Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan OPD Tahun 2019 pada 37 SKPD di lingkungan Pemda DIY;
d) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
e) Kas Opname dan Stok Opname pada akhir Tahun Anggaran secara serentak pada OPD/UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang; dan
f) Pengawasan lainnya yang merupakan mandatory peraturan yang berlaku.

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Alokasi anggaran untuk Penunjang Urusan Pengawasan pada tahun 2020 sebesar Rp8.370.160.000,00 untuk pelaksanaan lima Program dan 19 Kegiatan. Secara keseluruhan secara fisik terealisasi 100%, sedangkan dari sisi keuangan terealisasi sebesar Rp7.869.374.488,00 (94,02%). Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	INSPEKTORAT	1. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Intern	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan yang memerlukan koordinasi fisik menjadi terhambat diantaranta perjalanan dinas serta pengiriman diklat pegawai setelah pandemi sudah tidak dilaksanakan	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan dan koordinasi secara internal dan eksternal	
				Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran						
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	Buah	3	3			
				Retribusi sampah kantor	Bulan	12	12			
				Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor	Jenis	6	6			
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	6	6			
				Langganan surat kabar/majalah	Bulan	12	12			
				Barang cetakan	Jenis	12	12			
				Pembelian Meterai	Lembar	320	320			
				Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listirk 500 Kwh, rekening air 10 m3	Bulan	12	12			
				Tertatanya Arsip Aktif/In Aktif	Bulan	12	12			
				Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4	Unit	13	13			
				Langganan aplikasi internet video conference	Bulan	9	9			
				Alat tulis kantor	Jenis	21	21			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penggandaan dokumen dokumen	Lembar	71360	71420			
				Paket pengiriman	Bulan	12	12			
				Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2	Unit	4	4			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						
				Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	1	1			
				Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	1	1			
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	9	9			
				Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	orang	10	10			
				Kinerja perencana program	Orang	1	1			
				Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Orang	7	7			
				Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	Bulan	12	12			
				Koordinasi dan pelaksanaan pemeriksaan OPD luar daerah terlaksana dengan baik	Bulan	12	12			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor						
				Tersedianya data dukung pembangunan gedung tempat bekerja Tahap II 100%	%	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Alat Studio sesuai RKBMD 2 jenis	unit/set	35	35			
				Meubelair sesuai RKBD 0 Jenis	buah/set	0	0			
				Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 1 jenis	unit/buah/m2	119	119			
				Peralatan Kantor sesuai RKBMD 2 jenis	Unit	7	7			
				Komputer sesuai RKBMD 3 jenis	Unit	67	67			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD	Unit	13	13			
				Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD	Unit	4	4			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	Jenis	7	7			
				Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	Jenis	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
				Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu						
				Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek	angkatan @ 70 orang	3	3			
				Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat	Orang	7	7			
				Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu						
				Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	periode @ 70 orang	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang menduku ng kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	Laporan	1	1			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 19 kegiatan	Laporan Keuangan SKP	1	1			
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Perencanaan	4	4			
				Forum Perencanaan OPD	Berita Acara	1	1			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang	Capaian kinerja pela	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				telah ditetapkan 5 program 19 kegiatan						
2	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	1. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Intern	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN**				1. Kondisi yang dinamis, fokus pemeriksaan yang berubah-ubah mengikuti perkembangan dan kebutuhan pengawasan; 2. Bertambahnya mandatori pengawasan dari pusat dan tugas utama Inspektorat DIY dibandingkan dengan jumlah pemeriksa dan waktu pengawasan berakibat penugasan bertumpuk;	Terhadap hambatan atas kinerja dan kondisi pandemi Covid-19 maka Inspektorat DIY: 1 Menguatkan kembali koordinasi dan pengawasan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi baik yang dikembangkan Pemda DIY maupun oleh stakeholder terkait; 2. secara intensif mengedepankan upaya pembinaan, pengawalan dan mendorong OPD untuk secara aktif melakukan *diagnostic assessment* dalam sistem manajemennya dengan membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik dengan mengedepankan analisis risiko manajemen (risk management) dan analisis faktor risiko merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat DIY kedepannya.	
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian, Sarana dan Prasarana	%	85	93.13			
				Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala						
				Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD	Laporan	37	37			
				Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY sebelum tanggal persetujuan RAPBD Tahun 2021	Laporan	37	37			
				Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan	37	37			
				Laporan telaah sejawat kabupaten/kota	Laporan	1	1			
				Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan	Laporan	2	2			
				Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	LHP	190	208			
				Laporan Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY	LHE	37	37			
				Laporan Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi	Laporan	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Laporan Review Laporan Keuangan Pemda DIY	Laporan	1	1			
				Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H						
				Laporan Survey Penilaian Integritas	Laporan	0	0			
				Laporan Pelaksanaan Sosialisasi PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2019	Laporan	1	1			
				Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	1			
				Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu	Laporan	4	4			
				Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2021	SK	1	1			
				Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	Laporan	1	1			
				laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	Laporan	4	4			
				Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
				Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan	Laporan	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Pemerintahan Daerah (EKPPD) kabupaten/kota						
				Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan						
				rekapitulasi hasil tindaklanjut pengawasan	Laporan	3	3			
				Rekapitulasi hasil pengawasan	Laporan	1	1			
				Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan						
				Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Laporan	2	2			
				Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah						
				Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	LHP	100	100			

g. Penelitian dan Pengembangan

1) Kondisi Umum

Perdais DIY No.1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD). Selain itu, BPPSD dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan juga berpedoman pada Permendagri No.17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pergub DIY No. 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPPSD mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan statistik sektoral untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dan persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, tingkat capaian kinerja pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.155. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Program	Satu-an	Capai-an 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah	%	65	70	72,02	102,89	100	72,02

Sumber: BPPSD DIY, 2021

Kinerja program Penelitian dan Pembangunan Daerah dihitung melalui indikator persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah. Perhitungan ini berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan terpilih yang dijadikan sebagai bahan rumusan perencanaan dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY dikalikan 100%. Pada tahun 2020 terdapat 121 rekomendasi terpilih dari keseluruhan sejumlah 168 rekomendasi yang relevan dengan isu

strategis dan permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD DIY 2017-2022.

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan sudah semakin selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pada tahun 2020 Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pembangunan Daerah yang terdiri dari dua Kegiatan, yaitu Penelitian Pembangunan Daerah serta Penyelenggaraan Kegiatan Kelitbangan Pendukung dengan alokasi anggaran program sebesar Rp107.040.800,00. Secara keseluruhan realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 85,07%. Secara rinci, program/kegiatan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH	Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				Jumlah rekomendasi dari hasil penelitian yang relevan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan di DIY pada tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, belum semua hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum terjadi keselarasan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.	rencana kegiatan kelitbangan perlu mengacu pada dokumen Rencana Induk Kelitbangan yang disusun sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah	-
				Persentase Hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah	Persen	70	72,02			
				Penelitian Pembangunan Daerah						
				Dukungan terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 70%	%	60	60			
				Dokumen Hasil Penelitian	dokumen	2	2			
				Penyelenggaraan Kegiatan Kelitbangan Pendukung						
				Dokumen Laporan Monev Hasil Litbang	dokumen	1	1			
				Dukungan terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 70%	%	40	40			
				Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2020	dokumen	1	1			
				Inventarisasi Hasil Penelitian Tahun 2020	dokumen	1	1			

h. Sekretaris Dewan

1) Kondisi Umum

Sekretariat DPRD DIY dibentuk berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedudukan Sekretariat DPRD DIY adalah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dengan tugas membantu dan mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan DPRD dan anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut dijabarkan dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur DIY Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ketugasan di atas, Sekretariat DPRD memiliki sejumlah fungsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Pergub DIY Nomor 54 Tahun 2018, antara lain: penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan; penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD; fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan; fasilitasi alat kelengkapan DPRD; fasilitasi penetapan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur; penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD; serta fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD.

Terdapat 55 anggota DPRD DIY yang terhimpun dalam 7 (tujuh) fraksi dan 7 (tujuh) alat kelengkapan Dewan, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara administrasi dilayani oleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Untuk keperluan pelayanan kepada DPRD DIY, Sekretariat DPRD mengampu tujuh Program dan 23 Kegiatan sesuai RPJMD dan Rencana Strategis, dengan target dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.156. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satu-an	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (Bobot 50%)	%	90,72	85	85,92	101,08	90	95,46
2	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	105,65	96	130.76	136,21	96,50	135,50

Sumber: Sekretariat DPRD DIY, 2021

Penjelasan capaian pada masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

a) Indikator kinerja pada sasaran pertama terdiri dari Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD, dan Skor Indeks Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang masing-masing memiliki bobot 50%. Kinerja sasaran pertama ini terealisasi 85,92% dari target 85% atau sebesar 101,08%. Dengan demikian, target kinerja tahun 2020 terlampaui. Namun demikian, capaian realisasi tahun 2020 tersebut lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2019, sebesar 90,72%. Hal ini disebabkan karena fasilitasi tugas dinas pada pimpinan dan anggota DPRD menyesuaikan penerapan protokol kesehatan, sehingga Sekretariat DPRD DIY hanya melakukan pendampingan administratif saat pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah, reses, *public hearing*, dan sambung rasa. Sebelum pandemi Covid-19, Sekretariat DPRD DIY juga turut membantu pelaksanaan acara tersebut di lapangan, selain mendampingi dari sisi administratif. Hal ini tentu berpengaruh pada penilaian pelayanan Sekretariat DPRD DIY kepada DPRD DIY.

b) Indikator sasaran kedua berupa Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu. Kinerja sasaran kedua pada tahun 2020 terealisasi 130,76% dari target 96%, atau sebesar 136,21%. Terhadap capaian target akhir RPJMD, capaian tahun 2020 sebesar 130,76% sudah melampaui target tahun 2022 sebesar 96,50%. Ritme capaian

kinerja sasaran kedua ini perlu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Capaian kinerja sasaran kedua pada tahun 2020 didukung oleh:

(1) Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, kegiatan Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY, kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Alat Kelengkapan Dewan, dan Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD DIY.

(2) Program Pengembangan Regulasi Daerah yang terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY, Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, dan Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD DIY.

2) Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Dalam mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretaris Dewan, alokasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp67.441.096.111,00 yang terbagi dalam tujuh Program dan 23 Kegiatan. Secara keseluruhan, realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai Rp50.446.694.198,00 (74,80%), dengan capaian fisik sebesar 99,70%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

No	Urusan Pemerinta-han	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
1	URUSAN UMUM	SEKRETARIAT DPRD	1. Melaksanakan validasi inventarisasi asset, SDM dan Sarana Prasarana melalui Master Plan.	**PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN**				Pandemi Covid-19 menyebabkan ritme pemerintahan melambat dan *refocussing* anggaran untuk keperluan penangan Covid-19	Dilakukan perencanaan ulang (penyesuaian target program, indikator dan target kegiatan) serta perubahan Renstra Sekretariat DPRD DIY dengan berpedoman pada RPJMD).	
			2. Melaksanakan Standar kuntansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan ASB (SBK-SBU) dan SHBJ dengan mengembangkan kajian perencanaan, Monitoring dan evaluasi.	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	97.84			
			3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan DPRD dan *Stakeholder*.	**Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran**						
			4. Semua Fasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD harus berdasarkan SOP atau Juklak dan Juknis.	Jumlah Surat Masuk	surat	3000	1900			
			5. Melaksanakan Fasilitasi Produk Hukum, Pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli/narasumber/kelompok pakar.	Penggandaan	materi/ bahan	5	5			
			6. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.	Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone	bulan	12	12			
			7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur data base	Barang cetakan	jenis buku	21	21			

No	Urusan Pemerinta-han	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT.							
			8. Pengembangan Fungsi kepustakaan, dengan memaksimalkan asset yang ada.	Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	orang	25	25			
			9. Menyelenggarakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai.	Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional	unit	33	33			
				Retribusi sampah perkotaan	bulan	12	12			
				Alat dan kelengkapan penanggulangan Covid-19	Jenis	7	7			
				Dukungan 43.56 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelayanan dewan dan kegiatan dewan	%	43.56	43.56			
				Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor	jenis	7	7			
				Alat Tulis Kantor	jenis	29	29			
				Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan 300m3	bulan	12	12			
				Jumlah Surat Keluar	surat	4000	13903			
				Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 375 Kwh	bulan	12	12			
				Tertatanya arsip aktif dan dinamis	berkas	10000	10569			
				Kebersihan gedung kantor 333.470 m2	bulan	12	12			
				Pengiriman dokumen	paket	12	12			
				General Check Up pimpinan dan anggota DPRD	orang	55	43			
				Pembayaran rek telephone 6 sat sambungan	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						

No	Urusan Pemerinta-han	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	9	9			
				Kinerja perencana program dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	2	2			
				Dukungan 7.24 % terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran OPD	%	7.24	7.24			
				Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	2	2			
				Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Orang	2	2			
				Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Orang	8	8			
				Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor (pramuladi) dalam 1 tahun sesuai dengan SPK.	orang	3	3			
				Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi						
				Dukungan 49.20 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas OPD	%	49.2	49.2			
				Makan minum tamu sekretariat DPRD DIY tersedia sesuai kebutuhan	Tahun	1	1			
				Konsultasi dan koordinasi sekretariat DPRD DIY luar Jawa terlaksana dengan baik	Tahun	1	1			
				Konsultasi dan koordinasi sekretariat DPRD DIY dalam Jawa terlaksana dengan baik	Tahun	1	1			
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1			

No	Urusan Pemerinta-han	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Konsultasi/koordinasi dan Kunjungan Kerja DPRD dapat terfasilitasi dengan baik.	tahun	1	1			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	%	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Jumlah Perlengkapan yan dibeli	jenis	8	8			
				Jumlah Peralatan kantor yang dibeli	jenis	10	10			
				Dukungan 61,96 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	%	61.96	61.96			
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor						
				Jumlah luasan Gedung kantor yang dipelihara	m^2	6750	6750			
				Dukungan 6,41 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	%	6.41	6.41			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
				Dukungan 22,35 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	22.35	22.35			
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMD	Unit	21	21			
				Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMD.	unit	12	12			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan						
				Dukungan 9,28 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	9.28	9.28			
				Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	2	2			
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara.	jenis	5	5			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						

No	Urusan Pemerinta-han	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Persentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100			
				Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur						
				Pelatihan Pengembangan SDM	Orang	75	75			
				Dukungan 100 % terhadap capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	%	100	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN						
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja SKPD						
				Dukungan 11,03 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	11.03	11.03			
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU).	% Nilai LkjIP	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD						
				Dukungan 26 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	26	26			
				Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi.	dokumen	14	14			

No	Urusan Pemerinta-han	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi						
				ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	Doku -men	10	10			
				Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	Doku -men	1	1			
				Dukungan 48,53 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	%	48.53	48.53			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD						
				Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	%	100	100			
				Dukungan 14,44 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	%	14.44	14.44			
2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	1. Melaksanakan validasi inventarisasi asset, SDM dan Sarana Prasarana melalui Master Plan.	**PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**				Tahun 2020 DPRD DIY menyelesaikan pembahasan 32 bahan acara, lebih banyak dari rencana semula, sebanyak 24 bahan acara	Melakukan koordinasi intensif secara internal Sekretariat DPRD DIY, dan eksternal dengan OPD/instansi terkait, dalam rangka fasilitasi pelayanan pada DPRD DIY.).	
			2. Melaksanakan Standar kuntansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan ASB (SBK-SBU) dan SHBJ dengan mengembangkan kajian perencanaan, Monitoring dan evaluasi.	Persentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Program kerja DPRD DIY	%	95	133.33			
			3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan	**Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**						

No	Urusan Pemerinta-han	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
			dengan DPRD dan Stakeholder.							
			4. Semua Fasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD harus berdasarkan SOP atau Juklak dan Juknis.	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali	5	5			
			5. Melaksanakan Fasilitasi Produk Hukum, Pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar.	Dukungan 15 % terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY	%	15	15			
			6. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.	**Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY**						
			7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur data base dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT.	Jumlah produk hukum yang dibahas	BA Pansus/ AKD	13	13			
			8. Pengembangan Fungsi kepustakaan, dengan memaksimalkan asset yang ada.	Program Kerja DPRD	Keputus -an Dewan	2	2			
			9. Menyelenggarakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai.	Laporan hasil kerja Komisi	laporan kinerja Komisi	4	4			
				Laporan hasil kerja Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD	laporan rekomen -dasi	3	3			

No	Urusan Pemerinta-han	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Laporan hasil kerja DPRD	laporan kinerja DPRD	1	1			
				Jumlah Laporan Rekomendasi hasil kunker ke Luar Negeri	Laporan Rekomen -dasi	0	0			
				Hasil Seleksi Anggota baru KPID periode 2020-2023	Rekomen -dasi DPRD DIY	1	1			
				Dukungan 40 % terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD.	%	40	40			
				Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY						
				Pandangan Umum Fraksi	PU Fraksi	91	91			
				Pendapat Akhir Fraksi	PA Fraksi	91	84			
				Dukungan 15 % terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	%	15	15			
				Rekomendasi Fraksi	Rekomen -dasi	9	9			
				Penyelenggaraan Kinerja Anggaran						
				Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan 2020	BA	1	1			
				Nota kesepakatan bersama KUA - PPAS 2021	BA	1	1			
				Persetujuan bersama Raperda APBD 2021	BA	1	1			
				Keputusan DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD	BA	1	1			

No	Urusan Pemerinta-han	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali-sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019	BA	1	1			
				Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS 2020	BA	1	1			
				Dukungan 30 % terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD.	%	30	30			
				PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH						
				Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang diselesaikan Tepat Waktu	%	97	128.2			
				Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY						
				Draft Raperwan, Draft Rakepwan, Draft Rakeppim, Draft Rakep BK	Draft	156	200			
				Dukungan 60 % terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	60	60			
				4 NA dan 4 Draft Raperda Inisiatif dan Rekomendasi Kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda.	draft	16	16			
				Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD						
				Rekomendasi bahan pengawasan produk hukum yang sedang berjalan	Rekomen-dasi	2	2			
				Dukungan 20 % terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	20	20			
				Kajian Kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di Alat kelengkapan dewan.	Kajian AKD	2	2			

No	Urusan Pemerinta-han	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Penyebarluasan Produk Hukum Daerah						
				Pengundangan/pengadministrasian produk hukum	produk hukum	156	156			
				Jumlah perda yang disosialisasikan	Perda	9	9			
				Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	Peraturan perundang-undangan	0	0			
				Dukungan 20 % terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu.	%	20	20			
				PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN						
				Meningkatnya Layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan layanan keprotokolan	%	85	85.92			
				Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD						
				Kemitraan Wartawan	Kegiatan	4	4			
				Publikasi kinerja DPRD pada 10 jenis media	Share konten	3000	3032			
				Dukungan 30 % terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran.	%	30	30			
				Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat						
				Laporan kaukus parlemen	Forum kaukus	4	4			
				Laporan Audiensi	Audiensi	24	62			
				Laporan Unjukrasa	Laporan rekomen-dasi	12	12			
				Laporan Reses	Laporan	3	3			
				Laporan Sarasehan/ Gathering	Laporan	4	2			
				Laporan *Hearing*	Laporan	2	2			
				Dukungan 30 % terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi	%	30	30			

No	Urusan Pemerinta-han	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar-get	Reali -sasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPRD
				Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran.						
				Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD						
				Fasilitasi tugas dinas Pimpinan Dewan	Laporan hasil tugas	15	15			
				Fasilitasi 4 Rapur DPRD	Rapur	4	4			
				Layanan tamu DPRD terhadap 2400 orang yang terlayani dengan baik	Kepuasan (%)	70	85,92			
				Dukungan 30 % terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	%	30	30			
				Penyediaan pakaian Berciri Khas Daerah dan Pakaian Dinas beserta atributnya bagi 55 pimpinaN/Anggota dewan.	pakaian dinas dan atribut	305	305			
				Pengelolaan Data dan TI						
				Tersedianya layanan PPID berupa data yang dibutuhkan masyarakat	jenis data	3	3			
				Dukungan 10 % capaian Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokoleran.	%	10	10			

E. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Dalam rangka menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan tahun 2020, berikut beberapa kebijakan strategis yang diambil Pemda DIY.

Tabel 3.157. Daftar Kebijakan Strategis Pemda DIY Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pedoman Pemerintahan Kalurahan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan	Peningkatan kinerja Pemerintahan Kalurahan
2	Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Di DIY	Peraturan Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Di DIY	Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pada urusan statistik yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
3	PengaturanPenerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021	Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021 dapat dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku
4	Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sebagai pedoman pemberian insentif bagi guru tetap yayasan, pegawai tetap yayasan, dan guru pendamping khusus yang ada di SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta di DIY
5	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah	Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah	Sebagai pedoman pemberian Tambahan Penghasilan PNS pada Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
6	Hubungan Kerja Pelaksanaan Kewenangan Urusan Keistimewaan dan Penugasan Urusan Keistimewaan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Hubungan Kerja Pelaksanaan Kewenangan Urusan Keistimewaan dan Penugasan Urusan Keistimewaan	Sinkronisasi Pelaksanaan Kewenangan Urusan Keistimewaan dan Penugasan Urusan Keistimewaan
7	Pemberian Libur Guru	Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Libur Guru	Mengatur tata cara pengajuan libur guru dan persyaratan yang ditentukan
8	Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020	Meminimalisir terjadinya konflik social di DIY
9	Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020	Memberikan keringanan bagi wajib pajak selama pandemi Covid-19
10	Mekanisme Kerja Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Kerja Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah Istimewa Yogyakarta	Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
11	Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020	Peraturan Gubernur DIY Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020	*Refocussing* Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19
12	Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021	Mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus di DIY
13	Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020	Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020	*Refocussing* Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
14	Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan Di Kalurahan/Kelurahan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan Di Kalurahan/Kelurahan	Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan Di Kalurahan/ Kelurahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
15	Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir	Optimalisasi Pengelolaan Dana Bergulir
16	Penyediaan Layanan Angkutan Umum	Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan	Peningkatan Penyediaan Layanan Angkutan Umum di 25 Kecamatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta
17	Penyusunan dan implmentasi Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelindungan Anak Tahun 2020 – 2022	Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi DaerahPenyelenggaraan Pelindungan Anak Tahun 2020 – 2022	Tersedianya acuan bagi Perangkat Daerah dan *Stakeholder* dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui RAD yang secara lebih spesifik bertujuan untuk: a. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak; b. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam penyelenggaran pelindungan anak; dan c. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pelindungan anak secara terpadu untuk diimplementasikan secara rinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
18	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 – 2022	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 - 2022	Responsifitas penanggulangan bencan semakin meningkat
19	Pedoman Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata	Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata	Sebagai pedoman bahwa dalam rangka penerapan pariwisata berbasis masyarakat, maka perlu adanya pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata dan desa/kampung wisata yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum
20	Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021	Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021	Mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus di DIY dengan perubahan terkait penggunaan nilai Ujian Sekolah/Madrasah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiah
21	Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020	Memberikan keringanan bagi wajib pajak selama pandemi Covid-19
22	Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemda DIY	Peraturan Gubernur DIY Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemda DIY	Sebagai tindak lanjut penanganan Covid-19 dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tata kerja ASN Pemda DIY
23	Pedoman Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah	Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan
24	Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang	Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020	Penyesuaian anggaran atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020		Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.7/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
25	Pedoman Pemberian Beasiswa	Peraturan Gubernur DIY Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa	Menetapkan pedoman pemberian beasiswa dengan penghapusan Pasal 7 pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2019
26	Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Lingkungan Pemda DIY Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Lingkungan Pemda DIY Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	Penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 bidang perekonomian
27	Perubahan keempat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020	Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020	Penyesuaian Anggaran atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.7/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Tambahan Tahun Anggaran 2020
28	Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemda DIY

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
29	Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa	Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2020 tentangImplementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa	Sebagai pedoman penerapan pendidikan antikorupsi untuk menjadi bagian dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA, SMK, dan SLB
30	Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014 agar senantiasa selaras dengan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dan dinamika di lapangan pasca RUPM tersebut ditetapkan	Peraturan Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal	1) Studi ini melakukan telaah analisis dan evaluasi atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 kaitannya dengan peraturan-peraturan serta kebijakan yang baru dan tertuang dalam RPJMD tahun 2017- 2022 (Tahap I dan Tahap II). *2)* *Updating*, reviu, dan telaah substansi dilakukan dalam rangka penyelarasan RUPM dengan peraturan-peraturan yang ada dan dinamika kebijakan yang muncul setelah ditetapkannya RUPM di tahun 2014.
31	Rencana Kontijensi Tingkat Provinsi Untuk Ancaman Erupsi Gunung Merapi	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Rencana Kontijensi Tingkat Provinsi Untuk Ancaman Erupsi Gunung Merapi	Kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman erupsi Gunung Merapi
32	Rencana Aksi Daerah Untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2020 - 2022	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2020 - 2022	Meminimalisir risiko bencana di DIY
33	Perubahan kelima Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020	Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020	Penyesuaian anggaran atas Perubahan pertama Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
34	Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat	Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal	(1) Menjaga kestabilan produksi dan pasokan komoditas pangan (2) Meningkatkan produktifitas dan kestabilan harga komoditas pangan (3) Memudahkan pengawasan distribusi pangan dari produsen sampai ke konsumen (4) Adanya ketersediaan Sistem Informasi Tata Niaga Pangan yang akurat berkaitan dengan produktifitas, pola distribusi, jumlah pasokan dan harga di DIY sebagai instrumen sIstem peringatan dini dalam pengendalian inflasi.
35	Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri	Peraturan Gubernur DIY Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri	Sebagai pedoman penatausahaan BOS pada satdikmen negeri dan satdiksus negeri
36	Pengamanan dan penegakkan hukum Covid-19	Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	Untuk mendorong masyarakat agar selalu menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 melalui 4 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan) untuk mewujudkan perilaku hidup sehat
37	Pengaturan Pengelolaan Parkir	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Parkir	Pedoman pelaksanaan pengelolaan parkir
38	Perubahan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi	Memberikan keringanan bagi wajib pajak selama masa pandemi Covid-19

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	2020 yang sebelumnya di atur dengan Pergub 26 Tahun 2020	Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020	
39	Penetapan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta	Adanya landasan operasioanal bagi Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta
40	Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039	Adanya pedoman Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039
41	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peraturan Gubernur sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
42	Reviu terhadap Peraturan Gubernur tentang pedoman rekrutmen Petugas Haji Daerah (PHD)	Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah	Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan rekruitmen PHD yang lebih kompeten dalam melaksanakan pelayanan kepada jamaah haji
43	Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Sistem Informasi Melalui Elektronik	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Sistem Informasi Melalui Elektronik Pengawasan Daerah	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan pembangunan
44	Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Sistem Informasi Melalui Elektronik Pengawasan Daerah	Peraturan Gubernur DIY Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Sistem Informasi Melalui Elektronik Pengawasan Daerah	Sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat DIY dan sekaligus untuk mengantisipasi kondisi pandemi yang terjadi maka pengawasan perlu dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan data pada sistem informasi yang tersedia melalui elektronik pengawasan daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
45	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Penyesuaian anggaran atas perubahan kebijakan daerah
46	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Peraturan Gubernur DIY Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Penyesuaian Anggaran atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.7/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Tambahan Tahun Anggaran 2020
47	Penerapan RAD pencegahan stunting di DIY	Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024	Sebagai pedoman dalam rangka koordinasi terpadu penanganan prevalensi stunting di DIY
48	Pedoman pelaksanaan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya di DIY	Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya	Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/ kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. Pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya b. Pengelolaan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya c. Monitoring dan evaluasi Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya
	Penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Road Map Nasional 2020 – 2024	Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 – 2024	• Sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemda DIY secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur-unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi • *Road Map* memuat rencana unggulan seperti penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, penguatan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			pola kerja lintas sektor, transformasi digital dalam penyelenggaraan proses bisnis, pengembangan *Corporate University*, dan penguatan layanan *help desk*.
49	Perubahan pedoman tentang Jaga Warga	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Jaga Warga	Sebagai pedoman Jaga Warga
50	Otoritas Veteriner DIY	Peraturan Gubernur DIY Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Otoritas Veteriner Daerah Istimewa	Sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Otoritas Veteriner Daerah Istimewa Yogyakarta. Otoritas Veteriner DIY adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan
51	Penentuan Tarif Sewa Rumah Susun Sewa Gemawang	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sewa Gemawang	Sebagai Pedoman Pemungutan Tarif Sewa Rumah Susun Sewa Gemawang
52	Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kelurahan	Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan	Sebagai pedoman bagi kelurahan untuk pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan mulai dari peruntukan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, hingga pedoman perubahan penggunaan dana dan sisa dana
53	Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi	Memberikan keringanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid-19

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kendaraan Bermotor Tahun 2020	Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020	
54	Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan reproduksi sebagai upaya meningkatkan usia rata rata menikah pertama perempuan	Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatkan usia rata rata menikah pertama perempuan
55	Pembentukan Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat	Optimalisasi Koordinasi Program/ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
56	Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
57	Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Transjogja dengan Sistem *Buy The Service* Kepada PT. Anindya Mitra Internasional	Peraturan Gubernur DIY Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Transjogja dengan Sistem *Buy The Service* Kepada PT. Anindya Mitra Internasional	1. Memberikan Penugasan Kepada PT. AMI dalam menyelenggarakan Angkutan Perkotaan Bersubsidi dengan Sistem *Buy The Service* 2. Memberikan Pelayanan Sistem Angkutan umum perkotaan bersubsidi Trans Jogja bagi masyarakat sesuai dengan SPM 3. Mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, mudah, nyaman, terjangkau dan berkualitas serta terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah: dan 4. Memberikan kepastian pedoman perhitungan subsidi angkutan umum

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			dalam rangka mewujudkan transparansi dan akutanbilitas
58	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di DIY	Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
59	Perubahan kedua Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2020 Perubahan kedua Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Penyesuaian Anggaran atas penerimaan Tunjangan Profesi Guru
60	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagi Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
61	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020	Pedoman Bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021
62	Perubahan ketiga Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Peraturan Gubernur DIY Nomor 115 Tahun 2020 Perubahan ketiga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Penyesuaian Anggaran atas terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/km.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun Anggaran 2020
63	Pengelolaan Rumah Susun Sewa Gemawang	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Gemawang	Sebagai Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sewa Gemawang
64	Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

<table>
<tr><th>No</th><th>Kebijakan Strategis</th><th>Dasar Hukum</th><th>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</th></tr>
<tr><td>65</td><td>Subsidi Angkutan Perkotaaan Transjogja</td><td>Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Tata cara Pemberian Subsidi Angkutan Perkotaaan Transjogja</td><td>1. Memberikan Pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan subsidi Kepada PT. AMI untuk mengelola angkutan perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem BTS (Buy The Service)
2. Tertib administrasi dalam rangka mewujdukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan subsidi</td></tr>
<tr><td>66</td><td>Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan</td><td>Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</td><td>Sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan</td></tr>
<tr><td>67</td><td>Penetapan Tarif Layanan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta</td><td>Peraturan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta</td><td>Sebagai pedoman penetapan tarif dasar layanan yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta</td></tr>
<tr><td>68</td><td>Penentuan tarif air bersih pada Perusda Tirtatama</td><td>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Tarif Air Bersih Pada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta</td><td>Sebagai pedoman Tarif Air Bersih Pada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta</td></tr>
<tr><td>69</td><td>Penetapan status cagar budaya untuk penanda-penanda yang menjadi nominasi warisan dunia</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Cagar Budaya</th><th>No SK Gubernur</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bangunan Panggung Krapyak</td><td>20/KEP/ 2020</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Tugu Pal Putih Yogyakarta</td><td>21/KEP/ 2020</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ndalem Kepatihan</td><td>17/KEP/ 2020</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Bale Mangu di Kompleks Kepatihan</td><td>19/KEP/ 2020</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Masjid Sulthoni di Kompleks Kepatihan</td><td>18/KEP/ 2020</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pasar Beringharjo</td><td>53/KEP/ 2020</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Lokasi Kompleks Kepatihan</td><td>57/KEP/ 2020</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Mimbar dan Maksurah Masjid Gedhe Kraton Yogyakarta</td><td>56/KEP/ 2020</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Lokasi Masjid Gedhe Kraton Yogyakarta</td><td>181/KEP/ 2020</td></tr>
</table>
</td><td>Sebagai landasan hukum dan pedoman (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penganggaran) untuk pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) dan pengelolaannya, dalam rangka menguatkan nominasi Yogyakarta sebagai warisan dunia</td></tr>
</table>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum			Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		10	Bangunan Masjid Gedhe Kraton Yogyakarta	183/KEP/ 2020	
		11	Lokasi Tamansari	102/KEP/ 2020	
		12	Pasiraman Umbul Binangun	100/KEP/ 2020	
		13	Pulo Kenanga	101/KEP/ 2020	
		14	Alun-alun Lor dan Alun-alun Kidul Kraton Yogyakarta	219/KEP/ 2020	
		15	Pagelaran Kraton Yogyakarta	182/KEP/ 2020	
		16	Kamandhungan Lor Kraton Yogyakarta	191/KEP/ 2020	
		17	Bangsal Pancaniti Kraton Yogyakarta	187/KEP/ 2020	
		18	Bangsal Trajumas Kraton Yogyakarta	188/KEP/ 2020	
		19	Bangsal Sri Manganti Kraton Yogyakarta	189/KEP/ 2020	
		20	Regol Brajanala Kraton Yogyakarta	190/KEP/ 2020	
		21	Gedhong Prabayeksa dan Bangsal Kencana Kraton Yogyakarta	218/KEP/ 2020	
		22	Bangunan Siti Hinggil Kraton Yogyakarta	220/KEP/ 2020	
		23	Bangsal Kamagangan Kraton Yogyakarta	217/KEP/ 2020	
		24	Bangsal Kamandhungan Kidul Kraton Yogyakarta	249/KEP/ 2020	
		25	Museum Kereta Karaton Ngayogyakarta	282/KEP/ 2020	
		26	Lokasi Makam Raja di Imogiri	312/KEP/ 2020	
		27	Lokasi makam Girilaya	316/KEP/ 2020	
		28	Makam Banyusumurup	315/KEP/ 2020	
70	Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/INSTR/2020 tentang Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			Adanya kesepakatan bersama antara Dinas Sosial DIY dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi melakukan perbaikan data Bantuan Sosial dan data DTKS sehingga

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			menjadikan data yang tepat, akurat, dan bersifat satu data
71	Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di DIY	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 1/SE/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di DIY
72	Peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19)	Instruksi Gubernur DIY Nomor 2/instr/2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19)	
73	Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) DIY	Keputusan Gubernur DIY Nomor 64/KEP/2020	
74	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di DIY	Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020	
75	Peningkatan Kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dari Pendatang/ Pemudik ke DIY	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 2/SE/III/2020	
76	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) DIY	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 78/KEP/2020	
77	Perkembangan Eskalasi Penyebaran Covid-19 di DIY	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 5/SE/IV/2020	
78	Gerakan Wajib Pakai Masker dan Lampiran 59 titik Kegiatan Kampanye	Surat Edaran Wakil Gubernur DIY selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY Nomor 443/7538 Tanggal 12 Mei 2020	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
79	Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di DIY	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 121/KEP/2020 Tanggal 27 Mei 2020	
80	Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban dalam Masa Pandemi Covid-19.	Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 451/09439 Tanggal 24 Juni 2020	
81	Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di DIY	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 197/KEP/2020	
82	Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di DIY	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 227/KEP/2020 Tanggal 30 Juli 2020	
83	Penerapan Protokol Kesehatan pada unit kerja masing-masing	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 443/12245 Tanggal 11 Agustus 2020	
84	Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di DIY	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 254/KEP/2020	
85	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2020 Tanggal 4 September 2020	
86	Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di DIY	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 286/KEP/2020 Tanggal 29 September 2020	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
87	Penetapan Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di DIY	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 318/KEP/2020 Tanggal 27 Oktober 2020	
88	Penetapan Perpanjangan Ketujuh Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di DIY	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 358/KEP/2020 tanggal 25 November 2020	
89	Penetapan Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di DIY	Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 388/KEP/2020 Tanggal 22 Desember 2020	
90	Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul	Keputusan Gubernur Nomor 231/KEP/2020	Terwujudnya tertib administrasi pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Antarwaktu Kota Kabupaten Gunungkidul
91	Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sleman	Keputusan Gubernur Nomor 324/KEP/2020	Terwujudnya tertib administrasi pemberhentian anggota DPRD Antarwaktu Kabupaten Sleman
92	Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sleman	Keputusan Gubernur Nomor 343/KEP/2020	Terwujudnya tertib administrasi pengangkatan anggota DPRD Antarwaktu Kota Kabupaten Sleman
93	Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Yogyakarta	Keputusan Gubernur Nomor 381/KEP/2020	Terwujudnya tertib administrasi pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Antarwaktu Kota Yogyakarta
94	Penerima Bantuan Sosial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bagi Anggota Paguyuban Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta di Jakarta, Bogor, Depok,	Keputusan Gubernur DIY Nomor 285/KEP/2020	Sebagai pedoman dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada anggota paguyuban masyarakat DIY di Jakarta yang terdampak pandemi Covid-19

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Tangerang, dan Bekasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tahun 2020		
95	Penetapan Desa/Kelurahan Mandiri Budaya Tahun 2020	Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020	Penetapan daftar Desa/Kelurahan Mandiri Budaya sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
96	Penetapan Penerima Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020	Keputusan Gubernur DIY Nomor 49/KEP/2020	Memuat daftar penerima insentif yang terdiri dari guru tetap yayasan, pegawai tetap yayasan, dan guru pendamping khusus yang ada di SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta di DIY
97	Penetapan Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Menengah Swasta DIY Tahun 2019	Keputusan Gubernur DIY Nomor 50/KEP/2020	Memuat daftar penerima BOSDA jenjang pendidikan menengah swasta tahun 2019 yang mengalami penyesuaian jumlah penerimaan akibat adanya perubahan jumlah siswa
98	Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020	Keputusan Gubernur DIY Nomor 51/KEP/2020	Menetapkan daftar penerima dan besaran penerimaan DAK bagi SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta di DIY tahun 2020
99	Penetapan Pemberian Beasiswa Mahasiswa Umum Tahun 2020 Kepada Mahasiswa Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020	Keputusan Gubernur DIY Nomor 55/KEP/2020	Menetapkan daftar mahasiswa Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta yang menerima beasiswa pendidikan Tahun Akademik 2019/2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
100	Penetapan Penerima Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa DIY Tahun 2020	Keputusan Gubernur DIY Nomor 94/KEP/2020	Menetapkan para siswa SMA yang menjadi penerima beasiswa penelitian
101	Penetapan Penerima Beasiswa Inklusi Untuk Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi DIY Tahun 2020	Keputusan Gubernur DIY Nomor 141/KEP/2020	Menetapkan daftar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK se-DIY yang menjadi penerima beasiswa inklusif
102	Penetapan Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Luar Biasa Untuk Biaya Asrama Sekolah Luar Biasa Negeri DIY	Keputusan Gubernur DIY Nomor 209/KEP/2020	Menetapkan SLB penerima bantuan biaya asrama
103	Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta Sebagai Badan Layanan Umum Daerah	Keputusan Gubernur DIY Nomor 222/KEP/2020	Menetapkan SMKN 6 Yogyakarta sebagai BLUD, berlaku mulai tahun 2021
104	Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon Sebagai Badan Layanan Umum Daerah	Keputusan Gubernur DIY Nomor 259/KEP/2020	Menetapkan SMKN 1 Sewon sebagai BLUD, berlaku mulai tahun 2021
105	Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah	Keputusan Gubernur DIY Nomor 260/KEP/2020	Menetapkan SMKN 3 Wonosari sebagai BLUD, berlaku mulai tahun 2021
106	Pemberian Beasiswa Pendidikan Profesi Guru Tahun 2020	Keputusan Gubernur DIY Nomor 263/KEP/2020	Menetapkan para penerima beasiswa pendidikan profesi guru tahun 2020
107	Pemberian Beasiswa Mahasiswa Umum Tahun 2020 Berupa Bantuan Biaya Wisuda Kepada Mahasiswa Akademi Komunitas	Keputusan Gubernur DIY Nomor 264/KEP/2020	Menetapkan para mahasiswa Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta yang menjadi penerima bantuan biaya wisuda

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020		
108	Pemberian Beasiswa Mahasiswa Umum Tahun 2020 Berupa Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Uang Kuliah Tunggal Kepada Mahasiswa Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021	Keputusan Gubernur DIY Nomor 266/KEP/2020	Menetapkan daftar mahasiswa Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta yang menerima beasiswa pendidikan Tahun Akademik 2020/2021
109	Penetapan Penerima Beasiswa Kartu Cerdas Tahap II DIY Tahun 2020	Keputusan Gubernur DIY Nomor 314/KEP/2020	Menetapkan daftar siswa SMA dan SMK penerima beasiswa Kartu Cerdas
110	Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Bantul	Keputusan Gubernur Nomor 278/KEP/2020	Menghindari kekosongan pimpinan serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul selama Bupati dan wakil Bupati melaksanakan cuti kampanye Pilkada 2020
111	Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul	Keputusan Gubernur Nomor 120/KEP/2020	Terwujudnya tertib administrasi pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Antarwaktu Kota Kabupaten Gunungkidul
112	Pembentukan Tim Pertimbangan Klinis Jaminan kesehatan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020	Keputusan Gubernur DIY Nomor 22/TIM/2020	Sebagai pedoman dalam rangka menjamin kendali mutu dan kendali biaya serta memberikan kepastian penyelesaian permasalahan klinis yang terjadi dalam pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, dilakukan pertimbangan klinis *(clinical advisory)* agar pelayanan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			kesehatan yang diberikan kepada peserta berjalan efektif dan efisien sesuai kebutuhan
113	Penetapan Tim Verifikator pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19	Keputusan Gubernur DIY Nomor 72/TIM/2020	Sebagai pedoman dalam penetapan verifikasi pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di DIY
114	Penetapan Calon Penerima Insentif dan Santunan Kematian dari Pemerintah Pusat	Keputusan Gubernur DIY Nomor 104/KEP/2020	Sebagai pedoman dalam menetapkan daftar calon penerima Insentif dan Santunan Kematian dari Pemerintah Pusat bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19
115	Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit	Keputusan Gubernur DIY Nomor 275/KEP/2020	Merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah mengenai permasalahan Hubungan Industrial yang berkembang saat ini, menghasilkan pokok-pokok pikiran dan kesepakatan-kesepakatan yang merupakan hasil sidang Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai rekomendasi dan bahan untuk mengambil kebijakan, sehingga dapat terwujud hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
116	Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Masa Bakti 2020-2022	Keputusan Gubernur DIY Nomor 297/KEP/2020	Tujuan Dewan Pengupahan yaitu membuat rekomendasi rumusan kebijakan di bidang pengupahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dengan cara menyiapkan bahan kebijakan penetapan upah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			minimum yang akan diberlakukan bagi para pekerja/ buruh agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan
117	Pembentukan Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah	Keputusan Gubernur DIY Nomor 85/TIM/2020	Sebagai pedoman dalam pembentukan tim Satgas Ketahanan Pangan yang menjadi sarana untuk memastikan dan memantau ketersediaan, kelancaran distribusi, dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di DIY secara cepat, tepat, fokus, dan terpadu dengan periode harian
118	Tata tanam tahunan daerah irigasi serta pembagian dan pemberian hak guna pakai air irigasi periode tahun 2020/2021	Keputusan Gubernur DIY Nomor 233/KEP/2020	Sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya air, lahan pertanian, dan tanaman dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara partisipatif serta memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan air irigasi di setiap daerah irigasi perlu di atur tata tanam tahunan daerah irigasi
119	Penugasan Perseroan Terbatas Taru Martani dalam penggudangan, pembelian, dan pemasaran komoditas bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY Nomor 373/ KEP/2020	Sebagai pedoman dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas pangan di tingkat petani maka diperlukan intevensi dari pemerintah dalam mengendalikan rantai distribusi pangan
120	Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner DIY	Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 /KEP/2020	Sebagai pedoman Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Daerah Istimewa

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Yogyakarta yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah DIY
121	Pengangkatan PHD dan pencabutan keputusan pengangkatan PHD	Keputusan Gubernur Nomor 60/TIM/2020 tentang Pengangkatan Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Keputusan Gubernur Nomor 77/TIM/2020 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/TIM/2020 tentang Pengangkatan Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020	Pengangkatan petugas pelayanan jamaah haji yang terdiri dari pelayanan umum, pelayanan kesehatan dan pelayanan bimbingan ibadah Pencabutan keputusan pengangkatan petugas pelayanan jamaah haji dikarenakan adanya pembatalan pengiriman jamaah haji.
122	Pengoptimalan zakat melalui BAZNAS DIY	Keputusan Gubernur Nomor 382/KEP/2020 tentang Pengangkatan Plt. Pimpinan BAZNAS DIY	Pengisian kekosongan Pimpinan BAZNAS DIY setelah berakhirnya Pimpinan BAZNAZ DIY periode 2015-2020
123	Pembentukan Tim Penilai dan Monitoring Evaluasi Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya	Keputusan Gubernur DIY Nomor 129/TIM/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya	a. Melakukan penilaian terhadap Desa/Kalurahan yang akan ditetapkan sebagai Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya; b. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya.
124	Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya	Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya	Menetapkan 10 (sepuluh) Desa/Kalurahan sebagai Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 dengan daftar sebagai berikut: 1. Bejiharjo, Kabupaten Gunungkidul, dengan peringkat Utama 2. Pagerharjo, Kabupaten Kulon Progo, dengan peringkat Utama

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			3. Putat,Kabupaten Gunungkidul,dengan peringkat Utama 4. Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, dengan peringkat Utama 5. Girikerto, Kabupaten Sleman, dengan peringkat Utama 6. Wedomartani, Kabupaten Sleman, dengan peringkat Utama 7. Sabdodadi, Kabupaten Bantul, dengan peringkat Utama 8. Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, dengan peringkat Madya 9. Margodadi, Kabupaten Sleman, dengan peringkat Madya 10. Bangunkerto, Kabupaten Sleman, dengan peringkat Madya
125	Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia	Keputusan Gubernur DIY Nomor 13/TIM/2020 Tanggal 30 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia	Pembentukan Tim Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia
126	Percepatan Akses Keuangan Daerah	Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2020 Tanggal 22 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Mendorong dan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Termasuk juga melakukan transaksi pembelian/pembayaran yang dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional
127	Tindak lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional	Keputusan Gubernur DIY Nomor 310/KEP/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 25/KEP/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 86/KEP/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 25/KEP/2018 tentang satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Membubarkan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah. Meskipun Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dibubarkan, namun ketugasan Satgas masih tetap ada

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			dikarenakan sudah melekat pada tugas dan fungsi instansi
128	Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan	• Keputusan Gubernur DIY Nomor 1/TIM/2020 tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan • Keputusan Gubernur DIY Nomor 12/TIM/2020 tentang Project Management Unit Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan	Banyaknya pemangku kepentingan dengan tujuan dan tanggung jawab yang berbeda pada satu program/ proyek, dibutuhkan pembentukan suatu *special delivery unit* yang dapat bekerja lintas organisasi sebagai unit koordinasi dan point of contact dalam upaya percepatan proyek dan pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah dalam proyek. Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY dibentuk dengan tujuan utama sebagai *special delivery unit* tersebut, khususnya untuk program-program prioritas yang telah ditetapkan Gubernur
129	Penerapan Kebijakan Pembelian Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DIY	Surat Edaran Gubernur DIY tentang Himbauan Pembelian Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DIY Nomor 519/7669 Tanggal 14 Mei 2020	Sehubungan dengan dampak pandemi Covid-19 yang berimbas pada lesunya perekonomian wilayah DIY, yang sebagian besar disokong oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk itu, diperlukan langkah masif dalam rangka mendorong meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh UMKM, secara layak, aman, dan berkualitas. Untuk itu, dihimbau melakukan pembelian produk-produk UMKM pada wilayah DIY, sebagai

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			upaya mendorong berjalannya perekonomian daerah dan membantu pemulihan sosial ekonomi atas dampak pandemi Covid-19, oleh semua komponen masyarakat secara berkelanjutan
130	Menumbuhkan sektor perdagangan, perekonomian, industri kreatif dengan Program Jogja Heboh	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 510/1113 Tanggal 22 Januari 2020 tentang GREAT SALE JOGJA HEBOH 2020	Menumbuhkan sektor perdagangan, perekonomian, industri kreatif, serta mengenalkan DIY sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia
131	Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran arus distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pasca menyebarnya *Virus Corona Disease* 19 (Covid-19)	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 500/6349 Tanggal 14 April 2020 tentang Menjaga Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Arus Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya Serta Penggunaan Produk UMKM DIY	a. Menjaga kestabilan harga dan memastikan terjaminnya ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan kebutuhan penting lainnya bagi masyarakat DIY b. Memastikan dan menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya ke DIY c. Pemanfaatan produk lokal DIY yang diproduksi oleh UMKM DIY
132	Memperkuat ekonomi masyarakat melalui Pemberian Insentif/Stimulus Berupa Pengurangan atau Penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Pelaku Usaha pasca menyebarnya *Virus Corona Disease* 19 (Covid-19)	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 443/7130 Tanggal 29 April 2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus Berupa Pengurangan atau Penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Pelaku Usaha	Mengurangi beban perusahaan/pelaku usaha dengan menerbitkan kebijakan pemberian stimulus/insentif baik berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewenangan Pemda, Kabupaten/Kota berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah serta pajak penerangan jalan. Pemberlakuan kebijakan pemberian

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			stimulus /insentif dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dampak Covid-19 yang terjadi
133	Percepatan Akses Keuangan Daerah melalui Program *One Student One Account* (OSOA)	Surat Edaran Sekretaris Daerah a.n Gubernur DIY Nomor 900/14090 Tanggal 15 September 2020 tentang Optimalisasi Program *One Student One Account* (OSOA)	Pelajar merupakan salah satu target dari strategi nasional keuangan inklusif. Hal ini diimpelentasikan dengan program *One Student One Account* (OSOA). Pelaksanaan program ini melalui kegiatan pembukaan rekening simpanan pelajar (Simpel) bagi pelajar sekolah menengah pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat
134	Pengembangan Usaha Garam Rakyat di DIY	Surat Edaran Sekretaris Daerah a.n Gubernur DIY Nomor 530/187681 Tanggal 26 November 2020 tentang *Roadmap* Pengembangan Usaha Garam Rakyat di DIY	Integrasi Program/kegiatan untuk percepatan usaha garam rakyat sebagai kebijakan strategis Gubernur serta peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat atas usaha garam
135	Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penerimaan Kunjungan Tamu selama Pandemi Covid-19	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 11/SE/XI/2020 tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemda DIY dalam tatanan normal baru	Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penerimaan tamu di Pemda DIY dalam tatanan normal baru dengan penerapan protokol kesehatan
136	Penanganan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Tenaga Bantu (Naban) yang Terpapar Covid-19 di Lingkungan Pemda DIY	Surat Edaran Nomor 10/SE/X/2020 tentang Penanganan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Tenaga Bantu (Naban) yang Terpapar Covid-19 di Lingkungan Pemda DIY	Sebagai Pedoman bagi OPD dalam rangka Penanganan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Tenaga Bantu (Naban) yang Terpapar Covid-19 di Lingkungan Pemda DIY
137	Pelaksanaan Presensi Bagi PNS dan Tenaga Bantu pada Tatanan Normal Baru	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 870/03113 Tanggal 30 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Presensi Bagi PNS dan Tenaga Bantu pada Tatanan Normal Baru	Sebagai Pedoman Pelaksanaan Presensi Bagi PNS dan Tenaga Bantu pada Tatanan Normal Baru sebagai tindak lanjut penanganan Covid-19

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
138	Pelaksanaan Presensi bagi ASN dan Naban Pemda DIY dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19	Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 870/00130 tentang Pelaksanaan Presensi bagi ASN dan Naban Pemda DIY dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19	a. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Presensi bagi ASN dan Naban Pemda DIY dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
139	Pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha serta koordinasi pengawasan kemitraan di DIY	Rencana Kerja antara Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan Pemerintah Daerah DIY Nomor 16/SJ/PKS/VII/2020 --- 119/10315 Tanggal 9 Juli 2020 tentang Dukungan Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, serta Koordinasi Pengawasan Kemitraan Di DIY	a. Peningkatan kapasitas birokrasi dan pelaku usaha; b. Pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha; c. Asistensi penyusunan dan pemantauan atas implementasi kebijakan daerah terkait persaingan usaha; d. Advokasi kebijakan daerah terkait pengendalian inflasi dan persaingan usaha; e. Tukar menukar informasi kebijakan daerah terkait pengendalian inflasi dan persaingan usaha; f. Koordinasi pengawasan pola kemitraan dan pelaksanaan kemitraan; g. Sosialisasi bersama terkait persaingan usaha.
140	Kerja sama pengembangan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah di DIY	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah DIY dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Nomor 119/14053/2020 --- 22/1/Yk/NK/B Tanggal 14 September 2020 tentang Kerja Sama Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah di DIY	a. Pengembangan sektor ekonomi utama Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana profile Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY;

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			b. Pertukaran data dan informasi dalam rangka pengembangan sektor ekonomi utama DIY; c. Penyusunan kajian atau analytical notes dalam rangka pengembangan sektor ekonomi utama DIY; d. Pemantauan dan pengendalian stok bahan pokok dan harga komoditas di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas TPID; e. Upaya pembinaan untuk meningkatkan potensi pengembangan perekonomian dan peningkatan daya saing melalui sinergitas program dan kegiatan; f. Akselerasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETD) dan transaksi Non-Tunai lainnya; g. Pertumbuhan investasi daerah.
141	Kerjasama pengembangan dan Peningkatan Ekonomi di DIY	• Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Yogyakarta Nomor 119/14056/2020 --- WYK/1/0021/R Tanggal 14 September 2020 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi di DIY • Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Yogyakarta Nomor 119/14055/2020 --- 22/KW-VII/KKI/09/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Kerja Sama Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta	a. Pengembangan sektor produksi dan distribusi UMKM antara lain sektor pertanian dan sarana pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, restoran & hotel, sektor angkutan pergudangan & komunikasi, sektor jasa sosial masyarakat, sektor jasa dunia usaha dan sektor usaha lainnya b. Pengembangan ekonomi kreatif

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			c. Akselerasi implementasi transaksi Non-Tunai d. Sinergitas program dan kegiatan dalam upaya melakukan pembinaan yang mendukung pengembangan dan peningkatan ekonomi.
142	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di DIY	SK Penugasan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DIY Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 267/KEP/2020 Tanggal 10 September 2020	a. Fasilitasi pemanfaatan jasa dan produk perbankan b. Fasilitasi promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah melalui expo, bazaar, *workshop*, pameran c. Peningkatan kompetensi SDM d. Digitalisasi transaksi keuangan daerah
143	Pengembangan dan implementasi pelayanan publik Melalui Inovasi Ekonomi Digital	Kesepakatan Bersama Antara PT. Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan Pemda DIY Nomor 92/FKN/MOU/XI/2020 dan Nomor 119/17623/2020 tentang Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah melalui Inovasi Teknologi Digital Tanggal 8 November 2020	a. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka literasi dan inklusi keuangan melalui pemanfaatan inovasi teknologi digital b. Penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan di bidang transaksi keuangan secara digital, termasuk di dalamnya pengembangan digitalisasi ekosistem syariah c. Pemanfaatan data dan informasi hasil inovasi teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan
144	Penebusan Pupuk Bersubsidi Dengan Menggunakan Kartu Tani di DIY	• Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah DIY dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 119/01204/2020 --- B.683-DIR/BPM/04/2020 Tanggal 29 April 2020 tentang Penerbitan dan Pemanfaatan Kartu Tani di DIY	a. Penerbitan dan Pemanfaatan Kartu Tani di Daerah Istimewa Yogyakarta b. Distribusi pupuk lebih akurat dan tepat sasaran

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		• Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah DIY dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Yogyakarta Nomor 119/8404/2020 --- B.13/KW-VII/KKI/06/2020 Tanggal 4 Juni 2020 tentang Penebusan Pupuk Bersubsidi Dengan Menggunakan Kartu Tani di DIY	c. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian d. Mendorong penyerapan hasil panen petani oleh *off taker*

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2019

Menindaklanjuti keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Nomor 13/K/DPRD/2020 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Pemda DIY telah melakukan beberapa tindaklanjut sebagai berikut.

1. PENDAHULUAN (CATATAN UMUM)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pemerintah DIY harus terus fokus untuk mengurangi jumlah penduduk miskin baik dengan melakukan verifikasi data maupun dengan pendekatan progam dan kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.	Pemda DIY akan terus berkomitmen dan fokus dalam penanggulangan kemiskinan terutama dengan disahkannya Perda No 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam hal perbaikan data kemiskinan diterbitkan Pergub DIY No. 139 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pergub ini menjadi dasar hukum verifikasi validasi data kemiskinan dari tingkat desa/kelurahan. Pada tahun 2021 direncanakan dibentuk tim evaluasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdiri dari unsur Sekda, Bappeda, Biro Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota sebagai upaya meningkatkan kualitas verifikasi/validasi di tingkat bawah. Dalam aspek intervensi program kegiatan penanggulangan kemiskinan, selain intervensi melalui jaminan sosial yang sifatnya *charity* juga melalui intervensi yang sifatnya pemberdayaan masyarakat terutama peningkatan skill agar masyarakat miskin memiliki kemampuan sehingga bisa bekerja untuk meningkat kesejahteraanya. Upaya pemberdayaan masyarakat juga didukung oleh bantuan permodalan dan dukungan akses pasar. Desa Prima misalnya, program ini menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan, diarahkan lebih menyasar pada lokasi kantong kemiskinan, pemberian bantuan permodalan dan didukung pemasaran produknya sampai mandiri. Selain itu pemerintah juga memberikan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi, serta beasiswa untuk siswa tidak mampu.	1. Verifikasi dan Validasi Data, melalui: a. Koordinasi dengan kabupaten kota terkait dengan persiapan, pelaksanaan dan hasil dari veriifikasi-validasi data DTKS. b. Percepatan Pemutakhiran DTKS Oleh Pemerintah kabupaten/Kota. 2. Mendorong masyarakat untuk lebih berdaya dan lebih produktif, sehingga dapat beranjak dari zona kemiskinan.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3.	Usaha pemerintah untuk mengurangi kesenjangan wilayah dengan menumbuhkan pembangunan diwilayah selatan DIY dengan program strategisnya perlu terus didukung.	Pengurangan kesenjangan wilayah terus dilakukan diantaranya melalui pengembangan kawasan selatan DIY. Upaya ini akan terus dilakukan dengan melanjutkan dan mengawal rencana pengembangan sarana dan prasarana yang akan mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan maupun penyediaan infrastruktur dasar wilayah. Pengembangan SPAM Kamijoro, Jalur Jalan Lintas Selatan sebagai pendukung YIA merupakan bagian dari pelaksanaan hal-hal tersebut. Diharapkan dengan tumbuhnya kawasan-kawasan perkonomian baru akan berdampak pada meningkatnya perekonomian daerah/kabupaten/kota yang bermuara pada menurunnya ketimpangan wilayah di DIY.	Penyediaan infrastruktur dasar di Kawasan Selatan yang belum berkembang melalui penyediaan prasarana jalan, sistem penyediaan air minum perpipaan, dan sanitasi sebagai upaya untuk mendukung pengembangan kawasan dan sinergi dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di wilayah DIY seperti YIA, pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata serta Jalan Tol/bebas Hambatan
4.	Sektor pertanian secara umum perlu terus di dukung dan dikembangkan karena merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar dan juga berkaitan dengan ketahanan pangan. Penurunan kontribusi PDRB perlu menjadi perhatian serius pemerintah DIY.	Ketahanan dan kemandirian pangan tetap menjadi perhatian serius bagi Pemda DIY dan akan selalu diupayakan lebih ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian untuk meningkatkan kontribusi dalam PDRB, Pemda DIY telah melakukan berbagai intervensi mulai dari on farm sampai dengan off farm dengan harapan dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas pertanian yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY di sektor pertanian diantaranya yaitu: Tahun 2020: 1. Peningkatan kapasitas SDM petani melalui berbagai pelatihan mulai dari on farm sampai off farm yang diikuti dengan bantuan sarpras pertanian. 2. Untuk membantu pemasaran produk pertanian, dilakukan optimalisasi peran TTIC baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19 3. Pemberian insentif kepada petani berupa fasilitasi pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, alsintan, Jalan Usaha Tani, perbaikan irigasi dan lain-lain. 4. Penyusunan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 5. Kajian Roadmap Pengembangan Penganekaragaman Pangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan 6. Kajian pendukung pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 7. Pengembangan Lumbung Mataraman 8. Pemda DIY berkomitmen untuk mengentaskan desa rawan pangan sebagaimana menjadi target dalam RPJMD 2017-2022. Kerjasama sinergis dengan para pihak dilakukan agar	Peningkatan produksi sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		permasalahan kemiskinan di desa-desa tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Terkait dengan akses pangan, Pemda DIY telah melakukan intervensi dengan bantuan modal melalui gapoktan-gapoktan di desa rawan pangan. Usulan 2021 1. Asuransi usaha tani padi 2. Uji coba kartu tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi 3. Adanya pandemi telah memunculkan peluang-peluang bisnis di sektor pertanian dengan cara-cara baru yang menarik bagi kaum milenial. Oleh karenanya, pendidikan dan pelatihan pertanian bagi generasi muda akan ditingkatkan melalui pengoptimalan peran BPP untuk ikut membina generasi muda agar berminat bergerak di sektor pertanian, penggunaan alat mekanisasi pertanian yang beradaptasi dengan teknologi 4.0, serta pengembangan sistem informasi pertanian untuk penyebaran informasi berbasis IT. 4. Penyusunan Pergub Tindak lanjut Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 5. Peningkatan kapasitas SDM petani melalui berbagai pelatihan mulai dari *on farm* sampai *off farm* yang diikuti dengan bantuan sarpras pertanian 6. Penyusunan Draft Rapergub Insentif dan disinsentif PLP2B 7. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan yaitu dengan mendorong rumah tangga untuk memanfaatkan lahan di sekitarnya (termasuk pekarangan) untuk ditanami tanaman pangan maupun hortikultura guna pemenuhan gizi keluarga. 8. Kajian Pembentukan Pusat Grosir Pangan 9. Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Pendukung Pengendalian Inflasi 10. Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama Pendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi 11. Kajian Pemulihan Sektor Perekonomian Terdampak Covid-19 Pemda DIY juga berkomitmen untuk pengembangan sektor perikanan kelautan sebagai salah satu wujud pemanfaatan potensi dan pengembangan wilayah selatan DIY yang berbatasan dengan laut dengan	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		garis pantai sepanjang 113 Km2. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain: a. Pemda DIY telah menyelenggarakan berbagai bimtek dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan nelayan untuk meningkatkan produksi ikan di DIY. Intervensi dilakukan melalui berbagai bentuk fasilitasi bagi nelayan yang pada prinsipnya memberikan kemudahan dan memberikan bekal yang cukup kepada nelayan. Pelatihan yang diselenggarakan terdiri dari pelatihan teknis penangkapan ikan, serta pelatihan pendukung lainnya seperti bimtek pelayanan pelabuhan, pengelolaan pelabuhan dan keselamatan pelayaran termasuk didalamnya pelatihan untuk nelayan dalam rangka pemenuhan kelengkapan untuk perijinan. b. Untuk mengembangkan wilayah pansela dengan tetap mengupayakan perwujudan Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai dapat beroperasi. Pada tahun 2021 telah diusulkan melalui dana APBN untuk penyelesaian Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto. Untuk pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan membuka akses jalur selatan, maka sebagai alternatif akan dikembangkan Pelabuhan Gesing di Gunungkidul (master plan masih dalam usulan 2021).	
5.	Kesenjangan pendapatan yang semakin besar akan berdampak buruk bagi relasi social dimasyarakat. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang mendalam penyebab kesenjangan pendapatan yang semakin besar tersebut. dan ditemukan metode atau model yang bisa mengurangi kesenjangan pendapatan tersebut.	Kesenjangan yang terjadi di DIY adalah kesenjangan penduduk dengan pendapatan tinggi dengan pendapatan rendah dan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Untuk itu diperlukan program untuk meningkatkan kepedulian sosial dan revitalisasi budaya gotong royong. Disamping itu, perlu juga mendorong kapasitas lembaga di desa dalam pengelolaan dana desa dan manajemen pemerintahan di desa dengan harapan terjadi peningkatan ekonomi masyarakat desa sehingga bisa menurunkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan Kesenjangan pendapatan terjadi karena pertumbuhan pendapatan kelompok berpendapatan rendah jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan kelompok berpendapatan tinggi. Untuk mengurangi ketimpangan, program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi diprioritaskan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin diantaranya melalui kegiatan yang bersifat meningkatkan kapasitas usaha ekonomi rakyat. Dilihat dari sektor lapangan usaha, tenaga kerja atau unit usaha mikro dan kecil di DIY didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, Pertanian dan usaha jasa di	Pengurangan kesenjangan melalui peningkatan pendapatan & skala usaha UKM serta wirausaha baru

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		bidang pariwisata. Beberapa kegiatan yang rencana akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain: a. Untuk menyasar usaha mikro dan kecil baik terutama sektor industri pengolahan Pemda DIY melakukan pelatihan dan kemitraan Industri Kecil. Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal sementara itu kegiatan kemitraan dilakukan untuk meningkatkan akses pasar. b. Untuk menumbuhkan kemampuan kemandirian berusaha dilakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan dengan sasaran pada lokasi kantong-kantong kemiskinan atau yang biasa disebut dengan Desapreneur. c. Untuk meningkatkan kapasitas usaha serta kesempatan kerja di sektor pariwisata dilakukan pelatihan kepariwisataan baik pada tingkat SDM maupun kelembagaan usaha. Kegiatan ini diutamakan menyasar pada desa/kampung wisata dengan tujuan manfaat geliat pariwisata dapat dirasakan oleh komunitas atau masyarakat secara langsung. d. Pengurangan kesenjangan pendapatan dilakukan juga dengan strategi mengurangi pengangguran melalui kegiatan pembentukan kesempatan kerja baik dengan padat karya infrastruktur maupun pembekalan kewirausahaan tenaga kerja mandiri. Pada sektor formal, untuk mengurangi pengangguran dilakukan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja.	
6.	Belanja pemerintah sangat strategis bagi peningkatan PDRB. Oleh sebab itu pemilihan program, kegiatan, sasaran dan kualitas suatu kegiatan akan menentukan seberapa besar dampak dari kegiatan tersebut dalam mendorong peningkatan PDRB dan kesejahteraan rakyat di wilayah DIY.	Penentuan program dan kegiatan serta besaran anggaran, fokus dan lokus sudah dilakukan melalui proses identifikasi dampak terhadap kinerja yang diharapkan termasuk peningkatan PDRB serta aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lainnya. Di tahun mendatang, proses identifikasi dan analisis dampak diharapkan dapat dilakukan lebih efektif dan akurat sehingga dampak anggaran belanja pemerintah mencerminkan intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat DIY. Proses identifikasi dan analisis membutuhkan data yang akurat dan terkini sehingga penyediaan data-data tersebut akan diupayakan untuk terwujud di masa mendatang untuk lebih mengoptimalkan identifikasi dan analisis masalah pembangunan. Belanja Pemerintah secara langsung apabila dilihat dari PDRB menurut Pengeluaran mendukung sebesar 14 % dari total PDRB. Pemerintah	• Penyediaan data yang akurat, akuntabel dan valid untuk proses perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai dasar pertimbangan pemilihan program dan kegiatan yang efektif untuk peningkatan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat DIY. • Optimalisasi belanja pemerintah untuk stimulus pertumbuhan ekonomi daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Daerah DIY di dalam menentukan program dan kegiatan pada peningkatan perekonomian DIY berpedoman pada RPJMD DIY khususnya pada program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat dan sasaran Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan.	
7.	Kinerja aparatur dan keuangan DIY yang sudah bagus perlu terus dipertahankan dan dikembangkan dengan inovasi, kreatifitas dan etos kerja yang sudah dibudayakan untuk meningkatkan kinerja dan capaian hasil dalam setiap tahun anggaran dalam menghadapi kemajuan lingkungan yang dinamis.	Kinerja bidang aparatur dan keuangan yang sudah dinilai bagus, akan kami pertahankan dan terus tingkatkan dengan berbagai inovasi kegiatan yang akan kami lakukan. Terkait dengan kinerja aparatur, berbagai kegiatan yang akan kami lakukan masih tetap berlandaskan pada penanaman nilai-nilai budaya kerja dengan inovasi pada implementasinya, sedangkan untuk mempertahankan kinerja keuangan, kami akan menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan dan akuntansi Pemerintah. Pemda DIY secara bertahap mengupayakan Integrasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah baik dari level pemda DIY, OPD, s/d level individu (e-SKP). Integrasi yang telah berjalan dengan baik pada fase perencaanaan, penganggaran dan pengendalian serta monev kinerja pada level pemda dan OPD. Adapun pada pengukuran kinerja individu akan diupayakan dapat bersinergi dengan fase integrasi yang telah berjalan tersebut. Untuk mempertahankan kinerja aparatur dan keuangan Pemda DIY, beberapa hal telah dilaksanakan dan akan terus dilakukan. Beberapa langkah konkret yang dilaksanakan berupa penguatan reformasi birokrasi Pemda DIY termasuk implementasi budaya kerja SATRIYA secara lebih massif. Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, diharapkan dapat membangun komitmen Perangkat Daerah untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya sejalan dengan rekomendasi DPRD, dalam hal ini agar ASN Pemda DIY terus melakukan inovasi dan kreatif dalam pelaksanaan program/kegiatan, salah satunya dilakukan dengan menerapkan penilaian terhadap unsur inovasi pada raport kinerja perangkat daerah, yang sekaligus sebagai upaya mendorong terciptanya *One Agency One Innovation* di lingkup Pemda DIY. Adapun sebagai manifestasi *reward* and *punishment* terhadap etos kerja aparatur, mekanisme pemberian tambahan penghasilan sudah memperhitungkan kinerja organisasi, yang dipertimbangkan melalui berbagai aspek termasuk perencanaan dan pengendalian, pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian dari	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya kepercayaan, komitmen pelayanan dan kepuasan dari masyarakat. 2. Optimalisasi potensi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah DIY. 3. Mendukung sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dan peningkatan akuntabilitas pemerintahan *4.* Penguatan Reformasi Birokrasi Pemda DIY melalui budaya kerja SATRIYA yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik istimewa, yang berbasis pada nilai nilai kearifan lokal DIY, yaitu filosofi **hamemayu hayuning bawana** dan ajaran moral **sawiji, greget, sengguh ora mingkuh** serta dengan semangat **golong gilig**. *5. Peningkatan kinerja pemerintah dalam pembuatan keputusan. Evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan agar pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya sehingga dapat mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.*

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		sisi individu, capaian sasaran kinerja pegawai menjadi faktor penentu yang dominan. Beberapa hal tersebut, serta dukungan terus menerus dari DPRD DIY sebagai mitra kerja Pemda, diharapkan menciptakan kemantapan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan sumber daya manusia aparatur yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai "Trilogi SDM-DIY".	

2. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN

a. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Kami mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah yang mampu mewujudkan Pendapatan Asli Daerah yang melampaui target.Dalam data, capaian terbesar dari realisasi Pajak Daerah yang didominasi dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kami melihat perlu upaya – upaya lain yang lebih besar untuk meraih pendapatan di luar kendaraan bermotor. Hal itu berkait dalam perspektif yang lebih luas bahwa jumlah kendaraan bermotor di DIY yang sangat banyak menuntut konsekuensi-konsekuensi lain di kemudian hari baik dari infrastruktur hingga lingkungan. Berbagai alternative harus mulai dipikirkan dalam mencari terobosan.	Terobosan untuk mencari sumber pendapatan baru, telah dilakukan Pemerintah Daerah DIY dengan menggali sumber pendapatan baru, seperti misalnya dengan memanfaatkan asset daerah, dengan menyewakan asset yang dimiliki Pemda dan mendirikan BUMD terkait Aset Pemda yang nantinya akan mengelola Barang Milik Daerah untuk menjadi sumber pendapatan baru	Dibentuknya BUMD yang bergerak di bidang pengelolaaan Aset, diharapkan nanti akan menambah besaran penerimaan yang bersumber dari Aset Pemda
2.	Kajian – kajian tentang potensi dan peluang penambahan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor perlu dilakukan terutama berkait dengan peluang investasi dalam skala yang besar.	Peluang investasi dalam skala besar pada Pemda DIY belum pernah dilakukan karena belum ditemukan potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah	Pemda DIY belum melakukan investasi dalam skala besar, terkait dengan Pandemi di Tahun 2020, semua sector pembiayaan diarahkan guna mengatasi Pandemi
3.	Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan melalui penghasilan dari BUMD DIY	Usaha-usaha peningkatan penghasilan melalui penghasilan dari BUMD dilakukan dengan mencari peluang usaha lain yang bisa dioptimalkan oleh BUMD, salah satunya dengan mendirikan café untuk memanfaatkan peluang usaha saat ini	Mempertahankan usaha dalam rangka peningkatan penghasilan BUMD. Karena pada masa pandemi, penurunan penerimaan dari berbagai sector ekonomi
4.	Perlu dilakukan peningkatan agar persentase PAD DIY bisa kembali mencapai rata-rata nasional yaitu 46 % dibanding APBD DIY.	Usaha yang telah dilakukan Pemda DIY dalam mencapai rata-rata nasional, yaitu 46% dibanding APBD DIY dengan melakukan meningkatkan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY. Dengan memanfaatkan asset daerah dengan menyewakan asset daerah ataupun memanfaatkan mengoptimalkan asset daerah	Upaya yang dilakukan Pemda DIY selama tahun 2020 dalam meningkatkan pendapatan adalah dengan melakukan optimalisasi aset dengan menyewakan aset-aset yang dimiliki Pemda DIY, seperti menyewakan tanah di Jalan Kenari yang dimanfaatkan sebagai tempat berlatih calon atlet

			panahan dan penyesuaian tarif sewa untuk aset Pemda DIY.
5.	Pendapatan yang bersumber dari denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor cukup besar. Hal ini merupakan denda yang disebabkan keterlambatan dalam membayar pajak. Untuk itu Pemerintah perlu pro aktif memberi tahu kepada wajib pajak yang akan jatuh tempo supaya tidak kena denda.	Usaha Pemerintah dalam menginformasikan kepada Wajib Pajak terkait dengan Pajak yang akan jatuh tempo, Pemda DIY membuat aplikasi yang bisa didownload oleh masyarakat untuk bisa mengetahui Jatuh tempo masing-masing Wajib Pajak, selain itu dengan mengirim surat kepada Wajib Pajak melalui PT POS Indonesia dengan kegiatan SUPER PKB (Surat Pemberitahuan Pajak kendaraan Bermotor) terkait jatuh tempo pajak kendaraan milik Wajib Pajak	Menambah layanan pembayaran Pajak Daerah dengan mengaktifkan penagihan dari rumah ke rumah dan untuk Tahun 2020, karena adanya pandemi Covid-19 Pemda DIY memberikan insentif dengan melakukan pembebasan denda pajak, untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
6.	Kontribusi pajak air permukaan masih kecil. Secara potensi cukup besar. Untuk itu perlu optimalisasi dari pajak air permukaan.	Optimalisasi Pajak Air Permukaan telah dilakukan dengan melakukan pendataan pengusaha yang memanfaatkan sumber-sumber air permukaan sebagai usahanya, yang selanjutnya akan dilakukan penagihan terhadap pemanfaatan Air Permukaan.	Terdapat penambahan Wajib Pajak dari Pajak Air Permukaan, namun karena terkendala pandemi Covid-19, penambahan belum optimal

b. Pengelolaan Belanja Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Dalam LKPJ, kebijakan pengelolaan Belanja Daerah hanya dicantumkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tanpa ada penjelasan kebijakan pengelolaan berkait Dana Keistimewaan. Padahal dalam target dan belanja belanja dicantumkan belanja dana keistimewaan. Atas dasar itu, kami meminta ada perubahan dalam struktur penyusunan RKPD ke depan untuk memasukan pola kebijakan dana keistimewaan. Hal ini harus dilakukan sebagai dasar pengawasan legislatif dalam Keistimewaan Yogyakarta. Dasar pelibatan DPRD ini sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.07/2017 dalam Pasal 2 Ayat (2) yang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Keuangan No.15/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Yogyakarta dalam Pasal 5 ayat (2) dimana Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan disusun dengan berpedoman pada Perdais, Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam proses hal-hal tersebut dibahas bersama antara Pemerintah	Rekomendasi kami terima untuk memasukkan pola kebijakan dana keistimewaan ke dalam RKPD periode selanjutnya. Terkait dengan peran DPRD, dapat kami sampaikan bahwa di dalam pembahasan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) maupun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), keterlibatan DPRD tentulah sangat besar, mengingat Perdais maupun Perda tentang RPJMD membutuhkan pembahasan dan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Sedangkan pada proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2017 disebutkan bahwa “Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat ….”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan peran DPRD dalam proses penyusunan RKPD direpresentasikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang akan ditelaah lebih lanjut untuk menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKPD	Arah Kebijakan Dana Keistimewaan telah dimasukkan dalam dokumen RKPD, termasuk RKPD DIY 2021 pada Bab 3 Subbab 3.2.2.1.2 halaman 430 dan akan dimasukkan pada penyusunan dokumen RKPD selanjutnya.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Provinsi DIY dengan DPRD DIY. Dengan demikian, peran DPRD dalam pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dapat dilakukan melalui pembahasan penyusunan Perdais, RPJMD, dan RKPD yang dimaksud.		
2.	Optimalisasi Belanja langsung dan tidak langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku dengan orientasi untuk peningkatan martabat manusia Jogja yang paling miskin dan rentan. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat terutama masyarakat miskin dan marginal.	Belanja Langsung dalam APBD 2020 telah diarahkan untuk belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan cascading kinerja telah selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Belanja pegawai dianggarkan untuk honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Modal dianggarkan untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan	Belanja pada tahun 2020 telah banyak diarahkan untuk masyarakat melalui program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Hal ini terbukti antara lain jika melihat pada Kinerja Fisik Belanja Dana Keistimewaan mencapai 99,07% dari target 98% atas meningkatnya kualitas implementasi urusan keisitimewaan. Kinerja fisik tidak tercapai 100% karena pandemi covid mengaibatkan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dilakukan penundaan.
3.	Agar Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota bisa terealisasi 100%	Penganggaran Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/ Kota telah dihitung berdasarkan Perda DIY Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pergub DIY Nomor 89 tahun 2016 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan SK Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2019 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan SK Gubernur DIY Nomor 24/KEP/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2019 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019. Agar Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/ Kota bisa terealisasi 100% maka penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah juga harus tercapai 100%., karena penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/ Kota didasarkan atas penerimaan tersebut. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Air	Pada tahun 2020, target penerimaan pajak daerah tercapai sehingga Belanja Bagi hasil Kepada Kabupaten/ kota tercapai 100%

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Permukaan sudah terealisasi 100% , sementara Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Pajak Rokok tidak mencapai 100% karena penerimaan dari Pajak Rokok tidak sesuai dengan anggaran. Pajak rokok dianggarkan sebesar Rp210.353.611.516,00 dan realisasinya sebesar Rp190.255.946.878,00 sehingga Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten dan Kota yang bersumber dari pajak rokok tidak bisa terealisasi 100%.	

c. Pembiayaan Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Strategi pembiayaan daerah dengan pelibatan pihak ketiga harus selalu diupayakan sesuai dengan point ke-empat pendekatan tematik pembangunan DIY yaitu Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta. Kami belum melihat titik terang yang terlihat dari pendekatan ini.	Pada tahun 2019 telah dilakukan: 1. Kajian Penyiapan Regulasi/kebijakan pemerintah daerah terkait Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang di harap dapat menjadi pelengkap sandaran dan rujukan hukum dalam memperlancar pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Telah dilaksanakan Fasilitasi Proses Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, seperti diketahui bersama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui SK Gubernur DIY No. 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2019telah menetapkan program prioritas pembangunan terdiri daripengembangan 5 infrastruktur, 9 Kawasan dan 3 program strategis, 4 program diantaranya di kerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yaitu: Pengembangan TPA Piyungan, Pembangunan SPAM Kamijoro, Pembangunan Jogja Agro Park dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto 3. Kajian Pelaksanaan Perda 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan mendorong peran aktif dan kesepakatan bersama badan usaha/swasta dalam pelaksanaan TJLSP, Swasta/Badan usaha didorong menyalurkan program TJLSP yang dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2020 melaksanakan: 1. Kajian Pembiayaan non Pemerintah pada Program Prioritas Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang keluarannya adalah daftar skema pembiayaan non pemerintah program pembangunan prioritas pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.	1. Tersedianya bahan kebijakan terkait pembiayaan pembangunan non pemerintah di lingkup Pemda DIY. 2. Upaya Dukungan Pembiayaan Pembangunan melalui peran swasta pada pelaksanaaan pembangunan di DIY yakni pada 4 Proyek strategis Pemda DIY yang di skemakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yaitu: Pengembangan TPA Piyungan, Pembangunan SPAM Kamijoro, Pembangunan Jogja Agro Park dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto 3. Optimalisasi TJLSP

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		2. Fasilitasi Proses Pelaksanaan 4 Program Pembangunan yang telah di skemakan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. 3. Kajian Lanjutan tentang Pelaksanaan TJLSP di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memahami *detail impact* dari pelakanaan TJLSP bagi masyarakat yang secara langsung ataupun tidak langsung jelas berkontribusi aktif pada penanggulangan kemiskinan. Kajian ini diharapkan mampu menghasilkan jawaban mekanisme dam bentuk TJLSP apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan *impact postif* dalam menurunkan angka kemiskinan terutama di masa pandemi Covid-19	

d. Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Identifikasi asset daerah harus selalu dilakukan secara periodik dan dipastikan secara hukum. Kemudian dilakukan optimalisasi dan pendayagunaan asset dengan pasti sehingga tidak ada asset yang "mangkrak" dan tidak produktif. Penggunaan teknologi informasi dapat digunakan sebagai inovasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan asset daerah.	Dalam pengelolaan barang milik daerah, selalu mendasarkan pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam hal ini adalah siklus pengelolaan barang mulai dari perencanaan (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) sampai dengan Penghapusan. Dalam rangkaian pengelolaan barang tersebut, Pemda DIY telah menggunakan sistem teknologi informasi diantaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah modul Aset untuk pencatatan aset tetap, aplikasi persediaan barang milik daerah untuk pencatatan barang persediaan dan pada tahun 2019 telah merintis aplikasi pemanfaatan barang milik daerah. Bahwa inventarisasi aset barang dilakukan secara periodik yaitu per semester. Pemda DIY juga telah melakukan pengamanan barang milik daerah baik pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Upaya yang telah dilakukan Pemda DIY kaitannya dengan pengamanan secara hukum adalah dengan melakukan sertifikasi terhadap tanah - tanah yang belum ada legalitasnya dan menindaklanjuti penghuni liar untuk ditertibkan atau diproses secara legal melalui sewa barang milik daerah. Terkait dengan asset yang "mangkrak" dan tidak diproduktif, Pemda DIY telah melakukan Road Map Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Highest Best Use barang milik daerah idle sehingga dapat menentukan penggunaan terbaik dan tertinggi terhadap barang tersebut. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan barang milik daerah, yang meliputi: 1. Penatausahaan BMD a. Aset Tetap: SIPKD Modul aset. b. Persediaan: e-Persediaan 2. Pendayagunaan/Pemanfaatan BMD: Aplikasi Pemanfaatan BMD Aplikasi tersebut setiap tahun dilakukan pengembangan untuk mengikuti perkembangan dan/atau perubahan peraturan. Tahun 2020 untuk aplikasi aset tetap kode barang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, untuk aplikasi penatausahaan baik aset tetap maupun persediaan disesuaikan struktur organisasinya untuk menampung BMD (persediaan dan aset tetap) dari dana BTT dan/atau hibah khusus Covid-19.	Penggunaan dukungan aplikasi memungkinkan data BMD yang disewakan, kapan jatuh tempo dan berakhirnya sewa, siapa penyewanya serta besaran sewa per tahunnya, dapat disajikan lebih mudah. Aplikasi ini akan terus dikembangkan dengan mendasarkan pada data spasial berbasis Sistem Informasi Geografis sehingga dapat diketahui lokasinya serta petunjuk arahnya. Dengan langkah penyelesaian tersebut, Pemda DIY dapat melaksanakan Siklus Pengelolaan BMD mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan sebagai dasar penetapan kebijakan Pemda DIY dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku.

e. Pengelolaan Aset Daerah Yang Dipisahkan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Perluasan layanan bisnis BUMD perlu dipikirkan sebagai upaya inovasi pembiayaan daerah termasuk kemungkinan pendirian BUMD baru untuk merespon percepatan dunia usaha.	Untuk merespon percepatan dunia usaha, akan dibentuk 2 BUMD baru yaitu: a. Perusahaan Daerah Air Bersih (Saat ini sedang dalam proses di Biro Hukum Kemendagri) b. BUMD Pengelolaan Aset	Mulai tanggal 1 Januari 2021 Perumda Air Bersih Tirtatama DIY telah mulai beroperasi berdasarkan amanat Perda DIY no 5 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY dan Perda DIY no 10 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY. Pembahasan raperda Kelembagaan dan Penyertaan Modal BUMD Pengelolaan Aset sudah masuk di tri wulan I Propemperda 2021
2.	Untuk mengoptimalkan pengelolaan asset Daerah perlu dibentuk BUMD.	Untuk mengoptimalkan penegelolaan aset daerah akan dibentuk BUMD Pengelolaan Aset dimana proses pembentukan kelembagaan BUMD tersebut sudah masuk dalam Propemperda 2020.	Pembahasan raperda Kelembagaan dan Penyertaan Modal BUMD Pengelolaan Aset sudah masuk di tri wulan I Propemperda 2021.
3.	Mohon target PAD PT Bank BPD DIY dapat di realisasikan sebab hal ini sesuai dengan proposal saat penambahan modal BPD disampaikan.	Target PAD PT Bank BPD DIY tidak dapat direalisasikan seperti pada proposal penambahan modal karena realisasi setoran modal lebih kecil dari yang direncanakan dalam RPJMD	Tahun 2020 PT Bank BPD DIY memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp94.001.713.614,26. Penerimaan Bagian Laba tersebut berasal dari Laba PT Bank BPD DIY Tahun 2019. Penerimaan tersebut meningkat sebesar Rp15.736.585.097,67 dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2019 sebesar Rp78.265.128.516,59
4.	Kinerja PD Tarumartani yang mengelola usaha tembakau slag sampai hari ini kondisi usahanya perlu dievaluasi. Bagaimana nasib rencana membuka usaha dan aset yang ada di Pati Jateng.	Kinerja PT Taru Martani dalam mengelola usaha tembakau mengalami peningkatan. Terkait dengan pengembangan usaha di Pati, Jawa Tengah sedang dalam proses pengalihan saham yang dimiliki oleh PT Yongsin Aneka Energy.	PT Taru Martani pada tahun 2020 memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp148.697.632,00. Penerimaan tersebut menurun sebesar Rp776.385.527,00 dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2019 sebesar Rp925.083.150,00. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya beban biaya amortisasi (sisa dari tahun 2015). Tetapi pada tahun buku 2020, Laba bersih PT Tarumartani mengalami peningkatan sebesar Rp9.593.905,721,00. Pendapatan terbesar diperoleh dari penjualan tembakau Shag yang mengalami peningkatan. Saat ini proses pengalihan saham yang dimiliki oleh PT Yongsin Aneka Energy masih dalam proses negosiasi dengan pihak mitra.

3. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Urusan Pendidikan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peningkatan kualitas lulusan sekolah menengah terutama SMK perlu terus ditingkatkan agar mereka dapat terserap di dunia kerja dan tidak menjadi penganggur.	Terkait dengan peningkatan kualitas SMK, pada tahun 2021 akan diselenggarakan sinkronisasi kurikulum antara sekolah dengan dunia industri untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen, pariwisata, kemaritiman, teknologi dan rekayasa, agribisnis dan agroteknologi, teknik informasi dan komunikasi, serta kesehatan dan pekerjaan sosial. Output sinkronisasi ini adalah bahan ajar	Sinkronisasi kurikulum SMK dengan dunia usaha/dunia industri dan memperluas kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri guna membuka kesempatan penerimaan tenaga kerja yang lebih luas bagi para lulusannya.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		yang akan mendukung pengayaan materi di SMK dan mengasah lebih dalam keahlian praktik siswa. Penerapan bahan ajar ini juga diharapkan mampu mendekatkan siswa pada realitas pekerjaan di lapangan kelak sehingga akan memudahkan siswa memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh dunia usaha/dunia industri. Lulusan SMK diharapkan nantinya mampu bersaing sebagai tenaga kerja yang terampil dan kompeten.	
2.	Pemberian bea siswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar tidak terjadi putus sekolah dan untuk meningkatkan prestasi mereka. dan untuk yang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi pemberian bea siswa tetap di pertahankan. Hal ini untuk memberi kesempatan mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat lulus menjadi sarjana.	Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk 13.400 siswa SMA dan SMK di DIY dengan total anggaran sebesar Rp20.100.000.000,00. Di tahun 2021 juga direncanakan jumlah penerima beasiswa Kartu Cerdas sebanyak 13.400 siswa. Beasiswa ini diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi orangtua siswa dari keluarga kurang mampu sehingga siswa dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Untuk pembiayaan di jenjang pendidikan tinggi, di tahun 2020 dan 2021 calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu masih diarahkan pada pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). KIP-Kuliah adalah salah satu upaya untuk membantu para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi	Untuk memastikan beasiswa diterima dan dipergunakan sesuai ketentuan, telah dilakukan monitoring dan peninjauan langsung ke sekolah disertai wawancara dengan siswa penerima beasiswa Kartu Cerdas. Terkait dengan pemberian beasiswa jenjang perguruan tinggi, para calon mahasiswa atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai beasiswa telah diarahkan kepada Lembaga Layanan Pendidikan TInggi DIY yang membawahi Perguruan Tinggi di DIY dan bisa memberikan informasi lebih mendalam mengenai beasiswa pendidikan bagi para mahasiswa.
3.	Pemberian insentif bagi PTK baik itu GTT/PTT/GTY/PTY perlu terus diberikan sebagai wujud penghargaan kepada mereka yang telah berperan dalam penyelenggaraan Pendidikan di DIY sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah .	Sepanjang tahun 2020 telah disalurkan insentif kepada 1.079 GTT dan PTT SLB Swasta; GTY dan PTY SMA, SMK, dan SLB se-DIY; dan guru sekolah inklusif. Pengurangan dari target semula 1.199 orang disebabkan adanya GTT PTT, GTY PTY, maupun guru inklusif yang memasuki masa purna tugas. Dengan demikian total insentif yang telah diberikan di tahun 2020 adalah sebesar Rp9.076.600.000. Pemberian insentif ini dilanjutkan tahun 2021 dengan pengajuan anggaran insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap di DIY sebagai salah satu wujud penghargaan kepada mereka.	Pemberian insentif bagi GTT/PTT/GTY/PTY sebagai wujud penghargaan telah berperan dalam penyelenggaraan Pendidikan di DIY
4.	Untuk mendukung upaya pemerataan kualitas sekolah menengah, berbagai upaya peningkatan kualitas PTK perlu terus dilakukan. dan kebijakan zonasi perlu diterapkan tidak hanya bagi peserta didik namun juga bagi tenaga guru/ PTK	Peningkatan kualitas PTK di sekolah menengah telah dilakukan secara rutin setiap tahun, antara lain dengan penyelenggaraan bimbingan teknis penulisan karya ilmiah bagi guru (yang merupakan dasar bagi penerapan pemikiran ilmiah dalam metode pengajaran di sekolah) dan mendorong para PTK untuk mengikuti berbagai kompetisi seperti Anugerah Konstitusi; Olimpiade Guru; Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah	Pemerataan PTK di tahun 2020 diawali dengan pemetaan data kebutuhan PTK di SMA, SMK, dan SLB se-DIY. Pemetaan kemudian dilanjutkan dengan plotting penempatan PTK sesuai kebutuhan di sekolah yang bersangkutan untuk kemudian dilakukan rotasi. Rotasi di tahun 2020 mencakup rotasi guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah dan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		dan Tenaga Administrasi Berprestasi; serta Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi. Guna mendukung peningkatan kualitas pengajaran, dalam pemberian diklat peningkatan kompetensi guru juga perlu dilakukan pemerataan sehingga seluruh guru di DIY memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelatihan demi peningkatan kualitas. Terkait dengan pemerataan PTK, telah dilakukan kegiatan Pemetaan Data Kebutuhan Guru jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus (Dikmensus) guna menjaring kebutuhan pendidik SMA, SMK, dan SLB di DIY. Salah satu output dari kegiatan ini adalah rotasi guru dan Kepala Sekolah di DIY berdasarkan pertimbangan jarak domisili dan kompetensi guru atau kinerja Kepala Sekolah yang bersangkutan. Penerapan zonasi dilakukan bukan semata berdasarkan jarak dari tempat tinggal ke tempat kerja, namun juga mempertimbangkan hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG). UKG dapat digunakan sebagai standarisasi kualitas guru sehingga hasilnya dapat mendukung pemerataan kualitas guru di DIY. Dengan demikian diharapkan guru-guru dengan kompetensi mengajar yang baik tidak terkonsentrasi di satu titik namun dapat disebar ke berbagai sekolah guna meningkatkan mutu satuan pendidikan. Sebaliknya, guru-guru dengan kompetensi pengajaran yang masih kurang baik juga tidak terkonsentrasi di satu titik sehingga diharapkan adanya transfer ilmu dan kualitas pengajaran dari guru yang kualitasnya lebih baik ke guru yang kualitasnya masih perlu ditingkatkan	kompetensi PTK tersebut. Evaluasi atas kinerja akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai bahan pertimbangan untuk pemetaan maupun rotasi PTK berikutnya.
5.	Untuk meningkatkan kinerja ASN guru, kepala sekolah dan pengawas, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) perlu diberikan juga kepada ASN guru , kepala sekolah dan pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan Daerah	Telah disusun Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah	Pada tahun 2020 belum dilakukan pemberian TPP kepada ASN guru, kepala sekolah, dan pengawas mengingat penanganan pandemi Covid-19 di DIY yang membutuhkan banyak dukungan pendanaan. Diharapkan seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi DIY, pemberian penghargaan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan guna mendukung peningkatan kualitas kinerja di bidang pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Angka kematian ibu, angka kematian nenonatus dan angka kematian balita harus terus ditekan agar turun. Perlu pendekatan yang baru jika pendekatan selama beberapa tahun terakhir belum menunjukan hasil yang nyata. Jika masalah utama adalah 3 T maka perlu upaya yang baik untuk mengurangi problem 3 T tersebut.	Upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kematian ibu, bayi (neonatus) dan balita antara lain dengan pemenuhan sarana prasarana dan SDM Kesehatan yang dilaksanakan secara paralel dengan pendampingan/ Bimtek mutu dan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu juga masih dilakukan peningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga guna kesiapsiagaan pencegahan kematian ibu, bayi dan balita. Jaminan Kesehatan yang telah dan akan dilakukan yakni Jampersal melalui anggaran DAK, serta Preventif KIA melalui anggaran APBD meliputi Screening prenatal, TORCH, dan Gerakan untuk kesejahteraan Ibu dan Balita (Garba). Bersamaan dengan hal tersebut, tetap dilakukan update pengetahuan untuk petugas kesehatan mengenai tatalaksana kesehatan ibu dan bayi, pendampingan ibu hamil risiko tinggi, dan pemantauan ibu hamil, bayi dan balita melalui buku KIA. Semua kegiatan tersebut dilakukan pada 2020 dan tetap dilanjutkan pada tahun 2021. Ada satu inovasi yang akan dikembangkan di tahun 2021 yaitu pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Terintegrasi Kesehatan Ibu dan anak (SIMKIA) yang akan mengintegrasikan semua sistem di provnsi dan 5 kabupaten/ kota.	Tujuan: a. memberikan buffer pembiayaan pada kasus-kasus tertentu dan tidak terduga. b. Skrining sangat perlu dilakukan agar permasalahan kesehatan ibu dan bayi dapat diketahui sejak awal sehingga dapat diintervensi dengan baik. c. Ketersediaan Buku KIA dan pemanfaatan Buku KIA dengan baik akan meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga, meningkatkan peran masyarakat dan meningkatkan pemantauan kesehatan ibu dan balita. d. Adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang baik dan lintas wilayah, akan membantu pemantauan kesehatan ibu, dan mengetahui dengan cepat peta risiko sehingga pelaksana program hingga pemberi layanan kesehatan dapat memantau kesehatan sasaran dengan labih baik. Proses pelaporan juga menjadi lebih baik, valid dan cepat.
2.	Masalah stunting, jika faktor-faktornya adalah seperti ibu hamil kekurangan asupan, KEK ibu hamil, bumil anemia, maka perlu intervensi secara langsung ke sasaran. Pemerintah perlu memberi perhatian khusus dan pelayanan khusus agar kondisi yang demikian dapat di atasi.	Dalam rangka pencegahan stunting telah dilakukan kegiatan melalui anggaran DAK Non Fisik berupa pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita Kurus. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi percepatan perbaikan kualitas gizi masyarakat sekaligs sebagai upaya promosi secara langsung tentang pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil dan balita kurus.	Tujuan: Menurunkan prevalensi ibu hamil KEK sehingga kualitas bayi yang dilahirkan lebih lebih baik. Menurunkan prevalensi balita kurus sehingga status gizi balita semakin baik, dan menjadi generasi berkualitas.
3.	Perlu dukungan yang nyata dan serius untuk menemukan dan mengobati penyakit menular terutama TB untuk mencapai tujuan zero TB ditahun 2030. Adanya pandemi Covid-19 ditahun 2020 harus memberi pelajaran berharga pada kita bahwa penyakit menular seperti TB dan HIV AIDS perlu ditangani secara serius agar tidak terjadi penularan.	Dalam upaya menemukan dan mengobati penyakit menular terutama TB untuk mencapai tujuan zero TB ditahun 2030 dilakukan penguatan sistem Binwas antara lain: a. Koordinasi dan Advokasi lintas sektor, LSM, dan organisasi profesi b. Pengembangan alur dan sistem rujukan Tes Cepat Molekuler (TCM), dan rujuk balik pasien TB RO ke Puskesmas satelit c. Penguatan jejaring di dalam maupun luar DIY d. Pengembangan Layanan TB Resisten Obat (RO) di RS Pemerintah yang telah ditunjuk	a. Tujuan: LSM dan organisasi profesi berperan dalam program TB sehingga lebih banyak masyarakat yang terlayani TB dengan baik (terbentuk Koalisi Organisasi Profesi untuk TB/ KOPI TB) b. Tujuan: Memperluas akses pemeriksan TCM bagi semua suspek TB sehingga lebih banyak suspek TB yang diperiksa TCM. (Utilisasi TCM di DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		e. Pengembangan alur rujukan dan Pelatihan manajemen TB DOTS, f. Orientasi Public Privat Mix (PPM) bagi Kabupaten/Kota, g. Pelatihan/ OJT TB RO bagi Tim TB RO di RS dan manajemen TB RO di kabupaten kota h. Melibatkan peran Lintas sektor dalam penemuan kasus, i. Monev peran PPM dalam intensifikasi penemuan kasus ,dan utilisasi Tes Cepat Molekuler (TCM), j. Membangun sistem pelaporan dan feedback bagi klinik dan Dokter Praktek Mandiri, k. Monev SR dan pelaksanaan jejaring (TB SO dan TB RO), dan l. Monev hasil pelatihan dan pengembangan Layanan TB RO. Strategi integrasi dalam upaya di atas dilaksanakan dengan cara Pengembangan MoU dengan lintas sektor, Intensifikasi penemuan kasus dengan penetapan juknis, Integrasi program, Penyusunan Pedoman dan SPO , dan Pelibatan lintas sektor untuk mendorong pasien TB RO memulai dan menyelesaikan pengobatan .	meningkat dari tahun 2019 sebesar 32% menjadi 43% pada tahun 2020) c. Tujuan: Rujukan pasien TB bisa diterima dan diobati sesuai standar sampai selesai/ sembuh (Keberhasilan pengobatan pasien TB di DIY meningkat dari 84% pada tahun 2019 menjadi 86% tahun 2020) d. Tujuan: faskes yang mampu mengobati Pasien TB kebal obat bertambah sehingga pasien TB kebal obat segera mendapat pelayanan pengobatan. (Pada tahun 2020 bertambah RS Paru Respira) e. Tujuan: Rujukan pasien TB bisa diterima dan diobati sesuai standar sampai selesai/ sembuh (Keberhasilan pengobatan pasien TB di DIY meningkat dari 84% pada tahun 2019 menjadi 86% tahun 2020) f. Tujuan: Terbentuk Tim DPPM di 5 kabupaten/kota sebagai koordinator kegiatan TB yang melibatkan Dokter Praktik/ Praktisi Swasta g. Tujuan: Menyiapkan tim TB RO di RS dan manajemen TB RO di kabupaten kota untuk melayani pasien TB RO h. Tujuan: Meningkatkan penemuan kasus TB oleh kader Aisyiyah dan kader PPTI (Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia) i. Tujuan: Mengevaluasi penemuan suspek TB yang diperiksa TCM. (Utilisasi TCM di DIY meningkat dari tahun 2019 sebesar 32% menjadi 43% pada tahun 2020) j. Tujuan: Suspek TB yang dirujuk dari klinik dan Dokter Praktek Mandiri sampai ke puskesmas. Angka ini belum bisa dipisahkan melalui sistem informasi tuberkulosis. k. Tujuan: Mengevaluasi angka keberhasilan pengobatan (Success Rate/SR) TB (Keberhasilan pengobatan pasien TB di DIY meningkat dari 84% pada tahun 2019 menjadi 86% tahun 2020)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
4.	Berbagai upaya untuk menekan prevalensi penyakit tidak menular terus digalakan. Kampanye hidup sehat seperti Germas perlu terus menerus di lakukan. Pandemik Covid-19 mendorong secara massif masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan. Hal yang positif dan hal itu perlu terus di pertahankan. Jangan hanya sesaat ketika terjadi pandemi semata.	Upaya agar masyarakat tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan selama pandemi Covid terkait Germas dilaksanakan melalui koordinasi pelaksanaan Posyandu new Normal, koordinasi desa siaga covid, penyusunan protokol kesehatan pada tatanan kab/kota sehat, dan edukasi pemakaian masker ke masyarakat. Kegiatan tersebut menguatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan terkait Germas dengan cara penyelenggaraa kab/kota sehat, TTU di sekolah, pasar, dan hotel, penguatan STBM, lomba pasar sehat, dan sertifikasi higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan.	Meningkatkan pengetahuan sasaran untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk perubahan perilaku menuju perilaku yang sehat. Memotifasi Gerakan pemberdayaan masyarakat(UKBM) , Tempat wisata, tempat umum (Pasar, mall, terminal), tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan

c. Urusan Sosial

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Segera selesaikan masalah pendataan jumlah orang miskin, sehingga pemerintah baik propinsi maupun kabupaten dan desa mempunyai data yang sama. Sehingga tidak timbul masalah setiap kali ada peristiwa penting pemerintahan. Validasi data keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	Kewenangan Dinas Sosial DIY terhadap proses verifikasi dan validasi DTKS sebatas melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Untuk itu Dinas Sosial DIY bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali telah melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, melakukan pemantauan serta mengevaluasi sampai sejauh mana hasil verifikasi dan validasi data BDT yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti SKB tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK.07/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, dan Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Permutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemda DIY menetapkan instruksi Gubernur DIY Nomor 4/INSTR/2020 Tentang Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota se-DIY tentang percepatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tahun 2020 Dinas Sosial DIY telah memberikan peningkatan kapasitas kepada petugas pendata di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dengan menggunakan aplikasi SIKS Droid yaitu sistem pengembangan SIKS-NG yang lama sebagai pendukung kebijakan Pemerintah Pusat (Pusdatin Kemsos) di dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data. Hal ini segera ditindak lanjuti oleh Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Kulon Progo yang rencananya	1. Terkoordinasikannya verifikasi dan validasi DTKS oleh kabupaten kota 2. Telah dilakukannya percepatan pemutahiran DTKS oleh kabupaten/kota 3. Meningkatnya kapasitas petugas pendata di tingkat Kab Kota dengan menggunakan sistem aplikasi SIKS Droid.

<table>
<tr><th>No</th><th>Rekomendasi DPRD Tahun 2019</th><th>Tindak Lanjut</th><th>Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>akan segera menggunakan aplikasi SIKS Droid tersebut pada proses verifikasi dan pendataan tahun 2021 kedepan.
Dinas Sosial DIY akan segera membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Verifiksi dan Validasi DTKS dengan harapan proses verifikasi dan validasi DTKS kedepan dapat menghasilkan output data yang akurat.</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Bagaimana kondisi penerima PKH sampai dengan tahap IV yang pada tahun 2018 sejumlah 213.557 dan bantuan pangan non tunai sebanyak 317.219 KPM. Untuk di tahun 2019 berapa yang menerima PKH dan berapa yang menerima bantuan pangan non tunai?</td><td>Kondisi KPM PKH sampai dengan tahun 2018 (berdasarkan laporan dari pendamping PKH sudah ada) sejumlah 2.261 KPM PKH yang telah graduasi mandiri dan mempunyai usaha mandiri.
Data penerima PKH dan BPNT
<table>
<tr><th></th><th>2018</th><th>2019</th></tr>
<tr><td>PKH</td><td>213.557</td><td>212.624
(per tahap 4)</td></tr>
<tr><td>BPNT</td><td>317.219</td><td>324.998
(Keputusan Perdirjen PFM No 13A/4/SK/HK0202/10/2019 Tanggal 1 Oktober 2019)</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>530.776</td><td>534.352</td></tr>
</table></td><td>Saat ini penerima PKH sampai dengan tahap IV pada tahun 2019 sejumlah 212.624 KPM. Kondisi ini dibandingkan dengan tahun 2018 sejumlah 213.557 KPM, turun sebanyak 933 KPM atau 0,43%.
Sedangkan untuk penerima bantuan pangan non tunai pada tahun 2019 sejumlah 317.436 KPM. Kondisi ini dibandingkan dengan tahun 2018 sejumlah 317.219 KPM, naik sebanyak 217 KPM atau 0,063%.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>PKH Graduasi di tahun 2019 berjumlah 4.872 KPM, atau meningkat 395.13% dibandingkan tahun 2018 sebanyak 1.233 KPM. Hal ini perlu terus dilakukan mengingat jumlah PKH masih cukup besar yang belum berubah menjadi PKH Graduasi.</td><td>Pemerintah daerah membantu pelaksanaan graduasi PKH, sehingga warga yang sudah sejahtera tetapi masih menerima PKH bisa segera dikeluarkan dari kepesertaan PKH melalui kegiatan motivasi graduasi mandiri yang bersinergi dengan kabupaten/kota/ kecamatan/ desa serta bimbingan teknis KPM PKH sasaran graduasi. Tahun 2020 harapannya PKH Graduasi akan terus meningkat jumlahnya, akan tetapi karena adanya pandemi Covid-19 anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung PKH Graduasi dirasionaliasasi untuk penanganan Covid-19 dan kegiatan diusulkan kembali pada tahun 2021.</td><td>Dinas Sosial DIY Tahun 2021 ada kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota berupa:
a. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PKH Graduasi sejumlah 825 KPM, bantuan melalui BKK sebesar Rp 3.000.000 per-KPM
b. KPM Usaha Ekonomi Produktif PKH Graduasi tahun 2018 yang sampai saat ini usahanya masih bertahan dan produktif, mendapatkan bantuan melalui BKK sebesar Rp 300.000.000 per-KPM
c. Sosialisasi atau bimbingan pemantapan KPM peneria PKH sebanyak 500 orang bertujuan untuk mendorong KPM yang sudah berada pada kondisi ekonomi sejahtera untuk keluar PKH secara mandiri</td></tr>
</table>

d. Sub Urusan Pekerjaan Umum

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Jumlah penduduk DIY yang berakses sanitasi perlu terus ditingkatkan. Pengelolaan sampah yang baik perlu terus diupayakan sehingga ramah terhadap lingkungan. Rencana pengolahan sampah yang ada di TPST Piyungan perlu segera di wujudkan agar DIY tidak terjadi lagi kejadian darurat sampah seperti yang terjadi di bulan Maret 2019.	Pengelolaan sampah yang baik perlu terus diupayakan sehingga ramah terhadap lingkungan. Rencana pengolahan sampah yang ada di TPST Piyungan perlu segera di wujudkan agar DIY tidak terjadi lagi kejadian darurat sampah seperti yang terjadi di bulan Maret 2019. Terkait penanganan penduduk berakses sanitasi, di IPAL Sewon sedang dilakukan peningkatan kapasitas pengelolaan menjadi 40.000 SR dari kapasitas sekarang sejumlah 25.000 SR. Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Untuk permasalahan sampah, saat ini telah dilakukan integrasi penanganan TPST Piyungan antara APBN dan APBD DIY guna meningkatkan fungsi layanan. Disamping itu perlu segera menindaklanjuti studi-studi terkait penanganan TPST Piyungan. Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan terpadu dari sumber hingga sampai di TPA perlu terus ditingkatkan. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri mempunyai peran sangat penting. Peningkatan pengelolaan sampah di tingkat TPS, TPS 3R, TPST, maupun bank sampah perlu dilaksanakan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA yang kapasitasnya juga terbatas. Sedangkan untuk drainase, pengurangan titik genangan di kawasan perkotaan Yogyakarta (KPY) akan terus ditingkatkan untuk mengurangi lama genangan yang selama ini terjadi selama 3 jam.	Dalam pelaksanaan pelayanan peningkatan akses sanitasi di DIY, IPAL Sewon merupakan salah satu sistem pengolahan air limbah domestik terpusat yang melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Kapasitas pengolahan IPAL Sewon telah melebihi kapasitas rencana sedangkan peningkatan kebutuhan akses pelayanan air limbah di Kawasan pelayanan semakin meningkat. Oleh karena itu, APBN melalui BPPW DIY pada tahun anggaran 2020-2021 sedang melaksanakan peningkatan kapasitas IPAL Sewon untuk menambah jumlah kapasitas layanan pengolahan limbah domestik yang bisa masuk ke IPAL Sewon. Pelaksanaan penataan sel sampah eksisting di TPA Piyungan dan perbaikan sarana prasarana TPA Piyungan merupakan salah satu cara dalam peningkatan kapasitas TPA Piyungan yang sudah melebihi umur teknis rencana. Selain itu, rencana pembebasan lahan diharapkan menjadi solusi dalam pengembangan pengelolaan sampah di TPA Piyungan nantinya. Akan tetapi, kontribusi dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dalam penanganan dan pengurangan timbulan sampah yang dibuang ke TPA Piyungan tetap harus dilaksanakan.
2.	Penduduk DIY yang berakses air minum dengan standard kesehatan perlu terus ditingkatkan. Masih ada sebagian warga DIY yang kesulitan air minum. Terutama di wilayah Gunungkidul, sebagian Bantul, Kulon Progo dan sebagian Sleman. Program strategis SPAM regional segera beroperasi dan dapat mencukupi kebutuhan air minum dan air bersi bagi warga DIY. Untuk daerah-daerah yang rawan air minum pemerintah DIY perlu	Masih ada sebagian warga DIY yang kesulitan air minum. Terutama di wilayah Gunungkidul, sebagian Bantul, Kulon Progo dan sebagian Sleman. Program strategis SPAM regional segera beroperasi dan dapat mencukupi kebutuhan air minum dan air bersih bagi warga DIY. Untuk daerah-daerah yang rawan air minum pemerintah DIY perlu mencari solusi dengan memanfaatkan model seperti embung, telaga buatan dan sebagainya:	Penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul yang sudah beroperasi untuk sistem bantar dapat mencukupi kebutuhan air minum di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Selain penyelenggaraan SPAM Regional, Program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan salah satu program dalam peningkatan akses air minum di DIY dan bisa melayani di daerah-daerah rawan air.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	mencari solusi dengan memanfaatkan model seperti embung, telaga buatan dan sebagainya.	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum di DIY, salah satu program Pemda DIY adalah penyelenggaraan SPAM Regional. Progres penyelenggaraan SPAM Regional sebagai berikut: a. Pembangunan SPAM Regional Kartamantul telah dilaksanakan untuk tahap 1 yaitu Sistem Bantar dan telah dioperasionalkan oleh Balai PIALAMP dengan debit pengolahan sebesar 400 liter/detik untuk pelayanan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabaupaten Sleman. Untuk pembangunan SPAM Regional Kartamantul tahap 2 yaitu sistem Kebon Agung dengan debit pengolahan sebesar 300 liter/detik direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2020-2021 oleh Kementerian PUPR. b. Intake Kamijoro yang berada di Bendung Kamijoro ini merupakan unit air baku untuk SPAM Regional Kamijoro. Unit air baku beserta sebagian jaringannya sudah dibangun oleh Kementerian PUPR. Untuk pembangunan unit produksi dan unit distribusi lainnya direncanakan akan dilaksanakan menggunakan skema KPBU. Saat ini Pemda DIY sedang menyusun dokumen prastudi kelayakan untuk Proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro. SPAM Regional Kamijoro direncanakan akan menyuplai kebutuhan air minum di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul serta kawasan strategis seperti YIA, Pelabuhan Tanjung Adikarto dan Kawasan Industri Pasir Besi. c. Penyusunan dokumen perencanaan SPAM Regional Banyusoco direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2021. Penyelenggaraan SPAM Regional Banyusoco direncanakan untuk menyuplai kebutuhan air minum di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Selain penyelenggaraan SPAM Regional, untuk memenuhi kebutuhan air minum di perdesaan, Pemda DIY melalui DPUPESDM DIY memberikan bantuan hibah berupa pipa dan *accessories* nya untuk kelompok Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta (PAMMASKARTA). Bantuan ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan air minum perpipaan di perdesaan yang sulit terjangkau oleh pelayanan	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		PDAM. Pengelolaan SPAM perdesaan ini dilaksanakan oleh masyarakat penerima sehingga masyarakat juga turut aktif dalam penyelenggaraan SPAM. Jenis sumber yang digunakan sebagai sumber air baku untuk SPAM Perpipaan di DIY adalah sumber air permukaan berupa sungai dan waduk serta sumber-sumber air tanah lainnya. Untuk pemanfaatan embung yang ada DIY belum dioptimalkan sebagai sumber air minum karena pemanfaatan embung lebih diperuntukkan untuk menjaga pelestarian sumber daya air dan sumber air baku untuk irigasi.	
3.	Optimalisasi usaha-usaha pelestarian sumber daya daya air, baik sumber daya air hujan, air permukaan maupun airtanah, dengan rehabilitasi dan pemeliharaan sumber air, embung dan telaga telaga pada daerah yang minim akan sumber air bersih. Pendekatan kebudayaan pemenuhan dan pengelolaan air bersih harus dilakukan.	Pendekatan kebudayaan pemenuhan dan pengelolaan air bersih harus dilakukan: Pemda DIY berupaya terus untuk melaksanakan pelestarian sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat termasuk pada daerah yang minim sumber air bersih. Upaya pelestarian tersebut dilaksanakan pada tampungan-tampungan air yang berupa embung. Upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi pada embung tersebut. Kegiatan pemeliharaan rutin berupa pekerjaan babat semak dan gali waled untuk menjaga fungsi embung dengan melibatkan tenaga operasional dari penduduk sekitar embung. Sedangkan kegiatan rehabilitasi dilakukan bila kerusakan embung telah mencapai lebih dari 40 %. Dalam rangka melaksanakan pelestarian sumber daya air tersebut, Pemda DIY juga melaksanakan kampanye pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan masyarakat pemerhati Sumber Daya Air dengan menggunakan pendekatan kebudayaan masyarakat lokal (*local wisdom*) antara lain yang dilaksanakan pada acara Kenduri banyu udan, Gerakan irigasi bersih, Hari Air Dunia, dll. Selain berupaya terus melestarikan sumber daya air dalam rangka mewujudkan keberlanjutan sumber daya air dan memenuhi kebutuhan air baku bagi warga DIY, Pemda DIY selalu mengupayakan penyediaan embung-embung baru.	Pemeliharaan dan rehabilitasi pada embung bertujuan untuk agar dapat menjaga debit air yang dihasilkan embung. Kampanye pengelolaan Sumber Daya Air antara lain ditujukan untuk mengajak masyarakat untuk ikut melindungi dan melestariakan sumber air, ikut melakukan pengawetan air, dan menjaga kualitas air.
4.	Peningkatan luas fungsional daerah irigasi terus diusahakan. Hal ini akan dapat meningkatkan luas lahan produktif pertanian. Peningkatan luas fungsional daerah irigasi diharapkan tidak hanya besaran pada	Hal ini akan dapat meningkatkan luas lahan produktif pertanian. Peningkatan luas fungsional daerah irigasi diharapkan tidak hanya besaran pada luasannya tetapi kualitas layanan daerah irigasi. Antara lain ditentukan kapasitas tenaga operasional irigasi	Penyusunan PAI dan AKNPI mendukung efektivitas dalam penggunaan anggaran dalam rangka peningkatan luas fungsional daerah irigasi.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	luasannya tetapi kualitas layanan daerah irigasi. Antara lain ditentukan kapasitas tenaga operasional irigasi dilapangan. Perlu dukungan dan fasilitasi terhadap tenaga operasional tersebut.	dilapangan. Perlu dukungan dan fasilitasi terhadap tenaga operasional tersebut: Upaya Pemda DIY dalam rangka meningkatkan luas fungsional daerah irigasi yang teraliri air irigasi adalah dengan melakukan terus melaksanakan peningkatan jaringan irigasi yang banyak menyebabkan terjadinya kehilangan air irigasi. Upaya peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasar hasil penyusunan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI). Disamping peningkatan jaringan irigasi juga perlu untuk mempertahankan kondisi jaringan irigasi yang ada. Tujuannya agar dapat memberikan layanan yang baik. Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan pemeliharaan, baik permeliharaan rutin maupun berkala, termasuk selalu melaksanakan kalibrasi terhadap alat ukur pada bangunan ukur debit. Kegiatan operasional dan pemeliharaan rutin dilakukan oleh tenaga harian yang terus ditingkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi tersebut dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pembagian air dan pemeliharaan jaringan pada seluruh daerah irigasi serta memfasilitasi petani dalam meyelesaikan permasalah yang dihadapi setiap saat selama 24 Jam. Upaya peningkatan kompetensi petugas tersebut di atas didukung dengan melengkapi kebutuhan alat dan bahan pendukung operasional dan pemeliharaan berupa kantor pengamatan, alat Pelindung diri (jas hujan, senter, sepatu boots, dll), peralatan kerja (sabit, sekop, angkong, dll).	Peningkatan kapasitas Petugas OP ditujukan untuk memberikan layanan kebutuhan air sesuai dengan Rencana Tata Tanam (RTT) yang telah ditetapkan dan menjaga /meningkatkan kinerja sistem irigasi.
5.	Peningkatan aksesibilitas berupa jalan perlu ditingkatkan hingga tidak ada lagi wilayah/daerah yang terisolir. Terutama untuk wilayah perbatasan DIY dengan Jawa Tengah.	Dalam rangka mendukung peningkatan kelancaran arus kegiatan, keseimbangan aksesibilitas wilayah perbatasan dan mengurangi disparitas wilayah, pada tahun 2019 dilakukan pengembangan jaringan jalan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Prambanan – Gading, serta rintisan Bedah Menoreh. Sedang pada tahun 2020 diusulkan pengembangan aksesibilitas wilayah perbatasan khususnya yang di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan peningkatan jaringan jalan di ruas jalan Semin – Blimbing, ruas Ngalang – Hargomulyo – Watugajah dan ruas Pandanan – Candirejo.	Dalam rangka mendukung peningkatan kelancaran arus kegiatan, keseimbangan aksesibilitas wilayah perbatasan serta antar pusat kegiatan dan mengurangi disparitas wilayah khususnya di daerah – daerah dimana tingkat kemiskinan tinggi, pada tahun 2020 ini dilakukan pengembangan jalan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan progress sampai dengan tahun 2020 ini pelaksanaan pembebasan lahan dan konstruksi Jalur Jalan Lintas Selatan di D.I Yogyakarta dilakukan secara bertahap. Pembebasan lahan selebar 30 m untuk rencana pembangunan jalan 4 lajur sedang dilakukan,dan tahap pertama konstrusi telah dibangun

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			jalan 2 (dua) lajur dengan lebar 7 m. Sampai dengan akhir tahun 2020, dari target pembebasan tanah seluas 3.771.128 M^2 telah dapat dibebaskan seluas 2.898.799 M^2 (76,87%). Sedangkan untuk pembangunan konstruksi jalan, dari target 116,07 km, telah diselesaikan sepanjang 75,89 km (65,38%), dimana 2,6 km diantaranya telah mempunyai lebar 14 m (dari Congot kearah timur 2 km dan dari arah Duwet ke arah barat 0.6 km), sedangkan untuk ruas lainnya masih dengan lebar perkerasan 7 m. Selain itu di Tahun 2020 juga dilaksanakan peningkatan Jalan di Ruas Semin – Blimbing yang merupakan jalan perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Ruas Prambanan – Piyungan. Untuk ruas jalan baru Prambanan – Gayamharjo sedang berproses pembebasan lahan oleh Kab. Sleman. Sedang pada tahun 2021 sudah diusulkan pengembangan aksesibilitas wilayah perbatasan khususnya yang di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan peningkatan jaringan jalan di ruas jalan Pandanan-Candirejo serta peningkatan jembatan di Ruas Ngalang-Hargomulyo. Pada Kabupaten Gunungkidul juga pada tahun 2021 akan dimulai pembangunan ruas Jalan baru Tawang-Ngalang. Sedang untuk Kabupaten Kulon Progo diusulkan penanganan beberapa ruas yang merupakan akses ke wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi yaitu Ruas Tegalsari-Klepu, Klepu-Siluwok dan Sermo-Klepu. Ruas Brosot-Toyan yang juga merupakan akses menuju YIA juga diusulkan untuk ditingkatkan. Di Kabupaten Bantul diusulkan peningkatan jalan di Ruas Dawung- Makam Imogiri yang merupakan akses menuju Kawasan Wisata Makam Raja-raja Imogiri.
6.	Pembinaan, pengawasan secara intensif terhadap pelaku usaha jasa kontruksi serta selektifitas dalam penentuan pihak pelaksana jasa kontruksi dalam melakukan kontrak kerja sehingga diharapkan tidak terjadi lagi adanya hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, keterlambatan dalam	Pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara intensif kepada masyarakat jasa konstruksi, sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu untuk para tenaga ahli sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi yaitu melalui rangkaian fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi. Pada tahun 2020 direncanakan penambahan tenaga ahli	Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi (Sistem Informasi Pengendalian Kontrak Konstruksi) yang harus diupdate berkala oleh PPKom, Perencana, dan Pengawas Pekerjaan.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	penyelesaian serta penyimpangan terhadap peraturan perundangan dalam pengadaan barang dan jasa. Perlu pendampingan dan fasilitasi yang memadai agar hasil dari konstruksi di DIY benar-benar berakar dan mencerminkan identitas budaya Yogyakarta. Hal ini harus dilakukan sejak dalam perencanaan pekerjaan konstruksi.	konstruksi bersertfikat sejumlah 30 Orang, pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk sosialisasi dan/atau rapat koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) sejumlah 40 Orang, dan pendampingan Klinik Konstruksi bagi 40 Orang. Adapun dalam rangka pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi oleh badan usaha konstruksi diselenggarakan layananpengujian konstruksi yang diwujudkan dalam 800 Laporan Hasil Uji (LHU). Adapun pada tahun 2021 penambahan tenaga ahli konstruksi sejumlah 453 orang sehingga jumlah tenaga ahli akan mencapai 1.080 orang dan dalam rangka pengawasan dilakukan layanan pengujian yang diwujudkan dalam 640 LHU (Laporan Hasil Uji), sehingga peningkatan kinerja penyelenggara jasa konstruksi diprediksi dapat mencapai 85,86%	Pengawasan juga dilakukan dalam aspek teknis, melalui penyediaan fasilitas pengujian bahan/material kontruksi yang berstandar dan terakreditasi KAN. Perluasan akses informasi teknis terus dilaksanakan melalui media berbasis web (klinik konstruksi) yang memungkinkan masyarakat/pelaku usaha konstruksi bisa berkonsultasi dan mendapat akses informasi terbaru dari sektor jasa konstruksi. Di sisi lain, upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi terus dilakukan dengan pelatihan teknis baik di jenjang ahli (pelatihan dan sertifikasi) maupun terampil (penyediaan fasilitas mobile training unit untuk pelatihan tenaga terampil bekerja sama dengan Pemda Kab/Kota)

e. Sub Urusan Penataan Ruang

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan penataan ruang perlu dilakukan dengan menjaga implementasi RTRW agar dapat dilaksanakan secara konsisten. dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan sehingga tidaka da penyimpangan terhadap tata ruang baik untuk DIY maupun Kabupaten/Kota. Sinkronisasi sampai pada level Rencana Detai Tata Ruang (RDTR)	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan penataan ruang perlu dilakukan dengan: a. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, dari sisi pengaturan sudah ditindaklanjuti melalui kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi. b. Dari sisi pembinaan, bahwa Perda RTRW DIY telah disosialisakan ke OPD dan masyarakat melalui tatap muka dan media massa. dan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota akan melalui proses rekomendasi Gubernur sebelum dapat diajukan persetujuan substansi ke Menteri ATR/BPN RI. c. Dari sisi pelaksanaan Sudah ada surat pengantar Ketua TKPRD untuk menindaklanjuti indikasi program RTRW untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. d. Dari sisi pengawasan telah dilakukan kegiatan monev dan wastek. e. Semua penyusunan RTR kabupaten/kota akan diberikan rekomendasi Gubernur sebelum dapat diajukan ersetujuan substansi ke pusat	Penataan ruang akan lebih konsisten dan implementatif karena sudah ada sinkronisasi mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, langkah perwujudan ruangnya serta ke depan pengendalian pemanfaatan ruang akan lebih baik.
2.	Mekanisme Insentif dan Disinsentif berkait tata ruang harus dijalankan dengan konsisten.	Saat ini baru disusun kajian/naskah akademik untuk dijadikan usulan rapergub. Tahun 2021 diharapkan pergub Insentif dan Disinsentif sudah dapat ditetapkan.	Adanya kepastian hukum ketika adanya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum berupa

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			peningkatan kualitas hidup dengan membentuk ruang yang layak dan seimbang secara visual, fisik, ekonomi dan sosial
3.	Peningkatan Kinerja Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan harus konsiten dengan Roadmap perencaanaan disertai dengan sosialisasi yang luas.	Telah ditindaklanjuti melalui sosialisasi terhadap satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang tertuang pada Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten.	Pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat sehingga dalam implementasi identitas Keistimewaan dapat terbaca oleh seluruh lapisan masyarakat melalui penyebarluasan informasi (sosialisasi).
4.	Perlunya Revisi Perda No. 10/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan karena adanya ketidaksingkronan pelaksanaan dengan Perda 5/2019 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah DIY terkait dengan kepastian hukum terhadap hubungan hukum antara pemerintah daerah DIY dengan pemerintah kabupaten/kota.	Telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Dinas teknis dan Biro hukum untuk melakukan review Perda No. 10/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sudah ada acuan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019 – 2039 yang sudah melalui proses Persetujuan Menteri sesuai dengan Permen ATR Nomor 8 Tahun 2017. Salah satu evaluasi materi dalam Permen ATR tersebut memuat tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) berdasarkan dari data Kementerian Pertanian RI.	Produk perencanaan tata ruang akan lebih implementatif.

f. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Masih tingginya masyarakat yang tinggal dalam Rumah Tidak Layak Huni di DIY perlu di atasi dengan program yang tidak parsial.	Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni harus dipadukan dengan kegiatan yang meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sebagai sasaran utama perbaikan RTLH. Kemampuan untuk berinventasi terhadap kelayakan tempat tinggal sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat	Telah dilaksanakannya Penanganan RTLH dari berbagai sumber pendanaan baik APBN, APBD DIY, APBD Kab/Kota maupun melalui program CSR di tahun 2020 sejumlah 6.557 unit.
2.	Indikator kinerja sasaran perlu diubah dengan indeks kawasan pemukiman yang lebih luas. Hal ini akan mendorong adanya inovasi dalam penataan kawasan pemukiman terutama di perkotaan. Hal ini berhubungan dengan status tanah dan data lainnya yang tidak sinkron.	Pembuatan skema pemanfaatan kenaikan nilai guna tanah (*land value capture*) untuk meningkatkan pendapatan daerah baik langsung maupun tidak langsung, dari nilai pemanfaatan penguasaan tanah. Skema ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur/kosong, insentif pengembangan hunian vertical, dan kemudahan investasi	Kawasan di perbatasan kab/kota merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi permukiman baru. Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kab/kota merupakan kewenangan provinsi. Pada tahun 2020 dilakukan kajian Perencanaan Studi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota dengan maksud untuk mengkaji calon kasiba, lisiba, dan/atau lisiba BS yang ada di lintas batas untuk mendorong kawasan perumahan yang serasi, seimbang, dan selaras yang dilengkapi dengan PSU. Diharaplan dengan adanya calon kasiba,lisiba,

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			dan/atau lisiba BS ini mampu mendukung perkembangan kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
3.	Harga perumahan semakin mahal sebagai dampak dari mahalnya harga tanah untuk permukiman. Untuk itu Pemda perlu mengupayakan masalah tersebut agar harga perumahan dapat terjangkau.	Memprioritaskan penyediaan hunian baru terjangkau dengan memulai pembentukan BUMD daerah yang mengelola aset PKP atau yang diserahi mandat untuk mengelola kawasan. Pengembangan hunian baru vertikal dikonsentrasikan pada simpul – simpul transportasi melalui Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD – *Transit Oriented Development*) sesuai peraturan tata ruang dan RP3KP DIY	Sebagai tindak lanjut telah tersusunnya Perda DIY no. 9 tahun 2019 tentang RP3KP DIY, maka perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyusunan Pergub sebagai amanat dari Perda. Pada tahun 2020 telah dilakukan penyusunan Pergub tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Pemberian Insentif dan Disinsentif Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diharapkan pergub ini mampu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan PKP sesuai dengan RP3KP DIY

g. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peningkatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk menertibkan pedagang atau warung yang digunakan untuk kumpul remaja pada jam sekolah atau pada malam hari.	Tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD DIY terkait penanganan aksi klithih, Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan beberapa kegiatan yaitu: a. Melalui perubahan anggaran Tahun 2020 telah dilakukan Operasi Yustisi minumam beralkohol karena keberanian aksi klithih ternyata salah satu penyebabnya adalah minuman beralkohol. Selain itu, juga akan melakukan Operasi Non Yustisi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. b. Rencana pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021 telah dilakukan operasi tertib pendidikan ke sekolah-sekolah,patroli malam, operasi minuman beralkohol, dan operasi anjal gepeng.	Untuk menekan adanya aksi klitih karena ternyata aksi klitih di bawah pengaruh minuman berakohol
2.	Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan membangun ketahanan warga berbasis keluarga melalui program Kampung Tertib atau Dusun Tertib dan Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT).	Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja DIY telah membentuk Kader Penegak Perda dan Perkada di Desa sebanyak 5 (lima) Kader yang berfungsi untuk membantu melakukan penegakan Perda dan Perkada di wilayah desanya masing-masing. Untuk Tahun 2021 melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pelanggaran Perda dan Perkada, termasuk juga untuk menangani aksi klithih. Kalau di Kota Yogyakarta, namanya Kader Panca Tertib. Tetapi kalau di Kabupaten se DIY namanya Kader Penegar Perda dan Perkada.	Melakukan percepatan penanganan perda dan perkada karena melalui kader penegak perda masyarakat secara langsung diperingatkan dan diberikan sanksi sosial oleh kader penegak perda dan perkada

h. Urusan Pangan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya memproduksi dan mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi, advokasi, dan promosi terus menerus, sampai ke tingkat RT dan menyasar lembaga pendidikan dasar dan menengah. Selain itu perlunya optimalisasi pemanfaatan pekarangan baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun pedesaan untuk pemenuhan gizi keluarga. Dengan pemanfaatan lahan pekarangan tentunya dapat mengurangi pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sehingga kesejahteraan rumah tangga akan pangan semakin meningkat	1) Kampanye penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) sudah dilaksanakan di 18 lokasi dari rencana pelaksanaan di 30 lokasi dengan menggunakan dana APBD, kampanye penganekaragaman konsumsi pangan lokal di 16 lokasi dan bimtek budidaya hortikultura di lahan pekarangan di 16 lokasi dengan menggunakan dana BTT, serta sosialisasi produk pangan lokal yang menggunakan Danais. Kampanye dan sosialisasi ini bertujuan: • Mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. • Meningkatkan ketrampilan masyarakat akan pengolahan pangan lokal dengan diadakannya praktek pengolahan pangan lokal. • Sebagai promosi pangan lokal di masyarakat. 2) Rencana kegiatan ke depan: • Sosialisasi, gerakan, bimtek di 4 kabupaten dan 1 kota sebanyak 78 kali dengan melibatkan praktisi dan akademisi • Budidaya hortikultura di lahan pekarangan: 25 lokasi	1) Peningkatan dan penganekaragaman produksi pangan melalui budidaya di lahan pekarangan 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan penganekaragaman konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dengan mengurangi konsumsi beras dan terigu serta meningkatkan konsumsi umbi-umbian untuk mencapai skor ideal konsumsi dan memenuhi kebutuhan energi sesuai angka anjuran.
2.	Program dan kegiatan pengentasan Desa Rawan Pangan perlu lebih dioptimalkan. Terbukti dengan masih adanya 3 Desa Rawan Pangan DIY. Adanya Desa Rawan Pangan disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas, terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan pangan karena faktor kemiskinan, kondisi geografis, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Penyelesaian terhadap berbagai penyebab di atas harus segera dilakukan secara tuntas, dan mestinya menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Adalah sesuatu yang salah apabila di wilayah DIY yang relatif kecil dan mudah dijangkau, namun masih terdapat masalah aksesibilitas dan kesulitan mengatasi kondisi geografis. Mereka yang masih tergolong miskin dan rentan hendaknya dapat diberi perhatian khusus dengan mengalokasikan cadangan pangan yang tersedia sehingga angka kemiskinan dapat	1) Sampai dengan tahun 2020 masih ada 4 Desa Rawan Pangan di DIY. Hal ini menjadi tugas dan permasalahan yang harus diselesaikan secara tuntas, melibatkan peran serta lintas sektor, dan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY. Target akhir RPJMD tahun 2022 sudah tidak ada lagi Desa Rawan Pangan di DIY. Target ini akan dicapai melalui berbagai upaya, antara lain melalui Desa Mandiri Pangan (Demapan) dan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM). Desa Mandiri Pangan ditujukan untuk mengatasi kerawanan pangan dan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi produktif. Masyarakat di desa rawan pangan difasilitasi dengan hibah dan pendampingan usaha sesuai potensi wilayahnya. Hibah yang diberikan akan dimanfaatkan untuk usaha produktif baik di bidang pangan maupun non pangan, diharapkan dapat menambah pendapatan sehingga kesejahteraan masyarakat	Pengurangan tingkat kemiskinan di masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan pengentasan desa rawan pangan melalui kerjasama lintas sektor dan juga dengan dukungan dana desa

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	ditekan untuk tidak berada pada level di atas angka kemiskinan nasional. Selain itu, perlu mendorong dana desa untuk pengentasan desa rawan pangan yang ada di DIY.	meningkat. Pendampingan pasca penyaluran hibah dilaksanakan melalui berbagai bimtek dan pelatihan untuk menambah keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha produktif. Tahun 2020, hibah Demapan diberikan untuk 5 desa, yang meliputi 3 desa lama (tahap pengembangan) dan 2 desa baru (tahap penumbuhan). (2) Masalah aksesibilitas juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya Desa Rawan Pangan. Untuk mendekatkan pangan ke masyarakat dengan harga terjangkau, dilaksanakan kegiatan LAPM (Lembaga Akses Pangan Masyarakat). Kegiatan di tahun 2020 dilakukan melalui pemberian hibah uang kepada 2 gapoktan untuk dimanfaatkan sebagai modal pendirian warung/toko bahan pokok. Sasaran kegiatan ini adalah gapoktan yang mampu mengelola pembelian, pengelolaan dan penjualan bahan pangan. Nantinya gapoktan akan mengelola warung/toko dan menjual sembako ke masyarakat dengan harga lebih rendah atau minimal sama dengan harga pasar. Dengan adanya warung/toko ini diharapkan dapat mendekatkan masyarakat dengan bahan pokok sehingga aksesibilitas pangan masyarakat meningkat. (3) Dari aspek cadangan pangan, pada tahun 2020 Pemerintah Daerah DIY telah menambah jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 60 ton. (4) Rencana ke depan: kegiatan Demapan 6 desa, LAPM 2 gapoktan, Pengembangan Korporasi Usahatani, Distribusi Pangan dan Penguatan Lumbung Pangan. Sedangkan pengadaan CPPD tidak dilakukan karena pengadaan di tahun 2020 sudah cukup banyak. Biasanya hanya sekitar 10-25 ton per tahun namun dengan adanya kebijakan dari Pusat untuk penguatan cadangan pangan di daerah dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dan adanya alokasi DID tambahan untuk DIY yang dapat dimanfaatkan untuk menambah jumlah CPPD menyebabkan pengadaan CPPD 2020 menjadi jauh lebih banyak dibanding kondisi normal.	
3.	Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) perlu meningkatkan kerjanya dengan semakin memperluas wilayah pengawasan produksi dan peredaran pangan. Masih banyak produksi pangan yang beredar di	1) Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat lingkup DIY, sudah diterbitkan Perda No.2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan serta Pergub No. 22 tahun 2016 tentang	Optimasi kinerja Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	masyarakat yang tidak terjamin mutu dan keamanannya. Diperlukan sebuah peraturan, baik perda atau pergub agar lebih tegas bertindak.	Pedoman Penjaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Berdasarkan Perda dan Pergub tersebut, semua ketentuan mulai diberlakukan 5 tahun sejak diundangkan, sehingga sejak tahun 2019 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melalui lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) DIY melakukan pengawasan keamanan pangan pre-market dalam bentuk sertifikasi dan registrasi produk PSAT yang diproduksi dan dikemas oleh petani/pelaku usaha tani di wilayah DIY, serta melalui Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dilakukan juga pengawasan keamanan pangan *post-market* melalui pengambilan dan pengujian sampel pangan segar yang beredar di pasar tradisional dan retail modern yang dilakukan rutin setiap bulan melakukan pemantauan. Selain itu DPKP DIY juga bekerja sama dengan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) yang beranggotakan lintas SKPD yang membidangi pengawasan keamanan pangan untuk melakukan pengawasan insidentil bersama-sama saat terjadi kasus atau KLB (kejadian luar biasa) terkait keamanan pangan di wilayah DIY. 2) Ke depan akan disusun Peraturan Gubernur tentang JKPD sebagai landasan hukum.	

i. Urusan Tenaga Kerja

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	DPRD DIY mendorong agar jumlah TPT terus dapat diturunkan dengan meningkatkan berbagai upaya memberi akses kepada Angkatan kerja yang ada baik dalam bentuk pelatihan, bursa tenaga kerja maupun usaha-usaha lainnya.	Pada tahun 2021 akan dilakukan: a. Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan institusional/klasikal, pemagangan dan sertifikasi uji kompetensi. b. Perluasan kesempatan kerja, sektor informal melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan Pelatihan Mobile Trainning Unit (MTU), sektor formal melalui pelaksanaan job fair untuk penempatan local (DIY) dan penempatan antar daerah.	1. Menyiapkan angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 2. Dengan terbatasnya kesempatan kerja formal sebagai dampak pandemi Covid-19, maka dilakukan Pembukaan Kesempatan Kerja di sektor informal.
2.	Berdasarkan data Angkatan kerja yang masih berstatus penganggur di peroleh data bahwa yang berpendidikan SMA dan SMK mencapai 49.96% dan yang	Akan dilakukan rapat koordinasi dengan stakeholder provinsi dan Kab./kota termasuk	Memperbaiki karakter angkatan kerja agar memiliki daya juang dan kompetitif untuk

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	berpendidikan tinggi diploma dan universitas mencapai 24.37%. Dengan profil demikian, potensi Angkatan kerja DIY semestinya punya kulitas yang bias bersaing dengan daerah lainnya. Adanya pendapat yang mengatakan bahwa Angkatan kerja DIY tidak berminat untuk kerja diluar DIY perlu cek kebenarannya. Jika benar demikian perlu dicarikan jalan keluarnya, mengingat bahwa kesempatan kerja di DIY terbatas.	lembaga penempatan dalam dan luar negeri serta *Sending Organitation* (SO) guna mengetahui sejauhmana minat angkatan kerja untuk bekerja keluar negeri.	bersaing di pasar nasional dan global, melalui Penyusunan Grand Design Pembangunan Karakter Angkatan Kerja dan sosialisasi kepada masyarakat secara bertahap

j. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Mengupayakan agar data kependudukan menjadi data tunggal yang terintegrasi dengan berbagai instansi seperti data kemiskinan sehingga dengan menyebut NIK pemangku kebijakan sudah mengetahui status dalam NIK tersebut miskin atau tidak.	Data kemiskinan merupakan salah satu data sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam membangun data sektoral, termasuk data kemiskinan, kini seluruh OPD telah memahami bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai produk kebijakan nasional bidang administrasi kependudukan merupakan elemen data yang wajib tercantum. Dampak positif dari keberadaan NIK di data sektoral adalah kemudahan proses *updating* data melalui mekanisme penyandingan dan integrasi dengan database kependudukan. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai pengelola database kependudukan membuka akses seluas-luasnya kepada OPD yang memerlukan data penduduk *by NIK by name by address* untuk pembangunan dan updating data sektoral. Adapun mekanisme akses data penduduk bisa dilakukan melalui integrasi *database*, penyandingan data, dan *view access only*. Sampai saat ini, OPD yang telah memanfaatkan database kependudukan sebagai sumber basis data sektoral adalah Dinas Sosial DIY, Disperindag DIY, Dinas Kominfo DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY, serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY.	Data kependudukan dimanfaatkan sebagai sumber basis data untuk verifikasi data penerima bansos penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dan domisili pasien Covid-19. Selain itu data kependudukan juga digunakan untuk menetapkan zonasi sekolah berdasarkan domisili siswa di dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/SMK/sederajat yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY.
2.	Membuat program yang melindungi data digital kependukan aman dari gangguan hacker	Gangguan atas keamanan data merupakan risiko yang harus dihadapi oleh pengelola data, termasuk data kependudukan. Risiko gangguan tersebut semakin besar ketika database terkoneksi dengan jaringan komunikasi data. Untuk mengurangi potensi tindak peretasan data kependudukan, beberapa kebijakan teknis telah dilakukan antara lain, menggunakan jaringan tertutup untuk akses data oleh OPD dan lembaga pengguna, melakukan pembaruan *firewall* secara berkala untuk meningkatkan standar keamanan, dan melakukan pembaruan versi bahasa pemrograman secara bertahap terhadap aplikasi terpasang.	Topologi jaringan komunikasi data dialihkan menjadi jaringan tertutup. OPD/lembaga pengguna yang mengakses data kependudukan harus menggunakan jaringan privat yang terhubung dengan jaringan Dinas Kominfo DIY. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi tindak peretasan data.

k. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Membangun kesamaan pandang antar stake holder desa agar kemiskinan menjadi prioritas yang harus ditangani desa. Untuk itu dapat dilakukan dengan bekerja sama Perusahaan Swasta atau Perguruan Tinggi.	Pemerintah Daerah DIY mendorong perkembangan perekonomian desa melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka menambah wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan keahlihan masyarakat dengan melibatkan banyak stake holder: Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan, pelaku ekonomi lokal, perguruan tinggi.	Masyarakat desa /kelurahan sebagai lokus pelaksanaan pelatihan segoro amarto dapat meningkatkan pengetahuan ,ketrampilan dan keahlian dalam mengolah produk produk unggulan dan meningkatkan strategi pemasaran produk sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa dengan keterlibatan dari banyak stake holder
2.	Membuat RPJMDes dan RPJPDes dalam aksi penanggulangan kemiskinan	Mendorong peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk menyalurkan aspirasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musdes/Muskel	Rencana aksi penanganan kemiskinan terumuskan dalam agenda Musdes Muskel
3.	Menjadikan BUMDes sebagai sarana untuk meningkatkan Kesejahteraan warga	Peran dan fungsi BUMDes adalah membantu meningkatkan perekonomian desa melalui usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja bagi pengelola BUMDes	Pengelola Bumdes dapat meningkat kapasitasnya sehingga Bumdes sebagai lembaga ekonomi desa dapat berkembang.
		Pada Tahun 2020 ini, bentuk fasilitasi pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan antara lain:	Pelatihan dilakukan di 5 lokasi bumdes masing masing sebanyak 25 orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa, BPD, tokoh masyarakat, pendamping desa dan tenaga ahli bidang ekonomi.
		· Sosialisasi kebijakan;	
		· Pelatihan tentang manajemen pengelolaan BUMDes; dan	
		· Pelatihan tentang *Business Plan*	
4.	Peningkatan SDM *stakeholder* yang terlibat dalam program penangulangan kemiskinan.	Dilakukan pelatihan dan pendampingan pelaku usaha dan pelaku ekonomi desa/kelurahan serta lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya dalam rangka penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat	Pelaku usaha ekonomi desa mampu mengembangkan produk produk unggulan didesa serta memasarkan produknya melalui pelatihan dan pendampingan segoro amarto
			Pengelola Bumbes mampu mengelola Bumdes dengan lebih baik melalui pelatihan Bumdes sebanyak 5 lokasi bumdes masing masing sebanyak 25 orang erdiri dari unsur perangkat desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa, BPD, tokoh masyarakat, pendamping desa dan tenaga ahli bidang ekonomi.

l. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Adanya kebijakan dalam rekrutmen penyelenggara pemilu dengan surat sehat yang menjelaskan tidak memiliki penyakit kronis	Terkait dengan adanya korban meninggal penyelenggara pemilu pada saat rekapitulasi pemilu 2019 yang membuat masyarakat prihatin dan memunculkan syak wasangka yang kurang baik, Badan Kesbangpol DIY akan berkomunikasi dengan KPU DIY untuk	Adanya kebijakan dalam rekrutmen penyelenggara pemilu melalui adanya surat sehat.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	atau penyakit yang bisa berdampak buruk apabila mengalami kelelahan dan stress dan adanya batasan usia (non lansia).	memberikan kebijakan dalam rekrutmen penyelenggara pemilu berupa penyerahan surat sehat yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki penyakit kronis atau penyakit yang bisa berdampak buruk apabila mengalami kelelahan dan stress dan adanya batasan usia.	
2.	Lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan mencegah dan mengurangi peredaran gelap napza dalam bentuk konkrit di lapangan, misal fasilitasi kelompok masyarakat yang peduli dan komitmen pada upaya tersebut.	Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan mencegah dan mengurangi peredaran gelap Napza, Badan Kesbangpol DIY bersama dengan Forum P4GN DIY selalu melakukan sinergi secara aktif, disertai dengan pelaksanaan kegiatan rapat kerja dan workshop yang melibatkan beragam elemen terkait, termasuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap komitmen dan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di DIY.	Partisipasi masyarakat dalam gerakan mencegah dan mengurangi peredaran gelap napza mulai mengalami peningkatan dengan kemunculan Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada upaya P4GN.
3.	Membumikan Pancasila melalui gerakan dan suri tauladan.	Upaya membumikan Pancasila melalui gerakan dan suri tauladan, khususnya pada generasi muda juga dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol DIY melalui kegiatan Sinau Pancasila yang berupaya membangun pemahaman perwakilan generasi muda milenial akan arti ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan target sebanyak 18 (delapan belas) kelompok dalam tahun anggaran 2020 ini (target awal 78 kelompok, namun direvisi karena adanya pandemi Covid-19). Pada tahun anggaran 2021, kegiatan Seminar Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan dilaksanakan setidaknya di 78 (tujuh puluh delapan) lokasi se-DIY.	Telah dilakukan kegiatan Sinau Pancasila bagi 18 (delapan belas) kelompok selama tahun 2020, dari target 78 (tujuh puluh delapan) kelompok yang belum bisa secara maksimal dilakukan karena terkendala pandemi Covid-19.

m. Pendidikan dan Pelatihan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan secara berjenjang. Tujuan penjenjangan selain untuk meningkatkan pengetahuan dan promosi jabatan juga punya tujuan lain yaitu para ASN mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan yang selalu berkembang.	Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan. Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menjadi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketugasan yang diberikan tersebut, setiap tahun Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan bentuk-bentuk Pendidikan dan Pelatihan untuk aparatur, baik Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, maupun Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas), Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Pelatihan Kepemimpinan Administrator). Pada tahun 2019 Badan Pendidikan dan Pelatihan telah berhasil menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II) melalui pola	Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan dalam rangka persyaratan promosi jabatan, tetapi juga menyasar pada kompetensi yang dibutuhkan didalam menjalankan tugas jabatan. Salah satunya dengan reviu kurikulum untuk menyikapi perkembangan kebutuhan kompetensi jabatan.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		pendampingan dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, pada tahun 2020 telah diselenggarakan kembali dalam bentuk pendampingan dengan LAN RI sebelum kemudian bisa menyelenggarakan secara mandiri pada tahun 2021. Terkait dengan pengembangan kapasitas SDM tenaga kediklatan, untuk mengakomodir perkembangan yang ada. Bandiklat DIY telah menyelenggarakan Diklat *Training Officer Course* (TOC). Diklat *Management of Training* (MoT) baik dengan menyelenggarakan sendiri maupun melalui skema pengiriman, dan untuk peningkatan kapasitas tenaga pengajar/Widyaiswara pada tahun 2020 dilaksanakan melalui diklat ToF/Workshop pengajar/penyelenggara untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas). Selain itu secara rutin juga direncanakan pengiriman Widyaiswara untuk mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pengajar.	

n. Sub Urusan Kepegawaian

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Perlu meningkatan kualitas SDM tenaga teknis, pemberian jaminan kesehatan dan Jamkesos (kecelakaan kerja, Kematian, Tuinjangan Hari Tua, Pensiun) hal ini sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.	Pemenuhan Tenaga Teknis untuk mengisi kekurangan ASN di tahun 2020 telah dilakukan dengan Rekrutmen Tenaga Bantu sebanyak 3600 orang. Tenaga Bantu tersebut dikelola berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019 dengan diberikan hak-hak sebagai berikut: 1. Gaji setara PNS; 2. Cuti; 3. BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan; 4. Tunjangan lain; 5. Pengembangan Kompetensi; 6. Tugas tambahan lain.	Perlu meningkatan kualitas SDM tenaga teknis, pemberian jaminan kesehatan dan Jamkesos (kecelakaan kerja, Kematian, Tunjangan Hari Tua, Pensiun) hal ini sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Untuk pegawai. Peningkatan kualitas ASN dilakukan dengan Pengiriman Pegawai tugas belajar maupun ijin belajar S1, S2 dan S3 untuk meningkatkan kemampuan pendidikannya, dan pengiriman pegawai dalam diklat baik struktural, fungsional maupun teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi. ASN yang ada diikutkan dalam JKK, JKM dan memperoleh THT (seperti dalam rincian gaji yang ada) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

o. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Perlu adanya informasi Publik yang meluruskan hoak sekaligus memberikan informasi tentang perkembangan pembangunan yang mengedukasi masyarakat yang dibuat secara digital di berbagai media informasi yang ada termasuk melalui media mosial.	1. Sosialisasi dengan topik Jogja Bijak Bermedia Sosial kepada masyarakat DIY untuk memberikan edukasi tentang bahaya atau risiko hukum dari penyebaran berita hoaks. 2. Kegiatan talkshow, penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di televisi dan radio dengan tujuan mengedukasi kepada masyarakat agar berhati-hati menyebarluaskan berita hoaks, karena dampaknya bisa berurusan dengan aparat penegak hukum dan bisa berakhir dipenjara. 3. Forum Komunikasi dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang komunikasi sosial, pakar media sosial, pakar hukum, dengan peserta segenap lapisan masyarakat termasuk kaum difabel dengan tema informasi terkini termasuk memberikan pemahaman agar masyarakat tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar (Hoaks). 4. Forum Media Sosial yang menyasar pada hoaks hunter dan penekanan pada konten-konten yang positif dan bekerjasama dengan rekan-rekan buzzer media sosial Jogja. 5. Sosialisasi melalui Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-DIY, dengan topik peran serta PPID dalam pencegahan penyebaran berita Hoaks.	1. Dengan diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Jogja Bijak Bermedia Sosial ke masyarakat khususnya DIY maka masyarakat akan lebih memahami dan memberikan pengetahuan terkait penggunaan media sosial secara positif dan meminimalisir penyebaran berita hoax sebab selama ini banyak berita hoax yang sumber informasi tidak jelas. 2. Kegiatan melalui Talkshow dan ILM di Televisi dan Radio sangat bermanfaat untuk membantu menyebaran informasi ke masyarakat DIY supaya masyarakat bisa melihat dan mendengar secara langsung berita-berita terkini. 3. Dilaksanakan kegiatan forum komunikasi di berbagai wilayah kabupaten/kota dengan berbagai peserta dengan tujuan untuk memberikan edukasi informasi ke masyarakat luas agar tidak mudah terpengaruh berita informasi yang tidak jelas sumbernya dan masyarakat bisa memilih dan memilah berita-berita mana yang baik dan tidak baik. 4. Kegiatan Forum Media Sosial dengan menggandeng mitra kerja rekan-rekan buzzer media sosial jogja (contoh Masdjo, Paijo, ICJ, Genpi, Admin Plat Merah dan sebagainya) ini sangat bermanfaat untuk membantu menyebarluaskan informasi dan konten-konten produk Diskominfo DIY dan produk Pemda DIY supaya informasi tersebut dengan mudah dan cepat diketahui oleh masyarakat DIY. 5. Kegiatan Sosialisasi melalui Forum PPID se-DIY dilaksanakan untuk berkolaborasi kegiatan dengan PPID Kabupaten/Kota dalam penyebaran informasi yang ada di wilayah masing-masing sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan informasi.
2.	Disetiap Kabupaten/kota telah dikembangkan smart city, sekarang bagaimana cara mengintegrasikan	Dalam kerangka *Jogja Smart Province*, inisiasi pengembangan Smart City untuk Kab/Kota di DIY, difasilitasi melalui 5 (lima) dimensi Jogja Smart Province yaitu *Smart Government, Smart Culture, Smart Environment, Smart*	Kolaborasi antar stakeholder dan antar wilayah dengan memanfaatkan TIK semakin menemukan perwujudannya dalam masa pandemi covid19. Meskipun dalam hal ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang telah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	berbagai layanan digital kabupaten kota dalam satu sentuhan di Pemda DIY.	*Living* dan *Smart Society*. Untuk orkhestrasi layanan publik, didukung oleh 3 (tiga) aspek perubahan yaitu struktur, infrastruktur dan suprastruktur. Beberapa inisiasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 adalah: 4. Forum Kominfo se-DIY, yang menghasilkan kesepakatan mendukung pengembangan Jogja Smart Province sesuai konsep Smart City masing-masing Kota/Kabupaten. 5. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Kab/kota se-DIY sebagai bentuk komitmen bersama pengembangan Jogja Smart Province dan Smart City. Penandatangan PKS ini merupakan salah satu poin tindak lanjut dari Forum Kominfo DIY. 6. Penyusunan Dokumen E-Government Interoperability Framework yang merupakan dokumen kerangka kerja interoperabilitas sistem untuk pertukaran dari berbagi data di sektor pemerintahan. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya sepenuhnya ditujukan untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, baik saat ini ataupun di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Pengembangan e-GIF ini diharapkan akan mampu menuwujudkan interoperabilitas sinergi antar aplikasi serta dapat mengatur sisi teknis dan non-teknis pengembangan dan penggunaan aplikasi kepemerintahan di wilayah Pemerintah DIY dan Kabupaten/Kota di DIY. Dengan adanya E-Government Interoberability Framework (e-GIF) diharapkan terwujudnya interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah DIY dan Kab/Kota, tersedianya kamus data sistem informasi di lingkungan Pemerintah DIY dan tersedianya framework interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah DIY dan Kab/Kota. Berbagai layanan kolaboratif dan integratif semasa pandemi Covid-19 di tahun 2020, diantaranya adalah pemanfaatan aplikasi JogjaPass di pabrik dan layanan public (wisata, transportasi, penyedia jasa akomodasi) yang tersebar di Kab/Kota se DIY, kemudian aplikasi *CMS (Corona Monitoring System) dan DSS (Disaster Support System)* untuk pengolahan data penerima bansos, dan pembangunan JogjaCenter yang berfungsi sebagai data warehouse dan fasilitasi *virtual meeting*. Dalam konsepsi kolaborasi pemanfaatan jaringan internet, telah diselesaikan pembangunan jaringan internet ke seluruh desa dan SMK se DIY. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap Kab/Kota untuk	direncanakan sebelumnya hanya beberapa yang bisa dilaksanakan, namun situasi dan kondisi pandemi justru mendorong menguatnya kesadaran antar stakeholder dan antar wilayah di DIY untuk memperkuat layanan TIKnya.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		dikembangkan menjangkau kedalam lingkup wilayah terkecil, misalnya dari kantor kelurahan/kantor desa ke balai RW, RT dan sebagainya. Dalam rangka mengintegrasikan berbagai layanan digital kabupaten kota dalam satu sentuhan di Pemda DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, melaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindak lanjut, diantaranya: 6. Melaksanakan Forum Komunikasi Kominfo se-DIY pada bulan Februari 2020. Forum ini merupakan wadah komunikasi dan sharing antara Kominfo DIY dengan Kominfo Kabupaten/Kota se DIY terkait integrasi dan pemanfaatan bersama data Sistem Informasi Desa di DIY. Dengan adanya kolaborasi data bersama Kabupaten/Kota, DIY bisa memanfaatkan data yang komprehensif sebagai modal perencanaan pembangunan. 7. Melaksanakan sosialisasi Program Jogja *Smart Province* melalui media cetak, radio televisi, serta loyalty campaign untuk memberikan informasi kepada masyarakat DIY dan stakeholder pentahelix dalam mendukung upaya perwujudan Jogja Smart Province. 8. Membangun gudang data penanganan Covid-19 di DIY yang berisi data dari seluruh Kabupaten/Kota se-DIY. Untuk tahap pertama kolaborasi data dilaksanakan untuk sektor kesehatan dan sosial. 9. Menyiapkan draft Pergub E-Gif sebagai payung hukum operasionalisasi kerangka kerja interoperabilitas di DIY. 10. Melaksanakan Pagelaran TIK dengan memberikan fasilitasi kepada kab/kota dan pelaku TIK DIY, untuk mempromosikan dan mensosialisasikan layanan publik, produk TIK serta produk *digital creative* lainnya.	

p. Urusan Persandian

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peningkatan SDM persandian	Peningkatan SDM internal Pemda DIY untuk pengelolaan keamanan informasi dan persandian dilakukan dengan mengikuti beberapa training dari BSSN diantaranya dengan: 1. *ASEAN-JAPAN Cyber Security Drill Test* yang merupakan drill test kerjasama pengamanan siber antara BSSN dengan Badan Keamanan Siber Asia Pacific.	1. *ASEAN-JAPAN Cyber Security Drill* Test yang merupakan drill test kerjasama pengamanan siber antara BSSN dengan *Badan Keamanan Siber Asia Pacific* dilaksanakan pada Bulan Februari 2020 2. Workshop Pembentukan dan Pengelolaan *CSIRT (Cyber Security Incident Response Team)* dari BSSN untuk membekali Tim CSIRT 3. Direncanakan pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis BSSN (ECIH dan Threat Hunting) namun dibatalkan karena Pandemi Covid-19.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		2. Workshop Pembentukan CSIRT *(Cyber Security Incident Response Team)* dari BSSN untuk membekali Tim CSIRT (Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber) 3. Mengikuti Diklat Pengamanan Siber di BSSN dari staf dan pimpinan Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. 4. Penambahan SDM pengamanan Siber melalui CPNS tahun Anggaran 2020 untuk memperkuat pengamanan siber di Pemda DIY	4. Pada Bulan Desember 2020 mendapatkan tambahan personil CPNS sejumlah 3 orang. Seksi Keamanan Informasi = 2 orang, Seksi Persandian = 1 orang

q. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada penangkapan ikan di laut sangat ditentukan oleh cuaca, biaya tinggi dalam melaut karena kesulitan terhadap akses BBM, regulasi perijinan kapal dan infrastruktur yang ada. Dibutuhkan pelabuhan yang komprehensif dalam pengelolaan urusan perikanan khususnya perikanan tangkap. Pelabuhan Tanjung Adikarto perlu didorong terus agar proses breakwater segera bisa terealiasasi sehingga dapat membantu dalam peningkatan perikanan tangkap, serta perijinan kapal yang dipermudah, adanya insentif bahan bakar yang digunakan nelayan untuk melaut.	Sebagian besar nelayan DIY bukan merupakan nelayan asli/murni, tetapi berasal dari profesi lain seperti petani, buruh, dan profesi lain yg jauh dari dunia perikanan tangkap, tetapi kemudian beralih menjadi nelayan. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap karakter/mental dan kemampuan nelayan DIY. Sebagian besar nelayan DIY adalah nelayan PMT (Perahu Motor Tempel) yang terbiasa dengan one day fishing (1 hari). Untuk merubah pola melaut menjadi 5-7 hari (kapal sekoci ukuran 5-15GT) membutuhkan waktu yang panjang, mental yang kuat dan modal yang banyak/besar. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan perubahan mindset nelayan dan mencari kader-kader nelayan/regenerasi nelayan adalah: 1. Bimtek kaderisasi nelayan: mengenalkan kegiatan usaha perikanan tangkap sekaligus mencari bakal calon nelayan yang mampu untuk bisa mengoperasionalkan armada penangkapan ikan tingkat dasar PMT. 2. Magang nelayan. Magang nelayan merupakan proses yang panjang untuk regenerasi nelayan, peningkatan kemampuan usaha untuk mengoperasikan kapal yang lebih besar. Tahapannya dimulai dengan kegiatan kaderisasi nelayan **Terkait BBM:** Upaya yang dilakukan yaitu berkoordinasi dan mendorong Kab. Gunungkidul untuk membentuk sub penyalur BBM di PPP Sadeng, karena kebutuhan BBM di PPP Sadeng perhari masih di bawah 8 kilo liter sehingga paling efektif adalah dalam bentuk Sub Penyalur. Hal ini juga	1. Kuantitas dan kualitas nelayan DIY masih rendah menyebabkan rendahnya produksi perikanan tangkap 2. Belum beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, yang diperkirakan akan mampu menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap di DIY 3. Perijinan kapal masih terkendala surat rekomendasi pas kecil dan pas besar yang kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cilacap 4. Belum beroperasinya sub penyalur Bahan Bakar Minyak di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		sudah ditindaklanjuti oleh kemenkomaritim yang mengadakan rapat koordiansi dengan pihak yang terkait seperti pertamina, nelayan, kabupaten dan HNSI. Terkait insentif bahan bakar yang digunakan nelayan untuk melaut sedang diupayakan. **Terkait Perijinan:** Perijinan yang masih perlu diperhatikan adalah perijinan kapal-kapal di atas 30 GT, yang merupakan kewenangan pusat. Dari 7 km belum ada yang memiliki ijin penangkapan ikan. Hal ini disebabkan keengganan pemilik kapal memenuhi persyaratan pengajuan ijin dengan berbagai alasan. Oleh karena itu diadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan perijinan kapal ikan, baik itu ditahun 2020 maupun tahun 2021 dilakukan pendampingan terkait perijinan. Yang merupakan kewenangan provinsi adalah kapal 5-30 GT. Progress penyelesaian pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto yaitu dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang telah diinisiasi oleh Tim Percepatan bersama Bappenas. Surat permohonan penyatuan aset sudah dilayangkan ke BBWSO, Kab Kulon progo dan kementrian perhubungan. Aternatif penyelesaian juga dilakukan lewat pendanaan APBN melalui koordinasi Kemenkomaritim dan Kemenkopolhukam dengan meyelenggarakan rapat koordinasi dengan BBWSSO Kemen PUPR, Kementrian perhubungan dan KKP.	
2.	Perlunya mendorong pemasaran garam dengan pemberijian ijin garam rakyat serta pendampingan kepada petani dalam hal pengemasan yang menarik. Pendampingan pemasaran melalui media daring dan menjalin sinergi dengan BUMN PT Garam Indonesia perlu dilakukan oleh OPD yang terkait.	Produksi garam di DIY dapat dikatakan bagus karena selain mutu garamnya kualitas tinggi metode pembuatannya pun sangat efektif. Namun demikian untuk memasarkan masih terkendala diproses perijinan yaitu ijin edar. Pada tahun 2019 diadakan kegiatan Bimtek Usaha Garam, diharapkan para pembuat garan dapat meningkatkan kualitas produksinya yang berstandar SNI. Masalah perijinan garam ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimana UKM yang sudah maju diharapkan dapat memasarkan garam dengan perijinan yang lengkap. Telah disusun road map garam dan Pendampingan pemasaran melalui media daring serta menjalin sinergi dengan BUMN PT Garam.	Produksi garam masih skala kecil dan belum lengkap perijinannya sehingga Pemasaran garam masih belum optimal
3.	Rendahnya PDRB sektor perikanan disebabkan karena tingginya biaya produksi akibat terus meningkatnya harga pakan ikan. Mahalnya operasional melaut menjadi faktor yang menyebabkan menurunnya pendapatan nelayan dan pembudaya perikanan. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka OPD terkait diminta untuk bersungguh-sungguh	Sudah dirintis Pakan Mandiri dengan bahan baku murah. Telah dilakukan kegiatan sarasehan pakan mandiri, untuk subsitusi pakan bagi pembudidaya. Kegiatan yang terkait dengan benih ikan berkualitas yang dilakukan di 2020 dan 2021 antara lain: 1. Sosialisasi dan pelatihan MPM manajer pengendali mutu benih	1. Pemasaran hasil budidaya pada awal pandemi terkendala karena permintaan Hotel, Restoran dan Katering tutup. Namun dengan inovasi pemasaran melalui media daring dan jejaring bisa di atasi. Selain itu juga ada memasukkan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	memberikan solusi, baik masalah pakan maupun bibit ikan, insentif bagi nelayan. Para pembudidaya difasilitasi secara optimal untuk dapat membuat pakan sendiri dari bahan baku lokal yang murah dan terjangkau. Demikian juga untuk masalah bibit ikan yang berkualitas baik, diupayakan agar dapat dilakukan di wilayah DIY. Guna meningkatkan produksi ikan tangkap, para nelayan perlu terus diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Termasuk kemampuan untuk mengelola dan mengoperasikan kapal-kapal ikan besar serta membantu kemudahan dalam perijinan kapal.	2. Memberikan bantuan induk 3. Melakukan audit CPIB berkala 4. Mengoptimalkan peran UPTD Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (UPTD BPTPB) untuk menghasilkan benih dan calon induk serta induk unggul yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Para pembudidaya sudah difasilitasi secara optimal untuk dapat membuat pakan sendiri dari bahan baku lokal yang murah dan terjangkau dengan bantuan mesin pellet, pelatihan dan sarasehan pakan mandiri untuk mengoptimalkan produksinya. Sampai saat ini sudah banyak yang dapat membuat pakan mandiri walaupun kapasitasnya masih untuk konsumsi kelompok tersebut. Bahan pakan mandiri sudah bekerjasama dengan CSR Hotel dan restoran sehingga sisa makanan bisa digunakan untuk bahan baku pakan mandiri. Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan nelayan untuk menangkap ikan di laut, dilakukan beberapa kegiatan pelatihan/Bimtek, yaitu: Kegiatan tahun 2020: 1. Bimtek Basic Safety Training Fisheries (BST-F); Nelayan memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang keselamatan dasar di laut/di atas kapal perikanan. 2. Lomba Produktifitas Armada; Tersedianya data produksi dan nilai produksi kapal perikanan/PMT yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tahun yang akan datang. 3. Usulan kegiatan di tahun 2021: 4. Bimtek Laminasi Perahu Motor Tempel; Diharapkan nelayan mempunyai kemampuan dalam perbaikan kasko PMT. 5. Bimtek Kaderisasi Nelayan; Jumlah ketertarikan terhadap profesi nelayan yang semakin sedikit, sehingga diperlukan kegiatan kaderisasi nelayan dalam rangka memperkenalkan dunia perikanan tangkap dengan tujuan mendapatkan calon nelayan yang siap bekerja sebagai nelayan. 6. Bimtek Penggunaan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan; Minimnya pengetahuan tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan sehingga diharapkan dapat terwujud pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. 7. Magang Nelayan Perahu Motor Tempel; Sebagian besar nelayan DIY bukan merupakan nelayan asli/murni, tetapi berasal dari profesi lain	menu ikan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2. Pelatihan dan Bimtek untuk nelayan pada tahun 2020 banyak yang di*refocussing* untuk penanganan Covid-19.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		seperti petani, buruh, dan profesi lain yg jauh dari dunia perikanan tangkap, tetapi kemudian beralih menjadi nelayan. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap karakter/mental dan kemampuan nelayan DIY. Sebagian besar nelayan DIY adalah nelayan PMT (Perahu Motor Tempel) yang terbiasa dengan one day fishing (1 hari). Untuk merubah pola melaut menjadi 5-7 hari (sekoci) membutuhkan waktu yang panjang, mental yang kuat dan modal yang banyak. 8. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan perubahan mindset nelayan dan mencari kader-kader nelayan/regenerasi nelayan adalah: magang nelayan. Magang nelayan merupakan proses yang panjang untuk regenerasi nelayan atau mendapatkan nelayan yang tangguh. Beberapa tahapan yang harus dilalui: 9. Dimulai dengan kegiatan kaderisasi nelayan. 10. Dari masyarakat/calon nelayan yang minat menjadi nelayan akan bergabung ke sentra kegiatan perikanan tangkap (bisa jadi pendorong kapal dulu atau nelayan jaring eret). 11. Tahapan selanjutnya adalah meningkat menjadi Anak Buah Kapal (ABK-PMT). Pada tahap ini sudah siap menjadi nelayan. 12. Selanjutnya bila telah terampil menguasai medan lautan baru bisa menjadi nahkoda di kapal PMT, 13. Bagi nelayan yang tertarik ingin menjadi nelayan dengan kapal di atasnya bisa kita ikutkan mengikuti magang di kapal motor Sekoci (kapal di atas 10 GT) dengan waktu melaut 5-7 hari. 14. Tahapan berikutnya bagi nelayan yang ingin menjadi Nahkoda Kapal Motor sekoci tadi (syarat harus punya ANKAPIN/ SIM Kapal). 15. Peningkatan dengan keinginannya menjadi Nahkoda kapal di atas 30GT 16. Pencatatan Produktifitas Armada Penangkap Ikan; Data produksi dan nilai produksi yang akurat di masing-masing TPI. 17. Penyusunan Master Plan dan DED PPI Gesing Kab. Gunung Kidul; Rencana pembangunan PPI Gesing diharapkan dapat digunakan untuk berlabuh kapal motor ikan > 5 GT yang mampu beroperasi di perairan pantai sampai ZEE sehingga berujung pada peningkatkan produksi perikanan tangkap. Sekaligus menciptakan setra pertumbuhan ekonomi baru di wilayah yang masih tertinggal.	

r. Urusan Pariwisata

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Penyedian sarana transportasi menuju obyek wisata.	Penyediaan sarana transportasi umum menuju obyek wisata. Untuk destinasi wisata utama seperti di kawasan Keraton, Candi Prambanan, Pantai Parangtritis, dan Kaliurang sudah tersedia sarana transportasi umum yang memadai. Akan tetapi, untuk destinasi wisata alternatif dan yang relatif baru seperti Mangunan Bantul, Kalibiru Kulon Progo, dan pantai-pantai di Gunung Kidul, hal tersebut belum tersedia. Selain menggunakan kendaraan pribadi, wisatawan juga bisa menggunakan kendaraan sewaan untuk menuju lokasi-lokasi tersebut. Bahkan, pada saat ini sudah ada pihak yang menyediakan jasa transportasi secara daring. Kendati demikian, penyediaan transportasi umum ke destinasi wisata tetap perlu dipersiapkan untuk diadakan sebagai daya tawar fasilitas pariwisata di Yogyakarta yang memiliki pasar wisata dengan segmen yang beragam. Transportasi umum yang mengarahkan wisatawan ke destinasi baru dengan rute yang sudah di tetapkan tentunya akan menambah branding DIY sebagai destinasi wisata. Untuk itu, diperlukan kerjasama lintas sektor untuk mewujudkannya. Secara kewenangan, untuk penyediaan transportasi ada di Dinas Perhubungan. Koordinasi pernah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata terkait amenitas moda transportasi pariwisata ke Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW). Saat ini di DIY memang belum terdapat moda transportasi khusus pariwisata yang difasilitasi Pemda DIY. Yang ada, moda transportasi ke ODTW masih diupayakan oleh swasta, dan memang belum begitu memadai. Terdapat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong sebagai sarana transportasi tradisional dimana kawasan pariwisata merupakan salah satu wilayah pengoperasian Transportasi Tradisional. Transportasi tradisional becak dan andong bisa menjadi daya tarik budaya untuk menarik minat wisatawan. Untuk moda transportasi pariwisata antar kabupaten di DIY memang belum ada. Untuk penyediaan dan pengembangan moda transportasi pariwisata diperlukan kerjasama lintas sektor khususnya dengan dengan Dinas Perhubungan DIY. Dinas Pariwisata dalam hal ini akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DIY terkait penyediaan moda transportasi pariwisata ini.	Untuk memberikan pelayanan penyediaan transportasi publik kepada wisatawan yang ingin mengunjungi tempat - tempat wisata di DIY khususnya yang berada di kawasan Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul. Di kawasan kota Yogya saat ini sudah tersedia armada Trans Jogja yang memiliki rute melewati tempat - tempat wisata seperti Malioboro, Keraton, Taman Pintar, Gembira Loka, dan sekitarnya. Sedangkan untuk rute di Kab lainnya di DIY saat ini Damri sudah mulai membuka rute dengan mengoperasikan beberapa amadanya ke tempat wisata, antara lain rute Malioboro - Gunung Api Nglanggeran - Wonosari - Pantai Baron, rute YIA – Wonosari - Pantai Baron, Monumen Yogya Kembali - Pasar Plono Kulon Progo, Malioboro - Gua Kiskendo, Malioboro - Parangtritis, Borobudur – Prambanan. Diharapkan dengan dibukanya rute tersebut dapat mengintegrasikan moda transportasi umum dari satu tempat wisata menuju tempat wisata lainnya di DIY dan mempermudah wisatawan dalam melakukan kegiatan wisatanya khususnya wisatawan backpacker yang ingin berkeliling Yogyakarta.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2.	Penerjemahan visi sebagai tujuan wisata utama di Asia Tenggara harus diperjelas.	Sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025 terdapat perubahan visi pembangunan kepariwisataan Daerah, yakni terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat. Penterjemahan visi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan, sasaran pembangunan kepariwisataan DIY yang termaktub dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 Tahun 2019. Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dibagi pelaksanaanya dalam 3 (tiga) tahap, dan periode tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Tahap II RIPPARDA. Pembangunan pariwisata DIY mempunyai 4 pilar pembangunan yaitu: Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata, yang masing-masing mempunyai arah kebijakan dan strategi sendiri. Secara nasional DIY dikenal sebagai kota pariwisata, kota budaya, pendidikan. Yogyakarta juga resmi ditetapkan sebagai Kota Budaya ASEAN (ASEAN City of Culture) pada tahun 2018 dalam Forum ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA) ke-8 dan pertemuan ke-14 Asean Senior Officials Meeting Responsible on Culture and Arts (SOMCA). Dengan modal pariwisata DIY yang begitu lengkap atraktif tersebut (daya tarik wisata alam, budaya, pendidikan, sejarah), perwujudan DIY sebagai kota tujuan wisata budaya akan terwujud bila masyarakat DIY mampu memelihara kebudayaan, menciptakan inovasi pengembangan wisata serta dapat menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak sektor ekonomi lainnya. Trend pariwisata sekarang khususnya untuk minat wisatawan mancanegara terdapat pergeseran trend dari leisure menjadi culture experience. Hal tersebut terus diupayakan oleh Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Pariwisata DIY untuk terus berbenah. Hanya memang saat ini belum ada event pariwisata budaya DIY yang bertaraf internasional. Sudah ada event Jogja International Heritage Walk tetapi masih segmentif dan belum mendunia. Dalam upaya mempromosikan destinasi wisata di DIY, Dispar DIY dengan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berbagai event pariwisata di negara-negara Asia Tenggara dan	Penterjemahan visi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan, sasaran pembangunan kepariwisataan DIY yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 Tahun 2019. Visi pembangunan kepariwisataan Daerah, yakni terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		negara potensial market wisatawan seperti MATTA di Malaysia, TITF di Thailand, NATAS di Singapura, Filipina, dan Vietnam telah diikuti. Selain itu, event internasional lainya seperti ITB di Jerman, dan TEJ di Jepang juga rutin diikuti sebagai upaya untuk meningkatkan citra pariwisata DIY di mata calon wisatawan mancanegara. Sebagai wadah kerjasama promosi pariwisata internasional, EATOF juga menjadi media eksistensi pariwisata DIY di pasar internasional, khususnya Asia. Akan tetapi, semua itu kembali kepada kesiapan DIY dalam menyambut kedatangan para wisatawan tersebut, baik secara fisik berupa infrastruktur yang memadai, maupun secara psikis berupa SDM yang mumpuni.	
3.	Peningkatan SDM pariwisata dengan fasilitasi sertifikasi	Infrastruktur pariwisata yang memadai akan menjadi tidak lengkap apabila tidak didukung oleh tersedianya SDM pariwisata yang mumpuni dalam mengelola dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, dilaksanakan pelatihan pelatihan untuk SDM di bidang pariwisata untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, baik pelatihan di Destinasi wisata, di desa/kampung wisata, maupun pelaku Industri jasa pariwisata. Namun, pelatihan saja tidaklah cukup. Hal itu perlu ditindaklanjuti dengan uji kompetensi atau sertifikasi sehingga kompetensi SDM pariwisata dapat diukur dengan indikator yang jelas. Dispar DIY setiap tahunnya sudah melaksanakan kegiatan sertifikasi SDM pariwisata (pemandu wisata) dan juga sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan UJP. dan kegiatan ini masih akan terus dilaksanakan setiap tahunnya.	Setiap tahunnya Dispar DIY sudah melaksanakan kegiatan sertifikasi SDM pariwisata (pemandu wisata) dan juga sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan UJP. Sesuai dengan Program kerja Dinas Pariwisata DIY yaitu Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata dengan kegiatan pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang pemanduan Wisata dan meningkatkan kompetensi profesionalitas pelaku pemanduan wisata.
4.	Jumlah wisatawan dengan beroperasi penuh bandara NYIA dengan penerbangan langsung luar negeri perlu dipetakan rute, lama tinggal dan obyek wisata yang dikunjungi di DIY.	Dengan beroperasinya YIA secara penuh, diharapkan akan ada penambahan penerbangan langsung dari luar negeri ke YIA sehingga ada potensi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY. Pemetaan kunjungan wisatawan penting dilakukan untuk evaluasi kebutuhan fasilitas dan pelayanan kepada wisatawan. Pemetaan kunjungan wisatawan dilaksanakan dengan perhitungan statistik wisatawan sebagai kegiatan tahunan untuk mendapatkan data wisatawan baik pada penggunaan akomodasi, lama tinggal, serta kunjungan ke destinasi wisata. Sedangkan untuk mengetahui asumsi jumlah pengeluaran rata-rata wisatawan, dilaksanakan kajian analisa belanja/spending money wisatawan.	Dengan adanya pemetaan jumlah wisatawan, rute, lama tinggal dan obyek wisata yang dikunjungi diharapkan dapat memberikan data dalam membuat pola perjalanan wisata untuk wisatawan sehingga dapat memilik arah yang jelas ke mana saja wisatawan tersebut mau di bawa. Saat ini untuk kegiatan pendataan wisman di YIA Dispar menjalin komunikasi dengan Angkasa Pura. Selain itu untuk pendataan jumlah dan lama tinggal di hotel, Dispar juga mengumpulkan data kunjungan tamu menginap di hotel seluruh kab/kota DIY serta merekapitulasi data pergerakan jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata dari Dinas Pariwisata Kab/kota di DIY.

s. Urusan Perindustrian

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
.	Program pembinaan bagi pelaku IKM harus ditingkatkan.	Disperindag DIY selalu meningkatkan program pembinaan bagi pelaku IKM. Pembinaan dilakukan mulai dari Perbaikan mutu produksi, Perbaikan akses bahan baku, Perbaikan kelembagaan, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Perbaikan akses pasar dalam negeri, dan Perbaikan akses pasar luar negeri. Peningkatan pembinaan diantaranya dilakukan melalui berbagai inovasi dalam pembinaan. Beberapa inovasi yang telah dilakukan diantaranya: a. Penyelenggaraan pelatihan IKM secara daring; Pada tahun 2020 ini, terjadi pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pelatihan konvensional tidak dapat dilaksanakan Namun demikian, pembinaan pada IKM tetap dilaksanakan akan tetapi secara daring. Kelebihan kegiatan ini, adalah jumlah peserta yang lebih banyak dan biaya yang minimalis. Pada tahun 2021 kegiatan ini akan dilaksanakan kembali. b. Penerapan ATG di Sentra Potensial; Pelaku usaha di sector industri khususnya industri kecil menengah, secara umum kurang memiliki kemampuan membeli peralatan/mesin untuk mendukung produksinya. Sementara itu, program pemberian bantuan hibah berupa mesin/peralatan dari pemerintah kepada pelaku industry kecil menengah masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha di DIY. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melalui Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG) telah melakukan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan pemanfaatan teknologi bagi industri kecil menengah. Inovasi tersebut dilakukan dengan cara meminjam pakaikan mesin-mesin berteknologi tepat guna yang dirancang dan dibuat oleh BPTTG kepada IKM. Mesin-mesin tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mesin-mesin tersebut dipinjampakaikan kepada sentra-sentra IKM. Melalui skema ini, IKM tidak perlu membeli mesin-mesin yang mereka butuhkan. Pada tahun 2020, Penerapan ATG dilaksanakan pada 4 sentra IKM. Pada tahun 2021 kegiatan tersebut diusulkan kembali dengan sasaran yang berbeda. c. Pelayanan Fasilitasi HKI secara daring; Dalam rangka meningkatkan daya saing dan perlindungan hak kekayaan intelektual IKM melalui layanan fasilitasi HKI yang lebih optimal, Disperindag DIY melalui Balai Pengembangan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan layanan informasi dan fasilitasi HKI secara daring. Melalui layanan ini, IKM dapat lebih mudah dalam mengakses informasi dan fasilitasi HKI. Sehingga diharapkan semakin banyak IKM yang mengerti pentingnya HKI dan mengakses fasilitasi dari Disperindag. d. Peningkatan Pemasaran IKM melalui Pemasaran Daring; Agar produk IKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, Disperindag DIY mengupayakannya melalui revitalisasi portal e-comerce milik Disperindag DIY (jogjaplaza.com), pelatihan pemasaran daring, dan fasilitasi temu kemitraan antara IKM dengan penyelenggara marketplace potensial. Upaya tersebut dilaksanakan di tahun 2020 dan akan dilaksanakan di tahun berikutnya.	a. Pelatihan secara daring dilakukan untuk tetap meningkatkan keterampilan IKM disaat pelatihan tatap muka tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19. b. Penerapan ATG di Sentra Potensial dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi pada IKM dengan cara pinjam pakai, yang mana selama ini IKM tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membeli teknologi tersebut. c. Pelayanan Fasilitasi HKI secara daring dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pelaku usaha DIY untuk mendapatkan berbagai informasi HKI dan fasilitasi HKI dari Disperindag dan mengurangi risiko penularan Covid-19 akibat layanan tatap muka. d. Peningkatan Pemasaran IKM melalui Pemasaran Daring dilakukan agar produk IKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas pada saat pasar ofline sulit dilakukan akibat adanya pandemi Covid-19.
2.	Peningkatan dan pendampingan manajeman IKM.	Kegiatan pendampingan kepada IKM dari tahun ke tahun telah dilaksanakan terutama berkaitan dengan manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan produksi IKM. Untuk manajemen usaha secara umum Disperindag telah bersinergi dengan OPD yang memang memiliki tupoksi pembinaan dari sisi manajemen usaha secara umum yaitu Dinas Koperasi dan UKM DIY.	Secara umum IKM belum memiliki kemampuan manajerial yang baik. Oleh karenanya Disperindag melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut, diantaranya pendampingan dan bersinergi dengan OPD yang memang memiliki tupoksi

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			pembinaan dari sisi manajemen usaha secara umum yaitu Dinas Koperasi dan UKM DIY
3.	Fasilitasi Pemda DIY untuk menumbuhkan kerjasama IKM dengan Industri besar.	Disperindag DIY menganggarkan kegiatan temu kemitran IKM dengan pelaku usaha besar baik untu IKM Agro maupun IKM Logam, Sandang, dan Aneka pada tahun 2020. Karena adanya Pandemi Covid-19 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, pada tahun 2021, kami mengusulkan kegiatan tersebut kembali.	Temu kemitraan ditujukan untuk menguji apakah produk IKM yang dibina telah layak jual dan memfasilitasi kerjasama IKM dengan pelaku usaha besar untuk pengembangan usaha IKM.
4.	Pemanfaatan Kawasan Industri di Sentolo dan Piyungan	Pemanfaatan kawasan Sentolo selama ini belum dapat dioptimalkan. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut belum ditetapkan secara resmi sebagai kawasan industri dan statusnya masih sebagai kawasan peruntukan industri. Upaya yang akan dilakukan Disperindag adalah mendorong agar kawasan Sentolo segera dikondisikan dan ditetapkan sebagai kawasan industri. Sementara itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Industri Piyungan, Disperindag mengupayakannya dengan cara menyosialisaikan dan mempromosikannya kepada pelaku usaha yang relevan dengan konsep kawasan industri Piyungan	Pengembangan industri selama ini terkendala dengan pengelolaan limbah terutama industri yang high polutan. Adanya kawasan industri dengan manajemen pengelolaan limbah yang baik sebagai pusat industri merupakan solusinya.

t. Urusan Perdagangan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peningkatan kemampuan para pelaku perdagangan di DIY.	Peningkatan kemampuan para pelaku perdagangan di DIY akan dilaksankan melalui pelatihan dan sekolah pasar. Pelatihan dilaksanakan dengan materi manajemen pemasaran, pemasaran daring, dan pemasaran melalui ekspor. Pada tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 dan *refocussing* anggaran untuk penanganannya, kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian kegiatan tersebut kami rencanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021	Peningkatan kemampuan para pelaku perdagangan di DIY akan dilaksankan melalui pelatihan dan sekolah pasar. Melalui pelatihan ini diharapkan pelaku usaha perdagangan dapat meningkatkan kemampuan akses pasarnya baik domestic maupun global.
2.	Memanfaatan peluang dengan adanya NYIA	Pembangunan bandara NYIA tentu akan memperluas pasar produk IKM. Hal ini merupakan peluang bagi IKM. Peluang tersebut dapat diraih apabila produk IKM memiliki kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selama ini Disperindag berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM melalui berbagai pelatihan produksi dan pemasaran, peningkatan teknologi produksi, dan fasilitasi HKI. Pada tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 dan *refocussing* anggaran untuk penanganannya, sebagian kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian kegiatan tersebut kami rencanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021.	Peningkatan produk IKM agar memiliki kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar, merupakan strategi untuk mengakses pasar baru yang muncul akibat adanya NYIA.
3.	Perlu dukungan sarana perdagangan daring di DIY berupa Sarana Pusat media industri daring .	Agar produk IKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, Disperindag DIY mengupayakannya melalui revitalisasi portal *e-comerce* milik Disperindag DIY (jogjaplaza.com). Melalui aplikasi ini, diharapakan pelaku usaha dapat memasarkan produknya secara daring. Kegiata ini akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 akan dilakukan *maintenance* dan *upgrade*.	Berkembangnya pasar daring dan semakin menurunnya pasar offline akibat pandemi Covid-19 merupakan tantangan baru bagi IKM DIY. Revitalisasi portal e-comerce milik Disperindag DIY (jogjaplaza.com) merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi hal tersebut.

u. Urusan Pertanian

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Perlunya segera penyelesaian Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Generasi muda kurang berminat untuk bekerja di sektor pertanian karena tidak melihat peluang untuk hidup lebih baik dengan bertani. Mereka melihat orang tua dan keluarga mereka yang menjadi petani yang masih jauh dari sejahtera. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meyakinkan mereka agar mau bekerja di bidang usaha pertanian. Petani milineal perlu diberikan insentif. Mereka perlu dibuka wawasannya tentang cerahnya sektor pertanian sebagai sandaran hidup. Mereka diberikan ketrampilan plus, ketrampilan bertani dan kemampuan berwirausaha. Teknologi pertanian yang lebih modern dan kekinian sehingga menjadi menarik bagi petani milineal.	Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diinisiasi oleh DPRD DIY sudah terbit dan akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait dengan menyusun Pergub turunannya pada tahun 2021. Reviu Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai tindak lanjut keluarnya Perda DIY No. 5 tahun 2019 tentang RTRW DIY 2019-2039 sudah dilaksanakan di tahun 2020, diharapkan akan mampu mengurangi laju alih fungsi lahan pertanian. Salah satu upaya untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian yaitu dengan pengelolaan pertanian secara terpadu dengan membentuk korporasi petani dalam kawasan pertanian. Untuk mengoptimalkan kelembagaan korporasi petani, perlu meningkatkan peran pemuda dalam sektor pertanian, peningkatan kualitas pelaku pertanian melalui pendidikan pelatihan dan pendampingan, mengembangkan pertanian terpadu, penguatan *corporate farming*. Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan pertanian bagi generasi muda melalui pengoptimalan peran BPP untuk ikut membina generasi muda agar berminat bergerak di sektor pertanian, penggunaan alat mekanisasi pertanian beradaptasi dengan teknologi 4.0, serta pengembangan sistem informasi pertanian untuk penyebaran informasi berbasis IT. Sedangkan dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan, upaya yang telah dilakukan yaitu: a. Memfasilitasi alat mesin pertanian beserta bimbingan teknis alat mesin kepada petani berupa alat pengolahan tanah (traktor roda 2/rotary/cultivator), alat menanam benih padi (rice transplanter), alat penanam jagung, alat perontok padi, jagung dan kedelai (power thresher multiguna/power thresher mobil), pompa air, handsprayer, alat pemanen padi (combine harvester), Rice Milling Unit, alat pengolah pupuk organik dan lain-lain, sehingga dengan alat mesin pertanian maka proses akan lebih cepat, biaya lebih murah, kehilangan hasil berkurang, hasil pertanian dan pendapatan petani meningkat, pertanian akan maju, modern dan dapat menarik generasi muda milenial. b. Memberikan percontohan pertanian ramah lingkungan/pertanian organik menuju Jogja sehat. Pertanian organik dapat memperbaiki kondisi tanah dan lingkungan, selain itu meningkatkan nilai tambah karena harga yang jauh lebih tinggi. Pertanian organik didukung teknologi aman bagi petani dan lingkungan, biaya rendah dan menarik bagi generasi muda karena mempunyai prospek yang lebih baik (pasar ekspor terbuka lebar).	1) Landasan hukum untuk implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani di DIY 2) Regenerasi petani 3) Pembentukan dan pengembangan korporasi petani 4) Digitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir 5) Intensifikasi pertanian 6) Pertanian ramah lingkungan 7) Pertanian yang adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		c. Pemberian insentif kepada petani di lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa insentif asuransi pertanian, fasilitasi pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, Jalan Usaha Tani, perbaikan irigasi dan lain-lain. d. Sosialisasi dan koordinasi lintas sektor, perguruan tinggi, masyarakat secara bersama-sama dan sinergis terkait pentingnya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengingat ketersediaan pangan yang harus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, disisi lain ancaman penurunan provitas pertanian berupa hama penyakit, banjir, kekeringan, longsor dan bencana alam lainnya.	

v. Urusan Kehutanan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Banyak produk primer kayu yang dihasilkan tentunya perlu segera dilakukan penanaman pohon kembali (reforestasi).Perlunya pendampingan kepada kelompok pengelola hutan rakyat dalam terus melakukan pelembagaan hutan rakyat, selalu mempunyai perpektif untuk menjaga lingkungan, mendorong kelompok hutan rakyat untuk terus menjalin sinergi sehingga saling mendorong melakukan sertifikasi penatausahaan hasil hutan.	Nilai PDRB sub sektor kehutanan disumbang oleh hasil hutan primer dari dalam Kawasan hutan. Produksi kayu di tahun 2019 mencapai 154.210,56 m3, dimana realisasi produksi ini lebih tinggi jika dibandingkan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 120.235,40 m3. Produksi kayu bulat tahun 2019 berasal dari land clearing sebesar 1.554,83 m^3, dari pemegang ijin pada Hutan Tanaman Rakyat sebesar 86,76 m^3, dari pemegang ijin dalam Hutan Kemasyarakatan sebesar 3.290,75 m^3, dan dari hutan rakyat 149.278,22 m3. Dalam pengelolaan kawasan hutan, DLHK DIY sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke pelaporan. Dalam tahapan perencanaan, disusun dokumen perencanaan berupa Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang merupakan dokumen yang berisi rencana pengelolaan hutan (teknis/fisik) selama periode tertentu yang berazaskan kelestarian sumber daya hutan dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan sosial untuk suatu unit pengelolaan. RPKH selanjutnya didetailkan lagi menjadi dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) yang terdiri dari RTT Tebangan, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman. Dari dokumen tersebut dapat diketahui potensi tebangan yang dapat dilakukan berikutnya dan kegiatan penanaman serta pemeliharaan yang akan dilakukan.	Pengelolaan sektor kehutanan memang harus dilakukan secara bijak. Pengelolaan hutan berkelanjutan mutlak dilakukan untuk menjaga keseimbangan fungsi hutan dalam menopang ekonomi, ekologi, dan sosial. Dengan pola pengelolaan tersebut diharapkan fungsi hutan di DIY masih dapat lestari.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Dorongan kepada para pelaku usaha kehutanan untuk melakukan sertifikasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian hutan juga terus dilakukan. Upaya untuk mendorong hal tersebut salah satunya dilakukan dengan pendampingan tata usaha hasil hutan pada industri hasil hutan primer yang belum memiliki ijin dalam rangka pemenuhan persyaratan perijinan. Pada tahun 2019 terdapat penambahan 4 lembaga usaha kehutanan yang mendapatkan sertifikasi yaitu unit manajemen usaha SPP Gunungkidul dari Kab. Gunungkidul, UMHR Wono Lestari dari Kab. Bantul, APHR Dwi Manunggal dari Kab. Sleman, dan PHRL Mitra Wana Binangun dari Kab. Kulon Progo. Dengan demikian maka pembangunan usaha kehutanan di DIY sudah mengarah pada keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang.	

4. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Perangkat Daerah yang mendapatkan Tugas Pembantuan agar memberikan data kepada DPRD setelah ada kejelasan anggaran dari pemerintah pusat, diharapakan DPRD bisa melakukan monitoring terhadap program ini. Program tugas pembantuan hanya berasal dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementrian Pertanian Republik Indonesia, mohon potensi tugas pembantuan dari kementrian lain bisa diraih kedepannya.	Meskipun pelibatan daerah sudah dilakukan, diantaranya melalui e proposal pada masing-masing K/L, selama ini perencanaan APBN, termasuk Tugas Pembantuan, didominasi oleh kebijakan K/L. Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan K/L yang sudah ditetapkan dalam Renja-K/L yang mengacu pada RKP. Dengan kalimat lain, sebenarnya potensi tugas pembantuan ada di seluruh kewenangan konkuren pemerintah yang ada di DIY, dengan tentunya yang memenuhi syarat untuk ditugas pembantuankan, namun realisasinya, apakah kewenangan tersebut akan diperbantukan atau tidak sangat tergantung pada kebijakan pembangunan di tingkat pusat. Adapun Tugas Pembantuan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada satker lingkup Pemda DIY pada tahun anggaran 2021, berasal dari: 1. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (alokasi pagu DIPA Rp22.294.699.000,00), melalui satker pada Dinas PUP ESDM DIY; 2. Kementrian Pertanian Republik Indonesia (alokasi pagu DIPA Rp53.358.260.000,00), melalui satker pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal dan Transmigrasi (alokasi pagu DIPA Rp1.165.508.000,00*, status terblokir), melalui satker pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.	1. Penguatan fungsi DPRD terutama dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan. 2. Optimalisasi pemanfaatan dana APBN, khususnya tugas pembantuan dalam rangka pembangunan di daerah

5. PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN

a. Umum

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Dalam LKPJ, kebijakan pengelolaan Belanja Daerah hanya dicantumkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tanpa ada penjelasan kebijakan pengelolaan berkait Dana Keistimewaan. Padahal dalam target dan belanja belanja dicantumkan belanja dana keistimewaan. Atas dasar itu, kami meminta ada perubahan dalam struktur penyusunan RKPD ke depan untuk memasukan pola kebijakan dana keistimewaan. Hal ini harus dilakukan sebagai dasar pengawasan legislatif dalam Keistimewaan Yogyakarta. Dasar pelibatan DPRD ini sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.07/2017 dalam Pasal 2 Ayat (2) yang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Keuangan No.15/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Yogyakarta dalam Pasal 5 ayat (2) dimana Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan disusun dengan berpedoman pada Perdais, Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam proses hal-hal tersebut dibahas bersama antara Pemerintah Provinsi DIY dengan DPRD DIY. Dengan demikian, peran DPRD dalam pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dapat dilakukan melalui pembahasan penyusunan Perdais, RPJMD, dan RKPD yang dimaksud.	Perencanaan urusan keistimewaan sudah tercantum di dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) sesuai amanat dalam peraturan perundangan. Urusan keistimewaan sebenarnya juga telah mendapatkan porsi tersendiri dalam penyajiannya di dokumen perencanaan. Selanjutnya, RPJMD DIY Tahun 2017-2022 juga telah mencantumkan bagan alur (cascade) urusan keistimewaan sehingga akan terlihat dengan jelas dukungan terhadap sasaran pembangunan daerah. Namun demikian apabila diperlukan, pada masa mendatang penjelasan mengenai urusan keistimewaan akan kami cantumkan dalam kebijakan belanja daerah.	Pencantuman perencanaan urusan keistimewaan dalam dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan merupakan amanat peraturan perundangan yang harus di ikuti oleh Pemda DIY. Dalam proses penyusunannya melibatkan semua pihak melalui musrenbang (forum SKPD/Forum keistimewaan) sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat dapat masuk di dalam dokumen perencanaan tersebut.
2.	Penggunaan Dana Keistimewaan agar memberikan kontribusi terhadap permasalahan utama di DIY. Fokus pengunaan Dana Keistimewaan agar diberikan penjelasan kepada DPRD pada tahun yang akan datang, sehingga DPRD bisa memahami alur dan pemanfaatannya	Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa salah satu tujuan keistimewaan DIY adalah kesejahteraan masyarakat DIY, dalam pelaksanaan penganggaran dana keistimewaan dilakukan pada kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan belanja yang memiliki nilai investasi. Diharapkan dari hal itu dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat meningkat.	Optimalisasi Dana Keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat DIY

b. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pemda DIY hendaknya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan DIY untuk memasukan materi kebudayaan dalam kurikulum pendidikan di DIY, agar keterpaduan spirit Keistimewaan itu betul-betul nyata dan menyatu, sejak usia dini hingga Lansia, sejak Paud hingga Perguruan Tinggi.	Dalam rangka pelaksanaan kewenangan keistimewaan, Dinas Pendidikan DIY melalui urusan kebudayaan telah berkontribusi dalam upaya mengenalkan dan memajukan spirit keistimewaan melalui Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya, Program Pendidikan Non Formal dan Informal dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam pengembangnan dan Pelestarian Budaya Daerah. Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan Peningkatan kapasitas pendidikan menengah dalam pengembangan dan pelestarian budaya daerah. Program Pendidikan anak usia dini dengan kegiatan pengembangan model pengasuhan anak tradisi jawa. Program Peningkatan Sarpras Kebudayaan dengan kegiatan Pengadaan sarana kesenian ke sekolah dan Pembangunan Laboratorium Budaya di Satuan Pendidikan.	Terkait dengan memasukkan materi kurikulum formal pendidikan kebudayaan khususnya perguruan tinggi belum bisa dilaksanakan secara optimal dikarenakan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi/ memasukkan kurikulum materi pendidikan kebudayaan di Perguruan Tinggi. Namun, bisa diupayakan dengan kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi dengan memasukkan nilai-nilai Keistimewaan/ kebudayaan tidak dalam mata kuliah yang relevan (di Perguruan Tinggi belum menerima mata kuliah khusus terkait tentang nilai-nilai Keistimewaan). Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mempunyai mata kuliah yang khusus tentang kebudayaan/ Keistimewaan salah satunya yaitu Universitas Widya Mataram. Demikian pula juga sudah diupayakan oleh Biro Bina Mental dan Spiritul Setda DIY yang telah menyusun kajian Raperda Implementasi Tata Nilai Budaya Yogyakarta di Perguruan Tinggi.

c. Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Selaras amanat Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pemda DIY haruslah melakukan penataan tentang Pertanahan—Tanah Kasultanan dan Tahan Kadipaten— di DIY guna memberikan sumbangsih maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat DIY.	Pengaturan urusan pertanahan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan agar tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat memberikan sumbangsih maksimal untuk ketenteramaan dan kesejahteraan masyarakat. Keistimewaan DIY dalam Pertanahan bertumpu pada Tanah Kasultanan dan kadipaten. Di bidang pertanahan perlu diwujudkan semangat keistimewaan atau nilai-nilai dasar sebagaimana yang sudah teruraikan yakni Tahta Untuk Rakyat. Di antara perujudan "Tahta Untuk Rakyat" adalah kebijakan yang dikembangkan di bidang pertanahan. Semangat"Tanah Untuk Rakyat" serta sikap populis dan nasionalis tersebut harus menjadi dasar bagi penyusunan Perdais Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Semangat tersebut harus mewarnai pengelolaan dan pemanfaatan baik Tanah Keprabon maupun Tanah Bukan Keprabon. Perujudan dari semangat tersebut harus tercermin pada pemanfaatan tanah bagi kepentingan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan	Pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan kasultaan, tanah kadipaten dan tanah desa yang asal usulnya dari hak anggaduh Kasultanan maupun Kadipaten. Tujuan yang akan dicapai adalah mewujudkan ketertiban administrasi hak hukum atas tanah serta adminisitrasi dalam Pangelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditujukan untuk kepentingan kebudayaan, kepentingan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Bentuk pelaksanaan kegiatan urusan pertanahan meliputi penatusahaan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten, fasilitasi pelayanan perizinan pemanfaatan dan pengawasannya serta fasilitasi penanganan permasalahan dan sengketa tanah kasultanan dan kadipaten. Diharapkan kedepan tidak terjadi permasalahan pertanahan yang lagi terkait status hukum, serta pemanfaatan yang tidak sesuai dengan perizinan sesuai perundangan yang berlaku.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		masyarakat yang diwujudkan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.	

d. Penyelenggaraan Urusan Tata Ruang

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pemda DIY dalam melakukan Urusan tata ruang, sedapat mungkin memberikan tatanan baru, dimana ruang yang ada itu dapat memberikan ruang ekspresi bagi nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta. Agar identitas Keistimewaan Yogyakarta benar-benar terbaca oleh masyarakat DIY maupun dari luar DIY.	Implementasi kewenangan keistimewaan pada urusan tata ruang telah dituangkan di dalam Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Dalam perdais tersebut diamanatkan bahwa pengaturan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten harus mengangkat konsep tata ruang DIY yang dilandasi oleh konsep "Hamemayu Hayuning Bawana" karena tertuju langsung pada penciptaan ruang-ruang dan tata ruang yang membangun kautaman manusia, melestarikan kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan manusia dengan sifat-sifat yang inklusif, dan menghormati alam sebagai bagian dari kautaman manusia. Dengan demikian, Perdais Tata Ruang menjadi sarana membangun manusia dan ruang kehidupannya dengan melakukan tatanan baru urusan tata ruang, yang dilakukan melalui kebijakan struktur ruang dengan konservasi dan pelindungan tata ruang keistimewaan, serta kebijakan pola ruang dengan pengembangan tata ruang keistimewaan. Melalui Perdais tersebut juga telah ditetapkan 18 Satuan Ruang Strategis Keistimewaan pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.	Melalui tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan pada 3 kepentingan, yakni: kepentingan kebudayaan, kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan sosial. Dengan adanya Perdais tersebut, penataan ruang dilakukan dengan melingkupi kawasan - kawasan sekitar menjadi suatu kawasan, tidak per masing - masing bidang karena akan sangat rumit. Melalui rencana tata ruang, fungsi lintas masing - masing sektor ditautkan, agar pola ruang dapat terwujud. Dengan kata lain, penataan ruangnya terintegrasi dalam suatu kawasan yang disebut dengan Satuan Ruang Strategis.

e. Urusan Kelembagaan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Dalam rangka menjalankan Urusan Pemerintahan DIY maka Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY harus melaksanakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY	Kelembagaan Pemda DIY yang telah ditetapkan melalui Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah telah mempertimbangkan keselarasan urusan sesuai amanat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta	Kelembagaan Pemda DIY menjalankan urusan wajib dan pilihan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menjalankan urusan keistimewaan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Serta perlunya penekanan garis koodinasi kerjasama lintas lembaga.	regulasi-regulasi terkait lainnya. Kelembagaan Pemerintah Daerah diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Selanjutnya, telah ditetapkan Pergub Nomor 131 Tahun 2019 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan yang telah mengaturmembagi kewenangan urusan keistimewaan pada masing-masing level pemerintahan.	Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu ditetapkan Pergub Nomor 131 Tahun 2019 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan sehingga pelaksanaan urusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.
2.	Dalam rangka mewujudkan visi “Abad Samudra Hindia”, penting kiranya Pemerintah Daerah DIY membentuk bidang khusus tentang kelautan.	Dalam rangka mewujudkan tema visi “Abad Samudera Hindia”, berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah telah dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dibentuk untuk dapat melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung perwujudan visi 'Abad Samudra Hindia' secara lebih fokus.

6. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

a. Urusan Kerjasama Antar Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peningkatan kerjasama dalam membangun jaringan pariwisata, jaringan transporatasi yang menyatu dengan Provinsi Jateng dalam optimalisasi YIA.	Pada tanggal 10 Juli 2019 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Perbatasan DIY-Jateng Nomor 119/06463/2019, 125.5/063/2019, sebagai salah satu tindak lanjut dari kesepakatan bersama ini dapat sampaikan bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah melakukan koordinasi dengan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Provinsi Jawa Tengah terkait usulan Program/kegiatan Kerja Sama Daerah yang memungkinkan untuk dilakukan mulai Tahun 2020 ini, yaitu Pembahasan Angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum tidak dalam trayek perbatasan DIY-Jateng. Dari koordinasi yang dilakukan dengan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah, diperoleh jawaban bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pembahasan dan koordinasi tehnis yang kemudian perlu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, Biro Tata Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah dan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY bersepakat untuk menindaklanjuti. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketenteraman merupakan tugas dan fungsi dari Bakesbangpol DIY.	Optimalisasi pembangunan sarana prasarana Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

b. Pembinaan Batas Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Tata kelola daerah perbatasan, kesepakatan antar daerah penting diupayakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam melakukan tata batas daerah, khususnya untuk pemerintahan desa yang berbatasan dan kepentingan penduduknya. Pemerintah daerah perlu mempertegas batas daerah dan mengimplementasikannya pada peta geospasial desa untuk kepentingan pemerintah desa yang berbatasan.	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, khususnya pada Pasal 7 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka sesuai dengan kewenangannya batas daerah antar desa merupakan kewenangan masing-masing kabupaten/kota. Pasal 6 menyatakan bahwa tugas Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Provinsi. Biro Tata Pemerintahan pada tahun 2020 dan 2021 akan memaksimalkan fungsi koordinasi pembinaan dan pengawasan penyusunan peta batas desa tersebut.	Koordinasi, bimbingan dan pengawasan terkait tata kelola daerah perbatasan (yang merupakan kewenangan pemkab/kota).

c. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketenteraman hendaknya dilakukan setiap tahun dan pencapaian kesepakatan agenda program dan kegiatan, khususnya beberapa tindakan untuk pencegahan dini terhadap aktivitas yang menggaggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.	Peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dilakukan secara rutin dalam rangka pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan secara rutin melalui kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY. Sesuai Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Adapun materi koordinasi yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah berkaitan dengan kondisi wilayah DIY dari aspek kondusivitas daerah (keamanan, ketertiban dan ketenteraman). Instansi vertikal yang terlibat dalam Forkopimda antara lain DPRD DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Kanwil Kementerian Agama, Perwakilan Bank Indonesia DIY, Akademi Angkatan Udara, dan instansi terkait lainnya.	Peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dilakukan rutin dan berkala melalui koordinasi antar forum dan pencapaian kesepakatan agenda program dan kegiatan dilaksanakan melalui Forum OPD.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Pokok permasalahan yang menjadi bahan koordinasi dalam Forkopimda antara lain: • Persiapan, pelaksanaan dan pasca pemilu/pemilu kepala daerah DIY. • Persiapan menyosong bulan Ramadhan, Idul Fitri dan musim libur tengah tahun. • Menyosong hari Natal & Tahun Baru dan liburan akhir tahun. Adapun hasil dan manfaat koordinasi yang diperoleh adalah suatu kesepakatan bersama antara stakeholder di wilayah DIY untuk mengambil peran masing-masing untuk menjaga kondisi wilayah agar tetap aman, tertib dan tenteram.	

d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Membuat jejaring antar OPD, lembaga, organisasi relawan dalam mitigasi bencana	Jejaring antar OPD, lembaga, organisasi relawan dalam mitigasi bencana yang sudah terbentuk diantaranya adalah: a. Klaster penanggulangan bencana, ada 8 klaster PB yakni: Klaster Kesehatan, Klaster Pencarian dan Penyelamatan, Klaster Logistik, Klaster pengungsian dan Perlindungan, Klaster Pendidikan, Klaster Sarana dan Prasarana, Klaster Ekonomi, Klaster Pemulihan Dini b. Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY	• Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi kebencanaan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana semakin efektif, efisien dan akuntabel. • Tercukupinya kebutuhan sumber daya dan mengurangi risiko.
2.	Membuat SOP yang melibatkan semua pemangku kepentingan kebencanaan tentang siapa mengerjakan apa, dimana, bagaimana agar apabila terjadi bencana tidak gagap.	SOP yang melibatkan semua pemangku kepentingan kebencanaan telah dibentuk melalui Pergub DIY Nomor 119 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pergub DIY nomor 49 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana	• Memperjelas pembagian peran dan tanggungjawab dalam kerja-kerja penanggulangan bencana. • Tidak ada overlap/duplikasi upaya yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang merespon bencana.
3.	Melakukan gladi lapangan pada SOP yang sudah di tetapkan	Gladi lapang pada SOP yang sudah di tetapkan disebutkan bahwa Gladi lapang diawali dengan penyusunan rencana kontijensi. Tahun 2019 sudah Sdisusun rencana kontijensi Erupsi Merapi. Gladi lapang di Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilaksanakan melekat pada kegiatan Destana/Katana	Memastikan kesiapan sumber daya dan peralatan agar ketika terjadi bencana dapat dimobilisasi dengn baik dan lancar serta aman.
4.	Bersama Pemkot/Pemkab memfasilitasi organisasi relawan kebencanaan baik untuk peningkatan SDM maupun operasional organisasi.	Fasilitasi terhadap organisasi relawan kebencanaan baik untuk peningkatan SDM maupun operasional organisasi dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan kesiapsiagaan bencana, pelatihan penanggulangan kebakaran maupun pelatihan dapur umum.	Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan sukarelawan agar siap dimobilisasi ketika dibutuhkan dalam operasi penanggulangan bencana

e. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	KONI dimohon memperhatikan kesejahteraan atlet dan pelatih. Antara lain dengan menaikkan bonus bagi atlet yang berprestasi. Sudah banyak atlet dan pelatih DIY yang pindah daerah karena tawaran bonus yang lebih besar dan menjanjikan pekerjaan tetap.	Dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap KONI salah satunya diwujudkan melalui hibah Gubernur bagi penyelenggaraan kegiatan KONI. Di tahun 2020, Pemda DIY mengalokasikan hibah kepada KONI sebesar Rp29.000.000.000,00. Diharapkan hibah ini mampu mendukung pemberian penghargaan kepada para pelatih dan atlet berprestasi serta mendukung persiapan para atlet yang akan mewakili DIY pada PON 2021.	Pada tahun 2020, KONI melakukan pengembalian hibah dari Pemerintah Daerah DIY sebesar Rp20.003.000.000 terkait penundaan pelaksanaan PON XX. Dengan demikian hibah dari Pemerintah Daerah DIY yang dikelola KONI pada tahun 2020 adalah sebesar Rp8.997.000.000. Melalui hibah ini dipastikan honorarium bagi para atlet dan pelatih di tahun 2020 dapat terpenuhi mengingat puslatda untuk persiapan PON XX tetap berjalan di masa pandemi walaupun tidak ada kejuaraan yang dilaksanakan. Anggaran untuk pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih telah direncanakan di tahun 2021 bersamaan dengan mulai diselenggarakannya kompetisi-kompetisi olahraga.

f. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pemda DIY harus dapat mendukung peningkatan peran dan fungsi Kwarda Pramuka DIY dengan memberikan bimbingan, bantuan dan konsultasi, supaya pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka di DIY dapat berjalan dengan tepat guna.	Dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap Kwarda DIY salah satunya diwujudkan melalui hibah Gubernur bagi penyelenggaraan kegiatan Kwarda DIY. Di tahun 2020, Pemda DIY mengalokasikan hibah kepada Kwarda DIY sebesar Rp500.000.000,00. Diharapkan pemberian hibah ini dapat mendukung kegiatan kepramukaan yang diorganisir Kwarda DIY dalam rangka peningkatan kualitas generasi muda DIY dan penanaman nilai-nilai kearifan lokal sehingga generasi muda DIY menjadi generasi yang mandiri, kreatif dan produktif	Alokasi hibah kepada Kwarda Gerakan Pramuka DIY di tahun 2020 bersumber dari APBD sebesar Rp500.000.000 dan Dana Keistimewaan sebesar Rp1.403.240.000. Melalui hibah ini, Kwarda Gerakan Pramuka DIY telah menyelenggarakan edukasi daring pemberdayaan ekonomi di masa pandemi serta pelatihan pengembangan ekonomi kemasyarakatan guna membantu kelompok masyarakat terdampak pandemi

g. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	KPUD harus terus memperbaharui DPT secara berkala, karena selalu bermasalah setiap pelaksanaan Pemilu.	Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi lebih lanjut bersama KPU DIY agar terus memperbaharui DPT secara berkala dan menjalin komunikasi/ koordinasi secara berkala dengan partai politik, tidak hanya dilakukan saat menjelang atau pasca Pemilu. Selain itu, kami juga memberikan ruang kepada KPU DIY untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan Sosialisasi Kepemiluan yang difokuskan pada generasi muda dan kelompok marginal dalam rangka peningkatan partisipasi politik masyarakat yang bisa pula dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi berkala dengan masyarakat/partai politik.	KPUD terus memperbaharui DPT secara berkala, dan menjalin komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan partai politik
2.	KPUD harus selalu menjalin komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan partai politik. Tidak hanya dilakukan saat menjelang atau pasca Pemilu.		

a. Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Untuk mengurangi pelanggaran disetiap agenda pemilu hendaknya Bawaslu bersama KPU turut memberikan pendidikan politik, khususnya bagi warga DIY terutama terkait bidang pengawasan.	Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu DIY agar bersama KPU turut memberikan pendidikan politik, khususnya bagi warga DIY terutama terkait bidang pengawasan. Selain itu, Badan Kesbangpol DIY pada tahun anggaran 2020 dan 2021 juga memberikan ruang kepada Bawaslu DIY untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan Sosialisasi Kepemiluan yang difokuskan pada generasi muda dan kelompok marginal dalam rangka peningkatan partisipasi politik masyarakat yang bisa pula dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan politik, khususnya bagi warga DIY terutama terkait bidang pengawasan.	Bawaslu bersama KPU turut memberikan pendidikan politik, khususnya bagi warga DIY terutama terkait bidang pengawasan

h. Lembaga Ombudsman

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Meningkatnya jumlah pelapor menjadi indikator bahwa masyarakat DIY semakin peduli untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang baik. Untuk itu Pemda DIY harus dapat mendorong Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) untuk meningkatkan kinerjanya, melalui pembinaan dan pengawasan serta dukungan anggaran, agar LO DIY mampu mengoptimalkan capaian kerja yang lebih baik sehingga pelayanan publik yang berkualitas adalah benar-benar menjadi hak warga Negara.	Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. LO DIY merupakan Lembaga Non Struktural yang independen, sehingga Pemerintah Daerah DIY tidak bisa mencampuri kewenangan LO DIY tersebut. Biro Hukum Setda DIY hanya berperan sebagai pengampu anggaran Lembaga Ombudsman DIY.	Tujuan: LO DIY tetap obyektif dalam melaksanakan ketugasan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). Masalah yang diselesaikan: mampu memberikan pertimbangan kepada semua lapisan masyarakat termasuk kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh LO DIY, meminimalkan konflik bahkan berupaya mendamaikan pihak-pihak yang memiliki sudut pandang berbeda dan melihat setiap pengaduan dalam sudut pandang yang paling fundamental.
2.	Pemda DIY hendaknya memperhatikan sektor properti agar pengaduan di sektor tersebut dapat berkurang.	Terkait dengan rekomendasi pada angka 2, Biro Hukum akan memberikan masukan kepada LO DIY untuk lebih meningkatkan Kinerja Pelayanan Edukasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi LO DIY dan sektor properti agar pengaduan di sektor tersebut dapat berkurang.	Peningkatan kinerja Pelayanan Edukasi kepada masyarakat melalui penginformasian di kanal media dan program kegiatan LO DIY diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga pelaku industri sektor properti atas proses bisnis yang baik sehingga dapat mengurangi masalah yang menjadi aduan terkait sektor properti.

i. Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Munculnya tantangan peningkatan kasus ODHA pada difabel, Orang dengan gangguan jiwa, ibu rumah tangga perlu disikapi dengan bijak dan langkah taktis oleh KPAD DIY agar mampu menekan laju pertumbuhan ODHA di DIY oleh karena itu perlu program peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan partisipasi warga/kelompok masyarakat.	Dalam upaya menekan laju pertumbuhan ODHA di DIY KPAD pada tahun 2020 Kegiatan yang telah di lakukan: a. Pertemuan Perencanaan Penganggaran bersama Bapeda dan OPD DIY Tahun 2021 diharapkan OPD masih terlibat aktif dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS DIY b. Pelatihan Fasilitator HIV bagi Disabilitas yang dilakukan 1 kali bagi Disabilitas bisu dan Tuli, 1 kali Pelatihan Disabilitas Netra,fisik,dan mental pada bulan Maret 2020 Tantangan yang dihadapi oleh KPAD saat ini: a. Perlunya Kolaborasi HIV dan Covid-19 dalam Kebijakan mekanisme layanan, Pendampingan, termasuk Media bagi ODHA dan Masyarakat umum (Media yg harus disiapkan) b. Adanya Pandemi Covid menyebabkan Kegiatan Koordonasi tatap muka dihentikan sementara,koordinasi melalui WA ,dan Tlp c. Selama 3 bulan Koordinasi dengan Pendamping ODHA dan Pengurus *Shelter* ODHA terkait obat ARV yang terhambat bagi teman-teman ODHA d. Kolaborasi Webinar kerjasama KPA DIY dan Univ Respati Yogyakarta,m enyelenggakan Meeting Expert HIV tanggal 20 Juni 2020,melalui Meeting Zoom dan Chanel Youtube Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPAD di tahun 2021: a. Koordinasi rutin Lintas Sektor b. Koordinasi Perencanaan Penganggaran c. Koordinasi dengan Populasi Kunci d. Koordinasi Panti Sosial Anak u menyiapkan Anak-anak yg yatim piatu karena ortu meninggal HIV e. Pemetaan Populasi Kunci 2021	Tujuan: a. Mendorong Keterlibatan Stakeholder dalam Upaya Penanggulangan AIDS di DIY, akan diadakan Kordinasi rutin dengan OPD. Termasuk Perencanaan Penganggaran Upaya Penanggulangan AIDS DIY bersama Bappeda. b. Penanggulangan HIV pada orang disabilitas. c. Mendorong Populasi Kunci terlibat aktif dalam memutus mata rantai penularan HIV. d. Mendorong Panti Sosial Anak u menyiapkan akses Anak-anak yg yatim piatu yang terinfeksi HIV dan AIDS. e. Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Upaya Penangglangan HIV dan AIDS .

j. Palang Merah Indonesia (PMI) DIY

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Konsep Mitigasi Bencana Berbasis masyarakat yang terukur yang dimiliki oleh PMI seyogyanya menjadi acuan dalam pendidikan kebencanaan berbasis sekolah maupun masyarakat guna membangun masyarakat tangguh dan tanggap bencana.	Dalam upaya mewujudkan membangun masyarakat tangguh dan tanggap bencana yang dilakukan oleh PMI melalui tujuan strategis meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta penyakit melalui program-program kesiapsiagaan, kesehatan, dan sosial, serta pelayanan kesehatan rujukan. Tujuan tersebut dirinci dalam outcome Kapasitas PMI dalam mengelola program-program berbasis masyarakat di bidang kesiapsiagaan dan kesehatan meningkat. a. **Output 1:** Perangkat penunjang program-program berbasis masyarakat di bidang kesiapsiagaan dan kesehatan (seperti Media KIE, alat peraga, perangkat M&E) tersedia secara memadai. Kegiatan yang dilakukan oleh PMI dalam mewujudkan output 1 adalah: 1) *Workshop* Inisiasi Program Berbasis Masyarakat 2) Mencetak dan mendistrubusikan media KIE, perangkat M & E dan alat peraga penunjang program-program berbasis PMI DIY 3) Simulasi Penanggulangan Bencana b. **Output** 2: Kegiatan-kegiatan program-program berbasis masyarakat di bidang kesiapsiagaan dan kesehatan dilaksanakan oleh pegawai/sukarelawan/fasilitator yang kompeten di PMI semua tingkatan. Kegiatan yang dilakukan oleh PMI dalam mewujudkan output 2 adalah: 1) Kampus Siaga Bencana - Tersedianya kerja sama (MoU) antara PMI DIY dan Perguruan Tinggi, di antaranya adalah Universitas Ahmad Yani, Poltekes Kemenkes dan Universitas Guna Bangsa - Simulasi kesiapasiagaan bencana 2) Sekolah Siaga Bencana - Kesiapsiagaan Bencana, dalam hal ini “Ayo Siaga bencana” termasuk salah satu kurikulum pembelajaran Palang Merah Remaja dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA - Sekolah Siaga Bencana - Kerja sama PMI dengan beberapa sekolah ditindaklanjuti dengan pelatihan dan simulasi - Program Manajemen Kebersihan Menstruasi 3) Program Kesiapsiagaan Bencana berbasis Masyarakat - Pelatihan dan Simulasi Program kesiapsiagaan berbasis keluarga - Desa binaan melalui siaga bencana berbasis masyarakat (SIBAT) - Pelatihan pertolongan pertama untuk masyarakat - Kampanye keselamatan jalan raya	Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PMI DIY) bersama PMI Kabupaten/Kota dengan dukungan dari PMI Pusat, *International Federation Red Cross & Red Crescent* (IFRC), *International Committe of Red Croos* (ICRC), Pemerintah Daerah DIY, swasta, dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah maupun menangani Covid-19 sejak awal pandemi pada Maret 2020 sampai dengan tahun 2021. Berbagai respons kesiapsiagaan digulirkan untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19, diantaranya adalah: a. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan menjadi bagian dari satuan tugas penanganan Covid-19 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. b. Edukasi terhadap personel PMI dan Mitra PMI c. Perlindungan terhadap personel PMI d. Promosi dan edukasi masyarakat. Dalam rangka mendukung respons kesiapsiagaan tersebut ada berbagai inisiatif yang dikembangkan oleh PMI DIY: a. Penghimpunan Logistik *Stockpile* bahan-bahan bantuan untuk didistribusikan ke PMI Kabupaten/Kota, PMI Kecamatan, Kecamatan di Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten/Kota, Kwarda Pramuka DIY, Gerakan Pemuda Anshor, Kwarda Pramuka DIY, 27 rumah sakit rujukan Covid-19 dan wisma karantina Covid-19 b. Mitigasi ▪ Edukasi pada masyarakat ▪ Aktivasi Pusat Data dan Informasi PMI DIY dan Kabupaten/Kota c. Preventif ▪ Disinfeksi area umum, di antaranya fasilitas pendidikan, pemerintahan, rumah ibadah, fasilitas

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			kesehatan, pemukiman penduduk, pasar, jalan raya, perkantoran dan sebagainya. ▪ Pembagian Alat Perlindungan Diri (APD) ▪ Pembagian masker ▪ Pembagian *hand sanitizer* ▪ Pembagian paket perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ▪ Pembagian sprayer ▪ Pembagian megafon (edukasi) ▪ Pembagian disinfektan ▪ Pembagian tempat cuci tangan portabel ▪ Pemanfaatan truk gunner spray, lima mobil pikap yang dilengkapi disel, tandon air dan selang semprot untuk disinfeksi d. Dukungan Penanganan ▪ Pelayanan ambulans ▪ Pelayanan pemakaman baik Covid maupun non Covid ▪ Pelayanan kesehatan ▪ Promosi kesehatan ▪ Dukungan psikososial ▪ Pelatihan Relawan ▪ Mobiliasasi Relawan e. Pelayanan Darah ▪ Penyediaan darah yang aman, mudah dijangkau dan berkualitas di lima Unit Donor Darah PMI Kabupaten/Kota di DIY ▪ Penyediaan Plasma Konvalesen (saat ini baru ada di UDD PMI Kota Yogyakarta) ▪ Kendala terkait Plasma Konvalesen adalah sulitnya mendapatkan data penderita Covid-19, sehingga dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait data tersebut sehingga kebutuhan Plasma Konvalesen dapat terpenuhi f. Program Percepatan Penangangan Covid-19 Terdapat 26 desa di antaranya adalah 10 desa di Sleman, 10 desa di Bantul dan 6 desa di Gunungkidul

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Respons kesiapsiagaan yang digulirkan oleh PMI DIY sejak Maret 2020 hingga 4 Februari 2021 dengan jangkauan pelayanan sebagai berikut a. Penyemprotan Disinfektan Penyemprotan disinfektan telah menjangkau 2.230 titik dengan penerima manfaat sejumlah 649.525 orang. Sedangkan titik-titik lokasi yang telah dijangkau di antaranya adalah 100 titik area fasilitas kesehatan, 504 rumah ibadah, 440 kantor pemerintahan, 434 pemukiman, 322 lokasi pendidikan, 14 terminal/stasiun, dan 410 lokasi lainnya. Penyemportan disinfektan menggunakan gunner spray mencapai beberapa titik di wilayah DIY. Untuk penerima manfaat sampai dengan awal tahun 2021 mencapai 1.278.214 orang. b. Promosi Kesehatan Promosi kesehatan kepada masyarakat telah menjangkau penerima manfaat sejumlah 52.211 orang. c. Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan PMI DIY telah menjangkau 1.210 orang penerima manfaat. d. Pelayanan Ambulans Respons pelayanan ambulans baik emergency maupun *non emergency* sejumlah 576 respons terdiri dari pelayanan pemakaman sejumlah 274, sementara pelayanan *emergency* sejumlah 270 respons e. Dukungan Pelayanan Psikososial Pelayanan Psikososial telah menjangkau penerima manfaat sejumlah 195 orang. f. Pelayanan Sosial Pelayanan sosial PMI DIY selama tahun 2020 telah menjangkau penerima manfaat 521 orang. g. Distribusi Air Bersih PMI DIY telah mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi di antaranya dalah 61 masjid dan 11 sekolah dengan penerima manfaat 47.858 orang. h. Komunikasi Risiko (KIE)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			Selama tahun 2020 PMI DIY telah mendistribusikan 20 megafon, 4.400 poster, 4.000 brosur, 1.100 stiker, 30 spanduk, 1 baligo dan 100 kalender dalam rangka respons kesiapsiagaan krisis kesehatan. Komunikasi risiko melalui pemberitaan di berbagai media juga telah mencapai 305 berita dan pemberitaan khusus tentang pelayanan darah (stok darah) di berbagai media cetak dan elektronik. Selain hal tersebut juga disebarkan melalui media sosial PMI DIY yakni twitter, instagram dan website.

k. Trans Jogja

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	PT Trans Jogja sebagai operator Bus Perkotaan Trans Jogja yang dijalankan dengan sistem *buy the service*, kehadirannya sudah membantu memenuhi sarana transportasi yang nyaman, aman, tepat waktu dan harga terjangkau. Namun masih banyak persoalan yang perlu di selesaikan misalnya; beban subsidi pemda yang terus naik dari waktu kewaktu. Pendekatan BOP yang selama di laksanakan perlu mendapatkan pengawasan yang lebih baik agar menekan kebocoran subsidi yang ada. Kedua, jumlah penumpang yang menggunakan sarana bus trans jogja masih belum mampu memenuhi biaya operasional, sehingga beban subsidi terus naik dari waktu kewaktu. PT AMI sebagai pihak penyedia jasa, dalam prakteknya harus bekerja sama dengan PT Tugu Trans sebagai operator. Hal ini antara lain di sebabkan bahwa kehadiran PT AMI hanya sebagai badan hukum daerah (BUMD) yang ditunjuk sebagai penyedia jasa transpotasi milik pemda DIY dengan sistem *Buy The Service*.	Secara prinsip, penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy the Service* kepada PT Anindya Mitra Internasional, yang juga dilandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 (PP 74/2014) tentang Angkutan Jalan, di mana prinsip yang diacu adalah pada Bab X tentang Subsidi Angkutan Penumpang Umum, dengan ketentuan-ketentuan yang terinci pada pasal 107 – pasal 111. Penunjukan PT AMI sebagai pengelola Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja juga telah mengacu pada PP 74/2014 pada Pasal 110 huruf b. yang menyebutkan bahwa pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Penumpang umum dalam trayek bersubsidi dilakukan melalui proses penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan. Prinsip subsidi dalam PP 74/2014 merupakan bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan. Implementasi konsep subsidi yang diterapkan pada Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja mengacu pada Pasal 108 ayat (1) huruf b. di mana besaran subsidi yang diberikan oleh	1. Mengurangi kebocoran subsidi pemda kepada PT. AMI dengan peningkatan pengawasan, khusunya pada pola operasional transjogja yang berkaitan dengan kilometer layanan kepada masyarkat 2. Meningkatkan kualitas pelayanan atau Pengelolaan Sistem Angkuta Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Service* (BTS)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Pemerintah Daerah didasarkan pada selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum. Di dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2018 juga telah diamanatkan hak dan kewajiban dari masing-masing di mana salah satu ketugasan yang dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan DIY adalah: a. merencanakan, membangun dan mengembangkan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan dokumen perencanaan; b. menetapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal); c. mengawasi pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja agar tersedia layanan yang memenuhi SPM dengan tata kelola yang baik (good governance); d. menetapkan kebijakan terkait penyediaan dan pemeliharaan Prasarana Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja; e. menetapkan tarif layanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja. Dari aspek-aspek di atas maka rekomendasi dari DPRD DIY untuk meningkatkan pengawasan akan dilaksanakan secara lebih intensif oleh Dinas Perhubungan DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.	



Bab 4

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

2020

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Pengalokasian tugas pembantuan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sebagian anggaran Kementerian/Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang berkaitan dengan tugas pembantuan meliputi:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
7. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemda DIY mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui 2 (dua) kementerian yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp52.800.481.000,00. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp51.772.518.674,00 atau 98,05%, dengan realisasi kinerja fisik sebesar 99,57%.

Tabel 4.1. Alokasi Tugas Pembantuan Untuk Pemda DIY Tahun Anggaran 2020

No	Kementerian/Lembaga	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kementerian Pertanian	33.787.477.000,00	33.108.122.474,00
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	19.013.004.000,00	18.664.396.200,00

Sumber: Bappeda DIY, 2021

C. PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melalui 5 (lima) Satuan Kerja (Satker) yang terinci sebagai berikut:

Tabel 4.2. Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2020

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Nama Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.03.4.049087/2020	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	15.086.199.000
2	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.04.4.049088/2020	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	3.935.479.000
3	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.05.4.049089/2020	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	2.449.665.000
4	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.06.4.049090/2020	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	5.532.496.000
5	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.08.4.049094/2020	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	6.783.638.000

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY,2021

Adapun rincian pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

a. Satker Tanaman Pangan (049087)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	**15.086.199.000**	**14.626.891.603**	**96,96**	**100**
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	5.376..613.000	5.209.183.700	96,89	100
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	300.911.000	230.624.266	76,64	100
Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	6.871.000.000	6.731.372.625	97,97	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	702.150.000	691.808.712	98,53	100
Kegiatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1.835.525.000	1.763.902.300	96,10	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

b. Satker Hortikultura (049088)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	**3.935.479.000**	**3.801.653.690**	**96,60**	**100**
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	715.000.000	697073500	97,49	100
Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	180.000.000	180.00.000	100	100
Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	877.100.000	866.066.300	98,74	100
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	2.163.379.000	2.058.515.090	95,15	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

c. Satker Perkebunan (049089)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	**2.449.665.000**	**2.438.616.378**	**99,55**	**100**
Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan	321.350.000	321.350.000	100	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	762.560.000	756.237.195	99,17	100
Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	224.800.000	224.794.500	99,99	100
Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	415.500.000	414.541.338	99,77	100
Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	725.455.000	721.900.041	99,51	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY,2021

d. Satker Peternakan (049090)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	**5.532.496.000**	**5.483.525.122**	**99,11**	**100**
Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak	15.580.000	15.580.00	100	100
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	106.877.000	83.946.500	78,54	100
Kegiatan Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	4.527.180.000	4.508.858.676	99,60	100

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	146.646.000	145.894.100	99,49	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	281.758.000	279.895.453	99,34	100
Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	454.455.000	449.350.634	98,88	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

e. Satker Sarana dan Sarana Pertanian-Tanaman Pangan (049094)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	**6.783.638.000**	**6.757.435.681**	**99,61**	**100**
Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	4.864.000.000	4.863.013.470	99,98	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	799.718.000	778.454.661	97,34	100
Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	864.550.000	863.808.350	99,91	100
Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	255.370.000	252.159.200	98,74	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

(1) Ketersediaan benih bantuan tanaman pangan tidak sinkron dengan kebutuhan petani karena tidak sesuai dengan jadwal tanam. Varietas benih yang tersedia tidak sesuai dengan varietas yang diminta oleh petani.

(2) Penanaman mengalami kemunduran karena menyesuaikan kondisi iklim.

(3) Realisasi pada Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mengalami kendala, ada sub kegiatan yang tidak bisa direalisasikan seluruhnya karena mengikuti Pedum dan Juklak/Juknis yang ada, yaitu pembelian produk petani yang terdampak langsung Covid-19 dimana produk petani akan dibeli jika harga produk di bawah BEP. Beberapa produk komoditas hortikultura yang di awal pandemi Covid-19 mengalami penurunan harga signifikan, pada saat anggaran DIPA *refocussing* turun harganya sudah membaik (diatas BEP), sehingga tidak semua anggaran bisa direalisasikan.

(4) Kegiatan pada Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak bisa mencapai target yaitu Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan. Target *output* pada sub kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan sebanyak 27.750 dosis terealisasi 26.623 dosis atau 95,94% karena tidak semua target ternak yang divaksinasi Antrax bisa direalisasikan. Dari target vaksinasi Antrax sebanyak 2.000 ekor hanya terealisasi 873 ekor karena sebagian besar ternak yang disasar dalam kondisi bunting.

b) Solusi

(1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian agar ke depan bantuan benih dapat disesuaikan dengan permintaan/kebutuhan petani serta memperhatikan kaidah pemberian bantuan agar dapat memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat lokasi/tempat.

(2) Pendampingan bagi petani untuk mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI).

(3) Memberikan masukan ke Pusat untuk meningkatkan kecepatan dalam hal memproses *refocussing* anggaran/revisi DIPA serta menerbitkan Pedum tepat waktu agar tidak kehilangan momentum dalam pelaksanaan kegiatan di daerah.

(4) Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pemilik ternak yang akan divaksinasi Antrax bahwa vaksinasi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi ternak yang sedang bunting.



Gambar 4.1. Dokumentasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY terbagi menjadi Satuan Kerja Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan sebagai Satuan Kerja Tugas Pembantuan Preservasi Jalan Nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat No. 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat dua Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (luasan areal lebih dari 3.000 ha atau lintas provinsi) di DIY yang di Tugas Pembantuankan, yaitu Jaringan Irigasi Van der Wicjk (luas 5.159 ha) dan Jaringan Irigasi Kalibawang (7.152 ha). Adapun Tugas Pembantuan pada Bidang Bina Marga tercantum pada Perjanjian Kinerja TA 2020 Dinas PUP dan ESDM DIY berupa kegiatan Preservasi pada Jalan Nasional Ruas Yogyakarta – Wonosari – Duwet. Lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 73,51 km, Rehabilitasi Minor Jalan sepanjang 1,00 km, Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 665,1 m, Rehabilitasi Jembatan sepanjang 155,7 m dan Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan sepanjang 4,48 km. Seluruh tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY pada tahun 2020, seluruhnya dapat dilaksanakan 100% tanpa ada kendala/hambatan yang berarti, dengan rincian sebagai berikut:

a. Program/Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, dilakukan melalui Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Bina Marga sebagai berikut:

1) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, meliputi:

a) Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi kewenangan Pusat;
b) Melaksanakan Penyusunan Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi kewenangan pusat;
c) Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi.

2) Bidang Bina Marga, meliputi:

a) Penyelenggaraan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta.
b) Koordinasi keterpaduan terhadap kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan fungsional OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Tabel 4.3. Pagu Anggaran Tugas Pembantuan Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2020

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3.648.372.000,00
2	Direktorat Jenderal Bina Marga	15.364.632.000,00
JUMLAH		19.013.004.000,00

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2021

b. Pengelolaan Sumber Daya Air

Tujuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air khususnya kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air adalah untuk mengoperasikan, menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi, perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan.

Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Bina OP Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk kegiatan ini dengan pagu awal sebesar Rp3.692.805.000,00 dan pada tanggal 4 Mei 2020 mengalami revisi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat tentang *refocussing* atau pemotongan anggaran untuk penangganan pandemi Covid-19 sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp3.648.372.000,00.

Tabel 4.4. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2020

NO	Program/Kegiatan/Paket	Sasaran	PAGU	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
			TOTAL *)	Rp *)	%	%
	(033.06.10) Program Pengelolaan Sumber Daya Air		3,648,372	3,533,261	96.84	100
	(5300) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA		3,648,372			
	(5300.001) Jaringan Irigasi Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan Dipelihara		3,402,150			
1	Operasi Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wicjk	5.159 ha	978,866	978,866	100	100
2	Operasi Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang	7.152 ha	1.754.878	1.754.878	100	100
3	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wicjk	45,41 km	398.946	365,339	91.58	100
4	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang	125,89 km	287.921	287.477	99.85	100
5	Penyusunan Pelaporan OP Irigasi	1 Lap	15,590	15,590	100	100
	(5300.970) Layanan Dukungan Manajemen Satker		212,171			
6	Administrasi Kegiatan	12 Bln	206,529	125,469	61,80	100

NO	Program/Kegiatan/Paket	Sasaran	PAGU	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
			TOTAL *)	Rp *)	%	%
7	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)	28 Lap	5,642	5,642	100	100

(dalam ribuan) *Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2021*



Gambar 4.2. Perbaikan Saluran Sekunder Kedundang dan Babat Semak Saluran Sekunder Cerbonan Wetan

c. Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan

Untuk pelaksanaan pengelolaan penyelenggaraan jalan, Satker Dinas PUP dan ESDM DIY mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp15.364.632.000,00. Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.131.135.000,00 (98,48%). Secara keseluruhan kinerja tugas pembantuan penyelenggaraan bidang jalan pada tahun 2020 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.5. Target dan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Jalan di DIY TA 2020

No	Kegiatan/Paket	Pagu DIPA (Rp000,-)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp000,-)	(%)	
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.946.757	5.890.840	99,06	100
2	Rekonstruksi Jalan	1.900.238	1.900.238	100,00	100
3	Pemeliharaan Rutin Jembatan	512.024	512.023	100,00	100
4	Rehabilitasi Jembatan	626.449	626.448	100,00	100
5	Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	4.987.768	4.964.308	99,53	100
6	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.391.396	1.237.278	88,92	100
JUMLAH		15.364.632	15.131.135	98,48	100

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2021

Tabel 4.6. Lokasi Kegiatan Pemeliharan Rutin Jalan di DIY Tahun 2020

No	Nomor Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Lokasi						Panjang Perkerasan (km)
1	008	Jalan Yogyakarta – Piyungan	km	5,100	-	km	13,901		8,880
2	009	Jalan Piyungan - Bts. Kab. Gn. Kidul	km	13,860	-	km	17,860		4,000
3	010	Jalan Bts. Kab. Bantul – Gading	km	17,550	-	km	29,070		12,79
4	011	Jalan Gading – Gledag	km	30,820	-	km	35,720		5,31
5	012	Jalan Gledag - Wonosari	km	35,820	-	km	44,510		8,640
6	013	Jalan Lingkar Selatan Wonosari	km	36,800	-	km	42,570		5,770
7	014	Jalan Bts. Kota Wonosari - Ngeposari - Pacucak - Bedoyo – Duwet	km	39,720	-	km	66,280		27,03
8	014 11 K	Jalan Sugiyopranoto (Wonosari)	km	39,070	-	km	40,510		1,470
	JUMLAH								**73,510**

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2021

Tabel 4.7. Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Mayor Jalan dan Rehabilitasi Jembatan di DIY Tahun 2020

No	Nomor Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Lokasi						Panjang Perkerasan (km)
1	010	Jalan Bts. Kab. Bantul – Gading	km	24,500	-	km	25,500		1,000
	JUMLAH								**1,000**

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2021

Tabel 4.8. Lokasi Kegiatan Pemeliharan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2020

No	Nama Jembatan	Lokasi Ruas Jalan	Panjang (m)
1	Jembatan Ketandan	Yogyakarta – Piyungan	11,10
2	Jembatan Sekarsuli	Yogyakarta – Piyungan	46,20
3	Jembatan Kuning	Yogyakarta – Piyungan	14,15
4	Jembatan Buntung	Yogyakarta – Piyungan	16,40
5	Jembatan Gawe II	Piyungan - Bts. Kab Gunung Kidul	31,10
6	Jembatan Gawe I	Piyungan - Bts. Kab Gunung Kidul	41,20
7	Jembatan Tambalan II A	Piyungan - Bts. Kab Gunung Kidul	25,75
8	Jembatan Tambalan II B	Piyungan - Bts. Kab Gunung Kidul	22,00
9	Jembatan Duren	Bts. Kab Bantul – Gading	21,40
10	Jembatan Pentung Baru	Bts. Kab Bantul – Gading	76,80
11	Jembatan Irung Petruk	Bts. Kab Bantul – Gading	110,50
12	Jembatan Karangsari	Bts. Kab Bantul – Gading	6,88
13	Jembatan Saradan	Bts. Kab Bantul – Gading	12,70
14	Jembatan Dadap	Bts. Kab Bantul – Gading	7,20
15	Jembatan Suru	Bts. Kab Bantul – Gading	14,00
16	Jembatan Salak	Bts. Kab Bantul – Gading	10,00
17	Jembatan Bunder	Bts. Kab Bantul – Gading	61,10
18	Jembatan Kepil	Gading – Gledag	9,00
19	Jembatan Logandeng II	Gading – Gledag	7,00
20	Jembatan Logandeng III	Gading – Gledag	11,00
21	Jembatan Kemorosari	Gledag – Wonosari	6,50

No	Nama Jembatan	Lokasi Ruas Jalan	Panjang (m)
22	Jembatan Kajor	Gledag – Wonosari	7,00
23	Jembatan Grogol I	Gledag – Wonosari	7,40
24	Jembatan Mokol II	Gledag – Wonosari	10,00
25	Jembatan Jirak B	Bts. Kota Wonosari - Ngeposari – Pacucak	30,80
JUMLAH			**665,1**

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2021

Tabel 4.9. Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2020

Uraian	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)
	Jalan		Jembatan (m)	Jalan		Jembatan (m)	
	Efektif (km)	Fungsional (km)		Efektif (km)	Fungsional (km)		
Cakupan TP	1	73,51	820,8-	1	73,51	820,8	100,00

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2021

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 juga wajib dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran indikator kinerja di Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.10. Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi	%	
	Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Output					
		Pemeliharaan Rutin Jalan	73,51	km	73,51	km	100
		Rekonstruksi Jalan	1,0	km	1,0	km	100
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	665,1	m	665,1	m	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target	Realisasi	%	
		Rehabilitasi Jembatan	155,7	m	155,7	m	100
		Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	4,48	km	4,48	km	100
		Layanan Internal (*Overhead*)	1,00	Layanan	1,00	Layanan	100

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2021



Gambar 4.3. Pemeliharaan Berkala Jembatan: Pembersihan Jembatan Jembatan Pancuran



Gambar 4.4. Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan: Jalan Yogyakarta - Piyungan



Bab 5

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

2020

PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY

A. GAMBARAN UMUM

Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan merupakan satu kesatuan dengan Pembangunan Daerah secara keseluruhan. Tugas-tugas Pemerintahan Daerah dan Keistimewaan DIY termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012, urusan keistimewaan DIY meliputi Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Kolaborasi kelima urusan keistimewaan tersebut dipadukan dengan pembangunan sektor lainnya akan dapat mendorong terwujudnya peradaban yang unggul yang akan mewarnai pemajuan kebudayaan di Indonesia.

Sebagai bagian dari pembangunan daerah, tujuan pembangunan urusan keistimewaan di DIY adalah untuk mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, di samping untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal menjadi dasar pengaturan urusan keistimewaan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan urusan keistimewaan, filosofi dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian keistimewaan adalah *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi,* dan *Manunggaling Kawulo Gusti* yang menunjukkan keseimbangan spiritual dan material serta keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat menuju kesejahteraan lahir maupun batin. Nilai filosofi tersebut dimanifestasikan dalam norma yuridis dari UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Perdais maupun Peraturan Kepala Daerah (Pergub) turunannya, diantaranya yaitu Pergub DIY tentang Organisasi Perangkat Daerah DIY, Pergub DIY No. 131 Tahun 2018 Tentang Penugasan Keistimewaan, Pergub No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, serta Pergub DIY No. 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.



Gambar 5.1. Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY
Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2021

Pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Urusan Tata Cara, Urusan Kelembagaan, Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan, Urusan Tata Ruang Urusan Keistimewaan termuat dalam Pergub Nomor 131 Tahun 2018.

Tabel 5.1. Ruang lingkup Penugasan Urusan Keistimewaan

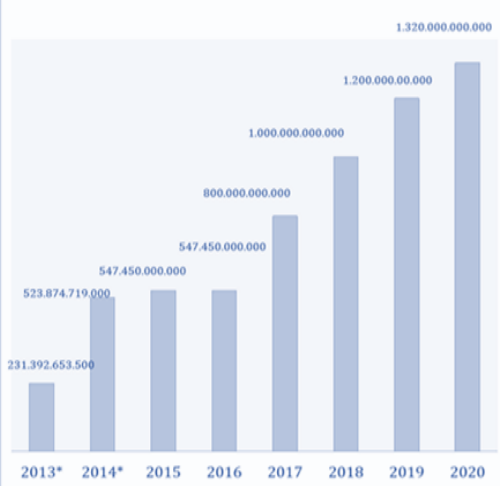
No	Urusan	Ruang Lingkup Penugasan
1	Kelembagaan	a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana), dan Kecamatan (Kapanewon/Kemantren); b. Menyusun regulasi untuk pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. Pengelolaan sumber daya manusia; dan d. Peningkatan budaya pemerintahan.
2	Kebudayaan	a. Pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki; b. Penyusunan regulasi internal mekanisme pemanfaatan anggaran pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki; c. Pengadaan barang/jasa, yang diatur oleh Kasultanan jika pengadaan yang dimaksud tidak termasuk dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki oleh Kasultanan; dan

No	Urusan	Ruang Lingkup Penugasan
		d. Melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan.
3	Pertanahan	a. Koordinasi penatausahaan pertanahan yang merupakan tanah desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; b. Penatausahaan pertanahan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang telah digunakan oleh Pemda DIY; c. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang telah digunakan oleh Pemda DIY; d. Pemberian izin pemanfaatan tanah desa; dan e. Fasilitasi sistem informasi pertanahan.
4	Tata Ruang	a. Penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; b. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; c. Penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; d. Pendanaan dalam rangka pemanfaatan ruang pada satuan ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten; e. Pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis; f. Pendanaan penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten; g. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; h. Pengendalian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis; i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang pada satuan ruang strategis; dan j. Penyusunan regulasi pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis.

Sumber: Pergub DIY No. 131 Tahun 2018

Semenjak dialokasikan pertama kali pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, besaran alokasi Dana Keistimewaan dari Pemerintah cenderung meningkat sebagaimana ditunjukan pada gambar berikut:

TAHUN	TOTAL PAGU
2013*	231.392.653.500
2014*	523.874.719.000
2015	547.450.000.000
2016	547.450.000.000
2017	800.000.000.000
2018	1.000.000.000.000
2019	1.200.000.000.000
2020	1.320.000.000.000



Gambar 5.2. Anggaran/Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2020
Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021

Agar pemanfaatan dan penyerapan dana keistimewaan lebih optimal, pelaksana dana keistimewaan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan masing-masing penerima. Pada tahun 2020, pelaksana BKK Dana Keistimewaan sudah menjangkau ke seluruh Kabupaten/Kota di DIY, dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 5.2. Alokasi Dana Keistimewaan Kabupaten/ Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kota Yogyakarta	53.712.360.784,00
2	Kabupaten Bantul	19.708.493.490,00
3	Kabupaten Kulon Progo	102.452.762.400,00
4	Kabupaten Gunungkidul	87.909.776.537,00
5	Kabupaten Sleman	44.531.429.000,00

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021

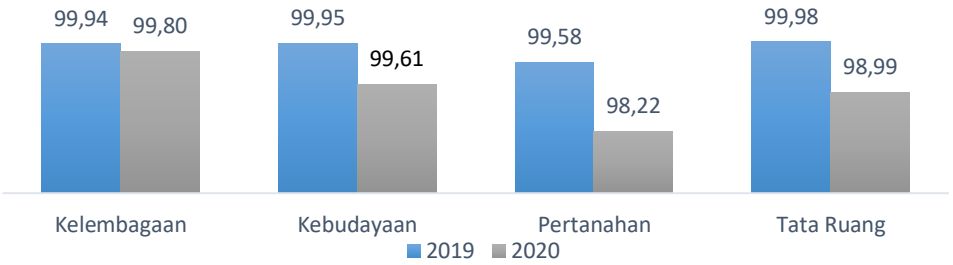
Permenkeu No. 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara *rigid* mengatur target serapan keuangan kegiatan Dana Keistimewaan yang dibagi dalam tiga tahap, meliputi Tahap I sebesar 15%, Tahap II sebesar 65%, dan Tahap III sebesar 20%. Skema anggaran Dana Keistimewaan per tahap tersebut merupakan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja yang menekankan bahwa realisasi penyerapan dan realisasi kinerja fisik pada setiap tahap telah tercapai sekurangnya 80% pada tahap bersangkutan. Berdasarkan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional bahwa Dana Keistimewaan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi. Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2020, realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada empat urusan keistimewaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3. Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2020

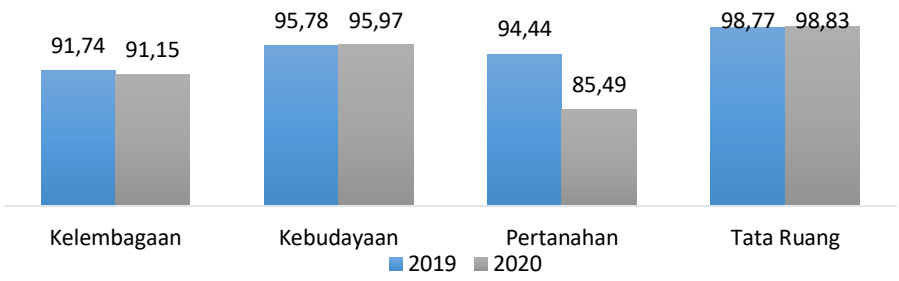
No.	Urusan	Jumlah		Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
		Program	Kegiatan		Keuangan	Fisik
1.	Kelembagaan Pemerintahan Daerah	9	35	14.554.390.500	91,15	99,80
2.	Kebudayaan	19	44	744.003.521.915	95,97	99,61
3.	Pertanahan	3	10	19.469.545.187	85,49	98,22
4.	Tata Ruang	4	17	541.972.542.398	98,83	98,99
	Total	**35**	**106**	**1.320.000.000000**	**96,94**	**99,07**

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021 (data diolah)

Pelaksanaan program kegiatan Dana Keistimewaan Pemda DIY tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp1.320.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh milyar rupiah) terdiri dari 35 program dan 106 kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,07% dan capaian keuangan sebesar Rp1.279.572.655.079,63 atau 96,94%. Capaian tahun 2020 tersebut merupakan capaian kumulatif dari Tahap I, II, dan III. Kinerja fisik pada seluruh urusan tidak dapat optimal disebabkan terbatasnya aktivitas pelaksanaan kegiatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.



Gambar 5.3. Realisasi Fisik Per Urusan Tahun 2019 dan 2020
Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021 (data diolah)



Gambar 5.4. Realisasi Keuangan Per Urusan Pada 2019 dan 2020
Sumber: BPKA DIY, 2021 (data diolah)

B. URUSAN KELEMBAGAAN

1. Kondisi Umum

Kelembagaan Pemda DIY termuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta dipertegas dengan Permendagri No.8 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang digunakan sebagai dasar bagi Pemda DIY dan DPRD DIY dalam membentuk kelembagaan Pemda DIY Pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Kelembagaan Pemda DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip

responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli.

Prioritas program dan kegiatan urusan kelembagaan ini adalah kegiatan perencanaan dan pengendalian keistimewaan, fasilitasi Paramparapraja, penyebarluasan informasi, pengelolaan SDM pengampu keistimewaan, peningkatan budaya pemerintahan SATRIYA, penataan kelembagaan asli dan lain-lain. Penataan kelembagaan diarahkan pada kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdais No.1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Daerah.

Tahun 2019 telah dilakukan penyesuaian nomenklatur dengan nilai-nilai keistimewaan hingga tingkat kabupaten/kota yaitu Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana), dan Kecamatan (*Kapanewon/Kemantren*). Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2019 menjadi dasar nama kecamatan di kabupaten berubah menjadi *kapanewon*, dan di kota berubah menjadi *kemantren*, Camat di kabupaten menjadi *panewu* dan di kota menjadi *mantri pamong praja*, desa di kabupaten berubah menjadi *kalurahan* dengan kepala *kalurahan* disebut *lurah*. Sementara untuk kelurahan di wilayah Kota tidak mengalami perubahan nomenklatur baik di kelembagaan maupun jabatannya.



Gambar 5.5. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Lurah se-Kabupaten Gunungkidul oleh Bupati Gunungkidul
Sumber: Biro Umum, Humas dan Protokol, 2021

Keselarasan, keserasian, dan keterpaduan antarlembaga dalam penyelenggaraan keistimewaan sangat penting untuk meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian terhadap OPD pemangku urusan keistimewaan. Etika dan etos dalam penyelenggaraan pelayanan diperlukan penguatan bidang SDM aparatur Pemda DIY dan kabupaten/kota, penggiatan sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan SATRIYA (Pergub DIY No. 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan SATRIYA) serta diklat keistimewaan bagi aparatur agar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pemerintahan SATRIYA menjadi pedoman, acuan, pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

Internalisasi nilai-nilai budaya juga diberikan bagi ASN baik yang di Pemda DIY maupun Pemkot dan Pemkab se DIY agar para aparatur memiliki sikap mental dan perilaku yang sesuai dengan tata nilai budaya Yogyakarta. Tidak kalah penting juga melakukan penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan keistimewaan agar keistimewaan dapat dipahami oleh masyarakat. Penyebarluasan dapat melalui kunjungan langsung ke lokus sasaran, *podcast*, melalui media sosial, dan lain sebagainya.



Gambar 5.6. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Keistimewaan Melalui *Podcast*
Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kelembagaan diampu oleh 17 (tujuhbelas) Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY serta 11 (sebelas) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp14.554.390.500,00 untuk membiayai pelaksanaan 9 program dan 35 kegiatan. Secara keseluruhan persentase realisasi fisik sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 99,80%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar 91,15%. Rekapitulasi kinerja urusan kelembagaan secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.4. Rekapitulasi Kinerja Urusan Kelembagaan

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
URUSAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH					
1	Biro Organisasi Setda DIY	1.150.752.750	923.024.400	80,21	100
2	Biro Hukum Setda DIY	325.000.000	302.111.200	92,96	100
3	Badan pendidikan dan Pelatihan DIY	200.000.000	194.580.000	97,29	100
4	Badan Kepegawaian Daerah DIY	15.548.000	193.685.500	99,05	100
5	Paniradya Kaistimewan DIY	7.755.231.850	7.057.635.675	91,00	99,66
6	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	238.854.000	212.495.000	88,96	100
7	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	288.945.000	280.186.500	96,97	100
8	Baguan Hukum Setda Kabupaten Sleman	58.000.000	57.063.925	98,39	100
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kaupaten Sleman	394.975.000	57.063.925	98,39	100
10	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	353.560.000	320.035.400	90,52	99,20
11	Bagian Administrasi Pemerintah Desa SetdaKabupaten Bantul	705.759.000	659.257.000	93,41	100
12	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	211.000.000	205.740.000	97,51	100
13	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	174.296.500	157.614.750	90,43	100
14	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo	1.289.277.500	1.247.489.300	96,76	100
15	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	339.350.500	318.708.421	93,92	100
16	Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul	215.575.400	190.958.600	88,58	100
17	DP3ABPMD Kabupaten Gunungkidul	658.265.000	555.390.500	84,37	100
	TOTAL	**14.554.390.500**	**13.266.845.421**	**91,15**	**99,80**

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021 (data diolah)

C. URUSAN KEBUDAYAAN

1. Kondisi Umum

Pelaksanaan program/kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan didasarkan pada Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, yang disebutkan dalam Pasal 5, bahwa objek kebudayaan meliputi 7 (tujuh) aspek, yaitu: 1. Nilai-nilai budaya; 2. Pengetahuan dan teknologi; 3. Bahasa; 4. Adat istiadat; 5. Tradisi luhur; 6. Benda; 7. Seni. Masyarakat DIY yang istimewa dimaknai sebagai masyarakat yang memiliki nilai budaya unggul dan sekaligus makmur secara ekonomi sehingga perlu dilakukan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, maritim, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Masyarakat yang istimewa adalah masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifannya tinggi. Hal ini ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya tinggi, serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berbasis budaya dipandang memadai. Masyarakat yang istimewa juga merupakan masyarakat yang derajat budaya kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial-budayanya baik. Disamping itu, masyarakat yang istimewa adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang istimewa adalah masyarakat yang kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai. DIY yang istimewa juga dimaknai sebagai masyarakat sejahtera secara ekonomis, karena pembangunan perekonomiannya berbasis nilai budaya lokal dan ilmu pengetahuan. Yogyakarta menjadi istimewa ketika mampu mewujudkan wilayah yang aman dan nyaman bagi siapapun terutama dari aspek religiusitas serta sosial-budaya.

Kebijakan penyelenggaraan kewenangan dalam urusan kebudayaan diwujudkan melalui pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang dilaksanakan dengan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan urusan kebudayaan yaitu: Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa/kelurahan dan Masyarakat. Urusan kebudayaan mencakup nilai dan perilaku manusia berserta produk yang dihasilkannya dalam perspektif keistimewaan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya melalui beberapa program, yang dilakukan dengan pelindungan fisik maupun non fisik, pengembangan untuk pemajuan kebudayaan.

Pada tahun 2020, prioritas kegiatan yang dilaksanakan Pemda DIY untuk Urusan Kebudayaan antara lain:

a. Desa Mandiri Budaya
b. Taman Budaya Provinsi/Kabupaten/Kota
c. DIY Warisan Budaya Dunia
d. Festival *Iconic* Daerah
e. Museum *World Class* (Sonobudoyo Dll) dan Wajib Kunjung Museum
f. Pendidikan Karakter Berbasis Budaya
g. Pola Pembinaan Obyek Kebudayaan
h. Pemeliharaan dan Pengembangan Obyek Kebudayaan (WBTb, Sejarah Dll)
i. Pemulihan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat
j. Budaya Maritim/Bahari
k. Pelayanan Publik Dalam Kebudayaan Secara Digital dan Multi Media
l. Penguatan Pelestari Lembaga Budaya

Upaya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya dilakukan melalui pemeliharaan dan pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya seperti: Konstruksi Masjid Giriloyo, Pekapalan, Ketandan, Gereja Kotabaru; Perawatan Rumah Kalang Tegalgendu, Perawatan Joglo Jagalan Kotagede , Perawatan Rumah Suryoputran (Walet Putih), Perawatan Dalem Gamelan, Perawatan Situs Kauman, Perawatan Tugu Pal Putih - Panggung Krapyak, Perawatan Jagang Benteng Vredeburg dan Lokomitif Bima Kunthing, Perawatan nDalem Langenastran, Perawatan nDalem Patehan, Perawatan Joglo Panembahan, Perawatan Benteng Kraton; Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB: Situs Pleret, Kalasan, Ketandan, Pathoknagoro, Pojok Beteng Lor Wetan; DED Notoprojo. Selain itu dilakukan Pembangunan Gedung Galeri Batik di Museum Sonobudoyo Unit I, Penataan Ruang Transit MSB Unit II menjadi Ruang Pamer Museum, dan Pembuatan Perencanaan Virtual Museum.

Pelaksanaan program/kegiatan urusan kebudayaan juga dilakukan oleh kabupaten/kota, misalkan di Kabupaten Kulon Progo melalui Pengamanan Candi Pringtali Kapanewon Samigaluh, Pengamanan Situs Gonotirto Kapanewon Kokap, pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya (Media Center) , penataan Lingkungan Aset Pesanggarahan Pakualaman dan Lingkungan Geo Heritage Eks Tambang Mangaan Kliripan. Demikian halnya penyelesaian Taman Budaya Gunungkidul yang terus dilakukan untuk mewujudkan pusat kebudayaan, khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 5.7. Pojok Beteng Lor Wetan pasca direvitalisasi
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Dampak dari Pandemi Covid-19 turut membatasi ruang ekspresi pelestarian seni dan budaya, namun di sisi lain memunculkan peluang dengan memanfaatkan *platform* melalui pemanfaatan IT. Sistem daring menjadi alternatif strategis dalam pembinaan organisasi seni dan budaya pada masa pandemi. *Channel* Youtube menjadi semakin dikenal oleh pelaku seni dan budaya sebagai media ekspresi, media sosialisasi dan sarana pengembangan seni budaya. Pembatasan kegiatan-kegiatan massal yang mengundang peserta, dialihkan menjadi penyelenggaraan even seni budaya yang dilakukan pada ruang tertutup dan direkam dengan video untuk selanjutnya ditayangkan ke media, baik secara *livestreaming* maupun siaran tunda. Inovasi dan kreativitas tersebut diharapkan menjadi tumpuan pembangunan kebudayaan selama pandemi.



Gambar 5.8. Livestreaming Ngayogjazz di Desa Mandiri Budaya
Sumber: Paniradya Kaistimewa, 2021

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kebudayaan diampu oleh 36 (Tiga puluh enam) Perangkat Daerah terdiri dari 20 (dua puluh) Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY dan 16 (enam belas) Perangkat Daerah di lingkungan kabupaten/kota. Alokasi anggaran pada urusan kebudayaan sebesar Rp744.003.521.915,00 untuk membiayai pelaksanaan 19 program dan 44 kegiatan. Secara keseluruhan persentase realisasi fisik sampai dengan akhir 2020, sebesar 99, 61%, sedangkan realisasi keuangannya mencapai Rp714.035.144.010,84 atau sebesar 95,97%. Rekapitulasi kinerja urusan kebudayaan secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.5. Rekapitulasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020

No	PA/KPA	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan Sampai Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			Rp	(%)	
1	Dinas Kebudayaan DIY	276.814.504.942	261.666.622.714	94,53	97,94
2	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	12.468.457.066	11.568.102.454	92,78	100
3	Taman Budaya Yogyakarta	6.053.305.600	5.821.612.940	96,17	100
4	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	10.417.891.890	9.530.808.732	91,49	99,50
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul	620.520.000	618.557.500	99,68	100
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	279.925.000	279.925.000	100	100
7	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul	255.000.000	243.770.000	95,60	100
8	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	473.269.200	472.440.100	99,82	99,82
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	425.000.000	425.000.000	100	100
10	Dinas Kominfo Kabupaten Bantul	1.067.775.000	1.060.789.650	99,35	100
11	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	208.381.500	208.381.500	100	100
12	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	40.789.854.150	40.420.852.720	99,10	99,98
13	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	6.436.238.350	6.147.293.372	95,51	100
14	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	1.381.500.000	1.338.871.000	96,91	97,60
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta	3.179.046.915	3.178.701.965	99,99	100
16	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	350.000.000	337.270.550	96,36	100
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	639.564.000	625.673.000	98,07	100
18	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	93.604.771.950	91.586.440.552	97,84	99,98
19	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	81.273.171.00	80.080.153.950	98,53	99,85
20	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	2.821.288.500	2.164.062.618	76,70	100
21	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	38.06.714.950	38.000.811.123	97,67	100
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	4.076.626.500	3.696.064.350	90,66	100

No	PA/KPA	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan Sampai Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			Rp	(%)	
23	Badan Penghubung Daerah DIY	857.695.000	833.072.888	97,13	100
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	864.876.500	626.484.000	72,44	76,34
25	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	3.261.818.000	3.123.877.920	95,77	100
26	Dinas Pariwisata DIY	6.927.825.500	5.041.079.190	72,77	96,66
27	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1.358.892.800	1.345.105.350	98,99	100
28	Dinas P3AP2 DIY	797.875.500	714.697.500	89,58	100
29	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.081.965.250	3.842.226.000	94,13	100
30	Dinas Sosial	2.424.100.000	2.082.845.270	85,92	100
31	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	1.783.547.000	1.729.742.300	96,98	100
32	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	36.286.983.752	32.426.991.803	89,36	100
33	Dinas Pekerjaan Umum ESDM	183.994.000	175.140.400	96,23	100
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	3.975.000	3.975.000	100	100
35	Biro Bina pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	224.676.000	213.716.000	94,90	100
36	Balai Kesatuan Hutan Yogyakarta	182.000.000	175.140.400.000	96,23	100
	TOTAL	**744.003.521.915**	**714.035.144.011**	**95,97**	**99,15**

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021 (data diolah)

D. URUSAN PERTANAHAN

1. Kondisi Umum

Urusan Pertanahan sebagai bagian dari kewenangan keistimewaan di DIY difokuskan pada penataan tanah Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana amanat yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon sebagai hak milik Kasultanan dan Kadipaten. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk tujuan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Urusan Pertanahan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam hal izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; izin membuka tanah; dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Urusan Pertanahan menggunakan aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan

Pemerintah Desa. Pengelolaan dan Pemanfaatan tersebut diwujudkan dalam aktivitas:

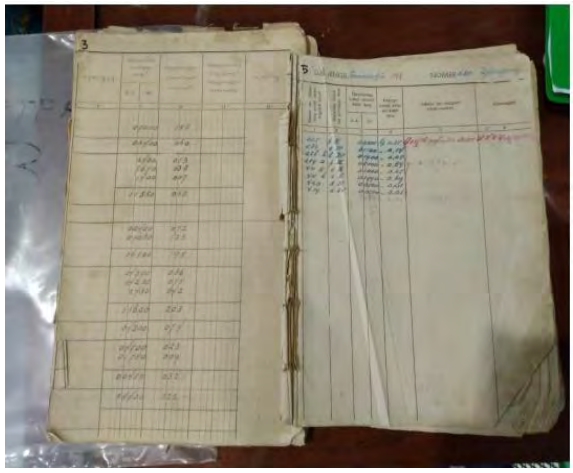
a. Penatausahaan tanah, merupakan kegiatan administrasi pertanahan yang meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
b. Pemeliharaan, merupakan aktivitas memelihara data-data objek serta pemanfaat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
c. Pelestarian, merupakan upaya untuk melindungi dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
d. Pelepasan, adalah kegiatan peralihan hak atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
e. Pengawasan, adalah pengawasan secara administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan penatausahaan tanah, pemeliharaan, pelestarian dan pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pokok-pokok kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah milik Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus melalui izin dari pihak Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Pengadministrasian keberadaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.



Gambar 5.9. Pemasangan Tegas Batas Desa
Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021 (data diolah)



Gambar 5.10. Pemeliharaan Dokumen
Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021 (data diolah)

2. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pertanahan diampu oleh 8 (delapan) Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Biro Hukum Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan DIY serta 5 (lima) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kabupaten/kota di wilayah DIY. Alokasi dana Urusan Pertanahan sebesar Rp19.469.545.187,00 untuk membiayai 3(tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Secara keseluruhan persentase realisasi fisik sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 98,22%,

sedangkan realisasi keuangannya adalah Rp16.644.881.594,21 atau dengan persentase sebesar 85,49%. Rekapitulasi kinerja urusan Pertanahan secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.6. Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020

No	Nama PA/ KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	3.402.890.800	2.684.873.637	78,90	94,23
2	Biro Hukum Setda DIY	383.313.000	359.413.057	93,76	100
3	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	264.197.400	243.687.000	92,24	100
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	1.239.550.000	1.194.422.250	96,63	100
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	3.857.701.400	3.409.016.075	88,37	98,40
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	3.170.804.000	2.813.892.448	88,74	98,50
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	4.789.091.637	3.812.290.277	79,60	99,14
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	2.261.996.850	2.127.286.850	90,06	100
	TOTAL	**19.469.545.187**	**16.644.881.594**	**85,49**	**98,22**

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021 (data diolah)

E. URUSAN TATA RUANG

1. Kondisi Umum

Tata Ruang Keistimewaan merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada Tanah Kasultanan dan Kadipaten serta wilayah yang memiliki nilai-nilai keistimewaan dan strategis baik sebagian atau seluruhnya dan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan di DIY.

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Keistimewaan Tata Ruang sesuai pasal 54 ayat (1) Perdais DIY No. 1 Tahun 2013 diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta kawasan satuan satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Pasal 54 ayat (2) menegaskan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:

a. Kebijakan pengembangan struktur ruan
b. Kebijakan pengembangan pola ruang

Adapun kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Tata Ruang sesuai Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:

a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
c. Penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
d. Pelaksanaan penataan ruang;
e. Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang;
f. Penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
g. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
h. Pengendalian pemanfaatan ruang; dan
i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang dilakukan dengan prinsip mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan yang akan difokuskan pada 18 kawasan Satuan Ruang Strategis (kawasan keistimewaan).

Aspek tata ruang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelestarian Kawasan Strategis Keistimewaan, seperti sarana prasarana yang saling menunjang dan harus direncanakan dengan baik sesuai konteks kawasan yang merepresentasikan nilai dasar filosofi Keistimewaan Yogyakarta. Penataan ruang Urusan Keistimewaan meliputi juga penataan sistem transportasi pada 13 kawasan cagar budaya yakni kawasan Malioboro, Kota Baru, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Imogiri, Pleret, Parangtritis, Prambanan, Merapi, Sokoliman, Nglanggeran, dan Perkotaan Wates.

2. Progam dan Kegiatan Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Tata Ruang diampu oleh 15 (Lima belas) Perangkat Daerah yang terdiri dari 8(delapan) Perangkat Daerah lingkup Pemda DIY serta 7(tujuh) Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah DIY yang menangani Urusan Tata Ruang. Beberapa pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas pelaksanaan urusan Tata Ruang seperti Pembangunan JJLS, akses Prambanan – Lemahbang , koneksi Tawang - Ngalang- Gading, serta Kawasan bedah Menoreh. Beberapa kegiatan tersebut memiliki harapan untuk menumbuhkembangkan

kawasan disekitarnya, sehingga ketimpangan antar wilayah dapat dikurangi dan memberikan akses bagi masyarakat agar lebih produktif. Sedangkan beberapa kegiatan lain yang dlakukan pada tahun anggaran 2020 antara lain: Dukungan untuk Penataan SRS Keistimewaan Makam Raja Raja Mataram Imogiri, DED Jalan Ruas Imogiri-Dodogan (Segmen Mangunan-Dodogan), Dukungan untuk Penataan SRS Keistimewaan Pantai Selatan Kulon Progo: DED Peningkatan Jembatan Tirto, DED Peningkatan Jembatan Kedung Bongkot, DED Peningkatan Jembatan Bondalem; DED Peningkatan Jembatan Kedung Longan, DED Peningkatan Jembatan Mudal, DED Peningkatan Jembatan Tejogan, DED Peningkatan Jembatan Mrogo, DED Peningkatan Jalan Sermo-Klepu, FS Simpang Tak Sebidang di Kebon Rejo; Dukungan untuk Penataan SRS Keistimewaan Candi Prambanan - Candi Ijo: DED Jembatan Bokoharjo, DED Simpang Tak Sebidang Gayamharjo I, DED Simpang Tak Sebidang Gayamharjo II, serta Rehabilitasi Ruas Jalan Prambanan – Piyungan.

Alokasi anggaran Urusan Tata Ruang pada tahun 2020 sebesar Rp541.972.542.398,00 untuk membiayai pelaksanaan 4 (empat) program dan 17 (Tujuh belas) kegiatan. Secara keseluruhan persentase realisasi fisik tahap akhir sebesar 98,99%, sedangkan realisasi keuangannya adalah Rp535.625.784.053,58 atau sebesar 98,83%. Rekapitulasi kinerja Urusan Tata Ruang secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7. Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Ruang Tahun 2020

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
URUSAN TATA RUANG					
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	2.054.739.788	1.373.167.640	66,83	78,73
2	Dinas Perhubungan DIY	3.321.359.210	3.245.278.602	97,71	98,55
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	417.894.725.978	412.555.793.455	98,72	98,81
4	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	402.839.953	401.310.793	99,62	100
5	Biro Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah DIY	114.942.500	114.742.500	99,83	100
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	67.578.800	67.575.382.800	99,99	100
7	Dinas Lingkungan Hidup DIY	34.660.000	34.320.000	99,02	100
8	SATPOL PP	3.765.710.000	3.731.228.683	99,08	100
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	832.710.500	826.980.600	99,31	100
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	637.658.000	628.358.000	98,54	100
11	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	6.060.405.519	6.036.895.866	99,61	100

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
12	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	34.251.759.500	34.096.595.764	99,55	100
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul.	634.322.500	621.524.100	97,98	98,82
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.	1.922.778.450	1.919.115.950	99,80	99,99
15	Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo	2.465.130.500	2.465.089.300	100	100
	TOTAL	**541.972.542.398**	**535.625.784.054**	**98,83**	**98,99**

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021 (data diolah)



Gambar 5.11. Manajemen lalu lintas di Kawasan Sumbu Filosofi (Semi Pedestrian Malioboro)
Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021



Bab 6

Program Strategis DIY

2020

PROGRAM STRATEGIS DIY

A. PENANGANAN COVID-19

1. Latar Belakang

Covid-19 menjadi pandemi global sejak penemuan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Berdasarkan kasus tersebut, organisasi Kesehatan dunia WHO mendeklarasikan Darurat Kesehatan Masyarakat Global pada 30 Januari 2020 serta menetapkan penyakit tersebut novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease (Covid-19)* pada tanggal 12 Februari 2020. Pernyataan WHO tersebut dibarengi dengan penambahan jumlah kasus yang meningkat dan penyebaran wabah yang cepat di seluruh dunia (51.857 kasus konfirmasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%), 16 Februari 2021). Merespon kasus Covid-19 yang masuk ke Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana pertama kali pada 29 Februari 2020.

Penemuan kasus pertama bayi tiga tahun yang tertular karena perjalanan dari Depok, Jawa Barat yang diumumkan resmi oleh Pemda DIY 15 Maret 2020 merupakan titik awal dari masuknya Pandemi Covid-19 di DIY. Sampai dengan 23 Februari 2021, terdapat 34.229 total pasien yang tersuspek, 26.822 orang total akumulasi jumlah pasien positif terkonfirmasi Covid-19, sebanyak 20.567 pasien dinyatakan sembuh Covid-19, 652 pasien positif Covid-19 meninggal dunia, dan 568 orang suspek dalam pemantauan di DIY (sumber https://corona.jogjaprov.go.id/, diakses 24 Februari 2021). Dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 serta melindungi keselamatan masyarakat pada tahun 2020, Pemda DIY telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan berkaitan penetapan status tanggap darurat, pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, penyusunan rencana operasi, tata kerja aparatur, pengaturan pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Pemda DIY bersinergi dengan Kabupaten/ Kota dan Kementerian/ Lembaga,TNI/ Polri serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19. Instruksi Gubernur DIY Nomor 2/Instr./2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) untuk menjadi dasar awal dalam penanganan epidemi Covid-19 di wilayah DIY. Kebijakan-kebijakan tersebut melibatkan peran serta masyarakat, sebagaimana dalam *Sapa Aruh,* Gubernur DIY (23/03/2020) mengemukakan pentingnya kesadaran diri dari masyarakat sebagai faktor penting penanganan dan pencegahan Covid-19.

Lebih lanjut, dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di DIY, Pemda DIY telah menyusun Rencana Operasi Penanganan Covid-19 di DIY sebagai panduan pelaksanaan bagi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY. Rencana operasi mempertimbangkan, skenario untuk mengantisipasi kondisi terburuk, terutama lonjakan kasus yang sangat mungkin jauh diatas kapasitas pemerintah dan masyarakat, serta durasi pandemi yang panjang. Hal-hal ini bisa berdampak ketangguhan masyarakat yang berimplikasi pada efektivitas penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19 di DIY.

Penanganan Covid-19 di DIY bertujuan untuk meminimalkan Penyebaran Covid-19, jatuhnya korban dan dampak sosial ekonomi bagi warga masyarakat terdampak. Penanganan tersebut memiliki sasaran untuk:

a. Tercegahnya penyebaran Covid-19 dengan cepat dan tepat;
b. Pasien Covid-19 tertangani hingga sehat dan tuntas;
c. Terwujudnya ketangguhan sosial, ekonomi, dan pendidikan warga masyarakat menghadapi pandemi Covid-19;
d. Terjaminnya keterbukaan, kejelasan, kemudahan, partisipasi dan literasi informasi kepada warga masyarakat DIY dalam pencegahan dan penanganan Covid-19;

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan Penanganan Covid-19 di DIY adalah menjamin pelaksanaan penanganan Covid-19 di DIY dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan tujuannya adalah meminimalkan Penyebaran Covid-19, jatuhnya korban dan dampak sosial ekonomi bagi warga masyarakat terdampak. Adapun sasaran Kegiatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah untuk:

a. Tercegahnya penyebaran Covid-19 dengan cepat dan tepat;
b. Pasien Covid-19 tertangani hingga sehat dan tuntas;
c. Terwujudnya ketangguhan sosial, ekonomi, dan pendidikan warga masyarakat menghadapi pandemi Covid-19;
d. Terjaminnya keterbukaan, kejelasan, kemudahan, partisipasi dan literasi informasi kepada warga masyarakat DIY dalam pencegahan dan penanganan Covid-19;

3. Progres Sampai Akhir Tahun 2020

Kegiatan penanganan Covid-19 dilakukan oleh Bidang-bidang Gugus Tugas sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/Kep/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Nomor 78/Kep/2020 Tanggal 8 April 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Nomor 64/Kep/2020

tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Kegiatan yang dilakukan untuk penanganan Covid-19 untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

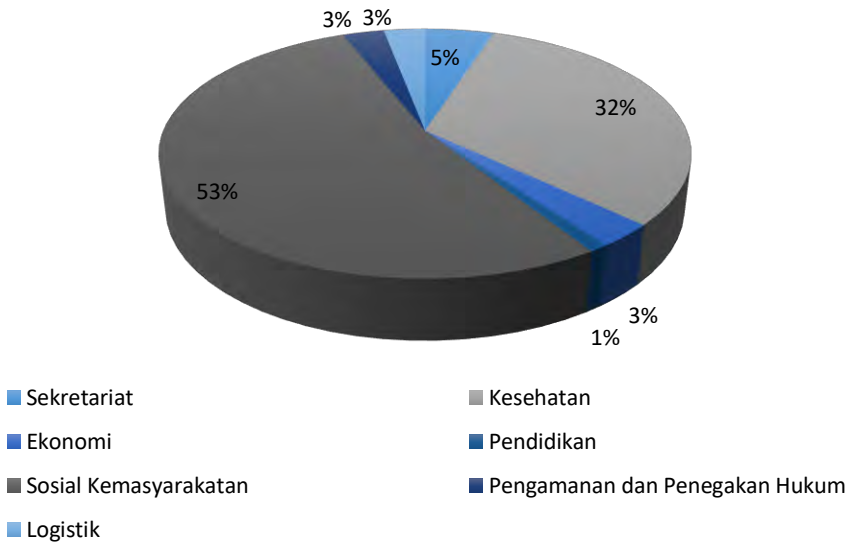
Tabel 6.1. Kegiatan Penanganan Covid-19 per Bidang

No	Bidang	Uraian Tugas	Kegiatan	Anggaran
1	**Sekretariat**	1. Mengkoordinasikan Penanganan Covid-19 setiap bidang 2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi 3. Menyiapkan Kegiatan Protokoler 4. Mengkoordinasikan laporan pelaksanaan harian	1. Dukungan manajemen Posko 2. Publikasi dan Diseminasi Informasi Publik Kegiatan Gugus Tugas Penanganan Covid19	**17.424.976.601**
2	**Kesehatan**	Pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah	1. Penyediaan alat kesehatan dan APD 2. Peningkatan Kapasitas dalam Disinfeksi Lingkungan dan Ambulans Transport Covid-19 pada Rumah Sakit di DIY 3. Penyediaan BMHP dan Peralatan/ Perlengkapan Skrining	**108.133.907.531**
3	**Pendidikan**	Melaksanakan Penanganan Dampak Ikutan bidang Pendidikan Bencana Covid-19	Penyediaan APD dan disinfeksi SMA /SMK /SLB	**3.586.395.000**
4	**Ekonomi**	Melaksanakan Penanganan Dampak Ikutan bidang Ekonomi Bencana Covid-19	1. Pemberdayaan siswa BLKPP 2. Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Debarkasi ke DIY 3. Kegiatan Padat Karya 4. Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok 5. Fasilitasi Pembangkitan Ekonomi 6. Fasilitasi dan Penerapan Protokol Kesehatan pada pelaku UMKM dan Pariwisata	**8.725.211.110**
5	**Sosial Kemasyarakatan**	Melaksanakan Penanganan Dampak Ikutan Sosial Bencana Covid-19	1. Penyelenggaraan Dapur Umum untuk *Shelter* (Karantina**)** 2. Bantuan Sosial Bagi	**183.270.928.000**

No	Bidang	Uraian Tugas	Kegiatan	Anggaran
			Lanjut Usia 3. Bantuan Sosial Bagi Difabel 4. Bantuan Sosial Bagi Mahasiswa Luar Daerah yang tidak bisa pulang 5. Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid-19	
6	**Pengawasan dan Penegakan Hukum**	Melaksanakan Penanganan Dampak Ikutan Bencana Covid-19	1. Operasi Pengawasan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka Pencegahan Covid-19 2. Pemeriksaan Pemudik di 3 wilayah perbatasan DIY – Jateng 3. Pengumpulan Data Informasi Keberadaan Orang Asing (bln Mei) 4. Verifikasi Data Mahasiswa Luar Daerah	**10.862.784.700**
7	**Logistik**	1. Melaksanakan Penanganan Dampak Ikutan Bencana Covid-19 melalui Penyediaan Logistik Non Kesehatan 2. Pengadaan belanja dukungan logistik untuk penanganan Covid-19 3. Pengadaan belanja pos dukungan gugus tugas penanganan Covid-19	1. Fasilitasi Dukungan Logistik untuk Penanganan Covid-19 2. Pengadaan belanja dukungan logistic dengan dana masyarakat 3. Pengadaan pos dukungan gusgas dengan dana masyarakat	**10.848.525.514**

Sumber: Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, 2021

Lebih dari separuh anggaran BTT APBD Tahun 2020 dipergunakan untuk Bidang Sosial Kemasyarakatan (53%) dan lebih dari seperempatnya untuk Bidang Kesehatan (32%), sebagaimana dapat dideskripsikan sebagai berikut



Gambar 6.1. Proporsi Alokasi BTT Untuk Penanganan Covid-19
Sumber: Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, 2021

4. Pelaksanaan Berdasar Rencana Operasi I

Penanganan bencana Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi dua Tahapan Rencana Operasi. Rencana Operasi TAHAP I dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Bulan Maret-April. Pada Rencana Operasi Tahap I ini dilaksanakan kegiatan pada 5 bidang gugus tugas yaitu:

a. Sekretariat Posko

Kegiatan Sekretariat Pos Komando Terpadu dalam rangka mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 adalah menyusun Rencana Operasi, mengerahkan sumber daya pelaksanaan penanganan Covid-19 dan menyusun laporan harian kepada Pengarah. Pos Komando Terpadu berkedudukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1) Menyusun Rencana Kebutuhan dan Belanja (RKB) untuk penanganan Covid-19 melalui Belanja Tidak Terduga APBD DIY.
2) Mengelola Anggaran dan Bantuan masyarakat untuk penanganan Covid-19, baik berupa uang maupun barang.
3) Dekontaminasi dan pemakaman jenazah terindikasi Covid-19.
4) Disinfeksi fasilitas umum.

5) Pelayanan informasi terkait Covid-19.
6) Koordiasi dan Penyusunan Laporan Harian.
7) Pelayanan Pos Kesehatan Petugas.

b. Bidang Kesehatan

Kegiatan Bidang Kesehatan pada Rencana Operasi Tahap I meliputi kegiatan untuk memastikan kesiapan sarana dan sumber daya kesehatan dalam menanganani Covid-19, antara lain:

1) Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat-alat Kesehatan untuk penanganan Covid-19.
2) Menyiapkan dan memastikan kesiapan Sumber Daya Rumah Sakit Rujukan Covid-19.
3) Pengelolaan Wisma bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19.
4) Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan peralatan/perlengkapan skrining untuk masyarakat.
5) Pengelolaan limbah medis PSC 119 DIY.
6) Peningkatan kapasitas dalam disinfektasi lingkungan dan ambulan transport Covid-19 pada Rumah Sakit di DIY.

c. Bidang Pendidikan

Kegiatan Bidang Pendidikan pada Rencana Operasi I meliputi kegiatan untuk memastikan Lingkungan Sekolah dilakukan disinfektasi dengan baik. Kegiatan ini berupa pengadaan disinfektan yang kemudian disebar untuk semua SMA/SMK/SLB di DIY.

d. Bidang Sosial

Kegiatan Bidang Sosial pada Rencana Operasi I direncanakan untuk memberi bantuan sosial bagi warga masyarakat yang melakukan karantina karena terindikasi Covid-19. Namun karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 di Desa, maka pada Rencana Operasi I ini bantuan sosial untuk warga tersebut tidak direalisasikan.

e. Bidang Kominfo

Kegiatan Bidang Komunikasi dan pada Rencana Operasi Tahap I meliputi publikasi informasi dan edukasi tentang Covid-19 baik melalui media luar ruang dengan billboard, spanduk dan leaflet serta melalui media elektronik dengan pembuatan video dan dialog interaktif.

5. Pelaksanaan Berdasar Rencana Operasi II

Penanganan bencana Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rencana Operasi TAHAP II dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78/Kep/2020 Tanggal 8 April 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Nomor 64/Kep/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan mulai Bulan April 2020. Pada Rencana Operasi Tahap II ini dilaksanakan kegiatan pada 7 bidang gugus tugas yaitu:

a. Sekretariat Posko

Kegiatan Sekretariat Pos Komando Terpadu dalam rangka mengkoordinasikan dan mengendalikan pelasanaan kegiatan penanganan Covid-19 pada Rencana Operasi ke II adalah memastikan tindak lanjut pelaksanaan rencana operasi, mengerahkan sumber daya pelaksanaan penanganan Covid-19 dan menyusun laporan harian kepada Pengarah. Pos Komando Terpadu berkedudukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1) Menyusun Rencana Kebutuhan dan Belanja (RKB) untuk penanganan Covid-19 melalui Belanja Tidak Terduga APBD DIY.
2) Mengelola Anggaran dan Bantuan masyarakat untuk penanganan Covid-19, baik berupa uang maupun barang.
3) Dekontaminasi dan pemakaman jenazah terindikasi Covid-19.
4) Disinfeksi fasilitas umum.
5) Pelayanan informasi terkait Covid-19.
6) Koordiasi dan Penyusunan Laporan Harian.
7) Pelayanan Pos Kesehatan Petugas.

Pelaksanaan kegiatan pada Renop Tahap II bidang sekretariat ini terdiri dari:

1) Penyediaan Dukungan Manajemen Posko Terpadu: kegiatan ini berupa penyediaan dukungan untuk manajemen Posko, termasuk pengadaan masker, coverall, makan-minum petugas, disinfektan, vitamin, sarung tangan dan item pendukung. Pengadaan ini dimaksudkan untuk mendukung kinerja manajemen Posko Terpadu sehingga bilamana terdapat kejadian yang membutuhkan penanganan dapat segera dilaksanakan penanganan dengan koordinasi pada Kabupaten/Kota, termasuk *dropping* bantuan dan tenaga bantuan.
2) Dekontaminasi dan Karantina Petugas: kegiatan ini berupa pengadaan yang terkait dengan kegiatan dekontaminasi dan karantina petugas. Setiap ambulance atau kendaraan yang mengangkut peralatan/bahan atau bantuan ke DIY terkait Covid-19 akan dilakukan dekontaminasi dan

petugasnya akan dilakukan karantina untuk menjamin keselamatan untuk semua.

3) Penyediaan Peralatan Kerja Petugas dan Relawan: kegiatan ini berupa pengadaan yang terkait dengan penyediaan peralatan kerja petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di DIY. Penyediaan peralatan kerja ini tentu harus didukung dengan peralatan yang sesuai dengan standar keselatamatan untuk mengurangi resiko terpapar oleh virus dan menjaga keselatan semua pihak yang terlibat.
4) Penyediaan dukungan Pos Kesehatan: kegiatan ini berupa pengadaan yang terkait dengan penyediaan peralatan kerja Pos Kesehatan untuk penanganan Covid-19 di DIY. Penyediaan peralatan kerja ini tentu harus didukung dengan peralatan yang sesuai dengan standar keselatamatan untuk mengurangi resiko terpapar oleh virus dan menjaga keselatan semua pihak yang terlibat.
5) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Pengamanan Personil dan Kesekretariatan: kegiatan ini berupa penyediaan APD untuk petugas pengubur jenasah terduga/positif Covid-19 di DIY untuk masing-masing Kabupaten/Kota di DIY.
6) Cadangan Tempat Pemakaman Jenazah Covid-19: kegiatan ini berupa pengadaan rencana tempat pemakaman untuk jenazah Covid-19 di DIY.
7) Penggandaan Panduan Deskata Covid-19 (Desa/Kampung Tangguh Covid-19): kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kepedulian pada tiap-tiap desa/kampung Tangguh bencana untuk ikut berperan serta dalam penanggulangan bencana epidemic Covid-19 di DIY. Jadi penanggulangan dimulai dari skala yang paling kecil dalam pemerintahan yaitu Desa/Kampung.
8) *Shelter*/Naungan Sementara Bagi WNA di Wisma Bandiklat DIY: kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan *shelter* dan fasilitasnya untuk WNA yang terpapar Covid-19 di DIY sebelum kemudian dikembalikan ke negara asal melalui kedutannya di Jakarta. WNA yang terpapar ini merupakan WNA India dan dilakukan isolasi di Badan Diklat DIY, Gunung Sempu, Bantul.
9) Penyediaan Humas dan Kominfo: kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Covid-19, agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar terkait pandemi Covid-19 di DIY. Kominfo dalam hal ini membantu memberikan tool dan alat bantu analisis untuk membangun kemudahan dan integrasi data antara bidang-bidang dalam Gugus Tugas Covid-19 di DIY.



Gambar 6.2. Informasi Covid-19 dari Humas Pemda DIY



Gambar 6.3. Tampilan Beranda https://corona.jogjaprov.go.id/

b. Bidang Kesehatan

Bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY yang memiliki banyak tugas dengan tingkat prioritas tinggi. Salah satu aspek penting dalam penanganan adalah efektivitas respon. WHO menyampaikan bahwa kajian efektivitas respon Covid-19 dapat

diamati dari tiga domain yaitu untuk menjawab apakah epidemi telah terkendali (epidemiologi), apakah sistem kesehatan mampu mengatasi kebutuhan yang mungkin kembali meningkat (sistem pelayanan kesehatan) dan apakah sistem mampu mendeteksi, mengelola kasus dan mengidentifikasi kenaikan jumlah kasus (surveilan). Indikator evaluasi tersebut telah ditetapkan dalam bagian evaluasi pedoman Kemenkes revisi ke-lima. Untuk mencapai efektivitas respon tersebut, gugus tugas bidang kesehatan telah menyusun dalam berbagai rangkaian program yang telah mempertimbangkan kontingensi surge capacity dan durasi yang diimplementasikan dalam berbagai program kegiatan selama lima bulan masa tanggap darurat. Sebagai bagian dari tahapan monitoring, laporan program perlu untuk disusun secara rutin sebagai tahapan dalam mengevaluasi bisnis proses dalam mencapai keefektifan respon. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah:

1) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
   a) Penguatan kewaspadaan dini dan surveilans di wilayah
   b) Pelaksanaan surveilans
   c) Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologidan kontak tracing
   d) Pelaksanaan Notifikasi Kasus
   e) Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kasus Covid-19
   f) Penguatan jejaring laboratorium
2) Program Pelayanan Kesehatan
   a) Menyusun draft kebijakan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
   b) Penyiapan sarana/prasarana/alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
   c) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan RS Rujukan Covid-19
   d) Monitoring utilisasi kapasitas pelayanan kritikal dan non kritikal RS Rujukan Covid-19
   e) Monitoring dan evaluasi implementasi protokol tatalaksana pasien di RS Rujukan
   f) Penguatan sistem rujukan
3) Program Sumber Daya Kesehatan
   a) Pelatihan Pengambilan Swab Nasofaring & Orofaring
   b) Pembentukan Tim Verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 tingkat Provinsi DIY
   c) Pengadaan logistik tahap I
   d) Pengadaan logistik tahap II phase 1 s/d phase 8
   e) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Covid-19 bersumber Pemda DIY

4) Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
   a) Penyebarluasan Informasi Program
   b) Pembinaan Pendampingan Masa pandemi
   c) Kajian KIA Gizi masa Pandemi
   d) Kegiatan Rutin dan Pengembangan Program pada masa pandemi
   e) Kemitraan Program KIA Gizi masa pandemi
   f) Kampanye Pencegahan Covid-19
   g) Pendampingan protokol Adaptasi Kebiasaan Baru
   h) Kajian Kepatuhan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19

c. Bidang Pendidikan

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DIY Bidang Pendidikan, yang dalam hal ini, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan Covid-19.

Satgas bidang pendidikan terus mengikuti dampak Covid-19 terhadap pendidikan, menganalisis kebijakan dan regulasi untuk selanjutnya menerbitkan ketentuan pelaksanaannya, meningkatkan kemampuan/kapasitas teknologi informasi dan pembelajaran jarak jauh, melaksanakan sterilisasi sarana dan prasarana untuk memastikan tidak terpaparnya peserta didik/mahasiswa, guru/dosen maupun karyawan, pendataan dan informasi dampak Covid-19 di lingkungan pendidikan, dan kesekretariatan/kehumasan.

Menindaklanjuti terbentuknya Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pendidikan melalui Keputusan Gubernur DIY nomor 64/KEP/2020, hasil analisis dampak pandemi Covid-19 terhadap bidang pendidikan, dan potensi bidang pendidikan untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19 di bidang pendidikan, maka program/kegiatan Gugus Tugas Bidang Pendidikan sebagai berikut:

1) Program Umum
   Yaitu semua program/kegiatan yang dilaksanakan satuan tugas bidang pendidikan, meliputi:
   a) Menetapkan kebijakan dan regulasi penanganan Covid-19 di bidang pendidikan sesuai perkembangan, termasuk berkaitan dengan protocol kesehatan, adaptasi kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian/ujian dan tindaklanjut.
   b) Meningkatkan kesiapan infrastruktur dan optimaliasasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran jarak jauh.
   c) Meningkatkan kesiapan satuan pendidikan/perguruan tinggi dalam

menyusun dan mengimplementasikan protokol kesehatan, seperti ketersediaan SOP pembelajaran, penataan sarana dan prasarana dan lingkungan, dll.

d) Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektoral (Kemenag, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota).

e) Koordinasi dan Kerjasama Instansi Vertikal (LLDikti, PT, LPMP).

2) Program Khusus

Yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan tugas bidang pendidikan dengan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) DIY, meliputi:

a) Sterilisasi/Penyemprotan Disinfektan yang dilaksanakan 3 (tiga) kali Pelaksanaan sterilisasi/penyemprotan disinfectan yang pertama dilakukan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta se-Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan pada 459 sekolah dan Kantor Induk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa.

b) Penyediaan Sistem verifikasi Berkas PPDB secara daring/daring Kegiatan ini berupa pembuatan sebuah aplikasi verifikasi secara daring PPDB SMA/SMK Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Aplikasi ini digunakan oleh Panitia PPDB SMA/SMK Negeri untuk melakukan verifikasi data usulan rekomendasi yang digunakan untuk tahap selanjutnya yaitu seleksi PPDB daring. Rekomendasi yang diterbitkan ialah untuk jalur prestasi, afirmasi (peserta didik dari keluarga kurang mampu), pindah tugas orang tua, dan peserta didik dari sekolah luar DIY.

c) Pengadaan APD untuk sekolah dalam pelaksanaan di era pendidikan new normal. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang dilaksanakan adalah pengadaan masker sebanyak 2.295 dus dan *faceshield* sebanyak 18.360 buah. Masker dan *Faceshield* didistribusikan kepada Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada SMA (164 sekolah), SMK (215 sekolah), dan SLB (79 sekolah) di wilayah masing-masing. Masing masing sekolah menerima 5 dus masker @50 *pcs* dan 40 buah *faceshield*.

d. Bidang Sosial Kemasyarakatan

Beberapa permasalahan sosial yang teridentifikasi pada masa pandemi Covid-19 adalah:

1) Kerentanan dan potensi tertular sehubungan pandemi Covid-19 di kalangan masyarakat miskin dan lanjut usia yang tinggal sendiri

2) Keresahan dan konflik sosial sehubungan ketakutan warga terhadap pendatang dari luar DIY, sehingga melakukan upaya *lockdown* lokal di lingkungan mereka
3) Masalah sosial di kalangan pekerja informal sehubungan kebijakan *social* dan *physical distancing* yang berakibat kehilangan sumber penghasilan
4) Perkembangan data yang sangat dinamis

Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan sosial akibat pandemi ini adalah sebagai berikut:

1) Perlindungan kelompok rentan terhadap bencana Covid-19 melalui
   a) Pemberian Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan terdampak Covid-19
   b) Penyiapan tempat karantina bagi masyarakat yang rentan terdampak Covid-19 dan pendatang dari luar daerah yang tidak diterima oleh masyarakat
   c) Perlindungan terhadap relawan yang bertugas
2) Pemulihan kondisi pasca tanggap darurat

   Pada tahapan pemulihan maka gugus tugas akan melaksanakan layanana dukungan sosial kepada masyarakat untuk mengkondisikan masyarakat untuk mengkondisikan masyarakat agar dapat melepaskan semua kecemasan dan berdamai dengan perubahan situasi, menumbuhkan kesadaran agar tetap mematuhi protokol kesehatan, bersemangat untuk melanjutkan kehidupan dengan norma – norma yang baru

   Langkah – langkah strategis diperlukan untuk menerapkan kebijakan dalam mengatasi persoalan diperlukan agar upaya penanganan dapt langsung secara cepat dan optimal. Langkah – langkah strategis penanganan dampak pandemi Covid-19 yang direncanakan meliputi:

   a) Koordinasi dan komunikasi dengan BPBD DIY dan Dinas Sosial kabupaten/Kota dalam:
      - Pembagian tugas penyediaan bansos bagi masyarakat rentan
      - Penyiapan dan pembagian tugas dalam pengelolaan tempat karantina bagi masyarakat yang rentan terdampak Covid-19 dan pendatang dari luar DIY yang ditolak warga
      - Penyiapan data penerima bantuan sosial
      - Rencana teknis distribusi bantuan sosial
   b) Penyelenggaraan Dapur Umum bagi masyarakat yang rentan terdampak Covid-19 (ODP) dan pendatang dari luar daerah yang tidk diterima oleh masyarakat (OTG) di tempat karantina

c) Penyediaan bantuan sosial berupa bantuan sembako bagi kelompok rentan
d) Penyediaan APD bagi relawan yang bertugas
e) Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum yang dimungkinkan menjadi tempat berkumpul dan beraktivitas masyarakat seperti halnya pasar – pasar tradisional
f) Pelayanan dukungan psikososial dalam masa pasca tanggap darurat

3) Kegiatan di Luar karantina/Isolasi

Selaku koordinator Gugus Tugas Dinas Sosial segera melakukan identifikasi permasalahan dan langkah-langkah yang diperlukan. Data-data yang dihimpun meliputi: kesiapan data masyarakat terdampak Covid-19 dengan konsentrasi pada masyarakat miskin pada desil1-2 dalam data DTKAS, kebutuhan Alat Pelindung Diri, kebutuhan sarana dan prasarana untuk disinfeksi lingkungan, dan identifikasi tempat-tempat umum yang ditengarai menjadi tempat berkumpul dan beraktivitas masyarakat untuk menghitung kebutuhn untuk mencuci tangan.

Guna memenuhi kebutuhan rasa aman dan perlindungan maka disusun skema bantuan bagi kelompok rentan dengan kriteria:

- Masyarakat yang kurang mampu terdampak Covid-19 layak dibantu dikuatkan dengan surat keterangan RT/RW/Dukuh
- Lanjut usia terlantar
- Disabilitas

4) Pembagian Alat Pelindung Diri

Pada situasi pandemi Covid-19 ketersediaan alat pelindung diri sangat diperlukan untuk menekan laju penyebaran virus. Relawan petugas dan masyarakat kiranya perlu dilindungi. Relawan dan petugas yang berkegiatan di ruang terbuka dan di tempat – tempat umum sangat membutuhkan APD. Masyarakat yang masih belum mempunyai pemahaman akan bahaya Covid-19 dan atau kesadaran akan protokol kesehatan perlu dibuka pemahamannya dan dibiasakan untuk menggunakan alat pelindung diri yang salah satu pendekatannya adalah dengan pembagian masker.

Gugus tugas melalui Dinas Sossial telah menyediakan alat perlindungan diri berupa:

a) Alat Perlengkapan Diri untuk penanganan Covid-19 untuk Tagana sebanyak 100 paket di bulan April 2020 terdiri atas: coverall suit, sepatu boot, sarung tangan non steril, masker N95, Hand Sanitizer 0,5 liter, multi vitamin dan madu, Oksigen 500 ml
b) Pengadaan Alat Perlengkapan Diri untuk mendukung pelayanan *shelter* tahap I di bulan April 2020 meliputi: coverall suit, masker, sarung tangan non steril hand sanitizer, sepatu boot dan multi vitamin
c) Pengadaan Alat Perlengkapan Diri untuk penanganan Covid-19 untuk Petugas *Shelter* di bulan Mei 2020 meliputi: Hand Sanitizer 0,5 liter, multi vitamin dan madu, sepatu boot
d) Pengadan Alat Perlengkapan Diri untuk mendukung pelayanan *shelter* di bulan Mei 2020 meliputi: hand sanitizer, multi vitamin sepatu boot.

5) Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19

Berpedoman peraturan-peraturan tersebut diatas maka Dinas Sosial DIY beberapa kali menggelar rapt koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota untuk melakukan pemetaan data terkini, melakukan pemilahan berdasarkan kriteria bantuan dan menyandingkan data yang diperoleh agar diperoleh rumusan data calon penerima bantuan sosial yang tepat sesuai peraturan dn kemampuan keuangan daerah. Rumusan-rumusan tersebut ditindaklanjuti dengan rapat rapat koordinasi tingkat atas oleh jajaran Sekertaris Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota demi memperoleh data yang benar-benar valid dan program bantuan sosial tepat sasaran.

Pendataan awal dan verivikasi data dilaksanakan dari level terbawah yang melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan, Pendamping PKH, Pendamping Penyandang Disabilitas, Pendamping Lanjut Usia pada lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, ketua RT, Ketua RW, pengelola data dan aparat perencana dan pelaksana teknis pada pemerintah di tingkat Desa, Dinas Sosial Kabupaten/kota dan provinsi. Skema bantuan berubath-ubah mengikuti perubahan kebijakan di tingkat pusat.

Dalam perjalanan kegiatan selanjutnya dijumpai banyak perubahan rencana maupun pelaksanaan akibat adanya perubhan yang sangat cepat dan perkembangan situasi sosial dan kebijakan dari pusat maupun daerah.

Peraturan-peraturan baru dari berbagai instansi dipemerintahan pusat dari berbagai lini dan sektor serta merta mengubah perencanaan sedemikan rupa sehingga kegiatan berlangsung tidak sebagaimana yang

direncanakan. Peraturan yang cukup berdampak terhadap program kegiatan gugus tugas bidang sosial kemasyarkaatan di DIY antara lain:

a) SE Kemensos No 3 tahun 2020 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah tanggal 24 Maret 2020, yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen Lnjamsos tentang Pedoman Penggunaan CBP yang menggariskan beberapa peraturan yang mengerucut pada kesimpulan bahwa dlm rangka Covid-19 pemanfaatan CBP bersinggungan dg kode etik kesehatan ttg data BNBA Suspect, ODP dan PDP, atau masyarakat dari wilayah Zona merah sehingga susah diterapkan. Sehubungan banyak persyaratan berkaitan dengan ketentuan kesehatan yang sulit diterapkan Kabupaten/Kota di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bersedia memanfaatkan CBP.
b) Permensos RI nomor 22 tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyalran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana telah mengatur bahwa provinsi dapar memanfaatkan CBP setelah menetapkan status tanggap darurat dan bila cadangan Kabupaten/Kota sudah habis,. Berdasarkan hal itu maka cadangan beras milik pemerintah provinsi dalam situasi bencana pandemi Covid-19 juga tidak dapat dimanfaatkan.
c) SE Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa tanggal 24 Maret 2020, yang menegaskan bahwa Padat Karya Tunai Desa menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat desa karena dpat menambah pendapatan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Surat Edaran ini menjadi dasar perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan sub bidang lain mmenjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
d) SE Menteri Sosial Republik Indnoesia Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 Tentang Perluasan Program Sembako yang merupakan pengembangan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai yang bekerjasama distibusinya bekerjasama dengan Himbara dan E-warung. Program ini akan menjangkau perluasan penerima dari 15,2 kpm menjadi 20 juta KPM, serta meningkatan indeks dari Rp150.000,-/bulan/KPM menjadi Rp200.000,-/bulan/KPM.

e) Kebijakan Menteri Sosial Republik Indonesia tanggal 4 April 2020 **Tentang Perluasan KPM PKH.** Dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos menempuh kebijakan perluasan kepesertaan menjadi 10 juta KPM, dan percepatan penyaluran dari semula 3 bulan menjadi perbulan

f) Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes, PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Amanah peraturan iniadalah bahwa Dana Desa pada saat sekarang diprioritaskan untuk: Pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan BLT - Dana Desa.

Dalam peraturan ini ada amanah untuk memanfaatkan Dana Desa guna membantu Keluarga miskin yang terdampak bencana non alam termasuk wabah pandemi Covid-19 melalui BLT-Dana Desa. Kriteria Keluarga miskin yang dapat menerima bantuan merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Data Penerima Bantuan ini dihimpun berdasarkan pendataan RT/RW di desa. Besaran bantuan yang diterima mencapai Rp600 ribu. Bantuan diterima selama tiga bulan, terhitung sejak April hingga Juni. Cara penyaluran dana dapat dilaksanakan dengan dua cara. Bagi mereka yang memiliki rekening bank, uang akan ditransfer ke rekening dan bagi calon penerima yang tidak memiliki rekening bank, uang akan diberikan langsung.

g) Surat Edaran Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial No. B.106/ Kemensos/4/KS.03/3/2020 tentang Instruksi terkait Perlindungan Penyandang Disabilitas selama Pandemi Corona Virus 19 (Covid-19). Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial menginsruksikan bahwa Penyandang Disabilitas yang terdampak Covid-19 untuk mendapatkan bantuan sosial dapat diusulkan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial. Untuk memastikan data penerima bantuan, Dinsos Kabupaten/Kota, memasukan data calon ke dalam SIKS- NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) sebagai *back bound* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Instruksi ini disampaikan pula oleh Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial

melalui acara Vidcon pada tanggal 16 April 2020 yang meminta Kabupaten/Kota untuk menyampaikan usulan bantuan sosial dan agar memvalidasi, serta diperbolehkan menambahkan sasaran data calon penerima bansos bagi LU dan PD.

h) Kepmensos nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bansos Sembako dan Bansos Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19

i) SE KPK nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data DTKS dan Data Non DTKS dalam Pemberian Bansos, yang merekomendasikan penggunaan data rujukan DTKS untuk keperluan bantuan sosial, dan bila diketemukan ketidak sesuaian di lapangan dimana penduduk yang seharusnya berhak menerima namun datanya tidak ada dalam DTKS maka bantuan dapat tetap diberikan. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa data penerima bantuan tersebut harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data-data yang terkumpul harus dipadankan data NIK-nya dengan data penduduk di Dinas Dukcapil setenpat untuk memastikan bahwa data penduduk tersebut memang nyata.

Peraturan-peraturan itu menjadi pedoman dalam pelaksanaan salah satu kegiatan Gugus Tugas Sosial Kemasyarakatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan sosial sehingga dalam perjalanan penyusunan keputusan bantuan sosial bagi masyarakat miskin beberapa kali mengalami perubahan sasaran, yaitu:

a) Tanggal 3 April 2020:
   (1) Bansos Fakir Miskin = 28.716 KK (data DTKS Desil 1-2)
   (2) Bansos Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas masih dalam proses pendataan cepat

b) 6 April 2020
   (1) Bansos Fakir Miskin = 28.716 (desil 1-2 data DTKS)
   (2) Bansos Lansia = 750 (non DTKS)
   (3) Bansos PD = 2969 (Data SIMPD< >18 th)

c) 9 April 2020 sesuai hasil Kesepakatan dg Kab/Kota tentang pembagian tanggungjawab
   (1) Bansos Fakir Miskin = 76.216 (desil 1-4), sembako @ Rp 625.000
   (2) Bansos Lansia = 750 (non DTKS), sembako @ Rp266.000
   (3) Bansos PD = 2969 (Data SIMPD, >18 th), sembako @ Rp266.000

d) 15 April 2020 sesuai hasil rapat dengan Dinsos Kabupaten/Kota dan Bidang Sosial Budaya Bappeda DIY

(1) Bansos Fakir Miskin = 24.647 (desil 3-4 data DTKS)
(2) Bansos Lansia = 750 (non DTKS)
(3) Bansos PD = 2969 (Data SIMPD >18 th)

e) 17 April 2020 sesuai Rakor Pencocokan Data dengan Bappeda dan Kepala Dinsos Kab/Kota dan memetakan bantuan APBD Kab/Kota
   (1) Bansos Fakir miskin = 43.362 KK (Jumlah Data DTKS yang belum menerima bantuan apapun)
   (2) Penerima Bansos LU = 750 (Non DTKS)
   (3) Penerima Bansos PD = 375 (PD yang menjadi KK krn nominalnya sama dg yg Fakir Miskin atas koreksi TAPD)
f) 21 April 2020 sesuai Rakor Data sandingan Bansos Covid-19 (APBD DIY, APBD KAB/Kota dan APBDES bersama Dinsos Kab/Kota dan Bappeda DIY).

   Bansos FM = 43.314 KK (DTKS yang belum menerima bantuan apapun)
g) 25 April 2020 muncul usulan bantuan bagi mahasiswa sebanyak: 453 orang, yang belum tervalidasi oleh Badan Kesbangpol DIY.
h) 23 April 2020 terbit surat Gubernur DIY nomor 443/7091 tentang Tindak Lanjut Rakor Sekda se-DIY yang selanjutnya mengatur mengenai perubahan skema bansos bagi fakir miskin menjadi *top up*, yang jumlah sasaran akan dilakukan *cleansing* oleh Dinas Kominfo DIY. Sasaran penerima bantuan adalah KPM PKH dari data DTKS yang menerima bantuan kurang dari enam ratus ribu rupiah dan telah dilakukan *process cleansing* untuk mendapatkan data KK dan NIK unik. (angka awal sebelum ke angka 169.383)

Dengan mengakomodasi beberapa permohonan bantuan lainnya maka Gubernur DIY telah memutuskan untuk memberikan bantuan sosial yang tertuang dalam:

a) Keputusan Gubernur DIY Nomor: 103/KEP/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Penerima Bansos Bagi Fakir Miskin Dalam Rangka Corona Virus Disease 2019.
b) Keputusan Gubernur DIY Nomor: 107/KEP/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerima Bansos Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar Dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor: 108/KEP/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Beras Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19.

c) Keputusan Gubernur DIY Nomor: 108/KEP/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Sosial Berupa Beras Kepada Masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019

d) Keputusan Gubernur DIY nomor 184/KEP/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dan Mahasiswa Luar Daerah Terdampak Bencana Corona Virus Disease 2019 Bulan Juni 2020.

e) Keputusan Gubernur DIY Nomor: 200/KEP/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahap II.

Kriteria penerima bantuan sosial berdasarkan peraturan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a) Keputusan Gubernur DIY Nomor: 103/KEP/2020 diterbitkan tanggal 12 Mei 2020 mengatur tentang Penerima Bansos Bagi Fakir Miskin Dalam Rangka Corona Virus Disease 2020. Keputusan ini mengamanahkan bantuan sosial bagi 169.383 KK fakir miskin kepada masyarakat yang memenuhi kriteria: masuk DTKS, memiliki NIK unik dan KK yang menerima bansos BLT, BST ataupun PKH kurang dari 600 rb. Bagi yang memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan sosial tunai 400 ribu rupiah per KK selama tiga bulan.

b) Keputusan Gubernur DIY Nomor: 107/KEP/2020 2020 diterbitkan tanggal 13 Mei 2020 mengatur tentang Penerima Bansos Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar Dalam Rangka Corona Virus Disease 2019 menetapkan bantuan sosial sebagai berikut:

   (1) Penyandang Disabilitas yang masuk dalam DTKS, mempunyai NIK unik dan KK akan menerima bantuan sosial senilai Rp 300.000,00 selama tiga bulan mulai April sampai dengan Juni 2020

   (2) Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang Non DTKS, mempunyai NIK unik dan tinggal sendiri (KK) akan menerima bantuan sosial senilai Rp 300.000,00 selama tiga bulan mulai April sampai dengan Juni 2020

   (3) Mahasiswa Luar Daerah yang masih tinggal di DIY akan mendapatkan bantuan sosial senilai Rp 248.500,00 sebanyak satu kali

   Daftar penerima bantuan sosial sesuai Lampiran SK Gubernur nomor 107/KEP/2020 adalah sebanyak:

   (1) 375 KK disabilitas
   (2) 750 KK lansia terlantar tinggal sendiri

(3) 464 orang mahasiswa (sudah tervalidasi oleh Tim dari Badan Kesbangpol DIY)

Bantuan sosial bagi 464 orang mahasiswa ini mengakomodasi permohonan bantuan dari Bakesbangpol DIY, terakhir menyampaikan nomor: 000/08647 tanggal 23 April 2020 2020 tentang Data Mahasiswa Yang Masih Tinggal di DIY.

Keputusan Gubernur DIY yang mengatur tentang bantuan sosial yaitu SK Gubernur DIY nomor 184/KEP/2020 mengakomodasi permohonan bantuan dari:

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY tanggal 29 Mei 2020 tentang Permohonan Bantuan
(2) Kanwil Kemenkumham DIY nomor W14.PK.01.04.04 - 3092 tanggal 4 Juni 2020 tentang Permohonan Bantuan Jaminan Hidup dan Kartu Prakerja

Pelaksana distribusi bantuan sosial berdasarkan juknis yang dibuat diatur sebagai berikut:

a) Pelaksanaan distribusi bantuan sosial bagi fakir miskin adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY bekerjasama dengan Bank pembangunan Daerah DIY dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota di lingkungan DIY.
b) Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, dan Mahasiswa Yang Masih Tinggal dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY dengan stakeholder terkait, yaitu:
   (1) Dinas sosial Kabupaten/Kota dan pendamping penyandang disabilitas
   (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial dan pendamping Lanjut Usia K
   (3) Koordinator Asrama Mahasiswa
c) Pemberian Bantuan Sosial Bagi Mahasiswa Luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang Tinggal di Asrama Sebagai Dampak Corona Virus Disease-19 Belanja Tidak Terduga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 Pemberian Bantuan Sosial Bagi Mahasiswa Luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang Tinggal di Asrama Sebagai Dampak Corona Virus Disease-19 Belanja Tidak Terduga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020
d) Pelaksanaan distribusi bantuan sosial berupa uang bagi masyarakat terdampak Covid-19 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY bekerjasama dengan Bank Pembangunan DaerahDIY, langsung kepada penerima manfaat.

e) Pelaksanaan distribusi Bantuan sosial berupa beras bagi masyarakat terdampak Covid-19 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY bersama-sama dengan Anggota DPRD DIY, yaitu: Untuk bansos berupa beras sebanyak 33.000 orang, yang masing masing menerima sebanyak 2 Kg/ orang.

6) Penyuluhan dan edukasi Covid- 19

Permasalahan sosial di tingkat masyarakat yang berkaitan dengan keterbatasan wawasan mengenai Covid-19 ternyata tidak hanya berakibat pada penutupan akses jalan di kampung-kampung, penolakan terhadap orang dari luar lingkungan, tetapi ketakutan masyarakat mengakibatkan disharmonisasi dan keresahan warga antar warga sehubungan kedatangan keluarga jauh yang pulang kampung atau mudik sekiranya mulai awal bulan puasa. Permasalahan ini sudah teridentifikasi dan dapat diprediksikan sejak awal sehingga hampir semua instansi yang tergabung dalam Gugus Tugas Bidang Sosial Kemasyarakatan telah menyusun bahan penyuluhan dan melakukan penyuluhan ataupun edukasi.

Berkaitan bahan penyuluhan Dinas Sosial telah menerima Buku Panduan Covid dari Universitas Gadjah Mada yang diserahkan oleh Wakil Rektor Bidang Pengajaran dan Kemahasiswaan sebanyak 8.000 eksemplar terdiri dari:

a) Buku Panduan Covid versi bahasa Indonesia sebanyak 4.000 eksemplar.
b) Buku Panduan Covid versi bahasa Jawa sebanyak 4.000 eksemplar.

Buku-buku ini telah dikirimkan ke dinas instansi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, pemerintah tingkat Kecamatan dan Desa, PKK, Karang Taruna, dan semua Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial yang menjadi binaan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Kampung Siaga Bencana. Dengan adanya buku ini tentu semua pelaksana dan relawan terbantu dalam menyampaikan materi penyuluhan/edukasi yang sudah dipastikan kebenarannya.

7) Penyemprotan Disinfektan

Sebagaimana rilis laporan yang masuk di Posko Induk Tagana DIY, hampir setiap hari Tagana Kabupaten/Kota melakukan penyemprotan di lingkungan masyarakat dan fasilitas umum baik dilakukan Tagana DIY sendiri maupun bersama dengan relawan lain atau pihak lingkungan setempat.

Permasalahan secara umum, penyemprotan disinfeksi oleh masyarakat setempat umumnya belum memenuhi standar keamanan (tidak menggunakan alat perlindungan diri), dan kurang efektif karena tidak difokuskan kepada obyek yang menjadi sumber penularan wabah Covid-19 (pegangan pintu, meja, atau alat lain yang sering disentuh). Seringkali mereka justru menyemprot pada obyek yang tidak semestinya, misal: jalan, pohon dan tanaman.

Masyarakat umumnya tidak sadar lingkungan pada lokasi mana yang sebaiknya dilakukan disinfektasi, misal di suatu wilayah sebenarnya masih aman atau tidak berdampak tetapi penyemprotan dilakukan secara masih (dengan frekuensi yang cukup tinggi, 3-4 kali/minggu).

Fenomena ini menurun seiring dengan berjalannya waktu dan kondisi keuangan masyarakat setempat mulai menurun.

Kegiatan penyemprotan disinfektan oleh Tagana Kabupaten/Kota dibatasi pada fasilitas-fasilitas umum seperti, masjid, pasar, terminal, perkantoran (sesuai permintaan) dan sekolah. Kegiatan ini berlangsung dampai bulan Mei 2020

8) Layanan Dukungan Psikososial (LDP)

Layanan dukungan psikososial merupakan pelayanan kepada masyarakat uantuk mempersiapkan mereka menuju tata kehidupan normal baru, yang mengambil bentuk sarasehan untuk membuka wawasan.

Sasaran kegiatan adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa yang dinilai belum siap untuk menghadapi perubahan kehidupan dengan norma-norma baru. Target lokasi tidak ditentukan berdasarkan banyaknya kasus penyebaran virus Covid-19 tetapi lebih kepada wawasan masyarakat tentang wabah Covid-19, kediplinan untuk menerapkan protokol kesehatan, serta tingkat penolakan/resistensi terhadap masyarakat/warga pendatang yang ditandai dengan sikap yang berlebihan. Oleh karena itu meskipun ditetapkan sebagai zona merah namun warganya sudah menunjukkan sikap yang wajar dantertib mematuhi protokol kesehatan maka wilayah desa tersebut tidak menjadi target lokasi LDP.

Kegiatan dilaksanakan di tanggal 25 - 29 Juni 2020 dengan target lokasi di 50 lokasi desa di Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

a) Bantul : 11 lokasi
b) Gunungkidul : 18 lokasi
c) Kota Yogyakarta: 1 lokasi
d) Kulon Progo : 12 lokasi
e) Sleman : 11 lokasi

Dalam kegiatan ini bertindak sebagai narasumber adalah Puskesmas setempat dan praktisi layanan dukungan psikologi dari lembaga Sekolah Tinggi Psikologi (STIPSI) di Yogyakarta dengan fasilitator Tagana selaku praktisi kebencanaan.

9) Kegiatan di Dalam Karantina/Isolasi

Tempat karantina/ *Shelter*/Isolasi yang menjadi alternatif adalah:

a) Rusunawa Giripeni - Kabupaten Kulon Progo
b) LBK Klidon dan Wisma Haji - Kabupaten Sleman
c) Balai Diklat - Kabupaten Gunungkidul
d) SKB Bangunharjo - Kabupaten Bantul
e) Pondok Pemuda Ambarbinangun - Kota Yogyakarta
f) Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta
g) Balai Diklat Kementerian Sosial RI.
h) Alternatif tempat lain yang memadai

Kegiatan di dalam karantina yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bidang Sosial Kemasyarakatan meliputi penyelenggaraan *shelter*/Wisma Perlindungan dengan dukungan Dapur Umum untuk penyiapan makanan bagi penyintas dan petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan *shelter*.

Mekanisme kerja pergerakan penyintas masuk dan keluar *shelter* telah dikoordinasikan antar pemangku kepentingan terkait pelayanan bagi penyintas. Kerjasama bidang sosial kemasyarakatan berkaitan penyelenggaraan *shelter*/wisma perlindungan adalah sebagai berikut:

a) Evakuasi penyintas masuk dan keluar ke *shelter* Badan Diklat diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Palang Merah Indonesia, dan Dinas Kesehatan
b) Evakuasi penyintas masuk dan keluar ke *shelter* RPS Sewon diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Tim Penegakan Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

c) Pengiriman penyintas ke lokasi rujukan oleh Dinas Sosial
d) Pemeriksaan Kesehatan berupa Rapid Tes Diagnosis oleh Dinas Kesehatan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah
e) Pemeriksaan Kesehatan berupa Rapid Tes Diagnosis oleh Rumah Sakit dibawah koordinasi Dinas Kesehatan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam pengelolaan *shelter* telah disusun Prosedur Tetap Pengelolaan *Shelter* oleh Dinas Sosial namun dalam pelaksanaan tidak dapat berjalan ideal. Seharusnya piket dan alur kegiatan *shelter* melibatkan anggota TNI, POLRI, Relawan dan Petugas Medis untuk memastikan para penyintas dalam keadaan aman, terjamin kebutuhan pangan dan papan, serta terpantau kesehatannya (protap terlampir). Pelaksanaan di lapangan jumlah petugas medis terbatas sehingga untuk *shelter*/wisma perlindungan Badan Diklat tidak terdapat petugas medis, sedangkan *shelter* Rumah Perlindungan Sementara (RPS) Sewon memanfaatkan tenaga media *Camp Assessment* untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi penyintas. Pelaksanaan pengelolaan *shelter* di DIY adalah sebagai berikut:

a) Shelter/wisma perlindungan Badan Diklat

Shelter ini diaktifkan berdasarkan surat Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta setelah melalui rapat Koorinasi tanggal 27 April 2020 ruang Rapat I Bandiklat DIY. *Shelter* menempati 6 kamar di lantai 3 Wisma Pandu Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY.

Shelter Badan Diklat DIY dinyatakan non aktif dan tidak diperpanjang lagi pada tanggal 30 Juni 2020, karena seluruh penyitas yang masih tinggal sebanyak 10 orang keluar dari *shelter* untuk kembali pulang ke negara asal melalui YIA pada jam 05.00 WIB dengan mobil ambulance dari BPBD DIY.

b) Shelter/wisma perlindungan Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon

Shelter ini diaktifkan berdasarkan surat Kepala Satuan Pamong Praja DIY nomor: 462/01510 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penanganan PMKS dan ditindaklanjuti rapat Koordinasi tanggal 12 Mei 2020 di ruang Aula Timur Dinas Sosial DIY. *Shelter* menempati lokasi bangunan belakang Rumah Penampungan Sementara di Sewon Bantul milik Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyitas yang menghuni *shelter* ini adalah gelandangan pengemis yang dijumpai di jalanan yang diamankan oleh petugas untuk menghindari penyebaran Covid-19 karena ketidakjelasan aktivitas serta pergerakannya.

Fasilitas yang diberikan kepada para penyintas adalah hunian sementara dengan layanan makan minum dan pemeriksaan rutin dari Camp Assessment serta RTD oleh BPBD DIY untuk memastikan mereka sehat dan tidak berpotensi terjangkit Covid-19. *Shelter* ini aktif hingga seluruh penyintas terkondisikan (seluruh penyintas akan dirujuk kembali pulang dn atau dikirim ke Camp Assessment untuk mendapatkan pembinaan lanjutan) atau masa tanggap darurat selesai.

e. Bidang Ekonomi

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan sektor ekonomi daerah yang didalamnya terdapat unsur KUMKM secara dominan (seperti: perdagangan, jasa lainnya, industri pengolahan, makanan dan minuman) mengalami pertumbuhan negatif. Pengaruh yang dirasakan oleh KUMKM diantaranya menurunnya permintaan pasar, sulitnya memperoleh bahan baku hingga terhambatnya proses produksi, serta pengurangan jumlah tenaga kerja.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 78/KEP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kebijakan sebagai upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 melalui anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Untuk bidang ekonomi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.555.134.000,00 yang terbagi dalam beberapa sektor ekonomi. Pada setiap OPD yang mendapatkan alokasi anggaran tersebut melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Bidang Ekonomi memiliki sub-bidang yang dilaksanakan oleh:

1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penangan Covid-19, Sub Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Pemberian Kerja Darurat Istimewa Bagi Komunitas Pasar Tradisional Tahun 2020

Terganggunya aktivitas ekonomi di pasar tradisional berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi komunitas pasar. Pasar tradisional para buruh gendong, juru parkir, pedagang kecil, maupun pekerja bebas lainnya mengalami pengurangan atau bahkan hilang pendapatan dengan sepinya aktivitas jual beli yang belum diketahui secara pasti kapan akan pulih kembali. Hal ini akan berdampak pada kekurang mampuan para pekerja tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang semestinya tidak bisa ditunda. Sehingga intervensi dari pemerintah perlu dilakukan agar komunitas pasar tradisional dapat melewati masa pandemi ini diiringi kebijakan lainnya untuk segera memulihkan kembali aktivitas perekonomian. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah DIY melalui gugus tugas bidang ekonomi memberikan pekerjaan kepada 1.200 orang komunitas pasar tradisional dalam jangka waktu tertentu pada masa pandemi Covid-19 komunitas agar mereka tetap dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b) Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terkena dampak Covid-19 Dari Debarkasi Ke DIY Tahun 2020

Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di berbagai negara merupakan salah satu pihak yang terkena dampaknya pandemi karena kehilangan pekerjaan baik bersifat sementara maupun tetap. Sebagian diantaranya bahkan kesulitan untuk kembali ke tanah air karena kebijakan *lockdown* di negara tempatnya bekerja. Pandemi ini juga memunculkan fakta masih adanya PMI ilegal bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang benar. Dalam kondisi pandemi ini mereka dideportasi oleh negara tempatnya bekerja untuk kembali ke wilayah Indonesia.

Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI menyatakan bahwa negara wajib menghadirkan sistem pelindungan bagi PMI mulai dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Undang-Undang tersebut juga menjabarkan tugas Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya. Mengingat pada wilayah tugas dan kewenangannya, Pemda DIY tidak melakukan

penanganan sampai di negara tempat para PMI bekerja. Namun demikian Pemda DIY dapat melakukan upaya perlindungan bagi PMI saat mereka tiba kembali di tanah air, salah satunya dengan memfasilitasi kepulangan mereka ke kampung halaman dari debarkasi. Pemerintah Daerah DIY melalui Gugus Tugas Bidang Ekonomi memberi fasilitasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal DIY untuk pulang dari debarkasi (tempat pemulangan) kembali ke kampung halaman di DIY dalam bentuk pemberian biaya transportasi. Dengan demikian keberadaan PMI tersebut dapat terpantau di tengah masa pandemiCovid-19 ini serta tidak menjadi beban pemerintah daerah tempatdebarkasi.

c) Pemberdayaan Lulusan BLKPP DIY Tahun 2020

Penyebaran Covid-19 di DIY berdampak di berbagai bidang salah satunya bidang ekonomi dimana banyak perusahan, toko, maupun wirausaha yang mengurangi jam kerja bahkan menutup usahanya untuk mengurangi penyebaran virus. Dampak tersebut dirasakan oleh para lulusan BLKPP yang membuka lapangan usaha/mandiri yang mengakibatkan berkurangnya/tidak adanya penghasilan dari usaha mandirinya, maupun mengalami pemutusan hubungan kerja yang bekerja di industri/perusahaan/toko. Pemutusan hubungan kerja dan tutupnya usaha mandiri mengakibatkan meningkatkan pengangguran baik formal maupun informal, sehingga menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dan Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY sebagai unit pelaksana teknis daerah dari Disnakertrasn DIY. Sehingga perlu adanya pemberdayaan lulusan pelatihan sebagai upaya membantu memulihkan kesejahteraan para lulusan akibat pandemi Covid-19 sekaligus memberdayaan lulusan pelatihan dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa baju hazmat, cover sepatu, faceshield, masker dan kantong mayat.



Gambar 6.4. Pemberdayaan Lulusan BLKPP DIY Untuk Pembuatan APD

2) Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Kegiatan yang dilakukan oleh sub bidang Perindustrian dan perdagangan adalah Operasi Pasar Beras Murni dan Operasi Pasar Komoditas Lainnya. Adanya pandemi Covid-19 berdampak serius pada seluruh lapis masyarakat. Distribusi barang yang terhambat dikhawatirkan mengganggu stabilitas pasokan bahan pokok daerah. Oleh karena itu diperlakukan kontrol pemerintah daerah untuk mengamankan stok bahan pokok. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Beras Murni dan Operasi Pasar Komoditas Lainnya. Kegiatan Operasi Pasar Beras murni dan Operasi Pasar Komoditas Lainnya dilakukan untuk memastikan stabilitas tok bahan pokok yang beredar di Masyarakat.

3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a) Pemberdayaan Peternak Sapi Perah

Wabah Covid-19, selain berdampak pada sektor kesehatan juga pada sektor perekonomian. Guna mencegah penularan Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan pembatasan kontak fisik antar manusia (*physical distanching*), bahkan di beberapa provinsi diterapkan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini sangat dirasakan oleh para pelaku usaha termasuk di bidang pertanian, salah satunya adalah para peternak sapi perah yang ada di DIY. Peternak sapi perah di DIY yang tergabung dalam 4 koperasi berada

di Kabupaten Sleman di kawasan lereng gunung Merapi. Produksi susu yang dihasilkan sebagian besar dipasarkan dalam bentuk susu segar sebagai bahan baku industri pengolah susu (IPS), sebagian diolah sebagai susu *pasteurisasi* dengan pangsa pasar sebagian besar di kantin-kantin sekolah dan komplek perumahan. Ada 2 koperasi susu yang mengolah susu *pasteurisasi* yaitu Koperasi Susu Warga Mulya yang beralamat di Bunder Purwobinangun Pakem Sleman dan Koperasi Peternakan Sarono Makmur di Kiyaran Wukirsari Cangkringan Sleman. Pemasaran dalam bentuk susu olahan ini memberikan keuntungan lebih bagi peternak karena ada peningkatan nilai tambah. Sebagai gambaran harga susu segar Rp7.000 per liter, apabila dilakukan pengolahan menjadi susu *pasteurisasi* harganya bisa mencapai Rp17.500 per liter. Biaya pengolahan, kemasan dan distribusi sekitar Rp7.000 berarti ada peningkatan nilai tambah Rp3.500 per liter. Sejak diberlakukannya kebijakan *physical distanching*, permintaan susu *pasteurisasi* mengalami penurunan cukup drastis karena kegiatan pembelajaran para murid sekolah dilakukan secara *daring*.

Dengan semakin meluasnya penyebaran wabah Covid-19 perlu ditanggulangi dengan upaya penanggulan yang intensip. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan sebanyak 27 rumah sakit sebagai rujukan penanganan Covid-19. Tenaga medis, *paramedic* dan tenaga lainnya pada rumah sakit rujukan, dengan pekerjaan yang tidak ringan dan beresiko tinggi terkena penularan Covid-19, perlu dukungan baik moril maupun materiil agar kinerjanya optimal. Melalui kegiatan ini para tenaga medis, para medis dan tenaga kerja lainnya, diberikan susu *pasteurisasi* yang diproduksi oleh koperasi susu. Pemberian susu ini dimaksudkan agar para tenaga medis, *paramedic* dan tenaga lainnya memperoleh peningkatan gizi yang sangat diperlukan untuk menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh sekaligus menghidupkan kembali usaha para peternak sapi perah.

b) Pendistribusian bahan makanan

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat di tengah merebaknya wabah Covid-19 dalam memperoleh komoditas bahan pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau, diperlukan penguatan kegiatan operasional Toko Tani Indonesia Center (TTIC) melalui bazar atau operasi pasar bahan pangan. Kehadiran TTIC

merupakan salah satu solusi dalam mengatasi gejolak harga pangan terutama pangan pokok/strategis, sekaligus dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan petani atau kelompok tani. Secara operasional, proses perdagangan di TTIC meningkatkan aksesibilitas masyarakat terutama pada pangan pokok/strategis baik yang berasal dari petani, kelompok tani, Gapoktan dan distributor utama. TTIC merupakan wadah bagi petani, kelompok tani dan gapoktan dan produsen lainnya untuk memasarkan langsung produknya, sehingga dapat berperan dalam upaya pengendalian harga agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan Pemerintah. Keberadaan TTIC diharapkan mampu memangkas rantai distribusi bahan pangan. Dengan memasarkan komoditas petani melalui TTIC, maka telah memotong 2-3 rantai distribusi sehingga harga dapat dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melakukan bazar/operasi pasar di 4 kabupaten di wilayah DIY.

c) Pengadaan Sarana Prasarana untuk Penyimpanan Produk Pertanian

Selama pandemi Covid-19 ini, *Toko Tani Indonesia Center* (TTIC) selain menyediakan bahan pangan pokok (beras, minyak goreng, gula pasir, dll) juga menyediakan aneka jenis makanan beku (*frozen food*). Aneka makanan beku dari bahan ikan /unggas seperti *nugget* dan sosis dapat disimpan dalam jangka waktu lama dan praktis dalam penyajian sehingga menjadi salah satu *preferensi* bahan pangan selama pandemi. Untuk itu, TTIC turut menyediakan bahan makanan beku dengan harga terjangkau dan banyak pilihan. Selama ini, peralatan untuk mendukung operasional penjualan makanan beku seperti *freezer* belum mencukupi.

Untuk itu, di bulan Mei 2020 ini dilaksanakan pengadaan *freezer* sebanyak 2 unit di TTIC. Dengan adanya freezer ini maka diharapkan makanan beku dapat tahan lebih lama sehingga kualitasnya tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat. Saat ini freezer telah dimanfaatkan untuk penyimpanan makanan beku *(froozen food)* dari bahan ikan untuk didistribusikan ke masyarakat. Suplai produk beku bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.



Gambar 6.5. Sarana dan Prasarana Untuk Penyimpanan Produk Pertanian

4) Dinas Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pengadaan Handsoap Untuk Nelayan DIY

Wabah pandemi Covid-19 langsung berdampak terhadap industri perikanan yang selama ini sebagai salah satu sumber kontribusi devisa bagi Indonesia. Selain menghantam sektor UMKM, efek domino dari pandemi ini juga berdampak kepada masyarakat pesisir yang hidupnya bergantung pada hasil laut.

Karena kebijakan *social distancing* dan pelarangan aktivitas orang otomatis berdampak kepada penurunan penjualan hasil tangkapan laut. Kondisi pasar sepi, distribusi hasil tangkapan ke wilayah luar pun terganggu karena *demand* yang berkurang akibat kebijakan PSBB. Dampak yang paling dirasakan juga adalah harga jual ikan yang merosot tajam.

Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY bersama dengan para pemangku kepentingan lain telah menyusun langkah-langkah yang dapat menjadi acuan dan dapat diaplikasikan bagi semua nelayan di DIY dalam rangka menyongsong kondisi tatanan baru atau kenormalan baru *(new normal)*. Salah satunya adalah Pengadaan *handsoap* untuk nelayan DIY di 19 lokasi.

5) Dinas Koperasi dan UKM/Sub Bidang Koperasi dan UKM

a) Pembuatan Masker dan Wastafel

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga memberikan dampak yang cukup signifikan pada sektor ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Kebijakan pembatasan aktivitas diluar rumah secara langsung berdampak pada produktifitas dan pemasaran UMKM sehingga Pemerintah Daerah selaku Pembina UMKM perlu melakukan tindakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan kegiatan Pemberdayaan UMKM untuk memproduksi Masker dan wastafel gerabah.

Kegiatan Pembuatan Wastafel meliputi pembelian bahan tanah, pemberian ongkos pembuatan wastafel, pemberian ongkos pembakaran gerabah dan pemberian ongkos kirim produk jadi ke lokasi Destinasi Wisata se DIY. Hasil pembuatan Wastafel telah di kirim ke lokasi Destinasi Wisata sebanyak 250 wastafel ke 50 tempat yang ada di DIY. Masing masing destinasi wisata mendapat 5 wastafel beserta dudukannya.

Pembuatan Masker dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/kota. Sebelum kegiatan dimulai diawali dengan pembuatan panduan masker sesuai standar yang telah ditentukan. Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota se DIY juga dilakukan untuk menetapkan nama UMKM pembuatan masker dan wastafel gerabah serta besaran ongkos pembuatannya dalam rangka tanggap darurat Covid-19 di DIY yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan UKM DIY tahun anggaran 2020. Pembuatan masker melibatkan sebanyak 46 UKM dengan memberdayakan 302 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 6.2. Pemberdayaan UKM Untuk Pembuatan Masker dan Wastafel

No	Kabupaten/Kota	Jumlah UKM	Orang terlibat
1	Bantul	8	54
2	Gunung Kidul	15	95
3	Sleman	6	64
4	Kulon Progo	7	35
5	Yogyakarta	10	34

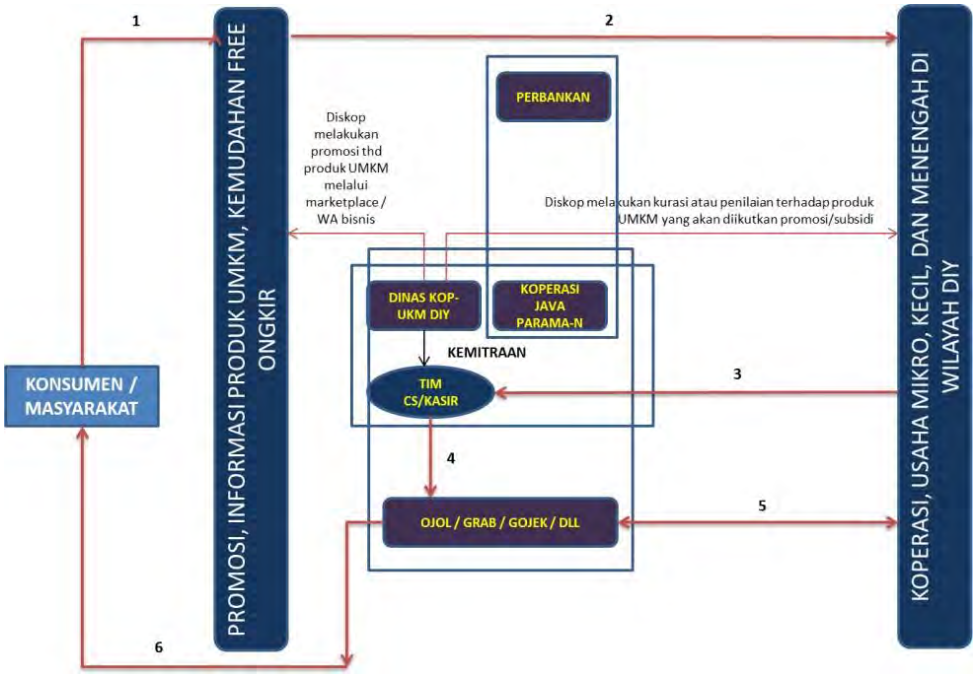
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2021

b) Bantuan Ongkos Kirim/Free Ongkir, Media Campaign & Pengembangan *marketplace* (Stimulus Daya Beli Produk KUMKM)

Pemda DIY melalui Dinas Koperasi UKM DIY berinisiatif membantu pemasaran KUMKM yang ada pada wilayah DIY dengan memberikan subsidi kemudahan ongkos kirim atau *free-ongkir*. Pada aspek ini KUMKM akan dimudahkan dalam hal pemasaran produknya, ojol yang mengalami penurunan omzet akan terbantu dengan pemesanan *daring* konsumen kepada KUMKM, dan Diskop UKM akan *sharing* usaha sekaligus pembelajaran tentang transaksi daring kepada KUMKM sebagai pilihan masa kini, dalam rangka mendukung *social distancing*, untuk menekan penyebaran Covid-19.

Kemudahan pemberian ongkos kirim yang ditanggung pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi dari paparan kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah DIY, pada Bulan April 2020, untuk menguatkan aspek pemasaran dalam membantu UMKM terdampak Covid-19. Untuk mendukungnya perlu didorong melalui pengembangan *marketplace*, *media campaign*, memberikan stimulant agar pemasaran produk KUMKM menjadi terbantu, dan melakukan pendampingan KUMKM dalam tata kelola bisnis yang diarahkan serba digital, serta sosialisasi penerapan protocol kesehatan dalam produk-produk KUMKM. Langkah ini memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam meringankan beban KUMKM selama pandemi Covid-19 masih menunjukkan perkembangan yang massif.

Pelaksanaan pemulihan KUMKM terdampak Covid-19 ini akan dilakukan selama tanggap darurat dan masa *recovery* pasca tanggap darurat pada tahun 2020 ini, yang dikoordinir melalui Dinas Koperasi UKM DIY. Dinas Koperasi UKM DIY membentuk tim pemulihan penanganan KUMKM dalam rangka promosi produk dan pemberian subsidi ongkos kirim atau *free* ongkir selama tahun 2020, yang sudah berjalan sejak Bulan Mei hingga awal Juli 2020. Adapun pelaksanaan teknisnya akan terdiri dari dua skema yang akan dijalankan sekaligus dan akan dimonitor pelaksanaannya secara berkala. UMKM yang mengikuti kegiatan *Free* Ongkir adalah UMKM terdampak Covid- 19 yang terdaftar pada Aplikasi Sibakul dan telah melewati seleksi kelayakan.



Gambar 6.6. Bisnis Proses Belanja Ongkos Kirim (*Free* Ongkir)

Penjelasan teknis skema usaha skema diatas:

No	Penjelasan
1	Konsumen melihat promosi produk KUMKM melalui Market Place/WA Bisnis yang diinisiasi oleh DISKOP UKM DIY, dengan laman: sibakuljogja.jogjaprov.go.id; atau melalui aplikasi plastore: JOGJAKITA (dalam menu SiBakul JOGJA); atau melalui WA Bisnis dengan nomor: 0853 2898 2010
2	Konsumen memesan produk yang diinginkan langsung kepada KUMKM Konsumen langsung transfer kepada KUMKM melalui mekanisme non tunai
3	CS/kasir dihubungi oleh KUMKM yang mendapat pesanan dari konsumen
	CS/kasir memeriksa kembali KUMKM (terdaftar/tidak) dan memastikan pesanan serta bukti transfer, serta kesiapan kapan barang/produk siyap diambil/diantar
4	CS/Kasir menghubungi OJOL untuk segera meluncur ke KUMKM CS/kasir menghubungi KUMKM ttg posisi/identitas OJOL
5	KUMKM memastikan produk pesanan diantar/dibawa oleh OJOL
6	OJOL mengatar produk pesanan kepada konsumen

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2021

Nilai ekonomi dari ongkir yang dibayarkan Pemda kepada OJOL baik GRAB maupun GOJEK adalah nilai pembelian barang/jasa dari konsumen ke KUMKM dan nilai rupiah yang diberikan ke ojol. Sejak pertengahan Mei hingga awal Juli 2020, tercatat sebesar Rp515,9 juta atau setengah milyar, selama satu setengah bulan. Nilai tersebut merupakan *benefit* ekonomi yang dihasilkan dari ongkir yang dibayarkan Pemerintah Daerah, dengan perkiraan setara 5,5 kali dari jumlah ongkir yang digelontorkan. Setidaknya nilai sebesar Rp515,9 juta sudah bergerak selama masa tanggap darurat kepada KUMKM dan ojol untuk bertahan hidup.

Media Campaign Promosi digital

Media campaign dialokasikan sebesar Rp100.000.000,00 dilakukan untuk mempromosikan kegiatan batuan ongkos kirim atau *free* ongkir, melalui: pembuatan video, iklan medsos, pembuatan flyer, buzzer, dan seterusnya.

Iklan medos dilakukan pada facebook maupun instagram dengan durasi 30 kali selama lima belas hari dengan menampilkan promosi kegiatan *free* ongkir mapun pendaftaran kegiatan *free* ongkir hingga memasarkan produk-produk UMKM. Selain itu, video endorsement dilakukan untuk mengkampanyekan pembelian produk KUMKM oleh Bapak Gubernur DIY, Bapak Sekda DIY, Ibu GKBRAA Paku Alam X, dan salah satu UMKM terdampak. Juga dibuat kampanye animasi terkait pengembangan SiBakul Jogja sebagai *marketplace*, cara mendaftar atau mengikuti layanan *free* ongkir bagi konsumen/UMKM.

Adapun produksi konten berupa katalog digital adalah cara memasarkan produk KUMKM yang sedianya digencarkan melalui sosialisasi ke konsumen tertentu, seperti ASN Pemda DIY, ASN Kab/kota se-DIY, hingga swasta/BUMN di wilayah DIY yang menyertai penyebaran SE Gub tentang pembelian produk KUMKM. Dukungan lainnya adalah menggandeng buzzer untuk mengkampanyekan kegiatan *free* ongkir agar dapat tersebar luas diikuti oleh konsumen maupun KUMKM. Selain itu, flyer promosi adalah pekerjaan tim promosi DInas Koperasi UKM DIY dalam rangka menampilkan ragam produk KUMKM yang menarik dan informative; sebelum ditampilkan ke media social, baik itu WA bisnis, playstore, atau web SiBakul.

Pelaksanaan *Media Campaign* Promosi Digital 100 persen, baik fisik maupun keuangannya, dengan melakukan *media campaign* tentang himbauan pembelian produk-produk KUMKM melalui media cetak, daring, hingga medsos. Termasuk pembuatan *flyer* dalam mendukung pemasangan produk KUMKM dalam *website* SiBakul atau WA bisnis dan pembuatan video layanan masyarakat. Untuk video layanan masyarakat dilakukan dengan menggandeng tokoh daerah seperti: Wakil Gubernur Paku Alam X, Ibu Gubernur DIY GKR Hemas,dan tokoh pelawak (Tedjo berserta kawan-kawan).

Media Publikasi Protokol Kesehatan

Media publikasi protokol kesehatan adalah pembuatan banner, poster, dan stiker dalam rangka sosialisasi kepada KUMKM dalam mendukung new normal untuk tetap menjalankan tata kelola produk KUMKM dengan benar.



Gambar 6.7. Contoh Media Publikasi Protokol Kesehatan

Dukungan Jasa Pengiriman dalam Distribusi Produk KUMKM

Dukungan jasa pengiriman merupakan bentuk pembinaan ke KUMKM setelah ditemui adanya pertanyaan dari public tentang kualitas pembuatan produk UMKM, apakah melalui prosedur yang higienis atau justrua abai. Untuk itu dilakukan kunjungan ke 4 kabupaten dalam rangka mengevaluasi upaya inventori secara langsung terhadap produk-produk UMKM yang terdaftar. UMKM akan disurvei secara sampling terhadap proses produksinya sesuai daftar yang dimiliki tim inventori. Selain itu dilakukan kunjungan

terhadap 75 UMKM secara acak, terutama UMKM yang mengikuti kegiatan *free*-ongkir dengan sosialisasi, seperti: pembagian masker, poster, stiker, dan pembinaan tata kelola produk yang higienis agar produk-produk yang dibeli konsumen dipercaya kualitas tataolahnya.

c) Identifikasi dan Inventaris kredit macet dan pembiayaan UMKM

Berdasarkan identifikasi bidang usaha, perdagangan menempati posisi paling banyak sejumlah 321 pelaku (32.1%), disusul Industri Pengolahan 250 pelaku (25%) dan bidang Ekonomi Kreatif 212 pelaku (21.2%). Sebaran responden berdasar kabupaten, paling banyak Bantul (261), diikuti Sleman (240), dan Kota Yogyakarta (236), lalu Gunung Kidul (157), dan Kulon Progo (68). Dari segi Pinjaman Usaha, mayoritas UMKM 71% memiliki pinjaman (715 pelaku), dan 29% tidak memiliki pinjaman (285 pelaku). Dari total 715 pelaku UMKM yang memiliki pinjaman, 213 pelaku UMKM (30%) memiliki pinjaman di luar bank, dan 502 UMKM memiliki pinjaman di Bank, Dari sebanyak 715 responden pelaku UMKM yang memiliki pinjaman, ada sebanyak 455(64%) pinjaman macet, dan sebanyak 260 (36%) yang memiliki pinjaman lancar. Pendataan UMKM juga mencakup tentang kondisi penurunan perputaran usaha (omzet) sebelum dan sesudah Covid-19 (Feb 2020). Total Omzet dari 1000 responden sebelum covid mencapai Rp19.711.144.600 dan omzet sesudah terjadi Covid sebanyak Rp3.503.591.350 atau mengalami penurunan 82.23%(Rp16.207.553.250).

Dari data SiBakul, didapatkan data terkini koperasi terutama dalam hal likuiditasnya dan koperasi yang terdata juga membuat permohonan pengajuan bantuan likuiditas. Kemudian Dinas Koperasi dan UKM DIY melakukan rasionalisasi likuiditas dan berdasarkan berbagai pertimbangan terdapat sejumlah 301 Koperasi. Sehingga berdasarkan surat pengajuan/permohonan bantuan likuiditas dari 301 Koperasi total kebutuhan sebesar Rp90.318.492.850,00.

6) Dinas Pariwisata/Sub Bidang Pariwisata

a) Pengadaan peralatan dan perlengkapan Hygienitas Destinasi Wisata

Secara umum Covid-19 berdampak negatif bagi industri wisata. Namun, di sisi lain memberikan dampak positif, yaitu munculnya kesadaran *(awareness)* para pengelola usaha atau industri pariwisata terhadap *hygiene* dan sanitasi serta prosedur kebersihan. Kesadaran

tersebut dituangkan dengan adanya protokol (SOP) yang wajib dilakukan oleh pengelola ketika menyelenggarakan usahanya maupun wisatawan ketika yang mengunjungi suatu destinasi atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh industri.



Gambar 6.8. Pemberian Perlengkapan Higienitas Destinasi Wisata

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian perlengkapan yang memadai untuk penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata (Google, Masker, sarung tangan, sepatu boot, penyemprot disinfektan, tenda, velbed, faceshield) pada destinasi wisata Tahun 2020 dengan sasarannya adalah 10 lokasi destinasi wisata (Pantai Baron, Pantai Kukup, Gunung Api Purba Nglangeran, Kali Suci, Pantai Parangtritis, Seribu Batu, Pinussari, Puncak Becici, Pinus Pengger, dan Taman Tebing Breksi. Melakukan pendampingan terhadap kegiatan padat karya di destinasi wisata melibatkan 25 orang x 8 kali kerja x 4 lokasi yaitu (Seribu Batu Pinussari, Puncak Becici dan Pinus Pengger). Pengadaan peralatan Hygenitas di 10 lokasi destinasi wisata (Pantai Baron, Pantai Kukup, Gunung Api Purba nglanggeran, kali Suci, Pantai Parangtritis, Seribu Batu, Pinussari, Puncak Becici, Pinus Pengger dan taman tebing Breksi).

b) Pengadaan Sarana Kebersihan Desa Wisata

Dinas Pariwisata DIY bersama dengan para pemangku kepentingan pariwisata (Tenaga Ahli Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, GIPI DIY, PHRI DIY, ASITA DIY, HPI DIY, PPJI DIY, Bank

Indonesia Perwakilan Yogyakarta) telah menyusun langkah- langkah yang dapat menjadi acuan dan dapat diaplikasikan bagi semua industri pariwisata di DIY dalam rangka menyongsong kondisi tatanan baru atau kenormalan baru *(new normal)*. Salah satunya adalah penyediaan wastafel di setiap destinasi wisata untuk mendukung terlaksananya kondisi *New* Normal, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan terhadap pengunjung di setiap destinasi wisata di DIY sehingga pencegahan atau langkah awal memutus mata rantai penyebaran virus pandemi Covid-19 dapat tercapai.

Kegiatan dilaksanakan di 20 lokasi, melibatkan tenaga kerja sebanyak 5 orang per masing-masing lokasi/destinasi: Lintang Sewu, Pinussari, Pinus Pengger, Pinus Asri, Puncak Becici, Bukit Panguk, Seribu Batu, Bukit Mojo, Watu Mabur, Telaga Jonge, Kalisuci, Nginggrong, Gunung Api Purba Nglanggeran, Kedung Kandang, Embung Nglanggeran, Puncak Sosok, Tebing Breksi, Banyunibo, Kedulan, dan Blue Lagoon.

c) Kampanye Penguatan Citra Destinasi Pariwisata DIY (*Brand Awarness*) Masa Pemulihan

Adanya Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup serius terhadap sektor pariwisata, khususnya di DIY. Banyak destinasi wisata menutup untuk kunjungan wisatawan sehingga penghasilan pelaku pariwisata menurun secara sangat signifikan. Namun dengan adanya kebijakan New Normal, diharapkan kondisi pariwisata di DIY dapat dibuka kembali dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Kegiatan Kampanye Penguatan Citra Destinasi Pariwisata DIY (Brand Awareness) Masa Pemulihan Bulan Juni 2020 diharapkan dapat mendukung kesiapan "*The New Normal"* kondisi pariwisata Pasca Pandemi Covid-19 sebagai sarana promosi pariwisata yang dapat memberikan update kesiapan pariwisata DIY pada masa pandemi Covid-19 serta mempertahankan dan meningkatkan citra positif kepariwisataan DIY di mata wisatawan.

Kampanye Penguatan Citra Destinasi Pariwisata DIY (*Brand Awareness*) dilakukan kepada:

(1) Masyarakat, calon wisatawan dan wisatawan yang akan dan sedang berkunjung ke DIY.

(2) Jurnalis pariwisata, pelaku wisata, serta *stakeholder* pariwisata lainnya yang akan mendukung perkembangan kepariwisataan, yang menjadi salah satu bagian dari kepariwisataan DIY.

Bentuk Kegiatan Kampanye Penguatan Citra Destinasi Pariwisata DIY (Brand Awareness) berupa:

(3) Publikasi Spot Adlibs Radio dilaksanakan pada tanggal 19-26 Juni di Radio JIZ FM berupa spot Sosialisasi The New Normal sebanyak 20 kali tayang.

(4) Jasa Buzzer (penggiat media sosial) lokal dilaksanakan pada tanggal 22- 25 Juni 2020 sebanyak 1 kali dengan rincian video post dan infografis post

(5) Desain Grafis Medsos dan Website sebanyak 1 kali dilaksanakan pada tanggal 22-25 Juni 2020.

(6) Talkshow TV Lokal (Persiapan New Normal) sebanyak 2 kali tayang

(7) Video Clip Kampanye Brand Awareness (Persiapan New Normal: Simulasi dan Uji Coba) dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 26 Juni 2020 sebanyak 4 paket

(8) Standing Poster sebanyak 44 buah dan Sticker 1500 buah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 mengenai CHS (Cleanliness, Higiene and Safety). Standing Poster dan Sticker tersebut telah didistribusikan ke Kabupaten dan Kota di DIY

(9) Kegiatan Pembuatan Virtual Tour
Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan tekhnologi untuk membantu pengguna untuk mengenal lebih jelas, merasakan dan menikmati destinasi wisata beserta informasinya melalui tekhnologi virtual, hal ini dilakukan untuk sarana promosi pariwisata ditengah kondisi pandemi Covid-19

(10) Pembuatan Aplikasi Reservasi Daring
Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan teknologi aplikasi berbasis android yang tujuannya sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi kontak fisik antara petugas reservasi di destinasi wisata juga bagian dari pembayaran transaksi non tunai (*e-payment*). Aplikasi ini diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya penumpukan ketika memasuki tempat wisata dan akan diintegrasikan dengan aplikasi Jogja Pass yang dikembangkan Diskominfo sehingga dapat merekam data identitas wisatawan melalui ID digital agar mudah untuk dilakukan tracing.



Gambar 6.9. Pemanfaatan Aplikasi Reservasi Daring

d) Simulasi dan Uji Coba SOP Hotel dan Restoran/Rumah Makan " New Normal" di DIY

Bagi kepariwisataan DIY sendiri, pandemi Covid-19 ini memberikan dampak bervariatif bagi industri pariwisata. Industri pariwisata yang terdampak mulai dari usaha akomodasi, usaha perjalanan wisata, restoran, desa/kampung wisata, gedung pertamuan, industri kerajinan, grup kesenian serta pramuwisata. Secara umum Covid-19 berdampak negatif bagi industri wisata. Namun, di sisi lain memberikan dampak positif, yaitu munculnya kesadaran *(awareness)* para pengelola usaha atau industri pariwisata terhadap *hygiene* dan sanitasi serta prosedur kebersihan. Kesadaran tersebut dituangkan dengan adanya protokol (SOP) yang wajib dilakukan oleh pengelola ketika menyelenggarakan usahanya maupun wisatawan ketika yang mengunjungi suatu destinasi atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh industri.

Oleh karena itu, Dinas Pariwisata DIY bersama dengan para pemangku kepentingan pariwisata (Tenaga Ahli Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, GIPI DIY, PHRI DIY, ASITA DIY, HPI DIY, PPJI DIY, Bank

Indonesia Perwakilan Yogyakarta) telah menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* yang dapat menjadi acuan dan dapat diaplikasikan bagi semua industri pariwisata di DIY dalam rangka menyongsong kondisi tatanan baru atau kenormalan baru *(new normal)*. Salah satunya adalah SOP di bidang akomodasi (hotel) dan

bidang makanan-minuman (restoran). Selanjutnya, Dinas Pariwisata DIY melakukan pendampingan simulasi dan evaluasi SOP Protokol Kesehatan pada Industri Hotel dan Restoran di 5 kabupaten/kota dalam rangka menghadapi *new normal* tersebut untuk meningkatkan jaminan keamanan dan kesehatan wisatawan yang berkunjung ke DIY melalui penerapan prosedur *hygiene*, sanitasi dan kebersihan dihotel dan restoran sebagai usaha jasa pariwisata.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa Pendampingan Simulasi dan Evaluasi SOP *New Normal* Hotel dan Restoran Tahun 2020 dengan sasarannya adalah 5 (lima) hotel bintang maupun non-bintang dan 5 (lima) restoran yang ada di DIY dan diusulkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.

f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Covid-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah, maka Gubernur DIY telah menetapkan Keputusan Nomor: 78/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY. Gugus Tugas Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum mendapat mandate untuk melaksanakan tugas penanganan dampak ikutan Covid-19. Untuk maksud tersebut, Gugus Tugas Bidang Pengamanan dan penegakan Hukum melakukan:

1) Operasi Pengawasan keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pencegahan Covid-19
2) Penanganan Pembatasan Perjalanan Orang Di Bandara dengan personil dari Bidang Ops. Lanud Adisucipto, Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta, Angkasa Pura I, Maskapai Airline, Polres Sleman, Polres Kulonprogo dengan melakukan Pengamanan Pembatasan Perjalanan Orang dengan transportasi Udara di Bandara Adisucipto Yogyakarta dan bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo dalam rangka percepatan penangan Covid-19.
3) Pendisiplinan Masyarakat menghadapi New Normal dilaksanakan oleh 30 regu dibagi dalam 3 *shift* (pagi, siang, malam) dengan personil dari Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Sat Linmas *Rescue* dan TNI/POLRI.

4) Penanganan pembatasa perjalana orang di Stasiuk KA dengan personil dari Kodim 0734/Yogyakarta, Polresta Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY, Denkesyah Yogyakartta (DKT), PT. KAI Dapos 6 Yogyakarta, Keselamatan dan Pengamanan PT. KAI dengan Pengamanan Pembatasan Perjalanan Orang dengan transportasi Kereta Api,
5) Penanganan Pengaduan dilaksanakan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat dan disampaikan melalui Call Center Pol PP DIY dengan Nomor WA 081325398451 No Telp. 5021060
6) Supervisi dan Perndisiplinan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 dengan personil dari Samapta Polda DIY, Korem 072/PMK, Den Pom Korem 072/PMK, Brimob Polda DIY, Satauan Polisi Pamong Praja DIY, dan Pom Angkatan Laut.
7) Operasi Non Yustisi Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pembinaan ditempat bagi warga masyarakat yang tidak menggunakan masker.
8) Pengawasan Keamanan, ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan koordinator Satuan Polisi Pamong Praja DIY sebagai Tindak Lanjut Peraturan Gubernur DIY nomor 77 Tahun 2020.

g. Bidang Logistik.

Kegiatan Logisitik pada penanganan Covid-19 dititikberatkan dalam hal penyiapan, fasilitasi dan penyimpanan logistik yang dibutuhkan selama pandemi Covid-19 di DIY. Selain itu bidang logistic juga mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan distribusi bantuan dan pengadaan peralatan/bahan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota di DIY. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1) Penyediaan Dukungan Manajemen Logistik.
2) Fasilitasi pengambilan logistik bantuan Pusat
3) APD untuk Petugas di Level Desa di Kabupaten/Kota
4) APD untuk Petugas Pengubur Jenazah
5) Virkon/Bahan Disinfektan
6) Penyediaan kantong Jenazah
7) Penyediaan Dukungan Manajemen Logistik Tambahan

Keseluruhan penugasan yang dilakukan oleh Bidang Logistik dalam rangka Penanganan Covid-19 dimaksudkan untuk memberikan kepastian ats ketersediaan bahan/peralatan untuk penanganan Covid-19 di DIY. Untuk maksud tersebut, Gugus Tugas Bidang Logistik melakukan:

1) Penyediaan Dukungan Manajemen Logistik
2) Fasilitas pengambilan logistik bantuan Pusat

3) APD untuk Petugas di Level Desa di Kabupaten/Kota
4) APD untuk Petugas Pengubr Jenazah
5) Virkon/Bahan Disinfektan
6) Penyediaan Kantong Jenazah
7) Penyediaan Dukungan Manajemen Logistik Tambahan

Pengadaan bahan/peralatan tersebut diatas dilaksanakan dalam rngka untuk mendukung pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 di DIY dengan menyediakan buffer stock agar tidak terjadi kekurangan saat penanganan bencana ini. Manajemen Gudang pada saat penanganan Covid-19 juga mendapat perhatian khusus, karena banyaknya barang yang tercampur di Gudang sehingga harus dipilah dan dipilih sesuai peruntukannya. Termasuk pemilahan mana yang termasuk barang dari hasil bantuan/donasi dan barang yang dari pengadaan BTT.

h. Sumbangan Dana Masyarakat

Sumbangan dana masyarakat untuk kegiatan penanganan Covid-19 dilakukan untuk pengadaan dukungan logistik untuk Gudang Logistik dan posko sekretariat Gugus Tugas. Pengadaan dilakukan dengan dasar kebutuhan penanganan Covid-19. Sumbangan dana masyarakat secara keseluruhan dikonsentrasikan untuk bidang logistik untuk kemudian dikoordinasikan kegiatan distribusi bantuan dan pengadaan peralatan/bahan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota di DIY. Pengadan menggunakan dana masyarakat telah selesai dilaksanakn pada akhir tahun anggaran 2020, tepatnya tanggal 30 Desember 2020

6. Realisasi Anggaran

a. Sumber Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020.

Penanganan Covid-19 melalui dana BTT APBD DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp342.625.183.442,00 teralisasi sebesar Rp305.709.422.769,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp36.915.760.672,00. Rincian realisasi dan sisa anggaran untuk setiap fase pencairan untuk masing-masing bidan gugus tugas adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

Tabel 6.3. Realisasi Anggaran Penggunaan Dana BTT Penanganan Covid-19 APBD Tahun Anggaran 2020

BIDANG GUGUS	ANGGARAN	REALISASI SPJ	SISA ANGGARAN
SP2D No. 0094/LS/4.05.02.00/03/2020 Tgl 27 Maret 2020	**9.295.231.300**	**9.165.945.500**	**129.285.800**
SEKRETARIAT	2.411.285.500	2.410.922.000	363.500
KESEHATAN	5.642.915.800	5.640.802.500	2.113.300
SOSIAL	107.530.000	-	107.530.000
PENDIDIKAN	399.740.000	393.606.000	6.134.000
KOMINFO	733.760.000	720.615.000	13.145.000
SP2D No. 01143/TU/4.05.02.00/04/2020 Tgl 14 April 2020	458.979.592	448.139.590	10.840.002
Kesehatan	458.979.592	448.139.590	10.840.002
SP2D No. 01548/TU/4.05.02.00/04/2020 Tgl 30 April 2020	51.641.912.300	41.861.132.675	9.780.779.625
SEKRETARIAT	4.612.495.800	3.776.036.409	836.459.391
KESEHATAN	33.610.481.500	28.858.346.709	4.752.134.791
EKONOMI	3.555.134.000	2.778.750.827	776.383.173
PENDIDIKAN	524.920.000	417.993.000	106.927.000
SOSIAL	5.669.717.500	2.843.493.700	2.826.223.800
GAKKUM	3.489.175.500	3.068.733.600	420.441.900
LOGISTIK	179.988.000	117.778.430	62.209.570
SP2D No. 01718/TU/4.05.02.00/05/2020 Tgl 14 Mei 2020	67.792.910.000	67.768.506.312	24.403.688
SOSIAL KEMASYARAKATAN	67.753.200.000	67.753.200.000	-
LOGISTIK	39.710.000	15.306.312	24.403.688
SP2D No. 02012/TU/4.05.02.00/05/2020 Tgl 20 Mei 2020	726.000.000	726.000.000	-
SOSIAL KEMASYARAKATAN	726.000.000	726.000.000	-
SP2D No. 02604/TU/4.05.02.00/05/2020 Tgl 27 Mei 2020	202.776.800	190.049.530	12.727.270
SEKRETARIAT	13.126.800	13.126.800	-
KESEHATAN	140.000.000	127.272.730	12.727.270
GAKKUM	49.650.000	49.650.000	-
SP2D No. 02524/TU/4.05.02.00/06/2020 Tgl 22 Juni 2020	101.114.400.000	87.184.400.000	13.930.000.000
SOSIAL KEMASYARAKATAN	101.114.400.000	87.184.400.000	13.930.000.000
SP2D No. 02525/TU/4.05.02.00/06/2020 Tgl 22 Juni 2020	42.705.170.125	37.484.325.946	5.220.844.179
SEKRETARIAT			
BPBD	2.091.371.200	1.837.029.910	254.341.290
Diskominfo	910.620.000	837.851.364	72.768.636
KESEHATAN	34.080.674.525	30.448.077.091	3.632.597.434
EKONOMI			-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	514.800.000	512.766.000	2.034.000
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	62.090.600	62.090.600	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.402.000	4.402.000	-
Dinas Koperasi dan UKM	125.528.000	125.528.000	-
Dinas Pariwisata	685.167.000	546.142.000	139.025.000

BIDANG GUGUS	ANGGARAN	REALISASI SPJ	SISA ANGGARAN
PENDIDIKAN	826.200.000	615.271.140	210.928.860
PENGAMANAN DAN GAKKUM			-
SatpolPP	747.717.000	747.707.800	9.200
Dinas Perhubungan	1.160.182.000	1.083.256.000	76.926.000
Kesbangpol	75.091.800	75.091.500	300
SOSIAL KEMASYARAKATAN	1.345.706.000	553.759.500	791.946.500
LOGISTIK	75.620.000	35.353.041	40.266.959
SP2D No. 02604/TU/4.05.02.00/06/2020 Tgl 26 Juni 2020	10.800.000	8.890.200	1.909.800
SEKRETARIAT	10.800.000	8.890.200	1.909.800
SP2D No. 03092/TU/4.05.02.00/07/2020 Tgl 15 Juli 2020	4.877.400.000	4.086.979.800	790.420.200
SEKRETARIAT	25.200.000	24.990.000	210.000
SOSIAL KEMASYARAKATAN			
Bantuan Sosial Warga Terdampak Covid-19	4.784.400.000	3.994.800.000	789.600.000
Bantuan Sosial untuk bekas Warga binaan LP Terdampak Covid-19	67.800.000	67.189.800	610.200
SP2D No. 03309/TU/4.05.02.00/07/2020 Tgl 24 Juli 2020	6.820.102.711	6.164.363.712	655.738.999
SEKRETARIAT			
BPBD	1.080.686.082	1.002.198.183	78.487.899
BPKA	126.146.219	75.397.939	50.748.280
Diskominfo	1.204.120.000	1.123.053.682	81.066.318
KESEHATAN	296.053.000	260.324.455	35.728.545
EKONOMI			-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58.708.500	42.328.500	16.380.000
Dinas Koperasi dan UKM	236.960.000	227.845.000	9.115.000
Dinas Pariwisata	567.732.510	542.824.000	24.908.510
PENDIDIKAN	399.740.000	355.875.000	43.865.000
PENGAMANAN DAN GAKKUM			-
SatpolPP	911.911.800	897.780.626	14.131.174
Dinas Perhubungan	243.770.000	224.855.000	18.915.000
Kesbangpol	46.598.600	46.598.600	-
SOSIAL KEMASYARAKATAN	129.016.000	-	129.016.000
LOGISTIK	1.518.660.000	1.365.282.727	153.377.273
SP2D No. 03926/TU/4.05.02.00/08/2020 Tgl 26 Agustus 2020	8.719.276.569	7.883.062.614	836.213.955
SEKRETARIAT			
BPBD	431.988.000	391.387.545	40.600.455
Badan Penghubung DIY di Jakarta	16.000.000	15.922.400	77.600
Diskominfo	855.200.000	812.807.273	42.392.727
BPKA	139.268.000	54.868.971	84.399.029
KESEHATAN	5.909.094.769	5.307.046.627	602.048.142
PENGAMANAN DAN GAKKUM			-
SatpolPP	650.499.800	644.556.162	5.943.638
Dinas Perhubungan	28.433.000	27.377.000	1.056.000
Kesbangpol	45.605.000	45.605.000	-
SOSIAL KEMASYARAKATAN	152.838.000	140.855.273	11.982.727

BIDANG GUGUS	ANGGARAN	REALISASI SPJ	SISA ANGGARAN
LOGISTIK	490.350.000	442.636.363	47.713.637
SP2D No. 04501/TU/4.05.02.00/09/2020 Tgl 25 September 2020	7.440.534.800	5.989.794.379	1.450.740.421
SEKRETARIAT			
BPBD	360.275.000	337.831.364	22.443.636
Inspektorat	33.320.000	31.080.000	2.240.000
Diskominfo	929.942.000	887.306.036	42.635.964
KESEHATAN	1.578.415.000	1.193.000.000	385.415.000
EKONOMI			-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	308.652.000	281.426.864	27.225.136
Dinas Koperasi dan UMKM	425.405.500	351.019.000	74.386.500
Dinas Pariwisata	68.202.000	67.642.000	560.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.486.000	39.386.000	100.000
Dinas Kelautan dan Perikanan	71.845.000	71.845.000	-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	144.608.000	144.608.000	-
PENDIDIKAN	231.995.000	188.148.751	43.846.249
SOSIAL KEMASYARAKATAN	1.017.164.500	309.832.473	707.332.027
PENGAMANAN DAN GAKKUM			-
SatpolPP	723.366.800	710.059.709	13.307.091
Dinas Perhubungan	28.433.000	28.433.000	-
Kesbangpol	45.605.000	44.150.000	1.455.000
LOGISTIK	1.433.820.000	1.304.026.182	129.793.818
SP2D No. 04867/TU/4.05.02.00/10/2020 Tgl 16 Oktober 2020	9.809.972.800	8.804.874.374	1.005.098.426
SEKRETARIAT			
BPBD	258.580.000	234.510.273	24.069.727
Diskominfo	229.600.000	165.020.000	64.580.000
KESEHATAN	999.041.000	900.502.682	98.538.318
EKONOMI			-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	129.589.000	126.189.000	3.400.000
Dinas Koperasi dan UMKM	454.300.000	433.785.725	20.514.275
Dinas Pariwisata	74.422.000	74.422.000	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	54.215.000	54.215.000	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	242.951.500	231.156.954	11.794.546
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	358.477.000	321.369.364	37.107.636
PENDIDIKAN	555.600.000	391.929.500	163.670.500
SOSIAL KEMASYARAKATAN	227.599.000	119.655.823	107.943.177
PENGAMANAN DAN GAKKUM			-
SatpolPP	786.497.800	774.367.598	12.130.202
Dinas Perhubungan	39.233.000	39.233.000	-
Kesbangpol	45.605.000	45.605.000	-
LOGISTIK	5.354.262.500	4.892.912.455	461.350.045
SP2D No. 05981/TU/4.05.02.00/12/2020 Tgl 1 Desember 2020	29.473.297.645	26.507.181.284	2.966.116.361
SEKRETARIAT			
BPBD	258.762.000	235.896.546	22.865.454
Diskominfo	152.580.000	145.080.000	7.500.000

BIDANG GUGUS	ANGGARAN	REALISASI SPJ	SISA ANGGARAN
KESEHATAN	25.305.947.345	22.956.879.600	2.349.067.745
EKONOMI			-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80.360.000	65.637.000	14.723.000
Dinas Koperasi dan UMKM	75.400.000	75.400.000	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	115.475.500	114.995.500	480.000
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	189.700.000	172.322.727	17.377.273
PENDIDIKAN	648.200.000	479.205.000	168.995.000
SOSIAL KEMASYARAKATAN	175.557.000	61.308.364	114.248.636
PENGAMANAN DAN GAKKUM			-
SatpolPP	863.178.800	851.460.000	11.718.800
Dinas Perhubungan	35.417.000	35.417.000	-
Kesbangpol	44.150.000	44.150.000	-
LOGISTIK	1.528.570.000	1.269.429.547	259.140.453
SP2D No. 06329/TU/4.05.02.00/12/2020 Tgl 10 Desember 2020	1.424.113.800	1.390.949.354	33.164.446
SEKRETARIAT			
BPBD	508.050.000	497.448.900	10.601.100
Diskominfo	31.800.000	23.580.000	8.220.000
EKONOMI			-
Dinas Kelautan dan Perikanan	81.600.000	77.105.454	4.494.546
PENGAMANAN DAN GAKKUM			-
SatpolPP	721.766.800	711.918.000	9.848.800
Dinas Perhubungan	35.417.000	35.417.000	-
Kesbangpol	45.480.000	45.480.000	-
SP2D No. 06622/TU/4.05.02.00/12/2020 Tgl 17 Desember 2020	112.305.000	44.827.500	67.477.500
KESEHATAN	112.305.000	44.827.500	67.477.500
JUMLAH	342.625.183.442	305.709.422.769	36.915.760.672

Sumber: Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, 2021

b. Dana Masyarakat

Dana masyarakat adalah dana bantuan dari masyarakat dan kelompok masyarakat yang menyampaikan bantuannya melalui rekening yang dibuka untuk penanganan Covid-19. Jumlah dana masyarakat untuk penanganan Covid-19 sampai dengan akhir Tahun 2020 sebesar Rp1.390.856.513,00 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang digunakan untuk pengadaan sarana prasarana penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat, pengadaan buku panduan untuk desa tangguh Covid-19 (Deskatavid) dan bahan makanan. Realisasi kegiatan pengadaan dengan menggunakan dana bantuan masyarakat dapat dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel 6.4. Pemanfaatan Dana Bantuan Masyarakat

No	Kegiatan	Nilai kegiatan
1	Pembelian Thermogun untuk pondok pesantren dan panti asuhan	183.565.000,00
2	Pengadaan Sembako untuk pondok pesantren dan panti asuhan	801.564.680,00
3	Pengadaan buku deskatavid	178.181.819,00
4	Pengadaan Logistik untuk penanganan Covid-19	126.644.014,00
5	Pengadaan posko sekretariat penanganan Covid-19	100.901.000,00
	Total	1.390.856.513,00

Sumber: Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, 2021

Seluruh pengadaan dengan dana masyarakat telah selesai dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2020 dengan ada dana dikembalikan ke negara berupa jasa (bunga) bank sebesar Rp3.530.942,00 (Tiga juta lima ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

7. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Masih terus terjadinya kenaikan kasus positif Covid-19.
2) Kesadaran untuk menaati protocol kesehatan selama pandemi belum merata di seluruh lapisan masyarakat.
3) Penanganan pandemi Covid-19 harus dilakukan lintas sektor dan lintas wilayah.
4) Penanganan dampak pandemi Covid-19 memerlukan dukungan program/kegiatan dan anggaran yang tidak sedikit.
5) Adapun permasalahan yang sering dijumpai di lapangan khususnya untuk proses pemakaman jenazah terpapar Covid-19 adalah seringnya terjadi penolakan dimasyarakat.

b. Solusi

1) Berkenaan dengan kenaikan kasus positif, telah dilaksanakan pembatasan aktivitas/kegiatan s.d. skala mikro, penegakan hukum dan protokol Kesehatan, sosialisasi kepada masyarakat, pelibatan intensif stakeholder untuk terlibat dan intensifikasi koordinasi Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kab/ Kota untuk mencegah kolapsnya sistem Kesehatan di DIY.
2) Pengawalan terhadap implementasi Pergub DIY Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
3) Koordinasi dilakukan secara intensif oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY dengan Gusgas Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat.

4) Melakukan *refocussing* program/kegiatan serta re alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 serta upaya percepatan terhadap realisasi belanja pemerintah.
5) Adapun solusi yang telah dilakukan untuk permasalahan tersebut adalah dengan mengalihkan pemakaman baik dari Rumah Sakit maupun dari masyarakat dialihkan ke masing – masing BPBD Kabupaten/Kota. BPBD Provinsi memberikan support dalam bentuk sarpras dan pendampingan oleh TRC Prop dan jika terjadi penolakan di masyarakat akan dilakukan cipta kondisi di masyarakat dengan memberikan pemahaman dan protokol kesehatannya.

B. JOGJA SMART PROVINCE

1. Latar Belakang

Layanan *Digital Government Services* (DGS) Pemda DIY merupakan rintisan awal dari pengembangan Jogja Smart Province. Pengembangan Jogja Smart Province (JSP) merupakan konsep implementasi teknologi, yang mendorong setiap elemen berpikir kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan masalah prioritas dan atau mengembangkan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah untuk mengakselerasi terwujudnya kehidupan masyarakat Jogja yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman. Sebagai lanjutan pengembangan, implementasi DGS menjadi salah satu dimensi Jogja Smart Province (JSP) yaitu dimensi smart governance. Jogja Smart Province (JSP) meliputi 5 (lima) dimensi yang terdiri dari smart governance, smart culture, smart living, smart environment dan smart society. Operasional JSP mengedepankan kreatifitas setiap elemen (masyarakat, pemerintah, swasta, akademik, dan media) untuk bersama-sama berkontribusi dan terlibat dalam proses pembangunan berdasar pada data dan informasi yang terintegrasi dengan baik, serta adanya kolaborasi antar wilayah.

Pengembangan Jogja Smart Province (JSP) diawali dengan inisiatif penyusunan konsep pada tahun 2017 yang dituangkan dalam Dokumen Masterplan Jogja Smart Province dilengkapi dengan peta jalan (road map) pengembangan selama lima tahun (2018-2023). Pada tahun 2018, sebagai *pilot project* pengembangan Jogja Smart Province, wilayah Sumbu Filosofi ditetapkan menjadi fokus pengembangan yang telah dilengkapi dengan *Blueprint Smart Area* Sumbu Filosofi. Pada tahun 2019, implementasi JSP dilaksanakan dengan pengembangan Sumbu Filosofi dan beberapa implementasi TIK di DIY. Pengembangan TIK DIY tahun 2019 antara lain, Pengembangan *bandwidth* desa untuk 246 desa, penyediaan wifi Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 50 Lokasi, Pemeliharaan Peralatan *Wifi Acces Point* Jalan Malioboro dan CCTV sejumlah 10 CCTV, Pemeliharaan Peralatan Videotron sebanyak

2 Unit, Pemeliharaan Peralatan Studio Jogja Istimewa TV dan Ruang *Command Center* IDMC sebanyak 2 Ruang, Pengadaan CCTV Pendukung Aplikasi Jogja Istimewa sejumlah 20 Lokasi, penyusunan 4 Dokumen *Blueprint Jogja Smart Province*. Pengembangan Kawasan *Smart Area* Sumbu Filosofi dengan implementasi *e-Ticketing* tempat wisata Museum Sonobudoyo, Pengembangan aplikasi layanan publik Jogja Istimewa aplikasi yang terintegrasi dengan layanan aduan publik e-Lapor DIY, LAPOR SP4N KemenpanRB, *Whistle Blowing System* DIY, kanal pembayaran *daring,* dan layanan kedaruratan *Panic Button*. Selain itu untuk mendukung proses transformasi digital ke masyarakat dilaksanakan Pelatihan dan Pendampingan *Management Digital Marketing* untuk lokasi Wifi Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 50 Lokasi, pengadaan infrastruktur internet di Kulon Progo pada 60 Desa dan penyusunan *Electronic Government Interoperability Framework* (E-GIF) berupa 1 dokumen panduan integrasi Pemda DIY.

Dalam mengawal pengembangan lebih lanjut pada tahun 2019, Pemda DIY menetapkan Peraturan Gubernur DIY nomor 46 tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Jogja Smart Province* untuk mengawal pengembangan *Jogja Smart Province* (JSP). Implementasi Peraturan Gubernur tersebut didukung dengan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda DIY dengan Pemkab/Pemkot se-DIY tentang Pengembangan *Smart City/Smart Regency* untuk mewujudkan *Jogja Smart Province* (JSP). Keberadaan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi Pemda DIY untuk mengatur lebih lanjut tata kelola TIK dengan menugaskan Dinas Kominfo DIY untuk memfasilitasi rekomendasi investasi TIK berdasarkan *self assessment* yang diajukan oleh OPD Pemda DIY. Pada tahun 2020, telah diterbitkan 45 rekomendasi investasi TIK yang akan digunakan oleh OPD sebagai dasar perencanaan pembangunan atau pengembangan TIK meliputi pengadaan sarana prasarana, pengembangan infrastruktur, aplikasi dan sebagainya.

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2020

Secara umum pengembangan *Jogja Smart Province* (JSP) pada tahun 2020 telah sesuai dengan Rencana Aksi sesuai Peraturan Gubernur DIY nomor 46 Tahun 2019 dalam berbagai dimensi. Berdasarkan peta jalan dalam Dokumen Rencana Aksi *Jogja Smart Province* (JSP)*,* Pemda DIY membangun *Jogja Center* yang terletak di Gedung Pracimosono Kepatihan pada tahun 2020. Pembangunan *Jogja Center* merupakan pengembangan Dimensi *Smart Governance.* Dimensi *Smart Governance* JSP tersebut merupakan rintisan untuk mewujudkan pengelolaan *Big Data* untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data yang berasal dari berbagai institusi pemerintah daerah, media massa dan media sosial dan kemudian digunakan untuk penyusunan bahan kebijakan publik. Pengelolaan *Big Data* dalam kerangka *Smart Governance*

diharapkan dapat membantu perumusan kebijakan publik yang berbasis data atau *evidence based policy*. Selain membangun *Jogja Center*, Pemda DIY menginisiasi *Start Up Academy* dalam upaya untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi perusahaan rintisan baru berbasis teknologi informasi (yang berada pada fase rangka riset pasar dan pengembangan produk) atau *start up.* Inisiasi tersebut diharapkan dapat memberikan ruang untuk perusahaan *start up* DIY agar lebih kompetitif, memiliki nilai tambah ekonomi, menumbuhkan *entrepreneur*/ wiraswasta baru serta dapat berkontribusi memberikan solusi bagi penyelesaian permasalahan publik. Inisiasi *Start Up Academy* tersebut dilengkapi dengan modul sebagai sarana untuk membantu keberhasilan pelaksanaan *Start Up Academy* yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY,



Gambar 6.10. Modul Start Up Academy



Gambar 6.11. JogjaCenter

3. Permasalahan dan Solusi

Terjadinya pandemi Covid-19 sejak triwulan I, 2020 menjadi tantangan tersendiri untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi karena terdapat kendala pelaksanaan. Kendala pelaksanaan tersebut berkenaan dengan adanya *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19 yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan *Jogja Smart Province* (JSP) untuk tahun 2020. Kendala tersebut berkaitan dengan dampak *refocussing* anggaran terhadap ketersediaan anggaran yang kemudian mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan, antara lain Pagelaran TIK dan *Start Up Academy*. Pandemi yang mengakibatkan keterbatasan operasional sekaligus menjadi pemantik kreativitas pemanfaatan TIK dalam konteks *Jogja Smart Province* (JSP) untuk terus berkinerja, dengan adanya penjalinan kerjasama dengan stakeholder bisnis dan civitas akademika. Jalinan kerjasama Pemda DIY dengan *stakeholder* dalam kerangka JSP tersebut diwujudkan dengan pembangunan TIK dalam membantu penanganan pandemi antara lain *website corona.jogjaprov.go.id*,

pengembangan aplikasi CMS (*Corona Monitoring System*), pengembangan Jogja Pass untuk mengatasi permasalahan informasi, data, *tracing* dan *tracking*. Jalinan Kerjasama yang menghasilkan aplikasi tersebut digunakan oleh lintas daerah Kabupaten/Kota se DIY sehingga menjadi model dari kolaborasi implementasi aplikasi.

C. REFORMASI BIROKRASI

1. Latar Belakang

Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* merupakan salah satu tujuan pembangunan jangka menengah yang termuat dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta selaras dengan Tujuan ke-16 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu "*Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh*". Sampai dengan akhir RPJMD, capaian reformasi tata kelola pemerintahan ditargetkan meraih capaian Indeks Reformasi Birokrasi A (Memuaskan). Indeks Reformasi Birokrasi A mencerminkan birokrasi yang semakin memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja bersih dan bebas dari KKN, akuntabel, serta profesional melayani. Oleh karena itu, pada seluruh perangkat daerah dilakukan penguatan delapan area perubahan yang meliputi (1) manajemen perubahan, (2) deregulasi kebijakan, (3) penataan dan penguatan organisasi, (4) penataan tata laksana, (5) penataan manajemen SDM aparatur, (6) penguatan akuntabilitas, (7) penguatan pengawasan, serta (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2020

Berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019, terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY dibandingkan dengan tahun sebelumnya – adapun capaian indeks tahun 2020 belum tersedia s/d penulisan laporan ini. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY pada tahun 2019 sebesar 80,02 dengan kategori A meningkat dari capaian tahun 2018 sebesar 78,29 dengan kategori "BB" (meningkat 1,91). Capaian Pemda DIY mendapatkan predikat "A" pertama kali pada tahun 2019 tersebut sekaligus telah memenuhi target akhir RPJMD. Peningkatan ini terutama disebabkan keberhasilan dalam upaya penguatan integritas pegawai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.5. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada 2018 dan 2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	**Komponen Pengungkit**			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,53	3,58
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,44	3,44
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	4,09	4,14
4	Penataan Tata laksana	5,00	3,66	3,67
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,90	12,02
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,63	5,56
7	Penguatan Pengawasan	12,00	7,79	8,14
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,51	4,54
	Total Komponen Pengungkit (A)	**60,00**	**44,16**	**45,09**
II	**Komponen Hasil**			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	11,79	12,64
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,86	4,82
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,81	5,97
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,28	8,93
	Total Komponen Hasil	**40,00**	**33,74**	**34,93**
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	**100,00**	**78,29**	**80,02**

Sumber: Kemenpan-RB, 2019

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemda DIY telah dilakukan secara bertahap, terukur, lintas sektor melibatkan peran aktif partisipatif seluruh OPD secara berkelanjutan. Pemda DIY mengoptimalkan peran OPD *leading sector* bersama Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Tim Reformasi pada 37 OPD secara intensif meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Upaya yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi di seluruh OPD, pendampingan pengusulan Unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta layanan konsultasi dan pendampingan reformasi birokrasi OPD.

Pada akhir tahun 2020, Pemda DIY telah melaksanakan evaluasi capaian indeks reformasi birokrasi OPD merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi tersebut mengukur aspek pemenuhan bukti-bukti pelaksanaan yang telah diunggah pada aplikasi *Co-Reform Space* dan aspek reform (perubahan) yang telah dilakukan OPD. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. 19 Perangkat Daerah berkategori A (Sangat Baik),
b. 10 Perangkat Daerah berkategori BB (Baik),
c. 7 Perangkat Daerah berkategori B (Cukup Baik), dan
d. 1 Perangkat Daerah berkategori CC (Cukup).

Pada tahun 2020 juga telah dilakukan penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang diatur melalui Permenpan RB no. 25 Tahun 2020. Penyesuaian tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 – 2024. Implementasi kebijakan Road Map ini dimulai pada tahun 2021 dengan lebih adaptif, kolaboratif, sistemik dan partisipatif Agenda Road Map pada tahun 2021 antara lain penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi/kebijakan, percepatan transformasi digital serta pengembangan *Corporate University*.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY Tahun 2020 sampai laporan ini disusun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum mempublikasikan Laporan Hasil Evaluasi terkait. Meskipun demikian, Indeks Reformasi Birokrasi 2020 diproyeksikan mengalami kenaikan capaian dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

a. Manajemen perubahan pada 37 Perangkat Daerah sudah semakin berjalan baik dengan dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing Instansi
b. Apresiasi inovasi pelayanan publik dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2020 semakin menggembirakan. Dalam kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB tersebut, Pemda DIY meraih prestasi Top 45 dengan inovasi Jogjabelajar Class ("*Melintasi Batas Ruang Kelas Bersama Jogjabelajar Class*", dan Outstanding Achievement Of Public Service Innovation dengan inovasi JOGJAPLAN (inovasi "*Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ORDINATE (Konsisten, Responsif, Dinamis, dan Akuntabel) dengan e-Planning")*;
c. 3 unit kerja yang lolos mendapatkan predikat WBK, yakni Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Penyelenggaran Jaminan Sosial dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman; sehingga total telah terdapat 5 unit kerja berpredikat WBK.

3. Permasalahan dan Solusi

Terdapat beberapa permasalahan implementasi Reformasi Birokrasi Pemda DIY yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut antara lain:

a. Belum meratanya kapasitas Tim Reformasi Birokrasi OPD dalam mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh pada masing-masing instansi.
b. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD belum substantif menyentuh permasalahan kinerja OPD.

Terhadap beberapa permasalahan tersebut di atas, dilakukan langkah-langkah solutif sebagai berikut:

a. Melaksanakan reviu Road Map Reformasi Birokrasi Pemda DIY agar lebih adaptif, kolaboratif, sistemik dan partisipatif, sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 – 2024.
b. Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY
c. Meningkatkan intensitas pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas kepada perangkat daerah.



Gambar 6.12. Penyerahan Apresiasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi
Sumber: Humas Pemda DIY, 2020

D. PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA

1. Latar Belakang

Visi Gubernur DIY "Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" melalui Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah selatan karena dengan adanya pelabuhan akan dapat melayani nelayan dari seluruh DIY yang jumlahnya mencapai 3.126 orang pada tahun 2020 (One Data KKP,2021) . *Multiplier effect* yang ditimbulkan dari pengoperasian pelabuhan ini antara lain: (1) Pelayanan kepada 5.000 nelayan baik itu dari DIY maupun luar DIY; (2) Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar untuk penyediaan logistik, BBM, dan perlengkapan penangkapan

ikan; (3) Pengembangan pengolahan ikan dan perdagangan ikan baik itu lokal, nasional maupun internasional melalui YIA; (4) Pemanfaatan Sumber Daya kelautan dan perikanan di Samudra Hindia dapat lebih optimal dan mensejahterakan masyarakat DIY; (5) Stok ikan di DIY dapat tercukupi dengan kualitas dan kuantitas yang baik sehingga tingkat konsumsi makan ikan meningkat dan kesehatan masyarakat dapat terjaga.(Kamiso, 2005)



Gambar 6.13. Breakwater Pelabuhan Tanjung Adikarto

2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2020

Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto dibangun berdasarkan studi kelayakan pada tahun 2001, kemudian dilakukan penyusunan Masterplan tahun 2002 dan DED tahun 2003. Selanjutnya dilakukan Kajian Amdal pada tahun 2005 dan fisiknya mulai dibangun pada tahun 2006 secara bertahap sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2017 telah dilakukan review Kelayakan Pelabuhan Tanjung adikarto.

Fasilitas fisik yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2020 meliputi: Fasilitas darat (fasilitas fungsional dan penunjang) seperti kantor pelabuhan, kantor syahbandar, bengkel, gedung pelelangan ikan, gedung serbaguna, gedung ikan segar, masjid, depot perbekalan, doking kapal, pagar keliling, jalan lingkungan, pos jaga, dan perumahan karyawan; Fasilitas pokok untuk lantai pelabuhan dan dinding kolam.

Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarta diarahkan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pada tahun 2019 telah disusun laporan pendahuluan dan Daftar Prioritas Proyek (DPP) dibantu oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.PII) yang merupakan BUMN Kementrian Keuangan RI untuk kemudian diajukan *financial cost* ke Bappenas berupa kajian *Objective Business Case* (OBC) dan *Final Business Case* (FBC). Berdasarkan hasil kajian DPP, untuk bisa melangkah lebih lanjut harus dilakukan penyatuan aset terlebih dahulu. Pihak-pihak yang memiliki aset yang ada di Tanjung Adikarta adalah

dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu dan Opak (BBWSO), Dinas Perhubungan DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Pemda DIY telah melayangkan surat permohonan penyatuan aset kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu dan Opak (BBWSO), Kementrian Perhubungan, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sampai dengan tahun 2020, Pemda Kulon progo sudah bersedia dan siap untuk menyerahkan aset yang dipunyai, sedangkan BBWSO pada prinsipnya merelakan untuk melepas asetnya tetapi saat ini masih proses penilaian kembali (revaluasi) BMN oleh Kementrian Keuangan RI. Untuk aset perhubungan masih dalam tahap koordinasi karena aset yang ada sudah dalam kondisi rusak.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta belum dapat didarati oleh kapal-kapal berukuran besar disebabkan sedimentasi pasir dari laut maupun dari sungai sangat tinggi, sehingga hanya kapal berukuran kecil yang dapat masuk di alur pelabuhan. Hal ini dikarenakan fasilitas pokok konstruksi breakwater masih belum memenuhi panjang kebutuhan desain. Kebutuhan panjang breakwater sisi timur dari target 390 m baru terbangun 220 m sehingga masih kurang 170 m sedangkan panjang breakwater sisi barat dari target 350 m baru terbangun 250 m sehingga masih kurang 100 m.

b. Solusi

Untuk penyelesaian pembangunan *breakwater* dan fasilitas lainnya ada beberapa alternatif yang telah diupayakan pemerintah daerah antara lain:

1) Melakukan percepatan proses pembiayaan pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), dalam hal ini Pemda DIY secara aktif berkoordinasi dengan Bappenas untuk dapat melanjutkan ke proses *Outline Bussines Case* (OBC) dan *Final Bussines Case* (FBC).
2) Pembiayaan APBN melalui Kemenkomaritim:

    a) Pemda DIY bersurat ke Kemenkomaritim dan Investasi pada tanggal 6 Februari 2020;
    b) Ditindaklanjuti dengan kunjungan ke Lokasi pada tanggal 4 November 2020

    Arahan dari Kemenkomaritim adalah segera menyelesaikan penyatuan aset yang ada dan Kemenko maritim akan

mengkoordinasikan lintas Kementrian untuk penyelesaian pembangunan Tanjung Adikarta;

c) Diundang Rapat koordinasi di Kemenkomaritim Jakarta tanggal tanggal 28 Februari 2020 namun ditunda sampai dengan saat ini;

Tindak lanjutnya dilakukan pertemuan zoom pada tanggal 1 Februari 2021 dengan hasil percepatan penyatuan aset dan koordinasi lintas kementrian

3) Pembiayaan APBN melalui Kemenkopolhukam;
4) Kunjungan staf ahli Menkopolhukam ke PPP Tanjung Adikarta pada tanggal 5 November 2020

Inventarisasi masalah, potensi penyelesaian dan koordinasi dengan pihak yang terkait dan yang dapat menyelesaikan masalah pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta

5) Diundang Rapat koordinasi oleh Kemenkopolhukam di Korem 072 Pamungkas Yogyakarta:

a) Perlu mensinergikan aspek ekonomi dengan aspek HANKAM sehingga perlu membangun sinergi dengan KOREM, POLDA, LANAL dan Adisucipto
b) Cek lokasi pelabuhan untuk melihat kondisi terkini
c) Permasalahan yg ada bersifat kompleks, sehingga perlu banyak pihak yang membantu penyelesaian pelabuhan
d) Perlu difikirkan pendanaan lain, selain melalui KPBU
e) Akan ditindaklanjuti pertemuan dengan mengundang stake holder yang lebih luas

6) Diundang rapat koordinasi di Kemenkopolhukam Jakarta tanggal 12 November 2020

Adanya komitmen dan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto. Ada 2 alternatif penyelesaian pembangunan yaitu: dengan model KPBU atau Anggaran Pemerintah Pusat, akan ditindaklanjuti rapat terbatas setingkat menteri

E. JOGJA AGRO PARK

1. Latar Belakang

Jogja Agro Park adalah satu kawasan percontohan pengembangan pertanian yang terpadu hulu hilir mulai dari pembibitan sampai dengan pemasaran yang berfungsi sebagai unit pembelajaran agribisnis dan lembaga pelatihan percontohan yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan wirausahawan agribisnis dan menjadi salah satu destinasi wisata pendidikan berbasis pertanian, serta mendukung tingkat kunjungan wisatawan di DIY pasca pembangunan bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA). Pembangunan *Jogja Agro Park* merupakan program prioritas Gubernur DIY berdasarkan SK Gubernur DIY No. 163/Kep/2017 Tentang Program Prioritas Pembangunan. Pembangunan *Jogja Agro Park* melalui peningkatan kualitas fisik bangunan dan lingkungan kawasan diharapkan dapat menjawab permasalahan sektor pertanian di DIY terutama berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, pendapatan petani yang relatif rendah dan keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pertanian.

Pengembangan *Jogja Agro Park* kedepannya dilakukan melalui pemberian pendampingan ke petani dalam mengolah hasil produksinya, melalui pengembangan kemitraan dengan petani dalam bentuk *contract farming*, mengembangkan konsep pertanian yang *integrated farming,* serta pengembangan inkubator agribisnis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas petani dan kelembagaan pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, meningkatkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian serta dapat menjadi *pilot project* untuk mengurangi konversi lahan pertanian.

2. Progress Sampai dengan Tahun 2020

Kegiatan Operasional *Jogja Agro Park* dibiayai APBD DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.168.213.775,24. Biaya operasional *Jogja Agro Park* digunakan untuk pemeliharaan ternak, ikan, dan tanaman yang meliputi: 1) ayam KUB 192 ekor; 2) sapi PO 18 ekor; 3) kambing PE 42 ekor; 4) kelinci berbagai ras (*rex, flam*/lokal, angora, *netherland dwarf, lion head, holland loop*, dan *dutch*); 5) ikan nila; 6) berbagai macam tanaman sayuran; dan 7) berbagai macam tanaman buah. Beberapa komoditas pertanian, peternakan, maupun perikanan menghasilkan produk-produk turunan yang dapat dijual kepada masyarakat umum seperti sayuran, biofarmaka, telur ayam, ikan konsumsi, dan anakan ternak. Hasil penjualan tersebut kemudian disetorkan ke kas daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Minat masyarakat terhadap keberadaan *Jogja Agro Park* cukup bagus, terbukti dengan banyaknya kunjungan masyarakat pada awal tahun 2020. Para pengunjung berharap agar *Jogja Agro Park* bisa segera dibuka secara resmi dengan wahana-wahana yang komplit seperti yang telah direncanakan. Sejak terjadinya pandemi Covid-19 *Jogja Agro Park* ditutup untuk umum.



Gambar 6.14. Tanaman Timun di *Green House*



Gambar 6.15. Kegiatan Magang anak SMK Nanggulan KP di JAP

Sebagai rangkaian proses pelaksanaan KPBU pada *Jogja Agro Park*, tahun 2019 telah disusun kajian prastudi kalayakan awal (*Outline Business Case*/OBC) yang difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hasilnya akan menjadi bahan untuk ditelaah lebih lanjut pada penyusunan prastudi kelayakan akhir (*Final Business Case*/FBC). Pada kunjungan ke *Jogja Agro Park* tanggal 16 Oktober 2020, Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa untuk empat tahun ke depan Kementerian Keuangan Republik Indonesia hanya akan memberikan fasilitas pembiayaan KPBU pada enam sektor yaitu air minum, sampah, jalan raya, perumahan, transportasi dan kesehatan, sehingga apabila KPBU *Jogja Agro Park* akan terus dilanjutkan maka fasilitasi penyusunan FBC akan diberikan dari kementerian PPN/Bappenas, dengan syarat Pemda DIY juga mengalokasikan anggaran untuk transaksi KPBU *Jogja Agro Park.*

3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan pengelolaan *Jogja Agro Park* dari hulu sampai dengan hilir masih menemui permasalahan, utamanya disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki jiwa *entrepreneurship*, terbatasnya anggaran operasionalisasi *Jogja Agro Park*, serta terbatasnya akses keleluasaan dalam pengelolaan *Jogja Agro Park.* Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang lebih profesional agar *Jogja Agro Park* dapat berjalan dengan baik dan dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Solusi yang ditempuh adalah optimasi fungsi *Jogja Agro Park* sebagai sentra pelatihan. Pengembangan *Jogja Agro Park* ke depan akan diupayakan melalui skema KPBU atau bentuk kemitraan lainnya.

F. YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT

1. Latar Belakang

Pada tanggal 28 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)di Kecamatan Temon, Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara ini akan memiliki peran penting dalam mewujudkan konektivitas udara serta mendorong pertumbuhan wilayah DIY serta Pulau Jawa bagian selatan berangkat dari latar belakang untuk memenuhi kebutuhan optimal pengguna jasa bandara komersial di DIY dan sekitarnya dibandingkan dengan Bandara Adisucipto yang sudah eksisting sebelumnya. Setahun sebelum diresmikan, Bandara Internasional Yogyakarta telah beroperasi secara bertahap pasca terbitnya sertifikat Bandar Udara Bandara Internasional Yogyakarta dengan Nomor 149/SBU-DBU/IV209 oleh Direktorat Jenderal Bandar Udara (DJBU) Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 26 April 2019. Sehingga pada tanggal 6 Mei 2019 bandara ini dibuka untuk operasional terbatas (minimum operation).

YIA telah dioperasikan secara keseluruhan (*full operation*) mulai tanggal 29 Maret 2020 (atau kurang lebih 5 bulan sebelum peresmian) dengan mengalihkan seluruh slot penerbangan komersial selain jenis pesawat *propeler* (baling-baling) dari dan menuju Bandara Adisutjipto ke YIA di Kulon Progo. Selama tahun 2020, YIA telah melayani 18 rute untuk penerbangan domestik, yaitu Denpasar, Cengkareng, Banjarmasin, Halim Perdanakusumah, dan kota-kota lain di Nusantara. Delapan belas rute penerbangan tersebut dilayani oleh maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air Air Asia, Sriwijaya Air dengan jumlah penerbangan sebanyak 11.784 pergerakan dan melayani penumpang sebanyak 996.362 orang, serta mengangkut kargo domestik sebanyak 6.464 ton. Untuk penerbangan internasional, YIA melayani 2 (dua) rute yaitu Singapura dan Kuala Lumpur yang dilayani oleh maskapai Air Asia dan Tiger Scoot, dengan jumlah penerbangan sebanyak 34 pergerakan dan melayani penumpang sebanyak 1.058 orang, serta mengangkut 111 ton.

Proses pembangunan YIA dilaksanakan selama 20 bulan dengan berbagai fasilitas mutakhir yang disiapkan. Sebagai pengganti Bandara Adisutipto, YIA memiliki terminal penumpang seluas 219.000 meter persegi yang dapat melayani 20 juta penumpang per tahun. Untuk fasilitas sisi udara, *runway* bandara ini memiliki dimensi 3.250 meter x 45 meter dengan nilai PCN 93 F/C/X/T sehingga dapat melayani pesawat terberat seperti Boeing B-777 dan pesawat terbesar seperti Airbus A380, dengan fasilitas Penyelamatan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) di YIA masuk ke dalam Kategori 8. Bandara Yogyakarta International Airport ini dilengkapi 5 unit *fixed bridge* dan *apron* seluas 371.205 meter persegi

berkapasitas 22 *parking stand*. Luas terminal kargo YIA adalah 12.000 meter persegi dengan kapasitas 40.300 ton per tahun. Gedung parkir tiga lantai dengan luas area 137.280 meter persegi yang mampu menampung ribuan kendaraan juga menambah kelengkapan fasilitas di YIA. Di dalam terminal penumpang, tersedia 12 konter *check-in*, 2 *x-ray*, 2 *Walk Through Metal Detector* (WTMD), 400 kursi tunggu, 6 konter imigrasi, serta 2 *baggage conveyor*. Adapun fasilitas standar pelayanan bandara lainnya yang sudah tersedia yaitu *signage*, konter informasi, *flight information display system*, *announcement*, informasi transportasi lanjutan, pusat informasi pariwisata, serta staf pelayanan pelanggan (*customer service*) yang berasal dari warga lokal Kulon Progo. Juga terdapat *difable lounge*, *difable toilet*, *difable lift*, *difable drop zone*, *nursery room*, *kid zone*, *reading corner*, serta 400 unit troli.

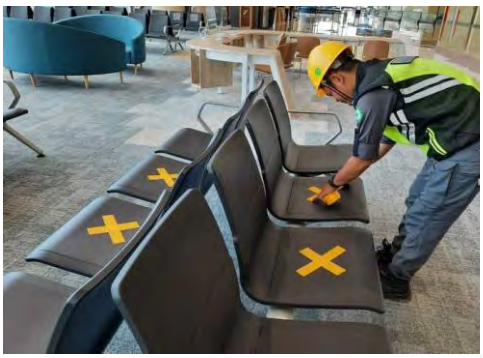
2. Progress Sampai dengan Tahun 2020

Dalam masa pandemi Covid-19 sejak Triwulan I 2020, pelayanan di YIA telah mengikuti aturan terkait protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 mulai dari pintu masuk bandara hingga saat penumpang akan meninggalkan bandara. Berdasarkan dengan peraturan-peraturan Kementerian Perhubungan terkait operasional transportasi udara untuk pencegahan penyebaran Covid-19, manajemen YIA memastikan penerapan *physical distancing* sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap penumpang, petugas dan mitra bandara diwajibkan untuk selalu mengenakan masker, tidak hanya penumpang saja. Calon penumpang juga diwajibkan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai syarat jika hendak melakukan penerbangan. Berkas utama yang wajib dibawa calon penumpang adalah surat kesehatan bebas Covid-19 yang secara resmi dikeluarkan oleh instansi kesehatan terkait.

Sebagai upaya pencegahan, Manajemen YIA menyediakan *hand sanitizer* di berbagai lokasi di dalam area Bandara dan melakukan penyemprotan Disinfektan secara berkala di fasilitas-fasilitas Bandara terutama yang sering bersinggungan langsung dengan penumpang. Disisi lain, demi menjaga kesehatan para tenaga kerja di Bandara, pihaknya pun sudah membekali para petugas dengan APD dan waktu istirahat kerja yang cukup sehingga kesehatan para petugas tetap terjaga.



Gambar 6.16. Peresmian Bandara Internasional Yogyakarta



Gambar 6.17. Penandaan Tempat Duduk Untuk Penerapan *Physical Distancing* di Bandara Internasional Yogyakarta

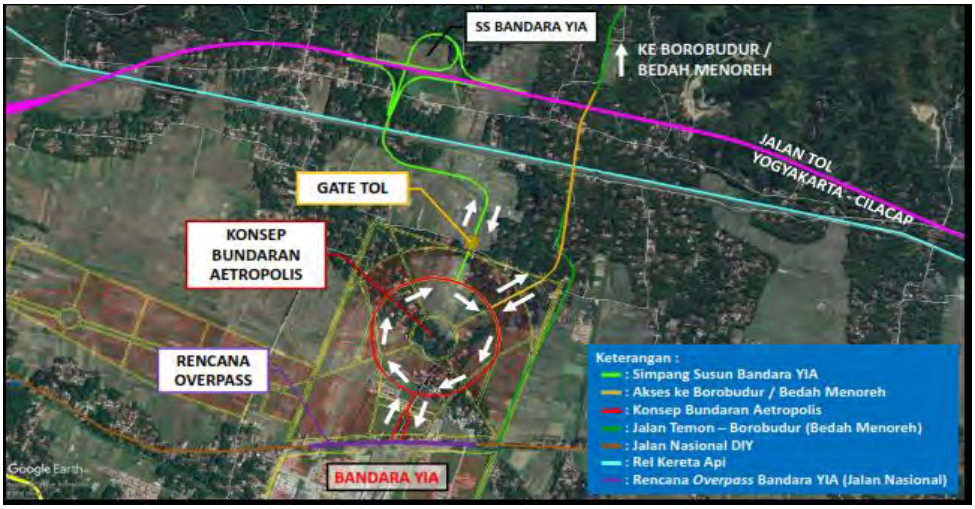
Pemerintah Daerah DIY sesuai dengan Presiden No 98 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo, telah memberikan dukungan yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara di Gubernur sesuai kewenangannya.

Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan *refocussing* anggaran untuk menangani Covid-19, sehingga beberapa kegiatan yang sudah dimulai pada tahun sebelumnya, tidak dapat dilanjutkan atau ditunda sementara. Dalam kondisi tersebut, Pemda DIY masih dapat memberikan dukungan dengan selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar operasional YIA tetap berjalan dengan baik. Kewenangan Pemda DIY dalam memberikan dukungan untuk pembangunan YIA yang masih dapat berjalan adalah mendukung aksesibilitas YIA.

a. Kawasan Pendukung Bandara (Aerotropolis)

Konsep Aerotropolis, merupakan konsep yang relevan dalam pengembangan kawasan sekitar YIA yang telah diinsiasi Masterplan-nya sejak tahun 2019. Konsep *aerotropolis* memperluas konsep *aerocity* dengan mengintegrasikan bandara dengan kawasan di sekitar bandara dengan radius hingga 30 kilometer dan dampak ekonomi sampai 70 kilometer. Konsep *aerotropolis* merencanakan bandara dimana didalamnya memperhatikan aspek seperti sosial-ekonomi, integrasi spasial, urban desain, kebijakan pemerintah, dan manajemen operasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, di Tahun 2019 telah dilakukan Identifikasi dan Siteplan Aerotropolis dan Perencanaan Detil Infrastruktur Aerotropolis pada kawasan sekitar YIA.

Masterplan Aerotropolis yang telah disusun pada tahun 2019 perlu disesuaikan dengan *trase* jalan tol yang akan ditetapkan. Karena pasca beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta dan diikuti dengan pemindahan seluruh penerbangan domestik dan internasional dari Bandara Adisucipto Yogyakarta ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) harus dikuti dengan dukungan aksesibilitas menuju YIA. Salah satu wujud dukungan aksesibiltas tersebut adalah dengan rencana pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Kulon Progo yang teritegrasi dengan ruas Tol Trans Jawa. Jalan Tol Yogyakarta-Kulon Progo ini akan terhubung langsung dengan YIA dengan simpang susun yang berada di sebelah utara jalan nasional Yogyakarta-Purworejo. Simpang susun ini selain menjadi akses langsung ke YIA, diharapkan juga menjadi akses utama pada kawasan Aerotropolis. Pada tahun 2020 telah dilakukan penyusunan desain *trase* jalan tol Yogyakarta-Kulonprogo, sehingga ke depan perlu ada penyesuaian dan intergrasi antara akses simpang susun dengan akses utama kawasan Aerotropolis.



Gambar 6.18. Gambar Rencana *Trase* Jalan Tol Pada Kawasan Sekitar YIA

b. Akses Jalan

Untuk mendukung beroperasinya YIA, pada tahun 2020 Pemda DIY telah melakukan proses pengadaan dan persertifikatan tanah *oprit* di underpass YIA. dan untuk jangka panjang aksesibilitas dari YIA ke Candi Borobudur dengan rencana jalan Bedah Menoreh, telah dilakukan perencanaan *Detailed Engineering Design* (DED) untuk jembatan - jembatan dan simpang tak sebidang yang ada di *Trase* Bedah Menoreh. Kemudian pada akhir tahun 2020 terdapat kegiatan pengadaan pompa air untuk Underpass Kulur, sebagai langkah

preventif menghadapi musim hujan 2021. Sedangkan untuk jalan di sekitar YIA pada tahun 2020 telah dilakukan pemeliharaan jalan di ruas Sindutan Congot, Ngremang Congot, dan Demen Glagah.

c. Aksesibilitas YIA Berbasis Darat (Angkutan Jalan)

Dalam rangka menyediakan aksesibilitas YIA, Otoritas Bandara telah melelangkan kuota angkutan tidak dalam trayek, berupa angkutan sewa khusus sebanyak 180 armada dan taksi khusus bandara sebanyak 180 armada. Angkutan dalam trayek yang sudah beroperasi menuju YIA, terdapat 10 armada dari Kota Yogyakarta menuju YIA dan terdapat 2 armada *shuttle* bus dari YIA menuju Stasiun Wojo. Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 290/KEP/2019 tentang Penetapan Jaringan Trayek AKDP di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11 Desember 2019 telah ditetapkan 5 trayek baru untuk mendukung YIA yaitu Terminal Giwangan – YIA, Terminal Pakem - YIA, Terminal Palbapang – YIA, Terminal Jombor - YIA, dan Stasiun Tugu – YIA.



Gambar 6.19. Sarana Angkutan AKDP Menuju YIA



Gambar 6.20. Bus Damri Rute Terminal Palbapang – YIA

d. Aksesibilitas YIA Berbasis Rel (Kereta Api)

Sejak awal operasional YIA hingga saat ini moda transportasi Kereta Api ke YIA memanfaatkan Stasiun Wojo sebagai tempat perhentian, sedangkan dari Stasiun Wojo ke YIA menggunakan bus DAMRI 2 unit *shuttle* ulang-alik dari YIA ke Stasiun Wojo dan sebaliknya. Untuk menambah frekuensi kereta api yang menghubungkan YIA dengan kota Yogyakarta, setiap kereta api terusan diwajibkan berhenti di Stasiun Wojo sehingga pada saat ini terdapat total sejumlah 14 *trip* kereta api.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan aksesibilitas berbasis rel, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan memulai pembangunan pada tanggal 6 Desember 2019 yang rencananya akan berlangsung 24 bulan. Pembangunan jalur Kereta Api YIA sepanjang 5.346 meter tersebut menggunakan *trase elevated* atau tidak sebidang. Proses pembangunan jalur kereta api YIA dibagi menjadi 4 (empat) paket pengadaan. Progres pembangunan sampai dengan akhir tahun 2020, yaitu

1) Paket Pembangunan Jalur KA Bandara *New Yogyakarta International Airport* km 507+600 s/d km 507+680 dan km 0+000 s/d km 1+435 dilaksanakan oleh PT. Istaka Karya (Persero) dengan progres pembangunan S.01 (km 507+600 - km 507+680) telah mencapai 77,76% (rencana 72,79%) dan TR.01 (km 0+000 – KM1+435) telah mencapai 82,05% (rencana 56,84%);
2) Paket Pembangunan Jalur KA Bandara *New Yogyakarta International Airport* km 1+435 s/d km 3+142 dilaksanakan oleh PT. Calista Perkasa Mulia dengan progres pembangunan telah mencapai 89,64% (rencana 58,67%);
3) Pembangunan Jalur KA Bandara *New Yogyakarta International Airport* km 3+142 s/d km 4+914 dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan progres pembangunan telah mencapai 77,73% (rencana 48,65%);
4) Pembangunan Jalur KA *Bandara New Yogyakarta International Airport* km 4+914 s/d km 5+346 dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan progres pembangunan telah mencapai 90,47% (rencana 70,08%).

e. Pembangunan VVIP Room

Salah satu standar fasilitas YIA adalah dilengkapi dengan Terminal VIP. Fasilitas Terminal VIP ini akan berfungsi sebagai tempat transit bagi para tamu VVIP dan VIP yang berkunjung ke Yogyakarta. Rencana pengembangan tercantum pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1164 Tahun 2013 Tanggal 11 November 2013. Pembangunan Bangunan Terminal VIP YIA direncanakan dalam 3 Tahap.

1) Tahap I pada tahun 2019 yaitu Pembangunan struktur bawah (pondasi) yang meliputi pekerjaan *Bore Pile, Pile Cap, Sloof* pengikat *Pile Cap*, dan Kolom Struktur. Capaian pelaksanaan pekerjaan Tahap I, realisasi fisik telah selesai 100%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.414.224.580,00 (lima milyar empat ratus empat belas juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
2) Tahap II meliputi Pekerjaan Pembangunan Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp 24.154.750.000,- (Dua puluh empat milyar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah). Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 443/5251 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan dan Penanganan COVID–19 dan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 050/5853 tanggal 3 April 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surat Kepala Dinas DPUP-ESDM DIY nomor 027/14061 tanggal 7 April 2020 tentang Penyampaian Inventarisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas PUP-ESDM DIY tahun 2020, maka dilakukan pencermatan ulang terhadap kegiatan-kegiatan di Tahun Anggaran 2020 dan revisi/perubahan anggaran pada masing – masing kegiatan akibat adanya Pandemi Covid-19. Sehingga pekerjaan Fisik Tahap II pembangunan terminal VIP YIA tidak dapat dilanjutkan.

3) Tahap III meliputi pekerjaan Mekanial Elektrikal, Landsekap, dan Interior.

f. Pembangunan SPAM Regional Kamijoro

Berdasarkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum DIY yang disusun oleh Pemerintah Daerah DIY, Bandara Yogyakarta International Airport akan disuplai pelayanan air minum dari SPAM Regional Kamijoro. SPAM Regional Kamijoro direncanakan akan melayani Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul dengan kapasitas produksi sebesar 475 liter/detik. Pembagian air curah dari SPAM Regional Kamijoro ke Kabupaten Kulon Progo adalah sebesar 286 liter/detik dan 189 liter/detik ke Kabupaten Bantul.

Bangunan *intake* dengan kapasitas 500 liter/detik dan jaringan transmisi air baku dari *intake* menuju IPA sudah dibangun oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak di Bendung Kamijoro yang diresmikan pada tahun 2019. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian SPAM Regional Kamijoro dari Unit Produksi sampai dengan reservoir pembagi masing-masing Kabupaten akan dilakukan dengan menggunakan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saat ini proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro sudah masuk ke dalam tahap persiapan proyek KPBU yaitu penyusunan Studi Kelayakan berupa laporan *Final Business Case* (FBC).

Untuk saat ini YIA sudah dilayani oleh PDAM Kab. Kulon Progo dengan sistem yang ada di IPA Sapon sebesar 14 liter/detik. Direncanakan kebutuhan air YIA saat penumpang mencapai ultimate adalah sebesar 60 liter/detik.



Gambar 6.21. Pintu *Intake* Kamijoro



Gambar 6.22. Ruang Pompa *Intake* Kamijoro

3. Permasalahan dan Solusi

a. Pemasalahan

1) *Masterplan* Aerotropolis yang sudah disusun pada tahun 2019 harus direview untuk menyesuaikan dengan akses menuju tol Yogyakarta-Kulonprogo serta rencana akses jalan menuju Bedah Menoreh.
2) Pada tahun 2019 telah dilakukan pembangunan terminal VIP YIA Tahap I berupa pondasi dan kolom struktur yang akan dilanjutkan bangunan diatasnya pada tahap II dan tahap III. Pada kolom struktur tersebut terdapat besi tulangan terbuka yang rawan korosi mengingat lokasi site berada di tepi pantai, kiranya proses pembangunan terminal VIP YIA ini dapat segera terealisasi.
3) Rawan Kecelakaan

    a) Berpindahnya lalu lintas penerbangan komersil dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Yogyakarta International Airport, berdampak pada pola pergerakan lalu lintas kendaraan yang semula kearah timur menjadi kearah barat. Hal ini berdampak terhadap tingkat pelayanan lalu lintas di sekitar jaringan jalan Bandara Yogyakarta International Airport. Adanya beberapa titik persimpangan yang belum dikendalikan dengan APILL disekitar Bandara tersebut berpotensi adanya konflik lalu lintas, beban lalu lintas yang semakin tinggi akibat mobilisasi menuju bandara tersebut menyebabkan tingginya potensi konflik lalu lintas di sekitar simpang yang berada di sekitar Bandara, termasuk akses masuk kedalam YIA
    b) Belum adanya rekayasa atau pengaturan simpang tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan, karena belum terkendalinya simpang dan tinggi kecepatan dan volume lalu lintas kendaraan.

4) Kurang efektifnya Perpindahan antar moda (moda Kereta ke Bus)

Pada saat ini mobilisasi menuju Bandara Yogyakarta Internasional Ariport dapat menggunakan Jalur darat dan Rel, untuk jalur darat sudah tersedia Angkutan Kota dalam Provinsi, untuk jalur rel saat ini masih menggunakan jalur eksisting dengan pemberhentian terakhir di Stasiun Wojo kemudian dilanjutkan dengan shuttle menggunakan Damri. Adanya perpindahan antar moda ini berdampak pada tingginya biaya dan waktu perjalanan karena belum adanya integrasi dokumen dalam hal ini adalah ticketing, sehingga mobilisasi menggunakan kereta api masih kurang eefktif dan efisien .

5) Pelaksanaan penyusunan dokumen *Final Business Case* telah diselesaikan sampai pada tahap laporan draft akhir dan hingga saat ini penyusunan untuk Laporan Akhir *Final Business Case* Proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro masih berlangsung. Penyusunan dokumen masih terkendala terkait kesepakatan tarif air curah yang akan dijual ke masing-masing PDAM Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, penyerapan air curah setiap tahun untuk masing-masing Kabupaten, dan kebutuhan pendanaan biaya jaringan distribusi hilir di masing-masing Kabupaten.

b. Solusi

1) Pengendalian Simpang dengan APILL

Simpang yang berada disekitar Bandara Yogyakarta Internasional Airport perlu direkayasa dengan menggunakan APILL untuk jangka pendek, hal ini bertujuan untuk mengurangi konlik lalu lintas yang berada di simpang dengan memperhatikan beban lalu lintas dari setiap arahnya. Terkendalinya simpang dengan APILL bertujuan juga untu meningkatkan keselamatan lalu lintas, lalu litas dari setiap arah diatur sesuai dengan fasenya.

2) Pembangunan Trase ke Stasiun Bandara

Kendala mobilisasi ke Bandara Yogyakarta Internasional Airport menggunakan moda Kereta Api dapat terselesaikan bila trase Kereta Api Ke Stasiun Bandara telah selesai dibangun, hal ini akan mengilangkan proses perpindahan dari Kereta ke Shuttle sehingga dapat memangkas waktu perjalanan. integrasi dokumen antarmoda dari kereta api ke bandara berupa integrasi tiket akan memudahkan para pelaku perjalanan yang menggunakan pesawat, kegiatan check in boarding pass dapat dilakukan stasiun kereta keberangkatan sehingga aktivitas check in

penumpang pesawat tidak perlu dilakukan di area terminal keberangkatan Bandara.

3) Pemerintah Daerah DIY akan terus melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten serta stakeholder lainnya untuk penyelesaian permasalahan berkenaan dengan penyelesaian SPAM Regional Kamijoro.

G. PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI

1. Latar Belakang

Kawasan Sumbu Filosofi dengan penanda kawasan berupa poros lurus dari selatan ke utara yang menghubungkan Panggung Krapyak – Kraton – Tugu, melambangkan filosofi masyarakat Yogyakarta terkait keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Sumbu filosofi juga melambangkan siklus hidup manusia yang disimbolkan oleh beberapa titik yang melambangkan fase kehidupan manusia; Panggung Krapyak di selatan Alun-alun Kidul yang melambangkan fase kelahiran manusia, Keraton Yogyakarta sebagai fase pertumbuhan manusia muda, Alun-alun Lor sebagai fase masuknya manusia muda ke manusia dewasa, Jalan Malioboro sebagai fase kejayaan manusia dewasa, Jalan Margopuro sebagai fase masuknya manusia dewasa ke masa tua, dan Tugu Pal Putih, yang melambangkan fase beralihnya manusia dari kehidupan duniawi dan masuk ke alam "kehidupan" berikutnya.

Selain itu terdapat dua elemen alam yang merupakan bagian dari sumbu ini, yaitu Laut Selatan yang melambangkan air sebagai sumber kehidupan manusia dan Gunung Merapi di utara sebagai tempat terakhir dan tertinggi jiwa manusia akan bersemayam, yaitu nirwana atau surga.

Sumbu Filosofi sejak 2017 oleh UNESCO sudah dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Non-Benda *(intangible cultural heritage*) Dunia. Terkait dengan hal tersebut, serta dalam rangka menjaga kelestarian kawasan sumbu filosofi, penataan sektor transportasi perlu dilakukan pada kawasan sumbu filosofis sebagai salah satu Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon, khususnya dalam mengujicobakan kawasan Malioboro sebagai kawasan semi pedestrian, dengan tetap memberikan prioritas kepada angkutan publik khususnya Angkutan Perkotaan Trans Jogja serta menggali potensi moda tradisional yang dapat dikembangkan dalam mendukung Sumbu Filisofi sebagai warisan budaya dunia



Gambar 6.23. Konsep Sumbu Filosofi Kraton Yogyakarta

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, beberapa upaya penegakan protokol kesehatan telah dilakukan di kawasan ini. Misalnya, Pemda DIY telah mengeluarkan edaran untuk sektor pariwisata terkait penegakan protokol kesehatan. Terkait hal tersebut, Dinas Pariwisata DIY telah mengambil langkah dalam mencegah penyebaran Covid-19 yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk aktivitas di kawasan ini.



Gambar 6.24. Kondisi Jalan Malioboro Sisi Barat Pada Masa Pandemi Covid-19 th. 2020



Gambar 6.25. Penyemprotan Disinfektan Jalan Malioboro Pada Masa Pandemi Covid-19 th. 2020



Gambar 6.26. Kondisi Jalan Malioboro Pada Masa Pandemi Covid-19 th. 2020



Gambar 6.27. Kondisi Jalan Malioboro Pada Masa Pandemi Covid-19 th. 2020

Tercatat, pada Oktober 2020 terjadi aksi unjuk rasa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja oleh berbagai elemen buruh, mahasiswa, serta pelajar di kawasan sumbu filosofi tepatnya di area Gedung DPRD DIY di Jl. Malioboro. Awalnya kegiatan ini berlangsung damai menyuarakan tuntutan penolakan UU Cipta Kerja. Namun saat gelombang massa semakin bertambah, terjadi kerusuhan. Sejumlah bangunan dan fasilitas publik yang berada di sekitar Jl. Malioboro mengalami kerusakan seperti; Gedung DPRD, Halte Transjogja, Street Furniture Pedestrian Malioboro, bangunan komersial milik warga, dirusak oknum demonstran.

Pasca kerusuhan, Pemda DIY bersama pemangku kepentingan lain melaksakan invetarisasi kerusakan bangunan dan fasilititas publik untuk dilakukan perbaikan dan penanganan darurat.



Gambar 6.28. Kondisi Jalan Malioboro Setelah Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang-Undng Cipta Kerja



Gambar 6.29. Kondisi Jalan Malioboro Setelah Aksi Unjuk Rasa Menolak Undang-Undng Cipta Kerja

2. Progress Sampai dengan Tahun 2020

Tahun 2014 adalah awal dimulainya penataan sumbu filosofi dengan dibangunnya tempat kantong parkir Ngabean. Pada tahun tersebut juga diselenggarakan sayembara membuat *grand design* Malioboro untuk menata kawasan Malioboro yang merupakan penyatuan dari tiga konsep terbaik pemenang sayembara. Kemudian pada tahun 2015 dilakukan pembangunan kawasan parkir Abu Bakar Ali. Sedangkan tahun 2016 merupakan awal pembangunan konstruksi penataan pedestrian kawasan Malioboro meliputi Penataan Pedestrian Kawasan malioboro dan Margomulyo Tahap I dan II, dan penataan kawasan Alun-Alun Utara. Kemudian di tahun 2017 dilanjutkan dengan pekerjaan pembangunan pedestrian Malioboro kawasan Pasar Beringharjo-Pangurakan dan pembangunan toilet bawah tanah di titik Nol. Tahun 2018 dilakukan Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro yaitu di segmen Jalan Malioboro dan Margomulya (sisi barat) serta Pangurakan (sisi barat - timur) dan pelaksanaan pembangunan gedung di Eks Bioskop Indra.

Selanjutnya pada Tahun 2019 dilakukan Penyusunan Dokumen Masterplan Penataan Kawasan Plengkung Gading - Panggung Krapyak dengan tujuan menjadikan Kawasan Plengkung Gading - Panggung Krapyak menjadi magnet pariwisata baru di wilayah DIY. Pada tahun ini juga dilakukan Penataan Lanskap Tempat Relokasi PKL di Eks Bioskop Indra yang merupakan pekerjaan lanjutan di kawasan Eks Bioskop Indra untuk menunjang penggunaan bangunan-bangunan pada area tersebut. Bangunan tempat relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra juga ini merupakan salah satu bagian dari konsep penataan PKL di JL. Malioboro yang terintegrasi dengan galery UMKM di Eks. Hotel Mutiara. Konsep penataan PKL ini menjadi bagian komitmen antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kota dan pelaku usaha untuk mewujudkan Kawasan Malioboro menjadi salah satu destinasi wisata budaya.

a. Penyusunan Naskah Yogyakarta Warisan Budaya Dunia

Nilai penting kawasan Sumbu Filosofi dikuatkan dengan penyiapan Naskah Nominasi (Dossier) yang menjadi persyaratan utama dalam pengajuan sebagai warisan dunia UNESCO. Tahapan ini dilakukan setelah berproses sejak tanggal 17 Maret 2017 pada saat usulan Pemda DIY telah masuk dalam daftar tentative list UNESCO, dengan tema nilai penting Sumbu Filosofi (Historical City Centre of Yogyakarta). Kawasan Sumbu Filosofi ini sebagai pengajuan nominasi warisan budaya dunia, memiliki kelengkapan nilai penting yang berhubungan dengan Kompleks Makam raja di Imogiri, sehingga kedua kawasan ini selanjutnya menjadi satu kesatuan nilai penting yang tidak terpisahkan sebagai area yang dinominasikan, dengan tema: *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*. Area nominasi ini termasuk dalam kategori lanskap kota bersejarah yang memiliki signifikasi lokal, regional, nasional, dan internasional

b. Penyusunan Naskah Management Plan Yogyakarta Warisan Budaya Dunia

Sumbu Filosofi sebagai bagian dari area yang dinominasikan menjadi warisan dunia UNESCO, memerlukan persyaratan kedua setelah Naskah Nominasi, yaitu Naskah/Dokumen Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) kawasan nominasi warisan dunia. Kedua naskah/dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan. Secara khusus, Naskah Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) area nominasi warisan dunia merupakan dokumen panduan utama untuk pengelolaan cagar budaya. Dokumen ini mengidentifikasi nilai-nilai warisan - atau signifikansi - suatu tempat termasuk *Outstanding Universal Value (OUV),* kebijakan pelestarian dan strategi yang akan digunakan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

c. Kajian Perencanaan Penataan Daya Dukung dan Daya Tampung Ruang Sumbu Filosofi

Yogyakarta dengan Sumbu Filosofi dan Sebagian Kompleks Makam raja di Imogiri sebagai kawasan nominasi warisan dunia, memerlukan dukungan data kapasitas daya dukung dan daya tampung ruang, yang merupakan bagian dari pengolahan penyusunan rencana pengelolaan Kawasan. Tersedianya penghitungan daya dukung fisik/*Physical Carrying Capacity (PCC), daya dukung Aktual/Real Carrying Capacity (RCC)* dan daya dukung efektif*/Efective Carying Capacity(ECC*) untuk memetakan kebutuhan kapasitas ruang yang layak untuk kawasan warisan dunia.

Secara garis besar, dengan adanya penyusunan Kajian Yogyakarta Warisan Dunia, yaitu Penyusunan Naskah Nominasi Yogyakarta Warisan Dunia, Penyusunan Naskah Management Plan Yogyakarta Warisan Dunia, dan Kajian Daya Dukung Kapasitas dan Daya Tampung Ruang Sumbu Filosofi, akan mendukung program strategis Pemerintah Daerah DIY yaitu menjadikan Yogyakarta sebagai warisan dunia. Status sebagai warisan dunia, selain mampu memberikan aspek pemanfaatan sumbu filosofi untuk peningkatan kehidupan masyarakat Yogyakarta dengan tetap memenuhi target pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, juga akan mampu menguatkan dan meneguhkan keistimewaan DIY. Naskah/dokumen pengusulan Yogyakarta tersebut di atas secara resmi telah dikirimkan mewakili Pemerintah RI (*official submission*) untuk pengajuan menjadi warisan dunia ke *World Heritage Center* (WHC) di Paris, paling lambat tanggal 1 Februari 2021.

d. Perencanaan Teknis Fasad Bangunan Sumbu Filosofi

Salah satu upaya untuk memperkuat citra kawasan sumbu filosofi dan sebagai salah satu pendukung pengusulan Yogyakarta Warisan Dunia dilakukan penyiapan desain rancangan penataan fasad di sumbu filosofi. Sasaran perencanaan ini meliputi 10 (sepuluh) bangunan dari Jalan Malioboro hingga Jalan Margomulyo. Target utamanya adalah berupa desain rancangan fasad untuk semua bangunan yang ada di sumbu filosofi mulai dari Panggung Krapyak hingga ke Tugu Pal Putih. Untuk itu, kegiatan perencanaan penataan fasad direncanakan dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun. Perencanaan Penataan Fasad di Sumbu Filosofi dimaksudkan untuk mendukung program strategis Pemerintah DIY.

e. Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia

Upaya untuk mendukung pengusulan Yogyakarta sebagai warisan dunia ke UNESCO adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan upaya penyiapan Yogyakarta Menuju Warisan Dunia. Sosialisasi pengenalan terhadap penanda-penanda di Kawasan sumbu filosofi beserta makna, nilai penting dan urgensi pengajuan, menjadi langkah strategis untuk mendukung pengusulan Yogyakarta Warisan Dunia.

Diharapkan masyarakat Yogyakarta dan masyarakat yang berada di Kawasan Sumbu Filosofi mampu berperan serta dalam pengusulan Yogyakarta Warisan Dunia. Peran masyarakat tersebut, terutama dalam upaya mempertahankan citra kawasan dan dukungan positif pada saat pengajuan mencapai tahapan visitasi dan penilaian oleh UNESCO. Pada akhirnya, Masyarakat Yogyakarta yang sudah mengetahui dan memahami tentang pengusulan Yogyakarta sebagai Warisan Dunia akan terkondisi ketika tim UNESCO akan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang sejauh mana peran serta masyarakat dalam mendukung pengusulan tersebut. Hal tersebut sangat mendukung untuk kelancaran dan kesuksesan pengusulan.

f. Pengadaan Lahan dan Bangunan Hotel Mutiara I dan II

Program strategis di Kawasan Sumbu Filosofi, dengan segmen Kawasan Malioboro menjadi prioritas karena sekaligus menjadi bagian dari proses dan tahapan-tahapan penyiapan dan pengkondisian, dalam rangka pemenuhan syarat dan ketentuan pengajuan suatu area menjadi warisan budaya dunia ke Unesco mewakili Pemerintah RI. Penataan Kawasan Malioboro secara khusus telah dilaksanakan bertahap, dan menjadi semakin krusial karena penataan area di Kawasan Malioboro yang meliputi pembangunan fisik, penataan pkl,

pedestrianisasi, rekayasa lalu lintas, menjadi bagian dari rencana pengelolaan area yang dinominasikan (*Management Plan*). Rencana Pengelolaan ini menjadi syarat wajib di dalam naskah nominasi (*dossier*) ke UNESCO, tidak hanya sekedar fisik, tetapi juga sosial dan manfaatnya untuk pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sejak 3 tahun terakhir, penataan PKL dan UMKM di Kawasan Malioboro sudah mulai dilaksanakan, mulai dari pendataan sampai pada rencana penataannya. Tahapan penyiapan untuk menata dan mengatur PKL/UMKM, secara fisik dilakukan dengan menyiapkan bangunan-bangunan yang akan menjadi sentra penataan. Keberadaan Hotel Mutiara menjadi solusi, sekaligus memberikan peluang dan berpotensi untuk mengatasi permasalahan penataan PKL/UMKM, di Kawasan yang dinominasikan. Untuk itulah, maka pengadaan Hotel Mutiara akan menjadi bagian dari pemanfaatan bangunan di area nominasi, untuk kepentingan penataan PKL/UMKM, dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif masyarakat, sebagaimana termuat di dalam Dokumen Rencana Pengelolaan usulan Yogyakarta Warisan Dunia.

g. Jasa Operasional dan Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra

Operasionalisasi bangunan dan pemeliharaan peralatan diperlukan untuk menjaga kebersihan dan fungsional peralatan supaya tetap efektif bekerja. Seperti tahun sebelumnya, dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan selesai pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat kegiatan Operasionalisasi Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra dan memiliki realisiasi keuangan sebesar 282.400.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Selain itu terdapat Kegiatan Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra yang memiliki realisiasi keuangan sebesar 40.400.000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah). Operasionalisasi Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra merupakan jasa kebersihan, dan metode yang digunakan yaitu dengan penggunaan alat alat pembersih yang tepat dan pembersihan rutin dilakukan setiap hari. Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra merupakan kegiatan pemeliharaan peralatan-peralatan yang ada di Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra.



Gambar 6.30. Kegiatan Pemeliharaan Eskalator Pada Eks Bioskop Indra



Gambar 6.31. Kegiatan Pemeliharaan Penyiraman Otomatis Pada Eks Bioskop Indra

h. Jasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol

Kegiatan Jasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol masih berlanjut sampai dengan tahun 2020 karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan pelayanan publik di Kawasan Malioboro. Dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan selesai pada tanggal 31 Desember 2020, kegiatan Pengelolaan Toilet Titik Nol tahun 2020 memiliki realisiasi keuangan sebesar 342.250.200,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah). Sedangkan kegiatan Pemeliharaan Toilet Titik Nol memiliki realisiasi keuangan sebesar 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Toilet Titik Nol ini memiliki beberapa ruang diantaranya adalah 12 kubikal toilet wanita yang terdiri dari 6 kloset duduk dan 6 kloset jongkok, 6 kubikal toilet pria dan 10 urinoir, 1 toilet untuk difabel, dan 1 ruang laktasi. Selain itu di Toilet Titik Nol juga menyedia lift khusus untuk difabel untuk mempermudah akses ke dalam, mengingat toilet ini berada di bawah tanah. Beberapa fasilitas pendukung di Toilet Titik Nol adalah adanya system IPAL Redox Advanced Oxydation Process, AC, Alarm, Tata Suara dan CCTV.

Pada bulan Maret terjadi pandemi Covid-19, adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan *social distancing*, mempengaruhi jumlah pengunjung yang datang di Kawasan Malioboro, terutama di Toilet Titik Nol. Pada awal penyebaran Covid-19, pengunjung di Toilet Titik Nol sempat mengalami penurunan. Pengelola menyediakan bahan habis pakai dan perlengkapan untuk memenuhi protocol Covid-19 termasuk kebutuhan operasional toilet Titik Nol seperti tissue toilet, sabun cuci tangan, dan lainnya. Jasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol TA 2020 saat ini sudah terlaksana dengan baik. Kedepannya diharapkan pengelolaan dan pemeliharaan Toilet Titik Nol terus dapat ditingkatkan untuk optimalisasi pelayanan publik.

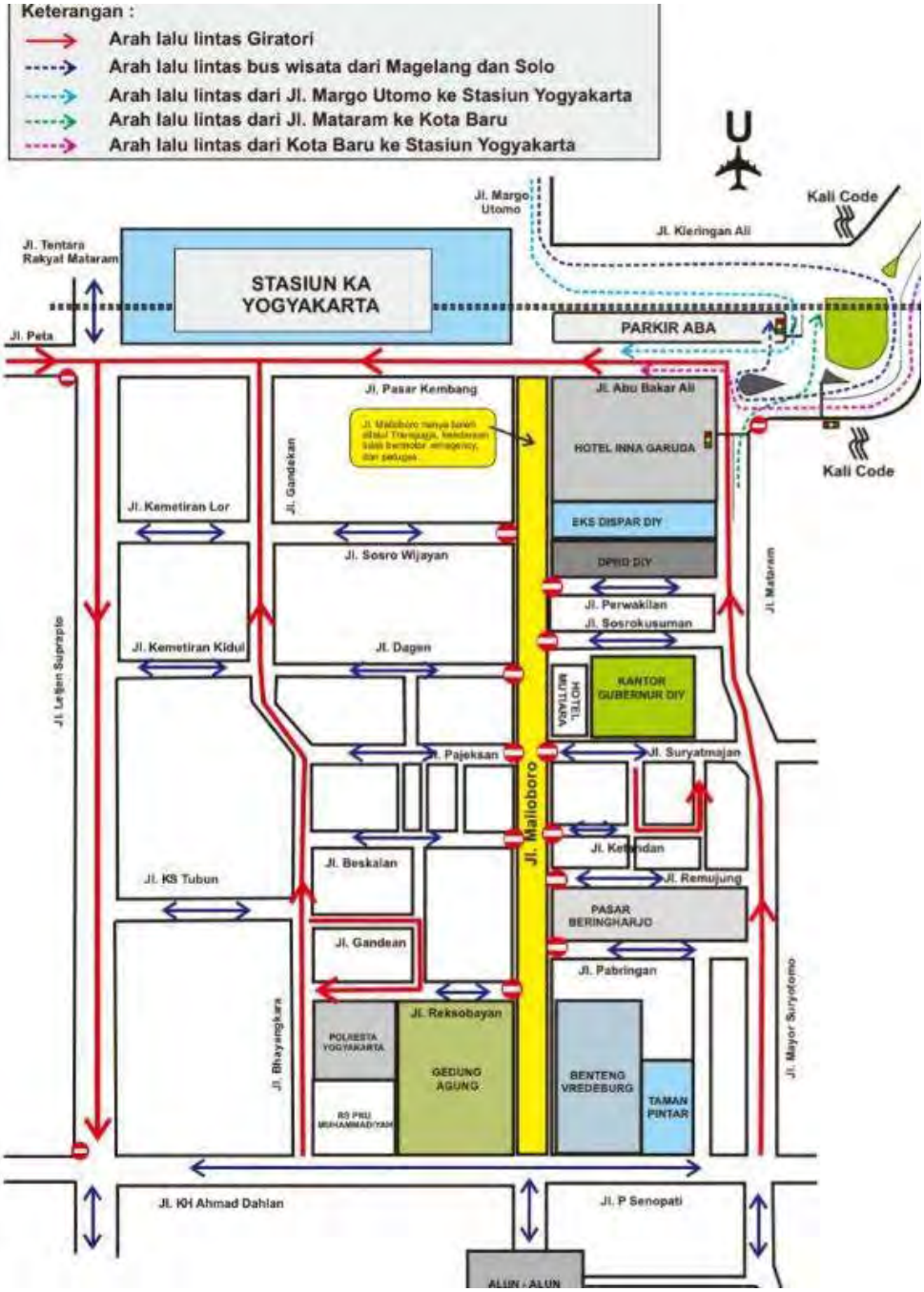
i. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di Kawasan sumbu filosofi dilaksanakan baik melalui mekanismen persuasive maupun penegakan hukum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Petugas Jogo Margo sebanyak 70 orang. Dari hasil kegiatan ini ditemukan 1924 pelanggaran yang terdiri dari 1101 pelanggar roda 4 dan 823 pelanggar roda 4.Menindaklanjuti rapat koordinasi forum lalu lintas sumbu filosofi, telah diadakan kegiatan penegakan hukum dengan hasil ditemukan 115 pelanggaran yang terdiri dari 29 ditilang dan 86 dilakukan pembinaan.

j. Uji Coba Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Semi Pedestrian Malioboro

Pada sisi transportasi, mengacu pada studi Perencanaan Penataan Transportasi Kawasan Malioboro (2014), pada tahun 2020 telah dilaksanakan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas dengan sistem giratori dalam rangka mendukung pedestrianisasi Malioboro. Telah disusun pula Dokumen Penataan dan Pengelolaan Transportasi Kawasan Sumbu Filosofi. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2020 telah tersedia fasilitas untuk rencana implementasi semi-pedestrian dan pengendalian ketertiban lalu lintas di kawasan SRS Sumbu Filosofi guna mendukung peningkatan perwujudan tata ruang dalam SRS Kasultanan dan Kadipaten. Harapannya dengan adanya penyediaan fasilitas dan pengendalian lalu lintas dapat menunjang terciptanya suatu kawasan yang selamat, aman, nyaman, tertib dan teratur. Berikut progres 2020 yang dapat dilaporkan.

Pelaksanaan uji coba MRLL dengan sistem giratori dalam rangka mendukung pedestrianisasi Malioboro diselenggarakan pada Tanggal 5 – 12 November 2020, dari perencanaan semula selama 5 kali atau 5 hari dan dilaksanakan bekerjasama Pemerintah Kota serta pihak terkait lainnya. Pada masa uji coba jalan Malioboro ditutup untuk kendaraan bermotor kecuali bus trans jogja, kendaraan emergency dan kendaraan petugas yang sedang bertugas.



Gambar 6.32. Lingkup Coba Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Semi Pedestrian Malioboro



Gambar 6.33. Apel pasukan kesiapan pelaksanaan Uji Coba MRLL Kawasan Malioboro

Berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi pada masa uji coba maka diputuskan bahwa:

1) Semi Pedestrian Jalan Malioboro diberlakuan pada kurun waktu 3 jam yaitu 18.00 sd. 21.00 WIB
2) Giratory di luar kawasan Malioboro diterapkan permanen pada kurun waktu 24 jam.
3) Penangawasan dan pengendalian dilakukan oleh Petugas Jogo Margo dan Dishub Kota Yogyakarta

k. Event Budaya Selasa Wagen dalam masa Pandemi Covid-19

Adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020 membuat gelaran even budaya Selasa Wage ditiadakan hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Pertimbangannya adalah untuk mengurangi kerumunan masyarakat dan mencegah penyebaran Covid-19. Diharapkan masyarakat memahami kondisi ini dan mengikuti himbauan Pemerintah Daerah DIY untuk berada di rumah. Selasa Wage bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membersihkan rumah masing-masing.



Gambar 6.34. Cegah Penyebaran Covid-19, Petugas Lakukan Ops Yustisi Di Malioboro

Tabel 6.6. Progres Penataan Kawasan Sumbu Filosofi 2014 – 2020

Tahun	No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
2014	1.	Penataan/revitalisasi kawasan budaya Kraton Yogyakarta	7.424.719.860	Dinas PUP-ESDM
	2.	Pembangunan penataan pedestrian titik nol dan Kawasan Alun-alun Utara	16.970.800.000	Dinas PUP-ESDM
	3.	Perencanaan penataan parkir Abu Bakar Ali	350.000.000	Dinas PUP-ESDM
	4.	Penyusunan Naskah Akademis Moda Transportasi Tradisional	158.000.000	Dinas Perhubungan
	5.	Pemasangan Penyesuaian Toponimi Jalan	500.000.000	Dinas Perhubungan
	6.	Penataan Transportasi Perkotaan (*Heritage City*)	5.250.000.000	Dinas Perhubungan
	7.	Penyusunan Materi Moda Transportasi Tradisional	202.000.000	Dinas Perhubungan
2015	1.	Pembangunan parkir Abu Bakar Ali	25.435.780.000	Dinas PUP-ESDM
	2.	Penataan kawawan budaya Kraton	5.927.098.000	Dinas PUP-ESDM
	3.	Pengadaan *truck road sweeper*	4.983.385.000	Dinas PUP-ESDM
	4.	Penataan Transportasi Perkotaan (*Heritage City*)	9.000.000.000	Dinas Perhubungan
	5.	Penyusunan Masterplan Jalur/Zone Angkutan Tradisional yang mendukung kawasan budaya perkotaan Yogyakarta	400.000.000	Dinas Perhubungan
	6.	Penyusunan Kajian Asal Tujuan Perjalanan di Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta	2.000.000.000	Dinas Perhubungan
	7.	Pengembangan Penyediaan *Park and Ride* di DIY	200.000.000	Dinas Perhubungan
	8.	Sosialisasi warisan budaya dunia	200.000.000	Dinas Kebudayaan
2016	1.	Konstruksi Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro	25.658.930.200	Dinas PUP ESDM

Tahun	No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	2.	Pembangunan tahap II tempat khusus parkir Abu Bakar Ali	3.484.954.100	Dinas PUP ESDM
	3.	Pembangunan tahap II tempat khusus parkir Ngabean	2.168.847.100	Dinas PUP ESDM
	4.	DED toilet dan jalur penyeberangan bawah tanah di kawasan titik nol Yogyakarta, DED Penataan Kawasan pada Jalur/Akses Masuk Wilayah DIY, DED Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan Yogyakarta dan ANDAL lalin utilitas bawah tanah Malioboro	3.344.813.000	Dinas PUP ESDM
	5.	Penataan Kawasan Alun-alun Utara	1.584.120.000	Dinas PUP ESDM
	6.	Penataan Transportasi Perkotaan (*Heritage City*)	5.000.000.000	Dinas Perhubungan
	7.	Penyusunan Kajian Asal Tujuan Perjalanan Orang di DIY	800.000.000	Dinas Perhubungan
	8.	Pengembangan Transportasi Kawasan Budaya Jeron Beteng	2.000.000.000	Dinas Perhubungan
	9.	Kajian PenataanTransportasi Kawasan Budaya Kawasan Jeron Beteng	300.000.000	Dinas Perhubungan
	10.	Sosialisasi warisan budaya dunia	200.000.000	Dinas Kebudayaan
	11.	Penyusunan Naskah *Dossier* Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	45.000.000	Dinas Kebudayaan
	12.	Kajian Fasad Sumbu Filosofi I (Panggung Krapyak - Kraton)	50.000.000	Dinas Kebudayaan
	13.	Kajian Fasad Sumbu Filosofi II (Kraton - Tugu)	45.000.000	Dinas Kebudayaan
	14.	Pembuatan film pendek Yogyakarta *City of Philosophy*	100.000.000	Dinas Kebudayaan
2017	1	Pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar Beringharjo-Pangurakan	17.340.936.840	Dinas PUP ESDM
	2	Pembangunan Toilet Bawah Tanah	5.871.789.000	Dinas PUP ESDM
	3	Pembangunan *Street Furniture*	2.332.684.830	Dinas PUP ESDM
	4	Pembangunan Akses Masuk dan Alat Bantu Difabel Toilet Bawah Tanah	468.270.000	Dinas PUP ESDM
	5	Pembangunan Parkir Ngabean	145.717.500	Dinas PUP ESDM
	6	Pemeliharaan Alun-Alun Utara	85.000.000	Dinas PUP ESDM
	7.	Penataan Transportasi Perkotaan *(Heritage City*)	5.695.703.369	Dinas Perhubungan
	8.	Pengembangan Transportasi Njeron Beteng	2.153.000.000	Dinas Perhubungan
	9.	Pengembangan Penyediaan Parkir Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY	997.571.000	Dinas Perhubungan
	10.	Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Moda Transportasi Tradisional	598.459.000	Dinas Perhubungan
	11.	Penataan Sarana Prasarana Angkutan Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis	849.740.000	Dinas Perhubungan
	12.	Rencana Induk Transportasi di DIY	924.800.000	Dinas Perhubungan

Tahun	No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	13.	*Kajian Promosi Yogyakarta Warisan Dunia & Kajian Pengelolaan Warisan Dunia*	177.564.100	Dinas Kebudayaan
	14.	*Cetak Buku Ragam WBCB Sumbu Filosofi*	*125.000.000*	Dinas Kebudayaan
	15.	Cetak *Leaflet & Banner* Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	205.000.000	Dinas Kebudayaan
2018	1	Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro segmen Jalan Malioboro dan Margomulya (sisi barat) serta Pangurakan (sisi barat - timur)	39.223.633.500	Dinas PUP ESDM
	2	Pembangunan tempat relokasi PKL di Eks Bioskop Indra	60.128.718.500	Dinas PUP ESDM
	3	Jasa Pengelolaan Toilet Titik Nol dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol dan pembangunan *entrance* titik nol	286.844.070	Dinas PUP ESDM
	4	Pengadaan dan Pemasangan *Counting Down* 10 unit (Simpang Tugu, Simpang Melia, Simpang Kleringan)	200.000.000	Dinas Perhubungan
	5	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 90 unit (Simpang Tugu - Panggung Krapyak, Sirip-Sirip Jalan Malioboro)	108.000.000	Dinas Perhubungan
	6	Penggantian Aki Solar Cell 40 buah (Simpang Kleringan, Simpang Tugu, Simpang Melia, *Pelican Crossing* Inna Garuda)	462.980.000	Dinas Perhubungan
	7	Pengadaan dan Pemasangan Tromol Becak 2 unit	23.000.000	Dinas Perhubungan
	8	Terbangunnya 1 Tempat Khusus Parkir di sebelah selatan Ramai Mall	9.918.199.600	Dinas Perhubungan
	9	Tersedianya: (a) Rehab Berat APILL 1 lokasi (Simpang Melia Purosani); (b) Pemeliharaan *Pelican Crossing* 6 unit; (c) Pesawat Handy Talky 15 unit; (d) Pemeliharaan APJ Tenaga Surya 14 unit; (e) Pemeliharaan APJ Tenaga Listrik 36 unit; (f) *Traffic Light Stick* (Senter Pengatur Lalu Lintas) 19 buah; dan (g) Marka Jalan 5000 meter	462.980.000	Dinas Perhubungan
	10	Penataan lalu lintas di Kawasan Malioboro: (a) Petugas Jogo Margo (80 orang) dan Forum Lalu Lintas Kawasan Strategis	311.750.000	Dinas Perhubungan
	11	Penyediaan Kantong Parkir Kendaraan Tidak Bermotor	205.733.574	Dinas Perhubungan
	12	Pengadaan Tanah Untuk Tempat Khusus Parkir di Eks Stiekers Jalan Parangtritis seluas 30.000 m2	90.241.563.800	Dinas Perhubungan
	13	Jasa Penyelenggaraan Sosialisasi Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	198.750.000	Dinas Kebudayaan
2019	1	Perencanaan Penanda Sumbu Filosofi	89.500.000	Dinas Kebudayaan
	2	Perencanaan Teknis Fasad Bangunan di Sumbu Filosofi	211.310.000	Dinas Kebudayaan
	3	Penyusunan Naskah Nominasi Yogyakarta Warisan Dunia	89.250.000	Dinas Kebudayaan

Tahun	No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	4	Penyusunan Naskah Management Plan Yogyakarta Warisan Dunia	89.100.000	Dinas Kebudayaan
	5	Jasa Penyelenggaraan Sosialisasi Yogyakarta Warisan Dunia	184.551.400	Dinas Kebudayaan
	6	Jasa Penyelenggaraan Sosialisasi Rekonstruksi dan Revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton	89.300.000	Dinas Kebudayaan
	7	Pembuatan Film Sumbu Filosofi	174.500.000	Dinas Kebudayaan
	8	Penataan Lansekap Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra	3.066.122.000	Dinas PUP ESDM
	9	Operasionalisasi dan Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra	88.000.000	Dinas PUP ESDM
	10	Pengelolaan dan pemeliharaan Toilet Titik Nol	408.968.000	Dinas PUP ESDM
	11	Optimalisasi Mekanikal Elektrikal Plumbing Toilet Titik Nol (Sistem Air Bersih, Bak Tampung)	196.265.500	Dinas PUP ESDM
	12	Penyusunan Dokumen Masterplan Penataan Kawasan Plengkung Gading - Panggung Krapyak	745.606.000	Dinas PUP ESDM
2020	1	Kajian Perencanaan Penataan Daya Dukung Kapasitas dan Daya Tampung Ruang Sumbu Filosofi	99.605.000	Dinas Kebudayaan
	2	Perencanaan Teknis Fasad Bangunan Di Sumbu Filosofi	94.780.400	Dinas Kebudayaan
	3	Jasa Penyelenggaraan Sosialisasi Yogyakarta Warisan Dunia	169.793.800	Dinas Kebudayaan
	4	Penyusunan Naskah Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	89.925.660	Dinas Kebudayaan
	5	Penyusunan Naskah Management Plan Yogyakarta Warisan Budaya Dunia	84.125.250	Dinas Kebudayaan
	6	Pengelolaan Toilet Titik Nol	356.400.000	Dinas PUP ESDM
	7	Pemeliharaan Toilet Titik Nol	23.100.000	Dinas PUP ESDM
	8	Operasional Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra	297.756.744	Dinas PUP ESDM
	9	Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra	40.887.000	Dinas PUP ESDM

Sumber: Disbud, Dishub, dan Dinas PUP-ESDM (diolah), 2020

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Mengingat tingginya dinamika dan kompleksitas penanganan di kawasan sumbu filosofi serta belum operasionalnya UPT Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi, akan berpotensi memunculkan perbedaan tahapan dan penanganan pengelolaan.

2) Masa Pandemi Covid-19 mengakibatkan tingkat kunjungan wisata ke Kawasan sumbu filosofi menjadi berkurang, sehingga mempengaruhi sektor perekonomian masyarakat.
3) Pemanfaatan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra belum bisa dilaksanakan.
4) Adanya demonstrasi Undang Undang Cipta Kerja mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum di Kawasan Sumbu Filosofi.
5) Belum terlaksananya MoU antara Pemda DIY – UPN Veteran Yogyakarta – Kemenristekdikti – Kemenhan; berkaitan masih terdapat permasalahan kepemilikan asset tanah eks UPN di jalan Ketandan Wetan 30, Ngupasan, Kec. Gondomanan. Hal ini berimbas pada lambatnya progress rencana penyediaan lahan parkir khusus di sirip kawasan Jalan Malioboro.
6) Adanya dinamika di lapangan mengakibatkan penerapan semi pedestrian Malioboro baru dapat dilaksanakan pada pukul 18.00 WIB sd 21.00 WIB, dari yang semula direncanakan mulai pukul 06.00 WIB sd 21.00 WIB.

b. Solusi

1) Percepatan operasionalisasi UPT Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi dan berdasarkan Dokumen Rencana Pengelolaan (Management Plan) Kawasan Sumbu Filosofi , dapat mengkoordinasikan semua kepentingan dan *stakeholders* yang terlibat dalam penanganan di kawasan sumbu filosofi baik di Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Bantul.
2) Perlu adanya penerapan protocol Covid-19 yang ketat di kawasan Sumbu Filosofi seperti penyemprotan disinfektan, pemeriksaan masker, pengukuran suhu badan dengan *thermogun*, dan tersedianya tempat cuci tangan. Selain itu juga perlu adanya penyediaan sarana prasarana yang menunjang pencegahan Covid-19 di Kawasan Sumbu Filosofi.
3) Pasca terbitnya Salinan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI terkait sengketa Status kepemilikan tanah dan bangunan di eks. Bioskop indra, pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Koperasi dan UMKM DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta melakukan Identifikasi Pemetaan dan Kajian Pengelolaan Bangunan tempat Relokasi PKL di EKs. Bioskop Indra.
4) Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan perbaikan terhadap bangunan pemerintah dan fasilitas publik yang rusak pasca demonstrasi Undang Undang Cipta Lapangan Kerja.
5) Perlunya mendorong percepatan terhadap status lahan eks UPN di jalan Ketandan Wetan 30, Ngupasan, Kec. Gondomanan; melalui koordinasi intensif dengan pihak terkait (termasuk Kemenristekdikti dan Kemenhan). Dukungan finansial dalam upaya keberlanjutan koordinasi terhadap

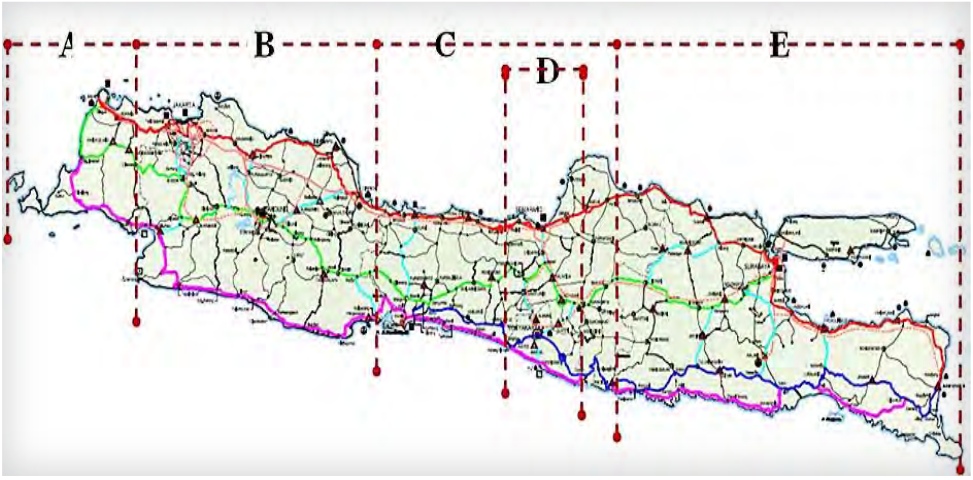
kepastian status lahan eks UPN dapat difasilitasi melalui alokasi APBD melalui Dishub DIY TA 2021 dan melanjutkan upaya pemenuhan kebutuhan parkir pada area pasar sore atau area yang lain.

6) Perlunya melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pihak terkait terutama warga terdampak dalam hal penentuan penerapan jam malioboro semi pedestrian dan Perlu adanya rencana pengelolaan terpadu yang ditangani secara fokus dan khusus oleh suatu bentuk Lembaga/institusi yang mampu mengkoordinasikan semua kepentingan dan stakeholders yang terlibat dalam penanganan di kawasan Sumbu Filosofi.

H. PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN

1. Latar Belakang

Salah satu strategi untuk menekan ketimpangan pembangunan di DIY adalah dukungan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah bagian selatan melalui pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Jalur Jalan lintas Selatan diharapkan menjadi pemicu (*triger*) bagi pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) di kawasan selatan, sekaligus menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.



Gambar 6.35. Peta Jalur Jalan Lintas Selatan di Pulau Jawa

Dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah khususnya pembangunan jalan JJLS telah disepakati antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal pembagian tanggung jawab dan yang menjadi kewajiban masing-masing diatur sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah baik kabupaten setempat maupun DIY sesuai kemampuan keuangan daerah tiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan tanah, tanam tumbuh/karangkitri maupun bangunan.
b. Pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban melaksanakan pembangunan fisik konstruksi jalan berikut bangunan pelengkapnya pada lokasi yang tanahnya telah dibebaskan oleh Pemda DIY.

Jaringan jalan sebagai prasarana transportasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung terciptanya aksesibilitas arus manusia, barang dan jasa secara meluas di seluruh wilayah. Infrastruktur jalan sebagai kebutuhan dasar yang diperlukan sebagai layanan dan fasilitas dalam menunjang perekonomian, sosial dan budaya dapat berfungsi dengan baik. Pengembangan sarana dan prasarana jalan di wilayah DIY meliputi 3 Kabupaten yaitu Gunungkidul (76,34 km), Bantul (16,58 km) dan Kulon Progo (23,15 km) yang dalam hal ini dikenal dengan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 116,07 km.



Gambar 6.36. Rencana Pembangunan JJLS Pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY

Trase jalan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Daerah Istimewa Yogyakarta, dimulai dari ujung barat di Congot (Kabupaten Kulon Progo) yang berbatasan dengan kabupaten Purworejo (Jawa Tengah) dan berakhir di ujung timur pada Desa Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Rute di Kabupaten Kulon Progo meliputi Congot – Ngremang – Jembatan Srandakan 3 sepanjang 23,15 km, di Kabupaten Bantul melalui Pandansimo – Samas - Parangtritis – Girijati sepanjang 16,58 km, sedangkan di Kabupaten Gunungkidul rute yang dilalui adalah ruas jalan Girijati – Tlogowarak – Klampok – Legundi – Planjan – Tepus – Jerukwudel – Baran – Duwet.

2. Progress Sampai dengan Tahun 2020

Pelaksanaan Konstruksi Jalur Jalan Lintas Selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara bertahap. Telah dilakukan pembebasan lahan selebar 30 m untuk rencana pembangunan jalan 4 lajur,sebagai tahap pertama telah dibangun jalan

dengan tipe jalan 2 (dua) lajur dengan lebar 7 m. Sampai dengan akhir tahun tahun 2019, dari target pembebasan tanah seluas 3.771.128 M^2 telah dapat dibebaskan seluas 2.600.374 M^2 (68.95%). Sedangkan untuk pembangunan konstruksi jalan, dari target 116,07 km, telah diselesaikan sepanjang 75,89 km (65,38%), dimana 2,6 km diantaranya telah mempunyai lebar 14 m (dari Congot kearah timur 2 km dan dari arah Duwet ke arah barat 0.6 km), sedangkan untuk ruas lainnya masih dengan lebar perkerasan 7 m.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan JJLS, Pemda DIY melaksanakan pembebasan lahan, sementara fisik konstruksi dilaksanakan melalui dana APBN. Pemda DIY melalui dana keistimewaan mengalokasikan anggaran 2020 untuk kegiatan:

a. Perencanaan Pembebasan Lahan untuk Segmen Legundi – Planjan (9,50 km)

Segmen Legundi – Planjan memiliki panjang rencana 17,14 km. Dari total panjang tersebut, sepanjang 4,70 km telah dibebaskan untuk memenuhi rencana 4 lajur, sehingga masih terdapat 12,44 km yang harus dibebaskan agar lebar rencana 4 lajur dapat terpenuhi. Target tahun ini adalah terwujudnya Dokumen Perencanaan Tahap I untuk Segmen Legundi-Planjan sepanjang 9,50 km sebagai dasar untuk mengajukan Ijin Penetapan Lokasi (IPL) yang akan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2021. Hingga tanggal 31 Desember 2020, progres yang dicapai adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Legundi-Planjan Segmen Girisekar-Monggol Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 6.37. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pembebasan Lahan JJLS DIY Segmen Legundi – Planjan

b. Persiapan Pembebasan Lahan untuk Segmen Garongan-Congot (Lanjutan) (8,89 km)

Secara fisik, Ruas Jalan Segmen Garongan - Congot telah tersambung, karena telah terdapat jalan eksisting, namun belum memenuhi syarat untuk kebutuhan lebar desain 4 lajur. Sehingga perlu dilakukan pembebasan pada sisi luar jalan yang ada saat ini. Progres yang dicapai per tanggal 31 Desember 2020 adalah telah terbitnya SK Gubernur DIY Nomor 347/KEP/2019 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Ngremang - Congot Segmen Garongan - Congot di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 30 Desember 2019.



Gambar 6.38. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pembebasan Lahan JJLS DIY Segmen Garongan - Congot

Selain 2 kegiatan diatas, Pemda DIY melalui Dana Keistimewaan juga melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yaitu:

1) Pembebasan Tanah untuk:

a) **Ruas Planjan - Tepus**: Total luasan pembayaran tanah di segmen Planjan - Tepus menurut hasil appraisal adalah 639.772 m2. Jumlah tersebut telah terselesaikan pada tahun 2019 ini dengan ditandatanganinya dokumen penyerahan hasil dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Dinas PUP-ESDM DIY. Pelaksanaan tahun ini adalah pembayaran tanah seluas 96.250 m2 dengan anggaran sebesar Rp 15.307.765.000,00.

b) **Ruas Tepus – Jerukwudel Tahap III**: Luasan tanah yang dibutuhkan di segmen ini adalah 833.160 m2. Dilakukan melalui tiga tahap, tahap I pada Tahun 2018 luasan tanah yang dibebaskan sebesar 84.304 m2. Pada Tahap II ,proggres hingga 31 Desember 2019 adalah terbebaskannya tanah seluas 594.368 m2 dengan anggaran sebesar

Rp 378.476.706.000,- . Pada Tahap III di akhir tahun 2020, luasan tanah yang dibebaskan seluas 154.488 m2 dengan anggran sebesar Rp 111.792.489.000,- sehingga untuk segmen Tepus – Jerukwudel ini sudah selesai untuk pembebasan lahan.

c) **Segmen Oprit underpass Bandara Tahap II**: Proses pembayaran segmen ini telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan penyerahan hasil dari BPN kepada Dinas PUP-ESDM DIY. Adapun total luasan yang dibebaskan yaitu 8.119 m2. Pada tahun ini telah dilaksanakan pembebasan seluas 409 m2 dengan anggaran sebesar Rp1.119.248.000,00.

2) **Tersedianya Dokumen Penilaian Harga Tanah untuk Segmen Ngremang - Garongan** (Congot) (144.706 m2). Hasil penilaian harga tanah ini menjadi dasar pembayaran pada segmen Ngremang - Garongan (Congot). Berdasarkan hasil appraisal untuk melaksanakan pembebasan tanah di Segmen Ngremang – Garongan (Congot) sebanyak 522 bidang tanah seluas 146.867 m2 dengan kebutuhan biaya sebesar Rp 291.148.827.298,00.

3) **Pengurangan (Splitzing) atau Penghapusan Hak Tanah Warga (141 Bidang),** Pengukuran Gabung bidang tanah JJLS (77 Bidang), dan Permohonan Hak tanah JJLS (98 Bidang).

4) **Penyediaan data pemanfaatan ruang milik jalan di JJLS** (1 Dokumen).
Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan jalan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya, salah satu kegiatan dari pengawasan tersebut adalah dengan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.

5) **Penyediaan Patok Penanda Batas RUMIJA di JJLS** (504 Patok). Pemasangan patok ini dilaksanakan untuk mempertegas kembali batas tanah JJLS yang telah dibebaskan oleh Pemda DIY terutama di segmen yang lebar tanahnya telah sesuai kebutuhan 4 lajur namun baru dilaksanakan pekerjaan konstruksi 2 lajur. Tujuannya adalah untuk mengamankan aset tanah JJLS agar tidak dimanfaatkan oleh warga.

Tabel 6.7. Ringkasan Progress Pembebasan Lahan dan Konstruksi Jalur Jalan Lintas Selatan DIY

No	Ruas	Pan-jang (km)	Pembebasan Lahan				Konstruksi		Keterangan
			2 lajur		4 lajur				
			Bebas (km)	Belum Bebas (km)	Bebas (km)	Belum Bebas (km)	2 lajur (km)	4 lajur (km)	
I	**Kab. Kulon Progo**	**23,15**	**23,15**	**-**	**3,80**	**19,35**	**21,15**	**2,00**	
1	Congot - Ngremang	19,35	19,35	-	-	19,35	17,35	2,00	*pembebasan lahan on going*

No	Ruas	Pan-jang (km)	Pembebasan Lahan				Konstruksi		Keterangan
			2 lajur		4 lajur				
			Bebas (km)	Belum Bebas (km)	Bebas (km)	Belum Bebas (km)	2 lajur (km)	4 lajur (km)	
									s.d. Des 2020 (7,25 km)
2	Ngremang - Pandansimo	3,80	3,80	-	3,80	-	3,80	-	
II	**Kab. Bantul**	**16,58**	**16,58**	**-**	**16,58**	**-**	**7,22**	**-**	
3	Pandansimo - Samas	6,28	6,28	-	6,28	-	4,58	-	
4	Samas - Parangtritis	5,00	5,00	-	5,00	-	2,64	-	
5	Parangtritis - Girijati	5,30	5,30	-	5,30	-	-	-	
III	**Kab. Gunungkidul**	**76,34**	**58,44**	**17,90**	**43,48**	**32,86**	**36,76**	**0,50**	
6	Girijati - Legundi	17,20	17,20	-	-	17,20	17,20	-	
7	Legundi Planjan	17,14	17,14	-	4,70	12,44	12,44	-	Fase konstruksi 2 lajur: 4,70 km (MYC)
8	Planjan - Tepus	13,00	13,00	-	13,00	-	7,12	-	
9	*Tepus - Jerukwudel*	*17,90*	*-*	*17,90*	*14,68*	*3,22*	*-*	*-*	*pembebasan lahan on going s.d. Feb 2020 (3,22 km)*
10	Jerukwudel - Duwet	11,10	11,10	-	11,10	-	-	0,50	Fase konstruksi 2 lajur: 10,60 km (MYC)
	Panjang Total	**116,07**	**98,17**	**17,90**	**63,86**	**52,21**	**65,13**	**2,50**	
	Persentase Terhadap panjang total		**84,58 %**	**15,42 %**	**55,02 %**	**44,98 %**	**56,11 %**	**2,15 %**	

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2020

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Kendala yang terjadi pada proses pensertifikatan Tanah JJLS adalah pembebasan Tanah JJLS yang dilakukan oleh Tim 9 pada proses pembebasan lahan awalnya belum tersedia Peta Pembebasan Tanah sebagai syarat untuk pensertfiikatan dan juga lamanya waktu tunggu dari penerimaan berkas sampai terbitnya SPS tiap tahapan pensertfifikatan, selain itu juga masih ada proses sertifikat tahun pembebasan sebelumnya tetapi belum selesai sehingga belum dapat berproses ke tahap selanjutnya.
2) Ketersediaan anggaran
3) Kebutuhan pembebasan lahan untuk JJLS sangat besar, sehingga proses pembebasan dan pembangunan konstruksinya memerlukan perencanaan yang cermat dengan tahapan yang berkelanjutan. Adapun, terdapat pembebasan lahan di Desa Kemadang dimana terdapat warga yang tidak sepakat dengan nilai ganti rugi dan mengajukan keberatan.

b. Solusi

1) Koordinasi dan sinergitas yang baik antar Lintas sektor dengan BPN/Kantor Pertanahan yang berwenang untuk penerbitan sertifikat sebagai penyelesaian permasalahan sertifikasi, khususnya sertifikasi Tanah JJLS.
2) Untuk menyelesaikan konstruksi jalan, masih diperlukan anggaran untuk pembebasan lahan yang diupayakan oleh APBD DIY pada tahun 2018 - 2021.
3) Permasalahan dimana terdapat warga yang tidak sepakat dengan nilai ganti rugi dan mengajukan keberatan; sehingga untuk keberlanjutannya akan dilakukan penitipan ganti rugi ke pengadilan negeri setempat (konsinyasi).

I. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY

1. Latar Belakang

Pembinaan kesenian membutuhkan penyediaan ruang seni yang representatif dengan segala pendukungnya untuk mendukung terwujudnya even seni yang berkualitas. Keberadaan Taman Budaya menjadi tujuan utama tempat pementasan seni budaya untuk semua pelaku budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyaknya agenda seni budaya yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan sarana dan prasarana yang mencukupi tidak hanya yang berada di Kota Yogyakarta namun juga tersebar di lima kabupaten/kota se-DIY.

Kondisi Taman Budaya Yogyakarta saat ini sudah jenuh karena terlalu padatnya agenda seni, dan kurangnya sarana dan prasarana seni. Hal ini menyebabkan padatnya pelaksanaan kegiatan seni untuk dilaksanakan di Taman Budaya. Pelaksanaan even seni dan budaya di DIY cukup semarak, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat secara mandiri. Diawali pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pembangunan ruang seni yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY antara lain dalam bentuk balai budaya di desa-desa budaya serta Taman Budaya di kabupaten/kota. Pembangunan Taman Budaya di kabupaten/kota menjadi prioritas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena memiliki arti penting bagi pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kuantitas dan kualitas even seni yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY. Keberadaan Taman Budaya yang tersebar pada kabupaten/kota di DIY ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan aktivitas kebudayaan lokal dan mengenalkan ruang ekspresi yang lebih leluasa untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan Terkemuka. Taman Budaya yang tersebar memungkinkan kegiatan berdimensi kebudayaan bisa tersebar lebih merata dan mendukung aktivitas

perekonomian wilayah melalui ekspresi kebudayaan yang mendidik, mencerahkan, dan menginspirasi.

2. Progress Sampai dengan Tahun 2020

Progres pembangunan taman budaya di wilayah kabupaten/kota se-DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 6.8. Progres Pembangunan Taman Budaya se-DIY

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
1.	Taman Budaya Yogyakarta	2017	Telah dilakukan pengadaan tanah seluas 20.000.20 m^2 berlokasi di Eks STIE Kerja Sama Jalan Parangtritis km 3,5 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Direncanakan akan dibangun gedung kesenian bertaraf internasional.
		2018	Dianggarkan penyusunan Masterplan kawasan eks STIE Kerja Sama oleh PU DIY
		2019	▪ *Masterplan* kawasan Eks STIE Kerjasama telah dipaparkan kepada bapak Gubernur dan terdapat beberpa koreksi terkait dengan conten yang ada di dalam bangunan tersebut.
2.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo	2014	▪ Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo dimulai tahun 2014 di bawah KPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dengan anggaran Rp3.701.107.000,00 dan telah mewujudkan Konstruksi Bangunan Pondasi Gedung *Concert Hall*
		2015	▪ Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo Tahap II Tahun 2015 di bawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo telah meneruskan Konstruksi Bangunan Gedung *Concert Hall* beserta arsitektur dan mekanikalnya
		2016	▪ Tahap III Tahun 2016 Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan sarana dan prasarana untuk gedung *Concert Hall* seperti *sound system*, kursi, dan AC (masing-masing 1 paket)
		2017	▪ Tahap IV Tahun 2017 Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo di bawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo dengan output pekerjaan joglo seluas 3.650 m^2, pagar 825 m^2, kafetaria 70 m^2, tempat ibadah 100 m^2, lanscape 42.560 m^2, dan mekanikal 1 paket.
		2018	▪ Pada tahap V atau tahap akhir Taman Budaya Kulon Progo di bawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo dengan output amphitheater, ruang pameran, serta kelengkapan seluruh bangunan dan komplek Taman Budaya Kulon Progo seperti *sound system, lighting*, AC, serta genzet.
		2019	Taman Budaya Kulon Progo telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan untuk kegiatan seni budaya di Kabupaten Kulonprogo Khususnya serta DIY pada Umumnya

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
3.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul	2017	Pada tahun 2017 di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul telah dilakukan pengadaan lahan seluas 28.132 m^2 di Dusun Logandeng, Playen, Gunungkidul dengan biaya anggaran Rp13.642.874.000,00. Pada lahan ini akan dibangun Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun yang sama disusun Masterplan dan DED Taman Budaya Gunungkidul.
		2018	Pada tahap I dilakukan persiapan lahan dan pembangunan pondasi dan kolom amphitheater.
		2019	Pembangunan taman budaya Gunung Kidul dilakukan dengan kontrak Multi Years sampai dengan 2021. Sampai dengan 2019 bagian bangunan yang dibangun adalah *Concert hall*
		2020	Penyelesaian pembangunan Taman Budaya
4.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Sleman	2018	Pada tahun 2018 di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman telah dilakukan kajian kelayakan Taman Budaya dan dilanjutkan dengan kajian Lalu Lintas dan Appraisal Pengadaan Lahan.
		2019	Pada tahun 2019 dilakukan appraisal terhadap tanah yang ditawarkan oleh masyarakat selanjutnya penawaran harga kepada pemilik lahan yang akan menjadi Taman Budaya di Sleman, dari kurang lebih 20 bidang tanah, 18 menerima harga sesuai dengan Apraisal 2 bidang menolak, pengadaan tanah tidak dapat dilanjutkan karena dua bidang yang menolak berada memotong bidang yang menerima dengan bidang yang bersentuhan denga jalan.
		2020	Pengadaan lahan
5.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul	2016-2019	Menyiapkan tanah yang menjadi taman budaya bantul, ada beberapa lokasi yang menjadi calon lokasi yakni di taman Gabusan dan lahan di Kecamatan Sewon. Namun kedua lokasi tersebut gagal diperoleh karena masalah perizinan dan tidak ada kesepakatan harga.
		2020	Di tahun 2020 Dinas Kebudayaan kabupaten Bantul terkait dengan Taman Budaya membuat *feasibility study* lokasi lahan yang akan digunakan sebagai Taman Budaya Bantul, selain itu untuk pengadaan lahan yang akan dilakukan di tahun 2021 juga dilakukan appraisal tanah di yang berlokasi kecamatan Pajangan.

Sumber: DInas Kebudayaan DIY, 2020

Taman Budaya bukan hanya bangunan, tetapi keberadaannya lebih dari sekedar identitas dan merupakan pusat aktivitas kebudayaan yang diharapkan bisa tersebar merata pada seluruh wilayah DIY. Taman Budaya merupakan fasilitas budaya yang dibangun untuk mendukung aktivitas kebudayaan dalam rangka melindungi, melestarikan, merevitalisasi, mengembangkan, dan menumbuh- kembangkan kebudayaan pada skala luas. Megahnya bangunan pusat kebudayaan diharapkan juga diimbangi dengan aktivitas seni dan kegiatan sosial serta pendidikan yang diharapkan munculnya pelaku-pelaku seni lokal untuk mengekspresikan diri dalam rangka mendukung terwujudnya peradaban. Artinya, pusat kebudayaan bukan

monopoli daerah pusat perkotaan tetapi harus menyebar hingga ke daerah. Taman Budaya diharapkan mampu menumbuhkembangkan dinamika kebudayaan dan perekonomian wilayah secara berkelanjutan.



Gambar 6.39. Pembangunan Taman Budaya Gunungkidul

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama yang dihadapai dalam proses Pembangunan Taman Budaya di kabupaten /kota adalah penyediaan lahan dengan luasan kurang lebih sekitar 3 ha. Hal ini dihadapi oleh Kabupaten Gunung Kidul, Sleman dan Bantul. Untuk pemenuhan lahan dengan luasan ideal yang dibutuhkan untuk Pembangunan Taman Budaya di kabupaten /kota perlu dilakukan kajian terkait dengan status tanah dan juga luasan yang diperlukan. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh kabupaten/kota untuk mengatasi kendala tersebur dengan melakukan tahapan kajian kelayakan lokasi dan status tanah yang akan digunakan untuk Pembangunan Taman Budaya.

J. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BERTARAF INTERNASIONAL RSUD WATES

1. Latar Belakang

Pembangunan pengembangan RSUD Wates bertujuan menghadirkan rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan unggul dengan pelayanan berstandar internasional. Pembangunan dilakukan di lahan Pemda DIY seluas ±4,4 hektar. Rumah sakit ini dilengkapi dengan fasilitas Gedung Medik Center, Gedung Rawat Inap, Asrama dan Apartemen. Pengembangan RSUD Wates menjadi bagian untuk mendukung beroperasinya *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kabupaten Kulon Progo. RSUD Wates juga disiapkan sebagai rumah sakit penyangga RSUP Dr. Sardjito bagi pasien-pasien yang berasal dari Jawa Tengah bagian selatan.

Pembiayaan pembangunan untuk pengembangan RSUD Wates menggunakan penganggaran *multiyears* tahun 2018 – 2020 sebesar Rp270.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh milyar rupiah). Sumber dana berasal dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemda DIY sebesar 70% dan APBD Kab. Kulon Progo sebesar 30%. Khusus untuk pengadaan alat kesehatan/kedokteran diberikan tambahan dana BKK Pemda DIY sebesar Rp19.350.000.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui APBD Perubahan (APBD P) tahun 2020.

2. Progress Sampai dengan Tahun 2020

Capaian terhadap total pekerjaan *multiyears* (2018-2020) di tahun 2019 sebesar 99,32%. Pekerjaan yang dilaksanakan tahun 2020 meliputi pekerjaan konstruksi (Gedung IRNA, Asrama dan Apartemen) dan kegiatan pengadaan alat kesehatan dengan sumber dana dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Pemda DIY. Realisasi dua pekerjaan/kegiatan tersebut secara fisik tercapai 100%.

a. Pembangunan Pengembangan RSUD Wates

Pada awal tahun 2020 hasil pekerjaan telah di serah terimakan ke RSUD Wates dan mulai dimanfaatkan untuk operasional pelayanan kesehatan rujukan. Gedung beroperasi secara bertahap sejak bulan Maret 2020, Gedung Medik Terpadu sudah dioperasikan 90%, Gedung Rawat Inap dioperasikan 60%. Gedung Asrama dioperasionalkan pada bulan Juli 2020 dan dimanfaatkan untuk isolasi mandiri masyarakat yang positif Covid-19 namun tanpa gejala. Gedung apartemen dioperasionalkan untuk isolasi mandiri bagi Nakes RSUD Wates. Peresmian gedung baru RSUD Wates dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 3 Desember 2020 oleh Gubernur DIY.

b. Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran

Kegiatan pengadaan alat kesehatan dengan sumber dana dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Pemda DIY dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan alat medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU), *High Care Unit* (HCU), Instalasi Bedah Sentral/Ruang Operasi (IBS), dan *Neonatus Intensive Care Unit* (NICU), Intalasi Radiologi termasuk Radiologi Urologi, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawal Jalan, Instalasi Rehabilitasi Medik dan Instalasi CSSD (Central Sterile Supply *Departement)-Laundry*.



Gambar 6.40. Kondisi Bangunan RSUD Wates Pada Akhir 2020



Gambar 6.41. Gedung rawat Inap RSUD Wates



Gambar 6.42. Gedung Apartemen Dioperasionalkan Untuk Isolasi Mandiri Bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Wates masa Pandemi Covid-19



Gambar 6.43. Gedung Asrama Dioperasionalkan Pada Bulan Juli Dimanfaatkan Untuk Isolasi Mandiri Masyarakat Dengan Kondisi Positif Covid-19 dan Tanpa Gejala

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pekerjaaan Pembangunan Pengembangan RSUD Wates terlaksana sesuai rencana dari awal tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2020. Demikian juga pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran pada APBD Perubahan Tahun 2020 terealisasi sesuai yang direncanakan.

a. Pembangunan Pengembangan RSUD Wates

Terdapat keterlambatan pemasangan tiang pancang disebabkan kedatangan tiang pancang tidak sesuai jadwal. Pekerjaan lainnya yang merupakan kelanjutan dari pemasangan tiang pancang, terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada akhir pekerjaan pada tahun 2020 serah terima pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena dilakukan percepatan penyelesaian pekerjaan.

b. Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran

Permasalahan dan kendala yang ada dapat diselesaikan dengan addendum sehingga pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan (APBD P) untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan/kedokteran selesai tepat waktu.

c. Secara keseluruhan gedung belum dapat dioperasikan dengan optimal dikarenakan masih terdapat kekurangan beberapa alat medis, sarana prasarana, dan SDM. Untuk mengatasi kendala kekurangan alat medis dan sarana prasarana akan diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kemenkes. Adapun untuk mengatasi kekurangan SDM akan menjalin kerja sama dengan RSUP Dr. Sardjito dalam bentuk *Sister Hospital*. Selain itu, RSUD Wates sebagai jejaring *Academic Health System* (AHS) sehingga selalu *update* dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

K. REVITALISASI TPA PIYUNGAN

1. Latar Belakang

Sejak tahun 1996 DIY memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang berlokasi di Dusun Ngablak dan Watugender, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. TPA Piyungan melayani 2 kabupaten dan 1 kota yaitu Kab. Bantul, Kab. Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020 TPA Piyungan rata-rata menerima sampah sebanyak 565,995 ton/hari yang dikelola pada lahan seluas 10 ha sebagai *landfill.*



Gambar 6.44. Kondisi *Landfill* di TPA pada akhir tahun 2020

Pengelolaan TPA saat ini masih beroperasi menggunakan sistem *controlled landfill* dimana sampah yang datang kemudian akan diratakan menggunakan alat berat dan selanjutnya dilakukan pemadatan dengan penimbunan tanah secara periodik. Karena berbagai macam keterbatasan, Sebagian sampah yang masuk masih diproses

dengan pola *open dumping*. Padahal secara desain, TPA Piyungan seharusnya beroperasi dengan sistem *sanitary landfill*. Kondisi pengelolaan sampah di TPA Piyungan saat ini jelas masih jauh dari ideal jika merujuk ke Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam rangka mencapai kondisi ideal pengelolaan TPA Piyungan, maka perlu adanya revitalisasi TPA. Revitalisasi ini dilakukan dengan tahapan jangka panjang dan jangka pendek. Sebagai upaya jangka panjang dilakukan dengan pengolahan sampah menggunakan teknologi tinggi, sedangkan jangka pendek dilakukan optimalisasi kapasitas TPA Piyungan untuk memperpanjang usia pakai TPA.

2. Progress Sampai dengan Tahun 2020

Sebagai upaya pengelolaan sampah di TPA Piyungan yang lebih baik, maka diperlukan langkah-langkah strategis dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Rencana jangka pendek berupa optimalisasi TPA Piyungan untuk memperpanjang usia TPA agar mampu menampung sampah hingga akhir tahun 2022. Pekerjaan revitalisasi TPA Piyungan jangka pendek dilakukan dengan progres hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:
    1) Pengurugan badan sampah dan membuat akses jalan agar armada sampah bisa masuk ke badan sampah menggunakan tanah urug sebanyak 23.458 m^3 dan dilapisi dengan sirtu/ pasir batu sebanyak 450 m^3 (agar lapisan tanah tidak lengket di roda kendaraan)
    2) Pemeliharaan saluran drinase sepanjang 100 meter yang berfungsi untuk memperlancar aliran air yang masuk ke Kali Opak
    3) Mengaktifkan kembali dermaga bawah dengan melakukan penataan sampah
    4) Secara rutin memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 2 (dua) desa terdampak yaitu Desa Bawuran dan Desa Sitimulyo dengan total anggaran sebesar Rp 350.000.000,- sebagai bentuk kompensasi dari Pemda DIY kepada masyarakat.

b. Rencana jangka panjang menggunakan teknologi tinggi dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam hal penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ BUMN/ BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memerhatikan pembagian risiko di antara para

pihak. Proses tahapan dalam KPBU yaitu *Planning, Preparation, Transaction, Construction, dan Operation*. Saat ini proses KPBU untuk TPA Regional Piyungan telah memasuki tahapan OBC (*Outline Business Case*), kemudian telah dilaksanakan market sounding pada bulan November 2020. *Market sounding* merupakan pencarian pihak yang memiliki tekonologi mengelola sampah yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. *Market Sounding* dilakukan secara daring, karena adanya Covid-19 yang membatasi pertemuan secara tatap muka.



Gambar 6.45. Koordinasi Dengan Konsultan dan Kontraktor Dari BPPW PUPR Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Kegiatan



G

Gambar 6.46. Pengecekan Drainase Sisi Selatan Selatan Badan Sampah

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Proses bongkar muat masih belum dapat dilakukan secara cepat dan efektif antara lain karena terbatasnya jumlah dermaga, belum semua angkutan sampah memakai dump truck, terbatasnya jumlah alat berat yang membantu proses bongkar muat.
2) Pengelolaan lindi di TPA masih belum optimal karena Instalasi Pengolah Limbah (IPL) belum dapat beroperasi selama 24 jam akibat dari terbatasnya kemampuan genset dan ketersediaan solar.
3) Terjadinya pergerakan dari timbunan sampah sehingga menyebabkan pergeseran pada saluran drainase, jalan, dan menyebabkan longsornya batas dinding antara jalan dengan kolam IPL.
4) Jalan akses TPA yang masih menjadi satu dengan jalan umum warga cukup memperlambat mobilitas truk sampah yang akan masuk ke TPA Piyungan.

b. Solusi

1) Untuk kelancaran bongkar muat sampah telah dilakukan penertiban armada truk sampah yang masuk ke dalam TPA harus menggunakan hidrolik dump yang dilengkapi surat rekomendasi dari kab/kota. Keterbatasan jumlah dan operasional alat berat untuk proses bongkar muat, sehingga perlu penambahan alat berat yaitu 1 unit *bulldozer* dan 1 unit *excavator* yang diusulkan pada TA. 2021, sementara ini kebutuhan alat berat dicukupi dengan cara sewa. Perluasan area dermaga sampah dilakukan agar dapat melakukan bongkar muatan sampah secara paralel pada zona aktif.
2) Penambahan daya listrik sebesar 190 kVA yang akan direncanakan pada tahun 2021 agar operasional aerator dapat berjalan selama 24 jam, sehingga IPL dapat bekerja lebih optimal
3) Telah dilakukan pembuatan talud di selatan Kolam IPL berupa beronjong yang diisi batu bertujuan untuk memperkuat pondasi badan sampah.
4) Melakukan pengurugan akses jalan menuju TPA dengan menggunakan sirtu. Pada tahun 2020 sudah dilakukan pembangunan jalan khusus akses menuju TPA sehingga jalan sudah terpisah dengan jalan umum yang dilalui warga.

L. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan di DIY menjadi persoalan serius yang perlu diselesaikan. Dari data Profil Kemiskinan di Indonesia yang dikeluarkan BPS per September 2020, tingkat kemiskinan DIY sebesar 12,8 persen, lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,19 persen. Menurut data BPS tersebut tingkat kemiskinan di DIY menempati urutan tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Berdasarkan karakteristik wilayahnya, tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadikan masalah kemiskinan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD DIY 2017-2022. Penanggulangan kemiskinan di DIY tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Diantaranya meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemenuhan pola konsumsi masyarakat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Upaya yang perlu didorong adalah meningkatkan pola konsumsi masyarakat, baik terkait komponen makanan dan non makanan, sehingga kebutuhan hidup penduduk bisa terpenuhi dengan layak. Berbagai program penanggulangan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi sehingga berbagai program yang dilakukan berkontribusi signifikan bagi penurunan jumlah masyarakat miskin di DIY.

Masalah lain yang membutuhkan perhatian adalah pembenahan basis data kemiskinan. Data yang valid menjadi kunci utama agar intervensi bagi masyarakat miskin sesuai sasaran. Dibutuhkan data yang bisa menggambarkan kondisi masyarakat secara faktual. Tanpa data yang berkualitas, maka akan tetap ditemui masalah *inclusion* dan *exclusion error* saat pemberian program bagi masyarakat miskin.

Pengukuran kemiskinan *dilakukan* berdasarkan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Nilai kebutuhan dasar minimun digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sementara mereka yang berada di atas garis kemiskinan masuk dalam kelompok masyarakat yang tidak miskin.

2. Progress Sampai dengan Tahun 2020

a. Ulasan Kegiatan penangulangan kemiskinan di DIY

Kemiskinan senantiasa menjadi fenomena di seluruh Indonesia bahkan dunia, namun demikain bagaimana kita terus berupaya untuk mencari solusi dalam mengentaskan kemiskinan ini, sudah banyak program kegiatan dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan, meskipun upaya dilakukan masih belum mencapai target yang diharapkan. Demikian pula di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari tahun ke tahun program kegiatan diprioritas untuk mengurangi angka kemiskinan, akan tetapi setiap tahunnya belum mampu menyelesaikan target yang diharapkan, terlebih lagi kondisi ini semakin diperparah dengan dampak pandemi Covid-19, sehingga upaya yang dilakukan mengalami hambatan, angka kemiskinan semakin meningkat dari 11,44 persen pada September 2019 menjadi 12,28 persen pada Maret 2020.

Upaya yang dilakukan ini tidak terlepas dari keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah DIY yang menjalankan tugas fungsinya sesuai perannya masing-masing dalam keanggotaan di tim tersebut, meskipun karena pandemi tidak bisa secara intensif turun ke lapangan, demikian juga stakeholder yang telah terlibat di banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Adapun beberapa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

1) Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. PKH mempunyai dua komponen yaitu PKH Tetap dan PKH Tambahan sesuai kriteria komponen tertentu. Kriteria ini telah disesuaikan dengan indeks dan faktor penimbang Bantuan Sosial PKH dalam penanganan Covid-19 tahun 2020. Jumlah dana yang dibagikan melalui PKH ini disesuaikan dengan keadaan keluarga penerima manfaat (KPM), yakni, dengan membagi PKH yang bersifat tetap menjadi PKH Reguler dan PKH Akses. Selain PKH yang bersifat tetap, setiap keluarga juga akan mendapat dana tambahan sesuai dengan komponen yang mereka miliki. Sementara, bantuan komponen diberikan maksimal untuk empat jiwa dalam satu keluarga. KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Sejak terjadi pandemi Covid-19, pemerintah menyalurkan PKH tiap bulan sejak April 2020 dari yang biasanya triwulanan dan menambahkan bantuan sebesar 25% yang dibayarkan pada medio bulan April, Mei, dan Juni.

2) Bantuan Pangan Non (BPNT) atau Sembako

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/*e-warong* yang bekerjasama dengan bank.

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT.

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai *(cashless)* yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di *e-Warong*, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp150.000/KPM/ bulan.

3) Top Up (bantuan sosial tunai) bagi fakir miskin dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan sasaran 169.383 kk dari hasil *cleansing*.

4) Bantuan sosial berupa paket sembako bagi 375 paket untuk Penyandang Disabilitas, 750 paket untuk Lanjut Usia Telantar, dan 1.691 paket Mahasiswa yang masih tinggal di asrama dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan *stakeholder* terkait yaitu Dinas Sosial yang tersebar di lima kabupaten/kota se-DIY disamping itu juga dilakukan

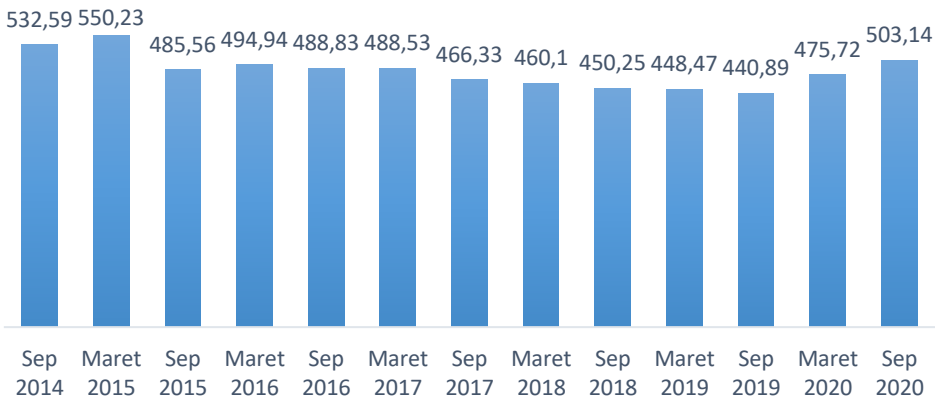
Pendamping Penyandang Disabilitas, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pendamping Lansia.

5) Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di tiga desa (Pakembinangun Pakem, Wonolelo Pleret, Jangkaran Kulonprogo) dilakukan oleh Pemda DIY melalui Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat ,
6) Desa Global Gotong Royong. Desa Global Gotong Royong merupakan adopsi model pemberdayaan desa seperti yang dijalankan di Korea Selatan melalui gerakan *Saemaul Undong* dengan penyesuaian kondisi lokal. Dalam Pelaksanaannya Bekerjasama dengan dengan Tetrapreneur UGM. Lokasi sasaran desa gotong royong di Donoharjo, Karangwuni, Salamreko, Banaran, Wukirsari, Girirejo.
7) Kerjasama Pemda, TNI, dan lembaga masyarakat desa/kelurahan dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tahun 2020 yang terdiri dari tiga tahap dengan menyasar 15 desa/kelurahan.
8) Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Des aPrima untuk melakukan pemetaan sekaligus mendapatkan data untuk melakukan pengkategorian Desa prima yang telah terbentuk selama ini sebanyak 107 desa apakah berada di kategori tumbuh, berkembang atau maju.
9) Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta sesuai Pergub 63 tahun 2016 yang menjalankan fungsi sebagai penyangga untuk masyarakat miskin yang tidak terjamin.
10) Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah untuk siswa dari keluarga tidak mampu sebanyak 13.400 siswa.



Gambar 6.47. Bantuan Pengembangan UMKM Kaja Shibori yang dilakukan PLN UIP Jawa Bagian Tengah II

b. Capaian Kemiskinan pada 2020



Gambar 6.48. Jumlah Penduduk Miskin DIY 2014-2020.
Sumber: Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta September 2020

Jumlah penduduk miskin di DIY pada September 2020 mencapai 503,14 ribu jiwa. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin sejak September 2015 hingga maret 2020 yang selalu berada dibawah 500 ribu jiwa. Lonjakan jumlah masyarakat miskin tahun 2020 sudah terlihat sejak Maret 2020, saat terdapat 475,72 ribu orang miskin pada bulan tersebut. Tren kenaikan ini berlanjut hingga September 2020.

Penyebab utama meningkatnya penduduk miskin di DIY adalah adanya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret tahun 2020. Berbagai kebijakan untuk menekan peredaran virus corona mengakibatkan masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Masyarakat di DIY pun mengalami hal yang sama. Banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya yang disebabkan adanya Covid-19. Akibatnya, penghasilan masyarakat menurun yang membuat pengeluaran konsumsi berkurang. dan ketika pengeluaran konsumsi ini berada di bawah garis kemiskinan, maka dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin.



Gambar 6.49. Sumbangan Sembako dari Angkasa Pura



Gambar 6.50. Tingkat Kemiskinan DIY pada September 2014-2020

Sumber: BPS Susenas September 2014-September 2020, dalam Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta September 2020

3. Permasalahan dan Solusi

Masalah utama yang dihadapi selama tahun 2020 adalah pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di semua daerah, termasuk DIY. Pemda DIY pun menetapkan status tanggap darurat bencana Covid-19 sejak 20 Maret yang kemudian dilakukan perpanjangan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan kondisi pandemi yang belum mereda.

Program dan kegiatan OPD banyak dilakukan refocussing anggarannya untuk penanganan Covid-19, termasuk juga di dalamnya beberapa anggaran program/kegiatan yang direncanakan untuk intervensi kemiskinan juga di-*refocussing* untuk penanganan Covid-19.

Selain aspek refocussing anggaran untuk Covid-19, program kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dijalankan secara optimal karena pembatasan pertemuan baik secara kuantitas maupun durasi dan frekuensi pertemuan.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menunda kegiatan yang tidak bisa berjalan di masa pandemi dan diakselerasi targetnya pada tahun-tahun berikutnya. Disamping itu juga terus meningkatkan koordinasi antar pusat provinsi dan kabupaten kota terhadap perbaikan data sasaran intervensi kemiskinan seperti dilakukan dalam *Cleansing* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis data penerima bantunan sosial. Selain itu dukungan lintas stakeholder untuk intervensi penanggulangan kemiskinan termasuk dukungan swasta. Dukungan swasta/masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam program kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan perlu lebih ditingkatkan.



Bab 7

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

2020

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kerjasama Antar-Daerah

Pada tahun 2020 Pemda DIY telah melakukan kerja sama antar daerah dalam bentuk Perjanjian Kerja sama dan Kesepakatan Bersama. Beberapa kerja sama tersebut diantaranya:

a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Pemda DIY No. 119/00900/2020 dan No. 019.8/016/Perj.I/KB/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Kerja sama Pembangunan Daerah;
b. Perjanjian Kerjasama Pemda DIY dan Kartamantul No. 119/6646/2020, No. 12/PK/Bt/2020, No.30/PK.KDH/A/2020 dan No. 14.PER.J.Yk/IV/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras air limbah domestik sistem terpusat;
c. Kesepakatan Bersama Pemda Provinsi Bengkulu dengan Pemda DIY No. 119/02229/2020 dan No. 119/015-KS/B.1/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Kerja sama Pembangunan Daerah;
d. Perjanjian Kerja sama Pemda DIY dengan Provinsi Jateng No. 119/03010/2020 dan No. 0195/8811/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pemanfaatan Galeri Kotagede di YIA;
e. Perjanjian Kerja sama antara Pemda DIY dan Pemda Kabupaten Kulon Progo No. 119/28294/2020 dan No.30/PRJ.KP/HKM/2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kamijoro.

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pemda DIY pada tahun 2020 telah melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga melalui 10 (sepuluh) Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan dan 9 (sembilan) Perjanjian Kerjasama dan 2 (dua) nota kesepakatan. Adapun Kesepakatan Bersama, nota kesepakatan dan Perjanjian Kerja sama yang telah berhasil dibentuk tersebut adalah sebagai berikut.

a. Perjanjian Kerja sama antar Dinas Koperasi & UKM DIY dan STIE YKPN Jogjakarta No. 119/0745/2020 dan No. 156/STIE/Ketua/I/2020, tanggal 15 Januari 2020 tentang Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengkajian dan Pengembangan SDM di DIY;

b. Perjanjian Kerja sama antar Dinas Kesehatan DIY dan Universitas Aisyiyah Jogjakarta No. 119/1265/2020 dan No. 179/UNISA/Au/I/2020, tanggal 24 Januari 2020 tentang Pendidikan , Penelitian dan Pelayanan Kesehatan;
c. Perjanjian Kerja sama antara Diskop dan UKM DIY dengan PT, BPD DIY No. 099/Kep/Set/III/2020 dan No. 9297/OM 0004, tanggal 26 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Jasa dan Produk Perbankan dan Kartu Mitra Usaha Kecil;
d. Kesepakatan Bersama antara UAD Yogyakarta dengan Pemda DIY No. 11/MOU.UAD/IV/2020, No. 119/5856/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah;
e. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT. BRI Tbk No. 119/01204/2020 dan No. B.683-DIR/BPM/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Penerbitan dan Pemanfaatan Kartu Tani;
f. Perjanjian Kerja sama antara Disperindag DIY dengan UGM dan Kadin DIY No. 119/8154/2020, No. 1938/UN1/DUI/DIT-PUI/HK/2020 dan No. 314/KS/KADINDIY/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Pengembangan SDM,Teknologi dan Pemasaran Produk UKM siap ekspor;
g. Perjanjian Kerja sama Pemda DIY dengan PT BRI Tbk. No. 119/8404/2020 dan No. B.13/KW-VII/KKI/06/2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani;
h. Perjanjian Kerja sama Pemda DIY dengan Pusat Investasi Pemerintah No. 119/9569/2020 dan No. 05/PKS.VI/PIP/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pengembangan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro;
i. Perjanjian Kerja sama Diskop,DIY, UGM dengan Kadin DIY No. 119/9984/2020, No. 1937/UN1/DUI/DIT-PUI/HK/2020 dan No. 316/KS/Kadin/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pengembangan Kapasitas SDM, Teknologi dan Manajemen Bisnis KUMKM;
j. Nota Kesepakatan Pemda DIY dengan Kanwil Bank Indonesia DIY No. 119/14053/2020 dan No. 22/1/Yk/NK/2020/B tanggal 14 September 2020 tentang Kerja sama Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Daerah di DIY.;
k. Kesepakatan BersamaPemda DIY dengan PT. Bank BRI, Tbk Yogyakarta No. 119/14055/2020 dan No. 22/Kw-VII/KKI/09/2020, tanggal 14 September 2020 tentang Kerja sama Peningkatan Ekonomi di DIY;
l. Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan PT. BNI , Tbk, Kanwil Yogyakarta No. 119/ 14056/2020 dan No. WYK/I/0021/R tanggal 14 September 2020 tentang Kerja sama Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi di DIY;
m. Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa No. 119/ 15294/2020 dan No. 055/AKAB/MOU/DIY/VIII/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Kerjasama Peningkatan Perekonomian di DIY (GOJEK);

n. Kesepakatan Bersama antara PT. Fintek Karya Nusantara dan Pemda DIY No. 92/FKN/MOU/XI/2020 dan No. 119/17623/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah Melalui Inovasi Teknologi Digital;
o. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT. Pertamina (Persero) No. 119/18277/2020 dan No. 001/CT30400/2020-S0 tanggal 18 November 2020 tentang Rekonsiliasi Data Pajak Bahan Bakar Minyak di DIY;
p. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan PT. TOKOPEDIA No. 119/18383/2020 dan No. TKPD/LEGAL/XI/2020/556 tanggal 19 November 2020 tentang Pemanfaatan Ekonomi Digital Dalam Percepatan Pembangunan DIY;
q. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta No. 119/19658/2020 dan No. 16/MoU-USD/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY;
r. Perjanjian Kerja sama antara Pemda DIY dan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta No. 119/20057/2020 dan No. 880/UNISA/Au/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Bencana di DIY;
s. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan PT. Brilliant Ecommence Berjayaz No. 119/19986/2020 dan No. 009/MM-BEB/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Pemanfaatan Platform E-Marketplace di DIY;
t. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dan Universitas Shanata Dharma Yogyakarta No. 119/03440/2020 dan No. 17/PKS-USD/XII2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pendidikan, pelatihan, penelitian, pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di DIY;
u. Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dan UIN SUKA Yogyakarta No. 119/20061/2020 No.B-3609/Un.o2/HK.07/12/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan.

3. Kerjasama Daerah sebagai bentuk Sinergi dengan Pemerintah Pusat

Pada tahun 2020 Pemda DIY telah melakukan kerja sama sebagai bentuk sinergi dengan Pemerintah Pusat. Terdiri dari beberapa nota kesepakatan, perjanjian kerja sama dan Rencana kerja (tindak lanjut). Beberapa kerja sama tersebut diantaranya:

a. Perjanjian Kerjasama antar Fakultas Biologi UGM dan Dislautkan DIY No. 527/00529,No. UGM/BI/454/C/03/03, tanggal 03 Februari 2020 tentang Kerja sama Pendidikan , Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kelautan dan Perikanan;
b. Perjanjian Kerja sama antara Pol PP DIY dengan Dir Obyek Vital Polda DIY No. 119/3619/2020, No. B/PKS/5/II/2020/Ditpamovit tanggal 26 Februari 2020 tentang Pengamanan Obyek vital dan Obyek Tertentu;
c. Nota Kesepakatan antara Kementrian Perindustrian dengan Pemda DIY dengan Pemkot Jogja No. 2 tahun 2020, No. 119/00895/2020 dan No. 13.1/NKB.YK/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
d. Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Kejaksaan Tinggi, dan BPK DIY No. 119/7791/2020, No. B..03/M.04/G.Ph.2/05/2020 dan No.S-1130/PW.12/I/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19;
e. Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Kejaksaan Tinggi, dan BPK DIY No. 119/01531,No.B.04/M.04/GPh.2/05/2020, No.S-1150/PW.12/I/2020, tanggal 20 Mei 2020 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Covid-20;
f. Perjanjian Kerja sama Pemda DIY dengan Pusat Investasi Pemerintah No. 119/9569/2020, No. 05/PKS.VI/PIP/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pengembangan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro;
g. Rencana Kerja antara KPPU dan Pemda DIY No. 119/10315 dan No. 16/SJ/PKS/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Dukungan Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, serta Koordinasi Pengawasan Kemitraan di DIY;
h. Rencana Kerja antara POLDA DIY dengan Pemda DIY No. 119/12338/2020 dan No. B/MOU-16/IX/2020, tanggal 10 September 2020 tentang Pemanfaatan Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Masyarakat di Wilayah DIY;



Gambar 7.1. Penandatanganan Kerja Sama Pemda DIY dengan Polda DIY

i. Nota Kesepakatan Pemda DIY dan Kanwil BPN DIY No. 119/ 02228 dan No. 2028/SKB-34.NP.02/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Reforma Agraria;
j. Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di DIY No. 119/18561/2020 dan No. MOU/9/112020 tanggal 23 November 2020;
k. Nota Kesepakatan antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Pemda DIY No. 1165/KS/LIPI/XI/2020 dan No. 119/03082/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendayagunaan Sumber Daya;
l. Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dan Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY No. 119/18991/2020 dan No. W14.TI.04.02-6622 tanggal 30 November 2020 tentang Sinergitas Penyelenggaraan Perlindungan Hukum dan HAM di DIY;
m. Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 119/03374/2020 dan No. PER/30/122020, tanggal 21 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan di DIY;
n. Nota Kesepakatan antara Kemenkeu RI dan Pemda DIY No. 119/17926/2020No.PRJ-124/SJ/2020, tanggal 12 November 2020 tentang Penempatan Lulusan STAN;

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Masih banyak naskah kerja sama yang masuk ke Pemda DIY yang belum menjadikan PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah sebagai pedoman penyusunan naskah kerja sama sehingga perlu memakan waktu lebih lama sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja sama atau kesepakatan bersama.

b. Solusi

Dilakukan penyamaan persepsi melalui sosialisasi PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah pada forum fasilitasi kerja sama antara OPD dengan mitra kerjasamanya sebelum dilakukan penandatanganan naskah kerja sama. Penyamaan persepsi tersebut penting dilakukan agar ke depan kerja sama dapat berlangsung dengan lancar, memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bekerjasama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Forkopimda dibentuk berjenjang di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Sejarah Forkopimda berawal dari UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menjadi dasar terbentuknya Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bertugas menunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi, dengan fungsi yaitu: (a) fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi; (b) pemberian dukungan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi; dan (c) memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan urusan Pemerintahan Umum.

Sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

Forkopimda di DIY telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur DIY No. 24/TIM/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020. Pada tahun 2020, materi yang dibahas berkaitan dengan kondisi wilayah DIY dari aspek kondusifitas daerah yang meliputi keamanan, ketertiban, dan ketenteraman. Instansi vertikal yang terkait adalah Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Kanwil Kementerian Agama, dan Perwakilan Bank Indonesia.

Anggaran yang mendukung kegiatan Forkopimda DIY pada tahun 2020 sebesar Rp1.118.435.000,00 dari APBD DIY melalui kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional. Adapun hasil dan manfaat koordinasi yang diperoleh adalah suatu kesepakatan bersama antara *stakeholder* di wilayah DIY untuk mengambil peran masing-masing untuk menjaga kondisi wilayah agar tetap aman, tertib dan tenteram.



Gambar 7.2. Dokumentasi Rakor Forkopimda, Desember 2020

2. Komite Intelijen Daerah

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi berbagai potensi konflik yang mungkin akan terjadi adalah dengan melakukan deteksi dan identifikasi potensi konflik secara dini. Koordinasi Deteksi Dini dan Cegah Dini dilakukan dalam rangka mengelola permasalahan strategis di tingkat lokal, nasional, regional, dan global yang diperkirakan berdampak terhadap situasi dan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat di DIY.

Instansi vertikal yang terkait adalah Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Hukum dan HAM DIY, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Kanwil Bea Cukai Yogyakarta, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY.

Kegiatan yang dikoordinasikan adalah Rapat Kerja Komite Intelijen Daerah (Kominda) DIY dan Rapat Koordinasi Kominda DIY. Hasil koordinasi tersebut adalah: (a) Pertukaran informasi intelijen; (b) Harmonisasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dan produk intelijen; (c) Perumusan kegiatan dan/atau operasi intelijen bersama; (d) Rekomendasi tindakan yang akan dilakukan dan masukan kebijakan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah tingkat Provinsi. Tindak lanjut hasil koordinasi bahwa semua informasi dan fakta menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara intelijen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Anggaran yang mendukung kegiatan Kominda DIY pada tahun 2020 difasilitasi sepenuhnya oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.

a. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Perlunya penguatan fungsi koordinasi antar unsur forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah.

b) Masih belum rutinnya penyelenggaraan rapat koordinasi.

c) Masih adanya kelemahan terkait koordinasi dan kecepatan penyampaian informasi terkini terkait perkembangan situasi terkini di daerah.

d) Sinergi antar anggota Kominda di daerah masih perlu dikuatkan.

2) Solusi

a) Optimalisasi fungsi koordinasi antar unsur forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah. Unsur forkopimda dapat memfungsikan kembali pusat pengendalian krisis di daerah. Dengan demikian terbangun konektivitas antar pusdalsis pusat, kabupaten/kota dan provinsi. Sehingga, informasi di daerah bisa langsung tersambung dengan pusdalsis di Pusat. Setiap permasalahan yang terjadi sekalipun di ujung pelosok maupun di kawasan perbatasan pada saat itu juga sudah sampai di tangan Gubernur, Pangdam, maupun Kapolda agar di provinsi bisa mengambil tindakan cepat.

b) Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DIY akan melaksanakan rapat koordinasi setiap bulan. Selain itu juga membuat sistem pelaporan yang baik ke forkopimda kabupaten/kota maupun provinsi secara berjenjang.

c) Kominda di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI/Polri lebih meningkatkan koordinasinya, sehingga benar-benar dapat memberikan laporan akurat dan memastikan informasi yang berkembang di masyarakat serta mengesampingkan ego sektoral.

d) Kominda perlu dilihat sebagai komunitas strategis yang berperan penting sebagai penyampai informasi terdepan sebagai deteksi dini dan cegah dini potensi konflik di daerah, sehingga ada perhatian khusus terkait fasilitasi dan kemudahan koordinasinya.

C. PEMBINAAN BATAS DAERAH

1. Kondisi Umum

Sebagai daerah otonom DIY terdiri atas lima kabupaten/kota, yang masing-masing batas daerahnya (baik batas daerah antar provinsi maupun antar kabupaten/kota), telah ditetapkan dalam Permendagri tentang Batas Daerah sebagai berikut.

Tabel 7.1. Permendagri tentang Batas Daerah Lingkup DIY

No	Segmen Batas Daerah		Jml. Pilar Batas	Panjang Lintasan Batas (km)	Penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah	Lampiran Permendagri tentang Batas Daerah
1.	DIY	Jawa Tengah	213	±215,24	Permendagri 19/2006	Peta Batas Wilayah skala 1: 100.000
2.	Bantul	Kulon Progo	79	±28,18	Permendagri 70/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000
3.	Gunungkidul	Bantul	83	±51,70	Permendagri 71/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 40.000
4.	Kota Yogyakarta	Sleman	66	±9,46	Permendagri 72/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 5.000
5.	Gunungkidul	Sleman	28	±6,50	Permendagri 4/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
6.	Kulon Progo	Sleman	55	±19,36	Permendagri 61/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 18.000
7.	Kota Yogyakarta	Bantul	160	±18,74	Permendagri 15/2012	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
8.	Bantul	Sleman	200	±41,15	Permendagri 83/2013	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2021

Permendagri tentang Batas Daerah merupakan hasil akhir dari rangkaian proses penegasan batas daerah yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Rangkaian proses penegasan batas daerah di darat meliputi penyiapan dokumen, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas, serta pembuatan peta batas (Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah), yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah yang berbatasan. Pelaksanaan penegasan batas daerah sendiri tidak menghapus hak keperdataan masyarakat, misalnya hak atas tanah dan kepemilikan aset, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 141 Tahun 2017.

Sebagai tindaklanjut dari Permendagri tentang Batas Daerah, Pemda DIY telah melakukan kerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah mengenai pemasangan pilar batas daerah antara DIY-Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dituangkan dalam

Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jawa Tengah Nomor 002/PKS/II/2019 dan 125.5/013/2019.

Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas akurasi titik koordinat pilar batas kedua provinsi, yang pada proses berikutnya akan digambarkan pada peta batas daerah skala besar (1:5.000) untuk tiap titik pilar batas daerah yang terpasang beserta jalur batasnya. Hal ini terkait dengan implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP) Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Prakteknya, masing-masing kabupaten/kota yang berbatasan memulai penarikan jalur batas daerah menggunakan peta skala besar dimaksud.

2. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi

a. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY

Berdasarkan Permendagri No. 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.

Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 antara lain berisi informasi mengenai kode wilayah administrasi pemerintahan, nama Kecamatan dan nama Camat, nama Desa/Kelurahan dan nama Kepala Desa/Lurah, nama Pedukuhan, luas wilayah, jumlah RT/RW, serta jumlah penduduk Semester II Tahun 2019 pada masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk bersumber dari data hasil konsolidasi dan pembersihan database Kependudukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang diolah oleh Bagian Kependudukan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Adapun untuk nama Camat dan Kepala Desa/Lurah bersumber dari Bagian Administrasi Pemerintahan (atau nama lain) Setda Kabupaten/Kota di DIY per tanggal 31 Januari Tahun 2020.

Hal baru yang tertuang di dalam Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 ini adalah adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dalam melaksanakan penugasan sebagian urusan Keistimewaan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Tabel 7.2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2020

NO.	KODE	NAMA KOTA/ KABUPATEN	JUMLAH			JUMLAH		LUAS WILAYAH (Km^2)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)*
			KEC.	DESA/ KELURAHAN	DUKUH/ KAMPUNG	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	34.01	KULON PROGO	12	87 / 1	930	4.472	1.862	586,28	447.246
2.	34.02	BANTUL	17	75 / -	933	5.519	-	508,13	949.325
3.	34.03	GUNUNGKIDUL	18	144 / -	1.429	6.822	1.492	1.431,42	769.907
4.	34.04	SLEMAN	17	86 / -	1.212	7.480	2.960	574,82	1.075.575
5.	34.71	YOGYAKARTA	14	- / 45	170	2.535	616	32,50	414.055
JUMLAH			**78**	**392 / 46**	**4.674**	**26.828**	**6.930**	**3.133,15**	**3.656.108**

*Keterangan : Semester II Tahun 2019

b. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten/ Kota tentang Penyelesaian Permasalahan di Wilayah Perbatasan Kabupaten/ Kota dan atau antar Provinsi di DIY

Permasalahan di Wilayah Perbatasan Antara Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman dengan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul terkait dengan Tanah Kas Desa Kalurahan Banyuraden yang digunakan untuk pembangunan jalan lingkar kampung Onggobayan oleh warga Onggobayan, Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Saat ini status tanah tersebut telah disewa oleh Universitas Widya Mataram Yogyakarta untuk dibangun kampus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/IZ/2020 tanggal 24 Februari 2020 Tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Banyuraden Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Desa Banyuraden Kepada Yayasan Mataram Yogyakarta untuk Pembangunan Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Langkah yang telah dilakukan oleh Pemda DIY mempertemukan para pemangku kepentingan dalam upaya penyelesaian permasalahan penggunaan tanah kas desa tersebut. Adapun kesepakatan Pemkab Bantul, Sleman dan Yayasan Mataram adalah (a) Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul sepakat bahwa garis batas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman, dan masing-masing pihak sudah mengetahui bahwa tanah yang dibangun jalan lingkar warga Padukuhan Onggobayan, Kalurahan

Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tersebut merupakan Tanah Kas Desa Banyuraden; (b) Pemerintah Kabupaten Sleman akan berkoordinasi internal dengan Lurah terpilih hasil Pemilihan Lurah Tahun 2020; (c) Yayasan Mataram Yogyakarta akan menganalisa terkait alternatif penyelesaian permasalahan pembangunan jalan lingkar warga Padukuhan Onggobayan, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul yang dibangun diatas tanah yang disewa oleh Yayasan Mataram.

c. Fasilitasi dan koordinasi usulan revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah pada segmen perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo.

Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi DIY dengan Provinsi Jawa Tengah. Peta batas daerah dan koordinat batas antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dengan skala 1: 100.000. Peta dengan skala 1: 100.000 ini terlihat sangat kecil terhadap obyek yang akan diambil sehingga dalam rangka penarikan garis batas antara provinsi membutuhan Peta Desa skala besar 1: 5000 sebagai rujukan dalam penarikan garis batas.

Guna penyempurnaan penarikan garis batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah khususnya segmen Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo telah dilakukan serangkaian tahapan penegasan batas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 yang pada prinsipnya dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yakni penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas atau titik acuan, penentuan dan pengukuran batas/pilar batas, serta pembuatan peta batas. Tahapan-tahapan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: pertama, penelitian dokumen didasarkan atas peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah dan dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yang berbatasan; kedua, pelacakan batas daerah di lapangan dilakukan untuk menentukan titik batas dan garis batas sementara di lapangan, untuk selanjutnya dituangkan dalam peta kerja. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Provinsi mengusulkan pengesahan penetapan batas daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

Rangkaian tahapan penegasan batas DIY dengan Jawa Tengah pada segmen perbatasan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo telah diselesaikan dengan baik. Pemda DIY telah menyampaikan surat kepada Mendagri Nomor 126/18534 tanggal 23 November 2020 hal permohonan revisi Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Batas Daerah Provinsi DIY dengan Provinsi

Jawa Tengah khususnya pada segmen perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo.

d. Database Administrasi Kewilayah.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan karakteristik *good governance* adalah dengan menerapkan e-government dengan pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan database administrasi kewilayahan. Sistem Informasi SIPILAR bertujuan untuk mengelola data sebaran titik batas-batas wilayah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam *database* SIPILAR, data yang tersedia merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, sehingga menghasilkan data-data titik sebaran dengan tingkat akurasi yang lebih baik.

Keberadaan *database*/pusat data ini secara langsung akan memudahkan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah. Akan lebih mudah menentukan posisi pilar batas yang hendak dibangun, atau mengindetifikasi posisi pilar batas daerah yang perlu dipelihara/diperbaiki dengan memanfaatkan database, dibandingkan harus membuka lembar peta batas daerah yang bersifat statis.

Database Administrasi Kewilayahan berisi fitur yang dapat menampilkan sebaran pilar batas yang terdiri dari pilar batas utama dan pilar perapatan berbasis *Geographic Information System*, mendeskripasikan pilar batas daerah dalam bentuk narasi, foto, dan koordinat, serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan DIY, meliputi lokasi kantor kabupaten/kota, kecamatan/*kapanewon*/*kemantren*, dan desa/*kalurahan*/ kelurahan dilengkapi dengan alamat dan koordinat titik lokasi. Database ini dapat diakses di http://sipilar-birotapem.jogjaprov.go.id/

e. Penggantian dan pemasangan pilar batas daerah pada perbatasan antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo

Penegasan batas daerah antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo telah dimulai sejak tahun 2015 melalui pemasangan 35 pilar batas daerah. Kegiatan ini ditindaklanjuti kembali dengan memasang 30 pilar batas daerah pada tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2020 telah terpasang 25 pilar perapatan yang berada di sepanjang garis batas antara Kabupaten Kulon Progo (Kapanewon Temon dan Kapanewon Kokap) dengan Kabupaten Purworejo, sekaligus telah diukur secara geodetik. Pengukuran titik koordinat secara geodetik merupakan teknik pengukuran yang akurasi pengukuran posisi pilar

batas daerah memiliki ketelitian hingga 5 – 10 milimeter. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan koordinat peta yang mewakili kondisi sesungguhnya di lapangan.

3. Permasalahan dan Solusi dalam Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan

a. Permasalahan

Batas Daerah antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Di dalam peta lampiran Permendagri ini skala peta yang digunakan masih sangat kecil yakni 1: 100.000, dimana ukuran 1 cm yang tergambar di dalam peta tersebut mewakili 1 km atau 1000 m di lapangan. Dengan skala yang kecil tersebut berpengaruh kepada kedetailan penarikan garis batas daerah sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian garis batas yang tergambar dalam peta dengan kondisi eksisting di lapangan. Hal ini dapat menimbulkan kerawanan di wilayah yang saling berbatasan dalam hal penerapan peta batas daerah di lapangan, terlebih pada daerah yang mempunyai potensi ekonomi tinggi.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, menyebutkan bahwa dalam rangka mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas nawacita, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Oleh karena itu peta lampiran Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak relevan lagi.

b. Solusi

a) Untuk menindaklanjuti PP No. 9 Tahun 2016 yang mengamanatkan tingkat ketelitian peta pada skala 1:50.000, maka Pemda DIY mengusulkan revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, dengan memperbesar skala peta batas daerah dari 1: 100.000 menjadi skala 1: 50.000. Namun revisi Permendagri tersebut masih dalam proses pengesahan hingga akhir tahun 2020.

b) Adapun mekanisme yang telah dilakukan dalam rangka revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2006, khususnya pada segmen batas daerah antara Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah adalah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Tahapan yang telah dilakukan meliputi Penyiapan Dokumen, Pelacakan Batas, Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas, dan Pembuatan Peta Batas. Pelaksanaan setiap tahapan revisi tersebut selalu melibatkan kedua Pemerintah Daerah sampai pada tingkat pemerintahan yang terendah (desa/kalurahan) dan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan memiliki kekuatan hukum melalui penandatanganan Berita Acara kesepakatan.

c) Progress terakhir yang telah dilakukan adalah pembahasan draft revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Pembahasan dihadiri Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara yang substansinya menyebutkan bahwa kedua Pemerintah Daerah telah sepakat dengan draft revisi Permendagri yang dibahas dan sepakat untuk menindaklanjuti dalam penerbitan revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2006, khususnya pada segmen batas daerah antara Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, oleh Menteri Dalam Negeri.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Gambaran Umum

DIY berada di daerah rawan bencana alam karena faktor geografi, geologi (lempeng tektonik) dan demografinya bahkan pernah mengalami bencana besar yatu gempa dan erupsi gunung berapi. Bencana memiliki sifat *uncertainity* yang tinggi sehingga ancamannya selalu ada. Komitmen Pemda DIY dalam penanggulangan bencana sudah cukup baik, salah satunya dalam perencanaan pembangunan telah mengakomodir isu penanggulangan bencana sebagai bagian dari Misi Pertama RPJMD tahun 2017–2022. Strategi Penanggulangan Bencana yang diterapkan adalah menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi seminimal mungkin.

Selama tahun 2017 sampai dengan 2020, terjadi sejumlah kejadian bencana alam. Pada tiga tahun terakhir periode tersebut, tiga kejadian terbanyak adalah bencana alam tanah longsor, kebakaran, dan angin kencang/puting beliung. Berdasarkan data

yang masuk ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) DIY, pada tahun 2017 terdapat 1.211 kejadian bencana di wilayah DIY, pada tahun 2018 sebanyak 512 kejadian dan tahun 2019 ada 813 kali kejadian. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kejadian bencana menjadi sebanyak 802 kejadian.

2. Antisipasi daerah Dalam Menghadapi Kemugkinan Bencana

Strategi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Strategi ini dipilih karena keterkaitan yang sangat erat antara peningkatan kapasitas dengan penurunan risiko bencana. Ada tiga faktor dari indeks risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Kapasitas merupakan faktor yang layak (*feasible*) diubah atau ditingkatkan seiring dengan program pembangunan, sedangkan faktor-faktor ancaman dan kerentanan cukup sulit diubah dalam jangka waktu lima tahun pembangunan.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya menjadi kinerja utama atau indikator sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah. Faktor-faktor utama yang menjadi penentu dalam peningkatan indeks ketahanan daerah adalah komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.

3. Permasalah dan Solusi

a. Permasalahan

1) Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selama ini kalau ada kerusakan akibat bencana tidak bisa segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi karena mekanisme penganggaran mengharuskan usulannya n-1 sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selalu tertunda, padahal seharusnya segera tertangani.
2) Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada;
3) Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana/Destana dalam rangka pengurangan resiko bencana;
4) Banyaknya kawasan rawan bencana di DIY yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana;
5) Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya;

6) Perlunya strategi yang berkelanjutan dalam penanganan bencana kekeringan di DIY;
7) Belum ada pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakaarta;
8) Belum tersedianya lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana/KRB III;
9) Masih banyaknya permasalahan yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan sungai di DIY.
10) Belum adanya studi kajian kebutuhan logistic kebencanaan yang dibutuhkan untuk seluruh DIY.
11) Perlu peningkatan monitoring dan kelanjutan aktivitas relawan Dapur Umum yang telah dibentuk Subbid Logistik BPBD DIY pada Kab/Kota.
12) Belum tersedianya sebuah sistem informasi yang berbasis aplikasi pada pengelolaan manajemen logistik bencana.
13) Belum tersedianya sebuah sistem informasi yang berbasis aplikasi pada pengelolaan manajemen peralatan PB.
14) Belum maksimalnya petugas pengelola peralatan dalam pengoperasian peralatan PB.
15) Masih adanya peralatan PB yang belum memenuhi standar.

b. Solusi

1) Adanya aturan atau Peraturan Gubernur untuk penggunaan dana kebutuhan mendesak untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
2) Penyusunan pedoman dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana/SPAB mandiri serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogykarta serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
3) Adanya kesinambungan kegiatan Desa Tangguh Bencana dengan kegiatan pengembangan Desa Tangguh Bencana yang merupakan kelanjutan dari Pembentukan Desa Tangguh Bencana, serta pemenuhan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kapasitas Destana;
4) Penyusunan database Sistem Peringatan Dini yang dimiliki instansi, lembaga maupun masyarakat, serta pemetaan kebutuhan sistem peringatan dini bencana;
5) Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di DIY;
6) Melakukan Gerakan Memanen Air Hujan dengan Ger-TRAP (Gerakan Tangkap Resapkan Alirkan dan Pelihara) air hujan dalam rangka mengatasi bencana kekeringan di DIY.
7) Menyusun kajian pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan;

8) Mendorong warga dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyediakan lahan relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana/KRB III;
9) Melakukan kajian rawan bencana di kawasan sungai di DIY.
10) Pengadaan kajian kebutuhan Logistik PB di DIY
11) Melakukan monitoring relawan Dapur Umum di Kab/Kota.
12) Pembuatan sistem informasi aplikasi manajemen logistik bencana.
13) Pengembangan sistem informasi pengelolaan peralatan.
14) Pelatihan pengoperasian peralatan PB.
15) Pengadaan peralatan PB yang memenuhi standar.

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gambaran Umum

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Dalam hal ini Pemda DIY wajib melindungi masyarakat dari segala gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Untuk menciptakan suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

DIY merupakan daerah tujuan pendidikan dan wisata serta pusat kebudayaan sehingga DIY bagaikan magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi warga yang menetap. Situasi ini menjadikan DIY sebagai daerah yang multi ethnis dan multi kultur. Implikasinya, DIY mengalami perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya:

a. Hampir di setiap jalan terdapat reklame besar yang melintang di atas jalan yang membahayakan pengguna jalan. Reklame yang di jalan nasional sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan karena Pemasangan papan reklame berada di perkerasan jalan bahkan sampai tengah/as jalan menyebabkan gangguan pandangan pengguna jalan. Apabila ada angin kencang papan reklame bisa roboh/plat besi reklame lepas sehingga membahayakan pengguna jalan.
b. Adanya penambangan liar di sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ijin dapat berakibat pada kerusakan lingkungan baik sosial maupun alam.

c. Peredaran minuman berakohol tetap masih menjadi prioritas penanganan gangguan tibumtranmas karena minuman berakohol ini akan memicu berbagai permasalahan kriminalitas.
d. Bencana berupa pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh Negara, terutama di Indonesia tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai fungsi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tentu saja harus melaksanakan fungsinya sebagai pelayan publik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat agar pelaksanaan kehidupan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pelaku ekonomi yang tidak patuh terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
2) Upaya pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang menghalangi petugas dalam menjalankan tugas.
3) Banyaknya penambangan liar di sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga atau perusahaan swasta tanpa izin. Hal ini akan berakibat merusak lingkungan baik manusia maupun alam.
4) Banyak beredar minuman keras/minuman berakohol di wilayah DIY yang dijual pada warung-warung kecil/toko kelontong yang seharusnya tidak menjual barang tersebut secara illegal.
5) Masyarakat cenderung abai dalam menghadapi pandemi Covid-19

b. Solusi

1) Perlu adanya kebijakan dan komitmen antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berupa pelimpahan wewenang kepada Pemda DIY terkait Penertiban reklame yang berada di jalan nasional.
2) Untuk meningkatkan kepatuhan pelanggar dilakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat rentan pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
3) Perlu adanya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penindakan secara non yustisial terhadap pelanggar perda penambangan liar serta operasi penertiban perijinan

4) Untuk mengatasi peredaran minuman beralkohol kami melakukan operasi yustisi kepada pengedar minuman beralkohol legal maupun ilegal dengan harapan agar putusan pengadilan membuat jera kepada para pelanggar
5) Untuk menghadapi masyarakat yang abai terhadap penyebaran Covid-19, Pemda DIY melalui Satpol PP melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memakai masker, melakukan jaga jarak dan menjauhi kerumunan di tempat umum, dan ketika terbit Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 maka kami melakukan operasi non yustisi di wilayah perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta, pelaku usaha (restoran, café, UMKM serta masyarakat umum) terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

F. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH

1. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)

a. Gambaran Umum

LO DIY mempunyai tugas utama sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja Pelayanan Publik, baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilingkup Pemda DIY dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya maupun oleh berbagai Pelaku Usaha Swasta yang secara operasional menyelenggarakan fungsi Pelayanan Publik.

LO DIY menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas keputusan atau tindakan penyelenggara Pemerintahan Daerah dan pengusaha yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum serta dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintahan Daerah dan instansi swasta. Adapun pembagian bidang yang menunjang kinerja kelembagaan LO DIY, adalah:

1) Bidang Pelayanan dan Investigasi.

Pada tahun 2020, LO DIY telah menyelesaikan 165 Produk Akhir, baik berupa Rekomendasi maupun Laporan Penyelesaian Kasus (LPK). Jumlah ini meningkat dari tahun 2019 yang berjumlah 106 Produk Akhir. LO DIY telah mengeluarkan 126 Rekomendasi atas adanya indikasi maladministrasi (bidang pemerintah) ataupun pelanggaran etika usaha (bidang instansi swasta). Dalam hal tidak ditemukan maladministrasi atau kasus telah diselesaikan oleh Pelapor dan Terlapor sebelum LO DIY

melakukan tindak lanjut, LO DIY telah menerbitkan 39 Laporan Penyelesaian Kasus (LPK).

Pada tahun 2020 ini LO DIY telah menerima 266 Aduan dari masyarakat, dengan rincian 242 Aduan diselesaikan pada tahap Konsultasi dan 24 Pengaduan diselesaikan sebagai Laporan Pengaduan yang didasarkan atas kewenangan LO DIY. Tabel Data adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3. Konsultasi berdasarkan Bidang:

No.	Bidang	Jumlah	Persentase
1	Instansi Swasta	134	55,37 %
2	Aparatur Pemerintah Daerah	79	32,65 %
3	BUMN/BUMD	14	5,79 %
4	Lainnya	15	6,20 %
	Jumlah	**242**	**100%**

Tabel 7.4. Konsultasi Berdasarkan Wilayah

No.	Wilayah	Jumlah	Persentase
1	Kota Yogyakarta	122	50,41 %
2	Sleman	59	24,38 %
3	Bantul	41	16,94 %
4	Luar DIY	13	5,37 %
5	Kulon Progo	4	1,65 %
6	Gunungkidul	3	1,24 %
	Jumlah	**242**	**100%**

Tabel 7.5. Konsultasi berdasarkan Sektor:

No.	Sektor	Jumlah	Persentase
1	Properti	58	23.97 %
2	Keuangan	54	22.31 %
3	Pendidikan	24	9.92 %
4	Kesejahteraan	21	8.68 %
5	Pertanahan	20	8.26 %
6	Ketenagakerjaan	16	6.61 %
7	Lainnya	11	4.55 %
8	Kepegawaian	10	4.13 %
9	Jasa	6	2.48 %
10	Kesehatan	4	1.65 %
11	Perseorangan	4	1.65 %
12	Hukum	2	0.83 %
13	Ketertiban Umum	2	0.83 %
14	Lingkungan	2	0.83 %
15	Perizinan	2	0.83 %
16	Retribusi/Pajak	2	0.83 %
17	Administrasi Kependudukan	1	0.41 %

No.	Sektor	Jumlah	Persentase
18	Komunikasi	1	0.41 %
19	Perdagangan	1	0.41 %
20	Retribusi/Pajak	1	0.41 %
Jumlah		**242**	**100 %**

Berdasarkan bidang, Laporan Pengaduan tersebut dapat dikategorikan: 20 laporan (83.33 %) bidang instansi swasta, 4 laporan (16.67 %) terkait dengan bidang layanan sektor pemerintah.

Tabel 7.6. Pengaduan berdasarkan Bidang

No	Bidang	Jumlah	Persentase
1	Aparatur Pemerintah Daerah	4	16,67 %
2	Instansi Swasta	20	83,33 %
Jumlah		**24**	**100 %**

Tabel 7.7. Pengaduan berdasarkan Wilayah

No.	Wilayah	Jumlah	Persentase
1	Kota Yogyakarta	12	50 %
2	Sleman	10	41,67 %
3	Bantul	2	8,33 %
Jumlah		**24**	**100 %**

Tabel 7.8. Pengaduan berdasarkan Sektor

No	Kasus	Total	Persentase
1	Keuangan	20	83,33 %
2	Pendidikan	2	8,33 %
3	Kepegawaian	1	4,17 %
4	Kesehatan	1	4,17 %
Jumlah		**24**	**100 %**

2) Bidang Sosialisasi, Kerja Sama dan Penguatan Jaringan.

Media sosial merupakan dunia maya yang dapat menjangkau beragam kalangan, usia, dan wilayah masyarakat yang sangat luas. Media sosial kini menjadi salah satu media kunci dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan LO DIY melalui jejaring media sosial menggunakan beberapa kanal, antara lain website lembaga (www.ombudsman.jogjaprov.go.id), Facebook (Lembaga Ombudsman DIY), Instagram (@lembagaombudsmandiy), Twitter (@ombusmanjogja), dan kanal Youtube (Lembaga Ombudsman DIY). Mengikuti tren

perkembangan teknologi informasi, LO DIY menggunakan media sosial sebagai sarana publikasi seputar kegiatan kelembagaan LO DIY, media edukasi dan informasi kepada masyarakat.

3) Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Hubungan Kelembagaan.

Lembaga Ombudsman DIY sebagai lembaga independen yang berfungsi memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh aparatur pemerintah maupun pelaku usaha sektor swasta dan sebagai pusat pelayanan atas semua pengaduan masyarakat tentang praktik mal-administrasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah maupun pelaku usaha sektor swasta di DIY, di sisi lain juga sekaligus sebagai laboratorium (*resource center*) praktik - praktik pelayanan publik pemerintah daerah maupun pelaku usaha sektor swasta yang bisa dipelajari dan dicermati oleh segenap kelompok masyarakat yang mempunyai minat dalam isu tersebut. Untuk itu, LO DIY membuka ruang dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk mengkaji lebih dalam melalui kegiatan penelitian ataupun program magang. Program ini merupakan upaya bagaimana LO DIY yang berbasis institusional nantinya bisa lebih luas dikenal oleh masyarakat sehingga fungsi pengawasan sebagaimana yang dilakukan oleh LO DIY bisa mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas guna terwujudnya *good governance* dan *good corporate governance* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4) Bidang Monitoring dan Evaluasi

Bidang Monitoring dan Evaluasi telah melakukan kegiatan monitoring terhadap 126 Rekomendasi yang diterbitkan pada tahun 2019 maupun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a) Mengirim 32 surat monitoring kepada para pihak terkait penerima Rekomendasi dan 14 diantaranya telah mendapatkan tanggapan;
b) Melakukan kunjungan lapangan, korespondesi via Telepon dan pesan singkat kepada Terlapor dan para pihak terkait untuk 112 Rekomendasi

Pada masa pandemi Covid-19, berbagai kegiatan monitoring ke lapangan atau kontak langsung dengan para pihak penerima Rekomendasi dikurangi untuk tetap menjaga physical/social distancing, dan dialihkan ke sarana komunikasi via telpon atau WA.

Terhadap Hasil Akhir berupa 39 Laporan Penyelesaian Kasus, Bidang Monitoring dan Evaluasi tidak melakukan monitoring karena proses tersebut dianggap telah selesai, dengan rincian sebagai berikut:

a) Telah diselesaikan Para Pihak sebanyak 30 produk;
b) Kewenangan Lembaga Lainnya sebanyak 6 produk;
c) Tidak ditemukan adanya pelanggaran pelayanan publik 3 produk.

b. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal permasalahan utama yang dihadapi oleh LO DIY dan solusi yang dilaksanakan, sebagai berikut:

1) Properti

Permasalahan: Proses pembelian lahan untuk perumahan tidak diselesaikan oleh kontraktor/pengembang, dalam permohonan ijin prinsip pembangunan perumahan terjadi perbedaan antara perusahaan yang mengajukan permohonan dengan perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan lokasi perumahan bahkan perusahaan marketingnya merupakan perusahaan yang lain, kualitas bangunan perumahan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan antara marketing/perusahaan pengembang/kontraktor dengan konsumen yang bersangkutan, telah terjadi pelunasan obyek perikatan yaitu bangunan rumah namun sertifikat tanah atas bangunan tersebut belum bisa diambil oleh konsumen, untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terjadi rawan penyimpangan pada aspek perjanjian seperti konsumen FLPP tidak sesuai kriteria, ada pembayaran lunas dari awal akad perjanjian, pembiayaan tidak mengikuti skema dari Bank yang ditunjuk oleh program FLPP, pengembang/ kontraktor menjual bagian tertentu/fasilitas tertentu dari unit rumah pada program FLPP, pengembang/kontraktor yang pimpinan/oknum tertentu memiliki jejak rekam kriminal di provinsi lain/wilayah pulau lain diluar pulau Jawa yang tidak diketahui oleh OPD penerbit perijinan bahkan Aparat Penegak Hukum, bukan perusahaan pengembang/kontraktor namun mengerjakan pekerjaan konstruksi.

Solusi: mencari sampai ketemu penanggungjawab dari perusahaan pengembang/kontraktor tersebut/seminimalnya ada pihak dari perusahaan yang bisa dibebani tanggungjawab selanjutnya melakukan upaya memperjelas kronologi permasalahan dan melakukan upaya mediasi. Dalam hal ini tetap melakukan upaya koordinasi dengan Pihak

Kepolisian wilayah setempat guna upaya preventif jika permasalahan tidak mampu diselesaikan oleh LO DIY maka akan diserahkan ke pihak Kepolisian beserta dokumen yang didapat di LO DIY untuk dilakukan upaya penegakan hukum. Berkoordinasi dengan Asosiasi Jasa Konstruksi terkait eksistensi dari para anggota perusahaan pengembang/kontraktor, melakukan pendidikan masyarakat melalui pertemuan secara langsung, media sosial dan koordinasi dengan pimpinan asosiasi jasa konstruksi serta dengan OPD terkait. Khusus untuk program FLPP berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia khususnya Balai Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU **PPDPP**) dan Bank prinsipal yang ditunjuk.

2) Keuangan.

Permasalahan: klasul baku pada perjanjian sewa-beli kurang bisa dipahami oleh masyarakat pada umumnya/kurang bisa diperhatikan dengan baik oleh masyarakat, konsumen dalam perjanjian sewa-beli kurang mendapatkan perhatian yang optimal dari lembaga terkait karena menilai bentuk perjanjian tersebut adalah kontrak keperdataan yang merupakan tanggungjawab dari masing-masing pihak.

Solusi: melakukan mediasi antara pihak jasa keuangan dengan konsumen untuk menemukan titik-temu kesepakatan dengan mengedepankan prinsip itikad baik dari masing-masing pihak guna melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Melakukan pendidikan masyarakat dengan berbagai pihak termasuk melalui media **sosial** dari LO DIY.

3) Jasa

Permasalahan: Perlu adanya pembinaan Koperasi dengan lebih baik, ada Koperasi yang menjalankan usahanya sama seperti perikatan kredit perbankan, tidak mampu **mempertanggungjawabkan** perhitungan pembiayaan kredit yang dibebankan pada konsumen, **menyelenggarakan** program investasi uang.

Solusi: meminta menunjukkan standar tata kelola, perijinan, bukti pembinaan, notulen rapat umum tahunan, struktur **pengurus** koperasi dan dokumen pendukung lainnya, melakukan mediasi antara konsumen, pihak koperasi dan dinas koperasi, **UMKM** dan Perindustrian setempat.

4) Komunikasi.

Permasalahan: keberadaan Menara Telekomunikasi/*Base Trasmisi System* (BTS) yang berada dikawasan pemukiman. Menimbulkan keresahan warga karena umur dari bangunan BTS tersebut, perpindahan status kepemilikan BTS tersebut kadang menjadi masalah karena kualitas pemeliharaan, kerjasama sosial yang tidak mau dijalin **antara** perusahaan pemilik/pengelola BTS tersebut dengan warga masyarakat sekitar.

Solusi: melakukan mediasi dan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika setempat guna melihat aspek perijinan. Meminta aspek *Corporate Social Responsibility* (CSR) **untuk** dilaksanakan pada kawasan dimana BTS tersebut berada.

5) Pendidikan.

Permasalahan: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan tahapan regulasi yang sulit untuk dicermati dan dipelajari oleh masyarakat pada umumnya karena terjadi perubahan hal prinsip pada setiap tahun ajaran, pemaknaan Pungutan yang dilakukan sekolah juga masih menjadi permasalahan yang masih terulang dibeberapa sekolah, perlu adanya pencermatan dengan sekolah yang menggunakan nama Internasional dalam hal pelaksanaan pembelajaran, etika dan pembiayaan pendidikan.

Solusi: mulai bulan Maret pada setiap tahunnya LO DIY mengundang OPD terkait dan pemerhati pendidikan untuk mencermati pelaksanaan PPDB yang akan dilaksanakan dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mendiskusikan permasalahan yang pada tahun ajaran sebelumnya muncul dan mencari jalan keluar, dalam hal Pungutan pendidikan di sekolah secara optimal LO DIY akan memberikan arahan untuk meniadakan kebijakan tersebut dan mendorong optimalisasi Komite Sekolah dalam hal pembiayaan pendidikan, untuk sekolah dengan label sekolah internasional LO DIY berusaha mencermati aspek perijinan dan tata kelola dari sekolah tersebut selanjutkan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat guna memberikan pembinaan dan pendalaman terhadap aspek tata kelola sekolah Internasional yang dimaksud. Ada indikasi keterlibatan warga Negara Asing (WNA) dalam pengelolaan sekolah internasional tersebut.

6) Kesejahteraan.

Permasalahan: pada masa pandemi keberadaan Bantuan Sosial (Bansos) menjadi salah satu dukungan bagi penguatan ekonomi masyarakat namun masih perlu dicermati untuk kriteria penerima Bansos, kemampuan verikasi perlu ditingkatkan terlebih pada situasi pandemi.

Solusi: melihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di Dinsos DIY dan meminta pada masyarakat yang tidak masuk pada DTKS tersebut untuk membuat pakta integritas bahwa yang bersangkutan masuk kriteria dengan melalui mekanisme yang berlaku.

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

a. Narasi Umum

Sebagai organisasi dengan tujuan mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan di tingkat dunia, membangun watak, serta mengangkat harkat dan martabat dan karakter kehormatan bangsa, Komite Nasional Indonesia Daerah istimewa Yogyakarta atau KONI DIY berupaya untuk mendukung pengembangan *Sport Science*, *Sport Industry* dan *Sport Tourism (ilmu keolahragaan*, industri olahraga dan wisata olahraga) di DIY. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain pembinaan olahraga prestasi, pengembangan industri olahraga seperti industri perlengkapan olahraga, serta pengembangan keilmuan olahraga seperti pembuatan panduan pembinaan ketangguhan mental dan panduan pemakaian obat-obatan serta suplemen atlet.

Pada tahun 2020, agenda awal KONI DIY adalah melakukan persiapan intensif untuk pengiriman kontingen dalam PON XX di Papua. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan KONI DIY melakukan berbagai penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatannya. Dengan agenda utama persiapan PON XX yang kemudian diundur penyelenggaraannya di tahun 2021, KONI DIY tetap melakukan pembinaan olahraga dan pengkondisian prestasi atlet di masa pandemi, salah satunya melalui Puslatda PON. Sebagai bentuk dukungan terhadap prestasi olahraga di DIY, KONI DIY menerima hibah APBD tahun 2020 sebesar Rp8.997.000.000,00 yang telah disalurkan seluruhnya.



Gambar 7.3. Tiga Tim Peserta Trofeo Akhir Tahun Yang Digelar di Stadion Mandala Krida, Rabu 30 Desember 2020
Sumber: konidiy.or.id.

b. Permasalahan dan Solusi

KONI DIY masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan olahraga, antara lain:

1) Masih kurang optimalnya prestasi atlet DIY
2) Perlunya pembenahan dalam pendataan atlet, pelatih, serta sarana prasarana olahraga
3) Perekrutan calon atlet masih memerlukan upaya yang lebih optimal, terutama dari Pengda selaku penanggung jawab pembinaan atlet di tiap cabang olahraga

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, KONI DIY berupaya melakukan beberapa strategi seperti:

1) Mengintensifkan pelatihan atlet dan pembinaan pelatih. Penambahan durasi pelatihan, penyelenggaraan pelatihan ketangguhan mental *(mental toughness)* serta terus diupayakan pemberian penghargaan prestasi yang sepadan dengan kerja keras para atlet dan pelatih
2) Melakukan pemeliharaan aplikasi dan perekrutan tim ahli pendataan untuk memperkuat basis data atlet, pelatih, serta sarana prasarana yang dimiliki oleh KONI DIY
3) Berkoordinasi intensif dengan Pengda dan KONI Kabupaten/Kota untuk melakukan pembibitan serta pengembangan bakat calon atlet sedini mungkin. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang melibatkan kontingen di usia pelajar diharapkan dapat menjadi salah satu cara efektif untuk menjaring para calon atlet berbakat DIY

3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

a. Narasi Umum

Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DIY dalam visinya untuk menjadi pilihan utama dalam membentuk kaum muda berkarakter yang mandiri dan berbudaya telah menetapkan beberapa program prioritas yang meliputi pengembangan kearifan lokal dan kebudayaan, pembinaan anggota muda, pembinaan anggota dewasa, penguatan organisasi dan kelembagaan, serta pengabdian kepada masyarakat, penanggulangan bencana, dan lingkungan hidup. Program-program ini diharapkan dapat mendukung Gerakan Pramuka menjadi wahana pendidikan yang handal bagi generasi muda sehingga mereka nantinya akan menjadi generasi yang tangguh, mampu memajukan masyarakat, sekaligus tetap menjunjung nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.

Pada tahun 2020 Kwarda Gerakan Pramuka DIY merencanakan penyelenggaraan *Jogja International Scout Camp* (JISC) sebagai salah satu upaya pengenalan budaya dan pemberdayaan para anggota pramuka di masyarakat. Dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020, Kwarda Gerakan Pramuka DIY mengalami banyak penyesuaian dan penundaan kegiatan salah satunya adalah JISC. Dalam keterbatasan penyelenggaraan kegiatan di masa pandemi, Kwarda Gerakan Pramuka DIY terus berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan anggota, mengingat dampak sosial ekonomi yang sangat besar di masyarakat akibat pandemi. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Kwarda pada tahun 2020 yaitu penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan kepramukaan di masa pandemi, penyelenggaraan edukasi daring pemberdayaan ekonomi di masa pandemi, serta pelatihan pengembangan ekonomi kemasyarakatan melalui pelatihan budidaya hidroponik, budidaya perikanan, budidaya ayam buras, pembuatan pupuk kompos, dan pelatihan pembuatan aneka makanan dan minuman.



Gambar 7.4. Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka DIY Tahun 2020
Sumber: pramukadiy.or.id

Hibah fasilitasi kegiatan yang diberikan kepada Kwarda DIY pada tahun 2020 bersumber dari APBD dan Dana Keistimewaan. Hibah APBD sebesar Rp500.000.000,00 dan hibah dari Dana Keistimewaan sebesar Rp1.403.240.000,00 yang seluruhnya telah disalurkan. Hibah dari APBD lebih banyak difungsikan untuk operasional Kwarda sedangkan hibah dari Dana Keistimewaan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, Kwarda Gerakan Pramuka DIY masih menghadapi beberapa permasalahan seperti:

1) Kegiatan Pramuka masih dianggap sebagai kegiatan yang kurang menarik oleh generasi muda.
2) Kualitas dan kuantitas pembina masih kurang memadai
3) Minimnya sarana prasarana pendukung kegiatan

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di atas, Kwarda Gerakan Pramuka DIY telah mempersiapkan beberapa strategi seperti:

1) Mengembangkan inovasi agar kegiatan pramuka lebih bervariasi dan memiliki manfaat langsung kepada masyarakat. Upaya utama adalah penyempurnaan kurikulum pembelajaran Pramuka, diikuti dengan perumusan metode-metode praktis penerapan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan ketertarikan generasi muda untuk berpartisipasi aktif. Mengemas pembelajaran pramuka lewat berbagai permainan dan melakukan pelatihan langsung di masyarakat menjadi salah satu metode inovasi Kwarda DIY.
2) Mengintensifkan perekrutan kader pramuka sebagai pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Dalam perekrutan juga diupayakan berbagai pelatihan dan pembinaan agar para anggota dewasa ini mampu memahami prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, sistem among, serta menciptakan kreasi kegiatan untuk para anggota muda.
3) Meningkatkan kemandirian dalam pendanaan dengan penyelenggaraan usaha dana yang salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kelengkapan sarana prasarana sebagai aset Kwarda Gerakan Pramuka DIY.

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

a. Narasi Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak tujuh orang; KPU Provinsi sebanyak lima atau tujuh orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Kegiatan yang dilakukan oleh KPU DIY selama tahun 2020 antara lain,:

1) Audiensi ke Polda DIY;
2) Bimbingan Teknis Pengelolaan *Website*, Sistem Informasi dan Penggunaan Media Sosial di Lingkungan KPU;
3) Diskusi *Daring* "Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemilihan di Tengah Pandemi Covid-19) di *channel* Youtube KPU DIY;

4) Siaran Pers KPU DIY melanjutkan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Protokol Covid-19;
5) Sosialisasi Perubahan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
6) KPU DIY *Launching* COKLIT di Balai Desa Tridadi, Sleman;
7) Konfrensi Pers Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Bantul, Gunungkidul;
8) Sosialisasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Tahun 2020;
9) Bimbingan Teknis Pembuatan Informasi dan Optimalisasi Penggunaan Media Sosial Penyelenggara Pemilu;
10) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati (9 pasangan calon) (pendaftaran dari tanggal 4 – 6 September 2020);
11) Sosialisasi Penerapan Protokol Pencegahan Covid-19 Pada Penyelenggaraan Pemilu;
12) Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye;
13) Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
14) Rapat Koordinasi Pelaksaan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
15) Bimbingan Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Website dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
16) Webinar KPU *Goes To Campus* Universitas Negeri Yogyakarta;
17) Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Serentak di Wilayah DIY.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1) Pembentukan KPPS di beberapa TPS sepi peminat.
2) Adanya situasi erupsi merapi dan penetapan BPBD DIY siaga level 3 Erupsi Merapi, yang mengakibatkan adanya penduduk yang mengungsi
3) Sebagian anggota KPPS menolak untuk *rapid* test
4) Ada petugas KPPS terpapar Covid-19.

Solusi:

1) Perpanjangan masa pendaftaran dan kerjasama dengan pemerintah desa.
2) Pemindahan TPS ke Barak Pengungsian.
3) Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi anggota KPPS yang sebelumnya menolak rapid test.
4) Melakukan penanganan sesuai prosedur kesehatan.

5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY

a. Narasi Umum

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Bawaslu yaitu:

1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu; dan sengketa proses pemilu;
3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
    a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
    b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
    c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
    d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
    a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
    b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
    c) Penetapan Peserta Pemilu;
    d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    e) Pelaksanaan dan dana kampanye;
    f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
    h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
    i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; serta
k) Penetapan hasil Pemilu;

5) Mencegah terjadinya praktik politik uang;
6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
   a) Putusan DKPP;
   b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
   c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
   d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; serta
   e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
9) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
12) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Bawaslu adalah sebagai berikut.

1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8) Mengkoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; serta
11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu juga memiliki kewajiban yaitu:

1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1) Pelaksanaan Pilkada dilaksanakan di masa pandemi Covid-19;
2) Logistik Pemilu, berupa kertas surat suara yang rusak;
3) Beberapa pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pilkada berupa pelanggaran pemasangan APK, Netralitas ASN, Kampanye terbatas, debat publik;
4) Peningkatan partisipasi bagi pemilih yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas/Rutan;

5) Masih ada pemilih yang terdaftar di DPT belum rekam e-KTP, yang rata-rata pemilih pemula.

Solusi:

1) Penerapan protokol kesehatan (Rekruitmen KPPS, Kampanye, *Rapid Test* bagi Petugas penyelenggara serta dalam pemungutan suara);
2) Meminta pengganti kertas surat suara;
3) Melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran pidana, administrasi, dan kode etik;
4) Koordinasi dengan pihak lapas/rutan untuk mendirikan TPS maupun layanan TPS di sekitar Lapas/Rutan;
5) Kerjasama dengan Disdukcapil memastikan layanan perekam e-KTP agar berjalan dengan baik, juga Kerjasama dengan Dikpora/Balai Dikmen untuk mendorong pelajar yang belum rekam untuk segera melakukan perekaman.

6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)

a. Narasi Umum

Kedudukan KPAD DIY diatur dalam Pergub DIY No. 39 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan HIV/AIDS DIY, yaitu sebagai organisasi non struktural yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di DIY. KPAD DIY bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan DIY. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPAD DIY bertujuan untuk mendukung salah satu program Dinas Kesehatan DIY, yaitu guna mewujudkan pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat.

Berdasarkan Pergub DIY No. 39 Tahun 2012, KPAD DIY mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana strategis Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP);
2) Membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
3) Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
4) Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan KPAP;
5) Mengadakan kerjasama regional penanggulangan HIV dan AIDS;

6) Menghimpun dan menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan dengan HIV dan AIDS;
7) Memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
8) Mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat/kelompok peduli HIV dan AIDS;
9) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
10) Menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Gubernur dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

KPAD DIY pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan hibah melalui Dinas Kesehatan DIY sebesar Rp500.000.000,00 dengan maksud dan tujuan pembiayaan operasional KPAD selama 1 tahun. Realisasi fisik dan keuangan tercapai sebesar 98,8 %.

Upaya penanggulangan HIV/AIDS masih menghadapi tantangan antara lain perkembangan Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) dengan kasus lain yaitu difabel dan Orang dengan Gangguan Jiwa ODGJ, peningkatan kasus pada ibu rumah tangga, serta diskriminasi dan stigma negatif terhadap ODHA. Untuk itu perlu pengembangan dan integrasi isu HIV, HIV dengan Difabel, dan HIV dengan ODGJ; pendekatan inovatif pada pasangan yang berperilaku seksual tidak aman; serta optimalisasi penguatan melalui Warga Peduli HIV/AIDS.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1) Pandemi Covid-19 mempengaruhi kegiatan yang sudah direncanakan.
2) Semua kegiatan dan keuangan berjalan sesuai dengan rencana dengan melakukan efisiensi sehingga sisa anggaran dikembalikan lagi ke Negara.
3) Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota yang terintegrasi di Dinas Kesehatan membuat Koordinasi Lintas Sektor mengalami kendala, sehingga berdampak pada penyelesaiannya permasalahan di daerah yang juga mengalami keterlambatan.
4) Penguatan Program pada Orang dengan Disabilitas terutama di Sekolah Luar Biasa.

Solusi:

1) Dengan adanya Pandemi, Kegiatan yang belum terlaksana direview untuk dibuat Adendum Kegiatan.
2) Sekretariat KPA DIY langsung berkoordinasi dengan LSM Pendamping di lapangan, dengan melakukan koordinasi, mediasi, dan audiensi.

3) Melakukan advokasi ke pengambil Kebijakan pada tahun berikutnya (2021).
4) Kerja sama dengan International Labaour Organization (ILO) untuk Focus Group Disscusion (FGD) dan Pelatihan Guru SMA Luar Biasa di DIY yang direncanakan dilaksanakan pada Februari 2021.

7. Palang Merah Indonesia (PMI)

a. Narasi Umum

Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari PMI DIY dan 5 (lima) Kota/Kabupaten yakni PMI Kota Yogyakarta, PMI Kabupaten Sleman, PMI Kabupaten Bantul, PMI Kabupaten Kulon Progo dan PMI Kabupaten Gunungkidul.

PMI adalah organisasi berbasis sukarelawan dengan latar belakang dan keterampilan pelayanan. Jumlah relawan PMI DIY menurut data laporan semester PMI Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2020 sejumlah 9.607 orang Palang Merah Remaja (PMR) dan 883 orang relawan aktif yang terdiri dari Korps Sukarela (KSR) dan Tenaga Sukarela (TSR).

Untuk melaksanakan program-program kerja serta kegiatan operasionalnya PMI memperoleh sumber dana dari Pemerintah, sektor swasta, mitra Gerakan Palang Merah & Bulan Sabit Merah Internasional, masyarakat, unit usaha, dan usaha-usaha lain yang tidak mengikat. PMI DIY secara rutin telah memperoleh dana APBD DIY melalui Dinas Kesehatan DIY sebesar Rp500.000.000,00. Dana tersebut sangat membantu dan masih sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat khususnya bidang pelayanan kesehatan termasuk pelayanan darah, penanggulangan bencana dan pembinaan generasi muda (relawan). Realisasi fisik dan keuangan dana hibah kelembagaan untuk PMI DIY tahun 2020 sebesar Rp472.458.382,00. Di samping itu, PMI DIY juga berupaya mengembangkan unit-unit pelayanan teknis seperti Klinik Pratama PMI DIY dan Pusdiklat PMI DIY dalam rangka menjalankan fungsi sebagai organisasi kemanusiaan yang netral dan mandiri menuju PMI berkarakter, profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat.

Selama tahun 2020, kegiatan PMI DIY memfokuskan diri pada berbagai kegiatan tanggap bencana dan juga krisis kesehatan yakni pendemi Covid-19 dan Erupsi Gunung Merapi. PMI DIY berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat yang membutuhkan. Jumlah penerima manfaat langsung pelayanan PMI berdasarkan laporan semester PMI Kabupaten/Kota adalah

1) Pelayanan darurat, kecelakaan sungai Sempor Turi Sleman sejumlah 249 orang, Covid-19 sejumlah 673.551 orang dan respons siaga Merapi sejumlah 328 orang.
2) Program kesehatan berbasis masyarakat sejumlah 4.989 orang
3) Pelayanan sosial sejumlah 521 orang melalui satgas lebaran, 47.858 orang menerima pelayanan distribusi air serta 61 masjid dan 11 sekolah.
4) Pelayanan ambulans tercatat 516 respons meliputi 269 layanan *emergency* dan 247 ambulans Covid-19

Jenis program dan kegiatan yang dilakukan PMI tahun 2020 adalah:

1) Penguatan dan Pengembangan Organisasi

   Berupa kegiatan penunjang fungsi koordinasi PMI DIY dengan PMI Pusat dan PMI Kab/Kota baik berupa menghadiri kegiatan, Rapat Kerja Teknis, penunjang informasi dan komunikasi melalui POSKO PMI DIY, kemitraan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi PMI Se-DIY.

2) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM (Pengurus, Staf dan Relawan)

   Berupa kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kegiatan relawan, pendelegasian kegiatan kepalangmerahan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

3) Pengembangan Sarana dan Prasarana

   Berupa kegiatan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana penunjang operasional rutin markas PMI DIY.

4) Peningkatan ketersediaan darah

   Program yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau, dan berkualitas di seluruh DIY ini berupa kegiatan-kegiatan koordinasi pelayanan darah baik internal PMI maupun dengan pemangku kepentingan terkait pelayanan darah, monitoring pelayanan darah serta promosi donor darah sukarela.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Pandemi Covid-19 mempunyai dampak cukup besar dalam pelaksanaan program kerja tahun 2020. Instruksi pemerintah dalam upaya mengurangi risiko penularan Covid-19 seperti pembatasan aktivitas sosial cukup mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan seperti perjalanan dinas, rapat atau pertemuan, kegiatan yang melibatkan peserta banyak, dan lainnya. Ada

beberapa kegiatan yang ditunda atau bahkan tidak terlaksana, atau kegiatan dialihkan menjadi kegiatan daring.

Solusi

Menindaklanjuti berbagai kebijakan pemerintah dalam pengurangan risiko penularan COVID -19 yang berdampak pada program kerja maka pada 26 Maret 2020 PMI DIY mengajukan permohonan perubahan Naskah Perjanjian hibah Daerah tahun anggaran 2020. Ada beberapa strategi kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 di antaranya adalah penyesuaian kegiatan yang diarahkan ke penanganan Covid-19 ataupun tanggap darurat bencana Merapi tahun 2020. Begitu pula dengan metode kegiatan dari luring menjadi daring ataupun perpaduan luring dan daring. Beberapa biaya penanganan Covid-19 juga mendapatkan bantuan dari donasi masyarakat.

8. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY

a. Narasi Umum

Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui penguatan lembaga kemasyarakatan agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Koordinasi dan sinkronisasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan meliputi bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. TP-PKK DIY merupakan salah satu lembaga yang menjadi penggerak tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TP-PKK DIY selama Tahun Anggaran 2020 yang bersinergi dengan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY selaku OPD yang mengampu mencairkan Dana Hibah sebesar Rp960.000.000 berupa kegiatan: 1).Kesekretariatan; 2).ATK, Plakat, Cinderamata, Belanja Pengiriman, Cetak, Penggandaan serta makan dan minum rapat; 3).Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK); 4)Belanja bakti sosial peduli Covid-19; 5).Monev KWT; 6).Lomba Gentongisasi (Gerget); 7).Lomba Masker komponen; 8).Lomba Masker PKK Kabupaten; 9).Lomba Baju rumah dan masker; 10).Lomba Masak Menu B2SA; 11).Pengadaan Masker; 12).Monitoring dan evaluasi 10 program pokok PKK; 13).Monitoring dan evaluasi pengelola terbaik PKK Bangga Kencana Kesehatan; 14).Monitoring dan evaluasi PHBS dan LBS.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan lapangan di tunda/dihilangkan sehingga mempengaruhi pemanfaatan hibah.

Solusi:

Pengajuan adendum NPHD sebanyak dua kali agar dana hibah tetap dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan kegiatan kegiatan pemberdayaan melalui PKK.

9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

a. Narasi Umum

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY senantiasa menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya sebagai Lembaga Negara Independen yang meliputi pengaturan, pengawasan, dan pengembangan. Bersama dengan *stakeholder* penyiaran yang lain, KPID DIY terus berupaya mewujudkan sistem penyiaran sehat, berbudaya, serta memperkuat integritas dan karakter kebangsaan sejalan dengan amanat Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Salah satu upaya KPID DIY ialah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pembinaan lembaga penyiaran televisi dan radio terkait penyelenggaraan penyiaran.

Pada tahun 2020, KPID DIY telah melaksanakan (1) Talkshow di Radio dan Televisi; (2) Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Radio dan Televisi; (3) Pengiriman paket informasi berupa *leaflet* dan buku; (4) Pembinaan dan pertemuan berkala; (5) Pendampingan/layanan konsultasi; (6) Seleksi Anggota KPID DIY Periode 2020 – 2023; dan (7) Kunjungan lapangan ke kantor atau studio lembaga penyiaran.

Ditengah wabah Covid-19 yang menyerang dan berdampak pada seluruh aspek, KPID DIY ikut serta membantu dalam hal menyebarluaskan informasi dan sosialisasi program dan anjuran pemerintah dalam bentuk ILM agar ditayangkan di lembaga penyiaran; meneruskan surat edaran atau aturan lainnya terkait wabah ini; menjadi narasumber talkshow untuk memberikan informasi bagaimana media dan lembaga penyiaran harus bersikap dan medukung program pemerintah.

Tugas pokok pengawasan isi siaran televisi dan radio dilakukan rutin setiap hari melalui peralatan pemantauan yang tersedia di Kantor KPID DIY. Pemantauan yang dilakukan antara lain pemantauan rutin atau reguler dan pemantauan tematik. Pada tahun 2020 ini pamantauan tematik dilakukan dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak, pengawasan program siaran selama Ramadhan, serta pengawasan program pemerintah dalam bentuk ILM germas dan Covid-19. Selain kedua pemantauan tersebut, KPID DIY juga membantu KPI Pusat melakukan pemantauan Silonas. Pemantauan Silonas adalah pemantauan yang terdiri atas pemantauan siaran lokal dan nasional. Hasil dari pemantauan Silonas ini dikirimkan ke KPI Pusat secara periodik dan dikumpulkan dari seluruh Indonesia menjadi laporan Survey Indeks Siaran KPI.

Proses perpanjangan perizinan yang difasilitasi KPID DIY tahun 2020 meliputi pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Lembaga Penyiaran Swasta Radio sebanyak lima kali (tiga kali dilakukan langsung dan dua dilakukan secara daring). KPID DIY menerima sebanyak empat Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip (Tidak tetap) Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Digital. dan dua diantaranya sudah berproses Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS).

Fungsi lain KPID DIY, yaitu memfasilitasi pembentukan lembaga penyiaran komunitas sebagaimana diatur dalam Pergub DIY No. 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas. Dalam upayanya menjalankan fungsi ini, KPID DIY memfasilitasi proses perizinan radio komunitas, memberikan layanan konsultasi terkait kelembagaan dan isi siaran, melakukan pendampingan kepada Lembaga Penyiaran Komunitas yang mengajukan permohonan Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP). Selain itu juga, KPID DIY memfasilitasi *MoU time sharing*/perjanjian berbagi waktu siar yang dilakukan oleh radio komunitas dalam satu cluster yang sama (lokasi berdekatan).

Selain itu, KPID DIY menjalankan amanat Pergub DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Atas Penyelenggaraan Penyiaran. Pada tahun 2020, KPID DIY tidak mengeluarkan sanksi administrasi teguran terhadap Lembaga Penyiaran. Meskipun demikian, bukan berarti kualitas siaran sudah sangat baik, melainkan pada tahun 2020 ini KPID DIY memilih melakukan pendekatan personal kepada lembaga penyiaran yang terindikasi melakukan pelanggaran. Indikasi pelanggaran bisa didapat dari hasil pemantauan sendiri maupun aduan masyarakat yang disampaikan ke KPID DIY. Dari hasil tersebut tidak serta merta langsung menyalahkan lembaga penyiaran, namun Komisioner KPID DIY melakukan pendalaman lagi terdapat

siaran yang dicurigai tersebut disamping berkomunikasi dengan lembaga penyiaran yang menyiarkan.

Melalui berbagai kegiatan di atas, terutama pembinaan terhadap lembaga penyiaran televisi dan radio, maka siaran radio dan tayangan televisi menunjukkan peningkatan dari sisi kualitas isi siaran, dipatuhinya regulasi daerah yang berkaitan dengan program siaran lokal terutama kewajiban penggunaan Bahasa Jawa dan terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sisi pelanggaran isi siaran.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang masih dijumpai di lapangan di bidang penyiaran meliputi:

1) Masih kurangnya pemahaman lembaga penyiaran terhadap regulasi di bidang penyiaran serta kurang memahami alur proses perizinan secara daring;
2) Belum semua masyarakat menjadi penonton televisi dan pendengar radio yang cerdas atau melek media, sehingga informasi yang diterima belum sepenuhnya dipilih dan dipilah dengan baik;
3) Kurangnya partisipasi masyarakat yang tinggal dalam radius 2,5 km jangkauan siar Lembaga Penyiaran Komunitas untuk mengkritisi isi siarannya;
4) Dalam hal publikasi atau sosialisasi kebijakan pemerintah daerah, Lembaga Penyiaran belum semua secara aktif menyiarkan melalui saluran media yang mereka miliki, sehingga kebijakan pemerintah daerah belum terkomunikasikan dengan luas; serta adanya tantangan dalam masa transisi dari analog menjadi digital juga perlu disosialisasikan terhadap masyarakat luas, agar bersiap dan mengecek kesiapan peralatan yang dimiliki.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hal-hal yang sudah dilakukan antara lain:

1) Kegiatan bimbingan teknis, layanan konsultasi, pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi dan alur proses pengurusan perizinan penyiaran secara daring kepada Lembaga Penyiaran;
2) Kegiatan Literasi media kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu bentuk pendidikan melek media dengan melibatkan para pihak terkait sehingga terwujud masyarakat yang cerdas bermedia;
3) Kegiatan yang bersifat advokasi dan persuasi kepada masyarakat untuk membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam memantau dan

melakukan aduan isi siaran yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS);

4) Meningkatkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui Lembaga Penyiaran untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah daerah sehingga publikasi kebijakan pemerintah daerah dapat terkomunikasikan secara luas.

10. Komisi Informasi DIY

a. Narasi Umum

Komisi Informasi Daerah (KID) DIY adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Kondisi sosial, politik dan budaya dalam pencapaian keterbukaan informasi publik di wilayah DIY dapat dilihat dalam dua ranah, pertama di ranah masyarakat terkait dengan kondisi keterbukaan informasi masih harus dibedakan dimasing-masing wilayah karena untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dengan akses informasi yang baik, budaya keterbukaan yang sudah relatif baik serta kesadaran masyarakat akan haknya atas informasi, mereka dapat mendapatkan informasi banyak dari internet. Hal ini menjadikan tantangan bagi badan publik untuk memastikan informasi yang disediakan harus selalu diperbaharui mengikuti perkembangan dan mendorong masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang benar dan tepat.

Sementara untuk masyarakat di 4 kabupaten dengan kondisi banyak daerah pedesaan dan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat pada desa melakukan transparansi dalam pengelolaan desanya yang berarti menjadi badan publik yang harus memiliki PPID desa sesuai dengan PERKI No 1 tahun 2018 tentang SLIP Desa. Kendalanya belum semua kabupaten di DIY mempunyai regulasi/payung hukum untuk memastikan desa memiliki PPID desa, sementara di masyarakat perkotaan adanya dana kelurahan juga menuntut pengelolaan yang transparan, sehingga kelurahan juga didorong untuk memiiki PPID.

Ketugasan Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Selama tahun 2020 kegiatan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 3 pokok kelembagaan:

1) Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Sengketa yang diadukan ke KID DIY sebanyak 10 sengketa informasi. Seluruhnya dapat diselesaikan dalam 100 hari kerja sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kesepuluh sengketa informasi yang diadukan ke KID DIY selama Tahun 2020 adalah berikut:

a) Sengketa informasi pertanahan

Total terdapat 7 sengketa pertanahan yang diadukan, dari tujuh sengketa tersebut, 4 kasus sudah selesai, 2 kasus masih proses penyelesaian dan 1 kasus masih proses peninjauan. Tiga sengketa informasi pertanahan yang belum terselesaikan ini disebabkan karena proses terkendala kondisi pandemi Covid-19 sehingga ada diskresi waktu untuk sengketa yang belum terselesaikan.



Gambar 7.5. Gambar Sidang Ajudikasi Sengketa

b) Sengketa informasi anggaran

Terdapat 3 sengketa informasi tentang anggaran yang sudah diselesaikan melalui proses ajudikasi non litigasi.

2) Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE)

Bidang ASE melakukan Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik sebanyak 2 kali dalam rangka peningkatan kesadaran akan Hak atas Informasi Publik dan mendorong Badan Publik mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Di tahun ini kegiatan sosialisasi sebanyak 2 kali sedikit terhambat dan kurang maksimal yang dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 *s*ehingga menggantikan kegiatan Sosialisasi dengan media daring kepada beberapa Masyarakat. Awal tahun Komisi Informasi Daerah juga

mengadakan Sarasehan kepada LSM yang ada di DIY untuk mendapatkan masukan dan saran mengenai keterbukaan informasi di DIY.

3) Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi terhadap 363 Badan Publik se-DIY. Dari 363 Badan Publik tersebut yang mengembalikan kuisoner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi sebanyak 343 Badan Publik, atau 89,56% dari total Badan Publik. Kegiatan monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik di DIY didasarkan pada Pasal 23 UU 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik. Di Tahun ini ada 3 Penganugerahan yang diberikan kepada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penganugerahan Pemeringkatan dengan Kategori: Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, OPD Pemerintah Daerah DIY, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, OPD Kecamatan se-DIY, Lembaga Legislatif se-DIY, Partai Politik di DIY, Lembaga Yudikatif di DIY, Instansi Vertikal di DIY, Badan Usaha Milik Daerah se-DIY. Bidang Kelembagaan juga telah melaksanakan beberapa kegiatan di Tahun antara lain Pendampingan kepada PPID di DIY, Pelatihan Mediator, Publikasi di Radio, LSM, Surat Kabar, TV, Radio, MoU atau kerjasama dengan stakeholders dan jaringan Komisi Informasi di antaranya dengan KPU DIY, Bawaslu DIY, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, Ombusman Daerah DIY, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat, Instansi Vertikal yang ada DIY, Penyusunan Raperda KIP.

b. Permasalahan dan Solusi

Kendala atau Permasalahan dalam implementasi keterbukaan informasi:

1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan Komisi Informasi Daerah DIY;
2) Kondisi Geografis di DIY yang sebagian masyarakat masih belum melek teknologi dan Internet, di beberapa Daerah masih belum maksimal sehingga akses informasi dari Badan Publik belum tersampaikan maksimal kepada masyarakat;
3) Kesadaran masyarakat atas hak untuk mendapatkan informasi;
4) Badan Publik yang belum membentuk PPID dan mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi;

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hal-hal yang sudah dilakukan antara lain:

1) Membangun kesadaran masyarakat serta mendorong badan publik terhadap keterbukaan informasi;
2) Penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas badan Publik melalui konsultasi dan kunjungan kerja menuju Web site Informatif;
3) Melakukan sosialisasi UU KIP serta mendorong Kelembagaan Badan Publik di desa dan kelurahan kepada pemangku kepentingan, badan publik, dan kelompok masyarakat;
4) Membangun kerja sama kemitraan dengan seluruh jaringan masyarakat (akademisi, organisasi masyarakat, media, kelompok kepentingan) dan pemerintah serta Menyediakan sarana dan prasarana lembaga yang representatif sesuai kewenangannya.

11. Trans Jogja

a. Narasi Umum

Trans Jogja" merupakan *brand name* Angkutan Perkotaan Yogyakarta yang diberikan oleh Gubernur DIY pada saat dimulai operasionalnya pada Februari 2008, setelah melalui proses panjang sejak pertama dilakukan studi pada tahun 2004. Sebelum Pemerintah Pusat melakukan implementasi subsidi terhadap angkutan umum, DIY telah melaksanakan konsep ini terhadap Angkutan Perkotaan yang saat itu mengalami keterpurukan akibat menurunnya kinerja, sehingga juga berpengaruh terhadap jumlah penumpang. Implementasi subsidi ini disebut dengan *Buy the Service* atau sistem pembelian pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY kepada operator angkutan perkotaan untuk melayani masyarakat dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Langkah ini merupakan bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah DIY dalam penyediaan angkutan umum berbasis bus dalam melayani pergerakan masyarakat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang aman, selamat, tertib, lancar, mudah, nyaman, terjangkau dan berkualitas serta terpadu dengan moda transportasi lain.

Hingga saat ini pengelolaan Bus Trans Jogja telah diserahkan kepada PT Anindya Mitra Internasional (AMI) dengan mekanisme penugasan serta menggunakan sistem *nett subsidy* yang didasarkan pada Peraturan Gubernur DIY No. 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Service* kepada PT Anindya Mitra Internasional.

Selain itu dalam perkembangannya, pada tahun 2020 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menggulirkan kegiatan untuk mensubsidi Angkutan Perkotaan di daerah-daerah, dan untuk di DIY tertuang dalam bentuk kerja sama yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemda DIY Nomor: HK.201/8/11/DRJD/2019 dan 119/16472 tentang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian terimplementasi dalam bentuk pengembangan rute dari semula 17 jalur menjadi 20 jalur, serta penambahan armada dari yang semula 128 armada menjadi 172 armada. Hal ini menghasilkan terpenuhinya seluruh target wilayah pelayanan pada 25 kecamatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, dengan tambahan 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngaglik, Ngemplak dan Godean.

Seluruh armada pada 3 (tiga) trayek pengembangan ini tergolong sangat modern karena menggunakan teknologi tinggi berbasis teknologi infomasi dan telematika, seperti blackbox yang merekam perjalanan bus, Global *Positioning System* atau GPS, beberapa kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) di dalam kabin, alat pengontrol pramudi, alat penghitung penumpang secara otomatis, sistem tiket non tunai, serta alarm yang dapat mendeteksi kecepatan tinggi, yang kesemuanya terintegrasi dalam sebuah sistem teknologi informasi, sehingga memiliki tingkat pengawasan yang sangat akurat dalam hal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ini juga sejalan dengan skema pengembangan transportasi di DIY yang terus mengembangkan *Intelligent Transport System* (ITS) atau sistem transportasi yang cerdas. Dalam aspek pelayanan kepada masyarakat juga telah dibuat aplikasi yang bernama "Teman Bus" yang merupakan akronim dari Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman. Aplikasi ini berisi rute, titik-titik halte, hingga jadwal bus yang bersifat real time, sehingga memudahkan masyarakat dalam memantau kedatangan dan keberangkatan bus secara *mobile* dan tepat waktu.

Berdasarkan Pergub DIY No. 120 Tahun 2018, beberapa ketugasan dari Dinas Perhubungan adalah: 1) perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja; 2) menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3) mengawasi pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja agar tersedia layanan yang memenuhi SPM dengan tata kelola yang baik *(goodgovernance)*; 4) menetapkan kebijakan terkait penyediaan dan pemeliharaan Prasarana Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja; dan 5) memberikan usulan kepada Gubernur dalam menetapkan tarif layanan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.

Berkaitan dengan ketugasan Dinas Perhubungan dalam pengawasan operasional Bus Trans Jogja pada tahun 2020, maka dapat dijelaskan beberapa hal berikut.

Evaluasi Laporan Pengawasan Melalui CCTV

Salah satu mekanisme pengawasan operasional Bus Trans Jogja dilakukan dengan menggunakan piranti CCTV yang terpasang di seluruh armada Bus Trans Jogja dan terpantau secara langsung di *Control Room* Dinas Perhubungan DIY. Hasil laporan pengawasan melalui CCTV ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1) Masih terdapat beberapa pelanggaran pramudi berupa:
   a) Perilaku kecepatan tinggi oleh pramudi Bus Trans Jogja yang membuat jarak waktu antar bus menjadi relatif pendek. Dari beberapa pelanggaran kecepatan tinggi didapatkan alasan bahwa meningkatnya kemacetan lalu lintas membuat armada sering terlambat sehingga para pramudi berperilaku menaikkan kecepatan pada ruas jalan yang lengang.
   b) Perilaku mengemudi sambil memainkan telepon genggam, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan melanggar marka jalan serta lampu lalu lintas.

   Pada tahun 2020 terdapat total 70 kejadian insiden berupa kecelakaan lalu lintas (baik menabrak atau tertabrak, baik yang melibatkan pihak lain atau laka tunggal).
2) Tindaklanjut dari hasil pengawasan tersebut di atas adalah melaporkan kepada pihak pengelola atas pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kedisiplinan, etika, dan lain-lain serta meneruskan kepada pihak berwajib atas pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

Evaluasi Kinerja dan Pelayanan

Kegiatan ini merupakan implementasi bentuk evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan menggunakan teknik sampling, dengan hasil sebagai berikut.

1) ***Karakteristik Penumpang Bus Trans Jogja Tahun 2020.***
   a) Berdasarkan profesi penumpang, pengguna Bus Trans Jogja terbesar adalah wiraswasta (25%), disusul mahasiswa (22%) dan swasta (22%), lainnya/ibu rumah tangga/pensiunan (21%), pelajar (6%), dan PNS/TNI/POLRI (4%). Dari hasil tersebut diketahui perjalanan bersekolah memiliki persentase kecil. Hal ini disebabkan karena pada saat survei terjadi pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pola perjalanan penumpang angkutan umum, yang sebelumnya didominasi oleh pelajar dan mahasiswa.

b) Berdasarkan tingkat pendidikan, penumpang Bus Trans Jogja terbanyak adalah lulusan SLTA (53%), disusul S1 (20%), SLTP (12%), Diploma (7%), SD (6 %), dan S2 (2%).
c) Berdasarkan penghasilan, sebagian besar pengguna Bus Trans Jogja (67%) berpenghasilan bulanan di bawah dua juta rupiah per bulan.
d) Berdasarkan frekuensi penggunaan, sebanyak 41% pengguna Bus Trans Jogja merupakan pengguna harian.
e) Sebagian besar pengguna Bus Trans Jogja menyatakan bahwa tarif Bus Trans Jogja termasuk murah, pelayanan yang cukup bagus, dan kondisi armada yang cukup baik.
f) Berdasakan survei kuesioner, beberapa keluhan pengguna Bus Trans Jogja sebagian besar berhubungan dengan waktu tunggu yang terlalu lama pada jalur-jalur tertentu serta aspek ketepatan waktu yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena pola penggunaan ruang jalan Bus Trans Jogja yang masih *mix traffic* (bercampur dengan lalu lintas yang lain).

2) ***Kinerja Teknis Bus Trans Jogja.***

Kinerja teknis ini diukur dari survei sampling yang dilakukan pada bulan Oktober 2020 (di saat pandemi Covid-19 masih berlangsung di DIY), dengan hasil sebagai berikut.

a) Dari aspek waktu antar bus *(headway),* rata-rata untuk seluruh jalur Bus Trans Jogja memiliki nilai *headway* yang cukup tinggi, yaitu 36 menit. Nilai *headway* terpendek adalah pada Jalur 1A sebesar 15 menit, sedangkan *headway* tertinggi ada pada Jalur 5B yaitu sebesar 60 menit. Tingginya nilai *headway* ini juga tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya pengurangan jumlah armada dari 128 menjadi 95 armada mulai April hingga Desember 2020.
b) Dari aspek kecepatan, seluruh jalur Bus Trans Jogja memiliki kecepatan rata-rata sebesar 24 km/jam, dengan kecepatan rata-rata tertinggi pada Jalur 1A sebesar 30 km/jam, dan terendah pada Jalur 3B sebesar 19 km/jam.
c) Dari aspek *load factor (LF)* atau tingkat keterisian penumpang, LF tertinggi terjadi pada Jalur 1A sebesar 39 persen, sedangkan LF terendah pada Jalur 6B sebesar 11 persen. Untuk LF rerata seluruh jalur ada pada angka 18 persen.
d) Berdasarkan jumlah *trip* dan penumpang yang naik/turun pada 8 Pos yang terdiri dari Pos Jombor, Amplas, Giwangan, Taman Pintar, Samsat, Bandara, Pool AMI dan Pool JTT, maka dapat dilihat jumlah penumpang harian rata-rata pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.9. JumlahTrip dan Penumpang Harian Rata-rata pada Tahun 2020

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah Trip (Perjalanan)	13779	13317	9841	2859	2433	3518	12558	4407	4186	4640	5263	5177
Jumlah Penumpang (Orang)	6890	6659	4921	1429	1217	1759	6279	2203	2093	2320	2631	2588

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa tren penumpang harian rata-rata Bus Trans Jogja berfluktuasi, khususnya pada bulan Maret – April, serta bulan Juli. Pada bulan Maret dan April terjadi pandemi COVID -19 yang melanda Indonesia, termasuk DIY, sehingga membuat jumlah penumpang Bus Trans Jogja mengalami penurunanan yang sangat signifikan.

Lonjakan penumpang terjadi kembali pada bulan Juli 2020, di mana pada bulan ini merupakan bulan setelah Hari Raya Idul Fitri dan terdapat liburan. Pada bulan ini YIA juga sempat dibuka secara penuh. Sehingga meskipun Covid-19 belum berakhir, terjadi aktivitas masyarakat yang cukup masif di Kawasan Perkotaan Yogyakarta di bulan Juli.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1) Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku perjalanan masyarakat, sehingga juga memengaruhi operasionalisasi Bus Trans Jogja. Jumlah penumpang Bus Trans Jogja menurun drastis pada kisaran LF 18 persen, sehingga terjadi pengurangan armada Bus Trans Jogja dari 128 unit, menjadi 95 armada, serta pengurangan jam operasi dari semula 05.30 – 21.30 WIB, menjadi 06.00 – 19.00 WIB.
2) Adanya pengembangan trayek Bus Trans Jogja dengan bantuan subsidi dari Pemerintah Pusat secara pelayanan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Namun yang masih menjadi catatan adalah secara sistem masih terpisah dengan sistem Trans Jogja, baik dari aspek aplikasi, teknologi informasi maupun mekanisme pengawasan operasionalnya.

Solusi:

1) Diharapkan kondisi Pandemi Covid-19 berakhir dan kembali berangsur normal, pola pergerakan masyarakat juga menjadi normal, sehingga pola operasional Bus Trans Jogja kembali pada posisi normal.
2) Perlu adanya implementasi konsep *Push and Pull Strategy* (strategi mendorong pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum dan membuat angkutan umum semakin menarik minat masyarakat). Keberadaan dan

peningkatan pelayanan Angkutan Perkotaan Trans Jogja hanya merupakan setengah dari *Push and Pull Strategy* karena hanya bersifat 'menarik", sehingga dibutuhkan implementasi *push strategy* dengan cara pembatasan-pembatasan akses kendaraan pribadi agar pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke angkutan umum yang lebih efisien dari aspek penggunaan ruang jalan.

Strategi *Push* juga telah ditekankan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan yang memberikan dukungan subsidi operasional Buy the Service, dengan catatan-catatan penting bahwa Pemerintah Daerah juga harus membuat strategi-strategi untuk mendorong masyarakat meninggalkan atau membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

Beberapa strategi *Push* yang sedang dijalankan di DIY antara lain adalah:

a) Pedestrianisasi Kawasan Malioboro, dengan memberikan *privilege,* atau hak khusus terhadap angkutan umum khususnya Bus Trans Jogja, serta kendaraan tidak bermotor.
b) Koordinasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pembatasan kawasan parkir serta kenaikan tarif parkir di pusat kota. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya 2 (dua) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, yaitu:
    (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang menaikkan tarif parkir pada Kawasan I atau Kawasan Premium, serta dengan tambahan perlakuan tarif parkir progresif.
    (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang juga menaikkan tarif parkir pada Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
c) Pengelolaan bangunan-bangunan khusus parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan DIY melalui Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran.

3) Koordinasi kebijakan dan teknis dengan Kementerian Perhubungan perihal adanya *gap* antara sistem IT *(information technology)* yang dibangun pada Bus Trans Jogja eksisting dengan pengembangan.
4) Adanya upaya yang berkesinambungan dalam hal penyesuaian peningkatan layanan melalui penambahan fasilitas-fasilitas pada Bus Trans Jogja eksisting.

Bab 8

Penutup

2020

PENUTUP

Penyusunan dokumen LKPJ merupakan upaya Pemerintah Daerah DIY dalam meningkatkan kualitas evaluasi atas capaian pembangunan daerah. Dokumen LKPJ Kepala Daerah DIY Tahun 2020 menjadi refleksi, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun yang dapat diukur melalui kontribusi sejumlah program dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan arah kebijakan dan atau urusan yang telah ditetapkan. Kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas harus memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah sebagai bukti keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Pandemi Covid-19 yang menerpa DIY sejak Triwulan I Tahun 2020 berdampak pada perubahan tema pembangunan, dari semula "*Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas*" menjadi *"Penanganan Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan serta Upaya Penguatan Ekonomi Guna Meminimalisir Dampak Pandemi Covid-19."* Perubahan tema pembangunan tersebut menguji efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah DIY sebagai satu kesatuan sinergi dan keterpaduan pembangunan daerah yang termanifestasikan melalui kinerja pemerintah daerah pada masing-masing urusan. Sejumlah kendala maupun problematika yang muncul dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan selama tahun 2020 harus menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun selanjutnya.

Hingga akhir 2020, capaian 14 indikator kinerja dari 8 sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD 2017-2022 adalah sebagai berikut, enam indikator sasaran yang tercapai (capaian $\geq$100%) yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi, Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan, Opini BPK, Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP), dan Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan. Indikator sasaran yang tidak tercapai sejumlah delapan indikator, meliputi: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Persentase angka kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, IKLH, Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Indeks Williamson, dan Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan.

Belum tercapainya target kedelapan indikator tersebut dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19 yang masif terhadap kehidupan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi perekonomian sehingga angka pertumbuhan ekonomi terkontraksi atau tumbuh minus sejak Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Angka pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi menggambarkan aspek pengeluaran per kapita yang menyebabkan IPM tidak tercapai. Begitu pula naiknya angka kemiskinan dan indeks gini yang terdampak oleh perlambatan perekonomian pada masa pandemi. Pembatasan kegiatan dan ketaatan pada protokol kesehatan serta redesain dukungan anggaran maupun kegiatan sesuai hierarki *cascading* berakibat pada capaian *IKLH* berkenaan dengan pengujian dan capaian *Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan* berkenaan dengan jumlah bidang tanah yang diukur dan didaftarkan pada pelayanan Kantor Pertanahan yang terbatas selama pandemi. Sedangkan capaian indikator *Kesesuaian Pemanfaatan Ruang* tidak terkait langsung dengan pandemi sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut karena pemanfaatan ruang terkait dengan peran berbagai sektor dan lintas kewilayahan. Perlu diingatkan kembali, bahwa capaian sasaran yang ada memerlukan dukungan lintas sektor, lintas kewenangan, lintas kewilayahan, dan lintas pendanaan untuk didorong melalui strategi yang tepat, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, dapat disampaikan bahwa penyampaian LKPJ Tahun 2020 ini menjadi laporan pelaksanaan tahun ketiga dalam rentang waktu periode RPJMD DIY 2017-2022. Capaian tahun ketiga ini menjadi evaluasi penting terhadap pelaksanaan tahun-tahun selanjutnya agar pencapaian sasaran daerah menjadi lebih optimal, terlebih mendekati akhir periode RPJMD DIY 2017-2022 dan RPJPD 2005-2025. Selanjutnya, kinerja pembangunan daerah yang sudah dijalankan diharapkan dapat menjadi sebuah prestasi sekaligus catatan kritis untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terus dituntut untuk senantiasa lebih baik, bermanfaat, inovatif, dan memiliki tingkat keberlanjutan serta harus berkualitas.

jogja
istimewa

Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Bappeda DIY

ꦥꦼꦩꦼꦫꦶꦠꦃꦢꦲꦫꦃ ꦢꦲꦫꦃꦄꦶꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦃ ꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Telp. 0274 - 562811
(Psw. 1209 - 1220, 1243 - 1246, 1253), 511185 Fax. 0274 - 586712
http://bappeda.jogjaprov.go.id
Yogyakarta 55213

@2021